

**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PUSAT
TAHUN 2012
(*Audited*)**

KATA PENGANTAR	iii
INDEKS ISI	iv
INDEKS TABEL	vi
INDEKS GRAFIK	vii
INDEKS DAFTAR	ix
INDEKS SINGKATAN	x
INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	xiii
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT	xvii
RINGKASAN	1
I. LAPORAN REALISASI APBN	5
II. NERACA	9
III. LAPORAN ARUS KAS	13
IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	16
A. PENJELASAN UMUM	17
A.1. DASAR HUKUM	17
A.2. KEBIJAKAN FISKAL/KEUANGAN DAN EKONOMI MAKRO	17
A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	54
A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI	58
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI APBN	74
B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI APBN	74
B.2. PENJELASAN PER FOS LAPORAN REALISASI APBN	75
B.3. CATATAN PENTING LAINNYA	101
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	105
C.1. POSISI KEUANGAN SECARA UMUM	105
C.2. PENJELASAN PER FOS NERACA	106
C.3. CATATAN PENTING LAINNYA	177
C.4. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL PELAPORAN	212
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS	204
D.1. IKHTISAR LAPORAN ARUS KAS	204
D.2. PENJELASAN PER FOS LAPORAN ARUS KAS	217
DAFTAR	227

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 *(unaudited)*

INDENS TABEL

1. Asumsi Dasar APBNP TA 2012	19
2. Realisasi Anggaran TA 2012 dan Perubahan APBN 2012	20
3. Perkembangan CAR, LDR, dan NPL Bulanan Tahun 2012	30
4. Rasio Utang Terhadap FDB Indonesia dan Berbagai Negara	31
5. Perkembangan Pendapatan Negara dan Hibah tahun 2008 – 2012	32
6. Perkembangan Tax Ratio Indonesia Tahun 2009-2012	33
7. Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak dengan APBN dan APBN-P Tahun 2008 - 2012	36
8. Pagu dan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi Tahun 2012	42
9. Perkembangan Komposisi Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Belanja	43
10. Perkembangan Belanja Negara tahun 2008-2012	48
11. Presentase Anggaran Dan Realisasi APBN Terhadap PDB Tahun 2012	52
12. Perbandingan Indikator Ekonomi Tahun 2008-2012	53
13. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi TA 2012 dan TA 2011	82
14. Piutang Pajak per Jenis Pajak pada Ditjen Pajak	103
15. Piutang Pajak per Jenis Pajak pada Ditjen Bea dan Cukai	114
16. Posisi Utang Luar Negeri, SBN, dan <i>Promissory Notes</i>	170
17. Posisi Utang Luar Negeri Menurut Valuta Asing	171
18. Saldo Anggaran Lebih TA 2012 dan TA 2011	171
19. Laporan Rekening Nomor 600.000.411980 Tahun 2012 dan 2011	178
20. <i>Sharing</i> Pembayaran Manfaat Pensiun	199
21. Jenis dan Outstanding SPN tahun 2012	532
22. Realisasi Penerbitan SUN Valas s.d. 31 Desember 2012	533
23. Realisasi pelaksanaan <i>Debtswitching</i> tahun 2012	533
24. Hincian realisasi pelaksanaan <i>Debtswitching</i> tahun 2012	534
25. Transaksi <i>Buyback</i> tahun 2012	535
26. Rekap tulasi Hesi Lelang SBSN tahun 2012	537
27. <i>Outstanding</i> SEN seri <i>Fixed Rate</i> (FR) per 31 Desember 2012	539
28. Jatuh Tempo SBN seri <i>Fixed Rate</i> (FR) per 31 Desember 2012	540
29. Kupon SBN Seri <i>Fixed Rate</i> (FR) per 31 Desember 2012	541
30. Nilai dan Jatuh Tempo ORI per 31 Desember 2012	542
31. Nilai <i>Outstanding</i> dan Jatuh Tempo <i>Zero Coupon</i> (ZC) per 31 Desember 2012	544
32. Nilai dan Jatuh Tempo SBN seri <i>Variable Rate</i> (VR) per 31 Desember 2012	545
33. Nilai dan <i>Outstanding</i> Surat Utang Pemerintah per 31 Desember 2012	547
34. Nilai <i>Outstanding</i> dan Jatuh Tempo SBSN Rupiah per 31 Desember 2012	549
35. Nilai dan Jatuh Tempo SR per 31 Desember 2012	551
36. <i>Outstanding</i> dan Jatuh Tempo SBN Valas per 31 Desember 2012	553
37. Mutasi <i>Principle Outstanding</i> SBN Tahun 2012	556

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 *layarsted*

INDEKS GRAFIK

1. Tren PDR Harga Beraku Tahun 2008-2012	23
2. Pertumbuhan Ekonomi Selama Tahun 2008 – 2012	23
3. Struktur PDB Menurut Komponen Pengukuran tahun 2012	24
4. Struktur PDB Menurut Lapangan Usaha tahun 2012	25
5. Perkembangan PDB Per Kapita tahun 2008-2012	25
6. Tren Laju Inflasi Bulanan (m-t-m) selama Tahun 2011 - 2012	26
7. Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) Triwulanan 2010-2012	27
8. Perkembangan Ekspor tahun 2012	28
9. Perkembangan Impor tahun 2012	28
10. Cadangan Devisa Triwulanan 2010-2012	29
11. Tren Laju IHSG Bulanan Tahun 2012	30
12. Perbandingan <i>Tax Ratio</i> Indonesia tahun 2009-2012	33
13. Target Dan Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun 2008-2012	34
14. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak yang Dikelola Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2008-2012	35
15. Realisasi PNBPN Lainnya tahun 2008-2011	38
16. Target Dan Realisasi Penerimaan PNBPN Tahun 2008-2012	39
17. K/L Penerima Alokasi Anggaran Belanja Terbesar Tahun Anggaran 2012	41
18. Pagu dan Realisasi Belanja Tahun 2012 Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi	42
19. Tren Belanja Negara Bulanan TA 2011 dan TA 2012	44
20. Tren Belanja Pegawai Bulanan TA 2012	44
21. Tren Belanja Darang Bulanan TA 2012	45
22. Tren Belanja Modal Bulanan TA 2012	45
23. Tren Belanja Subsidi Bulanan TA 2012	46
24. Tren Belanja Bantuan Sosial Bulanan TA 2012	46
25. Tren Belanja Pembayaran Bunga Utang Bulanan TA 2012	47
26. Tren Belanja Lain-lain Bulanan TA 2012	47
27. Tren Serapan Dana Perimbangan Bulanan TA 2012	49
28. Tren Serapan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian Bulanan TA 2012	49
29. Perkembangan Fasio Realisasi Disisit Anggaran terhadap PDB tahun 2008-2012	51
30. Perkembangan Surplus/Defisit, Penerimaan serta SIKPA/SILPA Tahun 2006-2012	51
31. Perkembangan Realisasi Penerimaan Perpajakan dan PNBPN TA 2008 - 2012	74

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 *lanjutan*

32. Perkembangan Realisasi Belanja Negara TA 2008 - 2012	75
33. Komposisi Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2012	76
34. Komposisi Lini Tertinggi Kementerian Negara/Lembaga Pengguna Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2012	81
35. Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi TA 2012	82
36. Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja TA 2012	83
37. Komposisi Realisasi Transfer ke Daerah TA 2012	90
38. Komposisi Pendapatan BLU TA 2012	104
39. Pendapatan, Beban, dan Surplus/Defisit BLU TA 2012	104
40. Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana Neto pada Neraca Tahun 2008 – Tahun 2012	105
41. Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Badan Layanan Umum 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011	187
42. Komposisi Arus Kas Bersih per Aktivitas	205
43. Struktur <i>Outstanding</i> ON Rupiah seri FR per 31 Desember 2012	539
44. Struktur Jatuh Tempo ON Rupiah Seri FR per 31 Desember 2012	541
45. Tingkat kupon Seri FR per 31 Desember 2012	542
46. Struktur <i>Outstanding</i> ORI per 31 Desember 2012	543
47. Struktur Jatuh Tempo ORI per 31 Desember 2012	543
48. Struktur <i>Outstanding Zero Coupon</i> (ZC) per 31 Desember 2012	544
49. Struktur Jatuh Tempo <i>Zero Coupon</i> (ZC) per 31 Desember 2012	544
50. Struktur <i>Outstanding</i> VR per 31 Desember 2012	545
51. Struktur Jatuh Tempo VR per 31 Desember 2012	546
52. Struktur <i>Outstanding</i> SPN per 31 Desember 2012	546
53. Struktur <i>Outstanding</i> SUP per 31 Desember 2012	547
54. Struktur Jatuh Tempo SUP Per 31 Desember 2012	548
55. Struktur <i>Outstanding; Fixed Rate</i> SBSN per 31 Desember 2012	549
56. Tingkat Imbalan SBSN per 31 Desember 2012	550
57. Struktur Jatuh Tempo SBSN per 31 Desember 2012	550
58. Struktur <i>Outstanding</i> SR per 31 Desember 2012	551
59. Struktur Jatuh Tempo ORI per 31 Desember 2012	552
60. Struktur <i>Outstanding; SBN</i> Valas per 31 Desember 2012	553
61. Struktur Jatuh Tempo SBN Valas per 31 Desember 2012	554
62. Tingkat Kupon/Imbalan SDN Valas per 31 Desember 2012	554
63. Struktur <i>Outstanding</i> SUN dan SBSN Rupiah per 31 Desember 2012	555

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 *Revised*

INDEKS DAFTAR

1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Pusat TA 2012	228
2. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2012	245
3. Laporan Realisasi Dana Perimbangan TA 2012	268
4. Jasa Siaran dan Non Siaran LPP RRI dan LPP TVRI	331
5. Daftar Rekening Khusus per 31 Desember 2012	334
6. Saldo Rekening Pemerintah Lainnya di BI per 31 Desember 2012	335
7. Monitoring Hasil Kegiatan Usaha Hulu Migas Tahun 2012	336
8. Rekening Pemerintah Lainnya di Bank Umum Tahun 2012	349
9. Daftar Saldo Kas di KPPN per 31 Desember 2012	350
10. Kas pada K/L per 31 Desember 2012	356
11. Uang Muka Belanja dan Belanja Dibayar di Muka pada Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2012	360
12. Piutang Pajak TA 2012	361
13. Piutang PNB per 31 Desember 2012	366
14. Piutang yang Berasal dari Kewajiban Bank Dalam Likuidasi	368
15. Piutang Aset Eks BPPN	369
16. Bagian Lancar Tagihan TGR pada Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2012	374
17. Persediaan pada Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2012	375
18. Penyertaan Modal Negara Pada BUMN	378
19. BPYBDS Pada BUMN per 31 Desember 2012	388
20. Penyertaan Modal Negara Pada Perusahaan Negara/Lembaga Dibawah Pembinaan Kementerian Keuangan	389
21. Penyertaan Modal Negara Pada Non BUMN	391
22. Penyertaan Modal Negara pada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional/Regional	392
23. Ikhtisar Laporan Keuangan Bank Indonesia	393
24. Ikhtisar Laporan Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan	395
25. Aset Tetap pada Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2012	397
26. Tagihan TP/TGR pada Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2012	400
27. Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain pada Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2012	401
28. Aset KIKS per 31 Desember 2012	403
29. Aset Eks BPPN per 31 Desember 2012	417
30. Utang Kepada Pihak Ketiga dan Pencaharian Diterima di Muka pada Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2012	422
31. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang – Surat Berharga Negara per 31 Desember 2012	428
32. Surat Berharga Negara Jangka Panjang per 31 Desember 2012	432
33. Ikhtisar Laporan Hasil Penertiban Barang Milik Negara pada K/L per 31 Desember 2012	436
34. Ikhtisar Laporan Keuangan BLU per 31 Desember 2012	438
35. Penyusutan Aset Tetap Pada Satuan Kerja BLU per 31 Desember 2012	480
36. Ikhtisar Laporan Keuangan Lembaga Non Struktural dan Yayasan	483
37. Rekapitulasi Hasil Penilaian Aset Bekas Milik Asing/Cina s.d. 31 Desember 2012	489
38. Ikhtisar Laporan Keuangan SKK MIGAS	478
39. tindak Lanjut Pemerintah terhadap Permuan Pemeriksaan BPK atas UKHP Tahun 2011	480
40. Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Surat Berharga Negara Tahun Anggaran 2012	529

Indeks Daftar - ix -

INDEKS SINGKATAN

APRN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan
BAPPENAS	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BBM	: Bahan Bakar Minyak
BDL	: Bank Dalam Likuidasi
BEJ	: Bursa Efek Jakarta
BHMN	: Badan Hukum Milik Negara
BI	: Bank Indonesia
BKKBN	: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
BLBI	: Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
BLU	: Badan Layanan Umum
BPMIGAS	: Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
BPHTB	: Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPJT	: Badan Pengatur Jalan Tol
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
B POM	: Badan Pengawas Obat dan Makanan
BPPN	: Badan Penyehatan Perbankan Nasional
BPPT	: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
BPYBDS	: Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya
BRR	: Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi
BULOG	: Badan Urusan Logistik
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BUN	: Bendahara Umum Negara
CBN	: Cadangan Benih Nasional
CBP	: Cadangan Beras Pemerintah
CEO	: <i>Chief Financial Officer</i>
CEI	: <i>Consultative Group on Indonesia</i>
COO	: <i>Chief Operating Officer</i>
CPI	: <i>Consumer Price Index</i>
DAK	: Dana Alokasi Khusus
DAU	: Dana Alokasi Umum
DAU	: Dana Alokasi Umum
DEH	: Dana Bagi Hasil
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DJA	: Direktorat Jenderal Anggaran
DJBC	: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
DJKN	: Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
DJP	: Direktorat Jenderal Pajak
DJPBN	: Direktorat Jenderal Perpendaftaran
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DTP	: Ditanggung Pemerintah
EDI	: <i>Electronic Data Exchange</i>
GEHN	: Gas-Gas Beras Besar Heluan Negara
HTI	: Hutang Tanah-tanah Industri

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 *Issued*

INDFA	: Indonesian Debt Restructuring Agency
KITE	: Kemudahan Impor Tujuan Ekspor
KKKS	: Kontraktor Kontrak Kerja Sama
K/L	: Kementerian Negara/Lembaga
KMK	: Keputusan Menteri Keuangan
KCN	: Komite Olahraga Nasional Indonesia
KPPN	: Kantor Pelayanan Perbandaran Negara
KSM	: Kelompok Swadaya Masyarakat
KU	: Kiriman Uang
KUHR	: Kredit Usaha Hutan Rakyat
KUMK	: Kredit Usaha Mikro dan Kecil
KUN	: Kas Umum Negara
KUT	: Kredit Usaha Tani
LAK	: Laporan Arus Kas
LBMN	: Laporan Barang Milik Negara
LDKP	: Lembaga Dana Kredit Pedesaan
LDR	: <i>Loan to Deposit Ratio</i>
LKBUN	: Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara
LKKL	: Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
LKP	: Lembaga Keuangan Pelaksana
LKPP	: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LNSI	: Lembaga Non Struktural/Independen
LRA	: Laporan Realisasi Anggaran
MPN	: Modul Penerimaan Negara
MP3	: Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak
NAD	: Nanggroe Aceh Darussalam
NPL	: <i>Non-Performing Loan</i>
PDB	: Pendapatan Domestik Bruto
PFK	: Perhitungan Pihak Ketiga
PIP	: Pusat Investasi Pemerintah
PMA	: Penanaman Modal Asing
PMDN	: Penanaman Modal Dalam Negeri
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
PMN	: Penyertaan Modal Negara
PMBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
PFh	: Pajak Penghasilan
PPN	: Pajak Pertambahan Nilai
PPhBM	: Pajak Penjualan atas Barang Mewah
PSL	: <i>Past Service Liability</i>
PSO	: <i>Public Service Obligation</i>
PT PPA	: PT Perusahaan Perdagangan Aset
RANTF	: <i>Recovery of Aceh Nias Trust Fund</i>
RCI	: Rekening Dana Investasi
RPD	: Rekening Pembangunan Daerah
RPLMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPL	: Rekening Pemerintah Lainnya
SA-BUN	: Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara
SAI	: Sistem Akuntansi Instansi
SAKUR	: Sistem Akuntansi Kas Umum Negara
SAL	: Saldo Anggaran Lebih

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 *(revised)*

SAP	:	Standar Akuntansi Pemerintahan
SAPP	:	Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat
SAPU	:	Sistem Akuntansi Umum
SBN	:	Surat Berharga Negara
SBSN	:	Surat Berharga Syariah Negara
SCA	:	Sumber Daya Alam
SCHI	:	Sukuk Cane Haji Indonesia
SiAP	:	Sistem Akuntansi Pusat
SIBOR	:	<i>Singapore Interbank Offered Rate</i>
SiKPA	:	Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran
SiLPA	:	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
SIMAK-BMN	:	Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
SKPA	:	Surat Kuasa Pengguna Anggaran
SKPKB	:	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
SKPLB	:	Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
SPKPBM	:	Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk
SLA	:	<i>Subsidiary Loan Agreement</i>
SP2D	:	Surat Perintah Pencairan Dana
SPN	:	Surat Perbendaharaan Negara
SP3	:	Surat Perintah Pengesahan Pembukuan
SUN	:	Surat Utang Negara
TA	:	Tahun Anggaran
TGR	:	Tuntutan Ganti Rugi
THT	:	Tabungan Hari Tua
TP	:	Tim Pemberesan Aset
TPA	:	Tagihan Penjualan Angsuran
TSA	:	<i>Treasury Single Account</i>
TSP	:	Tempat Simpan Pinjam
USD	:	<i>United State Dollar</i>
USP	:	Usaha Simpan Pinjam
UP/TUP	:	Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 *Revised***INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN****LAPORAN REALISASI APBN**

Pendapatan Negara dan Hibah			Halaman
Catatan	B.2.1	Pendapatan Negara dan Hibah	75
Catatan	B.2.1.1	Penerimaan Perpajakan	76
Catatan	B.2.1.1.1	Pajak Daerah Negeri	77
Catatan	B.2.1.1.2	Pajak Perdagangan Internasional	77
Catatan	B.2.1.2	Penerimaan Negara Bukan Pajak	78
Catatan	B.2.1.2.1	Penerimaan Sumber Daya Alam	78
Catatan	B.2.1.2.2	Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	78
Catatan	B.2.1.2.3	Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	79
Catatan	B.2.1.2.4	Pendapatan BLU	79
Catatan	B.2.1.3	Penerimaan Hibah	80
 Belanja Negara			
Catatan	B.2.2	Belanja Negara	80
Catatan	B.2.2.1	Belanja Pemerintah Pusat	80
Catatan	B.2.2.1.1	Belanja Pegawai	83
Catatan	B.2.2.1.2	Belanja Barang	83
Catatan	B.2.2.1.3	Belanja Modal	84
Catatan	B.2.2.1.4	Pembayaran Bunga Utang	85
Catatan	B.2.2.1.5	Subsidi	85
Catatan	B.2.2.1.6	Belanja Hibah	88
Catatan	B.2.2.1.7	Belanja Bantuan Sosial	89
Catatan	B.2.2.1.8	Belanja Lain-lain	89
Catatan	B.2.2.2	Transfer ke Daerah	90
Catatan	B.2.2.2.1	Jana Ferimbangan	91
Catatan	B.2.2.2.1.1	Jana Bagi Hasil	91
Catatan	B.2.2.2.1.2	Jana Alokasi Umum	92
Catatan	B.2.2.2.1.3	Jana Alokasi Khusus	92
Catatan	B.2.2.2.2	Jana Otonomi Khusus dan Penyesuaian	92
Catatan	B.2.2.2.2.1	Jana Otonomi Khusus	92
Catatan	B.2.2.2.2.2	Jana Penyesuaian	93
Catatan	B.2.2.3	Suspensi	93
 Surplus (Defisit) Anggaran			
Catatan	B.2.3	Defisit Anggaran	94
 Pembiayaan			
Catatan	B.2.4	Pembiayaan	94
Catatan	B.2.4.1	Pembiayaan Dalam Negeri (Neto)	94
Catatan	B.2.4.1.1	Penggunaan SAL	94
Catatan	B.2.4.1.2	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	94
Catatan	B.2.4.1.3	Privatisasi dan Pelepasan Aset Program Restrukturisasi	95
Catatan	B.2.4.1.4	Surat Berharga Negara (Neto)	96

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 *(Revised)*

Catatan	B.2.4.1.5	Pinjaman Dalam Negeri	96
Catatan	B.2.4.1.6	Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah	97
Catatan	B.2.4.1.7	Kewajiban Penjaminan	98
Catatan	B.2.4.1.8	Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	98
Catatan	B.2.4.2	Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	98
Catatan	B.2.4.2.1	Penerimaan Pinjaman Luar Negeri	98
Catatan	B.2.4.2.1.1	Penerimaan Pinjaman Program	99
Catatan	B.2.4.2.1.2	Penerimaan Pinjaman Proyek	99
Catatan	B.2.4.2.2	Penerusan Pinjaman	100
Catatan	B.2.4.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	100

SILPA (SIKPA)

Catatan	B.2.5	Sisa Lebih (Kelebihan) Pembinaan Anggaran – SILPA (SIKPA)	101
---------	-------	---	-----

CATATAN PENTING LAINNYA

Catatan	D.3	Catatan Penting Lainnya	101
---------	-----	-------------------------	-----

NERACA

ASET

		Aset Lancar	
Catatan	C.2.1	Rekening Kas BUN di BI	106
Catatan	C.2.2	Rekening Pemerintah Lainnya	107
Catatan	C.2.3	Rekening Kas di KPPN	108
Catatan	C.2.4	Kas di Bendahara Pengeluaran	108
Catatan	C.2.5	Kas di Bendahara Penerimaan	108
Catatan	C.2.6	Kas Lainnya dan Setara Kas	108
Catatan	C.2.7	Kas Pada BLU	110
Catatan	C.2.8	Jang Muka dari Rekening BLN	111
Catatan	C.2.9	Investasi Jangka Pendek	111
Catatan	C.2.10	Investasi Jangka Pendek Lainnya	111
Catatan	C.2.11	Balasan Dibayar Dimuka dan Uang Muka Belanja	112
Catatan	C.2.12	Piutang Pajak	112
Catatan	C.2.13	Piutang Bukan Pajak	115
Catatan	C.2.14	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	123
Catatan	C.2.15	Bagian Lancar Penerusan Pinjaman	123
Catatan	C.2.16	Piutang dari Kegiatan BLU	125
Catatan	C.2.17	Piutang Lain-lain	126
Catatan	C.2.18	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang	126
Catatan	C.2.19	Persediaan	127
		Investasi Jangka Panjang	
Catatan	C.2.20	Jana Berwujud	128
Catatan	C.2.21	Jana Berwujud Diragukan Tertagih	129
Catatan	C.2.22	Investasi Non Permanen Lainnya	130
Catatan	C.2.23	Cadangan Penurunan Nilai Investasi Non Permanen Lainnya	131
Catatan	C.2.24	Investasi Permanen PMN	132
Catatan	C.2.25	Investasi Permanen BLU	140

 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 *(revised)*

Catatan	C.2.25	Investasi Permanen Lainnya	140
		Aset Tetap	
Catatan	C.2.27	Aset Tetap	140
		Piutang Jangka Panjang	
Catatan	C.2.28	Piutang Jangka Panjang	141
Catatan	C.2.29	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	144
		Aset Lainnya	
Catatan	C.2.30	Aset Lainnya	144
Catatan	C.2.31	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Aset Lainnya	147
KEWAJIBAN			
		Kewajiban Jangka Pendek	
Catatan	C.2.32	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	158
Catatan	C.2.33	Utang Kepada Pihak Ketiga	158
Catatan	C.2.34	Utang Biaya Pinjaman	159
Catatan	C.2.35	Utang Subsidi	160
Catatan	C.2.36	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	162
Catatan	C.2.37	Utang SBN Jangka Pendek	163
Catatan	C.2.38	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	163
Catatan	C.2.39	Pendapatan Diterima di Muka	164
Catatan	C.2.40	Utang Jangka Pendek Lainnya	164
		Kewajiban Jangka Panjang	
Catatan	C.2.41	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan	165
Catatan	C.2.42	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Surat Berharga Negara	165
Catatan	C.2.43	Utang Kepada Dana Pensiun dan THT	167
Catatan	C.2.44	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	167
Catatan	C.2.45	Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan	169
Catatan	C.2.46	Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya	170
EKUITAS			
		Ekuitas Dana Lancar	
Catatan	C.2.47	Saldo Anggaran Lebih (SAL) Setelah Penyesuaian	171
Catatan	C.2.48	Sil PA (SIKPA) Setelah Penyesuaian	172
Catatan	C.2.49	Cadangan Piutang	173
Catatan	C.2.50	Cadangan Persediaan	173
Catatan	C.2.51	Pendapatan yang Dittagihkan	173
Catatan	C.2.52	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	174
Catatan	C.2.53	Selisih Kurs Eragian Lancar	175
Catatan	C.2.54	Dana Lancar Lainnya	175
Catatan	C.2.55	Barang/Jasa yang Harus Diterima	175
Catatan	C.2.56	Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan	176
		Ekuitas Dana Investasi	
Catatan	C.2.57	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	176
Catatan	C.2.58	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	176
Catatan	C.2.59	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	176
Catatan	C.2.60	Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	177

 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 *Revised*

Catatan	C.2.61	Selisih Kurs Bagian Jangka Panjang	177
---------	--------	------------------------------------	-----

CATATAN PENTING LAINNYA

Catatan	C.3	Catatan Penting Lainnya	177
---------	-----	-------------------------	-----

KEJADIAN PENTING SETELAH TAMGGAL PELAPORAN

Catatan	C.4	Kejadian Penting Setelah Tanggal Pelaporan	202
---------	-----	--	-----

LAPORAN ARUS KAS**ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI**

Catatan	0.2.1	Penerimaan Perpajakan	207
Catatan	0.2.1.1	Pajak Penghasilan	208
Catatan	0.2.1.2	Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	208
Catatan	0.2.1.3	Pajak Bumi dan Bangunan	209
Catatan	0.2.1.4	Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	209
Catatan	0.2.1.5	Cukai	209
Catatan	0.2.1.6	Pajak Lainnya	209
Catatan	0.2.1.7	Pajak Perdagangan Internasional	210
Catatan	0.2.2	PRBP	210
Catatan	0.2.2.1	Penerimaan Sumber Daya Alam	211
Catatan	0.2.2.2	Penerimaan Bagian Penerimaan atas Laba BUMI	211
Catatan	0.2.2.3	Penerimaan PNBF Lainnya	211
Catatan	0.2.2.4	Penerimaan BLU	212
Catatan	0.2.3	Penerimaan Hibah	212
Catatan	0.2.4	Relanja Pegawai	213
Catatan	0.2.5	Belanja Barang	213
Catatan	0.2.6	Belanja Pembayaran Bunga Utang	214
Catatan	0.2.7	Subsid	214
Catatan	0.2.8	Belanja Hibah	215
Catatan	0.2.9	Bantuan Sosial	215
Catatan	0.2.10	Belanja Lain-Lain	218
Catatan	0.2.11	Dana Bagi Hasil Pajak	218
Catatan	0.2.12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	218
Catatan	0.2.13	Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau	217
Catatan	0.2.14	Dana Alokasi Umum	217
Catatan	0.2.15	Dana Alokasi Khusus	217
Catatan	0.2.16	Dana Otonomi Khusus	217
Catatan	0.2.17	Dana Penyesuaian	218

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN

Catatan	0.2.18	Penjualan Aset	218
Catatan	0.2.19	Belanja Modal	218

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 *lanjutan*

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN

Catatan	0.2.20	Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	219
Catatan	0.2.21	Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	221
Catatan	0.2.22	Penerimaan Pengembalian Penanaman Pinjaman	222
Catatan	0.2.23	Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	222
Catatan	0.2.24	Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	222
Catatan	0.2.25	Perubahan Modal Negara/Investasi Pemerintah	223
Catatan	0.2.26	Penerusan Pinjaman (RDL/RPD)	223

ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN

Catatan	0.2.27	Perhitungan Pihak Ketiga (Neto)	224
Catatan	0.2.28	Pinjaman Uang	224
Catatan	0.2.29	Transito	225
Catatan	0.2.30	Penerimaan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Karena Kesalahan Rekening	226

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012**

- 01 Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memeriksa Neraca Pemerintah Pusat tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Arus Kas (LAK) untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan.
- 02 Keseluruhan seperti yang diuraikan dalam paragraf 04 – 07 berikut ini, BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK menearahkan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah, jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat, penilaian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penilaian atas keandalan sistem pengendalian internal yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar memadai untuk menyatakan opini.
- 03 Dalam Laporan BPK Nomor 24a/LHP/XV/05/2012 tanggal 24 Mei 2012, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPP Tahun 2011 karena: (a) permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pencatatan hasil inventarisasi dan Penilaian (IP) Aset Tetap dan (b) pelaksanaan inventarisasi, perhitungan, dan penilaian terhadap Aset Eks Badan Penyelatan Perbankan Nasional (BPPN) yang belum berdasarkan dokumen yang valid dan belum disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Dalam tahun 2012, Pemerintah telah melakukan upaya perbaikan dengan melakukan koordinasi dengan masing-masing KL terkait rincian aset tetap yang menjadi temuan, menyelesaikan IP sebagian besar aset tetap yang belum di-IP, dan menerbitkan ketentuan terkait penyusutan BMN, serta menelusuri, memverifikasi dokumen *essie*, dan membentuk penyisihan atas Aset Eks BPPN.
- 04 Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan R.2.1.2.3, R.2.2.1.8, dan C.2.48 atas Laporan Keuangan, Pemerintah mengungkapkan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya, Belanja Lain-Lain, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SLPA) Setelah

BPK

LHP – LKPP Tahun 2012

Penyesuaian TA 2012 masing-masing sebesar Rp73,46 triliun, Rp4,07 triliun, dan Rp21,02 triliun. PNBPL lainnya dan Belanja Lain-Lain tersebut diantaranya berasal dari pendapatan lainnya dari selisih kurs sebesar Rp2,09 triliun dan belanja lainnya dari rugi selisih kurs sebesar Rp282,39 miliar. Sementara nilai SILPA Setelah Penyesuaian termasuk saldo selisih kurs dan kas (*unrealized*), sebesar minus Rp499,28 miliar. Pemerintah belum menghitung untung/rugi selisih kurs dari seluruh transaksi mata uang asing sesuai dengan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Nomor 12 tentang Akuntansi Transaksi Dalam Mata Uang Asing. Penerimaan/belanja dari untung/rugi selisih kurs dapat berbeda secara signifikan jika dihitung berdasarkan Buletin Teknis SAP Nomor 12 tersebut. Data yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh keyakinan atas pendapatan dan belanja lainnya karena untung/rugi selisih kurs dan selisih kurs dari kas (*unrealized*).

- 05 Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan B.2.2.1 atas Laporan Keuangan, Pemerintah menyajikan realisasi belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.010,56 triliun dan anggunannya sebesar Rp1.069,53 triliun. Jumlah realisasi belanja tersebut diantaranya merupakan Belanja Barang sebesar Rp140,38 triliun, Belanja Modal sebesar Rp145,10 triliun, dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp75,62 triliun. Terdapat kelemahan-kelemahan dalam penganggaran dan penggunaan anggaran Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial, yaitu (a) Adanya kelemahan pengendalian atas pelaksanaan revisi DIPA sehingga terjadi realisasi belanja yang melampaui pagu DIPA sebesar Rp11,37 triliun untuk belanja selain Belanja Pegawai; (b) penggunaan Belanja Barang dan Belanja Modal yang melanggar ketentuan/peraturan perundang-undangan dan bernilai merugikan negara sebesar Rp646,01 miliar termasuk yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp240,16 miliar serta pembayaran Belanja Barang dan Belanja Modal di akhir tahun sebesar Rp1,31 triliun tidak sesuai realisasi fisik; dan (c) Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp1,91 triliun yang masih mengendap di rekening giro ketiga dan/atau rekening penampungan KI tidak disetor ke kas negara; dan (d) Penggunaan anggaran Belanja Bantuan Sosial tidak sesuai sasaran sebesar Rp269,98 miliar. Masalah tersebut mengakibatkan realisasi Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial tidak menggambarkan realisasi belanja yang sebenarnya.
- 06 Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan C.2.13 dan C.2.30 atas Laporan Keuangan, Pemerintah mengungkapkan Piutang Dukan Pajak per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp120,93 triliun dan Rp19,89 triliun serta Aset lainnya per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp378,99 triliun dan Rp454,62 triliun. Piutang Dukan Pajak tahun 2012 tersebut diantaranya sebesar Rp63,72 triliun merupakan aset *credit* Eks BPPN. Sementara Aset lainnya tahun 2012 tersebut diantaranya sebesar Rp3,97 triliun merupakan aset properti Eks BPPN. Pemerintah telah melakukan inventarisasi dan penelusuran atas Aset Eks BPPN khususnya yang berupa aset kredit berdasarkan dokumen yang ada dan telah menilai kembali nilai wajar aset properti Eks BPPN. Namun demikian, Pemerintah belum menelusuri keberadaan Aset Eks BPPN sebesar Rp3,79 triliun yang tercantum dalam Sistem Aplikasi Pengganti Buniyeh (SAPP) dan daftar nominatif properti Eks BPPN serta belum menyelesaikan penilaian atas Aset properti Eks BPPN yang berasal dari Lelo dan PT PPA sebesar Rp1,12 triliun. Nilai Aset Eks BPPN yang dicatat dalam LKPP dapat berbeda secara signifikan jika Pemerintah selesai menelusuri keberadaan dan menilai seluruh Aset Eks BPPN. Data yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran saldo Aset Eks BPPN.

- 07 Dalam Catatan C.2.47 atas Laporan Keuangan, Pemerintah melaporkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada akhir tahun 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp70,26 triliun dan Rp105,09 triliun. SAL akhir tahun 2012 tersebut terdiri dari SAL Awal Setelah Penyesuaian sebesar Rp49,24 triliun dan SILPA Setelah Penyesuaian sebesar Rp21,02 triliun. SAL akhir tahun 2012 tersebut masih berbeda dengan rincian fisik SAL sebesar Rp8,15 miliar dan penambahan fisik SAL sebesar Rp33,49 miliar tidak dapat dijelaskan. Pemerintah juga melakukan koreksi manual atas pencatatan SILPA sebesar Rp30,89 miliar yang tidak didukung dokumen sumber yang memadai. Pemerintah tidak dapat memberikan penjelasan yang memadai atas penambahan fisik SAL dan koreksi yang tercapgauli terhadap catatan SAL serta perbedaan antara catatan dan fisik SAL.
- 08 Menurut opini BPK, kecuali ketidakputuhan dalam realisasi belanja barang, modal, dan bansos, serta dampak penyesuaian, jika ada, yang mungkin perlu dilakukan jika Pemerintah menghindari selisih kurs dari kas *(unrealized)* dan utang/ragi selisih kurs, menyelesaikan penelusuran dan penilaian atas seluruh Aset Eks BFPN, dan menyelesaikan permasalahan SAL, laporan keuangan yang disebut dalam paragraf pertama di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Pusat per 31 Desember 2012 dan 2011 serta realisasi anggaran dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- 09 Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 45/LHP/XV/05/2013 tanggal 20 Mei 2013 dan Nomor 45c/LHP/XV/05/2013 tanggal 20 Mei 2013, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 30 Mei 2013
**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA**
KETUA,



Drs. Hadi Poernomo, Ak
 Register Negara No. D-786

RINGKASAN

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 *Audited*.

RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2012, Pemerintah menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun Anggaran (TA) 2012 dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan serta diampiri Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara, Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Lainnya.

LKPP Tahun 2012 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Lampiran II (PSAP Berbasis Kas Menuju Akral).

LKPP Tahun 2012 ini disusun berdasarkan konsolidasian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

1. LAPORAN REALISASI APBN

Laporan Realisasi APBN menggambarkan perbandingan antara APBN-P TA 2012 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama periode 1 Januari 2012 - 31 Desember 2012.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2012 adalah sebesar Rp1.338,11 triliun atau 98,52 persen dari APBN-P. Sementara itu, realisasi Belanja Negara pada TA 2012 adalah sebesar Rp1.491,41 triliun atau 98,33 persen dari APBN-P. Jumlah realisasi Belanja Negara tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.010,56 triliun atau 84,49 persen dari APBN-P, dan realisasi Transfer ke Daerah sebesar Rp480,65 triliun atau 100,39 persen dari APBN-P. Selain itu, pada TA 2012 terdapat Suspen Belanja sebesar Rp206,91 miliar.

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah, dan realisasi Belanja Negara, terjadi Defisit Anggaran TA 2012 sebesar Rp153,30 triliun. Realisasi Pembiayaan Neto TA 2012 adalah sebesar Rp175,16 triliun atau 92,14 persen dari APBN-P, sehingga terjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp21,86 triliun.

Ringkasan Laporan Realisasi APBN TA 2012 dan 2011 dapat disajikan sebagai berikut.

(dalam triliun rupiah)

Uraian	TA 2012 <i>(audited)</i>			TA 2011 <i>(audited)</i>
	Anggaran (UU No. 4/2012)	Realisasi	% Realisasi thd Anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara dan Hibah	1.358,2	1.338,11	98,52	1.210,60
Belanja Negara	1.548,3	1.491,41	96,33	1.295,00
Belanja Pemerintah Pusat	1.369,53	1.010,56	84,49	899,72
Transfer ke Daerah	478,78	480,65	100,39	411,32
Suspen Belanja Negara	-	0,21	-	(0,08)
Surplus (Defisit) Anggaran	(190,10)	(153,30)	80,64	(64,40)
Pembiayaan Neto	160,10	175,16	109,34	130,95
SILPA (SIKPA)	-	21,86	-	46,55

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 *(Audited)*

2. NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Pusat mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2012.

Jumlah Aset per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp3.432,98 triliun yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp241,31 triliun, Investasi Jangka Panjang sebesar Rp932,41 triliun, Aset Tetap sebesar Rp1.895,50 triliun, Piutang Jangka Panjang (netto) sebesar Rp4,67; dan Aset Lainnya sebesar Rp359,09 triliun.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp2.158,89 triliun yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp206,14 triliun dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp1.890,75 triliun.

Sementara itu, jumlah Ekuitas Dana Netn per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp1.276,10 triliun yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp23,56 triliun dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp1.299,68 triliun.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 dapat disajikan sebagai berikut.

Uraian	dalam triliun rupiah	
	31 Desember 2012 (Audited)	31 Desember 2011 (Audited)
Aset	3.432,98	3.023,44
Aset Lancar	241,31	266,81
Investasi Jangka Panjang	932,41	750,03
Aset Tetap	1.895,50	1.567,97
Piutang Jangka Panjang	4,67	3,43
Aset Lainnya	359,09	435,20
Kewajiban	2.158,89	1.947,37
Kewajiban Jangka Pendek	206,14	246,44
Kewajiban Jangka Panjang	1.890,75	1.700,93
Ekuitas Dana Neto	1.276,10	1.076,07
Ekuitas Dana Lancar	(23,56)	40,81
Ekuitas Dana Investasi	1.299,68	1.035,23

3. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama TA 2012 serta saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2012.

Saldo Kas Bendahara Umum Negara (BUN), Kas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Kas Badan Layanan Umum (BLU), dan Kas Hibah Langsung yang telah disahkan per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp107,84 triliun, sedangkan pada awal tahun 2012 terjadi koreksi tambah sebesar Rp0,31 triliun, selingga saldo awal Kas BUN, Kas KPPN, Kas BLU, dan Kas Hibah Langsung yang telah disahkan tahun 2012 menjadi Rp108,15 triliun.

Selama TA 2012 terjadi penurunan kas dari aktivitas operasi sebesar Rp0,07 triliun, penurunan kas dari aktivitas investasi aset non keuangan sebesar Rp144,13 triliun, kenaikan kas dari aktivitas pembiayaan sebesar Rp175,18 triliun, penurunan kas dari aktivitas non anggaran sebesar Rp1,50 triliun, penurunan karena penggunaan SAL

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 *(Audited)*

sebesar Rp63,17 triliun, dan penurunan karena penyesuaian pembukuan sebesar Rp0,76 triliun. Dengan demikian, saldo Kas BUN, Kas KPPN, Kas BLU, dan Kas Hibah Langsung yang telah disahkan per 31 Desember 2012 menjadi Rp71,58 triliun.

Selain kas di atas, terdapat Rekening Penerimaan Lainnya sebesar Rp13,40 triliun, Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp0,21 triliun, Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp0,20 triliun, Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp5,45 triliun, dan Kas pada BLU yang belum disahkan sebesar Rp0,08 triliun. Selama tahun 2012 terdapat deposito (investasi jangka pendek) yang berasal dari Kas pada BLU yang telah disahkan sebesar Rp0,77 triliun, sehingga saldo akhir Kas dan Bank Pemerintah Pusat sebesar Rp90,24 triliun.

Ringkasan Laporan Arus Kas TA 2012 dan TA 2011 dapat disajikan sebagai berikut.

Uraian	dalam triliun rupiah;	
	TA 2012 <i>(Audited)</i>	TA 2011 <i>(Audited)</i>
Saldo Awal Kas BUN, Kas KPPN, Kas BLU, dan Kas Hibah Langsung	107,84	98,98
Koreksi Saldo Awal	3,31	0,03
Saldo Awal Kas BUN, Kas KPPN, Kas BLU, dan Kas Hibah Langsung setelah Koreksi	108,15	99,01
Kenailan (Penurunan) Kas		
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(8,67)	32,78
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(142,43)	(117,62)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	75,16	131,39
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	11,90	1,31
Penggunaan SAL	(56,17)	(40,32)
Penyesuaian Pembukuan	(0,76)	1,28
Kenailan (Penurunan) Kas	(30,57)	8,83
Saldo Akhir Kas BUN, Kas KPPN, Kas BLU, dan Kas Hibah Langsung	71,58	107,84

4. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan kebijakan makro, kebijakan fiskal, metodologi penyusunan LKPP, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dalam penyajian Laporan Realisasi APBN, pendapatan, belanja, dan pembiayaan diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN). Dalam penyajian Neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN.

Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta beberapa informasi tambahan yang diperlukan.

**LAPORAN REALISASI APBN
(AUDITED)**

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (audited)

I. LAPORAN REALISASI APBN (AUDITED)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN REALISASI APBN
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2012 DAN 2011

Uraian	Catatan	TA 2012 (Audited)		TA 2011 (Audited)	
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
A. Pendapatan Negara dan Hibah	B.2.1				
1. Penerimaan Pajak	B.2.1.1	1.016.237.341.511.000	980.518.133.319.319	96,48	873.873.892.399.381
: Pajak Dalam Negeri	B.2.1.1.1	930.293.241.511.000	930.061.893.909.439	96,13	819.732.426.342.423
2. Pajak Perdagangan Internasional	B.2.1.1.2	47.544.100.000.000	48.656.293.809.881	103,57	54.121.466.056.956
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.2.1.2	341.142.610.103.000	351.804.746.666.862	103,13	331.471.821.098.730
: Penerimaan Sumber Daya Alam	B.2.1.2.1	217.158.876.893.000	225.843.973.463.751	104,00	213.823.349.552.827
2. Bagian Pemerintah atas Laba BUMV	B.2.1.2.2	30.776.336.250.000	30.797.973.717.673	100,07	28.193.873.126.600
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	B.2.1.2.3	72.799.374.473.000	73.458.504.524.407	100,91	69.390.502.832.532
4. Pendapatan RRI	B.2.1.2.4	20.408.072.687.000	21.704.295.961.034	106,35	20.133.995.586.771
III. Penerimaan Hibah	B.2.1.3	825.091.588.000	5.766.749.186.777	701,35	5.293.939.801.304
: Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.1 + A.1.1 + A.1.1.1)		1.358.216.043.200.000	1.338.108.629.172.858	88,52	1.210.698.653.358.416
B. Bantuan Negara	B.2.2				
1. Bantuan Pemerintah Pusat	B.2.2.1	1.069.534.444.947.000	1.010.558.236.531.814	94,49	983.721.886.196.519

(Dalam Rupiah)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini. -B-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

Uraian	Catatan	TA 2012 (Audited)		TA 2011 (Audited)	
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
1. Belanja Pegawai	B.2.2.1.1	212.671.607.708.622	187.863.563.816.235	88,61	175.737.918.419.01E
2. Belanja Barang	B.2.2.1.2	160.031.270.543.986	140.884.875.397.761	88,04	124.639.479.512.304
3. Belanja Modal	B.2.2.1.3	182.821.848.581.508	145.104.143.492.853	79,48	117.854.532.071.382
4. Penyalangan Bunga Utang	B.2.2.1.4	117.785.273.800.000	108.515.994.274.844	92,24	93.271.919.810.886
5. Subsidi	B.2.2.1.5	246.078.318.892.000	348.420.404.82.332	141,35	295.336.229.638.324
6. Belanja Hibah	B.2.2.1.6	1.790.936.803.000	75.073.293.554	4,19	330.108.738.353
7. Belanja Bantuan Sosial	B.2.2.1.7	80.716.444.343.429	75.621.057.38.995	93,69	71.134.326.132.347
8. Belanja Lain-lain	B.2.2.1.8	58.570.194.302.453	4.079.111.835.293	6,94	5.435.369.735.956
II. Transfer ke Daerah	B.2.2	478.775.933.233.000	480.645.074.235.761	100,39	411.324.764.831.790
1. Dana Perimbangan	B.2.2.1	408.352.065.705.000	411.283.124.879.761	100,72	347.246.213.954.316
a. Dana Bagi Hasil	B.2.2.1.1	108.421.669.502.000	111.537.202.920.761	102,87	96.938.991.991.31E
b. Dana Alokasi Umum	B.2.2.1.2	273.614.438.203.000	273.814.439.203.000	100,00	225.533.712.049.000
c. Dana Alokasi Khusus	B.2.2.1.3	26.115.948.000.000	25.941.483.858.000	99,33	24.833.509.925.000
2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian	B.2.2.2	70.423.877.528.000	69.351.549.256.000	98,48	64.078.550.677.474
a. Dana Otonomi khusus	B.2.2.2.1	1.552.577.528.000	11.952.577.528.000	100,00	10.421.312.933.000
b. Dana Penyesuaian	B.2.2.2.2	58.471.300.000.000	57.399.371.728.000	98,17	53.657.237.694.474
III. Sisa/ Saldo Belanja Negara	B.2.3		206.913.823.419		(47.504.353.285)
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II + B.III)		1.548.310.378.180.000	1.491.410.224.590.994	96,33	1.294.999.146.475.024
C. Surplus (Defisit) Anggaran (A - B)	B.2.3	190.105.324.890.000	115.360.595.418.036	60,64	384.399.893.115.809

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini. -7-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Audited)

Uraian	Catatan	TA 2012 (Audited)		% Realisasi terhadap Anggaran	TA 2011 (Audited)	
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	Realisasi
D. Pembelian						
1. Pembelian Dalam Negeri (Mato)						
: Rukung Pemerintah	B.2.4	194.531.004.181.000	198.622.535.177.645	102,10	148.748.034.850.000	148.748.034.850.000
: Rukung Pemerintah	B.2.4.1	56.173.717.235.000	56.700.000.000.000	99,99	40.319.012.019.000	40.319.012.019.000
: Penerimaan Cicilan Pengembalian Ferusan Pinjam	B.2.4.1.1	4.387.875.573.000	6.533.099.03.443	148,89	8.638.845.435.456	8.638.845.435.456
: Privatisasi dan Pejualan Aset Program Restrukturisasi	B.2.4.1.2	380.000.000.000	1.277.984.561.583	456,43	1.597.981.517.176	1.597.981.517.176
: Surat Berharga Negara (Mato)	B.2.4.1.3	159.596.700.000.000	159.704.323.637.093	100,07	119.834.365.439.086	119.834.365.439.086
: Penerbitan Surat Berharga Negara	B.2.4.1.4		282.897.267.989.793		207.136.113.136.150	207.136.113.136.150
: Pengeluaran Surat Berharga Negara	B.2.4.1.5	591.161.506.000	(123.192.944.352.684)		167.271.747.737.085	167.271.747.737.085
: Pinjaman Dalam Negeri (Mato)	B.2.4.1.6	(19.265.140.156.000)	790.673.393.939	90,60	619.302.641.693	619.302.641.693
: Pemertan Modal, Mepertanana Investasi Pemerintah	B.2.4.1.7	1933.340.000.000	(18.867.557.467.419)	97,91	(19.643.863.317.264)	(19.643.863.317.264)
: Kavajiban Perjanjian	B.2.4.1.8	17.000.000.000.000	17.000.000.000.000	100,00	2.617.700.000.000	2.617.700.000.000
: Dana Penge nangan Pendidikan Nasional	B.2.4.1.9					
11. Pembelian Luar Negeri (Mato)						
: Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)	B.2.4.2	14.425.669.201.000	(23.464.366.857.270)	530,19	17.799.165.225.548	17.799.165.225.548
: Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Neto)	B.2.4.2.1	52.731.053.828.000	31.403.481.754.448	58,45	33.747.178.723.921	33.747.178.723.921
a. Penarikan Pinjaman > 12 bulan	B.2.4.2.1.1	15.603.899.524.000	15.003.473.80.432	96,15	15.236.144.513.216	15.236.144.513.216
b. Penarikan Pinjaman < 12 bulan	B.2.4.2.1.2	38.127.154.304.000	16.400.005.574.015	43,01	18.431.034.210.703	18.431.034.210.703
: Peneusan Pinjaman (Neto)	B.2.4.2.2	18.431.823.079.000	3.753.031.242.391	44,51	(4.223.841.471.298)	(4.223.841.471.298)
: Peneusan Pinjaman (Neto)	B.2.4.2.3	(49.724.890.000.000)	(51.114.817.365.327)	102,80	(47.222.502.478.271)	(47.222.502.478.271)
Jumlah Pembelian (D.1 + D.11)		190.105.334.980.000	175.156.168.378.375	92,14	130.548.869.674.470	130.548.869.674.470
E. Sisa Lebih Kurang Pembelian Anggaran -SLPA (SIKPA)		-	21.857.572.902.339	-	46.549.376.508.811	46.549.376.508.811

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini. -8-

**NERACA
(AUDITED)**

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (audited)

II. NERACA (AUDITED)

Pemerintah Republik Indonesia
NERACA
PER 31 DESEMBER 2012 DAN 31 DESEMBER 2011

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Des 2012 (audited)	31 Des 2011 (audited)
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas			
Rekening Kas BUN di BI	C.2.1	37.582.696.367.036	82.453.318.298.407
Rekening Pemerintah Lainnya	C.2.2	13.495.865.498.447	6.315.352.720.213
Rekening Kas di KPPN	C.2.3	18.207.980.323.812	11.870.358.947.881
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.2.4	213.468.828.221	282.786.837.869
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2.5	196.160.468.976	262.900.321.124
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.6	6.103.251.518.103	6.758.975.778.441
Kas pada BLU	C.2.7	18.643.419.487.034	13.319.368.257.083
Jumlah Kas dan Setara		90.242.624.466.836	121.281.888.280.888
Jang Muka dari Penerimaan BUN	C.2.8	767.370.392.558	1.408.356.648.910
Investasi Jangka Pendek BLU	C.2.9	788.128.137.182	170.553.018.053
Investasi Jangka Pendek Lainnya	C.2.10	-	136.838.485.873
Belanja Dibayar Dimuka dan Uang Muka Belanja	C.2.11	1.693.533.661.966	1.279.166.316.147
Piutang			
Piutang Pajak	C.2.12	93.468.626.344.200	106.363.462.368.841
Piutang Bukan Pajak	C.2.13	120.625.750.512.257	19.386.360.412.806
Bagian Lancar Teguhan Turutan Ganti Rugi	C.2.14	268.808.908.475	60.470.838.892
Bagian Lancar Penerusan Pinjaman	C.2.15	5.225.797.572.454	4.462.395.947.776
Piutang dari Itikad BLU	C.2.16	2.473.903.438.488	1.218.391.969.142
Piutang lain-lain	C.2.17	-	24.377.368.237.846
Jumlah Piutang Brutol		222.568.794.775.872	159.388.567.411.131
Penyisihan Piutang Tirk Tertegit	C.2.18	(136.953.775.912.378)	(76.330.131.880.606)
Jumlah Piutang Bersih		85.607.018.863.494	83.058.435.530.525
Persediaan	C.2.19	82.018.687.798.416	69.214.348.462.180
Jumlah Aset Lancar		241.316.134.207.260	266.807.824.111.647
Investasi Jangka Panjang			
Investasi Non Permanen			
Dana Bergilir	C.2.20	11.463.274.948.660	8.196.266.111.610
Dana Bergilir Dirajut Tertegit	C.2.21	(20.196.519.935)	-
Jumlah Dana Bergilir (bersih)		11.433.078.428.615	8.196.266.111.610
Investasi Non Permanen Lainnya	C.2.22	7.568.540.521.754	4.749.737.167.996
Cadangan Penurunan Nilai Investasi Non Permanen Lainnya	C.2.23	(8.098.081.815)	-
Jumlah Investasi Non Permanen Lainnya (bersih)		7.560.441.646.939	4.749.737.167.996
Jumlah Investasi Non Permanen		19.093.520.075.554	12.945.993.279.606
Investasi Permanen			
Investasi Permanen PMN	C.2.24	1.121.171.688.386.801	736.981.664.233.014
Investasi Permanen BLU	C.2.25	137.168.377.116	6.637.194.603
Investasi Permanen Lainnya	C.2.26	-	87.809.772.784
Jumlah Investasi Permanen		1.258.340.065.924	831.428.531.621
Jumlah Investasi Jangka Panjang		932.406.392.842.504	750.030.794.479.806

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini -10-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (uskred)

Uraian	Catatan	31 Des 2012 (uskred)	31 Des 2011 (uskred)
Ases Tetap	C.2.27		
Tanah		596.678.472.254.680	006.436.356.590.744
Paralatan dan Mesin		778.179.448.807.797	184.852.199.556.042
Gedung dan Bangunan		170.243.288.864.322	162.220.089.916.182
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		378.236.269.018.824	347.164.628.246.236
Ases Tetap Lainnya		14.566.662.501.210	11.317.128.867.802
Konstruksi Dalam Pengerjaan		98.447.328.580.044	66.780.773.332.766
Jumlah Ases Tetap		1.895.601.448.208.883	1.667.674.174.687.760
Piutang Jangka Panjang	C.2.28		
Tagihan Penjualan Arsuran		1.375.031.741	1.375.031.741
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi		248.721.313.812	248.628.424.419
Putang Jangka Panjang Lainnya		4.767.606.812.732	3.737.310.660.736
Jumlah Putang Jangka Panjang (Bersih)		6.391.361.868.285	3.360.974.826.896
Penyisihan Piutang Tak Terlagih - Piutang Jangka Panjang	C.2.29	(342.011.679.691)	(663.936.168.803)
Jumlah Piutang Jangka Panjang (Bersih)		4.873.590.581.804	3.434.378.248.897
Ases Lainnya	C.2.30		
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga		225.918.302.700	212.907.785.823
Ases Tak Berwujud		15.705.813.887.576	17.406.318.913.595
Ases yang Dibatasi Penggunaannya		43.873.803.780.822	37.253.361.374.408
Data Penjaminan		68.308.700.630	75.371.634.076
Data Kelolaan BLU		21.178.800.007.681	19.320.332.310.233
Ases KIKKS		143.878.028.206.822	160.508.890.286.218
Ases/Ases BHPN		3.872.872.786.807	67.243.484.486.406
Ases Lain-lain		103.540.902.717.960	106.392.977.283.260
Ases Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya		2.430.048.950.500	14.782.446.010.385
Ases Lainnya Penarikan Pinjaman		44.114.288.077.588	48.340.275.969.109
Jumlah Ases Lainnya (Bersih)		379.507.604.360.656	454.316.944.923.482
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Ases Lainnya	C.2.31	(19.901.414.612.944)	(19.418.938.848.580)
Jumlah Ases Lainnya (Bersih)		369.606.289.747.712	436.200.008.874.902
JUMLAH ASET		3.432.982.893.385.983	3.023.447.176.100.695
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	C.2.32	467.880.000.307	1.765.374.888.286
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.2.33	28.738.138.876.662	31.780.534.368.020
Utang Biaya Pinjaman	C.2.34	23.090.286.717.583	21.324.338.336.466
Utang Subsidi	C.2.35	54.678.143.480.242	29.767.300.909.742
Bagian Lancar - Utang Jangka Panjang	C.2.36	118.218.112.940.270	106.777.069.656.825
Utang SBN Jangka Pendek	C.2.37	22.888.280.644.000	39.408.181.967.000
Utang Kelembhan Pembayaran Pendapatan	C.2.38	112.830.306.636	704.437.258.882
Pantapanan Cukai dan Pajak	C.2.39	8.777.888.089.201	8.379.314.082.880
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.2.40	9.728.882.176.822	6.387.100.837.108
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		288.136.388.891.888	248.444.880.183.115
Kewajiban Jangka Panjang			
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri			
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan	C.2.41	1.658.364.752.248	877.330.785.232
Utang Jangka Panjang SBN Dalam Negeri	C.2.42	1.278.847.880.282.207	1.085.324.345.750.551
Utang Kepada Dana Pelelun dan THT	C.2.43	18.167.746.000.000	11.322.231.724.876
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	C.2.44	6.024.283.622.492	6.333.382.826.744
Jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri		1.304.692.303.559.953	1.103.357.191.066.402
Utang Jangka Panjang Luar Negeri			
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan	C.2.45	558.487.514.862.710	571.982.048.618.444
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya	C.2.46	26.588.606.370.532	25.389.179.304.040
Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri		585.076.121.233.242	597.371.227.922.484
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		1.889.768.424.802.195	1.700.728.418.888.888

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (audited)

Uraian	Catatan	31 Des 2012 (audited)	31 Des 2011 (audited)
JUMLAH KEWAJIBAN		2.158.885.979.894.864	1.947.373.299.153.001
EKUITAS DANA			
Ekuitas Dana Lancar			
SAL Awal Setelah Penyesuaian	C.2.47	48.242.283.167.736	68.368.722.488.002
SLPA (SIKPA) Setelah Penyesuaian	C.2.48	21.020.662.086.738	46.432.349.228.692
Carangan Piutang	C.2.49	86.265.604.100.265	84.574.519.543.073
Carangan Persediaan	C.2.60	82.018.567.798.415	59.214.348.453.180
Pendapatan yang Ditangguhkan	C.2.51	9.043.802.422.868	3.810.488.939.873
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	C.2.62	(24.196.623.377.966)	(204.483.884.343.763)
Salah Kurang Bagian Lancar	C.2.63	(4.443.013.089.614)	(2.788.682.210.216)
Dana Lancar Lainnya	C.2.54	66.476.083.688	451.933.601.148
Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima	C.2.55	1.689.360.614.088	1.278.453.004.389
Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan	C.2.65	(6.721.888.089.201)	(6.321.674.877.086)
Jumlah Ekuitas Dana Lancar		(29.588.284.358.935)	40.213.342.935.899
Ekuitas Dana Investasi			
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	C.2.57	632.408.382.842.604	750.330.794.479.804
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	C.2.68	1.896.607.446.206.082	1.667.974.174.687.760
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	C.2.69	362.406.006.769.186	417.130.366.123.476
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	C.2.60	(11.650.355.888.189.889)	(11.879.033.615.548.059)
Salah Kurang Bagian Jangka Panjang	C.2.81	(40.276.032.240.800)	(20.841.184.232.270)
Jumlah Ekuitas Dana Investasi		1.299.883.144.107.434	1.035.280.594.012.801
EKUITAS DANA NETO		1.270.294.865.750.499	1.075.027.676.847.684
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		3.429.180.845.645.363	2.922.400.975.000.885

LAPORAN ARUS KAS
(AUDITED)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Audited)

III. LAPORAN ARUS KAS (AUDITED)

Pemerintah Republik Indonesia

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2012 DAN 2011

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2012 (Audited)	TA 2011 (Audited)
A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
I. Arus Kas Masuk			
1. Penerimaan Perpajakan	D.2.1		
a. Pajak Penghasilan	C.2.1.1	485.089.641.549.059	431.121.712.728.316
b. Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	C.2.1.2	337.684.677.498.286	277.800.078.879.384
c. Pajak Bumi dan Bangunan	C.2.1.3	28.868.862.702.282	29.868.164.324.385
d. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	C.2.1.4	-	(730.161.679)
e. Cukai	C.2.1.5	95.027.881.221.457	77.010.010.813.795
f. Pajak Lainnya	C.2.1.6	4.210.878.548.355	3.928.192.148.211
g. Pajak Perdagangan Internasional	C.2.1.7	48.666.283.808.881	64.121.466.065.863
Total Penerimaan Perpajakan		980.574.133.319.319	873.878.897.399.381
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	D.2.2		
a. Penerimaan Sumber Daya Alam	C.2.2.1	216.843.873.463.751	213.823.348.662.827
b. Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	C.2.2.2	30.797.972.717.670	20.103.973.125.600
c. PNBP Lainnya	C.2.2.3	73.332.319.646.034	69.226.130.305.965
d. Penerimaan DLU	C.2.2.4	21.704.286.061.034	20.103.886.683.771
Total PNBP		361.678.661.790.489	331.337.448.672.183
3. Penerimaan Hibah	D.2.3	4.141.701.010.979	4.250.217.535.974
Jumlah Arus Kas Masuk (A.I)		1.336.336.386.828.797	1.209.469.656.608.433
II. Arus Kas Keluar			
1. Belanja Pegawai	D.2.4	187.869.667.628.774	176.746.847.143.204
2. Belanja Barang	D.2.5	140.020.670.603.375	124.159.183.392.116
3. Belanja Bunga Utang	D.2.6	100.515.994.274.180	59.260.281.484.343
4. Belanja Subsidi	D.2.7	348.420.404.182.332	206.388.422.813.324
5. Belanja Hibah	D.2.8	76.079.846.754	300.108.783.366
6. Bantuan Sosial	D.2.9	75.602.528.863.964	71.076.290.233.168
7. Belanja Lain-Lain	D.2.10	4.072.855.612.158	5.484.234.053.592
8. Bagi Hasil Pajak	D.2.11	47.214.128.030.798	41.626.681.083.184
9. Bagi Hasil Sumber Daya Alam	D.2.12	62.600.286.671.376	63.874.886.297.964
10. Bagi Hasil Cukai	D.2.13	1.722.781.272.658	1.408.448.761.181
11. Dana Alokasi Umum	D.2.14	27.387.438.203.000	226.633.712.043.000
12. Dana Alokasi Khusus	D.2.15	26.941.183.866.000	24.802.228.762.980
13. Dana Otentik Khusus	D.2.18	11.952.577.528.000	10.421.312.993.000
14. Dana Peryusahan	D.2.17	57.399.389.588.082	53.857.183.083.474
Jumlah Arus Kas Keluar (A.II)		1.345.212.483.918.358	1.176.887.862.019.881
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (A.I - A.II)		(8.874.088.987.571)	92.781.898.488.577
B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN			
I. Arus Kas Masuk			
Penjualan Aset	D.2.19	126.184.876.373	134.372.625.647

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini -14-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Audiited)

Uraian	Catatan	TA 2012 (Audiited)	TA 2011 (Audiited)
Jumlah Arus Kas Masuk (B.I)		126.184.876.373	134.372.526.547
II. Arus Kas Keluar			
Belanja Modal	D.2.19	144.552.713.908.838	117.768.087.731.733
Jumlah Arus Kas Keluar (B.II)		144.552.713.908.838	117.768.087.731.733
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan (B.J - B.II)		(144.426.628.430.465)	(117.624.716.204.186)
C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN			
I. Arus Kas Masuk			
1. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	D.2.21	341.268.374.433.800	249.672.620.403.961
2. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	D.2.21	31.403.481.754.448	33.747.178.723.921
3. Penerimaan Pengembalian Pinjaman Pinjaman	D.2.22	6.533.098.103.448	8.609.945.493.453
Jumlah Arus Kas Masuk (C.I)		379.194.954.291.694	292.029.544.621.335
II. Arus Kas Keluar			
1. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	D.2.23	130.308.379.672.182	69.969.447.737.063
2. Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	D.2.24	61.114.617.289.327	47.822.602.479.271
3. Penyertaan Modal Negara/ Dana Investasi Pemerintah	D.2.25	18.862.667.487.419	19.210.367.712.264
4. Penurunan Pinjaman	D.2.25	3.763.031.242.391	4.223.811.471.293
Jumlah Arus Kas Keluar (C.II)		204.038.726.671.319	160.636.148.398.813
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (C.J - C.II)		175.156.168.320.375	131.392.395.224.420
D. ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN			
1. Perhitungan Filak Ketiga (Neto)	D.2.27	11.303.714.096.823	171.690.675.787
2. Kiri man Uang (Neto)	D.2.28	(279.649.821.569)	12.521.443.111
3. Transisi (Neto)	D.2.29	89.787.905.187	7.19.874.491.867
4. Transaksi NA Filak Ketiga karena kesalahan Rekening (retur) dan koreksi kesalahan KU (Neto)	D.2.31	(17.883.087.832)	909.666.105.708
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran		(1.601.492.800.189)	1.313.642.816.663
KEJAIKAN (PENURUMAN) KAS		20.366.110.002.173	47.862.918.124.364
Penggunaan SAL		(56.170.000.000.000)	(40.319.043.043.000)
Penyesuaian Pembukuan		1755.835.540.849	1.287.457.711.323
KEMAJUAN (PENURUMAN) KAS SETELAH KOREKSI	D.1.2	(50.698.726.638.479)	3.351.333.788.887
SALDO AWAL KAS BUN, KPPN DAN BLU		107.842.612.387.387	88.866.088.736.169
Koreksi Saldo Awal		309.493.844.869	26.188.864.943
SALDO AWAL KAS BUN, KPPN DAN BLU setelah Koreksi	D.1.1	108.14	89.011.278.600.702
SALDO AKHIR KAS BUN, KPPN, DAN BLU		71.578.940.693.780	107.842.612.387.389
Rekening Pemerintah Lainnya	D.2.4	13.486.666.488.448	6.619.662.720.213
Kas di Bendahara Pengeluaran	D.2.5	213.468.829.221	282.796.837.869
Kas di Bendahara Penerimaan	D.2.6	196.190.498.978	292.900.321.124
Kas Lainnya dan Salara Kas	D.2.7	5.447.004.787.840	6.377.755.718.087
Kas pada BLU yang Belum Diaktifkan	D.1.3	30.028.628.762	109.824.884.167
Kas pada BLU yang telah Dioperasikan (Investasi Berjangka Pendek)		(768.125.137.193)	(170.553.016.059)
SALDO AKHIR KAS DAN BAKU		90.242.524.455.836	121.261.988.260.870

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini -15-

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(AUDITED)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 *(Audited)*

IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN *(AUDITED)*

A. PENJELASAN UMUM

A.1. DASAR HUKUM

1. UUD 1945 Pasal 23 ayat (1) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran II (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Aktual).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar.
9. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 233/PMK.1E/2011.

A.2. KEBIJAKAN FISKAL, KEUANGAN DAN EKONOMI MAKRO

PEREKONOMIAN GLOBAL

Kondisi perekonomian global tahun 2012

Kondisi perekonomian global tahun 2012 menunjukkan adanya perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Di negara maju, pertumbuhan perekonomian yang relatif rendah ini diakibatkan oleh adanya krisis utang di Eropa dan masalah utang tekal (*fiscal cliff*) di Amerika Serikat. Memburuknya perekonomian negara-negara maju tersebut telah berdampak pada melambatnya perekonomian sebagian besar negara *emerging markets* seperti China dan India. Kedua negara yang merupakan mitra dagang utama Indonesia juga mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan perlambatan ekonomi dunia, tekanan inflasi dunia selama tahun 2012 secara umum mengalami penurunan.

ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO

Di dalam paruh kedua tahun 2011 hingga memasuki tahun 2012, perkembangan berbagai faktor eksternal seperti pertumbuhan ekonomi global dan harga minyak mentah di pasar internasional, telah menyebabkan beberapa indikator ekonomi makro terutama harga minyak mentah Indonesia (ICPI) dan nilai tukar Rupiah berada cukup signifikan dari asumsi yang dianggarkan dalam APBN 2012. Berbagai perkembangan tersebut diperkirakan memberikan tekanan yang sangat berat terhadap pelaksanaan APBN 2012. Perkembangan berbagai asumsi dasar ekonomi makro tersebut menjadi latar belakang perlunya pengajuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2012, lebih cepat dari jadwal reguler, yang hasilnya dilakukan setelah penyampaian laporan pelaksanaan APBN Semester I.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 *(revisi)*:

Tabel 1 Asumsi Dasar APBN TA 2012

Indikator	APBN 2012	APBN 2012
Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,7	3,5
Tingkat Inflasi (%)	5,3	5,8
Nilai tukar Rupiah (Rp/USD)	8.600	8.000
Suku Bunga (SPN) 3 bulan (%)	6,0	5,0
Harga Minyak (US\$/Barrel)	90,0	105,0
Lifting Minyak (Ribu Barrel/Hari)	950	930,0

Sumber: Nota Keuangan APBN 2012

*Perubahan
Asumsi Dasar:
pada APBN dan
Revisi TA 2012*

POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL DAN PERUBAHAN POSTUR APBN 2012

*Tema
Pembangunan
RKP 2012*

Tema pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2012 yang diterapkan oleh Pemerintah bersama dengan DPR RI tahun 2012 adalah "Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Inklusif dan Berkeadilan Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat". Untuk mendukung rencana tersebut, Pemerintah memfokuskan pada tiga langkah utama, yakni: (i) melanjutkan pembangunan menuju Indonesia sejahtera; (ii) memperkuat pilar-pilar demokrasi; dan (iii) memperkuat dimensi keadilan di semua bidang.

*RKP 2012
sebagai
penjabaran
RPJMN 2010-
2014*

RKP tahun 2012 adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) tahun 2010-2014. RKP tahun 2012 adalah untuk mendukung sasaran pembangunan dalam RPJM 2010-2014 dalam bentuk: (i) sasaran pembangunan kesejahteraan; (ii) sasaran pembangunan demokrasi; dan (iii) sasaran peregakan hukum. Pemerintah Indonesia senantiasa konsisten untuk menjalankan komitmen mendarang pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*), mengurangi pengangguran (*pro-job*), mengentaskan kemiskinan (*pro-poor*), serta pembangunan berwawasan lingkungan (*pro-environment*). Sejalan dengan hal tersebut, sasaran di bidang ekonomi ditujukan untuk mencapai tingkat pertumbuhan pada kisaran 6,5 persen sejalan dengan sasaran RPJMN 2010-2014 rata-rata 6,3-6,8 persen pertahun. Pengendalian tingkat inflasi pada tahun 2012 diupayakan sebesar 6,0 persen (APBN 2012). Penurunan tingkat pengangguran menjadi sekitar 6,4 - 3,6 persen dimana sasaran RPJMN adalah sebesar 5 sampai 6 persen pada akhir tahun 2014 dan kemiskinan menjadi 10,5 sampai 11,5 persen dimana sasaran RPJMN pada akhir tahun 2014 sebesar 8 sampai 10 persen. Untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran tersebut Pemerintah menetapkan sebelas prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam RKP 2012 yang meliputi: (1) reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan dan kapandukan; (4) penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim investasi dan iklim usaha; (8) energi; (9) lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; (10) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik; (11) kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi.

*Pokok-pokok
Kebijakan Fiskal
dan Postur APBN
2012*

Perubahan APBN 2012, selain menampung perubahan indikator ekonomi mikro dalam tahun 2012, juga dimaksudkan agar berbagai besaran APBN menjadi realistis dan dapat dilaksanakan secara baik. Perubahan kebijakan fiskal dan langkah-langkah antisipatif dalam perubahan APBN 2012 meliputi antar lain: (1) Perambatan biaya infrastruktur dan kebutuhan mendesak, yang dibiayai dari pemanfaatan saldo anggaran lebih (SAL); (2) Kebijakan pengendalian subsidi BBM; (3) peningkatan Belanja Pegawai dan Belanja Barang yang tidak mempengaruhi *output* dan *outcome* pada Kementerian negerilembaga; (4) perluasan defisit anggaran serta (5) optimalisasi pendapatan negara utamanya peningkatan PNEP.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 *(Lanjutan)*

Tabel 2 Realisasi Anggaran TA 2012 dan Perubahan APBN 2012

(dalam triliun rupiah)

URAIAN	TA 2012 (Realisasi)	TA 2012	
		APBN	APBVP
Penerimaan Perpajakan	980,52	1.092,57	1.016,24
PMBP	352,00	227,99	341,14
Penerimaan Hibah	5,79	0,82	0,82
Pendapatan Negara & Hibah	1.336,31	1.261,38	1.358,20
Belanja Pemerintah Pusat	1.010,53	964,99	1.069,53
Transfer ke Daerah	480,85	470,41	478,77
Total Belanja Negara	1.491,41	1.435,40	1.548,30
<i>Sisaopen</i>	0,21	-	-
Surplus (Defisit)	(153,10)	(174,02)	(190,10)
Pembiayaan	174,93	124,02	190,10

Sumber: Nota Keuangan APBN 2012

Kebijakan Umum Perpajakan

Dari sisi penerimaan negara, Pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan pajak melalui pokok-pokok kebijakan umum perpajakan. Pokok-pokok kebijakan umum perpajakan pada tahun 2012 adalah sebagai berikut: (a) melanjutkan pokok-pokok kebijakan perpajakan yang telah dilakukan di tahun 2011; (b) melakukan perbaikan pelayanan dan penyuluhan perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela; (c) melakukan perbaikan kebijakan perpajakan untuk mendukung optimalisasi pendapatan Negara dan mendukung kegiatan ekonomi, termasuk dengan pemberian insentif fiskal; (d) melakukan pembaruan internal aparatur dan sistem perpajakan; (e) penegakan hukum (*law enforcement*) kepada wajib pajak yang tidak patuh; dan (f) mensinergikan unsur Pemerintah dalam penggalan potensi perpajakan dengan memberikan dukungan data/informasi kepada Kementerian Keuangan.

Program Penguatan Potensi Perpajakan

Sepanjang tahun 2012, Pemerintah telah melakukan berbagai program yang bertujuan untuk menggali potensi penerimaan perpajakan. Program-program tersebut antara lain adalah program intensifikasi perpajakan; program ekstensifikasi perpajakan; program *enabasing* (pemisahan potensi pajak berbasis wilayah); program intensifikasi penagihan; program penyempurnaan mekanisme keberstan banding dalam proses pengadilan pajak; *law enforcement*, yang meliputi pemeriksaan dan penagihan serta melakukan kegiatan pembinaan kepada wajib pajak yang telah terdaftar; dan mengaktifkan kegiatan sosialisasi dan edukasi perpajakan.

Boks 1. Kebijakan Pajak Tahun 2012

Krisis yang terjadi pada beberapa negara Eropa memiliki potensi untuk mempengaruhi penerimaan pajak tahun 2012. Dampak krisis tersebut sudah mulai terasa dengan adanya penurunan ekspor-impor. Penurunan ekspor-impor akan berdampak pada turunnya penerimaan pajak terutama sektor Pajak Penghasilan (PPH) Impor dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor. Penerimaan perpajakan semester I 2012 mencapai Rp 457,00 triliun atau sekitar 44,26 persen dari target tahun 2012. Capaian tersebut sudah cukup baik mengingat kondisi perekonomian global yang tidak menentu. Untuk itu, pada semester II-2012, Pemerintah menargetkan semua sektor guna mencapai target penerimaan perpajakan yang sudah ditentukan dalam APBN-P 2012 sebesar Rp 1.016,24 triliun. Selama ini tren penerimaan pajak pada semester I bisa saja lebih tinggi dibandingkan realisasinya pada semester I. Namun demikian untuk tahun 2012, kemungkinan terjadinya perlambatan perekonomian Indonesia terkait krisis global harus diwaspadai. Oleh karena itu Pemerintah mengambil beberapa langkah pengamanan penerimaan pajak seperti perbaikan

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 *(continued)*

sistem PPN, perbaikan sistem teknologi informasi untuk pengawasan terhadap Wajib Pajak serta melakukan sensus pajak untuk menggali potensi penerimaan pajak yang lebih besar lagi.

Registrasi Ulang PKP

Tahapan awal dari perbaikan sistem PPN adalah Ditjen Pajak melaksanakan registrasi ulang pada Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dimulai sejak Februari sampai dengan 31 Agustus 2012. Ditjen Pajak merencanakan akan mencatat sekitar 300.000 PKP yang berpotensi menyelamatkan faktur pajak. Selama ini status PKP rawan disalahgunakan oleh pengusaha dengan menerbitkan faktur pajak fiktif. Dengan langkah ini diharapkan dapat mencegah kebocoran penerimaan PPN.

Sensus Pajak Nasional

Sensus Pajak Nasional adalah proses pengumpulan data Wajib Pajak untuk penggalan potensi perpajakan. SPN dilaksanakan karena sampai saat ini masih sangat banyak orang pribadi dan perusahaan di Indonesia yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sensus pajak akan meneliti para Wajib Pajak atau objek pajak yang berada di sektor bisnis, *high rise building*, perumahan dan ditambah dengan objek pajak potensial. Tahun 2012, SPN dilaksanakan mulai 1 Mei 2012 hingga 31 Oktober 2012. Ditjen Pajak menargetkan 2 juta Wajib Pajak bisa terdata dalam sensus pajak tahun ini atau meningkat dari target 2011 yaitu sebesar 500 ribu Wajib Pajak.

Kebijakan Lainnya

Selain kebijakan-kebijakan perpajakan yang ditujukan untuk mendorong penerimaan pajak, Pemerintah juga membuat kebijakan-kebijakan perpajakan yang memberikan keringanan perpajakan bagi masyarakat. Kebijakan itu antara lain rencana kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), penetapan sumbangan umat Hindu sebagai pengurang pajak, dan pembabasan PPN untuk rumah murah.

Pemerintah di tahun 2012 merencanakan kenaikan PTKP dari Rp 15,6 juta menjadi Rp 24 juta per tahun. Dengan kata lain, masyarakat berpenghasilan hingga Rp 24 juta per bulan tidak akan dipungut pajak. Kenaikan PTKP ini diharapkan akan membantu meringankan beban masyarakat yang berpenghasilan rendah. Kenaikan PTKP juga diharapkan dalam jangka panjang akan meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini karena peningkatan PTKP itu akan memberikan insentif bagi masyarakat kecil, baik untuk pengembangan usaha baru, maupun ke arah konsumsi.

Pada bulan Juni 2012, Pemerintah telah menetapkan sumbangan wajib umat Hindu yang diseimbangkan lewat Badan Dharma Dharma Nasional Yayasan Adikara Dharmas Parisari (BDDN YADP) capai: dikurangkan dari penghasilan bruto. Dengan begitu, sumbangan tersebut dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Sebelumnya pada tahun 2011 Pemerintah juga telah menetapkan 20 Badan/Lembaga penerima zakat dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Pemerintah juga merencanakan pembabasan pengenaan PPN untuk rumah murah senilai Rp 90 juta sampai Rp 145 juta. Untuk harga rumah Rp 90 juta berlaku untuk rumah di Jabodetabek termasuk daerah lainnya dan rumah Rp 145 juta khusus di Papua. Dengan kebijakan ini diharapkan membantu masyarakat kelas bawah yang akan membeli rumah murah.

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 *(Lanjutan)*

*Pengaruh
Perubahan
Perkonomian
Global terhadap
kondisi
perekonomian
Indonesia*

PEREKONOMIAN INDONESIA

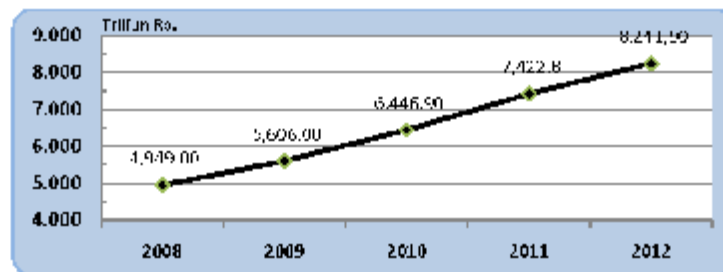
Di tengah kondisi perlambatan perekonomian dunia, ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2012 tumbuh cukup baik sebesar 6,23 persen meskipun lebih rendah dibanding tahun sebelumnya sebesar 6,44 persen. Daya tahan perekonomian ini didukung oleh stabilitas makro dan sistem keuangan yang mampu memperkuat basis permintaan domestik. Dari sisi penggunaan, pertumbuhan ini didukung oleh tingginya konsumsi rumah tangga yang kuat dan investasi yang meningkat. Peningkatan ini mampu meredakan dampak menurunnya pertumbuhan ekspor di tahun 2012. Pertumbuhan komparasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), mengalami peningkatan sebesar 9,81 persen dan pertumbuhan konsumsi rumah tangga meningkat sebesar 5,26 persen, lebih tinggi dibanding dengan tahun sebelumnya. Faktor-faktor yang mendukung tingginya konsumsi rumah tangga tersebut antara lain meningkatnya jumlah kelas menengah, menguatnya keyakinan konsumen, membaiknya daya beli masyarakat, rancaknya inflasi dan tersedianya pembiayaan konsumsi. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga didukung keyakinan konsumen yang cukup tinggi sebagaimana tercermin dari Indeks Tendensi Konsumen (ITK) nasional tahun 2012 yang mencapai rata-rata di atas 100 yang artinya kondisi ekonomi konsumen meningkat dari periode sebelumnya. Membaiknya ekonomi konsumen didorong oleh peningkatan pencapaian, rendahnya pengaruh inflasi terhadap konsumsi makanan sehari-hari, dan peningkatan konsumsi beberapa komoditi makanan dan bukan makanan. Kinerja investasi pada tahun 2012 mencapai 10,7 persen meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja investasi disebabkan antara lain adanya optimisme pelaku usaha terhadap perekonomian Indonesia, perbaikan iklim investasi, serta terjadinya kestabilan makro ekonomi. Dari sisi produksi pertumbuhan ekonomi terutama ditopang oleh kinerja sektor Industri Pengolahan, sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran, serta sektor Pengangkutan dan Komunikasi.

*Produk Domestik
Bruto*

Jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara, atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dinyatakan dalam Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Sesuai dengan pendekatan produksi, penghitungan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan tersebut dikelompokkan ke dalam sembilan lapangan usaha/ sektor. Dari pendekatan pendapatan, PDB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi, berupa upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan dari pendekatan pengeluaran, PDB adalah gabungan dari jumlah pengeluaran konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori, dan ekspor neto. PDB atas harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku setiap tahun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. Kedua jenis PDB ini menjadi indikator yang digunakan untuk melihat bergesernya dan struktur ekonomi (PDB atas dasar harga berlaku) dan mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun (PDB atas dasar harga konstan).

PDB atas dasar harga berlaku selama tahun 2012 mencapai Rp8.241,9 triliun, naik sebesar Rp819,1 triliun dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2011 sebesar Rp7.422,8 triliun. Peningkatan terjadi di semua sektor ekonomi. Pertumbuhan tertinggi terjadi di sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 9,9% persen. Sedangkan PDB atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2012 mencapai Rp2.618,1 triliun, naik Rp183,4 triliun dibandingkan tahun 2011 sebesar Rp2.434,7 triliun.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 *(revisi)*

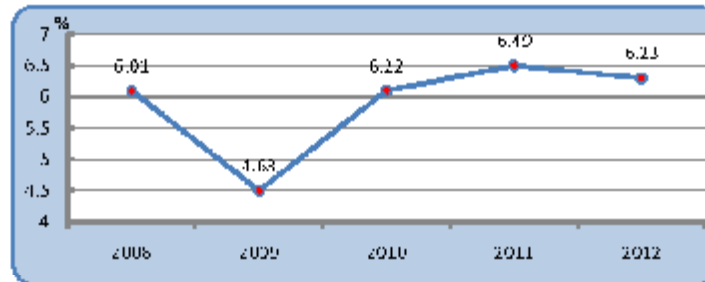


Sumber : Badan Pusat Statistik

Grafik 1 Tren Nilai Rupiah Harga Berlaku Tahun 2008-2012 (Rp triliun)

Tren pertumbuhan ekonomi tahun 2008-2012

Lima tahun terakhir (tahun 2008-2012) pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai rata-rata sebesar 5,9 persen. Pada tahun 2008 perekonomian domestik tumbuh sebesar 6,01 persen, selanjutnya melambat pada posisi 4,63 persen di tahun 2009. Pada tahun 2010 dan 2011 meningkat menjadi 6,22 persen dan 6,49 persen kemudian mengalami perlambatan menjadi 6,23 persen pada tahun 2012. Perlambatan perekonomian domestik ini sejalan dengan perlambatan ekonomi global.



Sumber : Badan Pusat Statistik

Grafik 2 Pertumbuhan Ekonomi Selama Tahun 2008 – 2012

Sumber-sumber pertumbuhan

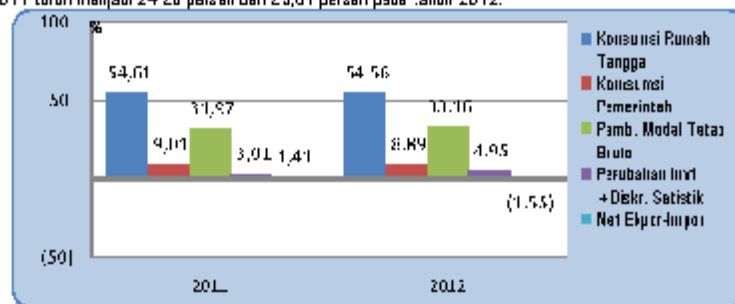
Dilihat dari sisi penggunaan atau permintaan, PDB dipengaruhi oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, investasi fisik (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori) dan Ekspor-Impor. Secara *yearly* pertumbuhan PDB pada tahun 2012 terhadap tahun 2011 didukung oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 9,81 persen, diikuti komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang tumbuh sebesar 5,28 persen, Komponen Ekspor Bersang dan Jasa 2,01 persen, dan komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang tumbuh 1,25 persen. Sementara, Komponen Impor sebagai faktor pengurang mengalami pertumbuhan 6,65 persen.

Komponen PDB berdasarkan penggunaan

Struktur PDB menurut komponen penggunaan tahun 2012 dapat dilihat pada Grafik 3. Kontribusi terbesar terhadap PDB masih berasal dari pengeluaran konsumsi rumah tangga yaitu sebesar 54,56 persen mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2011 yang mencapai 54,61 persen

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 *(Lanjutan)*

Kontribusi pengeluaran konsumsi Pemerintah turun dari semula 9,01 persen pada tahun 2011 menjadi 8,89 persen pada tahun 2012. Kontribusi PMTB pada tahun 2012 sebesar 33,16 persen, mengalami kenaikan bila dibandingkan periode yang sama tahun 2011 yang mencapai 31,97 persen. Kontribusi Perubahan Inventori dan Diskrepansi Statistik pada tahun 2012 sebesar 4,95 persen naik dari tahun 2011 sebesar 3,01 persen. Kontribusi Ekspor dan impor dari semula 26,35 persen dan 24,94 persen pada tahun 2011 turun menjadi 24,26 persen dan 25,81 persen pada tahun 2012.



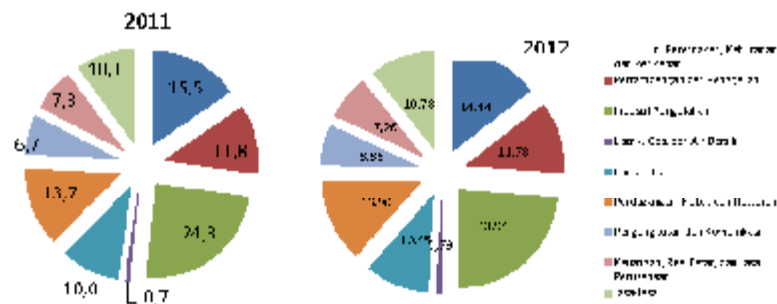
Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 3 Struktur PDB Menurut Komponen Penggunaan tahun 2012

Komponen PDB berdasarkan lapangan usaha

Komponen PCB berdasarkan lapangan usaha pada tahun 2012 antara lain adalah Sektor Industri Pengolahan yang apabila dilihat dari kontribusinya terhadap PDB sebesar 23,94 persen mengalami penurunan dari tahun 2011 sebesar 24,93 persen, tetapi secara nominal tumbuh sebesar 5,79 persen; kemudian Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan tumbuh 3,97 persen dan berkontribusi sebesar 14,44 persen mengalami penurunan dari tahun 2011 sebesar 14,70 persen, disusul oleh Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran tumbuh 8,11 persen dan berkontribusi 13,90 persen mengalami kenaikan dari tahun 2011 sebesar 13,80 persen; Sektor Pertambangan dan Pengalihan tumbuh sebesar 1,49 persen dan berkontribusi sebesar 11,78 persen mengalami penurunan dari tahun 2011 sebesar 11,85 persen; sektor Jasa-jasa tumbuh 5,24 persen dan berkontribusi sebesar 10,78 persen mengalami kenaikan dari tahun 2011 sebesar 10,56 persen; sektor Konstruksi tumbuh 7,50 persen dan berkontribusi sebesar 10,45 persen mengalami kenaikan dari tahun 2011 sebesar 10,16 persen; Sektor Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan tumbuh 7,15 persen dan berkontribusi sebesar 7,26 persen mengalami kenaikan dari tahun 2011 sebesar 7,21 persen; Sektor Pengangkutan dan Komunikasi tumbuh 9,93 persen dan berkontribusi sebesar 6,66 persen mengalami kenaikan dari tahun 2011 sebesar 6,62 persen; dan Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih tumbuh 8,40 persen dan berkontribusi sebesar 0,79 persen mengalami kenaikan dari tahun 2011 sebesar 0,77 persen. (lihat Grafik 4).

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 *(Lanjutan)*

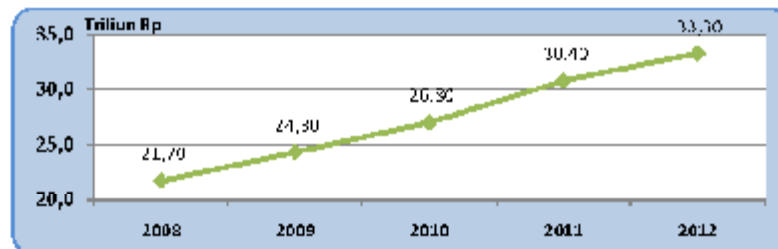


Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 4 Struktur PDB Menurut Lapangan Usaha tahun 2012 (%)

PDB perkapita tahun 2012

Seiring dengan tren peningkatan pertumbuhan PDB, maka PDB per kapita tahun 2012 juga mengalami peningkatan cukup signifikan. PDB perkapita merupakan PDB atas dasar harga berlaku dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Pada tahun 2012, nilai PDB perkapita mencapai Rp33,3 juta (USD3.562,6) dengan laju peningkatan sebesar 3,58 persen dibandingkan dengan PDB per kapita tahun 2011 yang sebesar Rp30,4 juta (USD3.498,2).



Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 5 Perkembangan PDB Per Kapita tahun 2008-2012 (Taliun Rp)

Inflasi

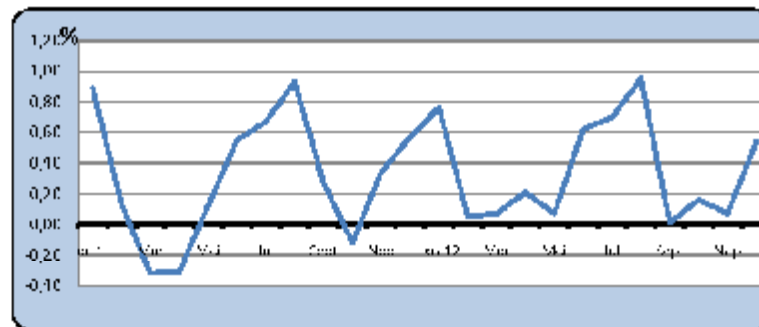
Laju inflasi tahun kalender 2012 tercatat sebesar 4,30 persen di bawah yang ditetapkan dalam APBNP sebesar 6,8 persen. Apabila dilihat dari komponen yang membantu inflasi hingga Desember 2012, inflasi komponen bergejolak *volatile food* menunjukkan peningkatan tertinggi. Pada Desember 2012, inflasi tahunan komponen *volatile foods* mencapai 5,68 persen (*yo-y*) lebih tinggi bila dibandingkan yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 3,57 persen (*yo-y*). Komponen inflasi inti berada dalam tingkat yang moderat sebesar 4,40 persen (*yo-y*) walaupun sedikit meningkat dibanding dengan tahun sebelumnya sebesar 4,31 persen (*yo-y*). Terkadang tingkat inflasi inti tersebut didukung oleh terkalanya permintaan domestik serta meningkatnya kemampuan sisi produksi dalam merespons permintaan domestik sejalan dengan tingginya pertumbuhan investasi dalam beberapa tahun terakhir.

Halat rendahnya inflasi ini juga disebabkan oleh rendahnya tingkat inflasi dari sisi impor (*imported*)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 *(continued)*

inflation) seiring dengan penurunan harga komoditas akibat perlambatan perekonomian dunia, nilai tukar yang terjaga dengan tingkat volatilitas rendah, serta kebijakan Pemerintah terkait bea masuk impor. Selain itu, percepatan pelaksanaan pembangunan sarana dan infrastruktur transportasi melalui inisiatif MP3EI diharapkan dapat memperbaiki arus distribusi dalam wilayah maupun antar wilayah. Komponen inflasi harga diatur Pemerintah (*administered prices*) mencapai 2,66 persen (*y-o-y*) relatif lebih rendah dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 2,78 persen (*y-o-y*). Relatif rendahnya inflasi komponen ini dicorong oleh relatif mirimnya perubahan kebijakan pemerintah di bidang harga, khususnya dengan diberalkannya kebijakan menaikan harga BBM bersubsidi per 1 April 2012. Berdasarkan kelompok pengeluaran, kelompok makanan, jadi, kelompok bahan makanan, dan kelompok sandang merupakan tiga kelompok utama yang mendorong kenaikan inflasi tahunan. Selama tahun 2012, kelompok makanan jadi mengalami inflasi sebesar 6,11 persen (*y-o-y*). Kelompok bahan makanan mengalami peningkatan sebesar 5,63 persen (*y-o-y*), seiring dengan kenaikan harga bahan makanan pokok di pasar domestik. Sementara itu kelompok sandang mengalami peningkatan sebesar 4,67 persen (*y-o-y*).

Sepanjang tahun 2012, inflasi tertinggi terjadi pada bulan Agustus 2012 sebesar 0,95 persen. Komoditas yang dominan menyumbang inflasi pada bulan tersebut antara lain: tarif angkutan udara, ikan segar, tarif angkutan antar kota, telur mentah, dan kelapa. Dalam rangka menjaga kestabilan harga dan inflasi, Pemerintah terus melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia melalui forum TPI dan TPID terutama pada upaya peningkatan produksi, kelancaran distribusi, dan stabilisasi harga pangan strategis. Upaya ini tercapai dari inflasi yang rendah dan stabil yang merupakan prasyarat utama bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Laju inflasi bulanan *(m-m)* selama tahun 2012 tergambar di Grafik 6.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 6 Tren Laju Inflasi Bulanan (m-m) selama Tahun 2011 - 2012

Nilai tukar Rupiah

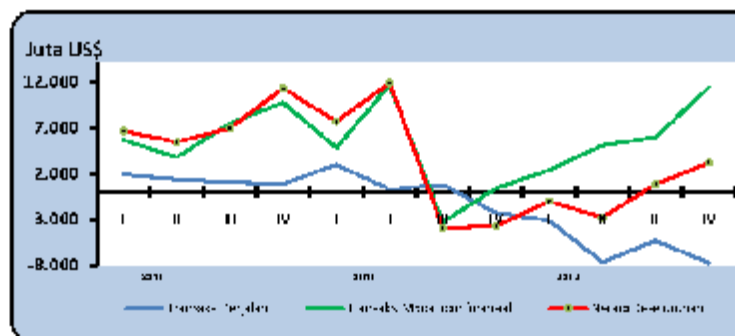
Nilai tukar Rupiah pada tahun 2012 mengalami depresiasi dengan volatilitas yang cukup rendah. Rupiah secara rata-rata terdepresiasi sebesar 6,3 persen (*y-o-y*) ke Rp9.638/USD diawali asumsi APBNP 2012 sebesar Rp9.000/USD. Sementara itu, secara *point-to-point*, rupiah melemah sebesar 5,91 persen dan ditutup pada level Rp9.670/USD dengan volatilitas yang lebih terjaga pada level 4,3 persen (*annualised*). Tekanan depresiasi rupiah selama tahun 2012 terutama disebabkan oleh ketidakpastian ekonomi global dan melebarnya defisit transaksi berjalan. Tekanan depresiasi terutama terjadi pada triwulan II dan III tahun 2012 terkait dengan memburuknya kondisi perekonomian global, khususnya di kawasan Eropa yang berdampak pada penurunan arus masuk portofolio asing ke Indonesia. Dari sisi domestik, tekanan rupiah berasal dari tingginya permintaan valas untuk keperluan impor di tengah perlambatan kinerja ekspor. Nilai tukar rupiah kembali bergerak stabil pada triwulan IV 2012 seiring dengan beningnya arus masuk modal asing yang cukup besar, baik dalam bentuk arus masuk modal portofolio maupun investasi langsung

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 *(uskred)*

Meningkatnya arus modal asing yang cukup besar tersebut didukung oleh kepercayaan investor terhadap kondisi fundamental dan prospek ekonomi Indonesia, perolehan status atau peringkat layak investasi *investment grade*, faktor risiko yang membaik, dan tingkat imbal hasil dalam aset rupiah yang masih menarik.

Neraca Pembayaran Indonesia

Pertumbuhan ekonomi dunia yang mengalami perlambatan turut mempengaruhi kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) tahun 2012. Setelah mengalami defisit pada triwulan I dan II, kinerja NPI pada triwulan III dan IV tahun 2012 mengalami surplus. Secara keseluruhan tahun 2012, NPI mencatat surplus USD0,2 miliar. Kinerja NPI tahun 2012 antara lain dipengaruhi oleh meningkatnya tekanan cari meningkatnya defisit neraca Transaksi Berjalan (TB). Defisit neraca TB tersebut sejalan dengan menurunnya ekspor sebagai akibat dari perlambatan ekonomi dunia di tengah imor yang masih tinggi akibat aktivitas ekonomi domestik yang masih kuat. Meningkatnya defisit neraca transaksi berjalan tersebut juga akibat dari melonjaknya konsumsi BBM di dalam negeri. Namun, defisit transaksi berjalan dapat diimbangi oleh surplus transaksi modal dan finansial yang meningkat dibanding tahun sebelumnya. Transaksi modal dan finansial (TMF) mencatat surplus yang cukup signifikan diopang oleh kerjakan investasi langsung (PMA), investasi portofolio, maupun penarikan utang luar negeri swasta. Meningkatnya arus modal masuk tersebut menunjukkan bahwa di tengah kondisi perekonomian global yang masih diliputi oleh ketidakpastian, keyakinan investor asing terhadap ketahanan dan prospek perekonomian Indonesia tetap tinggi.



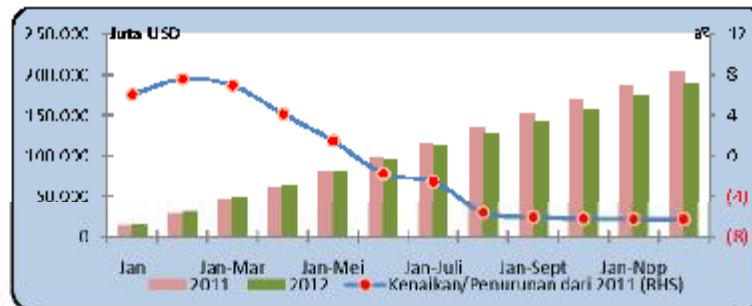
Sumber : Bank Indonesia

Grafik 7 Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) Triwulanan 2010-2012

Ekspor tahun 2012 turun

Seraca kumulatif nilai ekspor selama tahun 2012 sebesar USD190,04 miliar turun sebesar 6,61 persen dibanding tahun sebelumnya, terdiri dari ekspor non migas senilai USD150,07 miliar turun 5,92 persen dari tahun sebelumnya dan ekspor migas sebesar USD36,97 miliar turun 10,90 persen dibanding dengan tahun sebelumnya. Kinerja pertumbuhan ekspor selama tahun 2012 mengalami tren perlambatan bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebagaimana tercermin pada grafik 8. Perlambatan ini sebagai dampak melemahnya perekonomian global sepanjang tahun 2012. Perlambatan ekspor disebabkan utamanya oleh melambatnya permintaan dari negara mitra dagang utama Indonesia seperti China dan Jepang, terutama pada komoditas industri. Melambatnya ekspor juga didorong oleh tren penurunan harga komoditas terutama komoditas sumber daya alam. Dari sisi domestik, penurunan kinerja ekspor disebabkan oleh kebijakan Pemerintah untuk mengatatkan ekspor mineral mentah yang ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah produk dalam jangka menengah.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 *Revisi*



Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 8 Perkembangan Ekspor tahun 2012 (juta USD)

Tren impor tahun 2012 mengalami penurunan

Pemintaan domestik yang masih kuat menyebabkan impor masih tumbuh cukup tinggi walaupun mengalami tren penurunan di tengah melambatnya ekspor. Sepanjang tahun 2012 total impor mencapai USD191,67 miliar naik sebesar 8,02 persen dibanding dengan periode yang sama tahun sebelumnya, terdiri dari impor non migas senilai USD149,10 miliar naik 9,05 persen dari tahun sebelumnya dan impor migas sebesar USD42,56 miliar naik 4,58 persen dibanding dengan tahun sebelumnya. Sejalan dengan meningkatnya kegiatan investasi, peningkatan impor terutama terjadi di kelompok barang modal, terutama dalam bentuk mesin dan alat angkut, termasuk pesawat terbang. Sementara itu masih tingginya kegiatan produksi di dalam negeri mengakibatkan impor bahan baku juga masih tetap tinggi diantaranya adalah impor jenis golongan barang besi dan baja yang mengalami peningkatan sebesar 36,82 persen dibanding tahun sebelumnya. Tren perkembangan impor selama tahun 2012 dapat dilihat pada grafik 9.

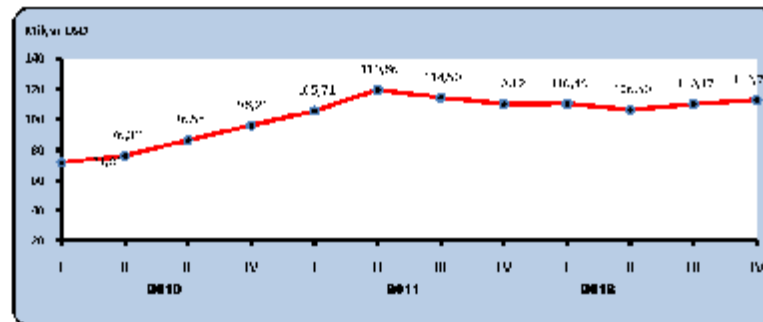


Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 9 Perkembangan Impor tahun 2012 (juta USD)

Cadangan Devisa

Derasnya arus modal asing masuk ke Indonesia baik investasi portofolio maupun FDI, telah mampu meningkatkan posisi cadangan devisa Indonesia. Cadangan Devisa sampai dengan akhir Desember 2012 mencapai USD112,78 miliar atau setara dengan 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Cadangan Devisa ini secara nominal naik dibanding dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar USD110,1 miliar.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 *(continued)*

Sumber: Data Asli/Asli

Grafik 10 Cadangan Devisa Triwulanan 2010-2012

BI Rate

Pada awal tahun 2012, BI rate ditetapkan sebesar 3,00 persen, selanjutnya mengalami penurunan di bulan Februari 2012 menjadi sebesar 5,75 persen yang tidak mengalami perubahan hingga bulan Desember 2012. Langkah ini sejalan dengan arah kebijakan moneter BI untuk membawa inflasi ke dalam rentang sasaran 4,5 persen \pm 1 persen.

Suku Bunga Surat Berharga Negara (SBN)

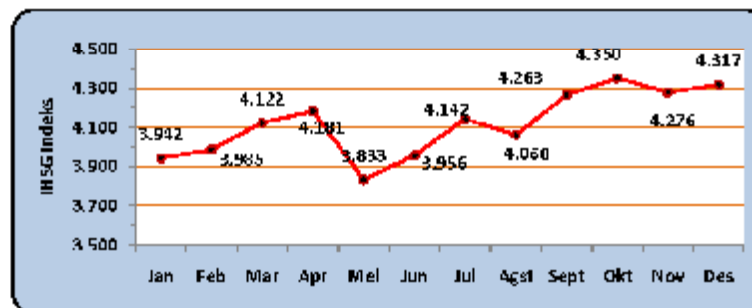
Kinerja pasar Surat Berharga Negara (SBN) tetap tumbuh positif meski pemulihan perekonomian global masih diliputi ketidakpastian. Walaupun pada awal tahun 2012 para pelaku SBN merespon positif penurunan BI rate, dalam perkembangannya selanjutnya memburulnya risiko eksternal dan domestik menyebabkan tekanan di pasar SBN meningkat pada pertengahan tahun 2012. Pada Mei 2012 imbal hasil di pasar SBN mengalami kenaikan menjadi 6,52 persen. Realisasi SBN 3 bulan seiring dengan langkah-langkah lanjutan yang dilakukan oleh pemerintah dan pencapaian peringkat layak investasi *investment grade*, bergerak imbal hasil SBN kembali meruncing dan sampai dengan akhir tahun ditutup pada level lebih rendah dibanding dengan tahun 2011. Imbal hasil SBN seluruh tenor tahun 2012 turun sebesar 72 basis poin ke level 5,16 persen dibanding tahun sebelumnya. Selama tahun 2012, investor asing mencatat aksi beli pada seluruh tenor lebih tinggi dari pada periode yang sama tahun sebelumnya. Adapun rata-rata realisasi suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan selama tahun 2012 adalah 3,19 persen. Hal ini seiring dengan fundamental ekonomi domestik yang melemah dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang stabil serta imbal hasil yang cukup menarik dibandingkan dengan negara-negara di kawasan.

IHSG

Kinerja saham domestik di tahun 2012 mencatat prestasi yang positif walaupun divalir dengan beberapa gajolak sebagai imbas dari peningkatan risiko eksternal. Dalam perkembangannya, kinerja saham sempat terimbas oleh gajolak pasar keuangan global menyusul berlarutnya penyelesaian krisis Eropa. Hal tersebut mengakibatkan selama beberapa periode kinerja pasar saham domestik mengalami penurunan. Dukungan stabilitas makro ekonomi yang cukup kondusif, kinerja emiten yang stabil serta kebijakan perekonomian yang akomodatif menjadi faktor penopang penguatan IHSG hingga kembali mencapai level tertinggi sebesar 4.375,71 pada tanggal 26 November 2012. Sampai dengan tanggal 28 Desember 2012, IHSG ditutup pada level 4.316,69 atau tumbuh sebesar 12,9 persen jika dibanding dengan tahun 2011. Cinamika yang terjadi selama tahun 2012 menunjukkan peningkatan daya tahan pasar saham domestik dalam menghadapi imbas dari ketidakpastian perekonomian global. Peningkatan daya tahan tersebut antara lain tercermin dari *market confidence* yang relatif terjaga dapat dilihat antara lain dari (i) volume perdagangan yang tidak mengalami perubahan drastis sehingga pembentukan harga terjadi secara normal, (ii) reaksi investor non residen dalam melakukan aksi jual *force sell* yang bersifat temporer dan diikuti dengan aksi pembelian kembali *buy*

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 *(continued)*

baik), (ii) kecepatan pemulihan harga saham yang lebih baik. Jika dilihat lebih jauh, relatif terjaganya *market confidence* tersebut dilandasi oleh kepercayaan pasar terhadap komitmen yang kuat dari Pemerintah dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas makro ekonomi serta prospek emiten yang cukup baik. Dukungan kedua faktor tersebut mendorong mekanisme stabilisasi oleh pelaku pasar berjalan dengan baik sehingga pemulihan kinerja pasar dapat segera terjadi.



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 11 Tren Laju IHS3 Bulanan Tahun 2012

Fungsi
informasi
peranan yang
membaur

Secara umum, selama tahun 2012 sistem keuangan dan perbankan menunjukkan kinerja yang positif dengan ketahanan yang tetap terjaga di tengah kondisi eksternal dan domestik yang masih diliputi oleh ketidakpastian. Stabilitas sistem keuangan nasional terjaga disertai dengan fungsi intermediasi yang terus meningkat dalam mendukung pembiayaan perekonomian. Kinerja intermediasi perbankan cukup dipertahankan pada tingkat pertumbuhan yang signifikan bagi perekonomian. Pertumbuhan kredit: hingga akhir Desember 2012 mencapai 23,1 persen. Tingginya pertumbuhan kredit tersebut terutama disalurkan dalam bentuk kredit investasi. Kredit investasi tercatat tumbuh paling tinggi sebesar 27,4 persen (*y-o-y*), yang diikuti dengan pertumbuhan kredit modal kerja (KMK) sebesar 23,2 persen (*y-o-y*) dan kredit konsumsi sebesar 20,0 persen (*y-o-y*). Dengan meningkatnya penyaluran kredit ke sektor-sektor produktif diharapkan dapat menambah kapasitas ekonomi ke depan. Dari sisi penghimpunan dana masyarakat, jumlah dana pihak ketiga (DPTK) pada tahun 2012 mengalami pertumbuhan sebesar 15,8 persen (*y-o-y*) atau mencapai Rp3.225 triliun. Pertumbuhan DPK yang masih kuat tersebut terutama berkontribusi oleh pertumbuhan tabungan dan deposito yang tetap stabil. Sementara itu, dari sisi permodalan, rasio kecukupan modal bank (CAR/*Capital Adequacy Ratio*) tercatat jauh di atas batas minimum 8 persen. Selama tahun 2012 kemampuan bank dalam mengelola risiko masih tetap terjaga. Di tengah penyaluran kredit yang tumbuh meningkat, risiko kredit masih terjaga, yang terlihat dari rasio kredit bermasalah (NPL/*Non Performing Loan*) Cross perbankan sebesar 1,9 persen yang merupakan rasio NPLs terendah yang pernah dialami oleh perbankan nasional.

Table 9 Perkembangan CAR, LDR, dan NPL Dukungan Tahun 2012

Indikator	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Juni	Juli	Agst	Sep	Okt	Nov	Des
LDR (%)	78,8	78,7	80,2	81,6	82,0	83,0	83,4	84,1	83,3	84,2	84,0	84,0
NPL (%)	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3	2,2	2,2	2,2	2,1	2,2	2,0	1,9
CAR	18,4	18,5	18,5	18,0	17,9	17,5	17,3	17,2	17,3	17,2	17,4	17,3

Sumber: Bank Indonesia

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

Lifting Minyak Lifting minyak mentah Indonesia selama tahun 2012 mencapai kisaran 860 ribu barel per hari yang berarti lebih rendah bila dibandingkan dengan target APBNP tahun 2012 sebesar 930 ribu barel per hari. Penurunan ini antara lain terkait dengan menurunnya kapasitas produksi dari sumur-sumur tua, faktor *operational shut down* dan hambatan non-teknis seperti permasalahan di daerah dan lain-lain.

Harga Minyak Mentah Indonesia Harga minyak mentah Indonesia sepanjang tahun 2012 mengalami fluktuasi. Selama Januari-Maret, tahun 2012 harga minyak mentah Indonesia mengalami kenaikan secara signifikan. Pada awal tahun 2012, harga ICP berada di level USD115,91 per barel yang terus meningkat hingga mencapai USD128,14 per barel pada bulan Maret 2012. Sementara pada triwulan II mengalami penurunan hingga mencapai level USD99,06 per barel pada bulan Juni 2012. Selanjutnya pada triwulan III dan IV tahun 2012 tren harga minyak mentah Indonesia mengalami kenaikan yang tertinggi pada bulan Oktober 2012 yang mencapai USD109,65 per barel. Tren kenaikan seiring dengan terbatasnya pasokan minyak mentah dunia terkait geopolitik di negara-negara teluk yang mempengaruhi pasokan minyak mentah dunia. Harga rata-rata ICP Januari 2012 sampai dengan Desember 2012 sebesar USD112,73 per barel lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2011 yaitu sebesar USD111,5 per barel.

Rasio utang terhadap PDB Utang Pemerintah diperlukan untuk membiayai defisit APBN, penyediaan arus kas jangka pendek dan *refinancing* utang lama. Pengeluaran utang pemerintah diarahkan untuk mendapatkan sumber pembiayaan dengan biaya dan risiko rendah, jangka panjang dan tidak ada ikatan politik. Meskipun secara nominal, jumlah utang mengalami peningkatan, namun rasio utang terhadap PCB cenderung menurun dan saat ini telah mencapai batas yang aman. Rasio utang Indonesia terhadap PCB tahun 2012 adalah 24,0 persen (angka sementara). Rasio ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2011 sebesar 24,4 persen. Perkembangan rasio utang terhadap PDB selama lima tahun terakhir menunjukkan tren yang membaik dan bahkan dibanding rasio-rasio yang sama di negara lain termasuk negara maju.

Tabel 4. Rasio Utang Terhadap PDB Indonesia dan Berbagai Negara IS¹

NECARA	2008	2009	2010	2011	2012
Argentina	58.6	68.7	49.2	44.8	46.2
Brazil	63.6	66.8	66.2	64.9	64.1
Germany	86.8	74.7	82.4	81.8	83.0
India	74.1	74.2	68.0	67.0	67.6
Indonesia	33.0	28.3	28.0	24.4	24.0 ¹⁾
Italy (RHS)	106.7	116.0	118.6	121.1	126.3
Japan (RHS)	181.8	210.2	216.3	228.8	238.8
Turkey	41.0	46.1	42.4	36.3	37.7
United Kingdom	52.2	86.0	75.0	81.8	86.7
United States	76.1	89.7	88.6	102.9	107.2

Sumber: BUPU Kementerian Keuangan

¹⁾ angka sementara

Kemiskinan dan Pengangguran Laju pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat memberikan banyak kesempatan kerja sehingga makin banyak keluarga Indonesia yang dapat menikmati hasil-hasil pembangunan dan keluar dari kemiskinan. Hal ini sejajar dengan tiga pilar pembangunan yaitu *pro growth, pro job, dan pro poor*. Di tahun 2012 Pemerintah terus berupaya melakukan akselerasi perekonomian melalui penciptaan lapangan pekerjaan dan program-program perbaikan kesejahteraan masyarakat. Menurut data BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2012 mencapai 26,59 juta orang (11,66 persen), berkurang 0,54 juta orang (0,50 persen) dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2011 yang sebesar 30,02 juta orang (12,49 persen). Decerata faktor terkait penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin selama periode September 2011-September 2012 adalah hal Peningkatan jumlah penerima beras murah/raskin pada

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 *(Lanjutan)*

kelompok 20 persen penduduk dengan pendapatan terendah, (b) Peningkatan jumlah penerima pelayanan kesehatan gratis pada kelompok 20 persen penduduk dengan pendapatan terendah, (c) Tingkat inflasi relatif rendah, (d) Perbaikan penghasilan petani, (e) Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih cukup tinggi. Dalam hal program pengurangan pengangguran, persentase tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Agustus 2012 mencapai 6,14 persen mengalami penurunan dibanding TPT periode yang sama tahun 2011 sebesar 6,56 persen.

REALISASI PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

*Perkembangan
Pendapatan
Negara dan Hibah*

Dalam tahun 2012 realisasi pendapatan negara dan hibah mencapai Rp 1.336,31 triliun atau 98,54 persen dari sasaran yang ditetapkan dalam APBN P 2012 sebesar Rp 1.358,21 triliun. Jumlah ini berarti mengalami kenaikan Rp 127,71 triliun (10,55 persen) dari realisasi 2011 sebesar Rp 1.210,60 triliun.

Selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2008-2012) pendapatan negara dan hibah cenderung mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 14 persen. Realisasi pendapatan negara dan hibah pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2008, yaitu sebesar 39 persen sebelum mengalami penurunan 14 persen di tahun 2009. Sedangkan pertumbuhan selama kurun waktu 2010-2012 berturut-turut sebesar 17 persen, 22 persen dan 11 persen.

Tabel 5. Perkembangan Pendapatan Negara dan Hibah tahun 2008 – 2012

(dalam triliun rp)

Urutan	2008		2009		2010		2011		2012	
	APBN	Real	APBN	Real	APBN	Real	APBN	Real	APBN	Real
Pendapatan Negara Dan Hibah	884,94	901,67	577,98	548,77	897,40	896,77	1.169,87	1.210,60	1.318,70	1.336,31
1. Penerimaan Perpajakan	808,25	858,70	651,95	618,92	743,52	723,50	878,88	873,87	1.018,23	1.060,52
a. Pajak Dalam Negeri	580,25	622,36	631,88	601,23	723,76	694,29	821,74	818,73	838,29	860,86
b. Pajak Perdagangan Internasional	28,80	36,34	20,07	18,67	22,96	29,21	46,94	54,12	47,94	49,66
2. PNBP	282,81	320,60	215,09	227,18	247,18	268,99	286,98	331,45	341,12	302,01
a. Penerimaan SDa	182,78	224,46	135,05	138,93	164,73	168,23	181,88	213,82	217,18	225,87
b. Bagian Persewaan atas Aset BUMN	31,24	29,08	28,61	28,01	29,90	30,10	28,84	28,13	30,78	30,80
c. PNBP Lainnya	58,78	63,33	44,88	53,80	43,46	59,43	50,34	69,33	72,80	73,64
d. Pendapatan BLU		3,73	5,89	8,37	3,40	10,50	15,42	20,13	20,41	21,70
3. Hibah	2,89	2,30	1,01	1,67	1,00	3,02	4,86	5,23	0,82	5,79

Sumber: Laporan Pelaksanaan Anggaran dan Keuangan

Peningkatan realisasi pendapatan negara terutama didorong oleh ciperaiahkannya pertumbuhan ekonomi nasional serta didukung oleh pelaksanaan kebijakan Pemerintah di bidang pendapatan negara. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap meningkatnya pendapatan perpajakan dalam negeri, perpajakan perdagangan internasional dan penerimaan sumber daya alam sebagai penyumbang pendapatan terbesar.

*Realisasi
penerimaan
perpajakan tahun
2012*

Di tahun 2012 perpajakan tetap menunjukkan sebagai kontributor utama realisasi pendapatan negara dan hibah. Realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp 930,52 triliun (66,45 persen dari sasaran APBN-P 2012 sebesar Rp 1.016,24 triliun), atau naik sebesar Rp 58,65 triliun (12,20 persen dari realisasi 2011 sebesar Rp 873,87 triliun). Dari sektor perpajakan semua komponen penerimaan mengalami perbaikan. PPh dan PNBP mengalami peningkatan kinerja sejalan dengan membaiknya tingkat pendapatan masyarakat. Hal ini didukung juga oleh penggalan potensi perpajakan naik melalui program interstimulasi dan eksternstimulasi. Peningkatan juga terjadi pada pajak perdagangan internasional, khususnya Bea Masuk. Adapun Bea Keluar

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 *(revised)*

mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2011. Hal ini sering dengan perlambatan ekspor akibat dari imbas perlambatan perekonomian dunia. Meningkatnya rata-rata harga minyak mentah pada tahun 2012 mendorong peningkatan pendapatan pajak penghasilan migas. Kondisi penurunan ekonomi global (*global economic slowdown*) selama tahun 2012 telah berimbas pada turunnya ekspor komoditas sektor pertambangan dan pengalihan, dan sektor industri pengolahan. Akibatnya pembayaran pajak yang berasal dari Wajib Pajak sektor ini mengalami penurunan sebesar Rp22,46 triliun pada sektor pertambangan dan pengalihan, dan sebesar Rp12,83 triliun pada sektor industri pengolahan.

Tax ratio

Tax ratio adalah salah satu indikator ketahanan fiskal suatu negara yang merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) negara tersebut. Setelah sempat mengalami penurunan pada tahun 2009, *tax ratio* Indonesia barangsung-angsur meningkat pada periode 2010-2012. Realisasi rasio penerimaan pajak terhadap PDB (*tax ratio*) tahun 2012 mencapai 12,5 persen. Persentase ini meningkat jika dibandingkan tahun 2011 sebesar 11,77 persen dan tahun 2010 sebesar 11,26 persen.

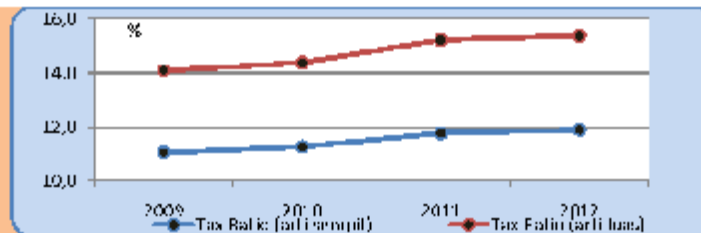
Boks.2 Tax Ratio

Rasio penerimaan perpajakan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) (*tax ratio*) Indonesia tahun 2009–2012 berkisar antara 11,0 persen–11,9 persen. Dasarinya penerimaan perpajakan dalam perhitungan *tax ratio* tersebut hanya memperhitungkan penerimaan perpajakan yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, tidak termasuk penerimaan pajak daerah dan SDA migas. Jika penerimaan pajak daerah dan SDA migas dimasukkan dalam perhitungan *tax ratio*, maka *tax ratio* Indonesia tahun 2009–2012 menjadi lebih tinggi, yaitu berkisar antara 14,1 persen–15,4 persen. Perhitungan *tax ratio* yang memasukkan penerimaan pajak daerah dan SDA migas merupakan *tax ratio* dalam arti yang lebih luas. Perkembangan *tax ratio* Indonesia tahun 2009–2012 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 6 Perkembangan *Tax Ratio* Indonesia Tahun 2009-2012

	(dalam triliun rupiah)			
	2009	2010	2011	2012
Penerimaan Perpajakan (1)	610,3	723,3	373,0	680,62
SDA Migas (2)	126,3	162,1	163,6	203,8
Penerimaan Pajak Daerah (3)	45,1	47,7	63,6	61,6
PDB (4)	5.613,4	6.422,2	7.427,1	6.241,9
<i>Tax Ratio</i> tert sempit = 1 : 4	10,9%	11,3%	11,0%	11,0%
<i>Tax Ratio</i> tert luas = 1 : 2 : 3 : 4	14,1%	14,4%	15,3%	15,4%

Sumber : Kementerian Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 *Unaudited*

Sumber: Kementerian Keuangan

Grafik 12 Perbandingan Tax Ratio Indonesia tahun 2008-2012

Tren realisasi penerimaan perpajakan selama 5 tahun terakhir

Penerimaan perpajakan merupakan sumber utama pendapatan negara. Dalam 5 tahun terakhir, penerimaan perpajakan sangat mendominasi penerimaan negara walaupun jika dilihat dari tingkat pencapaian target penerimaan perpajakan, sedikit mengalami fluktuasi. Realisasi penerimaan perpajakan pada tahun 2012 adalah sebesar Rp980,52 triliun atau meningkat sebesar 48,86 persen dari realisasi penerimaan perpajakan tahun 2008 yang sebesar Rp658,70 triliun. Pada tahun 2009 realisasi penerimaan perpajakan sebesar 95,09 persen dari APBN-P atau sebesar Rp619,92 triliun. Di tahun 2010 terjadi sedikit peningkatan realisasi penerimaan perpajakan menjadi 97,31 persen dari APBN-P atau sebesar Rp723,31 triliun, dan di tahun 2011 meningkat menjadi 99,45 persen atau sebesar Rp873,87 triliun. Pada tahun 2012 realisasi penerimaan perpajakan mengalami penurunan menjadi hanya 86,19 persen dari pagu APBN-F 2012 atau sebesar Rp840,52 triliun dan 94,96 persen dari APBN 2012. Target APBN dan APBN-P serta realisasi penerimaan perpajakan tahun 2008-2012 dapat dilihat pada grafik 13.



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Keuangan

Grafik 13 Target Dan Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun 2008-2012

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 *(unaudited)*

Penerimaan perpajakan terdiri dari penerimaan pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Realisasi penerimaan pajak dalam negeri TA 2012 adalah sebesar Rp330,54 triliun atau mencapai 93,10 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp354,59 triliun.

Penerimaan pajak dalam negeri dikelola oleh dua Satuan Kerja di Kementerian Keuangan yaitu Direktorat Jenderal Pajak yang mengelola penerimaan pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengelola penerimaan cukai.

Pada tahun 2012, realisasi netto penerimaan pajak yang berhasil dihimpun oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah sebesar Rp835,83 triliun. Realisasi tersebut hanya sebesar 94,44 persen dari target dalam APBN-P atau kurang sebesar Rp49,20 triliun. Dan apabila dibandingkan dengan APBN, maka realisasi tahun 2012 hanya mencapai 91,43 persen atau kurang sebesar Rp78,37 triliun.

Dalam 5 tahun terakhir, penerimaan pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak sangat mendominasi penerimaan negara walaupun jika dilihat dari tingkat pencapaian target penerimaan pajak, cenderung mengalami penurunan. Realisasi penerimaan pajak yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2012 adalah sebesar Rp835,83 triliun atau kurang Rp49,20 triliun dari target APBN-P sebesar Rp885,03 triliun dan kurang Rp78,37 triliun dari target APBN sebesar Rp914,20 triliun. Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2008 mencapai 106,84 persen dari target APBN-P atau melampaui Rp36,58 triliun. Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2009 mencapai 94,31 persen dari target APBN-P atau kurang sebesar Rp32,85 triliun dari target. Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2010 mencapai 94,97 persen dari target APBN-P atau kurang sebesar Rp33,27 triliun dari target. Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2011 mencapai 97,26 persen dari target APBN-P atau kurang sebesar Rp20,92 triliun dari target.

Target dan realisasi penerimaan pajak yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak tahun 2008-2012 dalam triliun rupiah dapat dilihat pada grafik 14

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 *(unaudited)*



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Keuangan

Gratik 14 Target APBN/PPBN-F Dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2008-2012

Target penerimaan pajak ditetapkan dalam APBN dan selanjutnya apabila terjadi perubahan target, ditetapkan dalam APBN-P. Selama lima tahun terakhir, perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan target APBN dan APBN-P dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7 Perbandingan realisasi penerimaan pajak dengan APBN dan APBN-P Tahun 2008 – 2012 (dalam triliun rupiah)

Tahun	Jenis Pajak	Target			Salah		
		APBN	APBN-P	Realisasi	APBN dengan APBN-P	Realisasi dengan APBN	Realisasi dengan APBN-P
2008	4 Penerimaan Pajak	261,31	272,34	270,11	108,91	111,34	111,34
	↳ Penerimaan-PPN	10,63	122,10	122,10	0,00	111,47	111,47
	↳ Pajak Penghasilan	24,11	30,30	31,91	1,20	1,00	0,00
	↳ Pajak Bumi dan Bangunan	41,55	58,85	57,93	17,00	25,37	25,37
	Jumlah	117,60	141,40	142,95	18,10	143,87	142,95
2009	4 Penerimaan Pajak	302,00	322,00	322,00	121,00	121,00	121,00
	↳ Penerimaan-PPN	31,27	31,00	31,27	0,00	0,00	0,00
	↳ Pajak Penghasilan	4,72	8,25	8,17	3,72	3,45	3,45
	↳ Pajak Bumi dan Bangunan	65,79	80,00	73,54	27,00	27,00	17,14
	Jumlah	107,85	102,75	102,75	100,27	100,55	102,75
2010	4 Penerimaan Pajak	317,95	322,95	322,95	121,00	121,00	121,00
	↳ Penerimaan-PPN	36,87	36,90	36,90	0,00	0,00	0,00
	↳ Pajak Penghasilan	31,40	31,77	31,77	11,00	11,00	11,00
	↳ Pajak Bumi dan Bangunan	49,68	63,28	54,07	20,00	19,00	8,00
	Jumlah	119,00	114,00	114,00	100,00	100,00	100,00
2011	4 Penerimaan Pajak	364,84	364,84	364,84	141,00	141,00	141,00
	↳ Penerimaan-PPN	37,22	37,22	37,22	0,00	0,00	0,00
	↳ Pajak Penghasilan	47,22	60,88	58,37	23,00	1,25	8,10
	↳ Pajak Bumi dan Bangunan	110,20	116,48	110,20	116,00	130,00	130,00
	Jumlah	170,64	170,64	170,64	170,00	170,25	170,10
2012	4 Penerimaan Pajak	414,11	414,11	414,11	151,00	151,00	151,00
	↳ Penerimaan-PPN	37,58	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00
	↳ Pajak Penghasilan	47,00	60,00	57,00	23,00	1,00	8,00
	↳ Pajak Bumi dan Bangunan	119,53	127,11	120,11	128,00	150,00	150,00
	Jumlah	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 *(continued)*

Uraian	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah	714,40	711,07	742,76	841,11	813,31	811,21
APBN	48,11	44,35	44,34	111,21	111,21	111,21
APBN-P	266,29	311,86	312,17	111,21	111,21	111,21
APBN-Non-P	200,00	355,86	386,25	619,69	590,89	588,79
Perpajakan	5,58	5,68	4,31	-	3,42	1,47
Non-Perpajakan	194,42	350,18	381,94	619,69	587,47	587,32
Jumlah	114,20	111,09	116,32	138,11	118,31	118,21
Tingkat Pelaksanaan Pajak yang Tidak Terpungkir				164,11	118,31	118,21

Perubahan target penerimaan pajak dari APBN menjadi APBN-P disebabkan antara lain karena terjadi perkembangan dan perubahan asumsi dasar ekonomi makro yang sejalan dengan kondisi perekonomian global dan domestik antara lain meliputi tingkat pertumbuhan ekonomi, rata-rata nilai tukar rupiah, tingkat inflasi, harga minyak ICP, lifting minyak, suku bunga SBI, yang disertai dengan perubahan kebijakan fiskal yang berdampak cukup signifikan sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas berbagai sasaran pendapatan negara agar menjadi lebih realistis. Perkembangan tersebut salah satunya adalah kinerja perekonomian Indonesia Tahun 2012 yang diperkirakan mengalami perlambatan dan mencapai sebesar 6,5% dari yang semula diperkirakan sebesar 6,7%.

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak pada tahun 2008 melebihi target, yaitu mencapai 106,84% dari target APBN-P. Namun tahun 2009 – 2012 realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target dan hanya berkisar 94,31% - 97,26% dari target APBN-P. Dengan demikian selama periode empat tahun terakhir (2009 – 2012) penerimaan pajak yang tidak tercapai dibandingkan dengan APBN-P sebesar Rp136,24 triliun dengan APBN sebesar Rp233,44 triliun.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan realisasi penerimaan pajak tahun 2009 – 2012 tidak mencapai target adalah belum diimplementasikannya secara efektif ketentuan yang diatur dalam Pasal 35A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2008 yang mengharuskan setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain memberikan data dan informasi perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Mengingat pentingnya data dalam rangka penggalan potensi perpajakan, maka pada acara penyediaan LHP LKPP Tahun 2010 kepada Presiden tanggal 1 Juni 2010, BPK telah mengajukan kepada pemerintah untuk segera mengimplementasikan ketentuan Pasal 35A UU KUP dengan harapan Direktorat Jenderal Pajak dapat menghimpun data perpajakan dari para pihak yang disebutkan dalam ketentuan tersebut dan menjadikannya sebagai pusat data pajak yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Selanjutnya Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan. Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan bahwa instansi pemerintah, lembaga asosiasi, dan pihak lain wajib memberikan Data dan Informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Walaupun peraturan pemerintah tersebut telah berlaku efektif pada tanggal 27 Februari 2012, namun secara teknis peraturan dimaksud baru dapat diimplementasikan setelah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur rincian jenis data, tata cara penyampaian, dan saat penyampaian data dan informasi perpajakan.

Sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Pemerintah tersebut, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 yang mulai berlaku efektif tanggal 4 Januari 2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan. Peraturan Menteri Keuangan tersebut menetapkan

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 *(revisi)*

14 insansi pemerintah, lembaga, asosiasi atau pihak lain (ILAP) yang diminta memberikan data. Selanjutnya Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2013 tanggal 11 April 2013 yang menambah lima ILAP.

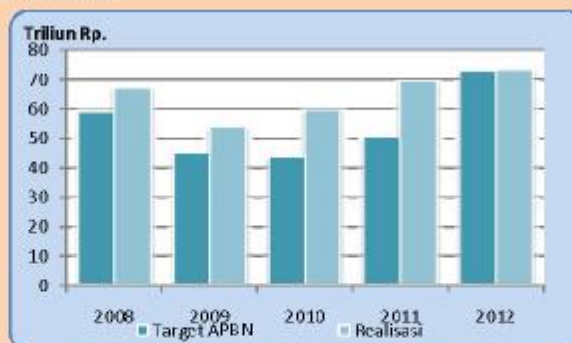
Realisasi PNBSP tahun 2012

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp352,01 triliun (103,18 persen dari sasaran APBN-P 2012 sebesar Rp341,14 triliun). Jumlah ini naik Rp20,83 triliun (6,13 persen) dari realisasi PNBP tahun 2011 sebesar Rp331,17 triliun. Realisasi PNBP dipengaruhi antara lain oleh (a) penerapan kebijakan di bidang PNBP; (b) meningkatnya ICP; dan (c) meningkatnya penerimaan dari PNBP non migas.

Nilai realisasi PNBP tahun 2012 tersebut berasal dari realisasi penerimaan SDA sebesar Rp225,87 triliun yang merupakan sumber utama penerimaan FNB, realisasi penerimaan laba BUMN senilai Rp30,80 triliun, realisasi PNBP lainnya sebesar Rp73,64 triliun dan realisasi pendapatan BLU sebesar Rp21,70 triliun. Dalam tahun 2012, Pemerintah terus melakukan berbagai langkah kebijakan untuk meningkatkan penerimaan PNBP. Untuk penerimaan SDA, upaya dari kebijakan antara lain difokuskan pada (a) pemberian fasilitas fiskal dan non-fiskal terhadap kegiatan usaha sektor hulu migas; (b) memperkuat peragih dan pengawasan penerimaan dari sektor migas; (c) meningkatkan produksi komoditas mineral dan batubara; dan (d) menggali potensi penerimaan yang ada di sektor kehutanan dengan tanpa merusak lingkungan dan mempertahankan kelestarian hutan. Untuk PNBP yang bersumber dari BUMN, langkah kebijakan dilakukan melalui pemberahan internal dalam upaya meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN), baik manajemen maupun upaya payahatan BUMN melalui Penyertaan Modal Negara (PMN). Sedangkan untuk penerimaan PNBP lainnya dan Badan Layanan Umum (BLU), upaya peningkatannya dilakukan antara lain melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, pelayanan serta penyempurnaan peraturan di bidang PNBP dan BLU.

Boks 3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya

Dilihat dari realisasinya sejak tahun 2008, secara umumnya PNBP lainnya cenderung berfluktuasi. Hal ini terlihat dari grafik 15. Terjadi peningkatan semenjak tahun 2009 mencerminkan kontribusi keberhasilan kebijakan-kebijakan Pemerintah menyangkut PNBP, juga mengindikasikan masih terdapatnya potensi PNBP lainnya yang dapat terus ditingkatkan.



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Keuangan

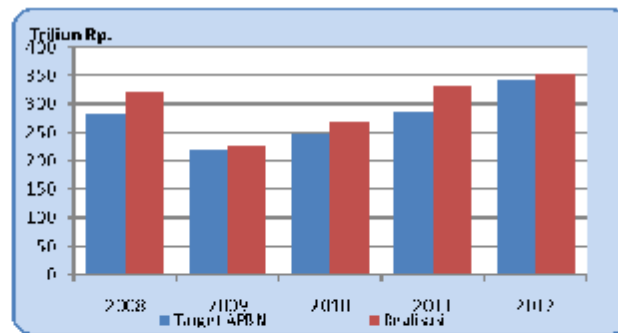
Grafik 15 Realisasi PNBP Lainnya tahun 2008-2012

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 *Unaudited*

Sumber utama PNBP lainnya berasal dari jasa pelayanan yang diberikan oleh kementerian/negara/lembaga (K/L) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing K/L. Secara garis besar, PNBP lainnya terbagi dalam beberapa jenis pendapatan, antara lain: (a) pendapatan dari pengelolaan barang milik negara (BMN) serta pendapatan dari penjualan; (b) pendapatan jasa; (c) pendapatan bunga; (d) pendapatan kajaksaan dari pengadilan; (e) pendapatan pendidikan; (f) pendapatan gratifikasi; dan uang sitaan hasil korupsi; (g) pendapatan iuran dan denda; serta (h) pendapatan lain-lain. Dalam rangka optimalisasi PNBP K/L, pada tahun 2012 telah dilakukan upaya, antara lain: (a) meningkatkan pelayanan dan memperbaiki administrasi PVBK K/L; (b) melakukan penyempurnaan beberapa peraturan terkait dengan jenis dan tarif PNBK K/L; dan (c) melakukan monitoring, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan PVBK K/L. Selama periode tahun 2008–2012, PNBK lainnya meningkat rata-rata sebesar 5,36 persen. Perkembangan PNBK lainnya selama periode 2008–2012 dapat dilihat dalam grafik 15. Pada tahun 2012, terdapat tujuh K/L yang memberikan kontribusi terbesar dalam PNBK lainnya. Ketujuh K/L tersebut adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendikbud), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Tren realisasi PNBK selama 5 tahun terakhir

Dilihat dari tingkat pencapaian target penerimaan PNBK, selama tahun 2008-2012 secara umum realisasi penerimaan PNBK melebihi target yang ditetapkan dalam APBN-P. Pada tahun 2008 realisasi penerimaan PNBK meningkat menjadi 113,36 persen dari pagu sebesar Rp320,60 triliun. Sedangkan pada tahun 2009 terjadi penurunan tingkat realisasi penerimaan PNBK menjadi sebesar 104,19 persen dari pagu sebesar Rp327,17 triliun. Kemudian pada tahun 2010 realisasi penerimaan PNBK kembali meningkat menjadi 108,80 persen dari pagu sebesar Rp268,94 triliun. Pada tahun 2011 meningkat menjadi 115,17 persen dari pagu APBN-P 2011 sebesar Rp333,47 triliun. Sedangkan tahun 2012 mencatat penerimaan PNBK sebesar Rp352,01 triliun atau 103,18 persen dari pagu APBN-P. Sebagai kontributor terbesar untuk penerimaan PNBK, SDA migas menjadi faktor penting yang menentukan naik turunnya penerimaan PNBK. Tren peningkatan SDA migas tersebut dipengaruhi oleh perkembangan beberapa faktor, seperti (a) jumlah rata-rata lifting minyak bumi harian, (b) peningkatan ICP dan (c) penguatan nilai rupiah.



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Keuangan
 Grafik 16 Target Dan Realisasi Penerimaan PNBK Tahun 2008-2012

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 *(continued)*

Realisasi Penerimaan Hibah tahun 2012

Penerimaan hibah tahun 2012 terealisasi sebesar Rp3,79 triliun yakni sebesar 701,35 persen dari target APBN-P tahun 2012 sejumlah Rp0,82 triliun. Angka realisasi tercatat naik dibandingan realisasi hibah tahun 2011 yang mencapai Rp5,23 triliun.

Faktor yang mempengaruhi realisasi penerimaan hibah antara lain komitmen akan kecadayaan negara atau lembaga donor dalam memberikan bantuan kepada Pemerintah Indonesia serta kebijakan Pemerintah untuk mempermudah lembaga donor dalam memberikan bantuan kepada Pemerintah Indonesia, yaitu bahwa hibah dapat disalurkan melalui mekanisme hibah terencana maupun hibah langsung. Selain itu, realisasi penerimaan hibah dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah dalam penerapan sistem akuntansi hibah dan mekanisme pengelolaan hibah, dalam hal ini, (1) penerima hibah diwajibkan untuk mencatatkan semua penerimaan hibah dalam APBN.

REALISASI BELANJA NEGARA

Realisasi belanja negara tahun 2012

Dalam tahun 2012, realisasi belanja negara mencapai Rp1.481,41 triliun, atau 86,33 persen dari pagu APBN-P 2012 sebesar Rp1.548,31 triliun. Jumlah tersebut naik Rp196,41 triliun atau 15,17 persen dari realisasi tahun 2011 sebesar Rp1.295,99 triliun. Target maupun realisasi belanja negara memiliki kecenderungan yang terus meningkat. Kecenderungan tersebut selain dipengaruhi oleh kondisi eksternal yang terkait dengan ekonomi makro seperti harga minyak mentah (ICP), nilai tukar Rupiah, dan perkembangan tingkat suku bunga, juga banyak ditentukan oleh kebijakan di bidang pembalasan yang diambil oleh Pemerintah. Apabila kondisi perekonomian sedang mengalami kelangkaan usaha dan perlambatan aktivitas bisnis akibat resesi, Pemerintah melakukan kebijakan yang bersifat ekspansif dengan meningkatkan volume belanja khususnya Belanja Barang dan jasa serta Belanja Modal, agar mampu berperan dalam memberikan stimulasi pada pertumbuhan ekonomi serta menjaga stabilitas dan memperkuat fundamental ekonomi makro. Sedangkan dalam kondisi ekonomi yang memanas akibat tingginya permintaan agregat, Pemerintah akan meluncurkan kebijakan kontraktif yang berfungsi untuk menyeimbangkan kondisi permintaan dan penawaran serta menurunkan perekonomian. Kebijakan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat sangat berperan dalam stabilisasi bagi perekonomian atau menjadi *counter cyclical* yang efektif dalam meredakan gejolak ekonomi.

10 K/L yang memiliki alokasi anggaran belanja terbesar dalam APBN-P tahun 2012

Dalam melaksanakan ketiga pilar pembangunan (*pro growth, pro job* dan *pro poor*) dan melaksanakan prioritas-prioritas pembangunan, anggaran dialokasikan kepada kementerian/regional lembaga. Adapun sepuluh K/L yang memperoleh alokasi anggaran terbesar adalah:

- 1). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan alokasi anggaran pada APBN 2012 sebesar Rp77,18 triliun (14,03 persen dari belanja K/L) dengan tingkat realisasi 37,56 persen atau Rp67,58 triliun.
- 2). Kementerian Pekerjaan Umum alokasi anggaran pada APBN 2012 sebesar Rp74,99 triliun (13,68 persen dari belanja K/L) dengan tingkat realisasi 90,66 persen atau Rp67,98 triliun.
- 3). Kementerian Pertahanan alokasi anggaran pada APBN 2012 sebesar Rp72,90 triliun (13,50 persen dari belanja K/L) dengan tingkat realisasi 83,94 persen atau Rp61,30 triliun.
- 4). Kepolisian Negara Republik Indonesia alokasi anggaran pada APBN 2012 sebesar Rp41,89 triliun (6,77 persen dari belanja K/L) dengan tingkat realisasi 94,32 persen atau Rp39,51 triliun.
- 5). Kementerian Agama alokasi anggaran pada APBN 2012 sebesar Rp39,37 triliun (17,67 persen dari belanja K/L) dengan tingkat realisasi 93,73 persen atau Rp36,90 triliun.

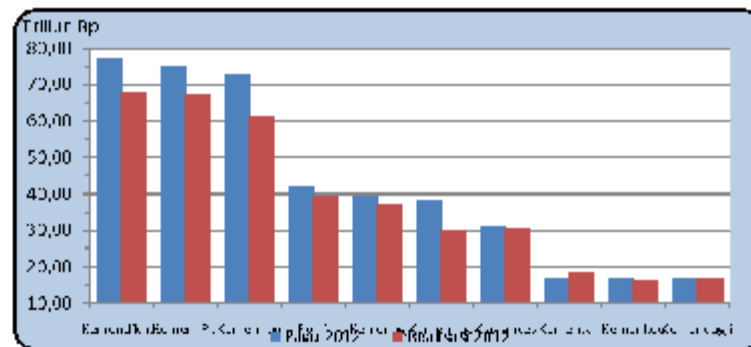
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 *(Lanjutan)*

- 6). Kementerian Perhubungan alokasi anggaran pada APBN 2012 sebesar Rp38,14 triliun (5,01 persen dari belanja K/L) dengan tingkat realisasi 77,84 persen atau Rp30,08 triliun.
- 7). Kementerian Kesehatan alokasi anggaran pada APBN 2012 sebesar Rp31,20 triliun (4,06 persen dari belanja K/L) dengan tingkat realisasi 97,88 persen atau Rp30,57 triliun.
- 8). Kementerian Pertanian alokasi anggaran pada APBN 2012 sebesar Rp17,09 triliun (2,25 persen dari belanja K/L) dengan tingkat realisasi 106,79 persen atau Rp18,25 triliun.

Terdapat penambahan pagu anggaran dan revisi setelah APDN-P pada Sekretariat Jenderal karena adanya pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian dan penambahan pagu anggaran pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan karena adanya penambahan dana kontinuitas untuk penanganan pasca panen tanaman berupa bantuan peralatan dan mesin serta tempat penyimpanannya.

- 9). Kementerian Keuangan alokasi anggaran pada APBN 2012 sebesar Rp13,81 triliun (1,81 persen dari belanja K/L) dengan tingkat realisasi 96,51 persen atau Rp13,32 triliun.
- 10). Kementerian Dalam Negeri alokasi anggaran pada APBN 2012 sebesar Rp13,72 triliun (1,80 persen dari belanja K/L) dengan tingkat realisasi 100,24 persen atau Rp13,75 triliun.

Kementerian Pendidikan Nasional tetap merupakan kementerian yang memperoleh alokasi anggaran terbesar, untuk peringkat kedua diduduki oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Grafik K/L yang menerima alokasi anggaran belanja terbesar menurut organisasi dapat dilihat pada grafik 17.



Sumber: Realisasi Anggaran Kementerian

Grafik 17 K/L Penerima Alokasi Anggaran Belanja Terbesar Tahun Anggaran 2012

Anggaran dan Realisasi belanja Pemerintah berdasarkan 11 fungsi

Menurut klasifikasi fungsi, alokasi anggaran belanja pemerintah pusat dirinci ke dalam 11 fungsi, yang pengklasifikasiannya bertujuan untuk menggambarkan tugas pemerintah dalam melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

Fungsi-fungsi tersebut mencakup: (1) pelayanan umum; (2) pertahanan; (3) ketertibatan dan keamaran; (4) ekonomi; (5) lingkungan hidup; (6) perumahan dan fasilitas umum; (7) kesehatan; (8) pariwisata dan budaya; (9) agama; (10) pendidikan; dan (11) perlindungan sosial. Alokasi anggaran belanja pemerintah pusat menurut fungsi merupakan pengelompokan belanja pemerintah pusat berdasarkan fungsi-fungsi utama pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam berbagai subfungsi, yang pada dasarnya merupakan konpilasi dari anggaran berbagai program/kegiatan di setiap kementerian negara/lembaga. Kegiatan adalah perjabaran dari program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit Eselon II/satuan kerja atau penugasan tertentu (K/L yang berisi satu

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 *(continued)*

atau beberapa komponen kegiatan untuk mencapai keluaran (*output*) dengan indikator kinerja yang terukur. Selain itu, kegiatan terdiri dari sekumpulan tindakan penerahan sumber daya, baik yang berupa sumber daya manusia (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, serta dana, atau dengan kata lain kegiatan adalah kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Satker merupakan *business unit* yang melakukan siklus anggaran dari sejak perencanaan dan penganggaran hingga pelaksanaan pertanggungjawaban dan pelaporannya. Dalam RAPBN tahun 2012, alokasi belanja pemerintah pusat berdasarkan fungsi masih didominasi oleh fungsi pelayanan umum, fungsi ekonomi dan fungsi pendidikan, yaitu sebesar 61,4 persen terhadap total belanja Pemerintah pusat, yang kemudian diikuti secara berturut-turut oleh fungsi ekonomi sebesar 11,4 persen, dan fungsi pendidikan sebesar 11,0 persen. Relatif tingginya porsi alokasi anggaran pada fungsi pelayanan umum menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pelayanan umum kepada masyarakat merupakan fungsi utama pemerintah, yang terdiri dari pemberian subsidi, pembayaran Bunga Utang, cukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, penyelenggaraan diplomasi dan kerjasama internasional, pelatihan administrasi, kependudukan, pemberdayaan masyarakat, pembangunan daerah, serta penelitian dan pengembangan iptek.

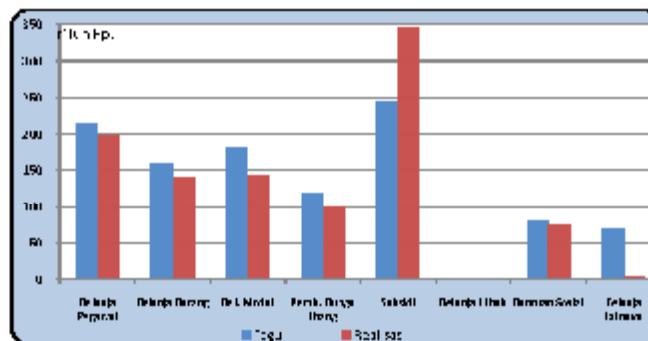
Table 8 Pagu dan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi Tahun 2012
(dalam triliun rupiah)

Fungsi	Pagu	Realisasi
Pelayanan Umum	356,82	647,68
Pertahanan	72,88	61,23
Ketertiban dan Keamanan	33,10	29,09
Ekonomi	122,21	105,37
Lingkungan Hidup	10,67	8,81
Perumahan dan Fasilitas Umum	28,46	25,44
Kesehatan	15,21	15,18
Pariwisata dan Budaya	3,11	2,52
Ayatan	3,54	3,42
Pendidikan	118,01	105,21
Perlindungan Sosial	5,53	5,08

Sumber: Realisasi Anggaran, Kemenkeu

Realisasi belanja berdasarkan karakteristik ekonomi

Realisasi belanja pemerintah pusat tahun 2012 tercatat sebesar Rp1.010,56 triliun, atau secara nominal naik sebesar Rp126,84 triliun (14,35 persen) dari realisasi 2011 sebesar Rp883,72 triliun. Realisasi tersebut menunjukkan daya serap anggaran sebesar 94,49 persen dari pagu APBN-P 2012 sebesar Rp1.069,53 triliun. Belanja Pegawai direalisasi sebesar Rp197,83 triliun (92,91 persen dari pagu) lebih tinggi dari realisasi tahun 2011 sebesar Rp. 175,74 triliun. Sedangkan realisasi Belanja Barang Rp140,88 triliun (88,04 persen dari pagu) lebih tinggi dari realisasi tahun 2011 sebesar Rp124,64 triliun. Realisasi Belanja Modal Rp145,10 triliun (79,46 persen dari pagu), lebih tinggi dari realisasi anggaran tahun 2011 sebesar Rp 117,35 triliun.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 *(uskred)*

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Keuangan
Grafik 18 Pagu dan Realisasi Belanja Tahun 2012 Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi

Sedangkan realisasi pembayaran Bunga Utang mencapai Rp130,52 triliun (85,34 persen dari pagu) lebih tinggi dari realisasi anggaran tahun 2011 sebesar Rp. 83,2E triliun. Terkait subsidi, realisasinya mencapai Rp246,42 triliun (141,35 persen dari pagu) atau naik Rp11,1 triliun dan realisasi tahun 2011 sebesar Rp235,36 triliun. Realisasi Bantuan Sosial mencapai Rp75,62 triliun (93,69 persen dari pagu). Sedangkan realisasi Belanja Lain-lain mencapai Rp4,07 triliun minus 5,64 persen terhadap pagu, lebih rendah dari realisasi anggaran tahun 2011 sebesar Rp5,47 triliun. Secara persentase, kontribusi belanja Pemerintah Pusat terbesar berdasarkan klasifikasi ekonomi selama tahun 2012 adalah realisasi belanja subsidi sebesar 34,26 persen lebih besar dibandingkan proporsi di tahun 2011 sebesar 33,42 persen diikuti oleh realisasi Belanja Pegawai sebesar 19,57 persen, diikuti dengan Belanja Modal sebesar 14,35 persen, Belanja Barang sebesar 13,96 persen. Sedangkan belanja pembayaran Bunga Utang sebesar 9,94 persen, belanja Bantuan Sosial sebesar 7,49 persen, Belanja Lain-lain sebesar 0,40 persen dan belanja hibah 0,01 persen dari total belanja.

Tren realisasi belanja berdasarkan jenis belanja

Sejak tahun 2008, realisasi anggaran belanja Pemerintah Pusat didominasi oleh belanja operasional, yakni Belanja Pegawai, Belanja Barang, subsidi, dan pembayaran bunga, rata-rata mencapai 75,63 persen dari total belanja pemerintah pusat. Belanja pemerintah pusat dalam periode 2008-2012, secara nominal menunjukkan peningkatan rata-rata 15,98 persen per tahun, yaitu dari Rp693,35 triliun dalam tahun 2008 menjadi Rp1.010,56 triliun dalam tahun 2012. Dilihat dari komposisinya secara per jenis, belanja yang mengalami peningkatan secara signifikan adalah Belanja Modal dan Belanja Barang. Belanja Modal meningkat dari 10,50 persen terhadap total belanja pemerintah pusat dalam tahun 2008, menjadi 14,24 persen terhadap total belanja pemerintah pusat dalam tahun 2012. Sedangkan, Belanja Barang mengalami peningkatan dari 8,07 persen terhadap total belanja pemerintah pusat dalam tahun 2008, menjadi 13,96 persen terhadap total belanja pemerintah pusat dalam tahun 2012.

Tabel 9 Perkembangan Komposisi Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2008-2012

(dalam triliun rupiah)

Jenis	2008		2009		2010		2011		2012	
	Rp. Triliun	%	Rp. Triliun	%	Rp. Triliun	%	Rp. Triliun	%	Rp. Triliun	%
Belanja Pegawai	693,35	100	809,61	100	937,41	100	863,71	100	1.213,62	100
Belanja Operasional	578,61	70,80	649,23	71,11	779,37	77,53	693,03	71,11	955,11	71,74

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 *(audited)*

Bel. j. P. Jasa	142.95	10.27	127.07	71.70	148.78	71.71	129.76	17.91	137.90	16.77
Bel. j. P. Lain	65.96	6.07	50.57	12.50	31.30	12.50	12.66	17.11	140.36	10.66
Perbaikan dan Pemeliharaan	84.43	12.29	72.78	14.01	84.34	14.01	67.26	1.96	1.01	6.24
Sukrel	278.70	29.70	129.09	71.76	170.77	71.76	267.09	7.47	349.46	34.66
Pranala Modal	77.77	10.60	76.92	13.72	67.23	13.72	117.65	17.34	145.10	14.06
Modal					177	177	177	177	177	177
Bel. dan P. Jasa	107.91	8.33	91.41	1.24	91.91	1.24	111.11	4.14	2.12	1.46
Keasalahteraan	3133	401	813	91	1.91	311	1.41	191	4.1	1.41

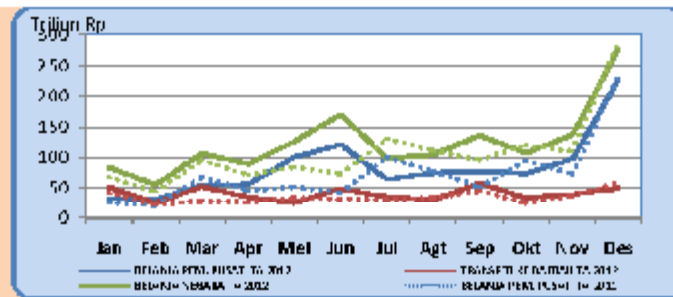
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Keuangan

Bols 4. Tren Penyerapan Anggaran Belanja TA 2012

Kecenderungan peningkatan belanja Pemerintah dari tahun ke tahun memiliki implikasi terhadap makro ekonomi yakni pada sektor riil yang berpengaruh pada konsumsi, investasi dan pada gilirannya berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini seharusnya dibarengi dengan pola penyerapan dana yang rasional terkait peran APBN sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi. Fenomena kecenderungan penyerapan anggaran terakumulasi pada akhir tahun menunjukkan kurang optimalnya pelaksanaan anggaran. Salah satu kendala yang ditengarai menjadi penyebab kurang optimalnya penyerapan anggaran belanja negara adalah kesiapan kementerian negara/lembaga dalam melaksanakan prosedur pengadaan barang dan jasa serta kesiapan dalam menyediakan berbagai dokumen pendukung, serta tingginya tingkat kehati-hatian pejabat pengadaan dalam mengambil keputusan.

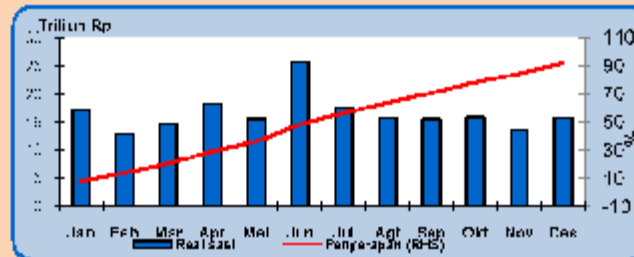
Mencermati hal tersebut Pemerintah berupaya terus memperbaiki tren pencairan dana yang antara lain dilakukan melalui percepatan proses kerja dalam area pelaksanaan anggaran serta melakukan monitoring pelaksanaan rencana kerja (K/L). Pemerintah telah membentuk Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) untuk melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan belanja di masing-masing kementerian negara/lembaga. Dengan demikian, diharapkan penyerapan dan pelaksanaan anggaran dapat lebih terarah dan tepat waktu, sehingga penyerapan anggaran dapat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Upaya memperbaiki kinerja penyerapan anggaran dan belanja Pemerintah juga sejalan dengan implementasi yang lebih baik dari penarikan Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan telah diubah dengan Perpres 55 tahun 2011 yang merupakan langkah untuk memperbaiki dan mempercepat proses pengadaan barang dan jasa oleh instansi-instansi pemerintah. Kebijakan pembentukan TEPPA dan Perpres Nomor 54 tahun 2010 tidak saja diarahkan pada Belanja Barang dan pegawai (komponen konsumsi Pemerintah) tetapi juga pada Belanja Modal dan investasi Pemerintah.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 *continued*



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan
 Grafik 19 Tren Belanja Negara Bulanan TA 2011 dan TA 2012

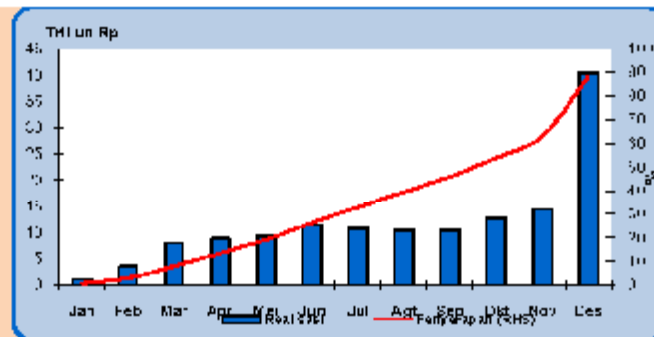
Dari grafik di atas (Grafik 19) belanja negara yang terdiri dari belanja Pemerintah Pusat dan Transfer Ke Daerah memperlihatkan pergerakan secara perlahan pada awal tahun hingga mencapai puncaknya pada bulan Juli, selanjutnya mengalami penurunan hingga bulan Agustus dan meningkat tajam kembali dari bulan November dengan nilai realisasi tertinggi pada bulan Desember sebesar Rp276,65 triliun dan rata-rata nilai serapan per bulan sebesar Rp124,15 triliun.



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan
 Grafik 20 Tren Belanja Pegawai Bulanan TA 2012

Belanja Pegawai pada tahun 2012 terealisasi sebesar Rp197,86 triliun atau 92,91 persen dari pagu APBN-P sebesar Rp212,97 triliun, secara nominal meningkat sebesar Rp22,1 triliun atau 12,59 persen bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp175,74 triliun. Dari bulan Januari sampai dengan Juni 2012 tren Belanja Pegawai berfluktuasi tipis dengan nominal yang hampir sama, dan pada bulan Juli 2012 mengalami peningkatan cukup tajam yang dipengaruhi pembayaran gaji ke-13 untuk aparatur negara dengan nilai realisasi tertinggi sebesar Rp25,62 triliun. Selanjutnya dari bulan Oktober sampai Desember tingkat serapan cenderung mendatar atau meningkat tipis. Secara umum tren ini tidak jauh berbeda dengan tren tahun sebelumnya.

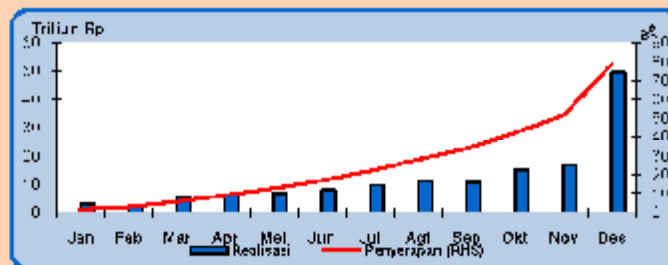
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 *Unaudited*



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan

Grafik 21 Tren Belanja Barang Bulanan TA 2012

Pagu Belanja Barang pada tahun anggaran 2012 sebesar Rp160,03 triliun atau meningkat sebesar Rp17,66 triliun atau 12,41 persen dibanding pagu tahun 2011 sebesar Rp142,34 triliun. Belanja Barang terealisasi sebesar Rp140,88 triliun atau 88,04 persen dari pagu, yang berarti mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2011 yang terealisasi sebesar Rp124,64 triliun. Adapun tren Belanja Barang pada tahun 2012 tidak banyak berbeda dengan tren tahun sebelumnya, terutama terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada akhir tahun anggaran. Secara nominal, realisasi terendah terjadi pada awal tahun anggaran (bulan Januari) sebesar Rp1,32 triliun. Selanjutnya realisasi tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar Rp40,36 triliun. Rendahnya tingkat serapan Belanja Barang ditengarsi masih terkait dengan kesibukan Kementerian/lembaga dalam melaksanakan prosedur pengadaan barang dan jasa serta tingginya tingkat kehati-hatian pejabat pengada dalam mengambil keputusan.



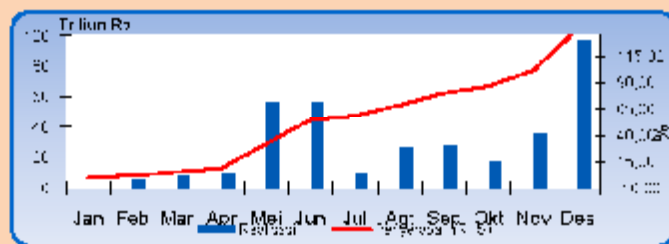
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan

Grafik 22 Tren Belanja Modal Bulanan TA 2012

Alokasi anggaran Belanja Modal pada tahun 2012 sebesar Rp182,62 triliun yang berarti naik sebesar Rp36,05 triliun atau 26,3 persen dibanding pagu tahun 2011 sebesar Rp144,6 triliun. Adapun realisasi Belanja Modal tahun 2012 sebesar Rp145,10 triliun atau 79,46 persen dari pagunya, lebih rendah dari penyerapan tahun sebelumnya sebesar 81,52 persen. Secara umum tren realisasi Belanja Modal tidak jauh berbeda dengan tren realisasi Belanja Barang yakni sepanjang tahun mengalami fluktuasi dan meningkat secara signifikan pada bulan Desember. Realisasi terendah terjadi pada bulan Januari sebesar Rp2,82 triliun dan tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar Rp49,61 triliun. Rata-rata realisasi bulanan di tahun 2012 sebesar Rp11,97 triliun, sudah jauh lebih besar dibandingkan kemampuan rata-rata penyerapan tahun sebelumnya sebesar Rp9,96 triliun. Kenaikan realisasi anggaran Belanja Modal tersebut sejalan dengan kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan pengeluaran investasi dalam rangka mendorong

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 *Unaudited*

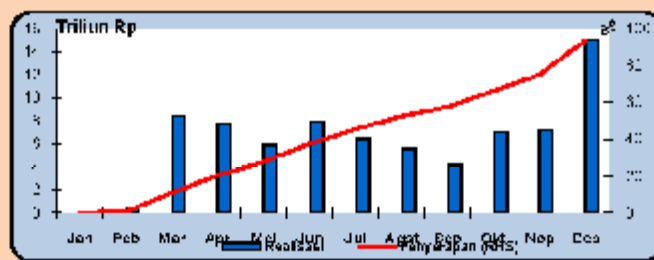
pertumbuhan ekonomi juga tumbuh dari besarnya perhatian Pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar mendorong pertumbuhan ekonomi, menekan inflasi, serta mendorong distribusi barang.



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan

Grafik 23. Tren Belanja Subsidi Bulanan TA 2012

Pagu belanja subsidi pada tahun 2012 senilai Rp245,08 triliun atau meningkat sebesar Rp6,61 triliun (2,77 persen) dibanding yang dialokasikan pada tahun 2011 sebesar Rp238,47 triliun. Realisasi belanja subsidi mencapai Rp346,42 triliun atau 141,35 persen dari yang pagu APBN-P 2012 yang berarti mengalami kenaikan realisasi sebesar Rp51,1 triliun atau 17,29 persen dibanding realisasi tahun lalu yang berada pada level Rp295,36 triliun. Adapun tren penyerapan belanja subsidi sepanjang tahun 2012 berfluktuasi. Penyerapan baru mulai terealisasi pada bulan Februari dan kemudian naik sampai bulan Juni serta meningkat secara tajam pada bulan Desember sebesar Rp98,88 triliun atau 39,45 persen dari total pagu. Penyerapan terendah terjadi pada bulan Februari sebesar Rp5,2 triliun. Secara umum, nilai serapan per bulan untuk belanja subsidi rata-rata Rp28,86 triliun.

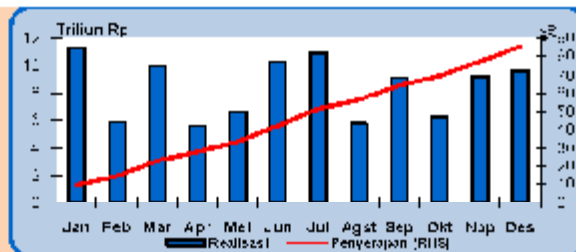


Sumber: Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan

Grafik 24. Tren Belanja Bantuan Sosial Bulanan TA 2012

Pada tahun 2012, belanja Bantuan Sosial menerima alokasi anggaran sebesar Rp60,72 triliun atau mengalami kenaikan sebesar Rp3,25 triliun atau 4,19 persen bila dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun 2011 sebesar Rp77,47 triliun. Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp75,62 triliun atau 93,39 persen dari pagu APBN-P 2012 atau mengalami kenaikan sebesar Rp4,5 triliun atau 6,56 persen dibanding realisasi tahun 2011 sebesar Rp71,10 triliun. Tren belanja Bantuan Sosial berfluktuasi sepanjang tahun 2012, dan baru ada realisasi pada bulan Februari, penyerapan terendah terjadi pada bulan Februari sebesar Rp0,40 triliun dan penyerapan tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar Rp15,05 triliun dan secara rata-rata penyerapan belanja Bantuan Sosial per bulan Rp6,30 triliun.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 *(Lanjutan)*



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan
Grafik 25 Tren Belanja Pembayaran Bunga Utang Bulanan TA 2012

Alokasi anggaran belanja pembayaran Bunga Utang pada tahun 2012 mencapai Rp117,73 triliun atau mengalami kenaikan sebesar Rp11,23 triliun atau 10,50 persen bila dibandingkan alokasi tahun lalu sebesar Rp106,50 triliun. Realisasi belanja pembayaran Bunga Utang sebesar Rp110,52 triliun atau 85,34 persen dari yang dialokasikan dalam APBN-P 2012 atau mengalami kenaikan sebesar Rp7,3 triliun atau 7,77 persen dibanding realisasi tahun 2011 yang mencapai Rp93,26 triliun. Peningkatan besaran pembayaran Bunga Utang seiring dengan peningkatan *outstanding* utang dari tahun ke tahun, dimana sebagai konsekuensinya, beban utang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Realisasi pembayaran Bunga Utang tahun 2012 berfluktuasi dengan rata-rata bulanan sebesar Rp9,36 triliun.



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan
Grafik 26 Tren Belanja Lain-lain Bulanan TA 2012

Pada tahun 2012, Belanja Lain-lain terealisasi sebesar Rp4,07 triliun atau 5,94 persen dari yang dialokasikan dalam APBN-P 2012 atau mengalami penurunan sebesar Rp1,39 triliun atau 25,47 persen dibanding realisasi tahun 2011 sebesar Rp5,47 triliun. Tren penyerapan Belanja Lain-lain sepanjang tahun 2012 berfluktuasi dan realisasi terendah terjadi pada bulan Januari sebesar Rp0,002 triliun, sedangkan realisasi tertinggi terjadi pada bulan Juni sebesar Rp2,11 triliun. Secara rata-rata penyerapan Belanja Lain-lain per bulan selama tahun 2012 adalah sebesar Rp0,34 triliun.

Kontribusi belanja Pemerintah dan Belanja Modal terhadap perekonomian

Sejalan dengan program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah sesuai dengan RPJMN tahun 2010-2014 yang menetapkan 3 (tiga) agenda yang menjadi misi pembangunan yaitu (1) melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera, (2) memperkuat pilar-pilar demokrasi, dan (3) memperkuat dimensi keadilan di semua bidang. Agenda yang diwujudkan dalam besaran dan kebijakan alokasi belanja negara memiliki peran strategis dalam mendukung percepatan pembangunan. Sejalan dengan itu, maka hal yang mau di realisasi belanja pemerintah pusat tahun 2012 diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pencapaian misi tersebut. Peran APBN dalam mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi sangat penting untuk melakukan stimulus bagi perekonomian terutama melalui belanja negara, dengan rata-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 *(uskred)*

rata kontribus 17,67 persen terhadap PDB di lima tahun terakhir. Data perkembangan realisasi belanja negara dari deresit tahun 2008 – 2012 (lihat tabel 10) menunjukkan bahwa Pemerintah telah menjalankan kebijakan fiskal yang ekspansif.

Realisasi belanja negara tahun 2008 sebesar Rp885,72 triliun atau sekitar 19,90 persen PDB. Kemudian belanja negara tahun 2009 (16,70 persen PDB) turun sebesar 4,31 persen dibanding tahun sebelumnya dan meningkat di tahun 2010 sebesar 11,17 persen (16,23 persen PDB). Di tahun 2011 realisasi belanja naik 24,27 persen menjadi Rp1.294,98 triliun (17,44 persen PDB). Selanjutnya tahun 2012 realisasi belanja negara mencapai Rp1.491,41 triliun yang terdiri dari belanja Pemerintah pusat Rp1.010,58 triliun (12,26 persen PDB), dan transfer ke daerah mencapai Rp480,65 triliun (5,63 persen PDB).

Kontribusi pos Belanja Modal dalam APBN memiliki dampak yang cukup besar terhadap sektor ini terutama melalui pembentukan modal tetap bruto (PMTB). Secara nominal, realisasi Belanja Modal tahun 2008-2012 cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun, rasio Belanja Modal terhadap PDB sempat mengalami penurunan selang kurun waktu 2009-2010, dan kembali naik di tahun 2011. Rasio realisasi Belanja Modal terhadap PDB dalam kurun waktu 2008-2012 adalah: 1,47 persen; 1,35 persen; 1,25 persen; 1,59 persen; dan 1,76 persen.

Tabel 10 Perkembangan Belanja Negara tahun 2008-2012

(dalam triliun rupiah)

Uraian	2008		2009		2010		2011		2012	
	Real	% PDB	Real	% PDB	Real	% PDB	Real	% PDB	Real	% PDB
Belanja Total	885,72	19,90	820,34	19,71	1.012,12	19,23	1.294,98	17,44	1.491,41	18,00
Belanja Ekspendit	885,72	19,90	820,34	19,71	1.012,12	19,23	1.294,98	17,44	1.491,41	18,00
Transfer ke Daerah	52,44	1,11	41,14	0,94	344,95	6,52	411,47	5,28	441,11	5,34
Suplai	1,36	0,03	1,02	0,02	1,02	0,02	1,06	0,01	1,47	0,02
Transfer	3,12	0,07	29,87	0,69	148,96	2,91	24,35	0,31	120,40	1,48
Belanja Modal	12,17	0,27	10,14	0,23	30,26	0,59	11,59	0,15	14,10	0,17
Total	1,80	0,04	10,14	0,23	175,23	3,42	6,45	0,08	15,57	0,19

Sumber: Laporan Keuangan Anggaran-Pemerintah Pusat

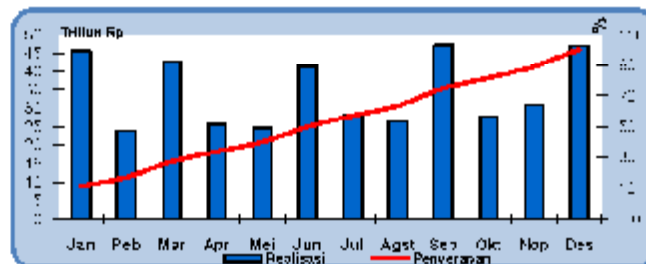
Refleksi transfer ke daerah

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, kebijakan desentralisasi fiskal telah memasuki dasawarsa yang kedua. Prinsip dan tujuan desentralisasi fiskal yang diadopsi Pemerintah antara lain untuk mengurangi *vertical dan horizontal fiscal imbalance*, meningkatkan kualitas layanan publik dan mengurangi kesenjangan layanan publik antar daerah, meningkatkan efisiensi sumber daya nasional, membangun tata kelola pelaksanaan transfer ke daerah yang tepat sasaran dan tepat waktu, serta mendukung *fiscal sustainability* dalam kebijakan ekonomi makro. Transfer ke daerah yang salah satu sumber pendanaan daerah semakin meningkat seiring dengan rakitnya pendapatan negara. Selain anggaran Transfer ke Daerah yang dialokasikan dan disalurkan ke daerah sebagai penerimaan APBD, juga terdapat beberapa jenis dana APBD yang dialokasikan melalui anggaran kementerian negara/lembaga untuk mendanai beberapa kegiatan di daerah. Dana dari kementerian negara/lembaga tersebut, antara lain berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta dalam rangka pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan dana untuk pelaksanaan berbagai jenis subsidi, yang pengelolaannya dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga terkait dan tidak menjadi bagian dari penerimaan APBD. Secara kasurutan, dana APBD yang digunakan untuk membiayai kegiatan di daerah, baik berupa Transfer ke Daerah maupun anggaran dari kementerian negara/lembaga, jumlahnya saat ini hampir mencapai 60 persen dari total belanja dalam APBD.

Realisasi Transfer ke Daerah dalam tahun 2012 mencapai Rp480,65 triliun (100,39 persen dari pagu

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 *Revisi*

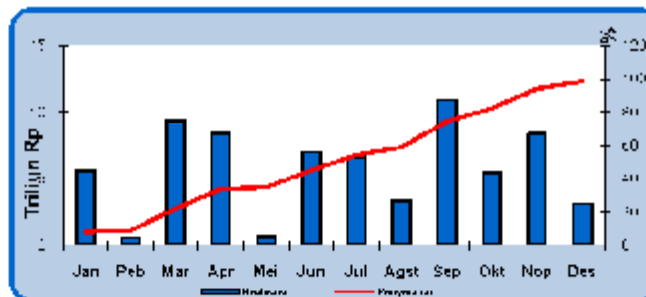
APBN-P 2012 sebesar Rp478,78 triliun, atau naik Rp69,32 triliun (16,85 persen) dari realisasi tahun 2011 sebesar Rp411,32 triliun. Realisasi transfer ke daerah tersebut terdiri dari dana perimbangan, dana otsus dan penyesuaian. Realisasi Dana Perimbangan tahun 2012 sebesar Rp411,29 triliun atau sebesar 100,72 persen dari pagu APBN-P 2012 sebesar Rp408,35 triliun. Untuk dana otsus dan penyesuaian terealisasi sebesar Rp69,35 triliun atau 98,48 persen dari pagu APBN-P 2012 sebesar Rp71,42 triliun.



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan

Grafik 27 Tren Serapan Dana Perimbangan Bulanan TA 2012

Tren serapan transfer ke daerah tersebut tidak berbeda jauh dengan tren belanja Pemerintah Pusat yakni berfluktuasi sepanjang tahun 2012. Untuk dana perimbangan, pada awal tahun terjadi penyerapan sebesar Rp45,75 triliun atau 11,2 persen terhadap total realisasi dana perimbangan, selanjutnya berfluktuasi dengan kenaikan di bulan terakhir pada masing-masing triwulan dan pada akhir tahun terjadi penyerapan tertinggi sebesar Rp48,90 triliun atau 11,40 persen dari total pagu dana perimbangan. Secara nominal, dana perimbangan terserap sebesar Rp411,29 triliun dengan rata-rata serapan per bulan sebesar Rp34,27 triliun, lebih besar dari rata-rata tahun sebelumnya sebesar Rp29,94 triliun.



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan

Grafik 28 Tren Serapan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian Bulanan TA 2012

Untuk penyerapan dana otonomi khusus dan penyesuaian, penyerapan tertinggi ada di bulan September (Rp10,69 triliun), berikutnya bulan Maret (Rp9,35 triliun) dan April (Rp8,41 triliun). Secara nominal dengan rata-rata serapan per bulan sebesar Rp5,78 triliun. Dana otonomi khusus dan penyesuaian terserap sebesar Rp69,35 triliun, lebih besar dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp64,08 triliun.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 *(Lanjutan)*

PEMBIAYAAN

Dampak kebijakan stimulus fiskal terhadap defisit APBN

Peningkatan defisit fiskal utamanya merupakan implikasi dari kebijakan stimulus fiskal dalam beberapa tahun terakhir. Defisit dan pembiayaan anggaran adalah komponen APBN yang kondisinya tidak bisa terlepas dari perkembangan faktor-faktor eksternal. Kebijakan fiskal ekspansif mendukung perekonomian negara dan memberikan stimulus fiskal bagi perekonomian nasional serta untuk meredakan dampak krisis global. Pasca krisis global yang mencapai puncaknya pada tahun 2009, fundamental perekonomian Indonesia menunjukkan perkembangan yang semakin baik yang tercermin antara lain dari pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, tingkat inflasi yang terkendali, *sovereign credit rating* yang semakin baik, cadangan devisa yang meningkat, dan nilai tukar Rupiah yang terkendali.

Penetapan kebutuhan besaran defisit APBN dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai hal, antara lain kebutuhan kegiatan prioritas yang harus dibiayai di tahun yang bersangkutan, kapasitas pembiayaan anggaran, kondisi perekonomian dan pasar keuangan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun kebijakan fiskal ekspansif memiliki kecenderungan terjadinya defisit, Pemerintah terus berupaya menjaga defisit fiskal pada tingkat yang relatif rendah. Di samping itu, upaya perhitungan besaran dan realisasi defisit ini dilakukan dengan memperhatikan kemampuan pembiayaan tanpa merusak indikator makro ekonomi seperti inflasi. Defisit yang meningkat juga disambungkan dengan kebijakan di bidang pendapatan yang mengupayakan peningkatan pendapatan negara terutama yang berasal dari dalam negeri. Realisasi defisit anggaran tahun 2012 mencapai Rp153,10 triliun atau 80,53 persen dari yang ditargetkan sebesar Rp190,10 triliun.

Sumber-sumber pembiayaan

Sumber-sumber pembiayaan terus digali untuk menutup defisit anggaran. Sumber pembiayaan itu sendiri berasal dari sumber pembiayaan utang dan non utang, serta terdiri dari pembiayaan dalam negeri dan pembiayaan luar negeri. Pemerintah mengoptimalkan dan mengefisienkan penggunaan anggaran dengan terlebih dahulu memenuhi kebutuhan pembiayaan melalui non utang. Sementara realisasi pembiayaan utang diupayakan menyesuaikan kebutuhan pembiayaan anggaran. Dalam rangka meningkatkan tingkat kemandirian, Pemerintah menekankan sumber pembiayaan dalam negeri sebagai sumber pembiayaan APBN. Hal ini mengingat risiko utang dalam negeri relatif lebih rendah apabila dibandingkan dengan utang luar negeri. Selain itu, dengan memanfaatkan sumber pembiayaan dalam negeri dapat yang beresinergi Pemerintah dapat mengembangkan pasar keuangan domestik dan meningkatkan *multiplier* perekonomian nasional. Adapun sumber pembiayaan luar negeri juga digali dengan memperhatikan dan mempertahankan penerunan rasio utang terhadap PDB secara berkeadilan (*debt sustainability*). Pada tahun 2012 sumber pembiayaan didominasi oleh sumber pembiayaan utang yang dikibatkan oleh tertatannya sumber pembiayaan non utang yang antara lain dipengaruhi oleh kebijakan penerimaan privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Untuk sumber yang berasal dari utang Pemerintah mengurukan Surat Berharga Negara (SEN) dan Surat Utang Negara (SUN) serta Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai instrumen utama. Pembiayaan non utang bersumber dari Saldo Anggaran Lebih (SAL), penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman, dan hasil pengelolaan aset (HPA). Sementara pembiayaan utang bersumber dari Surat Berharga Negara (SBN), pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri.

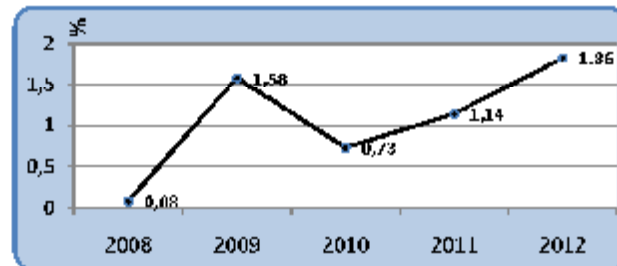
Realisasi pembiayaan APBN

Realisasi pembiayaan anggaran pada tahun 2012 mencapai Rp14,96 triliun, lebih rendah Rp15,14 triliun (7,56 persen) dari target APBN-P 2012 sebesar Rp190,11 triliun. Untuk realisasi pembiayaan dalam negeri mencapai Rp198,42 triliun lebih tinggi Rp0,89 triliun (1,59 persen) dari target APBN-P 2012 sebesar Rp194,53 triliun. Realisasi pembiayaan luar negeri mencapai negatif Rp23,46 triliun, naik Rp20,96 triliun dari target APBN-P 2011 sebesar Rp4,42 triliun.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

Rasio defisit terhadap PDB

Rasio defisit terhadap PDB merupakan salah satu indikator keselamatan fiskal. Selama tahun 2008-2012 rasio tersebut berfluktuatif dan berada di bawah level 3 persen dengan rata-rata sebesar 1,07 persen. Angka rasio defisit terhadap PDB selama periode 2008-2012 berturut-turut adalah 0,03 persen, 1,59 persen, 0,73 persen, 1,14 persen dan 1,86 persen.



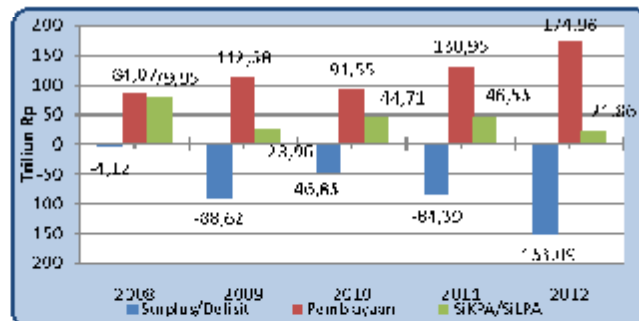
Sumber: Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan

Grifik 29 Perkembangan Rasio Realisasi Defisit Anggaran terhadap PDB tahun 2008-2012

Perkembangan surplus/defisit, pembiayaan, SIKPA/SILPA

Surplus/defisit menunjukkan perbedaan antara seluruh penerimaan anggaran dengan seluruh pengeluaran anggaran. Sedangkan SILPA (sisa lebih pembiayaan anggaran)/SIKPA (sisa kurang pembiayaan anggaran) merupakan selisih antara surplus/defisit dengan pembiayaan. Secara umum, dalam beberapa tahun terakhir realisasi anggaran Pemerintah Pusat menghasilkan SILPA. SILPA yang dihasilkan dapat digunakan untuk pengeluaran pada periode anggaran berikutnya. Perambaan SILPA tahun anggaran berjalan dengan saldo SILPA tahun sebelumnya menghasilkan Sisa Anggaran Lebih (SAL) Pemerintah.

Pada tahun 2008 realisasi APBN mengalami SILPA Rp 79,95 triliun. SILPA tersebut menjadi SAL tahun 2008 yang digunakan untuk kegiatan tahun 2009 yakni terutama terkait dengan PNPB. Pada tahun 2009, realisasi pembiayaan lebih tinggi dibanding realisasi defisit sehingga terjadi SLPA sebesar Rp29,96 triliun dan pada tahun 2010 realisasi APBN mengalami SILPA sebesar Rp44,71 triliun. Tahun 2011 jumlah SILPA berkurang menjadi Rp46,55 triliun. Sedangkan tahun 2012 jumlah SILPA menjadi Rp21,66 triliun (grafik 30). Selama tahun 2008-2012, SILPA rata-rata sebesar Rp43,40 triliun.



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan

Grifik 30 Perkembangan Surplus/Defisit, Pembiayaan serta SIKPA/SILPA Tahun 2008-2012

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 *(unaudited)*

Tabel 11 Presentase Anggaran dan Realisasi APBN Terhadap PDB Tahun 2012

(dalam triliun rupiah)

Uraian	2012			
	APBN P	persen thd PDB	Realisasi	persen thd PDB
Perencanaan anggaran dan realisasi	1.358,20	18,48	1.338,31	18,24
1. Anggaran Eksekutif	1.018,23	12,93	880,52	11,88
1.1. Anggaran Eksekutif Awal Tahun	838,29	11,75	830,88	11,28
1.2. Anggaran Eksekutif Perubahan	47,84	0,58	48,88	0,60
2. Anggaran Anggaran Belanja Pegawai	341,15	4,74	352,00	4,70
3. Anggaran Gaji	217,16	2,83	225,87	2,75
4. Anggaran Biaya Lain-Lain DUN	30,78	0,37	30,80	0,37
6. Anggaran PDR lainnya	72,80	0,88	73,63	0,89
1.1. Anggaran LRU	20,41	0,25	21,70	0,28
3. Anggaran Hibah	0,82	0,01	5,79	0,07
4. Anggaran Negara	1.548,31	18,78	1.481,17	18,08
1. Anggaran Pemerintah Pusat	1.038,54	12,80	1.010,53	12,26
1.1. Belanja Negara	212,97	2,58	197,86	2,40
1.2. Belanja Daerah	130,03	1,54	140,88	1,71
1.3. Belanja Modal	132,62	1,52	145,10	1,76
1.4. Belanja Lain-Lain Pemerintah Pusat	117,79	1,43	100,51	1,22
1.5. Belanja Hibah	215,08	2,67	308,92	3,80
1.1.1. Belanja Hibah	1,78	0,02	0,07	0,00
1.1.2. Belanja Hibah Langsung	80,72	0,88	75,82	0,82
1.1.3. Belanja Hibah Tidak Langsung	88,54	0,83	4,07	0,05
2. Transfer Daerah	478,77	5,81	480,64	5,83
1. Dana Transfer Pusat	408,32	4,96	411,29	4,99
1.1. Dana Transfer	138,42	1,32	111,54	1,35
1.2. Dana Mekanis Lain	273,81	3,32	273,81	3,32
1.3. Dana Hibah Langsung	28,12	0,32	25,84	0,31
1.4. Hibah Tidak Langsung Lainnya	70,42	0,85	88,35	0,84
1.5. Dana Hibah Lainnya	11,85	0,14	11,85	0,14
1.6. Dana Hibah Lain	58,47	0,71	57,40	0,70
Delikat Anggaran	1190,11	12,31	1153,10	11,86
Mutakhir	130,11	2,31	174,98	2,12

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 *(continued)*

Tabel 12. Perbandingan Indikator Ekonomi Tahun 2008-2012

No	Indikator	2008	2009	2010	2011	2012	Ket
1	Milai PDB Harga Konstan (Rp Triliun)	2.082,1	2.177,0	2.310,7	2.482,2	2.618,1	(1)
2	Milai PDE Harga yang Berlaku (Rp Triliun)	4.942,7	5.606,2	6.436,3	7.427,1	8.241,9	(1)
3	PDB per kapita (Rp Juta)	21,9	23,9	27,1	30,8	33,3	(1)
4	Pertumbuhan PDB (%)	6,0	4,8	6,2	6,5	6,23	(1)
5	Inflasi (%)	11,1	2,8	7,0	3,8	4,3	(1)
6	Total ekspor (USD miliar)	137,0	110,5	157,0	203,0	200,0	(1)
7	Ekspor Non Migas (USD miliar)	107,8	97,47	129,68	162,02	153,07	(1)
8	Total impor (USD miliar)	122,2	96,8	135,7	177,4	191,7	(1)
9	Impor Non Migas (USD miliar)	92,3	77,87	108,24	136,61	149,10	(1)
10	Saluran Devisa (USD Miliar akhir tahun)	51,8	88,1	99,2	110,1	112,78	(2)
11	Rupiah/USD (yoy)	10.850	10.408	9.078	9.778	9.838	(2)
12	Total Pendapatan Negara (Rp Triliun)	881,80	848,73	856,27	1.210,58	1.308,31	(4)
13	Total Belanja Negara (Rp Triliun)	885,73	937,38	1.042,12	1.294,98	1.491,41	(4)
14	Defisit Anggaran (Rp Triliun)	(4,12)	88,65	(185,85)	184,38	(153,10)	(4)
15	Uang Beredar (Rp Triliun)						
	a. Arti Sempit (M ³)	486,4	506,03	518,45	505,15	841,78	(2)
	b. Arti Luas (M ³)	1.002,8	1.065,0	2.206,02	2.408,00	3.304,04	(2)
16	Kredit Perbankan (Rp Triliun)	1.315,7	1.402,6	1.796,0	1.989,06	2.707,9	(3)
17	Suku Bunga (%) per tahun, pasai akhir tahun						
	a. Deposito 1 bulan	6,2	6,67	6,78	6,35	5,58	(3)
	b. Kredit Modal Kerja	19,2	13,69	12,83	12,16	11,49	(3)
	c. Kredit Investasi	14,4	12,93	12,28	12,04	11,27	(3)
18	Realisasi Investasi						
	a. Domestik (Rp triliun)	20,36	31,80	60,5	71	92,18	(5)
	b. Asing (USD Miliar)	14,87	10,82	18,21	19,47	24,58	(5)
19	IFSG BEJ	1.355,0	2.534,0	3.704	3.822	4.310,7	(2)
20	Harga Minyak (USD/Barrel)	88,13	81,5	79,4	111,5	112,7	(6)
21	Lifting Minyak Into Bumi (t)	931	952	964	898,1	861	(6)
22	Nasio Utang terhadap PDB (GDP, %)	30	30	20	25,4	23,1	(3)

Sumber:

- (1) Badan Pusat Statistik
- (2) Bank Indonesia
- (3) DJPU, Kementerian Keuangan
- (4) Laporan Realisasi APBN, Kementerian Keuangan
- (5) Badan Koordinasi Penanaman Modal
- (6) Kementerian ESDM

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lusdr)red

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2012 mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas Pemerintah Pusat, yang terdiri dari Bendahara Umum Negara (BUN) dan kementerian negara/lembaga (K/L) beserta jejaring struktural di bawahnya seperti eselon I, kantor wilayah, serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya termasuk satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) dan satuan kerja pengguna dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. LRPP disusun oleh Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Kementerian Negara/lembaga (K/L) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

Untuk LRPP Tahun 2012, entitas pelaporan keuangan tingkat K/L dan BUN, serta entitas akuntansi tingkat satuan kerja (satker) di bawahnya yang dicakup, meliputi:

Daftar entitas pelaporan keuangan tingkat kementerian negara/lembaga

No.	Ruang Anggaran	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah Satker	
			2012	2011
1	H5.017	Badan Penyelenggara Pemilu	2	2
2	B5.028	Layanan Peradilan Negeri	2	2
3	H5.014	Kantor Staf Menteri Keuangan	2	2
4	D4.008	Melaksanakan Tugas	1.825	1.802
5	H5.016	Keperawatan	212	212
6	D4.007	Keperawatan	12	12
7	H5.015	Keperawatan	200	200
8	B5.017	Keperawatan	120	142
9	B5.012	Keperawatan	257	256
10	D4.010	Keperawatan	225	250
11	H5.013	Keperawatan	1.251	1.057
12	B5.018	Keperawatan	1.251	2.239
13	H5.019	Keperawatan	110	119
14	D4.020	Keperawatan	30	30
15	H5.022	Keperawatan	250	800
16	B5.025	Keperawatan	250	250
17	H5.024	Keperawatan	1.251	1.245
18	B5.026	Keperawatan	515	2.957
19	D4.029	Keperawatan	120	1.000
20	D4.027	Keperawatan	272	264
21	H5.028	Keperawatan	410	410
22	B5.022	Keperawatan	241	215
23	H5.025	Keperawatan	120	112
24	D4.001	Keperawatan	2	2
25	H5.023	Keperawatan	2	2
26	D4.006	Keperawatan	2	2
27	H5.041	Keperawatan	242	210
28	B5.011	Keperawatan	2	2
29	D4.049	Keperawatan	2	2
30	D4.040	Keperawatan	2	2
31	H5.044	Keperawatan	20	36
32	B5.013	Keperawatan	12	2
33	H5.039	Keperawatan	2	2
34	B5.000	Keperawatan	2	2
35	D4.051	Keperawatan	2	2
36	D4.063	Keperawatan	2	2
37	H5.054	Keperawatan	240	494
38	B5.033	Keperawatan	2	2
39	H5.030	Keperawatan	240	494

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

No.	Bagian Anggaran	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah Seder	
			2012	2011
40	D4.787	Perpustakaan Nasional	05	05
41	H5.13	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	9	90
42	H5.14	Badan Koordinasi Keluarga Sakinah	1.26	1.38
43	B5.103	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	21	39
44	D4.784	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	-	-
45	D4.785	Badan Kerja Sama Internasional	01	09
46	H5.15	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	11	24
47	B5.107	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	-	-
48	D4.786	Badan Penyelenggara Pemilihan Umum	42	42
49	B5.174	Kantor Nasional Hak Asasi Manusia	-	-
50	D4.788	Badan Penyelenggara Pemilihan Umum	10	160
51	H5.16	Kantor Nasional Anti-Korupsi	2	101
52	H5.17	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	-	-
53	B5.138	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Korporeasi	-	-
54	D4.796	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	50	50
55	H5.181	Kantor Nasional Pelayanan Konsumen	-	-
56	H5.19	Badan Penyelenggara Pemilihan Umum	11	19
57	B5.183	Lembaga Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	21	19
58	D4.780	Badan Penyelenggara Pemilihan Umum	-	-
59	B5.184	Badan Penyelenggara Pemilihan Umum	-	-
60	D4.789	Badan Penyelenggara Pemilihan Umum	-	-
61	H5.181	Kantor Nasional Pelayanan Konsumen	-	-
62	H5.18	Lembaga Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	11	13
63	D4.787	Badan Penyelenggara Pemilihan Umum	01	01
64	B5.188	Badan Penyelenggara Pemilihan Umum	11	19
64	D4.799	Badan Penyelenggara Pemilihan Umum	01	01
65	H5.191	Kantor Nasional Pelayanan Konsumen	14	81
66	H5.19	Kantor Nasional Pelayanan Konsumen	49	42
67	B5.183	Kantor Nasional Pelayanan Konsumen	31	31
68	D4.780	Badan Penyelenggara Pemilihan Umum	-	-
68	B5.180	Badan Penyelenggara Pemilihan Umum	1	1
70	D4.100	Kantor Nasional Pelayanan Konsumen	-	-
71	H5.183	Kantor Nasional Pelayanan Konsumen	-	-
72	H5.184	Badan Penyelenggara Pemilihan Umum	4	24
73	H5.181	Kantor Nasional Pelayanan Konsumen	-	-
74	D4.100	Lembaga Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	-	-
75	B5.107	Badan Penyelenggara Pemilihan Umum	21	25
76	D4.100	Kantor Nasional Pelayanan Konsumen	-	-
77	H5.183	Kantor Nasional Pelayanan Konsumen	-	-
78	B5.110	Kantor Nasional Pelayanan Konsumen	-	-
78	B5.117	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	21	31
80	D4.112	Badan Penyelenggara Pemilihan Umum	-	-
81	B5.113	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	-	-
82	D4.114	Kantor Nasional Pelayanan Konsumen	-	-
83	H5.114	Kantor Nasional Pelayanan Konsumen	-	-
84	H5.11	Lembaga Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	21	-
85	B5.117	Lembaga Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	21	-
86	D4.110	Badan Penyelenggara Pemilihan Umum	-	-
87	B5.100	Kantor Nasional Pelayanan Konsumen	-	-
	74.676.01	Perpustakaan Nasional	-	-
	46.810.01	Kantor Nasional Pelayanan Konsumen	-	-
	36.036.03	Instansi Pemerintah	3	-
	36.036.04	Instansi Pemerintah	-	-
	36.036.05	Instansi Pemerintah	-	0
	46.810.01	Kantor Nasional Pelayanan Konsumen	14	16
	74.676.09	Perpustakaan Nasional	14	169

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

34.936,90	Transaksi Khusus **)		
6.938,00	Estimasi Lain-lain		
	Jumlah Sadia	24.899	25.148

*) Bagian Anggaran tersebut baru terbentuk sejak tahun anggaran 2012

**) BA tersebut merupakan entitas pelaporan, dan laporan keuangan BA tersebut dikonsolidasikan menjadi LK BUN.

LKPP Tahun 2012 ini mencakup transaksi-transaksi sebagai berikut:

- transaksi keuangan yang berasal dari APBN, termasuk dana APBN yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, yaitu dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan;
- transaksi keuangan terbatas dari unit-unit fiskal register yang tidak menggunakan dana APBN, namun mengelola aset Pemerintah, yaitu Unit Badan Lainnya nonsatuan kerja.

LKPP Tahun 2012 ini tidak mencakup entitas:

- Pemerintahan Daerah;
- Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- Badan Hukum Milik Negara (BHMN); dan
- Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

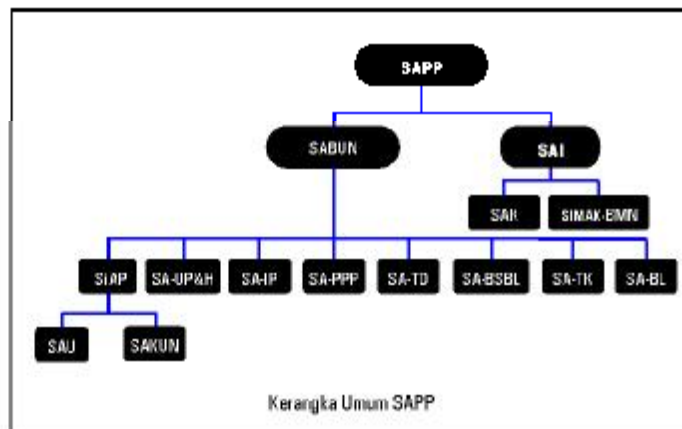
Namun, penyertaan modal (investasi) Pemerintah pada perusahaan negara (BUMN dan Non BUMN), dan BHMN, nilainya disajikan sebagai investasi Pemerintah dan dijabarkan dalam Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara/Badan Lainnya.

Sesuai dengan PMK Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 233/PMK.05/2011, LKPP dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SAI diselenggarakan oleh K/L secara berjenjang mulai dari tingkat satker (Kuasa Pengguna Anggaran) sampai tingkat K/L (Pengguna Anggaran), untuk menghasilkan laporan realisasi anggaran dan neraca. SAI terdiri dari dua subsistem, yaitu Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAK diselenggarakan untuk membukukan transaksi anggaran (Daftar Kiri Pelaksanaan Anggaran), pencapaian, belanja, serta data neraca, sedangkan SIMAK-BMN diselenggarakan untuk membukukan data barang milik negara dalam rangka menghasilkan neraca.

Mantri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) menyelenggarakan Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) untuk menghasilkan Laporan Keuangan BUN. SA-BUN terdiri dari beberapa sub sistem, yaitu Sistem Akuntansi Pusat (SIAP), Sistem Akuntansi Utang Pemerintah dan Hibah (SA-UPBH), Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah (SA-IP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Penerusan Pinjaman (SA-PPP), Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah (SA-TD), Sistem Akuntansi Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (SA-BSBL), Sistem Akuntansi Transaksi Khusus (SA-TK), dan Sistem Akuntansi Dandan Lainnya (SA-DL). SIAP terdiri dari dua subsistem, yaitu Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SA-KUN) dan Sistem Akuntansi Umum (SAU). SA-KUN diselenggarakan untuk menghasilkan Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat, sedangkan SAU diselenggarakan untuk membukukan data yang akan direkonsiliasi dengan data yang dibukukan SAI.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 *(Lanjutan)*

Kerangka Umum SAPP dan alur penyusunan LKPP adalah sebagaimana disajikan pada diagram di bawah ini.



Alur Penyusunan LKPP

SAPP dirancang untuk menghasilkan LKPP yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Laporan Realisasi APBN disusun berdasarkan kompilasi Laporan Realisasi Anggaran seluruh entitas pelaporan K/L dan entitas pelaporan BUN. Laporan Realisasi APBN terdiri dari Pendapatan Negara dan Hibah, Belanja Negara, dan Pembiayaan.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

- Angka realisasi Pendapatan Negara dan Hibah yang disajikan pada Laporan Realisasi APBN TA 2012 berdasarkan data penerimaan kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN sebagai pembukuan intrakomtabel atas seluruh penerimaan uang yang riil masuk ke Kas Negara atau melalui pengesahan pendapatan. Sedangkan data realisasi Pendapatan Negara dan Hibah dari K/L berfungsi sebagai pengujian (kontrol) data BUN.
- Angka realisasi Belanja Negara yang disajikan pada Laporan Realisasi APBN TA 2012 berdasarkan kompilasi realisasi belanja negara seluruh entitas K/L, di mana pengguna anggaran bertanggung jawab penuh atas seluruh pengeluaran yang dibelanjakannya. Sedangkan data realisasi pengeluaran yang dikelola oleh BUN (data SAU) berfungsi sebagai pengujian (kontrol) data belanja K/L. Apabila terjadi perbedaan antara realisasi belanja berdasarkan data K/L dengan data BUN, perbedaan tersebut disajikan pada Laporan Realisasi APBN sebagai "Suspen."
- Angka realisasi Pembiayaan yang disajikan pada Laporan Realisasi APBN TA 2012 berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN sebagai pembukuan intrakomtabel atas seluruh penerimaan dan pengeluaran uang yang riil masuk ke atau keluar dari Kas Negara.

2. Neraca

Neraca Pemerintah Pusat disusun berdasarkan konsolidasi Neraca seluruh K/L dan Neraca LKBUN. Neraca LKBUN disusun berdasarkan konsolidasi Neraca Kas Umum Negara (KUN) dan Neraca Bagian Anggaran – Bagian Anggaran BUN termasuk Laporan Keuangan Badan Lainnya. Data mengenai Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, dan Kas pada BLU didasarkan pada Neraca K/L yang disusun melalui SAI.

3. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN. Laporan Arus Kas TA 2012 mencakup data penerimaan dan pengeluaran kas melalui rekening KPPN dan rekening BUN (rekening 502.000000980, rekening 600.502411980, rekening 600.502111980, rekening 519.000122980, rekening 519.000411980, rekening 519.000111980, rekening SAL, dan rekening Penempatan Uang Negara), termasuk transaksi pengesahan pendapatan hibah, serta pendapatan dan belanja pada BLU. Laporan Arus Kas disusun dengan menggunakan SAKUN yang merupakan subsistem dari SiAP.

4. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang analisis makro ekonomi, penjabaran penyusunan laporan keuangan, selanjutnya akuntansi, penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBN, Neraca Pemerintah Pusat, dan Laporan Arus Kas, serta informasi penting lainnya dalam rangka pengungkapan yang memadai.

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan Realisasi APBN disusun dengan menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 *(Lanjutan)*

diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN.

Penyusunan dan penyajian LKFP Tahun 2012 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Lampiran II "Pernyataan SAP (PSAP) Berbasis Kas Menuju Akrual". Dengan demikian, dalam penyusunan LKFP telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang baik di lingkungan pemerintahan.

Dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual, sebagaimana diamanatkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perberdaaraan Negara, Pemerintah telah menetapkan dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. PP tersebut mengatur SAP Berbasis Akrual dan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual. Sesuai dengan PP tersebut, Pemerintah dapat menerapkan SAP Berbasis Akrual secara bertahap dengan ketentuan penerapan sepenuhnya paling lambat tahun anggaran 2015.

Kerangka akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKFP adalah:

1) Pendapatan

Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN dan terjadinya pengesahan oleh KPPN

Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN atau pada saat terjadinya pengesahan atas pendapatan melalui dokumen pengesahan oleh KPPN. Pendapatan yang diakui pada saat pengesahan oleh KPPN antara lain Pendapatan Liah Langsung K/L dan Pendapatan BLU.

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

Pengecualian terhadap asas bruto pada penyusunan LKFP Tahun 2012 adalah untuk penerimaan minyak dan gas bumi (migas) yang ditampung dalam Rekening Minyak dan Gas Bumi (600.030411980) dan Rekening Panas Bumi (508.030084980). Hal ini dilandasi bahwa *earnings process* atas penerimaan migas dan panas bumi tersebut belum selesai, karena penerimaan migas pada rekening 600.030411980 dan penerimaan panas bumi pada rekening 508.030084980 masih harus memperhitungkan unsur-unsur kewajiban Pemerintah seperti *underlover living, Domestic Market Obligation (DMO)* (i.e. dan penggantian (*reimburse*ment) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Penerimaan migas pada rekening 600.030411980 dan penerimaan panas bumi pada rekening 508.030084980 setelah dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran kewajiban Pemerintah yang dapat diestimasi diakui sebagai "Pendapatan yang Ditaraguhkan." Selanjutnya, terhadap pengeluaran-pengeluaran kewajiban Pemerintah yang membebani rekening tersebut akan dikeluarkan terlebih dahulu, baru kemudian dialokasikan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

(2) Belanja

Belanja diakui pada saat kas keluar dari KUN dan terjadinya pengesahan oleh KPPN

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas cara lancar di am periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN atau pada saat terjadinya pengesahan atas belanja melalui dokumen pengesahan oleh KPPN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh KPPN. Belanja yang diakui pada saat pengesahan oleh KPPN antara lain Belanja yang berasal dari Pendapatan Hibah Langsung K-L dan Belanja B.U. Belanja disajikan pada muka (facel) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi.

(3) Pembiayaan

Pembiayaan diakui pada saat kas diterima/keluar dari KUN atau terjadinya pengesahan oleh BUN

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau meniadakan surplus anggaran. Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada KUN, serta pada saat terjadinya pengeluaran kas dari KUN atau terjadinya pengesahan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan oleh BUN. Penerimaan Pembiayaan yang diakui pada saat pengesahan antara lain penerimaan pinjaman luar negeri melalui mekanisme *direct payment*. Pengeluaran Pembiayaan yang diakui pada saat pengesahan antara lain pencatatan investasi peminan yang berasal dari hibah saham. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan mencukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).

Nilai pembiayaan dalam rangka penarikan pinjaman luar negeri dan pembayaran cicilan pokok atas pinjaman luar negeri yang disajikan baik pada Laporan Realisasi APBV maupun Laporan Arus Kas berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN (data Ditjen Perbendaharaan selaku Kuasa BUN). Sementara itu, saldo pinjaman/utang luar negeri yang disajikan pada Neraca LKPP berdasarkan saldo pinjaman/utang luar negeri yang disajikan pada Neraca Bagian Anggaran 999.01 (Pengadaan Utang) oleh Ditjen Pengelolaan Utang. Perbedaan data penarikan pinjaman luar negeri antara Ditjen Perbendaharaan selaku Kuasa BUN dan Ditjen Pengelolaan Utang selaku Kuasa Pengguna Anggaran dijelaskan pada CaLK.

(4) Aset

Aset terdiri dari Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang. Termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

Aset Lancar terdiri dari kas, piutang, dan persediaan

a. **Aset Lancar**

Suatu aset diklasifikasikan sebagai Aset Lancar jika berupa kas dan setara kas serta diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas dan setara kas, piutang, investasi jangka pendek, dan persediaan.

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia (BI) pada tanggal pelaporan.
- Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang persediaan (UP) yang belum disetorkan ke kas negara atau belum dipertanggungjawabkan sampai dengan tanggal pelaporan.
- Kas dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang belum disetor ke kas negara disajikan sebagai Kas di Bendahara Penerimaan. Bunga dan jasa giro atas rekening Bendahara Penerimaan disajikan sebagai bagian dari Kas di Bendahara Penerimaan.
- Kas Lainnya dan Setara Kas terdiri dari bunga dan jasa giro atas rekening Bendahara Pengeluaran, pungutan pajak, dan pengembalian belanja yang belum disetorkan ke kas negara sampai dengan tanggal pelaporan, dana lancar BLU, serta kas dari hibah langsung dan dana yang berasal dari SPM-LS Bendahara Pengeluaran yang belum dibayarkan kepada pihak ketiga.
- Kas pada BLU yang disajikan merupakan Kas pada BLU yang telah disahkan oleh KPPN maupun yang belum disahkan. Kas di BLU yang merupakan dana kelolaan yang belum digulirkan/diinvestasikan disajikan sebagai Aset Lainnya.
- Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas pada BLU didasarkan pada Neraca K/L yang disusun melalui SAI.
- Termasuk dalam klasifikasi Kas adalah Kas Dalam Transito. Kas Dalam Transito merupakan kas yang telah dipindahbukukan dari satu rekening Pemerintah (rekening asal) ke rekening Pemerintah yang lain (rekening tujuan), namun sampai dengan tanggal pelaporan, kas tersebut belum masuk ke dalam rekening tujuan.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan pengaturnya. Termasuk dalam pos Piutang adalah Piutang Pajak, Piutang Eukan Pajak, Tagihan Penjual Argeuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Uang Muka Belanja, Piutang dari Kegiatan BLU, Piutang Lain-lain, dan Piutang Penerusan Pinjaman yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. JKPP Tahun 2012 ini telah menyajikan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) atas piutang dengan memperhitungkan penyisihan atas piutang tidak tertagih yang disajikan pada pos tersendiri dalam lembar muka Neraca dan diungkapkan pada CaLK. Penyisihan piutang tidak tertagih tidak diterapkan pada Uang Muka Belanja/Belanja Dibayar di Muka.
- Termasuk dalam persediaan adalah barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai persediaan didasarkan pada perhitungan fiskal pada tanggal

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

pelaporan, kecuali untuk persediaan dalam bentuk beras.

Persediaan dicatat pada neraca berdasarkan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
- harga wajar atau estimasi nilai penjabarkannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rahasian.

b. Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi pemerintah diklasifikasikan kedalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu setahun atau kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun. Penyajian investasi pada Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2012 meliputi investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Investasi jangka pendek yang disajikan pada Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2012 adalah investasi berupa deposito berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan yang ada di BLJ.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

(i) Investasi Non Permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan negara/daerah, pemerintah daerah, dan pihak ketiga lainnya.

Investasi Non Permanen meliputi:

- Seluruh dana pemerintah yang diberikan dalam bentuk Pinjaman Dana Bergulir kepada pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), nasabah Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDK/P), nasabah Usaha Simpan Pinjam, Tempat Simpan Pinjam (USPTSP) atau nasabah BPR, kelompok petani, nelayan, dan kelompok usaha lainnya.
- Investasi Non Permanen Lainnya berupa dana pada BLJ Pusat Investasi Pemerintah (PIPI) yang telah diinvestasikan dalam bentuk pinjaman atau surat berharga.

Investasi non Permanen disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi pada Dana Kelolaan BLU yang masih berupa kas dan belum digulirkan/diinvestasikan disajikan sebagai Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan pada pos Aset Lainnya.

Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

(ii) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen dan/atau menenankan pengalihan yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kemitraan. Investasi permanen meliputi seluruh Penyertaan Modal Negara (PMN) pada perusahaan negara, lembaga internasional, dan badan usaha atau badan hukum lainnya.

- Investasi Permanen PMN terdiri dari investasi pada perusahaan negara, lembaga keuangan internasional, Badan Hukum Milik Negara (BHMN), dan badan usaha lainnya. PMN pada perusahaan negara yang sama dengan atau lebih dari 51 persen disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). PMN pada perusahaan negara yang kurang dari 51 persen (minoritas) disebut sebagai Non BUMN;
- PMN dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga (kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan);
- Aset-aset yang berstatus Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada BUMN disajikan sebagai Investasi Permanen PMN. BPYBDS merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari belanja K/L yang diserahkan kepada BUMN di masing-masing sektor. Pengalihan BMN dari K/L menjadi aset BUMN berdasarkan dokumen Berita Serah Terima Operasi (BASTO). Metode pencatatan BPYBDS masih variatif, sebagian berdasarkan BASTO dan yang lain menggunakan nilai hasil *review* Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); dan
- PMN pada lembaga keuangan internasional dicatat sebagai investasi permanen sebesar kontribusi Pemerintah yang telah dibayar tunai maupun dalam bentuk penerbitan *Promissory Notes*. Di sisi lain, *Promissory Notes* tersebut disajikan sebagai kewajiban.

Nilai PMN pada BUMN/BHMN dengan persentase kepemilikan sama dengan atau lebih dari 51 (lima puluh satu) persen serta investasi pada BI disajikan dengan menggunakan metode ekuitas *equity method*. Nilai PMN pada perusahaan minoritas (Non BUMN) dengan kepemilikan 20 (dua puluh) persen atau lebih disajikan dengan menggunakan metode ekuitas *equity method*, sedangkan kepemilikan kurang dari 20 (dua puluh) persen menggunakan metode biaya *cost method*.

Penilaian investasi jangka panjang diprioritaskan menggunakan metode ekuitas. Jika suatu investasi bisa dipastikan tidak akan diperoleh kembali atau terdapat bukti bahwa investasi hendak ditiadakan, maka digunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. Investasi dalam bentuk pemberian pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga dari *non earning asset* atau hanya sebagai bentuk partisipasi dalam suatu organisasi, seperti penyertaan pada lembaga-lembaga keuangan internasional, menggunakan metode biaya khusus untuk penyertaan pada lembaga keuangan internasional disajikan dengan menggunakan metode biaya berdasarkan hasil konfirmasi dan disesuaikan dengan kurs tengah BI pada tanggal pelaporan.

Pada LKPP Tahun 2011, Investasi Permanen PMN pada DIMICAS dicatat sebesar nilai ekuitas bersih per 31 Desember 2011. Dengan adanya Putusan Mahkamah

 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 *(Lanjutan)*

Konstitusi Nomor 96/PUU-X/2012 tanggal 19 November 2012 tentang Pembubaran BPMIGAS, maka nilai investasi permanen PMN pada BPMIGAS disajikan sebesar ekuivalensi bersih per 19 November 2012. Pendanaan BPMIGAS tanggal 19 November 2012 s.d 31 Desember 2012 diungkapkan dalam Catatan Penting Lainnya.

Aset Tetap terdiri dari Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan KDP

c. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya. Aset tetap juga mencakup biaya-biaya atas pemeliharaan aset tetap yang sampai dengan tanggal pelaporan sedang dalam proses penyelesaian dan dilaporkan sebagai Konstruksi Dalam Persewaan (KDP). KDP dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dan siap digunakan.

Aset Tetap dilaporkan berdasarkan neraca K/L per 31 Desember 2012 dengan harga perolehan. Sejak tahun 2007, Pemerintah telah melakukan penertiban Barang Milik Negara (BMN) yang meliputi inventarisasi dan penilaian kembali BMN. Penilaian kembali dilakukan untuk BMN yang diperoleh sebelum tahun 2004. Hasil inventarisasi dan penilaian kembali BMN tersebut menjadi dasar penyajian Aset Tetap pada Neraca per 31 Desember 2012.

Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2012 didasarkan pada nilai setoran minimum kapitalisasi yaitu:

- (a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan oleh negara yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp100.000,00 (satu ratus ribu rupiah); dan
- (b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang berwujud kesenian. Nilai satuan minimum kapitalisasi juga dikecualikan terhadap aset tetap yang diperoleh dari transfer/pengalihan/pertukaran.

Pengeluaran yang memenuhi batasan minimum kapitalisasi diperlakukan sebagai penambah nilai Aset Tetap.

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran II PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan (depresiasi). Namun, Pemerintah menetapkan bahwa dalam penyusunan LKPP Tahun 2012, seluruh aset tetap yang dikelola oleh K/L selaku pengguna barang belum disusutkan/didepresiasi. Hal ini disebabkan antara lain peraturan dan kebijakan penyusutan, serta umur manfaat dari masing-masing kelompok aset tetap belum ditetapkan. Penerapan penyusutan aset tetap akan dilaksanakan mulai pelaporan keuangan tahun 2013. Untuk tahun 2012, penyusutan aset tetap dilaksanakan untuk aset tetap yang menerapkan pengelolaan keuangan BLU yang telah melaksanakan sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Nilai Perolehan.

SAP telah mengatai mengasasi depresiasi. Tapi aset tetap dalam LKPP ini belum didesresiasi.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Laporan)

penyusutan, dan nilai buku atas aset tetap pada saat yang menerapkan pengelolaan keuangan BLU diungkapkan dalam CaUC.

Terhadap Aset Tetap yang penyelesaian pengerjaannya melebihi dan atau melampaui satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap untuk digunakan. Dengan demikian terhadap pengerjaan/perolehan aset tetap yang pada akhir tahun anggaran belum selesai, maka dilaporkan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan. Konstruksi Dalam Pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap untuk digunakan harus segera direklasifikasikan ke salah satu akun yang sesuai dalam pos aset tetap.

d. Piutang Jangka Panjang

Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Penerusan Pinjaman, Piutang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.
- Piutang Penerusan Pinjaman adalah aset yang dimiliki Pemerintah sehubungan dengan adanya penerusan pinjaman yang berasal pinjaman/hibah baik yang bersumber dari dalam dan/atau luar negeri, yang diberikan kepada pemda, BUMN, BUMD atau penerima lainnya yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran masuk sumber daya ekonomi Pemerintah, termasuk di dalamnya piutang sehubungan dengan pemberian pinjaman kepada BUMN, BUMD, pemda atau penerima lainnya.
- Piutang Kredit Pemerintah adalah aset yang dimiliki Pemerintah sehubungan dengan adanya pemberian kredit oleh Pemerintah kepada pemda, BUMN, BUMD, atau penerima lainnya.
- TPA, Tagihan TGR, Penerusan Pinjaman, dan Piutang Kredit Pemerintah yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lancar (Lihat Kebijakan Akuntansi pada Aset Lancar).

TPA, TGR, TPA, dan Penerusan Pinjaman yang disajikan pada LKPP Tahun 2012 ini telah memperhitungkan penyisihan piutang tidak tertagih yang disajikan pada pos tersendiri dalam lambang muka Neraca dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

Aset lainnya terdiri dari TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Piutang Jangka Panjang Lainnya, Dana yang Didisiasikan Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, Dana Perampasan, Aset KKKS, Aset Eks BPPN, Aset Lainnya dari Unit Pemerintah lainnya, dan Aset Lainnya.

e. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tidak Berwujud, Dana Perampasan, Aset KKKS, Aset Eks BPPN, Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya, dan Aset Lain-lain.

- Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Apabila kemitraan berakhir, maka aset yang menjadi hak Pemerintah akan direklasifikasi menjadi aset definitif sesuai jenisnya.
- Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu seperti yang disimpan pada rekening cadangan suksesi di PSD, rekening cadangan Dana Bagi Hasil, rekening dana rehabilitasi, Dana Abadi Umat, dana Biaya Penyelenggaraan Urus Haki, dan kas bagi perwakilan RI di luar negeri, Dana Abadi Pendidikan, serta dana lain yang sejenis.
- Aset Tidak Berwujud merupakan aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tidak Berwujud meliputi *software* komputer, lisensi dan *franchise*, hak cipta (*copyright*), paten, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang, serta hak jasa dan operasi Aset Tak Berwujud dalam pengembangan.
- Aset KKKS yang disajikan pada LKPP Tahun 2012 adalah:

- Aset KKKS yang diperoleh sampai dengan akhir tahun 2004 disajikan pada LKPP tahun 2012 sebesar nilai wajar berdasarkan hasil penilaian, sedangkan yang diperoleh tahun 2005 – 2010 disajikan berdasarkan harga perolehan, bila tidak diketahui harga perolehannya maka dapat menggunakan nilai wajar berdasarkan hasil penilaian, untuk aset KKKS yang diperoleh sejak tahun 2011 dicatat berdasarkan harga perolehan. Aset KKKS yang belum diserahkan dan belum dilakukan inventarisasi dan penilaian, serta aset KKKS yang sudah dilakukan inventarisasi dan penilaian namun belum dapat diyalini, tidak dicatat dalam neraca, namun diungkapkan dalam CaLK.

Aset KKKS yang diperoleh serta digunakan sejak tahun 2011, apabila berupa Harta Barang Modal Aset disajikan pada LKPP Tahun 2012 setelah *Placed Into Services* (PIS), dan apabila berupa tanah disajikan setelah digunakan oleh KKKS. PIS adalah koncis sebuah barang yang diadakan oleh KKKS telah siap/sudah digunakan untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

Aset KKKS yang telah diserahkan kepada Pemerintah c.q. Kementerian ESDM dan sudah dilakukan inventarisasi dan penilaian, dicatat dalam neraca sebagai aset tetap atau persediaan.

Jrntuk Aset KKKS yang masih dikuasai oleh KKKS, ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset mengikuti kebijakan akuntansi pada industri hulu minyak dan gas bumi.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 *(Lanjutan)*

- Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya merupakan kekayaan bersih (skuitas) pada Unit Badan Lainnya non satuan kerja seperti Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Badan Pengelola Gedung Mangrove Wambakki, dan Yayasan Bedung Veteran. Nilai Aset Lainnya tersebut disajikan sebesar nilai kekayaan bersih (aset dikurangi kewajiban). Dalam hal badan-badan lain tersebut mendapatkan alokasi APBD dan bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), maka aset dan kewajiban atas KPA dikeluarkan dalam penghitungan nilai kekayaan bersih.
- Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam jenis aset sebagaimana dijelaskan di atas. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah, aset yang belum ditetapkan status penggunaannya seperti aset eks Pertamina, aset yang dikelola pihak lain seperti aset pemerintah eks BPPN yang dialihkan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (PTPPA). Aset eks BPPN berupa kredit atau tagihan pada LKPP Tahun 2012 disajikan sebagai Putang Lain-lain sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Termasuk juga dalam Aset Lainnya adalah dana kelolaan BLJ yang masih berupa kas yang belum digulirkan/diinvestasikan.

(5) Kewajiban

Kewajiban terdiri dari kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga/Biaya Pinjaman (*accrued interest*), Utang Subsidi, Surat Perbendaharaan Negara (SPN), dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- Utang PFK dicatat sebesar saldo pengutan/potong berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai akhir periode pelaporan.
- Utang bunga atas utang Pemerintah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang Pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
- Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

- SPN adalah instrumen utang jangka pendek dengan pembayaran secara risikonto yang berjangka waktu kurang dari 12 bulan.
- Termasuk dalam kewajiban jangka pendek adalah kewajiban Pemerintah terkait dengan penerimaan migas yang masuk ke rekening 600.000411.980 dan 508.000084.980, seperti *under lifting*, *DMD fee*, dan pengembalian (*reimbursement*) PPM dan PBB, yang akan dibayarkan kepada KKKS berdasarkan verifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah bersama BP MIGAS.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka panjang pemerintah terdiri dari utang luar negeri dan utang dalam negeri. Utang Luar Negeri Pemerintah adalah pinjaman bilateral, multilateral, kredit ekspor, *leasing*, dan kredit komersial yang dikelola Kementerian Keuangan. Utang Dalam Negeri Pemerintah antara lain adalah utang dalam bentuk sekuritas (*government debt securities*), yang terdiri dari *fixed rates bonds*, *variable rates bonds*, *zero coupon bonds*, *international bonds*, Surat Utang Pemerintah kepada Bank Indonesia, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang dikelola Kementerian Keuangan.

Utang Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal 31 Desember 2011 disajikan sebagai bagian lancar.

- **Fixed Rate (FR) Bonds** adalah obligasi yang memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan, dan dibayarkan secara periodik setiap 6 (enam) bulan. Obligasi jenis ini dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.
- **Obligasi Negara Ritel (ORI)** adalah Obligasi Negara yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual di pasar perdana. ORI memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan dan dibayarkan secara periodik. Kupon CR dibayarkan sebulan sekali (*monthly*). ORI dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.
- **Variable Rate (VR) Bonds** adalah obligasi berbunga mengambang memiliki tingkat kupon yang ditetapkan secara periodik berdasarkan referensi tertentu. Dalam hal ini referensi yang digunakan adalah tingkat bunga Sarifitkat Bank Indonesia (SRBI) berjangka tiga bulan. Kupon dibayarkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali. Obligasi VR dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.
- **Zero Coupon (ZC) Bonds** adalah obligasi negara tanpa bunga yang dijual secara diskonto *Zero Coupon* dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.
- **Surat Utang Pemerintah kepada Bank Indonesia (SUP kepada BI)** merupakan jenis surat utang yang tidak dapat diperdagangkan (*non-tradable*). SUP kepada BI terdiri dari SU C02, SU 004, SU 007, dan SRBI 01
- **SU-002 dan SU-004** adalah jenis utang Pemerintah kepada Bank Indonesia

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

berkaitan dengan program penjaminan dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). SU-002 setelah restrukturisasi memiliki tingkat bunga sebesar 1 persen per tahun (dari sebelumnya 3 persen), pokoknya diamortisasi dengan jatuh tempo pokok yang terakhir pada tahun 2025 (sebelumnya 2018). SU-004 setelah restrukturisasi memiliki tingkat bunga 3 persen per tahun (tidak berubah), pokoknya diamortisasi dengan jatuh tempo pokok yang terakhir pada tahun 2025 (sebelumnya 2018).

- **SU-007** adalah surat utang hasil konversi indeksasi dan tunggakan bunga SU-002 dan SU-004. SU-007 memiliki tingkat bunga 0,1 persen pertahun dan jatuh tempo pada tahun 2025. angsuran pokok SU-007 diamortisasi secara *semiannually* dan telah mulai dibayar sejak 1 Februari 2007 sebesar Rp509.352.721.728. Pembayaran angsuran pokok SU-007 dapat dilakukan dengan cara tunai (*cash*) atau dibayar dengan menggunakan Surat Utang Negara (SUN) yang dapat diperdagangkan (*tradable*).
- **SRBI-01** adalah surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah pada tanggal 7 Agustus 2003 sebagai pengganti SU-001 dan SU-003, dalam rangka BLBI. Jatuh tempo SRBI-01 adalah tahun 2033 dengan tingkat kupon 0,1 persen per tahun dihitung dari sisa pokok terutang yang dibayarkan secara periodik dua kali setahun.
- **International Bonds** adalah jenis obligasi negara yang berdenominasi mata uang asing yang dapat diperdagangkan/diperjualbelikan. Obligasi ini disajikan di neraca dalam rupiah berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal pelaporan.
- **Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)** adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah, atau dikenal secara internasional dengan istilah sukuk. Instrumen keuangan ini pada prinsipnya sama seperti surat berharga konvensional, dengan perbedaan pokok antara lain berupa penggunaan konsep imbalan dan bagi hasil sebagai pengganti bunga, adanya suatu transaksi pendukung (*underlying transaction*) berupa sejumlah tertentu aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk, serta adanya akad atau perjanjian antara para pihak yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban Pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonominya sedemikian seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Nilai nominal atas utang luar negeri Pemerintah merupakan kewajiban Pemerintah kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan sampai tanggal pelaporan. Utang dalam bentuk sekuritas dinilai berdasarkan nilai historis. Khusus untuk *hedged bonds* menggunakan kurs rupiah terhadap USD yang terakhir.

SAP telah mengatur penyajian utang kepada pegawai (*post service liability*). Namun demikian, penyajian utang Pemerintah di neraca belum mencakup utang kepada pegawai terkait kompensasi Pemerintah sebagai pemberi kerja, kepada pegawai sebagai pekerja atas jasa yang telah diberikan. *Post service liability (unfunded liability)* berupa kewajiban pensiun PNS diungkapkan dalam Catatan Penting Lainnya. Sedangkan *Post service*

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 *(Lanjutan)*

Liabilitas terkait Tabungan Hari Tua PNS disajikan dalam Neraca.

Termasuk dalam kelompok kewajiban adalah *Promissory Notes* yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam rangka keanggotaan pada lembaga internasional. *Promissory Notes* yang akan dilunas/dibayar kurang dari satu tahun setelah tanggal pelaporan disajikan sebagai kewajiban jangka pendek. *Promissory Notes* yang akan dilunas/dibayar lebih dari satu tahun setelah tanggal pelaporan disajikan sebagai kewajiban jangka panjang. *Promissory notes* pada IMF disajikan berdasarkan revaluasi yang dilakukan IMF pada bulan April tahun berjalan bukan pasca tanggal pelaporan.

*Kewajiban kontinjensi
diungkapkan dalam
catatan penting lainnya*

(6) Kewajiban Kontinjensi

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali Pemerintah, atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena kemungkinan besar Pemerintah tidak mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikannya, atau jumlah tersebut tidak dapat diukur dengan akurat.

Utang kontinjensi pemerintah yang bersifat eksplisit seperti jaminan pembangunan Proyek Monorail Jakarta, tanggungan kelebihan biaya pengadaan tanah sebagai akibat adanya kenaikan harga pada saat penbebasan lahan pada proyek pembangunan jalan tol, dan jaminan Pemerintah terhadap pembayaran kewajiban PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kepada kreditur yang menyediakan pendanaan kredit ekspor untuk pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batu bara diungkapkan dalam Catatan Penting Lainnya. Sedangkan utang kontinjensi Pemerintah yang bersifat implisit seperti intervensi Pemerintah apabila perbankan mengalami kebangkrutan belum diungkapkan dalam LKPP.

Kewajiban Kontinjensi terkait dengan *risk sharing* atas Program Kredit Usaha Tani Tahun Penyediaan 1998:1999 disajikan dalam Neraca.

*Ekuitas Dana (selisih aset
Ekuitas Dana Lancar dan
Ekuitas Dana Investasi)*

(7) Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih Pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan menjadi Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang. Khusus untuk akun Dana yang dibatasi penggunaannya (kelompok Aset Lainnya-aset tidak lancar) berupa dana pihak ketiga yang dikelola Pemerintah mempunyai akun lawan kewajiban jangka pendek.

Kurs Mata Uang Asing

(8) Kurs Mata Uang Asing

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran II PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Paragraf 62, transaksi dalam mata uang asing ditukarkan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Lebih lanjut, Interpretasi Pernyataan SAP (IPSAP) Nomor 01 tentang Transaksi dalam Mata Uang Asing, menyatakan bahwa:

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

- Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkan ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
- Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan Rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut.
- Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:
 - a. transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi; dan
 - b. transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Perlakuan yang sama juga diterapkan pada transaksi penerimaan/penarikan.

Transaksi dalam mata uang asing, dimana Pemerintah memiliki rekening dalam mata uang tersebut di BI, seperti USD dan Yen, dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Hal tersebut dilakukan karena dalam melakukan transaksi Pemerintah tidak harus membeli mata uang asing yang bersangkutan. Namun, transaksi dalam mata uang asing, dimana Pemerintah tidak memiliki rekening dalam mata uang tersebut di BI, dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tunai (*spot rate*) pada tanggal transaksi. Hal ini dilakukan karena dalam melakukan transaksi, Pemerintah harus membeli mata uang asing yang bersangkutan.

Setiap pos aset dan kewajiban dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Berikut adalah kurs tengah BI (Rupiah terhadap Mata Uang Asing) per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011.

Mata Uang Asing	Satuan	31 Desember 2012	31 Desember 2011
Dolar Amerika Serikat (USD)	1	10.025,39	3.068,00
Dolar Australia (AUD)	1	7.907,12	3.202,68
Dolar Kanada (CAD)	1	9.722,03	3.881,60
Franc Swiss (CHF)	1	10.608,70	3.833,07
Yuan China (CNY)	1	1.537,46	1.433,18
Kroner Denmark (DKK)	1	1.717,16	1.573,22
EURO (EUR)	1	12.800,86	11.733,90
Poundsterling Inggris (GBP)	1	16.678,88	13.889,27
Yeni Jepang (JPY)	100	11.196,68	11.683,32
Korean Won (KRW)	1	803	7,84

Selisih penjabaran pos aset dan kewajiban dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan. LKPP Tahun 2012 ini menyajikan selisih kurs atas kewajiban dalam mata uang asing sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan dalam Neraca.

Selisih kurs terkait dengan kas dalam valas, bagian lancar penerusan pinjaman dan utang

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

luar negeri disajikan pada chuitas dana lancar, sedangkan selisih kurs yang terkait dengan penarikan pinjaman, utang jangka panjang luar negeri dan SBN Valas disajikan pada ekuitas dana investasi.

Pencatatan selisih kurs atas Kas BUN di BI dalam mata uang asing, valas:

a. Selisih kurs yang terealisasi dihitung dari:

- kurs transaksi pada saat konversi dikurangi kurs tengah BI hari sebelumnya dikalikan dengan mata uang asing yang dikonversi; dan
- ditambah dengan proporsi akumulasi selisih kurs yang belum terealisasi sampai dengan hari sebelumnya dari mata uang asing yang dikonversi terhadap total mata uang asing.

Selisih kurs untung diakui sebagai PNBPL lainnya, sedangkan selisih kurs rugi diakui sebagai Belanja Lain-lain, dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

b. Selisih kurs yang belum terealisasi dibukukan pada saat tanggal pelaporan keuangan dengan menjabarkan saldo mata uang asing dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal pelaporan. Selisih kurs yang belum terealisasi tersebut disajikan pada Neraca sebagai penambah atau pengurang SILPA setelah memperhitungkan proporsi selisih kurs dari mata uang asing yang telah terealisasi.

Pencatatan selisih kurs atas utang dalam valas:

Formulasi penghitungan selisih kurs atas utang dalam mata uang asing.

- a. *Outstanding* valas dikali kurs tengah pada tanggal neraca dikurangi *outstanding* valas dikali kurs penarikan pada tanggal terakhir penarikan.
- b. Kurs penarikan terakhir penarikan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - *Loan* yang penarikan terakhirnya sebelum tahun 2004 menggunakan kurs tengah BI pada tanggal 31 Desember 2004
 - *Loan* yang penarikan terakhirnya tahun 2004 dan sesudahnya menggunakan kurs dengan membagi nilai rupiah dengan valas pada tanggal penarikan terakhir.
 - Dalam hal mata uang penarikan terakhir berbeda dengan mata uang *outstanding* (2011), maka kurs dihitung dengan nilai rupiah penarikan terakhir dibagi dengan hasil konversi mata uang terakhir.

(9) Aspek Kelembagaan Eks BRR NAD-Nias

Aspek Kelembagaan Eks
BRR NAD-Nias

Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Bentuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara (BRN NAD-Nias) sebagaimana telah ditetapkan menjadi UU Nomor 10 Tahun 2005, masa tugas BRR NAD-Nias adalah empat tahun. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2009, masa tugas BRR NAD-Nias berakhir tanggal 16 April 2009. Berdasarkan ketentuan tersebut, BRR NAD Nias sebagai suatu organisasi berakhir per tanggal 16 April 2009. Namun sebagai Entitas Pelaporan, BRR NAD Nias telah berakhir per 31 Desember 2008, sehingga Neraca Penutup BRR NAD-Nias adalah per 31 Desember

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

2008.

Sampai dengan penyusunan LKPP Tahun 2012, Neraca Likuidasi BRR MAD-Nias belum selesai diselesaikan, sehingga aset/kewajiban eks BRR MAD-Nias yang disajikan pada LKPP Tahun 2012 ini adalah aset/kewajiban BRR MAD-Nias per 31 Desember 2008 yang telah diaudit oleh BPK dikurangi dengan aset/kewajiban yang telah diserahkan kepada pihak lain sampai dengan 31 Desember 2012.

(10) Daftar Perubahan Kebijakan Akuntansi

*Daftar Perubahan
Kebijakan Akuntansi*

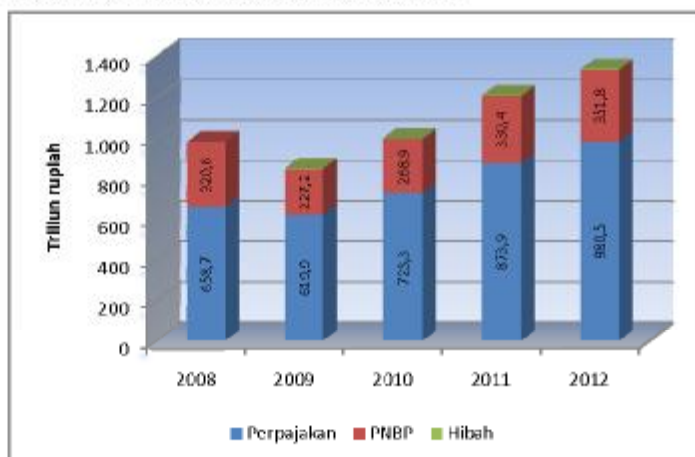
No.	Kebijakan Akuntansi	LKPP Tahun 2012	LKPP Tahun 2011
1.	Putang Jangka Panjang (Tagihan Angsuran, Tagihan Pembunahan, Tagihan Ganti Rugi, dll)	Disajikan pada akun tersendiri sesuai Perbendaharaan Nomor 43/2012 tentang Penambelian dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Akun Naras Para Badan Abu Standar	Disajikan pada Aset Lainnya
2.	Putang yang berasal dari Aset Eks DPPW yang berupa aset kredit dan tagihan	Disajikan pada akun aset lancar – Putang lain-lain, oleh riberapken penyajian piutang yaitu sebesar 100% dikurang persentase rata-rata nilai penertarikan Mayean	Disajikan pada kategori Aset Lainnya. Belum diterapken penyajian piutang
3.	Selilih Kura Kas BUN di EI dan LPVale persentase	Disajikan pada neraca sebagai bagian dari SLPA setelah penyusutan	Disajikan pada neraca sebagai akun tersendiri dan bukan bagian dari SLPA.

B. PENJELASAN ATAS PDS-POS LAPORAN REALISASI APBN

B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI APBN

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Tahun Anggaran (TA) 2012 adalah sebesar Rp1.398.109.829.172.958 atau mencapai 98,52 persen dari target APBN-P TA 2012 sebesar Rp1.358.205.043.200.000. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah berasal dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp980.518.133.319.319, PNBP sebesar Rp351.604.746.866.862, dan Penerimaan Hibah sebesar Rp5.786.749.186.777. Dalam realisasi Penerimaan Perpajakan tersebut termasuk Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar Rp3.665.260.413.269 dan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM-DTP) sebesar Rp99.813.751.137 serta dalam Pendapatan Hibah termasuk Pendapatan Hibah non kas (barang dan jasa) sebesar Rp1.645.047.367.798.

Pendapatan Negara dan Hibah TA 2012 mengalami kenaikan Rp127.509.975.813.543 atau 10,53 persen jika dibandingkan dengan TA 2011. Perkembangan realisasi Penerimaan Perpajakan dan PNBP sejak TA 2008 terlihat pada Grafik 31.



Grafik 31 Perkembangan Realisasi Penerimaan Perpajakan dan PNBP TA 2008 - 2012

Realisasi Belanja Negara pada TA 2012 adalah sebesar Rp1.491.410.224.590.994 atau 96,33 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2012 sebesar Rp1.548.310.378.180.000. Sementara itu, realisasi Belanja Negara pada TA 2011 adalah sebesar Rp1.294.999.146.475.024. Realisasi Belanja Negara terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.010.558.236.531.814, Transfer ke Daerah sebesar Rp480.645.074.235.761, dan terdapat Suspensi sebesar Rp206.913.823.419. Suspensi tersebut merupakan selisih Belanja Negara menurut catatan Kas Negara dengan Kementerian Negara/Lembaga. Perkembangan realisasi Belanja Negara sejak TA 2008 dapat dilihat pada Grafik 32.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (audited)



Grafik 32 Perkembangan Realisasi Belanja Negara TA 2008 - 2012

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah sebesar Rp1.338.109.629.172.958 dan realisasi Belanja Negara sebesar Rp1.491.410.224.590.994, maka Defisit Anggaran pada TA 2012 sebesar Rp153.300.595.418.036.

Sementara itu, realisasi Pembiayaan (Neto) pada TA 2012 adalah sebesar Rp175.158.168.320.375, yang terdiri dari Pembiayaan Dalam Negeri (Neto) sebesar Rp198.622.535.177.645 dan Pembiayaan Luar Negeri (Neto) sebesar minus Rp23.464.366.857.270.

Terjadinya Defisit Anggaran dan adanya Realisasi Pembiayaan Neto mengakibatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2012 sebesar Rp21.857.572.902.339.

B.2. PENJELASAN PER PQS LAPORAN REALISASI APBN

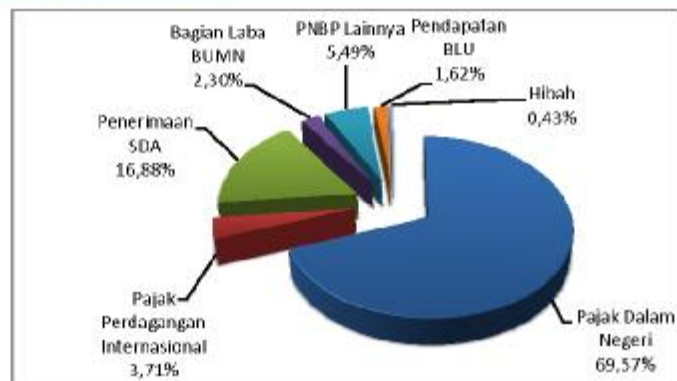
B.2.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Pendapatan Negara dan Hibah Rp1.338,1 triliun

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2012 adalah sebesar Rp1.338.109.629.172.958, berarti mencapai 93,32 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam AP3N-P sebesar Rp1.358.203.043.200.000. Pendapatan Negara dan Hibah terdiri dari Perorangan Perpajakan, PNBK, dan Perorangan Hibah.

Komposisi realisasi Pendapatan Negara dan Hibah dalam persentase TA 2012 dapat dilihat pada grafik 31.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (audited)



Grafik 33 Komposisi Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2012

Penerimaan Perpajakan
Rp980,52 triliun

B.2.1.1 Penerimaan Perpajakan

Realisasi Penerimaan Perpajakan TA 2012 adalah sebesar Rp980.518.133.319.319 atau mencapai 96,49 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp1.016.237.341.511.000. Hal ini berarti Penerimaan Perpajakan TA 2012 lebih besar Rp106.644.240.919.938 atau naik 12,20 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2011. Penerimaan Perpajakan ini berasal dari i) Pajak Dalam Negeri, dan ii) Pajak Perdagangan Internasional. Dalam realisasi Penerimaan Perpajakan tersebut termasuk Pajak Penghasilan DTP sebesar Rp3.685.260.413.269, dan Bea Masuk DTP sebesar Rp99.813.751.137.

Perkembangan realisasi penerimaan pajak dan targetnya selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tahun	Penerimaan Perpajakan		Presentase (%)
	Target	Realisasi	
2008	808.227.480.000.000	658.700.780.884.236	108,12
2009	851.954.823.000.000	619.622.172.828.415	95,05
2010	743.325.806.000.000	723.206.688.621.736	117,31
2011	878.885.216.782.000	673.673.862.388.281	89,46
2012	1.016.237.341.511.000	980.518.133.319.319	96,45
Jumlah	3.899.430.777.273.000	3.856.321.657.621.090	

Salah satu penyebab realisasi penerimaan pajak tahun 2009 - 2012 tidak mencapai target adalah belum efektifnya pelaksanaan ketentuan yang diatur dalam Pasal 35A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2008 yang mengharuskan setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain memberikan data dan informasi perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, penyebab penerimaan pajak di TA 2012 tidak mencapai target antara lain terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi di beberapa negara sebagai akibat krisis ekonomi global yang menyebabkan berkurangnya permintaan komoditas, turunnya harga komoditas dan menurunnya pertumbuhan ekspor yang mempengaruhi pajak sektor industri pengolahan.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Audiited)

Penerimaan Pajak Dalam Negeri Rp.930,86 triliun

B.2.1.1.1. Pajak Dalam Negeri

Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri TA 2012 adalah sebesar Rp930.861.839.509.438 atau mencapai 98,13 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp948.283.241.511.000. Hal ini berarti realisasi Pajak Dalam Negeri TA 2012 lebih besar Rp17.421.411.961.561 atau naik 13,55 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2011. Besarnya realisasi Pajak Dalam Negeri ini adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2012 (Audiited)	TA 2011 (Audiited)
PPh Migas	83.463.868.001.301	73.095.496.767.938
PPh Nonmigas	377.842.176.068.446	364.883.663.082.614
PPh Final	1.330.076.044	4.126.576.364
PPh Ditanggung Pemerintah	3.665.260.413.269	3.338.836.314.000
PPN dan PPhBM	337.684.677.488.286	277.800.178.879.384
PRB	28.868.867.707.767	29.893.184.374.398
BPHTB	-	1730.151.679
Cukai	95.027.881.221.467	77.010.110.613.796
Pajak Lainnya	4.213.876.648.366	3.828.182.148.211
Jumlah	930.861.839.509.438	819.752.428.942.423

Dalam realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri tersebut termasuk penerimaan atas Pajak Penghasilan PTP sebesar Rp3.665.260.413.269 dalam bentuk Subsidi.

Pendapatan Pajak Dalam Negeri mengalami kenaikan dibandingkan dengan TA 2011, dikarenakan antara lain adanya kebijakan registrasi ulang FKP, sensus pajak nasional serta kebijakan lainnya yang ditujukan untuk mendorong penerimaan pajak.

Realisasi Pendapatan Cukai TA 2012 mengalami kenaikan karena kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau dan efektivitas pengawasan peredaran Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) melalui pelekatan pita cukai.

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam Daftar 1.

B.2.1.1.2. Pajak Perdagangan Internasional

Pajak Perdagangan Internasional Rp49,87 triliun

Realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional TA 2012 adalah sebesar Rp49.656.293.809.881, atau mencapai 103,57 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp47.944.100.000.000. Hal ini berarti Pajak Perdagangan Internasional TA 2012 lebih kecil Rp4.465.172.247.077 atau turun 8,25 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2011. Rincian realisasi Pajak Perdagangan Internasional adalah (dalam Rp):

Uraian	TA 2012 (Audiited)	TA 2011 (Audiited)
Bea Masuk	26.418.359.044.419	25.285.983.309.375
Bea Keluar	21.237.934.765.462	26.665.802.747.593
Jumlah	49.656.293.809.881	54.121.466.056.968

Dalam realisasi Penerimaan Bea Masuk TA 2012, termasuk Penerimaan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM-DTP) sebesar Rp99.813.731.137.

Penurunan Bea keluar TA 2012 disebabkan oleh penurunan tarif Bea Keluar dan Harga Pokok Ekspor (HPE) sehingga terjadi pergeseran komoditas ekspor *Crude Palm Oil* (CPO).

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam Daftar 1.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Audited)

B.2.1.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

PMBP Rp351,50 triliun

Realisasi PNBP TA 2012 adalah sebesar Rp351.504.746.366.867 mencapai 103,13 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp341.142.610.103.000. Hal ini berarti realisasi PNBP TA 2012 lebih besar Rp20.332.925.568.133 atau naik 5,13 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2011. Realisasi PNBP berasal dari (i) Penerimaan Sumber Daya Alam; (ii) Bagian Pemerintah atas Laba BUMN; (iii) PMBP lainnya, dan (iv) Pendapatan BLL.

B.2.1.2.1. Penerimaan Sumber Daya Alam

Penerimaan SDA Rp225,87 triliun

Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) TA 2012 adalah sebesar Rp225.843.973.463.751, atau mencapai 104,00 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp217.158.876.693.000. Hal ini berarti Penerimaan SDA TA 2012 lebih besar Rp12.020.623.910.824 atau naik 5,62 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2011. Rincian realisasi Penerimaan SDA adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2012 (Audited)	TA 2011 (Audited)
Pendapatan Minyak Bumi	144.717.087.322.468	141.303.403.462.283
Pendapatan Gas Alam	61.106.427.315.761	52.107.095.923.633
Pendapatan Pertambangan Umum	15.877.387.316.504	16.360.780.735.678
Pendapatan Keluaraer	3.158.338.362.520	3.216.476.006.406
Pendapatan Perikanan	2.15.766.502.300	183.802.161.080
Pendapatan Pertambangan Panas Bumi	738.966.344.398	562.702.273.747
Jumlah	225.843.973.463.751	215.323.348.562.327

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam Daftar 1.

Peningkatan pendapatan minyak bumi pada TA 2012 utamanya disebabkan oleh naiknya harga rata-rata minyak mentah Indonesia, dimana pada tahun 2011 rata-rata harga minyak mentah Indonesia mencapai USD111,55/barrel sementara pada tahun 2012 harganya naik hingga pada level USD112,72/barrel. Pendapatan Gas Bumi juga mengalami kenaikan sebesar 17,09 persen. Kondisi ini antara lain disebabkan karena lebih tingginya rata-rata *Indonesia Crude Price* (ICP) tahun 2012 bila dibandingkan dengan tahun 2011, dimana ICP tersebut mempengaruhi formula harga LNG. Mengingat kontribusi terbesar Pendapatan Gas Bumi berasal dari penerimaan LNG, maka kenaikan ICP tersebut sangat berpengaruh terhadap capaian Pendapatan Gas Bumi.

B.2.1.2.2. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN

Bagian Pemerintah atas Laba BUMN Rp30,80 triliun

Realisasi Bagian Pemerintah atas Laba BUMN TA 2012 adalah sebesar Rp30.797.972.717.670 atau mencapai 100,00 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp30.797.336.250.000. Hal ini berarti Bagian Laba Pemerintah atas Laba BUMN TA 2012 lebih besar Rp2.613.999.591.070 atau naik 9,27 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2011.

Realisasi Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	TA 2012 (Audited)	TA 2011 (Audited)
Penyertaan Laba BUMN Perbankan	4.070.293.177.065	3.627.944.671.870
Pencapaian Laba BUMN Non Perbankan	26.727.679.540.615	24.565.028.664.630
Jumlah	30.797.972.717.670	28.192.973.336.500

Dari realisasi Bagian Pemerintah atas Laba BUMN TA 2012 tersebut, sebesar 78,81 persen berasal dari Laba BUMN terbesar, yaitu:

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

	Nama BUMN	Jumlah (Rp.)
1	PT Pertamina	7.257.043.000.000
2	PT Telkom	3.832.434.555.606
3	PT PLN	3.600.000.000.000
4	PT Pupuk Indonesia	2.042.313.600.701
5	PT Bank Rakyat Indonesia	1.711.844.248.000
6	PT Perusahaan Gas Negara	1.708.888.548.005
7	PT Bank Mandiri	1.469.525.280.000
8	PT Lembang Batu bara Bukit Asam Tbk	1.048.380.332.000
9	PT Semen Gresik	1.001.078.681.240
10	PT Bank Wajara Indonesia	899.100.833.310
Total 10 BUMN		24.271.686.867.012

B.2.1.2.3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

PNBP Lainnya Rp 73.456
miliar

Realisasi PNBP Lainnya TA 2012 adalah sebesar Rp73.456.504.524.407 atau 100,90 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P yaitu sebesar Rp72.799.374.473.000. Hal ini berarti realisasi PNBP Lainnya TA 2012 lebih besar Rp4.098.001.691.875 atau naik 5,91 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2011. Realisasi PNBP Lainnya ini terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	TA 2012 (dianggarkan)	TA 2011 (dianggarkan)
Pendapatan Penjualan dan Sewa	23.253.375.396.358	21.650.214.589.444
Pendapatan Jasa	58.217.962.723.749	76.634.518.584.927
Pendapatan Bunga	11.667.980.412.311	4.893.238.511.754
Pendapatan Kekuasaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi	251.243.211.308	240.781.603.806
Pendapatan Pendidikan	2.375.603.738.188	2.985.915.235.601
Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sita Hasil Korupsi	158.144.329.332	92.848.578.380
Pendapatan Iuran dan Donasi	1.468.628.323.727	1.318.108.834.683
Pendapatan Lain-lain	8.064.683.388.140	11.563.901.203.833
Jumlah	73.456.504.524.407	88.380.602.332.532

Pendapatan lain-lain dari penerimaan bukan pajak lainnya berasal dari pendapatan penerimaan kembali belanja Tahun Anggaran yang lalu sebesar Rp4.661.215.950.737, pendapatan pelaksanaan piutang sebesar Rp54.165.965.036, pendapatan dari penutupan rekening sebesar Rp58.455.641.949, pendapatan dari selisih kurs sebesar Rp2.031.891.225.661 serta pendapatan lain-lain sebesar Rp1.221.165.1E5.737.

Penerimaan BLU
Rp21.704 miliar

B.2.1.2.4. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)

Realisasi Pendapatan BLU TA 2012 adalah sebesar Rp21.704.295.961.034 atau 106,95 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P yaitu sebesar Rp20.408.022.687.000. Hal ini berarti realisasi Pendapatan BLU TA 2012 lebih besar Rp1.600.300.374.263 atau naik 7,93 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2011. Realisasi Pendapatan BLU terdiri dari (dalam Rp):

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Audiited)

Uraian	TA 2012 (Audiited)	TA 2011 (Audiited)
Pendapatan Jasa Layanan Umum:		
Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa kepada Masyarakat	7.237.212.649.937	17.215.910.979.592
Pendapatan dari Pengelolaan Wilayah:		
Kawasan Terentu	742.823.064.171	102.780.118.488
Pengelolaan Daerah Khusus untuk Masyarakat	1.492.015.634.729	503.231.034.829
Total Pendapatan Jasa Layanan Umum	18.471.861.778.837	17.821.852.180.899
Pendapatan Hibah BLU	83.863.755.388	167.482.619.227
Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	1.061.352.068.323	647.683.481.201
Pendapatan BLU Lainnya	1.067.188.387.406	1.467.137.085.847
Jumlah	21.704.285.881.034	20.105.885.688.771

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam Daftar 1.

B.2.1.3. Penerimaan Hibah

*Penerimaan Hibah
Rp5,79 triliun*

Realisasi Penerimaan Hibah Tahun Anggaran (TA) 2012 adalah sebesar Rp5.786.749.186.777 atau 701,35 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp925.091.586.000. Hal ini berarti Penerimaan Hibah TA 2012 lebih besar Rp532.809.325.479 atau naik 10,14 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2011.

Realisasi Penerimaan Hibah TA 2012 termasuk realisasi Penempatan Hibah Non Kas (barang dan jasa) sebesar Rp1.645.047.367.798. Pendapatan Hibah Non Kas tersebut dicatat dengan jumlah yang sama pada sisi belanja. Pendapatan Hibah Non Kas tidak dicatat pada Laporan Arus Kas.

Pada TA 2012, masih terdapat Pendapatan Hibah Langsung pada beberapa K/L yang belum dilampirkan kepada Menteri Keuangan selaku BUN. Hal ini terjadi dikarenakan K/L tidak mematuhi ketentuan pengalokasian hibah sesuai dengan PMK 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah.

Rincian lebih lanjut Penerimaan Hibah dapat dilihat dalam Daftar 1.

B.2.2. Belanja Negara

*Belanja Negara
Rp1.481.41 triliun*

Realisasi Belanja Negara TA 2012 adalah sebesar Rp1.481.410.224.590.894 atau 96,93 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp1.548.310.376.180.000. Belanja Negara TA 2012 lebih besar Rp196.411.081.159,00 atau naik 15,17 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2011. Realisasi Belanja Negara terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah.

B.2.2.1. Belanja Pemerintah Pusat

*Belanja Pemerintah
Pusat Rp1.010,56 triliun*

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2012 adalah sebesar Rp1.010.559.236.531.814 atau 94,49 persen dari APBN-P sebesar Rp1.069.534.444.947.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2012 lebih besar Rp126.336.350.335.285 atau 4,33 persen dari realisasi TA 2011.

Belanja Pemerintah Pusat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) klasifikasi, yaitu (i) Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi/Bagian Anggaran; (ii) Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi; dan (iii) Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja (Ekonomi).

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

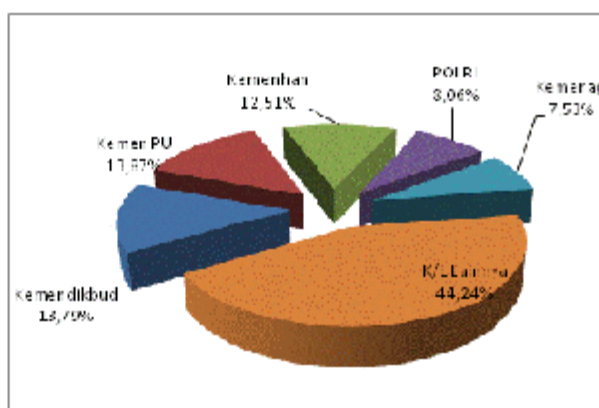
Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi/BA

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi/Bagian Anggaran

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2012 menurut Bagian Anggaran (BA) terbesar adalah pada BA 999 (Bendahara Umum Negara) sebesar Rp520.491.471.144,513 atau 51,31 persen dari total Belanja Pemerintah Pusat.

Sementara itu, total realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2012 pada K/L (selain BA BUA) adalah sebesar Rp490.066.765.386.899. Dari total realisasi belanja tersebut, realisasi belanja pada K/L terbesar adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp7.585.415.013.820 atau 13,79 persen dari total realisasi Belanja Pemerintah Pusat untuk K/L.

Komposisi lima (lima) terbesar K/L pengguna anggaran Belanja Pemerintah Pusat (dalam persentase) selain BA 999 (Bendahara Umum Negara) pada TA 2012 dapat dilihat pada Grafik 34.



Grafik 34 Komposisi Lima Terbesar Kementerian Negara/Lembaga Pengguna Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2012

Rincian realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi/Bagian Anggaran dapat dilihat dalam Daftar 2.

Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat juga dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi. Fungsi adalah pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi terbagi dalam 11 (sebelas) fungsi, yaitu fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertib dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial.

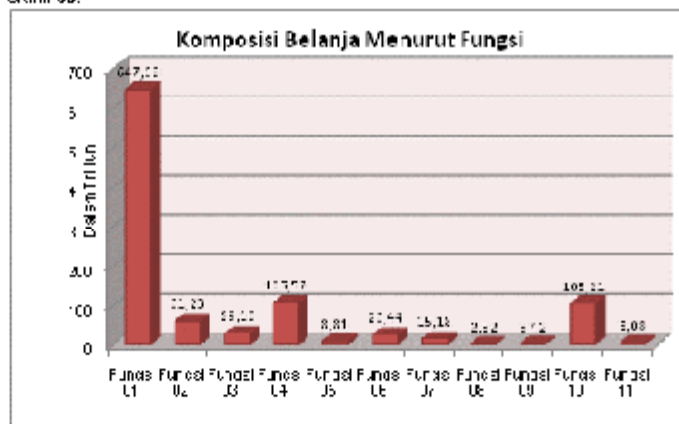
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat per fungsi pada TA 2012 dan 2011 adalah sebagaimana tertera dalam Tabel 12.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

**Tabel 13 Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi
TA 2012 dan TA 2011**

Kode	Uraian Fungsi	(dalam rupiah)	
		TA 2012 (Realisasi)	TA 2011 (Realisasi)
01	Pelayanan Umum	617.870.133.087,285	508.015.413.327,554
02	Perawatan	51.226.356.461,880	41.130.585.252,887
03	Keterlibatan dan Keawakan	29.096.481.226,224	21.631.237.365,477
04	Etanovi	125.574.147.153,010	87.246.161.314,834
05	Lingkungan Hidup	8.814.131.853,182	2.615.085.371,607
06	Perumahan dan Fasilitas Umum	28.440.588.855,014	22.937.807.328,477
07	Kesehatan	15.181.702.080,984	14.058.780.258,183
08	Parwisata dan Budaya	29.16.325.963,586	3.913.443.317,287
09	Agama	3.419.376.039,297	1.424.732.319,450
10	Pendidikan	125.207.147.524,813	87.814.046.304,241
11	Kependudukan dan Perlindungan Sosial	5.081.514.281,077	3.006.376.381,520
00	Tidak ada fungsi	318.428.715,582	62.337.781.375,870
	Total	1.010.558.236.531.814	883.721.896.106.519

Komposisi realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi TA 2012 dapat terlihat pada Grafik 35.



Grafik 35 Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi TA 2012

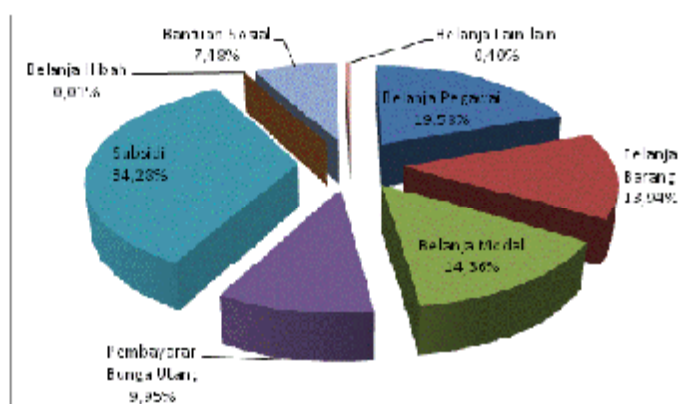
Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah menurut Fungsi dapat dilihat dalam Daftar 2.

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis Belanja

*Belanja Pemerintah
Pusat menurut Jenis
Belanja*

Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja terdiri atas: (i) Belanja Pegawai; (ii) Belanja Barang; (iii) Belanja Modal; (iv) Pembayaran Bunga Utang; (v) Subsidi; (vi) Belanja Hibat; (vii) Bantuan Sosial; dan (viii) Belanja Lain-lain. Komposisi realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja disajikan pada Grafik 36.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Audited)



Grafik 36 Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja TA 2012

B.2.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai
Rp.197,88 triliun

Realisasi Belanja Pegawai TA 2012 adalah sebesar Rp197.863.565.816.235 yang berarti 92,91 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp212.971.607.708.622. Hal ini berarti realisasi Belanja Pegawai TA 2012 lebih besar Rp22.125.647.397.220 atau naik 12,39 persen dari realisasi TA 2011. rincian Belanja Pegawai adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2012 (Audited)	TA 2011 (Audited)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	55.892.007.708.730	49.445.102.508.675
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri	44.483.930.328.017	40.263.378.847.670
Belanja Gaji dan Tunjangan Pajabat Negara	719.704.490.870	819.043.608.633
Belanja Gaji Dokter PT	822.266.259.230	771.007.438.015
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	783.857.761.538	748.850.447.677
Belanja Honorarium	1.386.430.803.700	1.369.522.181.066
Belanja Lembuh	857.710.561.779	501.547.788.155
Belanja Vakasi	231.248.767.842	217.890.587.087
Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transitu	23.481.893.093.887	20.337.894.883.748
Belanja Persun dan Jang Tunggu	67.787.448.603.746	59.477.181.551.185
Belanja Asuransi Kesehatan	2.482.037.544.996	2.141.251.233.920
Belanja Tunjangan Kesehatan Valeran	184.734.857.000	150.578.684.996
Belanja Cadangan Perawatan Shaling	-	(374.730.220)
Belanja Kontribusi APBN Pemayanan Persin	-	-
Dks PRS Dep. Hub. Pada PT ICAI	-	(38.347.338)
Jumlah	197.863.565.816.235	175.737.918.419.015

B.2.2.1.2. Belanja Barang

Belanja Barang Rp.143,88 triliun

Realisasi Belanja Barang TA 2012 adalah sebesar Rp140.884.875.397.761 yang berarti 88,04

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Audiited)

persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp150.031.270.543.968. Hal ini berarti realisasi Belanja Barang TA 2012 lebih besar Rp'6.245.395.895.457 atau naik 13,03 persen dari Realisasi TA 2011. Rinciannya adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2012 (Audiited)	TA 2011 (Audiited)
Belanja Barang Operasional	24.071.629.386.368	21.729.369.193.591
Belanja Barang Non Operasional	43.962.826.987.352	42.942.829.212.628
Belanja Jasa Untuk Pencatatan Jasa dari Hibah	695.166.352.250	-
Belanja Barang Penunjang Kegiatan POKPT (*)	-	87.751.735.675
Belanja Barang Fisik Lain Tugas Pembantuan**;	-	2.054.844.291.641
Belanja Barang Pencatatan Persediaan Hibah	78.778.115.731	7.187.180.771
Belanja Jasa	17.857.456.305.373	16.360.913.536.031
Belanja Penelitian	10.964.757.183.198	9.794.590.647.633
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	17.862.360.185.269	17.919.945.204.322
Belanja Perjalanan Luar Negeri	1.851.343.370.403	1.719.357.648.549
Belanja Barang BLU	15.548.263.729.110	12.543.409.145.675
Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat atau Pemda	6.747.060.396.287	-
Belanja Barang Penunjang Dana Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan	248.266.417.328	-
Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Pada Masyarakat atau Pemda	1.071.149.153.104	-
Jumlah	140.834.875.387.761	124.639.478.502.304

*| Belanja Barang Fisik Lain Tugas Pembantuan dan Belanja Barang Pencatatan Persediaan Hibah tahun 2012 disajikan pada Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat atau Pemda.

Belanja Barang ELU sebesar Rp'5.548.293.729.110 terdiri dari:

Uraian	TA 2012 (Audiited)	TA 2011 (Audiited)
Belanja Gaji dan Tunjangan	6.837.763.744.728	4.328.678.718.401
Belanja Barang	5.212.178.260.326	4.590.288.645.436
Belanja Jasa	1.878.228.864.277	1.468.345.274.887
Belanja Pemeliharaan	518.954.765.653	421.834.026.720
Belanja Perawatan	503.408.854.730	348.829.822.276
Belanja Penyedia Barang dan Jasa BLU Lainnya	1.796.713.408.396	1.349.732.655.051
Jumlah	15.548.293.729.110	12.543.409.145.675

Belanja gaji dan tunjangan yang didanai dari pendapatan BLU, sesuai ketentuan belanja tersebut dimasukkan sebagai Belanja Barang.

Pada TA 2012, terdapat Belanja Barang yang dianggarkan dalam Belanja Modal dan sebaliknya, Belanja Modal yang dianggarkan dalam Belanja Barang. Kondisi ini dikarenakan CL tidak cermat dalam penyusunan PKR KL dan dokumen pelaksanaan anggaran. Dalam hal Belanja Barang menghasilkan Aset Tetap, Aset Tetap tersebut dilaporkan pada Neraca dan Laporan BMM.

B.2.2.1.3. Belanja Modal

Belanja Modal Rp145,17 triliun

Realisasi Belanja Modal TA 2012 adalah sebesar Rp145.104.148.492.353 berarti 79,46 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp182.671.948.581.508. Hal ini berarti realisasi Belanja Modal TA 2012 lebih besar Rp27.248.616.421.321 atau naik 23,12 persen dari Realisasi TA 2011. Rincian realisasi Belanja Modal adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Audited)

Uraian	TA 2012 (Audited)	TA 2011 (Audited)
Belanja Modal Tanah	3.621.341.327.511	3.400.566.777.970
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.485.838.612.569	36.946.011.381.682
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15.545.767.573.166	20.705.016.407.069
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	72.322.551.241.233	49.596.433.921.982
Belanja Modal Fisik Lainnya	4.011.444.117.446	3.342.302.032.093
Belanja Modal BLL	2.103.005.518.752	1.795.321.489.749
Belanja Dana Bergulir	6.231.932.176	-
Jumlah	145.184.148.492.853	117.854.592.071.332

Belanja Modal BLU terdiri dari (Rp):

Uraian	TA 2012 (Audited)	TA 2011 (Audited)
Belanja Modal Tanah	15C.719.812.664	6D.616.628.743
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	94C.275.210.002	90E.997.430.630
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	83C.813.852.516	707.869.165.383
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	43.048.248.487	32.102.737.074
Belanja Modal Fisik Lainnya	23C.148.237.003	181.836.628.000
Jumlah	2.183.086.518.762	1.796.321.489.748

B.2.2.1.4. Pembayaran Bunga Utang

Pembayaran Bunga Utang Rp100,52 triliun

Realisasi Belanja Pembayaran Bunga Utang TA 2012 adalah sebesar Rp100.515.994.274.844 yang berarti 85,34 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp117.765.423.800.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Pembayaran Bunga Utang TA 2012 lebih besar Rp7.254.074.469.853 atau naik 7,79 persen dari Realisasi TA 2011. Rincian Pembayaran Bunga Utang TA 2012 adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2012 (Audited)	TA 2011 (Audited)
Belanja Pembayaran Bunga Utang DW – Jangka Panjang	807F1.137.160.467	57.210.627.836.836
Belanja Pembayaran Bunga Utang LW – Jangka Panjang	20.811.480.250.076	25.547.340.266.35C
Belanja Pembayaran Imbalan S3SN DN	6.267.744.208.130	47.681.899.586.200
Belanja Pembayaran Imbalan S3SN LN	960.763.140.870	514.676.086.450
Belanja Pembayaran Discount SUN DN	1.496.959.122.930	3.236.157.597.300
Belanja Pembayaran Discount SUN LN	449.843.400.030	373.905.90C.000
Belanja Pembayaran <i>Lessen of Debt Rescheduling</i> atau Pembebasan Kembali Obligasi Negara DN	198.467.422.000	310.612.680.000
Belanja Pembayaran Discount Imbalan S3SN DV	913.801.123.270	51.468.616.000
Belanja Pembayaran Bunga Imbalan Bunga Pajak	816.834.747.231	1.247.389.871.387
Belanja Pembayaran Biaya Pemeliharaan Hibah	-	1.235.356.364
Jumlah	100.515.994.274.844	98.261.518.810.886

B.2.2.1.5. Subsidi

Subsidi Rp348,42 triliun

Realisasi Subsidi TA 2012 adalah sebesar Rp346.420.404.182.332 yang berarti 141,35 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp245.076.316.662.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Subsidi TA 2012 ini lebih besar Rp101.344.088.182.332 atau naik 17,29 persen dari Realisasi TA 2011. Rincian realisasi Subsidi adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

Lain-lain	TA 2012 (Rupiah)	TA 2011 (Rupiah)
Subsidi Premiun	107.245.334.379,318	78.782.408.088,742
Subsidi Minyak Solar	64.671.893.110,393	53.245.080.871,434
Subsidi Minyak Tanah	7.128.123.174,258	8.441.088.427,448
Subsidi Eljiji	22.546.226.819,432	22.582.148.582,351
Subsidi Pangan	18.117.020.057,314	16.538.202.621,000
Subsidi Listrik	94.588.027.782,154	90.447.485.461,331
Subsidi Bank	60.251.413,489	96.913.542,095
Subsidi Pupuk	13.808.433.702,000	16.344.187.987,389
Belanja Subsidi PPH	3.663.330.000,000	3.338.838.314,000
Belanja Subsidi BNI	56.813.751,137	73.117.386,000
Belanja Subsidi PT F.M	680.137.912,253	630.870.812,779
Belanja Subsidi PT PELNI	897.631.980,000	872.152.505,000
Subsidi PT Pte dan Giro	272.425.000,000	256.043.800,000
Belanja Subsidi dalam rangka PSD Lainnya	82.036.280,387	73.358.751,500
Subsidi Bunga KPR	-	611.843.137,443
Subsidi Bunga Ketahanan Pangan	180.083.320,374	178.388.456,280
Subsidi Bunga Kredit Program Eka KULI	7.230.924,101	10.070.776,218
Subsidi Bunga Kredit Eksternal H.PENRIP	76.593.585,000	74.104.074,508
Belanja Subsidi Uang Kredit Program Lainnya	3/ 100,000	-
Belanja Subsidi Imbalan Jasa Penjamin Kredit Usaha Rakyat (JUI)	601.125.000,000	624.165.242,000
Subsidi Bunga Pengusaha NAC dan Nisa	1.333.147,033	2.160.047,151
Belanja Subsidi Kredit Sektor Peternakan	26.930.112,133	20.080.545,778
Belanja Subsidi Kredit Rasi Burung	429.805,171	128.971,207
Jumlah	346.420.404.182,332	295.358.229.836,324

Tertampainya realisasi Belanja Subsidi dalam AFBN-P dapat terjadi sesuai dengan Pasal 15 UU Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN TA 2012, yang menyatakan bahwa Belanja Subsidi dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan untuk mengantisipasi deviasi realisasi asumsi ekonomi makro dan perubahan parameter subsidi, berdasarkan kemampuan keuangan negara.

Di dalam realisasi pembayaran subsidi listrik tahun 2012 sebesar Rp94.588.027.782.154 sudah termasuk pula pembayaran kekurangan subsidi listrik tahun 2010 sebesar Rp4.506.797.782.554.

Pagu subsidi Listrik pada Pasal 6 UL Nomor 4 Tahun 2012 ditetapkan sebesar Rp4.973.400.000.000, dan Cadangan Energi sebesar Rp23.000.000.000.000, sedangkan Pagu Subsidi Listrik pada DIPA Nomor : 0145/999-07.1.03/00/2012 tanggal 31 Januari 2012 sebesar Rp4.583.030.000.000 sehingga DIPA Subsidi Listrik TA 2012 lebih tinggi sebesar Rp6.609.630.000.000. Perhitungan jumlah Subsidi Listrik tahun 2012 yang diusulkan oleh Pemerintah sebesar Rp93.052,65 miliar tersebut, didasarkan pada asumsi dan parameter Subsidi Listrik sebagai berikut :

No	parameter	APBN 2012	APBNP 2012	Selisih
1	ICP (US\$/rb)	90,00	105,00	15,00
2	Kurs (Rp/US\$)	8,800	8,000	200
3	TTL	10%	3% ^{1/2}	0%
4	Growth Sales (%)	9,00	9,00	-
	Energy Sales (TWh)	73,77	170,30	(3,47)
5	Losses (%)	8,60	8,60	-
6	Fuel Mix			
	- HSD (juta.kl)	2,30	5,72	3,42
	- NFO (juta.kl)	1,98	1,72	0,38

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 *(revised)*

- IDO (juta Rp)	-	0,02	1,02
- Batubara (juta ton)	48,1	38,4	(8,7)
- Gas (juta BBTU)	0,37	0,32	(0,02)
- Panas Bumi (TWh)	3,40	3,40	0,00
- Bio Diesel (juta KL)	0,24	0,01	(0,24)
7 Merger (%)	7	7	-
Subsidi Tahun Berjalan (miliar Rp)	40.463,20	39.646,88	48.082,48
Kurang bayar 2010 <i>(revised)</i>	4.600,8	4.600,8	0,0
Kekurangan 2011 <i>(unaudited)</i>	4.600,0	3.600,0	(1.000,0)
<i>Carryover</i> 2012 ke 2013	4.500,0	(4.500,0)	-
Total Subsidi (miliar Rp)	44.960,20	39.662,66	48.082,47

Kenaikan realisasi belanja subsidi jenis premium, minyak solar dan subsidi LPG disebabkan oleh:

- a. Kenaikan rata-rata realisasi harga indeks pasar BBM *Mean of Price Singapore* (MOPS) tahun 2012 yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2011 dengan rincian.

(dalam US\$/bbl)

Uraian	TA 2012	TA 2011	Naik/(Turun)
Premium	118,13	114,53	3,60
Minyak Solar	128,21	122,72	5,49

- b. Realisasi volume jenis premium dan minyak solar serta LPG tabung 3 Kg yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2011 dengan rincian.

Uraian	TA 2012	TA 2011	Naik/(Turun)
Premium (juta KL)	27.241	26.623	618
Minyak Solar (juta KL)	4.840	4.538	302
LPG Tabung 3 Kg (juta Kg)	3.690	3.258	432

- c. Realisasi nilai tukar tahun 2012 yang digunakan dalam perhitungan subsidi (rata-rata kurs bei Bank Indonesia) mengalami penurunan dibandingkan tahun 2011, dengan rincian:

Uraian	TA 2012	TA 2011	Naik/(Turun)
Nilai Tukar \$/us/bbl Bt	8,327	8,732	(0,405)

Sementara itu, realisasi subsidi BBM jenis minyak tanah Tahun 2012 mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2011 terutama disebabkan penurunan realisasi volume konsumsi minyak tanah.

Uraian	TA 2012	TA 2011	Naik/(Turun)
Minyak Tanah (juta KL)	1.152	1.696	(544)

Dalam realisasi subsidi TA 2012 tertelat pembayaran beberapa jenis subsidi yang dananya belum tersalurkan sampai dengan akhir TA 2012, dan ditempatkan pada rekening dana cadangan subsidi (PSU) sebesar Rp1.333.841.364.281. Penempatan dana cadangan tersebut dilakukan karena dikurir pengalihan dari pihak penerima subsidi belum selesai diverifikasi. Setelah verifikasi selesai, maka dana cadangan subsidi tersebut akan dibayarkan kepada penerima. Rincian penempatan dana atas realisasi subsidi TA 2012 adalah sebagai berikut:

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

Uraian	Jumlah (Rp)
Subsidi Premium	3.252.194.040
Subsidi LPG	1.558.763.147.899
Subsidi Pupuk	1.099.268.371.268
Subsidi Benih	32.774.806.860
Subsidi PT Pos Indonesia	81.882.000.000
Subsidi PT PELNI	197.831.960.000
Subsidi PT KAI	192.532.247.000
Subsidi Pangan	187.823.634.424
Jumlah	3.833.841.884.281

Terkait dengan Imbalan Jasa Penjamin Kredit Usaha Rakyat (KUR), Subsidi tersebut digunakan untuk meningkatkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dalam penandaan, maka Pemerintah membuat program Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR adalah kredit pembiayaan kepada UMKM yang bersumber dari dana perbankan dengan persyaratan ringan dan terjangkau serta didukung fasilitas penjaminan dan Pemertan melalui perusahaan penjamin. UMKM atau calon debitur yang dapat memperoleh KUR adalah calon debitur yang memiliki usaha produktif yang layak namun belum bankable dalam dan digunakan untuk keperluan modal kerja dan/atau investasi.

Skema KUR melibatkan tiga pihak yaitu Pemerintah, Bank Pelaksana dan perusahaan penjamin, yang terkait dalam satu nota kesepahaman (MoU). Perbankan memiliki peran memberikan KUR kepada debitur sasaran yang secara otomatis dijamin oleh perusahaan penjamin. Premi atas penjaminan kredit yang dilakukan oleh perusahaan penjamin dibayar oleh pemerintah sebagai subsidi Kredit Program.

Sejak tahun 2010, target penyaluran KUR oleh perbankan ditetapkan oleh ketiga pihak tersebut secara bersama sebesar Rp23 triliun pertahun. Mengingat bahwa KUR adalah kredit program pemerintah maka agar tidak menimbulkan kerugian dan untuk memenuhi kecukupan modal bagi perusahaan penjamin, pemerintah harus menambah penyertaan modal kepada perusahaan penjamin tersebut. Biasanya penyertaan modal oleh pemerintah ditentukan oleh target KUR yang akan dicapai dan rasio penjaminan yang ditentukan *(loaning ratio)*.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka total pengelaran Pemerintah pada program pembiayaan UMKM melalui KUR adalah:

1. Imbal jasa penjaminan (IJP) yang dibayarkan pemerintah sebagai subsidi kepada debitur KUR dalam bentuk premi atas usaha penjaminan kredit yang dilakukan oleh perusahaan penjamin.
2. Penyertaan modal negara (PMN) yang dibayarkan pemerintah sebagai pengelaran investasi dalam rangka memenuhi kecukupan modal di perusahaan penjamin, sehingga mereka dapat melakukan penjaminan sebesar kredit yang ditargetkan tersalur kepada UMKM melalui KUR.

B.2.2.1.B. Belanja Hibah

Belanja Hibah Rp. 75.08 miliar

Realisasi Belanja Hibah pada TA 2012 adalah sebesar Rp/5.079.293.554 yang berarti 4,13 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APEN-P sebesar Rp1.790.936.805.000. Realisasi belanja Hibah tersebut terdiri dari:

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (*Audited*)

Projek/Megiatan	Jumlah (Rp)
Local Basic Education Capacity (L-BEC)	42.004.416.316
Water and Sanitation Program, Sub Program D Sanitation City Pilot Projects (Mesaup D)	9.634.186.250
Investment Enhancement Grant (IEG)	5.385.305.713
Mass Rapid Transit (MRT)	3.490.518.501
Water Resource and Irrigation Sector Management Projects (WASMP)	14.504.054.774
Jumlah	75.078.293.554

Belanja hibah tersebut merupakan belanja yang diberikan kepada Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang merupakan penerusan hibah dari luar negeri kepada Pemerintah Daerah maupun dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Rendahnya realisasi belanja hibah dikarenakan tidak terlaksananya proyek *Mass Rapid Transportation* (MRT). Dari total alokasi dana MRT yang diadikasikan sebesar Rp1.570.577.681.100 hanya terealisasi sebesar Rp3.490.518.501 (0,22%).

B.2.2.1.7. Belanja Bantuan Sosial

*Belanja Bantuan Sosial
Rp79,82 triliun*

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2012 adalah sebesar Rp75.621.057.138.995 yang berarti 93,69 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBA-P sebesar Rp80.716.414.343.428. Hal ini berarti realisasi Belanja Bantuan Sosial JA 2012 lebih besar Rp4.516.729.976.648 atau naik 6,35 persen dari Realisasi TA 2011. Rincian realisasi Belanja Bantuan Sosial adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2012 (<i>Audited</i>)	TA 2011 (<i>Audited</i>)
Belanja Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	480.648.334.894	-
Belanja Bantuan Kempercasi Kemiskinan Harga BBM	-	6.246.014.909.528
Belanja Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	24.666.996.333.311	-
Belanja Bantuan Langsung (<i>Social Cash Transfer</i>) Sekolah/Lembaga/Guru	-	32.091.722.341.602
Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	36.772.640.726.904	-
Belanja Bantuan Imbal Swadaya Sekolah/Lembaga	-	3.728.610.000
Belanja Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial	1.992.433.632.977	-
Belanja Bantuan Bencana	-	4.895.000.900.695
Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan kemiskinan	11.886.370.018.093	-
Belanja Bantuan Sosial Lembaga Perbadanan	-	148.890.983.500
Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Bencana	1.048.738.654.028	-
Belanja Lembaga Sosial Lainnya	-	27.931.109.348.622
Jumlah	75.621.057.138.995	71.104.328.162.347

Perubahan rincian Belanja Bantuan Sosial pada tahun 2012 terjadi karena perubahan akun terkait dengan Belanja Bantuan Sosial.

B.2.2.1.8. Belanja Lain-lain

*Belanja Lain-lain Rp4,07
triliun*

Realisasi Belanja Lain-lain TA 2012 adalah sebesar Rp4.073.111.935.240 atau 5,94 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBA-P sebesar Rp68.540.494.302.453. Hal ini berarti realisasi Belanja Lain-lain TA 2012 lebih kecil Rp1392.257.660.718 atau turun 25,47 persen dari Realisasi TA 2011. Rincian Belanja Lain-lain adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 *(audited)*

Uraian	TA 2012 <i>(Audited)</i>	TA 2011 <i>(Audited)</i>
Belanja Cadangan Beras Perse-intak	2.000.000.000.000	-
Belanja Cadangan Rasio Kasimta	347.784.387.131	-
Belanja Selisih Harga Basis Bulog	16.235.217.000	-
Belanja Tunggalan dan Klein Pilek Ketiga	6.218.852.693	-
Belanja Perusahaan PT SWI	43.490.221.466	-
Belanja Kerjasama Takris Internasional	-	13.893.595.176
Belanja Cadangan tunjangan beras PNS/TA (Poki)	-	9.778.482.000
Belanja Non Mada -Otorita Estem	-	667.786.893
Belanja Karena Rugi Selisih Kurs	282.390.817.867	360.981.026.639
Jasa Perbandahaiaan	195.934.423.438	199.847.380.710
Belanja TVRI	-	895.547.340.402
Belanja PPI	-	677.104.143.619
Uang Cadangan Kasiko Kenaikan Harga Jasa <i>(Land Copying)</i>	310.092.000.000	408.146.000.000
Belanja Lain-lain BJA Lainnya	44.438.296.369	-
Belanja Lain-lain	826.187.619.379	2.111.606.042.707
Jumlah	4.073.111.935.240	5.485.969.795.958

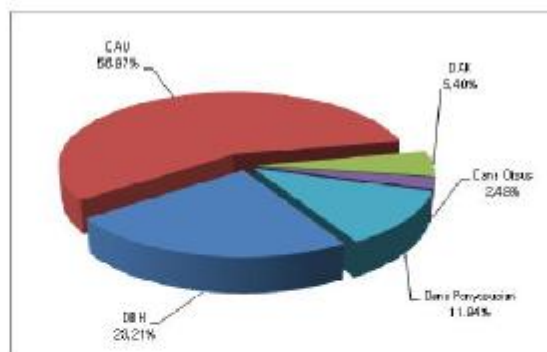
Kecilnya realisasi Belanja Lain-lain pada TA 2012 dibandingkan dengan APBN-P dikarenakan adanya realokasi anggaran belanja lain-lain ke anggaran K/L sesuai dengan *nature of transaction* nya.

*Transfer ke Daerah
Rp480,66 triliun*

B.2.2.2. Transfer ke Daerah

Realisasi Transfer ke Daerah TA 2012 adalah sebesar Rp480.645.074.235.761 yang berarti 100,39 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp478.775.913.233.000. Hal ini berarti Realisasi Transfer ke Daerah TA 2012 ini lebih besar Rp18.870.300.603.971 atau naik 16,85 persen dari Realisasi TA 2011. Transfer ke Daerah terdiri dari *i)* Dana Perimbangan, dan *ii)* Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian.

Komposisi realisasi Transfer untuk Daerah TA 2012 disajikan pada Grafik 37.



Grafik 37 Komposisi Realisasi Transfer ke Daerah TA 2012

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Audited)

Dana Perimbangan
Rp411,29 triliun

B.2.2.2.1. Dana Perimbangan

Realisasi Dana Perimbangan TA 2012 adalah sebesar Rp411.293.124.979.761 atau 100,72 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp408.352.053.705.000. Hal ini berarti realisasi Dana Perimbangan TA 2012 ini lebih besar Rp24.046.911.025.445 atau naik 18,44 persen dari realisasi TA 2011. Dana Perimbangan terdiri dari (i) Dana Bagi Hasil (DBH), (ii) Dana Alokasi Umum (DAU), dan (iii) Dana Alokasi Khusus (DAK).

Rincian realisasi Dana Perimbangan disajikan pada Daftar 3

DBH Rp111,54 triliun

B.2.2.2.1.1. Dana Bagi Hasil

Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2012 adalah sebesar Rp111.537.232.920.761 atau 102,87 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp108.421.669.502.000. Hal ini berarti realisasi Dana Bagi Hasil TA 2012 ini lebih besar Rp3.115.563.418.761 atau naik 15,09 persen dari realisasi TA 2011. Terlampauinya realisasi DBH dari anggerannya tersebut disebabkan oleh kenaikan pendapatan yang dibagikan yang melampaui anggerannya. Realisasi DBH terdiri dari Bagi Hasil Pajak sebesar Rp47.214.138.030.738, Dana Bagi Hasil Cukai sebesar Rp1.722.781.272.658 dan Dana Bagi Hasil SDA sebesar Rp62.500.285.617.315.

Rincian realisasi Dana Bagi Hasil (DBH), dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Uraian	TA 2012 (Audited)	TA 2011 (Audited)
DBH Pajak		
DBH Pajak Penghasilan Perorangan	19.379.200.456.694	13.237.326.409.261
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	27.697.142.663.038	28.281.482.663.025
DBH Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	238.819.021.058	6.747.878.980
Jumlah DBH Pajak	47.314.138.030.738	41.526.658.918.174
DBH Cukai	1.722.781.272.658	1.408.448.784.184
DBH SDA		
DBH SDA Minyak Bumi	26.165.822.138.467	20.634.080.736.284
DBH SDA Gas Bumi	21.231.876.084.288	18.972.548.768.983
DBH SDA Pertambangan Umum	17.990.854.478.197	14.458.178.577.477
DBH SDA Pertambangan Panas Bumi	626.278.978.409	5.19.587.115.194
DBH SDA Kawalanan	1.835.890.422.815	1.812.485.063.991
DBH SDA Perikanan	179.784.557.382	139.077.102.117
Jumlah DBH SDA	62.500.285.617.315	53.974.988.297.954
Total DBH	111.537.202.820.761	96.808.981.831.316

Dalam realisasi DBH SDA sebesar Rp62.500.285.617.315, terdapat Rp13.429.204.255.033 yang sampai dengan akhir TA 2012 dananya masih tersimpan pada rekening dana cadangan (*excess account*), karena masih menunggu identifikasi daerah penerima. Penampatan dana cadangan tersebut dilakukan karena masih dilakukan rekonsiliasi dan verifikasi daerah penerima oleh DJPK, pemerintah daerah, dan pihak kementerian terkait. Setelah rekonsiliasi/verifikasi selesai, maka dana cadangan DBH tersebut akan ditayangkan kepada pemerintah daerah.

Rincian realisasi Dana Perimbangan disajikan pada Daftar 3

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

DAU Rp273,81 triliun

B.2.2.2.1.2. Dana Alokasi Umum

Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2012 adalah sebesar Rp273.814.438.203.000 atau 100 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp273.814.438.203.000. Hal ini berarti realisasi DAU TA 2012 ini lebih besar Rp48.280.726.155.000 atau naik 21,41 persen dari realisasi TA 2011.

Rincian realisasi Dana Perimbangan disajikan pada Daftar 3

DAK Rp25,94 triliun

B.2.2.2.1.3. Dana Alokasi Khusus

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2012 adalah sebesar Rp25.941.483.856.000, atau 99,33 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp26.115.948.000.000. Hal ini berarti realisasi DAK TA 2012 ini lebih besar Rp1.137.973.931.100 atau naik 4,53 persen dari realisasi TA 2011.

DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah, dan sesuai dengan prioritas nasional. Daerah tertentu adalah daerah yang memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Pada TA 2012, DAK dialokasikan untuk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional pada 19 bidang sebagaimana ditetapkan melalui PMK Nomor: 209/PMK.01/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi DAK TA 2012.

Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian Rp89,25 triliun

B.2.2.2.2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian

Realisasi Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian TA 2012 adalah sebesar Rp89.351.949.256.000 atau 98,48 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp90.429.877.528.000. Hal ini berarti realisasi Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian TA 2012 ini lebih besar Rp5.273.398.578.526 atau naik 8,23 persen dari realisasi TA 2011. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian terdiri dari (i) Dana Otonomi Khusus, dan (ii) Dana Penyesuaian.

Rincian realisasi Dana Perimbangan disajikan pada Daftar 3

Dana Otonomi Khusus Rp11,85 triliun

B.2.2.2.2.1. Dana Otonomi Khusus

Realisasi Dana Otonomi Khusus (Dotsu) TA 2012 adalah sebesar Rp11.952.577.529.000, yang berarti 100 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp11.952.577.529.000. Hal ini berarti realisasi Dana Otonomi Khusus TA 2012 ini lebih besar Rp1.531.264.435.000 atau naik 14,69 persen dari realisasi TA 2011.

Uraian	TA 2012 (Revisi)	TA 2011 (Revisi)
Transfer Dana Otonomi Untuk Papua	5.473.298.784.000	4.510.353.498.500
Transfer Dana Otonomi Khusus Untuk Papua	3.833.402.135.000	3.057.459.547.550
Transfer Dana Tambahan Infrastruktur Papua	571.428.571.000	-
Transfer Dana Otonomi Khusus Untuk Papua Barat	1.042.886.820.000	1.053.193.848.850
Transfer Dana Tambahan Infrastruktur Papua Barat	428.571.428.000	-
Jumlah	11.952.577.529.000	10.431.312.895.300

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

Dana Penyesuaian
Rp57,40 triliun

B.2.2.2.2. Dana Penyesuaian

Realisasi Dana Penyesuaian TA 2012 adalah sebesar Rp57.399.371.728.000, yang berarti 98,17 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp58.471.300.000.000. Hal ini berarti realisasi Dana Penyesuaian TA 2012 ini lebih besar Rp3.742.134.043.528 atau naik 6,97 persen dari realisasi TA 2011. Dana Penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dan membantu mendukung percepatan pembangunan di daerah. Dana Penyesuaian TA 2012 terdiri dari:

Uraian	TA 2012 (Alokasi)	TA 2011 (Alokasi)
Dana Penyesuaian Lainnya		78.807.877.152
Dana untuk Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah	2.883.278.000.000	3.878.528.738.000
Dana Insentif Daerah (DID)	1.387.800.000.000	1.387.800.000.000
Dana Tujangan Profesi Guru PNSD	36.557.825.724.250	10.510.236.627.040
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	23.540.258.003.750	16.329.888.218.250
Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah		7.535.013.858.000
Dana Proyek Perencanaan Daerah dan Desentralisasi (P2D)	30.000.000.000	-
Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah		6.136.838.327.360
Jumlah	57.399.371.728.000	53.097.241.084.474

B.2.2.3. Suspensi

Suspensi Rp206,91 miliar

Suspensi merupakan perkiraan (skun) yang meramalkan perbedaan pencatatan realisasi Belanja Negara menurut Kementerian negara/lembaga dengan pencatatan pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). Jumlah suspensi belanja TA 2012 adalah sebesar Rp206.913.823.419, dengan rincian dalam Rp1:

Uraian	BUN	Kementerian Negara/Lembaga *)	Selisih (BUN - K/L)
Belanja Pemerintah Pusat			
Belanja Pegawai	157.859.657.528.774	157.859.657.528.774	0,000.000.000
Belanja Bahan	140.023.870.833.375	140.023.870.833.375	0,000.000.000
Belanja Modal	144.592.713.306.838	144.592.713.306.838	0,000.000.000
Penyediaan Barang Ulang	100.513.590.279.180	100.513.590.279.180	0,000.000.000
Susut/Nilai	346.423.404.132.332	346.423.404.132.332	0,000.000.000
Belanja Hibah	75.076.945.754	75.076.945.754	0,000.000.000
Belanja Bantuan Sosial	75.002.520.033.804	75.002.520.033.804	0,000.000.000
Belanja Lain-lain	4.072.855.812.158	4.072.855.812.158	0,000.000.000
TOTAL	1.009.120.104.717.353	1.009.120.104.717.353	0,000.000.000
Transfer ke Daerah			
Dana Bagi Hasil	111.537.502.920.761	111.537.502.920.761	0,000.000.000
Dana Alokasi Umum	273.814.438.233.000	273.814.438.233.000	0,000.000.000
Dana Alokasi Khusus	25.941.483.858.000	25.941.483.858.000	0,000.000.000
Dana Diklat dan Kursus	11.992.977.928.000	11.992.977.928.000	0,000.000.000
Dana Penyesuaian	57.399.371.728.000	57.399.371.728.000	0,000.000.000
TOTAL	480.645.072.505.842	480.645.072.505.842	0,000.000.000
Suspensi			206.913.823.419

*) Data K/L tidak termasuk Pendapatan dan Belanja terkait dengan Pendapatan Hibah Non Kas (Sraag/Usai)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Audited)

Defisit Anggaran
Rp182,18 triliun

B.2.3. Defisit Anggaran

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara & Hibah dan Realisasi Debet Negara TA 2012, maka Defisit Anggaran TA 2012 adalah sebesar Rp153.300.595.418.037, yang berarti 80,52 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp190.105.334.980.000. Perhitungan Defisit Anggaran sebagai berikut:

Uraian	TA 2012 (Audited)	TA 2011 (Audited)
Pendapatan Negara dan Hibah	1.308.108.028.172.937	1.210.588.853.358.415
Debet Negara	(1.491.410.224.590.994)	(1.234.999.146.475.020)
Defisit Anggaran	(183.300.595.418.037)	(24.398.493.115.005)

Pembiayaan (Neto)
Rp175,18 triliun

B.2.4. Pembiayaan

Realisasi Pembiayaan (Neto) TA 2012 adalah sebesar Rp175.158.169.320.375 yang berarti 92,14 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp190.105.334.980.000. Pembiayaan terdiri dari (i) Pembiayaan Dalam Negeri, dan (ii) Pembiayaan Luar Negeri. Realisasi Pembiayaan yang akan diuraikan di bawah ini adalah realisasi Pembiayaan berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN.

Pembiayaan Dalam Negeri
Rp196,82 triliun

B.2.4.1. Pembiayaan Dalam Negeri (Neto)

Realisasi Pembiayaan Dalam Negeri TA 2012 adalah sebesar Rp196.622.535.177.645, yang berarti 102,10 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp194.531.004.181.000. Pembiayaan Dalam Negeri terdiri dari (i) Rekening Pemerintah, (ii) Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman (iii) Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi, (iv) Surat Berharga Negara (Ratol), (v) Pinjaman Dalam Negeri (Neto), (vi) Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah, (vii) Kawajiban Penjaminan, dan (viii) Dana Pengembang Pendidikan Nasional.

Rekening Pemerintah
Rp58,17 triliun

B.2.4.1.1. Penggunaan SAL

Pembiayaan dan Penggunaan SAL adalah penerimaan pembiayaan yang berasal dan penggunaan rekening SAL. Realisasi Penggunaan SAL TA 2012 adalah sebesar Rp56.170.000.000.000, yang berarti 99,99 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp56.173.747.225.000. Rincian Pengguna SAL adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2012 (Audited)	TA 2011 (Audited)
Penggunaan SAL	56.170.000.000.000	40.318.043.048.000
Jumlah	56.170.000.000.000	40.318.043.048.000

Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman
Rp6,62 triliun

B.2.4.1.2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman

Realisasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman TA 2012 adalah sebesar Rp6.533.098.103.116 yang berarti 148,88 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp4.387.675.676.000. Rincian Penerimaan Pengembalian Penerusan Pinjaman adalah

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

sebagai berikut: (dalam Rp):

Uraian	TA 2012 (Audited)	TA 2011 (Audited)
Penerimaan Pengembalian Penerusan Pinjaman DN kepada Daerah	50.384.445.450	18.972.303.278
Penerusan Pinjaman DN kepada BUMD	84.061.278.943	75.477.991.357
Penerusan Pinjaman DN kepada BUMN	565.052.615.028	478.070.633.171
Penerusan Pinjaman DN kepada Non Pemerintah	271.500.107.060	780.886.288.000
Penerusan Pinjaman LN Takur Angkuran Berjalan (TABI) kepada Daerah	94.826.202.823	47.857.604.648
Penerusan Pinjaman LN TAB kepada EUMD	338.1025.052.882	363.488.113.658
Penerusan Pinjaman LN TAB kepada EUMN	5.121.413.643.152	6.897.012.681.438
Penerusan Pinjaman LN TAB kepada Non Pemerintah	21.884.274.210	-
Total	8.530.880.100.446	8.808.846.486.468

B.2.4.1.3. Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi

Pembiayaan Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi Rp1,28 triliun

Realisasi Pembiayaan dari Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi TA 2012 sebesar Rp1.277.894.564.583 atau 456,23 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBV³ sebesar Rp282.000.000.000.

Program privatisasi dilakukan Pemerintah dengan tujuan utama yaitu untuk peningkatan kinerja BUMN. Peningkatan kinerja tersebut dapat dilakukan dengan peningkatan keefisienan modal BUMN dan pelapasan kepemilikan pemerintah kepada swasta agar BUMN lebih mampu bersaing. Sementara itu, Penjualan Aset Program Restrukturisasi dilakukan oleh PT PPA melalui penjualan aset pasca dibubarkannya DPMN. Rincian realisasi pembiayaan dari Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi adalah:

Uraian	TA 2012 (Audited)	TA 2011 (Audited)
Penerimaan Hasil Privatisasi	138.268.381.371	425.044.145.887
Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi	-	330.329.053
Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelenggaraan Aset Ets BPPN	876.202.356.673	801.228.043.527
Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelenggaraan Aset Bebas Milik Ets BDI	293.522.146.138	371.378.005.731
Jumlah	1.277.894.564.583	1.587.881.517.178

Rincian penerimaan hasil privatisasi tahun 2012 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Tanggal Setor	Nilai Setoran	Uraian Setoran
1.	5 Januari 2012	380.956.093,80	PT Kertas Bekas (Setoran ke-2, setelah verifikasi)
2.	5 Januari 2012	113.503.470,88	PT Indub (Setoran ke-2, setelah verifikasi)
3.	5 Januari 2012	213.138.574,71	PT KEF (Setoran ke-2, setelah verifikasi)
4.	5 Januari 2012	378.790.149,89	PT Aminda (Setoran ke-2, setelah verifikasi)
5.	5 Januari 2012	1.320.378.805,63	PT Jakarta International Hotel Development LHD (Setoran ke-2, setelah verifikasi)
6.	23 November 2012	125.571.081.900,00	PT Bank Tabungan Negara (Setoran Tab. Hasil penjualan rights Pemerintah)
Jumlah		138.268.381.370,88	

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

Penerimaan pembiayaan yang merupakan setoran ke-2 (dua) adalah penerimaan dari kegiatan privatisasi yang telah dilakukan pada tahun 2011 dan terdapat setoran kembali setelah dilakukannya verifikasi oleh Kantor Akuntan Publik atas hasil bersih dari pelaksanaan privatisasi.

Penerimaan rights pemerintah merupakan penjualan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dimiliki oleh pemerintah, atas diterbitkannya saham baru pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

B.2.4.1.4. Surat Berharga Negara (Neto)

Surat Berharga Negara
(Neto) Rp 159,70 triliun

Realisasi Pembiayaan dan Surat Berharga Negara (SBN) Neto TA 2012 adalah sebesar Rp 159.704.323.637,096 atau 100,07 persen dari yang dianggarkan dalam APDN-P sebesar Rp 159.596.700.000,000. Pemerintah dapat menerbitkan SBN untuk membiayai kebutuhan pengelolaan kas bagi pelaksanaan APDN, apabila dan tunai kas tidak cukup tersedia untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran di awal tahun anggaran dan untuk kepentingan stabilisasi pasar dan pengelolaan kas dengan tetap memperhatikan jumlah kebutuhan penerbitan SBN neto untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang ditetapkan.

Perhitungan Surat Berharga Neto adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2012 (Ankud)	TA 2011 (Ankud)
Penerimaan		
Penerbitan/Perjualaan SPN	30.520.000.000,000	40.000.000.000,000
Penerbitan/Perjualaan Obligasi Negara CN	148.780.745.000,000	110.514.000.000,000
Utang Bunga Obligasi Negara CN	2.251.728.240,000	1.817.837.481,000
Penerbitan/Perjualaan SBSN - Jangka Panjang	43.080.805.000,000	22.051.410.000,000
Imbalan Dibayar di muka SBSN - Jangka Panjang	171.346.283,000	160.28.850,000
Penerbitan/Perjualaan SJK Perumahan - CN	1.380.000.000,000	1.320.000.000,000
Penerbitan/Perjualaan Obligasi Negara - Valas	46.018.969.095,000	21.441.986.160,150
Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara - Valas	85.870.205,270	-
Penerimaan Penerbitan SBSN - Valas	9.639.006.152,000	8.035.050.295,000
Totol Penerimaan	282.887.257.889,780	207.136.113.186,150
Pengeluaran		
Pelunasan SPN	(37.800.000.000,000)	(38.045.000.000,000)
Pelunasan Obligasi CN	(58.582.418.279,853)	(42.080.071.345,095)
Pembelian Kembali Obligasi CN	(13.886.527.000,000)	(4.183.086.000,000)
Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara CN	(2.384.108.740,000)	(2.020.187.408,000)
Pelunasan SBSN Jangka Pendek	-	-
Pelunasan SBSN Jangka Panjang	(8.888.290.000,000)	-
Pembayaran Imbalan Dibayar di Muka SBSN - J: Panjang	(158.900.711,000)	(52.188.386,000)
Pelunasan SPN Syariah	(2.505.000.000,000)	-
Pembayaran Utang Bunga Obligasi Valas	(67.699.621,842)	-
Totol Pengeluaran	(123.192.044.352,694)	(87.271.747.737,085)
Jumlah SBN (Neto)	159.704.323.637,096	119.864.365.449,065

B.2.4.1.5. Pinjaman Dalam Negeri (Neto)

Pinjaman Dalam Negeri
(Neto) Rp 759,8P miliar

Realisasi Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri TA 2012 adalah sebesar Rp 799.676.339.939, yang berarti 83,66 persen dari jumlah yang dianggarkan APDN-P sebesar Rp 955.116.1538.000. Pinjaman ini merupakan pinjaman dari RUMAH. Rincian Pinjaman Dalam Negeri TA 2012 adalah

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

Uraian	TA 2012 (Rp triliun)	TA 2011 (Rp triliun)
Penerimaan pinjaman dalam negeri dari BUMN	708.475.587.703	323.303.359.471
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri dan Perusahaan Daerah	206.641.281.721	-
Pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri	(10.435.519.428)	-
Jumlah	700.676.359.930	303.606.359.471

B.2.4.1.6. Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah

PMN Investasi
Pemerintah Rp18,28
triliun

Realisasi pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Negara (PMN)/Investasi Pemerintah TA 2012 adalah sebesar Rp13.862.557.487,418, yang berarti 97,91 persen dari jumlah yang dianggarkan APBN-P sebesar Rp19.263.140.158.000. Rincian Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Negara (PMN) TA 2012 adalah:

Uraian	TA 2012 (Rp triliun)	TA 2011 (Rp triliun)
PMN untuk BUMN dan Badan Lainnya	7.600.000.000.000	9.225.783.312.234
PMN untuk Badan Internasional	541.150.086.643	-
Penyertaan Modal Lainnya	370.384.401.000	-
Investasi Pemerintah	3.289.800.000.000	1.000.000.000.000
Investasi Pemerintah untuk Dana Geothermal	876.500.000.000	1.156.000.000.000
Pembiayaan Kredit Investasi Pemerintah Dana Bergulir	6.166.813.000.000	550.000.000.000
Jumlah	18.982.557.487.419	19.843.883.312.234

PMN untuk BUMN dan Badan Lainnya sebesar Rp7.500.000.000.000, terdiri dari:

Uraian	Jumlah (Rp)
Penyerahan pada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)	1.000.000.000.000
Penyerahan pada PT Sarana Multi Infrastruktur Indonesia (Persero)	2.000.000.000.000
Penyerahan pada PT Diraja Istra Indonesia (Persero)	1.400.000.000.000
PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	831.000.000.000
Penaun Jaminan Kredit Indonesia	1.188.000.000.000
Penyerahan pada PT PA (Persero)	800.000.000.000
Penyerahan pada PT Pindad	300.000.000.000
Penyerahan pada PT Industri Kapal Indonesia	200.000.000.000
Penyerahan pada PT Diraja	100.000.000.000
Jumlah	7.600.000.000.000

PMN untuk Badan Internasional sebesar Rp541.150.086.643, terdiri dari:

Uraian	Jumlah (Rp)
Penyerahan pada Bank for Reconstruction and Development	147.813.078.223
Penyerahan pada Asian Development Bank	352.880.083.874
Penyerahan pada International Finance Corporation	9.116.254.379
Penyerahan pada Fund for Agricultural Development	18.619.211.088
Penyerahan pada International Development Association	4.641.226.000
Penyerahan pada The Islamic Corporation for the Development of Private Sector	9.884.124.480
Jumlah	541.150.086.643

Investasi Pemerintah sebesar Rp3.289.800.000.000, terdiri dari:

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

Uraian	Jumlah (Rp)
Investasi pemerintah pada Pusat Investasi Pemerintah	1.299.800.000.000
Investasi pemerintah pada PT Indonesia Asahan Aluminium	2.000.000.000.000
Jumlah	3.299.800.000.000

Dana Bergulir sebesar Rp8.188.313.000.000 dikelola oleh beberapa BLU, yaitu:

Uraian	Jumlah (Rp)
BLU Pusat Perbiyasan Paramahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	4.709.253.000.000
BLU Bidang Perencanaan Sekretariat BFKT Kementerian PL	900.000.000.000
BLU LPDB Kementerian Koperasi dan UKM	667.880.000.000
Jumlah	6.188.913.000.000

B.2.4.1.7. Kewajiban Penjaminan

*Kewajiban Penjaminan
Rp0*

Pada TA 2012 tidak terdapat realisasi pengeluaran pembiayaan Kewajiban Penjaminan, sedangkan jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp633.340.000.000.

Kewajiban penjaminan adalah penjaminan yang secara potensial menjadi beban Pemerintah akibat pambayar jaminan kepada PT PLN (Persero) sebesar Rp623.340.000.000, dalam rangka mendukung percepatan pembangkit listrik 10.000 MW atas kewajiban kepada kreditor perbankan dan jaminan sebesar 70% atas kewajiban pembayaran kembali pokok kredit investasi PDAM sebesar Rp10.000.000.000. Pada akhir tahun kewajiban penjaminan tersebut tidak direalisasikan karena PT PLN dan PCAM mampu untuk membayar kewajiban kepada kreditornya.

B.2.4.1.8. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional

*Dana Pengembangan
Pendidikan Nasional Rp7
triliun*

Realisasi pengeluaran Dana Pengembangan Pendidikan Nasional pada TA 2012 adalah sebesar Rp7.000.000.000.000, yang berarti 100 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp7.000.000.000.000. Alokasi dana pengembangan pendidikan nasional adalah untuk penberukan *encompassing fund* yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program Laji generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antar generasi dan dana cadangan pendidikar untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak. Dana tersebut dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) pada Kementerian Keuangan.

B.2.4.2. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)

*Pembiayaan LN (Neto)
minus Rp23.45 triliun*

Realisasi Pembiayaan Luar Negeri (Neto) TA 2012 adalah sebesar minus Rp23.464.366.857.270, yang berarti 530,18 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar minus Rp4.425.889.201.000. Pembiayaan Luar Negeri terdiri dari (i) penarikan pinjaman luar negeri, (ii) penerimaan pinjaman dan (iii) pembayaran cicilan pokok utang luar negeri.

B.2.4.2.1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri

*Penarikan Pinjaman LN
Rp31,40 triliun*

Realisasi Penarikan Pinjaman Luar Negeri TA 2012 adalah sebesar Rp31.403.481.754.448 yang berarti 58,45 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp53.731.053.828.000. Penarikan pinjaman luar negeri terdiri dari (i) penarikan pinjaman program, dan (ii) penarikan pinjaman proyek.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

Penarikan Pinjaman
Program Rp15.00 triliun

B.2.4.2.1.1. Penarikan Pinjaman Program

Realisasi Penarikan Pinjaman Program TA 2012 adalah sebesar Rp15.003.476.180.432, yang berarti 96,15 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBV-P sebesar Rp15.603.899.524.000.

Pinjaman Program adalah pinjaman yang diterima dalam bentuk tunai (*cash financing*) yang memerlukan *policy matrix* untuk pencairannya. *Policy matrix* adalah suatu *set of policy* yang menjadi *condition* pinjaman program yang harus dipenuhi agar pinjaman dapat dicairkan. Pinjaman program digunakan untuk mendukung pembiayaan defisit tunai APBN. Besar-besarnya pinjaman program dilakukan dengan mempertimbangkan defisit pada suatu tahun anggaran.

Berikut di bawah ini adalah rincian realisasi Penarikan Pinjaman Program TA 2012 dan TA 2011 (dalam Rp):

Uraian	TA 2012 (Ankaso)	TA 2011 (Asiliasi)
Penarikan Pinjaman Program dari DECF	-	873.388.325.700
Penarikan Pinjaman Program dari IBRC	8.020.410.280.122	107.983.748.187.510
Penarikan Pinjaman Program dan AUI	4.812.300.000.000	3.634.000.000.000
Penarikan Pinjaman Program Multilateral Lainnya	570.895.020.310	-
Jumlah	15.003.476.180.432	15.266.144.513.218

Realisasi Penarikan Pinjaman Program ini berbeda dengan realisasi yang dilaporkan oleh BA 998.01 (Utang Pemerintah), dengan selisih sebesar Rp26.873.845.960. Selisih ini disebabkan adanya perbedaan saat pengakuan penerimaan pinjaman (selisih kurs) antara Ditjen Perbendaharaan selaku kuasa BUN dengan Ditjen Pengelolaan Utang selaku Kuasa Pengguna Anggaran 998.01. Rincian perbedaan tersebut adalah (dalam Rp):

Uraian	Data BUN	Data BA 998	Selisih
Waktu Penerimaan Utang dari IBRC	8.020.410.280.122	8.510.110.280.122	1.000.000.000
Waktu Penerimaan Utang dari AUI	4.812.300.000.000	6.295.000.000.000	1.520.000.000
Waktu Penerimaan Utang Program Multilateral Lainnya	570.895.020.310	1.110.000.000.000	479.845.000
Jumlah	15.003.476.180.432	14.875.000.334.672	26.873.046.860

B.2.4.2.1.2. Penarikan Pinjaman Proyek

Penarikan Pinjaman
Proyek Rp19.40 triliun

Realisasi Penarikan Pinjaman Proyek TA 2012 adalah sebesar Rp16.400.005.571.013, yang berarti 43,01 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBV-P sebesar Rp38.127.134.304.000

Pinjaman Proyek merupakan pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan/proyek pembangunan tertentu. Kegiatan pembangunan ini adalah kegiatan yang telah menjadi kegiatan prioritas pembangunan yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Kegiatan prioritas ini disusun BAPPENAS berdasarkan usulan dari kementerian negara/lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN.

Berikut di bawah ini adalah rincian realisasi Penarikan Pinjaman Proyek TA 2012 dan TA 2011 (dalam Rp):

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

Uraian	TA 2012 (Rincian)	TA 2011 (Rincian)
Penerima Pinjaman Prayak Bilateral	8.020.242.160.154	9.046.106.085.582
Penerima Pinjaman Prayak Multilateral	5.870.258.974.518	5.243.144.122.735
Penerima Pinjaman Prayak Fasilitas Kredit Ekspor	2.451.888.847.371	4.188.783.882.385
Penerima Pinjaman Prayak Komersial	57.582.877.025	-
Penerima Pinjaman Prayak Lainnya	57.414.977	-
Jumlah	16.400.005.574.016	18.481.034.210.702

Realisasi Penerimaan Pinjaman Prayak ini berbeda dengan realisasi yang dilaporkan oleh RA 999.01 (Utang Pemerintah), dengan selisih sebesar Rp1.962.913.849.879 dengan rincian sebagai berikut: (dalam Rp):

Uraian	Data BUN	Data RA 999	Selisih
Penerima Pinjaman Prayak Bilateral	8.020.242.160.154	9.046.106.085.582	(1.025.863.925.428)
Penerima Pinjaman Prayak Multilateral	5.870.258.974.518	5.243.144.122.735	627.114.851.783
Penerima Pinjaman Prayak Fasilitas Kredit Ekspor	2.451.888.847.371	4.188.783.882.385	(1.736.895.035.014)
Penerima Pinjaman Prayak Komersial	57.582.877.025	1.127.182.880.285	(1.069.595.003.260)
Penerima Pinjaman Prayak Lainnya	57.414.977	54.459.700	2.955.277
Jumlah	16.400.005.574.016	18.362.919.423.395	(1.962.913.849.879)

Perbedaan penerusan pinjaman luar negeri disebabkan oleh:

Uraian	Jumlah
Catatan Kas	(378.135.687.770)
Saldo Awal 2012 (Saldo Akhir 2011)	4.814.214.464
Saldo Awal	10.813.872.422
Saldo GRC yang bertambah sebagai dana GRC	21.323.366.216
Saldo GRC yang berkurang sebagai GRC	(21.110.987.388)
Pajak GRC Monev	2.377.347.000.436
Saldo	(821.317.452)
Saldo Revisi Saldo Awal tahun 2010	11.301.000.000
Saldo Revisi Saldo Akhir tahun 2012	(17.090.971.714)
Saldo Revisi Saldo Awal 2010	56.330.898.099
Saldo Revisi Saldo Akhir 2012	50.000.000.000
Total	(1.962.913.849.879)

B.2.4.2.2. Penerusan Pinjaman

Realisasi pengeluaran pembiayaan Penerusan Pinjaman TA 2012 adalah sebesar Rp5.753.031.242.381, yang berarti 44,51 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBV³ sebesar Rp12.823.029.000. Rincian Penerusan Pinjaman adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2012 (Rincian)	TA 2011 (Rincian)
Penerusan Pinjaman .N TAB kearah Daerah	(92.016.402.128)	(116.837.802.868)
Penerusan Pinjaman .N TAB kearah BUMN	(3.861.014.840.204)	(4.108.913.568.433)
Total	(3.753.031.242.381)	(4.225.751.371.298)

B.2.4.2.3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri

Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri merupakan pembayaran pokok utang luar negeri yang jatuh tempo pada TA 2012. Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri dalam TA 2012 adalah sebesar Rp51.144.817.369,327 yang berarti 102,80 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp49.724.800.000,00.

Berikut di bawah ini adalah rincian Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri TA 2011 dan

Penerusan Pinjaman
Rp 5.753 triliun

Pembayaran Cicilan
Pokok Utang LN
Rp 51,14 triliun

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

TA 2010 (dalam Rp):

Uraian	TA 2012 (Audiens)	TA 2011 (Audiens)
Perbiayaan Utang Pokok Utang LA - Pinjaman Program	-	381.155.555.858
Cicilan Pokok Utang LM - Pinjaman Program	10.862.734.857.111	8.038.453.325.006
Perbiayaan Utang Pokok Utang LA - Pinjaman Proyek	3.031.378.886.738	2.275.910.434.365
Cicilan Pokok Utang LM - Pinjaman Proyek	37.522.893.918.478	35.818.983.180.042
Jumlah	51.114.877.368.327	47.322.502.478.271

B.2.5. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran - SILPA/SIKPA:

SILPA Rp21,86 triliun

Berdasarkan Defisit Anggaran sebesar Rp153.300.395.480.036 dan realisasi Pembiayaan Neto sebesar Rp173.158.1E8.320.37E sebagaimana diuraikan di atas, maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp21.857.572.902.338, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2012 (Audiens)	TA 2011 (Audiens)
Pendapatan Negara dan Hibah	1.330.109.629.172.950	1.210.599.653.359.415
Belanja Negara	1.481.410.224.580.884	1.234.988.146.475.034
Surplus/Defisit	(168.300.596.418.036)	(84.388.483.116.309)
Pembiayaan Neto	175.158.158.320.375	130.948.889.674.420
SILPA (SIKPA)	21.857.572.902.338	48.548.579.508.311

B.3. CATATAN PENTING LAINNYA

1. Informasi Pendapatan dan Belanja Aktual

Sesuai dengan Pasal 44 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN TA 2012, Laporan Realisasi Anggaran pada LKPP dilengkapi dengan informasi pendapatan dan belanja berbasis aktual. Informasi tentang pendapatan dan belanja secara aktual dimaksudkan sebagai tahap menuju pada penerapan akuntansi berbasis aktual yang dilengkapi dengan informasi hak dan kewajiban yang diikuti sebagai peramban atau pengurang nilai kelayaan bersih Pemerintah dalam penganggaran berbasis kas. Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Aktual disajikan secara tersendiri dalam Suplemen LKPP Tahun 2012.

2. Data Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Berdasarkan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga terdapat realisasi belanja terkait dengan dana dekonsentrasi/tugas pembantuan TA 2012, dengan rincian sebagai berikut.

Kode BA	Kementerian Negara/Lembaga	Realisasi TA 2012 (dalam Rp)		
		Dekonsentrasi	Tugas Pembantuan	Lulusan Bersama
010	Kementerian Dalam Negeri	1.179.409.100.567	235.524.177.751	6.004.213.674.197
019	Kementerian Kelautan	3.067.060.404.009	6.307.067.090.757	-
011	Kementerian Kehutanan	111.841.898.572	-	-
020	Kementerian Kesehatan	81.201.525.000	-	-
029	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	3.041.471.378.859	20.701.305.725	-
029	Kementerian Sosial	400.401.460.551	4.465.461.857.113	41.114.770.000
029	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	307.460.093.022	1.305.260.000.000	-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

C27	Kementerian Sosial	576.946.410.100	105.224.460.200	
L27	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	11.129.700.000	4.371.441.100	
L28	Kementerian Koordinator Bidang Pertahanan dan Keamanan	229.322.777.400	474.307.307.300	-
C30	Kementerian Kesehatan	137.144.019.100	1.310.065.227.300	1.321.451.000.000
LU1	Kementerian Kabupaten/Kota	60.061.500.000	59.010.312.000	
L43	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	31.427.700.000		
LU2	Kementerian Kewasibadan UPM	18.180.000.000	-	-
C47	Kementerian Negara Pembangunan Daerah Khusus	13.320.000.000	-	-
C55	Kementerian Negara PPN/Perdagangan	20.410.514.000		
L57	Kementerian Perindustrian	57.421.344.000		
L59	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	15.000.000.000	-	-
C67	Kementerian PDI		504.071.556.000	
C69	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	2.448.100.000		
C67	Kementerian Pertahanan	1.401.884.000		
L53	Kementerian Kelautan dan Perikanan	19.446.744.000	8.237.900.000	
C81	Kementerian Kewasibadan Pertahanan dan Keamanan	13.971.775.000		
C92	Kementerian Kewasibadan Luar Negeri	102.015.105.100		
1	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	2.767.367.000	13.569.004.000	
	Total	15.501.831.152.500	17.287.645.451.700	10.263.273.291.180

3. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU)

Sebagai bagian reformasi manajemen keuangan negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah mengamarkan berbagai perubahan fundamental, antara lain pada Pasal 68 dan 69 mengenai PK BLU untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Amanat UU 1/2004 tersebut telah dijabarkan lebih lanjut dalam PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan 5 (lima) Peraturan Menteri Keuangan berkaitan dengan Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satker Instansi Pemerintah untuk Menetapkan PK BLU, Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada BLU, Pembentukan Dewan Pengawas pada BLU, Perencanaan Penetapan Remunerasi pada BLU, Tata Cara Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLU.

BLU merupakan implementasi konsep "enterprising the government" dan penganggaran berbasis kinerja di lingkungan pemerintah. BLU diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan untuk mendukung produktivitas, efisiensi dan efektivitas pelayanan publik tetapi tidak bertujuan mencari laba. Fleksibilitas BLU antara lain mengelola langsung pendapatan operasionalnya, tidak harus menyelaraskan plus akhir tahun ke Rekening Kas Negara, pegawai bisa PNS dan non-PNS, remunerasi berdasarkan tingkat tanggung jawab dan profesionalisme. Sumber pembiayaan instansi yang menerapkan PK BLU berasal dari APBR, pendapatan dari pelayanan, kerja sama operasional, hibah dan pendapatan lainnya.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

Bidang layanan umum yang diselenggarakan instansi PK BLU adalah kegiatan pemerintah yang bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa (*quasi public goods*), meliputi penyediaan barang/jasa, pengelola wilayah, dan pengelola dana khusus untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

BLU diharuskan menyusun dan mengintegrasikan RBA dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) kementerian/negara/lembaga induknya. Transparansi dan akuntabilitas diinformasikan dalam laporan keuangan instansi PK BLU, minimal terdiri dari laporan operasional/laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, disertai laporan kinerja. Laporan keuangan tersebut diaudit oleh pemeriksa ekstern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan instansi PK BLU tersebut harus dikonsolidasikan dalam laporan keuangan kementerian/negara/lembaga, yang selanjutnya dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang disampaikan Presiden kepada DPR sebagai RIL, pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

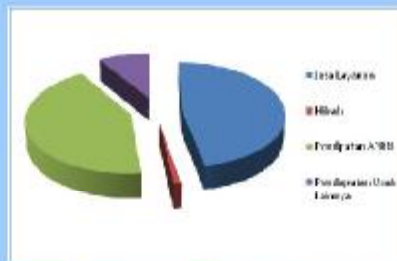
Sampai dengan 31 Desember 2012, terdapat 142 Satuan Kerja di lingkungan pemerintah yang telah menerapkan PK BLU, yang berasal dari 20 Kementerian/Negara/Lembaga, yaitu:

No	Kementerian/Negara/Lembaga	Jumlah BLU
1	Badan Koordinasi Nasional	1
2	Kementerian Keuangan	1
3	Kementerian Dalam Negeri	2
4	Kementerian Perhubungan	3
5	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-
6	Kementerian Kehutanan	-
7	Kementerian Kelautan dan Perikanan	35
8	Kementerian Kesehatan	32
9	Kementerian Pertanian	15
10	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1
11	Kementerian Sosial	-
12	Kementerian Pekerjaan Umum	-
13	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-
14	Kementerian Sains dan Teknologi	1
15	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	-
16	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	-
17	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	-
18	TKLPI	1
19	TKP	-
20	Jumlah RIL	142

Ditinjau dari bidang layanan, dari 142 BLU tersebut dapat dibagi menjadi:

- 133 BLU bidang Penyediaan Barang dan/atau Jasa;
- 3 BLU bidang Pengelolaan Wilayah/Kawaca;
- 6 RIL bidang Pengelolaan Dana Khusus.

Berdasarkan laporan keuangan 142 BLU, total pendapatan pada tahun 2012 adalah sebesar Rp95.013.146.013,920. Komposisi pendapatan BLU pada TA 2012 dapat dilihat pada Grafik 38.



Grafik 38 Komposisi Pendapatan BLU TA 2012

Sementara itu, Pendapatan, Beban, dan Surplus/Defisit BLU Tahun 2012 dapat dilihat pada Grafik 39.



Grafik 39 Pendapatan, Beban, dan Surplus/Defisit BLU TA 2012

Ikhtisar Laporan Keuangan BLU disajikan secara lengkap pada Daftar 37.

4. LPP RRI dan LPP TVRI

UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, PP No.11/2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran LPP, PP No.12/2005 tentang LPP RRI dan PP No.13/2005 tentang LPP TVRI menyebutkan bahwa pembiayaan LPP TVRI dan RRI berasal dari iuran penyiaran, APBN/APBD, sumbangan masyarakat, siaran iklan, dan usaha lain yang sah terkait dengan penyelenggaraan penyiaran. Pembiayaan yang berasal dari iuran penyiaran, sumbangan masyarakat siaran iklan, dan usaha lain yang sah terkait dengan penyelenggaraan penyiaran merupakan penerimaan negara yang dikelola langsung secara langsung untuk membiayai dan menunjang operasional LPP.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. S-714/ME.02/2011 tanggal 17 November 2011 tentang Perubahan Bagian Anggaran, status LPP RRI dan LPP TVRI mulai tahun anggaran 2012 telah menjadi Bagian Anggaran. Pendapatan dan belanja yang bersumber dari iuran penyiaran, sumbangan masyarakat, siaran iklan dan usaha lain yang sah dari kedua lembaga tersebut dilaporkan dalam suplemen laporan keuangan BA 116 dan BA 117. Terkait dengan Jasa Siaran dan Ulu Siaran (Jasinsu) yang diperoleh oleh kedua lembaga tersebut dapat dilihat pada Daftar 4.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (audited)

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 POSISI KEUANGAN SECARA UMUM

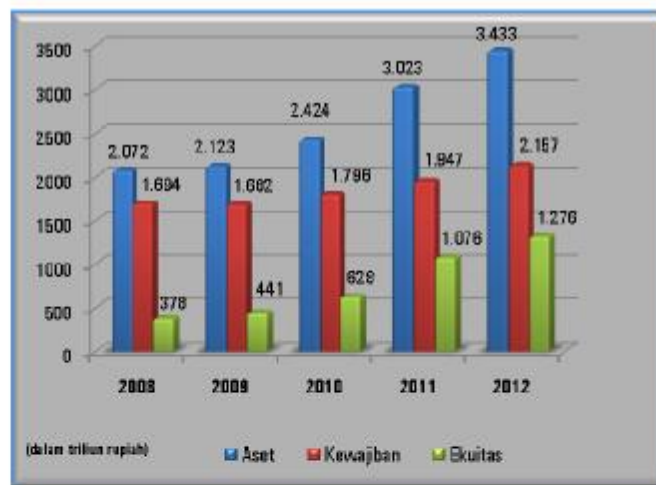
Posisi Neraca secara umum

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut.

Uraian	(dalam rupiah)	
	31 Desember 2012 (audited)	31 Desember 2011 (audited)
Aset Lancar	241.316.134.207.260	266.607.624.111.647
Investasi Jangka Panjang	932.406.392.642.504	750.030.794.479.804
Aset Tetap	1.895.501.446.206.083	1.567.974.174.587.750
Piutang Jangka Panjang	4.673.590.581.804	3.591.396.926.385
Aset Lainnya	350.096.269.747.712	435.042.965.985.109
Jumlah Aset	3.432.982.833.385.363	3.073.447.176.100.695
Kewajiban Jangka Pendek	266.136.369.631.688	246.444.660.163.115
Kewajiban Jangka Panjang	1.890.749.584.803.196	1.700.928.418.989.886
Jumlah Kewajiban	2.156.885.973.834.884	1.947.373.299.153.001
Ekuitas Dana Lancar	(23.566.284.356.835)	40.813.342.935.083
Ekuitas Dana Investasi	1.299.683.144.107.434	1.036.250.534.012.601
Jumlah Ekuitas Dana Neto	1.276.096.859.750.499	1.076.073.876.947.684
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	3.432.982.833.385.363	3.073.447.176.100.695

Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana Neto selama lima tahun terakhir disajikan pada Grafik 40.

Perbandingan Neraca selama 5 tahun terakhir



Grafik 40 Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana Neto pada Neraca Tahun 2008 – Tahun 2012

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 *(audited)*

Grafik di atas menunjukkan bahwa selama lima tahun berturut-turut, nilai Ekuitas Dana selalu meningkat. Ekuitas Dana per 31 Desember 2012 naik 18,58 persen dari posisi 31 Desember 2011.

C.2 PENJELASAN PER POS NERACA

C.2.1 Rekening Kas BUN di Bank Indonesia

*Rekening Kas BUN di BI
Rp37,20 triliun*

Jumlah Rekening Kas BUN di Bank Indonesia (BI) per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp37.382.888.887,038 dan Rp32.453.918.288,407 merupakan saldo Rekening Derahara Umum Negara (DUN) yang ada di BI, dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Rekening	(dalam rupiah)	
	31 Desember 2012 <i>(audited)</i>	31 Desember 2011 <i>(audited)</i>
Rekening GUN Nomor 802.00000080	2.189.882.404.884	2.081.080.838.882
Rekening KUN dalam Valuta USD Nomor 800.632411880	8.339.138.100	8.471.831.168
Rekening KUN dalam Valuta YEN Nomor 800.632111880	880.272.438.984	1.088.182.472.870
Rekening Kas Pinampatan dalam Rupiah Nomor 619.030122880	840.127.275.287	4.788.148.872.868
Rekening Kas Pinampatan dalam Valuta USC Nomor: 808.001411880	4.886.849.807.748	22.201.820.898.198
Rekening Kas Pinampatan dalam Valuta EURO Nomor: 808.000801880	664.701.587.186	-
Rekening Kas Pinampatan dalam Valuta YEN Nomor: 808.000111880	-	-
Rek. Penerimaan Eartuan Bancana Alam Surat-atera dalam Rupiah Nomor 619.030124880	8.492.000.736	8.492.000.706
Rek. Penerimaan Eartuan Bancana Alam Surat-atera dalam USD Nomor: 609.022411880	-	-
Rek. Penerimaan Eartuan Bancana Alam Surat-atera dalam EURO Nomor 609.03091880	-	-
Rekening SAL Nomor 600.030002880	26.766.866.588.308	48.606.846.197.626
Rekening Khusus	1.907.213.434.809	2.390.018.547.064
Rekening RDI-RPD	-	-
Rekening Penerimaan pada Bank Mandiri	8.566.186	-
Kas dalam Transit	333.832.373.803	-
Jumlah	37.382.888.887.038	82.453.918.288.407

Kas dalam transit merupakan transaksi kiriman uang yang diimpahkan pada akhir Desember 2012 dan baru diterima di RKUN sebesar Rp300.938.121.000 pada tanggal 2 Januari 2013 dan sebesar Rp33.494.762.803 merupakan transaksi pemindahtoran antar Rekening Khusus.

Rekening Kas BUN di BI dalam valuta asing (valas) sesuai rincian berikut.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (audited)

Jenis Rekening	Saldo Valas	Saldo Rupiah
Rekening KUN dalam Valuta USD Nomor 600.6124.11980	USD666.646,06	6.339.130.103
Rekening KUN dalam Valuta YEN Nomor 600.6121.11980	YEN6.076.666.183,00	680.372.438.864
Rekening Kas Penempatan dalam Valuta USC Nomor: 608.001411980	USD616.670.090,77	4.986.649.807.746
Rekening Kas Penempatan dalam Valuta EURO Nomor: 608.000601980	EUR44.083.361,88	664.701.667.196

Seluruh saldo Rekening Kas BUN di BI merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih (SAL). Rincian Rekening Khusus dapat dilihat pada **Daftar 5**.

C.2.2 Rekening Pemerintah Lainnya

RPL Rp13.50 triliun

Jumlah Rekening Pemerintah Lainnya per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp13.495.665.498.447 dan Rp8.815.552.720.213 merupakan saldo Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) yang ada di BI dan Bank Jrum dengan rincian sebagai berikut:

Bank	(dalam rupiah)	
	31 Desember 2012 (audited)	31 Desember 2011 (audited)
1. Bank Indonesia	13.490.088.191.673	6.559.644.568.813
2. Bank Umum	16.688.306.774	66.708.133.600
Jumlah	13.495.665.498.447	8.815.552.720.213

Seluruh saldo RPL bukan merupakan bagian dari SAL.

Rekening Pemerintah Lainnya di BI, terdiri dari:

Rekening	(dalam rupiah)	
	31 Desember 2012 (audited)	31 Desember 2011 (audited)
Rekening Panas Bumi (Nomor 508.000099990)	347.992.721.305	197.980.188.008
Rekening Hasil Minyak Perjanjian KPS (Nomor: 600.100411980)	13.005.480.815.909	8.237.138.752.226
Rekening Pemerintah Lain	128.6.2854.459	123.748.646.379
Jumlah	13.130.066.191.673	6.558.811.586.613

Rincian lebih lengkap masing-masing RPL di BI dapat dilihat pada **Daftar 8**.

Rekening Panas Bumi sebesar Rp347.992.721.305 merupakan kas BUN yang ada di rekening antara untuk menampung seluruh penerimaan dalam valuta asing dari hasil kegiatan panas bumi di Indonesia serta untuk menyelesaikan kewajiban Pemerintah di bidang perpajakan (pembayaran kembali PPN dan pembayaran PBB) terkait dengan kegiatan usaha panas bumi.

Rekening Hasil Minyak Perjanjian KPS sebesar Rp13.005.480.815.909 merupakan Kas BUN yang ada di rekening antara untuk menampung seluruh penerimaan dalam valuta asing dari hasil kegiatan usaha hulu migas dalam rangka *Production Sharing Contract/Kontrak Kerja Sama* dan melayani kewajiban kontraktual migas kepada Pemerintah.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

Monitoring hasil kegiatan hulu migas tahun 2012 dapat dilihat pada **Daftar 7**. Transaksi (mutasi) arus masuk dan keluar kas dari Hasil Minyak Perjanjian KPS dan Rekening Panas Bumi disajikan pada **Catatan Penting Lainnya**.

Rekening Pemerintah Lain sebesar Rp126.812.854.456 terdiri dari rekening untuk menampung penerimaan pertambangan dan perikanan.

2. Rekening Pemerintah Lainnya pada Bank Umum sebesar Rp 5.589.306.774 merupakan Kas pada 3A 999.04 (Penerusan Pinjaman) yang tersimpan di berbagai Bank Umum berupa rekening kredit program yang digunakan untuk mengelola proyek Perusahaan Inisi Rakyat (PIR)/Unit Pelaksana Proyek (UPP) Perkebunan. Rincian saldo RPL pada Bank Umum dapat dilihat pada **Daftar 8**.

C.2.3 Rekening Kas di KPPN

*Rekening Kas di KPPN
Rp18,21 triliun*

Jumlah Rekening Kas di KPPN per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp16.207.862.323.813 dan Rp11.870.556.947.661 merupakan saldo Rekening Kas Kantor Pelayanan Pertendahaaran Negara (KPPN) di seluruh Indonesia. Seluruh saldo Rekening Kas di KPPN merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih (SAL).

Daftar Saldo Kas di KPPN dapat dilihat pada **Daftar 9**.

C.2.4 Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp213,46 miliar*

Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp213.458.329.221 dan Rp202.795.937.359 merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan (UP), namun sampai dengan akhir tahun anggaran belum disetor/dipartanggungjawabkan ke kas negara.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran pada KL dapat dilihat pada **Daftar 10**.

C.2.5 Kas di Bendahara Penerimaan

*Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp196,18 miliar*

Jumlah Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp196.150.458.978 dan Rp252.900.321.124 mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank, termasuk bunga dan jasa giro, maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang belum disetorkan ke kas negara.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan pada KL dapat dilihat pada **Daftar 10**.

C.2.6 Kas Lainnya dan Setara Kas

*Kas Lainnya dan Setara
Kas Rp6,16 triliun*

Jumlah Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp6.103.251.116.103 dan Rp6.156.815.116.441 merupakan kas yang berada di bendahara pengeluaran selain uang persediaan. Saldo tersebut dapat berupa pendapatan seperti bunga jasa giro, pungutan pajak, dan pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara. Belanja yang sudah dicairkan akan tetapi belum dicayarkan kepada pihak ketiga, dan kas dari hibah langsung KL. Kas Lainnya dan Setara Kas terdiri dari:

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

Uraian	(dalam rupiah)	
	31 Desember 2012 (audited)	31 Desember 2011 (audited)
Eungsi dan Jasa Giro, dan Pengembalian Belanja yang Belum Dieror ke Kas Negara	3.150.005.278.102	2.587.515.283.864
Kas yang Belum Ditanyakan kepada Pihak Ketiga	2.470.815.869.777	3.049.045.544.201
Dana Lancar Lainnya (tidak langsung KL)	483.320.568.134	443.660.152.167
Dana Lancar BLU	-	2.850.787.178
Jumlah	6.103.251.518.103	6.750.875.778.441

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas menurut organisasi Kementerian Negara/Lembaga dan BUMN adalah sebagai berikut.

Uraian	(dalam rupiah)	
	31 Desember 2012 (audited)	31 Desember 2011 (audited)
1. K/L	4.075.227.758.750	1.630.725.363.653
2. B/L	2.028.023.761.353	4.120.150.414.788
Jumlah	6.103.251.518.103	6.750.875.778.441

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas masing-masing (masing) KL dapat dilihat pada **Daftar 10**.

Kas Lainnya dan Setara Kas yang berada di BLU sebesar Rp2.028.023.757.353 terdiri dari:

1. Kas Lainnya dan Setara Kas pada Bagian Anggaran (BA) 399.03 sebesar Rp1.429.667.753 merupakan kas atas pengembalian program dana bergilir yang saat ini masih tertampung dalam rekening LPT Indak;
2. Kas Lainnya dan Setara Kas pada BA 999.05 sebesar Rp766.831.261.146 merupakan kas yang terdapat pada rekening dana cadangan sebagai sisa atas dana cadangan DEH yang tidak disalurkan ke pemerintah daerah, dan disetorkan ke Kas Negara pada akhir Februari 2013;
3. Kas Lainnya dan Setara Kas pada BA 999.07 sebesar Rp551.551.895.542 merupakan kas yang terdapat pada rekening dana cadangan sebagai sisa atas dana cadangan subsidi yang tidak disalurkan kepada pihak ketiga, dan disetorkan ke Kas Negara pada akhir Februari 2013; dan
4. Kas Lainnya dan Setara Kas pada BA 999.08 sebesar Rp706.180.632.512 terdiri dari:
 - a. Kas Lainnya dan Setara Kas pada Kementerian Pertanian sebesar Rp29.399.785.771 berupa sisa biaya penyelesaian dan jasa giro pengelola cula Cadangan Denih Nasional (CDN) yang belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca
 - b. Kas Lainnya dan Setara Kas pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebesar Rp673.781.046.741 merupakan saldo Dana kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi TA 2011 yang baru dilaksanakan dalam TA 2012, dan sampai dengan 31 Desember 2012 masih berada di Bandara Pengaluaran Pembantu EPBC penerima bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RH). Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas dimaksud berada pada beberapa BPP EPBD Provinsi/Kabupaten/Kota penerima bantuan dana RR TA 2011 yang sudah tidak dapat digunakan lagi karena sudah melewati batas waktu sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Kepala BNPB.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

C.2.7 Kas pada BLU

Kas pada BLU Rp18,64 triliun

Jumlah Kas pada BLU per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp16.643.419.462.034 dan Rp13.019.388.257.063 merupakan saldo kas yang ada di satuan kerja BLU pada beberapa KL, yang terdiri dari:

Kementerian Negara/Lembaga	(dalam rupiah)	
	31 Desember 2012 (dalam Rp)	31 Desember 2011 (dalam Rp)
1. BLU di Sekretaris Negara	621.282.524.757	529.314.721.409
2. BLU di Kementerian Keuangan	3.041.157.122.938	2.188.881.124.587
3. BLU di Kementerian Pertanian	5.541.107.213	3.466.155.684
4. BLU di Kementerian Perindustrian	33.304.872.029	20.011.012.491
5. BLU di Kementerian ES/PM	19.979.456.001	18.498.721.552
6. BLU di Kementerian Perhubungan	181.040.897.137	132.050.346.020
7. BLU di Kementerian Dikbud	4.648.837.613.868	4.497.383.942.144
8. BLU di Kementerian Kesehatan	1.227.650.673.842	1.056.474.213.524
9. BLU di Kementerian Agama	222.780.109.309	160.067.021.688
10. BLU di Kementerian Pertahanan	568.408.310	714.874.920
11. BLU di Kementerian Cerukaman	86.050.828.714	-
12. BLU di Kementerian Pekerjaan Umum	643.925.236.828	311.877.656.631
13. BLU di Kementerian Riset	2.129.679.286	1.507.726.323
14. BLU di Kementerian Negara KUKM	314.883.667.838	222.839.494.602
15. BLU di Kementerian Kominfo	4.250.475.068.238	3.710.218.850.141
16. BLU di KPPT	43.280.564.088	31.085.827.408
17. BLU di BPT	17.884.193.545	7.013.147.667
18. BLU di LAPAN	3.208.179.400	1.958.045.703
19. BLU di Kementerian Perumahan Rakyat	283.179.242.298	145.069.354.794
20. BLU di BPK, PP, PB, Badan	386.702.219.408	-
Jumlah	16.643.419.462.034	13.019.388.257.063

Berdasarkan data RUM, Kas pada RUM yang telah disahkan oleh KPPN adalah sebesar Rp17.331.515.089.485 (lihat Catatan D.7). Dari Kas pada BLU tersebut sebesar Rp768.125.137.193 telah dipakai token dengan jangka waktu lebih dari tiga bulan (dicajikan pada Investasi Jangka Pendek - lihat Catatan C.2.7.5). Dengan demikian, tercapai Kas pada BLU yang belum disahkan sebesar Rp80.029.529.762, yaitu berasal dari Rp16.643.419.462.034 + Rp768.125.137.193 - Rp17.331.515.089.465).

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (audited)

Uang Muka dari
Rekening BUN Rp 767,37
miliar

C.2.8 Uang Muka dari Rekening Bandahara Umum Negara (BUN)

Jumlah Uang Muka dari Rekening BUN per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp 767.370.392.558 dan Rp 1.406.995.648.910 merupakan pembayaran pembizyaan pendahuluan dalam rangka penarikan pinjaman luar negeri dari BUN yang belum ada penggantian dari *lender*.

Uang Muka dari Rekening BUN sebesar Rp 767.370.392.558 adalah Uang Muka dari Rekening BUN yang *eligible*, yaitu uang muka yang masih dapat ditagihkan kepada *lender* yang terjadi sejak tahun 2008. Saldo tersebut berasal dari saldo akhir tahun 2011 sebesar Rp 1.406.995.648.910 dikurangi dengan Uang Muka BUN yang diselesaikan selama tahun 2012 sebesar Rp 621.625.256.352. Rincian Uang Muka dari Rekening BUN menurut *lender* adalah sebagai berikut.

<i>Lender</i>	Idalam rupiah	
	31 Desember 2012 (<i>audited</i>)	31 Desember 2011 (<i>audited</i>)
1. IBRD	195.506.947.772	434.796.199.957
2. ADB	341.516.048.918	557.243.342.772
3. OECD/BIC	44.025.428.500	14.116.106.385
4. Lainnya	216.321.971.367	402.940.000.012
Jumlah ¹⁾	767.370.392.557	1.406.995.648.910

¹⁾ Saldo dan debit/akumulasi penggantian Uang Muka BUN tahun Rp 0, sesuai perjanjian.

Investasi Jangka Pendek
Rp 788,13 miliar

C.2.9 Investasi Jangka Pendek

Jumlah Investasi Jangka Pendek per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp 788.125.137.93 dan Rp 170.553.016.059, merupakan nilai investasi yang dilakukan dan diharapkan akan diperoleh kembali dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan keuangan. Investasi Jangka Pendek per 31 Desember 2012 merupakan deposito yang berada di BLL pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp 730.559.384.448, BLU pada Kementerian Kesehatan sebesar Rp 28.653.752.745, dan BLU pada Kementerian Agama sebesar Rp 8.772.000.000.

Investasi Jangka Pendek
Lainnya Rp 0

C.2.10 Investasi Jangka Pendek Lainnya

Jumlah Investasi Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp 0 dan Rp 135.831.486.878. Jumlah Investasi Jangka Pendek Lainnya Tahun 2011 merupakan investasi berupa deposito. Pada LKPP tahun 2012, seluruh Investasi Jangka Pendek Lainnya disajikan dalam pos Investasi Jangka Pendek.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

Belanja Dibayar di Muka
dan Uang Muka Belanja
Rp 1,32 triliun

C.2.11 Belanja Dibayar di Muka dan Uang Muka Belanja

Belanja Dibayar di Muka dan Uang Muka Belanja per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp1.893.539.561.965 dan Rp1.279.165.315.147 merupakan uang muka dan/atau pembayaran termin yang telah diterima oleh kontraktor atau pihak ketiga atas pekerjaannya dalam rangka penyediaan barang/jasa yang berada di beberapa KL. Belanja Dibayar di Muka yang nilainya paling signifikan terdapat pada Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp1.033.431.395.605 yang merupakan pembayaran uang muka terhadap beberapa paket pekerjaan. Tidak dilakukan penyisihan piutang tak tertagih atas Uang Muka Belanja. Rincian Uang Muka Belanja pada masing-masing KL dapat dilihat pada **Daftar 11**.

Piutang Pajak
Rp 92,47 triliun

C.2.12 Piutang Pajak

Jumlah Piutang Pajak per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp93.468.526.344.200 dan Rp108.063.462.389.641. Nilai Piutang Pajak per 31 Desember 2012 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*), adalah Rp49.17.583.719.256 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp93.468.526.344.200 dikurangi penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp44.550.842.630.944.

Rincian Piutang Pajak menurut organisasi adalah sebagai berikut.

Uraian	dalam rupiah	
	31 Desember 2012 (Lanjutan)	31 Desember 2011 (Lanjutan)
Direktorat Jenderal Pajak:		
Nilai Bruto	70.721.181.887.660	86.601.566.456.341
Penyisihan	(42.829.017.362.023)	(46.206.682.087.023)
Nilai Bersih	27.792.164.525.637	40.394.874.369.318
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai		
Nilai Bruto	22.747.344.466.640	21.262.096.927.300
Penyisihan	(1.621.825.268.821)	(1.611.617.003.316)
Nilai Bersih	21.125.519.197.819	19.650.479.923.984
Piutang Pajak (Bruto)	93.468.526.344.200	108.063.462.389.641
Total Penyisihan	(44.550.842.630.944)	(47.817.309.090.339)
Piutang Pajak (Bersih)	48.917.583.719.256	60.246.153.299.302

Piutang Pajak pada
Direksi Pajak

1. Piutang Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp70.721.181.887.660 dan Rp86.801.366.456.341 merupakan tagihan pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2012. Rincian Piutang Pajak (nilai bruto sebelum penyisihan) per jenis pajak dapat dilihat pada **Tabel 14**.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (audited)

Tabel 14 Piutang Pajak per Jenis Pajak pada Ditjen Pajak

No.	Jenis Piutang Pajak	(dalam rupiah)	
		31 Desember 2012 (audited)	31 Desember 2011 (audited)
1.	Piutang PPh Pasal 21	1.361.617.937.233	1.085.067.767.112
2.	Piutang PPh Pasal 22	400.402.015.178	400.005.742.712
3.	Piutang PPh Pasal 23	4.918.951.082.916	1.971.735.361.857
4.	Piutang PPh Pasal 25 Orang Pribadi	1.218.954.328.211	1.011.913.424.162
5.	Piutang PPh Pasal 25 Badan	18.473.224.808.353	14.272.878.371.717
6.	Piutang PPh Pasal 28	2.053.962.968.334	2.891.001.117.252
7.	Piutang PPh Final dan Final LN	589.713.052.211	517.874.742.842
8.	Piutang PPN Dasar Negeri	15.704.801.720.030	42.235.400.351.546
9.	Piutang PPhBM Dalam Negeri	176.233.058.336	208.754.851.900
10.	Piutang PBB Perikanan	2.958.934.810.829	2.401.365.373.918
11.	Piutang PBB Perkebunan	1.156.123.794.772	11.281.484.288.102
12.	Piutang PBB Perkebunan	661.307.587.023	384.208.811.227
13.	Piutang PBB Pertambangan	558.001.107.117	630.580.303.822
14.	Piutang PDB Pertambangan	7.507.841.021.710	5.602.815.301.501
15.	Piutang PTL	11.396.731	661.914.037
16.	Piutang Bunga Penjualan PPh	2.281.242.280.829	1.878.837.937.861
	Jumlah	70.721.181.887.660	66.801.366.456.241

Berdasarkan umurnya, Piutang Pajak di DJP dapat dirinci sebagai berikut.

Umur Piutang	(dalam rupiah)	
	31 Desember 2012 (audited)	31 Desember 2011 (audited)
Kurang dari 1 Tahun	20.670.616.683.018	18.470.734.128.870
1 Tahun dan Kurang dari 2 Tahun	14.312.073.025.071	37.889.573.637.061
3 Tahun dan Kurang dari 5 Tahun	12.904.367.023.451	9.033.583.799.836
6 Tahun atau Lebih	22.831.226.465.842	20.938.174.692.664
Jumlah	70.721.181.887.660	66.801.366.456.241

1. Nilai piutang pajak yang dapat ditagih per 31 Desember 2012 sebesar Rp42.929.017.362.023.

e. Dari nilai piutang pajak sebesar Rp70.721.181.887.660 terdapat piutang pajak yang disisihkan sebesar Rp42.929.017.362.023. Nilai piutang yang disisihkan tersebut termasuk piutang yang telah deluwarsa jenagiamnya sebesar Rp6.838.230.038.255. Selama tahun 2012, atas nilai piutang pajak yang telah deluwarsa tersebut, telah diusulkan penghapusan sebesar Rp1.176.047.212.813. Selama tahun 2012, nilai piutang yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan untuk dihapusbuku kan sebesar Rp28.073.790.754.612. Rincian Piutang Pajak dapat dilihat pada **Daftar 12**.

f. Dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan pembatalan, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak, pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak, pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak, banding, gugatan dan peninjauan kembali. Nominal ketetapan pajak kurang bayar yang menjadi sangketa pajak tersebut diatas yang belum diterbitkan keputusan atau putusan sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 adalah Rp55.217.729.152.085.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

2. Piutang Pajak pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp22.747.344.456.540 dan Rp21.262.086.827.300 merupakan tagihan pajak yang telah mempunyai surat ketetapan yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal neraca yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Pincian Piutang Pajak (nilai awal sebelum penyisihan) per jenis pajak dapat dilihat pada Tabel 15.

Berikut ini rincian umur piutang pajak DJBC dapat dirinci sebagai berikut..

Umur Piutang	dalam rupiah	
	31 Desember 2012 (awalnya)	31 Desember 2011 (awalnya)
Kurang dari 1 Tahun	20.767.263.503.573	19.649.510.505.526
1 Tahun s.d 2 Tahun	522.071.007.821	517.988.178.984
2 Tahun s.d 3 Tahun	43.156.722.533	103.556.167.086
Diatas 3 Tahun	1.414.001.225.612	1.292.566.684.744
Jumlah *	22.747.344.456.641	21.262.086.827.300

* Nilai awal karena belum dikurangi dengan piutang pemungutan kembali yang belum terpulihkan

Tabel 15 Piutang Pajak per Jenis Pajak pada Ditjen Bea dan Cukai

Piutang Pajak pada
Ditjen Bea dan Cukai

No	Jenis Piutang Pajak	dalam rupiah	
		31 Desember 2012 (awalnya)	31 Desember 2011 (awalnya)
1	Piutang PPh Pasal 22	6.145.000	-
2	Piutang PPh Pasal 22 Impor	38.885.338.305	45.882.289.214
3	Piutang PPh Pasal Negeri	3.278.801.445.758	3.146.810.948.970
4	Piutang PPh Impor	233.237.408.822	240.582.578.649
5	Piutang PPh Lainnya	-	13.875.000
6	Piutang PPhBM Impor	32.488.318.221	28.715.140.404
7	Piutang PPhBM Lainnya	-	-
8	Piutang Cutai Hasil Tembaku	17.033.037.355.284	15.812.430.025.881
9	Piutang Cutai Ethyl Alkohol	889.300.000	889.000.000
10	Piutang Cutai Mirisan mengandung Ethyl Alkohol	3.120.764.000	3.080.046.600
11	Piutang Pendapatan Uenda Administrasi Lukat	1.064.203.002.678	1.023.988.802.174
12	Piutang Pendapatan Cukai Lainnya	46.892.366.615	46.890.983.274
13	Piutang Bunga Pemgihan PPN	4.092.285.584	8.710.323.332
14	Piutang Bunga Pemgihan PPhBM	-	10.882.000
15	Piutang Bea Masuk	532.381.234.997	851.036.883.843
16	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Pabean	830.788.287.334	773.530.556.888
17	Piutang Pendapatan Pabean Lainnya	177.749.777.036	173.032.484.314
18	Piutang Pajak Penghasilan Ekstern	149.477.547.674	227.178.905.925
19	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar	8.143.352.772	8.238.343.382
20	Piutang Pendapatan Bunga Bea Keluar	281.371.900	288.533.000
	Jumlah	22.747.344.456.640	21.262.086.827.300

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

Piutang Bukan Pajak
Rp 120,92 triliun

C.7.13 Piutang Bukan Pajak

Jumlah Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 120.925.758.512.257 dan Rp 9.885.890.412.635. Nilai Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2012 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp 29.562.629.523.524, yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp 120.925.758.512.257 dikurangi penyisihan sebesar Rp 91.363.128.988.733. Piutang tersebut terdiri dari:

	(dalam rupiah)	
Jenis Piutang Bukan Pajak	31 Desember 2012 (miliar)	31 Desember 2011 (miliar)
Piutang pada KL:		
Nilai Bruto	28.251.323.543.828	12.780.526.303.176
Penyisihan	(10.423.508.133.718)	18.825.371.734.598
Nilai Bersih	17.827.815.410.110	3.955.154.568.578
Piutang pada BUN:		
Nilai Bruto	92.674.234.968.329	6.089.364.104.459
Penyisihan	(71.933.220.736.017)	(318.020.166.038)
Nilai Bersih	20.741.014.232.312	5.771.343.938.421
Piutang Bukan Pajak (Bruto)	120.925.758.512.257	18.869.890.412.635
total Penyisihan	(91.363.128.988.733)	(10.293.396.500.624)
Piutang Bukan Pajak (Bersih)	29.562.629.523.524	8.576.493.911.011

Piutang Bukan Pajak sebesar Rp 20.925.758.512.257 merupakan semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang, atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran serta dilampirkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun.

Beberapa Piutang PNBP pada KL yang mempunyai nilai cukup signifikan, yaitu Piutang PNBP pada Kejaksaan sebesar Rp 12.570.332.222.592 merupakan piutang dari uang pengganti, denda tilang dan sewa rumah dinas, Piutang PNEP pada Kementerian ESDM sebesar Rp 9.399.082.826.274 merupakan piutang yang berasal dari lunas Foyalty dan lunas Tetap KIK/JIP dan PKP2B, Piutang PRBP pada Kementerian Kehutanan sebesar Rp 2.067.471.000.170 berasal dari tunggakan Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Heboisasi, tunggakan ganti rugi tegakan dan Piutang PNBP pada Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp 2.780.032.327.625 berasal dari Biaya Hak Penyelenggaraan telekomunikasi dan pengenaan denda.

rincian Piutang Bukan Pajak pada KL per 31 Desember 2012 dapat dilihat pada **Daftar 13**.

Piutang Bukan Pajak pada BUN per 31 Desember 2012 terdiri dari:

Piutang Bukan Pajak di
BUN Rp 82,87 triliun

	(dalam rupiah)	
Piutang PNBP	31 Desember 2012 (miliar)	31 Desember 2011 (miliar)
1. Piutang Dividen dan Denda pada EA 988.03:		
Nilai Bruto	185.383.470.276	54.914.351.161
Penyisihan	(100.817.241.258)	(51.548.420.777)
Nilai Bersih	84.566.229.018	3.365.930.384
2. Piutang pada BA 598.01:		
Nilai Bruto	3.813.204.581.704	419.570.214.333
Penyisihan	-	-
Nilai Bersih	3.813.204.581.704	419.570.214.333
3. Piutang pada BA 598.02:		

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

Nilai Bruto	1.142.775.784.207	878.859.094.800
Pemiskinan	(5.713.878.861)	(4.391.691.474)
Nilai Bersih	1.137.061.905.326	874.467.403.326
4. Piutang pada BA 598.03:		
Nilai Bruto	211.015.741.664	7.420.161.900
Pemiskinan	-	-
Nilai Bersih	211.015.741.664	7.420.161.900
5. Piutang P* PPA pada BA 898.00:		
Nilai Bruto I	2.816.000.000	2.766.071.131
Pemiskinan	(2.590.720.000)	-
Nilai Bersih	225.280.000	2.766.071.131
6. Piutang Megas pada BA 900.00:		
Nilai Bruto	7.823.335.855.090	5.145.256.422.767
Pemiskinan	(470.531.889.158)	(262.082.042.757)
Nilai Bersih	7.352.804.065.932	4.883.174.379.990
7. Piutang Bukan Pajak pemanfaatan aset Eks Partisipasi pada BA 990.00:		
Nilai Bruto	2.804.109.073.920	-
Pemiskinan	(14.020.549.369)	-
Nilai Bersih	2.790.088.524.551	-
8. Piutang pada DA 598.00 - Bank Dalam Litu/leat:		
Nilai Bruto	10.882.381.724.314	10.853.866.843.224
Pemiskinan	(10.573.232.350.354)	(10.012.579.238.618)
Nilai Bersih	118.149.384.960	4.102.317.605
9. Piutang pada BA 598.00 - Belanja Personel:		
Nilai Bruto	42.120.486.400	34.840.343.422
Pemiskinan	-	-
Nilai Bersih	42.120.486.400	34.840.343.422
10. Piutang pada BA 598.00 - Aset Kredit Eks BPPN dan Eks Keliaan PT PPA:		
Nilai Bruto	83.722.118.585.074	-
Pemiskinan	(58.824.347.255.508)	-
Nilai Bersih	24.897.771.329.566	-
11. Piutang pada BA 598.00 - Aset Kredit yang diembek/leat kepada PT PPA:		
Nilai Bruto	2.334.984.286.710	-
Pemiskinan	(2.148.187.125.373)	-
Nilai Bersih	186.797.161.337	-
Piutang PNPB (Bruto)	82.874.284.668.339	17.467.541.808.336
Total Pemiskinan	(71.038.220.785.017)	(11.230.568.406.618)
Piutang PNPB (Bersih)	20.736.064.173.312	8.236.973.391.718

1. Piutang Dividan dan Denda (BA 990.03) sebesar Rp185.384.473.276 terdiri dari:
- a. Piutang lancar sebesar Rp39.255.985.379 terdiri dari:

(dalam rupiah)			
Nama BUMN	Jumlah	Pemiskinan Piutang tidak Tertagih (0,0%)	Nilai Bersih
1. PT. UMS	80000000	000000	80000000
2. PT. Telekomunikasi Indonesia	1491111111	000000	1491111111
3. PT. Telekomunikasi Indonesia	500000000	000000	499999999
4. PT. Telekomunikasi Indonesia	160000000	000000	159999999
5. PT. Telekomunikasi Indonesia	100000000	000000	99999999
6. PT. Telekomunikasi Indonesia	100000000	000000	99999999

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

2. Piutang Dividen	35.111.111	15.111.111	20.000.000
Jumlah	28.266.881.378	186.279.827	21.068.706.452

b. Piutang Diragukan sebesar Rp91.415.053.053 terdiri dari:

Nama BUMN	Jumlah	Penyisihan Piutang tidak Tertagih (100%)	Nilai Bersih
1. PT PDI P Batam	59.419.638	29.709.819	29.709.819
2. Perum Perumnas	67.225.637.648	33.612.818.824	33.612.818.824
3. PT. Perkebunan Nusantara II	19.717.527.690	9.858.763.845	9.858.763.845
4. PT Inhutani I	4.412.468.076	2.206.234.038	2.206.234.038
Jumlah*)	91.415.053.052	45.707.526.526	45.707.526.526

*) selisih antara data neraca dengan data piutang diragukan sebesar Rp1, karena pembulatan

c. Piutang Macet sebesar Rp54.713.434.845 terdiri dari:

Nama BUMN	Jumlah	Penyisihan Piutang tidak Tertagih (100%)	Nilai Bersih
1. PT. Istaka Karya	6.391.154.934	6.391.154.934	-
2. PT. Bina Karya	566.628.402	566.628.402	-
3. PT. Balai Pustaka	786.749.799	786.749.799	-
4. PT. Industri Sandang Nusantara	43.586.982.444	43.586.982.444	-
5. PT Inhutani V	3.381.919.266	3.381.919.266	-
Jumlah	54.713.434.845	54.713.434.845	-

Dalam piutang dividen tersebut di atas, belum termasuk dividen tahun 2011 dari PT Krakatau Steel (Persero) Tbk sebesar Rp956.493.260.000,00, dimana pada Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan telah ditetapkan sebagai dividen dalam bentuk saham kepada para pemegang saham. Keputusan pemberian dividen dalam bentuk saham ini, mengakibatkan perubahan nilai modal saham yang dimiliki oleh Pemerintah pada PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Perubahan nilai modal disahur dari dividen saham tersebut, telah dituangkan dalam perubahan Anggaran Dasar Perusahaan.

Dividen saham yang telah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT Krakatau Steel (Persero) Tbk akan dicatat dan diakui sebagai penerimaan dividen, setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah tentang Penyertaan Modal Negara kepada PT Krakatau Steel (Persero) Tbk yang berasal dari penerimaan dividen tahun 2011 tersebut. Pemerintah akan mengalokasikan penerimaan dari dividen dan pelaksanaan penyertaan modal negara dari penerimaan dividen tersebut pada APBN-P Tahun 2013.

2. Piutang pada BA 999.05 per 31 Desember 2012 sebesar Rp3.913.204.961.704 merupakan piutang yang berasal dari kelebihan pembayaran lebih satu Dana Perimbangan. Lebih satu tersebut akan dikompensasikan dengan pembayaran Dana Perimbangan TA 2013.

3. Piutang pada Bagian Anggaran Belanja Subsidi (BA 999.07) sebesar Rp1.142.775.784.247 merupakan piutang yang berasal dari kelebihan pembayaran atas subsidi Pangan berdasarkan hasil audit BPK tahun 2011 dan tahun 2012 masing-masing

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

sebesar Rp435.113.206.842 dari Rp707.662.577.405

4. Piutang pada Bagian Anggaran Belanja Lain-Lain (BA 999.08) sebesar Rp211.015.741.654 terdiri dari:
 - a. Piutang pada Perum BULOG sebesar Rp2.978.120.000; dan
 - b. Piutang pada Kementerian Pertanian sebesar Rp208.037.621.654 berupa cadangan benih yang berada di penangkaran yang merupakan nilai stok Cadangan Benih Nasional (CBN) yang berada di penangkaran PT Sang Hiyang Seri (SHS) dan PT Pertani sebanyak 16.081.053 kg dalam lima komoditas yaitu Padi Non Hibrida, Padi Hibrida, Jagung Komposit, Jagung Hibrida, dan Kecelai, serta biaya distribusi CBN.
5. Piutang PT PPA sebesar Rp2.816.000.000 merupakan kewajiban PT PPA atas Hasil Pengelolaan Aset (HPA) yang masih harus disetorkan kepada Pemerintah, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	(dalam rupiah)	
	31 Desember 2012 (revisi)	31 Desember 2011 (revisi)
Saldo Awal (1)	2.786.071.931	2.121.512.481
Kurangi Saldo Awal (2)	39.928.469	751.838
Penerimaan:		
Hasil Pengelolaan Aset (HPA):		
Dividen saham yang dikelola	236.000.000	98.000.000.000
Dividen atas saham yang dikelola	3.978.000.000	466.043.291
Potok dan bunga atas tagihan yang dikelola	-	-
Potok dan Bunga Bunga atas obligasi yang dikelola	155.446.000.000	150.874.801.111
Penerimaan Obligasi		
Penjualan dari right saham	-	-
HPA aset lainnya	1.932.000.000	-
Jumlah HPA	154.680.000.000	150.440.801.402
Dana Cadangan Biaya Pengelolaan		2.627.252.974
Bunga dari dana HPA yg masih harus disetor	2.829.000.000	850.849.835
Jumlah Pembayaran (3)	157.509.000.000	158.758.802.211
Pengurangan:		
Biaya pengelolaan yang dapat diperoleh kembali tahun berjalan dan telah disyartakan	121.000.000	100.414.505
Inbalan Pengelolaan Aset	40.030.000.000	50.327.371.208
PPN atas Inbalan Pengelolaan Aset	4.830.000.000	5.023.737.124
PPN atas Penggantian Biaya Pengelolaan	12.000.000	10.341.430
Biaya aset periode sebelumnya	-	-
Inbalan Kinerja	-	1.363.397.000
PPN Inbalan Kinerja	-	138.900.700
Tunggakan biaya-biaya aset dengan penugasan	-	-
Hutang	-	-
Jumlah Pengurangan (4)	57.860.000.000	56.901.865.190
HPA yang harus disetor ke Pemerintah (5) = (1) + (2) + (3) - (4)	116.432.000.000	143.859.101.832
HPA yang telah disetor ke Pemerintah (6)	113.646.000.000	141.113.034.401
Jumlah HPA yang masih harus disetor (7) = (5) - (6)	2.786.000.000	2.786.071.931

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

6 Piutang Migas pada BA 999.99 terdiri dari:

Uraian	(dalam rupiah)	
	31 Desember 2012 (audited)	31 Desember 2011 (audited)
Piutang pada PT Pertamina	57.925.277.543	625.801.393.360
Piutang Migas Lainnya	7.665.410.577.484	4.618.438.129.401
Piutang Migas (Bruto)	7.823.335.855.028	5.145.288.422.761
Penyisihan	1470.331.689.199	1262.082.042.797
Piutang Migas (Neto)	7.162.804.165.829	4.883.204.379.964

Rincian Piutang PT Pertamina sebesar Rp57.925.277.543 terdiri dari USD1.224.469 dan Rp46.084.659.028.

Uraian	USD	Rp
Nilai Lewan		46.084.659.028
Ekspor Minyak Mentah	514	-
Natural Gas	988.219	-
LPG	224.636	-
Jumlah	1.224.469	46.084.659.028
Total (setelah konversi ke rupiah)		57.925.277.543

Rincian Piutang Non PT Pertamina sebesar USD782.358.901 ekuivalen dengan Rp7.665.410.577.484 terdiri dari:

No	Piutang	USD
1	Penjualan Minyak Bumi	88.402.762.100
2	Penjualan Gas Alam	185.502.128.878
a	Melalui Transaksi	158.397.155.572
	1) Ekspor LNG	-
	2) Ekspor Gas Alam	128.381.874.870
	3) Domestik Gas Alam	30.035.480.702
	4) Domestik LPG	-
	5) Domestik LNG	-
b	Melalui Non Transaksi (Kewajiban KKKS)	7.604.877.106
	1) Ekspor LPG	248.670
	2) Domestik Gas Alam	7.604.722.438
3	Overdraft/KKKS	544.794.703.760
a	Minyak Bumi	343.025.279.252
b	Gas Alam	201.268.624.628
4	Lainnya	3.768.818.940
a	Bonus Produksi	3.000.025.000
b	Transfer Material	759.793.940
	Total Piutang	782.358.901.198

7. Piutang Bukan Pajak pemanfaatan aset eks Pertamina pada BA 999.99 sebesar Rp2.804.109.072.920 terdiri dari:

- Piutang sewa tanah di Jalan Terogong 99, Jakarta Selatan oleh Jakarta International School sebesar Rp65.873.527.324; dan
- Piutang sewa aset oleh PT Pertamina (Persero) c.q. PT Pertamina EP sebesar

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (audited)

Rp2.738.233.545.596

Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-341/MK.6/2010 tanggal 27 September 2010 hal Sewa Menyewa antara Menteri Keuangan dan Jakarta International School dan surat Nomor S-539/MK.3/2012 tanggal 2 Oktober 2012 hal Tindak Lanjut Permasalahan Sewa Tanah di Jakarta International School, atas penggunaan lahan di Jalan Terogong 33, Jakarta Selatan periode 1 Mei 2008 sampai dengan 29 Februari 2012 (46 bulan) oleh Jakarta International School, telah ditetapkan pengenaan sewa sebesar Rp90.677.717.589.

Pada tanggal 14 Desember 2012, pihak Jakarta International School telah melakukan pembayaran sewa sebesar 50% melalui setoran ke Rekening Kas Umum Negara, sehingga masih terdapat Piutang PNBP dari sewa BMM sebesar Rp45.338.858.300.

Selanjutnya, untuk perpanjangan sewa, dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-150/MK.3/2013 tanggal 26 Maret 2013 hal Sewa Tanah di Jalan Terogong 33 oleh Jakarta International School, telah ditetapkan pengenaan sewa periode 1 Maret 2012 s.d. 28 Februari 2013 (12 bulan) sebesar Rp20.836.668.324.

Berdasarkan Laporan Keuangan PT Pertamina (Persero) Tahun 2012, diketahui terdapat pencatatan Hutang Kepada Pemerintah berupa sewa BMM oleh Pertamina yang digunakan oleh PT Pertamina sejak tahun 2003 s.d. 2012, dengan total nilai tertutang per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp2.738.233.545.596.

8. Piutang pada BA 999.99 berupa Piutang pada 20 Bank Dalam Likuidasi (BDL) terdiri dari:

(dalam Rpl)

Uraian	31 Desember 2012 (audited)	31 Desember 2011 (audited)
Dana BDL eks Dana Talangan Pemerintah	8.298.437.312,41	8.298.437.312,41
B. BDL eks Dana Talangan Pemerintah	2.850.222.233,184	2.850.222.233,175
Nilai Bruto	11.148.659.545,596	11.148.659.545,587
Fasilitas	(11.148.659.545,596)	(11.148.659.545,587)
Nilai Bersih	0	0

- a. Piutang pada 15 BDL eks Dana Talangan Pemerintah berasal dari

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2012 (audited)	31 Desember 2011 (audited)
Dana BDL BDL yang dikawatirkan	11.888.938.781,558	11.888.938.781,298
Dikuangi		
- Pengembalian s.d. Desember 2003	(2.730.846.174,151)	(2.730.846.274,151)
- Pengembalian tahun 2007	(228.053.353,877)	(228.053.353,877)
- Pengembalian tahun 2008	(323.144.483,070)	(323.144.483,070)
- Pengembalian tahun 2009	(140.784.188,757)	(140.784.188,757)
- Pengembalian tahun 2010	(84.175.887,817)	(84.175.887,817)
- Pengembalian tahun 2011	(83.718.041,057)	(83.718.041,057)
- Pengembalian tahun 2012	(232.873.341,830)	
Jumlah	8.045.569.370,917	8.298.437.312,747

Dari 15 BDL, 13 BDL telah melaksanakan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Aset dari Tim Likuidasi kepada Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan, satu BDL yaitu Bank Umum Majapahit Jaya telah melaksanakan RUPS pembubaran Tim Likuidasi, dan satu BDL belum melakukan penandatanganan BAST

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

Aset, yaitu PT Bank Jakarta Rincian Piutang 15 RTI lebih lengkap dapat dilihat pada Daftar 14.

3. Piutang pada lima BDL eks Dana Penjaminan merupakan saldo penjaminan pemerintah terhadap lima BDL yang diberikan melalui UPE (Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah) dengan bank pemayor PT BNI (Persero), dengan perhitungan sebagai berikut.

Uraian	dalam rupiah	
	31 Desember 2011 (awak/awak)	31 Desember 2010 (awak/awak)
Total dana BLBI EDL yang dikawatirkan	3.321.282.850.872	3.321.282.361.813
Dikurangi:		
- Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2305	(8.000.000.000)	(8.000.000.000)
- Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2307	(28.500.000.000)	(28.500.000.000)
- Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2308	(18.000.000.000)	(18.000.000.000)
- Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2309	(366.663.664.470)	(366.663.664.470)
- Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2310	(146.889.652.866)	(146.889.652.866)
- Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2311	(100.000.000.000)	(100.000.000.000)
- Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2312	(8.401.890.831)	
Jumlah *	2.646.827.753.386	2.655.228.633.473

* Nilai saldo pada tanggal 31 Desember 2010 merupakan saldo awal tahun 2010.

9. Piutang pada BA 999.99 berupa Piutang Belanja Pensiun sebesar Rp42.120.466.400 terdiri dari:
- Pengembalian Setoran DAMU Pensiun Bulan Januari s.d. Juni 2012 sebesar Rp19.488.628.600;
 - Pengembalian Setoran camu Pensiun Bulan Juli s.d. Desember 2012 sebesar Rp20.163.161.100; dan
 - Pengembalian Setoran Danru Pensiun Rapel dan Gaji ke 13 Tahun 2012 sebesar Rp2.468.696.700.

Seluruh Piutang Belanja Pensiun sebesar Rp42.120.466.400 telah dilunasi dan telah diestorikan ke kas negara pada TA 2013 sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2013.

10. Piutang pada BA 999.99 sebesar Rp63.722.116.582.074, terdiri dari Piutang Aset Kredit eks BPPN sebesar Rp57.875.238.023.263 dan eks Kelolaan PT PPA sebesar Rp5.846.878.558.811. Piutang Aset Kredit eks BPPN dan eks Kelolaan PT PPA yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp5.057.768.326.566, yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp63.722.116.582.074 dikurangi penyisihan sebesar Rp58.624.347.955.508. Piutang tersebut terdiri dari:

(dalam rupiah)

Piutang Aset Kredit Eks BPPN dan Eks Kelolaan PT PPA	Jumlah
Aset Kredit eks BPPN	57.875.238.023.263
Eks Kelolaan PT PPA	5.846.878.558.811
Piutang (Bruto)	63.722.116.582.074
Penyisihan	(58.624.347.955.508)
Piutang (Bersih)	5.097.768.626.566

Aset eks BPPN sebesar Rp57.875.238.023.263 merupakan aset Pemerintah hasil penyitaan oleh pemerintah karena para debitur tidak mampu melunasi hutangnya kepada Pemerintah atas fasilitas likuiditas yang dikururkan Pemerintah pada saat terjadi krisis

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

ekonomi tahun 1997-1998. Aset-aset tersebut pada awalnya dikelola oleh BPPN (Badan Penyelamatan Pertbankan Nasional) sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pemberian dana talangan kepada perbankan yang CAR (*Capital Adequacy Ratio*) di bawah batas minimal yang ditetapkan B. Setelah BPPN dibubarkan kemudian sebagian pengelolannya beralih pada Tim Pamberasan BPPN yang diketuai langsung oleh Menteri Keuangan. Aset-aset yang dikelola oleh Tim Pamberasan BPPN adalah aset-aset yang masih berperkara.

Aset kredit eks BPPN per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp57.875.238.023.263 dan per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 65.071.997.186.144. Perubahan jumlah ini disebabkan oleh adanya pembayaran dan/atau pelunasan oleh debitur, koreksi jumlah utang, pengembalian pengurusan piutang negara oleh PUPN kepada Penyerah Piutang (dhi. Kantor Pusat DJKN), dan adanya revaluasi pada tahun 2012 atas hasil inventarisasi dan penilaian (IP) sisa aset eks BPPN tahun 2011. Selain itu, perubahan juga disebabkan adanya perubahan struktur penyajian aset kredit eks BPPN pada laporan keuangan Tahun 2012 yakni memasukkan tagihan PKPS menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aset kredit eks BPPN.

Sebagai tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun 2011, maka pada tahun 2012 dilakukan verifikasi ulang atas hasil IP Tahun 2011 sebanyak 1.319 berkas dan menunjukkan keberadaan piutang tersebut dengan dokumen pendukung berupa dokumen pengalihan piutang dari Bank Asal kepada BPPN (*Cessie*).

Aset kredit eks kelolaan PT PPA sebesar Rp5.846.878.558.811 merupakan hak tagih atau piutang eks BPPN yang semula diserahkan pengelolaannya kepada PT PPA kemudian dikembalikan ke Menteri Keuangan sesuai berita acara serah terima tanggal 27 Februari 2009. Pengelolaan atas aset eks kelolaan PT PPA ini oleh Kementerian Keuangan dilakukan melalui mekanisme penyerahan kepada PUPN, namun sebagian aset kredit ini masih dalam pengelolaan Kantor Pusat DJKN.

Pada LKPP Tahun 2011 Aset kredit eks BPPN dan Tagihan PKPS dicatat sebagai Aset Lainnya eks BPPN. Rincian Piutang Aset Kredit Eks BPPN dan Eks Kelolaan PT PPA dapat dilihat pada **Daftar 15**.

11. Piutang Lain-lain pada BA 989 89 berupa Piutang Aset Kredit yang Diserahkelolaan kepada PT PPA sebesar Rp2.334.964.266.710 merupakan aset kredit yang sebelumnya berasal dari EPPN yang tidak terkait dengan perkara, yang dikelola oleh PT PPA berdasarkan perjanjian serah-kelola aset antara Menteri Keuangan dan PTPPA tanggal 7 Maret 2012.

Rincian Piutang Aset Kredit yang Diserahkelolaan kepada PT PPA adalah sebagai berikut.

Debitur	Nilai Aset dalam Rp	Nilai Aset dalam USD
PT Fina Bank Syariah	1.336.074.710	86.427,32
PT Fina Bank Syariah	1.593.558.500	99.092
PT Fina Bank Syariah	135.879.310	8.405
PT Fina Bank Syariah	10.469.340	-
PT Fina Bank Syariah	44.108.718,40	2.741,00
PT Fina Bank Syariah	1.000.300.000,00	-
Total	1.706.307.438,235	65.374,96
Total setelah konversi ke Rp		2.334.964.266.710

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (audited)

C.7.14 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi

Bagian Lancar Tagihan
TGR Rp366,31 miliar

Jumlah Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp366.308.908.475 dan Rp60.470.939.992 merupakan saldo Tagihan TGR pada KL dan BUN yang akan jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Saldo Bagian Lancar TGR per 31 Desember 2012 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp296.353.225.635 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp366.606.908.475 dikurangi penyisihan sebesar Rp69.355.682.840.

Rincian Bagian Lancar TGR pada masing-masing KL dan BUN dapat dilihat pada Daftar 16.

C.7.15 Bagian Lancar Penerusan Pinjaman

Bagian Lancar Penerusan
Pinjaman Rp5,32 triliun

Bagian Lancar Penerusan Pinjaman per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp5.325.797.572.454 dan Rp5.306.849.159.688. Bagian Lancar Penerusan Pinjaman terdiri dari:

1. Bagian Lancar Penerusan Pinjaman sebesar Rp4.112.004.157.416 merupakan potensi kewajiban pokok Penerusan Pinjaman yang jatuh tempo sampai dengan akhir tahun 2012. Nilai Bagian Lancar Penerusan Pinjaman per 31 Desember 2012 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp4.091.444.136.629 yang berasal dari nilai bruto Rp4.112.004.157.416 dikurangi penyisihan sebesar Rp20.560.020.787, dengan rincian

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2012 (audited)	31 Desember 2011 (audited)
BUN	3.668.206.081.623	3.622.764.063.077
BUND	394.443.942.136	453.602.028.304
Pembi	64.970.519.606	76.293.160.709
Lainnya	100.086.268.083	109.746.806.386
RIDL	3.288.384.778	-
Nilai Bruto	4.117.004.157.416	4.482.395.947.778
Penyisihan	(20.560.020.787)	(22.311.978.739)
Nilai Bersih	4.091.444.136.629	4.460.083.371.037

2. Piutang Lainnya Penerusan Pinjaman sebesar Rp1.213.793.415.038 merupakan piutang yang terkait dengan Penerusan Pinjaman, terdiri dari:
 - a. Potensi tunggakan dapat ditagih sebesar Rp738.987.707.027 yang merupakan bagian hak tagih Pemerintah yang telah jatuh tempo dan menunggak serta memiliki potensi untuk dapat ditagih pada 2012. Berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 12/PE/2011 mengenai Kualitas dan Penyisihan Piutang piutang disajikan berdasarkan umur piutang. Piutang yang tertunggak dengan kolektibilitas di bawah 12 bulan per tanggal neraca dikategorikan sebagai potensi tunggakan yang dapat ditagih. Sedangkan piutang yang tertunggak dengan kolektibilitas di atas 12 bulan per tanggal neraca diklasifikasikan pada aset lainnya RDI. Jumlah potensi tunggakan yang dapat ditagih terdiri dari piutang pada:

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

Uraian	Jumlah (Rp)
BUMN	587.843.857.084
BUMD	19.1467.908.183
Penda	22.825.753.188
Lainya	14.820.885.574
Nilai Bruto	726.387.707.027
Penyisihan	(87.861.348.337)
Nilai Bersih	639.288.360.729

b. Piutang Bunga sebesar Rp588.721.637.578 berdasarkan debitur, yaitu:

Uraian	Jumlah (Rp)
BUMN	248.711.538.480
BUMD	17.870.841.340
Penda	7.522.262.744
Lainya (Kotakang dan KUMK SIP 006)	15.519.891.063
Nilai Bruto	269.724.807.544
Penyisihan	(1.449.623.138)
Nilai Bersih	268.278.014.386

c. Piutang Denda yang telah diterbitkan Surat Tagihannya sebesar Rp187.101.070.462 berdasarkan debitur, yaitu:

Uraian	Jumlah (Rp)
BUMN	44.468.783.857
BUMD	139.045.384.728
Penda	3.506.892.077
Nilai Bruto	187.101.070.482
Penyisihan	(93.509.312)
Nilai Bersih	186.189.965.110

Piutang Lainnya Ferurusan Pinjaman pada LKPP Tahun 2011 disajikan pada pos Piutang Lainnya, sedangkan pada LKPP Tahun 2012 disajikan pada pos Bagian Lancar Penerusan Pinjaman

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (audited)

Piutang dari Kegiatan
BLU Rp2,47 triliun**C.7.10 Piutang dari Kegiatan BLU**

Piutang dari Kegiatan ELU per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp2.473.903.438.486 dan Rp1.216.391.989.142. Saldo Piutang dari Kegiatan BLU per 31 Desember 2012 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp1.624.730.324.255 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp2.473.903.438.486 dikurangi penyisihan sebesar Rp849.123.114.231. Piutang dari Kegiatan BLU terdiri dari piutang kegiatan operasional BLU sebesar Rp2.391.229.648.357, dan non operasional BLU sebesar Rp82.673.590.129.

Piutang Kegiatan Operasional BLU terdiri dari:

Kementerian Negara/Lembaga	dalam rupiah	
	31 Desember 2012 (audited)	31 Desember 2011 (audited)
1. BLU di Sekretariat Negara	778.749.986.403	250.789.471.000
2. BLU di Kementerian Keuangan	20.620.616.161	14.938.119.044
3. BLU di Kementerian Perindustrian	2.191.006.721	2.466.869.870
4. BLU di Kementerian ESDH	20.163.840.442	14.319.049.649
5. BLU di Kementerian Perhubungan	1.817.931.020	409.502.500
6. BLU di Kementerian Dikbud	393.579.565.636	170.476.463.630
7. BLU di Kementerian Kesehatan	689.346.027.706	66.1984.000.111
8. BLU di Kementerian Agama	2.882.340.226	1.811.781.626
9. BLU di Kementerian PU	90.789.336.228	46.068.787.010
10. BLU di Kementerian ETKM	1.178.510.596	2.298.548.194
11. BLU di Kepolisian RI	14.916.845.477	13.680.873.046
12. BLU di DPPPT	3.649.440.600	6.779.608.300
13. BLU di LAPAN	250.105.154	248.647.687
14. BLU di Kementerian Rakyat	1.267.537.247	2.154.033.443
15. BLU di Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas & Pelabuhan Bebas Batam	362.129.072.626	-
Jumlah Nilai Bruto	2.391.229.648.357	1.177.422.667.288
Penyisihan	(836.483.280.147)	(108.288.828.063)
Jumlah Nilai Bersih	1.554.736.558.210	979.123.738.229

Piutang Kegiatan Non Operasional BLU terdiri dari:

Kementerian Negara/Lembaga	dalam rupiah	
	31 Desember 2012 (audited)	31 Desember 2011 (audited)
1. BLU di Sekretariat Negara	13.694.201.803	13.078.384.965
2. BLU di Kementerian Keuangan	32.766.365.163	22.027.743.403
3. BLU di Kementerian Perhubungan	42.367.403	82.893.203
4. BLU di Kementerian Dikbud	31.707.807.821	-
5. BLU di Kementerian Kesehatan	3.207.162.029	3.162.783.613
6. BLU di Kementerian Agama	1.354.184.933	335.443.062
7. BLU di LAPAN	1.729.880	2.065.803
Jumlah Nilai Awal	82.673.680.129	38.868.321.864
Penyisihan	(12.628.824.084)	(11.180.387.271)
Jumlah Nilai Bersih	70.043.786.045	37.687.934.579

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

Piutang Lain-lain Rp0

C.2.17 Piutang Lain-lain

Piutang Lain-lain per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp0 dan Rp24.977.956.337.945 merupakan piutang yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu kategori piutang sebagaimana telah dijelaskan di atas. Piutang Lain-lain pada tahun 2011 merupakan Piutang Lain-lain pada Kejaksaan Agung – piutang yang pengganti untuk perkara tindak pidana korupsi, piutang denda dan biaya tilang vertek, piutang sewa rumah dinas, dan piutang sewa DNI, piutang terkait penerusan pinjaman, piutang lebih selur DCII Pajak, piutang pada Kementerian Pertanian berupa cacangan benih nasional, piutang pada 20 Bank BDL, dan piutang belanja pensiun. Piutang tersebut pada LKPP Tahun 2012 disajikan sebagai Piutang Bukan Pajak.

Reklasifikasi piutang Lain-lain menjadi piutang PNBSP menyesuaikan perubahan pada Bagan Akun Standar berdasarkan Perdirjen Pembendaharaan Nomor PER-42/PS/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Akun Neraca pada Bagan Akun Standar, dimana akun untuk Piutang Lain-lain tidak digunakan lagi.

C.2.18 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Rp 136,956 triliun

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang per 31 Desember 2012 sebesar Rp 136.956.775.912.378 terdiri dari:

Uraian	(dalam rupiah)	
	Jumlah	
1. Piutang Pajak	44.550.542.630.944	
2. Piutang Bukan Pajak	91.363.128.988.733	
3. Bagian Lancar TP/TGR	69.656.682.840	
4. Bagian Lancar Penerusan Pinjaman	120.626.496.030	
5. Piutang dari kegiatan BLU	649.123.114.231	
Penyisihan Piutang	136.956.775.912.378	

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang tersebut diakui sebagai pengurang nilai Piutang yang disajikan pada Aset Lancar.

1. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Pajak sebesar Rp44.550.542.630.944 merupakan penyisihan Piutang Pajak pada Kementerian Keuangan
2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Bukan Pajak sebesar Rp91.363.128.988.733 dapat dilihat pada **Daftar 13**.
3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Bagian Lancar TP/TGR sebesar Rp69.656.682.840 dapat dilihat pada **Daftar 16**.
4. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Bagian Lancar Penerusan Pinjaman sebesar Rp120.626.496.030 merupakan penyisihan Bagian Lancar Penerusan Pinjaman pada EA 999.04.
5. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang dari Kegiatan BLU sebesar Rp649.123.114.231 terdiri dari:

Uraian	(dalam rupiah)	
	Jumlah	
1. BLU di Sekretariat Negara	638.687.324.677	
2. BLU di Kementerian Keuangan	745.235.221	
3. BLU di Kementerian Perindustrian	573.036.619	

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (lanjutan)

4. BLU di Kementerian ESDM	10.600.480.822
6. BLU di Kementerian Perhubungan	48.183.630
6. BLU di Kementerian Pihhid	49.772.783.781
7. BLU di Kementerian Kesehatan	249.398.151.822
8. BLU di Kementerian Agama	93.060.000
8. BLU di Kementerian PU	371.636.688
10. BLU di Kementerian KUKM	180.434.192
11. BLU di Korpri RI	84.948.821
12. BLU di BPPT	17.742.203
13. BLU di LAPAN	148.644.888
14. BLU di Kementerian Perumahan Rakyat	58.337.888
15. BLU di BPKP/BF/Batam	1.610.646.384
Jumlah	349.123.114.231

C.2.19 Persediaan

Persediaan
Rp62,62 triliun

Jumlah Persediaan per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp62.016.561.796.415 dan Rp59.214.846.453.160 merupakan nilai persediaan yang berdasarkan neraca KL dan Unit terkait lainnya, dengan rincian sebagai berikut.

Jenis Persediaan	(dalam rupiah)	
	31 Desember 2012 (<i>audited</i>)	31 Desember 2011 (<i>audited</i>)
Persediaan di KL	56.391.134.237.688	56.048.934.411.652
Persediaan di BLU	732.879.110.391	690.786.321.790
Persediaan di BUN	4.882.498.398.336	2.675.861.710.618
Jumlah	62.016.561.796.415	59.214.846.453.160

Persediaan di KL per 31 Desember 2012 terbesar berada di Kementerian Pertahanan sebesar Rp44.647.356.307.542, PDLRI sebesar Rp2.514.537.356.111, Kementerian Kesehatan sebesar Rp82.793.930.244, Kementerian Perumahan Rakyat sebesar Rp91.749.448.153, Kementerian Pertanian sebesar Rp90.627.537.236, dan Kementerian ESDM sebesar Rp813.946.422.944. Rincian Persediaan di KL dan BLU dapat dilihat pada **Daftar 17**.

Persediaan di BUN per 31 Desember 2012 sebesar Rp4.882.498.398.336 adalah Persediaan pada DA 999.08 yang merupakan nilai persediaan berdasarkan neraca KL dan Satker Khusus Pengguna Dana BA BUN – Belanja Lainnya (BA BUN - 999.06), yang terdiri dari:

- Persediaan Cadangan Beras Nasional (CBN) pada Kementerian Pertanian sebesar Rp146.138.014.925 setara dengan 2.517.368 kg dengan rincian sebagai berikut.

No.	Tahap	kg	Nilai (Rp.)
1	Pad Non Hibrida	887.8007	86.467.342.626
2	Pad Hibrida	437.180	20.878.040.424
3	Jagung Kompos 1	142.907	1.208.570.421
4	Jagung Hibrida	1.621.434	60.364.631.241
5	Kedelai	779.880	6.439.392.126
	Jumlah	12.517.368	146.137.998.848

* setiap persediaan beras disediakan persediaan BLU setara Rp27,93 triliun persediaan

- Persediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Neraca 999.08 (BA BUN - Belanja Lain-lain) per 31 Desember 2012 pada Perum BULOG sebesar Rp3.234.574.665.000 setara dengan jumlah 431.276.622 kg dikalikan dengan biaya perolehan persediaan

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

yang terakhir yaitu Rp7.500/kg. Sedangkan nilai stok CBP berdasarkan harga perdagangan per tahun dapat dirinci sebagai berikut.

No.	Tahun	Kuantum (kg)	Harga Perolehan per kg (Rp)	Jumlah (Rp)
2	2011	266.666.666	7.500	2.000.000.000.000
3	2012	266.666.666	7.500	2.000.000.000.000
Jumlah		433.333.332		3.052.641.576.250

Realisasi penyaluran CBP pada Tahun 2012 sebesar 213.813.109,71 kg berdasarkan *Delivery Order* (DO) terdiri dari penyaluran Bencana Alam sebanyak 13.321.928,4 kg dan penyaluran Operasi Pasar Murni Tahun 2012 sebanyak 200.491.181,31 kg.

Penggunaan CBP selama Tahun 2012 dan saldo per 31 Desember 2012 disajikan sebagai berikut.

URAIAN	Kuantum (Kg)	Nilai Neraca	Nominal (Rp)	KETERANGAN
STOK AWAL (Lap. Audited) Koreksi Stok Awal	379.838.048,31	6450	2.443.506.411,611	Nilai Persediaan (kuantum x nilai neraca)
	165.000,00 (-)			DO 2011 Telat Melaporkan Sumbang
	223.575,23 (-)			DO 2011 Bencana Alam (Koreksi lambah
	379.449.473,08			Stok awal Lap. Div. Lur. tgl 29/01/2013
	26.409,00 (-)			DO 2011 Koreksi Tambah DKI
	379.423.068,08			
PENAMBAHAN STOK				
STOK AWAL 2012	266.666.666,67	7500	2.000.000.000.000	Pembelian Pemerintah
PENGUNAAN OP (PENDAPATAN NEGARA)				
- DO TA 2011			5.464.248.000	Outstanding OPM TA 2011
- DO TA 2011			1.023.600.000	TA 2011, DO telat melaporkan
- Selama Tahun 2012 (Berdasarkan DO)	200.491.181,31		1.236.825.248,622	Bukti SSBP, tahun 2012
1. Total (Outstanding TA 2012 yang belum disetar)	200.491.181,31		1.243.312.497,622	Penerimaan pada Tahun 2012
PENGUNAAN BENCANA ALAM				
- DO TA 2012	13.321.928,46			
1. Total	13.321.928,46			
Total Persediaan per 31 Desember 2012	433.333.332		3.052.641.576.250	
STOK AWAL	433.333.332,00	7500	3.052.641.576.250	141Pemerintah Bantuan Internasional

c. Persediaan dibarbagai instansi lainnya pengguna EA SSBP sebesar Rp1.511.785.718.411.

C.2.20 Dana Bergulir

Dana Bergulir
Rp 11,45 triliun

Jumlah Dana Bergulir per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp 11.453.274.949.550 dan Rp 10.195.253.111.510 merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat, pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota Kelompok Swadaya Masyarakat dan lain-lain yang dikelola oleh KL maupun BLJ KL dengan rincian sebagai berikut.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

Kementerian Negara/Lembaga	(dalam miliar)	
	31 Desember 2012 Iqadifiaf	31 Desember 2011 Iqadifiaf
1. Kementerian Kehutanan	7.782.861.024	1.221.638.044
2. Kementerian Lingkungan Hidup	42.189.032.456	48.306.342.015
1. Kementerian Lingkungan Hidup	3.417.307.961.636	3.360.348.291.725
2. Kementerian Negara Perumahan Rakyat	3.800.000.000.000	3.800.000.000.000
3. Kementerian Pekerjaan Umum	2.635.433.963.293	2.216.597.870.341
Jumlah	11.453.274.948.950	4.195.258.111.910

Dari Dana Bergulir sebesar Rp11.453.274.948.950, terdapat Dana Bergulir yang sumber pembiayaannya berasal dari BA 999.03 sebesar Rp11.411.005.036.094 dan disalurkan melalui BLU pada Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Negara Koperasi dan UKM, dan Kementerian Kehutanan.

Penjelasan masing-masing dana bergulir adalah sebagai berikut.

1. Dana Bergulir di Kementerian Kehutanan per 31 Desember 2012 sebesar Rp7.782.861.024 adalah dana bergulir yang dikelola oleh Pusat Pembiayaan Pembangunan Kehutanan yang berasal dari DA 999.03.
2. Dana Bergulir di Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH) per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp42.189.032.456 dan Rp48.306.342.015 merupakan Dana Bergulir kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK), yang merupakan realisasi *Separate Arrangement Agreement* (SAA) antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman untuk program *Debt for Nature Swap* (DNS) yang ditandatangani pada tanggal 3 Agustus 2006. Program yang disetujui dalam rangka DNS ini adalah *Financial Assistance for Environmental Investment for Micro and Small Enterprises*. Program ini dijalankan oleh KLH selama 5 tahun, yaitu tahun 2006 sampai dengan 2010.
3. Dana Bergulir di Kementerian Negara Koperasi dan UKM per 31 Desember 2012 sebesar Rp2.517.334.363.833 berasal dari BA 888.03 yang disalurkan kepada Lembaga Pengelola Dana bergulir (LPUD) Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
4. Dana Bergulir di Kementerian Negara Perumahan Rakyat per 31 Desember 2012 sebesar Rp6.251.054.094.460 merupakan dana bergulir untuk pembiayaan perumahan yang berasal dari BA 999.03. Pembiayaan perumahan ini merupakan dana yang digulirkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat berpenghasilan menengah bawah untuk Kredit Kepemilikan Rumah Sederhana Sehat (KPRSH).
5. Dana Bergulir di Kementerian Pekerjaan Umum per 31 Desember 2012 sebesar Rp2.635.433.963.293 merupakan hak tagihan BLU BPJT kepada pihak ketiga khususnya Badan Usaha Jalan Tol (BUJTT) yang telah diberikan pinjaman untuk dana uang ganti rugi perolehan tanah proyek pembangunan jalan tol.

C.2.21 Dana Bergulir Diragukan Tertagih

Dana Bergulir Diragukan Tertagih sebesar Rp20,22 triliun

Jumlah Dana Bergulir Diragukan Tertagih per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar minus Rp20.196.518.935 dan Rp0 merupakan penyisihan yang dibentuk untuk mendapatkan nilai realisasi bersih dana bergulir yang dikelola oleh KL maupun BLU/BL dengan rincian sebagai berikut.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (audited)

Kementerian Negara/Lembaga	(dalam rupiah)	
	31 Desember 2012	31 Desember 2011
1. Kementerian Kehutanan	0	0
2. Kementerian Lingkungan Hidup	18.080.898.500	0
3. Kementerian Koperasi dan UKM	4.115.621.435	0
4. Kementerian Negara Perumahan Rakyat	0	0
5. Kementerian Pekerjaan Umum	0	0
Jumlah	20.196.519.935	0

Secara rinci kebijakan pembentukan nilai realisasi bersih dana bergulir pada masing-masing entitas adalah sebagai berikut:

1. Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan sebesar Rp0 karena semua penyaluran masih dalam masa tangguh (*grace period*).
2. Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada Kementerian Lingkungan Hidup sebesar Rp18.080.898.500 merupakan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang telah dilakukan Bank Syariah Mandiri dengan golongan diragukan dan macet. Akumulasi nilai PPAP dengan golongan diragukan dan macet dicatat dan dilaporkan pada akun Dana Bergulir yang Diragukan Netto lainnya.
3. Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada BLU LPDB (UKM) sebesar Rp4.115.621.435 merupakan dana bergulir yang diragukan tertagih. Dana bergulir yang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).
4. Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada BLU Pusat Pembiayaan Perumahan sebesar Rp0 karena semua risiko penyaluran menjadi beban perbankan.
5. Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada BLU Bidang Pendanaan Sekretariat RPJT sebesar Rp0, dengan pertimbangan: (1) BUJT wajib melakukan pelunasan dana talangan pengadaan tanah dimaksud sebelum pelaksanaan konstruksi pembangunan Jalan Tol, (2) sampai dengan saat ini semua dana talangan selalu dibayar oleh BUJT, serta (3) tanah yang ditangani oleh Dana Bergulir menjadi BMM pada Kementerian Pekerjaan Umum.

C.2.22 Investasi Non Permanen Lainnya

Investasi Non Permanen Lainnya Rp7,67 triliun

Investasi Non Permanen Lainnya per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp7.868.515.521.751 dan Rp4.749.737.167.996 merupakan investasi yang dikelola oleh beberapa KL atau BUN, yaitu:

Uraian	(dalam rupiah)	
	31 Desember 2012	31 Desember 2011
Kementerian Perindustrian	23.044.785.419	37.390.370.139
BLU Pusat Investasi Pemerintah-Kemenkeu	7.827.710.870.832	4.731.778.628.784
Peguruan Tinggi/Eks BHMN	19.788.762.500	10.590.289.073
Jumlah	7.869.545.521.754	4.749.737.167.996

Penjelasan masing-masing Investasi Non Permanen Lainnya adalah sebagai berikut:

1. Investasi non permanen pada Kementerian Perindustrian sebesar Rp23.044.785.419 merupakan investasi yang terbentuk dari pinjaman kepada perusahaan Industri Tekstil dan Produk Tekstil (ITPT), dalam program SKIM 2 dengan jangka waktu, pengembalian sampai dengan lima tahun. Nilai realisasi bersih investasi jangka panjang yang dimiliki oleh Kementerian Perindustrian adalah sebesar Rp14.948.703.604, yang merupakan nilai

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 *(unaudited)*

hasil pengurangan investasi tidak dengan nilai yang dicadangkan sebagai pengurang nilai investasi permanen lainnya sebesar Rp8.098.061.815.

2. Nilai Investasi Non Permanen pada BJU Pusat Investasi Pemerintah (Kementerian Keuangan) merupakan nilai investasi atau pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga sebagai bagian dari kegiatan operasi BLU PIP. Rincian Investasi Non Permanen Lainnya pada BLU PIP adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)	
Uraian	Jumlah
Investasi atau Penyaluran Kepada Pemerintah Daerah	
1. Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Type B di Provinsi Sulawesi Tenggara	190.000.000.000
2. Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Type C di Kota Surakarta	32.124.166.924
3. Pembangunan RSUD Type C di Kabupaten Moko Moko	16.715.116.050
4. Pembangunan Pasar Umum Amlapura Timur serta Pusat Seni dan Kerajinan	23.408.109.310
5. Pembangunan Pasar Tradisional Masbagik di Kabupaten Lombok Timur	4.933.258.800
6. Pembangunan Dua Jembatan layang serta peningkatan dan pelebaran tujuh ruas jalan di kota Bandar Lampung	39.770.558.309
7. Pembangunan RSUD Tipe C di Kabupaten Karangasem	6.644.467.500
8. Pembangunan Jalan dan Jembatan di Provinsi Sulawesi Tenggara	19.203.513.300
Total Penyaluran Kepada Pemda	332.799.180.193
Investasi atau Penyaluran Kepada BUMN atau Badan Usaha	
1. Pinjaman dengan Persyaratan Lunak dalam Rangka Pelaksanaan Pasal 22A UU Nomor 2 Tahun 2010 - PLN	7.500.000.000.000
2. Pengadaan 1200 Unit Gerbang PPCW- PT INKA	94.914.793.642
Total Penyaluran Kepada BUMN/Badan Usaha	7.594.914.793.642
Total Investasi/Penyaluran PIP	7.927.713.973.835

3. Investasi jangka panjang non permanen pada Perguruan Tinggi Eks Badan Hukum Milik Negara sebesar Rp18.786.762.500 merupakan investasi yang dikelola oleh:
- Universitas Garjaha Mada dengan nilai sebesar Rp13.308.637.500 yang merupakan *joint operation* dengan pihak ketiga; dan
 - Institut Teknologi Bandung dengan nilai sebesar Rp5.478.125.000 merupakan investasi dalam bentuk obligasi.

C.2.23 Cadangan Penurunan Nilai Investasi Non Permanen Lainnya

*Cadangan Penurunan
Nilai Investasi Non
Permanen Lainnya minus
Rp0,00 Milia*

Cadangan Penurunan Investasi Non Permanen Lainnya per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar minus Rp8.098.061.815 dan Rp0 merupakan pencadangan penurunan nilai investasi non permanen lainnya pada investasi non permanen SKIM 2 yang dikelola oleh Kementerian Perindustrian. Kebijakan pencadangan penurunan nilai investasi non permanen lainnya mulai diterapkan pada LKPP Tahun 2012 *audited* dengan kebijakan bahwa nilai yang dicadangkan adalah sebesar:

- investasi yang diragukan pengembaliannya dengan bobot pengurang sebesar 50%, dalam hal debitur hanya melakukan pembayaran paling banyak sebanyak tiga kali pembayaran dalam 1 (satu) tahun; dan

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (audited)

2. investasi macet dengan bentuk pengurang sebesar 100%, dalam hal debitur sama sekali tidak melakukan pembayaran dalam satu tahun.

Pencantukan cadangan perururan nilai Investasi Non Permanen Lainnya dilakukan dalam rangka pembentukan nilai realisasi bersih investasi non permanen. Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 tentang Akuntansi Investasi, investasi non permanen disajikan pada laporan keuangan sesuai dengan nilai realisasi bersihnya.

C.2.24 Investasi Permanen Penyertaan Modal Negara

PMN Rp912.877.899.801

Jumlah Investasi Permanen Penyertaan Modal Negara (PMN) per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp912.877.899.801 dan Rp738.951.554.233,014 merupakan nilai penyertaan modal negara pada BUMN, Non BUMN, BHMN, Lembaga Keuangan Internasional, Badan Usaha Lainnya, BI, dan LPS dengan jumlah

(dalam rupiah)

PMN	31 Desember 2012 (audited)	31 Desember 2011 (audited)
1. BUMN	677.338.383.256.170	589.766.661.926.137
2. BHMN	1.904.129.212.877	1.166.034.178.646
3. Non BUMN	5.179.641.951.881	4.261.956.608.163
4. Lembaga Internasional	36.497.092.327.727	35.495.913.032.610
5. Badan Usaha Lainnya	434.267.346	224.634.268
6. Bank Indonesia	166.468.466.000.000	69.572.275.000.000
7. Lembaga Penjamin Simpanan	23.490.590.381.000	16.726.488.855.000
Jumlah	912.877.899.396.801	738.951.554.233.014

PMN pada BUMN

1. Nilai PMN pada BUMN per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp677.338.383.256.170 dan Rp589.766.661.926.137 disajikan berdasarkan metode ekuitas *equity method*, yaitu dihitung dari penjumlahan total ekuitas masing-masing BUMN setelah dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah pada BUMN yang bersangkutan. Nilai PMN pada BUMN per 31 Desember 2012 tersebut merupakan nilai PMN pada 141 BUMN sebesar Rp656.663.652.345.436 dan lima BUMN/Lembaga dibawah pembinaan Kementerian Keuangan sebesar Rp20.674.731.410.734. Status laporan keuangan pada 141 BUMN adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Status Laporan Keuangan	Jumlah BUMN	Jumlah
Audited 2012	129	680.681.518.511.152
Unaudited 2012	9	13.952.371.613.911
PP Pendirian	1	97.982.660.300
Proyeksi 2012	1	1103.305.000.000
Unaudited 2010	1	7.747.857.717
Audited 2009	1	173.367.634.382
Jumlah	141	656.663.652.345.436

Terdapat laporan keuangan BUMN yang disajikan dalam mata uang Dollar Amerika yaitu PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk.; PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.; PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.; dan PT. Pertamina. Dalam melakukan konversi ke dalam mata uang Rupiah, digunakan kurs tengah BI pada tanggal 28 Desember 2012, yaitu Rp9,670-1 USD untuk akun-akun selain nilai modal disetor, mangingat akun modal disetor

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

menggunakan *historical cost* untuk konversinya

Rincian PMN pada BUMN dapat dilihat pada Daftar 18.

Nilai PMN pada BUMN per 31 Desember 2012 (tersebut termasuk Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada 21 BUMN dengan nilai sebesar Rp38.575.956.501.883. (Daftar 19)

Nilai PMN pada BUMN per 31 Desember 2012 termasuk PMN pada lima BUMN sebesar Rp20.674.730.410.734 yang berada di bawah pembinaan Kementerian Keuangan yaitu Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebesar Rp7.550.047.000.000, PT Sarana Multigriya Financial sebesar Rp2.647.607.277.078, PT Sarana Multi Infrastruktur sebesar Rp4.310.317.058.916, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia sebesar Rp4.917.117.265.000, dan PT Geo Dipa Energi sebesar Rp1.249.641.809.740. (Daftar 20)

Penambahan nilai PMN pada Perusahaan Negara antara lain disebabkan oleh:

- a. Perubahan Nilai Ekuitas pada masing-masing Perusahaan Negara dari Aktivitas Operasi.

Perubahan ekuitas Perusahaan Negara terutama disebabkan atas pembentukan cadangan yang dilakukan perusahaan, yang bersumber dari laba bersih yang tidak disetorkan menjadi dividen. Cadangan yang dibentuk akan menambah nilai ekuitas masing-masing Perusahaan Negara. Selain karena pembentukan cadangan, perubahan nilai ekuitas dapat disebabkan adanya saldo laba tahun berjalan yang belum ditetapkan penggunaannya.

- b. Penambahan Nilai PMN

Selama periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012, Pemerintah memberikan tambahan Penyertaan Modal Negara yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2012 kepada beberapa Perusahaan Negara, yaitu:

- 1) penambahan PMN kepada PT Dirgantara Indonesia (Persero), sebesar Rp1.400.000.000.000;
- 2) penambahan PMN kepada PT Asuransi Kreali, Indonesia (Persero) sebesar Rp631.000.000.000;
- 3) penambahan PMN kepada Perum Jamina Kredit Indonesia sebesar Rp1.169.000.000.000;
- 4) penambahan PMN kepada PT PAI Indonesia sebesar Rp500.000.000.000;
- 5) penambahan PMN kepada PT Pirdad sebesar Rp300.000.000.000;
- 6) penambahan PMN kepada PT Industri Kapal Indonesia, sebesar Rp230.000.000.000;
- 7) penambahan PMN kepada PT Garuda sebesar Rp100.000.000.000.

- c. Perubahan persentase kepemilikan negara

- 1) Penerbitan saham baru PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
- 2) *Initial Public Offering* PT Waskita Karya (Persero)

- d. Perubahan jumlah komposisi Perusahaan Negara

- 1) Penggabungan PT Pradnya Paramita (Persero) ke dalam PT Balai Pustaka (Persero). Besarnya nilai kekayaan Negara pada PT Pradnya Paramita

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (revised)

(Perseri) yang akan dialihkan ke dalam PT Balai Pustaka (Perseri) telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KM/K.06/2006.

- 2) Pengambilan bagian saham oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset mengakibatkan kepemilikan saham Negara secara langsung pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Nindya Karya menjadi 1% (satu persen) dan kepemilikan saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Nindya Karya menjadi 99% (sembilan puluh sembilan persen).
- 3) Dengan transaksi tersebut, PT Nindya Karya berubah statusnya dari BUMN menjadi Non-BUMN, karena kepemilikan negara pada PT Nindya Karya terdilusi menjadi 1%.
- 4) Pendirian Perum Layanan Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, dengan modal awal sebesar Rp97.952.690.300 yang berasal dari pengalihan barang milik negara pada Kementerian Perhubungan yang pengadaannya bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 dan 2011. Pada tahun 2012, perusahaan belum beroperasi, karena perangkat perusahaan baru terbentuk pada tahun 2013, dan mulai beroperasi pada tahun 2013.
- 5) Pemerintah melakukan pengurangan PMN pada PT Perusahaan Pengelola Aset sebesar Rp804.671.584.634 yang antara lain sebesar Rp474.992.100.000 merupakan tambahan modal disetor PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) pada PT Waskita Karya. Awalnya komposisi kepemilikan modal PT Waskita Karya adalah PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) sebesar 99% dan Pemerintah sebesar 1%, setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2012 tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset, maka kepemilikan Pemerintah menjadi 100% pada PT Waskita Karya, sehingga status PT Waskita Karya menjadi Perusahaan Negara PT Waskita Karya (Persero).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2003 dan Pasal 22 ayat (1) PP Nomor 0 Tahun 2006, LKFP dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan perusahaan negara yang memuat informasi lebih rinci tentang aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, dan laba (rugi) bersih yang disajikan dalam Daftar 18.

PMN pada BHMN

2. PMN pada Badan Hukum Milik Negara (BHMN) per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp1.904.129.212.677 dan Rp1.168.034.176.846 dengan merupakan nilai ekuitas pada BHMN dengan rincian sebagai berikut.

BHMN	(dalam rupiah)	
	31 Desember 2012 <i>(revised)</i>	31 Desember 2011 <i>(revised)</i>
a. Institut Pertanian Bogor (IPB)	874.896.460.513	878.080.916.526
b. Universitas Airlangga	437.711.135.427	412.443.966.338
c. BP MIGAS	591.521.616.737	(123.490.724.016)
Jumlah	1.904.129.212.677	1.168.034.176.846

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 *(unaudited)*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP), seluruh penyelenggara pendidikan harus berbentuk BHP, untuk itu seluruh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) BHMN harus mengubah bentuk dan menyesuaikan tata kelolanya sebagai BHP sesuai ketentuan UU tersebut. Namun, sebelum dilakukannya penyesuaian perubahan bentuk dan tata kelola menjadi BHP, telah ditetapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009 tanggal 31 Maret 2010 dalam sidang putusan uji materi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) yang memutuskan antara lain bahwa Penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 yang memberikan landasan hukum penyelenggara pendidikan dalam bentuk BHMN tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan juga menyatakan UU BHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang menetapkan antara lain PTN BHMN ditetapkan sebagai perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, semua Perguruan Tinggi eks Badan Hukum Milik Negara (BHMN) berubah status hukumnya menjadi Satuan Kerja Badan Layanan Umum, dengan klausul masa transisi untuk pengalihan aset Perguruan Tinggi Eks BHMN dilakukan paling lambat pada tanggal 28 September 2013.

Mengingat pengalihan aset dilakukan paling lambat pada tanggal 28 September 2013, telah diambil kebijakan bahwa aset Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara yang telah ditetapkan menjadi kekayaan negara dipisahkan, yaitu pada Universitas Airlangga dan Institut Pertanian Bogor, per 31 Desember 2012 tetap dicatat sebagai investasi permanen pada Laporan Keuangan BA 999.03 Tahun 2012, dengan *cut off* pencatatan per 31 Desember 2010, dengan dilakukan beberapa penyesuaian. Kebijakan ini diambil dalam masa transisi, sambil menunggu selesainya proses pengalihan kekayaan negara dipisahkan menjadi kekayaan negara tidak dipisahkan/tanah milik negara pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Nilai penyertaan modal negara/kekayaan negara dipisahkan pada Universitas Airlangga menggunakan data Laporan Keuangan Universitas Airlangga Tahun 2012 *audited* dengan dilakukan beberapa penyesuaian atas aset-aset lancar dan aset-aset yang telah dicatat atau dialihkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Nilai penyertaan modal negara/kekayaan negara dipisahkan pada Institut Pertanian Bogor per 31 Desember 2012 masih menggunakan data Laporan Keuangan BA 999.03 Tahun 2012 *unaudited*.

Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-X/2012 tanggal 19 November 2012 tentang Pembubaran BPMIGAS, Mahkamah Konstitusi telah membuat dasar hukum yang mengatur dan menetapkan BPMIGAS, sehingga per 31 November 2012 BPMIGAS telah diubuhkan.

Menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi, dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3135/K/08/MEM/2012 dan Nomor 3136/K/03/LEM/2012 tentang Pengalihan Tugas, Fungsi dan Organisasi Dalam Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 telah diatur hal-hal antara lain

- a. penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sampai dengan diterbitkannya undang-undang baru di bidang minyak dan gas bumi, dilaksanakan oleh satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (SKK Migas);
- b. dalam rangka Penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, SKK Migas memanfaatkan aset eks BPMIGAS dengan prinsip optimalisasi dan efisiensi;
- c. biaya operasional dalam rangka pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berasal dari jumlah tertentu dari bagian negara dari setiap kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi; dan
- d. biaya operasional yang diperlukan dalam pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi untuk tahun 2012 menggunakan sisa anggaran BPMIGAS tahun 2012.

Sesuai dengan surat Menteri Keuangan kepada Menteri ESDM Nomor S-33/MK.05/2013 tanggal 16 Januari 2013 hal Penyajian Laporan Keuangan BPMIGAS pada LKPP Tahun 2012, telah diambil kebijakan sebagai berikut.

- a. BPMIGAS menyusun Laporan Keuangan per 13 November 2012;
- b. Pendanaan BPMIGAS tanggal 13 November 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (BUN) BA 999.03;
- c. LKPP Tahun 2012 menyajikan BPMIGAS sebagai investasi permanen PMN sebesar *net equity* per 13 November 2012; dan
- d. Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2012 mengungkapkan BPMIGAS dan Satuan Kerja Sementara Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Atas kebijakan yang telah diambil terkait BPMIGAS tersebut, nilai investasi permanen pada BPMIGAS yang dicatat pada Laporan Keuangan BA 999.03 Tahun 2012 adalah nilai aset bersih yang dimiliki oleh BPMIGAS per 13 November 2012, berdasarkan Laporan Keuangan BPMIGAS (*gross equity*) per 13 November 2012 yang telah disusun oleh BPMIGAS. Sampai dengan LKPP Tahun 2012 (*gross equity*) diserahkan kepada BPK, proses audi. terhadap neraca tersebut belum selesai dilakukan.

Ekuitas BPMIGAS per 13 November 2012 naik sebesar Rp 715.012.340.753 dari posisi per 31 Desember 2011. Kenaikan tersebut akibat dari penyisihan Surplus Kinerja Bersih sebesar Rp 437.907.703.984 dan kenaikan Ekuitas lainnya sebesar Rp 277.105.136.769.

Terkait transaksi yang terjadi setelah tanggal 13 November 2012 sampai dengan 31 Desember 2012, tidak terdapat pendapatan yang diperoleh melainkan terdapat belanja sebesar Rp 383.006.130.829. Hal ini mengakibatkan terjadinya penurunan nilai ekuitas

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

PMN pada perusahaan minoritas (non-BUMN)

menjadi sebesar Rp973.4910.162. Transaksi setelah tanggal 13 November 2012 dilaporkan di Badan Lainnya sebagai Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya.

3. PMN pada perusahaan minoritas (non-BUMN) sebesar Rp5178.641.911.881, merupakan penyertaan pemerintah pada perusahaan dengan persentase kepemilikan kurang dari 51%. Nilai penyertaan pada perusahaan minoritas dengan kepemilikan 20% sampai dengan 50% disajikan dengan menggunakan metode ekuitas (*equity method*), sedangkan kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya (*cost method*).

Perubahan nilai kepemilikan negara pada Non-BUMN per 31 Desember 2012 disebabkan oleh:

- a. Perubahan total ekuitas pada Non-BUMN dengan kepemilikan Pemerintah antara 20% sampai dengan 50%, karena perhitungan Pemerintah menggunakan metode ekuitas;
- b. Perubahan komposisi Non-BUMN, yaitu PT Waskita Karya yang berubah statusnya menjadi BUMN, dikarenakan peningkatan kepemilikan Negara Republik Indonesia, PT Nindya Karya berubah status menjadi non-BUMN, dikarenakan penambahan modal yang dilakukan oleh PT Perusahaan Pengelolaan Aset dalam rangka restrukturisasi perusahaan, penambahan *Asean Infrastructure Fund* sebagai salah satu non-BUMN, yang merupakan perusahaan bentukan negara-negara Asean dalam bidang pembiayaan infrastruktur dan pengurangan *Asean Aceh Fertilizer*, karena berdasarkan penelitian lebih lanjut, keterwakilan Indonesia dilakukan oleh PT Pupuk Indonesia, sehingga penyertaan telah tercatat pada LK konsolidasi PT Pupuk Indonesia (Persero);
- c. Adanya perubahan kurs tengah BI untuk nilai tukar Dollar Amerika. Per tanggal 28 Desember 2012 kurs tengah BI adalah 1 USD=Rp9.670, sedangkan per tanggal 30 Desember 2011 adalah 1 USD=Rp9.068. Perubahan kurs tengah BI berpengaruh pada kepemilikan Pemerintah pada PT Freeport, PT Prasadha Pamunah Limbah Industri, *Asean Infrastructure Fund*, dan PT Indonesia Asahan Aluminium. Pada ketiga perusahaan tersebut, Laporan Keuangan disajikan menggunakan mata uang Dollar Amerika Serikat, sehingga harus dikonversi ke dalam mata uang Rupiah, untuk menghitung kepemilikan Pemerintah;
- d. Adanya perubahan kurs tengah BI untuk nilai tukar Ringgit Malaysia per tanggal 28 Desember 2012 kurs tengah BI adalah 1 MYR=Rp3.159.625 sedangkan per tanggal 30 Desember 2011 adalah 1 MYR= Rp2.852.923. Perubahan kurs tengah BI untuk Ringgit Malaysia berpengaruh pada kepemilikan di *Asean Bintulu Fertilizer*, mengingat Laporan Keuangan penyertaan modal negara dari Laporan Keuangan *Asean Bintulu Fertilizer* menggunakan mata uang Ringgit Malaysia; dan
- e. keikutsertaan Negara Republik Indonesia dalam Pendirian *Asean Infrastructure Fund*, yang merupakan perusahaan patungan negara-negara Asean bersama *Asean Development* dalam bidang pembiayaan infrastruktur. Kepemilikan negara-negara Asean pada perusahaan tersebut secara total adalah sebesar 68,10% dan kepemilikan ADD adalah sebesar 31,90%. Indonesia sendiri mempunyai kepemilikan sebesar 25,72% pada *Asean Infrastructure Fund*. Karena sampai dengan saat ini Perusahaan tersebut belum beroperasi, karena masih dalam proses penyelesaian organisasi nilai penyertaan Indonesia masih menggunakan nilai penyertaan yang

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

diperikan, yang disesuaikan dengan nilai tukar per 31 Desember 2012

Pada non-EUMN dengan kepemilikan negara di bawah 20%, nilai penyertaan negara pada Non-BUMN tersebut tetap, sepanjang tidak ada penambahan penyertaan yang dilakukan Pemerintah, mengingat perituran kepemilikan negara menggunakan metoda biaya. Berdasarkan hal tersebut, nilai kepemilikan negara pada Non-BUMN tersebut tidak tergantung pada status aporan kelangan non-BUMN tersebut, atau perubahan ekuitas.

Rincian kepemilikan negara pada Non-BUMN dapat dilihat pada **Daftar 21**.

Penyerahan pada
Lembaga Internasional

4. Penyerahan pada Lembaga Internasional per 31 Desember 2012 sebesar Rp38.497.052.327.727 merupakan Penyerahan Modal Pemerintah Indonesia dalam rangka keanggotaan pada beberapa organisasi/lembaga keuangan internasional/regional baik yang telah disator maupun yang masih dalam bentuk *promissory notes*. PMN ini dikonversikan ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal 28 Desember 2012. Rincian PMN pada Lembaga Internasional dapat dilihat pada **Daftar 22**.

Dari total penyerahan pada Lembaga Internasional sebesar Rp38.497.052.327.727, termasuk penyerahan dalam bentuk *promissory notes* sebesar Rp26.550.675.238.720 di antaranya sebesar **Rp26.550.675.238.720** kepada *International Monetary Fund* (IMF). Rincian *promissory notes* per Lembaga Internasional adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)		
No.	Nama Lembaga	Jumlah (Rp)
1.	International Monetary Fund	26.550.675.238.720
2.	International Development Association	5.173.138.088
3.	Multilateral Investment Guarantee Agency	10.676.624.060
4.	Common Fund for Commodities	2.662.368.088
Jumlah total		26.550.675.238.720

Promissory notes pada IMF disajikan berdasarkan revaluasi IMF yang dilakukan pada bulan April tahun berjalan, bukan pada tanggal 31 Desember 2012.

Nilai penyerahan yang masih merupakan *promissory notes* dapat berkurang, yang disebabkan:

- pembayaran atas *promissory notes*; dan
- pengurangan/penghapusan *promissory notes*, yang dapat disebabkan antara lain adanya apresiasi nilai tukar Rupiah.

Penyerahan dalam bentuk *Promissory Notes* disajikan sebagai bagian utang. Lihat Catatan **C.2.40** dan Catatan **C.2.46**.

Pada tanggal 13 Desember 2010, Board of Governor's IMF mengadopsi Resolusi Nomor 06-2 perihal "4th General Review of Quotas". Salah satu isi dari resolusi tersebut adalah kesepakatan tentang kenaikan kuota ke-14. Untuk Indonesia, kenaikan kuota ke-14 dimaksud setara dengan Rp39.162.006.333.240 (kurs tanggal 28 Desember 2012), yakni dari SDR 2.079 juta menjadi SDR 4.648,4 juta atau dari 0,872% menjadi 0,979%, peringkat 1 di konstituen South East Asia Voting Group (SEAVG). IMF mensyaratkan persetujuan atas pembayaran kenaikan kuota ke-14 harus telah disampaikan oleh masing-masing negara anggota paling lambat 31 Desember 2011. Pemerintah dan BI telah melakukan koordinasi yang antara lain menyepakati untuk mengalihkan pembayaran kuota tersebut kepada Bank Indonesia. Akan tetapi masih terdapat kendala hukum dikarenakan UU BI tidak mengatur secara eksplisit mengenai pembayaran keanggotaan di

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

	<p>lembaga internasional dan berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 1 Tahun 1967, bahwa Menteri Keuangan diberi kuasa, dengan mengadakan pinjaman atau cara-cara lain yang layak, untuk mendapatkan dan membayarkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia jumlah-jumlah yang sewaktu-waktu harus dibayar kepada IMF, menurut persetujuan IMF, dan berdasarkan resolusi-resolusi dari Dewan Gubernur IMF. Pemerintah dan BI sepakat untuk melakukan pembahasan terkait revisi PP Nomor 1 Tahun 1967 untuk memberikan kewenangan bagi BI untuk mewakili Negara Republik Indonesia dan melakukan pembayaran kuota untuk dan atas nama Negara.</p>
<i>PMN pada Rasio Usaha Lainnya</i>	<p>5. Penyertaan pada Badan Usaha Lainnya sebesar Rp434.267.946 merupakan investasi Permanen Pemerintah pada perusahaan penerbit SBSN. Perusahaan penerbit SBSN terdiri atas enam perusahaan, yaitu Perusahaan Penerbit SBSN, Perusahaan Penerbit SBSN I, Perusahaan Penerbit GDSN I, Perusahaan Penerbit GDSN II, Perusahaan Penerbit GDSN III, dan Perusahaan Penerbit SBSN IV. Nilai kepemilikan Negara pada masing-masing perusahaan tersebut sebesar Rp10.000.000, Rp10.000.000, Rp108.507.903, Rp104.759.443, Rp100.000.000, dan Rp100.000.000.</p>
<i>PMN pada BI</i>	<p>8. Penyertaan pada Bank Indonesia per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp166.468.468.000.000 dan Rp89.572.275.000.000. Modal Bank Indonesia dicatat dan dilaporkan sebagai bagian dari investasi permanen sesuai dengan penjelasan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, modal Bank Indonesia merupakan kekayaan negara dipisahkan. Ikhtisar laporan keuangan Bank Indonesia dapat dilihat pada Daftar 23.</p>
<i>PMN pada LPS</i>	<p>7. Penyertaan pada Lembaga Penjamin Simpanan per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp23.490.590.361.000 dan Rp16.726.488.355.000. Modal Lembaga Penjamin Simpanan dicatat dan dilaporkan sebagai bagian dari investasi permanen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, modal Lembaga Penjamin Simpanan merupakan kekayaan negara dipisahkan. Ikhtisar laporan keuangan Lembaga Penjamin Simpanan dapat dilihat pada Daftar 24.</p> <p>Nilai PMN pada Lembaga Penjamin Simpanan per 31 Desember 2012 menggunakan data Laporan Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan per 31 Desember 2012. Laporan Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan tahun 2012 mencantumkan opini <i>Disclaimer</i> oleh BPK yang disebabkan terdapat penyertaan modal sementara (PMS) pada Bank Mutiara, Tbk (d.lh. FT Bank Century, Tbk) per 31 Desember 2012 sebesar harga perolehan yaitu Rp6.762.331.000.000 yang tidak dapat diyakini keajaerannya. Nilai tercatat PMS pada Neraca LPS tidak memperhitungkan jumlah yang dapat diperoleh kembali (<i>recoverable amount</i>), hal ini akan berpengaruh terhadap Laporan Surplus Defisit, Cadangan Tujuan dan Cadangan Penjaminan pada Laporan Perubahan Modal LPS.</p>

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 *(audited)*

Investasi Permanen BLU
Rp 134,18 miliar

C.2.25 Investasi Permanen BLU

Saldo Investasi Permanen BLU per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 yang berjumlah Rp134.165.377.149 dan Rp6.637.194.500 merupakan penyertaan modal oleh BLU dan Perguruan Tinggi Eks BHMN yang telah ditetapkan menjadi Satuan Kerja BLU pada perusahaan. Saldo per 31 Desember 2012 terdiri dari:

1. penyertaan modal BLU PPK Selera Bung Karno (Sekretariat Negara) sebesar Rp6.637.194.500 pada PT Sanjaya Trikarya Sempana (PT STS) dengan porsi kepemilikan sebesar 10%; dan
2. penyertaan modal Institut Teknologi Bandung sebesar Rp92.685.105.659, Universitas Indonesia sebesar Rp11.488.502.626, Universitas Gajah Mada sebesar Rp61.810.850.000, Universitas Pendidikan Indonesia sebesar Rp6.518.536.641, Universitas Airlangga sebesar Rp10.421.613.561, dan Institut Pertanian Bogor sebesar Rp4.603.174.168.

Investasi Permanen Lainnya
Rp 0

C.2.26 Investasi Permanen Lainnya

Jumlah Investasi Permanen Lainnya per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp0 dan Rp0 merupakan nilai PMN pada badan-badan lainnya yang disajikan berdasarkan metode ekuitas *(equity method)*. Nilai Investasi Permanen Lainnya berupa penyertaan atau kepemilikan Perguruan Tinggi Eks BHMN pada beberapa perusahaan pada LKPP 2012 disajikan pada pos investasi Permanen BLU.

Aset Tetap Rp 1.995,56 triliun

C.2.27 Aset Tetap

Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp1.895.501.448.208.083 dan Rp1.587.974.174.587.750 merupakan nilai Aset Tetap berdasarkan neraca RL dan Neraca BUR. Aset Tetap dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan *(acquisition cost)* dan belum memperhitungkan depresiasi *(penyusutan)*.

Rincian Aset Tetap menurut jenisnya adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2012 <i>(audited)</i>	31 Desember 2011 <i>(audited)</i>
Tanah	806.878.472.264.880	806.436.566.508.744
Peralatan dan Mesin	238.128.448.806.787	184.862.188.686.042
Bangunan dan Rangunan	170.743.288.954.378	157.273.088.918.187
Jalan, ligasi, dan Jaringan	379.236.289.019.824	347.184.628.246.236
Aset Tetap Lainnya	14.666.862.681.210	11.617.129.887.802
Konstruksi Dalam Pengerjaan	85.447.328.680.044	66.780.773.332.766
Jumlah	1.895.501.448.208.083	1.587.974.174.587.750

Dalam nilai Aset Tetap per 31 Desember 2012 tersebut termasuk Aset Tetap yang dikelola oleh BLU sebesar Rp182.566.561.428.821, dengan rincian.

(dalam rupiah)

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2012 <i>(audited)</i>	31 Desember 2011 <i>(audited)</i>
Tanah	130.378.108.936.137	108.683.670.125.467
Peralatan dan Mesin	19.253.528.386.023	12.275.090.859.822
Gedung dan Bangunan	24.128.206.445.293	16.536.052.792.384

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.536.871.318.843	1.128.626.602.64E
Aset Tetap Lainnya	784.607.710.013	466.688.028.48E
Instruksi Dalam Pengerjaan	6.707.738.757.413	3.607.228.774.99E
Jumlah	182.568.981.428.821	142.599.447.179.471

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2012 mengalami kenaikan sebesar Rp327.927.271.613.333 atau 20,88 persen dari nilai per 31 Desember 2011. Kenaikan nilai Aset Tetap ini terutama karena perolehan dari realisasi Belanja Modal sebesar Rp145,10 triliun, koreksi penambahan hasil IP, koreksi pencatatan nilai, penambahan aset tetap dari BLU Oluita Batem, LP2 TVRI dan RFI, serta penambahan aset tetap yang diperoleh dari hibah.

Rincian daftar Aset Tetap per K/L dan EUN disajikan pada Daftar 25.

C.2.28 Piutang Jangka Panjang

*Piutang Jangka Panjang
Rp5,01 triliun*

Jumlah Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp5.015.602.161.395 dan Rp3.988.912.006.895. Nilai bersih Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp4.673.680.681.804, yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp5.015.602.161.395 dikurangi penyisihan sebesar Rp342.011.579.591. Pada LKPP Tahun 2011 Piutang Jangka Panjang diklasifikasikan dalam Aset Lainnya, sedangkan pada LKPP Tahun 2012 disajikan tersendiri.

Piutang Jangka Panjang terdiri dari:

Uraian	(dalam rupiah)	
	31 Desember 2012 (audit)	31 Desember 2011 (audit)
1. Tagihan Penjualan Angsuran	1.375.031.741	1.375.031.741
2. Tagihan Turutan Ganti Rugi	246.721.313.918	249.626.424.418
3. Piutang Jangka Panjang Lainnya	4.767.565.815.736	3.737.310.550.736
Jumlah	5.015.602.161.395	3.988.912.006.895
Penyisihan	(342.011.679.601)	(663.936.1E0.9C3)
Nilai Bersih	4.673.680.681.804	3.434.376.846.882

Penjelasan masing masing Piutang Jangka Panjang adalah sebagai berikut.

TPA Rp1,38 miliar

1. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)

Saldo TPA per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp1.375.031.741 dan Rp1.375.031.741. Saldo TPA per 31 Desember 2012 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan sebesar Rp16.888.276 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp1.375.031.741 dikurang penyisihan sebesar Rp1.328.042.465. Saldo TPA tersebut berada di Kementerian KUKM.

Tagihan TGR Rp246,72 miliar

2. Tagihan Turutan Ganti Rugi (TGR)

Saldo Tagihan TGR per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp246.721.313.918 dan Rp249.626.424.418. Saldo Tagihan TGR per 31 Desember 2012 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan sebesar Rp59.896.710.774 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp246.721.313.918 dikurang penyisihan sebesar Rp186.725.103.744. Rincian Tagihan TGR pada K/L dapat dilihat pada Daftar 28.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

Piutang Jangka Panjang Lainnya Rp4,77 triliun

3. Piutang Jangka Panjang Lainnya

Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp4.767.531.815.736 dan Rp3.737.310.550.736. Nilai Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2012 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp4.613.545.382.354, yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp4.767.505.815.736 dikurangi penyisihan sebesar Rp153.960.433.382. Berikut rincian Piutang Jangka Panjang Lainnya.

Instansi/Unit Terkait	(dalam rupiah)	
	31 Desember 2012 (audited)	31 Desember 2011 (audited)
1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	12.824.000.000	-
2. Kementerian Kehutanan	340.314.515.268	759.821.015.246
3. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	1.023.898.389	-
4. Perpustakaan Nasional	44.400.000	-
5. BKKBN	8.99.808.374	-
6. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	6.372.083	-
7. Badan Tenaga Nuklir Nasional	1.264.164	-
8. Badan Pengelola Kawasan Batam	85.283.299.514	-
9. BA BUN 999.34	2.773.982.230.890	2.979.489.535.491
10. BA BUN 899.99	1.646.646.838.061	-
Nilai Bruto	4.767.606.816.736	3.737.310.550.736
Penyisihan	(153.960.433.382)	(388.826.080.610)
Nilai Bersih	4.613.545.382.354	3.348.484.470.126

Penjelasan Piutang Jangka Panjang Lainnya adalah sebagai berikut.

- Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp12.824.000.000 pada satker Institut Pertanian Bogor merupakan piutang afiliasi kepada PT BLST yang merupakan anak perusahaan IPB, termasuk di antaranya untuk pinjaman dari kompensasi PT Irdah Pesona Bogor, Pinjaman untuk unit usaha Agrifresh, pinjaman untuk jaminan deposito, pinjaman untuk *shareholder* PT Grahwita Cendikia, Pinjaman untuk *prov* Lus, dan pinjaman jangka panjang kepada PT Prima Kelula. Nilai Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan sebesar Rp12.759.880.000, berasal dari nilai bruto sebesar Rp12.824.000.000 dikurangi penyisihan sebesar Rp64.120.000.
- Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Kehutanan sebesar Rp340.314.515.268. Penurunan Piutang Jangka Panjang Lainnya dibandingkan dengan tahun 2011 disebabkan oleh adanya bunga/denda piutang HTI *rescheduling* sebesar Rp9.506.729.000, pembayar piutang HTI *rescheduling* sebesar Rp114.675.374.869, dan reklasifikasi piutang HTI *rescheduling* sebesar Rp313.337.854.309. Nilai Piutang Jangka Panjang pada Kementerian Kehutanan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp294.356.601.041, yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp340.314.515.268 dikurangi penyisihan sebesar Rp46.257.914.227.
- Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebesar Rp1.023.898.389 merupakan piutang atas penanaman penghasilan pada sembilan orang debitur yang merupakan pejabat/pejawai pada Kementerian Koordinator

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

Rincian Perakunan yang akan jatuh tempo setelah TA 2013. Nilai Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Koordinator Bidang Perakunan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan sebesar Rp1.018.776.807, berasal dari nilai bruto sebesar Rp1.023.896.389 dikurangi penyisihan sebesar Rp5.119.582.

4. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Perpustakaan Nasional sebesar Rp44.400.000 merupakan piutang atas sewa ruang dan pemakaian listrik untuk ATM periode 2012 s.d. 2014. Nilai Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Perpustakaan Nasional berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan sebesar Rp44.178.000, berasal dari nilai bruto sebesar Rp44.400.000 dikurangi penyisihan sebesar Rp222.000.
5. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada BKKBN merupakan piutang atas dana bantuan modal yang diberikan dengan sistem bergulir pada kelompok UPPKS mulai tahun 2008. Berdasarkan hasil pemetaan terhadap UPPKS didapatkan sisa piutang sebesar Rp8.499.808.374 yang berpotensi menjadi piutang tak tertagih dan sedang proses pengusulan untuk penghapusan piutang. Nilai Piutang Jangka Panjang Lainnya pada BKKBN berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan sebesar Rp0, berasal dari nilai bruto sebesar Rp8.499.808.374 dikurangi penyisihan sebesar Rp8.499.808.374.
6. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan sebesar Rp6.372.083. Nilai tersebut merupakan piutang kelebihan pembayaran tunjangan umum kepada 3 (tiga) pegawai dengan umur piutang lebih dari 12 bulan. Nilai Piutang Jangka Panjang pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp6.340.223 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp6.372.083 dikurangi penyisihan sebesar Rp31.860.
7. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Badan Tenaga Nuklir Nasional sebesar Rp1.354.164 merupakan pengembalian Tunjangan Bahaya Nuklir. Nilai Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Badan Tenaga Nuklir Nasional berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp1.347.393 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp1.354.164 dikurangi penyisihan sebesar Rp6.771.
8. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Badan Pengelola Kawasan Batam sebesar Rp85.263.299.514. Nilai Piutang Jangka Panjang pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam diklasifikasikan sebagai piutang dengan kualitas macet, sehingga dieliminasi seluruhnya.
9. Piutang Jangka Panjang pada EA 999.04 sebesar Rp2.773.882.230.830 terdiri dari:

Uraian	(dalam rupiah) Jumlah
1. KLMK	2.729.780.000.000
2. Kredit Koperasi Primer untuk Anggota Bagi Hasil Bank Muamalat	8.000.000.000
3. Dana Induk Lingkungan	36.202.230.830
Nilai Bruto	2.773.882.230.830
Penyisihan piutang tidak tertagih	(13.989.911.154)
Nilai Bersih	2.760.112.319.739

10. Piutang Jangka Panjang pada BA 999.99 sebesar Rp1.545.545.939.054 atau senilai USD159.328.949 merupakan piutang migas yang jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan. Piutang Jangka Panjang tersebut berasal dari PT Trans Pacific Petroleum Indotama (PT TPPI) sebesar USD140.320.043 dan PT PIM sebesar USD19.508.903.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (audited)

Terkait dengan Piutang PT TPL, telah terdapat rencana restrukturisasi penyelesaian piutang PT TPL yang tertuang dalam Kesepakatan Bersama antara SKK Migas, Pertamina, dan FPA tanggal 15 April 2013 yang disetujui/diketahui oleh Menteri ESDM, Menteri Negara BUMN, dan Menteri Keuangan.

*Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang
Rp342,05 triliun*

C.2.29 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp342.011.579.591 dan Rp553.935.159.903 terdiri dari:

Uraian	(dalam rupiah)	
	31 Desember 2012 (audited)	31 Desember 2011 (audited)
1. Tagihan Penjualan Angsuran	1.328.342.465	-
2. Tagihan TP-Terluntan Ganti Rugi	166.723.103.744	167.010.079.363
3. Piutang Jangka Panjang Lainnya	163.960.433.382	386.626.060.610
Jumlah	342.011.579.591	553.935.159.903

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang tersebut diakui sebagai pengurang nilai Piutang yang disajikan pada Piutang Jangka Panjang.

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Tagihan Penjualan Angsuran sebesar Rp1.328.042.435 merupakan penyisihan pada Tagihan Penjualan Angsuran Kementerian K/L/KVI.
- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Tagihan TP/TCR sebesar Rp166.723.103.744 dapat dilihat pada Daftar 26.
- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang Lainnya sebesar Rp163.960.433.382 merupakan Penyisihan pada Piutang Jangka Panjang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp64.170.000, Kementerian Kesehatan sebesar Rp48.257.914.227, Kementerian Koordinator Bidang Perakonomian sebesar Rp5.110.182, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sebesar Rp22.000, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebesar Rp6.499.808.374, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebesar Rp31.860, Badan Tenaga Nuklir Nasional sebesar Rp6.771, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebesar Rp25.263.299.514, dan BA 93E.04 sebesar Rp19.869.911.154.

C.2.30 Aset Lainnya

*Aset Lainnya
Rp378,98 triliun*

Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp378.887.684.363.657 dan Rp151.616.074.923.132. Nilai bersih Aset Lainnya per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp339.086.269.747.713, yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp378.987.694.360.657 dikurangi penyisihan sebesar Rp19.301.474.612.944.

Aset Lainnya terdiri dari:

Uraian	(dalam rupiah)	
	31 Desember 2012 (audited)	31 Desember 2011 (audited)
1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga	225.816.302.700	212.307.785.825
2. Penerimaan Pinjaman	44.014.286.077.568	46.540.271.969.106
3. Aset Tak Berwujud	15.705.813.685.538	12.406.313.813.585

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

4. Aset yang Dibatasi Penggunaannya	43.873.803.783,522	37.253.351.374,408
5. Dana Kalkulasi BLU	21.170.800.007,851	19.320.332.310,235
6. Dana Penjaminan	88.308.705,830	75.371.634,078
7. Aset AKKS	143.078.028.336,822	130.508.380.280,218
8. Aset Eks DPPU (Tanpa Koordinasi)	3.072.072.706,067	37.543.304.466,405
9. Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya	2.430.048.856,900	14.782.441.010,385
10. Aset Lain-lain	103.540.802.717,961	136.882.377.283,250
Jumlah	378.887.634.360,657	454.316.844.822,432
Penyisihan	(10.801.414.812,944)	(19.113.838.848,890)
Nilai Bersih	358.086.239.547,713	435.203.005.973,542

Penjelasan masing-masing Aset Lainnya adalah sebagai berikut.

1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan Pihak Ketiga Rp225,92 miliar

Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp225.918.302.700 dan Rp212.807.765.825 merupakan saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga yang berada di:

Kementerian/Departemen/Lembaga	(dalam rupiah)	
	31 Desember 2012 (jumlah)	31 Desember 2011 (jumlah)
1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	11.028.332.500	549.100.000
2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	120.362.165.200	204.321.662.200
3. Kementerian Kesehatan	84.677.800.000	88.477.000.000
Jumlah	226.078.302.700	212.807.765.825

2. Penerusan Pinjaman

Penerusan Pinjaman Rp44,01 triliun

Saldo Penerusan Pinjaman per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp44.014.296.077.588 dan Rp46.540.275.969.109 merupakan total pokok pinjaman Penerusan Pinjaman yang akan jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun setelah tanggal rencana. Saldo Penerusan Pinjaman per 31 Desember 2012 tersebut terdiri atas:

Uraian	(dalam rupiah)	
	31 Desember 2012	31 Desember 2011
Penerusan Pinjaman kepada BUMN	42.097.099.042,573	44.003.413.952,390
Penerusan Pinjaman kepada BUMD	88.740.111,332	408.246.314,330
Penerusan Pinjaman kepada Pemerintah Daerah	44.000.046,271	422.404.717.130
Penerusan Pinjaman Lainnya	516.587.238,432	67.111.481,330
Nilai Bruto	44.614.296.077,588	46.540.275.969,109
Penyisihan	(227.041.430,308)	(232.471.310,958)
Nilai Bersih	43.784.214.647,280	46.307.804.658,151

3. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud Rp15,70 triliun

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp15.705.813.685.536 dan Rp12.406.611.813.593 merupakan aset yang berupa *software*, dan hak paten yang berada di KL. Rincian Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada Daftar 27.

4. Dana yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang Dibatasi Penggunaannya Rp43,87 triliun

Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp43.873.803.783.522 dan Rp37.253.351.374.408, terdiri atas:

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

Uraian	(dalam rupiah)	
	31 Desember 2012 (ajutras)	31 Desember 2011 (audit)
1. Sekretariat Negara	399.550.434	-
2. Kementerian Luar Negeri	426.599.804.967	329.201.782.094
3. Kementerian Pertahanan	6.719.107.771.665	5.763.321.157.149
4. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	148.850.004	-
5. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	304.184.836.079	236.446.173.044
6. Kementerian Kesehatan	2.180.231.243.962	2.033.536.302.485
7. Kementerian Agama	1.183.992.899.523	3.244.412.872.238
8. Kementerian Kehutanan	-	50.000.898
9. Kementerian Kelautan dan Perikanan	85.513.964.067	87.114.525.722
10. Lembaga Ketahanan Nasional	3.838.156.000	-
11. LPP TVRI	796.420.964	-
12. BLN	23.868.880.642.267	25.532.866.560.778
Jumlah	43.873.503.883.522	37.253.151.374.408

Masing-masing Dana yang Dibatasi Penggunaannya dapat dijelaskan sebagai berikut.

- Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Sekretariat Negara sebesar Rp399.550.434 merupakan uang jaminan dari pelepasan pada BLN Pusat Pengelcaan (Cmplek Kemayoran).
- Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Luar Negeri sebesar Rp426.599.804.967 merupakan saldo kas basi pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang dibantu berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-2. / B-424/0182 tanggal 13 Januari 1992 untuk keperluan berjaga-jaga terhadap keadaan/kajadlar yang mungkin timbul, terutama untuk membiayai perwakilan apabila *reise lease supply* terlambat dan keperluan lainnya yang penggunaannya harus mendapat persetujuan; instruksi dari Sekretariat Jenderal Kementerian Luar Negeri.
- Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp6.719.107.771.665 merupakan dana kegiatan lintas tahun yang belum selesai sampai dengan akhir tahun 2012, dan *reimbursement* untuk menyelenggarakan administrasi dana khusus Satgas TNI penugasat luar negeri dibawah koordinasi PBB, *Outstanding* L/C devisa, dan dana siswa untuk mendukung kegiatan operasi.
- Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp148.850.004 berada pada Unit Badar Lithang FSDM.
- Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp304.184.836.079 adalah Dana Abadi pada Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia, dan Universitas Indonesia.
- Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Kesehatan sebesar Rp2.180.231.243.962 merupakan dana Bantuan Sosial berupa jaminan kesehatan masyarakat yang belum digunakan sampai dengan akhir tahun 2012.
- Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Agama sebesar Rp1.183.992.899.523 merupakan aset bersih Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp1.183.992.899.523. BPIH dikelola setoran awal hingga adanya pelunasan BPIH sebagai akibat adanya keputusan keberangkatan jemaah atau adanya keputusan dari jemaah itu sendiri untuk menunda atau membatalkan kepesertaan dalam program BPIH atau adanya keputusan dari pejabat yang berwenang.
- Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp85.513.964.067 berupa Dana Penguatan Modal (DPM) dan Dana Ekonomi Produktif

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

DJPP merupakan bagian dari program pemerintah untuk pemertayaan masyarakat

- 9) Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Lembaga Ketahanan Nasional sebesar Rp3.939.159.000 merupakan nilai jaminan sisa pekerjaan yang belum selesai sampai dengan 31 Desember 2012.
- 10) Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada LPP TURI sebesar Rp756.422.954 berupa garansi bank dan jaminan sewa atas sisa pekerjaan yang belum selesai sampai dengan 31 Desember 2012.
- 11) Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BUN sebesar Rp32.968.990.942.267, terdiri dari:

	(dalam rupiah)	
Uraian	31 Desember 2012 (awalan)	31 Desember 2011 (awalan)
Rekening Cadangan	19.989.510.992.821	21.576.485.125.102
Bank Militer	187.097.389.854	158.894.824.182
Rekening Lainnya di BUN	182.806.726.662	149.485.080.003
BA 969.33	12.899.573.852.670	3.643.972.118.732
BA 969.36	-	6.387.305.781
Jumlah	32.968.990.942.267	25.532.963.580.798

Rincian masing-masing dana yang dibatasi penggunaannya pada BUN adalah:

- a. Rekening Cadangan sebesar Rp19.989.510.992.821 merupakan rekening yang digunakan untuk menampung sisa anggaran belanja yang terdiri dari:

	(dalam rupiah)	
Uraian	31 Desember 2012 (awalan)	31 Desember 2011 (awalan)
Rekening Cadangan Reboisasi	4.548.878.110.585	4.548.878.110.585
Rekening Cadangan Subsidi/PSD	2.782.289.686.339	7.523.846.341.346
Rekening Cadangan Dana Bagi Hasil	12.660.343.186.897	6.505.740.673.161
Jumlah	19.989.510.992.821	21.576.485.125.102

- Rekening Cadangan Reboisasi sebesar Rp4.548.878.110.585 adalah rekening milik Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbandharaan yang digunakan untuk menampung sisa dana reboisasi setiap tahun dari bagian pemerintah pusat setelah dikurangi alokasi ke Kementerian Kehutanan. Dana tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan reboisasi seperti Program Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Serhan) berdasarkan PP Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi, Peraturan Bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan Nomor 06.1/PMK/01/2007 dan Nomor 12/Menhut-II/2007 tanggal 5 Februari 2007 tentang Pengeluaran Dana Reboisasi Dalam Rekening Penunjang Hutan.
- Rekening Cadangan Subsidi/PSD adalah rekening milik Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbandharaan yang digunakan untuk menampung sisa subsidi/PSD yang belum disalurkan karena belum didukung oleh bukti-bukti yang sah. Penyaluran dana yang terdapat dalam Rekening Cadangan Subsidi/PSD dibatasi sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran 2013 sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 82/PMK/05/2007 tentang Tata Cara Pencairan Dana Anggaran Perakapan dan Belanja Negara Melalui Rekening Kas Umum Negara, kecuali rekening cadangan Subsidi/PSD yang berkaitan dengan BULOG pencairannya menunggu hasil audit BPK.

Rincian Rekening Cadangan Subsidi yang disajikan sebagai Dana yang Dibatasi Penggunaannya adalah sebagai berikut

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

Uraian	(dalam rupiah)	
	31 Desember 2012 (awal)	31 Desember 2011 (akhir)
Subsidi Premium	3.666.375.911	31.666.361.622
Subsidi Minyak Tanah	-	238.206.873.673
Subsidi Minyak Solar	-	110.754.727.694
Subsidi LPG	1.082.024.124.704	348.800.214.503
Subsidi Listrik	-	284.141.723.990
Subsidi Pangan	-	2.880.034.833.700
Subsidi Benih	14.040.573.010	38.807.101.708
Subsidi Pupuk	1.088.288.374.258	2.250.517.889.430
Subsidi Minyak Goreng	-	-
Subsidi PEL VI	187.831.880.000	124.457.843.390
Subsidi PT KA	136.267.383.443	152.468.942.721
Subsidi PT Pos dan Giro	6.662.500.000	64.360.501.000
PSU Peralun BULLG	187.328.634.424	-
Subsidi Bunga Kredit Program	-	-
Jumlah	2.782.289.888.339	7.523.346.941.340

Total rekening Dana Cadangan Subsidi-FSO adalah sebesar Rp3.333.841.884.281. Dari jumlah tersebut, yang disajikan dalam Dana yang Dibatasi Penggunaannya adalah sebesar Rp2.782.289.888.339 karena akan disalurkan kepada pihak ketiga sampai dengan akhir Februari 2013, sementara sisanya sebesar Rp551.551.995.942 disajikan dalam Kas Lainnya dan Setara Kas karena telah disetor ke Kas Negara sampai akhir Februari 2013.

- Rekening Cadangan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar Rp12.660.342.993.887 berasal dari jumlah dana cadangan DBH Sumber Daya Alam TA 2012 yang sudah menjadi hak daerah dan belum dipindahkan dari rekening Dana Cadangan ke pemerintah daerah karena pemerintah daerah penerima belum dapat diidentifikasi. Rekening Dana Cadangan tersebut akan disalurkan paling lambat pada akhir bulan Februari 2013. Rincian besaran Dana Cadangan per akun DBH SDA adalah sebagai berikut:

Jenis Transfer	(dalam rupiah)	
	31 Desember 2012 (awal)	31 Desember 2011 (akhir)
1. Dana Cadangan DBH Minyak Bumi 15%	1.536.828.014.274	3.127.743.507.074
2. Dana Cadangan DBH Gas Bumi 30%	4.448.408.583.781	3.555.350.558.735
3. Dana Cadangan DBH Luas Tetap	41.710.883.021	8.230.900.313
4. Dana Cadangan DBH Rhyalti	1.848.325.577.541	2.527.890.480.678
5. Dana Cadangan DBH HULUPHHPH	14.870.257.118	23.157.360.418
6. Dana Cadangan DBH PEDH	121.037.677.187	1.4.471.766.666
7. Dana Cadangan DBH Dana Rekrutasi	123.434.784.885	122.438.418.288
8. Dana Cadangan DBH Perikanan	22.837.486.000	15.348.641.190
Total	12.880.342.860.307	8.505.740.673.181

- b. Rekening escrow Bank Mutiara sebesar Rp167.057.369.834 adalah Rekening escrow pada rekening Nomor 1022 000920250 001 atas nama Dirjen Anggaran yang berada di Bank Mutiara (dulu Bank Century) yang setara dengan USD 7.279.976.20. Rekening tersebut digunakakan untuk menampung hibah dari Pemerintah Amerika Serikat.
- c. Rekening lainnya yang digunakan untuk tujuan tertentu adalah sebesar

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

Rp162.809.726.952 dengan rincian sebagai berikut

Uraian Rekening	Jumlah (Rp.)
1. Menteri Keuangan C.O Direktur Jenderal Perbendaharaan Untuk Menampung Penyisihan Dana Tabungan Dana Pemisahan Harta RP3 Nomor 103.000004900	83.868.437.523
2. Menteri Keuangan Pengeluaran untuk Surat Berharga Negara nomor 502.000001980	12.825.000.000
3. BUN Untuk Obligasi Dalam Rangka Pelebaran nomor 502.000002980	82.107.389.500
4. Rekening Khusus Menteri Keuangan Karena Penjualan Saham PT Telkom Di Pasar Domestik nomor 510.000239980	1.367.896.768
5. Rekening Depkeu U/Penampungan Hibah Dari luar Negeri Dlm Rangka Bencana Alam Nasional Dalam Valuta USD nomor 602.074411980	2.743.024.111
Total	162.809.726.952

d. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BA 999.03 terdiri dari:

- 1) Dana pada rekening Kementerian Lingkungan Hidup terkait dengan dana bergulir atas *Debt Nature Swap* sebesar Rp31.872.852.640 yang terdiri atas:
 - Dana pada rekening penampungan anggaran *Debt Nature Swap* Kementerian Lingkungan Hidup sebesar Rp1.784.349; dan
 - Dana pada rekening penampungan dana pokok dan bagi hasil sebesar Rp31.871.068.291.
- 2) Dana Pengembangan Pendidikan Nasional sebesar Rp10.617.700.000.000 yang merupakan *endowment fund* yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi dan dana cadangan pendidikan untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak.
Endowment Fund berupa Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) bersumber dari realisasi atas anggaran yang telah ditetapkan pada BA 999.03 dan dikelola oleh BLU Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di bawah Kementerian Keuangan.
- 3) Dana yang ditempatkan pada Rekening Induk Dana Investasi pada PIP sebesar Rp2.000.000.000.000 untuk pembiayaan PT Indonesia Asahan Aluminium, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.01/2012 tentang Tata Cara Penyediaan dan Pencarian Dana Investasi Pemerintah Untuk Penjualan PT Indonesia Asahan Aluminium.

Dana Kelolaan BLU yang Belum Disalurkan
Rp21,18 triliun

5. Dana Kelolaan BLU yang Belum Disalurkan/Dialokasikan

Dana Kelolaan BLU per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp21.179.300.007.891 dan Rp19.320.332.310.203 merupakan dana yang masih berupa kas yang belum disalurkan/diinvestasikan oleh BLU kepada pihak ketiga, yang terdiri dari:

BAJAN LAYANAN UMUM	Jumlah Dana
BLU Pusat Investasi Pemerintah	9.302.552.213.808
BLU Bidang Pendanaan Sekretariat BPK	4.414.508.333.705
BLU Pusat Perbiayaan Perumahan	4.712.847.103.540
BLU Pusat Perbiayaan Pembangunan Hutan	2.007.290.334.188
BLU LPD3 KURUM	742.344.317.544
JUMLAH DANA KELOLAAN	21.179.300.007.891

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

- a. Dana Kelolaan pada BLU Pusat Investasi Pemerintah sebesar Rp5.302.552.213,906 meruajakan dana investasi yang telah diterima PIP dari Bagian Anggaran 999.03, dan per 31 Desember 2012 berada pada rekening Pusat Investasi Pemerintah atau tidak *available* barbantuk investasi pemerintah. Rincian penempatan dana kelolaan pada BLU Pusat Investasi Pemerintah per 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)	
Penempatan Dana	Jumlah Dana
RIDN Reguler	
1. Giro di Bank BNI IRILI	26.016.026.165
2. Simpanan AS di Bank BRI	1.936.181.741
3. Deposito BRI (3 milyar)	3.839.800.000.000
4. Deposito Banc Mandiri (4 milyar)	1.071.000.000.000
5. Deposito Banc ETRA (5 milyar)	940.000.000.000
6. Deposito Banc Eukopin (5 milyar)	750.000.000.000
7. Deposito Banc Surut (1 milyar)	400.000.000.000
8. Deposito Banc Muaralat (2 milyar)	200.000.000.000
9. Deposito Banc Syariah Bukopin (2 milyar)	32.000.000.000
10. Deposito Bank BRI Syariah (1 milyar)	9.000.000.000
11. Deposito Bank BJB Syariah (1 milyar)	30.000.000.000
Jumlah RIDN Reguler	7.299.552.213.906
RIDN GECTHERMAPL	
1. Giro di Bank BRI IRID Gecthermapl	9.000.000.000
2. Deposito BRI (2 milyar)	2.002.500.000.000
Jumlah RIDN Gecthermapl	2.011.500.000.000
Jumlah Dana Kelolaan PI ⁴	9.312.052.213.906

- b. Dana Kelolaan pada BLU Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT sebesar Rp4.414.566.036.705. Rincian penempatan dana kelolaan pada DLU Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT adalah:

(dalam rupiah)	
Nama Bank	Saldo
1. Giro Bank Mandiri Acc. Nomor 128-00-0-481-8388	2.864.193.629
2. Giro BRI Acc. Nomor 00000183-01-00075130-3	1.182.823.551
3. Giro BNI Acc. Nomor 5523522235	8.722.11.525
4. Deposito Banc Mandiri	1.800.000.000.000
5. Deposito BNI	125.000.000.000
6. Deposito BRI	2.666.000.000.000
Jumlah	4.414.566.036.705

- c. Dana Kelolaan pada BLU Pusat Pembayaran Perumahan sebesar Rp4.712.847.105.540 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)	
Nama Bank	Saldo
1. Bank Mandiri	8.434.500
2. Bank BNI	1.436.800
3. Bank GPM	2.637.225
4. Bank BJB	11.211.111
5. Bank BNI KBF	1.130.000
6. Bank BNI KBF-1000-04	11.111.111
7. Bank BMLT	1.270.832
8. Bank BMLT KBF	2.236.290
9. Bank Mandiri	322.200.425
10. Bank Mandiri	17.711.000
11. Bank BNI	11.211.111

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

Uraian	2012
20. Dana Kelolaan	2.106.803.116.841
21. Dana Kelolaan	1.668.841.111
22. Dana Kelolaan	537.962.000
23. Dana Kelolaan	1.900.000.000.000
24. Dana Kelolaan	1.000.000.000.000
25. Dana Kelolaan	1.000.000.000.000
26. Dana Kelolaan	1.000.000.000.000
21. Mandiri	752.796.000.000
22. Mandiri	237.518.000.000
23. BRI SYARIAH	39.339.000.000
24. BRI	998.853.000.000
25. BUKOPIN	93.091.000.000
26. Pendapatan dari pengelolaan kas rekening Dana Kelolaan	(1.208.903.256)
Total*)	4.712.846.971.540

*) Rincian dana kelolaan tersebut diatas belum termasuk piutang operasional BLU sebesar Rp134.000, yang merupakan kesalahan pembebanan dan pembukuan oleh Bank, yang akan dikembalikan oleh Bank pelaksana, sehingga jumlah dana kelolaan pada BLU Pusat Pembiayaan Perumahan adalah sebesar Rp4.712.847.105.540.

- d. Dana Kelolaan pada BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan sebesar Rp2.007.290.034.196 yang terdiri dari:
- Rp7.290.034.196 ditempatkan pada Rekening Pengelolaan Pokok Dana Bergulir, pada rekening BRI Cabang Kebayoran Baru;
 - Rp100.000.000.000 ditempatkan dalam Deposito BRI berjangka tiga bulan; dan
 - Rp1.900.000.000.000 ditempatkan dalam Deposito BRI berjangka enam bulan.
- e. Dana Kelolaan pada BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUKM sebesar Rp742.344.617.544. Dana ini terdapat pada 32 rekening giro sebanyak Rp392.344.617.544 dan 7 rekening deposito sebanyak Rp350.000.000.000.

6. Dana Penjaminan

Dana Penjaminan
Rp68,31 miliar

Dana Penjaminan per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp68.303.705.830 dan Rp75.371.334.076 merupakan dana penjaminan yang berada pada Kementerian Negara Koperasi dan UKM yang digunakan sebagai penjaminan dari setiap kredit dan pembiayaan yang disalurkan penerima jaminan kepada KUKM terjamin. Dana penjaminan tersebut dikelola oleh perusahaan penjamin, yaitu Perum Sarana Pengembangan Usaha (SPU) Jaminan Kredit Indonesia.

7. Aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)

Aset KKKS Rp143,88 triliun

Aset KKKS per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp143.976.078.333.922 dan Rp150.508.980.266.216. Nilai Aset KKKS per 31 Desember 2012 tersebut berupa tanah dengan luas 667.919.254 m² sebesar Rp14.362.284.189.964 yang digunakan dalam rangka kontrak kerja sama minyak bumi dan gas alam yang dikelola oleh KKKS sebagai hasil inventarisasi terhadap 44 KKKS, dan aset lain non tanah sebesar Rp129.613.744.163.938 berdasarkan hasil inventarisasi dan penilaian pada pecahan 76 KKKS.

Rincian Nilai Aset KKKS Migas per 31 Desember 2012 disajikan pada Daftar 28.

Terdapat aset KKKS yang telah dilakukan inventarisasi dan penilaian, namun tidak disajikan

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (audited)

dalam Neraca IKPP Tahun 2012, yaitu:

1. Aset Non Tanah sebanyak 3.866 item pada 13 KKKS dengan nilai Rp0 (Nilai Rupiah);
2. Aset sumur yang tidak digurakan sebanyak 623 sumur pada 13 KKKS dengan nilai sebesar Rp1.184.222.605.157;
3. Aset *Subsequent Expenditure* sebanyak 13.897 item pada 34 KKKS dengan nilai sebesar Rp44.945.555.950.977;
4. Aset Kondisi Rusak Berat 11.820 item pada 46 KKKS dengan nilai sebesar Rp356.816.206.166;
5. Aset yang dalam proses penghapusan sebanyak 19 item pada KKKS Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (d.h. Kodaco Energy) senilai Rp927.406.395; dan
6. Aset dengan nilai wajar negatif sejumlah 209 item pada 4 KKKS dengan nilai perolehan negatif sebesar USD24.019.980 yang merupakan koreksi atas nilai perolehan aset.

B. Aset Eks BPPN

Aset Eks BPPN Rp3,27 triliun

Aset Eks BPPN (Aset Tim Koordinasi) per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp3.972.872.786.807 dan Rp67.543.934.466.405 merupakan aset Pemerintah eks BPPN yang status kepemilikan dan nilainya masih bermasalah, sehingga belum dapat diserahkan kepada FT PPA (Persem).

Nilai Aset Eks BPPN yang disajikan per 31 Desember 2012 merupakan hasil inventarisasi dan penilaian dengan rincian sebagai berikut.

Jenis Aset	31 Desember 2012 (audited)		31 Desember 2011 (audited)	
	Jumlah Aset	Nilai (Rp)	Jumlah Aset	Nilai (Rp)
Pinjaman yang Dibentakan	-	-	7.565	35.485.120.480.776
Tagihan PKPS	-	-	23	30.808.878.725.368
Aset Non Inti-Properti	1.696	2.866.168.457.000	1.643	1.981.229.809.193
Aset Non Inti-Inventaris	36.978	13.666.633.622	36.969	12.135.475.108
Penempatan Amlak Bank dan Rekrut	n.a	478.623.000.000	n.a	478.823.000.000
Surat Berharga Eks BPPN		284.487.331.925		
Sisa Eks BPPN		578.715.234.213		
Jumlah		3.972.872.786.807		67.543.934.466.405

Pada IKPP Tahun 2012, Aset Kredit: Eks BPPN dan Tagihan PKPS dicatat sebagai Piutang Bukan Pajak.

Rincian jumlah aset dan nilai pengalihan disajikan pada Daftar 29.

C. Aset Lainnya dari Unit Pemerintahan Lainnya

Aset Lainnya dari Unit Pemerintahan Lainnya Rp2,42 triliun

Aset Lainnya dari Unit Pemerintahan Lainnya per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp2.430.048.955.900 dan Rp14.762.445.310.365. Rincian Aset Lainnya dari Unit Pemerintahan Lainnya adalah sebagai berikut.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (audited)

Uraian	(dalam rupiah)	
	31 Desember 2012 (audited)	31 Desember 2011 (audited)
1. Dirifita Bce II	-	3.822.723.216,421
2. Taman Mini Indonesia Indah	110.139.850.009	42.277.377.168
3. Dirifita Asahan	540.080.422.400	746.947.319.369
4. BP Gedung Manggala Wanabakti *	-	21.382.969.643
b. Yayasan Gedung Veteran	114.808.66.808	1.120.666.877
B. Badan Amil Zakat	2.194.000.849	631.374.845
c. Badan Wakaf Indonesia	1.614.620.243	1.088.182.222
B. BP Dana Abadi Umi ***	2.238.100.173.268	-
9. SKK MIGAS ***	494.203.706.975	-
Jumlah	2.430.048.955.900	14.762.445.010.365

* Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2012 tanggal 18 Januari 2012 tentang Pengelolaan Gedung Pusat Kesehatan dan Taman Hutan (Gedung Manggala Wanabakti) dinyatakan bahwa pengelolaan Gedung Manggala Wanabakti dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan RI, sehingga pada LKPP Tahun 2012 tidak disajikan lagi sebagai aset lainnya.

** Dalam LKPP Tahun 2011 ekuitas bersih dari BP DAU belum disajikan dalam neraca LK Bekerja Lainnya tetapi dilaporkan dalam LK Kementerian Agama.

*** Nilai aset lainnya sebesar minus Rp494.206.706.975 yang berasal dari Setoran Kerja Khusus Palabana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK MIGAS) merupakan total ekuitas bersih yang diperoleh dari aset dan kewajiban SKK MIGAS mulai 14 November 2012 sampai dengan 31 Desember 2012. Laporan BP MIGAS pelaksanaan SKK MIGAS dalam LKPP Tahun 2011 ran untuk periode 1 Januari 2012 sampai dengan 13 November 2012 disajikan pada LK BA 090.03 sebagai Investasi Pasif dari PMN sebesar Ekuitas Bersih.

10. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain Rp103,54 triliun

Aset Lain-lain per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp103.546.902.717.960 dan Rp103.992.977.283.250 merupakan aset selain yang telah dikelompokkan sebagai jenis Aset Lainnya di atas. Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2012 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp83.659.657.511.367, yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp103.540.902.717.960 dikurangi penyisihan sebesar Rp19.881.345.182.556. Rincian Aset Lain-lain adalah sebagai berikut.

Klasifikasi/Unit Terkait	(dalam rupiah)	
	31 Desember 2012 (audited)	31 Desember 2011 (audited)
1. KL	43.659.657.511.367	33.908.907.816.802
2. BA BUN 399.03	42.346.855.319	142.127.857.545
3. BA BUN 399.04	19.719.281.63.338	19.419.108.22.886
4. BA BUN 399.05	-	48.701.881.088
5. BA BUN 399.09	43.060.717.97.930	43.473.131.894.229
Nilai Bruto	103.540.902.717.960	105.992.977.283.250
Penyisihan	19.881.345.182.556	19.184.237.466.134
Nilai Bersih	83.659.657.511.367	86.808.739.814.116

Penjelasan Aset Lain-lain adalah sebagai berikut.

1. Aset Lain-lain yang berada di KL sebesar Rp40.698.557.511.367. Rincian Aset Lain-lain di masing-masing KL disajikan pada Daftar 27;
2. Aset lain-lain pada BA 399.03 sebesar Rp42.346.855.319, selengkap nilai bersih yang

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

tidak direalisasikan adalah sebesar Rp24.621.718.895 berasal dari nilai bruto sebesar Rp42.343.855.319 dikurangi dengan penyisihan sebesar Rp17.728.138.424. Finisial Aset Lain-lain pada BA 999.03 adalah sebagai berikut.

- a. Reklasifikasi cari dana bergulir pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 2.206.756.931.

Dana bergulir pada Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan bagian dari Program Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil (PUPTSK) yang dilaksanakan sejak tahun 2004. Program PUPTSK tersebut adalah Optimasi Penangkapan Ikan (OPTIKAPI), Optimasi Pelelangan Ikan (OPTILANPI), Optimasi Pengolahan dan Distribusi Ikan (OPTIHANDIS), dan Optimasi Kelompok Usaha Bersama (OPTIKUB).

- b. Aset eks dana bergulir pada Kementerian Perindustrian sebesar Rp30.140.098.388. Piutang pada Kementerian Perindustrian merupakan piutang atas program dana bergulir yang pengelolaannya dilakukan oleh LPT Indak. Sampai dengan 31 Desember 2012, piutang pada LPT Indak yang telah diserahkan kepada KPKNL adalah sebesar Rp5.312.174.460 dan yang belum diserahkan ke KPKNL adalah sebesar Rp24.827.923.928.

3. Aset Lain-lain BA BUN 999.04 per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp19.719.281.153.339, sedangkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp55.664.107.207 berasal dari nilai bruto sebesar Rp19.719.281.153.339 dikurangi dengan penyisihan sebesar Rp19.663.617.046.132. Rincian Aset Lain-lain pada BA 999.04 adalah sebagai berikut.

- Aset Lainnya RDI sebesar Rp18.990.468.082.758 yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah
1. Tunggakan yang akan diselesaikan melalui restrukturisasi dan piutang yang tertunggak lebih dari satu tahun	16.619.053.674.168
2. Tunggakan macet dari tunggakan BBO/BBKU/BDL	2.260.096.312.554
3. Tunggakan Eks Timor Timur	128.340.000
4. Tunggakan korporasi/prnyak	111.189.758.038
Nilai Bruto	18.990.468.082.758
Penyisihan	13.326.360.875.551
Nilai Bersih	5.664.107.207

- Aset Lainnya Kredit Program Non Subsidi sebesar Rp728.813.070.581, yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah
1. PIR Perkebunan	318.608.688.344
2. UPP Perkebunan	304.388.014.802
3. Peternakan	97.278.652.438
4. Kredit Listrik Pedesaan	2.666.612.000
5. Perimbangan Pencidkan Akumansi	6.270.306.000
Nilai Bruto	728.813.070.581
Penyisihan	(728.813.070.581)
Nilai Bersih	-

4. Aset Lain-lain yang berasal dari Bagian Anggaran 999.08 per 31 Desember 2012 adalah

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (audited)

sebesar Rp1) sedangkan per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp46.701.991.639. Aset lain-lain sebesar Rp0 dikarenakan LPP TVRI, LPP RRI, dan Otorita Batam telah menjadi Bagian Anggaran tersendiri, sehingga Aset Lain-lain yang berasal dari ketiga institusi tersebut dialihkan dari BA 999.008. Aset lainnya dari Reklasifikasi UP/TUP yang berasal dari Kementerian Luar Negeri yang dilaporkan pada BA 999.008 telah dialihkan ke Kementerian Luar Negeri (BA 011). Rincian Aset Lain-lain per 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut.

	(dalam rupiah)	
Kementerian/ Lembaga	31 Desember 2012 (audited)	31 Desember 2011 (audited)
1. LPP TVRI	-	4.129.603.589
2. LPP RRI	-	26.767.898.211
3. Otorita Batam	-	16.766.812.360
4. Aset lainnya dari Reklasifikasi UP/TUP	-	37.977.643
Jumlah		46.701.991.639

5. Aset lain-lain pada DA 999.99 (Transaksi Khusus) sebesar Rp43.080.717.197.935 terdiri dari:

	(dalam rupiah)	
Uraian	31 Desember 2012 (audited)	31 Desember 2011 (audited)
1. PT PPA (Persero)	83.761.066.882	2.644.490.627.174
2. Aset PT PPA yang sudah dikembalikan ke Menteri Keuangan	1.168.800.710.887	1.484.449.098.120
3. Aset eks Pertamina	41.837.638.104.663	43.984.876.106.228
4. Piutang Migas	-	1.902.918.182.707
5. Aset Lain-Lain DJKN selaku Pengelola Barang	518.518.003	-
Jumlah	43.080.717.197.935	49.476.191.894.229

- Aset lain-lain yang berasal dari PT PPA (Persero) sebesar Rp83.761.066.882 merupakan aset saham yang disarahkelola kepada PT PPA yang terdiri dari saham bank dan saham non bank.
- Aset lain-lain eks PT PPA sebesar Rp1.168.800.710.887 merupakan aset eks PT PPA yang masih berada di Kementerian Keuangan setelah perampasan PT PPA pertama diselesaikan. Mutasi aset tersebut selama tahun 2012 sebagai berikut:

No	Jenis Aset	Saldo Awal		Mutasi Selama Tahun		Saldo Akhir	
		Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
1	Aset Kredit	1.168.800.710.887	1.168.800.710.887	1.168.800.710.887	1.168.800.710.887	1.168.800.710.887	1.168.800.710.887
2	Aset Lain-lain	-	-	-	-	-	-
3	Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	1.168.800.710.887	1.168.800.710.887	1.168.800.710.887	1.168.800.710.887	1.168.800.710.887	1.168.800.710.887

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.05/2012, Aset Kredit eks PT PPA disajikan dalam neraca sebagai piutang lain-lain bersama dengan Aset Kredit eks BPPN dalam hal Aset Kredit tersebut telah dicatatangani Pernyataan Bersama/diterbitkan Penetapan Jumlah Piutang Negara.

Pemerintah akan menelusuri sisa aset properti eks BPPN sesuai temuan BPK.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

- 3) Aset eks Pertamina sebesar Rp41.837.634.104.963 merupakan nilai aset sebagai akibat penetapan Neraca Pembukaan PT Pertamina (Persero) Per 17 September 2009. Aset eks Pertamina per 31 Desember 2012 tersebut terdiri atas:

- a. Aktiva Tetap LNG BADAK Bontang Rp16.302.963.578.041 dan LNG ARUN Lhokseumawe Rp11.029.729.944.498.

Perolehan aset LNG Arun dan LNG Badak berasal dari pinjaman sindikasi bank yang tertuang dalam *PSC Agreement* antara Pertamina (saat itu bertindak selaku Pemerintah) dengan PSC untuk pembangunan LNG Arun dan LNG Badak.

Aset kilang LNG Arun dan LNG Badak dioperasikan oleh PT Arun NGL dan PT Badak NGL di bawah pengawasan PT Pertamina (Persero) yang ditunjuk sebagai penanggung jawab sementara atas kedua aset LNG dimaksud sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92/KMK.06/2008.

Nilai aset kilang LNG Badak per 31 Desember 2012 sebesar Rp16.302.963.578.041 berasal dari hasil penilaian DJKN per 12 Nopember 2010 sebesar Rp16.302.447.401.562, ditambah hasil penilaian DJKN per 20 April 2012 sebesar Rp3.725.430.479, dikurangi penghapusan terhadap penilaian aset per 12 Nopember 2010 pada 21 September 2012 sebesar Rp3.209.254.000.

Nilai aset kilang LNG Arun berdasarkan hasil penilaian DJKN per 17 Maret 2011. Inventarisasi dan penilaian terhadap aktiva kilang LNG Arun dilakukan oleh PT Arun NGL, Kanwil I DJKN Banda Aceh dan KPKNL Lhokseumawe sejak tanggal 15 Desember 2010, sedangkan terhadap aktiva kilang LNG Badak dilakukan oleh PT Badak NGL, Kanwil XIII DJKN Samarinda dan KPKNL Bontang sejak tanggal 1 Nopember 2010. Saat ini Laporan Inventarisasi dan Penilaian aktiva kilang LNG Arun dan LNG Badak sedang dalam tahap penyelesaian oleh masing-masing Tim Pelaksana.

- b. Aset eks PT Pertamina yang digunakan oleh Pertamina EP sebesar Rp12.824.018.245.034.

Terhadap BMN berupa aset eks Kontrak Kerja Sama yang dipergunakan oleh PT Pertamina EP dengan nilai perolehan per 17 September 2009 sebesar Rp16.242.052.644.001 telah dilakukan inventarisasi dan penilaian oleh Tim Penilai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara bersama dengan PT Pertamina EP, dengan hasil pelaksanaan inventarisasi dan penilaian sebagai berikut.

	(dalam rupiah)
Penilaian Inventarisasi dan Penilaian DJKN	Nilai
and Penilaian asyarakat per 15 Nopember 2010	1.401.149.111
Hasil penilaian	3.627.439.000
Hasil Penilaian per 20 April 2012	3.725.430.479
Hasil Penilaian per 21 September 2012	1.209.254.000

- c. Aset eks PT Pertamina berupa delapan Aset Tetap sebesar Rp1.680.927.337.000.

Tim Penilai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara telah melakukan penilaian wajar atas delapan aset tetap eks Pertamina pada tahun 2012, dengan nilai wajar BMN sebagai berikut.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (audited)

No	Salah Aset	Tahun 2011	Begitupun 2012	Nilai Perolehan (RMB 55/2400)	Perkiraan DJNM Ribu Rp	Tanggal Perbaikan
1	Jiwa Kaya TUBAN	1007	007	220.071.430.388	220.071.430.388	10/12/11
2	Jiwa Kaya Sidoarjo	11/11	11/11	19.661.343.182.556	19.661.343.182.556	11/11/11
3	Jiwa Kaya MUSU	88	88	17.726.136.424	17.726.136.424	08/11/11
4	Jiwa Kaya Jember	10/11	10/11	220.071.430.388	220.071.430.388	10/12/11
5	Jiwa Kaya Jember	10/11	10/11	19.661.343.182.556	19.661.343.182.556	10/12/11
6	Jiwa Kaya Jember	10/11	10/11	17.726.136.424	17.726.136.424	10/12/11
	Jumlah			375.473.063.178	375.473.063.178	

- 4) Aset Lain-lain berupa Piutang Migas per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp0 dan Rp1.332.316.162.707. Pada TA 2012, Aset Lain-lain berupa piutang migas dikelompokkan dalam akun Piutang Jangka Panjang
- 5) Aset Lain-lain yang dikelola oleh CJM selaku Pengelola Barang sebesar Rp516.315.303 terdiri dari aset Eks USAID, aset eks Indonesian Debt Restructuring Agency (INDRA), aset eks E2-Profi, aset eks GIZ-GSPAS, dan Gratifikasi KPK.

*Penyisihan Piutang Tidak
Tertagih – Aset
Lainnya Rp19.80 triliun*

C.2.31 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Aset Lainnya

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Aset Lainnya per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp19.801.416.812.844 dan Rp19.416.828.848.880 terdiri dari:

Uraian	(dalam rupiah)	
	31 Desember 2012 (audited)	31 Desember 2011 (audited)
1. Penerusan Pinjaman	220.071.430.388	232.701.379.846
2. Aset Lain-lain	19.661.343.182.556	19.184.237.468.154
Jumlah	19.801.416.812.844	19.416.828.848.880

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Aset Lainnya tersebut diakui sebagai pengurang nilai Piutang yang disajikan pada Aset Lainnya.

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Penerusan Pinjaman sebesar Rp220.071.430.388 merupakan Penyisihan Penerusan Pinjaman pada BA 999.04.
- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Aset Lain-lain sebesar Rp19.661.343.182.556 terdiri dari Penyisihan Aset Lain-lain pada BA 999.03 sebesar Rp17.726.136.424 berupa aset eks dana bergulir pada Kementerian Perindustrian dan Piutang PNBK berupa Dividen dan pada BA 999.04 sebesar Rp1.963.617.046.132.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

Utang PFK Rp451,96 miliar

C.2.32 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp451.861.600.337 dan Rp1.755.574.696.265 merupakan selisih antara Penerimaan Potongan PFK dan Pengeluaran Pembayaran kepada pihak ketiga, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2011	Terakhir Tahun 2012		31 Desember 2012
		Penerimaan	Pengeluaran	
- Hutang ke pihak ketiga	1.090.800.229	17.301.220.100	3.333.000.000	20.634.220.100
- Hutang ke pemerintah	22.000.000	0	0	22.000.000
- Hutang ke BUMN	814.370.986	1.277.571.594	2.777.183.579	4.054.755.173
- Hutang ke Bank dan LRA	1.011.427.892	12.411.000.000	1.750.344.000	1.552.433.000
- Hutang ke lembaga internasional	1.000.000.000	1.000.000.000	-	2.000.000.000
- Hutang ke pihak lain	1.000.000.000	10.000.000.000	1.000.000.000	2.000.000.000
- Hutang ke pemerintah daerah	1.000.000.000	0	0	2.000.000.000
Jumlah	1.755.574.696.265	28.688.691.320.100	10.860.418.169	451.861.600.337

Utang Kepada Pihak Ketiga Rp29,74 triliun

C.2.33 Utang Kepada Pihak Ketiga

Jumlah Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp29.738.138.976.582 dan Rp31.780.834.389.020 merupakan kewajiban Pemerintah atas barang yang telah dicitrakan dari pihak ketiga dan kewajiban Pemerintah lainnya kepada pihak ketiga namun sampai dengan tahun anggaran berakhir belum dibayar, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Utang Kepada Pihak Ketiga	31 Desember 2012 (Lanjutan)	31 Desember 2011 (Lanjutan)
K/L	12.381.780.077.662	0.054.080.097.560
BUN	17.346.358.898.700	22.926.544.271.462
Jumlah	29.738.138.976.582	31.780.834.389.020

- Utang kepada Pihak Ketiga yang tercatat di K/L sebesar Rp12.381.780.077.662 antara lain berupa dana pihak ketiga yang dikelola/dikuasai oleh K/L, dana yang masih harus dibayarkan atas pekerjaan gedung dan pembelian peralatan dan mesin, honor yang belum dibayarkan kepada pegawai kementerian peragihara dari pihak ketiga, dan lain-lain. Rincian utang kepada pihak ketiga dapat dilihat pada **Daftar 30**.
- Utang kepada pihak ketiga yang berada di BUN sebesar Rp17.346.358.898.700, terdiri dari:

(dalam rupiah)

Utang Kepada Pihak Ketiga	31 Desember 2012 (Lanjutan)	31 Desember 2011
BA 999.05	16.039.742.327.165	18.292.725.877.411
BA 999.08	1.306.616.571.535	4.633.818.393.948
Utang terkait Refur SP2D	1.110.041.138.181	1.137.854.225.593
Jumlah	17.346.358.898.700	22.826.544.271.452

- Utang pada BA 999.05 (Utang Transfer ke Daerah) merupakan utang kekurangan Transfer ke Daerah Dana Bagi Hasil yang belum dibayarkan kepada pemda penerima. Rincian Utang Transfer ke Daerah dan kekurangan dana bagi hasil yang belum dibayarkan sebesar Rp16.039.742.327.165, adalah sebagai berikut.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 *(audited)*

No	Jenis Kewajiban	(dalam rupiah)	
			Jumlah
1.	Kewajiban Jasa Jasa, UU11/2011	19.760.000.000,00	
2.	Data Desember 2012	12.390.143.690,627	
3.	Kewajiban Biaya PPh Pajak Penghasilan	927.568.000,000	
4.	Kewajiban Biaya PPh Pajak Penghasilan	7.777.620,000	
5.	Kewajiban Biaya PPh Pajak Penghasilan	752.748.816,253	
6.	Kewajiban Biaya PPh Pajak Penghasilan (TA 2011)	1.184.140,000	
7.	Kewajiban Biaya PPh Pajak Penghasilan (TA 2011)	6.624.110,000	
8.	Kewajiban Biaya PPh Pajak Penghasilan (TA 2011)	120.358.000,000	
9.	Pembayaran Utang Belanja (TA 2011)	2.610.200,000	
	Jumlah	18.339.042.327,188	

b. Jumlah Utang Kepada Pihak Ketiga pada BA 999.08 (Belanja Lain-lain) per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp186.675.493.374 terdiri dari:

- (1) kewajiban atas ongkos angkut beras FNS tahun 2012 yang belum ditayarkan berdasarkan Audit BPK sebesar Rp4.940.753.374; dan
- (2) utang kepada Pihak Ketiga pada Kementerian Sekretariat Negara berupa pembayaran termin IV-VII (TA 2013) pengadaan *Completion Center* Pesawat Kepresidenan. Nilai sebesar Rp181.234.680.000 dihitung berdasarkan nilai Utang sebesar USD18.604.000 dengan kurs tengah Bank Indonesia pada hari kerja terakhir tanggal 28 Desember 2012 sebesar USD1 = Rp6.670.

c. Utang Kepada Pihak Ketiga merupakan utang yang timbul kepada pihak ketiga karena terjadinya Pererimaan Non Anggaran Pihak Ketiga karena kesalahan rekening yaitu retur SP2D sebesar Rp1.119.941.138.161. Jumlah ini berasal dari Utang Tahun 2011 sebesar Rp1.137.894.225.999 ditambah penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga karena kesalahan rekening tahun berjalan sebesar Rp3.765.941.922.780 dikurangi pencelaran Non Anggaran Pihak Ketiga karena kesalahan rekening sebesar Rp3.802.066.175.202 serta koreksi pemindahbukuan sebesar Rp18.231.404.590.

C.2.34 Utang Biaya Pinjaman

*Utang Biaya Pinjaman
Rp23.099.285.717,583*

Jumlah Utang Biaya Pinjaman per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp23.099.285.717.583 dan Rp21.924.098.935.465 merupakan utang bunga yang belum dibayar sampai dengan tanggal neraca, yang terdiri dari:

Uraian	(dalam rupiah)	
	31 Desember 2012 <i>(audited)</i>	31 Desember 2011 <i>(audited)</i>
Utang Bunga Obligasi dan Bunga Pinjaman DN	20.613.172.214.139	18.276.622.533.264
Utang Bunga Pinjaman LN	2.486.213.603.444	2.648.218.000.171
Jumlah	23.099.285.717,583	21.924.098.935,465

*Utang Bunga Obligasi
dan pinjaman dalam
negeri*

Penjelasan masing-masing Utang Bunga adalah sebagai berikut:

1. Utang Bunga Obligasi dan Bunga Pinjaman Dalam Negeri (DN) per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp21.613.072.214.139 dan Rp18.276.622.533.264 dapat dirinci sebagai berikut:

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (audited)

Uraian	(dalam rupiah)	
	31 Desember 2012 (audited)	31 Desember 2011 (audited)
Fixed Rate Bonds	13.473.294.459.052	13.329.508.589.302
CRI	1.622.023.766	180.003.432.78E
SBSN	1.187.093.604.600	786.116.838.740
Variable Rate Bonds	582.986.830.700	723.777.587.150
SUP kepada BI	80.992.417.898	82.027.721.892
SBN Valas	6.183.426.483.222	4.163.646.829.44E
Pinjaman Cairan Negeri	0.0E8.281.134	1.342.833.880
Jumlah	20.613.072.214.139	19.276.322.331.294

Rincian lebih lanjut Utang Bunga Obligasi dapat dilihat pada **Daftar 31**.

Utang Bunga Pinjaman
Luar Negeri

2. Utang Bunga Pinjaman Luar Negeri per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp2.486.213.503.444 dan Rp2.648.216.002.171 dapat dirinci sebagai berikut.

Uraian	(dalam rupiah)	
	31 Desember 2012 (audited)	31 Desember 2011 (audited)
Utang Bilateral	1.064.864.480.338	1.233.887.418.238
Kredit Komersial	50.834.612.223	59.650.861.093
Kredit Ekspor	310.100.193.379	394.040.640.947
Multilateral	1.060.624.226.506	960.537.063.893
Jumlah	2.486.213.503.444	2.648.216.002.171

C.2.35 Utang Subsidi

Utang Subsidi Rp54,88
triliun

Jumlah Utang Subsidi per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp54.678.143.180.247 dan Rp29.767.938.889.742, yang terdiri dari:

Uraian	(dalam rupiah)	
	31 Desember 2012 (audited)	31 Desember 2011 (audited)
Utang Subsidi PSD yang Belum Disalurkan (BULOG, PT Peln, FT KAI, PT Pos)	583.480.487.667	4.221.221.690.818
Utang Subsidi Listrik	20.657.840.881.887	12.101.885.180.781
Utang Subsidi BFM dan IPG	23.384.886.413.63E	8.968.000.960.449
Utang Subsidi Pupuk dan Demik	8.500.621.64.164	4.077.256.018.181
Utang Subsidi Bunga Kredit Program KLEI	595.410.312.511	401.767.308.503
Jumlah	54.678.143.180.247	29.767.938.889.742

Penjelasan masing-masing Utang Subsidi adalah sebagai berikut.

1. Utang Subsidi pada Perum BULOG sebesar Rp187.928.634.424 merupakan utang subsidi peminjaman kepada Perum BULOG yang akan diselesaikan dengan menggunakan dana yang telah ditempatkan di rekening dana cadangan subsidi (PSC) atas nama Menteri Keuangan.
2. Utang Subsidi pada Kementerian Perhubungan sebesar Rp333.839.363.443 merupakan Utang Subsidi PSC kepada PT PFI NI sebesar Rp197.631.980.000 dan Utang Subsidi PSD kepada PT KAI sebesar Rp138.267.363.443. Utang Subsidi sebesar Rp333.839.363.443 akan diselesaikan dengan menggunakan dana yang telah ditempatkan di rekening Dana Cadangan subsidi PSD atas nama Menteri Keuangan.
3. Utang Subsidi pada Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp61.662.500.000

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

merupakan Utang subsidi PSO kepada PT PSD yang akan diselesaikan dengan menggunakan dana yang telah ditempatkan di rekening dana cadangan subsidi PSO atas nama Menteri Kelautan

4. Utang Subsidi pada Kementerian Keuangan sebesar Rp44.556.090.818.216 terdiri dari:
- Utang Subsidi Listrik kepada PT PLN (Persero) sebesar Rp20.665.784.091.867 merupakan kekurangan subsidi listrik tahun 2011 dan 2012. Saldo utang tersebut berasal dari saldo per 31 Desember 2011 sebesar Rp12.701.666.120.781, dikurangi pembayaran pada tahun 2012 sebesar Rp4.906.787.782.544 atas kekurangan subsidi tahun 2010, dan sebesar Rp234.141.726.597 berasal dari rekening dana cadangan tahun 2011 serta ditambah dengan kekurangan subsidi listrik hasil audit BPK tahun 2012 sebesar Rp13.255.055.420.237; dan
 - Utang Subsidi BBM dan LPG kepada pihak ketiga sebesar Rp23.894.896.413.838 yang berasal dari kekurangan subsidi BBM TA 2010 dan TA 2011 hasil audit BPK RI serta kekurangan subsidi BBM dan LPG Tabung 3 Kg TA 2012. Adapun rincian utang tersebut adalah:

(dalam rupiah)	
Uraian	Jumlah
Kekurangan Subsidi BBM Jenis Minyak Solar Hasil Audit BPK TA 2010	32.195.516
Kekurangan Subsidi BBM Jenis Premium Hasil Judit BPK TA 2011	3462311.086.047
Kekurangan Subsidi BBM dan LPG Tabung 3 Kg TA 2012	18932.153.132.475
Jumlah	23.394.896.413.838

- Utang Subsidi Bunga sebesar Rp696.410.312.611 yang terdiri dari:

(dalam rupiah)	
Uraian	Jumlah
Subsidi Bunga KKP-F	55.091.611.734
Subsidi Bunga KFCN-AP	74.542.084.002
Subsidi Bunga KPEs KUBI	4.177.033.735
Subsidi Bunga KJR	456.174.518.838
Subsidi Bunga KPP NAD-Nias	188.743.149
Subsidi Bunga KUPS	4.833.663.418
Subsidi Bunga S-SRG	303.518.423
Jumlah	696.410.312.611

5. Utang Subsidi pada Kementerian Pertanian sebesar Rp9.538.562.134.164 merupakan Utang Pemerintah kepada BUMN Daerah/or Subsidi Pupuk yang terdiri dari:
- Dana *escrow account* senilai Rp1.179.308.948.177;
 - Kekurangan bayar subsidi pupuk kepada PT Pupuk Kalimantan Timur berdasarkan hasil audit BPK Nomor 18/AUNITAMA-VII/PD/TT.07/2011 sebesar Rp84.228.013.923;
 - Kekurangan pembayaran subsidi pupuk tahun 2011 senilai Rp1.703.897.504.130 berdasarkan hasil audit BPK TA 2011 kepada produsen

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (audited)

Urutan	(dalam rupiah)
	Jumlah
PT Pupuk Sinergi Palembang	18.132.518.139
PT Pupuk Labin	811.832.592.822
PT Pupuk Iskandar Muda	155.433.631.232
PT Petrakimia Gresik	718.493.163.823
Jumlah	1.705.887.604.130

- d. Kekurangan Pembayaran Subsidi Pupuk sebesar Rp1.127.697.924 berdasarkan hasil audit BPK RI atas belanja Subsidi Pupuk TA 2012.

C.2.38 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang
Jangka Panjang
Rp118,22 triliun

Jumlah Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp118.216.112.940.270 dan Rp106.777.089.696.825 merupakan utang Pemerintah yang akan dibayar atau jatuh tempo satu tahun setelah tanggal neraca, yang terdiri dari:

	(dalam rupiah)	
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	31 Desember 2012 (audited)	31 Desember 2011 (audited)
Bagian Lancar Utang Luar Negeri:		
BA 999.0*	55.318.337.036.876	48.298.753.806.497
Subtotal	55.318.337.036.876	48.298.753.806.497
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri:		
BA 999.01 - Surat Berharga Negara (SBN)	62.766.736.739.162	68.314.607.418.166
BA 999.01 - Pinjaman Dalam Negeri	111.236.064.112	136.668.236.872
Utang pada PULN	-	10.236.000
Utang pada Kementerian	714.000.000	-
Subtotal	82.897.755.843.594	58.480.335.890.328
Jumlah	118.216.112.940.270	106.777.089.696.825

Bagian Lancar SBN yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun adalah dengan rincian sebagai berikut.

	(dalam rupiah)	
Jenis SBN	31 Desember 2012 (audited)	31 Desember 2011 (audited)
I. Fixed Rate Bonds		
Nominal	32.012.172.000.000	27.682.400.000.000
Unamortized Premium (Diskon)	(71.488.618.000)	(67.374.000.000)
Nilai bersih (nilai utuh)	31.940.683.382.000	27.615.026.000.000
II. Variable Rate		
Nominal	-	4.368.483.000.000
Unamortized Premium (Diskon)	-	-
Nilai bersih (nilai utuh)	-	4.368.483.000.000
III. Surat Utang Pemerintah kepada BI		
Nominal yang harus dimortisasi	5.274.826.875.452	4.184.803.280.452
Accrued Indexation	-	-
Nilai bersih (nilai utuh)	5.274.826.875.452	4.184.803.280.452
IV. OPI		
Nominal	10.475.875.000.000	21.026.495.000.000
Unamortized Premium (Diskon)	-	-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (audited)

Nilai bersih (nilai subt)	10.475.875.001.000	21.026.485.000.000
V. ZERO COUPON		
Normal	1.283.000.000.000	1.240.000.000.000
Unamortized Premium (Diskon)	(2.112.511.030)	(100.267.864.000)
Nilai bersih (nilai subt)	1.230.000.000.000	1.140.732.136.000
VI. SBSN		
Normal	13.833.860.000.000	-
Unamortized Premium (Diskon)	(1.468.160.030)	-
Nilai bersih (nilai subt)	13.832.391.840.000	-
Total SBN I – II – III-4IV – V)	62.785.785.789.452	58.344.607.413.458

Catatan:

Fixed Rate Bond terdiri dari 4 seri Fixed Rate Bond;

DIRI terdiri dari 2 seri, yaitu DIRIG05 dan DIRIG07;

Surat Utang Pemerintah (SUP) kepada BI terdiri dari SU-002, SU-004, SU-007, dan SRBI-01;

- Zero Coupon seri ZC-005

C.2.37. Utang SBN Jangka Pendek

Utang SBN Jangka Pendek Rp22.58 triliun

Jumlah SDV Jangka Pendek per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp22.689.783.544.000 dan Rp39.408.181.897.000, merupakan instrumen utang jangka pendek yang diterbitkan dengan diskonto yang akan jatuh tempo kurang dari satu tahun. SBN Jangka Pendek terdiri dari utang Surat Perbendaharaan Negara (SPN) sebesar Rp22.496.764.023.000 dan SPN Syariah Rupiah sebesar Rp192.519.520.000. Rincian SBN Jangka Pendek dapat dilihat dalam **Daftar 31**.

C.2.38. Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Utang kelebihan Pembayaran Pendapatan Rp812,93 miliar

Jumlah Utang Kelebihan Pelayanan Pendapatan per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp812.930.308.639 dan Rp704.437.258.982 merupakan kewajiban Pemerintah atas kelebihan pembayaran pendapatan yang dilakukan oleh penyeter namun sampai dengan tahun anggaran terakhir belum dibayar oleh Pemerintah dengan rincian sebagai berikut

Uraian	(dalam rupiah)	
	31 Desember 2012 [audited]	31 Desember 2011 [audited]
SPM-KP yang belum diterbitkan SP2Dnya dan pengembalian pinjaman ekspori yang belum direalisasikan oleh eksperti pada Kementerian Keuangan	763.033.888.843	704.520.863.778
Kelambatan atas pembayaran jasa Kemitraan oleh PT Adniral Lines pada Kementerian Perhubungan	-	116.103.388
Utang kelebihan pembayaran pendapatan pada Kementerian ESDM	68.896.610.096	60.818
Jumlah	812.930.508.639	704.437.258.982

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

Pendapatan Diterima
Di muka Rp6,72 triliun

C.2.39. Pendapatan Diterima di Muka

Jumlah Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp6.721.669.099.201 dan Rp9.639.914.082.690 merupakan pendapatan yang sudah masuk ke Kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga. Sebagian besar saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2012 berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp6.187.962.032.241 yang merupakan pendapatan terkait izin spektrum frekuensi. Rincian Pendapatan Diterima di Muka adalah sebagaimana pada Daftar 30.

Utang Jangka Pendek
Lainnya Rp9,79 triliun

C.2.40. Utang Jangka Pendek Lainnya

Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp9.729.985.178.829 dan Rp5.687.100.837.136, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	dalam rupiah	
	31 Desember 2012 (Lanjutan)	31 Desember 2011 (Lanjutan)
1. MA	5.000.000	3.000.000
2. Kementerian Pertahanan	69.911.720.814	31.170.771.795
3. Kementerian Hukum dan HAM	-	9.578.250
4. Kementerian Kelautan	-	4.155.000
5. Kementerian Perikanan	88.088.011	18.000.000
6. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	78.039.300.310	33.080.928.470
7. Kementerian Kesehatan	78.814.543	5.804.483
8. Kementerian Agama	248.772.045	38.373.808
9. Kementerian Pekerjaan Umum	-	14.786.883.834
10. Dewan Ketatalaksanaan Nasional	-	107.425.474
11. BK KBN	-	10.456.764
12. Komnas HAM	1.322.008.000	-
13. KPLI	-	6.699.168
14. Kementerian Perencanaan Rakyat	-	1.333.290
15. LPP TURI	43.661.814.893	-
16. BPLS	-	29.321.813.475
17. BA 999.03	-	39.174.191.985
18. BA 000.00	1.879.198.705.596	212.347.802.839
19. Kewajiban terkait Rekening Migas	7.051.821.082.008	5.321.583.383.450
Jumlah	9.729.985.178.829	5.687.100.837.136

Utang Jangka Pendek Lainnya pada BA 000.00 merupakan Utang *promissory notes* yang terkait dengan penyertaan Pemerintah pada lembaga-lembaga keuangan internasional yang belum dibayar dan akan jatuh tempo dalam jangka waktu satu tahun setelah tanggal neraca.

Nilai kewajiban jangka pendek berupa *promissory notes* pada BA 999.03 tahun 2012 menjadi Rp0 (nol) karena *promissory notes* tahun 2011 telah dibayarkan pada tahun 2012 dan *promissory notes* yang akan dibayarkan kepada Lembaga Keuangan Internasional pada TA 2013 tidak ada.

Utang Jangka Pendek Lainnya pada BA 999.03 per 31 Desember 2012 sebesar Rp1.879.198.705.596 terdiri dari:

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (audited)

Uraian	Jumlah (Rp)
1. Kekurangan draping belanja pensiun ke PT Taspen, Desember 2012	1.720.138.894.688
2. Kekurangan draping belanja pensiun ke PT ASABRI Desember 2012	117.169.778.030
3. Saldo Utang atas imbalan jasa/fee bank/pos yang belum dibayarkan sampai dengan Tahun 2012	37.900.263.000
Jumlah	1.875.198.795.598

Kewajiban terkait Rekening Migas Nomor 600.000411.920 per 31 Desember 2012 sebesar Rp7.655.821.062.008 merupakan estimasi kewajiban kontraktual Pemerintah yang harus dibayarkan dalam rangka pelaksanaan kontrak kerjasama dengan KKKS berupa *DMD/fee*, dan pengembalian (*reimbursement*) PPN dan PBB. Total saldo penerimaan migas yang berada di rekening 600.000411.920 per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp 3.005.460.615.909. Berdasarkan hasil verifikasi, jumlah yang diestimasi akan dibayarkan kepada KKKS adalah sebesar Rp7.655.821.062.008 dan sisanya sebesar Rp5.349.639.753.901 yang sudah dapat diperhitungkan menjadi hak Negara disajikan sebagai pencapaian yang Ditengguhan. Rincian kewajiban Pemerintah kepada KKKS adalah:

Uraian	(dalam rupiah)	
	31 Desember 2012 (un/aud)	31 Desember 2011 (audited)
Fee Penjualan PT Pertamina (Peseia)	2.692.277.173.647	2.311.480.414.804
<i>DMD Fee</i> dan <i>Fee</i> lainnya	2.115.017.241.152	1.049.837.096.793
<i>DMD Fee</i> PT Pertamina EP	-	811.426.338.361
<i>Underwriting</i> KKKS	-	674.361.770
<i>Reimbursement</i> PPN	2.792.443.644.114	867.284.681.761
PDRD	31.478.693.219	3.911.119.881
PBB Migas	144.593.503.876	186.989.438.000
Jumlah	7.655.821.062.008	6.321.663.383.463

C.2.41. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan

Utang Jangka Panjang
DN Perbankan Rp1,66
triliun

Jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp1.638.364.752.248 dan Rp877.350.765.232. Utang tersebut merupakan utang dalam negeri perbankan (SUDMN) yang akan jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun setelah tanggal neraca.

C.2.42. Utang Jangka Panjang Surat Berharga Negara Dalam Negeri

Utang Jangka Panjang
SBN Dalam Negeri
Rp 1.279,85 triliun

Jumlah Utang Jangka Panjang Surat Berharga Negara Dalam Negeri per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp1.278.847.990.292.207 dan Rp1.095.924.545.750.551 merupakan posisi utang dalam bentuk SBN yang akan jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun setelah tanggal neraca. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri SBN per 31 Desember 2012 ini terdiri dari SBN Berdenominasi dalam rupiah sebesar Rp1.014.361.035.001.230 dan SBN Internasional (dalam) sebesar Rp265.486.955.791.000.

Rincian Utang Jangka Panjang Dalam Negeri SBN adalah sebagai berikut.

Jenis SBN	(dalam rupiah)	
	31 Desember 2012 (un/aud)	31 Desember 2011 (audited)
I. Fixed Rate Bonds		
<i>Domestic</i> <i>Outstanding</i>	540.227.500.000.000	440.042.200.000.000
<i>Overseas</i> <i>Outstanding</i>	4.460.662.331.500	4.169.633.221.000

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (audited)

Nilai Bersih (Nilai Buku)	547.888.150.331.500	442.672.048.773.000
II. CRI		
<i>Portofolio Outstanding</i>	23.876.745.000.000	21.588.875.300.000
<i>Imprestasi Ransum (Ransum)</i>	-	-
Nilai Bersih (Nilai Buku)	23.876.745.000.000	21.588.875.300.000
III. Zero Coupon Bonds		
<i>Portofolio Outstanding</i>	-	1.263.800.300.000
<i>Imprestasi Ransum (Ransum)</i>	-	(14.765.143.000)
Nilai Bersih (Nilai Buku)	-	1.158.254.367.000
IV. Variable Rate Bonds		
<i>Portofolio Outstanding</i>	122.794.833.000.000	130.694.833.000.000
<i>Imprestasi Ransum (Ransum)</i>	-	-
Nilai Bersih (Nilai Buku)	122.794.833.000.000	130.694.833.000.000
V. Surat Utang Pemerintah kepada BI		
<i>Portofolio Outstanding</i>	234.889.538.205.700	240.451.854.374.551
<i>Imprestasi Ransum (Ransum)</i>	-	-
Nilai Bersih (Nilai Buku)	234.889.538.205.700	240.451.854.374.551
VI. SBSN		
<i>Portofolio Outstanding</i>	85.788.015.000.000	52.552.870.000.000
<i>Imprestasi Ransum (Ransum)</i>	(41.746.536.000)	300.376.343.000
Nilai Bersih (Nilai Buku)	85.371.478.484.000	52.853.246.343.000
Subtotal SBN Denominasi Rupiah	1.014.381.036.001.200	889.420.322.052.551
VII. Obligasi Negara dalam Valas		
<i>Portofolio Outstanding</i>	282.935.330.353.573	207.278.012.102.053
<i>Portofolio Imprestasi</i>	1.872.010.898.927	(11.848.212.102.053)
<i>Nilai Imprestasi Ransum (Ransum)</i>	579.805.201.000	274.123.895.000
Subtotal Obligasi Negara dalam Valas	265.486.555.282.200	185.863.323.696.000
Total SDN Jangka Panjang	1.279.867.590.282.200	1.005.324.345.750.551

Untuk informasi lebih lanjut mengenai utang negara, silakan kunjungi www.bpti.go.id

Catatan:

- *Fixed Rate Bonds* terdiri dari 37 seri dengan masa jatuh tempo tahun 2014 – 2042.
- CRI terdiri dari 2 seri dengan masa jatuh tempo tahun 2014 – 2015.
- *Variable Rate Bonds* terdiri dari 13 seri, dengan masa jatuh tempo tahun 2014 – 2020.
- *Fixed Rate Bonds*, CRI, dan *Variable Rate Bonds* diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.
- Surat Utang Pemerintah (SUP) kepada Bank Indonesia (BI) terdiri dari SU002, SU004, SU007, dan SRB101, dengan masa jatuh tempo tahun 2025 – 2033. SUP tidak dapat diperdagangkan *non-tradable*.
- SBSN terdiri dari 8 seri *fixed rate* dengan masa jatuh tempo tahun 2015-2036, 14 seri SDN dengan masa jatuh tempo tahun 2014-2022, 2 seri Sukuk Ritel ISF-003 dan SR-004 dengan masa jatuh tempo tahun 2014-2015, dan 4 seri PBS dengan masa jatuh tempo tahun 2018-2037.
- Obligasi Negara dalam Valas terdiri dari 14 seri berdenominasi USD dengan masa jatuh tempo tahun 2014 – 2038, 3 seri berdenominasi JPY yang jatuh tempo tahun 2019-2022, dan 3 seri SBSN berdenominasi USD yang jatuh tempo tahun 2014-2027.

Jelajahi kerangka penerapan *Asset Liability Management* (ALM) Negara Republik Indonesia yang bermanfaat antara lain untuk memperkuat pemodal Bank Indonesia, IMF dan Bank Dunia

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

merekomendasikan konversi Surat Utang Pemerintah (SUP) menjadi SBN *tradable*. Sampai dengan saat ini, belum ada kesepakatan final antara Pemerintah dan Bank Indonesia mengenai konversi SUP menjadi SBN *tradable*. Pemerintah akan mempelajari konversi SUP menjadi SBN *tradable*, menyusun "buku putih" mengenai kebijakan BLBI dan Hekapitalisasi Perbankan dan selanjutnya akan melakukan pembahasan dengan BI. Apabila kesepakatan mengenai konversi tersebut telah dicapai, implementasi konversi baru dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari DPR.

Rincian Utang Obligasi Dalam Negeri Jangka Panjang dapat dilihat pada Daftar 32.

C.2.43. Utang Kepada Dana Pensiun dan THT

Utang Kepada Dana
Pensiun dan THT
Rp 13,16 triliun

Utang Kepada Dana Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp18.161.745.000.000 dan Rp11.822.231.724.875 merupakan kewajiban Pemerintah terhadap Program Dana Pensiun dan THT akibat kenaikan gaji PNS tahun 2007, 2008, 2009, 2010, dan 2011 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Jumlah (Rp)
<i>Unfunded liability</i> akibat PP Nomor 9 Tahun 2007	1.638.443.303.070
<i>Unfunded liability</i> akibat PP Nomor 14 Tahun 2008	3.450.505.392.358
<i>Unfunded liability</i> akibat PP Nomor 8 Tahun 2009	3.024.849.340.483
<i>Unfunded liability</i> akibat PP Nomor 25 Tahun 2010	1.275.570.232.079
<i>Unfunded liability</i> akibat PP Nomor 11 Tahun 2011	3.432.868.553.875
Jumlah	11.822.231.724.875
Penetapan <i>liability</i> PSL tahun 2007 s.d 2011	18.161.745.000.000
Pembayaran Tahun 2012	1.000.000.000.000
Jumlah	18.161.745.000.000

Nilai *unfunded liability* atas Program THT sebesar Rp11.822.231.724.875 merupakan nilai yang ditetapkan PT Taspen per 31 Desember 2012. Pembayaran *unfunded liability* akan dilakukan Pemerintah berdasarkan kemampuan keuangan negara.

Berdasarkan surat Menteri Keuangan kepada PT Taspen Nomor S 160/MK.02/2013 tanggal 4 Maret 2013 Pemerintah menetapkan nilai *unfunded liability* atas program THT adalah sebesar Rp19.161.745.000.000, berdasarkan hasil *due diligence* yang dilakukan BPKP bahwa *unfunded* PSL PT Taspen Tahun 2007 s.d 2011. Jumlah nilai Rp19.161.745.000.000 termasuk jumlah PSL sebesar Rp11.822.231.724.875 yang telah dicatat dalam Tahun 2011. Atas penetapan tersebut, PT Taspen diminta untuk melakukan penyesuaian penggunaan asumsi perhitungan sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan.

C.2.44. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya

Utang Jangka Panjang
DN Lainnya Rp5,02 triliun

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp5.024.289.525.498 dan Rp5.099.082.825.744, yang terdiri dari:

Jenis Utang	(dalam rupiah)	
	31 Desember 2012 (<i>bookend</i>)	31 Desember 2011 (<i>bookend</i>)
Utang Pemerintah Indonesia kepada BI dalam rangka Penyelenggaraan Lembaga Keuangan Internasional	2.828.358.380.836	2.828.856.393.638
Kewajiban atas Pembiayaan Kredit Program Kredit Usaha Tani IKUT Tahun Penyelenggaraan (CIP)	1.911.327.727.159	1.811.827.727.159

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

1998:1999		
Utang Jangka Panjang dalam Negeri Lainnya pada KUT	285.398.701.703	294.158.701.548
Jumlah	5.024.283.525.438	5.033.082.825.744

- Utang Pemerintah Indonesia kepada BI dalam rangka Penyertaan pada Lembaga Keuangan Internasional

Dalam rangka penyertaan Pemerintah pada lembaga keuangan internasional, sejak tahun 1972 s.d. 1999, Bank Indonesia (BI) atas nama Pemerintah juga telah melakukan pembayaran secara tunai atas penyertaan Pemerintah pada lembaga keuangan internasional. Jumlah yang telah dibayarkan oleh BI adalah sebesar Rp2.826.956.396.636, termasuk di antaranya Rp2.764.860.843.170 kepada IMF. Pembayaran oleh BI dilakukan sebelum terbit UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI. BI mencatat pembayaran tersebut sebagai dana talangan/piutang kepada Pemerintah. Pemerintah belum menyepakati nilai dan status dana talangan/piutang tersebut. Pemerintah mengusulkan kepada BI, agar dana talangan/piutang tersebut dihapuskan dan tidak ditagihkan kepada Pemerintah. Terkait dengan itu, Menteri Keuangan telah mengirim surat kepada BI beberapa kali, terakhir dengan surat Nomor S-08/MK.11/2010 tanggal 9 Maret 2010 untuk meminta jawaban mengenai penyelesaian status dana talangan sesuai dengan usulan Pemerintah agar dapat dihapuskan. Kementerian Keuangan telah melakukan pertemuan dengan BI pada tanggal 7 Mei 2010, dan sesuai kesepakatan dilakukan beberapa langkah berikut: (1) Pemerintah dan BI melakukan verifikasi atas seluruh data dan transaksi dan talangan tersebut untuk memastikan jumlah dan status klaim BI; (2) Bila status dan jumlah dana talangan tersebut telah disepakati bersama, maka Pemerintah dan BI akan segera melakukan langkah penyelesaian status dana talangan.

Pemerintah dan BI telah melakukan verifikasi atas dana talangan tersebut, dan disepakati bahwa jumlah sebesar Rp2.780.599.599.504 telah didukung dengan data dan dokumen yang memadai yaitu Rekening Koran, Warkat transaksi, Surat dari BI ke Kementerian Keuangan dan sebaliknya, faksimili, SWIFT, dan Teleks. Sementara untuk jumlah Rp46.356.797.132 hanya didukung rekening koran. Pemerintah dan Bank Indonesia hingga saat ini terus melakukan pembahasan terkait nilai dana talangan tersebut dan opsi penyelesaian yang akan diambil atas permasalahan dana talangan tersebut.

- Kewajiban atas *Risk Sharing* Kredit Program KUT TP 1998:1999

Kredit Usaha Tani (KUT) adalah salah satu skema Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLB) berupa pemberian kredit modal kerja yang diberikan BI kepada bank pelaksana untuk disalurkan kepada petani yang tergabung dalam kelompok tani melalui koperasi primer (KOP) guna membiayai usaha taninya dalam rangka intervensi padi, palawija, dan hortikultura. Terdapat 2 (dua) pola dalam penyaluran KUT, yaitu pola *channeling* dan pola *channeling*. Penyaluran KUT TP 1998:1999 dilakukan dengan pola *channeling* yakni bank pelaksana terbatas hanya sebagai penyalur lagan *channeling* ke Koperasi (KOP). Sedangkan Koperasi (KOP) bertindak sebagai *channeling* yang bertanggung jawab atas penyaluran dan pelunasan KUT kepada dan dari kelompok tani.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-628/MK.017:1998 tanggal 7 Desember 1998, pembagian *risk sharing* atas tunggakan KUT tersebut yaitu sebesar 52,25% ditanggung Pemerintah, sebesar 42,75% ditanggung Bank Indonesia, dan sebesar 5,00% ditanggung Perum Jamkrindo.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (audited)

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 091/J-HP/W.12/2010, tanggal 31 Desember 2010 diketahui bahwa realisasi penyaluran KUT TP 1998/1999 adalah sebesar Rp7.677.429.744.359,79, terdapat pelunasan (B) menebati rekening giro bank pelaksana di B) sebesar Rp1.968.360.319.699,61, sehingga masih terdapat tunggakan sebesar Rp5.709.069.424.660,18. Dari tunggakan tersebut terdapat nilai yang belum disepakati berupa penyaluran tidak didukung dokumen lengkap sebesar Rp1.539.052.034.110,09 dan tunggakan yang tidak didukung Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sebesar Rp510.225.566.295,53. Dengan demikian, estimasi tunggakan yang dapat diperhitungkan untuk *risk sharing* adalah sebesar RpRp3.659.191.622.914,56. *Risk sharing* yang ditanggung Pemerintah adalah sebesar 32,25%, sehingga Pemerintah mengakui adanya kewajiban atas *Risk Sharing* Kredit Program KUT TP 1998/1999 sebesar Rp1.911.927.727.159,36 (52,25%xRp3.659.191.622.914,56).

Pemerintah dapat menyesuaikan nilai kewajiban atas *Risk Sharing* Kredit Program. Dalam rangka penyelesaian kewajiban *risk sharing* program KUT, dan sesuai dengan hasil rapat konsultasi Pemerintah dengan CPR pada tahun 2004, besaran kewajiban *risk sharing* KUT tersebut perlu mendapat persetujuan DPR.

- Utang Jangka Panjang dalam Negeri lainnya pada K/L

Utang Jangka Panjang dalam Negeri lainnya pada K/L sebesar Rp285.399.401.703 adalah utang pada Kementerian Luar Negeri sebesar Rp9.746.234.634, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp58.154.612.073, Kementerian Kesehatan sebesar Rp118.153.090.986, dan Lembaga Penyiaran Publik TVRI Rp39.345.434.110.

C.2.45. Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan

Utang Jangka Panjang
LN Perbankan Rp559,48
triliun

Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp559.487.514.862.710 dan Rp571.982.048.619.444 merupakan posisi utang luar negeri perbankan yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun setelah tanggal neraca. Rincian Utang Jangka Panjang LN Perbankan adalah sebagai berikut.

Jenis Utang	(dalam rupiah)	
	31 Desember 2012 (audited)	31 Desember 2011 (audited)
Bilateral	287.823.433.000.808	308.806.893.874.644
Multilateral	211.245.671.138.696	187.266.678.813.746
Kredit Ekspor	68.763.172.068.800	68.382.838.684.318
Kredit Komersial	3.855.233.638.308	4.528.237.398.838
Jumlah	559.487.514.862.710	571.982.048.619.444

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (audited)

C.7.48. Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya

Utang Jangka Panjang
Luar Negeri Lainnya
Rp28,57 triliun

Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp26.569.669.370.533 dan Rp25.899.179.304.040, dengan rincian:

	31 Desember 2012 (audited)	31 Desember 2011 (audited)
International Monetary Fund	28.500.875.238.721	25.091.090.740.469
International Development Association	5.173.139.660	5.173.139.660
Multilateral Investment Guarantee Agency	10.976.624.000	10.292.343.224
Common Fund for Commodities	2.882.368.084	2.623.080.668
Total Utang Jangka Panjang Lainnya	78.533.007.002.465	75.179.673.344.021

Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya adalah dalam bentuk *Promissory Notes* terkait dengan Perjanjian Pemerintah Lembaga Keuangan Internasional yang jatuh tempo/dibayar lebih dari satu tahun sejak tanggal laporan, sedangkan yang akan jatuh tempo satu tahun setelah tanggal neraca disajikan sebagai Utang Jangka Pendek Lainnya.

Rekapitulasi Utang Luar Negeri, SBN, dan Promissory Notes

Posisi Utang Luar Negeri,
SBN dan PN

Kenaikan dan penurunan saldo Utang Luar Negeri, SBN, dan *promissory notes* dalam mata uang Rupiah, serta kenaikan dan penurunan saldo Utang Luar Negeri (tidak termasuk utang bunga) dalam valuta asing secara keseluruhan disajikan pada Tabel 16 dan Tabel 17.

Tabel 16 Posisi Utang Luar Negeri, SBN, dan Promissory Notes

Jenis Utang	(Dalam juta rupiah)		
	31 Desember 2012	31 Desember 2011	Resolusi (Perubahan)
Utang Luar Negeri (LN):			
Utang LN – Bayan Lancar	55.453.404,89	48.296.753,81	7.156.651,08
Utang LN – Jangka Panjang	557.008.708,92	571.882.048,02	(14.873.339,10)
Utang Bunga LN	2.478.359,40	2.648.216,00	(169.856,60)
Total Utang LN	6.500.210,21	622.827.017,83	(7.824.910,82)
Surat Berharga Negara (SBN):			
Easjan Lancar SBN Rupiah	48.202.212,70	58.344.807,42	(10.142.594,72)
SPN	22.689.289,54	30.509.891,80	(7.820.602,26)
SDBN Jangka Pendek-Rupiah	12.032.301,04	0.000.000,00	3.834.101,04
SBN Jangka Panjang-Rupiah	929.668.359,92	836.567.325,71	93.101.034,21
SBN Jangka Panjang-Valas	239.861.455,29	130.667.600,00	109.193.855,29
SBSN Jangka Panjang-Rupiah	89.371.668,46	12.823.296,35	32.518.372,11
SBSN Jangka Panjang-Valas	25.625.500,00	14.962.200,00	10.663.300,00
Utang Bunga SBN	20.802.879,90	19.275.822,33	1.527.057,57
Total SBN dan Bunga	1.385.913.781,95	1.202.079.033,71	183.834.748,24
Promissory Notes (PN):			
PN Jangka Pendek	-	38.174,00	(38.174,00)
PN Jangka Panjang	26.569.669,37	25.899.179,30	670.490,07
Total PN	26.569.669,37	25.937.353,30	332.316,07

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (audited)

Tabel 17 Posisi Utang Luar Negeri Menurut Valuta Asing

Posisi Utang Luar negeri
Menurut Valuta Asing

Valuta	31 December 2012	31 December 2011	Kerensian (Penurunan)
ACU	305,868,131	279,847,434	25,821,697
ACB	89,348,229	109,582,221	(20,233,992)
ALD	307,464,820	351,410,720	(43,945,900)
CAO	128,875,789	138,742,057	(9,866,268)
CHF	204,879,871	240,740,151	(35,860,280)
CNY	1,472,578,303	1,550,000,400	(77,422,097)
DKK	37,354,431	42,746,717	(5,392,286)
EUR	2,942,045,413	4,429,525,292	(1,487,479,879)
GEP	307,894,873	363,482,311	(55,587,438)
JPY	2,138,377,758,315	2,307,420,817,502	(169,043,059,187)
KRW	187,890,877,463	189,566,018,440	(1,675,140,977)
KWD	7,368,203	8,758,800	(1,390,597)
SAR	87,368,353	100,075,874	(12,707,521)
SCR	2,080,367,363	2,144,885,372	(64,518,009)
USD	22,084,404,139	21,871,471,753	212,932,386
WBD	100,800,443	206,130,041	(105,329,598)

C.2.47. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Setelah Penyesuaian

SAL Setelah
Penyesuaian Rp49,24
triliun

Saldo Anggaran Lebih (SAL) setelah penyesuaian Tahun Anggaran (TA) 2012 dan TA 2011 adalah sebesar Rp49.242.263.157.735 dan Rp58.656.722.486.062. SAL TA 2012 setelah penyesuaian tersebut berasal dari saldo awal SAL TA 2012 sebesar Rp105.086.371.724.754, ditambah selisih lebih kas tahun lalu Rp17.425.232.112, dan ditambah penyesuaian lainnya sebesar minus Rp55.864.533.819.131. Pada TA 2012 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SLIPA) setelah penyesuaian sebesar Rp21.020.562.086.798, sehingga SAL per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp70.262.825.244.473. Sementara itu SAL menurut fisik setelah penyesuaian adalah sebesar Rp70.270.975.012.453, sehingga terdapat selisih lebih fisik SAL dibandingkan catatannya sebesar Rp8.149.767.980. Rincian penghitung SAL sebagaimana disajikan pada Tabel 18.

Tabel 18 Saldo Anggaran Lebih TA 2012 dan TA 2011

Uraian	TA 2012 (Rp)	TA 2011 (Rp)
Saldo Awal SAL	106.088.371.724.754	89.801.702.226.448
Saldo Saluran Dana Tahun Lalu dan Lain	17.425.232.112	1.987.000.000
Penyesuaian SAL	(65.170.000.000.000)	(130.019.370.371.000)
Korupsi dan Pencurian	(1.411.111)	(1.411.111)
Kelebihan dan Kekurangan	(1.411.111)	(1.411.111)
Saldo SAL Setelah Penyesuaian	49.242.263.157.735	58.656.722.486.062
SLIPA (SLIPA) Setelah Penyesuaian	21.020.562.086.798	46.541.376.606.811
Penyesuaian SLIPA (SLIPA)		
Penyesuaian Ekuitas dan Pendapatan Lain	(309.501.791.847)	(119.304.767.973)
Penyesuaian Pendapatan Berwujud dan Tidak Berwujud	-	(761.759.342)
Penyesuaian Pajak Penghasilan	(552.573)	(215.011.361)
Penyesuaian Pendapatan Anggaran Lain	-	(57.707)
Penyesuaian Ekuitas Lain	(1.830.473.031)	(307.891.307)
Penyesuaian Ekuitas Lain	(218.111.441)	(21.199.174)
Penyesuaian Lain	-	(4.119.384)
Penyesuaian Pendapatan	-	(20.381.000)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

Penyediaan Ekuitas RIBK	-	(31.064.114.911)
Selisih Kurs (selisih kurs) ¹⁾	(637.010.815.601)	-
Total Penyusunan SILPA	(637.010.815.601)	(116.721.280.115)
SILPA (SIKPA) Setelah Penyesuaian	21.020.562.086.738	46.432.649.228.692
Saldo Akhir SAL	70.262.325.244.475	115.063.311.124.754
Selisih Kurs		
Selisih Kurs dari penjabaran ke mata uang		(1.129.105.940.502)
Selisih Kurs K. J. E.K.		(1.071.877.081.482)
Selisih Kurs Penjabaran ke mata uang lain		(29.028.000.000)
Selisih Kurs	-	(2.229.007.000.000)
Saldo Akhir SAL dan Belanja Kurs (A)	70.262.325.244.475	112.834.304.124.754
Fiskal hasil SAL:		
Eksisting (NIR)	(26.941.891.143.328)	(4.414.080.111.525)
Eksisting (MNH)	(1.114.091.441.120)	(1.470.060.414.020)
Eksisting (KPP)	(162.008.222.292)	(11.890.080.301.501)
Eksisting (Kus)	(13.022.010.315.313)	(20.300.158.717.216)
Keseluruhan Fiskal hasil	(213.086.005.172)	(27.074.380.534.262)
Keseluruhan Fiskal hasil (NIR)	(26.941.891.143.328)	(4.414.080.111.525)
Keseluruhan Fiskal hasil (MNH)	(1.114.091.441.120)	(1.470.060.414.020)
Keseluruhan Fiskal hasil (KPP)	(162.008.222.292)	(11.890.080.301.501)
Keseluruhan Fiskal hasil (Kus)	(13.022.010.315.313)	(20.300.158.717.216)
Totol Fiskal Keseluruhan Fiskal Keseluruhan	(213.086.005.172)	(27.074.380.534.262)
Totol Fiskal Keseluruhan Fiskal Keseluruhan	(213.086.005.172)	(27.074.380.534.262)
Fiskal hasil setelah Penyesuaian (B)	70.270.376.012.463	115.341.076.000.000
Selisih Kas Lebih/Lurang (B-B)	(8.149.041.888)	(1.426.262.112)

Catatan

- 1) Selisih kurs 2012 selisih kurs (selisih kurs) atau selisih kurs yang merupakan selisih dari 3% merupakan selisih kurs (selisih kurs) 2012.
- 2) Selisih kurs 2012 selisih kurs (selisih kurs) atau selisih kurs yang merupakan selisih dari 3% merupakan selisih kurs (selisih kurs) 2012.
- 3) Selisih kurs 2012 selisih kurs (selisih kurs) atau selisih kurs yang merupakan selisih dari 3% merupakan selisih kurs (selisih kurs) 2012.

C.2.48. SILPA (SIKPA) Setelah Penyesuaian

Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp21.020.562.086.738 dan Rp46.432.649.228.692 merupakan selisih antara realisasi seluruh penerimaan dan pengeluaran anggaran selama TA 2012 setelah dilakukan penyesuaian-penyusunan, dengan rincian sebagai berikut.

SILPA setelah Penyesuaian Rp21,02 triliun

Uraian	(dalam rupiah)	
	TA 2012 (Realisasi)	TA 2011 (Realisasi)
Pendapatan Negara dan Hibah	1.338.100.820.172.958	1.210.599.853.353.415
Bea Penghasilan	1.461.141.224.590.894	1.294.899.146.471.024
Surplus (Defisit)	(123.040.403.418.336)	(84.299.293.117.609)
Pembiayaan Neto	175.153.188.320.375	130.848.809.824.420
SILPA (SIKPA) Sebelum Penyesuaian	21.020.562.086.738	46.432.649.228.692
Penyesuaian SILPA		
Penyesuaian Pengembalian Pendapatan Tahun Lalu	(805.531.881.845)	(102.304.746.513)
Penyesuaian Uang Persediaan	-	(691.092.742)
Penyesuaian Rekening Retur	(553.348)	(213.166.651)
Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	(9.202)
Penyesuaian Hibah Langsung	(1.336.463.036)	(377.860.710)
Penyesuaian Kas KPPN	(30.893.583.420)	(212.869.314)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (revisi)

Penyesuaian Transfer	-	4.173.888
Penyesuaian Kas pada BLU	-	(373.080.530)
Penyesuaian Kas di BLN	-	(13.064.114.611)
Selisih Kurs (kurang)	4.88.278.235.048	
Total Penyesuaian SILPA	(037.010.015.301)	(113.727.200.118)
SILPA (SIKPA) Setelah Penyesuaian	21.020.562.085.738	46.422.548.228.892

Sejak Tahun 2012, Selisih Kurs Kas EUN di BLN dan BLU merupakan penambah/pengurang perhitungan SILPA.

C.2.49. Cadangan Piutang

Cadangan Piutang
Rp86,26 triliun

Jumlah Cadangan Piutang per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp86.265.304.108.265 dan Rp84.574.619.543.073. Jumlah Cadangan Piutang merupakan akun lawan (pasangan) atas:

Alun Lawan	Jumlah
Piutang Bersih	05.607.010.063.494
Belanja Dibayar di Muka berupa Persekit Gaji	4.773.047.877
Dang Muka dari Rekening BUN	787.370.382.668
Selisih Kurs atas Bagian Lancar Penerusan Pinjaman dalam valas	(132.952.135.634)
Jumlah	86.265.604.108.265

C.2.50. Cadangan Persediaan

Cadangan Persediaan
Rp62,02 triliun

Jumlah Cadangan Persediaan per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp62.016.561.796.415 dan Rp59.214.846.453.160 merupakan pasangan perkiraan persediaan yang dilaporkan K/L dan instansi terkait lainnya, termasuk persediaan pada BLU.

C.2.51. Pendapatan yang Ditangguhkan

Pendapatan yang
Ditangguhkan Rp9,04 triliun

Jumlah Pendapat yang Ditangguhkan per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp9.043.802.422.858 dan Rp3.610.468.839.673 merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) K/L yang belum disetorkan ke Kas Negara, serta pendapat yang piutang terkait pemanmaan migas dan panas bumi yang belum dapat diakui sebagai PNBP karena *winning process-nya* belum selesai. Jumlah Pendapatan yang Ditangguhkan merupakan akun lawan (pasangan) atas:

Alun Lawan	(dalam rupiah)	
	31 Desember 2012 [revisi]	31 Desember 2011 [revisi]
Kes di Bendahara Penerimaan	196.160.468.978	262.000.321.124
Kes Lainnya dan Setera Kas ¹⁾	3.160.118.488.874	2.587.616.283.894
Rek. Migas Nomor R00 0004 11 360	-	519.575.358.774
Rek. Pemanfaatan Panas Bumi	347.592.721.306	197.580.168.008
Aset Lainnya ²⁾	-	76.166.978.014
Rek. Hasil Minyak Perjujuaan KPS - PMSF	6.348.838.763.801	-
Serahan dividen PT Sarinah ³⁾	-	1.761.704.889
Jumlah	9.043.802.422.858	3.610.468.839.673

Catatan:

1) Kas Lainnya dan Setera Kas merupakan dana yang diterima dan diserahkan oleh unit belum disetorkan.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

mencangkupkan belanja, anggaran pasal 60a biaya jasa dan lain-lain sebelum berakhir yang menjadi beban Pemerintah Kabupaten Alor Gajah (G.2.6)

- 2) Anggaran dasar sebagai SIP Pemerintah Kabupaten Marau biaya seperti 12 bulan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional yang telah diterima Rp 10.000.000,00 dan biaya lainnya sebagai beban pemerintah Kabupaten Marau sebesar Rp 100.000.000,00.
- 3) Pada tahun 2011 sebagai bagian dari Survei dan Pengukuran semikuantitatif yang dilaksanakan, Luasan lahan pertanian telah diukur oleh Direktorat Jenderal Pertahanan dan Ketahanan Pangan (DJKP) serta Menteri Pertanian untuk G.2.6.02.002, nilai di rekening Pas Uraian Negara. Pada Tahun 2012 data tersebut sudah diupdate ke Rp 100.000.000,00, sehingga akan diupdate kembali untuk tahun-tahun berikutnya sesuai dengan perkembangan data.

G.2.52. Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek minus Rp241,95 triliun

Jumlah Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar minus Rp241.958.232.377.365 dan minus Rp204.483.884.343.763. Perkiraan tersebut merupakan bagian dari ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. Jumlah ini merupakan total nilai Utang Jangka Pendek dikurangi Utang PTK.

Rincian penghitungan Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek adalah sebagai berikut:

Uraian	(dalam rupiah)	
	31 Desember 2012 (jumlah)	31 Desember 2011 (jumlah)
Total Utang jangka Pendek Kurang:	268.030.739.023.930	234.441.363.130.116
Utang PTK	268.030.739.023.930	234.441.363.130.116
Utang jangka pendek Ekuitas lokal - Regional SIP dan tidak terutang	1.134.911.109.119	1.134.911.109.116
Utang jangka pendek Ekuitas regional pemerintah kabupaten/kota/kabupaten/kota	12.401.059.991.110	12.401.059.991.110
Utang jangka pendek Ekuitas regional pemerintah kabupaten/kota/kabupaten/kota	17.883.172.177.990	17.883.172.177.990
Utang jangka pendek Ekuitas regional pemerintah kabupaten/kota/kabupaten/kota	-	17.821.916.641.016
Utang jangka pendek Ekuitas regional pemerintah kabupaten/kota/kabupaten/kota	-	12.000.000.000,00
Utang jangka pendek Ekuitas regional pemerintah kabupaten/kota/kabupaten/kota	16.721.958.983.000	16.721.958.983.000
Utang jangka pendek Ekuitas regional pemerintah kabupaten/kota/kabupaten/kota	141.741.121.951.200	141.741.121.951.200
Utang jangka pendek Ekuitas regional pemerintah kabupaten/kota/kabupaten/kota	17.783.000.883.660	17.783.000.883.660
Utang jangka pendek Ekuitas regional pemerintah kabupaten/kota/kabupaten/kota	-	17.783.000.883.660
Jumlah	241.958.232.377.365	204.483.884.343.763

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

Selisih Kurs Bagian Lancar minus Rp4,44 triliun

C.2.53. Selisih Kurs Bagian Lancar

Selisih Kurs Bagian Lancar per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar minus Rp4.443.013.069.514 dan minus Rp2.788.692.210.245 merupakan selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda antara kurs saat transaksi dengan kurs pada tanggal pelaporan (kurs tengah BI). Selisih kurs terdiri dari:

Uraian	(dalam rupiah)	
	31 Desember 2012 (realisasi)	31 Desember 2011 (realisasi)
Selisih kurs atas Bagian Lancar Uang Jangka Panjang yang terkait dengan utang luar negeri ran dalam negeri	(4.575.971.265.178)	13.207.294.640.603
Selisih kurs atas rekening BUN di B (dalam valas *)		235.078.083,35
Selisih kurs pada aset Bagian Lancar Perurusan Pinjaman	132.958.199.664	173.524.347.230
Jumlah	(4.443.013.069.514)	2.788.692.210.245

Salinan

*) Salinan Tahun 2012, Salinan Tahun 2011 dan realisasi merupakan pemembelangan yang pertimbangannya 1/100

Dana Lancar Lainnya Rp88,47 miliar

C.2.54. Dana Lancar Lainnya

Jumlah Dana Lancar Lainnya per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp58.475.093.646 dan Rp45.833.601.148, yang terdiri dari:

Uraian	(dalam rupiah)	
	31 Desember 2012 (realisasi)	31 Desember 2011 (realisasi)
Rekening Pemerintah Lainnya (Rek. Penerimaan Pertanjaran dan pertanjaran dan RPL pada BA 999.04)	142.211.381.233	180.453.779.919
Investasi Jangka Pendek pada Kementerian/Ditjen dan lainnya setara kas pada Kementerian/Departemen dan LKRM	-	135.938.486.818
Kas ELU yang belum disahkan sebagai SIL *A	50.028.528.782	100.824.084.157
Kas Hibah Langsung yang belum disahkan *)	-	12.826.616.113
Selisih Pencatatan Kas Hibah Langsung K/L dengan Pencatatan di K/PPI	(175.345.833.082)	-
Kas Lainnya dan Setara Kas pada BA 999.05	1.429.667.753	1.913.974.670
Selisih Kas Lebih Kurang Tahun ini	8.148.787.880	17.425.252.112
Jumlah	58.475.093.646	451.833.631.148

Salinan

*) Kas hibah langsung yang belum disahkan merupakan selisih antara kas hibah langsung pada neraca dengan kas hibah langsung yang dicatat di K/PPI

Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima Rp1,09 triliun

C.2.55. Barang/Jasa yang Harus Diterima

Barang/Jasa yang Harus Diterima per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp1.889.380.514.088 dan Rp1.278.453.004.389. Barang/Jasa yang Harus Diterima per 31 Desember 2012 merupakan akur lawan cari Belanja Dibayar Dimuka dan Jeng Muka Belanja sebesar Rp1.833.533.561.365 dikurangi Perskot Gaji pada Mahkamah Agung sebesar Rp2.361.550.268, Kejaksaan Agung sebesar Rp7.694.943, Kementerian Keuangan sebesar Rp1.801.187.869 dan pada Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika sebesar Rp2.614.800.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (audited)

Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan minus Rp8.771 triliun

C.2.58. Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan

Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar minus Rp6.721.668.089.201 dan minus Rp6.921.674.677.095. Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan per 31 Desember 2012 merupakan akun lawan dari total Pencapaian Diterima di Muka yang sebesar Rp6.721.668.089.201.

Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Rp832,40 triliun

C.2.57. Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang

Jumlah Perkiraan Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp452.406.392.642.504 dan Rp750.030.794.479.804 merupakan dana Pemerintah Pusat yang diinvestasikan dalam bentuk investasi permanen dan investasi non permanen yang merupakan lawan dari perkiraan Investasi Jangka Panjang

Diinvestasikan dalam Aset Tetap Rp1,95 triliun

C.2.58. Diinvestasikan dalam Aset Tetap

Jumlah Diinvestasikan dalam Aset Tetap per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp1.995.501.446.206.083 dan Rp1.567.974.174.587.750 merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk Aset Tetap.

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Rp362,10 triliun

C.2.59. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya

Jumlah Diinvestasikan dalam Aset Lainnya per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp362.406.005.768.186 dan Rp417.130.365.123.476 merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk Aset Lainnya.

rincian perhitungan Diinvestasikan dalam Aset Lainnya adalah sebagai berikut.

	(dalam rupiah)
Urutan	31 Desember 2012
	(audited)
Piutang Jangka Panjang (bersih)	4.373.350.561.803
Aset Lainnya (bersih)	359.386.269.747.713
Jumlah Piutang Jangka Panjang dan Aset lainnya	363.769.860.328.516
Dikurangi:	
Dana yang Dilalasi Penggunaannya pada BPH yang merupakan akun lawan Utang Kepada Pihak Ketiga	(11.163.992.839.623)
Aset Lainnya dari Reklasifikasi UPT/UP	(50.977.427.550)
Selisih kurs atas Penerusan Pinjaman dalam valuta	(18.884.292.657)
Jumlah	362.406.005.768.186

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

Dana yang Harus
Disediakan untuk
Pembayaran Utang
Jangka Panjang minus
Rp1.850,35 triliun

C.7.80. Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang

Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar minus Rp1.850.355.668.169.689 dan minus Rp1.879.033.815.548.059 merupakan bagian dari ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang. Jumlah ini merupakan akumulasi utang jangka panjang yang terdiri dari Utang Jangka Panjang Dalam Negeri dan Utang Jangka Panjang Luar Negeri dikurangi selisih kurs utang jangka panjang, dengan rincian sebagai berikut

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2012 <i>(audit)</i>	31 Desember 2011 <i>(audit)</i>
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	1.504.692.383.669.046	1.103.067.191.666.402
Utang Jangka Panjang Luar Negeri	688.667.201.233.245 (40.393.918.633.507)	687.871.227.823.484 (21.894.633.043.877)
Jumlah *)	1.850.355.668.169.682	1.879.033.815.946.099

*) Selisih kurs atas utang jangka panjang sebesar minus Rp1.850,35 triliun

Selisih Kurs Bagian
Jangka Panjang minus
Rp40,27 triliun

C.2.61. Selisih Kurs Bagian Jangka Panjang

Selisih Kurs Bagian Jangka Panjang per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar minus Rp40.275.032.340.850 dan minus Rp20.341.184.232.370 merupakan selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda antara kurs saat transaksi dengan kurs pada tanggal pelaporan (kurs tengah BI). Selisih Kurs Bagian Jangka Panjang terdiri dari:

Uraian	Jumlah (Rp)
Selisih kurs atas Utang Jangka Panjang dalam valuta *	(40.383.918.832.607)
Selisih kurs pada aset atas Aset lainnya RDL dan Aset Lainnya dalam Penerusan Pinjaman	119.884.282.867
Jumlah	(40.275.032.340.850)

*) Selisih kurs atas Utang Jangka Panjang dalam valuta terdiri dari selisih kurs Utang Jangka Panjang Luar Negeri sebesar minus Rp38.421.908.987.080 dan selisih kurs Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Valas sebesar minus Rp1.572.510.646.427.

C.3. CATATAN PENTING LAINNYA**1. Rekening Pemerintah Lainnya**

Di luar LIKPP Tahun 2012, Rekening Pemerintah Lainnya terdiri dari tiga rekening pada Bank Indonesia dan 17 rekening pada Bank Umum. Adapun tujuan dari pembentukan Rekening Pemerintah Lainnya tersebut adalah sebagai berikut.

a. **Rekening SD & Migas nomor 800.000411.980** Depdiknas khusus untuk pembelian minyak dan gas bumi

Sesuai PMK Nomor 113/PMK.02/2009 tentang Rekening Minyak dan Gas Bumi. Dijelaskan bahwa rekening minyak dan gas bumi adalah rekening dalam valuta USD untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar pengeluaran terkait kegiatan hulu migas. Penerimaan yang ditampung pada rekening tersebut harus mengandung hak milik ketiga yang harus

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

- dipindahkan dari rekening tersebut. Bagian pemerintah dari penerimaan Minyak dan Gas Bumi adalah sebesar 85%, yang terdiri dari 71,153% dari pihak lain dan 13,8482% merupakan Pendapatan Pajak.
- k. **Rekening SDA Non Migas, Nomor 608.000034.980 Rekening Penerimaan Panas Bumi**
 Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.02/2009 tentang Rekening Panas Bumi dijelaskan bahwa Rekening Penerimaan Panas Bumi pada BI digunakan untuk menampung penerimaan sebagian bagian Pemerintah dan untuk menyalurkan pengeluaran kewajiban pemerintah terkait usaha panas bumi. Pada rekening panas bumi terdapat pengeluaran berupa *reimbursements* PPN, PBB dan lainnya.
 - l. **Rekening SDA Non Migas, Nomor 608.000071.980 Rekening Perlengkapan dan Periklanan**
 Penerimaan pada rekening pertambangan dan perikanan berasal dari PT Inalum dan perusahaan KKS.
 Pemindahbukuan dari rekening 608.000071.980 ke Pemda/Pemprov/RUM didasarkan pada surat permohonan DJA. Sebelum melakukan pemindahan pertahabukuan, sesuai peraturan, DJA terlebih dulu melakukan perhitungan atas besaran yang bisa dipindahbukukan dan jenis pemindahbukuan.
 - m. **Rekening Kredit Program**
 Rekening Kredit Program dipergunakan untuk menampung pengembalian pinjaman dari debitur.

2. Rekening Migas

Saldo Rekening Hasil Minyak Perjanjian KPS per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp40.096.411.640,61E. Dana tersebut merupakan Kas BUN dalam bentuk valuta asing pada Rekening nomor 600.000.411.980, sebagai rekening antara untuk menampung seluruh penerimaan dalam valuta asing dari hasil kegiatan usaha hulu migas dalam rangka *Productive Sharing Contract* (Kerjasama Kerja Sama) dan membayar kewajiban kontraktual migas sesuai Pemerintah. Berikut adalah mutasi Rekening Migas selama Tahun 2012.

Tabel 19 Laporan Rekening Nomor 600.000.411.980 Tahun 2012 dan 2011

JURISDIKSI	31 Desember 2012 (akhir)		31 Desember 2011 (akhir)	
	USD	Rp. Juta	USD	Rp. Juta
I. Saldo Awal	637.812.389,33	8.237.138,73	212.267.134,13	2.744.794,41
II. Penerimaan:				
a. Hasil Yon-PP Migas dan Penerimaan Log Perikanan	19.734.244,24	252.305,29	16.144.411,70	202.128,43
b. Hasil dan Penerimaan Lain				
c. Hasil Perikanan				
d. Hasil Yon dan lain	1.144.611,51	1.397.000,00	225.122.691,25	2.822.063,43
e. Hasil dan Penerimaan Lain				
Total Penerimaan	19.734.244,24	152.172.245,35	19.455.157.501,95	173.881.822,94
III. Pengeluaran:				
a. Pengeluaran untuk kegiatan hulu migas				
b. Pengeluaran PSC Migas dan PSC Perikanan	2.048.229.121,22	18.211.410,00	2.011.732.301,04	22.270.007,73
c. Pengeluaran untuk kegiatan hulu migas	2.222.771,22	10.868,20	8.128.730,22	10.348,23
d. Pengeluaran untuk kegiatan hulu migas				
e. Pengeluaran untuk kegiatan hulu migas				
f. Pengeluaran untuk kegiatan hulu migas				
g. Pengeluaran untuk kegiatan hulu migas				
h. Pengeluaran untuk kegiatan hulu migas				
i. Pengeluaran untuk kegiatan hulu migas				
j. Pengeluaran untuk kegiatan hulu migas				
k. Pengeluaran untuk kegiatan hulu migas				
l. Pengeluaran untuk kegiatan hulu migas				
m. Pengeluaran untuk kegiatan hulu migas				
n. Pengeluaran untuk kegiatan hulu migas				
o. Pengeluaran untuk kegiatan hulu migas				
p. Pengeluaran untuk kegiatan hulu migas				
q. Pengeluaran untuk kegiatan hulu migas				
r. Pengeluaran untuk kegiatan hulu migas				
s. Pengeluaran untuk kegiatan hulu migas				
t. Pengeluaran untuk kegiatan hulu migas				
u. Pengeluaran untuk kegiatan hulu migas				
v. Pengeluaran untuk kegiatan hulu migas				
w. Pengeluaran untuk kegiatan hulu migas				
x. Pengeluaran untuk kegiatan hulu migas				
y. Pengeluaran untuk kegiatan hulu migas				
z. Pengeluaran untuk kegiatan hulu migas				
Total Pengeluaran	2.050.451,44	18.229.828,20	2.020.732.301,04	22.290.356,46
Saldo Akhir	618.078,147	8.084.315,48	192.814,633	2.454.000,00

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (*audited*)

a. Korupsi dan pelanggaran terhadap Peraturan				
d. Salahurutan dan pelanggaran BPHN dan	1.722.341,21	1.184.110,22	1.722.341,21	1.184.110,22
e. Salahurutan dan pelanggaran PPKS	17.259.291,22	1.877.280,98	17.259.291,22	1.407.626,98
f. Salahurutan dan pelanggaran PT, Perumda, Perusahaan	128.282.942,22	1.007.900,97		
g. Pencabutan dan pelanggaran Permen dan Peraturan Kepala PT, Perumda, Perusahaan				
Corupsi Pengawasan dan Pelaksanaan	48.215,810	2.261.000,1	48.215,810	2.261.000,1
1. Ke-selamatan dan ke-aman	197.597,547	1.787.280,0	197.597,547	1.787.280,0
2. Ke-selamatan dan ke-aman		828.719,0		828.719,0
3. Pengalokasian sumber daya		1.142.681,0		1.142.681,0
4. Ke-selamatan dan ke-aman		841,98		841,98
5. Ke-selamatan dan ke-aman		379,00		379,00
6. Ke-selamatan dan ke-aman		2.261,00		2.261,00
Total Pengawasan	18.815.874.747,73	185.409.928,57	18.815.874.747,73	183.459.175,98
N. Kimbali/Pemenuhan II - III	857.110.163,27	8.788.923,08	857.110.163,27	8.021.348,84
9. Saldo Akhir per 31/12	12.064.828.728,89	12.805.051,92	12.064.828.728,89	12.337.128,76

Penjelasan:

- a) **Rekening Migas Nomor 600.004.11880**
Merupakan rekening yang digunakan sebagai perantara untuk menampung seluruh Penerimaan Negara dalam valuta asing yang berasal dari hasil kegiatan usaha hulu migas dalam rangka *Production Sharing Contract* (Kontrak Kerja Sama) dan untuk membayai kewajiban kontraktual migas Pemerintah serta membayai kewajiban-kewajiban Pemerintah lainnya tertida dengan kegiatan usaha hulu migas.
- b) **Penerimaan SDA Migas**
Merupakan penerimaan Negara dari hasil penjualan minyak bumi dan gas alam bagian Negara, penyelesaian/penyetoran dari KKKS atau piutang selinga terkait penjualan minyak bagian Negara.
- c) **PPh Migas**
Merupakan penerimaan alas pembayaran kewajiban PPh migas kontraktual yang disetor ke rekening migas Nomor 600.004.11880 sesuai dengan kontrak kerja sama dan berdasarkan ketentuan perpajakan.
- d) **Bonus**
Merupakan setoran OIGS jika skema bagi hasil yang menjadil kewajiban OIGS setelah mencapai akurasi dan tingkat produksi tertentu.
- e) **Transfer Material**
Merupakan setoran OIGS jika skema bagi hasil dalam rangka pemanfaatan aset KKKS berdasarkan persetujuan BPMIGAS dan dapat dipahitungkan sebagai *cost recovery*.
- f) **Koreksi Pembukuan Kredit/Debit oleh Bank Indonesia**
Merupakan koreksi-koreksi kredit yang diakibatkan adanya koreksi pembukuan ganda, atau pembukuan double yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
Koreksi pembukuan kredit oleh Bank Indonesia sebesar USD 69.886,547 atau setara dengan Rp1.687.722.538.631. Rincian sebagai berikut:
- Koreksi atas pembukuan ganda dua kali jurnal penerimaan oleh Bank Indonesia pada selingan SDA migas bulan Desember 2012 sebesar USD 45.955.201 atau setara dengan Rp1.418.745.777.117
- Koreksi atas pembukuan ganda dua kali jurnal penerimaan oleh Bank Indonesia pada pembayaran PPh dan PPN atas fee penjualan migas tahun 2010 sebesar USD 17.730.146 atau setara dengan Rp171.007.262.414
- g) **Retur/Pengembalian Kredit: Debit karena Salai Retaning**
Retur/pengembalian karena Salai Rekening sebesar USD 3.889/ atau setara dengan Rp706.776.980 merupakan koreksi kredit yang disebabkan adanya retur pembayaran kewajiban-kewajiban sektor migas karena penggantian rekening atau kesalahan rekening tujuan pihak ketiga. Rincian sebagai berikut:

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 *(Lanjutan)*

	<ul style="list-style-type: none"> - Pembayaran DMO Fee tahun 2011 yang diterima kembali di rekening migas Nomor 600.0004.1980 karena salah rekening KIKIS sebesar USD7.341 atau setara dengan Rp4.833.438. Transaksi ini sudah dibayarkan kembali sebagai pembayaran DMO Fee tahun 2012. - Pembayaran <i>reimbursement</i> PPN KIKIS yang diterima kembali di rekening migas Nomor 600.0004.1980 karena salah rekening KIKIS sebesar USD88.958 atau setara dengan Rp41.882.614.
ki	<p>Biaya Administrasi Bank Luar Negeri</p> <p>Merupakan potongan yang dilakukan oleh Bank koresponden KIKIS karena adanya retai atau pengembelian akibat salah rekening ketika pemerintah melakukan pembayaran atas kewajiban kontraktual. Potongan tersebut dapat dikurangi dengan berkurangnya jumlah nominal antara pembayaran aktual dengan jumlah nominal yang diatur.</p>
ü	<p>Penerimaan lainnya</p> <p>Penerimaan lainnya sebesar USD835.000 atau setara dengan Rp8.007.100.000 merupakan penerimaan di luar kegiatan usaha hulu migas yang disebabkan karena terjadinya kesalahan penyetoran oleh GS Energy Co. terhadap setoran ini telah dipindahbukan ke rekening KUN 600.602/11930 sebagai PPh ri luar migas berdasarkan permitas Ditjen Peja.</p>
ü	<p>Selisih Kurs Pemukuan Kredit/Debit</p> <p>Merupakan selisih kurs pada pembukuan Bank Indonesia akibat dari perubahan kurs transaksi harian dengan kurs neraca yang dilakukan oleh Bank koresia. Selisih kurs ini terjadi karena transaksi di rekening migas Nomor 600.0004.11930 dalam satuan mata uang US Dollar sedangkan pemukuan harian Bank Indonesia dalam Rupiah. Karena selisih kurs ini tidak berpengaruh pada saldo penerimaan migas.</p>
ki	<p>Pembayaran kepada pihak ketiga</p> <p>Merupakan penyelesaian kewajiban-kewajiban pemerintah kepada kontraktor dalam rangka pelaksanaan kontrak kerja sama migas baik yang diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan maupun yang telah diatur dalam <i>Production Sharing Contract (PSC)</i>. Kewajiban pemerintah tersebut meliputi pembayaran PBB migas ke daerah, <i>reimbursement</i> PPh ke kontraktor, Pajak Pererangan Jalan Non P.N dan Pajak Air Bawah tanah (PADRI), pembayaran DMO Fee KIKIS, pembayaran <i>underlying</i> KIKIS, pembayaran fee penjurian PT Pertamina (Persero), dan pembayaran anggaran BPMIGAS.</p>
ü	<p>Pemindahbukan ke Rekening KUN</p> <p>Terdiri atas pemindahbukan sebagai berikut.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemindahbukan PNBP SDA Migas merupakan proses pemindahbukan penerimaan SDA migas dari rekening migas Nomor 600.0004.11930 ke Rekening Kas Umum Negara Nomor 600.6024.11880 yang dilakukan setiap akhir bulan setelah diperhitungkan/dicadangkan dengan kewajiban-kewajiban kontraktual pemerintah dalam rangka pelaksanaan kontrak kerja sama migas. Proses pemindahbukan ini merupakan tahap akhir agar penerimaan SDA migas untuk rapat diakui sebagai realisasi pendapatan Negara. - Pemindahbukan PPh Migas merupakan proses pemindahbukan atas PPh migas kontraktor yang diterima di rekening migas Nomor 600.0004.11880 setelah dilakukan pembayaran kontraktor diterima. - Pemindahbukan PNBP Lainnya merupakan pemindahbukan atas penerimaan bonus dan transfer material yang diterima KIKIS ke rekening migas Nomor 600.0004.11930.
ni	<p>Pembayaran DMO Fee KIKIS</p> <p>Dalam pembayaran DMO Fee KIKIS sebesar USD1.432.433.524 atau setara dengan Rp14.098.138.500.125 termasuk risalamnya pembayaran DMO Fee kepada PT Pertamina EP dan PT Pertamina Hulu Energi (PHU) yang diperhitungkan kembali dengan kewajiban velas PT Pertamina (Persero) sebesar USD188.874.334 dengan rincian sebagai berikut.</p>

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

- Pembayaran DMD Fee kepada PT Pertamina EP untuk periode bulan Oktober s.d. November 2012 sebesar USD141.500.842 yang dipotongkan dengan penyelesaian kewajiban nilai PT Pertamina (Persero) sebesar USD141.820.842, dan pada saat yang sama disetorkan kembali ke Rekening KLN Nomor 600.E02411980 sebagai Pendapatan SDA Gas Alam USD14.920.042 atau setara Rp1.374.503.350.702 (Kode Akun 4212.11).
 - Pembayaran DMD Fee kepada PT PHE untuk periode bulan Agustus s.d. November 2012 sebesar USD46.863.482 yang dipotongkan dengan penyelesaian kewajiban nilai PT Pertamina (Persero) sebesar USD46.863.482, dan pada saat yang sama disetorkan kembali ke Rekening KUN Valas Nomor 600.502411980 sebagai Pendapatan SDA Gas Alam (Kode Akun 4212.11) USD46.953.452 atau setara Rp464.744.575.541.
- ii) Pembebasan *underwriting* KKKs**
 Dalam pembayaran *underwriting* KKKs sebesar USD191028581 atau setara dengan Rp1.047.280.395.729 termasuk didalamnya pembayaran *underwriting* kepada PT PHE yang dipotongkan kembali dengan kewajiban nilai PT PHE sebesar USD23.665.642 dan kewajiban nilai PT Pertamina (Persero) sebesar USD48.463.888 (total kewajiban nilai Pertamina yang dipotongkan adalah sebesar USD72.019.531). Pada saat yang sama disetorkan kembali ke Rekening KUN Nomor 600.502411980 sebagai Pendapatan SDA Gas Alam (Kode Akun 4212.11) USD72.019.501 atau setara Rp897.511.775.597.
- iii) Koreksi Pembukuan Debit oleh Bank Indonesia**
 Koreksi pembukuan kredit oleh Bank Indonesia sebesar USD163.686.347 atau setara dengan Rp1.687.788.388.731 merupakan koreksi-koreksi debit yang diakibatkan adanya koreksi pembukuan ganda, atau pembukuan ganda yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Rincian sebagai berikut:
- Koreksi atas pembukuan ganda dua kali jumlah penerimaan oleh Bank Indonesia pada setoran SCA migas bulan Desember 2012 sebesar USD145.866.201 atau setara dengan Rp1.416.781.837.317.
 - Koreksi atas pembukuan ganda dua kali jumlah penerimaan oleh Bank Indonesia pada pembayaran PPh dan PPN atas fee penjualan migas tahun 2010 sebesar USD17.730.146 atau setara dengan Rp171.007.262.414.
- iv) Retur/Pengembalian Debit karena Salah Rekening**
 Retur/pengembalian karena salah rekening sebesar USD66.366 atau setara dengan Rp641.882.614 merupakan koreksi debit yang diakibatkan adanya retur pembayaran reimbursement PPh KKKs yang diterima kembali di rekening migas Nomor 600.E00411980 karena salah rekening KKKs.
- v) Pengeluaran Lainnya**
 Pengeluaran lain-lain sebesar USD3.516.847 atau setara dengan Rp614.923.221.828 merupakan pengeluaran atau penuliharaan yang perumusannya dapat dirinci sebagai berikut:
- Pemindahbukuan atas PPh *offset* KKKs Golden Spike Energy sebesar USD2.000.000 atau setara dengan Rp1.817.000.000 ke Rekening Giro Kas Negara Nomor: 600.600411980 yang penuruskannya bukan sebagai pendapatan migas melainkan PPh *offset* IPPh umum.
 - Pemindahbukuan ke rekening KUN valas Nomor 600.502411980 sebesar USD895.000 atau setara dengan USD6.126.430.000 sebagai PPh di luar migas (PPh umum) yang berasal dari kesalahan penyetoran GS Energy Co sesuai permintaan Citjen Pajak.
 - Pengambilan kelebihan pembayaran PWP Hulu Pertamina tahun 2003 s.d. 2007 sebesar USD58.219.898 atau setara dengan Rp548.417.024.999 yang dipotongkan kembali dengan kewajiban nilai PT Pertamina (Persero) kepada Jemberitah sebesar USD66.218.888 dan pada saat yang sama disetorkan kembali ke Rekening KUN Nomor 600.502411980 sebagai Pendapatan SDA Gas Alam (Kode Akun 4212.11) USD58.418.698 atau setara Rp548.417.024.999.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

- Pengembalian kelebihan pembayaran *overbilling* KKKS migas sebesar USD6,282,948 atau setara dengan Rp80.718.830 dishahatkan karena adanya insaksi *Financial Oversight Report (FOR)* oleh BPMIGAS (sekarang SKMIGAS) yang menjadi dasar perhitungan *overbilling*.

d) Saldo Akhir

Dari total saldo akhir sebesar USD1,244,928,730 atau setara dengan Rp13.006.460.816 (000) (ekuivalen menggunakan kurs tengah BI tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp9,670:USD), di dalamnya termasuk cadangan untuk pembayaran kewajiban kontrak jual dan kewajiban lainnya terkait dengan kegiatan usaha hulu migas tahun 2012 yang belum dapat diselesaikan sampai akhir Desember 2012 sebesar USD816,218,871 atau setara dengan Rp7.863.177.122,538. Sedangkan sisanya sebesar USD628,708,768 atau setara dengan Rp6.122.283.693,371 merupakan pendapatan tahun 2012, pendapatan yang ditundakan dan akan dipindahbukukan pada tahun 2013 apabila telah lengkap dokumen pendukungnya.

3. Rekening Panas Bumi (Rek. 603.000.034930)

Pada Catatan C.2.3 (Rekening Pemerintah Lainnya) disajikan bahwa saldo Rekening Panas Bumi per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp347.992.721.305 dan Rp197.980.188.038. Rekening Panas Bumi (Nomor 603.000.034930) adalah Rekening Pemerintah Panas Bumi Kementerian Keuangan di Bank Indonesia yang digunakan untuk menampung penerimaan negara yang berasal dari kegiatan panas bumi di Indonesia serta menyelesaikan kewajiban pemerintah di bidang perpajakan (pembayaran kembali PPN, Pembayaran PBB) terkait dengan kegiatan usaha panas bumi. Berikut adalah mutasi Rekening Panas Bumi:

	URAIAN	31 Desember 2012	31 Desember 2011
I.	Saldo Awal ¹⁾	197.980.188.038	208.604.971.388
II.	Penerimaan:		
	1. Saldo awal pemerintah dan sektor Usaha Panas Bumi	1.140.282.601.337	696.136.825.631
	2. Bank Indonesia (Bul)	-	-
	Total Penerimaan	1.140.282.601.337	696.136.825.631
III.	Pengeluaran:		
	1. Pembayaran PBB Pertambangan Panas Bumi	2.100.860.210	200.834.828.816
	2. Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Panas Bumi	72.100.325.492	11.531.161.676
	3. Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PBB) Panas Bumi	1.138.339.330	1.624.322.000
	4. Pembayaran Jasa Laba	-	-
	5. Kurang Bayar (K/B)	-	-
	Total Pengeluaran	3.969.524.932	3.256.748.513
IV.	Kemungkinan Penurunan II - III	160.052.631.237	111.844.769.361
V.	Saldo Akhir - Rp 4	347.992.721.305	197.980.188.038

Penjelasan:

- Saldo rekening panas bumi per 31 Desember 2012 sebesar Rp347.992.721.305 di atas merupakan cadangan untuk pembayaran kembali (*reimbursement*) PPN panas bumi dan cadangan pembayaran PBB PT Geodipa Energi dengan rincian:
 - Cadangan pembayaran kembali (*reimbursement*) PPN panas bumi sebesar Rp333.739.195.010 kepada:
 - PT Pertamina (Persero) 48.413.774.568
 - Chevron Geothermal Salek, Ltd. 123.873.808.637
 - Chevron Geothermal Indonesia, Ltd. 108.225.074.168
 - Star Energy Geothermal (Wayang Windu), Ltd. 53.427.027.729

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

<p>b. Cadangan Pembayaran PBB pertambangan panas bumi untuk Wiyah Kerja Panas Bumi PT Geotipa Energy yang belum dapat dibayarkan sebesar Rp14.253.536.295 karena masih diperlukan klarifikasi landasan hukum atas pembayaran PBB untuk badan usaha tersebut dengan rincian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PBB pertambangan panas bumi Tahun 2010 sebesar Rp3.772.271.568 2. PBB pertambangan panas bumi Tahun 2011 sebesar Rp4.312.924.397 3. PBB pertambangan panas bumi Tahun 2012 sebesar Rp6.168.340.340 <ul style="list-style-type: none"> • Pembayaran kembali (reimbursement) PPN kepada Pengusaha panas bumi sebesar Rp72.113.826.432 adalah Pembayaran kembali (reimbursement) PPN yang pengajuannya pada Tahun 2010, 2011, dan 2012 dengan rincian sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembayaran Kembali PPN yang pengajuannya Tahun 2010 Rp9.793.234 2. Pembayaran Kembali PPN yang pengajuannya Tahun 2011 Rp 344.408.089 3. Pembayaran kembali PPN yang pengajuannya Tahun 2012 16.468.621.178 • Pemindahbukuan PNPB Pertambangan Panas Bumi ke Rekening Kas Umum Negara sebesar Rp738.630.663.398 terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. PNPB Pertambangan Panas Bumi Triwulan I tahun 2011 Rp174.102.786.339 2. PNPB Pertambangan Panas Bumi Triwulan II tahun 2012 Rp191.087.076.446 3. PNPB Pertambangan Panas Bumi Triwulan III tahun 2012 Rp233.687.729.601 4. PNPB Pertambangan Panas Bumi Triwulan IV tahun 2012 Rp160.062.072.014
<p>4. Uang Persediaan Pada Kementerian Luar Negeri</p> <p>Mekanisme pemberian UP</p> <p>Mekanisme pencairan dana untuk seluruh jenis belanja pada Satker Perwakilan RI di Luar Negeri menggunakan mekanisme UP. Permintaan UP untuk Satker Perwakilan RI di Luar Negeri ke KPKN diajukan oleh Kantor Pusat Setjen Kementerian Luar Negeri c.q. Biro Keuangan dalam mata uang Rupiah. Selanjutnya LP tersebut dikonversi ke dalam mata uang USD untuk dikirimkan ke masing-masing Satker Perwakilan RI di Luar Negeri.</p> <p>Mekanisme pertanggungjawaban penggunaan UP (revoising)</p> <p>Satker Perwakilan RI di Luar Negeri mengirimkan bukti-bukti dalam mata uang USD dan mata uang asing ke Kantor Pusat Setjen Kementerian Luar Negeri c.q. Biro Keuangan. Selanjutnya bukti-bukti tersebut dikonversi ke mata uang Rupiah dan dimintakan penggantian ke KPKN. Atas dasar penggantian LP dari KPKN, Kantor Pusat Setjen Kementerian Luar Negeri c.q. Biro Keuangan mengkonversi ke mata uang USD dan dikirimkan kembali ke Satker Perwakilan RI di Luar Negeri.</p> <p>Mekanisme Penyetoran Sisa UP</p> <p>Mekanisme penyetoran sisa UP pada akhir tahun anggaran Satker Perwakilan RI di Luar Negeri berbeda dengan satker pada umumnya yang berlokasi di dalam negeri. Mekanisme penyetoran sisa UP dimaksud adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Satker Perwakilan RI di Luar Negeri mengirimkan sisa UP dalam mata uang USD dan mata uang asing ke rekening Peminta (sisa UP Perwakilan) di Kantor Pusat Setjen Kementerian Luar Negeri; b. Kantor Pusat Setjen Kementerian Luar Negeri c.q. Biro Keuangan mengkonversi nilai USD dan mata uang asing ke Rupiah dengan kurs yang berlaku pada saat transaksi penyetoran tersebut; dan c. Setelah dikonversi, Kantor Pusat Setjen Kementerian Luar Negeri c.q. Biro Keuangan kemudian menyetorkan sisa UP ke rekening Kas Negara pada Bank Pos Persypsi di Jakarta. <p>Pada akhir tahun anggaran, mekanisme tersebut dapat mengakibatkan terjadinya Defisit in</p>

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

Transit, yaitu setoran sisa UP telah dicatat oleh Satker Perwakilan RI di Luar Negeri, namun belum tercatat pada Rekening Perantara Isisa UP Perwakilan di Kantor Pusat Setjan Kementerian Luar Negeri hingga melewati tahun anggaran. Kejadian tersebut akibat adanya perbedaan waktu dan mekanisme pembukuan internasional seperti proses diring. Selain permasalahan *Deposit in Transit* tersebut, pada Satker Perwakilan RI di Luar Negeri, terdapat juga "Saldo UP Minus" yang timbul dari penggunaan UP Satker Perwakilan RI Luar Negeri untuk keperluan mendesak yang tidak dianggarkan termasuk untuk keperluan atau (kementerian negara/lembaga lain). Dalam hal penggunaan UP tersebut tidak mendapat penggantian, maka untuk menutupi penggunaan UP tersebut digunakan saldo kas besi. Hal ini akan mengakibatkan catatan UP masih ada, sementara dana UP fisik kas sendiri sudah tidak ada. Jika sampai akhir tahun UP tersebut tidak mendapat penggantian maka akan diatlasifikasi menjadi aset lainnya dan terus muncul di Neraca Kementerian Luar Negeri.

6. **Penerbitan Barang Milik Negara**

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP terdapat beberapa temuan yang terkait dengan Barang Milik Negara (BMN), antara lain: (i) BMN yang disajikan pada Neraca belum dapat diyakini kewajarannya, (ii) Aset Tetap Kementerian Negara/Lembaga belum disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, (iii) prosedur pencatatan dan pelaporan barang milik negara tidak dilakukan sesuai dengan sistem akuntansi yang telah ditetapkan, dan (iv) sistem pengendalian interni pengelolaan atas BMN masih lemah.

Sebagai tindak lanjut terhadap temuan pemeriksaan BPK atas LKPP tersebut, Pemerintah telah dan sedang melakukan penerbitan BMN. Sebagai langkah awal, telah diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 jo. Keputusan 13 Tahun 2008 tentang Tata Penerbitan Barang Milik Negara. Penerbitan BMN dilaksanakan melalui inventarisasi, penilaian, dan sertifikasi seluruh BMN pada K/L, sehingga diharapkan terwujud penerbitan dan pengamanan BMN secara terarah, efektif, efisien dan akuntabel baik secara administratif, fisik, maupun hukum.

Langkah cobyek penerbitan terdiri dari seluruh aset tetap BMN yang perolehannya berasal dari APBN dan perolehan yang sah serta kekayaan negara lain-lain yang diuangbalkan dalam kerangka BPK. Pelaksanaan penerbitan BMN dilakukan mulai Oktober 2007 s.d. 31 Maret 2011 terhadap 74 K/L, Lembaga Pelayanan Publik, dan aset kekayaan negara lain-lain seperti Aset KKKS, BMKI, Aset Asing/Lain, Aset eks Kepabeanan, Aset eks BPAN, Aset eks DLL, dan Aset eks Keluaran PPA. Hasil inventarisasi dan penilaian BMN akan diterbitkan sebagai dasar seleksi atas nilai BMN yang telah disajikan pada Neraca Awal Pemerintah per 31 Desember 2004.

Hasil inventarisasi dan penilaian sampai dengan 31 Desember 2012 telah ditukukan pada LK/L sebesar Rp430.343.356.456.033. Rincian hasil inventarisasi dan Penilaian BMN disajikan pada **Daftar 35**.

8. **Laporan Barang Milik Negara**

Berdasarkan hasil rekonstruksi aset tetap per 31 Desember 2012, antara data Neraca K/L dan data Laporan BMN, terdapat selisih sebesar Rp3.454.658.668.037, dengan rincian:

(Miliar rupiah)

Jenis Aset Tetap (1)	Data Neraca LK/L (*) (2)	Data LBMN (3)	SELISIH (4) = (2) - (3)
tanah	99.170.000.000,00	99.170.000.000,00	0,00
Lapangan Basah	20.911.000.000,00	20.911.000.000,00	0,00
Gedung dan Bangunan	150.900.673.864,00	141.980.061.617,96	8.920.612.246,04
Perabot dan Jari-Jari	373.968.000.000,00	373.968.010.607,97	9.989.989,03
Aset Tidak Berwujud	14.981.600.000,00	14.981.600.000,00	0,00
Kendaraan Bermotor	10.907.280.000,00	10.907.280.000,00	0,00
Jumlah	1.899.293.662.724,00	1.899.248.321.399,92	(3.454.658.668,037)

(*) Tidak termasuk aset tetap yang ada di BRP NAD-Nas

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

Penjelasan selisih:

1 Selisih pada Tanah, antara lain:

Tanah pada LBMN Kementerian Nakertrans sebesar Rp124.806.641.732 diklasifikasi menjadi aset lain-lain pada Neraca karena merupakan aset tetap yang perolehannya berasal dari dana konsentrasi dan tugas pembantuan yang akan diserahkan ke Pemda. Tanah pada LBMN Kependas sebesar Rp83.647.600.000 diklasifikasi sebagai Aset Lain-lain pada Neraca karena merupakan aset kenilraan.

2 Selisih pada Peralatan dan Mesin, antara lain:

- Peralatan dan Mesin pada LBMN Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal sebesar Rp26.12.880.120 diklasifikasikan sebagai Aset Tetap Lainnya pada Neraca. Peralatan dan Mesin pada LBMN Kementerian Nakertrans sebesar Rp172.649.836.743 diklasifikasi sebagai Aset Lain-lain pada Neraca karena merupakan aset dari DK/TP yang akan diserahkan ke pemda.

3 Gedung dan Bangunan, antara lain:

Gedung dan Bangunan pada LBMN Kementerian Nakertrans sebesar Rp1.317.400.371.177 diklasifikasi sebagai Aset Lain-lain pada Neraca karena merupakan aset dari DK/TP yang akan diserahkan ke pemda. Gedung dan Bangunan pada LBMN Kementerian Pertanian sebesar Rp2.780.881.277 karena adanya pencatatan ganda pada sistem inaktif.

4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan, antara lain:

Jalan Irigasi dan Jaringan pada LBMN Kementerian Nakertrans sebesar Rp1.276.622.807.328 diklasifikasi sebagai Aset Lain-lain pada Neraca karena merupakan aset dari DK/TP yang akan diserahkan ke pemda. Jalan Irigasi dan Jaringan pada Neraca Kementerian Kesehatan sebesar Rp978.660.000 merupakan pengembalian jaminan infrastruktur tetapi dia yang pembayarannya per termin dan selesai pada TA 2013 sehingga belum dapat dicatat pada LBMN.

5 Aset Tetap Lainnya, antara lain:

- Aset Tetap Lainnya pada LBMN Kementerian Nakertrans sebesar Rp140.808.220.991 diklasifikasi sebagai Aset Lain-lain pada Neraca karena merupakan aset dari DK/TP yang akan diserahkan ke pemda.
- Aset Tetap Lainnya pada LBMN Kementerian Agama sebesar Rp7.250.212.970 sedang dilakukan penelusuran secara internal oleh Kementerian Agama.

6 Konstruksi Dalam Pengerjaan, antara lain:

KUP sebesar Rp62.681.080.363 pada Neraca Kementerian Agama sedang dilakukan penelusuran secara internal oleh Kementerian Agama.
- KUP sebesar Rp79.975.004.839 pada Neraca Kementerian Kesehatan karena pelaksanaan yang akan diselesaikan pada TA 2013 sehingga belum dapat dicatat pada LBMN dan jurnal koneksi BPK yang akan ditandatangani pada semester satu Tahun 2013.

7. Aset Bersejarah (Heritage Assets)

Aset Bersejarah pada K/L antara lain:

- Badan Pemeriksa Keuangan, aset tersebut berakasi di Gedung Museum BPK, Majenang. Barang bersejarah tersebut aset ini masih tercatat di kantor BPK Perwakilan Provinsi DI Yogyakarta.
- Kementerian Perhubungan berupa DUA Tugu Peringatan dan Bangunan Bersejarah.
- Kementerian Luar Negeri, berupa aset dari Museum Konferensi Asia Afrika (KAA) Bandung sebanyak 87 unit dan aset yang berada pada Gedung Paracasile yang pengelolaannya

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

berada pada Sekretariat Jenderal sebanyak 324 buah. Berdasarkan buku barang bersejarah Museum KAA Bandung Ases bersejarah di museum tersebut dikelompokkan menjadi enam kelompok:

- koleksi dengan bahan dasar logam sebanyak 17 unit;
 - koleksi dengan bahan dasar kayu sebanyak 84 unit;
 - koleksi dengan bahan dasar tekstil sebanyak 498 unit;
 - koleksi dengan bahan dasar kertas sebanyak 207 unit;
 - koleksi dengan bahan dasar audio visual sebanyak 139 unit; dan
 - koleksi dengan bahan dasar lain-lain sebanyak 16 unit.
- d. Arsip Nasional Republik Indonesia, berupa arsip dokumen negara yang terdiri atas
- Arsip Tekstual/Kertas sebanyak 29.120 meter linier;
 - Arsip Kartografi/Peta sebanyak 87.426 lembar;
 - Arsip Film sebanyak 66.868 reel;
 - Arsip Mikrofilm sebanyak 5.932 roll (negatif) dan 4.732 roll (positif); Arsip *Microfiche* sebanyak 720 *fische*;
 - Arsip Video sebanyak 27.360 kaset;
 - Arsip Rekaman Suara sebanyak 43.276 kaset dan arsip *reel to reel sound* sebanyak 871 reel;
 - Arsip *Optical Disc* sebanyak 2.120 keping;
 - Arsip foto sebanyak 1.663.000 lembar (negatif dan cetak);
 - Arsip foto belum terdapat sebanyak 221 box dan 282 album.
- e. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mempunyai empat unit aset bersejarah yang terdiri dari Tugu Peringatan, Tugu Pahlawan, Makam Belanda (Santiong), dan Patung Kepala Sapi.
- f. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pusat Geologi berupa Gedung Museum yang terletak di Jalan Diponegoro 57 Bandung beserta hal-hal yang berkaitan yang ada di dalamnya.
- g. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata telah menetapkan 598 Benda Cagar Budaya (BCB), yang dikelompokkan menjadi:
- Benda cagar budaya seperti: bangunan cagar budaya (candi, situs, tugu, gedung, tsb);
 - Benda bersejarah lainnya seperti benda bersejarah dalam klasifikasi peralatan besi mesin dan eset tetap lainnya, seperti: benda tua, benda antik, benda seni, pusaka, fosil, dsb.
- Aset Bersejarah yang dikelola Kementerian Budaya sebanyak 27.031 unit yang tergolong dalam Candi, Tugu Peringatan, Bangunan Bersejarah, Tenda Peringatan dan Mesjid, Patung dan bangunan, Jala dan jimat, dan benda seni dan eset tetap lainnya.
- Terdapat 6 unit rumah peninggalan sejarah dan dua unit mesjid bersejarah dari hasil pengurusan anggaran modal MAM 53 TA 2000. Setelah diteliti kembali melalui dokumen SPM dan SP2D aset tersebut berupa tiga rumah peninggalan bersejarah dan satu unit mesjid bersejarah merupakan aset milik Pemda Tk. I Sumatera Barat. Berdasarkan SK. 12/PL.402/Sekret/KPEK/II/2012 sudah dihibahkan pada tanggal 21 Februari 2012.
- h. Perpustakaan Nasional RI, berupa koleksi naskah kuno berjumlah 10.056 eksemplar raskah kuno
- i. Kementerian Hukum dan HAM menguasai aset bersejarah sebanyak 18 unit dengan rincian:
- tugu peringatan prasasti sebanyak satu unit;
 - alat kantor rumah tangga sebanyak empat unit; dan
 - eksakta sebanyak 13 unit.
- j. Kementerian Sosial RI menguasai aset bersejarah berupa Tugu Peringatan sebanyak lima

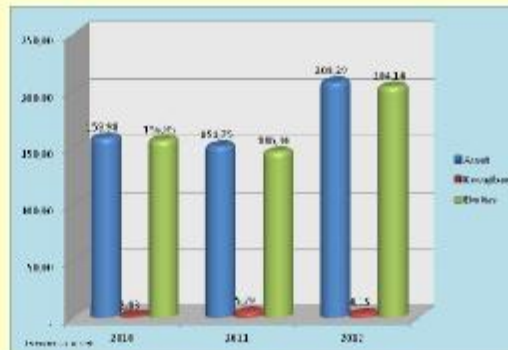
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

unit serta satu Lini Makam Bersaja.

- k. Kementerian Kehutanan, berupa Tugu Peringatan sebanyak satu unit dan Eksakta sebanyak 88 Bush
- l. Kementerian Pekerjaan Umum menguasai aset sejarah yang terdiri dari:
- tugu peringatan sebanyak 14 unit;
 - bangunan bersejarah sebanyak empat unit;
 - aset eksakta sebanyak dua unit; dan
 - aset non-eksakta sebanyak tujuh unit.

8. Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)

Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan BLU telah dijelaskan sebelumnya pada Catatan Penting Lainnya dalam Laporan Realisasi APBN. Perbandingan aset, kewajiban, dan ekuitas Saker BLU per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) disajikan dalam grafik di bawah ini.



Grafik 41 Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Badan Layanan Umum Tahun 2010, 2011, dan 2012

Ikhtisar Laporan Keuangan BLU disajikan pada Daftar 34

9. Penerapan Penyusutan Aset Tetap pada Badan Layanan Umum

Sesuai dengan amanat PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, seluruh Aset tetap selain tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Untuk penerapan penyusutan Aset Tetap telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan KMK Nomor 34/KM.06/2013. Sebagai pedoman bagi entitas Pemerintah Pusat dalam melakukan penyusutan, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Adapun tabel masa manfaat riil dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 50/KM.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Untuk Tahun 2012 yang diwajibkan untuk menerapkan penyusutan Aset Tetap adalah Satuan Kerja dengan pola pengelolaan keuangan BLU yang telah mengimplementasikan Sistem

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

Akuntansi Keuangan. Penyusutan Aset Tetap Sektoral BLL tersebut diungkapkan pada CaLK masing-masing LIKLI. Perhitungan Penyusutan Aset Tetap pada 105 Satuan Kerja Badan Layanan Umum disajikan pada Daftar 35.

10. Neraca Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara (BRR-NAD-Nias).

BRR-NAD Nias dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2006 tanggal 16 April 2006 tentang Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi yang selanjutnya menjadi UU dengan diterbitkannya UU Nomor 10 Tahun 2006 tanggal 25 Oktober 2006.

Masa tugas JHK berlaku empat tahun dan pengakhiran masa tugas BRR NAD-Nias diatur dalam PP Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pergerakan Masa Tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi IBRR Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, yaitu pada tanggal 18 April 2009.

Dalam rangka penyelesaian Aset-aset BRR NAD-Nias yang berakhir tanggal 15 April 2009, Pemerintah membentuk Tim Likuidasi BRR-NAD-Nias. Tugas Tim Likuidasi antara lain menyusun Laporan Keuangan Likuidasi Bagian Anggaran 094 IBRR NAD-Nias) Sampai dengan penyusunan LKPP Tahun 2012. LK Likuidasi belum diterbitkan, sehingga Neraca BRR NAD-Nias yang disajikan dalam LKPP Tahun 2012 adalah Neraca per 31 Desember 2011 dikurangi Mutasi Likuidasi sampai dengan 31 Desember 2012. Berikut ini adalah Neraca per 31 Desember 2009 (awal) dan Neraca per 31 Desember 2012.

**NERACA
BRR NAD-NIAS**

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2009 (Rp/Rs)	31 Desember 2012 (Rp/Rs)
Aset		
Aset Lancar		
Piutang Kepada Pihak Ketiga	516.969.200	
Uang Muka Belanja	24.548.204.400	
Belanja Dibayar Di Muka	2.119.589.510	
Persediaan	78.851.123.713	78.842.806.311
Jumlah Aset Lancar	106.133.886.823	78.642.806.311
Aset Tetap		
Tanah	572.821.719.812	452.520.454.536
Peralatan Dan Mesin	1.138.533.845.802	526.645.377.630
Gedung Dan Bangunan	3.251.098.588.510	428.582.870.307
Jalan, Pipa, Dan Jaringan	4.771.839.420.047	672.892.764.163
Aset Tetap Lainnya	27.433.007.111	15.021.199.484
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.019.831.238.580	329.112.111.636
Jumlah Aset Tetap	11.311.544.820.842	2.435.785.877.746
Aset Lainnya		
Aset Lain Lain	661.354.826.281	516.826.124.186
Jumlah Aset Lainnya	661.354.826.281	516.826.124.186
Jumlah Aset	12.079.073.827.366	3.029.364.908.243
Kewajiban		
Ekuitas Dana		
Pinjaman Dana Lancar		
Cicilan Piutang	27.212.747.110	
Cicilan Pinjaman	78.911.123.713	78.642.806.311
Jumlah Pinjaman Dana Lancar	106.133.886.823	78.642.806.311

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

Bentuk Dana Investasi		
Diuvestasikan Dalam Aset Tetap	11.511.544.820.842	2.455.785.877.746
Diuvestasikan Dalam Aset Lainnya	661.334.926.291	516.936.124.186
Jumlah Ekuitas Dana Investasi	11.872.879.747.133	2.852.722.001.932
Jumlah Ekuitas Dana	12.079.073.827.958	3.029.364.908.246
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	12.079.073.827.958	3.029.364.908.246

Perubahan nilai aset tetap dan aset lainnya dari Neraca per 31 Desember 2008 (sebelum) menjadi Neraca per 31 Desember 2012 adalah sebagai adanya kreasi dan penghapusan.

11. Badan Lainnya

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 236/PMK.06/2011 (107 Unit), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.06/2012, terdapat 105 unit Badan Lainnya.

terdapat beberapa Unit Badan Lainnya yang ditetapkan sebagai Bagian Anggaran tahun 2012, yaitu:

- a. Badan Pengawas Pemilu;
- b. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI);
- c. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI);
- d. Badan Pengelola Kawasan Pertambangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Serang;
- e. Badan Pengelola Kawasan Pertambangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Selanj;
- f. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT); dan
- g. Badan Informasi Geospasial, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional

Pada tahun 2012 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI), Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP TVRI), Badan Pengelola Kawasan Batari (BPK Batari) dan Badan Pengelola Kawasan Satang (BPK Sabang) yang sebelumnya merupakan Unit Akuntansi Pembantu Anggaran Bendahara Umum Negara untuk Belanja lain-lain (RA SBB.03) telah mendapatkan akses Bagian Anggaran sendiri berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-714/PMK.02/2011 tanggal 17 November 2011 tentang Penarikan Bagian Anggaran. Kolektifikasi Bagian Anggaran untuk masing-masing unit adalah:

No	Bagian Anggaran	Unit
1	Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (BPP)	111
2	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI)	111
3	Badan Pengawasan Kawasan Pertambangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPK Batari)	112
4	Badan Pengawasan Kawasan Pertambangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPK Sabang)	112

Sedang untuk Badan Pengelola Gedung Manggala Wanabhekti (Yayasan Sarana Wana Jaya), sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang Pengelolaan Gedung Pusat Kehutanan dan Taman Hutan, menyatakan bahwa Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1993 mengenai menunjukan Yayasan Sarana Wana Jaya selaku pengelola Gedung Pusat Kehutanan dan Taman Hutan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sebagai tindak lanjutnya, telah diterbitkan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Gedung Pusat Kehutanan dan Taman Hutan Beserta Bangunan Pelengkapya dari ketua Umum Pengurus Yayasan Sarana Wana Jaya kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan pada tanggal 6 Juli 2012.

Selain itu, berdasarkan hasil sementara dari Inventarisasi Unit Badan Lainnya sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perkebunan Nomor S-10237/PS/2012 tanggal 19 Desember 2012 tentang Inventarisasi Eksistensi Unit Badan Lainnya, terdapat beberapa Unit Badan Lainnya yang tidak aktif, belum aktif, atau likuidasi. UBL tersebut adalah:

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

- a. Badan Kebijakan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Nasional (BKPPAN);
- b. Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional (BPKN);
- c. Dewan Ibu Nasional (DBN);
- d. Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Dewan Kawasan);
- e. Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia (DPI/TI);
- f. Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI);
- g. Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Buruk untuk Anak (KAN-PPPTA);
- h. Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN);
- i. Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peringkat Tinggi Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (LKPKS Pace);
- j. Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK);
- k. Komite Antar Departemen Bidang Kelutanan;
- l. Badan Pertimbangan Parilman Nasional (BPN);
- m. Kawasan Ekonomi Khusus Sei Menkei;
- n. Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesang, dan
- o. Badan Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda.

Terdapat beberapa Lembaga Non Struktural yang ditetapkan sebagai Unit Badan Lainnya, terdapat empat LRS yang sedang dalam proses rekonstruksi penghapusan pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yaitu Komite Antar Departemen Bidang Kelutanan, Dewan Buku Nasional, Badan Kebijakan dan Pengendalian Perumahan dan Pemukiman Nasional dan Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.

Selanjutnya sesuai surat Kepala Biro Keuangan dan BUN Kementerian Kesehatan Nomor OT.01.01.041.2013 tanggal 7 Januari 2013 hal Hasil Inventarisasi Eksistensi UBL di lingkungan Kementerian Kesehatan, dinyatakan terdapat tiga UBL dan dua UBL yang tidak aktif, yaitu Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional (BPKN), dan Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK).

Berdasarkan surat Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian Nomor S-03/SEC.M.EKON.01/2013 tanggal 08 Januari 2013 hal Inventarisasi Eksistensi Unit Badan Lainnya bahwa untuk Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dilikuidasi dan diganti nama dengan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. Berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama nomor SJ.B.IV.47/2012 tanggal 17 Januari 2013 hal Inventarisasi Eksistensi Unit Badan Lainnya dinyatakan bahwa dalam lingkup Kementerian Agama terdapat lima Unit Badan Lainnya dan terdapat satu UBL, Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) yang belum aktif.

Berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor B.102/SJ-PR/2013 tanggal 23 Januari 2013 hal Penyediaan Unit Badan Lainnya di Lingkungan Kementerian terdapat empat UBL dan tidak termasuk Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Buruk untuk Anak (KAN-PPPTA).

Untuk Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional, dijelaskan bahwa KPRBN merupakan unit organisasi yang dibentuk dengan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2010 tentang *Revisi Mekanisme Reformasi Birokrasi* yang bertugas menetapkan kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional. Sejak pembentukannya, KPRBN tidak mengeluarkan APBN serta tidak mempunyai sekretariat.

Berdasarkan surat Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian Nomor S-03/SEC.M.EKON.01/2013 tanggal 08 Januari 2013 hal Inventarisasi Eksistensi Unit Badan

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

Lainnya bahwa untuk Devan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dilikuidasi dan diganti nama dengan Devan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus.

Berdasarkan surat Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor 3-113/Kemensos/RS/Set/RS/KS.01.01.01/2013 Januari 2013 hasil Inventarisasi Eksistensi Unit Badan Lainnya, bahwa UBL yang ada di bawah Kementerian Sosial hanya satu, yaitu Komisi Nasional Lanjut Usia. Selanjutnya sesuai surat Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor 6.73/Kemensos/RS/Set/RS/KU.02.01/01/2013 tanggal 23 Januari 2013 hasil Permintaan Laporan Keuangan Lembaga Non Struktural dan Yayasan Tahun 2012 (monev/tes) bahwa Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (UKP2KS Pecal belum pernah terbentuk sebagaimana riamanatkan dalam Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1989.

Untuk Badan Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda, berdasarkan informasi dari Kementerian Pekerjaan Umum Ditan Bina Marga, sampai saat ini Badan tersebut belum terbentuk sebagaimana riamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor RS Tahun 2011.

Untuk Kawasan Ekonomi Khusus Sei Menkei dan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung berada di bawah Devan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (Manko Perkeonomian), bahwa belum mendapat alokasi dana APBD pada tahun 2012.

Nomenklatur UBL in bermacam-macam, antara lain skadsm, badan, devan, komisi, komite, konsil, korps, lembaga, majelis, otorita, dan unit kerja. Kesekretariatan LNS biasanya berada di Kementerian atau instansi resmi pemerintah yang sudah ada sebelumnya, sedangkan pegawai seluruhnya berasal atau merupakan pinjaman dari Kementerian/Lembaga. Gaji pegawai sekretariat LNS sebagai pegawai negeri sipil (PNS) tetap dibayar oleh instansi asal, sedangkan dari LNS biasanya mereka mendapat tunjangan lembelan.

UBL dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pembentukan ini ada yang bersifat jangka pendek, namun ada pula yang bersifat jangka panjang mengingat pembentukan UBL tergantung dari kebutuhan Presiden selaku kepala pemerintahan dalam menjalankan roda pemerintahan guna menciptakan kesejahteraan bagi rakyat. Apabila Presiden membutuhkan unit baru guna mendukung tupoksi pemerintahan negara/lembaga maka Presiden membentuk UBL rangan melalui penetapan peraturan perundang-undangan. Peraturan yang digunakan untuk membentuk UBL dan lainnya dapat berupa:

1. Undang-undang;
2. Peraturan Pemerintah;
3. Peraturan Presiden; dan
4. Keputusan Presiden.

Dari 106 lembaga tersebut, lebih dari sepertiganya (36 lembaga) merupakan amanat yang tertulis dalam Undang-Undang. Memiliki legalitas pembentukannya, sebanyak 20% dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah. Sedangkan yang dibentuk berdasarkan Keputusan presiden sebanyak 60% dan 20% berdasarkan peraturan presiden.

Unit Badan Lainnya yang dibayai dari APBD murni, akuntansi atas transaksi keuangan dan laporan keuangannya sudah diisolilasikan dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga maupun dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. UBL yang menjadi satu kesatuan entitas akuntansi tersendiri, pengurusan administrasi keuangannya ditangani oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat atau pejabat struktural K.L yang memungut dan berbidai sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.

UBL sebagai entitas akuntansi lurdik pada ketentuan pasal 27 ayat 11) PP 8/2006 bahwa Kepala Satuan Kerja sebagai Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga menyampaikan Laporan Keuangan dan Kinerja interim sekurang-kurangnya setiap triwulan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga. Selanjutnya, Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Laporan Keuangan dan Kinerja interim Kementerian Negara/Lembaga berdasarkan

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

Laporan Keuangan dan Kinerja interim Kuasa Pengguna Anggaran dan menyampaikannya kepada Menteri Keuangan, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Negara Perencanaan Anggaran dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 pasal 2 memisahkan yayasan di lingkungan Kementerian Negara, Lembaga dalam ruang lingkup keuangan negara. Terdapat kata "pihak lain" pada butir g dan l yaitu:

- "Kekayaan negara, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan, lembaga, dan badan hukum";
- "Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah";

Dalam penjelasan pasal demi pasal disebutkan bahwa kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud pasal 2 butir l UU 17/2003 meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara, lembaga atau pemerintahan negara/daerah.

Berdasarkan ruang lingkup keuangan negara di atas, yayasan di lingkungan kementerian negara, lembaga atau yayasan yang terafiliasi dengan konsorsium negara/lembaga yang menurut Akta Notaris dan Anggaran Dasarnya didirikan atau dipimpin oleh pejabat pemerintah aktif di kementerian negara, lembaga tertentu atau yayasan yang menerima dan memanfaatkan aset negara dalam melaksanakan kegiatannya. Identifikasi atas yayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga ini diperlukan untuk kemajuan tata kelola pemerintahan melalui transparansi dan akuntabilitas sektor publik.

Identifikasi lebih lanjut atas yayasan di lingkungan pemerintahan negara/lembaga dipisahkan dari yayasan-yayasan yang berada dibawah institusi TNI. Hal ini karena karena pasal 76 Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI telah mengamanatkan bahwa dalam jangka waktu lima tahun sejak terbitnya Undang-undang Nomor 34 tahun 2004, Pemerintah harus mengambil alih seluruh aktifitas bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh TNI baik secara langsung maupun tidak langsung. Saat ini ada 900-an unit bisnis baik berupa yayasan maupun korporasi di bawah naungan TNI yang telah teridentifikasi oleh Badan Pengelola Transformasi Bisnis TNI yang diketuai oleh Sekretaris Kementerian Negara BUMN untuk diserahkan kepada Presiden. Selanjutnya yayasan maupun korporasi tersebut diranstrukturkan dalam korporasi atau dimasukkan dalam mekanisme APBN, sehingga TNI bisa berkonsentrasi mengembangkan profesionalitas tentara dan meninggalkan bisnis.

Dalam Laporan Keuangan UAP BUA PBL tahun 2012, menyajikan ekuitas bisnis atas beberapa Unit Badan Lainnya sebagai berikut.

1. Ditida Asahan;
2. Timan Min Indonesia Indah;
3. Yayasan Gedung Veteran RI;
4. Badan Amil Zakat Nasional; dan
5. Badan Wakaf Indonesia.

Intisir laporan keuangan Badan Lainnya (Lembaga Non Struktural dan Yayasan Pemerintah) disajikan dalam Daftar 36.

12. Aset Bekas Milik Asing/Cina

Aset Bekas Milik Asing/Cina (ADMAC) merupakan Aset yang dikuasai Negara yang berasal dari bekas idalah sebagai berikut.

1. Milik perumpulan-perkumpulan Cina yang dinyatakan terarang dan dibubarkan dengan

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 *(Lanjutan)*

pelaluran Penguasa Perang Pusat: melalui Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor Pit.032/PEPERPU/1956 jo. Keputusan Penguasa Perang Pusat Nomor Kpts/Peperpu/0428/1966 jo. Undang-Undang Nomor 60 Prp. Tahun 1960;

2. Perkumpulan/timun kepercayaan asing yang tidak sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia yang dinyatakan terlarang dan dibubarkan sesuai Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1957;
3. Perkumpulan/perkumpulan yang menjadi sasaran aksi massa/kesatuan-kesatuan aksi tahun 1966/1966 sebagai akibat keterlibatan Republik Rakyat Tjina IRRTI dalam pemberontakan G.30.S/PKI yang dibubarkan dan dikuasai oleh Penguasa Pelaksana Dekora Daerah sehingga asetnya dikuasai Negara melalui Instruksi Ralingram Kasdagam Nomor T-0403/G-6/6/66; dan
4. Organisasi yang didirikan oleh dan/atau untuk orang Tionghoa perantara (Ho Kiauw) yang bukan Warga Negara Asing yang telah mempunyai hubungan diplomatik dengan Negara Republik Indonesia dan/atau memperoleh pengakuan dari Negara Republik Indonesia, beserta cabang-cabang dan bagian-bagiannya.

Dalam rangka optimalisasi penyelesaian masalah Aset Bekas Milik Asing/Tjina (ABMA/C), dibentuklah dua tim, yaitu Tim Penyelesaian ABMA/C Tingkat Pusat dan Tim Asistensi Penyelesaian ABMA/C Tingkat Wilayah.

Penyelesaian ABMA/C diatur dalam PMK Nomor 188/PMK.08/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tjina, yang sebelumnya diatur dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-304/MK.03/1989 tanggal 12 April 1989 perihal Tanah dan Bangunan Gedung Bekas Sekolah Asing/Tjina. Sesuai dengan PMK Nomor 188/PMK.08/2008 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 64/PMK.08/2011, penyelesaian ABMA/C dapat dilaksanakan dengan beberapa cara sebagai berikut.

1. Dimantapkan status hukumnya menjadi Barang Milik Negara;
2. Dimantapkan status hukumnya menjadi Barang Milik Daerah;
3. Dilepaske penguasaannya dari Negara kepada pihak ketiga dengan cara pembayaran kompensasi kepada Pemerintah dengan menyalarkannya ke Kas Negara;
4. Dikembalikan kepada pemilik perolehan yang sah; atau
5. Dikeluarkan dari daftar Aset Bekas Milik Asing/Tjina.

Pada tahun 2012, terdapat penulasan pembayaran kompensasi ke kas negara atas ABMA/C Hotel Makmur Irh. BAKOM PKB Kab. Belitang yang dilepaske kepada pihak ketiga sejumlah Rp2.544.350.000,00 (dua miliar lima ratus empat puluh empat juta tiga ratus tiga puluh lima rupiah).

Sama dengan 31 Desember 2012, dari total 1.010, telah diselesaikan sebanyak 174 aset dengan rincian sebagai berikut.

1. Tahun 2009: 2 aset menjadi BMN dan 3 aset dilepaske ke pihak ketiga/sivasta (total 5 aset);
2. Tahun 2010: 6 aset menjadi BMN dan 14 aset menjadi BMD (total 20 aset);
3. Tahun 2011: 7 aset menjadi BMN, 29 aset menjadi BMD, dan 1 aset dilepaske ke pihak ketiga (total 38 aset); dan
4. Tahun 2012: 23 aset menjadi BMN, 39 aset menjadi BMD, dan 3 aset BVM dan BMD sebagai (total 112 aset).

Rincian Capaian Kinerja Penyelesaian ABMA/C di Tahun 2012 dapat dilihat pada **Daftar 37**.

13. Kewajiban Kontinjensi

- Untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, Pemerintah memberikan jaminan pada Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

Batubara yang dilaksanakan oleh PT. PLN (Persero) dan Program Percepatan Penyediaan Air Minum yang dilaksanakan oleh PDAM. Jaminan Pemerintah dimaksud diberikan atas risiko/kemungkinan PT. PLN (Persero) dan PDAM tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran kepada kreditor. Jaminan Pemerintah dimaksud ditentukan melalui Perpres Nomor 91.2007 dan Perpres Nomor 20.2008.

- Sesuai Perpres Nomor 91.2007, dalam rangka mendukung percepatan pembangunan pembangkit listrik berjenis bakar batubara oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN), Pemerintah memberikan jaminan penuh atas kewajiban pembayaran pinjaman PT. PLN (Persero) kepada kreditor perbankan.
- Dalam rangka mendukung percepatan penyediaan air minum, melalui Perpres Nomor 20.2008 Pemerintah memberikan jaminan sebesar 100% atas pembayaran sebagai kredit investasi PDAM kepada perbankan, sedangkan 30% sisanya menjadi risiko bank pemberi kredit. Dari 70% jaminan tersebut selanjutnya dilakukan pembagian pembelaan, dimana Pemerintah Pusat menanggung sebesar 40% (empat puluh persen), dan Pemerintah Daerah menanggung sebesar 30% (tiga puluh persen) dari seluruh kewajiban PDAM yang gagal bayar.
- Kewajiban Pemerintah untuk membayar kepada kreditor baru akan timbul jika pihak yang dijamin (PT PLN (Persero) dan PDAM) tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada kreditor (gagal bayar), sehingga terdapat unsur ketidakpastian atas timbulnya kewajiban Pemerintah. Terjadinya gagal bayar dimaksud sangat tergantung dengan kondisi keuangan dari PT PLN (Persero) dan PDAM. Selain itu, jumlah kewajiban yang mungkin timbul atas jaminan yang diberikan tidak dapat diukur secara pasti. Jumlah pasivanya baru akan diketahui pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, perhitungan alokasi anggaran dalam APBN didasarkan pada estimasi besaran jumlah kewajiban PT PLN (Persero) dan PDAM kepada kreditor jika tahun berjalan dilakukan dengan probabilitas gagal bayar dari kewajiban tersebut. Untuk memperkirakan terjadinya gagal bayar, digunakan rasio CICR (*Consolidated Interest Coverage Ratio*) dan DSCR (*Debt Service Coverage Ratio*).
- Sampai dengan semester II TA 2012 Surat Jaminan Pemerintah yang telah diterbitkan dalam rangka:
 - program percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara adalah sebanyak 30 surat jaminan Pemerintah untuk proyek pembangkit; dan 4 surat jaminan Pemerintah untuk proyek transmisi. Nilai total jaminan Pemerintah tersebut adalah sebesar Rp33.713.967.894,355 dan USD 3.938.718,574
 - program percepatan penyediaan air minum, telah diterbitkan sebanyak 4 Surat Jaminan Pemerintah Pusat untuk 4 PDAM (Kab. Bogor, Kab. Cianjur, Kab. Lombok Timur dan Kota Malang). Nilai total jaminan Pemerintah tersebut adalah sebesar Rp180.187.000.000 (seratus delapan puluh miliar seratus delapan puluh tujuh juta rupiah).
- Alokasi Anggaran kewajiban kontinjensi penjaminan Pemerintah TA 2012 sebagai berikut:

Program	Expense	Probability Default	100%	Recovery Rate	Expected Loss
Program PLN	33.713.967.894,355	1,4%	110%	0%	472.095.500,000
Program PDAM	180.187.000.000	1,14%	110%	0%	205.412.000,000

- *Expense* pembayaran kewajiban penjaminan Pemerintah kepada kreditor pada program percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara pada tahun 2012 diperkirakan mencapai Rp54.675 miliar. Dengan probabilitas gagal bayar 1,14% dan *recovery rate* sebesar 0%, maka *expected loss* kewajiban kontinjensi penjaminan Pemerintah yang mungkin timbul di tahun 2012 diperkirakan sebesar Rp623 miliar. Sehingga anggaran kontinjensi penjaminan Pemerintah untuk PT. PLN (Persero) yang dialokasikan dalam APBN TA2012 adalah sebesar Rp623 miliar (enam ratus dua puluh tiga

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 *(Lanjutan)*

miliar rupiah).

- *Exposure* pembayaran kewajiban penjaminan Pemerintah kepada kreditur pada program percepatan penyediaan air minum untuk tahun 2012 diperkirakan sebesar Rp28 miliar. Dengan probabilitas gagal bayar 16,8855 dan *recovery rate* sebesar 0% serta pertimbangan risiko lainnya, maka *expected loss* kewajiban kontinjensi yang mungkin timbul di tahun 2012 diperkirakan sebesar Rp4,1 miliar, namun untuk meningkatkan kepercayaan perbankan atas penjaminan Pemerintah untuk PDAM, maka alokasi anggaran kontinjensi penjaminan Pemerintah untuk program percepatan penyediaan air minum dalam APBN 2012 ditetapkan sebesar Rp10 miliar (sepuluh miliar rupiah).

- Kemungkinan Penggantian Oleh Pihak Ketiga

1) Kontinjensi untuk PT. PLN (Persero)

Sesuai dengan PMK Nomor 44-PMK.01.2009 Tentang Persyaratan Dan Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Pembongkaran Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara, apabila PT PLN (Persero) tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur, Pemerintah sebagai penjamin akan membayar kewajiban kepada kreditur PT PLN (Persero) sejumlah utang yang jatuh tempo. Kewajiban yang dibayarkan Pemerintah tersebut akan diperhitungkan sebagai piutang Pemerintah kepada PT PLN (Persero).

2) Kontinjensi untuk PDAM

Berdasarkan PMK Nomor 229-PMK.01.2009 Tentang Tatacara Pelaksanaan Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum dan PMK Nomor 81-PMK.01.2011 Tentang Perubahan atas PMK Nomor 229-PMK.01.2009, Pemerintah Pusat menanggung sebesar 70% dari pokok kredit investasi PDAM yang jatuh tempo dalam hal PDAM tidak mampu memenuhi kewajibannya (*payment default*). Dari 70% jaminan tersebut selanjutnya dilakukan pembagian pembebanan, dimana Pemerintah Pusat menanggung sebesar 40% (empat puluh persen), yang diperhitungkan sebagai pinjaman dari Pemerintah Pusat kepada PDAM, sedangkan 30% (tiga puluh persen) menjadi pinjaman Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. Apabila Pemerintah Daerah tidak membayar pinjaman kepada Pemerintah Pusat, maka akan dilakukan pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH).

- Tersdapat tuntutan hukum kepada Pemerintah yang telah *inbrecht* pada Kementerian Pertanian sebesar Rp1.000.000.000 berupa tuntutan pembayaran PT. Andriana Perdana atas pengalihan pajak *Rock Phosphate* kepada Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian.

- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial nasional yaitu dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang berbentuk badan hukum publik berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nir laba, keterbukaan, keterlaksanaan, akuntabilitas, portabilitas, kepastian bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelola Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan Peserta. Sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2011, terdapat dua bentuk BPJS, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. BPJS tersebut merupakan transformasi kelembagaan PT Askes (Persero), PT Jamsustek (Persero), PT TASPEN (Persero), dan PT ASABRI (Persero). Transformasi tersebut diikuti adanya pergeliban peserta, program, aset dan liabilitas, pegawai, serta hak dan kewajiban.

Sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2011, aset BPJS bersumber dari modal awal dari Pemerintah, yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 *(continued)*

sahan. Modal awal dimaksud untuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan ditetapkan masing-masing paling banyak sebesar Rp2.000.000.000.000 yang bersumber dari APBN, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2014. Terkait dengan alokasi anggaran TA 2013 untuk penyerahan modal jasa BPJS masih dibahas antara pemerintah dengan DPR.

Sesuai dengan Pasal 58 ayat (2) dan (3) UU Nomor 24 Tahun 2011, dalam hal terdapat kebijakan fiskal dan moneter yang mempengaruhi tingkat solvabilitas BPJS, Pemerintah dapat mengambil kebijakan khusus untuk menjamin kelangsungan program Jaminan Sosial, dan dalam hal terjadi krisis keuangan dan kondisi tertentu yang membahayakan perekonomian, Pemerintah dapat melakukan tindakan khusus untuk menjaga kesehatan keuangan dan kesinambungan penyelenggaraan program Jaminan Sosial.

14. BMN *like* *(like Asset)* TA 2012

BMN *like* *(like asset)* merupakan bagian dari BMN sehingga seluruh *like asset* dapat diakui sebagai BMN, sedangkan BMN *like* yang dilepaskan dan disajikan dalam Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Transaksi Khusus adalah BMN *like* yang sudah diserahkan kepada Pengelola Barang.

Karena sampai dengan Laporan ini disusun belum ada BMN *like* yang diserahkan kepada Pengelola Barang, maka Neraca BUK TK, BMN *like* yang sudah diserahkan ke Pengelola Barang per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp0,- (nihil).

Guna menindaklanjuti amanat Pasal 4 dan Pasal 30 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.08/2011 tentang Tata Cara Pengelola Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Memenuhi Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga, Direktorat BMN telah menerbitkan kebijakan sebagai berikut.

- 1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/KM.6/2012 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyalenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga Kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Untuk Dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat Keputusan Menteri Keuangan dan
- 2) Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor Per-06/KN/2012 tentang Prosedur Kerja dan Bentuk Surat Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyalenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga.

Dua peraturan di atas menjadi pedoman KPKNL, Kanwil DJKN, dan Kantor Pusat DJKN dalam melibatkan prosedur penetapan dan pengelolaan BMN *like*. Dari hasil monitoring terhadap beberapa KPKNL yang sudah melakukan kemitibasi tertulis kepada satker/satker ILAKPB) pengguna BMN yang terindikasi sebagai BMN *like*, Penatausahaan BMN *like* diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2012 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, yaitu:

Pasal 10 ayat (2)

Pelaksana Penatausahaan pada Pengelola Barang masing-masing terdiri pembukuannya harus:

- a. KPKNL membuat Daftar Barang Milik Negara Kantor Daerah berupa Tanah dan/atau Bangunan *like* (DBMN-KD-T&B), yang berada di wilayah kerjanya;
- b. Kanwil DJKN membuat Daftar Barang Milik Negara Kantor Wilayah berupa Tanah dan/atau Bangunan *like* (DBMN-KW-T&B), yang berupa gabungan DBMN-KD-T&B yang berada di wilayah kerjanya; dan
- c. CJKN membuat Daftar Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan *like* (DBMN-T&B), yang berupa gabungan DBMN-KW-T&B.

Pasal 23 ayat (1)

KPKAL menyusun Laporan BMN Kantor Daerah (LBMN-KD) berupa Tanah dan/atau Bangunan

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

siswa, yang terdiri dari:

- a. LBMN-KD Semesteran (LBMNS-KD) berupa Tanah dan/atau Bangunan siswa, menyajikan posisi BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan siswa pada awal dan akhir suatu semester serta mutasi yang terjadi selama semester tersebut, dan menyampaikannya kepada Kantor DJKN;
- b. LBMN-KD Tahunan (LBMNT-KD) berupa Tanah dan/atau Bangunan siswa, menyajikan posisi BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan siswa pada awal dan akhir tahun serta mutasi yang terjadi selama tahun tersebut, dan menyampaikannya kepada Kantor DJKN.

Pasal 24 ayat (1)

Kantor DJKN menyusun Laporan BMN Kantor Wilayah (LBMN-KW) berupa Tanah dan/atau Bangunan siswa, terdiri dari:

- a. LBMN-KW Semesteran (LBMNS-KW) berupa Tanah dan/atau Bangunan siswa, menyajikan posisi BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan siswa pada awal dan akhir suatu semester serta mutasi yang terjadi selama semester tersebut, yang datanya dihimpun dari LBMNS-KD berupa Tanah dan/atau Bangunan siswa, dan menyampaikannya kepada DJKN, dan
- b. LBMN-KW Tahunan (LBMNT-KW) berupa Tanah dan/atau Bangunan siswa, menyajikan posisi BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan siswa pada awal dan akhir tahun serta mutasi yang terjadi selama tahun tersebut, yang datanya dihimpun dari LBMNT-KD berupa Tanah dan/atau Bangunan siswa, dan menyampaikannya kepada DJKN.

Revisi Strategis:

Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Berdelera Umum Negara (UAKFA BUN TR) Pengelola BMN siswa yang sudah diseleksi kepada Pengelola Barang harus mengoptimalkan pengelolaan BMN siswa yang berada pada pengelolaannya melalui:

- Penetapan status perguruan BMN pada Kementerian/Lembaga yang membutuhkan BMN tersebut; dan
- Pemanfaatan dan penindahtanganan BMN siswa.

Pendapatan:

Pendapatan diperoleh dari pemanfaatan atau penindahtanganan BMN siswa yang berada di Pengelola Barang. Selama periode Tahun 2012, tidak terdapat Pemerintah Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diperoleh dari pemanfaatan dan/atau penindahtanganan BMN siswa milik.

Belanja:

Untuk periode Tahun 2012 tidak terdapat realisasi belanja dihilir karena belum ada BMN siswa yang harus dilakukan pemeliharaan dan pengamanan.

19. Pemanfaatan BMN eks KKKS Pertamina

Melalui surat Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nomor 1103-COJ000/2008-SC tanggal 15 Agustus 2008 perihal Usulan Penyelesaian Situasi Neraca Pembuka PT Pertamina (Persero) Indeks Lanjut Hapat Beli 28 ter 28 Juli 2008, dalam rangka koreksi laporan keuangan PT Pertamina (Persero) untuk menubahkan biaya atas penggunaan BMN eks KKS Pertamina senilai Rp16,2 triliun oleh PT Pertamina EP, telah disampaikan usulan sewa dengan pola *"fixed payment and fixed term"*, dengan klausul antara lain bahwa beban sewa dan pemeliharaan *operating and maintenance* menjadi unsur *cost recovery*. Selanjutnya dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-23/MK.6/2009 tanggal 21 Januari 2009, disampaikan persetujuan atas usulan sewa pemanfaatan aset eks KKS Pertamina Rp15,2 triliun.

Dalam perkembangannya, mengacu kesepakatan antara DJKN dan PT Pertamina (Persero) pada tanggal 23 Januari 2009 bahwa objek sewa adalah atas aset berupa bangunan, fasilitas Produksi, Harta Berwujud Modal Berjalan, dan Aset lainnya dengan nilai total Rp9.472 miliar, PT Pertamina (Persero) melakukan pembelian Sewa Aset dalam Laporan Keuangan Tahun 2003-2012 senilai total Rp2.728.233.645.596. Beban sewa BMN tersebut dibukukan sebagai Utang

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

Kepada Pemerintah karena belum dilakukan pembayaran sewa oleh PT Pertamina.

Penyetoran uang sewa ke Rekening Kas Umum Negara belum dapat dilakukan karena belum ditandatangani Perjanjian Sewa, saat ini terkendala menunggu kesepakatan dengan Kementerian ESDM dan Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengenai kapasitas objek sewa dan besaran *cost recovery*. Jmlah itu telah beberapa kali dilakukan pembahasan antara Direktorat Jenderal Kebijakan Negara, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian ESDM, SKK Migas & PT Pertamina, terakhir pada tanggal 28 Januari 2013, namun belum dapat dicapai kesepakatan.

a. Pemanfaatan Kilang LNG Arun Untuk Terminal Regasifikasi

Dalam rangka revitalisasi industri di Aceh, PT Pertamina (Persero) telah menyampaikan surat Nomor 226.LD.CDD.2011-30 tanggal 20 Mei 2011 hal Kebijakan Ekonomi Pemanfaatan Aset Kilang LNG Arun Untuk Proyek Revitalisasi Industri Aceh, yang pada isinya menyampaikan permohonan sewa aktif kilang LNG Arun yang meliputi tanah, bangunan, sarana pelengkap lainnya serta mesin dan peralatan lainnya, untuk digunakan sebagai Terminal Regasifikasi LNG. Selanjutnya, dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-314/MK.6/2011 tanggal 8 September 2011 hal Peretujuan Sewa Barang Milik Negara Berupa Aset Kilang LNG Arun Untuk Proyek LNG *Receiving and Regasification Terminal* dan surat Nomor S-854/MK.6/2011 tanggal 30 Desember 2011, telah disampaikan persetujuan Pemerintah atas rencana pelaksanaan sewa aktif kilang LNG Arun untuk Terminal Regasifikasi LNG oleh PT Pertamina, dengan nilai sewa tidak termasuk pajak sebesar Rp188.700.000.000 untuk jangka waktu lima tahun. Penandatanganan Naskah Perjanjian Sewa saat ini belum dapat dilakukan karena menunggu keabsahan Kementerian ESDM mengenai alokasi dan distribusi pasokan gas untuk kebutuhan industri di Aceh dan Sumatera Utara.

b. Pemanfaatan Aset oleh Jakarta International School

Head of Jakarta International School (JIS) dalam suratnya tanggal 17 Februari 2010 menyampaikan permohonan sewa tanah di Jalan Teungku Raya Nomor 55, Cilandak Jember usulan tarif untuk 5 tahun sebesar Rp23.666.066.766. Selanjutnya, dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-341/MK.09/2010 tanggal 27 September 2010 hal Sewa Menyewa Antara Menteri Keuangan Dan Jakarta International School, disampaikan bahwa sesuai ketentuan di bidang pengelolaan Aset Milik Negara, nilai sewa minimum tanah per tahun adalah sebesar Rp23.666.066.766, sehingga permohonan JIS tersebut belum dapat disetujui. Setelah itu, melalui surat Head of JIS tanggal 4 Oktober 2011 hal Peninjauan dari Notulen Rapat pada Hari Rabu Tanggal 14 September 2011 Di Jakarta International School, menyampaikan permohonan sewa dengan usulan tarif sebesar 60% (lima puluh persen) dari nilai yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam perkembangannya, melalui surat Head of JIS tanggal 22 Mei 2012 hal Lease on the Glandak Campus menyampaikan kesediaan untuk membayar sewa sebesar 100% (seratus persen) dari nilai yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk periode 1 Mei 2008 sampai dengan 29 Februari 2012 dan untuk periode sewa mulai 1 Maret 2012 sampai dengan 29 Februari 2017, akan dilakukan secara tahunan dengan mengacu ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara. Dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-533/MK.6/2012 tanggal 2 Oktober 2012 hal Tindak Lanjut Permasalahan Sewa Tanah oleh Jakarta International School, telah disampaikan persetujuan sewa tanah oleh JIS periode 1 Mei 2008 sampai dengan 29 Februari 2012 116 bulan dengan nilai sewa sebesar Rp50.377.717.599. Untuk itu, pihak Jakarta International School telah melakukan penyetoran uang sewa periode 1 Mei 2008 sampai dengan 29 Februari 2012 148 bulan sebesar Rp46.338.868.800 ke Rekening Kas Umum Negara untuk sewa periode 1 Maret 2012 sampai dengan 30 April 2013, telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai DUKV pada tanggal 24 September 2012. Saat ini dalam proses penelaahan persetujuan sewa.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (*Audited*)

Selanjutnya DJK akan melanjutkan dengan persetujuan sewa dan penandatanganan kontrak sewa dengan pihak Jakarta International School.

16. *Past Service Liabilities* Program Pensiun

Program Pensiun PVE diselenggarakan berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 1989 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Dana Pensiun dibentuk berdasarkan kontribusi Pemerintah, sebagai pemberi kerja, dan PNS, sebagai peserta. Namun demikian, selama ini untuk penyelenggaraan program pensiun dan program THT, iuran hanya d setor oleh peserta masing-masing sebesar 4,75% dan 3,25% dari gaji pokok.

Pemerintah menganut sistem pembayaran secara *pay as you go*, yaitu pembayaran pensiun dipenuhi secara langsung oleh Pemerintah melalui APBN pada saat pegawai memasuki masa pensiun dengan sistem *sharing* dengan Dana Pensiun. Pada APBN-P TA 2011 pembayaran pensiun 100% besar APBN. Sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 2006, Pemerintah meminta PT TASPEN melakukan *sharing* terhadap pembayaran manfaat pensiun seperti pada tabel 20.

Tabel 20 *Sharing* Pembayaran Manfaat Pensiun

No.	Periode	Sektor PNS		Sektor TNI	
		APBN	TASPEN	APBN	TASPEN
1	Periode 1989-1990	100%	0%	100%	0%
2	Periode 1991-1992	100%	0%	100%	0%
3	Periode 1993-1994	100%	0%	100%	0%
4	Periode 1995-1996	100%	0%	100%	0%
5	Periode 1997-1998	100%	0%	100%	0%
6	Periode 1999-2000	100%	0%	100%	0%
7	Periode 2001-2002	100%	0%	100%	0%
8	Periode 2003-2004	100%	0%	100%	0%
9	Periode 2005-2006	100%	0%	100%	0%
10	Periode 2007-2008	100%	0%	100%	0%
11	Periode 2009-2010	100%	0%	100%	0%
12	Periode 2011-2012	100%	0%	100%	0%
Total		100%	0%	100%	0%

Sistem pembayaran sebagaimana tersebut di atas mengakibatkan kekurangan pendanaan penyelenggaraan program pensiun dan THT. Berdasarkan hasil valuasi aktuaria independen per 31 Desember 2010 terdapat kewajiban Aktaria Program Dana Pensiun sebesar Rp1.809,42 triliun. Jumlah tersebut dihitung berdasarkan seluruh PVE, termasuk Veteran, TNI dan Polri yang telah menjalani masa pensiun sampai dengan 31 Maret 1989, serta pejabat negara.

Sejak 1 April 1989, pembayaran pensiun TNI dan Polri dikelola oleh PT Asabri (Persero). Berdasarkan hasil perhitungan aktuaria yang dilakukan oleh konsultan PT Sinapurna Jaja Hikmah per 25 April 2007 merujuk pada bentuk *past service liabilities* gabungan program pensiun dan berasi pada PT Asabri (Persero) per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp73,22 triliun.

Berdasarkan penjelasan di atas, total saldo *past service liabilities* untuk seluruh pensiun PNS, Veteran, TNI dan Polri adalah sebesar Rp 1.879,64 triliun. Saldo *past service liabilities* ini belum disajikan sebagai kewajiban dalam LKPP Tahun 2011.

Sesuai dengan data dalam Laporan Keuangan PT Taspen (Persero) Tahun 2012 (*Audited*) diketahui bahwa jumlah dana liptan atas iuran program pensiun sampai dengan 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp56,25 triliun. Rincian Dana Program pensiun per 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut.

	(dalam rupiah)
A. Saldo per 31 Desember 2011	42.193.509.260.318
B. Penerimaan	
Penerimaan Iuran Peserta	7.318.488.083.801
Penerimaan Dana dari Pemerintah	58.048.074.780.980
Hasil Investasi	3.510.707.848.075
Kenaikan Nilai Investasi	2.724.228.207.160
Pendapatan Lain-lain	25.885.387.231
Total Penerimaan	73.028.375.417.322
C. Pengeluaran	

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

Pembayaran Manfaat Pensiun	57.880.239.401,782
Penyelesaian Dana Jari Pemerintah	204.550.424,167
Rahasi Operasional	674.159.769,679
Total Pengeluaran	50.058.040.585,630
D. Perubahan Dana (3-C)	4.169.326.821,694
E. Kontribusi Bersih	(11.607.884.228)
F. Saldo per 31 Desember 2011 (A-D+E)	55.291.226.137,784

17. Dana Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL BUMN) (Peraturan Menteri BUMN bahwa 30% sudah diserahkan)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-06/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri, dan Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN. Dana Program Kemitraan BUMN bersumber dari penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2%, jasa administrasi pinjaman/majin/tagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan setelah dikurangi beban operasional, dan dari pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada. Untuk Dana Program Bina Lingkungan bersumber dari penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% dari hasil bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program BL.

Pelaksanaan dan Pengelolaan dana tersebut berada di BUMN Pembina (BUMN yang melaksanakan Program Kemitraan dan Program B.L. Koordinator BUMN Pembina (BUMN yang ditunjuk oleh Menteri BUMN untuk mengkoordinasikan BUMN Pembina di dalam suatu provinsi tertentu), BUMN Penyaur (BUMN Pembina yang menyalurkan Dana Program Kemitraan milik BUMN Pembina lain berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penyeluran, atau Lembaga Penyelur badan usaha selain BUMN atau lembaga bukan badan usaha yang melakukan kerjasama dengan BUMN Pembina dalam menyalurkan pinjaman Dana Program Kemitraan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penyeluran) dan utilitas penggunaannya tertera pada Kementerian BUMN.

Sampai dengan 31 Desember 2012 saldo dana PKBL BUMN Peduli berjumlah Rp329.378.726.406 yang terdiri dari saldo BL Peduli sebesar Rp150.223.875.146 dan Saldo BL Peduli lainnya atau BUMN Koordinator Sektor sesuai dengan Surat Menteri BUMN Nomor S 548/MBU/2012 tanggal 14 November 2012 sebesar Rp179.152.853.260.

Selain dana PKBL BUMN juga terdapat Dana Bantuan Tunai BUMN Peruli, yaitu Dana yang dikumpulkan dari dana BL BUMN Peduli dan merupakan bagian dari Dana Program Bina Lingkungan pada BUMN Pembina. Saldo Dana Bantuan Tunai BUMN Peduli 31 Desember 2012, per 31 Desember 2011, adalah sebesar Rp.14.631.641.815 dan Rp.14.180.602.676.

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-12/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-06/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, bahwa ketentuan atas setiap tahun berjalan sebesar 70% dari jumlah dana Program BL yang tersedia dapat disalurkan melalui Program BL BUMN Pembina dan 30% dari jumlah dana Program BL yang tersedia diperuntukkan bagi Program BL BUMN Peduli telah dihapuskan. Ketentuan tersebut mulai berlaku untuk tahun buku 2013.

18. Pembatalan BP MIGAS menjadi SIKK MIGAS

Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tanggal 13 November 2012 BP MIGAS dibatalkan status hukumnya, sehingga BP MIGAS secara hukum tidak ada lagi.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

Untuk melaksanakan Putusan MK dan menjamin keberlangsungan kegiatan usaha hulu migas diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 35 tahun 2012 Tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Migas dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3136 K/US/MBM/2012 dan 3136 K/US/MBM/2012 tentang Pergelitan Tugas, Fungsi dan Organisasi Dalam Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Kegiatan usaha hulu migas dialihkan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang migas sampai ditetapkannya peraturan yang baru.

Terkait dengan pendanaan SKSP Migas, sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Migas tersebut, Menteri Keuangan sesuai dengan surat Nomor S-694/MK.02/2012 tanggal 23 November 2012 hal Perencanaan Anggaran Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi telah menyelesaikan penggunaan sisa anggaran belanja BPMIGAS tahun 2012 untuk mendanai anggaran operasional SKSP Migas untuk periode pasca pembubaran BPMIGAS sampai dengan akhir TA 2012.

Untuk lebih lanjut mengatur penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu migas, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, antara lain diputuskan bahwa biaya operasional yang dipulaukan dalam kegiatan usaha hulu migas untuk tahun 2012 menggunakan sisa anggaran eks BPMIGAS tahun 2012.

Berdasarkan hal-hal tersebut, selama periode antara 14 November 2012 sampai dengan 31 Desember 2012, SKSP Migas sebagai unit yang melaksanakan tugas BPMIGAS setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, melakukan pengelolaan dana dan membiayai dana operasional menggunakan mekanisme yang sama dengan BPMIGAS sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi.

Terkait dengan pelaporan BPMIGAS pada LKPP Tahun 2012 telah diambil kebijakan sebagai berikut.

- a. Untuk aset, kewajiban, dan ekuitas BPMIGAS per 12 November 2012 dilaporkan pada BA BSE DS dan LKPP Tahun 2012 sebagai Investasi Pememen sebesar *net equity*; dan
- b. Untuk aset, kewajiban, dan ekuitas SKSP Migas yang diperoleh mulai 14 November 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 dilaporkan pada LK Badan Lainnya per LKPP Tahun 2012 sebagai Aset lainnya sebesar *net equity*;

Ikhtisar Laporan Keuangan BP Migas dapat dilihat pada **Daftar 38**.

19. Penjelasan terkait Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.

Tujuan dibentuknya OJK adalah agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- a) diselenggarakan secara terpadu, adil, transparan dan akuntabel;
- b) mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c) mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.

Secara kalamhagaan, Otoritas Jasa Keuangan berada di luar Pemerintah, tidak menjadi bagian dari kekuasaan Pemerintahan. OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai tugas, fungsi dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.

Fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, sejak tanggal 31 Desember 2012, beralih dari Menteri Keuangan ke Badan Pengawas

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK. Demikian juga fungsi, tugas, dan wewenang pengatur dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan. Sejak tanggal 31 Desember 2013, pindah dari Bank Indonesia ke OJK.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, Anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau pengutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Pembiayaan yang bersumber dari APBA tetap diperlukan untuk memenuhi kebutuhan OJK pada saat jurgatan dari pihak industri jasa keuangan belum dapat mendanai seluruh kegiatan operasional secara mandiri antara lain pada masa awal pembentukan OJK. Pada TA 2012, persiapan pendirian OJK dialokasikan pada APBN sebesar Rp212.031.418.000.

20. Rencana Tindak Lanjut Temuan BPK atas LKPP Tahun 2012

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2012, sesuai dengan ketentuan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pemerintah telah menyusun rencana tindak lanjut terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2012 dan menyampaikannya kepada BPK. Rencana tindak lanjut dimaksud dapat dilihat pada **Daftar 39**.

C.4. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL PELAPORAN

1. Pergantian Menteri Keuangan

Sesuai dengan ketentuan, Pemerintah menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBA berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) *seawakce* kepada BPK RI 3 (tiga) bulan sesudah tahun Anggaran berakhir. Untuk LKPP Tahun 2012, Menteri Keuangan Agus Martawardojo atas nama Pemerintah telah menyampaikannya kepada BPK pada tanggal 26 Maret 2013.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44/M Tahun 2013, Presiden membebankan Agus Martawardojo sebagai Menteri Keuangan karena akan ditetapkan menjadi Gubernur Bank Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 46/M Tahun 2013, Presiden menunjuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian M. Hatta Rajasa sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Keuangan pada tanggal 19 April 2013.

Dalam rangka penyelesaian LKPP Tahun 2012, Plt. Menteri Perekonomian telah menyampaikan LKPP Tahun 2012 *seawakce* kepada BPK pada tanggal 20 Mei 2013. LKPP *seawakce* tersebut disampaikan kepada BPK setelah disesuaikan dengan koreksi-koreksi temuan audit BPK.

2. Pencairan Dana Cadangan Subsidi/PSO dan Dana Cadangan DSH

Sampai dengan tanggal 28 Februari 2013, dari total dana cadangan subsidi/PSO dan dana cadangan DSH sebesar Rp 16.763.346.139.314 yang telah disalurkan kepada pihak ketiga sebesar Rp15.442.832.882.228 dan disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp1.320.413.257.086 dengan rincian sebagai berikut.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 *(lanjutan)*

(dalam rupiah)

No.	Jenis Cadangan	Jumlah Yang Telah Dikalkulasi (sebelum PPhK Migas)	Dana Cadangan yang Dibentuk dari PPhK Migas	Sisa Dana Cadangan	Jumlah Cadangan
1	Cadangan	47.462.400,00	0		47.462.400,00
2	Reservasi PPhK Migas	29.907.900,00	0		29.907.900,00
3	Reservasi Penjualan	22.337.870,00	0		22.337.870,00
4	Reservasi Penggantian	22.297.000,00	22.297.000,00		0,00
5	Reservasi Penyediaan	22.926.307,00	22.926.307,00		0,00
6	Cadangan Lainnya	2.804.000,00	0		2.804.000,00
7	Cadangan	2.333.200,00	0		2.333.200,00
8	Cadangan	19.000.000,00	0		19.000.000,00
	Sisa Total	271.826.800,00	85.180.000,00		357.006.800,00
9	PHN Balance	22.297.900,00	22.297.900,00		0,00
10	PHN Persempitan Biaya	22.297.900,00	22.297.900,00		0,00
11	JRH SDA	4.448.421.000,00	4.448.421.000,00		0,00
12	JRH PPhK Migas dan PHN lainnya	4.448.421.000,00	4.448.421.000,00		0,00
13	JRH PPhK Migas dan PHN lainnya	1.221.000.000,00	0		1.221.000.000,00
	Sisa Total	12.010.260.000,00	750.000.000,00		12.760.260.000,00
	Jumlah	158.889.200.000,00	1.420.000.000,00		160.309.200.000,00

Terkait dengan Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2012, dimana di dalamnya termasuk piutang yang berasal dari transfer material sebesar USD3.759.819, terdapat penyelesaian dari KKS sebesar USD188.081,16 yang telah dilakukan melalui mekanisme *cash recovery*, namun demikian informasi dan dokumen terkait penyelesaian tersebut baru diperoleh setelah tanggal neraca, yaitu melalui surat SKK Migas kepada Direktorat Jenderal Anggaran Nomor 0730/SKK.2000/2013/S4 tanggal 13 Mei 2013.

Saldo Rekening Migas Nomor 800.000411980 per 31 Desember 2012 yang berasal dari pendapatan yang ditunda atas PPhK SDA Migas sebesar USD245.855.322,90 telah dipindahbukukan ke Rekening KUR Nomor 600.602411980 pada tanggal 17 Februari 2013 bersamaan dengan pemindahbukuan saldo PPhK SDA Migas bulan Januari 2013 yang dicatat sebagai Pendapatan Gas Bumi.

Saldo Rekening Migas Nomor 600.000411980 per 31 Desember 2012 yang berasal dari pendapatan yang ditunda atas PNPB Migas lainnya sebesar USD7.341.594,97 telah dipindahbukukan ke Rekening KUR Nomor 600.602411980 pada tanggal 15 April 2013 dan dicatat sebagai Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (audited)

D. PENJELASAN ATAS POS-PDS LAPORAN ARUS KAS

D.1. IKHTISAR LAPORAN ARUS KAS

D.1.1. SALDO AWAL KAS

Saldo Awal Kas per 1 Januari 2012 sebesar Rp 108,148,032,258 triliun

Saldo Awal Kas BUN, KPPN dan BLU per 1 Januari 2012 adalah sebesar Rp 108.148.032.258 yang merupakan saldo akhir Kas BUN, KPPN, dan BLU per 31 Desember 2011 setelah disesuaikan dengan koreksi saldo awal kas pada TA 2012. Fincian saldo awal Kas BUN, KPPN, dan BLU adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2012 (audited)	(dalam rupiah) TA 2011 (audited)
Saldo Awal Kas BUN, KPPN & BLU		
Kas BUN di 31	82.413.918.258,40	78.606.376.358,79
Kredit KPPN	11.870.516.947,66	9.218.617.887,73
Kas Rekening Khusus	-	2.024.234.033,87
Kas pada BLU	13.058.018.578,05	7.287.580.742,17
Kas Hibah Langsung K/L yang telah disahkan	428.120.502,354	48.185.013,485
Saldo Awal Kas BUN, KPPN & BLU Sebelum Penyesuaian	107.842.612.387,387	98.985.083.738,159
Penyesuaian Saldo Awal		
Penyesuaian Saldo Awal Kas pada BLU (**)	105.511.298,378	265.544.037,100
Penyesuaian Saldo Awal Kas Hibah (***)	118.838.388,008	
Penyesuaian Saldo Awal Kas KPPN (****)	3.858,48	1381.572,5851
Total Penyesuaian Saldo Awal	305.453.644,869	26.183.864,543
Saldo Awal Kas BUN, KPPN & BLU Setelah Koreksi	108.148.088.032,258	99.011.273.800,702

Keterangan:

(**) Penyesuaian Saldo Awal Kas pada BLU sebesar Rp105.511.298,378 merupakan penyesuaian atas Kas pada BLU berdasarkan data dari KPPN sebagai berikut:

KPPN	Jumlah (Rp)
KPPN Bengkulu	888.888,424
KPPN Jakarta 1	317.283.818,774
KPPN Serang	1200.000,000
KPPN Dandang I	5.813.866,840
KPPN Surabaya	8.488.338,423
KPPN Yogyakarta	104.383.910,415
KPPN Denpasar	20.155.878,382
KPPN Surakarta	150.300.000,000
KPPN Mataram	10.087.788,404
KPPN Gorontalo	1582.888,577
KPPN Jakarta 3	132.339.943,940
KPPN Medan 2	378.987,770
KPPN Sukasumi	237.467,776
Total	185.511.298,378

(***) Penyesuaian Saldo Awal Kas Hibah sebesar Rp 118.838.388,008 merupakan penyesuaian atas Kas Hibah Langsung pada Saldo K/L yang berada di wilayah kerja KPPN yaitu:

KPPN	Jumlah (Rp)
KPPN Jakarta 1	120.000.000,000
KPPN Khusus Jakarta VI	150.318,544
KPPN Tasikmalaya	111.297,447
Total	118.838.388,008

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Audited)

***) Penyesuaian Saldo Awal Kas KPPN sebesar Rp3.058.481 merupakan penyesuaian atas Kas KPPN diAnggar, Baikrapan, Petalangan, Jakarta Khusus VI dan BLN.

D.1.2. PERUBAHAN KAS

Kenaiikan (penurunan) kas pada 2012 sebesar minus Rp38,57 triliun

Kenaiikan (penurunan) kas dari berbagai aktivitas pemerintah sepanjang TA 2012 dan TA 2011 adalah sebagai berikut:

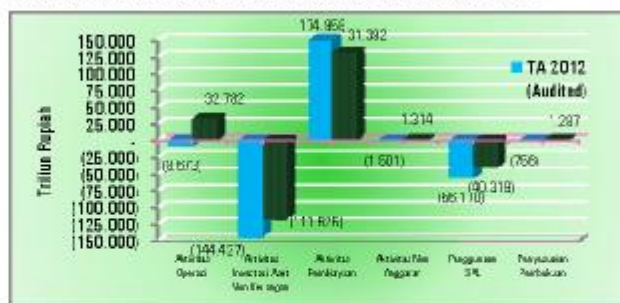
	(dalam rupiah)	
Uraian	TA 2012 (Audited)	TA 2011 (Audited)
kenaikan (Penurunan) Kas dari Aktivitas Operasi	15.874.088.987.571)	32.781.858.489.177)
kenaikan (Penurunan) Kas dari Aktivitas Investasi		
Asel Non Keuangan	1144.428.528.430.405)	1117.824.715.204.158)
kenaikan (Penurunan) Kas dari Aktivitas Pendayaan	175.158.189.320.375)	131.382.355.224.420)
kenaikan (Penurunan) Kas dari Aktivitas Non Anggaran	(1.501.482.800.163)	1.313.542.315.553)
Koreksi Pembukaan:		
Penyesuaian SAL **)	(53.170.000.000.000)	(40.318.043.048.030)
Penyesuaian Pembukaan ***)	155.835.540.848)	1.287.457.711.323)
Kenaiikan (Penurunan) Kas	36.809.729.938.470)	8.821.333.180.686)

**) Penyesuaian SAL pada saat yang bersamaan diakui juga sebagai Pemintaan Pembayaan yang disajikan pada aktivitas jembayasan.

***) Penyesuaian Pembukaan terdiri dari:

	(dalam rupiah)	
Uraian	TA 2012 (Audited)	TA 2011 (Audited)
Pergantian Pendapatan A yang lalu	138.301.981.848)	112.364.446.513)
Koreksi Uang Persediaan	(17.579.432.172)	(6.611.627.242)
Koreksi Rekening 'r'	(552.248)	(212.016.651)
Selisih Kurs Kas BLN	(734.358.401.881)	1.404.184.301.745)
Pendapatan Anggaran Lain-lain		52.332)
Koreksi kas Hilang Langsung	11.338.483.035)	(372.880.730)
Koreksi Kas pada BLU		(371.080.530)
Koreksi Transfer		4.173.986)
Koreksi Kas KPPN	(30.883.583.428)	212.363.534)
Koreksi Pembatalan	(144)	77)
Koreksi Kas di BLN	333.832.873.903)	(13.064.014.611)
Jumlah Penyesuaian Pembukaan	(755.835.540.848)	1.287.457.711.323)

Komposisi Arus Kas Bersih dari tiap aktivitas disajikan dalam Grafik 42.



Grafik 42 Komposisi Arus Kas Bersih per Aktivitas

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (audited)

Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2012 sebesar Rp90,242,524,455,636 triliun

SALDO AKHIR KAS DAN BANK

Saldo Akhir Kas dan Bank per 31 Desember 2012 sebesar Rp90,242,524,455,636 merupakan kas Pemerintah Pusat yang tersedia dan siap digunakan untuk membiayai aktivitas pemerintahan tahun berikutnya, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)		
Uraian	TA 2012 (audited)	TA 2011 (audited)
Kas BUN, KPPN, BLU & Hibah Langsung *)	71.673.340.493.780	107.342.612.387.387
Rekening Pemerintah Lainnya	13.405.665.498.448	6.616.662.720.213
Kas di Bendahara Pengeluaran	2.13.468.828.221	282.786.837.859
Kas di Bendahara Penerimaan	185.160.468.078	252.600.321.124
Kas Lainnya dan Setara Kas **)	5.447.004.782.840	8.327.766.218.087
Kas pada BLU yang Belum Disahkan ***)	80.029.529.782	100.924.694.157
Kas pada BLU yang telah Disetujui Investasi Jangka Pendek	1768.126.137.193	(170.663.018.069)
Jumlah Saldo Akhir Kas	90.242.524.455.636	121.251.988.260.868

*] Saldo Akhir Kas BUN, KPPN, BLU, dan Hibah Langsung terdiri dari:

(dalam rupiah)		
Uraian	TA 2012 (audited)	TA 2011 (audited)
Rekening Kas BUN di BI	37.382.696.367.039	82.463.618.288.407
Rekening Kas di KPPN	16.207.882.323.873	11.870.666.947.661
Kas di BLU yang Sudah Disahkan	17.331.616.069.465	13.089.016.678.966
Hibah Kas Langsung K/L yang Sudah Disahkan	666.246.733.463	429.120.662.364
Jumlah	71.673.340.493.780	107.342.612.387.387

Kas di BLU yang sudah disahkan TA 2012 sebesar Rp17,331,515,069,455 termasuk Kas yang didepositokan (investasi jangka pendek) sebesar Rp768,126,137,193 oleh Satker BLU.

**] Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp5,444,975,396,497 berasal dari saldo menurut neraca sebesar Rp6,103,251,516,103 dikurangi dengan Kas dari hibah langsung K/L yang sudah disahkan sebesar Rp656,246,733,463

***] Kas pada BLU sebesar Rp80,029,529,782 merupakan Kas pada BLU yang belum disahkan oleh KPPN dan beberapa koreksi, dengan perhitungan sebagai berikut.

(dalam rupiah)		
Uraian	TA 2012 (audited)	TA 2011 (audited)
Total Kas pada BLU menurut K/L	1884348482034	13.019.588.267.083
Kas pada BLU yang telah Didepositokan (Investasi Jangka Pendek)	768.126.137.193	170.663.018.069
	17.411.544.599.277	13.189.547.273.122
Dikurangi:		
Kas pada BLU yang telah disahkan KPPN	17.331.616.069.466	13.089.016.678.966
Total Kas pada BLU yang belum disahkan	80.029.529.782	100.924.694.157

Kas pada BLU yang telah disahkan KPPN sebesar Rp17,331,515,069,465 berasal dari perhitungan sebagai berikut.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

Uraian	(dalam rupiah)	
	TA 2012 (revisi)	TA 2011 (revisi)
Saldo awal BLU	13.039.016.173.961	7.287.560.742.179
Koreksi Saldo Awal Kas pada BLU	236.511.293.379	26.554.437.138
Pendapatan BLU	21.734.285.381.034	20.103.825.383.771
Belanja BLU	(17.047.305.768.813)	(14.328.733.108.623)
Koreksi Pembukuan Kas pada BLU	(50.303.000.030)	(371.080.530)
Kas pada BLU yang telah dialihian (PPN)	17.331.915.089.455	13.025.310.978.982

D.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN ARUS KAS

Penjelasan atas Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat Tahun 2012 diuraikan sebagai berikut:

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus Kas dari Aktivitas Operasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan operasional Pemerintah selama satu periode yang berakhir 31 Desember 2012. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi adalah sebesar minus Rp8.874.066.937.571, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	(dalam rupiah)	
	TA 2012 (revisi)	TA 2011 (revisi)
Arus Kas Masuk	1.336.330.306.820.707	1.205.468.550.503.440
Dikurangi Arus Kas Keluar	1.345.212.463.810.258	1.176.887.862.013.831
Arus Kas Bersih	(8.874.066.937.571)	32.761.586.488.577

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi menunjukkan bahwa pendapatan operasional Pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai seluruh kegiatan operasional Pemerintah. Jika dibandingkan dengan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2011, terdapat penurunan arus kas bersih sebesar Rp41.655.763.476.147.

D.2.1. Penerimaan Perpajakan

Penerimaan Perpajakan pada TA 2012 sebesar Rp980.518.139.319.319 terdiri dari Penerimaan Pajak Dalam Negeri sebesar Rp930.661.939.509.438 dan Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional sebesar Rp49.656.293.809.881. Penerimaan Perpajakan ini merupakan penerimaan Pemerintah yang diimpun dari sektor perpajakan sepanjang TA 2012 setelah dikurangi pengembalian pendapatan perpajakan. Rincian Penerimaan Perpajakan TA 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

Uraian	(dalam rupiah)	
	TA 2012 (revisi)	TA 2011 (revisi)
Pajak Dalam Negeri		
Pajak Penghasilan (PPH)	465.068.641.548.056	421.121.712.723.216
Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah (PPN & PPnBM)	337.584.577.485.285	277.800.076.373.384
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	28.988.882.702.285	25.893.164.921.596
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	-	(730.151.676)
Dukai	85.027.881.221.457	77.010.010.613.785
Pajak Lainnya	4.210.876.948.339	3.928.152.143.311
Jumlah Penerimaan Pajak DN	530.861.839.508.433	819.752.426.342.422
Pajak Perdagangan Internasional		

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar minus Rp8,87 triliun

Penerimaan Perpajakan Rp980,52 triliun

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (revisi)

Bes Masuk	28.418.369.044,41E	25.265.863.303,37E
Bes Keluar	21.297.694.765,46E	26.855.602.747,58E
Jumlah Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional	48.656.293.808,88E	54.121.466.056,85E
Penerimaan Perpajakan	580.518.133.318,319	873.873.382.398,381

Dengan demikian, Penerimaan Perpajakan dalam TA 2012 lebih besar Rp 106.644.240.919,938 atau 12,20 persen dari Penerimaan Perpajakan dalam TA 2011.

Pajak Penghasilan sebesar Rp 465,87 triliun

D.2.1.1. Pajak Penghasilan

Penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) pada TA 2012 adalah sebesar Rp 465.068.641.548,059 yang berasal dari Pajak Penghasilan Migas dan Non Migas. Rincian penerimaan kas dari PPH pada TA 2012 dan TA 2011 adalah sebagai berikut.

Uraian	(dalam rupiah)	
	TA 2012 (revisi)	TA 2011 (revisi)
PPH Migas		
PPH Minyak Bumi	22871020006270	25.841.782.121.00E
PPH Gas Alam	50484.720.418.488	47.153.704.823.05E
PPH Migas Lainnya	127.135.528	
Jumlah PPH Migas	83.460.882.001.301	58.872.731.12.80E
PPH Non Migas		
PPH Pasal 21	78589.440.702.004	60.751.500.274.22E
PPH Pasal 22	5.509.954.818.126	4.946.458.844.74E
PPH Pasal 23 Impor	31.811.184.408.871	28.281.747.589.03E
PPH Pasal 23	20.802.681.144.663	18.702.757.353.01E
PPH Pasal 25/28 Orang Pribadi	3763.482.234.948	5.287.028.813.47E
PPH Pasal 25/28 Eorban	152.131.851.530.030	154.809.563.362.73E
PPH Pasal 26	24.811.565.438.335	27.239.272.555.18E
PPH Final dan Faktal LN	60.387.050.035.018	50.818.584.852.04E
PPH Non Migas Lainnya	31.332.640.185	40.522.803.818
Pendapatan PPH Dihanguskan Pemerintah	3.661.960.413.969	5.338.656.314.00E
Jumlah PPH Non Migas	381.008.773.947.728	398.026.218.973.37E
Jumlah Pajak Penghasilan	465.068.641.548,059	431.121.712.728,31E

Dengan demikian, penerimaan Pajak Penghasilan pada TA 2012 lebih besar Rp 33.947.928.820,743 atau 7,67 persen dari penerimaan TA 2011

PPN dan PPhBM sebesar Rp 337,58 triliun

D.2.1.2. Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah (PPN & PPhBM) untuk TA 2012 adalah sebesar Rp 337.584.577.488,285. Rincian Penerimaan PPN & PPhBM adalah sebagai berikut.

Uraian	(dalam rupiah)	
	TA 2012 (revisi)	TA 2011 (revisi)
PPN dan PPhBM Dalam Negeri	202.305.584.710.548	185.218.964.383.33E
PPN dan PPhBM Impor	135.002.883.134,371	112.374.211.363,301
PPN dan PPhBM lainnya	198.119.843.368	206.900.393,821
Jumlah PPN dan PPhBM	337.584.577.488,285	277.800.376.678,284

Dengan demikian, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah pada

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (audited)

TA 2012 lebih besar Rp59.784.900.808.931 atau 2,52 persen dari TA 2011

D.2.1.3. Pajak Bumi dan Bangunan

Penerimaan PBB
sebesar Rp28,81 triliun

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada TA 2012 adalah sebesar Rp28.968.862.702.282. Rincian dari Penerimaan PBB tersebut adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2012 (audited)	TA 2011 (audited)
PBB Pedesaan	1.144.431.83.866	1.177.346.608.823
PBB Perkotaan	8.104.088.730.081	8.803.174.032.018
PBB Pertambangan	1.107.248.987.455	885.854.845.312
PBB Kehutanan	254.533.050.441	251.302.007.483
PBB Perikanan	585.247.025.160	397.619.412.898
PBB Migas	19.783.314.708.679	20.477.766.677.663
Jumlah PBB (Neto)	28.968.862.702.282	28.893.164.324.380

Dengan demikian, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada TA 2012 lebih kecil Rp824.301.622.114 atau 2,89 persen dari TA 2011

D.2.1.4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Tidak ada penerimaan
BPHTB

Pada TA 2012, Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tidak dicatat lagi karena telah diserahkan ke pemerintah daerah. Sedang pada TA 2011 masih ada realisasi Penerimaan BPHTB sebesar minus Rp730.151.676. Realisasi Penerimaan BPHTB pada TA 2011 ini merupakan pengembalian BPHTB.

D.2.1.5. Cukai

Penerimaan cukai
sebesar Rp95,02 triliun

Penerimaan Cukai pada TA 2012 adalah sebesar Rp95.027.881.221.457, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2012 (audited)	TA 2011 (audited)
Cukai Hasil Tembakau	80.653.838.824.874	73.261.428.888.908
Cukai Ethyl Alkohol	156.631.716.866	162.663.437.390
Cukai Minuman mengandung Cttv Alkohol	4.232.843.126.012	3.683.217.248.600
Denda Administrasi Cukai	17.154.861.382	11.587.400.196
Cukai Lainnya	8.682.704.230	11.036.084.480
Jumlah Penerimaan Cukai (Neto)	95.027.881.221.457	77.010.010.813.795

Dengan demikian, Penerimaan Cukai pada TA 2012 lebih besar Rp16.017.870.607.662 atau 23,40 persen dari Penerimaan Cukai TA 2011.

D.2.1.6. Pajak Lainnya

Penerimaan Pajak
Lainnya sebesar
Rp4,71 triliun

Penerimaan Pajak Lainnya pada TA 2012 adalah sebesar Rp4.210.876.548.356 dengan rincian sebagai berikut.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (audited)

Uraian	(dalam rupiah)	
	TA 2012 (audited)	TA 2011 (audited)
Penjualan Bonds dan Sea Materei	2.378.348.978.412	3.608.606.383.070
Pendapatan PPh Batubara	769.733	6.093.244
Pajak Tidak Langsung	3.100.248.028	1.228.038.688
Bunga Penagihan Pajak:		
- Bunga Penagihan PPh	184.768.886.616	84.726.712.822
- Bunga Penagihan PPN	142.786.207.887	224.188.980.842
- Bunga Penagihan PPh3M	1.588.088.896	204.067.288
- Bunga Penagihan PTLL	373.468.883	7.688.186.460
Jumlah Pajak Lainnya	4.210.878.548.355	3.928.192.148.211

Tengas demikian, Penerimaan Pajak Lainnya pada TA 2012 lebih besar Rp282.834.400.144 atau 7,20 persen dari TA 2011.

D.2.1.7. Pajak Perdagangan Internasional

Pajak Perdagangan Internasional sebesar Rp49,58 triliun

Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional pada TA 2012 adalah sebesar Rp49.656.293.609.861, yang terdiri dari Penerimaan Bea Masuk sebesar Rp28.418.359.044.419 dan Penerimaan Bea Keluar sebesar Rp21.237.934.765.462 dengan rincian sebagai berikut.

Jrakan	(dalam rupiah)	
	TA 2012 (audited)	TA 2011 (audited)
Bea Masuk		
Bea Masuk	26.708.523.805.738	25.783.454.801.710
Bea Masuk OTP atas Hibah 0% Nihil	23.834.038	3.173.023.088
Hendaraan Udara Administrasi		
Pabean	465.371.844.436	381.846.604.381
Bea Masuk dalam rangka KITE	1.076.300.580.035	846.600.042.226
Denda atas sanksi administrasi	18.070.853	15.001.000
Bea Masuk - Ditanggung Pemerintah	59.513.751.137	733.10.873.000
Pabean Lainnya	67.482.208.039	87.454.975.573
Jumlah Bea Masuk	28.418.359.044.419	26.265.383.309.378
Bea Keluar	21.237.934.765.462	28.855.502.747.588
Jumlah Pajak Perdagangan Internasional	49.656.293.609.861	55.121.488.056.966

Dengan demikian, penerimaan Pajak Perdagangan Internasional TA 2012 lebih kecil Rp4.465.172.247.077 atau 8,25 persen dari TA 2011.

D.2.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan PNBP sebesar Rp361,63 triliun

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada TA 2012 adalah sebesar Rp351.678.561.793.488, yang berarti lebih besar Rp20.341.113.218.306 atau 6,14 persen dari TA 2011 sebesar Rp331.337.448.572.183.

PNBP tersebut berasal dari penerimaan dari Sumber Daya Alam, Kegiatan Pemerintah atas Laba BUMN, PNBP Lainnya, dan Pendapatan BLU.

Rincian atas penerimaan negara bukan pajak adalah sebagai berikut.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

Penerimaan SDA
sebesar Rp225,84
triliun

D.2.2.1. Penerimaan Sumber Daya Alam

Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) pada TA 2012 adalah sebesar Rp225.643.970.463.751. Penerimaan ini merupakan penerimaan negara yang berhubungan dengan kegiatan eksplorasi SDA, yang terdiri dari:

Uraian	(dalam rupiah)	
	TA 2012 (revisi)	TA 2011 (revisi)
Pendapatan Minyak Bumi	144.717.087.122.468	141.303.445.349.228
Pendapatan Gas Alam	61.106.427.615.761	55.187.065.922.635
Pendapatan Pertambangan Umum	5.877.387.816.604	16.369.769.731.671
Pendapatan Kehutanan	3.100.300.362.520	2.216.476.003.406
Pendapatan Perikanan	215.766.807.000	183.872.161.080
Pendapatan Pertambangan Panas Bumi	738.966.044.398	562.122.374
Jumlah Penerimaan SDA	225.843.970.463.751	213.823.340.552.827

Dengan demikian, Penerimaan Sumber Daya Alam pada TA 2012 lebih besar Rp12.023.323.910.925 atau 5,42 persen dari TA 2011.

D.2.2.2. Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN

Penerimaan Bagian
Pemerintah atas Laba
BUMN sebesar
Rp30,00 triliun

Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN pada TA 2012 adalah sebesar Rp30.797.972.717.670, yang berarti lebih besar Rp2.613.999.591.070 atau 9,27 persen dari TA 2011 sebesar Rp28.183.973.126.600. Penerimaan tersebut merupakan penerimaan yang diperoleh Pemerintah atas pengelolaan kekayaan negara yang diisahkan, yakni kekayaan negara yang ditempatkan sebagai penyertaan modal pada Perusahaan Negara.

D.2.2.3. Penerimaan PNBP Lainnya

Penerimaan PNBP
Lainnya sebesar
Rp77,62 triliun

Penerimaan PNBP Lainnya pada TA 2012 adalah sebesar Rp73.532.319.648.034. Penerimaan ini terdiri dari:

Uraian	(dalam rupiah)	
	TA 2012 (revisi)	TA 2011 (revisi)
Pencapaian Penjualan Hasil Produksi/Sitaw	9.782.221.208.572	5.525.540.313.858
Pencapaian Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas	3.063.747.782.845	11.803.460.367.215
Pencapaian Sewa	271.221.959.788	186.810.775.728
Pencapaian Jasa I	6.149.943.608.009	16.222.029.203.306
Pencapaian Jasa II	1.356.307.863.738	1.371.672.767.319
Pencapaian Jasa Luar Negeri	505.070.000.074	454.000.340.127
Pencapaian Jasa Perbankan	294.417.442	688.213.800
Pencapaian atas Pengelolaan TSM Harta dan atas Penempatan Uang Negara	4.417.801.800.174	4.835.358.321.429
Pencapaian Jasa Keolisian	3.378.471.933.288	5.295.511.203.017
Pencapaian Jasa Pelayanan Tel	193.828.847.708	-
Pencapaian Jasa Keolisian II	122.838.850.129	95.561.368.822
Pencapaian Jasa Lainnya	86.888.365.688	26.310.382.000
Pencapaian Bunga	3.370.659.347.639	1.169.874.445.254
Pencapaian Biaya Dan Biaya Penjualan	-	760.000.000
Pencapaian Premiun atas Obligasi Negara	8.297.001.018.852	2.722.874.365.500
Pencapaian Keabsahan dan Penjualan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi	251.243.211.808	240.761.103.801
Pencapaian Pendidikan	2.375.603.736.186	2.965.915.231.801
Pencapaian Gratifikasi dan Uang Sitaw Hasil Korupsi	158.144.829.032	92.848.373.390

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

Penerimaan Iuran dan Donasi	1.499.528.823.727	1.319.106.324.883
Penerimaan dari Penerbitan Kertas TAYL	4.661.015.950.737	7.986.615.361.280
Pencapaian Pelunasan Piutang	54.165.865.038	26.715.369.818
Pencapaian dari Penutupan Retening	53.451.841.848	628.023.309.285
Penerimaan Swais Kurs	2.091.891.225.881	3.713.540.541.837
Penerimaan Lain-lain	1.221.64.105.737	208.556.383.712
Jumlah PNBP Lainnya	73.332.318.648.034	68.226.130.305.885

Dengan demikian, Penerimaan PNBP Lainnya pada TA 2012 lebih besar Rp4.106.189.212.151 atau 5,83 persen dari TA 2011.

D.2.2.4. Penerimaan Badan Layanan Umum

Penerimaan Badan Layanan Umum (BLU) pada TA 2012 adalah sebesar Rp21.704.295.961.034, yang terdiri dari:

Penerimaan BLU
sebesar Rp21,78 triliun

Uraian	(dalam rupiah)	
	TA 2012 (jumlah)	TA 2011 (jumlah)
Pendapatan Jasa Layanan Umum	19.431.351.378.837	17.821.822.192.696
Pendapatan Hasil Badan Layanan Umum	83.383.755.888	187.462.319.227
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	1.081.382.058.823	647.563.491.001
Penerimaan BLU lainnya	1.067.185.387.406	1.487.157.365.817
Jumlah Penerimaan B.U	21.704.295.861.034	20.153.985.586.771

Dengan demikian, penerimaan ELU pada TA 2012 lebih besar Rp1.650.300.374.263 atau 7,96 persen dari TA 2011.

D.2.3. Penerimaan Hibah

Penerimaan Hibah pada TA 2012 adalah sebesar Rp4.141.701.218.979. Pendapatan ini merupakan penerimaan negara yang berasal dari sumbangan dalam negeri perorangan, lembaga, badan usaha dan hibah dalam negeri lainnya. Selain itu, penerimaan hibah juga berasal dari luar negeri perorangan, bilateral, multilateral dan hibah luar negeri lainnya. Rincian Pendapatan Hibah adalah sebagai berikut.

Penerimaan Hibah
sebesar Rp4,14 triliun

Uraian	(dalam rupiah)	
	TA 2012 (jumlah)	TA 2011 (jumlah)
Hibah Dalam Negeri		
Hibah Dalam Negeri - Perorangan		34.102.500
Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang Perorangan	2.638.67.860	
Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang Lembaga/Badan Usaha	137.006.740.382	166.310.915.813
Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang Perorangan daerah	394.172.80.379	287.158.580.078
Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang Lainnya		10.000.000.000
Jumlah Hibah Dalam Negeri	533.817.088.611	463.563.536.389
Hibah Luar Negeri		
Hibah Luar Negeri - Perorangan	143.794.500	
Hibah Luar Negeri - Bilateral	8.8147.407.739	323.935.838.288
Hibah Luar Negeri - Multilateral	1.943.618.324.054	2.389.885.678.488
Hibah Luar Negeri Lainnya	6.499.847.530	7.198.973.778
Hibah Luar Negeri Langsung - Bilateral	80.727.200.479	112.705.020.056
Hibah Luar Negeri Langsung - Multilateral	708.308.048.484	818.255.288.845
Hibah Luar Negeri Langsung Lainnya	34.072.12.582	42.842.352.889
Jumlah Hibah Luar Negeri	3.807.884.730.388	3.784.713.838.485
Jumlah Hibah	4.141.701.218.979	4.258.217.536.674

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

Dengan demikian, penerimaan Hibah pada TA 2012 lebih kecil Rp 16.315.717.885 atau 2,74 persen dari TA 2011.

0.2.4. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai pada TA 2012 adalah sebesar Rp 97.059.657.528.774, dengan rincian sebagai berikut

Belanja Pegawai sebesar Rp 137,86 triliun

Uraian	(dalam rupiah)	
	TA 2012 (miliar)	TA 2011 (miliar)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	55.075.080.005.010	49.430.707.054.022
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri	44.464.734.119.218	40.713.949.674.738
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	724.258.524.008	818.040.108.830
Belanja Gaji Dokter PTT	822.268.218.220	771.007.436.015
Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	264.003.728.588	248.834.377.220
Belanja Honorarium	1.368.355.133.050	1.338.820.238.160
Belanja Lembur	852.171.223.118	501.557.318.955
Belanja Vaksinasi	231.248.757.842	217.877.848.087
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	59.401.121.774.105	20.333.825.257.330
Belanja Pensiun dan Uang Tunj.	67.280.131.234.944	59.470.885.084.274
Belanja Asuransi Kesehatan	2.482.037.944.596	2.141.221.230.920
Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran	104.234.832.000	150.578.804.980
Belanja Cadangan Perbelanjaan	-	374.730.220
Belanja Kontribusi APEN Pembayaran Pensiun Eks PNS Cepuh pada FT KAI	-	40.088.888
Total Belanja Pegawai	197.659.857.528.774	176.745.947.147.204

Dengan demikian, Belanja Pegawai pada TA 2012 lebih besar Rp221.3710.388.570 atau 12,58 persen dari TA 2011.

0.2.5. Belanja Barang

Belanja Barang pada TA 2012 adalah sebesar Rp140.020.870.803.375 yang merupakan pengeluaran Pemerintah dalam rangka pengadaan/pembelian barang dan jasa non investasi guna mendukung kegiatan operasional pemerintahan. Rincian Belanja Barang adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Belanja Barang sebesar Rp 140,82 triliun

Uraian	TA 2012 (miliar)	TA 2011 (miliar)
Belanja Barang	68.038.275.672.450	66.807.696.651.591
Belanja Jasa	17.108.110.520.874	15.888.778.383.480
Belanja Perbaikan	10.064.200.000.027	8.204.458.416.007
Belanja Perjalanan	18.882.831.758.052	18.835.213.118.570
Belanja Barang BLU	15.584.500.280.345	12.543.014.843.575
Belanja Barang Untuk Diteruskan Kepada Masyarakat/Peinda	0.002.050.511.457	-
Jumlah Belanja Barang	140.020.870.803.375	124.159.183.392.110

Dengan demikian, Belanja Barang TA 2012 ini lebih besar Rp15.861.707.411.255 atau 12,78 persen dari TA 2011.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (revisi)

Belanja Pembayaran
Bunga Utang sebesar
Rp138,62 triliun

D.2.6. Belanja Pembayaran Bunga Utang

Belanja Pembayaran Bunga Utang pada TA 2012 sebesar Rp100.515.994.274.160 merupakan pen bayaran yang dilakukan atas kewajiban peng ungan pokok utang (*interest on principal*), baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman, dan pembayaran denda berupa imbalan bunga. Belanja Pembayaran Bunga Utang mengalami kenaikan Rp7.255.792.809.614 atau 7,78 persen dari Belanja Pembayaran Bunga Utang TA 2011 sebesar Rp93.260.261.434.346.

Rincian Belanja Pembayaran Bunga Utang tersebut terdiri dari Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri (DNI) dan Luar Negeri (LNI) masing-masing sebesar Rp86.151.574.166.955 dan Rp14.364.420.107.205 dengan rincian sebagai berikut.

Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri

Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri sebesar Rp86.151.574.166.955 merupakan pembayaran bunga dan kewajiban lain atas Surat Berharga Negara baik mata uang rupiah maupun valas, serta pembayaran denda berupa imbalan bunga, dengan rincian sebagai berikut

Uraian	(dalam rupiah)	
	TA 2012 (revisi)	TA 2011 (revisi)
Belanja Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri	83.760.101.687.507	57.210.627.003.009
Belanja Pembayaran Imbalan SBSN Dalam Negeri	3.297.744.208.100	4.788.569.583.200
Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara Dalam Negeri	1.458.989.522.800	3.298.157.597.500
Belanja Pembayaran Loss Di End Redemption	158.467.625.000	310.612.683.000
Belanja Pembayaran Discount SBSN Dalam Negeri	913.801.237.200	5.146.661.000
Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara Valas	14.580.113.588.067	11.800.854.889.691
Belanja Pembayaran Imbalan SBSN Valas	830.783.140.850	514.876.089.450
Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Valas	149.848.400.000	373.805.903.000
Belanja Pembayaran Denda	615.634.747.291	1.247.359.871.387
Belanja Terkait Pendapatan Hibah	-	1.255.353.882
Jumlah Pembayaran Bunga Utang DN	86.151.574.166.955	79.815.338.481.746

Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar Negeri

Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar Negeri sebesar Rp14.364.420.107.205 merupakan pembayaran bunga dan kewajiban lain atas pinjaman program dan pinjaman proyek, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2012 (revisi)	TA 2011 (revisi)
Belanja Bunga Pinjaman Program	3.940.942.047.757	3.540.073.133.517
Belanja Bunga Pinjaman Proyek	10.423.478.059.448	10.114.671.468.389
Jumlah Pembayaran Bunga Utang LN	14.364.420.107.205	13.654.744.601.906

D.2.7. Subsidi

Belanja Subsidi sebesar
Rp346,42 triliun

Belanja Subsidi pada TA 2012 sebesar Rp346.420.404.182.332 merupakan belanja negara yang diberikan kepada perusahaan/l lembaga yang memproduksi, menjual, mengeksport atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga harga terjangkau oleh masyarakat. Rincian Subsidi adalah sebagai berikut.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

Uraian	(dalam rupiah)	
	TA 2012 (miliar)	TA 2011 (miliar)
Subsidi Perusahaan Negara		
Subsidi Perusahaan Negara - BUMN	211.895.707.483.639	185.161.338.990.975
Subsidi Non Lembaga Keuangan - Non BUMN		
Subsidi Non BUMN - Yayasan	127.713.798.781.890	123.421.702.891.115
Subsidi Non BUMN - Pabrik	3.763.173.781.137	3.411.149.100.700
Serta	131.476.971.666.703	126.840.216.611.816
Subsidi Lain - Lain - BUMN	1.012.961.125.940	1.019.999.791.241
Jumlah Subsidi Perusahaan Negara	346.310.829.182.772	293.326.493.882.889
Subsidi Perusahaan Swasta		
Belanja Subsidi - Lain - Lain - Swasta	1.111.276.018.660	1.022.036.281.285
Jumlah Subsidi Perusahaan Swasta	1.110.376.018.660	1.022.036.281.285
Jumlah Belanja Subsidi	346.420.404.182.332	295.358.422.916.324

Dengan demikian, Subsidi TA 2012 ini lebih besar Rp51.061.981.266.008 atau 17,29 persen dari Subsidi TA 2011.

D.2.8. Belanja Hibah

Belanja Hibah sebesar
Rp 75,88 miliar

Belanja Hibah merupakan transfer uang atau barang oleh Pemerintah Pusat kepada negara lain, organisasi internasional, dan pemerintah daerah yang sifatnya tidak wajib. Pada TA 2012 terdapat belanja hibah negara kepada pemerintah daerah sebesar Rp75.079.945.754. Belanja hibah TA 2012 lebih kecil Rp225.028.852.631 atau turun 74,98 persen dari TA 2011 sebesar Rp300.108.798.335.

D.2.9. Bantuan Sosial

Bantuan Sosial sebesar
Rp 75,80 triliun

Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp75.602.528.863.934 merupakan uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	(dalam rupiah)	
	TA 2012 (miliar)	TA 2011 (miliar)
Bantuan Kompensasi Kenaikan Harga BBM	424.170.718.781	6.234.225.314.385
Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial dan bentuk lainnya	5.506.964.988	-
Bantuan Langsung Sekolah Lembaga Guru	17.510.231.905.699	33.099.345.314.817
Bantuan Sosial Swadaya Sekolah Lembaga	7.116.168.287.950	3.820.100.000
Bantuan Beasiswa	-	4.694.535.371.423
Bantuan Sosial Lembaga Peribadatan	-	140.083.983.700
Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	35.772.440.108.235	27.027.085.335.883
Bantuan Sosial Untuk Peningkatan Sosial	1.882.433.882.597	-
Bantuan Sosial Untuk Peninggalan Kerakitan	11.084.593.498.228	-
Bantuan Sosial Untuk Peninggalan Bencana	1.050.930.889.010	-
Jumlah Bantuan Sosial (Nasi)	75.802.528.863.934	71.078.290.233.168

Dengan demikian, Belanja Bantuan Sosial TA 2012 ini lebih besar Rp4.526.236.630.796 atau 6,37 persen dari TA 2011.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (audited)

Belanja Lain-lain
sebesar Rp4,07 triliun

0.2.10. Belanja Lain-lain

Belanja Lain-lain pada TA 2012 adalah sebesar Rp4.072.855.812.156, dengan rincian sebagai berikut

Uraian	(dalam rupiah)	
	TA 2012 (audited)	TA 2011 (audited)
Kegiatan Teknis Internasional	-	10.000.000.000
Cadangan Kenaikan Harga Tanah (Kenaikan Harga)	310.065.000.000	-
Cadangan Biaya Pemeliharaan	7.000.000.000.000	-
Belanja Cadangan Debit Nasional	342.764.007.151	-
Cadangan Tunjangan Beas PWS/TMI/Polri	-	3.778.482.000
Belanja DBH Biaya Upat Pungut PBB untuk DUP	-	110.650.875
Belanja Non Mutasi Divisi Batas	-	557.785.893
Belanja karena rugi selisih kurs Dalam Pengelolaan rekening EUN	282.580.817.867	300.901.025.538
Jasa Perbaikan dan	189.584.423.458	156.947.380.770
Belanja Pembayaran Selisih Harga Barang Bulog	18.355.217.000	-
Belanja uruk LPP TVRI	-	686.547.340.402
Belanja uruk LPP RRI	-	677.07.093.980
Dana Cadangan Resiko Kenaikan Harga Tanah	-	406.441.000.000
Belanja lain-lain	-	3.114.270.585.883
Belanja lain-lain BUN	83.457.470.427	-
Belanja Lain-lain Tanggap Darurat	244.850.000	-
Belanja Lain-lain Lainnya	828.176.495.355	-
Jumlah Belanja Lain-lain	4.072.855.812.156	5.404.234.033.892

Dengan demikian, Belanja Lain-lain TA 2012 mengalami penurunan sebesar Rp1.391.378.241.436 atau 25,46 persen dari TA 2011

DBH Pajak sebesar
Rp47,21 triliun

0.2.11. Dana Bagi Hasil Pajak

Bagi Hasil Pajak merupakan transfer oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atas bagi hasil penerimaan pajak yang merupakan bagian pendapatan pemerintah daerah. Transfer Bagi Hasil Pajak pada TA 2012 adalah sebesar Rp47.214.136.030.788, dengan rincian sebagai berikut

Uraian	(dalam rupiah)	
	TA 2012 (audited)	TA 2011 (audited)
Bagi Hasil Pajak Penghasilan	18.237.220.468.884	18.237.328.488.281
Bagi Hasil Sumber Daya Alam	27.697.042.663.038	-
Bagi Hasil PHN/B	238.813.021.066	6.747.876.882
Bagi Hasil PBB	-	28.281.486.730.111
Jumlah Bagi Hasil Pajak	47.214.136.030.788	41.526.561.086.164

Dengan demikian, Bagi Hasil Pajak TA 2012 lebih besar Rp5.688.514.934.624 atau 13,70 persen dari TA 2011.

DBH SDA sebesar
Rp62,80 triliun

0.2.12. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) merupakan transfer oleh Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah atas bagi hasil penerimaan sumber daya alam yang merupakan bagian pendapatan pemerintah daerah. Transfer Bagi Hasil SDA dalam TA 2012 adalah sebesar Rp62.800.285.677.315, dengan rincian sebagai berikut.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (*audited*)

Uraian	(dalam rupiah)	
	TA 2012 (<i>audited</i>)	TA 2011 (<i>audited</i>)
Bag Hasil Minyak Bumi	26.166.822.138.467	20.534.380.736.284
Bagi Hasil Gas Alam	21.231.676.084.266	16.572.248.768.883
Bag Hasil Pertambangan Jinan	12.860.864.426.197	14.498.126.522.476
Bag Hasil Pertambangan Panas Bumi	626.278.878.408	518.987.116.184
Bag Hasil Keluteraan	1636.880.432.616	1.512.466.068.881
Bagi Hasil Perikanan	178.764.687.362	138.377.102.117
Jumlah Bagi Hasil SDA	82.800.285.817.315	53.974.988.797.854

Dengan demikian, LBH SDA TA 2012 lebih besar Rp6.825.299.319.361 atau 12,98 persen dari TA 2011.

D.2.13. Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau

DBH Cukai Tembakau sebesar Rp1,77 triliun

Bagi Hasil Cukai Tembakau merupakan transfer oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atas bag hasil penerimaan cukai yang merupakan bagian pendapatan Pemerintah daerah. Transfer Bagi Hasil Cukai Tembakau pada TA 2012 adalah sebesar Rp1.722.731.272.658, sedangkan pada TA 2011 sebesar Rp1.438.448.764.184. Dengan demikian DBH Cukai Tembakau TA 2012 lebih besar Rp284.322.508.474 atau 19,82 persen dibandingkan DBH Cukai Tembakau TA 2011.

D.2.14. Dana Alokasi Umum

DAU sebesar Rp273,01 triliun

Dana Alokasi Umum merupakan transfer oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang digunakan untuk membiayai kabupaten/provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Transfer Dana Alokasi Umum pada TA 2012 sebesar Rp273.614.438.203.000, jumlah tersebut lebih besar Rp48.283.726.155.000 atau 17,64 persen dari TA 2011 sebesar Rp225.593.712.048.000.

D.2.15. Dana Alokasi Khusus

DAK sebesar Rp25,94 triliun

Dana Alokasi Khusus adalah alokasi dari APBN kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Transfer Dana Alokasi Khusus pada TA 2012 sebesar Rp25.941.483.856.000, jumlah tersebut lebih besar Rp1.139.254.103.020 atau 4,59 persen dari TA 2011 sebesar Rp24.802.229.752.980.

D.2.16. Dana Otonomi Khusus

Dana Otonomi Khusus sebesar Rp11,95 triliun

Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah. Penggunaan Dana Otonomi Khusus ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Transfer Dana Otonomi Khusus pada TA 2012 sebesar Rp11.952.577.528.000, jumlah tersebut lebih besar Rp1.531.264.595.000 atau 14,69 persen dari TA 2011 sebesar Rp10.421.312.933.000.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (audited)

D.2.17. Dana Penyesuaian

Dana Penyesuaian sebesar Rp57,40 triliun

Dana Penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat. Transfer Dana Penyesuaian pada TA 2012 adalah sebesar Rp57.399.399.998 DB2, lebih besar Rp3.742.186.328.806 atau 6,37 persen dari TA 2011 sebesar Rp53.657.183.039.474.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN

Arus Kas Keluar Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan sebesar Rp144,43 triliun

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan menjelaskan penerimaan dan pengaljaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonom yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah kepada masyarakat. Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan pada TA 2012 menunjukkan arus kas keluar bersih sebesar Rp144.426.528.430.463, dengan rincian sebagai berikut

Uraian	(dalam rupiah)	
	TA 2012 (audited)	TA 2011 (audited)
Arus Masuk	126.194.876.373	134.372.523.547
Dikurangi Arus Keluar	144.552.713.306.838	117.760.087.733.733
Arus Kas Bersih	(144.426.528.430.463)	(117.624.716.204.186)

Dengan demikian, Arus Kas Keluar Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan pada TA 2012 lebih besar Rp26.601.813.233.279 atau 22,79 persen dari TA 2011.

D.2.18. Penjualan Aset

Penjualan Aset sebesar Rp126,13 miliar

Pendapatan Penjualan Aset merupakan pendapatan yang berasal dari penjualan Aset Tetap baik berupa rumah, gedung, bangunan dan tanah, kendaraan bermotor, dan aset yang rusak atau berlebihan. Pendapatan yang berasal dari Penjualan Aset Tetap pada TA 2012 adalah sebesar Rp126.184.878.373, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	(dalam rupiah)	
	TA 2012 (audited)	TA 2011 (audited)
Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	12.424.700.247	2.726.200.373
Penjualan Peralatan dan Mesin	7.228.882.578	1.801.702.873
Penjualan Sewa Bel	36.661.280.536	40.692.646.231
Penjualan Aset Bekas Milik Asing/Dina	2.528.488.402	888.346.600
Tukar Menukar Peralatan dan Mesin	5.000.000	-
Tukar Menukar Tanah, Gedung dan Bangunan	668.000	-
Tukar Menukar Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.000.000	-
Pemindahalnganan BMN Lainnya	87.301.388.810	88.568.731.770
Jumlah Penjualan Aset	126.184.878.373	194.372.578.547

Dengan demikian, Pendapatan ini pada TA 2012 lebih kecil Rp8.122.770.174 atau 6,04 persen dari TA 2011.

D.2.19. Belanja Modal

Belanja Modal sebesar Rp144,55 triliun

Belanja Modal pada TA 2012 adalah sebesar Rp144.552.713.306.838 dengan rincian sebagai berikut

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (audited)

Uraian	(dalam rupiah)	
	TA 2012 (audited)	TA 2011 (audited)
Belanja Modal Tanah	3.423.209.272.606	3.174.618.673.371
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.141.238.166.822	38.688.162.088.168
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.662.346.208.260	21.296.677.877.838
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	72.263.462.616.428	49.670.778.106.838
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.089.163.644.164	3.542.238.811.366
Belanja Modal BLU	2.082.302.608.668	1.786.724.263.048
Jumlah Belanja Modal	144.557.713.308.838	117.759.087.730.733

Belanja Modal ini pada TA 2012 lebih besar Rp26.785.625.573.105 atau 22,75 persen dari TA 2011.

Dengan Arus Kas Keluar Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp8.877.066.887.571 dan Arus Kas Keluar Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan sebesar Rp144.421.528.403.485 mengakibatkan defisit anggaran sebesar Rp153.300.595.418.033. Defisit anggaran tersebut ditutup dari sumber-sumber pembiayaan sebagaimana diuraikan pada bagian berikut ini.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN

*Kesulitan kas dari
Aktivitas Pembiayaan
sebesar Rp174,86
triliun*

Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan menjeaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas selubung. Jangka pendanaan defisit atau penyediaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim (tuntutan) pihak lain terhadap arus kas Pemerintah dan klaim Pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Jumlah Pembiayaan Neto dalam TA 2012 adalah sebesar Rp75.158.188.320.375, yang berasal dari:

Uraian	(dalam rupiah)	
	TA 2012 (audited)	TA 2011 (audited)
Arus Masuk	379.164.854.591.634	283.026.544.623.233
Dikurangi Arus Keluar	204.006.763.871.318	180.868.140.303.315
Arus Kas Bersih	175.158.188.320.375	102.158.404.319.918

Dengan demikian, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan TA 2012 lebih besar Rp72.739.784.000.457 atau 71,21 persen dari TA 2011.

0.2.20. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri

*Penerimaan
Pembiayaan DN
sebesar Rp341,26
triliun*

Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri dalam TA 2012 adalah sebesar Rp341.256.374.433.300, yang terdiri dari:

Uraian	(dalam rupiah)	
	TA 2012 (audited)	TA 2011 (audited)
Pembiayaan Perbankan	53.170.030.000.000	40.313.043.048.000
Pembiayaan Non Perbankan	1.051.381.840.788	1.344.428.757.500
Penerimaan Surat Berharga Negara (SBN)	282.887.237.888.780	217.133.113.138.150
Penjualan Aset Program Restrukturisasi	1.139.724.803.212	1.172.897.371.311
Jumlah Penerimaan Pembiayaan DN	341.256.374.433.300	299.872.520.403.961

Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri dalam TA 2012 lebih besar Rp41.383.853.984.339 atau 13,77 persen dibandingkan dengan TA 2011.

a. Pembiayaan Perbankan

Penerimaan pembiayaan perbankan pada TA 2012 sebesar Rp56.170.000.000.000

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (*audited*)

merupakan penerimaan pembiayaan karena penggunaan SAL, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	(dalam rupiah)	
	TA 2012 (<i>audited</i>)	TA 2011 (<i>audited</i>)
Penerimaan dari Rekening SAL	56.170.000.000,000	40.319.043.049,000
Total Penerimaan dari Pembiayaan Perbankan	56.170.000.000,000	40.319.043.049,000

Penerimaan pembiayaan dari Rekening Pemerintah TA 2012 lebih besar Rp15.850.956.951,000 atau 39,31 persen dari TA 2011.

b. Pembiayaan Non Perbankan

Penerimaan Pembiayaan Non Perbankan pada TA 2012 adalah sebesar Rp1.051.381.840,798, berarti lebih besar Rp6.935.050,598 atau 0,67 persen dari penerimaan pada TA 2011 sebesar Rp1.044.428.787,500. Penerimaan ini berasal dari privatisasi dan pinjaman dalam negeri. Rincian Penerimaan Pembiayaan Non Perbankan adalah sebagai berikut:

Uraian	(dalam rupiah)	
	TA 2012 (<i>audited</i>)	TA 2011 (<i>audited</i>)
Penerimaan Hasil Privatisasi	136.239.961,371	425.044.141,867
Pinjaman Dalam Negeri	915.111.879,427	619.382.841,633
Total Penerimaan Non Perbankan	1.051.381.840,798	1.044.426.983,500

c. Penerimaan Surat Berharga Negara (SBN)

Penerimaan pembiayaan SBN merupakan penerimaan pembiayaan dari penjualan Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Obligasi Negara, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), baik dalam mata uang rupiah maupun valas.

Penerimaan pembiayaan SBN pada TA 2012 sebesar Rp282.697.267.989,790, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	(dalam rupiah)	
	TA 2012 (<i>audited</i>)	TA 2011 (<i>audited</i>)
Penerimaan Penjualan SPN	30.521.000.000,000	40.000.000.000,000
Penerimaan Penjualan Obligasi Negara DN	143.780.745.000,000	110.514.000.000,000
Uang Bunga Obligasi Negara DN	2.251.726.240,000	1.817.627.481,000
Penerimaan Penjualan SBSN	48.096.826.000,000	23.851.140.000,000
Imbalan dibayar di muka SBSN	171.348.289,000	50.028.851,000
Penerimaan Penjualan Surat Uang Perbendaharaan UN	1.381.000.000,000	1.320.000.000,000
Penerimaan Penjualan SBSN - Valas	55.722.646.416,790	30.477.026.851,161
Total Penerimaan SBN	282.697.267.989,790	207.126.113.186,150

Dengan demikian, penerimaan pembiayaan SBN pada TA 2012 lebih besar Rp75.561.154.786,610 atau 36,58 persen dibanding TA 2011.

d. Penjualan Aset Program Restrukturisasi

Penerimaan Penjualan Aset Program Restrukturisasi pada TA 2012 sebesar Rp1.139.724.609,212, lebih kecil Rp30.212.766,099 atau 2,63 persen dari TA 2011 sebesar Rp1.172.937.371,311.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (audited)

Uraian	(dalam rupiah)	
	TA 2012 (audited)	TA 2011 (audited)
Penerimaan Hasil Perjualan Aset Program Restrukturisasi	-	330.323.053
Penerimaan Hasil Perjualan/penyelesaian aset eks BPPN	976.202.059.673	601.228.042.527
Penerimaan Hasil Perjualan/penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi (BOLI)	2.85.622.643.639	571.578.000.731
Total Penerimaan Aset Program Restrukturisasi	1.199.724.803.212	1.172.997.971.311

D.2.21. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri

Penerimaan
Pembiayaan LN sebesar
Rp31,40 triliun

Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri dalam TA 2012 sebesar Rp31.403.481.754.448 merupakan seluruh penerimaan Pemerintah sehubungan dengan penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri dari pinjaman program dan pinjaman proyek. Rincian Pembiayaan Luar Negeri adalah sebagai berikut.

Uraian	(dalam rupiah)	
	TA 2012 (audited)	TA 2011 (audited)
Pinjaman Program	15.003.476.180.432	15.266.144.513.219
Pinjaman Proyek	16.400.005.574.016	18.481.094.210.722
Jumlah Penerimaan Pembiayaan LN	31.403.481.754.448	33.747.179.723.921

Dengan demikian, Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri dalam TA 2012 lebih kecil Rp2.343.696.969.473 atau 6,94 persen dari TA 2011.

a. Pinjaman Program

Pinjaman Program yang diterima dalam TA 2012 adalah sebesar Rp15.003.476.180.432, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	(dalam rupiah)	
	TA 2012 (audited)	TA 2011 (audited)
Program Bilateral	-	973.396.323.700
Program Multilateral	15.003.476.180.432	14.392.748.187.519
Jumlah Pinjaman Program	15.003.476.180.432	15.266.144.513.219

Dengan demikian, Pinjaman Program TA 2012 lebih kecil Rp262.668.332.787 atau 1,72 persen dari TA 2011.

b. Pinjaman Proyek

Pinjaman Proyek yang diterima dalam TA 2012 adalah sebesar Rp16.400.005.574.016, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	(dalam rupiah)	
	TA 2012 (audited)	TA 2011 (audited)
Pinjaman Proyek dari Bilateral	8.070.242.100.124	5.046.106.053.582
Pinjaman Proyek dari Multilateral	5.870.258.474.515	5.246.144.127.735
Pinjaman Proyek Fasilitas Kredit Ekspor	2.451.888.847.371	4.188.763.893.385
Pinjaman Proyek Komersial	57.562.877.029	-
Pinjaman Proyek Lainnya	57.414.577	-
Jumlah Pinjaman Proyek	16.400.005.574.016	18.481.034.210.702

Dengan demikian, Pinjaman Proyek TA 2012 lebih kecil Rp2.081.028.636.686 atau 11,26 persen dibandingkan TA 2011.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (audited)

Penerimaan
Pengembalian
Penerusan Pinjaman
sebesar Rp8,68 triliun

D.2.22. Penerimaan Pengembalian Penerusan Pinjaman

Penerimaan Pengembalian Penerusan Pinjaman pada TA 2012 sebesar Rp6.332.435.748.457 merupakan penerimaan Pemerintah atas cicilan pengembalian Pinjaman *Subsidiary Loan Agreement* (SLA) yang terdiri dari penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman dalam dan luar negeri kepada Pemda, BUMD dan BUMN. Rincian Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2012 (audited)	TA 2011 (audited)
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman DM	951.071.477.779	1.334.456.191.806
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman LN	5.382.026.026.107	7.274.350.203.050
Penerimaan Pengembalian Penerusan Pinjaman	6.333.098.103.448	8.608.806.394.856

Penerimaan Pengembalian Penerusan Pinjaman dalam TA 2012 lebih kecil Rp2.075.747.392.110 atau 24,11 persen dari TA 2011.

D.2.23. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri

Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri dalam TA 2012 adalah sebesar Rp130.306.379.872.182 yang digunakan untuk pembiayaan pengembangan pendidikan nasional, pelunasan SPN, Obligasi Negara, dan SBSN, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2012 (audited)	TA 2011 (audited)
Pembiayaan Pengembangan Pendidikan Nasional	7.000.000.000.000	2.817.700.000.000
Pembiayaan Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri dari BUMN	113.435.519.488	
Pengeluaran untuk Pelunasan Surat Berharga Negara	87.869.821.542	
Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara	37.800.000.000.000	38.045.000.000.000
Pelunasan Obligasi Negara Rupiah	73.883.054.019.852	46.174.150.951.085
Pelunasan SBSN	9.057.190.711.000	52.568.383.000
Pelunasan Obligasi Internasional	2.505.000.000.000	
Jumlah Pembiayaan Dalam Negeri	130.306.379.872.182	89.869.447.737.085

Dengan demikian, Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri TA 2012 lebih besar Rp40.416.932.135.097 atau 44,96 persen dibandingkan TA 2011.

D.2.24. Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri

Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri dalam TA 2012 sebesar Rp51.114.817.369.327 merupakan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri, yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2012 (audited)	TA 2011 (audited)
Pinjar Program	10.802.750.857.111	8.429.808.883.834
Pinjar Proyek	40.252.022.412.218	37.892.858.594.407
Jumlah Penerimaan Pembiayaan LN	51.114.817.369.327	47.322.667.478.271

Dengan demikian, Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri TA 2012 lebih besar Rp3.792.314.691.056 atau 8,01 persen dibandingkan dengan TA 2011.

Pengeluaran
Pembiayaan DN
sebesar Rp130,21
triliun

Pengeluaran
Pembiayaan LN sebesar
Rp51,11 triliun

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

PMN/Investasi
Pemerintah sebesar
Rp18,88 triliun

0.2.25. Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah

Pengeluaran Penyertaan Modal Negara (PMN)/Investasi Pemerintah merupakan penyertaan modal Pemerintah Pusat dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki Negara/Daerah, serta investasi dalam bentuk dana bergulir. PMN/Investasi Pemerintah dalam TA 2012 adalah sebesar Rp18.882.557.487.419, yang terdiri dari:

Uraian	(dalam rupiah)	
	TA 2012 (realisasi)	TA 2011 (realisasi)
Penyertaan Modal Negara pada BUMN	7.600.000.000.000	8.240.874.519.422
Penyertaan Modal Negara pada Badan Internasional	541.150.088.050	811.283.82.842
Penyertaan Modal Negara Lainnya	378.384.401.380	100.000.000
Investasi Pemerintah untuk BLU PIP	4.170.100.000.000	2.878.500.000.000
Dana Bergulir	6.186.913.000.000	7.671.600.000.000
Jumlah PMN/Investasi Pemerintah	18.882.557.487.419	19.200.357.712.254

Dengan demikian, PMN/Investasi Pemerintah TA 2012 lebih kecil Rp377.800.224.845 atau 1,76 persen dari TA 2011.

0.2.26. Penerusan Pinjaman (RDI/RPD)

Penerusan Pinjaman
sebesar Rp3,75 triliun

Penerusan Pinjaman RDI/RPD merupakan pengeluaran Pemerintah atas pemberian pinjaman dan penerusan pinjaman luar negeri yang disalurkan untuk pemerintah daerah, dan BUMN/BUMD. Penerusan pinjaman luar negeri pada TA 2012 adalah sebesar Rp3.753.031.242.591. Jumlah tersebut lebih kecil Rp470.610.228.907 atau 11,15 persen dibandingkan dengan TA 2011 sebesar Rp4.223.641.471.298.

Berdasarkan Arus Kas Masuk Bersih dari Aktivitas Pembiayaan sebesar Rp175.156.168.923,975 dan defisit anggaran sebesar Rp163.300.696.418,036, terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) TA 2012 sebesar Rp21.857.674.802,940.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN

Kas Keluar Bersih
dari Aktivitas
Non Anggaran sebesar
miliar Rp1,50 triliun

Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran dan tidak disajikan dalam Laporan Realisasi APBN. Dalam TA 2012, Arus Kas Keluar Bersih dari Aktivitas Non Anggaran adalah sebesar Rp1.501.462.900.166, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	(dalam rupiah)	
	TA 2012 (realisasi)	TA 2011 (realisasi)
Perhitungan Pihak Ketiga (Metode)	(1.303.714.005.028)	171.800.578.787
Kiriman Uang (Metode)	(279.648.621.188)	12.521.440.111
Transito (Metode)	90.792.905.182	210.874.401.857
Penerimaan/Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Karena Kesalahan Rekening (Metode)	(17.893.087.832)	909.866.106.798
Arus Kas Bersih	(1.501.462.900.166)	1.313.542.615.553

Dengan demikian, Arus Kas Keluar Bersih dari Aktivitas Non Anggaran TA 2012 lebih kecil Rp2.815.005.515.719 atau 214,51 persen dari TA 2011.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

PFK (Neto) sebesar
minus Rp1,30 triliun

0.2.27. Perhitungan Pihak Ketiga (Neto)

Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dalam TA 2012 sebesar minus Rp1.303.714.095.928 berasal dari penerimaan pemerintah yang berasal dari sejumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar (SPM); Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga, seperti potongan gaji, pensiun, beras BULOG, dan PFK lainnya dikurangi dengan jumlah pembayaran yang telah dilakukan pemerintah kepada pihak ketiga yang berhak menerimanya. Adapun Rincian penerimaan dan pengeluaran PFK pada TA 2012 adalah sebagai berikut

Uraian	(dalam rupiah)	
	TA 2012 (modifikasi)	TA 2011 (modifikasi)
PFK terkait Pengakuan Utang PFK		
Penerimaan		
Penerimaan PFK 10% Gaji	17.887.641.306.166	16.206.213.603.950
Penerimaan PFK 2% Gaji Tebusan	3.042.006.448	4.168.364.646
Penerimaan PFK Beras BULOG	246.883.388.696	22.189.847.499
Penerimaan PFK 2% Penda	2.473.951.467.434	1.188.154.244.764
Penerimaan PFK lain-lain	378.879.255.234	382.182.889.930
Jumlah Penerimaan PFK	23.888.668.320.078	18.002.577.373.781
Pengeluaran		
Pengeluaran Penerimaan PFK 10% Gaji	(18.088.405.888.184)	(18.122.008.531.270)
Pengeluaran Penerimaan PFK 2% Gaji Tebusan	(0.586.402.895)	(3.131.896.112)
Pengeluaran Penerimaan PFK Beras Bulog	(240.361.262.878)	(202.664.676.214)
Pengeluaran Penerimaan PFK 2% Penda	(2.575.125.888.343)	(2.112.551.112.844)
Pengeluaran Penerimaan PFK lain-lain	(401.940.783.696)	(350.529.377.514)
Jumlah Pengeluaran PFK	(22.283.410.415.846)	(18.003.008.798.894)
Jumlah PFK terkait Pengakuan Utang PFK (Neto)	(1.303.714.095.928)	131.390.576.787

Dengan demikian, Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dalam TA 2012 lebih kecil Rp 1.999.898.588.550 atau 780,38 persen dari TA 2011. Adanya saldo PFK (Neto) TA 2012 tersebut mengakibatkan saldo utang PFK per 31 Desember 2012 menurun menjadi Rp451.666.600.337 dari Rp1.755.574.696.265 pada tanggal 31 Desember 2011.

0.2.28. Kiriman Uang

Kiriman Uang sebesar
minus Rp279,55 miliar

Kiriman Uang (KU) Neto TA 2012 sebesar minus Rp279.648.621.588 antara lain merupakan penanaman dan pengeluaran kiriman uang antar rekening pemerintah yang berasal dari KPPN sebagai Kuasa BUN di daerah ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan-Kementerian Keuangan sebagai Kuasa BUN dan sebaliknya, pemindahbukuan intern rekening BUN, dan pemindahbukuan intern KPPN.

Dalam transaksi KJ TA 2012 dan TA 2011 masih terdapat selisih antara penerimaan dengan pengeluaran KU yang disebabkan belum sepenuhnya seluruh transaksi atas rekening yang saling terkait dengan transaksi kas belum dibulukan dalam Sistem Akuntansi Pusat, adanya *time lag* antara saat pengiriman dan saat penerimaan kiriman uang serta ketidakepatan dalam penggunaan akun. Rincian KJ TA 2012 dan TA 2011 adalah sebagai berikut.

Uraian	(dalam rupiah)	
	TA 2012 (modifikasi)	TA 2011 (modifikasi)
Penerimaan Kiriman Uang dan Pemindahbukuan		
Penerimaan Kiriman Uang	1.854.373.472.422.377	1.614.190.734.717.420
Penerimaan Kiriman Uang Dalam Rangka TSA	338.144.640.408.840	2.610.400.984.608.160

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

Penerimaan Kiriman Uang Dalam Rangka Reksus	6.359.358.520.898	7.707.811.003.417
Penerimaan Pemindahbukuan	1.356.163.159.835.517	1.220.031.858.801.484
Penerimaan Pemindahbukuan Penutupan Rekening	2.169.647.956	-
Penerimaan Pemindahbukuan Dalam Rangka Peninjauan	4.052.515.451.020.208	3.194.063.328.087.827
Jumlah Penerimaan RL	10.521.494.649.906.798	3.646.998.318.328.308
Pengeluaran Kiriman Uang dan Pemindahbukuan		
Pengeluaran Kiriman Uang	1.834.076.212.342.841	(1.014.187.503.082.300)
Pengeluaran Kiriman Uang Dalam Rangka TSA	3.301.700.077.807.338	(2.010.420.628.988.810)
Pengeluaran Kiriman Uang Dalam Rangka Reksus	15.722.531.420.868	(7.674.627.347.310)
Pengeluaran Pemindahbukuan	1.323.454.738.488.374	(1.220.037.708.442.150)
Pengeluaran Pemindahbukuan Penutupan Rekening	12.139.647.956	-
Pengeluaran Pemindahbukuan Dalam Rangka Peninjauan	4.052.515.451.020.208	(3.194.063.328.087.820)
Jumlah Pengeluaran RL	(10.521.774.288.528.386)	(8.646.983.756.388.97)
Jumlah RU (Neto)	(278.548.821.388)	12.821.440.111

Selisih Kiriman uang sebesar (Rp278.648.821.568) disebabkan oleh transaksi pengeluaran kiriman uang dari RFBUN Pusat yang diimpahkan pada tanggal 28 Desember 2012 dan hari, diterima di RKLN pada tanggal 7 Januari 2013 sebesar Rp300.338.151.000 serta transaksi pengalihan dan penerimaan kiriman uang antar Rekening Khusus sebesar Rp 33.181.752.903

Dengan demikian, RU masuk neto dalam TA 2012 lebih kecil Rp292.773.061.639 dari TA 2011.

0.2.29. Transito

Transito (Neto) TA 2012 sebesar Rp99.782.903.182 merupakan transaksi BLN yang terkait dengan Pengeluaran Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) tahun berjalan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Penerimaan atas Pengembalian UP tersebut. Pengembalian JP dari Kuasa Pengguna Anggaran dapat berupa UP yang diterima tahun berjalan maupun tahun yang lalu, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	(dalam rupiah)	
	TA 2012 (realisasi)	TA 2011 (realisasi)
Penerimaan Pengembalian UP Dana RUPAH	18.572.705.257.184	16.851.318.463.000
Penerimaan Pengembalian UP Dana PHLN	107.000.000.000	181.620.471.808
Penerimaan Pengembalian UP Pengguna PRBP (Swadana)	1.288.151.087.100	1.088.585.563.048
Penerimaan Pengembalian UP TAYL	337.183.550.128	530.588.231.884
Penerimaan Pengembalian UP Pengembalian Hasil Pajak	328.000.000	480.555.528
Jumlah Penerimaan Transito	20.205.204.773.200	18.862.321.307.820
Pengeluaran Transito		
Pengeluaran UP Dana RUPAH	118.770.108.917.107	(17.108.900.521.510)
Pengeluaran UP Dana PHLN	(1.284.762.850)	(180.367.646.436)
Pengeluaran UP Pengguna PRBP (Swadana)	(1.308.872.100.228)	(1.164.453.438.445)
Pengeluaran Penganki Kelebihan Setoran Sisa		21.774.503.770

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 *(unaudited)*

UFTJP TAYL	6.849.915.166	
Pengeluaran Uang Persediaan Pengembalian (Resitusi) Pajak	(1.175.000.000)	510.000.000
Jumlah Pengeluaran Transito	(20.185.581.668.029)	(18.442.848.815.870)
Jumlah Transito (Neto)	99.782.903.182	219.579.491.888

Dengan demikian, Transito (Neto) dalam TA 2012 lebih kecil Rp1 '9 88 1.586.676 atau 54,57 persen dari TA 2011.

0.2.30. Penerimaan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Karena Kesalahan Rekening

*Penerimaan Pengeluaran
Non Anggaran Pihak
Ketiga minus Rp17,89
milyar*

Dalam TA 2012 dan TA 2011 Penerimaan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Karena Kesalahan Rekening merupakan utang kepada pihak ketiga yang timbul karena retur SP2D, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	(dalam rupiah)	
	TA 2012 <i>(modified)</i>	TA 2011 <i>(modified)</i>
Penerimaan Non Anggaran PFK Karena Kesalahan Rekening	3.785.941.582.780	5.198.958.954.785
Pengeluaran Non Anggaran PFK Karena Kesalahan Rekening	(3.803.066.475.909)	(4.247.598.581.937)
Jumlah PFK terkait Kesalahan Rekening dan SP2D Retur (Neto)	(36.124.482.422)	809.360.011.780
Koreksi Pemindahbukuan		
Koreksi Pengeluaran Pemindahbukuan	269.670.566.350	78.142.922.443
Koreksi Penerimaan Pemindahbukuan	(246.430.161.700)	(77.046.027.425)
Jumlah Koreksi Pemindahbukuan	18.231.434.590	286.095.016
Jumlah Penerimaan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Karena Kesalahan Rekening	(17.893.087.832)	809.556.106.788

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHONEYONO

DAFTAR

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2012 DAN 2011**
(dalam rupiah)

KODE MA	URAIAN MA	ANGGARAN		REALISASI TAHUN ANGGARAN 2012		%		REALISASI TAHUN ANGGARAN 2011		KENAIKAN/ PENURUNAN		% KENAIKAN/ PENURUNAN	
		3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6						
1	2												
4	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	1.358.205.043.200.000	1.338.109.629.172.960	98,52%	1.210.599.653.359.410	127.509.975.813.543	10,53%						
41	Penerimaan Perpajakan	1.016.237.341.511.000	980.518.133.319.318	96,49%	873.873.892.399.381	106.644.240.919.938	12,20%						
411	Pendapatan Pajak Dalam Negeri	968.263.241.511.000	930.861.839.509.437	96,13%	819.752.426.342.423	111.109.413.167.015	13,55%						
4111	Pendapatan Pajak Penghasilan	513.650.160.000.000	465.069.641.549.058	90,54%	431.121.712.728.316	33.621.304.721.474	7,80%						
41111	Pendapatan Pajak PPh Migas	67.916.730.000.000	83.460.868.001.301	122,89%	73.095.496.754.938	10.365.371.246.363	14,18%						
411111	Pendapatan PPh Minyak Bumi	27.550.390.000.000	32.976.020.386.272	119,69%	25.941.792.126.888	7.034.228.269.386	27,12%						
411112	Pendapatan PPh Gas Alam	40.366.340.000.000	50.484.720.419.496	125,07%	47.153.704.628.050	3.331.015.791.449	7,06%						
411119	Pendapatan PPh Migas Lainnya	-	127.196.529	-	-	127.196.529	-						
41112	Pendapatan PPh Non-Migas	445.733.430.000.000	377.942.175.058.445	84,79%	354.683.553.082.514	23.258.621.975.931	6,56%						
411121	Pendapatan PPh Pasal 21	89.195.190.000.000	79.599.440.782.334	89,24%	66.751.563.274.222	12.847.877.508.112	19,25%						
411122	Pendapatan PPh Pasal 22	7.917.680.000.000	5.506.864.819.126	69,55%	4.946.498.044.246	560.365.874.880	11,33%						
411123	Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	38.186.630.000.000	31.610.164.408.871	82,78%	28.291.747.589.939	3.318.416.818.932	11,73%						
411124	Pendapatan PPh Pasal 23	28.486.960.000.000	20.302.691.144.666	71,27%	18.702.757.359.018	1.599.933.786.045	8,55%						
411125	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	5.615.840.000.000	3.763.462.234.946	67,02%	3.287.028.613.473	476.433.621.476	14,49%						
411126	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	191.131.540.000.000	152.131.951.560.030	79,50%	154.609.563.560.736	(2.477.611.980.706)	-1,60%						
411127	Pendapatan PPh Pasal 26	29.793.110.000.000	24.610.565.469.335	82,60%	27.239.272.558.180	(2.628.707.088.845)	-9,65%						
411128	Pendapatan PPh Final	55.365.560.000.000	60.385.711.978.972	109,07%	50.814.558.376.084	9.571.153.602.888	18,84%						
411129	Pendapatan PPh Nonmigas Lainnya	42.930.000.000	31.332.640.165	73,00%	40.572.806.616	(9.240.166.451)	-22,77%						
41113	Pendapatan PPh Fiskal	-	1.338.076.044	-	4.026.576.864	(2.688.500.820)	-66,77%						
411131	Pendapatan PPh Fiskal Luar Negeri	-	1.338.076.044	-	4.026.576.864	(2.688.500.820)	-66,77%						
41114	Pendapatan PPh ditanggung Pemerintah	-	3.665.260.413.269	-	3.338.636.314.000	326.624.099.269	9,78%						

Daftar 1. A

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (AUDITED)

411141	Pendapatan PPh ps1 21 ditanggung Pemerintah	1.900.413.269	-	-	-	1.900.413.269	
411142	Pendapatan PPh ps1 22 ditanggung Pemerintah	-	-	-	-	-	
411144	Pendapatan PPh ps1 23 ditanggung Pemerintah	-	-	-	-	-	
411146	Pendapatan PPh ps1 25/29 ditanggung Pemerintah	815.400.000.000	-	-	888.462.528.000	(63.062.528.000)	-9,24%
411147	Pendapatan PPh ps1 26 ditanggung Pemerintah	2.847.960.000.000	-	-	2.440.173.786.000	407.786.214.000	16,71%
411148	Pendapatan PPh Final ditanggung Pemerintah	-	-	-	-	-	
4112	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	335.055.979.511.000	100,45%	277.800.076.679.384	59.784.500.808.901		21,52%
41121	Pendapatan PPN	318.709.170.377.790	-	264.377.921.470.207	54.331.348.907.583		20,55%
411211	Pendapatan PPN Dalam Negeri	191.936.627.053.476	-	157.178.437.931.519	34.758.389.121.957		22,11%
411212	Pendapatan PPN Impor	126.610.119.566.338	-	107.000.114.903.086	19.610.004.663.252		18,33%
411219	Pendapatan PPN Lainnya	162.223.757.976	-	198.268.635.802	(37.044.877.626)		-18,59%
41122	Pendapatan PPhBM	18.375.407.110.495	-	13.422.255.209.177	5.453.151.901.318		40,63%
411221	Pendapatan PPhBM Dalam Negeri	10.428.737.657.072	-	8.040.526.451.743	2.388.211.205.329		29,70%
411222	Pendapatan PPhBM Impor	8.422.773.558.033	-	5.374.086.456.215	3.048.677.111.818		56,73%
411229	Pendapatan PPhBM Lainnya	23.895.885.390	-	7.632.301.219	16.263.584.171		213,09%
4113	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	29.687.507.000.000	97,58%	29.893.164.324.396	(924.301.622.114)		-3,09%
41131	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	28.968.862.702.282	-	29.893.164.324.396	(924.301.622.114)		-2,80%
411311	Pendapatan PBB Perdesaan	1.144.421.183.968	-	1.177.946.608.922	(32.925.424.856)		-7,56%
411312	Pendapatan PBB Perkotaan	6.104.099.730.881	-	6.603.174.032.018	(499.074.301.337)		12,30%
411313	Pendapatan PBB Perkebunan	1.107.246.997.455	-	985.954.945.312	121.292.052.143		1,29%
411314	Pendapatan PBB Kehutanan	254.533.056.441	-	251.302.697.483	3.230.358.958		42,16%
411315	Pendapatan PBB Pertambangan	565.247.025.160	-	397.619.412.998	167.627.612.262		-3,34%
411316	Pendapatan PBB Migas	19.793.314.708.579	-	20.477.766.627.863	(684.451.919.284)		
4114	Pendapatan BPHTB	-	-	(730.151.679)	730.151.679		
41141	Pendapatan BPHTB	-	-	(730.151.679)	730.151.679		
411411	Pendapatan BPHTB	-	-	(730.151.679)	730.151.679		
4115	Pendapatan Cukai	95.027.881.221.457	114,12%	77.010.010.513.795	18.017.870.607.662		23,40%
41151	Pendapatan Cukai	93.266.625.000.000	-	77.010.010.513.795	18.017.870.607.662		23,40%
411511	Pendapatan Cukai Hasil Tembakau	79.856.130.000.000	-	73.251.428.868.906	17.302.209.956.068		23,62%

DAFTAR LRA 229

Daftar 1. A

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (AUDITED)

411512	Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol	124.135.000.000	155.581.715.856	125,33%	152.953.431.380	2.628.284.476	1,72%
411513	Pendapatan Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol	3.284.360.000.000	4.292.843.125.012	130,71%	3.583.211.248.930	709.631.876.182	19,80%
411514	Pendapatan Denda Administrasi Cukai	-	17.154.851.382	-	11.381.400.196	5.773.451.186	50,73%
411519	Pendapatan Cukai Lainnya	-	8.862.704.233	-	11.035.664.483	(2.372.960.250)	-21,50%
4116	Pendapatan Pajak Lainnya	5.531.970.000.000	4.210.876.548.355	74,77%	3.928.192.148.211	282.684.400.144	7,20%
41161	Pendapatan Pajak Lainnya	-	3.879.749.896.174	-	3.611.492.492.012	268.257.404.162	7,43%
411611	Pendapatan Bea Meterai	-	1.104.415.931.742	-	1.060.800.968.721	43.615.063.021	4,11%
411612	Pendapatan Dari Penjualan Benda Meterai	-	2.772.232.946.670	-	2.548.804.494.349	223.428.452.321	8,77%
411613	Pendapatan PPh Batubara	-	769.733	-	61.093.244	(60.323.511)	-98,74%
411619	Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	-	3.100.248.029	-	1.826.035.698	1.274.212.331	69,78%
41162	Pendapatan Bunga Penghasilan Pajak	-	331.126.652.181	-	316.699.656.199	14.426.995.982	4,56%
411621	Pendapatan Bunga Penghasilan PPh	-	184.769.866.516	-	84.726.712.822	100.043.173.694	118,08%
411622	Pendapatan Bunga Penghasilan PPN	-	143.785.207.687	-	224.199.680.842	(80.414.472.955)	-35,87%
411623	Pendapatan Bunga Penghasilan PPhBM	-	1.698.098.985	-	204.067.285	1.494.031.710	732,13%
411624	Pendapatan Bunga Penghasilan PTL	-	873.458.983	-	7.569.195.450	(6.695.736.467)	-88,46%
41163	Pendapatan Bunga Penghasilan Pajak Ditanggung Pemerintah	-	-	-	-	-	-
411631	Pendapatan Bunga Penghasilan PPh Ditanggung Pemerintah	-	-	-	-	-	-
412	Pajak Perdagangan Internasional	47.944.100.000.000	49.656.293.809.881	103,57%	54.121.466.056.958	(4.465.172.247.077)	-8,25%
4121	Pendapatan Bea Masuk	24.737.900.000.000	28.418.359.044.419	114,88%	25.255.863.309.375	3.162.495.735.044	12,48%
41211	Pendapatan Bea Masuk	-	28.418.359.044.419	-	25.255.863.309.375	3.162.495.735.044	12,48%
412111	Pendapatan Bea Masuk	-	26.708.623.995.738	-	23.783.424.990.710	2.925.099.005.028	12,30%
412112	Pendapatan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM Nihil)	-	25.634.038	-	3.173.020.085	(3.147.386.047)	-99,19%
412113	Pendapatan Denda Administrasi Pabean	-	465.920.844.465	-	391.846.604.781	74.074.239.684	18,90%
412114	Pendapatan Bea Masuk Dalam Rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)	-	1.076.608.693.885	-	946.668.042.226	129.940.651.459	13,73%
412115	Denda atas sanksi administrasi dari pelaksanaan pengawasan terhadap barang tertentu yang pengangkutannya Di Dalam Daerah Pabean (Antar Pulau)	-	(16.070.663)	-	15.000.000	(31.070.663)	-207,14%

DAFTAR LRA 230

Daftar 1. A

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (AUDITED)

412116	Pendapatan Bea Masuk Dianggung Pemerintah (BM-DPT)	99.813.751.137	73.310.676.000		26.503.075.137				36,15%
412119	Pendapatan Pabean Lainnya	67.482.296.009	67.424.976.573		57.320.436				0,09%
4122	Pendapatan Bea Keluar	21.237.934.765.462	28.855.802.747.883	91,52%	(7.617.867.982.121)				-26,40%
41221	Pendapatan Bea Keluar	21.237.934.765.462	28.855.802.747.883		(7.617.867.982.121)				-26,40%
412211	Pendapatan Bea Keluar	21.212.623.814.884	28.839.607.612.305		(7.626.983.797.421)				-26,45%
412212	Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar	22.318.787.523	12.094.053.103		10.224.734.420				84,54%
412213	Pendapatan Bunga Bea Keluar	2.992.163.055	3.901.082.175		(908.919.120)				-23,30%
42	Penerimaan Negara Bukan Pajak	351.904.746.666.662	331.471.921.098.730	103,13%	20.332.925.568.133				6,13%
421	Penerimaan Sumber Daya Alam	225.843.973.463.751	213.823.349.552.827	104,00%	12.020.623.910.925				5,62%
4211	Pendapatan Minyak Bumi	144.717.087.022.468	141.303.493.452.283	95,94%	3.413.593.570.185				2,42%
421111	Pendapatan Minyak Bumi	144.717.087.022.468	141.303.493.452.283		3.413.593.570.185				2,42%
4212	Pendapatan Gas Bumi	61.106.427.615.761	52.187.085.923.633	128,74%	8.919.341.692.128				17,09%
421211	Pendapatan Gas Bumi	61.106.427.615.761	52.187.085.923.633		8.919.341.692.128				17,09%
4213	Pendapatan Pertambangan Umum	15.274.120.402.000	15.369.789.735.678	103,95%	(492.401.919.074)				-3,01%
421311	Pendapatan Iuran Tetap	702.807.228.000	261.174.184.719	51,05%	97.594.258.942				37,37%
421312	Pendapatan Royalti	14.571.313.174.000	16.108.615.540.959	106,50%	(689.996.179.017)				-3,66%
4214	Pendapatan Kehutanan	3.074.886.191.000	3.216.476.006.406	103,69%	(28.137.643.886)				-0,87%
42141	Pendapatan Dana Rehabilitasi	1.504.623.560.000	1.796.009.923.150	108,14%	(168.910.779.192)				-9,40%
421411	Pendapatan Dana Rehabilitasi	1.504.623.560.000	1.796.009.923.150		(168.910.779.192)				-9,40%
42142	Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan	1.304.886.766.000	868.650.766.502	75,58%	117.621.870.853				13,54%
421421	Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan	1.304.886.766.000	868.650.766.502		117.621.870.853				13,54%
42143	Pendapatan IUUP (IHPH)	38.083.295.000	119.264.958.237	269,30%	(16.704.802.147)				-14,01%
421431	Pendapatan IUUP (IHPH) Tanaman Industri	85.636.000	398.640	0,47%	398.640				
421432	Pendapatan IUUP (IHPH) Bambu	-	-	-	-				
421433	Pendapatan IUUP (IHPH) Tanaman Rotan	-	2.664.000	-	2.664.000				
421434	Pendapatan IUUP (IHPH) Hutan Alam	37.997.599.000	119.264.958.237	269,80%	(16.707.864.787)				-14,01%
42144	Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan	227.293.590.000	432.550.358.517	207,84%	39.856.066.600				9,21%
421441	Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan	227.293.590.000	432.550.358.517		39.856.066.600				9,21%

DAFTAR LRA 2/1

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (AUDITED)

Daftar 1. A

4215	Pendapatan Perikanan	150.000.100.000	215.766.602.000	143,84%	183.802.161.080	31.964.440.920	17,39%
42151	Pendapatan Perikanan	150.000.100.000	215.766.602.000	143,84%	183.802.161.080	31.964.440.920	17,39%
421511	Pendapatan Perikanan	150.000.100.000	215.766.602.000	143,84%	183.802.161.080	31.964.440.920	17,39%
4216	Pendapatan Pertambangan Panas Bumi	348.810.000.000	738.866.044.398	211,85%	562.702.273.747	176.263.770.652	31,32%
42161	Pendapatan Pertambangan Panas Bumi	348.810.000.000	738.866.044.398	211,85%	562.702.273.747	176.263.770.652	31,32%
421611	Pendapatan Pertambangan Panas Bumi	348.810.000.000	738.866.044.398	211,85%	562.702.273.747	176.263.770.652	31,32%
422	Pendapatan Bagian Laba BUMN	30.776.336.250.000	30.797.872.717.670	100,07%	28.183.873.126.600	2.613.999.591.070	9,27%
4221	Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	30.776.336.250.000	30.797.872.717.670	100,07%	28.183.873.126.600	2.613.999.591.070	9,27%
42211	Pendapatan Laba BUMN Perbankan	5.000.000.000.000	4.070.293.177.056	81,41%	3.627.944.571.970	442.348.605.086	12,19%
422111	Pendapatan Laba BUMN Perbankan	5.000.000.000.000	4.070.293.177.056	81,41%	3.627.944.571.970	442.348.605.086	12,19%
42212	Pendapatan Laba BUMN Non-Perbankan	25.776.336.250.000	26.727.679.540.615	103,69%	24.556.028.554.630	2.171.650.985.985	8,64%
422121	Pendapatan Laba BUMN Non-Perbankan	25.776.336.250.000	26.727.679.540.615	103,69%	24.556.028.554.630	2.171.650.985.985	8,64%
423	Pendapatan PHBP Lainnya	72.789.374.473.000	73.458.504.524.407	100,91%	69.360.502.832.532	4.098.001.691.875	5,91%
4231	Pendapatan Penjualan dan Sewa	25.769.214.556.000	23.253.375.898.356	90,24%	21.650.214.589.444	1.603.161.308.912	7,40%
42311	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Sitaan	13.830.123.278.000	9.792.221.299.572	70,80%	9.525.540.319.958	266.680.979.614	2,80%
423111	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan	3.475.448.000	12.405.382.079	356,94%	8.862.552.173	3.552.839.906	40,13%
423112	Pendapatan Penjualan Hasil Peternakan dan Perikanan	17.089.101.000	25.092.957.789	146,75%	18.064.793.335	7.038.064.454	38,98%
423113	Pendapatan Penjualan Hasil Tambang	13.689.882.571.000	8.136.063.530.880	59,39%	7.874.419.017.285	261.644.513.605	3,32%
423114	Pendapatan Penjualan Hasil Sitaan/Rampasan dan Harta Peninggalan	40.000.000.000	309.451.289.769	773,63%	229.776.103.763	79.675.186.006	34,66%
423115	Pendapatan Penjualan Obat-Obatan dan Hasil Farmasi Lainnya	65.835.026.000	31.057.945	47,19%	277.289.024	(246.231.679)	-88,80%
423116	Pendapatan Penjualan Informasi, Penerbitan, Film, Survey, Pemetaan dan Hasil Cetakan Lainnya	208.316.000	63.263.293.144	30,37%	56.696.904.982	6.566.388.162	11,56%
423117	Pendapatan Penjualan Dokumen-Dokumen Pelelangan	208.316.000	239.757.944	115,09%	286.085.900	(46.327.956)	-16,19%
423118	Pendapatan Penjualan Cadangan Beras Pemerintah Dalam Rangka Operasi Pasar Murni	3.622.816.000	1.241.170.700.122	34,26%	1.330.536.272.413	(89.365.572.291)	-6,72%
423119	Pendapatan Penjualan Lainnya	3.622.816.000	4.513.420.480	124,58%	6.641.301.083	(2.127.880.593)	-32,04%
42312	Pendapatan Penjualan Aset	5.193.011.000	126.184.876.373	2429,90%	134.372.526.647	(8.187.650.174)	-6,09%

DAFTAR LRA 232

Daftar 1. A

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (AUDITED)

423121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	52.039.000	12.444.700.247	239.14,18%	2.725.200.373	9.719.499.874	356,65%
423122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	1.596.978.000	7.228.982.579	452,85%	1.807.702.673	5.421.279.906	299,90%
423123	Pendapatan Penjualan Sewa Beli		36.661.280.535	-	40.584.546.231	(3.923.265.696)	-9,67%
423124	Pendapatan Penjualan Aset Bekas Milik Asing/ Cina		2.546.469.402	-	898.345.500	1.648.123.902	183,46%
423125	Pendapatan dari Tukar Menukar Tanah, Gedung dan Bangunan		558.000	-		558.000	
423126	Pendapatan dari Tukar Menukar Jalan, Irigasi dan Jaringan		519.000	-		519.000	
423127	Pendapatan dari Tukar Menukar Jalan, Irigasi dan Jaringan		1.000.000	-		1.000.000	
423129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN lainnya	3.544.994.000	67.301.366.610	1898,49%	88.356.731.770	(21.055.365.160)	-23,83%
42313	Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas	11.782.750.000.000	13.063.747.762.845	110,78%	11.803.490.967.212	1.260.256.795.433	10,68%
423131	Pendapatan Bersih Hasil Penjualan Bahan Bakar Minyak		-	-	1.375.672	(1.375.672)	-100,00%
423132	Pendapatan Minyak Mentah (DMO)	11.782.750.000.000	12.339.481.343.731	104,54%	11.757.959.720.968	582.121.622.763	4,95%
423139	Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas		724.266.418.914	-	46.129.870.572	678.136.548.342	1470,06%
42314	Pendapatan Sewa	141.148.267.000	271.221.959.766	192,15%	186.810.775.728	84.411.184.038	45,19%
423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	121.731.633.000	198.768.866.357	164,11%	45.451.619.659	154.317.046.698	339,52%
423142	Pendapatan Sewa Peralatan, dan Mesin		41.281.940.524	959,10%	100.928.367.267	(59.686.426.743)	-59,12%
423143	Pendapatan Sewa Jalan, Irigasi, dan Jaringan		1.491.636.660	-	4.032.068.912	(2.540.432.252)	-63,01%
423144	Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan		245.943.085	-		245.943.085	
423145	Pendapatan dari KSP Peralatan dan Mesin		43.000	-		43.000	
423146	Pendapatan dari KSP Jalan, Irigasi dan Jaringan		23.806.250	-		23.806.250	
423147	Pendapatan dari Bangun, Guna, Serah (BGS)		36.210.000	-		36.210.000	
423148	Pendapatan dari Bangun, Serah, Guna (BSG)			-			
423149	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN lainnya	15.114.424.000	28.393.913.980	187,86%	36.398.719.980	(8.004.806.000)	-21,99%
4232	Pendapatan Jasa	27.099.595.145.000	26.207.952.723.750	96,71%	26.634.516.584.922	(646.903.561.095)	-2,43%
42321	Pendapatan Jasa I	15.811.540.207.000	16.145.943.608.009	102,11%	16.222.029.958.308	(76.086.250.299)	-0,47%
423211	Pendapatan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan Lainnya	14.889.250.000	16.463.326.144	110,50%	23.068.984.569	(6.625.658.425)	-28,70%
423212	Pendapatan Tempat Hiburan/ Taman/ Museum dan Pungutan Usaha Parwisata Alam (PUPA)	15.282.066.000	17.398.110.910	113,85%	18.435.005.544	(1.036.894.634)	-5,62%
423213	Pendapatan Surat Keterangan, Visa/Paspor	1.812.364.040.000	1.883.037.417.182	103,90%	1.728.221.763.186	154.815.653.996	8,96%
423214	Pendapatan Hak dan Perijinan	10.452.874.455.000	10.534.658.683.147	100,78%	10.079.440.234.930	455.218.448.157	4,52%
423215	Pendapatan Sensor/Karantina, Pengawasan/Pemeriksaan	114.182.502.000	172.275.214.737	150,88%	141.487.021.280	30.788.193.457	21,76%

DAFTAR LRA 233

Daftar 1. A

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (AUDITED)

423216	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, dan Teknologi sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi Masing-masing Kementerian dan Pendapatan DJBC	946.106.871.167	98,17%	1.730.985.001.598	(784.878.130.431)	-45,34%
423217	Pendapatan Jasa Bendera, Keperluan dan Kenavigasian	68.255.730.088	90,37%	68.425.848.122	(1.168.918.034)	-1,69%
423218	Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama	996.728.925.891	148,71%	1.176.013.919.573	(179.284.993.682)	-15,25%
423219	Pendapatan pelayanan pertanian	1.511.019.328.943		1.254.932.279.446	0,00%	
42322	Pendapatan Jasa II	1.061.461.089.000	127,78%	1.371.822.057.319	(15.314.104.079)	-1,12%
423221	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	357.998.336.000	122,30%	558.885.378.409	(122.051.843.978)	-21,80%
423222	Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi	602.960.948.000	111,35%	608.889.747.166	62.507.783.284	10,27%
423223	Pendapatan Iuran Lelang Untuk Fakir Miskin	166.666		6.468.867	(6.300.201)	-87,42%
423224	Pendapatan Jasa Catatan Sipil	15.592		-	15.592	
423225	Pendapatan Biaya Pengalihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa	935.564.387	23,24%	988.174.444	(52.610.057)	-5,32%
423226	Pendapatan Uang Penerimaan	290.720.908		1.106.860.702	(816.169.794)	-73,74%
423227	Pendapatan Bea Lelang	145.027.944.278	346,74%	111.461.806.567	33.565.537.711	30,11%
423228	Pendapatan Biaya Pengurusan Pinang dan Lelang Negara	94.507.923.026	211,87%	77.259.612.769	17.248.310.257	22,33%
423229	Pendapatan Registrasi Dokter dan Dokter Gigi	6.305.153.502	63,05%	12.013.990.395	(5.708.836.893)	-47,52%
42323	Pendapatan Jasa Luar Negeri	505.878.388.074	102,61%	454.063.043.127	51.815.344.947	11,41%
423231	Pendapatan dari Pemberian Surat Perjalanan RI	396.972.535.000	85,39%	324.666.971.475	14.306.862.503	4,41%
423232	Pendapatan dari Jasa Pengurusan Dokumen Konsuler	85.641.724.000	80,12%	63.067.780.745	5.554.238.316	8,81%
423239	Pendapatan Rutin Lainnya dari Luar Negeri	98.292.505.035	947,35%	66.338.290.907	31.954.214.128	48,17%
42324	Pendapatan Layanan Jasa Perbankan	12.000.000	2453,48%	698.213.800	(403.786.358)	-57,83%
423241	Pendapatan Layanan Jasa Perbankan	294.417.442	85,41%	4.835.359.321.429	(517.457.391.255)	-10,48%
42325	Pendapatan atas Pengelolaan Rekening Tunggal Perbendaharaan (TSA) dan/atau atas Penempatan Uang Negara	5.172.801.839.000				
423251	Pendapatan Atas Penempatan Uang Negara pada Bank Umum	86.812.037.000	96,83%	74.666.280.250	9.478.428.931	12,69%
423252	Pendapatan Atas Penempatan Uang Negara pada Bank Umum			3.528.960	(3.528.960)	-100,00%
423253	Pendapatan dari Pelaksanaan Treasury Notional Pooling	125.000.000.000	141,51%	193.977.521.312	(17.091.553.881)	-8,81%
423264	Pendapatan Atas Penempatan Uang Negara pada Bank Indonesia	4.960.989.742.000	83,79%	4.666.711.991.507	(509.840.737.945)	-10,93%
42326	Pendapatan Jasa Kepolisian	4.232.362.910.000	79,82%	3.295.511.200.017	82.960.163.271	2,52%
423261	Pendapatan Surat Ijin Mengemudi (SIM)	997.071.000.000	91,81%	956.633.348.681	(41.266.570.968)	-4,31%

DAFTAR LRA 234

Daftar 1. A

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (AUDITED)

423262	Pendapatan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	961.147.985.000	905.654.397.575	94,23%	882.208.725.500	23.445.672.075	2,66%
423263	Pendapatan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK)	151.117.000.000	58.860.605.000	38,87%	4.328.630.000	54.561.975.000	1260,49%
423264	Pendapatan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP)	1.033.646.500.000	884.776.925.000	85,60%	896.525.547.151	(11.748.622.151)	-1,31%
423265	Pendapatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)	815.772.000.000	582.548.043.000	71,41%	522.356.460.000	60.191.583.000	11,52%
423266	Pendapatan Ujian Keterampilan Mengemudi Melalui Simulator	271.000.000.000	29.067.365.000	10,73%	31.081.543.885	(2.014.178.686)	-6,48%
423267	Pendapatan Penerbitan Surat Ijin Senjata Api dan Bahan Peledak	2.608.425.000	2.167.250.000	83,09%	2.376.945.000	(209.695.000)	-8,82%
42327	Pendapatan Jasa Pelayanan Tol	-	193.326.847.706	-	-	193.326.847.706	-
423271	Pendapatan Jasa Pelayanan Tol Suramadu	-	193.326.847.706	-	-	193.326.847.706	-
42328	Pendapatan Jasa Kepolisian II	288.029.500.000	122.939.950.129	42,68%	95.921.998.922	27.017.951.207	28,17%
423281	Pendapatan Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Ke Luar Daerah	188.250.000.000	56.544.395.000	30,04%	47.653.063.281	8.891.331.719	18,66%
423282	Pendapatan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian	36.364.500.000	53.895.772.000	148,21%	36.189.633.800	17.705.938.200	48,93%
423283	Pendapatan Penerbitan Surat Keterangan Laport Diri	8.515.000.000	11.609.850.000	136,35%	10.211.880.000	1.397.970.000	13,69%
423284	Pendapatan Penerbitan Kartu Sidik Jari (Inafis Card)	52.500.000.000	50.430.000	0,10%	20.885.000	29.545.000	141,47%
423285	Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu Lintas	2.400.000.000	839.403.129	34,88%	1.846.336.841	(1.006.933.712)	-54,54%
42329	Pendapatan Jasa Lainnya	40.397.371.000	86.888.365.688	215,08%	259.310.892.000	(172.422.526.312)	-66,49%
423291	Pendapatan Jasa Lainnya	40.397.371.000	86.888.365.688	215,08%	259.310.892.000	(172.422.526.312)	-66,49%
4233	Pendapatan Bunga	4.421.769.862.000	11.667.860.412.611	263,88%	4.893.238.511.754	6.774.721.900.857	138,45%
42331	Pendapatan Bunga	1.843.587.667.000	3.370.659.392.659	182,83%	2.169.804.446.254	1.200.854.946.405	55,34%
423311	Pendapatan Bunga atas Investasi Dalam Obligasi	-	-	-	740	(740)	-100,00%
423312	Pendapatan PPA (eks BPPN) atas Bunga Obligasi	-	-	-	58.100	(68.100)	-100,00%
423313	Pendapatan Bunga Dari Piutang dan Penerusan Pinjaman	1.843.587.667.000	1.868.554.108.681	102,49%	1.870.775.465.928	18.778.642.955	1,00%
423314	Pembalihan Pendapatan Bunga dari Pemberian Kredit Pemerintah	-	141.139.610.618	-	7.200	141.139.603.418	196027227,0%
423315	Pendapatan Bunga dari Rekening Pembangunan Hutan	-	327.862.371.933	-	296.540.178.988	31.312.192.935	10,56%
423319	Pendapatan Bunga Lainnya	-	1.012.113.301.427	-	2.488.734.390	1.009.624.567.037	40567,79%
42332	Pendapatan Gain On Bond Redemption	-	-	-	760.000.000	(760.000.000)	-100,00%
423321	Pendapatan Gain On Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Dalam Negeri Jangka Panjang	-	-	-	760.000.000	(760.000.000)	-100,00%
42333	Pendapatan Premium atas Obligasi Negara	2.578.182.185.000	8.297.301.019.952	321,93%	2.722.674.065.500	5.574.626.954.452	204,75%
423331	Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Negeri/Rupiah	2.291.309.428.000	7.928.964.713.100	346,09%	2.435.801.308.500	5.494.163.404.600	225,56%
423332	Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Valuta Asing	-	213.100.688.852	-	-	213.100.688.852	-

DAFTAR LRA 235

Daftar 1. A

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (AUDITED)

423333	Pendapatan Premium atas Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam negeri/luar	286.872.757.000	154.235.618.000	53,75%	286.872.757.000	0,00%
42334	Pendapatan Fee Lainnya atas Surat Berharga Negara	-	-	-	-	-
423341	Pendapatan Fee Lainnya atas Transaksi Securities lending SUN	-	-	-	-	-
4234	Pendapatan Keajaiban dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi	98.724.105.000	251.243.211.806	254,49%	240.761.503.805	4,35%
42341	Pendapatan Keajaiban dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi	98.724.105.000	251.243.211.806	254,49%	240.761.503.805	4,35%
423411	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	825.000.000	3.634.086.227	440,50%	2.398.961.316	1.235.124.911
423412	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	250.000.000	658.727.059	263,49%	329.737.000	328.990.059
423413	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Ujian Pada Penitiera Badan Pengadilan (Peradilan)	210.000.000	6.328.338.471	3013,49%	6.654.804.355	(226.465.884)
423414	Pendapatan Hasil Denda dan Sebagainya	6.060.000.000	183.316.515.295	3030,03%	191.196.884.305	(7.880.168.010)
423415	Pendapatan Ongkos Perkar	25.760.605.000	22.144.284.459	86,00%	15.654.504.145	6.589.780.314
423416	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Korupsi	2.000.000.000	1.296.984.660	64,85%	6.767.713.500	(5.470.768.840)
423417	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Gratifikasi	63.638.500.000	21.150.000	0,00%	48.955.000	(46.840.000)
423419	Pendapatan Keajaiban dan Peradilan Lainnya	-	33.862.190.435	-	17.910.144.184	15.952.046.251
4235	Pendapatan Pendidikan	2.365.735.509.000	2.375.603.736.186	100,42%	2.965.915.235.801	(590.311.499.615)
42351	Pendapatan Pendidikan	2.365.735.509.000	2.375.603.736.186	100,42%	2.965.915.235.801	(590.311.499.615)
423511	Pendapatan Uang Pendidikan	1.612.958.071.000	1.683.616.183.253	104,38%	2.335.962.221.221	(652.346.037.968)
423512	Pendapatan Uang Ujian Masuk, Kenakan Tingkat, dan Akhir	84.753.136.000	71.608.700.610	84,49%	65.785.580.265	5.823.120.345
423513	Pendapatan Uang Ujian Untuk Menjalankan Praktek	137.573.950.000	59.850.019.750	43,50%	50.851.274.636	8.998.745.114
423519	Pendapatan Pendidikan Lainnya	530.450.352.000	560.528.832.573	105,67%	513.316.159.679	47.212.672.894
4236	Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi	62.250.000.000	158.144.829.032	254,05%	92.848.578.990	65.296.250.642
42361	Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi	62.250.000.000	158.144.829.032	254,05%	92.848.578.990	65.296.250.642
423611	Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Ditetapkan	18.160.000.000	88.535.075.353	487,80%	19.288.796.467	69.246.278.882
423612	Pendapatan Gratifikasi yang Ditetapkan KPK Menjadi Milik Negara	19.900.000.000	2.546.845.878	12,80%	3.183.654.370	(636.808.492)
423613	Pendapatan dari Pengembalian Penyalahgunaan Penyelenggaraan	-	338.979.472	-	145.460.900	193.518.572

DAFTAR LRA 236

Daftar 1. A

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (AUDITED)

423614	Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi yang Ditetapkan di Pengadilan	24.200.000.000	66.325.599.603	274,07%	70.114.738.636	(3.789.139.033)	-5,40%
423615	Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara	-	338.328.720	-	115.928.017	282.400.703	243,60%
4237	Pendapatan Iuran dan Denda	474.350.972.000	1.459.529.823.727	307,69%	1.319.106.524.583	140.423.199.144	10,65%
42371	Pendapatan Iuran Badan Usaha	437.502.302.000	1.059.505.758.801	242,17%	861.670.014.154	197.835.744.647	22,96%
423711	Pendapatan Iuran Badan Usaha dari kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM	359.252.302.000	810.911.080.868	225,72%	632.396.034.868	178.515.045.990	28,23%
423712	Pendapatan Iuran Badan Usaha dari kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa	78.250.000.000	179.194.147.167	229,00%	151.050.193.216	28.143.953.951	18,63%
423713	Pendapatan Iuran Badan Usaha di Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan	-	69.400.530.776	-	78.223.786.070	(8.823.255.294)	-11,28%
42372	Pendapatan Dana Pengamanan Hutan	-	1.840.358.875	-	733.007.131	1.107.351.744	15,107%
423721	Pendapatan Dana Pengamanan Hutan	-	1.840.358.875	-	733.007.131	1.107.351.744	15,107%
42373	Pendapatan dari Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam	31.825.200.000	184.307.131.542	579,12%	140.713.701.218	43.593.430.424	30,98%
423731	Pendapatan Iuran Menangkap/Mengambil/Mengangkut Satwa Liar/Mengambil/Mengangkut Tumbuhan Alam Hidup atau Mati	6.571.833.000	6.430.980.457	97,86%	6.215.444.231	215.536.226	3,47%
423732	Pungutan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (PIPPA)	3.019.901.000	358.418.000	11,87%	102.922.500	255.495.500	248,24%
423733	Pungutan Izin Pengusahaan Taman Buru (PIPTB)	-	-	-	-	-	-
423734	Pungutan Izin Berburu di Taman Buru dan Areal Buru (PIB)	-	-	-	300.000	(300.000)	-100,00%
423735	Pungutan masuk Obyek Wisata Alam	22.138.066.000	20.039.871.992	90,52%	36.984.234.576	(16.944.362.584)	-45,82%
423736	Iuran Hasil Usaha Pengusahaan Pariwisata Alam (IHUPA)	95.400.000	188.262.278	197,34%	118.212.233	70.050.045	59,26%
423737	Iuran Hasil Usaha Perburuan di Taman Buru (IHUPTB)	-	750.000	-	175.000	575.000	328,57%
423738	Pendapatan Pengantian Nilai Tegakan	-	157.298.848.915	-	97.292.412.678	59.996.436.237	61,67%
42374	Pendapatan Penanaman dan Kompensasi Pelestarian Sumber Daya Alam Kelautan	-	-	-	-	-	-
423741	Pendapatan Penanaman dan Kompensasi Pelestarian Sumber Daya Alam Kelautan	-	-	-	-	-	-
42375	Pendapatan Denda I	5.023.470.000	213.956.984.631	4257,16%	315.818.319.492	(101.961.334.861)	-32,26%
423751	Pendapatan Denda Palangaran Eksploitasi Hutan	-	13.438.646.875	-	4.281.304.178	9.157.342.697	213,89%
423752	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	4.923.470.000	170.053.946.951	3453,95%	140.752.619.522	29.301.327.329	20,82%

DAFTAR LRA 237

Daftar 1. A

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (AUDITED)

423753	Pendapatan Denda Administrasi BPHB		44.097.949		239.219.700		(185.122.351)	-81,57%
423754	Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Pasar Modal		18.759.228.018		16.062.817.184		2.876.410.834	16,84%
423755	Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha	100.000.000	8.409.191.060		150.962.722.445		(142.553.531.385)	-84,43%
423756	Pendapatan Denda Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Bersaldo Mihil dalam Rangka TSA		419.944.000		517.649.929		(97.705.929)	-18,87%
423757	Pendapatan Denda atas Pelaksanaan Penempatan Uang Negara di Bank Umum dan Bank Indonesia		23.067.950		-		23.067.950	
423758	Pendapatan Denda atas Pelaksanaan Treasury Notional Pooling		140.162		1.554.710		(1.414.548)	-90,98%
423759	Pendapatan Denda atas Kekurangan/Keterlambatan Pelimpahan Penyerahan Negara oleh Bank/Pos Persepsi		2.708.722.366		2.980.431.824		(271.709.458)	-9,12%
42376	Pendapatan Denda II		19.589.778		171.582.588		(151.992.810)	-88,58%
423761	Pendapatan Denda atas Kekurangan/Keterlambatan Pelimpahan Saldo BO II ke BO I		500.035		5.934.346		(5.434.311)	-91,57%
423762	Pendapatan Denda atas Kekurangan/Keterlambatan Pembagian PBB oleh BO III PBB		19.089.743		165.648.242		(146.558.499)	-88,48%
4239	Pendapatan Lain-Lain	12.507.734.334.000	8.084.693.889.140	6,45%	11.563.901.203.833	(3.479.207.314.693)	-30,09%	
42391	Pendapatan Dari Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran yang Lalu	12.483.162.936.000	4.861.015.950.737	37,34%	7.886.815.386.380	(3.325.599.414.643)	-41,64%	
423911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai/Pusat TAYL	6.700.290.000	95.636.858.451	1,43%	184.534.308.201	(88.697.449.751)	-48,07%	
423912	Penerimaan Kembali Belanja Pensiun TAYL	6.900.000	124.260.810.847	1,80%	74.070.662.833	50.190.148.014	67,76%	
423913	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL	1.702.081.711.000	3.592.793.634.341	21,04%	1.353.153.920.438	2.229.639.713.903	164,77%	
423914	Penerimaan Kembali Belanja Lain Pinjaman LM TAYL	29.746.888.000	22.693.035.784	76,29%	44.901.246.343	(22.208.210.559)	-49,46%	
423915	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Hibah TAYL	732.624.000	15.015.061.686	2,04%	8.219.282.565	6.795.779.101	82,66%	
423916	Penerimaan Kembali Belanja Swadana TAYL		2.646.631.730		1.291.921.495	1.254.910.235	97,14%	
423917	Penerimaan Kembali Belanja Transfer ke Daerah TAYL	1.027.517.225.000	817.869.717.888	79,80%	1.744.368.203.373	(926.518.485.475)	-53,11%	
423919	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL	9.716.377.308.000		0,00%	4.576.055.820.112	(4.576.055.820.112)	-100,00%	
42392	Pendapatan Pelunasan Piutang	3.482.977.000	54.165.965.036	1555,16%	26.715.395.818	27.450.069.218	102,75%	
423921	Pendapatan Pelunasan Piutang Non-Bendahara	25.000.000	2.192.153.211	8768,61%	1.500.847.472	691.305.739	46,06%	
423922	Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara(Masuk TP/GR) Bendahara	3.457.977.000	51.973.811.825	1503,01%	25.215.048.346	26.758.763.479	106,12%	

DAFTAR LRA 238

Daftar 1. A

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (AUDITED)

42393	Pendapatan dari Penutupan Rekening	-	56.455.641.949	-	628.093.309.285	(571.637.667.336)	-91,01%
423931	Pendapatan dari Penutupan Rekening	-	56.455.641.949	-	628.093.309.285	(571.637.667.336)	-91,01%
42394	Pendapatan dari Selisih Kurs	-	2.091.891.225.881	-	2.713.540.544.837	(621.649.318.956)	-22,91%
423941	Pendapatan dari Selisih Kurs dalam pengelolaan Rekening Milik BUN	-	2.098.401.826.505	-	2.710.010.534.060	(621.608.707.555)	-22,94%
423942	Pendapatan dari Untung Selisih Kurs Uang Persediaan Sektoral	-	3.489.389.176	-	3.530.010.577	(40.611.401)	-1,15%
42399	Pendapatan Lain-Lain	21.088.421.000	1.221.165.105.736	5790,69%	208.936.088.712	1.012.229.017.024	484,47%
423991	Penerimaan Kembali Persektif/ Uang Muka Gaji	19.717.562.000	11.157.163.911	56,58%	10.792.715.501	364.448.410	3,38%
423992	Penerimaan Premi Penjaminan Perbankan Nasional	-	7.712.609.129	-	311.181.400	7.401.427.729	2378,49%
423993	Pendapatan dari Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan	-	-	-	195.600.000	(195.600.000)	-100,00%
423994	Pendapatan dari Biaya Pengawasan HET Minyak Tanah	-	-	-	838.000	(838.000)	-100,00%
423995	Pendapatan Bagian Pemerintah dari Sisa Surplus Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-
423996	Pendapatan Jasa Perbendaharaan	-	-	-	-	-	-
423997	Pendapatan Kelebihan Pelimpahan Pajak/PNBP dari bank/jasa Persepsi	-	140.853.710	-	1.575	140.852.135	8942992,70%
423998	Pendapatan Penyortiran Kelebihan Hasil Bersih telang yang tidak diambil oleh yang berhak	-	2.660.275.000	-	-	2.660.275.000	-
423999	Pendapatan Anggaran Lain-Lain	1.370.859.000	1.199.494.203.986	87499,46%	197.635.752.236	1.001.858.451.750	506,92%
424	Pendapatan Badan Layanan Umum	20.408.022.687.000	21.704.295.961.034	106,35%	20.103.995.586.771	1.600.300.374.263	7,96%
4241	Pendapatan Jasa Layanan Umum	18.753.700.334.000	19.471.851.778.837	103,83%	17.821.832.190.896	1.650.019.588.141	9,26%
42411	Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa Kepada Masyarakat	16.592.833.006.000	17.237.212.849.937	103,88%	17.215.810.979.582	21.401.870.355	0,12%
424111	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	5.037.908.878.000	5.719.217.633.192	113,52%	4.911.963.939.956	807.253.693.836	16,43%
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	9.546.933.008.000	9.324.560.999.440	97,67%	9.483.689.653.299	(159.108.653.859)	-1,68%
424113	Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi	189.374.791.000	162.682.735.402	81,55%	155.212.682.826	7.370.152.576	4,75%
424114	Pendapatan Jasa Pencetakan	1.024.475.000	82.947.368	8,04%	91.120.980	(6.773.612)	-9,63%
424115	Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelembutan dan Navigasian	-	-	-	-	-	-
424116	Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi	1.406.777.248.000	1.557.810.037.640	110,74%	1.423.253.556.524	134.556.481.016	9,45%
424117	Pendapatan Jasa Pelayanan Pemasaran	2.700.000.000	864.139.254	32,01%	785.289.559	78.949.695	10,04%
424118	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang	-	6.007.373.560	-	8.862.033.195	(2.854.659.635)	-32,21%

DAFTAR LRA 239

Daftar 1. A

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (AUDITED)

424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	398.114.506.000	466.067.564.181	117,07%	1.231.362.803.943	(765.885.219.662)	-62,17%
42412	Pendapatan dari Pengelolaan Wilayah/Kawasan Tertentu	755.116.047.000	742.623.094.171	98,35%	102.760.116.486	639.862.977.685	62,26%
424121	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Otorita	595.338.350.000	621.871.377.002	104,46%	-	621.871.377.002	-
424122	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Terpadu/Pengembangan Ekonomi Terpadu	-	-	-	-	-	-
424123	Pendapatan Pengelolaan Fasilitas Umum Milik Pemerintah	165.000.000	165.000.000	-	-	165.000.000	-
424129	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Lainnya	159.777.697.000	120.586.717.169	75,47%	102.760.116.486	17.826.600.683	17,35%
42413	Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat	1.405.751.281.000	1.492.015.834.729	106,14%	503.261.094.628	988.754.740.101	196,47%
424131	Pendapatan Program Dana Penjaminan	-	-	-	-	-	-
424132	Pendapatan Program Dana Penjaminan Syariah	-	-	-	-	-	-
424133	Pendapatan Program Moda Ventura	2.721.000.000	3.533.385.415	129,56%	6.864.420.592	(3.321.035.177)	-48,45%
424134	Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral	474.300.011.000	420.322.358.013	88,62%	233.121.189.136	187.201.168.877	80,30%
424135	Pendapatan Program Dana Bergulir Syariah	6.676.600.000	24.478.804.283	366,54%	14.356.562.257	10.122.242.026	70,51%
424136	Pendapatan Investasi	670.766.666.000	615.220.144.470	91,72%	248.303.299.963	366.916.844.507	147,77%
424139	Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya	251.287.004.000	428.461.142.548	170,51%	625.612.860	427.835.529.668	683,66%
4242	Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum	58.698.456.000	83.863.755.868	142,87%	167.462.819.277	(83.599.063.359)	-49,92%
42421	Pendapatan Hibah Terkait	48.790.714.000	45.711.363.265	93,69%	55.720.275.237	(10.008.911.972)	-17,96%
424211	Pendapatan Hibah Terkait Dalam Negeri - Perorangan	300.000.000	5.269.437.781	1756,48%	98.005.000	5.171.432.781	5276,70%
424212	Pendapatan Hibah Terkait Dalam Negeri - Lembaga/Badan Usaha	46.990.714.000	16.454.981.900	35,02%	11.161.892.904	5.293.088.996	47,42%
424213	Pendapatan Hibah Terkait Dalam Negeri - Pemda	1.500.000.000	22.235.603.933	1482,37%	43.878.108.803	(21.642.504.870)	-49,32%
424214	Pendapatan Hibah Terkait Luar Negeri - Perorangan	-	-	-	-	-	-
424215	Pendapatan Hibah Terkait Luar Negeri - Lembaga/Badan Usaha	-	-	-	-	-	-
424216	Pendapatan Hibah Terkait Luar Negeri - Negara	1.751.339.751	1.751.339.751	-	582.268.630	1.169.071.221	200,78%
424219	Pendapatan Hibah Terkait Lainnya	-	-	-	-	-	-
42422	Pendapatan Hibah Tidak Terkait	9.907.742.000	38.152.392.603	385,08%	111.742.543.990	(73.590.151.387)	-65,86%
424221	Pendapatan Hibah Tidak Terkait Dalam Negeri - Perorangan	-	15.000.950.000	-	-	15.000.950.000	-
424222	Pendapatan Hibah Tidak Terkait Dalam Negeri - Lembaga/Badan Usaha	-	5.932.273.152	-	2.936.983.000	2.995.290.152	101,99%
424223	Pendapatan Hibah Tidak Terkait Dalam Negeri - Pemda	-	9.998.612.070	100,92%	108.550.000.000	(98.551.387.930)	-90,79%
424224	Pendapatan Hibah Tidak Terkait Luar Negeri - Perorangan	-	-	-	-	-	-
424225	Pendapatan Hibah Tidak Terkait Luar Negeri - Lembaga/Badan Usaha	-	-	-	215.560.990	(215.560.990)	-100,00%

DAFTAR LRA-240

Daftar 1. A

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (AUDITED)

424226	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri - Negara	-	-	-	-	-	7.220.557.381	-	-	-	7.180.557.381	17951,39%
424229	Pendapatan Hibah Tidak Terikat - Lainnya	-	-	-	-	-	1.081.392.058.923	90,43%	40.000.000	647.563.491.201	433.828.567.722	66,99%
4243	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	1.195.859.085.000	-	-	-	-	1.081.392.058.923	90,43%	-	647.563.491.201	433.828.567.722	66,99%
42431	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	1.195.859.085.000	-	-	-	-	42.256.194.636	-	13.794.581.510	28.461.613.126	206,32%	
424311	Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan	-	-	-	-	-	896.179.627.937	83,41%	605.800.871.961	390.378.755.978	64,44%	
424312	Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha	1.194.384.085.000	-	-	-	-	42.956.236.450	2912,29%	27.968.037.930	14.988.198.620	53,59%	
424313	Pendapatan Hasil Kerjasama Pemerintah Daerah	1.475.000.000	-	-	-	-	1.067.188.367.406	266,95%	1.467.137.085.647	(399.948.718.241)	-27,26%	
4249	Pendapatan BLU Lainnya	399.764.812.000	-	-	-	-	1.067.188.367.406	266,95%	1.467.137.085.647	(399.948.718.241)	-27,26%	
42491	Pendapatan BLU Lainnya	399.764.812.000	-	-	-	-	1.067.188.367.406	266,95%	1.467.137.085.647	(399.948.718.241)	-27,26%	
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	399.764.812.000	-	-	-	-	5.786.749.186.777	701,35%	5.253.939.861.304	532.809.325.473	10,14%	
43	Penerimaan Hibah	825.091.586.000	-	-	-	-	5.786.749.186.777	701,35%	5.253.939.861.304	532.809.325.473	10,14%	
431	Pendapatan Hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri	-	-	-	-	-	948.005.796.311	-	960.021.567.110	(17.522.413.649)	-1,83%	
4311	Pendapatan Hibah Dalam Negeri	-	-	-	-	-	-	-	34.102.500	(34.102.500)	-100,00%	
43111	Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Terencana Perorangan	-	-	-	-	-	-	-	34.102.500	(34.102.500)	-100,00%	
431112	Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Terencana Lembaga/Badan Usaha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
431119	Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Terencana Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
43112	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Non Kas	-	-	-	-	-	414.188.707.700	-	496.517.968.721	(85.196.736.021)	-17,16%	
431121	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung - Bentuk Barang	-	-	-	-	-	411.321.232.700	-	52.992.368.721	358.328.863.979	676,19%	
431122	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung - Bentuk Jasa	-	-	-	-	-	2.867.475.000	-	-	2.867.475.000	-	
431123	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung - Bentuk Surat Berharga	-	-	-	-	-	-	-	443.525.800.000	(443.525.800.000)	-100,00%	
43113	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung	533.817.088.611	-	-	-	-	533.817.088.611	-	463.469.495.889	67.708.424.372	14,61%	
431131	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung - Bentuk Uang - Perorangan	-	-	-	-	-	2.639.167.950	-	-	2.639.167.950	-	
431132	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang - Lembaga/Badan Usaha	-	-	-	-	-	137.005.740.382	-	166.310.915.813	(29.305.175.431)	-17,62%	
431133	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang - Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	394.172.180.379	-	287.158.580.076	107.013.600.303	37,27%	

DAFTAR LRA-2A1

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (AUDITED)

Daftar 1. A

431139	Pendapatan Hibah Dalam Negeri -Langsung Bentuk Uang Lainnya	-	-	10.000.000.000	(10.000.000.000)	-100,00%
4312	Pendapatan Hibah Luar Negeri	4.838.743.390.466	-	4.293.818.294.194	544.925.096.272	12,69%
43121	Pendapatan Hibah Luar Negeri	2.776.359.367.823	-	2.721.020.490.004	55.338.877.819	2,03%
431211	Pendapatan Hibah Luar Negeri - Terencana Perorangan	143.794.500	-	-	143.794.500	-
431212	Pendapatan Hibah Luar Negeri - Terencana Bilateral	816.147.401.739	-	323.935.838.288	492.211.563.451	151,95%
431213	Pendapatan Hibah Luar Negeri - Terencana Multilateral	1.943.618.224.054	-	2.369.865.678.888	(446.267.454.434)	-18,67%
431219	Pendapatan Hibah Luar Negeri -Terencana Lainnya	16.459.947.530	-	7.198.973.228	9.260.974.302	128,64%
43122	Pendapatan Hibah Luar Negeri-Non Kas	1.230.858.660.098	-	499.204.355.709	731.654.304.389	146,56%
431221	Pendapatan Hibah Luar Negeri-Langsung Bentuk Barang	355.406.477.276	-	31.458.714.430	323.947.762.846	1029,76%
431222	Pendapatan Hibah Luar Negeri-Langsung Bentuk Jasa	875.452.182.822	-	467.745.641.279	407.706.541.543	87,16%
431223	Pendapatan Hibah Luar Negeri-Langsung Bentuk Surat Berharga	831.515.362.545	-	1.073.593.448.481	(242.178.085.936)	-22,56%
431231	Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung -Langsung Bentuk Uang Perorangan	-	-	-	-	-
431232	Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung -Langsung Bentuk Uang Bilateral	88.737.200.479	-	112.795.828.856	(24.058.628.377)	-21,33%
431233	Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung -Langsung Bentuk Uang Multilateral	708.306.049.484	-	918.255.266.945	(209.949.217.461)	-22,86%
431239	Pendapatan Hibah Luar Negeri-Langsung Bentuk Uang Lainnya	34.472.112.582	-	42.642.352.880	(8.170.240.098)	-19,16%
	Jumlah Penerimaan	1.358.205.043.200.000	1.338.109.629.172.960	1.210.599.653.359.410	127.509.975.813.543	10,53%

DAFTAR LRA 262

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

DAFTAR 1. B

**RINCIAN BAGIAN PEMERINTAH ATAS LABA BUMN
TAHUN ANGGARAN 2012
(Dalam Rupiah)**

NO	NAMA BUMN	JUMLAH PEMBAYARAN (Rp)
A	BUMN Perbankan	
1	Bank BRI	1.711.944.248.000,00
2	Bank Mandiri	1.469.525.260.000,00
3	Bank BNI	699.100.833.310,00
4	Bank BTN	160.840.962.360,00
5	Bank Bukopin	28.881.873.385,72
JUMLAH DIVIDEN BUMN PERBANKAN		4.070.293.177.055,72
B	BUMN NON PERBANKAN	
6	PT Pertamina	7.257.043.000.000,00
7	PT Telkom	3.832.434.555.606,00
8	PT PLN	3.500.000.000.000,00
9	PT Pupuk Indonesia	2.042.313.500.701,00
10	PT Perusahaan Gas Negara	1.708.868.546.055,00
11	PT Bukit Asam	1.049.380.332.000,00
12	PT Semen Gresik	1.001.076.591.340,00
13	PT Asuransi Jasa Rahardja	596.983.093.256,00
14	PT Aneka Tambang	564.137.157.008,00
15	PT Perkebunan Nusantara III	534.165.759.728,00
16	PT Pelindo II	448.655.000.000,00
17	PT Angkasa Pura II	458.921.316.239,00
18	PT Pegadaian	429.776.468.000,00
19	PT Perkebunan Nusantara IV	378.718.251.100,00
20	PT Jasa Marga	375.461.184.000,00
21	PT Timah	291.453.500.000,00
22	PT Pelindo III	287.465.000.000,00
23	PT Inalum	260.983.070.509,50
24	PT Krakatau Steel	189.300.000.000,00
25	PT Angkasa Pura I	182.316.105.970,00
26	PT Perkebunan Nusantara V	137.002.055.557,00
27	PT Perkebunan Nusantara IX	98.776.000.000,00
28	PT Perkebunan Nusantara VI	78.544.104.898,00
29	PT Wijaya Karya	70.232.000.000,00
30	PT Pelindo IV	67.352.000.000,00
31	PT Indosat	59.668.098.750,00
32	PT Perkebunan Nusantara VIII	57.458.660.000,00
33	Perum Jamkrindo	55.774.249.686,00
34	PT Pelindo I	52.834.000.000,00
35	PT Perkebunan Nusantara X	51.039.000.000,00
36	PT Semen Baturaja	50.328.000.000,00
37	PT Socfin Indonesia	97.039.088.300,00

DAFTAR LRA -243 -

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

DAFTAR 1. B

**RINCIAN BAGIAN PEMERINTAH ATAS LABA BUMN
TAHUN ANGGARAN 2012
(Dalam Rupiah)**

NO	NAMA BUMN	JUMLAH PEMBAYARAN (Rp)
38	PT Perkebunan Nusantara XIII	47.642.000.000,00
39	PT Perkebunan Nusantara VII	46.023.001.200,00
40	PT Bio Farma	45.362.829.086,00
41	PT Pembangunan Perumahan	36.748.284.268,80
42	PT Asuransi Jasindo	36.317.000.000,00
43	PT Perkebunan Nusantara XII	33.801.000.000,00
44	PT Kimia Farma	30.926.447.148,00
45	Perum Peruri	30.000.000.000,00
46	PT Perusahaan Pengelola Aset	28.643.687.279,00
47	PT Adhi Karya	27.864.000.000,00
48	PT Sang Hyang Seri	9.950.000.000,00
49	PT Kawasan Berikat Nusantara	9.148.940.488,46
50	PT Kliring Berjangka Indonesia	9.032.000.000,00
51	PT ASEI	8.269.000.000,00
52	PT Biro Klasifikasi Indonesia	7.704.022.000,00
53	PT Surveyor Indonesia	7.364.898.200,00
54	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	7.102.675.680,00
55	PT Sucofindo	6.107.744.750,00
56	PT Surabaya Industrial Estate Rungkut	5.594.003.820,00
57	PT Pertani	3.946.000.000,00
58	PT LEN Industri	3.934.475.802,00
59	PT Bhandha Ghara Reksa	3.764.000.000,00
60	PT Permodalan Nasional Madani	3.114.000.000,00
61	PT Sarinah	2.925.909.888,90
62	PT Bali Tourism Development Corp.	2.289.000.000,00
63	PT Kawasan Industri Medan	2.058.569.867,00
64	PT Perkebunan Nusantara IX	1.450.120.379,00
65	PT Industri Telekomunikasi Indonesia	1.022.660.692,00
66	PT Perkebunan Nusantara II	900.000.000,00
67	Perum Perumnas	750.000.000,00
68	Kawasan Industri Makassar	710.985.364,00
69	PT Kawasan Industri Wijayakusuma	373.994.396,00
70	PT Inhutani I	300.000.000,00
71	PT Balai Pustaka	200.000.000,00
72	PT Persero Batam	85.865.000,00
73	PT Inhutani V	90.000.000,00
74	PT Dahana	1.105.000,00
75	PT ASDP Persero	27.602,00
75	Dividen Lainnya	661.604.000,00
JUMLAH DIVIDEN BUMN NON PERBANKAN		26.727.679.640.614,70
JUMLAH SELURUHNYA		30.797.972.717.670,40

DAFTAR LRA -244 -

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2012
(dalam rupiah)**

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	623.165.509.002	572.410.287.701	199.181.423	572.211.106.278	(100.944.402.724)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	78.962.443.947	84.263.083.133	94.502.787	84.208.588.346	(12.343.877.801)
02	MAJELIS	546.603.065.055	458.147.218.568	144.678.636	458.002.538.932	(88.600.525.123)
002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	2.706.550.930.000	2.033.004.478.239	17.417.909.950	2.016.366.568.689	(690.184.361.311)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	722.039.991.000	503.866.084.147	278.098.084	503.387.996.053	(218.651.994.947)
02	DEWAN	1.984.510.939.000	1.530.138.394.092	17.139.811.466	1.512.998.572.636	(471.512.366.364)
004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	2.674.785.807.000	2.271.649.048.289	23.374.535.903	2.248.274.512.386	(426.511.294.644)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	1.909.463.828.000	1.679.253.841.286	8.628.717.093	1.670.625.124.193	(238.838.703.807)
02	B.P.K. PUSAT	765.321.979.000	592.386.206.973	14.745.818.810	577.649.388.183	(187.672.580.837)
005	MAHKAMAH AGUNG	5.055.615.846.384	4.803.563.836.970	5.500.342.875	4.788.063.493.695	(257.652.352.689)
01	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	4.674.178.807.524	4.468.050.728.278	4.426.909.834	4.463.623.818.442	(210.594.789.082)
02	KEPANITERAAN	71.944.900.088	67.246.251.198	113.122.102	67.127.129.096	(4.817.770.992)
03	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM	124.827.784.088	97.362.389.093	577.490.131	96.784.888.982	(27.842.885.127)
04	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA	63.559.549.099	61.401.359.849	159.809.378	61.242.150.473	(2.317.394.626)
05	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA	20.291.908.234	18.430.268.496	115.968.979	18.314.301.617	(1.977.603.617)
06	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM	77.442.908.868	68.650.147.473	2.934.115	68.547.213.358	(8.895.693.500)
07	BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG	23.970.197.492	22.622.092.185	98.110.488	22.423.981.747	(1.146.215.746)
006	KEJAKSAAN AGUNG	3.785.369.646.586	3.526.055.872.629	1.256.427.873	3.524.799.444.756	(264.570.201.830)
01	KEJAKSAAN AGUNG	3.789.369.646.586	3.526.055.872.629	1.256.427.873	3.524.798.444.756	(264.570.201.830)
007	SEKRETARIAT NEGARA	1.977.196.018.973	1.824.096.782.334	1.420.953.968	1.822.677.828.366	(354.518.190.607)
01	SEKRETARIAT NEGARA	1.086.790.276.267	839.357.703.385	280.414.154	838.077.289.231	(247.712.987.036)
03	RUMAH TANGGA KEPRESIDENAN	417.737.223.118	408.386.887.894	138.570.989	408.248.316.885	(9.488.906.223)

DAFTAR 2. A

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
04	SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN	250.293.735.965	179.852.229.894	59.710.500	179.792.519.394	(70.501.216.621)
05	SEKRETARIAT MILITER	35.726.801.082	34.203.779.527	38.550.078	34.185.229.449	(1.561.371.633)
06	PASUKAN PENGAMANAN PRESIDEN	31.824.161.446	33.458.416.254		33.458.416.254	1.534.254.808
07	DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN	40.868.470.331	35.334.771.380		35.334.771.380	(5.333.898.961)
08	UNIT KERJA PRESIDEN BOP, PENGAWASAN & PENGENDALIAN PEMBANGUNAN (JKP- PPP)	63.806.403.563	53.755.231.187	122.265.256	53.632.965.931	(9.973.437.628)
09	LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)	50.449.147.215	39.749.762.873	781.442.981	38.968.319.892	(11.480.827.323)
010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	16.722.076.178.563	16.371.865.517.234	4.663.384.828	16.767.201.532.806	45.125.354.043
01	SEKRETARIAT JENDERAL	791.002.105.853	772.264.457.030	566.738.401	771.697.718.629	(19.304.387.230)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	45.241.000.379	43.620.618.532	101.555.544	43.519.062.988	(1.721.937.391)
03	DITJEN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	184.854.801.179	182.557.801.617	70.905.628	182.486.895.989	(2.167.905.186)
04	DITJEN PEMERINTAHAN UMUM	401.135.475.237	346.389.387.781	396.383.780	346.463.004.001	(55.672.471.236)
05	DITJEN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	10.690.997.868.875	10.875.440.752.161	1.189.202.847	10.874.251.549.314	183.253.880.439
06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	501.153.852.186	440.881.021.575	1.196.449.332	438.694.572.243	(61.469.279.943)
07	DITJEN OTONOMI DAERAH	97.716.161.696	109.161.564.031	310.331.772	108.851.232.259	11.135.070.564
08	DITJEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	3.753.811.755.008	3.763.313.566.357	86.938.366	3.763.226.629.991	9.414.874.985
09	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH	57.222.887.692	53.620.286.727	181.468.592	53.438.818.135	(3.783.869.557)
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	48.853.321.014	40.848.619.986	2.236.561	40.846.382.625	(8.006.938.189)
12	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	170.287.349.449	163.767.432.037	21.765.805	163.735.666.232	(6.551.883.213)
011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	4.995.826.397.938	4.122.815.262.521	4.974.615.348	4.117.840.547.173	(878.985.750.765)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	4.392.563.929.230	3.534.624.579.534	3.177.759.603	3.531.446.839.931	(881.117.069.299)
02	DITJEN ASIA PASIFIK DAN AFRICA	31.895.368.757	33.948.432.364	334.754.675	33.013.677.703	1.118.318.952
03	DITJEN AMERIKA DAN EROPA	34.902.182.382	34.570.392.083	153.022.986	34.417.329.097	(484.863.285)
04	DITJEN KERJASAMA ASEAN	37.331.187.899	32.869.143.756	295.391.505	32.633.752.251	(4.698.035.648)
05	DIREKTORAT JENDERAL MULTILATERAL	299.893.149.662	302.844.814.548	196.277.010	302.648.537.538	2.755.393.876
06	DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN DIPLOMASI PUBLIK	50.008.136.302	46.575.891.495	118.767.849	46.456.923.646	(3.551.214.658)
07	DIREKTORAT JENDERAL HUKUM DAN PERJUANGAN INTERNASIONAL	25.150.920.770	24.690.410.634	112.973.616	24.577.497.018	(572.883.752)
08	DIREKTORAT JENDERAL PROTOKOL DAN KONSULER	77.876.321.850	74.991.108.973	365.200.978	74.625.907.995	(3.250.413.855)

DAFTAR LRA - 246 -

DAFTAR 2. A

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
08	INSPEKTORAT JENDERAL	17.978.988.488	15.632.443.877	152.823.917	15.479.619.960	(2.499.368.508)
11	BADAN PENKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBUAKAAN	29.226.228.617	22.848.285.237	107.863.209	22.540.622.028	(6.685.606.589)
012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	72.935.487.180.928	64.644.131.408.795	3.338.781.783.233	61.305.349.625.562	(11.630.137.555.366)
01	KEMENTERIAN PERTAHANAN	19.405.867.961.032	12.485.498.914.207	3.246.370.568.098	9.220.128.346.109	(10.185.728.614.923)
21	MARKAS BESAR TNI	6.614.615.869.445	6.309.645.479.581	5.730.146.208	6.304.115.333.372	(310.700.528.073)
22	MARKAS BESAR TNI AD	23.678.465.105.870	28.806.453.927.036	37.925.794.706	28.768.528.132.330	(909.936.973.640)
23	MARKAS BESAR TNI AL	9.257.107.786.636	9.002.626.202.802	4.987.284.883	8.997.636.917.919	(259.468.868.717)
24	MARKAS BESAR TNI AU	7.979.240.467.945	8.059.705.885.169	44.767.989.337	8.014.937.895.832	35.687.427.887
013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	6.949.522.691.394	6.262.512.345.998	35.262.905.989	6.227.249.440.009	(722.273.251.385)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	5.476.412.347.049	5.058.760.849.535	27.077.591.132	5.031.683.058.403	(444.728.288.646)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	28.761.428.285	28.409.034.981	348.578.229	28.060.456.352	(700.968.933)
03	DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM	170.572.197.261	159.533.740.075	364.794.352	159.168.945.723	(11.403.251.538)
05	DITJEN PEMASTIARAKATAN	77.178.407.598	78.863.024.500	184.927.868	78.698.096.812	1.519.689.214
06	DITJEN IMIGRASI	878.620.075.320	659.685.747.535	5.601.451.494	654.084.296.041	(224.535.779.279)
07	DITJEN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL	89.128.298.670	78.116.524.926	309.869.785	77.806.665.141	(11.321.644.529)
06	DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	52.901.462.091	35.470.477.590	159.767.568	35.310.710.002	(17.590.742.069)
08	DITJEN HAK ASASI MANUSIA	27.468.600.528	26.131.055.542	566.228	26.130.489.314	(1.338.111.214)
10	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	46.638.093.461	40.435.528.842	69.971.461	40.365.557.181	(6.272.536.280)
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBAKIAN HAM	22.014.091.391	21.254.504.201	55.049.842	21.199.454.359	(614.637.032)
12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	79.627.701.740	75.852.058.771	1.110.338.090	74.741.720.681	(5.085.981.059)
015	KEMENTERIAN KEUANGAN	16.913.651.154.479	16.350.635.674.743	25.188.635.572	16.325.448.043.171	(588.203.471.308)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	6.586.628.063.274	6.094.004.969.816	15.742.387.823	6.048.322.601.993	(518.503.461.281)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	92.947.405.516	88.873.285.659	430.175.462	88.443.110.197	(3.904.895.319)
03	DITJEN ANGGARAN	135.863.128.734	126.019.645.030	442.929.815	125.576.715.215	(10.278.101.519)
04	DITJEN PALJAK	4.871.170.268.027	5.224.188.081.849	1.755.704.413	5.222.442.377.430	361.272.109.403
05	DITJEN BEA DAN CUKAI	2.076.733.528.629	1.984.344.041.674	1.207.745.730	1.983.136.295.944	(93.597.232.681)
06	DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN	114.495.294.429	113.380.175.641	821.193.066	112.558.982.775	(1.936.311.654)

DAFTAR LRA - 247 -

DAFTAR 2. A

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
07	DITJEN PENGELOLAAN UTANG	68.962.318.698	68.153.783.249	201.230.190	67.952.559.059	(1.009.759.639)
08	DITJEN PERBENDAHARAAN	1.495.695.356.257	1.415.197.849.228	1.250.910.848	1.413.946.938.378	(81.748.417.879)
09	DITJEN KEKAYAAN NEGARA	586.068.460.246	554.225.778.601	1.089.238.243	553.136.540.358	(32.931.939.888)
10	BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN	351.975.373.778	183.956.179.724	633.709.709	183.322.470.015	(188.652.903.763)
11	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN	411.223.011.229	396.654.114.466	1.444.739.651	395.209.374.815	(16.013.636.414)
12	BADAN KEUANGAN FISKAL	142.300.868.669	131.568.747.608	188.670.616	131.400.076.992	(10.900.811.677)
018	KEMENTERIAN PERTANIAN	17.997.814.290.726	18.261.722.196.918	14.667.948.167	18.247.054.247.851	1.149.239.957.125
01	SEKRETARIAT JENDERAL	1.164.743.418.224	1.271.121.816.757	2.001.925.352	1.269.119.891.405	104.376.473.181
02	INSPEKTORAT JENDERAL	58.511.892.498	62.045.127.289	18.812.049	62.026.315.240	3.514.422.744
03	DITJEN TANAMAN PANGAN	3.835.740.822.339	4.062.016.252.085	1.048.179.036	4.060.988.073.059	125.227.250.720
04	DITJEN HORTIKULTURA	492.137.258.207	535.572.857.691	150.272.919	535.422.584.772	43.285.326.565
05	DITJEN PERKEBUNAN	1.274.414.725.685	1.386.129.497.156	551.781.523	1.385.577.715.633	111.162.969.948
06	DITJEN PETERNAKAN	2.243.483.675.438	2.905.973.413.308	1.336.778.970	2.904.636.634.336	661.152.958.900
07	DITJEN PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR	437.797.694.951	466.999.737.436	33.539.448	466.966.197.968	29.168.503.037
08	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN	3.682.768.111.314	3.784.518.162.212	5.221.804.948	3.779.296.357.264	(113.471.754.050)
09	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN	1.106.025.737.833	1.201.233.563.815	1.403.192.739	1.198.630.371.076	33.804.633.243
10	BADAN KETAHANAN PANGAN	1.254.641.788.420	1.339.394.903.252	2.422.408.993	1.336.971.594.259	62.129.808.639
11	BADAN KAPANTINA PERTANIAN	598.329.910.564	624.144.781.642	145.120.108	622.427.863.259	24.087.952.695
12	BADAN KARANTINA PERTANIAN	639.019.259.257	624.144.781.642	334.132.082	623.810.649.660	(15.208.608.697)
019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	2.443.004.000.755	2.594.955.515.467	1.790.862.128	2.593.174.653.339	250.170.572.584
01	SEKRETARIAT JENDERAL	771.769.969.508	763.869.990.375	558.572.024	763.111.318.951	11.341.354.845
02	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO	300.375.210.550	309.577.837.176	362.540.241	309.195.296.937	8.620.086.387
03	DIREKTORAT JENDERAL BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR	365.515.272.656	556.193.099.867	39.720.625	556.153.379.242	200.638.106.568
04	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI UNGGULAN BERBASIS TEKNOLOGI TINGGI	151.927.065.349	143.427.068.134	229.130.965	143.197.937.649	(8.729.127.800)
05	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	274.861.611.147	275.134.584.397	158.564.783	274.976.000.214	114.369.067
06	DIREKTORAT JENDERAL	38.805.531.136	41.556.093.679	171.133.310	41.435.611.645	2.630.060.509
07	BADAN PENGKAJIAN KEUANGAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI	412.114.028.192	442.958.570.996	171.133.310	442.787.457.866	30.673.411.494
08	DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBAANGAN PERMILAYAHAN INDUSTRI	92.848.175.409	98.535.687.163	42.654.696	98.493.032.467	5.644.867.058

DAFTAR LRA - 248 -

DAFTAR 2. A

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
08	DIREKTORAT JENDERAL KERJASAMA INDUSTRI INTERNASIONAL	44.787.224.810	43.912.877.178	88.037.930	43.824.839.248	(862.865.562)
020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	16.286.288.627.154	9.891.413.138.502	4.440.630.519	9.886.972.507.593	(6.399.316.119.571)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	832.511.262.138	754.358.143.533	222.122.364	764.136.020.649	(78.375.241.563)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	103.940.211.098	87.821.692.498	879.380.289	86.742.312.189	(16.597.888.889)
04	DITJEN MINYAK DAN GAS BUMI	2.360.936.059.709	1.007.639.404.265	45.649.212	1.007.653.555.053	(1.353.292.504.656)
05	DITJEN LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI	9.070.002.207.911	5.308.507.561.477	332.328.662	5.308.175.254.915	(3.761.826.952.986)
06	DITJEN MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMI	351.767.249.349	227.433.818.927	284.564.969	227.149.253.958	(124.617.994.365)
07	DEWAN ENERGI NASIONAL	55.277.650.087	51.525.788.405	195.258.951	51.330.529.454	(3.947.120.633)
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	565.230.794.525	467.878.265.650	908.454.679	466.969.811.171	(96.280.963.354)
12	BADAN DIKLAT ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	620.738.182.178	554.283.894.174	251.839.454	564.031.854.720	(66.706.327.453)
13	BADAN GEOLOGI	877.127.308.224	708.309.600.742	1.248.430.482	707.681.370.260	(189.465.937.964)
14	BPHMIGAS	264.471.373.813	129.704.914.338	-	129.704.914.338	(134.766.459.475)
15	DITJEN ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI	1.184.886.329.128	563.490.034.293	72.403.327	553.417.630.966	(631.488.698.162)
022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	38.147.088.985.000	30.090.315.860.516	7.300.852.582	30.083.615.007.934	(8.063.473.977.066)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	482.851.555.000	411.951.863.282	433.954.853	411.518.528.429	(61.333.023.571)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	69.039.045.000	59.178.343.209	56.807.230	59.121.535.979	(9.977.509.021)
03	DITJEN PERHUBUNGAN DARAT	7.113.918.903.000	2.589.876.427.144	262.499.030	2.589.613.928.114	(4.524.304.674.886)
04	DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	11.550.550.774.000	10.002.428.236.889	3.288.421.133	9.898.138.815.756	(1.551.411.968.244)
05	DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	6.903.268.654.000	6.052.100.745.403	1.867.575.362	6.050.233.170.041	(853.055.483.953)
08	DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	9.252.127.787.000	8.533.765.070.592	349.636.525	8.533.415.434.067	(718.712.352.933)
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN	194.878.759.000	183.940.977.006	4.510.231	183.336.466.775	(11.542.292.225)
12	BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERHUBUNGAN	2.600.373.911.000	2.258.274.176.991	1.037.048.218	2.257.237.128.773	(343.136.782.227)
023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	77.175.792.706.747	67.854.802.031.958	269.387.018.138	67.585.415.013.820	(9.594.377.692.927)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	1.319.817.196.779	1.005.639.249.326	2.000.591.902	1.003.638.661.433	(316.178.555.946)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	183.234.943.122	134.694.375.964	12.162.439.062	122.421.936.207	(60.812.706.220)
03	DITJEN PENDIDIKAN DASAR	18.501.637.900.617	18.273.202.247.375	146.220.040.003	18.126.982.207.366	(1.374.655.693.251)
04	DITJEN PENDIDIKAN TINGGI	38.776.263.639.389	32.910.511.566.658	16.975.451.267	32.893.536.115.391	(5.882.727.223.986)
05	DITJEN PAUDNI	2.914.537.018.899	2.767.716.934.904	27.725.540.290	2.739.991.394.814	(174.545.624.285)

DAFTAR LRA - 249 -

DAFTAR 2. A

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DIKBUD	1.278.073.378.498	1.155.107.431.896	10.456.623.994	1.144.650.807.902	(133.422.568.596)
12	DITJEN PENDIDIKAN MENENGAH	8.992.076.275.658	8.120.619.103.364	25.663.803.663	8.094.955.499.695	(897.120.775.961)
13	BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA	255.693.065.735	165.841.935.446	168.064.007	165.673.871.439	(90.018.194.296)
14	BADAN PSMPK DAN PMP	2.840.383.639.437	2.678.634.101.135	27.943.918.938	2.650.690.182.197	(189.703.467.240)
15	DITJEN KEBUDAYAAN	1.118.066.250.615	642.945.081.881	70.755.000	642.874.336.881	(475.191.913.794)
024	KEMENTERIAN KESEHATAN	31.204.540.513.888	30.656.595.745.606	80.968.894.126	30.575.626.351.480	(628.914.864.406)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	2.422.314.516.597	2.376.727.324.948	4.249.051.118	2.372.476.273.830	(49.836.242.767)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	81.912.951.275	68.033.061.655	234.703.508	67.798.368.147	(14.114.593.128)
03	DITJEN BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK	1.989.297.979.307	1.841.431.811.741	14.833.669.071	1.826.598.142.670	(162.699.438.637)
04	DITJEN BINA UPAYA KESEHATAN	20.556.419.862.153	20.489.221.948.980	38.733.830.403	20.449.487.516.677	(106.932.365.676)
05	DITJEN PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN	1.233.048.144.965	1.507.660.544.010	1.349.992.442	1.508.330.551.668	273.282.406.603
07	DITJEN BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN	1.685.538.705.654	1.538.272.479.940	5.528.228.641	1.532.744.251.299	(132.794.454.355)
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN	423.553.711.972	365.540.386.155	3.692.662.022	361.947.794.133	(61.605.977.839)
12	BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN	2.632.455.423.965	2.469.688.280.177	11.446.756.921	2.468.241.523.256	(374.213.900.703)
025	KEMENTERIAN AGAMA	39.375.794.465.087	36.937.169.310.194	40.340.765.954	36.896.827.544.240	(2.478.966.920.847)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	2.036.272.804.367	1.802.744.960.293	7.225.907.969	1.795.519.072.924	(240.753.731.443)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	131.493.160.398	110.235.843.105	5.627.415.472	104.608.427.633	(26.884.732.765)
03	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM	2.670.132.928.348	2.652.663.631.034	6.503.923.405	2.646.149.707.629	(23.983.220.716)
04	DITJEN PENDIDIKAN ISLAM	31.498.757.218.212	28.554.743.041.006	16.568.911.875	28.538.174.129.131	(1.960.563.069.081)
05	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN	941.126.659.694	885.701.287.126	446.228.675	885.255.058.551	(65.871.601.103)
06	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KHATOLIK	527.904.309.220	527.695.663.248	82.447.300	527.613.215.948	(291.093.272)
07	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU	423.139.747.103	419.790.404.656	567.898.791	419.212.505.867	(3.927.241.236)
08	DITJEN PENYELNGAN HAJI DAN UMRAH	472.657.976.935	402.220.906.502	970.949.714	148.127.094.928	(25.465.924.222)
11	BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN PELATIHAN	499.816.642.703	431.295.208.980	1.269.497.579	430.025.771.001	(89.790.871.702)
026	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	4.101.391.413.578	3.788.827.685.844	4.777.899.445	3.784.049.956.399	(317.341.427.179)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	368.463.262.699	351.333.344.846	664.150.067	350.769.194.781	(17.714.067.916)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	42.915.539.312	41.126.865.933	50.185.403	41.070.660.524	(1.838.858.788)

DAFTAR LRA - 250 -

DAFTAR 2. A

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
04	DITJEN PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	687.472.528.758	629.775.130.357	1.957.435.700	627.817.694.857	(59.684.832.101)
05	DITJEN PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL & JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN	183.305.783.414	162.746.258.823	713.432.759	162.032.826.064	(21.272.957.350)
06	DITJEN PEMBINAAN PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	796.150.131.054	724.779.043.422	981.389.589	723.817.653.823	(72.332.477.231)
07	DITJEN PEMBINAAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGRASI	725.277.908.087	678.956.971.202	208.413.970	678.747.957.832	(46.529.947.255)
08	DITJEN PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	349.653.714.368	335.724.638.634	33.127.913	335.631.510.721	(13.962.203.647)
11	BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INFORMASI	81.920.307.838	58.898.122.108	36.190.016	58.861.932.092	(3.088.375.747)
13	DITJEN PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS	886.212.243.047	805.487.910.517	253.374.612	805.234.535.905	(60.977.707.142)
027	KEMENTERIAN SOSIAL	4.549.943.266.956	4.433.305.923.777	10.817.476.179	4.422.487.547.998	(127.455.719.958)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	166.658.686.868	159.803.215.395	897.573.364	156.605.642.031	(8.053.044.837)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	24.595.653.241	20.541.397.096	210.701.230	20.331.295.866	(4.264.257.375)
03	DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL	700.786.042.938	676.993.125.364	2.799.883.870	674.193.241.484	(26.592.801.442)
04	DITJEN PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL	898.613.468.854	887.624.268.177	2.919.941.616	884.704.346.561	(14.109.122.293)
05	DITJEN BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL	2.664.870.979.290	2.498.925.642.723	3.182.890.728	2.485.762.751.995	(89.107.821.296)
11	BADAN PENDIDIKAN DAN PENELITIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	194.218.941.777	189.616.755.022	726.485.371	188.830.289.851	(5.328.672.125)
029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	5.565.750.830.216	5.242.518.467.299	11.884.934.513	5.230.733.532.686	(455.017.357.530)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	397.171.478.802	436.551.329.072	1.375.854.785	435.175.674.287	38.004.185.485
02	INSPEKTORAT JENDERAL	53.370.911.756	52.510.182.805	942.359.326	51.567.823.479	(1.803.088.277)
03	DITJEN BINA USAHA KEHUTANAN	288.225.615.188	328.220.273.603	345.102.482	327.875.171.111	59.649.355.923
04	DITJEN BINA PENGELOLAAN DAS DAN PERHUTANAN SOSIAL	2.422.719.940.907	2.114.183.800.620	1.709.465.333	2.112.494.135.287	(310.235.505.620)
05	DITJEN PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM	1.480.856.639.517	1.300.245.846.050	3.473.874.159	1.298.771.973.891	(184.084.665.626)
06	DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN	622.466.193.917	560.156.760.205	2.895.733.024	557.461.027.181	(65.025.168.736)
07	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN	248.009.983.747	246.668.065.370	1.115.968.146	245.452.127.224	(2.557.256.523)
08	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEHUTANAN	213.910.928.382	204.172.377.574	226.777.948	203.945.600.226	(9.965.326.155)
032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	6.014.096.394.130	5.956.740.505.907	2.290.215.028	5.954.460.351.879	(59.636.002.251)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	370.071.833.081	374.268.294.494	309.400.071	373.956.894.423	3.867.061.942

DAFTAR LRA - 251 -

DAFTAR 2. A

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
02	INSPEKTORAT JENDERAL	56.221.651.592	60.190.485.277	1.370.556	60.189.114.721	3.967.463.129
03	DITJEN PERIKANAN TANGKAP	1.393.424.419.295	1.360.834.767.388	184.410.987	1.380.650.356.401	(12.774.062.894)
04	DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	1.366.921.463.196	1.300.546.300.527	285.059.173	1.300.261.201.354	(66.660.261.842)
05	DITJEN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN & PERIKANAN	475.227.659.694	498.698.699.247	279.801.534	498.419.097.713	23.191.438.019
06	DITJEN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN (P2HP)	515.221.555.286	529.661.843.684	377.260.468	529.304.563.196	14.083.007.908
07	DITJEN KELAUTAN, PESIRIR DAN PULAU-PULAU KECIL (KP3K)	642.797.277.247	558.065.261.369	169.076.664	567.696.184.805	15.098.907.558
11	BADAN RISET KELAUTAN DAN PERIKANAN (BRKP)	468.267.706.712	395.612.169.277	140.336.961	395.471.832.316	(92.815.874.396)
12	BADAN PENGEMBANGAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN	556.238.993.211	587.264.980.445	412.591.333	586.852.369.112	30.613.395.901
13	BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL	249.663.814.814	271.577.905.179	120.847.341	271.456.757.838	21.772.943.024
033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	74.977.141.415.597	68.034.160.447.120	52.583.056.575	67.981.577.360.145	(6.995.564.036.447)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	688.367.108.522	557.839.704.869	478.605.817	557.360.898.852	(131.006.207.670)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	120.648.104.455	71.501.272.767	1.093.767.060	70.407.505.707	(50.240.598.748)
03	DITJEN PENATAAN RUANG	744.769.932.347	679.146.714.018	320.709.294	678.626.004.784	(65.943.327.563)
04	DITJEN BINA MARGA	40.056.230.143.377	36.656.416.154.840	36.654.994.603	36.618.781.160.237	(3.436.468.363.140)
05	DITJEN CIPTA KARYA	13.747.060.702.399	12.947.261.222.434	8.266.649.574	12.837.994.572.860	(809.066.129.533)
06	DITJEN SUMBER DAYA AIR	18.951.644.870.972	16.509.790.969.755	3.648.967.917	16.506.142.001.838	(2.445.502.869.194)
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	414.129.346.424	364.669.530.401	437.063.664	364.252.446.637	(29.876.899.887)
13	BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI	252.291.810.096	227.514.856.236	662.068.866	226.832.789.350	(25.468.020.746)
034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	405.074.186.955	360.216.190.683	184.461.794	360.031.728.889	(45.042.458.076)
01	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	405.074.186.955	360.216.190.683	184.461.794	360.031.728.889	(45.042.458.076)
035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	2.12.011.128.000	193.337.955.802	1.682.378.236	191.655.560.566	(20.355.547.434)
01	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	2.12.011.128.000	193.337.955.802	1.682.378.236	191.655.560.566	(20.355.547.434)
036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	222.316.596.002	221.120.483.624	455.239.303	220.665.244.321	(1.651.351.681)
01	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	222.316.596.002	221.120.483.624	455.239.303	220.665.244.321	(1.651.351.681)
040	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	2.571.965.845.658	2.229.128.665.652	1.953.990.977	2.227.174.664.675	(444.811.180.983)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	186.794.409.253	173.039.602.222	127.199.509	172.912.602.713	(13.861.806.940)

DAFTAR LRA - 252 -

DAFTAR 2. A

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
02	INSPEKTORAT JENDERAL	28.141.855.368	26.590.040.193	56.889.319	26.533.150.874	(1.608.704.494)
03	DIREKTORAT JENDERAL NILAI BUDAYA, SENI DAN PERFILMAN	262.158.253.012	228.246.444.632	541.266.146	227.705.178.486	(34.463.074.526)
04	DIREKTORAT JENDERAL SEJARAH DAN PURBAKALA	404.359.979.316	304.498.909.198	188.047.963	304.310.761.229	(100.048.818.087)
05	DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBARAN DESTINASI PARAHWISATA	337.310.587.688	306.538.729.861	295.488.914	306.243.239.847	(31.067.348.039)
06	DIREKTORAT JENDERAL PEMASARAN	823.973.864.528	761.806.107.809	182.225.483	761.623.882.326	(62.349.782.202)
10	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KEBUDAYAAN DAN PARAHWISATA	326.667.739.545	286.289.071.510	111.637.047	286.177.434.463	(40.380.305.082)
11	DITJEN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF BERBASIS SENI DAN BUDAYA	185.551.969.776	89.828.254.015	367.804.050	88.470.649.965	(96.081.319.811)
12	DITJEN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF BERBASIS MEDIA, DESAIN DAN IPEK	117.127.787.174	52.291.397.512	93.632.540	52.197.784.972	(64.930.022.202)
041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	111.264.511.000	94.254.976.479	898.700.948	93.356.275.531	(17.908.235.469)
01	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	111.264.511.000	94.254.976.479	898.700.948	93.356.275.531	(17.908.235.469)
042	KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI	639.772.648.041	652.511.450.468	2.891.147.022	649.570.303.446	9.747.655.405
01	KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI	639.772.648.041	652.511.450.468	2.891.147.022	649.570.303.446	9.747.655.405
043	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	738.975.898.790	676.340.227.583	977.628.501	675.362.599.182	(63.213.299.608)
01	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	738.975.898.790	676.340.227.583	977.628.501	675.362.599.182	(63.213.299.608)
044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	1.387.497.635.008	1.230.288.119.594	173.808.269	1.230.114.311.285	(157.383.323.723)
01	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	1.387.497.635.008	1.230.288.119.594	173.808.269	1.230.114.311.285	(157.383.323.723)
047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	150.942.141.967	156.461.293.260	1.264.777.360	155.196.515.900	4.254.373.933
01	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	150.942.141.967	156.461.293.260	1.264.777.360	155.196.515.900	4.254.373.933
048	KEMENTERIAN PENAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	131.432.479.979	110.738.030.717	877.410.100	109.860.620.617	(21.571.859.362)
01	KEMENTERIAN PENAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	131.432.479.979	110.738.030.717	877.410.100	109.860.620.617	(21.571.859.362)
050	BADAN INTELIJEN NEGARA	1.484.905.945.003	1.476.395.777.773	158.587.350	1.476.237.190.423	(8.668.754.580)
01	BADAN INTELIJEN NEGARA	1.484.905.945.003	1.476.395.777.773	158.587.350	1.476.237.190.423	(8.668.754.580)
051	LEMBAGA SANDI NEGARA	1.750.367.352.022	1.737.160.524.028	4.313.576.871	1.732.846.947.157	(25.520.404.865)
01	LEMBAGA SANDI NEGARA	1.750.367.352.022	1.737.160.524.028	4.313.576.871	1.732.846.947.157	(25.520.404.865)
052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	31.083.284.000	30.050.527.127	18.500.004	30.032.027.123	(1.051.256.877)
01	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	31.083.284.000	30.050.527.127	18.500.004	30.032.027.123	(1.051.256.877)

DAFTAR LRA - 253 -

DAFTAR 2. A

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
054	BADAN PUSAT STATISTIK	2.272.642.818.892	2.655.416.920.710	716.692.117	2.654.700.228.593	382.057.409.701
01	BADAN PUSAT STATISTIK	2.272.642.818.892	2.655.416.920.710	716.692.117	2.654.700.228.593	382.057.409.701
055	KEMENTERIAN PRIBAPENAS	755.548.970.008	662.538.257.737	816.125.807	662.122.131.930	(93.426.838.078)
01	KEMENTERIAN PRIBAPENAS	755.548.970.008	662.538.257.737	816.125.807	662.122.131.930	(93.426.838.078)
056	BADAN PERTAHANAN NASIONAL	3.881.165.536.668	2.994.480.428.032	8.974.315.451	2.985.877.312.581	(895.268.224.087)
01	BADAN PERTAHANAN NASIONAL	3.881.165.536.668	2.994.480.428.032	8.974.315.451	2.985.877.312.581	(895.268.224.087)
057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	348.034.528.995	324.328.835.869	236.400.513	324.092.435.356	(23.942.093.639)
01	PERPUSTAKAAN NASIONAL	348.034.528.995	324.328.835.869	236.400.513	324.092.435.356	(23.942.093.639)
059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3.090.774.087.017	2.695.254.565.261	4.694.753.467	2.690.559.911.794	(400.214.175.223)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	200.218.694.108	186.822.509.917	99.871.354	186.522.838.663	(13.696.855.545)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	22.517.250.773	21.428.614.844	14.529.352	21.412.085.292	(1.105.165.481)
03	DITJEN POS DAN TELEKOMUNIKASI	714.154.839.782	645.642.098.863	2.128.501.267	643.713.597.696	(70.441.242.168)
04	DITJEN APLIKASI TELEMATIKA	150.278.462.018	148.368.864.863	307.023.736	148.061.641.117	(2.216.620.901)
05	DITJEN SARANA KOMUNIKASI DAN DISEMINASI INFORMASI	1.722.597.407.426	1.419.365.945.060	1.521.439.599	1.417.844.505.461	(304.752.901.964)
06	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	138.396.325.805	136.092.759.288	567.890.648	135.495.058.620	(2.901.267.185)
07	BADAN INFORMASI PUBLIK	142.611.107.126	137.535.673.656	25.888.511	137.509.985.145	(5.101.121.981)
060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	41.892.864.760.463	39.522.186.057.385	14.189.538.026	39.507.996.419.359	(2.384.868.341.104)
01	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	41.892.864.760.463	39.522.186.057.385	14.189.538.026	39.507.996.419.359	(2.384.868.341.104)
063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	1.079.662.938.031	1.115.407.250.703	7.314.393.652	1.108.092.947.051	28.430.011.020
01	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	1.079.662.938.031	1.115.407.250.703	7.314.393.652	1.108.092.947.051	28.430.011.020
064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	174.236.482.994	227.729.953.953	137.204.880	227.592.749.083	53.356.266.089
01	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI	174.236.482.994	227.729.953.953	137.204.880	227.592.749.083	53.356.266.089
065	BADAN KOORDINASI PENAHANAN MODAL	650.695.975.998	572.233.803.769	3.778.244.751	566.455.559.018	(82.240.416.980)
01	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	650.695.975.998	572.233.803.769	3.778.244.751	566.455.559.018	(82.240.416.980)
066	BADAN FARMASI NASIONAL	841.045.305.304	861.661.421.971	2.658.629.646	859.002.792.325	17.957.487.021
01	PELAKSANA HARIAN BNN	841.045.305.304	861.661.421.971	2.658.629.646	859.002.792.325	17.957.487.021
067	KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	1.153.826.455.011	1.150.276.431.820	357.257.300	1.149.919.174.520	(3.907.280.491)
01	KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	1.153.826.455.011	1.150.276.431.820	357.257.300	1.149.919.174.520	(3.907.280.491)

DAFTAR LRA - 254 -

DAFTAR 2. A

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

KODE BAESEKON I	BAGIAN ANGGARAN & ESEKON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
068	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	2.110.109.978.368	2.215.737.660.387	2.053.978.267	2.213.663.662.120	103.973.803.752
01	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	2.110.109.978.368	2.215.737.660.387	2.053.978.267	2.213.663.662.120	103.973.803.752
074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	53.655.792.988	58.119.623.758	196.393.432	57.973.230.326	4.267.437.338
01	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	53.655.792.988	58.119.623.758	196.393.432	57.973.230.326	4.267.437.338
075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	1.283.960.282.079	1.135.189.946.483	233.554.406	1.134.956.392.077	(148.003.890.002)
01	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	1.283.960.282.079	1.135.189.946.483	233.554.406	1.134.956.392.077	(148.003.890.002)
076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	1.625.211.541.000	1.114.826.646.094	1.902.931.733	1.112.923.114.361	(512.288.426.539)
01	KOMISI PEMILIHAN UMUM	1.625.211.541.000	1.114.826.646.094	1.902.931.733	1.112.923.114.361	(512.288.426.539)
077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	221.821.484.999	220.413.004.538	111.945.001	220.301.059.537	(15.70.425.462)
01	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	221.821.484.999	220.413.004.538	111.945.001	220.301.059.537	(15.70.425.462)
078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	73.079.235.986	56.401.804.173	281.280.285	56.120.523.888	(16.958.712.108)
01	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	73.079.235.986	56.401.804.173	281.280.285	56.120.523.888	(16.958.712.108)
079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	761.721.510.026	975.731.274.505	712.586.708	975.018.687.797	(16.988.712.108)
01	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	761.721.510.026	975.731.274.505	712.586.708	975.018.687.797	(16.988.712.108)
080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	637.120.187.015	731.087.986.357	903.521.749	730.184.474.608	93.064.287.593
01	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	637.120.187.015	731.087.986.357	903.521.749	730.184.474.608	93.064.287.593
081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	808.665.170.962	896.869.445.813	865.600.316	896.003.845.497	87.438.674.536
01	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	808.665.170.962	896.869.445.813	865.600.316	896.003.845.497	87.438.674.536
082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	491.863.242.009	455.281.524.234	194.715.545	455.086.808.689	(36.776.433.320)
01	LAPANGAN	491.863.242.009	455.281.524.234	194.715.545	455.086.808.689	(36.776.433.320)
083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	535.855.833.022	494.269.193.174	1.056.894.262	493.212.498.812	(42.643.334.110)
01	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	535.855.833.022	494.269.193.174	1.056.894.262	493.212.498.812	(42.643.334.110)
084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	74.225.720.004	72.598.306.074	321.909.342	72.276.396.732	(1.949.923.272)
01	BADAN STANDARISASI NASIONAL	74.225.720.004	72.598.306.074	321.909.342	72.276.396.732	(1.949.923.272)
085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	72.033.786.003	71.413.170.260	340.414.255	71.072.756.005	(661.039.998)
01	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	72.033.786.003	71.413.170.260	340.414.255	71.072.756.005	(661.039.998)
086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	243.628.623.030	239.862.618.700	202.548.873	239.660.067.827	(3.968.755.203)
01	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	243.628.623.030	239.862.618.700	202.548.873	239.660.067.827	(3.968.755.203)

DAFTAR LRA - 255 -

DAFTAR 2. A

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	130.253.531.998	123.087.305.572	914.877.932	122.172.427.640	(8.081.104.358)
01	ARSIP NASIONAL	130.253.531.998	123.087.305.572	914.877.932	122.172.427.640	(8.081.104.358)
088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	488.857.204.904	493.380.630.272	3.723.071.373	488.657.558.899	2.800.353.995
01	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	488.857.204.904	493.380.630.272	3.723.071.373	488.657.558.899	2.800.353.995
089	BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	1.050.465.880.974	1.006.703.734.087	4.611.412.076	1.002.092.322.011	(48.373.558.963)
01	BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	1.050.465.880.974	1.006.703.734.087	4.611.412.076	1.002.092.322.011	(48.373.558.963)
090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	2.441.533.073.178	2.180.074.858.476	3.748.136.223	2.176.326.720.247	(265.206.352.931)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	488.444.321.955	404.384.435.378	958.424.478	403.435.010.900	(86.009.311.055)
02	DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI	943.493.873.618	912.015.754.022	551.988.113	911.463.764.909	(32.030.108.709)
03	DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI	1.75.546.579.235	158.311.859.154	240.863.856	166.070.795.498	(17.474.783.737)
04	DIREKTORAT JENDERAL KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL	108.987.513.738	87.394.188.654	42.511.971	87.351.676.683	(21.645.837.055)
05	INSPEKTORAT JENDERAL	35.519.860.078	31.574.098.181	43.840.785	31.530.485.378	(3.988.424.702)
06	DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL	316.028.894.163	257.323.813.959	70.704.094	257.252.909.865	(66.775.984.298)
07	BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI	115.230.786.254	100.901.255.008	576.529	100.900.678.477	(14.330.118.777)
08	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN	65.810.624.832	62.727.845.933	130.922.442	62.536.723.491	(3.273.901.341)
09	DIREKTORAT JENDERAL STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	131.461.569.305	165.432.208.211	1.647.504.163	163.784.704.048	(27.676.885.257)
091	KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT	5.928.455.012.998	4.002.254.786.092	2.395.603.853	3.995.859.182.439	(1.928.595.830.559)
01	KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT	5.928.455.012.998	4.002.254.786.092	2.395.603.853	3.995.859.182.439	(1.928.595.830.559)
092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	1.757.949.581.017	954.843.091.590	143.118.227	954.699.973.363	(803.249.607.654)
01	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	1.757.949.581.017	954.843.091.590	143.118.227	954.699.973.363	(803.249.607.654)
093	KOMISI PEMBERATASAN KORUPSI	634.537.542.995	337.026.581.434	1.450.893.911	335.574.867.523	(298.963.055.472)
01	KOMISI PEMBERATASAN KORUPSI	634.537.542.995	337.026.581.434	1.450.893.911	335.574.867.523	(298.963.055.472)
095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	589.847.420.000	523.451.412.163	5.619.302.986	517.852.109.177	(72.015.310.823)
01	SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI	363.290.420.000	330.185.119.007	177.491.544	330.007.627.463	(63.282.792.537)
02	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	206.557.000.000	193.266.293.156	5.441.811.442	187.824.481.714	(18.732.518.286)
100	KOMISI YUDISIAL RI	77.446.170.003	75.873.971.639	144.476.671	75.729.494.968	(1.716.675.035)
01	KOMISI YUDISIAL RI	77.446.170.003	75.873.971.639	144.476.671	75.729.494.968	(1.716.675.035)

DAFTAR LRA - 256 -

DAFTAR 2. A

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	1.126.245.361.988	1.360.111.505.577	17.176.792.196	1.342.934.713.381	214.669.361.393
01	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	1.126.245.361.988	1.360.111.505.577	17.176.792.196	1.342.934.713.381	214.669.361.393
104	BADAN NASIONAL PEMERINTAH DAN PERLINDUNGAN TKI	266.850.617.539	248.215.534.254	731.418.767	247.484.115.487	(18.366.502.052)
01	SEKRETARIAT UTAMA BNP2TKI	266.850.617.539	248.215.534.254	731.418.767	247.484.115.487	(18.366.502.052)
105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	1.533.349.012.002	1.056.252.811.140	5.187.700	1.066.247.623.440	(467.101.388.562)
01	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	1.533.349.012.002	1.056.252.811.140	5.187.700	1.066.247.623.440	(467.101.388.562)
106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	183.410.797.001	150.951.244.112	1.357.583.850	149.593.660.262	(33.817.136.739)
01	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	183.410.797.001	150.951.244.112	1.357.583.850	149.593.660.262	(33.817.136.739)
107	BADAN SAR NASIONAL	992.107.725.008	970.423.798.058	178.419.304	970.245.378.754	(21.862.346.254)
01	BADAN SAR NASIONAL	992.107.725.008	970.423.798.058	178.419.304	970.245.378.754	(21.862.346.254)
108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	113.509.824.995	99.335.165.022	1.253.469.907	98.081.656.115	(15.428.178.880)
01	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	113.509.824.995	99.335.165.022	1.253.469.907	98.081.656.115	(15.428.178.880)
109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU	266.176.234.000	100.493.262.353	510.822.660	99.982.439.693	(168.193.794.307)
01	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU (BPWS)	266.176.234.000	100.493.262.353	510.822.660	99.982.439.693	(168.193.794.307)
110	OMBUUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	56.574.884.000	52.597.146.961	-	52.597.146.961	(6.157.737.039)
01	OMBUUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	56.574.884.000	52.597.146.961	-	52.597.146.961	(6.157.737.039)
111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	197.741.693.000	141.246.875.577	2.129.992.224	139.118.663.353	(58.623.009.647)
01	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	197.741.693.000	141.246.875.577	2.129.992.224	139.118.663.353	(58.623.009.647)
112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	736.338.350.000	704.255.425.538	-	704.255.425.538	(31.082.824.462)
01	BKPE BATAMI	736.338.350.000	704.255.425.538	-	704.255.425.538	(31.082.824.462)
113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	92.767.667.002	89.690.271.043	117.224.538	89.573.046.505	(3.194.620.497)
01	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	92.767.667.002	89.690.271.043	117.224.538	89.573.046.505	(3.194.620.497)
114	SEKRETARIAT KABINET	197.199.119.000	138.221.656.856	567.824.827	137.653.832.029	(59.545.266.971)
01	SEKRETARIAT KABINET	197.199.119.000	138.221.656.856	567.824.827	137.653.832.029	(59.545.266.971)
115	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	53.068.318.995	126.176.710.067	1.171.630.583	124.005.079.484	70.916.760.489
01	SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	53.068.318.995	126.176.710.067	1.171.630.583	124.005.079.484	70.916.760.489
116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	766.987.633.000	676.326.430.073	406.997.668	676.519.432.509	(92.468.200.495)

DAFTAR LRA - 257 -

DAFTAR 2. A

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
01	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	768.987.633.000	676.325.430.073	405.997.568	676.519.432.505	(92.468.200.486)
117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	753.207.879.000	717.070.898.087	401.098.754	716.669.799.333	(36.538.079.667)
01	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	753.207.879.000	717.070.898.087	401.098.754	716.669.799.333	(36.538.079.667)
118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	392.200.000.000	341.507.084.915	34.063.839	341.473.021.076	(50.726.978.924)
01	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	392.200.000.000	341.507.084.915	34.063.839	341.473.021.076	(50.726.978.924)
999	BENDAHARA UMUM NEGARA	521.216.898.831.000	520.756.850.868.219	265.379.723.304	520.491.471.144.915	(725.227.886.085)
01	PENGELOLA UTANG PEMERINTAH	117.785.423.800.000	98.900.359.527.593		98.900.359.527.593	(17.885.064.272.407)
02	PENGELOLA HIBAH	1.790.938.905.000	75.913.809.154	834.515.900	75.079.293.654	(1.715.857.511.446)
07	PENGELOLA BELANJA SUBSIDI	245.076.318.862.000	346.420.404.182.332		346.420.404.182.332	101.344.085.320.332
08	PENGELOLA BELANJA LAINNYA	156.664.019.864.000	3.600.734.516.076	11.692.364.098	3.569.042.151.978	(162.974.977.212.022)
99	TRANSAKSI KHUSUS		70.759.438.833.064	252.862.843.806	70.506.585.989.458	70.506.585.989.458
		1.069.534.444.947.000	1.014.900.841.961.928	4.342.605.430.114	1.010.558.236.531.814	(58.976.208.415.186)

DAFTAR LRA - 258 -

DAFTAR 2/B

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (6/07/2012)

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT JENIS BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2012
(dalam rupiah)**

KODE BA	URAIAN BA	Belanja Pegawai 51	Belanja Barang 52	Belanja Modal 53	Bunga Utang 54	Belanja Subsidi 55	Belanja Hibah 56	Belanja Bansos 57	Lain-lain 58	Total Belanja
001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	21.334.376.879	490.663.647.036	10.323.182.363	-	-	-	-	-	522.211.106.278
002	DEWAN PERMUKAWAN RAKYAT	484.260.746.152	1.438.988.826.938	43.156.986.693	-	-	-	-	-	2.016.386.668.689
004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	706.427.466.402	1.056.419.843.826	487.432.212.129	-	-	-	-	-	2.248.274.512.356
005	MAHKAMAH AGUNG	3.043.297.671.306	884.461.636.160	880.324.387.229	-	-	-	-	-	4.798.064.493.695
006	KEJAKSAAN AGUNG	1.728.904.964.382	1.182.056.068.838	613.839.410.626	-	-	-	-	-	3.524.799.444.766
007	SEKRETARIAT NEGARA	287.814.711.220	1.111.338.743.169	213.624.373.988	-	-	-	-	-	1.622.677.828.366
010	DEPARTEMEN DALAM NEGERI	337.644.033.606	4.944.979.407.981	2.184.091.863.109	-	-	-	9.300.686.207.911	-	16.767.201.632.606
011	DEPARTEMEN LUAR NEGERI	1.861.100.396.774	2.067.827.308.069	198.912.942.340	-	-	-	-	-	4.117.940.647.173
012	DEPARTEMEN PERTAHANAN	33.304.770.948.464	11.268.164.671.820	16.732.424.006.288	-	-	-	-	-	61.306.249.626.662
015	DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	7.976.346.217.823	6.097.847.421.003	1.636.619.667.094	-	-	-	-	-	16.325.448.043.171
018	DEPARTEMEN PERTANIAN	1.834.834.178.103	6.830.404.984.931	844.481.986.364	616.634.747.261	-	-	8.637.183.118.463	-	18.247.064.247.961
019	DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN	626.626.414.439	1.477.006.402.629	680.642.836.271	-	-	-	-	-	2.683.174.663.339
020	DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	622.830.846.269	3.328.089.386.161	6.036.062.276.173	-	-	-	-	-	9.886.972.672.693
022	DEPARTEMEN PERHUBUNGAN	1.441.874.026.790	5.366.872.796.980	23.276.868.186.164	-	-	-	-	-	30.083.616.007.934
023	DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL	8.960.643.020.777	19.476.013.693.494	8.992.288.666.106	-	-	-	30.196.669.643.443	-	67.695.415.013.820
024	DEPARTEMEN KESEHATAN	4.022.360.273.490	12.710.114.947.894	6.717.161.919.446	-	-	-	7.126.999.210.661	-	30.675.626.361.480
025	DEPARTEMEN AGAMA	19.313.168.924.920	7.087.724.860.172	2.682.712.800.689	-	-	-	8.813.220.988.269	-	36.886.827.644.240
026	DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	269.772.866.168	2.796.026.811.418	742.608.492.013	-	-	-	26.742.826.900	-	3.784.049.986.399
027	DEPARTEMEN SOSIAL	226.694.074.088	1.273.217.676.369	208.770.736.019	-	-	-	2.713.906.162.122	-	4.422.487.647.698
029	DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN	862.388.682.937	3.808.161.311.264	460.241.988.486	-	-	-	99.961.660.000	-	5.230.733.632.686
032	DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN	514.177.428.079	3.643.717.680.649	1.112.173.129.236	-	-	-	784.982.263.916	-	5.964.460.381.879
033	DEPARTEMEN PERKOTAAN, RUMAH SAKIT DAN KEMAMPUAN	1.189.836.121.091	8.246.876.122.103	64.337.834.691.006	-	-	-	4.202.812.693.362	-	67.981.677.380.146
034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	38.634.424.633	191.218.698.966	130.178.606.400	-	-	-	-	-	360.031.728.999
036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	33.264.146.143	162.066.432.088	6.346.003.336	-	-	-	-	-	191.666.680.666
036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	30.702.406.662	133.688.662.788	56.263.974.871	-	-	-	-	-	220.666.244.321

DAFTAR LARA 2/B9 -

DAFTAR 2/6

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (6/07/2012)

KODE BA	URAIAN BA	Belanja Pegawai 51	Belanja Barang 52	Belanja Modal 53	Bunga Utang 54	Belanja Subsidi 55	Belanja Hibah 56	Belanja Bansas 57	Lain-lain 58	Total Belanja
D40	DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIMISATA	300.272.662.762	1.673.736.320.066	168.146.631.948	-	-	-	85.020.000.000	-	2.227.174.694.676
D41	KEMENTERIAN NEGARA BADAN USHA MILIK NEGARA	17.196.445.668	71.896.823.960	4.264.006.003	-	-	-	-	-	93.356.275.631
D42	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	66.678.646.899	271.769.611.665	312.082.144.932	-	-	-	-	-	649.620.303.446
D43	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	63.384.986.618	698.876.694.446	23.100.938.218	-	-	-	-	-	676.362.699.182
D44	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	48.767.946.623	865.261.181.616	165.179.896.894	-	-	-	170.906.286.182	-	1.230.114.311.286
D47	KEMENTERIAN NEGARA PEMBUDIDAYAAN PERMULIAN	30.893.626.112	120.864.602.688	2.078.667.105	-	-	-	1.369.620.000	-	185.186.516.900
D48	KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	34.136.621.282	62.002.360.307	13.721.639.028	-	-	-	-	-	109.860.620.617
D50	BADAN INTELEKTIJ NEGARA	77.262.677.476	1.189.686.699.734	209.999.013.213	-	-	-	-	-	1.476.237.190.423
D51	LEMBAGA SANDI NEGARA	71.071.473.061	109.607.007.400	1.562.169.486.666	-	-	-	-	-	1.732.846.947.167
D52	DEWAN KEJAHATAN NASIONAL	6.616.778.630	21.189.202.603	2.367.046.990	-	-	-	-	-	30.032.027.123
D54	BADAN PUSAT STATISTIK	1.267.261.701.512	973.867.023.406	423.681.603.676	-	-	-	-	-	2.664.700.228.693
D55	KEMENTERIAN NEGARA PNBAPPENAS	94.618.413.943	637.300.186.028	30.173.522.969	-	-	-	-	-	662.122.131.930
D56	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	1.072.707.488.660	1.680.861.900.977	262.307.923.044	-	-	-	-	-	2.995.877.312.681
D57	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	40.819.616.090	267.122.469.226	16.160.361.040	-	-	-	-	-	324.092.436.366
D59	KEMENTERIAN KOMINFO	194.671.428.808	2.296.099.226.286	230.782.267.700	-	-	-	-	-	2.690.559.911.794
D60	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	27.726.616.631.782	7.223.139.996.214	4.669.240.801.363	-	-	-	-	-	39.607.996.419.369
D63	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	321.843.140.264	466.038.772.471	321.210.034.316	-	-	-	-	-	1.108.092.947.051

DAFTAR LARA 260 -

DAFTAR 26

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (6/07/2012)

KODE BA	URAIAN BA	Belanja Pegawai 51	Belanja Barang 52	Belanja Modal 53	Bunga Utang 54	Belanja Subsidi 55	Belanja Hibah 56	Belanja Bansos 57	Lain-lain 58	Total Belanja
064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	62.943.808.611	81.401.149.249	93.247.791.323	-	-	-	-	-	227.592.749.083
065	BADAN KORDINASI PENJAJARAN MODAL	60.916.374.615	432.636.071.300	75.003.113.103	-	-	-	-	-	568.465.559.018
066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	105.318.145.327	524.876.308.117	228.907.738.881	-	-	-	-	-	899.002.792.325
067	KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH-TERTINGGAL	17.734.697.609	386.007.259.556	2.314.444.500	-	-	-	743.982.872.895	-	1.149.919.174.520
068	BADAN KORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	333.162.648.174	1.806.774.668.733	73.746.366.213	-	-	-	-	-	2.213.693.682.120
074	KOMISI NASIONAL HKK-ASASI MANUSIA	19.462.644.082	36.138.433.124	2.321.163.120	-	-	-	-	-	57.923.230.326
075	BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	207.188.061.764	497.128.822.441	440.639.507.862	-	-	-	-	-	1.194.956.392.077
076	KOMISI FEMILIHAN UMUM	346.096.290.237	693.403.821.690	194.434.002.644	-	-	-	-	-	1.112.923.114.361
077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	12.322.083.940	158.396.121.781	49.681.853.916	-	-	-	-	-	220.301.059.637
078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	21.063.416.396	25.156.647.793	9.900.459.699	-	-	-	-	-	56.120.523.888
079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	434.348.660.289	300.846.880.346	239.524.257.162	-	-	-	-	-	975.019.697.797
080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	334.037.763.986	207.179.822.269	198.966.898.354	-	-	-	-	-	730.184.474.608
081	BADAN PENGAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	288.676.267.461	325.239.517.309	282.089.080.727	-	-	-	-	-	896.003.845.497
082	LEMBAGA PENELITIAN DAN ANTIKORUPSI NASIONAL	69.436.669.975	181.791.421.417	204.869.817.297	-	-	-	-	-	455.086.808.689
083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	34.972.228.992	147.947.649.379	310.292.520.541	-	-	-	-	-	493.212.498.912
084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	13.066.663.669	67.946.184.643	1.294.648.500	-	-	-	-	-	72.276.396.732
085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	25.811.179.701	35.740.166.429	9.521.419.875	-	-	-	-	-	71.072.756.005
086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	72.578.066.860	139.666.668.336	27.515.342.632	-	-	-	-	-	239.660.067.827
087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	50.095.692.333	62.624.676.422	9.482.159.885	-	-	-	-	-	122.172.427.640
088	BADAN KEPERAWATAN NEGARA	255.352.879.202	165.266.807.654	69.033.872.043	-	-	-	-	-	489.657.558.889
089	BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	594.985.712.146	403.701.288.699	43.406.320.266	-	-	-	-	-	1.002.092.322.011
090	DEPARTEMEN PERDAGANGAN	198.766.211.821	1.308.671.024.360	668.890.494.076	-	-	-	-	-	2.176.326.720.247
091	KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT	48.123.028.781	1.094.747.238.939	1.101.649.346.218	-	-	-	1.795.339.568.501	-	3.989.869.182.439
092	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	53.711.074.611	561.137.973.241	9.777.281.100	-	-	-	360.079.244.411	-	954.699.973.363
093	KOMISI PEMERIKSAAN KORUPSI	192.409.373.009	116.747.817.201	27.417.697.313	-	-	-	-	-	336.574.897.523
095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	247.673.062.646	294.899.020.130	5.461.026.401	-	-	-	-	-	517.932.109.177
100	KOMISI YUDISIAL RI	8.742.781.026	63.773.494.771	3.213.219.171	-	-	-	-	-	75.729.494.968
103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	14.176.417.809	816.916.520.270	73.266.498.681	-	-	-	438.676.276.621	-	1.342.934.713.381
104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERUMINGAN TKI	42.003.646.987	190.268.670.240	15.211.899.260	-	-	-	-	-	247.488.115.487
105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDARLU	12.882.949.300	87.576.736.336	929.259.967.804	-	-	-	-	-	1.066.247.623.440
106	LEMBAGA KEBUAKAN PENGADAAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	14.648.647.369	83.982.700.786	50.962.412.107	-	-	-	36.527.990.000	-	149.593.690.262
107	BADAN SAR NASIONAL	133.349.628.245	305.566.020.467	530.330.730.052	-	-	-	-	-	970.245.378.754

DAFTAR LAMBA 261

DAFTAR 2/B

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (6/07/2012)

KODE BA	URAIAN BA	Belanja Pegawai 51	Belanja Barang 52	Belanja Modal 53	Bunga Utang 54	Belanja Subsidi 55	Belanja Hibah 56	Belanja Bansos 57	Lain-lain 58	Total Belanja
108	KOMISI PENGAWAS PERSAWAHLUSAHA	21.682.486.000	69.960.997.742	6.449.203.373	-	-	-	-	-	98.081.686.115
109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABADU (BPWS)	5.760.460.000	56.763.666.538	37.468.404.155	-	-	-	-	-	99.992.439.693
110	DIRJUSMAN REPUBLIK INDONESIA	8.607.429.096	31.740.659.969	12.249.188.907	-	-	-	-	-	52.697.148.961
111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	4.693.179.320	88.804.872.713	45.720.631.320	-	-	-	-	-	139.118.693.353
112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	-	646.626.988.624	167.729.427.014	-	-	-	-	-	704.256.425.638
113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	5.212.263.691	78.176.627.169	6.186.166.721	-	-	-	-	-	89.575.046.605
114	SEKRETARIAT KABINET	67.278.420.314	66.869.023.896	4.617.387.620	-	-	-	-	-	137.653.832.029
115	BADAN PENGAWASAN PEMULIHAN UMUM	1.002.343.400	111.987.676.200	11.019.060.894	-	-	-	-	-	124.006.079.494
116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	307.676.436.402	323.610.986.288	45.333.011.804	-	-	-	-	-	676.619.432.605
117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	208.864.821.186	441.337.686.114	66.477.280.033	-	-	-	-	-	716.668.799.333
118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	-	16.608.098.002	326.864.922.074	-	-	-	-	-	341.473.021.076
999	BENDAHARA UMUM NEGARA	69.928.727.603.270	-	-	99.900.369.627.693	346.420.404.182.332	75.079.293.654	99.007.665.619	4.067.892.982.647	520.491.471.144.915
	JUMLAH	197.863.666.816.235	140.884.875.397.761	145.104.148.482.853	100.515.994.274.844	346.420.404.182.332	75.079.293.654	75.621.057.138.995	4.073.111.935.240	1.010.568.236.531.814

DAFTAR LRA 2B2

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

DAFTAR 2.C

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT FUNGSI SUBFUNGSI
TAHUN ANGGARAN 2012
(dalam rupiah)**

KODE FUNGSI/ SUBFUNGSI	FUNGSI/SUBFUNGSI	ANGGARAN	REALISASI BELANJA BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI BELANJA NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
01	PELAYANAN UMUM	656.824.991.747.365	648.159.206.908.002	480.073.220.737	647.679.133.687.265	(9.145.858.060.100)
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN	110.866.113.072.647	105.145.485.103.424	161.165.647.972	104.984.319.455.452	15.881.793.617.195
01.03	PELAYANAN UMUM	13.514.357.989.932	12.524.849.167.786	39.451.092.489	12.485.398.075.297	(1.028.959.914.635)
01.04	PEMELITIAN DASAR DAN PENGEMBANGAN IPTEK	2.349.227.437.416	2.536.278.471.061	5.594.170.696	2.530.684.300.365	181.456.862.949
01.05	PINJAMAN PEMERINTAH	117.871.285.807.778	99.978.645.539.520	208.750.812	99.978.436.788.708	(17.892.849.019.070)
01.06	PEMBANGUNAN DAERAH	1.872.688.775.673	1.790.464.734.292	2.563.191.091	1.787.901.543.201	(84.797.232.472)
01.07	LITBANG PELAYANAN UMUM	178.589.953.790	168.542.832.110	518.966.397	168.023.865.713	(10.566.088.077)
01.90	PELAYANAN UMUM LAINNYA	410.172.718.710.129	425.978.453.366.338	270.560.191.280	425.707.893.175.058	15.535.174.464.929
01.08	SUBFUNGSI TIDAK ADA		36.475.685.571	11.210.000	36.464.455.571	36.464.455.571
01.09	SUBFUNGSI TIDAK ADA		12.027.900	-	12.027.900	12.027.900
02	PERTAHANAN	72.858.578.721.584	64.565.572.448.162	3.338.715.986.312	61.226.856.461.850	(11.631.722.259.734)
02.01	PERTAHANAN NEGARA	52.328.077.332.233	50.970.744.649.321	93.719.283.655	50.877.025.365.686	(1.451.051.966.567)
02.02	DUKUNGAN PERTAHANAN	20.368.819.102.477	13.428.956.052.118	3.240.243.876.410	10.188.692.175.708	(10.180.126.926.789)
02.04	LITBANG PERTAHANAN	161.682.286.874	165.891.746.723	4.752.826.247	161.138.920.476	(543.366.398)

DAFTAR LRA - 263 -

DAFTAR 2.C

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

KODE FUNGSI/ SUBFUNGSI	FUNGSI/SUBFUNGSI	ANGGARAN	REALISASI BELANJA BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI BELANJA NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	33.102.022.813.087	29.140.780.780.541	44.299.554.317	29.096.481.226.224	(4.005.541.586.863)
03.01	KEPOLISIAN	20.357.941.349.895	17.006.924.012.370	9.927.730.931	16.996.996.281.439	(3.360.945.068.456)
03.02	PEMANGGULANGAN BENCANA	1.128.245.351.988	1.360.111.505.577	17.186.393.596	1.342.925.111.981	214.679.759.993
03.03	PEMIBINAAN HUKUM	2.990.075.068.107	2.457.400.304.650	7.221.590.052	2.450.178.714.598	(539.896.343.509)
03.04	PERADILAN	5.115.475.918.828	4.863.281.923.393	5.511.650.825	4.857.770.272.568	(257.705.646.260)
03.06	LITBANG KETERTIBAN DAN KEAMANAN	16.605.069.190	16.355.398.886	23.902.574	16.331.496.312	(273.572.878)
03.90	KETERTIBAN DAN KEAMANAN LAINNYA	3.493.680.065.079	3.436.707.635.665	4.428.286.339	3.432.279.349.326	(61.400.715.753)
04	EKONOMI	122.206.005.613.147	105.651.016.957.031	76.469.805.021	105.574.547.152.010	(16.631.458.461.137)
04.01	PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI DAN UKM	2.921.226.319.186	2.668.914.901.217	3.546.404.540	2.665.368.496.677	(255.857.822.509)
04.02	TENAGA KERJA	1.759.436.727.852	1.627.762.100.378	3.388.856.907	1.624.373.243.471	(135.063.484.381)
04.03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	18.251.380.734.442	19.405.486.970.394	13.693.773.607	19.391.793.196.787	1.140.412.462.345
04.04	PENGAIRAN	892.848.700.472	881.083.546.485	163.218.200	880.920.328.285	(211.928.372.187)
04.05	BAHAN BAKAR DAN ENERGI	11.957.200.841.149	6.547.400.744.822	549.891.078	6.546.850.853.744	(5.410.349.987.405)
04.06	PERTAMBANGAN	1.746.782.301.469	1.096.683.600.462	1.453.276.626	1.095.230.323.836	(651.551.977.633)
04.07	INDUSTRI DAN KONSTRUKSI	1.964.152.091.744	2.170.780.847.656	1.925.116.090	2.168.855.731.566	204.703.639.822
04.08	TRANSPORTASI	73.518.909.529.214	62.618.039.774.690	41.254.679.935	62.576.785.094.755	(10.942.124.434.459)
04.09	TELEKOMUNIKASI	2.000.000.000	231.021.183.934	41.541.870	230.979.642.064	228.979.642.064
04.10	LITBANG EKONOMI	3.064.760.042.529	3.254.030.199.597	4.151.555.730	3.249.878.643.867	185.118.601.338
04.90	EKONOMI LAINNYA	6.127.308.325.090	5.349.813.087.396	6.301.490.438	5.343.511.596.958	(783.796.728.132)
05	LINGKUNGAN HIDUP	10.673.674.261.208	8.826.520.156.781	12.388.303.619	8.814.131.953.162	(1.859.542.408.046)

DAFTAR LRA - 264 -

DAFTAR 2.C

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

KODE FUNGSI/ SUBFUNGSI	FUNGSI/SUBFUNGSI	ANGGARAN	REALISASI BELANJA BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI BELANJA NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
05.01	MANA JEMEN LIMBAH	2.764.536.632.886	2.155.954.726.365	147.535.800	2.155.807.190.565	(608.729.442.321)
05.03	PENANGGULANGAN POLUSI	163.298.014.770	144.526.992.633	85.693.609	144.441.299.024	(18.856.715.746)
05.04	KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM	4.009.977.211.733	3.564.863.848.751	4.285.981.518	3.560.577.867.233	(449.399.344.500)
05.05	TATA RUANG DAN PERTANAHAN	3.216.374.736.020	2.541.640.566.539	6.725.601.649	2.534.914.964.890	(681.459.771.130)
05.90	LINGKUNGAN HIDUP LAINNYA	519.487.665.799	419.534.022.493	1.143.491.043	418.390.531.450	(101.097.134.349)
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	28.464.614.157.650	26.454.914.558.307	14.024.602.693	26.440.889.955.614	(2.023.724.202.036)
06.01	PEMBANGUNAN PERUMAHAN	4.434.977.008.201	3.051.072.569.662	2.292.432.165	3.048.820.137.497	(1.386.156.870.704)
06.02	PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERMUKIMAN	4.049.467.001.858	3.458.703.675.049	149.995.644	3.458.553.679.405	(590.913.322.453)
06.03	PENYEDIAAN AIR MINUM	3.729.634.720.387	3.692.150.659.406	191.440.046	3.691.959.219.360	(37.675.501.027)
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA	16.250.535.427.204	16.252.987.654.190	11.430.734.838	16.241.556.919.352	(8.978.507.852)
07	KESEHATAN	15.210.936.596.791	15.237.085.202.620	55.382.511.626	15.181.702.690.994	(29.233.905.797)
07.01	OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	2.695.453.531.884	2.606.924.954.614	11.069.181.626	2.595.855.772.988	(99.597.758.896)
07.02	PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN	8.650.610.704.781	8.476.593.158.299	30.310.998.138	8.446.282.160.161	(204.328.544.620)
07.03	PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT	1.188.246.167.001	1.471.595.170.762	3.480.331.306	1.468.114.839.456	279.868.672.455
07.04	KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	2.110.109.878.368	2.215.737.660.387	2.053.978.267	2.213.663.682.120	103.573.803.752
07.05	LITBANG KESEHATAN	319.874.939.125	280.445.696.824	2.521.650.518	277.924.046.306	(41.950.892.819)
07.90	KESEHATAN LAINNYA	246.641.375.632	185.788.561.734	5.946.371.771	179.842.189.963	(66.799.185.669)
08	PARIWISATA DAN BUDAYA	3.106.944.475.517	2.518.217.242.613	1.891.278.617	2.516.325.963.996	(590.618.511.521)
08.01	PENGEMBANGAN PARIWISATA	1.566.288.331.474	1.536.353.064.210	1.514.721.361	1.534.838.342.849	(31.429.988.625)
08.03	PEMBINAAN PENERBITAN DAN PENYIARAN	7.432.895.531	6.991.995.653	-	6.991.995.653	(440.909.878)

DAFTAR LRA - 265 -

DAFTAR 2.C

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

KODE FUNGSI/ SUBFUNGSI	FUNGSI/SUBFUNGSI	ANGGARAN	REALISASI BELANJA BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI BELANJA NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
08.04	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA	78.694.185.743	62.749.239.491	37.595.009	62.711.644.482	(15.982.541.261)
08.05	PEMBINAAN OLAHRAGA PRESTASI	640.491.417.159	483.966.691.478	4.612.350	483.962.079.128	(156.529.338.031)
08.90	PARIWISATA LAINNYA	814.057.645.610	428.156.261.781	334.349.897	427.821.911.884	(386.235.733.726)
09	AGAMA	3.537.620.481.125	3.428.569.671.820	8.893.632.573	3.419.676.039.247	(117.944.441.878)
09.01	PENINGKATAN KEHIDUPAN BERAGAMA	916.957.951.483	822.107.926.228	2.967.367.525	819.140.558.703	(97.817.392.780)
09.02	KERUKUNAN HIDUP BERAGAMA	62.145.255.420	58.686.626.774	872.330.290	57.814.296.484	(4.330.958.936)
09.03	LITBANG AGAMA	1.658.136.128.392	1.800.406.732.111	2.095.593.218	1.798.311.138.893	140.175.010.501
09.90	PELAYANAN KEAGAMAAN LAINNYA	900.381.145.830	719.554.034.015	2.902.572.040	716.651.461.975	(183.729.683.855)
09.08			27.814.352.692	55.769.500	27.758.583.192	27.758.583.192
10	PENDIDIKAN	118.015.850.517.446	105.500.034.096.167	292.486.571.354	105.207.547.524.813	(12.808.302.992.633)
10.01	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	261.627.280.480	244.697.399.217	1.738.450.695	242.958.948.522	(18.668.331.958)
10.02	PENDIDIKAN DASAR	32.144.560.985.559	28.959.027.786.152	148.612.471.015	28.810.415.315.137	(3.334.145.670.422)
10.03	PENDIDIKAN MENENGAH	9.171.847.151.539	8.312.822.356.189	25.910.773.382	8.286.911.582.807	(884.935.568.732)
10.04	PENDIDIKAN NON-FORMAL DAN INFORMAL	3.671.198.758.884	3.463.824.113.255	26.244.487.422	3.437.579.625.833	(233.579.133.051)
10.05	PENDIDIKAN KEDINASAN	602.236.655.830	587.037.483.713	498.946.222	586.538.537.491	(15.698.118.339)
10.06	PENDIDIKAN TINGGI	45.667.797.724.369	38.734.891.543.538	21.935.985.442	38.712.955.558.096	(6.954.842.166.273)
10.07	PELAYANAN BANTUAN TERHADAP PENDIDIKAN	4.527.904.043.443	3.968.614.259.095	42.273.271.709	3.926.340.987.386	(601.563.056.057)
10.08	PENDIDIKAN KEAGAMAAN	3.282.203.241.613	3.053.730.249.710	4.146.714.441	3.049.583.535.269	(232.619.706.344)
10.09	LITBANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.278.073.376.498	1.151.456.936.196	10.456.623.994	1.141.000.312.202	(137.073.064.296)
10.10	PEMBINAAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	929.110.281.020	304.261.215.849	32.715.800	304.228.500.049	(624.881.780.971)
10.90	PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LAINNYA	16.479.331.018.211	16.076.725.661.372	10.565.376.232	16.066.160.285.140	(413.170.733.071)

DAFTAR LRA - 266 -

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

DAFTAR 2.C

KODE FUNGSI/ SUBFUNGSI	FUNGSI/SUBFUNGSI	ANGGARAN	REALISASI BELANJA BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI BELANJA NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
10.00	SUBFUNGSI TIDAK ADA		642.945.091.881	70.755.000	642.874.336.881	642.874.336.881
11	PERLINDUNGAN SOSIAL	5.533.205.562.080	5.091.543.452.917	10.029.191.840	5.081.514.261.077	(451.691.301.003)
11.01	PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ORANG SAKIT DAN CACAT	304.404.328.385	301.244.450.204	1.484.334.490	299.760.115.714	(4.644.212.671)
11.02	PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL LANSIA	137.158.398.899	135.567.154.303	37.635.471	135.529.518.832	(1.628.880.067)
11.04	PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ANAK-ANAK DAN KELUARGA	475.194.905.559	472.127.017.395	1.559.870.131	470.567.147.264	(4.627.758.295)
11.05	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	116.083.795.118	118.121.200.872	1.204.795.560	116.916.405.312	832.610.194
11.08	BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL	31.644.688.979	27.877.350.110	33.261.400	27.844.088.710	(3.800.610.269)
11.09	LITBANG PERLINDUNGAN SOSIAL	226.627.125.964	225.262.481.355	253.588.752	225.008.892.603	(1.618.233.361)
11.90	PERLINDUNGAN SOSIAL LAINNYA	4.242.092.309.176	3.811.343.798.678	5.455.706.036	3.805.888.092.642	(436.204.216.534)
00.00	Fungsi Subfungsi Tidak Ada		327.380.486.967	7.950.771.405	319.429.715.562	319.429.715.562
	JUMLAH	1.069.534.444.947.000	1.014.900.841.961.928	4.342.605.430.114	1.010.558.236.531.814	(58.976.208.415.186)

DAFTAR LRA - 267 -

DAFTAR 3.A

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN
TAHUN ANGGARAN 2012
(Dalam Rupiah)**

No.	Wilayah	Dana Bagi Hasil					Jumlah 6 = 3 + 4 + 5	DAU 7	DAK 8	Total Dana Perimbangan 9 = 6 + 7 + 8
		Pajak 3	SDA 4	Cukai 5	DAU 6	DAK 7				
1	Provinsi Mangrove Aceh Darussalam	1.172.109.772,061	1.656.492.219,314	6.955.960,332	2.835.557.951,707	10.257.062.953,000	932.016.550,000	14.024.637.454,707		
2	Provinsi Sumatera Utara	1.794.936.433,289	74.202.872,206	14.525.881,833	1.883.665.187,328	16.408.691.459,000	1.535.920.128,000	19.928.276.774,328		
3	Provinsi Sumatera Barat	705.954.372,249	67.391.195,809	8.257.962,252	781.503.530,310	9.226.584.083,000	820.249.293,000	10.828.336.906,310		
4	Provinsi Riau	2.163.416.511,993	14.035.559.332,572	-	16.198.975.844,565	5.316.669.142,000	380.450.955,000	21.896.095.941,565		
5	Provinsi Kepulauan Riau	864.682.142,365	4.265.676.063,695	-	5.130.358.206,060	2.158.221.170,000	166.924.085,000	7.455.503.461,060		
6	Provinsi Jambi	1.020.527.259,178	1.919.657.887,859	4.565.959,144	2.944.751.103,181	5.392.345.989,000	432.659.485,000	8.759.755.577,181		
7	Provinsi Sumatera Selatan	2.199.313.042,631	6.018.375.184,526	4.012.747,489	8.220.700.974,646	8.020.930.106,000	737.077.240,000	16.978.608.320,646		
8	Provinsi Bangka Belitung	295.392.606,192	408.907.687,535	-	704.300.293,727	2.891.371.486,000	276.503.310,000	3.972.175.089,727		
9	Provinsi Bengkulu	305.697.167,741	97.928.682,479	-	403.625.850,220	4.433.207.693,000	429.280.910,000	5.266.114.453,220		
10	Provinsi Lampung	693.635.730,605	549.382.057,433	4.534.629,213	1.247.552.417,251	8.517.087.668,000	1.070.149.930,000	10.934.790.015,251		
11	Provinsi DKI Jakarta	10.984.787.699,665	303.331.951,754	-	11.288.119.651,419	275.327.857,000	-	11.563.447.508,419		
12	Provinsi Jawa Barat	4.290.311.713,547	1.472.248.735,277	152.860.849,861	5.915.421.298,685	25.366.474.052,000	1.972.986.423,000	33.254.881.773,685		
13	Provinsi Banten	1.611.313.546,019	23.470.873,660	-	1.634.784.419,679	6.087.268.420,000	453.881.040,000	8.175.933.979,679		
14	Provinsi Jawa Tengah	2.381.715.314,194	60.723.861,327	437.599,951,010	2.880.039.126,531	26.384.459.831,000	2.448.507.600,000	31.713.006.557,531		
15	Provinsi DI Yogyakarta	387.652.774,921	1.920.989,505	19.128.612,640	408.602.383,966	4.076.315.166,000	257.020.870,000	4.741.938.419,966		
16	Provinsi Jawa Timur	3.474.934.770,437	1.799.333.710,600	843.629.720,083	6.117.898.201,120	28.970.769.844,000	2.223.596.265,000	37.312.264.310,120		
17	Provinsi Kalimantan Barat	670.816.634,072	178.747.727,743	-	849.564.361,815	8.122.410.318,000	964.858.240,000	9.936.832.191,815		
18	Provinsi Kalimantan Tengah	763.537.495,556	734.467.280,111	4.355.718,021	1.502.360.493,690	7.353.898.102,000	515.368.160,000	9.371.626.755,690		
19	Provinsi Kalimantan Selatan	815.841.666,286	3.177.116.050,918	-	3.992.958.317,204	5.867.936.400,000	447.768.060,000	10.308.562.777,204		
20	Provinsi Kalimantan Timur	3.037.644.403,982	21.981.958.897,380	-	25.019.603.301,362	4.536.156.684,000	269.209.269,000	29.824.969.254,362		
21	Provinsi Sulawesi Utara	435.325.268,990	35.591.248,360	-	470.916.517,250	5.947.146.273,000	688.993.380,000	7.107.056.170,250		

DAFTAR LRA - 208 -

No.	Wilayah	Dana Bagi Hasil					Jumlah 6 = 3 + 4 + 5	DAU	DAK	Total Dana Perimbangan 9 = 6 + 7 + 8
		Pajak 3	SDA 4	Cukai 5	7	8				
1	2									
22	Provinsi Gorontalo	152.836.928.624	3.445.349.806	-	156.282.278.430	2.623.208.646.000	269.211.450.000	3.048.702.374.430		
23	Provinsi Sulawesi Tengah	393.568.259.542	108.119.333.815	3.255.920.453	504.943.513.810	6.023.223.674.000	638.622.650.000	7.166.789.837.810		
24	Provinsi Sulawesi Selatan	1.272.712.137.404	55.732.563.492	11.955.854.680	1.340.400.560.576	12.033.560.759.000	1.227.933.070.000	14.601.894.389.576		
25	Provinsi Sulawesi Barat	227.287.892.191	4.346.629.541	-	231.634.521.732	2.591.449.802.000	342.063.350.000	3.165.147.673.732		
26	Provinsi Sulawesi Tenggara	367.321.318.870	299.442.676.943	-	666.763.995.813	5.977.703.717.000	649.099.490.000	7.293.567.202.813		
27	Provinsi Bali	676.775.656.028	3.232.394.181	11.125.437.810	691.133.488.019	5.038.814.658.000	340.255.143.000	6.070.203.289.019		
28	Provinsi Nusa Tenggara Barat	430.219.417.069	69.867.404.983	191.867.760.358	691.954.582.410	5.831.380.610.000	599.277.990.000	7.122.613.182.410		
29	Provinsi Nusa Tenggara Timur	492.601.764.190	10.913.297.518	4.148.310.479	507.663.372.187	8.906.209.191.000	1.292.666.810.000	10.706.539.373.187		
30	Provinsi Maluku	411.972.204.253	59.466.817.516	-	471.439.121.769	4.922.808.888.000	483.833.420.000	5.878.081.529.769		
31	Provinsi Maluku Utara	372.965.868.200	279.958.781.426	-	652.924.649.626	4.544.724.652.000	615.084.530.000	5.812.733.831.626		
32	Provinsi Papua	1.339.125.087.882	683.865.502.029	-	2.022.990.589.911	14.320.547.756.000	1.954.866.690.000	18.198.425.035.911		
33	Provinsi Papua Barat	1.008.303.170.760	1.390.648.382.856	-	2.398.951.553.616	5.300.671.054.000	605.129.070.000	8.304.751.677.616		
	Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	0		
	Kembali ke RKUN	-	768.861.261.146	-	768.861.261.146	-	-	768.861.261.146		
	Nilai belum teridentifikasi daerah penerima	-	-	-	-	-	-	0		
	JUMLAH	47.214.136.030.788	62.600.285.617.315	1.722.781.272.658	111.537.202.920.761	273.814.438.203.000	25.941.483.856.000	411.293.124.979.761		

DAFTAR LRA-209

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

DAFTAR 3.B

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2012
(Dalam Rupiah)**

No.	Daerah	Pagu	Realisasi			Total 7 = 4 + 5 + 6
			PPH Perorangan	PBB	BPHTB	
1	2	3	4	5	6	
1	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	251.142.652.419	80.624.297.647	170.518.354.772	-	251.142.652.419
2	Kab. Aceh Barat	23.667.923.332	6.909.601.121	16.758.322.211	481.469.231	23.667.923.332
3	Kab. Aceh Besar	28.028.236.666	7.407.298.000	20.621.938.666	481.469.231	28.028.236.666
4	Kab. Aceh Selatan	21.444.277.660	2.683.946.091	18.760.331.569	481.469.231	21.444.277.660
5	Kab. Aceh Singkil	22.488.688.890	3.358.992.337	19.129.696.553	481.469.231	22.488.688.890
6	Kab. Aceh Tengah	23.664.403.504	3.691.047.860	19.973.355.644	481.469.231	23.664.403.504
7	Kab. Aceh Tenggara	19.599.666.912	2.866.164.666	16.733.502.246	481.469.231	19.599.666.912
8	Kab. Aceh Timur	86.901.682.284	2.967.692.794	83.934.989.490	481.469.231	86.901.682.284
9	Kab. Aceh Utara	246.700.533.218	7.939.879.961	238.760.653.257	481.469.231	246.700.533.218
10	Kab. Bireun	34.079.465.252	4.368.369.867	29.711.095.385	481.469.231	34.079.465.252
11	Kab. Pidie	23.383.316.590	4.911.774.346	18.471.542.244	481.469.231	23.383.316.590
12	Kab. Simeulue	18.283.653.214	2.664.720.812	15.618.932.402	481.469.231	18.283.653.214
13	Kota Banda Aceh	38.269.993.461	21.546.644.620	16.723.348.841	481.469.231	38.269.993.461
14	Kota Sabang	19.746.748.021	2.475.437.768	17.271.310.253	481.469.231	19.746.748.021
15	Kota Langsa	23.319.737.943	5.869.265.536	17.450.472.407	481.469.231	23.319.737.943
16	Kota Lhokseumawe	66.823.988.669	13.837.862.812	52.986.125.857	481.469.231	66.823.988.669
17	Kab. Nagan Raya	28.967.024.451	5.288.750.455	23.678.273.996	481.469.231	28.967.024.451
18	Kab. Aceh Jaya	21.801.339.599	4.075.175.879	17.726.163.720	481.469.231	21.801.339.599
19	Kab. Pidie Jaya	19.021.329.733	2.312.811.454	16.708.518.279	481.469.231	19.021.329.733
20	Kab. Aceh Barat Daya	20.621.402.932	3.943.998.168	16.677.404.764	481.469.231	20.621.402.932
21	Kab. Gayo Lues	26.672.102.195	2.267.554.228	24.404.547.967	481.469.231	26.672.102.195
22	Kab. Aceh Tamiang	70.526.540.162	4.648.529.381	65.878.010.781	481.469.231	70.526.540.162
23	Kab. Bener Meriah	21.461.182.364	2.574.567.080	18.886.615.284	481.469.231	21.461.182.364
24	Kota Subulussalam	15.614.994.820	2.486.609.263	13.128.385.557	481.469.231	15.614.994.820
25	Provinsi Sumatera Utara	447.290.810.174	267.453.204.459	179.837.605.715	-	447.290.810.174
26	Kab. Asahan	57.186.816.980	10.405.603.906	46.781.213.074	481.469.231	57.186.816.980
27	Kab. Dairi	25.046.612.591	4.940.635.904	20.105.976.687	481.469.231	25.046.612.591
28	Kab. Deli Serdang	72.293.176.414	17.909.178.472	54.384.997.942	481.469.231	72.293.176.414
29	Kab. Tanah Karo	28.306.144.312	5.824.090.608	22.482.053.704	481.469.231	28.306.144.312
30	Kab. Labuhan Batu	53.308.143.497	11.158.320.280	42.150.823.217	481.469.231	53.308.143.497
31	Kab. Langkat	151.807.807.144	11.430.659.106	139.377.148.038	481.469.231	151.807.807.144
32	Kab. Mandailing Natal	37.878.156.210	8.654.633.236	29.223.522.974	481.469.231	37.878.156.210
33	Kab. Nias	12.514.594.954	4.021.435.368	8.493.159.586	481.469.231	12.514.594.954
34	Kab. Simalungun	62.145.670.667	10.326.715.254	51.818.955.413	481.469.231	62.145.670.667
35	Kab. Tapanuli Selatan	36.655.180.170	9.360.674.873	27.294.505.297	481.469.231	36.655.180.170
36	Kab. Tapanuli Tengah	34.714.302.623	5.188.791.677	29.525.510.946	481.469.231	34.714.302.623
37	Kab. Tapanuli Utara	27.874.410.149	6.526.574.922	21.347.835.227	481.469.231	27.874.410.149
38	Kab. Toba Samosir	22.832.183.366	7.215.752.746	15.616.430.620	481.469.231	22.832.183.366
39	Kota Binjai	40.550.550.811	7.579.528.466	32.971.022.345	481.469.231	40.550.550.811
40	Kota Medan	196.391.372.528	159.812.619.935	36.578.752.593	481.469.231	196.391.372.528
41	Kota Pematang Siantar	34.190.159.289	18.491.554.106	15.698.605.183	481.469.231	34.190.159.289
42	Kota Sibolga	20.307.129.499	5.229.513.875	15.077.675.624	481.469.231	20.307.129.499
43	Kota Tanjung Balai	17.845.187.301	5.281.964.670	12.563.222.631	481.469.231	17.845.187.301
44	Kab. Batu Bara	27.636.641.810	9.766.766.525	17.869.875.285	481.469.231	27.636.641.810
45	Kab. Labuhan Batu Utara	36.887.009.187	6.133.594.905	30.753.414.282	481.469.231	36.887.009.187
46	Kab. Labuhan Batu Selatan	51.927.033.347	7.211.985.815	44.715.047.532	481.469.231	51.927.033.347
47	Kab. Padang Lawas Utara	30.371.045.511	4.950.619.021	25.420.426.490	481.469.231	30.371.045.511
48	Kab. Padang Lawas	28.074.760.020	4.999.350.068	23.075.409.952	481.469.231	28.074.760.020
49	Kab. Nias Utara	13.848.921.954	3.589.369.595	10.259.552.359	481.469.231	13.848.921.954
50	Kab. Nias Barat	12.763.148.707	3.475.767.345	9.287.381.362	481.469.231	12.763.148.707
51	Kota Tebing Tinggi	24.402.300.264	6.862.985.009	17.539.315.255	481.469.231	24.402.300.264
52	Kota Padang Sidempuan	32.341.248.784	13.929.327.417	18.411.921.367	481.469.231	32.341.248.784
53	Kab. Pakpak Bharat	23.003.217.822	3.867.744.702	19.135.473.120	481.469.231	23.003.217.822
54	Kab. Nias Selatan	23.998.041.620	3.935.147.658	20.062.893.962	481.469.231	23.998.041.620
55	Kab. Humbang Hasundutan	27.310.381.672	4.338.432.261	22.971.949.411	481.469.231	27.310.381.672
56	Kab. Serdang Bedagai	51.345.752.945	10.263.135.400	41.082.617.545	481.469.231	51.345.752.945
57	Kab. Samosir	18.453.102.744	3.976.102.235	14.477.000.509	481.469.231	18.453.102.744
58	Kota Gunungsiboli	14.435.428.223	4.621.041.331	9.814.386.892	481.469.231	14.435.428.223
59	Provinsi Sumatera Barat	180.525.464.328	121.046.655.429	59.478.807.899	-	180.525.464.328
60	Kab. Limapuluh Kota	25.352.794.839	5.360.623.083	19.992.171.756	481.469.231	25.352.794.839

DAFTAR LRA - 270 -

No.	Daerah	Pagu	Realisasi			
			PPh Perorangan	PBB	BPHTB	Total
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5+6
61	Kab. Agam	26.612.907.195	8.474.511.501	16.666.826.453	481.469.231	26.612.907.195
62	Kab. Kepulauan Mentawai	22.862.513.371	3.723.612.996	18.667.431.146	481.469.231	22.862.513.371
63	Kab. Padang Pariaman	24.549.787.179	6.702.431.521	17.366.886.427	481.469.231	24.549.787.179
64	Kab. Pasaman	24.627.466.726	5.541.251.975	18.604.736.519	481.469.231	24.627.466.726
66	Kab. Pesisir Selatan	30.319.530.933	6.892.034.944	22.946.026.858	481.469.231	30.319.530.933
68	Kab. Sijunjung	24.236.571.192	4.623.031.572	19.131.070.399	481.469.231	24.236.571.192
67	Kab. Solok	22.166.209.347	5.199.354.899	16.486.395.217	481.469.231	22.166.209.347
68	Kab. Tanah Datar	20.109.688.530	6.233.502.932	13.394.716.367	481.469.231	20.109.688.530
69	Kota Bukit Tinggi	23.143.429.107	11.220.963.439	11.440.996.437	481.469.231	23.143.429.107
70	Kota Padang Panjang	19.157.382.806	4.767.195.446	13.918.718.129	481.469.231	19.157.382.806
71	Kota Padang	107.079.825.196	73.711.733.049	32.896.622.907	481.469.231	107.079.825.196
72	Kota Payakumbuh	17.995.394.934	5.504.790.715	12.009.134.988	481.469.231	17.995.394.934
73	Kota Sawahlunto	18.465.909.207	4.966.031.474	13.009.408.502	481.469.231	18.465.909.207
74	Kota Solok	18.826.956.013	5.278.875.012	13.066.610.770	481.469.231	18.826.956.013
75	Kota Pariaman	23.542.521.249	7.166.452.401	15.896.599.617	481.469.231	23.542.521.249
76	Kab. Pasaman Barat	28.511.389.949	6.824.941.451	21.204.979.267	481.469.231	28.511.389.949
77	Kab. Dharmasraya	25.408.426.744	5.100.619.583	19.826.337.930	481.469.231	25.408.426.744
78	Kab. Solok Selatan	23.371.314.425	4.298.437.628	18.691.407.566	481.469.231	23.371.314.425
79	Provinsi Riau	502.497.680.044	204.861.885.696	297.635.794.348	-	502.497.680.044
80	Kab. Bengkalis	238.942.928.516	52.505.789.309	186.965.669.976	481.469.231	238.942.928.516
81	Kab. Indragiri Hilir	67.157.862.543	14.035.731.896	52.840.661.416	481.469.231	67.157.862.543
82	Kab. Indragiri Hulu	112.565.229.167	14.067.390.625	98.026.369.311	481.469.231	112.565.229.167
83	Kab. Kampar	141.798.069.906	14.486.242.717	126.820.347.958	481.469.231	141.798.069.906
84	Kab. Kuantan Singingi	46.325.727.443	12.114.952.487	33.729.305.725	481.469.231	46.325.727.443
85	Kab. Pelalawan	162.842.248.744	20.168.746.166	142.192.033.347	481.469.231	162.842.248.744
86	Kab. Rokan Hilir	21.914.423.583	17.586.571.749	201.546.382.603	481.469.231	21.914.423.583
87	Kab. Rokan Hulu	125.201.031.153	11.769.113.710	112.960.448.212	481.469.231	125.201.031.153
88	Kab. Siak	236.494.129.678	25.622.031.765	210.390.628.662	481.469.231	236.494.129.678
89	Kota Dumai	98.729.228.777	50.026.669.922	48.221.089.624	481.469.231	98.729.228.777
90	Kota Pekanbaru	125.860.555.878	83.418.150.316	41.960.936.331	481.469.231	125.860.555.878
91	Kab. Kepulauan Meranti	85.387.406.561	8.588.220.989	76.337.716.351	481.469.231	85.387.406.561
92	Provinsi Kepulauan Riau	199.536.363.562	80.959.079.312	118.577.284.250	-	199.536.363.562
93	Kab. Bintan	75.752.109.733	10.080.586.654	65.190.053.848	481.469.231	75.752.109.733
94	Kab. Natuna	180.742.532.265	9.213.304.387	171.047.758.647	481.469.231	180.742.532.265
95	Kab. Karimun	65.571.486.126	13.478.632.084	51.611.383.811	481.469.231	65.571.486.126
96	Kota Batam	176.905.033.052	67.439.523.436	108.984.040.395	481.469.231	176.905.033.052
97	Kab. Kepulauan Anambas	68.098.143.246	12.613.831.190	55.002.842.825	481.469.231	68.098.143.246
98	Kota Tanjung Pinang	48.509.730.938	7.184.268.300	40.863.993.407	481.469.231	48.509.730.938
99	Kab. Lingga	49.566.744.443	6.036.596.854	43.049.678.358	481.469.231	49.566.744.443
100	Provinsi Jambi	224.691.647.899	60.692.547.656	163.999.100.243	-	224.691.647.899
101	Kab. Batanghari	159.674.435.218	7.040.032.862	152.152.933.125	481.469.231	159.674.435.218
102	Kab. Bungo	335.771.195.957	8.401.085.352	24.694.642.374	481.469.231	335.771.195.957
103	Kab. Kerinci	19.391.340.941	2.930.435.569	15.979.436.141	481.469.231	19.391.340.941
104	Kab. Merangin	40.958.890.536	5.423.466.927	36.053.955.378	481.469.231	40.958.890.536
105	Kab. Muaro Jambi	131.326.232.435	7.062.079.429	123.782.683.775	481.469.231	131.326.232.435
106	Kab. Sarolangun	79.443.931.783	3.645.471.319	75.316.991.233	481.469.231	79.443.931.783
107	Kab. Tanjung Jabung Barat	78.707.718.713	6.102.741.872	72.123.507.610	481.469.231	78.707.718.713
108	Kab. Tanjung Jabung Timur	100.977.628.781	7.009.787.761	93.486.371.789	481.469.231	100.977.628.781
109	Kab. Tebo	52.537.481.292	4.704.670.639	47.351.341.422	481.469.231	52.537.481.292
110	Kota Jambi	83.179.721.965	33.373.608.865	49.324.643.849	481.469.231	83.179.721.965
111	Kota Sungai Penuh	16.061.032.658	5.345.441.869	10.234.121.558	481.469.231	16.061.032.658
112	Provinsi Sumatera Selatan	488.990.018.629	145.460.936.576	343.529.082.053	-	488.990.018.629
113	Kab. Lahat	115.694.039.965	10.174.248.412	105.038.322.322	481.469.231	115.694.039.965
114	Kab. Musi Banyuasin	367.037.053.052	13.247.789.698	353.307.814.123	481.469.231	367.037.053.052
115	Kab. Musi Rawas	188.693.806.415	6.699.832.340	191.512.504.844	481.469.231	188.693.806.415
116	Kab. Muara Enim	334.190.169.942	20.469.496.024	313.239.204.687	481.469.231	334.190.169.942
117	Kab. Ogan Komering Ilir	62.987.297.661	7.258.530.084	55.247.298.346	481.469.231	62.987.297.661
118	Kab. Ogan Komering Ulu	86.057.253.778	13.403.670.990	72.172.113.557	481.469.231	86.057.253.778
119	Kota Palembang	113.180.712.944	90.556.917.167	22.142.326.546	481.469.231	113.180.712.944
120	Kota Pagar Alam	28.682.584.827	5.336.191.788	22.884.923.808	481.469.231	28.682.584.827
121	Kota Lubuk Linggau	35.126.822.031	11.962.871.009	22.882.481.791	481.469.231	35.126.822.031
122	Kota Prabumulih	58.865.779.422	13.123.105.110	45.261.205.081	481.469.231	58.865.779.422
123	Kab. Empat Lawang	28.587.045.902	5.047.191.649	23.068.385.022	481.469.231	28.587.045.902
124	Kab. Banyuasin	151.386.182.937	7.988.044.987	142.916.668.719	481.469.231	151.386.182.937
125	Kab. Ogan Ilir	71.955.058.766	5.975.812.463	65.507.777.072	481.469.231	71.955.058.766

No.	Daerah	Pagu	Realisasi			Total 7 = 4+5+6
			PPh Perorangan	PBB	BPHTB	
1	2	3	4	5	6	
126	Kab. OKU Timur	36.879.126.708	7.571.238.896	27.826.418.582	481.469.231	36.879.126.708
127	Kab. OKU Selatan	30.990.089.662	6.366.917.184	24.141.703.237	481.469.231	30.990.089.662
128	Provinsi Bangka Belitung	63.606.665.272	26.533.033.606	37.073.631.766	-	63.606.665.272
129	Kab. Bangka	36.306.434.134	4.317.388.940	31.507.575.963	481.469.231	36.306.434.134
130	Kab. Belitung	31.546.342.037	4.096.980.089	26.967.892.718	481.469.231	31.546.342.037
131	Kota Pangkal Pinang	39.094.859.550	15.486.313.429	23.127.075.890	481.469.231	39.094.859.550
132	Kab. Bangka Selatan	30.241.176.863	2.439.201.466	27.320.506.166	481.469.231	30.241.176.863
133	Kab. Bangka Tengah	29.968.642.787	3.596.046.836	26.891.126.721	481.469.231	29.968.642.787
134	Kab. Bangka Barat	33.008.903.482	5.390.063.760	27.137.380.491	481.469.231	33.008.903.482
135	Kab. Belitung Timur	31.620.594.077	4.953.179.808	26.186.936.038	481.469.231	31.620.594.077
136	Provinsi Bengkulu	61.839.720.508	25.491.139.891	36.348.580.617	-	61.839.720.508
137	Kab. Bengkulu Selatan	19.982.624.829	3.092.663.936	16.409.471.663	481.469.231	19.982.624.829
138	Kab. Bengkulu Utara	29.283.564.365	3.194.764.249	26.607.330.876	481.469.231	29.283.564.365
139	Kab. Rejang Lebong	22.578.888.845	3.066.071.562	19.041.348.062	481.469.231	22.578.888.845
140	Kota Bengkulu	34.786.419.046	16.287.667.127	18.017.292.688	481.469.231	34.786.419.046
141	Kab. Kaur	23.645.893.162	2.030.323.336	21.134.090.596	481.469.231	23.645.893.162
142	Kab. Seluma	23.684.510.228	2.481.179.581	20.721.861.416	481.469.231	23.684.510.228
143	Kab. Mukomuko	28.166.007.268	2.333.119.560	26.360.418.467	481.469.231	28.166.007.268
144	Kab. Lebong	26.736.268.721	1.773.276.333	24.490.513.167	481.469.231	26.736.268.721
145	Kab. Bengkulu Tengah	13.667.328.594	2.066.891.116	11.129.968.247	481.469.231	13.667.328.594
146	Kab. Kepahiang	21.327.962.196	1.931.743.060	18.914.749.904	481.469.231	21.327.962.196
147	Provinsi Lampung	165.062.626.606	85.139.229.164	79.923.397.462	-	165.062.626.606
148	Kab. Lampung Barat	30.911.067.902	4.388.646.367	26.040.942.314	481.469.231	30.911.067.902
149	Kab. Lampung Selatan	34.432.428.642	7.137.148.497	26.813.810.914	481.469.231	34.432.428.642
150	Kab. Lampung Tengah	65.923.663.746	13.783.799.072	51.668.386.442	481.469.231	65.923.663.746
151	Kab. Lampung Utara	35.633.082.715	6.418.122.936	28.733.490.549	481.469.231	35.633.082.715
152	Kab. Lampung Timur	82.662.420.863	9.460.888.873	72.720.062.769	481.469.231	82.662.420.863
153	Kab. Tanggamus	25.669.528.177	6.000.766.306	20.097.302.641	481.469.231	25.669.528.177
154	Kab. Tulang Bawang	46.112.209.809	6.469.371.020	38.171.369.558	481.469.231	46.112.209.809
155	Kab. Way Kanan	37.368.166.216	4.332.009.122	32.644.687.863	481.469.231	37.368.166.216
156	Kab. Pesawaran	19.460.366.297	4.899.499.730	14.079.416.336	481.469.231	19.460.366.297
157	Kab. Pringsewu	15.889.142.296	4.298.017.339	11.109.665.726	481.469.231	15.889.142.296
158	Kab. Mesuji	20.371.923.222	2.414.890.461	17.476.563.530	481.469.231	20.371.923.222
159	Kab. Tulang Bawang Barat	20.045.409.876	2.560.920.980	17.003.019.684	481.469.231	20.045.409.876
160	Kota Bandar Lampung	67.248.196.471	48.783.398.811	17.963.328.429	481.469.231	67.248.196.471
161	Kota Metro	27.956.498.770	8.036.789.088	19.438.240.471	481.469.231	27.956.498.770
162	Provinsi DKI Jakarta	10.984.787.699.665	8.197.974.477.075	2.784.405.876.435	2.407.346.165	10.984.787.699.665
163	Provinsi Jawa Barat	1.150.340.432.595	720.610.186.659	429.730.246.936	-	1.150.340.432.595
164	Kab. Bandung	143.913.023.260	36.109.991.427	108.321.562.602	481.469.231	143.913.023.260
165	Kab. Bekasi	379.616.887.224	156.428.275.223	222.707.142.770	481.469.231	379.616.887.224
166	Kab. Bogor	132.441.664.461	71.490.066.641	60.470.119.589	481.469.231	132.441.664.461
167	Kab. Ciamis	68.990.442.239	20.962.196.966	47.546.777.042	481.469.231	68.990.442.239
168	Kab. Cianjur	83.406.222.266	23.470.736.181	59.464.017.863	481.469.231	83.406.222.266
169	Kab. Cirebon	78.782.340.022	26.607.022.329	52.693.948.462	481.469.231	78.782.340.022
170	Kab. Garut	91.760.415.147	23.299.138.434	67.979.807.482	481.469.231	91.760.415.147
171	Kab. Indramayu	173.874.128.892	29.750.680.074	143.641.979.667	481.469.231	173.874.128.892
172	Kab. Karawang	273.067.181.848	77.168.666.020	196.407.167.637	481.469.231	273.067.181.848
173	Kab. Kuningan	52.449.010.846	17.437.800.440	34.529.641.174	481.469.231	52.449.010.846
174	Kab. Majalengka	81.836.546.366	16.836.179.627	64.517.896.647	481.469.231	81.836.546.366
175	Kab. Purwakarta	86.021.983.504	32.111.846.936	53.428.668.338	481.469.231	86.021.983.504
176	Kab. Subang	169.864.192.937	20.761.248.498	138.611.476.208	481.469.231	169.864.192.937
177	Kab. Sukabumi	91.496.453.120	18.770.193.831	72.244.790.058	481.469.231	91.496.453.120
178	Kab. Sumedang	62.194.041.064	24.033.846.938	37.678.726.886	481.469.231	62.194.041.064
179	Kab. Tasikmalaya	61.113.369.744	18.389.639.149	42.232.261.364	481.469.231	61.113.369.744
180	Kab. Bandung Barat	73.979.811.646	26.916.739.103	47.681.603.312	481.469.231	73.979.811.646
181	Kota Bandung	418.502.492.080	184.287.062.713	233.723.970.136	481.469.231	418.502.492.080
182	Kota Bekasi	232.610.772.964	104.092.329.668	128.036.974.066	481.469.231	232.610.772.964
183	Kota Bogor	106.986.822.066	44.046.154.332	62.469.198.462	481.469.231	106.986.822.066
184	Kota Cirebon	54.110.897.098	25.024.938.396	28.604.579.482	481.469.231	54.110.897.098
185	Kota Depok	61.962.150.330	42.214.493.770	19.266.187.329	481.469.231	61.962.150.330
186	Kota Sukabumi	38.210.347.393	23.420.287.460	14.308.590.692	481.469.231	38.210.347.393
187	Kota Cimahi	48.270.630.466	18.783.633.486	29.006.527.740	481.469.231	48.270.630.466
188	Kota Tasikmalaya	46.429.673.614	23.804.996.266	21.143.208.118	481.469.231	46.429.673.614
189	Kota Banjar	39.100.801.429	14.704.550.423	23.914.781.776	481.469.231	39.100.801.429
190	Provinsi Banten	451.137.609.766	304.388.166.675	146.749.443.091	-	451.137.609.766

No.	Daerah	Pagu	Realisasi			Total
			PPh Perorangan	PBB	BPHTB	
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5+6
191	Kab. Lebak	68.146.203.465	22.290.637.849	46.374.096.375	481.469.231	68.146.203.465
192	Kab. Pandeglang	64.606.977.790	23.431.676.498	40.693.933.061	481.469.231	64.606.977.790
193	Kab. Serang	94.441.217.311	46.724.122.762	47.236.626.328	481.469.231	94.441.217.311
194	Kab. Tangerang	276.228.900.474	90.694.798.764	184.162.632.479	481.469.231	276.228.900.474
196	Kota Cilegon	109.682.480.028	52.960.806.982	56.260.203.815	481.469.231	109.682.480.028
196	Kota Tangerang	313.866.062.722	130.197.907.894	183.177.285.597	481.469.231	313.866.062.722
197	Kota Serang	46.484.746.421	25.262.106.439	19.761.170.761	481.469.231	46.484.746.421
198	Kota Tangerang Selatan	188.729.348.062	66.574.938.922	122.672.939.899	481.469.231	188.729.348.062
199	Provinsi Jawa Tengah	610.215.374.714	378.066.207.437	232.149.167.277	-	610.215.374.714
200	Kab. Banjarnegara	40.649.819.413	8.326.204.070	31.742.146.112	481.469.231	40.649.819.413
201	Kab. Banyumas	82.364.693.013	23.694.041.892	58.299.181.890	481.469.231	82.364.693.013
202	Kab. Batang	38.781.980.096	9.198.793.644	29.101.717.220	481.469.231	38.781.980.096
203	Kab. Blora	74.248.121.221	11.780.601.703	61.986.150.287	481.469.231	74.248.121.221
204	Kab. Boyolali	42.166.093.860	11.130.016.266	30.544.608.364	481.469.231	42.166.093.860
206	Kab. Brebes	56.402.797.096	10.363.149.476	46.568.178.388	481.469.231	56.402.797.096
206	Kab. Cilacap	100.897.094.899	26.676.073.282	73.739.542.396	481.469.231	100.897.094.899
207	Kab. Demak	46.234.483.910	9.363.367.744	36.399.666.936	481.469.231	46.234.483.910
208	Kab. Grobogan	69.327.096.774	10.684.720.441	48.160.907.102	481.469.231	69.327.096.774
209	Kab. Jepara	52.208.462.922	13.604.173.843	38.122.819.948	481.469.231	52.208.462.922
210	Kab. Karanganyar	47.296.060.468	12.968.606.640	33.946.974.637	481.469.231	47.296.060.468
211	Kab. Kebumen	49.029.790.037	11.144.426.593	37.403.894.213	481.469.231	49.029.790.037
212	Kab. Kendal	62.679.906.866	10.967.403.330	41.231.034.296	481.469.231	62.679.906.866
213	Kab. Klaten	44.166.809.044	13.841.010.214	29.834.329.699	481.469.231	44.166.809.044
214	Kab. Kudus	76.097.097.026	32.318.069.384	43.297.668.410	481.469.231	76.097.097.026
215	Kab. Magelang	47.769.346.018	11.782.346.534	36.506.531.263	481.469.231	47.769.346.018
216	Kab. Pati	54.076.646.706	12.826.897.431	40.769.279.043	481.469.231	54.076.646.706
217	Kab. Pekalongan	34.666.816.513	7.983.660.284	26.201.766.998	481.469.231	34.666.816.513
218	Kab. Pemalang	43.667.707.891	9.787.212.994	33.399.026.666	481.469.231	43.667.707.891
219	Kab. Purbalangga	36.702.936.824	7.699.810.906	29.621.666.687	481.469.231	36.702.936.824
220	Kab. Purborejo	41.344.640.726	10.747.786.641	30.116.386.854	481.469.231	41.344.640.726
221	Kab. Rembang	41.438.403.299	8.940.700.673	32.016.233.496	481.469.231	41.438.403.299
222	Kab. Semarang	43.723.869.538	13.615.072.406	29.627.317.902	481.469.231	43.723.869.538
223	Kab. Sragen	41.769.488.687	11.846.037.809	29.432.981.647	481.469.231	41.769.488.687
224	Kab. Sukoharjo	31.848.436.410	15.377.096.186	15.999.871.994	481.469.231	31.848.436.410
225	Kab. Tegal	47.764.860.662	11.321.127.427	36.962.263.994	481.469.231	47.764.860.662
226	Kab. Temanggung	36.301.430.249	9.214.460.638	26.606.500.380	481.469.231	36.301.430.249
227	Kab. Wonogiri	40.201.111.926	9.166.336.192	30.663.307.603	481.469.231	40.201.111.926
228	Kab. Wonosobo	36.046.889.183	8.694.644.096	26.969.776.866	481.469.231	36.046.889.183
229	Kota Magelang	23.793.796.093	11.124.128.166	12.188.198.696	481.469.231	23.793.796.093
230	Kota Pekalongan	26.964.406.653	11.903.828.667	14.679.108.666	481.469.231	26.964.406.653
231	Kota Salatiga	22.337.986.668	8.292.960.693	13.663.666.844	481.469.231	22.337.986.668
232	Kota Semarang	149.896.280.384	127.637.478.869	21.777.332.284	481.469.231	149.896.280.384
233	Kota Surakarta	81.302.477.390	31.468.362.870	49.362.846.289	481.469.231	81.302.477.390
234	Kota Tegal	28.473.142.179	12.433.212.306	15.568.460.642	481.469.231	28.473.142.179
235	Provinsi DI Yogyakarta	112.691.591.066	86.086.016.246	26.605.575.820	-	112.691.591.066
236	Kab. Bantul	49.864.791.011	18.220.766.161	31.162.666.629	481.469.231	49.864.791.011
237	Kab. Gunung Kidul	39.140.930.847	12.967.871.904	26.691.589.712	481.469.231	39.140.930.847
238	Kab. Kulon Progo	33.196.670.704	12.316.962.696	20.397.148.877	481.469.231	33.196.670.704
239	Kab. Sleman	96.861.408.966	39.176.943.979	56.192.996.756	481.469.231	96.861.408.966
240	Kota Yogyakarta	56.908.482.227	46.600.370.630	9.826.642.466	481.469.231	56.908.482.227
241	Provinsi Jawa Timur	933.488.022.058	601.966.056.373	331.531.966.686	-	933.488.022.058
242	Kab. Bangkalan	78.930.816.228	11.282.298.649	67.167.047.348	481.469.231	78.930.816.228
243	Kab. Banyuwangi	71.762.164.023	17.266.747.047	54.004.937.746	481.469.231	71.762.164.023
244	Kab. Blitar	47.469.806.446	11.637.466.674	36.360.869.640	481.469.231	47.469.806.446
245	Kab. Bojonegoro	100.026.960.639	16.138.682.390	83.406.799.019	481.469.231	100.026.960.639
246	Kab. Bondowoso	32.917.078.226	11.687.624.036	20.847.964.968	481.469.231	32.917.078.226
247	Kab. Gresik	107.473.669.939	62.160.946.044	44.841.146.664	481.469.231	107.473.669.939
248	Kab. Jember	72.079.484.686	23.601.868.079	47.996.167.276	481.469.231	72.079.484.686
249	Kab. Jombang	62.891.933.781	14.671.926.771	47.838.537.779	481.469.231	62.891.933.781
250	Kab. Kediri	76.696.431.663	14.908.676.443	61.306.396.879	481.469.231	76.696.431.663
251	Kab. Lamongan	72.489.014.426	14.868.206.732	57.139.338.463	481.469.231	72.489.014.426
252	Kab. Lumajang	38.241.198.698	11.760.740.971	26.008.988.396	481.469.231	38.241.198.698
253	Kab. Madiun	38.964.894.917	11.280.011.707	27.203.413.979	481.469.231	38.964.894.917
254	Kab. Magetan	39.897.392.541	14.003.829.000	26.412.094.310	481.469.231	39.897.392.541
255	Kab. Malang	91.800.006.780	22.304.453.364	69.014.084.186	481.469.231	91.800.006.780

No.	Daerah	Pagu	Realisasi			
			PPh Perorangan	PBB	BPHTB	Total
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5+6
256	Kab. Mojokerto	76.906.686.469	17.112.098.337	59.313.117.901	481.469.231	76.906.686.469
257	Kab. Nganjuk	54.093.566.629	13.216.491.467	40.396.604.931	481.469.231	54.093.566.629
258	Kab. Ngawi	47.780.818.704	13.726.620.602	33.572.728.871	481.469.231	47.780.818.704
259	Kab. Pacitan	36.969.472.961	10.631.772.240	24.846.231.480	481.469.231	36.969.472.961
260	Kab. Pamekasan	55.749.204.813	12.421.972.434	42.845.763.148	481.469.231	55.749.204.813
261	Kab. Pasuruan	79.281.908.687	18.974.011.613	59.826.327.843	481.469.231	79.281.908.687
262	Kab. Ponorogo	50.438.990.675	12.375.080.226	37.582.441.218	481.469.231	50.438.990.675
263	Kab. Probolinggo	57.617.024.079	17.555.399.024	39.580.155.824	481.469.231	57.617.024.079
264	Kab. Sampang	63.006.418.296	10.684.661.193	51.839.287.872	481.469.231	63.006.418.296
265	Kab. Sidoarjo	128.385.459.966	62.516.844.086	66.387.146.650	481.469.231	128.385.459.966
266	Kab. Situbondo	37.673.692.601	11.707.336.099	25.494.888.271	481.469.231	37.673.692.601
267	Kab. Sumenep	141.370.171.126	14.967.961.794	125.920.740.101	481.469.231	141.370.171.126
268	Kab. Trenggalek	37.672.572.753	11.513.961.861	25.677.141.671	481.469.231	37.672.572.753
269	Kab. Tuban	105.158.483.198	22.863.329.082	81.813.684.886	481.469.231	105.158.483.198
270	Kab. Tulungagung	51.689.982.045	13.822.352.568	37.386.160.246	481.469.231	51.689.982.045
271	Kota Blitar	26.148.720.727	10.134.936.314	15.532.315.152	481.469.231	26.148.720.727
272	Kota Kediri	46.506.307.434	22.279.624.557	22.746.213.646	481.469.231	46.506.307.434
273	Kota Madiun	36.380.466.158	16.516.582.024	18.382.404.903	481.469.231	36.380.466.158
274	Kota Malang	86.767.525.190	38.274.047.073	48.012.008.896	481.469.231	86.767.525.190
275	Kota Mojokerto	28.586.904.223	11.726.649.696	16.377.785.297	481.469.231	28.586.904.223
276	Kota Pasuruan	25.907.933.069	12.796.498.011	12.629.975.827	481.469.231	25.907.933.069
277	Kota Probolinggo	33.101.404.467	11.081.029.282	21.539.905.944	481.469.231	33.101.404.467
278	Kota Surabaya	278.196.667.733	252.390.887.869	25.324.300.633	481.469.231	278.196.667.733
279	Kota Batu	27.538.867.716	9.308.719.993	17.748.678.492	481.469.231	27.538.867.716
280	Provinsi Kalimantan Barat	152.230.868.148	70.582.938.573	81.647.929.575	-	152.230.868.148
281	Kab. Bengkayang	30.245.883.111	5.662.114.337	24.102.099.543	481.469.231	30.245.883.111
282	Kab. Landak	35.342.989.090	3.293.042.579	31.589.477.280	481.469.231	35.342.989.090
283	Kab. Kapuas Hulu	46.364.166.275	3.726.871.453	42.155.825.591	481.469.231	46.364.166.275
284	Kab. Ketapang	65.986.113.171	6.605.245.613	58.898.398.327	481.469.231	65.986.113.171
285	Kab. Pontianak	17.015.431.794	3.702.826.522	12.831.136.041	481.469.231	17.015.431.794
286	Kab. Sambas	33.993.196.878	6.972.618.696	26.539.108.951	481.469.231	33.993.196.878
287	Kab. Sanggau	43.671.289.593	6.094.235.176	37.085.585.186	481.469.231	43.671.289.593
288	Kab. Sintang	43.616.777.435	4.626.015.987	38.509.292.217	481.469.231	43.616.777.435
289	Kota Pontianak	61.166.199.456	43.154.016.880	17.530.713.345	481.469.231	61.166.199.456
290	Kota Singkawang	24.590.072.433	7.135.176.767	16.973.426.436	481.469.231	24.590.072.433
291	Kab. Kayong Utara	22.929.207.494	2.535.721.206	19.912.017.057	481.469.231	22.929.207.494
292	Kab. Kubu Raya	32.461.827.315	7.001.496.519	24.978.861.565	481.469.231	32.461.827.315
293	Kab. Sekadau	29.183.562.503	3.275.466.814	25.426.626.458	481.469.231	29.183.562.503
294	Kab. Melawi	32.020.249.376	3.235.410.421	28.303.369.724	481.469.231	32.020.249.376
295	Provinsi Kalimantan Tengah	162.116.425.301	52.703.333.032	109.413.092.269	-	162.116.425.301
296	Kab. Barito Selatan	51.634.491.227	3.078.796.130	48.074.225.866	481.469.231	51.634.491.227
297	Kab. Barito Utara	55.729.819.167	3.679.511.206	51.589.838.730	481.469.231	55.729.819.167
298	Kab. Kapuas	48.381.768.652	4.577.397.452	43.322.901.969	481.469.231	48.381.768.652
299	Kab. Kotawaringin Barat	44.157.757.654	7.920.515.429	36.755.772.994	481.469.231	44.157.757.654
300	Kab. Kotawaringin Timur	58.327.703.913	11.344.881.931	46.501.352.751	481.469.231	58.327.703.913
301	Kota Palangkaraya	42.051.380.941	22.311.171.013	19.258.740.697	481.469.231	42.051.380.941
302	Kab. Barito Timur	42.118.662.164	4.489.470.468	37.147.722.456	481.469.231	42.118.662.164
303	Kab. Murung Raya	48.297.874.283	5.132.682.842	42.683.722.210	481.469.231	48.297.874.283
304	Kab. Pulang Pisau	25.670.821.608	3.292.130.989	21.897.221.388	481.469.231	25.670.821.608
305	Kab. Gunung Mas	30.316.592.955	3.520.356.591	26.314.767.133	481.469.231	30.316.592.955
306	Kab. Lamandau	35.271.625.929	2.064.469.086	32.725.687.612	481.469.231	35.271.625.929
307	Kab. Sukamara	31.445.162.172	1.935.164.950	29.028.527.991	481.469.231	31.445.162.172
308	Kab. Katingan	33.912.173.393	2.953.466.951	30.477.237.211	481.469.231	33.912.173.393
309	Kab. Seruyan	54.105.236.199	4.818.004.531	48.805.762.437	481.469.231	54.105.236.199
310	Provinsi Kalimantan Selatan	196.746.088.337	98.566.671.170	98.179.417.167	-	196.746.088.337
311	Kab. Banjar	55.604.411.220	13.080.919.743	42.042.022.246	481.469.231	55.604.411.220
312	Kab. Barito Kuala	28.341.228.400	6.112.555.077	21.747.194.092	481.469.231	28.341.228.400
313	Kab. Hulu Sungai Selatan	38.616.507.447	5.473.975.242	32.661.062.974	481.469.231	38.616.507.447
314	Kab. Hulu Sungai Tengah	27.870.538.540	5.991.288.372	21.397.780.937	481.469.231	27.870.538.540
315	Kab. Hulu Sungai Utara	34.890.579.749	4.438.811.557	29.970.297.961	481.469.231	34.890.579.749
316	Kab. Kotabaru	66.800.333.768	16.583.056.302	49.735.808.235	481.469.231	66.800.333.768
317	Kab. Tabalong	86.862.645.078	10.662.335.568	74.709.840.279	481.469.231	86.862.645.078
318	Kab. Tanah Laut	36.888.629.989	12.798.851.526	23.608.309.232	481.469.231	36.888.629.989
319	Kab. Tapin	40.701.917.472	5.494.935.369	34.725.512.872	481.469.231	40.701.917.472
320	Kota Banjarbaru	39.478.174.759	18.616.823.200	20.379.882.328	481.469.231	39.478.174.759

No.	Daerah	Pagu	Realisasi			
			PPh Perorangan	PBB	BPHTB	Total
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5+6
321	Kota Banjarmasin	62.231.729.530	38.836.286.146	22.914.976.154	481.469.231	62.231.729.530
322	Kab. Balangan	50.766.720.866	6.099.839.562	44.174.412.073	481.469.231	50.766.720.866
323	Kab. Tanah Bumbu	51.063.162.141	8.913.247.496	41.669.446.415	481.469.231	51.063.162.141
324	Provinsi Kalimantan Timur	715.864.462.861	269.218.324.135	446.646.138.726	-	715.864.462.861
325	Kab. Berau	69.187.478.528	14.526.460.636	54.180.558.661	481.469.231	69.187.478.528
326	Kab. Bulungan	218.404.704.212	12.074.817.041	206.849.417.940	481.469.231	218.404.704.212
327	Kab. Kutai Kartanegara	563.469.667.131	34.368.437.197	518.619.760.703	481.469.231	563.469.667.131
328	Kab. Kutai Barat	96.886.401.646	25.206.262.900	71.198.679.615	481.469.231	96.886.401.646
329	Kab. Kutai Timur	217.900.129.068	38.719.786.816	178.698.874.011	481.469.231	217.900.129.068
330	Kab. Malinau	68.074.026.794	10.249.189.160	57.943.367.403	481.469.231	68.074.026.794
331	Kab. Nunukan	146.656.486.765	10.959.482.964	136.114.534.680	481.469.231	146.656.486.765
332	Kab. Pasir	118.348.360.976	18.984.424.563	98.882.467.192	481.469.231	118.348.360.976
333	Kota Balikpapan	156.983.346.963	103.264.883.466	53.236.994.276	481.469.231	156.983.346.963
334	Kota Bontang	169.592.584.072	51.507.866.916	117.603.267.926	481.469.231	169.592.584.072
335	Kab. Tana Tidung	46.031.047.693	9.253.409.821	36.296.168.641	481.469.231	46.031.047.693
336	Kota Samarinda	166.536.227.833	69.666.838.889	96.396.919.713	481.469.231	166.536.227.833
337	Kota Tarakan	163.106.519.863	18.941.466.501	133.682.584.131	481.469.231	163.106.519.863
338	Kab. Penajam Paser Utara	142.716.970.587	11.106.448.124	131.130.063.232	481.469.231	142.716.970.587
339	Provinsi Sulawesi Utara	92.018.714.575	48.267.635.102	43.751.179.473	-	92.018.714.575
340	Kab. Bolaang Mongondow	20.473.894.698	1.861.590.869	18.130.824.598	481.469.231	20.473.894.698
341	Kab. Minahasa	28.568.526.486	3.883.569.187	24.203.468.069	481.469.231	28.568.526.486
342	Kab. Sangihe	15.996.542.737	3.626.163.961	11.889.909.646	481.469.231	15.996.542.737
343	Kota Bitung	26.678.421.294	3.918.673.998	21.278.378.066	481.469.231	26.678.421.294
344	Kota Manado	66.136.898.711	33.824.602.383	30.829.927.097	481.469.231	66.136.898.711
345	Kab. Kepulauan Talaud	19.303.800.706	2.206.157.618	16.616.173.856	481.469.231	19.303.800.706
346	Kab. Minahasa Selatan	19.934.554.078	2.144.143.697	17.308.941.150	481.469.231	19.934.554.078
347	Kab. Minahasa Tenggara	17.330.786.362	1.836.726.320	15.013.690.811	481.469.231	17.330.786.362
348	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	16.167.007.063	2.676.449.798	12.999.089.034	481.469.231	16.167.007.063
349	Kota Kotamobagu	15.478.986.826	2.809.212.213	12.188.306.391	481.469.231	15.478.986.826
350	Kab. Bolaang Mongondow Timur	17.686.867.228	2.037.410.486	15.167.977.612	481.469.231	17.686.867.228
351	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	13.472.296.500	1.726.022.386	11.264.803.894	481.469.231	13.472.296.500
352	Kota Tomohon	25.120.109.931	3.329.658.109	21.309.082.529	481.469.231	25.120.109.931
353	Kab. Minahasa Utara	25.536.800.143	5.411.316.210	19.644.014.702	481.469.231	25.536.800.143
354	Kab. Bolaang Mongondow Utara	17.432.082.564	1.579.847.561	15.370.766.782	481.469.231	17.432.082.564
355	Provinsi Gorontalo	30.667.268.269	15.772.154.692	14.895.113.577	-	30.667.268.269
356	Kab. Boalemo	20.121.041.037	2.029.172.806	17.610.399.000	481.469.231	20.121.041.037
357	Kab. Gorontalo	19.194.040.300	4.910.898.582	13.801.672.487	481.469.231	19.194.040.300
358	Kota Gorontalo	19.478.367.317	9.896.030.660	9.100.867.436	481.469.231	19.478.367.317
359	Kab. Pohuwato	21.721.563.863	2.281.670.476	18.968.424.166	481.469.231	21.721.563.863
360	Kab. Gorontalo Utara	17.881.978.191	1.831.721.901	15.568.787.069	481.469.231	17.881.978.191
361	Kab. Bone Bolango	23.772.669.647	2.708.737.630	20.582.462.786	481.469.231	23.772.669.647
362	Provinsi Sulawesi Tengah	82.194.669.472	33.046.748.492	49.147.920.980	-	82.194.669.472
363	Kab. Banggai	36.829.299.881	6.946.827.040	29.401.003.610	481.469.231	36.829.299.881
364	Kab. Banggai Kepulauan	26.667.528.506	3.008.449.827	22.167.609.448	481.469.231	26.667.528.506
365	Kab. Buol	21.072.214.668	2.073.120.944	18.617.624.493	481.469.231	21.072.214.668
366	Kab. Toli-Toli	19.836.386.287	2.510.276.909	16.843.640.247	481.469.231	19.836.386.287
367	Kab. Donggala	28.363.339.272	2.646.218.676	25.226.660.366	481.469.231	28.363.339.272
368	Kab. Morowali	48.929.260.828	2.729.841.600	46.717.949.997	481.469.231	48.929.260.828
369	Kab. Poso	31.372.302.962	3.406.224.548	27.494.609.173	481.469.231	31.372.302.962
370	Kota Palu	27.709.586.791	18.549.826.138	8.679.290.422	481.469.231	27.709.586.791
371	Kab. Parigi Moutong	28.940.434.474	3.564.368.918	24.904.596.425	481.469.231	28.940.434.474
372	Kab. Sigi	16.732.012.827	2.227.619.200	14.023.024.396	481.469.231	16.732.012.827
373	Kab. Tojo Una Una	26.942.226.584	2.419.662.837	23.041.193.616	481.469.231	26.942.226.584
374	Provinsi Sulawesi Selatan	296.257.886.953	154.848.109.452	141.409.777.501	-	296.257.886.953
375	Kab. Bantaeng	26.522.764.491	4.404.142.003	21.637.153.257	481.469.231	26.522.764.491
376	Kab. Barru	26.404.979.971	4.871.501.468	21.062.009.272	481.469.231	26.404.979.971
377	Kab. Bone	68.067.846.472	9.676.104.691	57.911.272.650	481.469.231	68.067.846.472
378	Kab. Bulukumba	31.780.422.611	6.826.606.848	24.473.347.632	481.469.231	31.780.422.611
379	Kab. Enrekang	31.163.697.242	4.521.639.178	26.160.588.833	481.469.231	31.163.697.242
380	Kab. Gowa	38.101.136.833	8.137.646.164	29.482.020.438	481.469.231	38.101.136.833
381	Kab. Jenepono	28.881.591.423	5.738.679.246	22.461.442.946	481.469.231	28.881.591.423
382	Kab. Luwu	24.414.479.667	3.862.774.164	20.080.236.282	481.469.231	24.414.479.667
383	Kab. Luwu Utara	36.274.164.976	4.526.666.331	30.267.029.414	481.469.231	36.274.164.976
384	Kab. Maros	33.302.968.266	7.718.817.383	26.102.671.662	481.469.231	33.302.968.266
385	Kab. Pangkajene Kepulauan	36.499.147.060	12.808.422.418	23.209.265.411	481.469.231	36.499.147.060

No.	Daerah	Pagu	Realisasi			
			PPh Perorangan	PBB	BPHTB	Total
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5+6
386	Kab Pinrang	30.179.417.426	5.745.428.078	23.952.520.117	481.469.231	30.179.417.426
387	Kab Selayar	23.402.629.096	4.040.002.376	18.881.157.489	481.469.231	23.402.629.096
388	Kab Sidenreng Rappang	38.144.314.889	5.871.311.402	31.791.534.256	481.469.231	38.144.314.889
389	Kab Sinjai	26.256.772.329	4.766.438.327	20.008.864.771	481.469.231	26.256.772.329
390	Kab Soppeng	28.746.315.025	5.461.796.349	22.803.049.445	481.469.231	28.746.315.025
391	Kab Takalar	24.971.584.467	5.473.454.253	19.016.660.993	481.469.231	24.971.584.467
392	Kab Tana Toraja	21.196.574.861	5.168.335.167	15.546.770.453	481.469.231	21.196.574.861
393	Kab Wajo	115.759.495.770	6.927.718.062	108.360.309.477	481.469.231	115.759.495.770
394	Kota Pare-pare	27.313.899.750	8.266.093.219	18.667.337.300	481.469.231	27.313.899.750
395	Kab. Toraja Utara	18.660.825.195	3.251.714.463	14.927.641.491	481.469.231	18.660.825.195
396	Kota Makassar	160.990.133.894	74.761.787.613	86.746.877.040	481.469.231	160.990.133.894
397	Kota Palopo	21.110.172.102	6.028.044.215	14.600.658.656	481.469.231	21.110.172.102
398	Kab. Luwu Timur	60.510.927.665	23.447.428.618	36.582.029.816	481.469.231	60.510.927.665
399	Provinsi Sulawesi Barat	43.615.302.708	11.683.404.150	31.931.898.558	-	43.615.302.708
400	Kab. Majene	28.990.808.359	2.521.309.644	26.988.029.494	481.469.231	28.990.808.359
401	Kab. Mamuju	55.923.427.495	6.974.134.355	48.467.823.909	481.469.231	55.923.427.495
402	Kab. Polewali Mandar	27.979.989.877	3.206.087.387	24.292.433.259	481.469.231	27.979.989.877
403	Kab. Mamasa	23.663.915.488	1.775.747.486	21.406.698.772	481.469.231	23.663.915.488
404	Kab. Mamuju Utara	47.114.448.264	3.047.827.369	43.586.151.674	481.469.231	47.114.448.264
405	Provinsi Sulawesi Tenggara	69.691.161.460	26.878.789.050	42.812.372.410	-	69.691.161.460
406	Kab. Buton	28.371.717.650	2.849.312.015	25.040.936.404	481.469.231	28.371.717.650
407	Kab. Konawe	21.236.649.571	2.611.058.667	18.143.121.673	481.469.231	21.236.649.571
408	Kab. Kolaka	38.229.608.667	3.944.060.860	33.804.078.766	481.469.231	38.229.608.667
409	Kab. Muna	21.071.929.446	3.399.472.152	17.190.988.063	481.469.231	21.071.929.446
410	Kota Kendari	33.656.234.707	13.361.996.924	19.812.768.552	481.469.231	33.656.234.707
411	Kota Bau-bau	24.721.237.439	4.166.497.182	20.073.271.026	481.469.231	24.721.237.439
412	Kab. Konawe Selatan	27.760.678.725	3.127.888.727	24.151.320.767	481.469.231	27.760.678.725
413	Kab. Bombana	23.049.077.557	1.481.800.345	21.066.807.991	481.469.231	23.049.077.557
414	Kab. Konawe Utara	21.685.456.566	1.362.598.162	19.941.389.173	481.469.231	21.685.456.566
415	Kab. Buton Utara	14.291.011.780	1.248.267.120	12.561.275.429	481.469.231	14.291.011.780
416	Kab. Wakatobi	19.846.548.301	1.849.723.963	17.515.355.107	481.469.231	19.846.548.301
417	Kab. Kolaka Utara	23.711.006.811	1.269.166.132	21.960.372.448	481.469.231	23.711.006.811
418	Provinsi Bali	176.928.525.925	114.887.946.924	62.040.579.001	-	176.928.525.925
419	Kab. Badung	160.033.099.164	38.666.303.826	120.896.326.107	481.469.231	160.033.099.164
420	Kab. Bangli	23.469.890.434	7.237.117.466	15.751.293.737	481.469.231	23.469.890.434
421	Kab. Buleleng	38.539.533.236	14.642.588.201	23.415.475.804	481.469.231	38.539.533.236
422	Kab. Gianyar	34.943.553.022	14.079.843.942	20.392.239.849	481.469.231	34.943.553.022
423	Kab. Jembrana	26.677.026.060	9.807.029.248	17.389.527.581	481.469.231	26.677.026.060
424	Kab. Karangasem	28.414.146.225	9.843.442.916	18.089.234.078	481.469.231	28.414.146.225
425	Kab. Klungkung	19.255.555.862	8.115.551.966	10.668.534.655	481.469.231	19.255.555.862
426	Kab. Tabanan	34.554.311.546	11.232.236.495	22.840.605.820	481.469.231	34.554.311.546
427	Kota Denpasar	133.960.024.554	59.717.806.326	73.780.748.997	481.469.231	133.960.024.554
428	Provinsi Nusa Tenggara Barat	111.653.413.171	76.257.660.211	35.395.752.960	-	111.653.413.171
429	Kab. Bima	23.129.894.282	4.418.267.676	18.230.147.375	481.469.231	23.129.894.282
430	Kab. Dompu	20.379.186.601	5.536.735.343	14.360.981.027	481.469.231	20.379.186.601
431	Kab. Lombok Barat	24.046.955.651	4.481.865.783	19.083.620.637	481.469.231	24.046.955.651
432	Kab. Lombok Tengah	33.215.870.740	6.941.236.886	26.793.164.624	481.469.231	33.215.870.740
433	Kab. Lombok Timur	33.666.664.581	8.059.906.590	25.125.288.760	481.469.231	33.666.664.581
434	Kab. Sumbawa	30.409.567.449	5.209.515.190	23.718.583.029	481.469.231	30.409.567.449
435	Kota Mataram	58.297.670.230	34.231.881.787	23.594.319.212	481.469.231	58.297.670.230
436	Kab. Lombok Utara	18.932.728.898	4.550.816.050	13.900.443.617	481.469.231	18.932.728.898
437	Kota Bima	22.438.632.328	8.158.417.466	13.798.745.631	481.469.231	22.438.632.328
438	Kab. Sumbawa Barat	54.048.844.138	32.645.811.182	20.921.563.725	481.469.231	54.048.844.138
439	Provinsi Nusa Tenggara Timur	99.337.626.039	45.870.568.569	53.467.057.470	-	99.337.626.039
440	Kab. Alor	16.031.542.233	1.738.559.152	13.811.513.950	481.469.231	16.031.542.233
441	Kab. Belu	20.711.987.912	2.405.070.573	17.825.448.108	481.469.231	20.711.987.912
442	Kab. Ende	17.713.992.208	3.131.866.343	14.100.666.634	481.469.231	17.713.992.208
443	Kab. Flores Timur	22.166.555.993	3.395.809.864	18.289.276.898	481.469.231	22.166.555.993
444	Kab. Kupang	20.756.649.773	3.220.106.696	17.055.073.846	481.469.231	20.756.649.773

No.	Daerah	Pagu	Realisasi			
			PPh Perorangan	PBB	BPHTB	Total
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5+6
445	Kab. Lembata	17.474.966.263	2.360.561.206	14.632.824.926	481.469.231	17.474.966.263
446	Kab. Manggarai	15.362.379.893	3.167.997.727	11.712.912.936	481.469.231	15.362.379.893
447	Kab. Ngada	14.316.994.938	1.761.636.066	12.083.889.642	481.469.231	14.316.994.938
448	Kab. Sikka	18.783.260.612	3.846.086.996	14.466.696.286	481.469.231	18.783.260.612
449	Kab. Sumba Barat	14.364.627.401	2.111.767.463	11.771.390.707	481.469.231	14.364.627.401
450	Kab. Sumba Timur	26.014.339.207	2.536.096.360	21.996.773.626	481.469.231	26.014.339.207
451	Kab. Timor Tengah Selatan	24.061.263.478	2.329.989.580	21.249.804.667	481.469.231	24.061.263.478
452	Kab. Timor Tengah Utara	18.126.876.166	1.690.031.090	16.964.376.844	481.469.231	18.126.876.166
453	Kota Kupang	40.163.269.347	26.378.676.864	14.303.123.252	481.469.231	40.163.269.347
454	Kab. Pote Ndoo	19.366.206.436	2.168.149.264	16.716.686.941	481.469.231	19.366.206.436
455	Kab. Nagekeo	16.282.846.337	1.439.157.922	14.362.218.184	481.469.231	16.282.846.337
456	Kab. Sumba Tengah	13.827.491.999	1.296.113.466	12.049.909.312	481.469.231	13.827.491.999
457	Kab. Sumba Barat Daya	17.429.614.232	1.139.661.802	16.809.583.199	481.469.231	17.429.614.232
458	Kab. Manggarai Timur	13.373.476.388	1.143.176.731	11.748.831.426	481.469.231	13.373.476.388
459	Kab. Sabu Raijua	8.666.794.312	1.020.326.661	7.153.998.430	481.469.231	8.666.794.312
460	Kab. Manggarai Barat	19.291.127.124	2.139.608.716	16.670.049.179	481.469.231	19.291.127.124
461	Provinsi Maluku	83.097.586.825	25.618.448.370	57.479.137.465	-	83.097.586.825
462	Kab. Maluku Tenggara Barat	26.867.161.094	1.502.233.032	23.883.468.831	481.469.231	26.867.161.094
463	Kab. Maluku Tengah	39.766.277.242	3.486.264.367	36.789.643.664	481.469.231	39.766.277.242
464	Kab. Maluku Tenggara	27.410.966.194	2.922.166.196	24.007.321.767	481.469.231	27.410.966.194
465	Kab. Pulau Buru	18.671.466.721	1.578.822.686	16.611.174.904	481.469.231	18.671.466.721
466	Kota Ambon	42.689.321.677	19.236.667.382	22.872.186.064	481.469.231	42.689.321.677
467	Kab. Seram Bagian Barat	24.001.661.466	1.889.396.221	21.630.796.004	481.469.231	24.001.661.466
468	Kab. Seram Bagian Timur	69.122.070.267	1.496.787.398	67.143.813.638	481.469.231	69.122.070.267
469	Kab. Maluku Barat Daya	22.630.631.634	2.124.941.776	20.024.220.627	481.469.231	22.630.631.634
470	Kab. Buru Selatan	17.047.229.164	1.468.919.671	15.106.840.262	481.469.231	17.047.229.164
471	Kab. Kepulauan Aru	27.204.617.166	1.633.644.946	26.089.502.980	481.469.231	27.204.617.166
472	Kota Tual	14.663.226.823	1.099.830.000	13.081.926.692	481.469.231	14.663.226.823
473	Provinsi Maluku Utara	68.138.545.719	20.859.240.421	47.277.371.298	1.934.000	68.138.545.719
474	Kab. Halmahera Tengah	30.734.671.762	2.033.324.790	28.219.877.731	481.469.231	30.734.671.762
475	Kab. Halmahera Barat	26.820.243.406	1.946.808.409	23.391.966.766	481.469.231	26.820.243.406
476	Kota Ternate	36.066.721.267	6.236.530.401	30.339.721.636	481.469.231	36.066.721.267
477	Kab. Halmahera Timur	39.869.946.069	2.216.936.269	37.171.539.669	481.469.231	39.869.946.069
478	Kota Tidore Kepulauan	27.268.157.781	3.894.052.987	22.892.636.663	481.469.231	27.268.157.781
479	Kab. Kepulauan Sula	29.068.691.676	2.047.247.347	26.539.975.097	481.469.231	29.068.691.676
480	Kab. Pulau Morotai	16.364.168.183	1.223.366.460	13.649.303.492	481.469.231	16.364.168.183
481	Kab. Halmahera Selatan	38.886.486.609	2.270.262.216	36.133.766.162	481.469.231	38.886.486.609
482	Kab. Halmahera Utara	34.786.744.240	10.420.322.744	23.883.962.266	481.469.231	34.786.744.240
483	Kab. Yalimo	12.828.370.436	2.468.297.627	9.888.603.678	481.469.231	12.828.370.436
484	Kab. Lanny Jaya	14.166.132.074	2.466.396.489	11.207.266.364	481.469.231	14.166.132.074
485	Provinsi Papua	311.801.544.793	144.855.058.395	166.944.137.918	2.348.480	311.801.544.793
486	Kab. Biak Numfor	26.746.180.366	6.232.374.968	20.031.336.166	481.469.231	26.746.180.366
487	Kab. Jayapura	36.532.704.764	4.190.830.306	31.860.406.217	481.469.231	36.532.704.764
488	Kab. Jayawijaya	28.679.362.399	6.206.614.667	21.992.268.611	481.469.231	28.679.362.399
489	Kab. Merauke	42.329.677.782	6.517.377.073	36.330.731.479	481.469.231	42.329.677.782
490	Kab. Mimika	190.079.906.963	93.030.620.402	96.667.716.330	481.469.231	190.079.906.963
491	Kab. Nabire	29.944.546.672	3.779.226.046	26.883.861.396	481.469.231	29.944.546.672
492	Kab. Paniai	21.060.167.904	3.926.748.727	16.661.939.946	481.469.231	21.060.167.904
493	Kab. Puncak Jaya	28.417.112.176	3.316.103.719	24.620.539.226	481.469.231	28.417.112.176
494	Kab. Kepulauan Yapen	33.643.628.367	3.666.294.963	29.606.764.173	481.469.231	33.643.628.367
495	Kota Jayapura	66.144.503.766	37.526.381.516	18.137.663.009	481.469.231	66.144.503.766
496	Kab. Sarmi	31.482.566.376	3.026.469.939	27.974.627.206	481.469.231	31.482.566.376
497	Kab. Keerom	31.066.013.449	3.321.184.010	27.263.360.208	481.469.231	31.066.013.449
498	Kab. Yahukimo	37.812.427.692	2.692.838.009	34.738.120.452	481.469.231	37.812.427.692
499	Kab. Pegunungan Bintang	40.806.221.930	4.002.264.071	36.322.468.629	481.469.231	40.806.221.930
500	Kab. Tolikara	29.487.960.817	2.672.468.213	26.334.033.373	481.469.231	29.487.960.817
501	Kab. Boven Digoel	46.648.226.740	4.812.104.102	40.264.663.407	481.469.231	46.648.226.740
502	Kab. Mappi	41.129.128.038	3.737.107.846	36.910.660.962	481.469.231	41.129.128.038
503	Kab. Asmat	38.698.986.666	3.369.676.522	34.767.941.813	481.469.231	38.698.986.666
504	Kab. Waropen	43.618.121.662	2.669.701.918	40.666.960.613	481.469.231	43.618.121.662
505	Kab. Mamberamo Raya	78.133.336.919	2.371.679.294	75.280.287.394	481.469.231	78.133.336.919
506	Kab. Mamberamo Tengah	12.334.506.286	2.288.646.096	9.664.490.969	481.469.231	12.334.506.286
507	Kab. Nduga	13.320.077.290	2.404.296.067	10.434.311.992	481.469.231	13.320.077.290
508	Kab. Dogiyai	19.794.691.030	2.291.023.902	17.012.197.897	481.469.231	19.794.691.030
509	Kab. Intan Jaya	18.136.149.066	2.809.349.640	14.844.330.196	481.469.231	18.136.149.066

No.	Daerah	Pagu	Realisasi			Total
			PPH Perorangan	PBB	BPHTB	
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5+6
510	Kab. Puncak	19.817.115.587	2.841.051.852	16.494.594.504	481.469.231	19.817.115.587
511	Kab. Deyai	14.391.530.653	2.657.421.176	11.242.640.246	481.469.231	14.391.530.653
512	Kab. Supiori	19.291.024.862	2.443.405.979	16.366.149.652	481.469.231	19.291.024.862
513	Provinsi Papua Barat	198.508.632.667	25.396.243.942	173.112.388.725	-	198.508.632.667
514	Kab. Sorong	157.794.896.193	5.710.515.568	151.592.911.394	481.469.231	157.794.896.193
515	Kab. Manokwari	93.573.706.165	6.527.232.101	86.566.004.833	481.469.231	93.573.706.165
516	Kab. Fak Fak	72.710.276.431	2.216.221.647	70.012.585.553	481.469.231	72.710.276.431
517	Kota Sorong	51.930.826.427	8.938.376.019	42.510.981.177	481.469.231	51.930.826.427
518	Kab. Sorong Selatan	64.145.243.735	2.302.013.092	61.361.761.412	481.469.231	64.145.243.735
519	Kab. Raja Ampat	72.928.733.274	1.920.361.098	70.526.902.945	481.469.231	72.928.733.274
520	Kab. Teluk Bintuni	157.202.096.792	11.076.897.859	145.643.729.702	481.469.231	157.202.096.792
521	Kab. Teluk Wondama	41.145.779.180	2.711.112.559	37.953.197.390	481.469.231	41.145.779.180
522	Kab. Tambrauw	24.612.409.763	1.066.615.583	23.064.324.949	481.469.231	24.612.409.763
523	Kab. Maybrat	27.426.526.131	1.059.467.748	25.885.589.152	481.469.231	27.426.526.131
524	Kab. Kaimana	46.334.044.012	2.157.983.170	43.694.591.611	481.469.231	46.334.044.012
	Dana cadangan	-	-	-	-	-
	Nilai belum teridentifikasi daerah penerima	-	-	-	-	-
	JUMLAH	47.214.136.030.788	19.378.280.456.694	27.597.042.553.038	238.813.021.056	47.214.136.030.788

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
TAHUN ANGGARAN 2012
(Dalam Rupiah)**

No.	Daerah	Pagu	Realisasi							Total
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Provinsi Nangroe Aceh Darussalam	879.729.635.431	452.325.614.300	719.339.775.717	1.452.522.717	-	157.970.756	-	1.173.275.863.490	
2	Kab. Aceh Barat	9.262.153.922	2.126.922.951	8.529.720.661	1.080.817.249	-	5.273.262	359.154.909	12.101.889.032	
3	Kab. Aceh Besar	8.604.587.281	2.126.922.951	8.529.720.661	185.001.462	-	14.846.488	359.154.909	11.215.646.471	
4	Kab. Aceh Selatan	8.815.662.440	2.126.922.951	8.529.720.661	441.362.110	-	44.440.523	359.154.909	11.501.601.154	
5	Kab. Aceh Singkil	8.705.533.500	2.126.922.951	8.529.720.661	286.653.699	-	37.208.246	359.154.909	11.339.660.466	
6	Kab. Aceh Tengah	8.836.967.811	2.126.922.951	8.529.720.661	518.088.010	-	22.414.667	359.154.909	11.566.301.188	
7	Kab. Aceh Tenggara	8.451.595.651	2.126.922.951	8.529.720.661	32.715.850	-	5.273.262	359.154.909	11.053.787.633	
8	Kab. Aceh Timur	8.113.420.642	2.169.178.995	8.159.443.254	35.403.860	-	64.069.313	359.154.909	10.787.250.321	
9	Kab. Aceh Utara	169.193.306.438	34.869.129.053	187.438.397.628	32.715.850	-	24.048.637	359.154.909	222.923.446.077	
10	Kab. Bireun	8.585.716.099	2.126.922.951	8.529.720.661	166.836.298	-	7.602.119	359.154.909	11.190.236.938	
11	Kab. Pidie	8.504.209.363	2.126.922.951	8.529.720.661	204.587.424	-	10.667.192	359.154.909	11.231.043.137	
12	Kab. Simeulue	8.451.595.651	2.126.922.951	8.529.720.661	32.715.850	-	5.273.262	359.154.909	11.053.787.633	
13	Kota Banda Aceh	8.451.595.651	2.126.922.951	8.529.720.661	32.715.850	-	5.273.262	359.154.909	11.053.787.633	
14	Kota Sabang	8.451.595.651	2.126.922.951	8.529.720.661	32.715.850	-	5.273.262	359.154.909	11.053.787.633	
15	Kota Langsa	8.451.595.651	2.126.922.951	8.529.720.661	32.715.850	-	66.109.770	359.154.909	11.114.624.141	
16	Kota Lhokseumawe	8.451.595.651	2.126.922.951	8.529.720.661	32.715.850	-	5.273.262	359.154.909	11.053.787.633	
17	Kab. Illegan Raya	8.486.717.865	2.126.922.951	8.529.720.661	673.864.864	-	12.911.447	359.154.909	11.702.564.832	
18	Kab. Aceh Jaya	8.828.983.954	2.126.922.951	8.529.720.661	486.828.823	-	41.714.594	359.154.909	11.918.772.938	
19	Kab. Pidie Jaya	8.452.043.651	2.126.922.951	8.529.720.661	33.163.850	-	5.273.262	359.154.909	11.054.236.633	
20	Kab. Aceh Barat Daya	8.892.009.051	2.126.922.951	8.529.720.661	285.240.610	-	7.319.360	359.154.909	11.308.358.511	
21	Kab. Gayo Lues	8.951.508.470	2.126.922.951	8.529.720.661	1.094.341.762	-	5.273.262	359.154.909	12.054.13.965	
22	Kab. Aceh Tamiang	17.860.757.929	14.207.842.781	8.529.720.661	35.046.450	-	20.081.174	359.154.909	23.151.854.975	
23	Kab. Bener Meriah	8.463.428.789	2.126.922.951	8.529.720.661	32.715.850	-	5.273.262	359.154.909	11.053.787.633	
24	Kota Subulussalam	8.467.324.192	2.126.922.951	8.529.720.661	48.444.391	-	26.467.795	359.154.909	11.090.710.647	
25	Provinsi Sumatera Utara	7.654.753.562	1.412.940.716	1.795.876.446	769.036.216	-	4.617.433.039	-	8.795.266.417	

No.	Daerah	Pagu	Realisasi					Total	
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kelutanan		Hasil Perikanan
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kab. Asahan	758.289.802	88.308.792	112.242.277	-	-	489.215.508	359.154.909	1.048.921.486
27	Kab. Deli	1.657.201.831	88.308.792	112.242.277	238.928.524	-	971.345.790	359.154.909	1.769.980.292
28	Kab. Deli Serdang	760.041.749	90.083.745	112.242.277	-	-	301.089.564	359.154.909	862.570.495
29	Kab. Tanah Karo	761.952.622	88.308.792	112.242.277	100.874.833	-	301.656.095	359.154.909	962.236.866
30	Kab. Labuhan Batu	758.289.802	88.308.792	112.242.277	-	-	301.089.564	359.154.909	860.795.542
31	Kab. Langkat	5.176.074.152	2.254.150.519	3.284.560.929	-	-	301.089.564	359.154.909	6.198.045.921
32	Kab. Mandailing Natal	3.335.598.319	88.308.792	112.242.277	539.514.595	-	2.425.665.086	359.154.909	3.525.085.659
33	Kab. Nias	758.289.802	88.308.792	112.242.277	-	-	301.089.564	359.154.909	860.795.542
34	Kab. Simalungun	3.011.966.111	88.308.792	112.242.277	-	-	2.668.508.596	359.154.909	3.218.214.574
35	Kab. Tapanuli Selatan	3.789.443.600	88.308.792	112.242.277	279.382.884	-	3.995.651.161	359.154.909	4.794.750.023
36	Kab. Tapanuli Tengah	839.955.789	88.308.792	112.242.277	77.665.987	-	301.089.564	359.154.909	938.461.529
37	Kab. Tapanuli Utara	1.522.574.491	88.308.792	112.242.277	1.598.341.008	-	324.212.973	359.154.909	2.482.259.959
38	Kab. Toba Samosir	945.945.784	88.308.792	112.242.277	187.464.601	-	314.313.739	359.154.909	1.061.484.318
39	Kota Binjai	1.189.025.313	298.769.763	419.444.242	-	-	301.089.564	359.154.909	1.378.458.498
40	Kota Medan	758.289.802	88.308.792	112.242.277	-	-	301.089.564	359.154.909	860.795.542
41	Kota Pematang Siantar	758.289.802	88.308.792	112.242.277	-	-	301.089.564	359.154.909	860.795.542
42	Kota Sibolga	758.289.802	88.308.792	112.242.277	-	-	301.089.564	359.154.909	860.795.542
43	Kota Tanjung Balai	758.289.802	88.308.792	112.242.277	-	-	301.089.564	359.154.909	860.795.542
44	Kab. Batu Bara	758.289.802	88.308.792	112.242.277	-	-	301.089.564	359.154.909	860.795.542
45	Kab. Labuhan Batu Utara	890.865.369	88.308.792	112.242.277	-	-	434.145.093	359.154.909	993.851.071
46	Kab. Labuhan Batu Selatan	1.216.072.483	88.308.792	112.242.277	-	-	816.615.074	359.154.909	1.370.321.052
47	Kab. Padang Lawas Utara	758.289.802	88.308.792	112.242.277	-	-	301.089.564	359.154.909	860.795.542
48	Kab. Padang Lawas	6.602.841.813	447.803.762	112.242.277	-	-	6.068.148.513	359.154.909	7.005.349.461
49	Kab. Nias Utara	758.289.802	88.308.792	112.242.277	-	-	301.089.564	359.154.909	860.795.542
50	Kab. Nias Barat	758.289.802	88.308.792	112.242.277	-	-	301.089.564	359.154.909	860.795.542
51	Kota Tebing Tinggi	758.289.802	88.308.792	112.242.277	-	-	301.089.564	359.154.909	860.795.542
52	Kota Padang Sidempuan	871.685.322	88.308.792	112.242.277	113.395.520	-	301.089.564	359.154.909	974.191.062
53	Kab. Pakpak Bharat	774.078.554	88.308.792	112.242.277	6.225.245	-	311.708.439	359.154.909	877.639.662
54	Kab. Nias Selatan	3.949.871.062	88.308.792	112.242.277	-	-	3.492.670.824	359.154.909	4.052.376.802
55	Kab. Humbang Hasundutan	5.011.451.685	88.308.792	112.242.277	448.000	-	5.613.620.676	359.154.909	6.173.774.654

No.	Daerah	Pagu	Realisasi					Total	
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kelutanan		Hasil Perikanan
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kab. Serdang Bedagai	758.289.802	88.308.792	112.242.277	-	-	301.089.564	359.154.909	860.795.542
57	Kab. Sumsel	3.185.003.037	88.308.792	112.242.277	-	-	3.868.664.361	359.154.909	4.528.370.359
58	Kota Gunung Sitoli	758.289.802	88.308.792	112.242.277	-	-	301.089.564	359.154.909	860.795.542
59	Provinsi Sumatera Barat	8.874.164.862	-	-	7.370.160.397	-	2.160.13.823	-	9.530.774.220
60	Kab. Limapuluh Kota	1.288.194.932	-	-	833.139.195	-	228.034.989	359.154.909	1.420.329.093
61	Kab. Agam	1.270.655.300	-	-	783.071.367	-	274.892.583	359.154.909	1.417.118.849
62	Kab. Kepulauan Mentawai	4.948.597.739	-	-	779.935.357	-	3.935.356.957	359.154.909	5.074.488.953
63	Kab. Padang Panjang	1.248.003.234	-	-	779.935.357	-	225.506.394	359.154.909	1.364.596.660
64	Kab. Pasaman	1.716.813.078	-	-	1.239.913.327	-	237.434.528	359.154.909	1.836.502.764
65	Kab. Pasisir Selatan	1.848.460.686	-	-	1.310.318.277	-	290.679.570	359.154.909	1.920.152.756
66	Kab. Sijunjung	3.427.929.593	-	-	2.445.627.035	-	755.975.967	359.154.909	3.580.757.911
67	Kab. Solok	1.513.478.483	-	-	1.068.938.014	-	240.048.607	359.154.909	1.666.141.530
68	Kab. Tanah Datar	1.298.985.600	-	-	825.806.541	-	231.290.697	359.154.909	1.416.252.147
69	Kota Bukit Tinggi	1.248.003.234	-	-	779.935.357	-	225.506.394	359.154.909	1.364.596.660
70	Kota Padang Panjang	1.248.003.234	-	-	779.935.357	-	225.506.394	359.154.909	1.364.596.660
71	Kota Padang	1.248.003.234	-	-	779.935.357	-	225.506.394	359.154.909	1.364.596.660
72	Kota Payakumbuh	1.248.003.234	-	-	779.935.357	-	225.506.394	359.154.909	1.364.596.660
73	Kota Sawahlunto	9.383.303.385	-	-	8.923.945.422	-	227.205.475	359.154.909	9.910.305.806
74	Kota Solok	1.248.003.234	-	-	779.935.357	-	225.506.394	359.154.909	1.364.596.660
75	Kota Parimam	1.248.003.234	-	-	779.935.357	-	225.506.394	359.154.909	1.364.596.660
76	Kab. Pasaman Barat	1.422.914.109	-	-	786.291.037	-	504.563.901	359.154.909	1.650.009.847
77	Kab. Dharmasraya	4.461.517.370	-	-	3.470.770.616	-	1.889.895.927	359.154.909	5.519.821.452
78	Kab. Solok Selatan	11.235.165.687	-	-	1.559.847.875	-	11.397.401.177	359.154.909	13.316.403.961
79	Provinsi Riau	2.238.604.221.624	2.754.298.723.502	3.119.715.673	5.295.509.034	-	29.162.375.142	-	2.789.680.363.351
80	Kab. Bengkalis	2.463.892.335.998	3.040.014.461.009	58.141.029	793.539.531	-	26.735.056.151	359.154.909	3.067.956.352.629
81	Kab. Indragiri Hilir	456.530.213.714	500.781.586.090	58.141.029	2.304.136.751	-	60.515.409.206	359.154.909	564.018.429.985
82	Kab. Indragiri Hulu	426.719.334.892	511.385.713.977	58.141.029	8.962.182.973	-	9.253.733.412	359.154.909	530.028.926.300
83	Kab. Kampar	890.694.401.003	1.099.172.621.575	58.141.029	862.884.756	-	8.267.843.678	359.154.909	1.108.740.645.947
84	Kab. Kuantan Singingi	410.543.729.523	500.781.586.090	58.141.029	3.297.469.532	-	6.625.593.257	359.154.909	511.121.944.817
85	Kab. Pelalawan	444.408.667.892	513.125.106.379	639.951.349	800.920.331	-	32.442.201.316	359.154.909	547.366.934.284

DAFTAR LAM. 281.

No.	Daerah	Pagu	Realisasi							Total
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
86	Kab. Rokan Hilir	1.051.409.001.481	1.306.896.085.522	58.141.029	793.539.531	-	6.470.703.173	359.154.909	1.314.977.624.164	
87	Kab. Rokan Hulu	422.450.110.187	517.263.203.997	58.141.029	1.024.788.551	-	6.109.570.813	359.154.909	524.804.859.299	
88	Kab. Siak	1.170.286.036.220	1.443.199.363.718	58.141.029	825.586.260	-	13.772.701.642	359.154.909	1.458.214.937.948	
89	Kota Dumai	413.133.919.658	500.781.596.090	58.141.029	793.539.531	-	13.994.625.403	359.154.909	516.387.046.962	
90	Kota Pekanbaru	407.192.174.487	500.781.596.090	58.141.029	793.539.531	-	5.411.340.934	359.154.909	507.403.762.493	
91	Kab. Kepulauan Meranti	475.338.275.865	583.012.003.463	58.141.029	885.086.790	-	11.941.098.602	359.154.909	596.255.484.793	
92	Provinsi Kepulauan Riau	786.874.998.084	374.888.724.631	619.438.174.875	27.113.618.412	-	74.137.1124	-	1.021.514.655.042	
93	Kab. Bintan	264.098.305.318	123.648.266.965	187.891.996.000	26.340.462.404	-	24.712.374	359.154.909	338.264.592.652	
94	Kab. Batam	736.642.805.364	500.042.177.017	437.330.483.810	8.364.240.534	-	24.712.374	359.154.909	946.120.788.644	
95	Kab. Karimun	297.206.425.991	123.648.266.965	187.891.996.000	20.399.133.107	-	34.984.098	359.154.909	332.333.545.079	
96	Kota Batam	247.228.491.499	123.648.266.965	187.891.996.000	8.364.240.534	-	121.120.607	359.154.909	320.384.778.015	
97	Kab. Kepulauan Anambas	510.718.005.448	326.321.910.638	322.205.027.899	8.364.240.534	-	24.712.374	359.154.909	667.276.046.554	
98	Kota Tanjung Pinang	291.964.062.792	123.648.266.965	187.891.996.000	13.374.170.424	-	24.712.374	359.154.909	325.296.300.672	
99	Kab. Lingga	251.115.894.752	123.648.266.965	187.891.996.000	12.331.733.714	-	253.224.449	359.154.909	324.484.376.037	
100	Provinsi Jambi	297.534.261.257	144.785.474.050	215.082.170.106	16.230.456.777	-	4.526.113.094	-	380.624.214.027	
101	Kab. Barangliah	66.224.215.156	30.744.661.525	43.016.434.020	7.153.868.317	-	2.756.082.162	359.154.909	84.032.190.953	
102	Kab. Bungo	76.863.786.444	28.957.094.809	43.016.434.020	19.859.691.671	-	2.241.836.635	359.154.909	94.434.212.044	
103	Kab. Kerinci	59.477.340.660	28.957.094.809	43.016.434.020	2.875.502.938	-	906.742.188	359.154.909	76.114.928.864	
104	Kab. Merangin	61.027.377.436	28.957.094.809	43.016.434.020	4.331.034.531	-	1.114.614.562	359.154.909	77.778.332.831	
105	Kab. Muaro Jambi	70.406.321.401	40.073.295.131	43.726.816.156	3.325.189.661	-	2.875.146.630	359.154.909	90.359.562.489	
106	Kab. Sarolangun	81.419.050.374	44.298.149.985	43.016.434.020	11.482.831.441	-	3.224.901.832	359.154.909	102.381.472.187	
107	Kab. Tanjung Jabung Barat	388.642.637.844	191.228.139.489	298.757.263.924	3.264.435.341	-	3.474.048.065	359.154.909	497.083.041.728	
108	Kab. Tanjung Jabung Timur	208.661.904.262	93.681.530.998	173.713.128.173	2.875.502.938	-	2.062.297.596	359.154.909	272.691.614.614	
109	Kab. Tebo	68.792.058.990	28.957.094.809	43.016.434.020	4.002.774.375	-	10.221.836.941	359.154.909	86.557.295.054	
110	Kota Jambi	63.815.240.790	34.330.685.020	43.016.434.020	2.875.502.938	-	906.836.867	359.154.909	81.487.613.724	
111	Kota Sungai Penuh	59.476.475.690	28.957.094.809	43.016.434.020	2.875.502.938	-	906.222.618	359.154.909	76.113.409.294	
112	Provinsi Sumatera Selatan	917.03.927.329	310.940.676.375	740.078.613.051	140.865.855.185	-	6.416.18.893	-	1.195.304.763.504	
113	Kab. Lahat	226.378.897.265	51.439.523.105	123.466.158.320	106.578.774.807	-	1.560.791.666	359.154.909	283.394.402.807	
114	Kab. Musi Banyuasin	1.276.613.708.958	403.587.622.752	1.250.404.049.940	24.662.514.536	-	7.486.619.465	359.154.909	1.866.481.960.592	
115	Kab. Musi Rawas	310.102.473.844	89.134.274.857	285.038.959.946	25.205.514.887	-	1.778.220.038	359.154.909	401.517.124.637	

DAFTAR LAM. 282.

No.	Daerah	Pagu	Realisasi						Total
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kelutanan	Hasil Perikanan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
116	Kab. Muara Enim	353.866.509.159	130.309.413.181	134.141.832.306	186.789.242.480	-	2.479.682.150	359.154.909	454.079.325.026
117	Kab. Ogan Komering Ilir	131.979.456.478	44.420.096.623	105.725.516.149	19.547.007.918	-	2.063.879.829	359.154.909	172.115.655.428
118	Kab. Ogan Komering Ulu	152.809.095.893	71.735.438.260	108.721.119.278	21.993.863.299	-	942.681.822	359.154.909	203.162.157.668
119	Kota Palembang	130.789.741.306	44.420.096.623	105.725.516.149	19.414.639.578	-	916.659.841	359.154.909	170.836.067.100
120	Kota Pagar Alam	130.789.741.306	44.420.096.623	105.725.516.149	19.414.639.578	-	916.659.841	359.154.909	170.836.067.100
121	Kota Lubuk Linggau	130.789.741.306	44.420.096.623	105.725.516.149	19.414.639.578	-	916.659.841	359.154.909	170.836.067.100
122	Kota Prabumulih	138.455.274.033	52.382.767.754	107.021.888.054	19.779.886.226	-	922.169.099	359.154.909	180.465.486.042
123	Kab. Empat Lawang	131.250.491.732	44.420.096.623	105.725.516.149	19.865.390.004	-	916.659.841	359.154.909	171.286.817.526
124	Kab. Banyuasin	178.697.281.469	79.857.862.236	105.725.516.149	22.950.478.119	-	23.248.786.754	359.154.909	232.141.797.167
125	Kab. Ogan Ilir	138.422.432.650	54.375.126.962	105.725.516.149	19.643.126.978	-	916.659.841	359.154.909	181.019.583.839
126	Kab. OKU Timur	130.909.631.391	44.420.096.623	105.725.516.149	19.517.591.752	-	925.163.194	359.154.909	170.947.522.817
127	Kab. OKU Selatan	130.909.631.391	44.420.096.623	105.725.516.149	19.515.521.148	-	940.117.644	359.154.909	170.960.406.473
128	Provinsi Bangka Belitung	83.938.317.192	9.079.641.414	105.725.516.149	77.353.590.519	-	19.959.052	-	86.453.190.985
129	Kab. Bangka	73.678.085.895	2.591.674.378	-	72.427.128.222	-	26.789.672	359.154.909	75.404.747.181
130	Kab. Belitung	35.616.532.615	2.591.674.378	-	33.329.908.361	-	52.382.591	359.154.909	36.333.090.239
131	Kota Pangkal Pinang	26.723.141.935	2.591.674.378	-	24.457.966.082	-	6.653.017	359.154.909	27.415.438.986
132	Kab. Bangka Selatan	40.732.700.961	2.591.674.378	-	39.069.312.169	-	6.653.017	359.154.909	42.026.794.473
133	Kab. Bangka Tengah	40.732.851.112	2.591.674.378	-	39.412.681.241	-	6.676.697	359.154.909	42.370.187.225
134	Kab. Bangka Barat	58.975.898.055	2.591.674.378	-	57.180.479.869	-	30.259.850	359.154.909	60.161.588.006
135	Kab. Belitung Timur	38.172.895.195	2.591.674.378	-	35.785.188.736	-	6.653.017	359.154.909	38.742.671.040
136	Provinsi Bengkulu	16.275.097.292	-	-	18.719.547.207	-	83.421.970	-	18.802.969.177
137	Kab. Bengkulu Selatan	3.869.103.673	-	-	4.061.522.361	-	18.538.215	359.154.909	4.439.215.485
138	Kab. Bengkulu Utara	19.759.292.337	-	-	21.277.322.742	-	445.702.872	359.154.909	22.082.180.523
139	Kab. Bengkulu Tengah	3.840.463.573	-	-	4.043.882.361	-	18.538.215	359.154.909	4.421.575.485
140	Kota Bengkulu	3.840.463.573	-	-	4.043.882.361	-	18.538.215	359.154.909	4.421.575.485
141	Kab. Kaur	3.943.853.018	-	-	4.146.838.200	-	18.971.821	359.154.909	4.524.964.930
142	Kab. Seluma	4.089.761.664	-	-	4.656.490.865	-	18.976.461	359.154.909	5.034.622.235
143	Kab. Mukomuko	3.863.892.707	-	-	4.143.254.972	-	28.136.130	359.154.909	4.530.546.011
144	Kab. Lebong	4.065.965.084	-	-	4.269.383.872	-	18.538.215	359.154.909	4.847.076.998
145	Kab. Bengkulu Tengah	17.437.135.055	-	-	20.209.368.719	-	18.538.215	359.154.909	20.587.061.843

DAFTAR LAM. 283

No.	Daerah	Pagu	Realisasi					Total	
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan		Hasil Perikanan
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
146	Kab. Kepahiang	3.855.782.397	-	-	4.046.794.361	-	30.945.038	359.154.909	4.436.894.309
147	Provinsi Lampung	129.073.553.648	129.169.101.254	22.930.713.045	2.492.682.246	-	723.684.024	-	155.316.190.569
148	Kab. Lampung Barat	19.075.599.472	18.836.302.076	3.274.205.620	333.364.972	-	111.337.542	359.154.909	22.914.365.119
149	Kab. Lampung Selatan	19.074.281.982	18.836.302.076	3.274.205.620	337.047.482	-	111.337.542	359.154.909	22.913.047.629
150	Kab. Lampung Tengah	19.080.146.462	18.836.302.076	3.274.205.620	337.911.962	-	111.337.542	359.154.909	22.918.912.109
151	Kab. Lampung Utara	19.065.878.782	18.836.302.076	3.274.205.620	323.644.282	-	111.337.542	359.154.909	22.904.644.429
152	Kab. Lampung Timur	75.325.836.494	85.437.399.043	3.274.205.620	323.644.282	-	111.337.542	359.154.909	89.905.741.396
153	Kab. Tanggamus	22.968.894.280	18.836.302.076	3.274.205.620	4.562.183.882	-	111.337.542	359.154.909	27.143.194.029
154	Kab. Tulang Bawang	19.097.952.921	18.836.302.076	3.274.205.620	355.718.421	-	111.337.542	359.154.909	22.936.718.568
155	Kab. Way Kanan	19.459.573.093	18.836.302.076	3.274.205.620	350.128.698	-	479.654.294	359.154.909	23.299.445.597
156	Kab. Pasawaran	19.097.114.847	18.836.302.076	3.274.205.620	564.813.793	-	111.337.542	359.154.909	23.145.813.940
157	Kab. Pringsewu	19.093.467.706	18.836.302.076	3.274.205.620	351.233.206	-	111.337.542	359.154.909	22.932.233.353
158	Kab. Tulang Bawang Barat	20.862.824.528	18.836.302.076	3.274.205.620	1.189.083.905	-	1.079.071.298	359.154.909	24.737.817.408
159	Kab. Tulang Bawang	19.065.878.782	18.836.302.076	3.274.205.620	323.644.282	-	111.337.542	359.154.909	22.904.644.429
160	Kota Bandar Lampung	19.065.878.782	18.836.302.076	3.274.205.620	323.644.282	-	111.337.542	359.154.909	22.904.644.429
161	Kota Metro	19.065.878.782	18.836.302.076	3.274.205.620	323.644.282	-	111.337.542	359.154.909	22.904.644.429
162	Provinsi DKI Jakarta	262.934.562.203	232.407.429.700	68.768.591.311	-	-	-	2.154.930.323	303.331.951.754
163	Provinsi Jawa Barat	288.900.551.224	146.635.202.802	63.459.271.232	7.648.488.372	125.255.795.686	2.232.650.808	-	345.231.408.900
164	Kab. Bandung	118.862.075.275	11.370.597.845	5.018.250.706	576.556.260	105.778.754.949	182.961.175	359.154.909	123.265.875.844
165	Kab. Bekasi	59.768.186.771	41.020.170.364	22.119.267.272	576.556.260	10.020.463.654	178.612.064	359.154.909	74.274.224.523
166	Kab. Bogor	81.147.349.860	11.370.597.845	5.018.250.706	12.839.318.452	58.508.359.949	247.888.195	359.154.909	88.343.570.055
167	Kab. Ciamis	24.726.344.708	11.370.597.845	5.018.250.706	701.888.401	10.020.463.654	2.120.571.269	359.154.909	29.590.926.784
168	Kab. Cianjur	24.950.413.710	11.370.597.845	5.018.250.706	1.530.881.036	10.020.463.654	1.312.395.599	359.154.909	29.611.743.749
169	Kab. Cirebon	23.104.606.719	11.370.597.845	5.018.250.706	576.556.260	10.020.463.654	183.200.612	359.154.909	27.528.223.986
170	Kab. Cerrut	79.200.507.315	11.370.597.845	5.018.250.706	969.807.139	65.964.300.513	204.236.740	359.154.909	83.882.347.852
171	Kab. Indramayu	47.669.360.998	30.575.895.459	17.500.694.938	576.556.260	360.223.426	359.154.909	359.154.909	58.392.948.646
172	Kab. Karawang	48.147.902.415	22.062.644.119	26.661.070.707	576.556.260	10.020.463.654	187.210.282	359.154.909	59.857.099.931
173	Kab. Kuningan	23.153.867.232	11.370.597.845	5.018.250.706	576.556.260	10.020.463.654	235.779.989	359.154.909	27.580.803.363
174	Kab. Majalengka	24.475.416.292	12.401.223.862	5.979.098.773	576.556.260	10.020.463.654	199.782.607	359.154.909	29.536.271.065
175	Kab. Purwakarta	23.279.388.749	11.370.597.845	5.018.250.706	593.905.060	10.020.463.654	343.386.789	359.154.909	27.705.788.963

No.	Daerah	Pagu	Realisasi					Total	
			Minyak Bumi 4	Gas Bumi 5	Pertambangan Umum 6	Panas Bumi 7	Hasil Kelutanan 8		Hasil Perikanan 9
176	Kab. Subang	53.066.214.382	12.872.748.948	41.795.464.936	578.556.260	10.020.463.854	221.147.912	359.154.909	66.805.536.619
177	Kab. Sukabumi	63.762.468.296	11.370.597.845	5.018.250.706	667.581.085	50.321.566.925	481.003.743	359.154.909	68.218.155.213
178	Kab. Sumedang	23.173.957.023	11.370.597.845	5.018.250.706	578.556.260	10.020.463.854	258.066.711	359.154.909	27.603.089.085
179	Kab. Tasikmalaya	24.873.759.892	11.370.597.845	5.018.250.706	2.367.512.740	10.020.463.854	256.211.884	359.154.909	29.392.191.738
180	Kab. Bandung Barat	23.142.173.015	11.370.597.845	5.018.250.706	578.556.260	10.020.463.854	224.502.786	359.154.909	27.569.526.160
181	Kota Bandung	23.100.135.432	11.370.597.845	5.018.250.706	578.556.260	10.020.463.854	178.612.064	359.154.909	27.523.635.438
182	Kota Bekasi	23.100.135.432	11.370.597.845	5.018.250.706	578.556.260	10.020.463.854	178.612.064	359.154.909	27.523.635.438
183	Kota Bogor	23.100.135.432	11.370.597.845	5.018.250.706	578.556.260	10.020.463.854	178.612.064	359.154.909	27.523.635.438
184	Kota Cirebon	23.100.135.432	11.370.597.845	5.018.250.706	578.556.260	10.020.463.854	178.612.064	359.154.909	27.523.635.438
185	Kota Depok	23.100.135.432	11.370.597.845	5.018.250.706	578.556.260	10.020.463.854	178.612.064	359.154.909	27.523.635.438
186	Kota Sukabumi	23.100.135.432	11.370.597.845	5.018.250.706	578.556.260	10.020.463.854	178.612.064	359.154.909	27.523.635.438
187	Kota Cimahi	23.100.135.432	11.370.597.845	5.018.250.706	578.556.260	10.020.463.854	178.612.064	359.154.909	27.523.635.438
188	Kota Tasikmalaya	23.130.718.418	11.370.597.845	5.018.250.706	578.556.260	10.020.463.854	209.197.311	359.154.909	27.954.220.695
189	Kota Banjar	23.195.854.044	11.370.597.845	5.018.250.706	578.556.260	10.020.463.854	274.330.676	359.154.909	27.619.354.050
190	Provinsi Banten	2.809.441.055	-	-	3.695.803.519	-	423.723.359	-	4.119.526.878
191	Kab. Lebak	1.371.634.484	-	-	1.238.868.973	-	205.094.199	-	1.798.088.081
192	Kab. Pandeglang	5.766.962.730	-	-	7.330.952.564	-	763.416.336	-	8.453.523.809
193	Kab. Serang	1.101.916.674	-	-	1.036.403.757	-	121.063.816	-	1.516.622.482
194	Kab. Tangerang	1.101.916.674	-	-	1.036.403.757	-	121.063.816	-	1.516.622.482
195	Kota Cilegon	1.101.916.674	-	-	1.036.403.757	-	121.063.816	-	1.516.622.482
196	Kota Tangerang	1.101.916.674	-	-	1.036.403.757	-	121.063.816	-	1.516.622.482
197	Kota Serang	1.101.916.674	-	-	1.036.403.757	-	121.063.816	-	1.516.622.482
198	Kota Tangerang Selatan	1.101.916.674	-	-	1.036.403.757	-	121.063.816	-	1.516.622.482
199	Provinsi Jawa Tengah	8.488.890.663	1.632.525.850	459.888.229	1.133.068.814	-	6.402.931.202	-	9.628.474.795
200	Kab. Banjarnegara	925.742.520	86.030.933	27.052.248	66.473.823	-	524.784.212	-	1.073.486.125
201	Kab. Banyumas	922.548.408	86.030.933	27.052.248	66.851.583	-	508.729.794	-	1.069.819.467
202	Kab. Batang	1.374.339.503	86.030.933	27.052.248	63.702.943	-	1.000.813.944	-	1.546.754.977
203	Kab. Blora	8.863.431.832	3.265.051.697	53.862.509	6.702.943	-	5.938.891.646	-	9.680.653.704
204	Kab. Boyolali	987.110.168	86.030.933	27.052.248	63.702.943	-	615.981.150	-	1.161.922.183
205	Kab. Brebes	1.259.084.995	86.030.933	27.052.248	63.702.943	-	854.588.395	-	1.400.530.428

No.	Daerah	Pagu	Realisasi						Total
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
206	Kab. Cilacap	2.687.806.886	96.030.933	27.052.248	2.159.509.228	-	614.134.988	359.154.909	3.255.862.277
207	Kab. Demak	809.756.227	96.030.933	27.052.248	63.702.943	-	376.976.776	359.154.909	922.917.809
208	Kab. Grobogan	1.531.019.529	96.030.933	27.052.248	63.702.943	-	1.139.396.998	359.154.909	1.685.338.031
209	Kab. Jepara	983.917.717	96.030.933	27.052.248	111.332.010	-	515.534.678	359.154.909	1.109.104.778
210	Kab. Karanganyar	810.527.800	96.030.933	27.052.248	377.743.759	-	377.743.759	359.154.909	923.684.792
211	Kab. Kebumen	849.009.471	96.030.933	27.052.248	82.760.674	-	458.867.531	359.154.909	1.023.866.295
212	Kab. Kendal	1.419.465.330	96.030.933	27.052.248	63.702.943	-	1.054.593.520	359.154.909	1.601.534.953
213	Kab. Klaten	809.551.604	96.030.933	27.052.248	63.702.943	-	376.646.582	359.154.909	922.587.615
214	Kab. Kudus	810.082.313	96.030.933	27.052.248	63.702.943	-	378.403.471	359.154.909	924.344.504
215	Kab. Magelang	821.800.803	96.030.933	27.052.248	63.702.943	-	390.229.720	359.154.909	936.170.753
216	Kab. Pati	1.172.511.576	96.030.933	27.052.248	63.702.943	-	762.667.318	359.154.909	1.306.608.351
217	Kab. Pekalongan	861.912.790	96.030.933	27.052.248	68.849.023	-	434.088.906	359.154.909	983.176.019
218	Kab. Pemalang	1.741.360.841	96.030.933	27.052.248	63.702.943	-	1.321.393.005	359.154.909	1.867.334.038
219	Kab. Purbalingga	839.095.925	96.030.933	27.052.248	63.702.943	-	406.508.108	359.154.909	952.449.141
220	Kab. Purworejo	823.505.537	96.030.933	27.052.248	63.702.943	-	439.592.458	359.154.909	985.533.491
221	Kab. Rembang	1.801.807.434	96.030.933	27.052.248	63.702.943	-	1.520.447.712	359.154.909	2.066.388.745
222	Kab. Semarang	865.604.148	96.030.933	27.052.248	63.702.943	-	443.103.550	359.154.909	989.044.563
223	Kab. Sragen	810.765.095	96.030.933	27.052.248	63.702.943	-	378.402.077	359.154.909	924.343.110
224	Kab. Sukoharjo	809.551.604	96.030.933	27.052.248	63.702.943	-	376.646.582	359.154.909	922.587.615
225	Kab. Tegal	1.260.635.402	96.030.933	27.052.248	63.702.943	-	420.033.641	359.154.909	1.389.251.422
226	Kab. Temanggung	828.601.386	96.030.933	27.052.248	63.702.943	-	843.310.389	359.154.909	965.974.674
227	Kab. Wonogiri	975.864.134	96.030.933	27.052.248	203.882.067	-	409.970.709	359.154.909	1.086.080.866
228	Kab. Wonorejo	846.066.646	96.030.933	27.052.248	63.702.943	-	462.686.935	359.154.909	1.006.627.968
229	Kota Magelang	809.551.604	96.030.933	27.052.248	63.702.943	-	376.646.582	359.154.909	922.587.615
230	Kota Pekalongan	809.551.604	96.030.933	27.052.248	63.702.943	-	376.646.582	359.154.909	922.587.615
231	Kota Salatiga	809.551.604	96.030.933	27.052.248	63.702.943	-	376.646.582	359.154.909	922.587.615
232	Kota Semarang	1.479.019.565	96.030.933	892.976.198	63.702.943	-	393.566.160	359.154.909	1.795.430.143
233	Kota Surakarta	809.551.604	96.030.933	27.052.248	63.702.943	-	376.646.582	359.154.909	922.587.615
234	Kota Tegal	809.551.604	96.030.933	27.052.248	63.702.943	-	376.646.582	359.154.909	922.587.615
235	Provinsi DI Yogyakarta	3.836.072	-	-	1.731.600	-	3.312.792	-	5.044.392

No.	Daerah	Pagu	Realisasi					Total	
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kelutanan		Hasil Perikanan
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
236	Kab. Bantul	314.385.306	-	-	-	-	2.076.876	359.154.909	361.231.785
237	Kab. Gunung Kidul	316.865.824	-	-	-	-	5.985.744	359.154.909	365.140.653
238	Kab. Kulon Progo	321.299.466	-	-	6.926.400	-	1.875.756	359.154.909	367.957.065
239	Kab. Sleman	314.155.866	-	-	-	-	1.656.396	359.154.909	360.811.305
240	Kota Yogyakarta	314.155.866	-	-	-	-	1.656.396	359.154.909	360.811.305
241	Provinsi Jawa Timur	306.203.069.556	324.390.649.124	55.938.403.466	231.501.936	-	6.545.932.559	-	387.036.467.125
242	Kab. Bangkalan	30.150.728.292	28.078.766.446	5.515.066.998	4.724.552	-	390.992.466	359.154.909	34.348.705.371
243	Kab. Banyuwangi	19.461.233.565	17.491.894.976	3.061.095.205	103.161.564	-	3.100.847.521	359.154.909	24.116.154.175
244	Kab. Blitar	17.062.593.354	17.491.894.976	3.061.095.205	46.113.267	-	624.698.155	359.154.909	21.582.956.512
245	Kab. Bojonegoro	423.526.452.540	551.081.627.816	3.465.113.033	4.724.552	-	1.240.479.769	359.154.909	556.151.100.079
246	Kab. Bondowoso	16.860.726.117	17.491.894.976	3.061.095.205	4.724.552	-	457.937.302	359.154.909	21.374.806.944
247	Kab. Gresik	39.623.670.799	39.976.994.076	11.744.174.132	4.724.552	-	437.537.071	359.154.909	52.522.584.740
248	Kab. Jember	18.179.616.185	17.491.894.976	3.061.095.205	26.633.907	-	1.956.339.944	359.154.909	22.895.118.941
249	Kab. Jombang	16.962.340.474	17.491.894.976	3.061.095.205	51.684.332	-	546.899.659	359.154.909	21.510.729.081
250	Kab. Kediri	17.493.672.875	17.491.894.976	3.061.095.205	4.724.552	-	1.099.298.855	359.154.909	22.016.168.497
251	Kab. Lamongan	17.176.888.262	17.491.894.976	3.061.095.205	4.724.552	-	792.249.404	359.154.909	21.709.119.046
252	Kab. Lumajang	17.479.391.375	17.491.894.976	3.061.095.205	154.463.307	-	862.285.556	359.154.909	22.028.893.953
253	Kab. Madian	18.419.544.285	17.491.894.976	3.061.095.205	5.844.552	-	2.088.712.314	359.154.909	23.006.701.956
254	Kab. Magetan	16.786.731.287	17.491.894.976	3.061.095.205	4.724.552	-	387.678.586	359.154.909	21.304.548.228
255	Kab. Malang	16.862.121.658	17.491.894.976	3.061.095.205	6.784.162	-	767.115.118	359.154.909	21.683.984.760
256	Kab. Mopokerto	17.037.612.653	17.491.894.976	3.061.095.205	4.724.552	-	471.886.537	359.154.909	21.390.815.789
257	Kab. Nganjuk	17.164.775.190	17.491.894.976	3.061.095.205	4.724.552	-	815.118.453	359.154.909	21.731.988.095
258	Kab. Ngawi	17.316.594.592	17.491.894.976	3.061.095.205	17.920.493.352	-	920.493.305	359.154.909	21.837.362.947
259	Kab. Paitan	16.815.080.662	17.491.894.976	3.061.095.205	87.372.680	-	356.429.732	359.154.909	21.355.947.502
260	Kab. Pamekasan	16.756.098.628	17.491.894.976	3.061.095.205	4.724.552	-	355.834.193	359.154.909	21.270.703.895
261	Kab. Pesuruan	16.802.337.550	17.491.894.976	3.061.095.205	26.820.332	-	381.163.661	359.154.909	21.320.129.063
262	Kab. Ponorogo	16.942.066.039	17.491.894.976	3.061.095.205	5.620.552	-	553.494.518	359.154.909	21.471.260.160
263	Kab. Probolinggo	16.632.631.887	17.491.894.976	3.061.095.205	4.724.552	-	432.786.311	359.154.909	21.349.655.953
264	Kab. Sampang	16.755.098.628	17.491.894.976	3.061.095.205	4.724.552	-	353.834.193	359.154.909	21.270.703.835
265	Kab. Sidoarjo	16.766.169.811	17.502.966.259	3.061.095.205	4.724.552	-	353.834.193	359.154.909	21.281.775.118

DAFTAR LAM. 287.

No.	Daerah	Pagu	Realisasi						Total
			Minyak Bumi 4	Gas Bumi 5	Pertambangan Umum 6	Panas Bumi 7	Hasil Kehutanan 8	Hasil Perikanan 9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
266	Kab. Situbondo	16.829.940.252	17.491.894.976	3.061.095.205	4.724.552	-	4.724.037.217	359.154.909	21.386.906.859
267	Kab. Sumenep	16.867.247.506	18.486.081.937	5.767.049.195	4.724.552	-	4.724.971.475	359.154.909	25.096.982.068
268	Kab. Trenggalek	17.279.142.044	17.491.894.976	3.061.095.205	334.768.237	-	560.695.174	359.154.909	21.807.598.501
269	Kab. Tulungagung	21.128.907.374	25.986.299.951	3.061.095.205	4.724.552	-	1.127.870.298	359.154.909	30.538.104.915
270	Kab. Tulungagung	16.902.444.802	17.491.894.976	3.061.095.205	9.063.766	-	505.536.823	359.154.909	21.426.745.679
271	Kota Bharu	16.755.098.628	17.491.894.976	3.061.095.205	4.724.552	-	353.834.193	359.154.909	21.270.703.835
272	Kota Kediri	16.755.098.628	17.491.894.976	3.061.095.205	4.724.552	-	353.834.193	359.154.909	21.270.703.835
273	Kota Madiun	16.755.098.628	17.491.894.976	3.061.095.205	4.724.552	-	353.834.193	359.154.909	21.270.703.835
274	Kota Malang	16.755.098.628	17.491.894.976	3.061.095.205	4.724.552	-	353.834.193	359.154.909	21.270.703.835
275	Kota Mojokerto	16.757.570.153	17.491.894.976	3.061.095.205	7.196.077	-	353.834.193	359.154.909	21.273.175.360
276	Kota Pasuruan	16.755.098.628	17.491.894.976	3.061.095.205	4.724.552	-	353.834.193	359.154.909	21.270.703.835
277	Kota Probolinggo	16.755.098.628	17.491.894.976	3.061.095.205	4.724.552	-	353.834.193	359.154.909	21.270.703.835
278	Kota Surabaya	16.755.098.628	17.491.894.976	3.061.095.205	4.724.552	-	353.834.193	359.154.909	21.270.703.835
279	Kota Batu	16.763.921.185	17.491.894.976	3.061.095.205	4.724.552	-	362.999.006	359.154.909	21.279.868.648
280	Provinsi Kalimantan Barat	21.159.407.557	-	-	21.365.936.030	-	7.601.998.622	-	28.971.934.652
281	Kab. Bengkayang	3.233.441.252	-	-	2.944.171.744	-	951.063.089	-	4.254.419.752
282	Kab. Landak	6.160.477.538	-	-	4.741.467.041	-	2.751.462.735	-	7.852.094.665
283	Kab. Mempoh	5.529.559.082	-	-	2.957.052.260	-	6.079.709.627	-	9.395.916.816
284	Kab. Mempoh	37.873.838.813	-	-	36.235.903.948	-	16.512.971.073	-	53.108.029.930
285	Kab. Pontianak	3.474.226.402	-	-	3.493.269.877	-	1.026.874.613	-	4.879.299.399
286	Kab. Sambas	3.113.374.740	-	-	2.813.431.982	-	964.422.920	-	4.137.009.811
287	Kab. Sanggau	12.251.339.941	-	-	11.471.012.953	-	4.577.959.856	-	16.408.127.718
288	Kab. Sintang	10.999.479.298	-	-	3.387.840.555	-	9.344.687.159	-	13.081.662.623
289	Kota Pontianak	3.095.405.951	-	-	2.717.575.262	-	949.654.260	-	4.026.384.451
290	Kota Singkawang	3.082.845.566	-	-	2.795.014.877	-	949.654.260	-	4.103.824.066
291	Kab. Kayong Utara	3.739.159.789	-	-	3.450.797.407	-	950.185.972	-	4.780.138.288
292	Kab. Kutai Raya	5.734.693.891	-	-	2.730.358.622	-	6.222.077.134	-	9.510.621.369
293	Kab. Sekadau	3.045.059.103	-	-	2.730.358.622	-	978.783.592	-	4.068.297.123
294	Kab. Melawi	7.939.282.291	-	-	2.889.698.373	-	6.930.103.778	-	10.178.957.060
295	Provinsi Kalimantan Tengah	99.160.162.564	-	-	99.839.979.151	-	25.653.897.567	-	119.692.866.718

No.	Daerah	Pagu	Realisasi					Total	
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kelutanan		Hasil Perikanan
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
286	Kab. Barito Selatan	22.283.317.904	-	-	20.562.628.993	-	4.443.795.335	359.154.909	26.365.578.837
287	Kab. Barito Utara	54.640.800.121	-	-	44.716.645.435	-	25.195.745.669	359.154.909	70.271.546.033
288	Kab. Kapuas	65.092.116.972	-	-	67.374.745.667	-	14.815.791.264	359.154.909	82.549.691.940
289	Kab. Kotawaringin Barat	18.867.094.476	-	-	13.761.433.433	-	9.220.642.192	359.154.909	23.341.230.534
300	Kab. Kotawaringin Timur	22.587.669.274	-	-	14.946.127.676	-	13.336.278.845	359.154.909	28.641.561.430
301	Kota Palangkaraya	14.899.975.803	-	-	13.741.310.686	-	3.770.087.771	359.154.909	17.870.553.376
302	Kab. Barito Timur	35.915.346.689	-	-	38.666.321.469	-	4.361.087.679	359.154.909	43.386.564.057
303	Kab. Gunung Raya	87.063.474.979	-	-	73.695.354.286	-	25.097.365.198	359.154.909	99.151.894.393
304	Kab. Pulang Pisau	14.863.720.698	-	-	13.644.797.397	-	3.884.861.282	359.154.909	17.868.803.588
305	Kab. Gunung Mas	29.318.367.148	-	-	14.995.962.737	-	21.371.955.398	359.154.909	36.717.073.044
306	Kab. Lamandau	25.339.643.226	-	-	16.539.044.984	-	16.269.485.468	359.154.909	33.166.685.361
307	Kab. Sukamara	15.176.069.256	-	-	14.017.110.217	-	3.783.446.625	359.154.909	18.169.711.751
308	Kab. Katingan	44.275.313.364	-	-	14.971.149.876	-	37.419.121.174	359.154.909	52.749.425.959
309	Kab. Seruyan	55.876.836.433	-	-	13.747.174.054	-	51.407.764.227	359.154.909	66.514.093.190
310	Provinsi Kalimantan Selatan	544.703.029.159	9.240.552.831	-	623.865.604.221	-	782.951.175	-	633.832.108.227
311	Kab. Banjar	176.302.370.198	1.540.092.138	-	201.534.482.511	-	181.328.415	359.154.909	203.915.057.973
312	Kab. Barito Kuala	90.745.179.420	1.540.092.138	-	103.553.327.832	-	201.502.750	359.154.909	105.654.077.629
313	Kab. Hulu Sungai Selatan	110.940.468.453	1.540.092.138	-	126.428.569.057	-	93.841.311	359.154.909	127.421.657.415
314	Kab. Hulu Sungai Tengah	90.678.405.406	1.540.092.138	-	103.566.485.091	-	93.841.311	359.154.909	105.581.573.449
315	Kab. Hulu Sungai Utara	90.644.652.929	1.540.092.138	-	103.549.967.832	-	98.606.093	359.154.909	105.547.820.972
316	Kab. Kotabaru	171.452.021.111	1.540.092.138	-	209.740.168.561	-	516.442.259	359.154.909	212.155.855.867
317	Kab. Tabalong	311.828.662.865	17.831.100.101	-	310.349.969.785	-	2.025.692.727	359.154.909	330.665.917.522
318	Kab. Tanah Laut	268.790.933.921	1.540.092.138	-	361.643.727.659	-	110.474.975	359.154.909	353.653.449.681
319	Kab. Tapin	171.547.620.320	1.540.092.138	-	198.540.382.781	-	93.841.311	359.154.909	200.533.471.139
320	Kota Banjarbaru	90.698.556.608	1.540.092.138	-	103.608.636.293	-	93.841.311	359.154.909	105.601.724.651
321	Kota Banjarmasin	90.646.555.735	1.540.092.138	-	103.549.967.832	-	103.123.196	359.154.909	105.552.338.075
322	Kab. Bakang	252.773.408.423	2.190.097.702	-	265.191.515.880	-	93.841.311	359.154.909	267.534.609.802
323	Kab. Tanah Bumbu	268.265.673.503	1.540.092.138	-	314.963.947.798	-	2.343.793.671	359.154.909	319.206.988.516
324	Provinsi Kalimantan Timur	4.305.037.434.282	972.614.699.002	3.090.973.827.046	1.186.740.411.546	-	37.013.913.273	-	5.287.348.850.667
325	Kab. Berau	760.564.811.547	143.738.871.320	455.700.748.304	254.219.737.596	-	64.498.297.910	359.154.909	918.514.810.039

DAFTAR LAM. 289

No.	Daerah	Pagu	Realisasi					Total	
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kelutanan		Hasil Perikanan
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
326	Kab. Bulungan	697.064.143.792	173.389.902.165	456.106.089.430	194.027.035.767	-	35.047.562.798	359.154.909	858.924.745.070
327	Kab. Kutai Kartanegara	3.621.535.475.682	797.701.886.019	2.788.365.669.696	945.034.646.035	-	16.981.067.877	359.154.909	4.549.342.424.536
328	Kab. Kutai Barat	922.010.844.866	143.736.871.320	455.700.748.304	464.563.219.866	-	62.126.478.875	359.154.909	1.126.466.473.274
329	Kab. Kutai Timur	1.253.272.527.748	151.986.037.910	455.700.748.304	861.679.135.449	-	38.895.522.851	359.154.909	1.508.620.999.420
330	Kab. Malinau	663.789.291.031	143.736.871.320	455.700.748.304	218.949.242.230	-	27.839.677.717	359.154.909	846.594.694.480
331	Kab. Nunukan	702.988.711.470	153.620.939.142	455.700.748.304	229.925.066.547	-	28.037.370.672	359.154.909	867.643.279.574
332	Kab. Pasir	866.279.128.040	143.736.871.320	455.700.748.304	401.237.730.525	-	15.022.081.004	359.154.909	1.016.056.586.062
333	Kota Balikpapan	640.699.782.106	143.736.871.320	455.700.748.304	181.499.346.076	-	5.073.302.075	359.154.909	786.366.422.634
334	Kota Bontang	685.192.921.305	159.866.573.595	483.562.989.843	181.699.169.816	-	5.062.676.155	359.154.909	840.650.584.318
335	Kab. Tana Tidung	657.940.635.496	144.167.688.579	455.700.748.304	186.966.354.545	-	20.912.987.761	359.154.909	808.106.534.098
336	Kota Samarinda	719.531.263.967	150.313.015.490	461.124.427.910	260.573.841.350	-	5.062.676.155	359.154.909	877.433.115.814
337	Kota Tarakan	678.992.227.901	188.071.711.843	457.324.999.269	181.295.310.663	-	5.062.689.691	359.154.909	832.123.276.375
338	Kab. Penajam Paser Utara	697.847.895.647	191.754.644.893	473.062.864.857	184.819.986.782	-	7.735.669.375	359.154.909	857.752.520.816
339	Provinsi Sulawesi Utara	5.877.507.095			5.765.469.018		127.036.095		5.896.505.053
340	Kab. Bolaang Mongondow	1.502.279.076	-	-	1.173.562.734	-	18.148.005	359.154.909	1.560.865.648
341	Kab. Minahasa	1.066.263.291	-	-	739.566.949	-	18.148.005	359.154.909	1.116.869.863
342	Kab. Sangihe	1.134.036.078	-	-	865.379.736	-	18.148.005	359.154.909	1.182.692.650
343	Kota Bitung	1.906.433.491	-	-	1.576.717.149	-	18.148.005	359.154.909	1.964.020.063
344	Kota Manado	1.068.550.643	-	-	739.834.301	-	18.148.005	359.154.909	1.117.137.215
345	Kab. Kepulauan Talaud	1.068.283.291	-	-	739.566.949	-	18.148.005	359.154.909	1.116.869.863
346	Kab. Minahasa Selatan	1.329.787.574	-	-	1.001.071.232	-	18.148.005	359.154.909	1.378.374.146
347	Kab. Minahasa Tenggara	1.126.506.160	-	-	797.769.818	-	18.148.005	359.154.909	1.175.092.732
348	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	1.068.283.291	-	-	739.566.949	-	18.148.005	359.154.909	1.116.869.863
349	Kota Kotamobagu	1.068.283.291	-	-	739.566.949	-	18.148.005	359.154.909	1.116.869.863
350	Kab. Bolaang Mongondow Timur	3.014.583.295	-	-	2.684.625.080	-	22.796.984	359.154.909	3.066.576.973
351	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1.428.270.266	-	-	1.095.249.780	-	22.452.149	359.154.909	1.476.866.838
352	Kota Tomohon	1.068.283.291	-	-	739.566.949	-	18.148.005	359.154.909	1.116.869.863
353	Kab. Minahasa Utara	8.940.329.961	-	-	8.611.613.619	-	18.148.005	359.154.909	8.988.916.553
354	Kab. Bolaang Mongondow Utara	2.030.715.341	-	-	900.219.620	-	952.496.665	359.154.909	2.219.871.194
355	Provinsi Gorontalo	152.503.660			131.843.668		86.693.528		220.537.216

No.	Daerah	Pagu	Realisasi					Total	
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan		Hasil Perikanan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
356	Kab. Boalemo	438.650.411	-	-	6.272.000	-	141.713.308	359.154.909	507.140.217
357	Kab. Gorontalo	390.797.047	-	-	214.682.192	-	105.068.192	359.154.909	678.905.258
358	Kota Gorontalo	337.164.163	-	-	4.032.000	-	27.944.989	359.154.909	391.131.868
359	Kab. Pohuwato	457.789.248	-	-	72.700.856	-	84.713.422	359.154.909	516.569.187
360	Kab. Gorontalo Utara	609.004.976	-	-	199.735.910	-	112.437.312	359.154.909	671.328.131
361	Kab. Bone Bolenggo	405.251.163	-	-	59.779.907	-	40.903.113	359.154.909	459.737.929
362	Provinsi Sulawesi Tengah	12.706.861.575	7.589.238.680	480.784.007	12.032.007.228	-	664.071.673	-	20.285.317.581
363	Kab. Banggai	6.284.538.406	1.517.847.699	-	5.259.483.181	-	803.718.393	359.154.909	7.940.204.182
364	Kab. Banggai Kepulauan	2.608.359.411	1.517.847.699	-	2.110.885.879	-	132.726.974	359.154.909	4.120.615.461
365	Kab. Buol	2.805.802.903	1.517.847.699	-	2.214.520.780	-	270.095.293	359.154.909	4.361.618.681
366	Kab. Toji-Toli	3.091.574.955	1.517.847.699	-	2.467.506.469	-	448.936.777	359.154.909	4.793.445.854
367	Kab. Donggala	2.974.472.116	1.517.847.699	-	2.345.442.806	-	298.437.641	359.154.909	4.520.883.055
368	Kab. Morowali	23.072.390.449	15.178.477.382	-	21.740.245.148	-	705.978.606	359.154.909	37.983.866.045
369	Kab. Poso	3.290.009.627	1.517.847.699	-	2.245.302.295	-	1.391.523.640	359.154.909	5.513.828.543
370	Kota Palu	2.686.187.549	1.517.847.699	-	2.188.651.235	-	137.563.072	359.154.909	4.203.216.865
371	Kab. Parigi Moutong	3.285.688.420	1.517.847.699	-	2.444.840.950	-	523.664.205	359.154.909	4.845.507.763
372	Kab. Sigi	2.641.609.388	1.517.847.699	-	2.124.350.624	-	157.514.077	359.154.909	4.156.867.309
373	Kab. Tojo Ulu Ulu	3.313.999.359	1.517.847.699	-	3.000.264.261	-	514.705.587	359.154.909	5.391.972.476
374	Provinsi Sulawesi Selatan	9.329.963.350	-	480.784.007	8.895.048.613	-	7.283.718	-	9.384.056.338
375	Kab. Bantaeng	1.063.672.455	-	41.806.590	731.625.207	-	631.627	359.154.909	1.133.218.333
376	Kab. Barru	1.091.064.455	-	41.806.590	739.017.207	-	631.627	359.154.909	1.140.610.333
377	Kab. Bone	1.137.362.320	-	41.806.590	785.315.072	-	631.627	359.154.909	1.186.908.198
378	Kab. Bulukumba	1.063.672.455	-	41.806.590	731.625.207	-	631.627	359.154.909	1.133.218.333
379	Kab. Enrekang	1.095.325.213	-	41.806.590	742.050.249	-	2.869.343	359.154.909	1.456.871.091
380	Kab. Gowa	1.063.672.455	-	41.806.590	731.625.207	-	631.627	359.154.909	1.133.218.333
381	Kab. Jeneponto	1.064.877.895	-	41.806.590	732.830.747	-	631.627	359.154.909	1.134.423.873
382	Kab. Luwu	1.244.319.704	-	41.806.590	889.701.325	-	3.202.758	359.154.909	1.293.865.582
383	Kab. Luwu Utara	1.265.981.077	-	41.806.590	912.147.343	-	2.428.113	359.154.909	1.315.536.955
384	Kab. Mamas	1.102.053.790	-	41.806.590	750.006.542	-	631.627	359.154.909	1.151.599.668
385	Kab. Pangkajene Kepulauan	1.135.938.019	-	41.806.590	783.891.771	-	631.627	359.154.909	1.185.484.897

DAFTAR LAM. 291 -

No.	Daerah	Pagu	Realisasi					Total	
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kelutanan		Hasil Perikanan
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
386	Kab. Pinrang	1.083.929.697	-	41.806.590	731.625.207	-	888.868	359.154.909	1.133.475.575
387	Kab. Selayar	1.106.584.455	-	41.806.590	754.537.207	-	631.627	359.154.909	1.166.130.333
388	Kab. Sidenreng Rappang	1.113.387.037	-	41.806.590	759.044.137	-	2.927.279	359.154.909	1.162.932.915
389	Kab. Sinjai	1.086.801.490	-	41.806.590	734.754.242	-	631.627	359.154.909	1.136.347.368
390	Kab. Soppeng	1.083.672.455	-	41.806.590	731.625.207	-	631.627	359.154.909	1.133.218.333
391	Kab. Takalar	1.087.112.080	-	41.806.590	735.064.822	-	631.627	359.154.909	1.136.657.958
392	Kab. Tana Toraja	1.173.823.114	-	41.806.590	816.015.767	-	4.391.726	359.154.909	1.223.388.992
393	Kab. Wajo	2.005.352.875	-	961.568.415	733.543.802	-	631.627	359.154.909	2.054.898.753
394	Kota Parepare	1.083.672.455	-	41.806.590	731.625.207	-	631.627	359.154.909	1.133.218.333
395	Kab. Toraja Utara	1.119.877.147	-	41.806.590	844.822.274	-	720.440	359.154.909	1.246.304.213
396	Kota Makassar	1.083.672.455	-	41.806.590	731.625.207	-	631.627	359.154.909	1.133.218.333
397	Kota Palopo	1.167.539.640	-	41.806.590	815.492.592	-	631.627	359.154.909	1.217.085.718
398	Kab. Luwu Timur	18.422.333.476	-	41.806.590	18.125.167.937	-	1.530.298	359.154.909	18.527.669.734
399	Provinsi Sulawesi Barat	195.110.929	-	-	114.517.392	-	151.452.520	-	266.009.912
400	Kab. Majene	369.301.696	-	-	3.617.198	-	75.746.260	359.154.909	438.518.367
401	Kab. Mamuju	1.609.951.667	-	-	402.506.363	-	1.476.222.651	359.154.909	2.237.863.923
402	Kab. Polewali Mandar	369.301.696	-	-	21.889.198	-	75.746.260	359.154.909	456.790.367
403	Kab. Mamasa	384.935.726	-	-	26.439.612	-	90.083.059	359.154.909	475.687.580
404	Kab. Mamuju Utara	392.522.621	-	-	5.857.198	-	106.727.285	359.154.909	471.739.992
405	Provinsi Sulawesi Tenggara	40.035.965.311	-	-	58.412.478.995	-	256.483.153	-	56.670.962.148
406	Kab. Buton	10.782.105.133	-	-	13.753.174.265	-	52.108.442	359.154.909	14.164.437.616
407	Kab. Konawe	9.893.409.090	-	-	12.726.093.857	-	279.087.653	359.154.909	13.364.336.419
408	Kab. Kolaka	38.292.046.226	-	-	51.005.730.716	-	305.009.002	359.154.909	51.669.894.627
409	Kab. Muna	7.599.866.763	-	-	10.327.510.294	-	399.510.917	359.154.909	11.086.176.120
410	Kota Kendari	7.277.532.648	-	-	10.291.543.686	-	46.986.937	359.154.909	10.657.695.552
411	Kota Bau-bau	7.333.971.636	-	-	10.307.992.674	-	49.866.640	359.154.909	10.716.994.223
412	Kab. Konawe Selatan	15.068.679.235	-	-	26.090.309.938	-	126.879.798	359.154.909	26.576.344.645
413	Kab. Bombana	17.076.569.041	-	-	25.264.581.983	-	60.742.294	359.154.909	25.684.479.186
414	Kab. Konawe Utara	21.498.649.711	-	-	33.952.282.189	-	707.186.926	359.154.909	34.818.624.024
415	Kab. Buton Utara	7.824.394.225	-	-	10.337.504.835	-	564.125.672	359.154.909	11.260.785.416

No.	Daerah	Pagu	Realisasi					Total	
			Minyak Bumi 4	Gas Bumi 5	Pertambangan Umum 6	Panas Bumi 7	Hasil Kelutanan 8		Hasil Perikanan 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
416	Kab. Wakatobi	7.277.532.648	-	-	10.251.543.686	-	46.886.937	359.154.909	10.657.695.532
417	Kab. Kolaka Utara	15.207.001.242	-	-	19.781.657.839	-	173.438.707	359.154.909	20.314.251.455
418	Provinsi Bali	0	0	0	0	0	0	0	0
419	Kab. Badung	313.103.630	-	-	-	-	-	359.154.909	359.154.909
420	Kab. Bangli	313.103.630	-	-	-	-	-	359.154.909	359.154.909
421	Kab. Buleleng	313.103.630	-	-	-	-	-	359.154.909	359.154.909
422	Kab. Gianyar	313.103.630	-	-	-	-	-	359.154.909	359.154.909
423	Kab. Jembrana	313.103.630	-	-	-	-	-	359.154.909	359.154.909
424	Kab. Karangasem	313.103.630	-	-	-	-	-	359.154.909	359.154.909
425	Kab. Klungkung	313.103.630	-	-	-	-	-	359.154.909	359.154.909
426	Kab. Tabanan	313.103.630	-	-	-	-	-	359.154.909	359.154.909
427	Kota Denpasar	313.103.630	-	-	-	-	-	359.154.909	359.154.909
428	Provinsi Nusa Tenggara Barat	12.747.649.700	0	0	12.930.050.626	0	135.647.649	0	13.065.698.275
429	Kab. Bima	3.579.228.758	-	-	3.298.620.481	-	30.143.922	359.154.909	3.677.919.312
430	Kab. Dompu	3.050.486.346	-	-	2.819.460.305	-	38.280.830	359.154.909	3.216.896.044
431	Kab. Lombok Barat	2.982.793.885	-	-	2.806.825.453	-	30.463.531	359.154.909	3.186.413.873
432	Kab. Lombok Tengah	2.959.198.655	-	-	2.625.067.178	-	73.032.149	359.154.909	3.057.254.236
433	Kab. Lombok Timur	2.966.609.005	-	-	2.632.477.528	-	30.143.922	359.154.909	3.021.776.359
434	Kab. Sumbawa	4.674.765.689	-	-	4.894.267.647	-	202.859.125	359.154.909	5.556.281.661
435	Kota Mataram	2.957.124.205	-	-	2.622.992.728	-	30.143.922	359.154.909	3.012.291.559
436	Kab. Lombok Utara	2.957.124.205	-	-	2.622.992.728	-	30.143.922	359.154.909	3.012.291.559
437	Kota Bima	2.957.124.205	-	-	2.622.992.728	-	30.143.922	359.154.909	3.012.291.559
438	Kab. Sumbawa Barat	25.713.344.310	-	-	24.686.580.199	-	992.556.418	359.154.909	26.038.290.526
439	Provinsi Nusa Tenggara Timur	613.782.171	0	0	601.755.974	0	57.511.801	0	659.267.775
440	Kab. Alor	513.668.668	-	-	513.589.465	-	49.023.542	359.154.909	618.777.936
441	Kab. Belu	814.290.994	-	-	495.615.991	-	5.751.180	359.154.909	860.522.080
442	Kab. Ende	387.812.947	-	-	44.145.943	-	30.743.181	359.154.909	434.044.033
443	Kab. Flores Timur	356.674.627	-	-	29.225.303	-	14.525.501	359.154.909	402.905.713
444	Kab. Kupang	371.261.991	-	-	52.586.978	-	5.751.180	359.154.909	417.493.067
445	Kab. Lembata	347.900.306	-	-	29.225.303	-	5.751.180	359.154.909	394.131.392

DAFTAR LAM. 293

No.	Daerah	Pagu	Realisasi					Total	
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kelutanan		Hasil Perikanan
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
446	Kab. Manggarai	360.718.706	-	-	42.043.703	-	5.751.180	359.154.909	406.949.792
447	Kab. Ngada	347.900.306	-	-	29.225.303	-	5.751.180	359.154.909	394.131.392
448	Kab. Sikka	380.134.043	-	-	29.225.303	-	37.984.917	359.154.909	426.365.129
449	Kab. Sumba Barat	347.900.306	-	-	29.225.303	-	5.751.180	359.154.909	394.131.392
450	Kab. Sumba Timur	347.900.306	-	-	29.225.303	-	5.751.180	359.154.909	394.131.392
451	Kab. Timor Tengah Selatan	766.575.321	-	-	437.900.318	-	5.751.180	359.154.909	802.806.407
452	Kab. Timor Tengah Utara	697.324.651	-	-	483.305.196	-	5.751.180	359.154.909	848.211.245
453	Kota Kupang	347.900.306	-	-	29.225.303	-	5.751.180	359.154.909	394.131.392
454	Kab. Pore Hida	365.602.116	-	-	48.927.113	-	5.751.180	359.154.909	411.833.202
455	Kab. Nagekeo	347.900.306	-	-	29.225.303	-	5.751.180	359.154.909	394.131.392
456	Kab. Sumba Tengah	491.857.106	-	-	173.182.103	-	5.751.180	359.154.909	536.088.192
457	Kab. Sumba Barat Daya	347.900.306	-	-	29.225.303	-	5.751.180	359.154.909	394.131.392
458	Kab. Manggarai Timur	452.863.525	-	-	141.717.450	-	5.751.180	359.154.909	506.623.539
459	Kab. Sabu Raiua	347.900.306	-	-	29.225.303	-	5.751.180	359.154.909	394.131.392
460	Kab. Manggarai Barat	380.127.186	-	-	61.452.183	-	5.751.180	359.154.909	426.358.272
461	Provinsi Maluku	7.518.274.095	419.568.888	-	3.981.682.008	-	3.968.584.921	-	8.368.045.817
462	Kab. Maluku Tenggara Barat	1.922.050.790	83.913.775	-	918.816.394	-	1.801.878.313	359.154.909	3.163.763.381
463	Kab. Maluku Tengah	3.489.317.795	83.913.775	-	776.166.320	-	3.165.232.242	359.154.909	4.384.467.246
464	Kab. Maluku Tenggara	1.498.614.458	83.913.775	-	766.370.240	-	490.750.209	359.154.909	1.700.189.133
465	Kab. Pulau Buru	12.501.903.989	83.913.775	-	766.370.240	-	12.984.893.292	359.154.909	14.194.332.216
466	Kota Ambon	1.496.114.388	83.913.775	-	766.370.240	-	487.759.318	359.154.909	1.697.198.242
467	Kab. Seram Bagian Barat	1.905.803.853	83.913.775	-	787.757.440	-	877.939.341	359.154.909	2.106.765.465
468	Kab. Seram Bagian Timur	3.164.676.668	839.137.778	-	771.134.656	-	1.624.966.030	359.154.909	3.594.395.373
469	Kab. Maluku Barat Daya	8.512.952.172	83.913.775	-	7.862.125.464	-	487.759.318	359.154.909	8.792.953.466
470	Kab. Buru Selatan	5.652.665.484	83.913.775	-	989.512.640	-	6.098.473.426	359.154.909	7.931.054.750
471	Kab. Kepulauan Aru	1.496.660.021	83.913.775	-	766.370.240	-	625.115.261	359.154.909	1.834.554.185
472	Kota Tual	1.496.114.388	83.913.775	-	766.370.240	-	487.759.318	359.154.909	1.697.198.242
473	Provinsi Maluku Utara	35.450.666.744	-	-	47.044.756.272	-	2.003.906.404	-	49.048.662.676
474	Kab. Halmahera Tengah	13.469.050.882	-	-	15.263.620.137	-	1.459.886.798	359.154.909	17.082.663.804
475	Kab. Halmahera Barat	9.875.586.838	-	-	11.201.280.650	-	439.866.531	359.154.909	12.000.291.990

DAFTAR LAM. 294 -

No.	Daerah	Pagu	Realisasi					Total	
			Minyak Bumi 4	Gas Bumi 5	Pertambangan Umum 6	Panas Bumi 7	Hasil Kelutanan 8		Hasil Perikanan 9
1	Kota Ternate	9.847.668.618	-	-	11.173.352.230	-	439.866.531	359.154.909	11.972.363.670
476	Kab. Halmahera Timur	47.130.291.654	-	-	55.130.255.521	-	2.256.439.076	359.154.909	57.745.849.506
478	Kota Tidore Kepulauan	10.318.044.918	-	-	11.180.520.230	-	903.074.830	359.154.909	12.442.749.969
479	Kab. Kepulauan Sula	15.330.204.755	-	-	14.785.162.647	-	5.668.067.748	359.154.909	20.812.385.304
480	Kab. Pulau Morotai	9.901.984.529	-	-	11.866.676.870	-	480.867.802	359.154.909	12.026.689.681
481	Kab. Halmahera Selatan	36.147.958.284	-	-	35.478.631.768	-	8.371.821.434	359.154.909	44.209.608.101
482	Kab. Halmahera Utara	19.604.276.978	-	-	22.827.946.097	-	656.469.083	359.154.909	23.843.590.089
484	Kab. Talo	9.200.536.041	-	-	8.238.253.843	-	789.554.616	359.154.909	9.386.963.368
485	Provinsi Papua	127.681.018.345	-	-	117.135.237.626	-	13.395.682.687	-	130.530.920.313
486	Kab. Lanny Jaya	9.200.536.041	-	-	8.238.253.843	-	806.262.052	359.154.909	9.403.670.804
487	Kab. Jayapura	10.531.543.204	-	-	8.271.084.403	-	2.104.438.655	359.154.909	10.734.677.967
488	Kab. Jayawijaya	9.296.037.743	-	-	8.293.755.545	-	789.554.616	359.154.909	9.442.465.070
489	Kab. Merauke	20.196.718.697	-	-	8.238.253.843	-	16.786.816.652	359.154.909	25.383.225.404
490	Kab. Mimika	234.608.655.672	-	-	231.670.484.463	-	3.518.388.615	359.154.909	235.548.027.987
491	Kab. Mamberamo	10.280.879.034	-	-	8.601.634.288	-	1.626.950.730	359.154.909	10.987.739.897
492	Kab. Paniai	9.911.635.895	-	-	9.917.735.473	-	789.554.616	359.154.909	11.066.444.998
493	Kab. Puncak Jaya	9.290.909.730	-	-	8.328.627.532	-	789.554.616	359.154.909	9.477.337.057
494	Kab. Kepulauan Tanimbar	9.217.325.961	-	-	8.295.043.763	-	789.554.616	359.154.909	9.403.753.288
495	Kota Jayapura	9.200.536.041	-	-	8.238.253.843	-	789.554.616	359.154.909	9.386.963.368
496	Kab. Sarmi	26.953.163.997	-	-	8.440.025.335	-	19.593.154.661	359.154.909	28.692.334.925
497	Kab. Keerom	13.167.058.062	-	-	8.444.230.732	-	5.214.707.718	359.154.909	14.018.083.359
498	Kab. Yahukimo	9.279.416.617	-	-	8.317.134.419	-	789.554.616	359.154.909	9.465.843.944
499	Kab. Pegunungan Bintang	9.321.702.083	-	-	10.777.538.233	-	789.554.616	359.154.909	11.926.247.258
500	Kab. Tolikara	9.373.283.083	-	-	8.311.010.865	-	789.554.616	359.154.909	9.459.720.410
501	Kab. Boven Digoel	20.434.941.906	-	-	8.238.253.843	-	13.709.941.545	359.154.909	22.307.360.297
502	Kab. Mappi	9.314.579.152	-	-	8.238.253.843	-	955.895.863	359.154.909	9.563.304.615
503	Kab. Asmat	10.043.762.769	-	-	8.238.253.843	-	2.186.607.186	359.154.909	10.786.015.938
504	Kab. Wampan	9.482.444.271	-	-	8.515.623.343	-	810.600.782	359.154.909	9.685.579.334
505	Kab. Mamberamo Raya	21.110.614.693	-	-	8.604.199.396	-	12.333.687.715	359.154.909	21.297.042.020

DAFTAR LAM. 295.

No.	Daerah	Pagu	Realisasi					Total	
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan		Hasil Perikanan
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
506	Kab. Mamberamo Tengah	9.200.536.041	-	-	8.238.253.843	-	789.554.616	359.154.909	9.386.963.368
507	Kab. Iiduga	9.200.536.041	-	-	8.238.253.843	-	789.554.616	359.154.909	9.386.963.368
508	Kab. Dogiyai	9.200.536.041	-	-	8.238.253.843	-	789.554.616	359.154.909	9.386.963.368
509	Kab. Intan Jaya	9.200.536.041	-	-	8.238.253.843	-	789.554.616	359.154.909	9.386.963.368
510	Kab. Puncak	9.200.536.041	-	-	8.238.253.843	-	789.554.616	359.154.909	9.386.963.368
511	Kab. Deiyai	9.200.536.041	-	-	8.238.253.843	-	789.554.616	359.154.909	9.386.963.368
512	Kab. Supiori	9.200.536.041	-	-	8.238.253.843	-	789.554.616	359.154.909	9.386.963.368
513	Provinsi Papua Barat	286.500.221.783	877.314.232.512	143.503.312.588	1.837.552.466	-	15.035.915.897	-	1.037.491.013.463
514	Kab. Sorong	38.130.409.915	83.653.232.096	5.834.820.598	281.836.592	-	13.119.086.411	359.154.909	103.248.130.606
515	Kab. Mimika	6.754.534.951	9.075.664.458	3.743.564.676	293.906.389	-	3.822.440.922	359.154.909	17.294.731.364
516	Kab. Fak Fak	9.202.430.166	9.075.664.458	3.743.564.676	223.505.549	-	6.465.399.102	359.154.909	19.867.288.694
517	Kota Sorong	5.203.234.425	9.075.664.458	3.743.564.676	215.367.549	-	2.349.689.646	359.154.909	15.743.431.238
518	Kab. Sorong Selatan	5.250.142.689	9.075.664.458	3.743.564.676	262.265.809	-	3.547.491.563	359.154.909	16.986.141.415
519	Kab. Raja Ampat	7.916.985.636	9.114.218.619	3.743.564.676	2.695.651.427	-	2.358.329.646	359.154.909	18.270.919.277
520	Kab. Teluk Bintuni	21.525.143.046	15.179.004.723	35.344.390.840	1.664.106.593	-	26.257.771.663	359.154.909	78.604.428.248
521	Kab. Teluk Wondama	11.213.948.655	9.075.664.458	3.743.564.676	215.367.549	-	8.360.403.876	359.154.909	21.754.145.468
522	Kab. Tambrauw	5.277.504.724	9.075.664.458	3.743.564.676	215.367.549	-	2.423.959.945	359.154.909	15.817.701.537
523	Kab. Maybrat	5.330.752.172	9.075.664.458	3.743.564.676	215.367.549	-	2.477.207.393	359.154.909	16.870.948.985
524	Kab. Kaimana	13.613.488.802	9.075.664.458	3.743.564.676	359.675.066	-	15.959.442.952	359.154.909	29.497.502.061
	Dana Cadangan	13.423.204.255.033	-	-	-	-	-	-	-
	Kembali ke RKUN	62.600.285.617.315	26.165.822.138.467	21.231.675.084.265	12.860.954.426.197	626.278.978.409	1.535.890.432.615	179.764.557.362	62.600.285.617.315
	JUMLAH								
	Rp								

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

DAFTAR 3.D

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
AUDITED TAHUN ANGGARAN 2012
(Dalam Rupiah)**

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
1	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	2.119.808.156	2.119.808.156
2	Kab. Aceh Barat	117.767.119	117.767.119
3	Kab. Aceh Besar	117.767.119	117.767.119
4	Kab. Aceh Selatan	117.767.119	117.767.119
5	Kab. Aceh Singkil	117.767.119	117.767.119
6	Kab. Aceh Tengah	565.282.175	565.282.175
7	Kab. Aceh Tenggara	117.767.119	81.078.172
8	Kab. Aceh Timur	117.767.119	117.767.119
9	Kab. Aceh Utara	117.767.119	117.767.119
10	Kab. Bireun	117.767.119	81.078.172
11	Kab. Pidie	565.282.175	565.282.175
12	Kab. Simeulue	117.767.119	81.078.172
13	Kota Banda Aceh	117.767.119	117.767.119
14	Kota Sabang	117.767.119	117.767.119
15	Kota Langsa	117.767.119	117.767.119
16	Kota Lhokseumawe	117.767.119	117.767.119
17	Kab. Nagan Raya	117.767.119	117.767.119
18	Kab. Aceh Jaya	117.767.119	117.767.119
19	Kab. Pidie Jaya	565.282.175	565.282.175
20	Kab. Aceh Barat Daya	117.767.119	117.767.119
21	Kab. Gayo Lues	565.282.175	565.282.175
22	Kab. Aceh Tamiang	117.767.119	117.767.119
23	Kab. Bener Meriah	565.282.175	565.282.175
24	Kota Subulussalam	117.767.119	117.767.119
25	Provinsi Sumatera Utara	4.518.774.286	4.518.774.286
26	Kab. Asahan	197.789.218	197.789.218
27	Kab. Dairi	545.538.924	545.538.924
28	Kab. Deli Serdang	320.633.579	320.633.579
29	Kab. Tanah Karo	1.270.868.184	1.270.868.184
30	Kab. Labuhan Batu	169.388.545	121.258.699
31	Kab. Langkat	229.950.859	164.919.145
32	Kab. Mandailing Natal	159.534.384	114.621.457
33	Kab. Nias	131.896.915	131.896.915
34	Kab. Simalungun	1.370.371.927	1.370.371.927
35	Kab. Tapanuli Selatan	151.045.856	108.653.522

DAFTAR LRA -297 -

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
36	Kab. Tapanuli Tengah	156.967.519	156.967.519
37	Kab. Tapanuli Utara	829.080.551	829.080.551
38	Kab. Toba Samosir	145.809.125	145.809.125
39	Kota Binjai	156.688.414	112.492.033
40	Kota Medan	360.094.800	360.094.800
41	Kota Pematang Siantar	1.428.212.266	1.428.212.266
42	Kota Sibolga	135.973.696	135.973.696
43	Kota Tanjung Balai	144.041.939	144.041.939
44	Kab. Batu Bara	163.736.068	117.212.515
45	Kab. Labuhan Batu Utara	157.045.957	157.045.957
46	Kab. Labuhan Batu Selatan	156.332.561	112.202.567
47	Kab. Padang Lawas Utara	144.212.776	144.212.776
48	Kab. Padang Lawas	145.783.506	145.783.506
49	Kab. Nias Utara	130.914.896	130.914.896
50	Kab. Nias Barat	126.456.412	88.645.583
51	Kota Tebing Tinggi	144.997.904	144.997.904
52	Kota Padang Sidempuan	146.713.052	105.307.732
53	Kab. Pakpak Bharat	135.303.976	97.051.392
54	Kab. Nias Selatan	147.553.876	103.054.524
55	Kab. Humbang Hasundutan	580.960.527	580.960.527
56	Kab. Serdang Bedagai	189.887.836	189.887.836
57	Kab. Samosir	138.506.494	138.506.494
58	Kota Gunung sitoli	131.514.107	92.099.839
59	Provinsi Sumatera Barat	2.539.464.303	2.539.464.303
60	Kab. Limapuluh Kota	2.103.961.424	2.103.961.424
61	Kab. Agam	347.460.187	347.460.187
62	Kab. Kepulauan Mentawai	133.656.016	133.656.016
63	Kab. Padang Pariaman	133.656.016	92.272.266
64	Kab. Pasaman	327.612.686	327.612.686
65	Kab. Pesisir Selatan	133.656.016	133.656.016
66	Kab. Sijunjung	133.656.016	133.656.016
67	Kab. Solok	391.125.100	391.125.100
68	Kab. Tanah Datar	379.072.885	379.072.885
69	Kota Bukit Tinggi	133.656.016	133.656.016
70	Kota Padang Panjang	133.656.016	92.272.266
71	Kota Padang	133.656.016	92.272.266
72	Kota Payakumbuh	396.534.345	396.534.345
73	Kota Sawahlunto	375.777.880	375.777.880
74	Kota Solok	133.656.016	92.272.266
75	Kota Pariaman	133.656.016	133.656.016

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
76	Kab. Pasaman Barat	133.656.016	92.272.266
77	Kab. Dharmasraya	133.656.016	133.656.016
78	Kab. Solok Selatan	133.656.016	133.656.016
79	Provinsi Riau	-	-
80	Kab. Bengkalis	-	-
81	Kab. Indragiri Hilir	-	-
82	Kab. Indragiri Hulu	-	-
83	Kab. Kampar	-	-
84	Kab. Kuantan Singingi	-	-
85	Kab. Pelalawan	-	-
86	Kab. Rokan Hilir	-	-
87	Kab. Rokan Hulu	-	-
88	Kab. Siak	-	-
89	Kota Dumai	-	-
90	Kota Pekanbaru	-	-
91	Kab. Kepulauan Meranti	-	-
92	Provinsi Kepulauan Riau	-	-
93	Kab. Bintan	-	-
94	Kab. Natuna	-	-
95	Kab. Karimun	-	-
96	Kota Batam	-	-
97	Kab. Kepulauan Anambas	-	-
98	Kota Tanjung Pinang	-	-
99	Kab. Lingga	-	-
100	Provinsi Jambi	1.409.186.744	1.409.186.744
101	Kab. Batanghari	140.918.674	140.918.674
102	Kab. Bungo	140.918.674	140.918.674
103	Kab. Kerinci	1.878.915.658	1.878.915.658
104	Kab. Merangin	140.918.674	140.918.674
105	Kab. Muaro Jambi	140.918.674	140.918.674
106	Kab. Sarolangun	140.918.674	97.141.008
107	Kab. Tanjung Jabung Barat	140.918.674	140.918.674
108	Kab. Tanjung Jabung Timur	140.918.674	97.141.008
109	Kab. Tebo	140.918.674	97.141.008
110	Kota Jambi	140.918.674	140.918.674
111	Kota Sungai Penuh	140.918.674	140.918.674
112	Provinsi Sumatera Selatan	1.226.705.651	1.226.705.651
113	Kab. Lahat	402.555.064	402.555.064
114	Kab. Musi Banyuasin	81.780.376	81.780.376
115	Kab. Musi Rawas	81.780.376	81.780.376

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
116	Kab. Muara Enim	81.780.376	81.780.376
117	Kab. Ogan Komering Ilir	88.127.195	88.127.195
118	Kab. Ogan Komering Ulu	81.780.376	56.356.597
119	Kota Palembang	81.780.376	56.356.597
120	Kota Pagar Alam	402.555.064	402.555.064
121	Kota Lubuk Linggau	408.901.883	408.901.883
122	Kota Prabumulih	81.780.376	81.780.376
123	Kab. Empat Lawang	81.780.376	56.356.597
124	Kab. Banyuasin	81.780.376	81.780.376
125	Kab. Ogan Ilir	88.127.195	88.127.195
126	Kab. OKU Timur	402.555.064	402.555.064
127	Kab. OKU Selatan	415.248.702	415.248.702
128	Provinsi Bangka Belitung	-	-
129	Kab. Bangka	-	-
130	Kab. Belitung	-	-
131	Kota Pangkal Pinang	-	-
132	Kab. Bangka Selatan	-	-
133	Kab. Bangka Tengah	-	-
134	Kab. Bangka Barat	-	-
135	Kab. Belitung Timur	-	-
136	Provinsi Bengkulu	-	-
137	Kab. Bengkulu Selatan	-	-
138	Kab. Bengkulu Utara	-	-
139	Kab. Rejang Lebong	-	-
140	Kota Bengkulu	-	-
141	Kab. Kaur	-	-
142	Kab. Seluma	-	-
143	Kab. Mukomuko	-	-
144	Kab. Lebong	-	-
145	Kab. Bengkulu Tengah	-	-
146	Kab. Kepahiang	-	-
147	Provinsi Lampung	1.365.731.060	1.365.731.060
148	Kab. Lampung Barat	126.346.390	126.346.390
149	Kab. Lampung Selatan	183.249.115	183.249.115
150	Kab. Lampung Tengah	439.753.674	439.753.674
151	Kab. Lampung Utara	252.334.262	252.334.262
152	Kab. Lampung Timur	939.260.955	939.260.955
153	Kab. Tanggamus	214.399.694	214.399.694
154	Kab. Tulang Bawang	99.255.001	99.255.001
155	Kab. Way Kanan	101.328.295	83.520.632

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
156	Kab. Pesawaran	198.510.783	198.510.783
157	Kab. Pringsewu	208.156.254	208.156.254
158	Kab. Mesuji	99.255.001	99.255.001
159	Kab. Tulang Bawang Barat	99.255.001	99.255.001
160	Kota Bandar Lampung	99.255.001	99.255.001
161	Kota Metro	126.346.390	126.346.390
162	Provinsi DKI Jakarta	-	-
163	Provinsi Jawa Barat	49.051.153.377	49.051.153.377
164	Kab. Bandung	4.029.149.925	4.029.149.925
165	Kab. Bekasi	17.996.111.743	12.414.584.701
166	Kab. Bogor	2.057.512.706	2.057.512.706
167	Kab. Cianjis	3.106.237.802	3.106.237.802
168	Kab. Cianjur	3.205.836.013	3.205.836.013
169	Kab. Cirebon	2.889.441.277	2.323.596.323
170	Kab. Garut	10.397.994.107	10.397.994.107
171	Kab. Indramayu	1.108.934.367	1.108.934.367
172	Kab. Karawang	12.196.651.588	12.196.651.588
173	Kab. Kuningan	3.277.186.787	3.277.186.787
174	Kab. Majalengka	8.210.334.415	8.210.334.415
175	Kab. Purwakarta	2.865.237.556	1.967.291.768
176	Kab. Subang	2.623.578.750	2.623.578.750
177	Kab. Sukabumi	3.091.371.895	3.091.371.895
178	Kab. Sumedang	9.499.352.859	9.499.352.859
179	Kab. Tasikmalaya	2.868.854.206	2.868.854.206
180	Kab. Bandung Barat	2.381.459.003	1.636.211.551
181	Kota Bandung	2.707.834.715	2.707.834.715
182	Kota Bekasi	2.223.033.499	1.528.685.491
183	Kota Bogor	2.060.545.988	1.417.097.426
184	Kota Cirebon	2.764.567.128	2.764.567.128
185	Kota Depok	2.706.910.937	2.706.910.937
186	Kota Sukabumi	2.539.568.617	2.539.568.617
187	Kota Cimahi	2.218.063.721	1.523.715.713
188	Kota Tasikmalaya	2.803.708.681	2.803.708.681
189	Kota Banjar	2.623.212.917	1.802.928.013
190	Provinsi Banten	-	-
191	Kab. Lebak	-	-
192	Kab. Pandeglang	-	-
193	Kab. Serang	-	-
194	Kab. Tangerang	-	-
195	Kota Cilegon	-	-

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
196	Kota Tangerang	-	-
197	Kota Serang	-	-
198	Kota Tangerang Selatan	-	-
199	Provinsi Jawa Tengah	131.279.985.308	131.279.985.308
200	Kab. Banjarnegara	4.507.352.327	4.507.352.327
201	Kab. Banyumas	4.071.027.750	4.071.027.750
202	Kab. Batang	5.481.002.875	5.481.002.875
203	Kab. Blora	6.439.773.711	6.439.773.711
204	Kab. Boyolali	9.638.880.677	9.638.880.677
205	Kab. Brebes	4.015.907.617	4.015.907.617
206	Kab. Cilacap	4.050.927.925	4.050.927.925
207	Kab. Demak	9.784.870.848	9.784.870.848
208	Kab. Grobogan	6.059.023.689	6.059.023.689
209	Kab. Jepara	10.866.882.760	10.866.882.760
210	Kab. Karanganyar	12.432.232.547	12.432.232.547
211	Kab. Kebumen	6.079.634.061	6.079.634.061
212	Kab. Kendal	25.479.865.908	25.479.865.908
213	Kab. Klaten	11.784.544.263	11.784.544.263
214	Kab. Kudus	52.579.441.278	52.579.441.278
215	Kab. Magelang	10.085.564.726	10.085.564.726
216	Kab. Pati	11.844.259.170	11.844.259.170
217	Kab. Pekalongan	4.001.753.976	4.001.753.976
218	Kab. Pemalang	4.148.095.257	4.148.095.257
219	Kab. Purbalingga	4.179.594.505	4.179.594.505
220	Kab. Purworejo	4.615.958.666	4.615.958.666
221	Kab. Rembang	4.187.366.982	4.187.366.982
222	Kab. Semarang	6.083.563.460	6.083.563.460
223	Kab. Sragen	4.253.596.053	4.253.596.053
224	Kab. Sukoharjo	4.861.081.951	4.861.081.951
225	Kab. Tegal	6.586.617.997	6.586.617.997
226	Kab. Temanggung	19.050.563.680	19.050.563.680
227	Kab. Wonogiri	4.299.898.753	4.299.898.753
228	Kab. Wonosobo	7.248.659.123	7.248.659.123
229	Kota Magelang	4.026.332.110	4.026.332.110
230	Kota Pekalongan	7.648.545.333	7.648.545.333
231	Kota Salatiga	10.915.325.741	10.915.325.741
232	Kota Semarang	6.668.686.768	6.668.686.768
233	Kota Surakarta	4.337.810.039	4.337.810.039
234	Kota Tegal	4.005.323.176	4.005.323.176
235	Provinsi DI Yogyakarta	5.738.583.793	5.738.583.793

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
236	Kab. Bantul	3.825.722.528	3.825.722.528
237	Kab. Gunung Kidul	1.912.861.264	1.912.861.264
238	Kab. Kulon Progo	2.869.291.896	2.869.291.896
239	Kab. Sleman	2.678.005.769	2.678.005.769
240	Kota Yogyakarta	2.104.147.390	2.104.147.390
241	Provinsi Jawa Timur	253.088.916.030	253.088.916.030
242	Kab. Bangkalan	7.309.728.459	7.309.728.459
243	Kab. Banyuwangi	7.951.117.766	7.951.117.766
244	Kab. Blitar	9.789.459.387	9.789.459.387
245	Kab. Bojonegoro	23.001.012.504	23.001.012.504
246	Kab. Bondowoso	13.305.608.923	13.305.608.923
247	Kab. Gresik	7.308.890.695	7.308.890.695
248	Kab. Jember	17.404.020.142	17.404.020.142
249	Kab. Jombang	13.349.489.264	13.349.489.264
250	Kab. Kediri	28.374.830.649	28.374.830.649
251	Kab. Lamongan	12.851.207.302	12.851.207.302
252	Kab. Lumajang	8.986.138.746	8.986.138.746
253	Kab. Madiun	7.937.327.275	7.937.327.275
254	Kab. Magetan	7.592.368.794	7.592.368.794
255	Kab. Malang	36.972.176.254	36.972.176.254
256	Kab. Mojokerto	9.325.557.961	9.325.557.961
257	Kab. Nganjuk	12.173.431.740	12.173.431.740
258	Kab. Ngawi	10.608.705.243	10.608.705.243
259	Kab. Pacitan	7.924.446.745	7.924.446.745
260	Kab. Pamekasan	31.908.564.763	31.908.564.763
261	Kab. Pasuruan	47.309.142.509	47.309.142.509
262	Kab. Ponorogo	7.867.892.962	7.867.892.962
263	Kab. Probolinggo	23.505.083.618	23.505.083.618
264	Kab. Sampang	9.995.482.397	9.995.482.397
265	Kab. Sidoarjo	16.616.267.262	16.616.267.262
266	Kab. Situbondo	8.386.393.104	8.386.393.104
267	Kab. Sumenep	21.679.939.006	21.679.939.006
268	Kab. Trenggalek	8.790.742.612	8.790.742.612
269	Kab. Tuban	9.153.952.196	9.153.952.196
270	Kab. Tulungagung	16.928.960.181	16.928.960.181
271	Kota Blitar	8.282.253.211	8.282.253.211
272	Kota Kediri	55.049.048.336	55.049.048.336
273	Kota Madiun	7.452.887.767	7.452.887.767
274	Kota Malang	24.877.405.499	24.877.405.499
275	Kota Mojokerto	7.846.812.162	7.846.812.162

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
276	Kota Pasuruan	7.179.205.008	7.179.205.008
277	Kota Probolinggo	6.882.206.180	6.882.206.180
278	Kota Surabaya	21.550.172.347	21.550.172.347
279	Kota Batu	7.112.875.084	7.112.875.084
280	Provinsi Kalimantan Barat	-	-
281	Kab. Bengkayang	-	-
282	Kab. Landak	-	-
283	Kab. Kapuas Hulu	-	-
284	Kab. Ketapang	-	-
285	Kab. Pontianak	-	-
286	Kab. Sambas	-	-
287	Kab. Sanggau	-	-
288	Kab. Sintang	-	-
289	Kota Pontianak	-	-
290	Kota Singkawang	-	-
291	Kab. Kayong Utara	-	-
292	Kab. Kubu Raya	-	-
293	Kab. Sekadau	-	-
294	Kab. Melawi	-	-
295	Provinsi Kalimantan Tengah	1.362.266.285	1.362.266.285
296	Kab. Barito Selatan	104.789.714	73.928.115
297	Kab. Barito Utara	104.789.714	104.789.714
298	Kab. Kapuas	104.789.714	73.928.115
299	Kab. Kotawaringin Barat	104.789.714	104.789.714
300	Kab. Kotawaringin Timur	104.789.714	104.789.714
301	Kota Palangkaraya	104.789.714	104.789.714
302	Kab. Barito Timur	104.789.714	73.928.115
303	Kab. Murung Raya	104.789.714	73.928.115
304	Kab. Pulang Pisau	1.816.355.048	1.816.355.048
305	Kab. Gunung Mas	104.789.714	73.928.115
306	Kab. Lamandau	104.789.714	104.789.714
307	Kab. Sukamara	104.789.714	73.928.115
308	Kab. Katingan	104.789.714	104.789.714
309	Kab. Seruyan	104.789.714	104.789.714
310	Provinsi Kalimantan Selatan	-	-
311	Kab. Banjar	-	-
312	Kab. Barito Kuala	-	-
313	Kab. Hulu Sungai Selatan	-	-
314	Kab. Hulu Sungai Tengah	-	-
315	Kab. Hulu Sungai Utara	-	-

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
316	Kab. Kotabaru	-	-
317	Kab. Tabalong	-	-
318	Kab. Tanah Laut	-	-
319	Kab. Tapin	-	-
320	Kota Banjarbaru	-	-
321	Kota Banjarmasin	-	-
322	Kab. Balangan	-	-
323	Kab. Tanah Bumbu	-	-
324	Provinsi Kalimantan Timur	-	-
325	Kab. Berau	-	-
326	Kab. Bulungan	-	-
327	Kab. Kutai Kartanegara	-	-
328	Kab. Kutai Barat	-	-
329	Kab. Kutai Timur	-	-
330	Kab. Malinau	-	-
331	Kab. Nunukan	-	-
332	Kab. Paser	-	-
333	Kota Balikpapan	-	-
334	Kota Bontang	-	-
335	Kab. Tana Tidung	-	-
336	Kota Samarinda	-	-
337	Kota Tarakan	-	-
338	Kab. Penajam Paser Utara	-	-
339	Provinsi Sulawesi Utara	-	-
340	Kab. Bolaang Mongondow	-	-
341	Kab. Minahasa	-	-
342	Kab. Sangihe	-	-
343	Kota Bitung	-	-
344	Kota Manado	-	-
345	Kab. Kepulauan Talaud	-	-
346	Kab. Minahasa Selatan	-	-
347	Kab. Minahasa Tenggara	-	-
348	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	-	-
349	Kota Kotamubagu	-	-
350	Kab. Bolaang Mongondow Timur	-	-
351	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	-	-
352	Kota Tomohon	-	-
353	Kab. Minahasa Utara	-	-
354	Kab. Bolaang Mongondow Utara	-	-
355	Provinsi Gorontalo	-	-

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
356	Kab. Boalemo	-	-
357	Kab. Gorontalo	-	-
358	Kota Gorontalo	-	-
359	Kab. Pohuwato	-	-
360	Kab. Gorontalo Utara	-	-
361	Kab. Bone Bolango	-	-
362	Provinsi Sulawesi Tengah	976.776.136	976.776.136
363	Kab. Banggai	122.097.017	122.097.017
364	Kab. Banggai Kepulauan	122.097.017	122.097.017
365	Kab. Buol	434.122.727	434.122.727
366	Kab. Toli-Toli	434.122.727	434.122.727
367	Kab. Donggala	122.097.017	122.097.017
368	Kab. Morowali	122.097.017	122.097.017
369	Kab. Poso	122.097.017	122.097.017
370	Kota Palu	434.122.727	434.122.727
371	Kab. Parigi Moutong	122.097.017	122.097.017
372	Kab. Sigi	122.097.017	122.097.017
373	Kab. Tojo Una Una	122.097.017	122.097.017
374	Provinsi Sulawesi Selatan	3.600.637.372	3.600.637.372
375	Kab. Bantaeng	159.176.945	159.176.945
376	Kab. Barru	163.043.568	163.043.568
377	Kab. Bone	907.042.345	907.042.345
378	Kab. Bulukumba	232.718.714	232.718.714
379	Kab. Enrekang	156.298.835	156.298.835
380	Kab. Gowa	150.026.557	150.026.557
381	Kab. Jeneponto	150.026.557	150.026.557
382	Kab. Luwu	151.281.012	151.281.012
383	Kab. Luwu Utara	150.026.557	150.026.557
384	Kab. Maros	150.026.557	150.026.557
385	Kab. Pangkajene Kepulauan	151.335.898	151.335.898
386	Kab. Pinrang	150.026.557	150.026.557
387	Kab. Selayar	150.026.557	150.026.557
388	Kab. Sidenreng Rappang	150.026.557	150.026.557
389	Kab. Sinjai	991.691.287	991.691.287
390	Kab. Soppeng	3.195.451.890	3.195.451.890
391	Kab. Takalar	150.026.557	150.026.557
392	Kab. Tana Toraja	163.323.788	163.323.788
393	Kab. Wajo	168.273.376	168.273.376
394	Kota Pare-pare	150.026.557	150.026.557
395	Kab. Toraja Utara	151.304.533	151.304.533

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
396	Kota Makassar	160.252.875	160.252.875
397	Kota Palopo	150.026.557	150.026.557
398	Kab. Luwu Timur	150.026.557	103.756.672
399	Provinsi Sulawesi Barat	-	-
400	Kab. Majene	-	-
401	Kab. Mamuju	-	-
402	Kab. Polewali Mandar	-	-
403	Kab. Mamasa	-	-
404	Kab. Mamuju Utara	-	-
405	Provinsi Sulawesi Tenggara	-	-
406	Kab. Buton	-	-
407	Kab. Konawe	-	-
408	Kab. Kolaka	-	-
409	Kab. Muna	-	-
410	Kota Kendari	-	-
411	Kota Bau-bau	-	-
412	Kab. Konawe Selatan	-	-
413	Kab. Bombana	-	-
414	Kab. Konawe Utara	-	-
415	Kab. Buton Utara	-	-
416	Kab. Wakatobi	-	-
417	Kab. Kolaka Utara	-	-
418	Provinsi Bali	3.337.631.344	3.337.631.344
419	Kab. Badung	370.847.927	370.847.927
420	Kab. Bangli	397.938.956	397.938.956
421	Kab. Buleleng	4.371.229.480	4.371.229.480
422	Kab. Gianyar	778.419.873	778.419.873
423	Kab. Jembrana	370.847.927	370.847.927
424	Kab. Karangasem	385.978.522	385.978.522
425	Kab. Klungkung	370.847.927	370.847.927
426	Kab. Tabanan	370.847.927	370.847.927
427	Kota Denpasar	370.847.927	370.847.927
428	Provinsi Nusa Tenggara Barat	57.560.328.110	57.560.328.110
429	Kab. Bima	8.457.952.275	8.457.952.275
430	Kab. Dompu	5.146.007.237	5.146.007.237
431	Kab. Lombok Barat	13.642.023.415	13.642.023.415
432	Kab. Lombok Tengah	25.231.196.306	25.231.196.306
433	Kab. Lombok Timur	51.515.907.840	51.515.907.840
434	Kab. Sumbawa	8.966.273.818	8.966.273.818
435	Kota Mataram	6.297.805.637	6.297.805.637

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
436	Kab. Lombok Utara	6.110.117.339	6.110.117.339
437	Kota Bima	4.286.790.096	4.286.790.096
438	Kab. Sumbawa Barat	4.653.358.285	4.653.358.285
439	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1.541.166.954	1.541.166.954
440	Kab. Alor	88.180.188	60.728.519
441	Kab. Belu	276.375.543	276.375.543
442	Kab. Ende	1.077.457.298	736.375.370
443	Kab. Flores Timur	73.540.329	50.729.930
444	Kab. Kupang	114.161.560	78.473.023
445	Kab. Lembata	86.090.457	59.301.295
446	Kab. Manggarai	88.637.103	61.040.578
447	Kab. Ngada	73.540.329	50.729.930
448	Kab. Sikka	210.927.235	156.188.387
449	Kab. Sumba Barat	219.426.138	150.365.599
450	Kab. Sumba Timur	94.451.100	65.011.365
451	Kab. Timor Tengah Selatan	83.088.965	57.251.364
452	Kab. Timor Tengah Utara	73.540.329	50.729.930
453	Kota Kupang	73.540.329	50.729.930
454	Kab. Rote Ndao	73.540.329	50.729.930
455	Kab. Nagekeo	128.238.347	88.087.050
456	Kab. Sumba Tengah	73.540.329	50.729.930
457	Kab. Sumba Barat Daya	399.434.710	273.306.103
458	Kab. Manggarai Timur	73.540.329	50.729.930
459	Kab. Sabu Raijua	81.315.769	56.040.324
460	Kab. Manggarai Barat	133.489.495	133.489.495
461	Provinsi Maluku	-	-
462	Kab. Maluku Tenggara Barat	-	-
463	Kab. Maluku Tengah	-	-
464	Kab. Maluku Tenggara	-	-
465	Kab. Pulau Buru	-	-
466	Kota Ambon	-	-
467	Kab. Seram Bagian Barat	-	-
468	Kab. Seram Bagian Timur	-	-
469	Kab. Maluku Barat Daya	-	-

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
470	Kab. Buru Selatan	-	-
471	Kab. Kepulauan Aru	-	-
472	Kota Tual	-	-
473	Provinsi Maluku Utara	-	-
474	Kab. Halmahera Tengah	-	-
475	Kab. Halmahera Barat	-	-
476	Kota Ternate	-	-
477	Kab. Halmahera Timur	-	-
478	Kota Tidore Kepulauan	-	-
479	Kab. Kepulauan Sula	-	-
480	Kab. Pulau Morotai	-	-
481	Kab. Halmahera Selatan	-	-
482	Kab. Halmahera Utara	-	-
483	Kab. Yalimo	-	-
484	Kab. Lanny Jaya	-	-
485	Provinsi Papua	-	-
486	Kab. Biak Numfor	-	-
487	Kab. Jayapura	-	-
488	Kab. Jayawijaya	-	-
489	Kab. Merauke	-	-
490	Kab. Mimika	-	-
491	Kab. Nabire	-	-
492	Kab. Paniai	-	-
493	Kab. Puncak Jaya	-	-
494	Kab. Kepulauan Yapen	-	-
495	Kota Jayapura	-	-
496	Kab. Sarmi	-	-
497	Kab. Keerom	-	-
498	Kab. Yahukimo	-	-
499	Kab. Pegunungan Bintang	-	-
500	Kab. Tolikara	-	-
501	Kab. Boven Digoel	-	-
502	Kab. Mappi	-	-
503	Kab. Asmat	-	-
504	Kab. Waropen	-	-
505	Kab. Mamberamo Raya	-	-
506	Kab. Mamberamo Tengah	-	-
507	Kab. Nduga	-	-
508	Kab. Dogiyai	-	-
509	Kab. Intan Jaya	-	-

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
510	Kab. Puncak	-	-
511	Kab. Deiyai	-	-
512	Kab. Supiori	-	-
513	Provinsi Papua Barat	-	-
514	Kab. Sorong	-	-
515	Kab. Manokwari	-	-
516	Kab. Fak Fak	-	-
517	Kota Sorong	-	-
518	Kab. Sorong Selatan	-	-
519	Kab. Raja Ampat	-	-
520	Kab. Teluk Bintuni	-	-
521	Kab. Teluk Wondama	-	-
522	Kab. Tambrauw	-	-
523	Kab. Maybrat	-	-
524	Kab. Kaimana	-	-
	Dana Cadangan	-	-
JUMLAH		1.735.723.716.232	1.722.781.272.658

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

DAFTAR 3 E

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
AUDITED TAHUN ANGGARAN 2012
(Dalam Rupiah)**

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	911.080.707.000	911.080.707.000	50.413.710.000	50.413.710.000
2	Kab. Aceh Barat	440.584.427.000	440.584.427.000	38.695.880.000	38.695.880.000
3	Kab. Aceh Besar	549.069.553.000	549.069.553.000	52.573.120.000	52.573.120.000
4	Kab. Aceh Selatan	465.287.229.000	465.287.229.000	48.698.160.000	48.698.160.000
5	Kab. Aceh Singkil	298.293.644.000	298.293.644.000	37.510.770.000	37.510.770.000
6	Kab. Aceh Tengah	449.223.044.000	449.223.044.000	46.747.210.000	46.747.210.000
7	Kab. Aceh Tenggara	415.200.033.000	415.200.033.000	35.997.420.000	35.997.420.000
8	Kab. Aceh Timur	541.297.184.000	541.297.184.000	62.738.870.000	62.738.870.000
9	Kab. Aceh Utara	585.406.402.000	585.406.402.000	28.543.240.000	28.543.240.000
10	Kab. Bireun	612.599.162.000	612.599.162.000	51.102.390.000	51.102.390.000
11	Kab. Pidie	598.795.484.000	598.795.484.000	51.134.130.000	51.134.130.000
12	Kab. Simeulue	309.799.056.000	309.799.056.000	42.234.930.000	42.234.930.000
13	Kota Banda Aceh	491.593.554.000	491.593.554.000	26.893.570.000	26.893.570.000
14	Kota Sabang	273.672.391.000	273.672.391.000	17.773.910.000	17.773.910.000
15	Kota Langsa	337.337.339.000	337.337.339.000	23.604.620.000	23.604.620.000
16	Kota Lhokseumawe	394.259.998.000	394.259.998.000	26.014.670.000	26.014.670.000
17	Kab. Nagan Raya	387.243.580.000	387.243.580.000	27.478.100.000	27.478.100.000
18	Kab. Aceh Jaya	303.438.672.000	303.438.672.000	30.218.660.000	30.218.660.000
19	Kab. Pidie Jaya	307.809.690.000	307.809.690.000	35.525.310.000	35.525.310.000
20	Kab. Aceh Barat Daya	327.572.527.000	327.572.527.000	46.517.310.000	46.517.310.000
21	Kab. Gayo Lues	329.446.951.000	329.446.951.000	44.339.270.000	44.339.270.000
22	Kab. Aceh Tamiang	370.319.962.000	370.319.962.000	42.395.070.000	42.395.070.000
23	Kab. Bener Meriah	332.475.834.000	332.475.834.000	33.009.850.000	33.009.850.000
24	Kota Subulussalam	225.256.530.000	225.256.530.000	31.856.380.000	31.856.380.000
25	Provinsi Sumatera Utara	1.103.389.237.000	1.103.389.237.000	41.628.390.000	41.628.390.000
26	Kab. Asahan	628.974.980.000	628.974.980.000	65.206.660.000	65.206.660.000
27	Kab. Dairi	451.176.116.000	451.176.116.000	43.357.200.000	43.357.200.000
28	Kab. Deli Serdang	1.100.013.616.000	1.100.013.616.000	65.478.160.000	65.478.160.000
29	Kab. Tanah Karo	546.294.802.000	546.294.802.000	38.426.590.000	38.426.590.000
30	Kab. Labuhan Batu	461.644.282.000	461.644.282.000	75.496.690.000	75.496.690.000
31	Kab. Langkat	847.503.037.000	847.503.037.000	56.056.730.000	56.056.730.000
32	Kab. Mandailing Natal	541.106.638.000	541.106.638.000	41.555.830.000	41.555.830.000
33	Kab. Nias	289.608.144.000	289.608.144.000	48.137.260.000	48.137.260.000
34	Kab. Simalungun	865.405.855.000	865.405.855.000	90.868.630.000	90.868.630.000
35	Kab. Tapanuli Selatan	454.322.254.000	454.322.254.000	53.366.970.000	53.366.970.000
36	Kab. Tapanuli Tengah	422.611.672.000	422.611.672.000	48.644.240.000	48.644.240.000
37	Kab. Tapanuli Utara	487.345.532.000	487.345.532.000	50.220.620.000	50.220.620.000
38	Kab. Toba Samosir	387.623.169.000	387.623.169.000	52.119.770.000	52.119.770.000
39	Kota Binjai	416.965.216.000	416.965.216.000	23.777.970.000	23.777.970.000
40	Kota Medan	1.153.789.320.000	1.153.789.320.000	66.298.270.000	66.298.270.000
41	Kota Pematang Siantar	429.632.177.000	429.632.177.000	28.447.080.000	28.447.080.000
42	Kota Sibolga	292.873.107.000	292.873.107.000	19.290.260.000	19.290.260.000
43	Kota Tanjung Balai	313.729.707.000	313.729.707.000	17.955.740.000	17.955.740.000
44	Kab. Batu Bara	452.227.480.000	452.227.480.000	44.148.640.000	44.148.640.000
45	Kab. Labuhan Batu Utara	400.601.985.000	400.601.985.000	42.495.140.000	42.495.140.000
46	Kab. Labuhan Batu Selatan	334.512.284.000	334.512.284.000	34.218.000.000	25.663.500.000

DAFTAR LRA -311 -

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
47	Kab. Padang Lawas Utara	348.056.278.000	348.056.278.000	36.733.240.000	36.733.240.000
48	Kab. Padang Lawas	331.754.392.000	331.754.392.000	42.520.850.000	42.520.850.000
49	Kab. Nias Utara	267.283.187.000	267.283.187.000	36.405.150.000	36.405.150.000
50	Kab. Nias Barat	227.860.916.000	227.860.916.000	63.754.580.000	63.754.580.000
51	Kota Tebing Tinggi	307.635.689.000	307.635.689.000	25.323.480.000	25.323.480.000
52	Kota Padang Sidempuan	364.923.284.000	364.923.284.000	23.986.600.000	23.986.600.000
53	Kab. Pakpak Bharat	232.990.274.000	232.990.274.000	25.460.900.000	25.460.900.000
54	Kab. Nias Selatan	378.605.613.000	378.605.613.000	64.679.170.000	64.679.170.000
55	Kab. Humbang Hasundutan	376.847.178.000	376.847.178.000	28.968.140.000	28.968.140.000
56	Kab. Serdang Bedagai	554.245.457.000	554.245.457.000	64.704.900.000	64.704.900.000
57	Kab. Samosir	331.412.601.000	331.412.601.000	37.126.130.000	27.844.598.000
58	Kota Gunung Sitoli	305.726.000.000	305.726.000.000	56.898.180.000	56.898.180.000
59	Provinsi Sumatera Barat	918.560.365.000	918.560.365.000	32.500.720.000	32.500.720.000
60	Kab. Limapuluh Kota	550.759.741.000	550.759.741.000	44.415.300.000	44.415.300.000
61	Kab. Agam	595.713.049.000	595.713.049.000	74.202.750.000	74.202.750.000
62	Kab. Kepulauan Mentawai	371.174.681.000	371.174.681.000	35.584.400.000	26.688.900.000
63	Kab. Padang Pariaman	558.234.576.000	558.234.576.000	63.917.200.000	63.917.200.000
64	Kab. Pasaman	426.264.647.000	426.264.647.000	43.939.030.000	43.939.030.000
65	Kab. Pesisir Selatan	609.139.244.000	609.139.244.000	70.443.330.000	70.443.330.000
66	Kab. Sijunjung	389.425.714.000	389.425.714.000	42.992.150.000	42.992.150.000
67	Kab. Solok	521.759.479.000	521.759.479.000	54.762.570.000	54.762.570.000
68	Kab. Tanah Datar	520.092.334.000	520.092.334.000	47.980.030.000	47.980.030.000
69	Kota Bukit Tinggi	326.224.306.000	326.224.306.000	20.577.270.000	15.432.953.000
70	Kota Padang Panjang	269.610.492.000	269.610.492.000	18.629.610.000	18.629.610.000
71	Kota Padang	871.875.666.000	871.875.666.000	64.122.760.000	64.122.760.000
72	Kota Payakumbuh	325.023.247.000	325.023.247.000	25.559.910.000	25.559.910.000
73	Kota Sawahlunto	268.961.519.000	268.961.519.000	20.236.910.000	20.236.910.000
74	Kota Solok	280.495.627.000	280.495.627.000	23.908.660.000	23.908.660.000
75	Kota Pariaman	299.255.003.000	299.255.003.000	27.022.440.000	27.022.440.000
76	Kab. Pasaman Barat	457.694.684.000	457.694.684.000	52.908.300.000	52.908.300.000
77	Kab. Dharmasraya	351.295.616.000	351.295.616.000	36.555.460.000	36.555.460.000
78	Kab. Solok Selatan	315.024.093.000	315.024.093.000	34.030.910.000	34.030.910.000
79	Provinsi Riau	489.179.914.000	489.179.914.000	62.491.370.000	62.491.370.000
80	Kab. Bengkalis	84.768.625.000	84.768.625.000	40.874.260.000	40.874.260.000
81	Kab. Indragiri Hilir	651.878.979.000	651.878.979.000	73.370.340.000	55.027.755.000
82	Kab. Indragiri Hulu	487.476.121.000	487.476.121.000	46.461.410.000	46.461.410.000
83	Kab. Kampar	569.782.157.000	569.782.157.000	29.224.290.000	29.224.290.000
84	Kab. Kuantan Singingi	496.776.188.000	496.776.188.000	27.412.740.000	27.412.740.000
85	Kab. Pelalawan	421.047.701.000	421.047.701.000	26.777.240.000	26.777.240.000
86	Kab. Rokan Hilir	282.513.158.000	282.513.158.000	30.451.230.000	30.451.230.000
87	Kab. Rokan Hulu	442.557.164.000	442.557.164.000	17.192.010.000	17.192.010.000
88	Kab. Siak	167.312.486.000	167.312.486.000	15.713.630.000	15.713.630.000
89	Kota Dumai	299.081.335.000	299.081.335.000	-	-
90	Kota Pekanbaru	622.184.684.000	622.184.684.000	23.933.910.000	23.933.910.000
91	Kab. Kepulauan Meranti	302.110.630.000	302.110.630.000	4.891.110.000	4.891.110.000
92	Provinsi Kepulauan Riau	460.857.807.000	460.857.807.000	23.165.600.000	23.165.600.000
93	Kab. Bintan	232.884.448.000	232.884.448.000	15.782.440.000	15.782.440.000
94	Kab. Natuna	85.322.702.000	85.322.702.000	35.584.610.000	35.584.610.000
95	Kab. Karimun	246.833.306.000	246.833.306.000	4.352.100.000	4.352.100.000
96	Kota Batam	429.672.271.000	429.672.271.000	46.462.200.000	46.462.200.000
97	Kab. Kepulauan Anambas	169.458.624.000	169.458.624.000	29.241.460.000	21.931.095.000
98	Kota Tanjung Pinang	292.026.588.000	292.026.588.000	1.444.580.000	1.444.580.000
99	Kab. Lingga	241.165.424.000	241.165.424.000	18.201.460.000	18.201.460.000
100	Provinsi Jambi	731.952.242.000	731.952.242.000	32.673.320.000	32.673.320.000

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
101	Kab. Batanghari	427.893.466.000	427.893.466.000	32.010.910.000	32.010.910.000
102	Kab. Bungo	456.372.466.000	456.372.466.000	40.226.240.000	40.226.240.000
103	Kab. Kerinci	442.627.808.000	442.627.808.000	56.523.520.000	56.523.520.000
104	Kab. Merangin	509.653.986.000	509.653.986.000	46.655.450.000	46.655.450.000
105	Kab. Muaro Jambi	458.269.264.000	458.269.264.000	57.738.360.000	57.738.360.000
106	Kab. Sarolangun	419.840.650.000	419.840.650.000	51.688.990.000	51.688.990.000
107	Kab. Tanjung Jabung Barat	329.458.507.000	329.458.507.000	3.750.500.000	3.750.500.000
108	Kab. Tanjung Jabung Timur	356.323.443.000	356.323.443.000	18.469.260.000	18.469.260.000
109	Kab. Tebo	410.846.427.000	410.846.427.000	34.161.960.000	34.161.960.000
110	Kota Jambi	543.578.287.000	543.578.287.000	40.010.140.000	40.010.140.000
111	Kota Sungai Penuh	295.529.443.000	295.529.443.000	24.999.780.000	18.749.835.000
112	Provinsi Sumatera Selatan	716.153.261.000	716.153.261.000	45.401.430.000	45.401.430.000
113	Kab. Lahat	516.937.290.000	516.937.290.000	58.371.130.000	58.371.130.000
114	Kab. Musi Banyuasin	327.550.951.000	327.550.951.000	37.402.280.000	37.402.280.000
115	Kab. Musi Rawas	537.624.294.000	537.624.294.000	59.287.760.000	59.287.760.000
116	Kab. Muara Enim	580.314.469.000	580.314.469.000	45.218.580.000	45.218.580.000
117	Kab. Ogan Komering Ilir	743.452.601.000	743.452.601.000	82.721.570.000	82.721.570.000
118	Kab. Ogan Komering Ulu	456.823.059.000	456.823.059.000	15.199.060.000	15.199.060.000
119	Kota Palembang	934.084.157.000	934.084.157.000	36.498.530.000	36.498.530.000
120	Kota Pagar Alam	268.911.890.000	268.911.890.000	25.474.480.000	25.474.480.000
121	Kota Lubuk Linggau	328.281.811.000	328.281.811.000	31.059.990.000	31.059.990.000
122	Kota Prabumulih	299.641.875.000	299.641.875.000	20.886.170.000	20.886.170.000
123	Kab. Empat Lawang	274.671.065.000	274.671.065.000	42.325.010.000	42.325.010.000
124	Kab. Banyuasin	651.357.692.000	651.357.692.000	97.453.050.000	97.453.050.000
125	Kab. Ogan Ilir	446.518.667.000	446.518.667.000	49.789.140.000	49.789.140.000
126	Kab. OKU Timur	541.448.924.000	541.448.924.000	48.171.470.000	48.171.470.000
127	Kab. OKU Selatan	397.058.100.000	397.058.100.000	41.817.590.000	41.817.590.000
128	Provinsi Bangka Belitung	634.087.815.000	634.087.815.000	25.135.650.000	25.135.650.000
129	Kab. Bangka	403.295.027.000	403.295.027.000	52.578.660.000	52.578.660.000
130	Kab. Belitung	341.680.009.000	341.680.009.000	39.066.180.000	39.066.180.000
131	Kota Pangkal Pinang	336.693.583.000	336.693.583.000	26.987.120.000	20.240.340.000
132	Kab. Bangka Selatan	330.111.851.000	330.111.851.000	37.588.990.000	37.588.990.000
133	Kab. Bangka Tengah	303.044.784.000	303.044.784.000	35.892.070.000	35.892.070.000
134	Kab. Bangka Barat	322.887.366.000	322.887.366.000	32.131.060.000	32.131.060.000
135	Kab. Belitung Timur	319.571.051.000	319.571.051.000	33.870.360.000	33.870.360.000
136	Provinsi Bengkulu	775.311.166.000	775.311.166.000	28.620.610.000	28.620.610.000
137	Kab. Bengkulu Selatan	396.665.102.000	396.665.102.000	44.194.530.000	44.194.530.000
138	Kab. Bengkulu Utara	448.065.642.000	448.065.642.000	42.453.810.000	42.453.810.000
139	Kab. Rejang Lebong	448.469.185.000	448.469.185.000	48.953.470.000	48.953.470.000
140	Kota Bengkulu	475.745.500.000	475.745.500.000	32.144.200.000	32.144.200.000
141	Kab. Kaur	301.076.661.000	301.076.661.000	38.412.510.000	38.412.510.000
142	Kab. Seluma	349.783.377.000	349.783.377.000	50.280.530.000	50.280.530.000
143	Kab. Mukomuko	338.203.452.000	338.203.452.000	39.952.210.000	39.952.210.000
144	Kab. Lebong	293.909.631.000	293.909.631.000	37.743.780.000	37.743.780.000
145	Kab. Bengkulu Tengah	288.875.390.000	288.875.390.000	36.763.590.000	36.763.590.000
146	Kab. Kepahiang	317.102.587.000	317.102.587.000	29.761.670.000	29.761.670.000
147	Provinsi Lampung	939.139.287.000	939.139.287.000	31.087.640.000	31.087.640.000
148	Kab. Lampung Barat	486.998.706.000	486.998.706.000	64.868.770.000	64.868.770.000
149	Kab. Lampung Selatan	686.434.133.000	686.434.133.000	115.550.690.000	115.550.690.000
150	Kab. Lampung Tengah	954.226.843.000	954.226.843.000	126.573.510.000	126.573.510.000
151	Kab. Lampung Utara	661.427.439.000	661.427.439.000	80.961.800.000	80.961.800.000
152	Kab. Lampung Timur	763.748.797.000	763.748.797.000	73.476.890.000	73.476.890.000
153	Kab. Tanggamus	530.838.460.000	530.838.460.000	91.286.390.000	91.286.390.000
154	Kab. Tulang Bawang	412.608.587.000	412.608.587.000	66.123.980.000	66.123.980.000

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
155	Kab. Way Kanan	450.615.498.000	450.615.498.000	69.624.180.000	69.624.180.000
156	Kab. Pasawaran	476.870.845.000	476.870.845.000	57.108.620.000	57.108.620.000
157	Kab. Pringsewu	443.529.040.000	443.529.040.000	91.917.180.000	91.917.180.000
158	Kab. Mesuji	294.053.217.000	294.053.217.000	56.212.090.000	56.212.090.000
159	Kab. Tulang Bawang Barat	323.773.746.000	323.773.746.000	68.267.740.000	68.267.740.000
160	Kota Bandar Lampung	762.664.927.000	762.664.927.000	50.491.130.000	50.491.130.000
161	Kota Metro	330.158.143.000	330.158.143.000	26.599.220.000	26.599.220.000
162	Provinsi DKI Jakarta	275.327.857.000	275.327.857.000	-	-
163	Provinsi Jawa Barat	1.269.960.760.000	1.269.960.760.000	48.356.280.000	48.356.280.000
164	Kab. Bandung	1.518.230.253.000	1.518.230.253.000	167.510.030.000	167.510.030.000
165	Kab. Bekasi	962.996.327.000	962.996.327.000	43.257.860.000	43.257.860.000
166	Kab. Bogor	1.672.614.142.000	1.672.614.142.000	158.027.770.000	158.027.770.000
167	Kab. Ciamis	1.165.043.374.000	1.165.043.374.000	89.651.290.000	89.651.290.000
168	Kab. Cianjur	1.168.372.143.000	1.168.372.143.000	148.885.720.000	148.885.720.000
169	Kab. Cirebon	1.135.758.785.000	1.135.758.785.000	86.034.470.000	86.034.470.000
170	Kab. Garut	1.385.441.117.000	1.385.441.117.000	142.605.490.000	142.605.490.000
171	Kab. Indramayu	1.017.639.195.000	1.017.639.195.000	97.712.970.000	97.712.970.000
172	Kab. Karawang	1.004.178.461.000	1.004.178.461.000	76.834.550.000	76.834.550.000
173	Kab. Kuningan	892.633.054.000	892.633.054.000	68.155.840.000	68.155.840.000
174	Kab. Majalengka	885.922.026.000	885.922.026.000	129.748.250.000	129.748.250.000
175	Kab. Purwakarta	635.154.048.000	635.154.048.000	44.084.300.000	44.084.300.000
176	Kab. Subang	917.181.913.000	917.181.913.000	57.339.020.000	57.339.020.000
177	Kab. Sukabumi	1.193.642.550.000	1.193.642.550.000	128.266.790.000	128.266.790.000
178	Kab. Sumedang	923.623.866.000	923.623.866.000	77.202.460.000	77.202.460.000
179	Kab. Tasikmalaya	1.083.660.482.000	1.083.660.482.000	106.110.250.000	106.110.250.000
180	Kab. Bandung Barat	804.973.413.000	804.973.413.000	72.168.590.000	72.168.590.000
181	Kota Bandung	1.323.681.042.000	1.323.681.042.000	37.047.460.000	37.047.460.000
182	Kota Bekasi	935.205.053.000	935.205.053.000	32.974.450.000	24.730.838.000
183	Kota Bogor	603.531.550.000	603.531.550.000	15.235.050.000	4.570.515.000
184	Kota Cirebon	487.039.012.000	487.039.012.000	20.172.180.000	20.172.180.000
185	Kota Depok	674.052.719.000	674.052.719.000	52.061.510.000	52.061.510.000
186	Kota Sukabumi	401.102.986.000	401.102.986.000	18.138.860.000	18.138.860.000
187	Kota Cimahi	440.860.307.000	440.860.307.000	26.916.070.000	26.916.070.000
188	Kota Tasikmalaya	582.124.220.000	582.124.220.000	30.936.990.000	30.936.990.000
189	Kota Banjar	281.851.254.000	281.851.254.000	16.460.070.000	16.460.070.000
190	Provinsi Banten	530.833.378.000	530.833.378.000	29.687.200.000	29.687.200.000
191	Kab. Lebak	804.122.393.000	804.122.393.000	66.461.250.000	66.461.250.000
192	Kab. Pandeglang	880.790.323.000	880.790.323.000	104.862.670.000	104.862.670.000
193	Kab. Serang	785.474.329.000	785.474.329.000	64.713.250.000	64.713.250.000
194	Kab. Tangerang	1.016.902.729.000	1.016.902.729.000	84.826.250.000	84.826.250.000
195	Kota Cilegon	405.584.438.000	405.584.438.000	328.820.000	328.820.000
196	Kota Tangerang	747.696.465.000	747.696.465.000	6.850.760.000	6.850.760.000
197	Kota Serang	442.554.608.000	442.554.608.000	49.457.830.000	49.457.830.000
198	Kota Tangerang Selatan	473.309.757.000	473.309.757.000	46.893.010.000	46.893.010.000
199	Provinsi Jawa Tengah	1.516.892.951.000	1.516.892.951.000	50.630.450.000	50.630.450.000
200	Kab. Banjarnegara	681.395.924.000	681.395.924.000	67.730.850.000	67.730.850.000
201	Kab. Banyumas	991.945.010.000	991.945.010.000	118.901.780.000	118.901.780.000
202	Kab. Batang	577.238.039.000	577.238.039.000	54.673.900.000	54.673.900.000
203	Kab. Blora	673.180.530.000	673.180.530.000	53.989.760.000	53.989.760.000
204	Kab. Boyolali	780.301.856.000	780.301.856.000	60.360.690.000	60.360.690.000
205	Kab. Brebes	981.051.188.000	981.051.188.000	84.451.180.000	84.451.180.000
206	Kab. Cilacap	1.057.808.013.000	1.057.808.013.000	87.652.460.000	87.652.460.000
207	Kab. Demak	658.971.337.000	658.971.337.000	81.553.310.000	81.553.310.000
208	Kab. Grobogan	812.990.740.000	812.990.740.000	97.055.020.000	97.055.020.000

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
209	Kab. Jepara	712.740.462.000	712.740.462.000	76.460.530.000	76.460.530.000
210	Kab. Karanganyar	720.918.512.000	720.918.512.000	55.514.410.000	55.514.410.000
211	Kab. Kebumen	906.222.007.000	906.222.007.000	100.103.330.000	100.103.330.000
212	Kab. Kendal	702.708.128.000	702.708.128.000	63.884.980.000	63.884.980.000
213	Kab. Klaten	967.284.829.000	967.284.829.000	74.501.530.000	74.501.530.000
214	Kab. Kudus	637.615.372.000	637.615.372.000	58.346.760.000	58.346.760.000
215	Kab. Magelang	816.732.604.000	816.732.604.000	103.595.180.000	103.595.180.000
216	Kab. Pati	850.377.211.000	850.377.211.000	80.449.020.000	80.449.020.000
217	Kab. Pekalongan	678.713.899.000	678.713.899.000	77.029.380.000	77.029.380.000
218	Kab. Pemalang	827.163.222.000	827.163.222.000	92.869.030.000	92.869.030.000
219	Kab. Purbalingga	640.265.476.000	640.265.476.000	75.989.640.000	75.989.640.000
220	Kab. Purworejo	711.741.839.000	711.741.839.000	69.568.400.000	69.568.400.000
221	Kab. Rembang	570.454.948.000	570.454.948.000	78.350.660.000	78.350.660.000
222	Kab. Semarang	691.271.583.000	691.271.583.000	67.737.200.000	67.737.200.000
223	Kab. Sragen	778.668.035.000	778.668.035.000	69.378.280.000	69.378.280.000
224	Kab. Sukoharjo	680.235.009.000	680.235.009.000	47.616.310.000	47.616.310.000
225	Kab. Tegal	860.568.434.000	860.568.434.000	74.555.350.000	74.555.350.000
226	Kab. Temanggung	584.158.278.000	584.158.278.000	87.303.720.000	87.303.720.000
227	Kab. Wonogiri	828.479.528.000	828.479.528.000	75.052.100.000	75.052.100.000
228	Kab. Wonosobo	597.858.484.000	597.858.484.000	55.970.270.000	55.970.270.000
229	Kota Magelang	348.498.193.000	348.498.193.000	20.667.810.000	20.667.810.000
230	Kota Pekalongan	347.390.356.000	347.390.356.000	27.126.720.000	27.126.720.000
231	Kota Salatiga	325.710.016.000	325.710.016.000	27.639.760.000	27.639.760.000
232	Kota Semarang	936.865.926.000	936.865.926.000	72.270.900.000	72.270.900.000
233	Kota Surakarta	595.222.827.000	595.222.827.000	28.972.180.000	28.972.180.000
234	Kota Tegal	334.819.085.000	334.819.085.000	30.554.770.000	30.554.770.000
235	Provinsi DI Yogyakarta	757.056.696.000	757.056.696.000	19.052.740.000	19.052.740.000
236	Kab. Bantul	768.034.584.000	768.034.584.000	63.281.450.000	63.281.450.000
237	Kab. Gunung Kidul	687.944.489.000	687.944.489.000	70.584.420.000	70.584.420.000
238	Kab. Kulon Progo	531.104.016.000	531.104.016.000	45.379.520.000	45.379.520.000
239	Kab. Sleman	795.708.767.000	795.708.767.000	52.237.390.000	52.237.390.000
240	Kota Yogyakarta	536.466.614.000	536.466.614.000	6.485.350.000	6.485.350.000
241	Provinsi Jawa Timur	1.491.561.136.000	1.491.561.136.000	52.787.680.000	52.787.680.000
242	Kab. Bangkalan	700.513.200.000	700.513.200.000	71.355.490.000	71.355.490.000
243	Kab. Banyuwangi	1.030.217.037.000	1.030.217.037.000	67.656.190.000	67.656.190.000
244	Kab. Blitar	845.117.933.000	845.117.933.000	68.085.940.000	51.064.455.000
245	Kab. Bojonegoro	785.584.826.000	785.584.826.000	68.347.170.000	68.347.170.000
246	Kab. Bondowoso	666.857.212.000	666.857.212.000	65.417.780.000	65.417.780.000
247	Kab. Gresik	711.868.321.000	711.868.321.000	82.505.080.000	82.505.080.000
248	Kab. Jember	1.279.295.764.000	1.279.295.764.000	95.364.740.000	95.364.740.000
249	Kab. Jombang	809.295.635.000	809.295.635.000	94.467.880.000	94.467.880.000
250	Kab. Kediri	925.532.895.000	925.532.895.000	102.056.870.000	102.056.870.000
251	Kab. Lamongan	832.015.926.000	832.015.926.000	70.832.240.000	70.832.240.000
252	Kab. Lumajang	736.273.179.000	736.273.179.000	48.874.360.000	48.874.360.000
253	Kab. Madiun	645.865.489.000	645.865.489.000	49.168.360.000	49.168.360.000
254	Kab. Magetan	677.454.353.000	677.454.353.000	54.252.590.000	54.252.590.000
255	Kab. Malang	1.281.612.867.000	1.281.612.867.000	118.237.360.000	118.237.360.000
256	Kab. Mojokerto	733.782.205.000	733.782.205.000	50.645.610.000	50.645.610.000
257	Kab. Nganjuk	827.298.802.000	827.298.802.000	58.366.860.000	58.366.860.000
258	Kab. Ngawi	796.833.553.000	796.833.553.000	63.804.470.000	63.804.470.000
259	Kab. Pacitan	589.829.914.000	589.829.914.000	51.724.730.000	51.724.730.000
260	Kab. Pamekasan	625.872.640.000	625.872.640.000	61.093.880.000	61.093.880.000
261	Kab. Pasuruan	876.731.942.000	876.731.942.000	66.236.310.000	66.236.310.000
262	Kab. Ponorogo	779.077.679.000	779.077.679.000	62.386.740.000	62.386.740.000

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
263	Kab. Probolinggo	761.569.639.000	761.569.639.000	76.672.760.000	76.672.760.000
264	Kab. Sampang	603.996.470.000	603.996.470.000	72.170.450.000	72.170.450.000
265	Kab. Sidoarjo	974.570.533.000	974.570.533.000	63.877.470.000	63.877.470.000
266	Kab. Situbondo	616.093.730.000	616.093.730.000	66.718.400.000	66.718.400.000
267	Kab. Sumenep	807.976.168.000	807.976.168.000	67.924.850.000	67.924.850.000
268	Kab. Trenggalek	654.342.618.000	654.342.618.000	53.829.880.000	53.829.880.000
269	Kab. Tuban	757.906.831.000	757.906.831.000	49.806.830.000	49.806.830.000
270	Kab. Tulungagung	878.221.208.000	878.221.208.000	68.674.420.000	68.674.420.000
271	Kota Blitar	315.773.358.000	315.773.358.000	17.527.970.000	17.527.970.000
272	Kota Kediri	490.371.763.000	490.371.763.000	424.100.000	424.100.000
273	Kota Madiun	413.003.782.000	413.003.782.000	20.273.450.000	20.273.450.000
274	Kota Malang	665.927.808.000	665.927.808.000	21.897.310.000	21.897.310.000
275	Kota Mojokerto	309.102.871.000	309.102.871.000	15.463.900.000	15.463.900.000
276	Kota Pasuruan	319.424.821.000	319.424.821.000	19.058.200.000	19.058.200.000
277	Kota Probolinggo	367.601.263.000	367.601.263.000	32.816.170.000	32.816.170.000
278	Kota Surabaya	1.061.625.528.000	1.061.625.528.000	53.227.560.000	53.227.560.000
279	Kota Batu	324.768.945.000	324.768.945.000	18.244.590.000	18.585.720.000
280	Provinsi Kalimantan Barat	1.023.229.807.000	1.023.229.807.000	43.913.040.000	43.913.040.000
281	Kab. Bengkayang	399.692.985.000	399.692.985.000	60.067.270.000	60.067.270.000
282	Kab. Landak	477.731.189.000	477.731.189.000	69.150.130.000	69.150.130.000
283	Kab. Kapuas Hulu	686.858.835.000	686.858.835.000	77.479.360.000	77.479.360.000
284	Kab. Ketapang	776.577.558.000	776.577.558.000	83.972.790.000	83.972.790.000
285	Kab. Pontianak	410.336.243.000	410.336.243.000	42.225.110.000	42.225.110.000
286	Kab. Sambas	622.612.006.000	622.612.006.000	89.094.070.000	89.094.070.000
287	Kab. Sanggau	589.206.205.000	589.206.205.000	88.950.480.000	88.950.480.000
288	Kab. Sintang	646.998.388.000	646.998.388.000	77.023.840.000	77.023.840.000
289	Kota Pontianak	549.629.456.000	549.629.456.000	44.753.630.000	44.753.630.000
290	Kota Singkawang	373.908.313.000	373.908.313.000	33.813.860.000	33.813.860.000
291	Kab. Kayong Utara	303.211.589.000	303.211.589.000	47.840.070.000	47.840.070.000
292	Kab. Kubu Raya	535.464.386.000	535.464.386.000	80.856.050.000	80.856.050.000
293	Kab. Sekadau	339.546.757.000	339.546.757.000	75.269.950.000	75.269.950.000
294	Kab. Melawi	367.406.601.000	367.406.601.000	50.448.590.000	50.448.590.000
295	Provinsi Kalimantan Tengah	951.256.068.000	951.256.068.000	50.184.280.000	50.184.280.000
296	Kab. Barito Selatan	450.692.235.000	450.692.235.000	40.146.160.000	40.146.160.000
297	Kab. Barito Utara	408.492.300.000	408.492.300.000	34.275.740.000	34.275.740.000
298	Kab. Kapuas	660.647.985.000	660.647.985.000	72.816.160.000	72.816.160.000
299	Kab. Kotawaringin Barat	486.941.691.000	486.941.691.000	27.939.150.000	27.939.150.000
300	Kab. Kotawaringin Timur	618.026.440.000	618.026.440.000	30.820.440.000	30.820.440.000
301	Kota Palangkaraya	459.782.814.000	459.782.814.000	31.305.370.000	31.305.370.000
302	Kab. Barito Timur	373.203.206.000	373.203.206.000	32.042.290.000	32.042.290.000
303	Kab. Murung Raya	508.288.176.000	508.288.176.000	1.423.410.000	1.423.410.000
304	Kab. Pulang Pisau	397.465.989.000	397.465.989.000	43.643.540.000	43.643.540.000
305	Kab. Gunung Mas	414.880.214.000	414.880.214.000	36.717.700.000	36.717.700.000
306	Kab. Lamandau	339.309.471.000	339.309.471.000	34.181.250.000	34.181.250.000
307	Kab. Sukamara	321.274.401.000	321.274.401.000	24.436.800.000	24.436.800.000
308	Kab. Katingan	513.410.125.000	513.410.125.000	6.780.340.000	6.780.340.000
309	Kab. Senayan	450.226.987.000	450.226.987.000	48.655.530.000	48.655.530.000
310	Provinsi Kalimantan Selatan	652.535.312.000	652.535.312.000	38.848.250.000	38.848.250.000
311	Kab. Banjar	535.602.032.000	535.602.032.000	54.071.920.000	54.071.920.000
312	Kab. Barito Kuala	423.209.928.000	423.209.928.000	62.669.730.000	62.669.730.000
313	Kab. Hulu Sungai Selatan	404.135.723.000	404.135.723.000	40.288.580.000	40.288.580.000
314	Kab. Hulu Sungai Tengah	393.267.166.000	393.267.166.000	31.467.530.000	31.467.530.000
315	Kab. Hulu Sungai Utara	356.539.892.000	356.539.892.000	47.627.950.000	47.627.950.000
316	Kab. Kota Baru	509.000.078.000	509.000.078.000	24.265.740.000	24.265.740.000

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
317	Kab. Tabalong	356.660.993.000	356.660.993.000	4.938.870.000	4.938.870.000
318	Kab. Tanah Laut	398.795.857.000	398.795.857.000	20.372.950.000	20.372.950.000
319	Kab. Tapin	349.786.888.000	349.786.888.000	29.263.390.000	29.263.390.000
320	Kota Banjarbaru	308.618.984.000	308.618.984.000	26.927.460.000	26.927.460.000
321	Kota Banjarmasin	547.024.778.000	547.024.778.000	41.844.160.000	41.844.160.000
322	Kab. Balangan	258.116.917.000	258.116.917.000	3.207.280.000	3.207.280.000
323	Kab. Tanah Bumbu	374.541.852.000	374.541.852.000	21.974.250.000	21.974.250.000
324	Provinsi Kalimantan Timur	52.637.761.000	52.637.761.000	34.516.130.000	34.516.130.000
325	Kab. Berau	444.693.316.000	444.693.316.000	5.519.870.000	4.139.903.000
326	Kab. Bulungan	289.927.621.000	289.927.621.000	7.645.360.000	7.645.360.000
327	Kab. Kutai Kartanegara	59.091.547.000	59.091.547.000	50.178.150.000	15.053.445.000
328	Kab. Kutai Barat	535.530.298.000	535.530.298.000	72.611.450.000	72.611.450.000
329	Kab. Kutai Timur	452.003.282.000	452.003.282.000	14.289.630.000	14.289.630.000
330	Kab. Malinau	557.697.933.000	557.697.933.000	49.468.020.000	49.468.020.000
331	Kab. Nunukan	296.210.334.000	296.210.334.000	57.435.080.000	43.076.310.000
332	Kab. Pasir	280.966.870.000	280.966.870.000	7.397.640.000	7.397.640.000
333	Kota Balikpapan	385.085.246.000	385.085.246.000	13.459.300.000	13.459.300.000
334	Kota Bontang	134.543.724.000	134.543.724.000	-	-
335	Kab. Tana Tidung	143.330.129.000	143.330.129.000	6.166.530.000	1.849.959.000
336	Kota Samarinda	518.878.304.000	518.878.304.000	4.361.080.000	4.361.080.000
337	Kota Tarakan	216.526.490.000	216.526.490.000	-	-
338	Kab. Penajam Paser Utara	169.033.829.000	169.033.829.000	4.136.740.000	1.241.022.000
339	Provinsi Sulawesi Utara	790.534.491.000	790.534.491.000	43.539.930.000	43.539.930.000
340	Kab. Bolaang Mongondow	388.968.863.000	388.968.863.000	68.308.140.000	68.308.140.000
341	Kab. Minahasa	488.909.611.000	488.909.611.000	46.571.080.000	46.571.080.000
342	Kab. Sangihe	388.071.349.000	388.071.349.000	60.509.760.000	60.509.760.000
343	Kota Bitung	379.300.339.000	379.300.339.000	33.009.510.000	33.009.510.000
344	Kota Manado	576.989.312.000	576.989.312.000	44.229.500.000	44.229.500.000
345	Kab. Kepulauan Talaud	349.375.894.000	349.375.894.000	54.114.180.000	54.114.180.000
346	Kab. Minahasa Selatan	388.510.062.000	388.510.062.000	51.611.620.000	51.611.620.000
347	Kab. Minahasa Tenggara	288.810.442.000	288.810.442.000	49.305.400.000	49.305.400.000
348	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	294.321.073.000	294.321.073.000	39.022.590.000	39.022.590.000
349	Kota Kotamubagu	270.246.978.000	270.246.978.000	24.267.000.000	24.267.000.000
350	Kab. Bolaang Mongondow Timur	210.942.873.000	210.942.873.000	28.884.600.000	28.884.600.000
351	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	229.324.941.000	229.324.941.000	24.212.220.000	24.212.220.000
352	Kota Tomohon	287.651.390.000	287.651.390.000	26.955.150.000	26.955.150.000
353	Kab. Minahasa Utara	354.982.999.000	354.982.999.000	60.593.370.000	60.593.370.000
354	Kab. Bolaang Mongondow Utara	260.205.636.000	260.205.636.000	33.859.330.000	33.859.330.000
355	Provinsi Gorontalo	582.140.302.000	582.140.302.000	24.008.330.000	24.008.330.000
356	Kab. Boalemo	299.140.794.000	299.140.794.000	36.230.470.000	36.230.470.000
357	Kab. Gorontalo	462.746.446.000	462.746.446.000	57.518.820.000	57.518.820.000
358	Kota Gorontalo	366.463.719.000	366.463.719.000	34.949.900.000	34.949.900.000
359	Kab. Pohuwato	342.707.301.000	342.707.301.000	41.065.680.000	41.065.680.000
360	Kab. Gorontalo Utara	251.595.704.000	251.595.704.000	41.547.480.000	41.547.480.000
361	Kab. Bone Bolango	318.414.380.000	318.414.380.000	33.890.770.000	33.890.770.000
362	Provinsi Sulawesi Tengah	902.087.729.000	902.087.729.000	43.237.070.000	43.237.070.000
363	Kab. Banggai	580.225.459.000	580.225.459.000	61.530.080.000	61.530.080.000
364	Kab. Banggai Kepulauan	371.918.157.000	371.918.157.000	57.895.180.000	57.895.180.000
365	Kab. Buol	359.941.585.000	359.941.585.000	40.479.640.000	40.479.640.000
366	Kab. Toli-Toli	436.210.238.000	436.210.238.000	39.289.060.000	39.289.060.000
367	Kab. Donggala	464.885.380.000	464.885.380.000	69.147.080.000	69.147.080.000
368	Kab. Morowali	548.247.835.000	548.247.835.000	55.359.110.000	55.359.110.000
369	Kab. Poso	509.604.879.000	509.604.879.000	58.877.580.000	58.877.580.000
370	Kota Palu	512.824.174.000	512.824.174.000	42.362.300.000	42.362.300.000

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
371	Kab. Parigi Moutong	520.677.901.000	520.677.901.000	67.427.780.000	67.427.780.000
372	Kab. Sigi	442.899.906.000	442.899.906.000	51.218.610.000	51.218.610.000
373	Kab. Tojo Una-Una	373.700.451.000	373.700.451.000	51.799.160.000	51.799.160.000
374	Provinsi Sulawesi Selatan	996.939.584.000	996.939.584.000	42.774.470.000	42.774.470.000
375	Kab. Bantaeng	325.057.232.000	325.057.232.000	39.504.550.000	39.504.550.000
376	Kab. Barru	358.904.488.000	358.904.488.000	42.032.280.000	42.032.280.000
377	Kab. Bone	754.025.482.000	754.025.482.000	89.442.570.000	89.442.570.000
378	Kab. Bulukumba	520.529.199.000	520.529.199.000	51.722.710.000	51.722.710.000
379	Kab. Enrekang	384.422.103.000	384.422.103.000	42.116.080.000	42.116.080.000
380	Kab. Gowa	586.415.307.000	586.415.307.000	54.785.160.000	54.785.160.000
381	Kab. Jeneponto	437.703.926.000	437.703.926.000	61.885.780.000	61.885.780.000
382	Kab. Luwu	475.295.053.000	475.295.053.000	54.806.460.000	54.806.460.000
383	Kab. Luwu Utara	457.250.496.000	457.250.496.000	43.516.120.000	43.516.120.000
384	Kab. Maros	455.829.227.000	455.829.227.000	49.906.540.000	49.906.540.000
385	Kab. Pangkajene Kepulauan	485.962.003.000	485.962.003.000	46.460.490.000	46.460.490.000
386	Kab. Pinrang	502.508.309.000	502.508.309.000	44.568.230.000	44.568.230.000
387	Kab. Selayar	365.634.515.000	365.634.515.000	46.580.000.000	46.580.000.000
388	Kab. Sidenreng Rappang	432.894.860.000	432.894.860.000	41.347.480.000	41.347.480.000
389	Kab. Sinjai	416.771.464.000	416.771.464.000	38.021.790.000	38.021.790.000
390	Kab. Soppeng	446.410.179.000	446.410.179.000	33.832.040.000	33.832.040.000
391	Kab. Takalar	409.280.603.000	409.280.603.000	46.835.800.000	46.835.800.000
392	Kab. Tana Toraja	389.286.812.000	389.286.812.000	64.649.650.000	64.649.650.000
393	Kab. Wajo	513.517.208.000	513.517.208.000	74.835.020.000	74.835.020.000
394	Kota Pare-pare	332.459.112.000	332.459.112.000	50.362.700.000	50.362.700.000
395	Kab. Toraja Utara	348.127.616.000	348.127.616.000	52.577.990.000	52.577.990.000
396	Kota Makassar	911.122.797.000	911.122.797.000	32.644.320.000	32.644.320.000
397	Kota Palopo	361.383.685.000	361.383.685.000	38.000.330.000	38.000.330.000
398	Kab. Luwu Timur	365.829.499.000	365.829.499.000	44.724.510.000	44.724.510.000
399	Provinsi Sulawesi Barat	590.680.361.000	590.680.361.000	36.786.280.000	36.786.280.000
400	Kab. Majene	361.181.229.000	361.181.229.000	52.919.230.000	52.919.230.000
401	Kab. Mamuju	504.353.363.000	504.353.363.000	60.403.920.000	60.403.920.000
402	Kab. Polewali Mandar	484.998.228.000	484.998.228.000	71.437.140.000	71.437.140.000
403	Kab. Mamasa	350.648.047.000	350.648.047.000	72.822.860.000	72.822.860.000
404	Kab. Mamuju Utara	299.588.574.000	299.588.574.000	47.693.920.000	47.693.920.000
405	Provinsi Sulawesi Tenggara	869.882.871.000	869.882.871.000	34.659.800.000	34.659.800.000
406	Kab. Buton	468.956.933.000	468.956.933.000	59.419.250.000	59.419.250.000
407	Kab. Konawe	568.010.624.000	568.010.624.000	59.187.530.000	59.187.530.000
408	Kab. Kolaka	535.098.526.000	535.098.526.000	52.618.840.000	52.618.840.000
409	Kab. Muna	561.580.535.000	561.580.535.000	80.745.000.000	80.745.000.000
410	Kota Kendari	478.763.604.000	478.763.604.000	42.248.220.000	42.248.220.000
411	Kota Bau-bau	370.653.915.000	370.653.915.000	34.663.270.000	34.663.270.000
412	Kab. Konawe Selatan	481.737.617.000	481.737.617.000	66.988.470.000	66.988.470.000
413	Kab. Bombana	328.634.006.000	328.634.006.000	49.693.360.000	49.693.360.000
414	Kab. Konawe Utara	377.863.760.000	377.863.760.000	43.398.480.000	43.398.480.000
415	Kab. Buton Utara	291.312.065.000	291.312.065.000	40.562.700.000	40.562.700.000
416	Kab. Wakatobi	308.676.985.000	308.676.985.000	44.851.260.000	44.851.260.000
417	Kab. Kolaka Utara	336.532.276.000	336.532.276.000	40.063.290.000	40.063.290.000
418	Provinsi Bali	694.079.080.000	694.079.080.000	34.025.910.000	34.025.910.000
419	Kab. Badung	353.067.906.000	353.067.906.000	1.838.320.000	1.838.320.000
420	Kab. Bangli	396.942.913.000	396.942.913.000	38.259.250.000	38.259.250.000
421	Kab. Buleleng	687.697.696.000	687.697.696.000	62.589.200.000	62.589.200.000
422	Kab. Gianyar	532.883.001.000	532.883.001.000	35.930.200.000	35.930.200.000
423	Kab. Jembrana	396.762.339.000	396.762.339.000	40.170.350.000	40.170.350.000
424	Kab. Karangasem	503.028.930.000	503.028.930.000	46.764.660.000	46.764.660.000

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
425	Kab Klungkung	387.340.103.000	387.340.103.000	33.095.150.000	24.821.363.000
426	Kab Tabanan	574.346.244.000	574.346.244.000	47.366.540.000	47.366.540.000
427	Kota Denpasar	512.666.446.000	512.666.446.000	8.489.350.000	8.489.350.000
428	Provinsi Nusa Tenggara Barat	809.617.715.000	809.617.715.000	53.326.340.000	53.326.340.000
429	Kab Bima	618.722.430.000	618.722.430.000	63.393.380.000	63.393.380.000
430	Kab Dompu	419.778.267.000	419.778.267.000	44.901.700.000	44.901.700.000
431	Kab Lombok Barat	553.918.195.000	553.918.195.000	60.378.910.000	60.378.910.000
432	Kab Lombok Tengah	702.814.863.000	702.814.863.000	74.433.270.000	74.433.270.000
433	Kab Lombok Timur	830.534.456.000	830.534.456.000	101.450.730.000	101.450.730.000
434	Kab Sumbawa	586.148.017.000	586.148.017.000	63.238.890.000	63.238.890.000
435	Kota Mataram	445.894.174.000	445.894.174.000	29.436.680.000	29.436.680.000
436	Kab Lombok Utara	275.520.014.000	275.520.014.000	39.153.120.000	39.153.120.000
437	Kota Bima	329.098.457.000	329.098.457.000	40.913.200.000	40.913.200.000
438	Kab Sumbawa Barat	259.334.022.000	259.334.022.000	28.651.770.000	28.651.770.000
439	Provinsi Nusa Tenggara Timur	940.646.764.000	940.646.764.000	57.088.950.000	57.088.950.000
440	Kab Alor	414.227.641.000	414.227.641.000	66.290.940.000	66.290.940.000
441	Kab Belu	514.663.089.000	514.663.089.000	107.588.230.000	107.588.230.000
442	Kab Ende	459.254.657.000	459.254.657.000	75.508.650.000	75.508.650.000
443	Kab Flores Timur	420.202.192.000	420.202.192.000	57.338.430.000	57.338.430.000
444	Kab Kupang	475.616.705.000	475.616.705.000	77.887.130.000	77.887.130.000
445	Kab Lembata	314.176.964.000	314.176.964.000	50.477.450.000	50.477.450.000
446	Kab Manggarai	394.658.221.000	394.658.221.000	53.719.440.000	53.719.440.000
447	Kab Ngada	336.875.056.000	336.875.056.000	47.824.850.000	47.824.850.000
448	Kab Sikka	440.354.186.000	440.354.186.000	48.043.690.000	48.043.690.000
449	Kab Sumba Barat	278.593.998.000	278.593.998.000	37.752.680.000	37.752.680.000
450	Kab Sumba Timur	462.689.930.000	462.689.930.000	64.087.080.000	64.087.080.000
451	Kab Timor Tengah Selatan	544.431.464.000	544.431.464.000	58.765.960.000	58.765.960.000
452	Kab Timor Tengah Utara	403.508.769.000	403.508.769.000	69.333.940.000	69.333.940.000
453	Kota Kupang	453.986.555.000	453.986.555.000	31.257.790.000	31.257.790.000
454	Kab Rote Ndao	284.550.454.000	284.550.454.000	36.178.540.000	36.178.540.000
455	Kab Nagekeo	303.787.471.000	303.787.471.000	58.979.870.000	58.979.870.000
456	Kab Sumba Tengah	239.756.523.000	239.756.523.000	41.537.240.000	41.537.240.000
457	Kab Sumba Barat Daya	321.654.137.000	321.654.137.000	56.064.310.000	56.064.310.000
458	Kab Manggarai Timur	339.700.544.000	339.700.544.000	97.018.550.000	97.018.550.000
459	Kab Sabu Raijua	220.235.150.000	220.235.150.000	52.864.240.000	52.864.240.000
460	Kab Manggarai Barat	342.638.721.000	342.638.721.000	47.058.870.000	47.058.870.000
461	Provinsi Maluku	829.491.474.000	829.491.474.000	38.062.680.000	38.062.680.000
462	Kab Maluku Tenggara Barat	367.501.323.000	367.501.323.000	45.273.750.000	45.273.750.000
463	Kab Maluku Tengah	672.609.497.000	672.609.497.000	59.515.870.000	59.515.870.000
464	Kab Maluku Tenggara	310.533.609.000	310.533.609.000	41.235.810.000	41.235.810.000
465	Kab Pulau Buru	329.533.510.000	329.533.510.000	41.429.330.000	41.429.330.000
466	Kota Ambon	497.388.862.000	497.388.862.000	29.219.550.000	29.219.550.000
467	Kab Seram Bagian Barat	400.089.555.000	400.089.555.000	37.905.470.000	37.905.470.000
468	Kab Seram Bagian Timur	328.796.339.000	328.796.339.000	42.842.540.000	42.842.540.000
469	Kab Maluku Barat Daya	353.270.635.000	353.270.635.000	40.115.000.000	40.115.000.000
470	Kab Buru Selatan	259.458.763.000	259.458.763.000	34.703.870.000	34.703.870.000
471	Kab Kepulauan Aru	356.469.535.000	356.469.535.000	46.574.580.000	46.574.580.000
472	Kota Tual	217.665.886.000	217.665.886.000	26.954.970.000	26.954.970.000
473	Provinsi Maluku Utara	703.159.025.000	703.159.025.000	37.858.020.000	37.858.020.000
474	Kab Halmahera Tengah	301.838.254.000	301.838.254.000	43.787.980.000	43.787.980.000
475	Kab Halmahera Barat	325.327.678.000	325.327.678.000	49.836.490.000	49.836.490.000
476	Kota Ternate	404.588.285.000	404.588.285.000	43.365.800.000	43.365.800.000
477	Kab Halmahera Timur	295.108.028.000	295.108.028.000	40.408.360.000	40.408.360.000
478	Kota Tidore Kepulauan	399.531.966.000	399.531.966.000	43.485.170.000	43.485.170.000

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
479	Kab Kepulauan Sula	361.491.540.000	361.491.540.000	38.389.310.000	38.389.310.000
480	Kab Pulau Morotai	241.796.020.000	241.796.020.000	66.920.400.000	66.920.400.000
481	Kab Halmahera Selatan	445.160.136.000	445.160.136.000	52.612.940.000	52.612.940.000
482	Kab Halmahera Utara	324.875.231.000	324.875.231.000	50.694.990.000	50.694.990.000
483	Kab Yalimo	361.840.282.000	361.840.282.000	61.904.020.000	61.904.020.000
484	Kab Lanny Jaya	380.008.207.000	380.008.207.000	85.821.050.000	85.821.050.000
485	Provinsi Papua	1.569.782.444.000	1.569.782.444.000	106.191.170.000	106.191.170.000
486	Kab Biak Numfor	435.356.830.000	435.356.830.000	71.582.310.000	71.582.310.000
487	Kab Jayapura	493.852.754.000	493.852.754.000	55.842.600.000	55.842.600.000
488	Kab Jayawijaya	473.277.942.000	473.277.942.000	56.194.030.000	56.194.030.000
489	Kab Merauke	865.521.774.000	865.521.774.000	102.708.750.000	102.708.750.000
490	Kab Mimika	412.267.021.000	412.267.021.000	49.423.900.000	49.423.900.000
491	Kab Nabire	503.018.656.000	503.018.656.000	67.983.710.000	67.983.710.000
492	Kab Paniai	430.773.393.000	430.773.393.000	89.942.900.000	89.942.900.000
493	Kab Puncak Jaya	472.759.854.000	472.759.854.000	84.366.620.000	84.366.620.000
494	Kab Kepulauan Yapen	369.738.713.000	369.738.713.000	44.799.510.000	44.799.510.000
495	Kota Jayapura	496.265.717.000	496.265.717.000	44.263.240.000	44.263.240.000
496	Kab Sarmi	487.193.343.000	487.193.343.000	37.321.220.000	37.321.220.000
497	Kab Keerom	389.707.566.000	389.707.566.000	57.232.200.000	57.232.200.000
498	Kab Yahukimo	492.738.286.000	492.738.286.000	85.313.140.000	85.313.140.000
499	Kab Pegunungan Bintang	568.820.555.000	568.820.555.000	91.527.140.000	91.527.140.000
500	Kab Tolikara	437.518.633.000	437.518.633.000	83.498.270.000	83.498.270.000
501	Kab Boven Digoel	597.915.419.000	597.915.419.000	52.299.320.000	52.299.320.000
502	Kab Mappi	581.299.652.000	581.299.652.000	73.187.330.000	73.187.330.000
503	Kab Asmat	659.271.747.000	659.271.747.000	62.256.800.000	62.256.800.000
504	Kab Waropen	383.124.701.000	383.124.701.000	39.703.100.000	39.703.100.000
505	Kab Mamberamo Raya	503.646.862.000	503.646.862.000	38.710.380.000	38.710.380.000
506	Kab Mamberamo Tengah	341.507.690.000	341.507.690.000	48.933.200.000	48.933.200.000
507	Kab Nduga	399.825.178.000	399.825.178.000	58.461.420.000	58.461.420.000
508	Kab Dogiyai	332.993.509.000	332.993.509.000	54.101.270.000	54.101.270.000
509	Kab Intan Jaya	447.947.741.000	447.947.741.000	88.770.570.000	88.770.570.000
510	Kab Puncak	506.929.154.000	506.929.154.000	84.723.710.000	84.723.710.000
511	Kab Deyai	350.625.782.000	350.625.782.000	86.868.360.000	86.868.360.000
512	Kab Supiori	316.866.840.000	316.866.840.000	38.680.520.000	38.680.520.000
513	Provinsi Papua Barat	901.398.453.000	901.398.453.000	38.633.110.000	38.633.110.000
514	Kab Sorong	414.440.517.000	414.440.517.000	79.710.210.000	79.710.210.000
515	Kab Manokwari	557.019.915.000	557.019.915.000	54.513.970.000	54.513.970.000
516	Kab Fak Fak	479.791.765.000	479.791.765.000	40.743.400.000	40.743.400.000
517	Kota Sorong	350.959.919.000	350.959.919.000	34.991.880.000	34.991.880.000
518	Kab Sorong Selatan	312.712.933.000	312.712.933.000	66.007.670.000	66.007.670.000
519	Kab Raja Ampat	454.890.889.000	454.890.889.000	54.806.590.000	54.806.590.000
520	Kab Teluk Bintuni	472.543.967.000	472.543.967.000	43.298.340.000	43.298.340.000
521	Kab Teluk Wondama	318.112.538.000	318.112.538.000	46.918.690.000	46.918.690.000
522	Kab Tambrauw	316.168.211.000	316.168.211.000	70.042.220.000	70.042.220.000
523	Kab Maybrat	277.798.391.000	277.798.391.000	38.200.060.000	38.200.060.000
524	Kab Kaimana	444.833.556.000	444.833.556.000	37.262.930.000	37.262.930.000
	Dana Cadangan	-	-	-	-
	JUMLAH	273.814.438.203.000	273.814.438.203.000	26.115.948.000.000	25.941.483.856.000

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

DAFTAR 3.F

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN
AUDITED TAHUN ANGGARAN 2012
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi		
			Otonomi Khusus	Dana Penyesuaian	Realisasi
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5
1	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	5.938.284.934.000	5.476.288.764.000	442.349.581.000	5.918.638.345.000
2	Kab. Aceh Barat	30.363.562.000	-	30.363.562.000	30.363.562.000
3	Kab. Aceh Besar	58.904.866.000	-	58.904.866.000	58.904.866.000
4	Kab. Aceh Selatan	46.126.568.000	-	46.126.568.000	46.126.568.000
5	Kab. Aceh Singkil	12.582.483.000	-	12.582.483.000	12.582.483.000
6	Kab. Aceh Tengah	64.636.899.000	-	64.636.899.000	64.636.899.000
7	Kab. Aceh Tenggara	29.416.657.000	-	29.416.657.000	29.416.657.000
8	Kab. Aceh Timur	42.541.238.000	-	42.541.238.000	42.541.238.000
9	Kab. Aceh Utara	80.428.694.000	-	80.428.694.000	80.428.694.000
10	Kab. Bireun	76.455.870.000	-	76.455.870.000	76.455.870.000
11	Kab. Pidie	76.722.948.000	-	76.722.948.000	76.722.948.000
12	Kab. Simelue	12.315.860.000	-	12.315.860.000	12.315.860.000
13	Kota Banda Aceh	99.906.360.000	-	99.906.360.000	99.906.360.000
14	Kota Sabang	11.360.454.000	-	11.360.454.000	11.360.454.000
15	Kota Langsa	33.738.477.000	-	33.738.477.000	33.738.477.000
16	Kota Lhokseumawe	34.133.708.000	-	34.133.708.000	34.133.708.000
17	Kab. Nagan Raya	16.264.671.000	-	16.264.671.000	16.264.671.000
18	Kab. Aceh Jaya	17.353.962.000	-	17.353.962.000	17.353.962.000
19	Kab. Pidie Jaya	18.662.683.000	-	18.662.683.000	18.662.683.000
20	Kab. Aceh Barat Daya	27.372.335.000	-	27.372.335.000	27.372.335.000
21	Kab. Gayo Lues	11.154.993.000	-	11.154.993.000	11.154.993.000
22	Kab. Aceh Tamiang	37.922.576.000	-	37.922.576.000	37.922.576.000
23	Kab. Bener Meriah	23.200.856.000	-	23.200.856.000	23.200.856.000
24	Kota Subulussalam	10.737.772.000	-	10.737.772.000	10.737.772.000
25	Provinsi Sumatera Utara	1.582.683.614.000	-	1.518.973.689.250	1.518.973.689.250
26	Kab. Asahan	81.336.742.000	-	81.336.742.000	81.336.742.000
27	Kab. Dairi	45.929.603.000	-	45.929.603.000	45.929.603.000
28	Kab. Deli Serdang	170.965.159.000	-	170.965.159.000	170.965.159.000
29	Kab. Tanah Karo	60.038.468.000	-	60.038.468.000	60.038.468.000
30	Kab. Labuhan Batu	48.454.928.000	-	48.454.928.000	48.454.928.000
31	Kab. Langkat	116.777.995.000	-	116.777.995.000	116.777.995.000
32	Kab. Mandailing Natal	78.436.816.000	-	78.436.816.000	78.436.816.000
33	Kab. Nias	15.837.320.000	-	15.837.320.000	15.837.320.000
34	Kab. Simalungun	121.481.848.000	-	121.481.848.000	121.481.848.000
35	Kab. Tapanuli Selatan	40.550.539.000	-	40.550.539.000	40.550.539.000
36	Kab. Tapanuli Tengah	51.768.382.000	-	51.768.382.000	51.768.382.000
37	Kab. Tapanuli Utara	65.514.039.000	-	65.514.039.000	65.514.039.000
38	Kab. Toba Samosir	48.240.349.000	-	48.240.349.000	48.240.349.000
39	Kota Binjai	55.690.016.000	-	55.690.016.000	55.690.016.000
40	Kota Medan	253.041.880.000	-	251.397.130.000	251.397.130.000
41	Kota Pematang Siantar	62.146.267.000	-	62.146.267.000	62.146.267.000
42	Kota Sibolga	19.347.420.000	-	19.347.420.000	19.347.420.000
43	Kota Tanjung Balai	18.835.927.000	-	18.835.927.000	18.835.927.000
44	Kab. Batu Bara	48.118.977.000	-	48.118.977.000	48.118.977.000
45	Kab. Labuhan Batu Utara	37.337.382.000	-	37.337.382.000	37.337.382.000
46	Kab. Labuhan Batu Selatan	24.458.744.000	-	24.458.744.000	24.458.744.000
47	Kab. Padang Lawas Utara	22.560.460.000	-	22.560.460.000	22.560.460.000
48	Kab. Padang Lawas	19.304.303.000	-	19.304.303.000	19.304.303.000
49	Kab. Nias Utara	12.928.449.000	-	12.928.449.000	12.928.449.000
50	Kab. Nias Barat	8.018.367.000	-	8.018.367.000	8.018.367.000

No.	Daerah	Pagu	Realisasi		
			Otonomi Khusus	Dana Penyesuaian	Realisasi
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5
51	Kota Tebing Tinggi	34.208.331.000	-	34.208.331.000	34.208.331.000
52	Kota Padang Sidempuan	48.972.403.000	-	48.972.403.000	48.972.403.000
53	Kab. Pakpak Bharat	10.071.199.000	-	10.071.199.000	10.071.199.000
54	Kab. Nias Selatan	16.147.599.000	-	16.147.599.000	16.147.599.000
55	Kab. Humbang Hasundutan	46.951.544.000	-	46.951.544.000	46.951.544.000
56	Kab. Serdang Bedagai	75.324.124.000	-	75.324.124.000	75.324.124.000
57	Kab. Samosir	27.475.806.000	-	27.475.806.000	27.475.806.000
58	Kota Gunung Sitoli	31.973.979.000	-	31.973.979.000	31.973.979.000
59	Provinsi Sumatera Barat	569.435.210.000	-	544.675.915.000	544.675.915.000
60	Kab. Limapuluh Kota	79.937.742.000	-	79.937.742.000	79.937.742.000
61	Kab. Agam	111.969.415.000	-	111.969.415.000	111.969.415.000
62	Kab. Kepulauan Mentawai	22.400.517.000	-	22.400.517.000	22.400.517.000
63	Kab. Padang Pariaman	87.367.036.000	-	87.367.036.000	87.367.036.000
64	Kab. Pasaman	80.266.094.000	-	80.266.094.000	80.266.094.000
65	Kab. Pesisir Selatan	91.719.323.000	-	91.719.323.000	91.719.323.000
66	Kab. Sijunjung	39.239.323.000	-	39.239.323.000	39.239.323.000
67	Kab. Solok	76.720.541.000	-	76.720.541.000	76.720.541.000
68	Kab. Tanah Datar	96.102.078.000	-	96.102.078.000	96.102.078.000
69	Kota Bukit Tinggi	39.039.923.000	-	39.039.923.000	39.039.923.000
70	Kota Padang Panjang	22.296.642.000	-	22.296.642.000	22.296.642.000
71	Kota Padang	174.082.662.000	-	174.082.662.000	174.082.662.000
72	Kota Payakumbuh	41.407.063.000	-	41.407.063.000	41.407.063.000
73	Kota Sawahlunto	24.086.724.000	-	24.086.724.000	24.086.724.000
74	Kota Solok	27.874.286.000	-	27.874.286.000	27.874.286.000
75	Kota Pariaman	34.872.888.000	-	34.872.888.000	34.872.888.000
76	Kab. Pasaman Barat	37.878.104.000	-	37.878.104.000	37.878.104.000
77	Kab. Dharmasraya	34.304.754.000	-	34.304.754.000	34.304.754.000
78	Kab. Solok Selatan	25.743.313.000	-	25.743.313.000	25.743.313.000
79	Provinsi Riau	664.651.709.000	-	639.784.644.000	639.784.644.000
80	Kab. Bengkalis	76.721.242.000	-	76.721.242.000	76.721.242.000
81	Kab. Indragiri Hilir	59.893.183.000	-	59.893.183.000	59.893.183.000
82	Kab. Indragiri Hulu	53.766.598.000	-	53.766.598.000	53.766.598.000
83	Kab. Kampar	96.857.157.000	-	96.857.157.000	96.857.157.000
84	Kab. Kuantan Singingi	57.640.860.000	-	57.640.860.000	57.640.860.000
85	Kab. Pelalawan	58.160.635.000	-	58.160.635.000	58.160.635.000
86	Kab. Rokan Hilir	44.244.104.000	-	44.244.104.000	44.244.104.000
87	Kab. Rokan Hulu	49.415.930.000	-	49.415.930.000	49.415.930.000
88	Kab. Siak	48.202.403.000	-	48.202.403.000	48.202.403.000
89	Kota Dumai	35.538.792.000	-	35.538.792.000	35.538.792.000
90	Kota Pekanbaru	125.977.654.000	-	125.977.654.000	125.977.654.000
91	Kab. Kepulauan Meranti	24.391.067.000	-	24.391.067.000	24.391.067.000
92	Provinsi Kepulauan Riau	163.364.580.000	-	155.910.740.000	155.910.740.000
93	Kab. Bintan	22.055.574.000	-	22.055.574.000	22.055.574.000
94	Kab. Natuna	12.475.919.000	-	12.475.919.000	12.475.919.000
95	Kab. Karimun	32.244.654.000	-	32.244.654.000	32.244.654.000
96	Kota Batam	34.310.112.000	-	34.310.112.000	34.310.112.000
97	Kab. Kepulauan Anambas	4.155.163.000	-	4.155.163.000	4.155.163.000
98	Kota Tanjung Pinang	30.647.055.000	-	30.647.055.000	30.647.055.000
99	Kab. Lingga	16.264.331.000	-	13.447.331.000	13.447.331.000
100	Provinsi Jambi	341.463.908.000	-	324.820.708.000	324.820.708.000
101	Kab. Batanghari	43.043.750.000	-	43.043.750.000	43.043.750.000
102	Kab. Bungo	54.146.650.000	-	54.146.650.000	54.146.650.000
103	Kab. Kerinci	58.380.474.000	-	58.380.474.000	58.380.474.000
104	Kab. Merangin	46.859.789.000	-	46.859.789.000	46.859.789.000
105	Kab. Muaro Jambi	48.860.583.000	-	48.860.583.000	48.860.583.000
106	Kab. Sarolangun	45.844.245.000	-	45.844.245.000	45.844.245.000
107	Kab. Tanjung Jabung Barat	36.816.367.000	-	36.816.367.000	36.816.367.000

No.	Daerah	Pagu	Realisasi		
			Otonomi Khusus	Dana Penyesuaian	Realisasi
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5
108	Kab. Tanjung Jabung Timur	33.248.391.000	.	33.248.391.000	33.248.391.000
109	Kab. Tebo	45.337.041.000	.	45.337.041.000	45.337.041.000
110	Kota Jambi	116.602.188.000	.	116.602.188.000	116.602.188.000
111	Kota Sungai Penuh	31.508.717.000	.	31.508.717.000	31.508.717.000
112	Provinsi Sumatera Selatan	814.754.820.000	.	777.775.050.000	777.775.050.000
113	Kab. Lahat	67.119.933.000	.	67.119.933.000	67.119.933.000
114	Kab. Musi Banyuasin	55.685.859.000	.	55.685.859.000	55.685.859.000
115	Kab. Musi Rawas	50.890.985.000	.	50.890.985.000	50.890.985.000
116	Kab. Muara Enim	79.326.550.000	.	79.326.550.000	79.326.550.000
117	Kab. Ogan Komering Ilir	70.082.265.000	.	70.082.265.000	70.082.265.000
118	Kab. Ogan Komering Ulu	53.258.952.000	.	53.258.952.000	53.258.952.000
119	Kota Palembang	259.279.204.000	.	259.279.204.000	259.279.204.000
120	Kota Pagar Alam	22.423.593.000	.	22.423.593.000	22.423.593.000
121	Kota Lubuk Linggau	39.862.301.000	.	39.862.301.000	39.862.301.000
122	Kota Prabumulih	30.031.678.000	.	30.031.678.000	30.031.678.000
123	Kab. Empat Lawang	18.837.078.000	.	18.837.078.000	18.837.078.000
124	Kab. Banyuasin	72.447.486.000	.	72.447.486.000	72.447.486.000
125	Kab. Ogan Ilir	56.797.002.000	.	56.797.002.000	56.797.002.000
126	Kab. OKU Timur	67.505.712.000	.	67.505.712.000	67.505.712.000
127	Kab. OKU Selatan	28.533.257.000	.	28.533.257.000	28.533.257.000
128	Provinsi Bangka Belitung	129.132.080.000	.	124.799.697.500	124.799.697.500
129	Kab. Bangka	34.335.918.000	.	34.335.918.000	34.335.918.000
130	Kab. Belitung	25.030.271.000	.	25.030.271.000	25.030.271.000
131	Kota Pangkal Pinang	30.052.643.000	.	30.052.643.000	30.052.643.000
132	Kab. Bangka Selatan	14.089.515.000	.	14.089.515.000	14.089.515.000
133	Kab. Bangka Tengah	15.654.044.000	.	15.654.044.000	15.654.044.000
134	Kab. Bangka Barat	18.194.157.000	.	18.194.157.000	18.194.157.000
135	Kab. Belitung Timur	16.806.491.000	.	16.806.491.000	16.806.491.000
136	Provinsi Bengkulu	203.519.360.000	.	193.083.392.500	193.083.392.500
137	Kab. Bengkulu Selatan	62.582.279.000	.	62.582.279.000	62.582.279.000
138	Kab. Bengkulu Utara	49.271.497.000	.	49.271.497.000	49.271.497.000
139	Kab. Rejang Lebong	43.934.979.000	.	43.934.979.000	43.934.979.000
140	Kota Bengkulu	57.933.321.000	.	57.933.321.000	57.933.321.000
141	Kab. Kaur	44.410.219.000	.	44.410.219.000	44.410.219.000
142	Kab. Seluma	28.919.750.000	.	28.919.750.000	28.919.750.000
143	Kab. Mukomuko	24.163.052.000	.	24.163.052.000	24.163.052.000
144	Kab. Lebong	21.478.137.000	.	21.478.137.000	21.478.137.000
145	Kab. Bengkulu Tengah	22.037.814.000	.	22.037.814.000	22.037.814.000
146	Kab. Kepahiang	27.534.617.000	.	27.534.617.000	27.534.617.000
147	Provinsi Lampung	785.229.380.000	.	750.856.896.000	750.856.896.000
148	Kab. Lampung Barat	78.783.947.000	.	78.783.947.000	78.783.947.000
149	Kab. Lampung Selatan	100.158.800.000	.	100.158.800.000	100.158.800.000
150	Kab. Lampung Tengah	182.660.030.000	.	182.660.030.000	182.660.030.000
151	Kab. Lampung Utara	97.473.403.000	.	97.473.403.000	97.473.403.000
152	Kab. Lampung Timur	134.926.995.000	.	134.926.995.000	134.926.995.000
153	Kab. Tanggamus	75.158.684.000	.	75.158.684.000	75.158.684.000
154	Kab. Tulang Bawang	37.709.998.000	.	37.709.998.000	37.709.998.000
155	Kab. Way Kanan	54.967.011.000	.	54.967.011.000	54.967.011.000
156	Kab. Pesawaran	62.342.248.000	.	62.342.248.000	62.342.248.000
157	Kab. Pringsewu	80.547.613.000	.	80.547.613.000	80.547.613.000
158	Kab. Mesuji	15.777.198.000	.	15.777.198.000	15.777.198.000
159	Kab. Tulang Bawang Barat	36.330.492.000	.	36.330.492.000	36.330.492.000
160	Kota Bandar Lampung	168.206.757.000	.	168.206.757.000	168.206.757.000
161	Kota Metro	56.212.967.000	.	56.212.967.000	56.212.967.000
162	Provinsi DKI Jakarta	1.816.564.063.000	.	1.779.682.463.000	1.779.682.463.000
163	Provinsi Jawa Barat	4.205.668.978.000	.	4.046.052.947.500	4.046.052.947.500
164	Kab. Bandung	318.054.232.000	.	318.054.232.000	318.054.232.000

No.	Daerah	Pagu	Realisasi		
			Otonomi Khusus	Dana Penyesuaian	Realisasi
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5
165	Kab. Bekasi	177.623.968.000	-	177.623.968.000	177.623.968.000
166	Kab. Bogor	263.590.831.000	-	263.590.831.000	263.590.831.000
167	Kab. Ciamis	247.286.806.000	-	247.286.806.000	247.286.806.000
168	Kab. Cianjur	221.006.291.000	-	221.006.291.000	221.006.291.000
169	Kab. Cirebon	194.676.765.000	-	194.676.765.000	194.676.765.000
170	Kab. Garut	266.801.526.000	-	266.801.526.000	266.801.526.000
171	Kab. Indramayu	166.244.941.000	-	166.244.941.000	166.244.941.000
172	Kab. Karawang	164.132.014.000	-	164.132.014.000	164.132.014.000
173	Kab. Kuningan	147.605.926.000	-	147.605.926.000	147.605.926.000
174	Kab. Majalengka	155.879.569.000	-	155.879.569.000	155.879.569.000
175	Kab. Purwakarta	113.145.574.000	-	113.145.574.000	113.145.574.000
176	Kab. Subang	158.933.948.000	-	158.933.948.000	158.933.948.000
177	Kab. Sukabumi	190.464.509.000	-	190.464.509.000	190.464.509.000
178	Kab. Sumedang	153.087.296.000	-	153.087.296.000	153.087.296.000
179	Kab. Tasikmalaya	232.477.213.000	-	232.477.213.000	232.477.213.000
180	Kab. Bandung Barat	145.329.274.000	-	145.329.274.000	145.329.274.000
181	Kota Bandung	293.695.361.000	-	293.695.361.000	293.695.361.000
182	Kota Bekasi	174.552.873.000	-	174.552.873.000	174.552.873.000
183	Kota Bogor	125.745.495.000	-	125.745.495.000	125.745.495.000
184	Kota Cirebon	64.268.689.000	-	64.268.689.000	64.268.689.000
185	Kota Depok	109.629.910.000	-	109.629.910.000	109.629.910.000
186	Kota Sukabumi	55.214.998.000	-	55.214.998.000	55.214.998.000
187	Kota Cimahi	81.110.429.000	-	81.110.429.000	81.110.429.000
188	Kota Tasikmalaya	122.975.025.000	-	122.975.025.000	122.975.025.000
189	Kota Banjar	35.205.659.000	-	35.205.659.000	35.205.659.000
190	Provinsi Banten	1.047.296.690.000	-	998.737.325.000	998.737.325.000
191	Kab. Lebak	133.704.907.000	-	133.704.907.000	133.704.907.000
192	Kab. Pandeglang	155.073.997.000	-	155.073.997.000	155.073.997.000
193	Kab. Serang	119.629.024.000	-	119.629.024.000	119.629.024.000
194	Kab. Tangerang	164.709.098.000	-	164.709.098.000	164.709.098.000
195	Kota Cilegon	58.707.284.000	-	58.707.284.000	58.707.284.000
196	Kota Tangerang	182.398.549.000	-	182.398.549.000	182.398.549.000
197	Kota Serang	68.626.820.000	-	68.626.820.000	68.626.820.000
198	Kota Tangerang Selatan	83.889.123.000	-	83.889.123.000	83.889.123.000
199	Provinsi Jawa Tengah	2.852.581.621.000	-	2.710.569.135.000	2.710.569.135.000
200	Kab. Banjarnegara	168.674.789.000	-	168.674.789.000	168.674.789.000
201	Kab. Banyumas	236.964.107.000	-	236.964.107.000	236.964.107.000
202	Kab. Batang	111.875.303.000	-	111.875.303.000	111.875.303.000
203	Kab. Blora	105.770.570.000	-	105.770.570.000	105.770.570.000
204	Kab. Boyolali	167.626.904.000	-	167.626.904.000	167.626.904.000
205	Kab. Brebes	202.690.706.000	-	202.690.706.000	202.690.706.000
206	Kab. Cilacap	213.682.172.000	-	213.682.172.000	213.682.172.000
207	Kab. Demak	123.222.625.000	-	123.222.625.000	123.222.625.000
208	Kab. Grobogan	131.494.643.000	-	131.494.643.000	131.494.643.000
209	Kab. Jepara	116.288.445.000	-	116.288.445.000	116.288.445.000
210	Kab. Karanganyar	181.233.186.000	-	181.233.186.000	181.233.186.000
211	Kab. Kebumen	163.270.232.000	-	163.270.232.000	163.270.232.000
212	Kab. Kendal	128.304.737.000	-	128.304.737.000	128.304.737.000
213	Kab. Klaten	207.721.763.000	-	207.721.763.000	207.721.763.000
214	Kab. Kudus	88.545.748.000	-	88.545.748.000	88.545.748.000
215	Kab. Magelang	118.609.866.000	-	118.609.866.000	118.609.866.000
216	Kab. Pati	174.374.050.000	-	174.374.050.000	174.374.050.000
217	Kab. Pekalongan	129.909.032.000	-	129.909.032.000	129.909.032.000
218	Kab. Pemalang	179.101.037.000	-	179.101.037.000	179.101.037.000
219	Kab. Purbalingga	142.624.281.000	-	142.624.281.000	142.624.281.000
220	Kab. Purworejo	155.803.538.000	-	155.803.538.000	155.803.538.000
221	Kab. Rembang	96.417.785.000	-	96.417.785.000	96.417.785.000

No.	Daerah	Pagu	Realisasi		
			Otonomi Khusus	Dana Penyesuaian	Realisasi
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5
222	Kab. Semarang	153.333.191.000	-	153.333.191.000	153.333.191.000
223	Kab. Sragen	167.308.769.000	-	167.308.769.000	167.308.769.000
224	Kab. Sukoharjo	121.525.711.000	-	121.525.711.000	121.525.711.000
225	Kab. Tegal	129.114.524.000	-	129.114.524.000	129.114.524.000
226	Kab. Temanggung	99.581.821.000	-	99.581.821.000	99.581.821.000
227	Kab. Wonogiri	183.826.480.000	-	183.826.480.000	183.826.480.000
228	Kab. Wonosobo	106.366.965.000	-	106.366.965.000	106.366.965.000
229	Kota Magelang	46.539.535.000	-	46.539.535.000	46.539.535.000
230	Kota Pekalongan	68.645.794.000	-	68.645.794.000	68.645.794.000
231	Kota Salatiga	46.948.716.000	-	46.948.716.000	46.948.716.000
232	Kota Semarang	191.552.502.000	-	191.552.502.000	191.552.502.000
233	Kota Surakarta	175.527.411.000	-	175.527.411.000	175.527.411.000
234	Kota Tegal	54.384.462.000	-	54.384.462.000	54.384.462.000
235	Provinsi DI Yogyakarta	280.790.940.000	-	266.557.880.000	266.557.880.000
236	Kab. Bantul	205.719.691.000	-	205.719.691.000	205.719.691.000
237	Kab. Gunung Kidul	159.563.905.000	-	159.563.905.000	159.563.905.000
238	Kab. Kulon Progo	143.945.745.000	-	143.945.745.000	143.945.745.000
239	Kab. Sleman	208.486.544.000	-	208.486.544.000	208.486.544.000
240	Kota Yogyakarta	139.337.979.000	-	139.337.979.000	139.337.979.000
241	Provinsi Jawa Timur	2.851.753.720.000	-	2.714.857.737.500	2.714.857.737.500
242	Kab. Bangkalan	106.002.433.000	-	106.002.433.000	106.002.433.000
243	Kab. Banyuwangi	210.000.496.000	-	210.000.496.000	210.000.496.000
244	Kab. Blitar	204.003.305.000	-	204.003.305.000	204.003.305.000
245	Kab. Bojonegoro	181.097.658.000	-	181.097.658.000	181.097.658.000
246	Kab. Bondowoso	105.507.694.000	-	105.507.694.000	105.507.694.000
247	Kab. Gresik	132.647.614.000	-	132.647.614.000	132.647.614.000
248	Kab. Jember	267.865.152.000	-	267.865.152.000	267.865.152.000
249	Kab. Jombang	175.386.824.000	-	175.386.824.000	175.386.824.000
250	Kab. Kediri	223.566.464.000	-	223.566.464.000	223.566.464.000
251	Kab. Lamongan	219.647.068.000	-	219.647.068.000	219.647.068.000
252	Kab. Lumajang	129.048.307.000	-	129.048.307.000	129.048.307.000
253	Kab. Madiun	127.675.703.000	-	127.675.703.000	127.675.703.000
254	Kab. Magetan	151.578.678.000	-	151.578.678.000	151.578.678.000
255	Kab. Malang	295.633.435.000	-	295.633.435.000	295.633.435.000
256	Kab. Mojokerto	134.133.167.000	-	134.133.167.000	134.133.167.000
257	Kab. Nganjuk	208.437.498.000	-	208.437.498.000	208.437.498.000
258	Kab. Ngawi	153.929.459.000	-	153.929.459.000	153.929.459.000
259	Kab. Pacitan	145.874.996.000	-	145.874.996.000	145.874.996.000
260	Kab. Pamekasan	86.043.555.000	-	86.043.555.000	86.043.555.000
261	Kab. Pasuruan	174.680.109.000	-	174.680.109.000	174.680.109.000
262	Kab. Ponorogo	157.237.213.000	-	157.237.213.000	157.237.213.000
263	Kab. Probolinggo	154.913.927.000	-	154.913.927.000	154.913.927.000
264	Kab. Sampang	70.975.210.000	-	70.975.210.000	70.975.210.000
265	Kab. Sidoarjo	205.691.537.000	-	205.691.537.000	205.691.537.000
266	Kab. Situbondo	85.800.354.000	-	85.800.354.000	85.800.354.000
267	Kab. Sumeneh	108.225.273.000	-	108.225.273.000	108.225.273.000
268	Kab. Trenggalek	147.647.104.000	-	147.647.104.000	147.647.104.000
269	Kab. Tuban	151.941.147.000	-	151.941.147.000	151.941.147.000
270	Kab. Tulungagung	217.666.843.000	-	217.666.843.000	217.666.843.000
271	Kota Blitar	45.450.355.000	-	45.450.355.000	45.450.355.000
272	Kota Kediri	71.136.871.000	-	71.136.871.000	71.136.871.000
273	Kota Madiun	81.339.127.000	-	81.093.627.000	81.093.627.000
274	Kota Malang	154.326.955.000	-	154.326.955.000	154.326.955.000
275	Kota Mojokerto	27.922.735.000	-	27.922.735.000	27.922.735.000
276	Kota Pasuruan	36.125.875.000	-	36.125.875.000	36.125.875.000
277	Kota Probolinggo	43.709.951.000	-	43.709.951.000	43.709.951.000
278	Kota Surabaya	309.836.593.000	-	309.836.593.000	309.836.593.000

No.	Daerah	Pagu	Realisasi		
			Otonomi Khusus	Dana Penyesuaian	Realisasi
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5
279	Kota Batu	30.195.147.000	-	30.195.147.000	30.195.147.000
280	Provinsi Kalimantan Barat	537.402.930.000	-	512.118.727.500	512.118.727.500
281	Kab. Bengkayang	29.702.434.000	-	29.702.434.000	29.702.434.000
282	Kab. Landak	39.331.476.000	-	39.331.476.000	39.331.476.000
283	Kab. Kapuas Hulu	37.844.041.000	-	37.844.041.000	37.844.041.000
284	Kab. Ketapang	45.841.722.000	-	45.841.722.000	45.841.722.000
285	Kab. Pontianak	42.371.695.000	-	42.371.695.000	42.371.695.000
286	Kab. Sambas	71.939.253.000	-	71.939.253.000	71.939.253.000
287	Kab. Sanggau	48.746.077.000	-	48.746.077.000	48.746.077.000
288	Kab. Sintang	40.382.966.000	-	40.382.966.000	40.382.966.000
289	Kota Pontianak	85.150.713.000	-	85.150.713.000	85.150.713.000
290	Kota Singkawang	34.055.986.000	-	34.055.986.000	34.055.986.000
291	Kab. Kayong Utara	9.443.367.000	-	9.443.367.000	9.443.367.000
292	Kab. Kubu Raya	47.732.752.000	-	47.732.752.000	47.732.752.000
293	Kab. Sekadau	16.882.678.000	-	16.882.678.000	16.882.678.000
294	Kab. Melawi	24.343.968.000	-	24.343.968.000	24.343.968.000
295	Provinsi Kalimantan Tengah	248.809.029.000	-	241.156.464.000	241.156.464.000
296	Kab. Barito Selatan	28.567.964.000	-	28.567.964.000	28.567.964.000
297	Kab. Barito Utara	25.818.023.000	-	25.818.023.000	25.818.023.000
298	Kab. Kapuas	64.233.435.000	-	64.233.435.000	64.233.435.000
299	Kab. Kotawaringin Barat	49.754.499.000	-	49.754.499.000	49.754.499.000
300	Kab. Kotawaringin Timur	41.395.584.000	-	41.395.584.000	41.395.584.000
301	Kota Palangkaraya	65.451.732.000	-	65.451.732.000	65.451.732.000
302	Kab. Barito Timur	21.622.933.000	-	21.622.933.000	21.622.933.000
303	Kab. Murung Raya	15.334.713.000	-	15.334.713.000	15.334.713.000
304	Kab. Pulang Pisau	19.014.953.000	-	19.014.953.000	19.014.953.000
305	Kab. Gunung Mas	20.296.789.000	-	20.296.789.000	20.296.789.000
306	Kab. Lamandau	12.174.768.000	-	12.174.768.000	12.174.768.000
307	Kab. Sukamara	13.983.532.000	-	13.983.532.000	13.983.532.000
308	Kab. Katingan	27.184.842.000	-	27.184.842.000	27.184.842.000
309	Kab. Seruyan	16.130.908.000	-	16.130.908.000	16.130.908.000
310	Provinsi Kalimantan Selatan	324.701.520.000	-	310.998.815.000	310.998.815.000
311	Kab. Banjar	69.895.459.000	-	69.895.459.000	69.895.459.000
312	Kab. Barito Kuala	76.492.582.000	-	76.492.582.000	76.492.582.000
313	Kab. Hulu Sungai Selatan	50.280.210.000	-	50.280.210.000	50.280.210.000
314	Kab. Hulu Sungai Tengah	58.001.523.000	-	58.001.523.000	58.001.523.000
315	Kab. Hulu Sungai Utara	40.890.665.000	-	40.890.665.000	40.890.665.000
316	Kab. Kotabaru	38.005.461.000	-	38.005.461.000	38.005.461.000
317	Kab. Tabalong	57.314.038.000	-	57.314.038.000	57.314.038.000
318	Kab. Tanah Laut	53.951.948.000	-	53.951.948.000	53.951.948.000
319	Kab. Tapin	39.740.040.000	-	39.740.040.000	39.740.040.000
320	Kota Banjarbaru	43.948.799.000	-	43.948.799.000	43.948.799.000
321	Kota Banjarmasin	115.558.694.000	-	115.558.694.000	115.558.694.000
322	Kab. Balangan	29.398.998.000	-	29.398.998.000	29.398.998.000
323	Kab. Tanah Bumbu	31.434.648.000	-	31.434.648.000	31.434.648.000
324	Provinsi Kalimantan Timur	420.887.864.000	-	407.917.670.000	407.917.670.000
325	Kab. Berau	51.267.274.000	-	51.267.274.000	51.267.274.000
326	Kab. Bulungan	22.503.730.000	-	22.503.730.000	22.503.730.000
327	Kab. Kutai Kartanegara	136.737.704.000	-	136.737.704.000	136.737.704.000
328	Kab. Kutai Barat	31.231.634.000	-	31.231.634.000	31.231.634.000
329	Kab. Kutai Timur	33.284.458.000	-	33.284.458.000	33.284.458.000
330	Kab. Malinau	10.262.415.000	-	10.262.415.000	10.262.415.000
331	Kab. Nunukan	20.033.133.000	-	20.033.133.000	20.033.133.000
332	Kab. Pasir	36.500.837.000	-	36.500.837.000	36.500.837.000
333	Kota Balikpapan	63.214.153.000	-	63.214.153.000	63.214.153.000
334	Kota Bontang	21.445.333.000	-	21.445.333.000	21.445.333.000
335	Kab. Tana Tidung	2.622.341.000	-	2.622.341.000	2.622.341.000

No.	Daerah	Pagu	Realisasi		
			Otonomi Khusus	Dana Penyesuaian	Realisasi
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5
336	Kota Samarinda	98.941.846.000	.	98.941.846.000	98.941.846.000
337	Kota Tarakan	42.947.482.000	.	42.947.482.000	42.947.482.000
338	Kab. Penajam Paser Utara	22.448.419.000	.	22.448.419.000	22.448.419.000
339	Provinsi Sulawesi Utara	278.695.044.000	.	267.389.841.500	267.389.841.500
340	Kab. Bolaang Mongondow	33.152.041.000	.	33.152.041.000	33.152.041.000
341	Kab. Minahasa	109.815.346.000	.	109.815.346.000	109.815.346.000
342	Kab. Sangihe	33.372.079.000	.	33.372.079.000	33.372.079.000
343	Kota Bitung	57.842.609.000	.	57.842.609.000	57.842.609.000
344	Kota Manado	100.446.551.000	.	100.446.551.000	100.446.551.000
345	Kab. Kepulauan Talaud	25.420.299.000	.	25.420.299.000	25.420.299.000
346	Kab. Minahasa Selatan	55.810.686.000	.	55.810.686.000	55.810.686.000
347	Kab. Minahasa Tenggara	12.111.938.000	.	12.111.938.000	12.111.938.000
348	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	16.018.326.000	.	16.018.326.000	16.018.326.000
349	Kota Kotamubagu	33.193.943.000	.	33.193.943.000	33.193.943.000
350	Kab. Bolaang Mongondow Timur	6.824.459.000	.	6.824.459.000	6.824.459.000
351	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	3.586.549.000	.	3.586.549.000	3.586.549.000
352	Kota Tomohon	26.800.900.000	.	26.800.900.000	26.800.900.000
353	Kab. Minahasa Utara	50.192.084.000	.	50.192.084.000	50.192.084.000
354	Kab. Bolaang Mongondow Utara	10.995.483.000	.	10.995.483.000	10.995.483.000
355	Provinsi Gorontalo	121.630.890.000	.	116.123.470.000	116.123.470.000
356	Kab. Boalemo	21.052.571.000	.	21.052.571.000	21.052.571.000
357	Kab. Gorontalo	101.219.424.000	.	101.219.424.000	101.219.424.000
358	Kota Gorontalo	58.247.609.000	.	58.247.609.000	58.247.609.000
359	Kab. Pohuwato	18.770.895.000	.	18.770.895.000	18.770.895.000
360	Kab. Gorontalo Utara	15.619.905.000	.	15.619.905.000	15.619.905.000
361	Kab. Bone Bolango	37.288.508.000	.	37.288.508.000	37.288.508.000
362	Provinsi Sulawesi Tengah	323.079.150.000	.	308.504.693.000	308.504.693.000
363	Kab. Banggai	95.546.431.000	.	95.546.431.000	95.546.431.000
364	Kab. Banggai Kepulauan	53.735.706.000	.	53.735.706.000	53.735.706.000
365	Kab. Buol	23.060.581.000	.	23.060.581.000	23.060.581.000
366	Kab. Toli-Toli	31.748.453.000	.	31.748.453.000	31.748.453.000
367	Kab. Donggala	48.558.453.000	.	48.558.453.000	48.558.453.000
368	Kab. Morowali	39.698.517.000	.	39.698.517.000	39.698.517.000
369	Kab. Poso	73.455.481.000	.	73.455.481.000	73.455.481.000
370	Kota Palu	111.147.949.000	.	111.147.949.000	111.147.949.000
371	Kab. Parigi Moutong	47.716.339.000	.	47.716.339.000	47.716.339.000
372	Kab. Sigi	41.169.086.000	.	41.169.086.000	41.169.086.000
373	Kab. Tojo Una-Una	23.663.517.000	.	23.663.517.000	23.663.517.000
374	Provinsi Sulawesi Selatan	928.800.890.000	.	884.352.647.500	884.352.647.500
375	Kab. Bantaeng	40.820.067.000	.	40.820.067.000	40.820.067.000
376	Kab. Barru	46.466.624.000	.	46.466.624.000	46.466.624.000
377	Kab. Bone	175.430.662.000	.	175.430.662.000	175.430.662.000
378	Kab. Bulukumba	82.699.467.000	.	82.699.467.000	82.699.467.000
379	Kab. Enrekang	52.270.992.000	.	52.270.992.000	52.270.992.000
380	Kab. Gowa	95.865.273.000	.	95.865.273.000	95.865.273.000
381	Kab. Jeneponto	54.459.862.000	.	54.459.862.000	54.459.862.000
382	Kab. Luvu	65.139.570.000	.	65.139.570.000	65.139.570.000
383	Kab. Luvu Utara	74.209.006.000	.	74.209.006.000	74.209.006.000
384	Kab. Maros	84.136.806.000	.	84.136.806.000	84.136.806.000
385	Kab. Pangkajene Kepulauan	61.779.343.000	.	61.779.343.000	61.779.343.000
386	Kab. Pinrang	85.508.242.000	.	85.508.242.000	85.508.242.000
387	Kab. Selayar	33.182.041.000	.	33.182.041.000	33.182.041.000
388	Kab. Sidreng Rappang	59.854.189.000	.	59.854.189.000	59.854.189.000
389	Kab. Sinjai	56.570.368.000	.	56.570.368.000	56.570.368.000
390	Kab. Soppeng	68.502.486.000	.	68.502.486.000	68.502.486.000
391	Kab. Takalar	59.479.153.000	.	59.479.153.000	59.479.153.000
392	Kab. Tana Toraja	50.478.933.000	.	50.478.933.000	50.478.933.000

No.	Daerah	Pagu	Realisasi		
			Otonomi Khusus	Dana Penyesuaian	Realisasi
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5
393	Kab. Wajo	82.502.476.000	.	82.502.476.000	82.502.476.000
394	Kota Pare-pare	37.379.685.000	.	37.379.685.000	37.379.685.000
395	Kab. Toraja Utara	42.297.040.000	.	42.297.040.000	42.297.040.000
396	Kota Makassar	211.436.166.000	.	211.436.166.000	211.436.166.000
397	Kota Palopo	39.581.860.000	.	39.581.860.000	39.581.860.000
398	Kab. Luwu Timur	36.681.273.000	.	36.681.273.000	36.681.273.000
399	Provinsi Sulawesi Barat	154.686.420.000	.	147.486.011.500	147.486.011.500
400	Kab. Majene	42.193.653.000	.	42.193.653.000	42.193.653.000
401	Kab. Mamuju	46.279.654.000	.	46.279.654.000	46.279.654.000
402	Kab. Polewali Mandar	73.700.427.000	.	73.700.427.000	73.700.427.000
403	Kab. Mamasa	24.529.653.000	.	24.529.653.000	24.529.653.000
404	Kab. Mamuju Utara	10.955.534.000	.	10.955.534.000	10.955.534.000
405	Provinsi Sulawesi Tenggara	303.244.350.000	.	289.391.927.500	289.391.927.500
406	Kab. Buton	81.398.484.000	.	81.398.484.000	81.398.484.000
407	Kab. Konawe	57.152.582.000	.	57.152.582.000	57.152.582.000
408	Kab. Kolaka	80.551.449.000	.	80.551.449.000	80.551.449.000
409	Kab. Muna	77.812.598.000	.	77.812.598.000	77.812.598.000
410	Kota Kendari	71.949.779.000	.	71.949.779.000	71.949.779.000
411	Kota Bau-bau	48.419.518.000	.	48.419.518.000	48.419.518.000
412	Kab. Konawe Selatan	44.475.787.000	.	44.475.787.000	44.475.787.000
413	Kab. Bombana	26.131.240.000	.	26.131.240.000	26.131.240.000
414	Kab. Konawe Utara	10.126.945.000	.	10.126.945.000	10.126.945.000
415	Kab. Buton Utara	11.374.201.000	.	11.374.201.000	11.374.201.000
416	Kab. Wakatobi	22.516.593.000	.	22.516.593.000	22.516.593.000
417	Kab. Kolaka Utara	15.696.767.000	.	15.696.767.000	15.696.767.000
418	Provinsi Bali	389.632.310.000	.	371.909.282.500	371.909.282.500
419	Kab. Badung	99.717.322.000	.	99.717.322.000	99.717.322.000
420	Kab. Bangli	39.289.956.000	.	39.289.956.000	39.289.956.000
421	Kab. Buleleng	125.049.808.000	.	125.049.808.000	125.049.808.000
422	Kab. Gianyar	110.035.955.000	.	110.035.955.000	110.035.955.000
423	Kab. Jembrana	51.680.144.000	.	51.680.144.000	51.680.144.000
424	Kab. Karangasem	75.744.040.000	.	75.744.040.000	75.744.040.000
425	Kab. Klungkung	43.179.357.000	.	43.179.357.000	43.179.357.000
426	Kab. Tabanan	118.390.170.000	.	118.390.170.000	118.390.170.000
427	Kota Denpasar	89.705.986.000	.	89.705.986.000	89.705.986.000
428	Provinsi Nusa Tenggara Barat	461.894.400.000	.	440.267.110.000	440.267.110.000
429	Kab. Bima	96.317.124.000	.	96.317.124.000	96.317.124.000
430	Kab. Dompu	42.790.728.000	.	42.790.728.000	42.790.728.000
431	Kab. Lombok Barat	75.524.183.000	.	75.524.183.000	75.524.183.000
432	Kab. Lombok Tengah	101.120.804.000	.	101.120.804.000	101.120.804.000
433	Kab. Lombok Timur	121.546.115.000	.	121.546.115.000	121.546.115.000
434	Kab. Sumbawa	72.093.187.000	.	72.093.187.000	72.093.187.000
435	Kota Mataram	63.662.999.000	.	63.662.999.000	63.662.999.000
436	Kab. Lombok Utara	20.818.150.000	.	20.818.150.000	20.818.150.000
437	Kota Bima	47.049.024.000	.	47.049.024.000	47.049.024.000
438	Kab. Sumbawa Barat	21.170.645.000	.	21.170.645.000	21.170.645.000
439	Provinsi Nusa Tenggara Timur	714.538.400.000	.	683.264.995.000	683.264.995.000
440	Kab. Alor	29.679.619.000	.	29.679.619.000	29.679.619.000
441	Kab. Belu	44.704.930.000	.	44.704.930.000	44.704.930.000
442	Kab. Ende	48.926.795.000	.	48.926.795.000	48.926.795.000
443	Kab. Flores Timur	37.258.458.000	.	37.258.458.000	37.258.458.000
444	Kab. Kupang	54.152.276.000	.	54.152.276.000	54.152.276.000
445	Kab. Lembata	19.605.455.000	.	19.605.455.000	19.605.455.000
446	Kab. Manggarai	33.357.399.000	.	33.357.399.000	33.357.399.000
447	Kab. Ngada	22.487.289.000	.	22.487.289.000	22.487.289.000
448	Kab. Sikka	35.483.133.000	.	35.483.133.000	35.483.133.000
449	Kab. Sumba Barat	14.900.716.000	.	14.900.716.000	14.900.716.000

No.	Daerah	Pagu	Realisasi		
			Otonomi Khusus	Dana Penyesuaian	Realisasi
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5
450	Kab. Sumba Timur	31.232.944.000	-	31.232.944.000	31.232.944.000
451	Kab. Timor Tengah Selatan	50.943.689.000	-	50.943.689.000	50.943.689.000
452	Kab. Timor Tengah Utara	30.597.346.000	-	30.597.346.000	30.597.346.000
453	Kota Kupang	73.496.398.000	-	73.496.398.000	73.496.398.000
454	Kab. Rote Ndao	18.396.832.000	-	18.396.832.000	18.396.832.000
455	Kab. Nagekeo	22.964.176.000	-	22.964.176.000	22.964.176.000
456	Kab. Sumba Tengah	33.106.322.000	-	33.106.322.000	33.106.322.000
457	Kab. Sumba Barat Daya	17.565.149.000	-	17.565.149.000	17.565.149.000
458	Kab. Manggarai Timur	21.436.673.000	-	21.436.673.000	21.436.673.000
459	Kab. Sabu Raijua	9.174.640.000	-	9.174.640.000	9.174.640.000
460	Kab. Manggarai Barat	24.741.019.000	-	24.741.019.000	24.741.019.000
461	Provinsi Maluku	218.698.870.000	-	209.562.135.000	209.562.135.000
462	Kab. Maluku Tenggara Barat	26.680.653.000	-	26.680.653.000	26.680.653.000
463	Kab. Maluku Tengah	66.682.807.000	-	66.682.807.000	66.682.807.000
464	Kab. Maluku Tenggara	23.278.969.000	-	23.278.969.000	23.278.969.000
465	Kab. Pulau Buru	19.995.946.000	-	19.995.946.000	19.995.946.000
466	Kota Ambon	91.752.437.000	-	91.752.437.000	91.752.437.000
467	Kab. Seram Bagian Barat	31.766.240.000	-	31.766.240.000	31.766.240.000
468	Kab. Seram Bagian Timur	11.825.218.000	-	8.661.718.000	8.661.718.000
469	Kab. Maluku Barat Daya	11.981.651.000	-	11.981.651.000	11.981.651.000
470	Kab. Buru Selatan	6.338.118.000	-	6.338.118.000	6.338.118.000
471	Kab. Kepulauan Aru	12.193.563.000	-	12.193.563.000	12.193.563.000
472	Kota Tual	12.753.073.000	-	12.753.073.000	12.753.073.000
473	Provinsi Maluku Utara	153.077.010.000	-	146.423.577.500	146.423.577.500
474	Kab. Halmahera Tengah	8.018.459.000	-	8.018.459.000	8.018.459.000
475	Kab. Halmahera Barat	15.520.681.000	-	15.520.681.000	15.520.681.000
476	Kota Ternate	37.174.412.000	-	37.174.412.000	37.174.412.000
477	Kab. Halmahera Timur	8.843.478.000	-	8.843.478.000	8.843.478.000
478	Kota Tidore Kepulauan	24.113.384.000	-	24.113.384.000	24.113.384.000
479	Kab. Kepulauan Sula	10.418.687.000	-	10.418.687.000	10.418.687.000
480	Kab. Pulau Morotai	5.182.229.000	-	5.182.229.000	5.182.229.000
481	Kab. Halmahera Selatan	17.343.616.000	-	17.343.616.000	17.343.616.000
482	Kab. Halmahera Utara	19.140.782.000	-	19.140.782.000	19.140.782.000
483	Kab. Yalimo	585.000.000	-	585.000.000	585.000.000
484	Kab. Lanny Jaya	1.587.000.000	-	396.750.000	396.750.000
485	Provinsi Papua	4.736.663.156.000	4.404.830.706.000	315.601.510.000	4.720.432.216.000
486	Kab. Biak Numfor	16.312.599.000	-	16.312.599.000	16.312.599.000
487	Kab. Jayapura	24.363.782.000	-	24.363.782.000	24.363.782.000
488	Kab. Jayawijaya	10.620.803.000	-	10.620.803.000	10.620.803.000
489	Kab. Merauke	35.565.963.000	-	35.565.963.000	35.565.963.000
490	Kab. Mimika	9.260.140.000	-	9.260.140.000	9.260.140.000
491	Kab. Nabire	14.402.093.000	-	14.402.093.000	14.402.093.000
492	Kab. Paniai	8.383.820.000	-	8.383.820.000	8.383.820.000
493	Kab. Puncak Jaya	2.736.194.000	-	2.736.194.000	2.736.194.000
494	Kab. Kepulauan Yapen	14.423.399.000	-	14.423.399.000	14.423.399.000
495	Kota Jayapura	67.792.384.000	-	67.792.384.000	67.792.384.000
496	Kab. Sarmi	2.867.907.000	-	2.867.907.000	2.867.907.000
497	Kab. Keerom	7.800.291.000	-	7.800.291.000	7.800.291.000
498	Kab. Yahukimo	3.965.701.000	-	2.161.425.250	2.161.425.250
499	Kab. Pegunungan Bintang	3.382.210.000	-	3.382.210.000	3.382.210.000
500	Kab. Tolikara	1.842.547.000	-	1.842.547.000	1.842.547.000
501	Kab. Boven Digoel	5.382.099.000	-	5.382.099.000	5.382.099.000
502	Kab. Mappi	6.470.737.000	-	6.470.737.000	6.470.737.000
503	Kab. Asmat	4.383.568.000	-	4.383.568.000	4.383.568.000
504	Kab. Waropen	3.828.888.000	-	3.828.888.000	3.828.888.000
505	Kab. Mamberamo Raya	2.545.528.000	-	709.528.000	709.528.000
506	Kab. Mamberamo Tengah	1.209.000.000	-	302.250.000	302.250.000

No.	Daerah	Pagu	Realisasi		
			Otonomi Khusus	Dana Penyesuaian	Realisasi
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5
507	Kab. Nduga	1.329.000.000	.	1.329.000.000	1.329.000.000
508	Kab. Dogiyai	2.119.037.000	.	2.119.037.000	2.119.037.000
509	Kab. Intan Jaya	1.130.566.000	.	453.316.000	453.316.000
510	Kab. Puncak	2.243.018.000	.	609.518.000	609.518.000
511	Kab. Deiyai	1.689.000.000	.	1.689.000.000	1.689.000.000
512	Kab. Supiori	3.017.907.000	.	3.017.907.000	3.017.907.000
513	Provinsi Papua Barat	2.187.249.388.000	2.071.458.058.000	110.323.525.000	2.181.781.583.000
514	Kab. Sorong	16.584.368.000	.	16.584.368.000	16.584.368.000
515	Kab. Manokwari	24.633.434.000	.	24.633.434.000	24.633.434.000
516	Kab. Fak Fak	13.665.768.000	.	13.665.768.000	13.665.768.000
517	Kota Sorong	24.927.861.000	.	24.927.861.000	24.927.861.000
518	Kab. Sorong Selatan	5.715.590.000	.	5.715.590.000	5.715.590.000
519	Kab. Raja Ampat	3.562.926.000	.	3.562.926.000	3.562.926.000
520	Kab. Teluk Bintuni	3.882.682.000	.	3.882.682.000	3.882.682.000
521	Kab. Teluk Wondama	2.278.869.000	.	2.278.869.000	2.278.869.000
522	Kab. Tambrauw	550.528.000	.	550.528.000	550.528.000
523	Kab. Maybrat	1.658.566.000	.	1.658.566.000	1.658.566.000
524	Kab. Kaimana	6.310.741.000	.	6.310.741.000	6.310.741.000
525	Dana Cadangan
JUMLAH		70.423.877.528.000	11.952.577.528.000	57.399.371.728.000	69.351.949.256.000

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

DAFTAR 4.A

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA JASINONSI
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2012

URAIAN	31 DESEMBER 2012
Pendapatan Operasional	
Pendapatan Iuran Penyiaran	-
Pendapatan Jasa Siaran	23.195.424.854
Pendapatan Jasa Non Siaran	13.316.815.101
Pendapatan Operasional Lainnya	2.306.587.020
Jumlah Pendapatan Operasional	38.818.826.975
Beban Operasional	(39.079.049.558)
Surplus (Defisit) Operasional	(260.222.583)
Pendapatan Non Operasional	-
Beban Non Operasional	(89.862.515)
Surplus (Defisit) Non Operasional	(89.862.515)
Surplus (Defisit) Bersih	(350.085.098)

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

DAFTAR 4.B

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA JASINONSI
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2012

URAIAN	TVRI
Pendapatan Operasional	
Kerjasama dengan Pihak III	104.205.066.700
Hasil Iklan	33.649.036.997
Liputan Berita/Coverage	1.964.274.643
Penerimaan Operasional Lainnya	25.311.608.121
Jumlah Pendapatan Operasional	165.129.986.461
Beban Operasional	(151.744.532.461)
Surplus (Defisit) Operasional	13.385.454.000
Pendapatan Non Operasional	12.338.394.521
Beban Non Operasional	(10.433.864.261)
Surplus (Defisit) Non Operasional	1.904.530.260
Surplus (Defisit) Bersih	15.289.984.260

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

DAFTAR 4.C

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA JASINONSI
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2012

URAIAN	TVRI	RRI
Pendapatan Operasional		
Kerjasama dengan Pihak III	104.205.066.700	-
Hasil Iklan	33.649.036.997	-
Liputan Berita/Coverage	1.964.274.643	-
Penerimaan Operasional Lainnya	25.311.608.121	2.306.587.020
Pendapatan Iuran Penyiaran	-	-
Pendapatan Jasa Siaran	-	23.195.424.854
Pendapatan Jasa Non Siaran	-	13.316.815.101
Jumlah Pendapatan Operasional	165.129.986.461	38.818.826.975
Beban Operasional	(151.744.532.461)	(39.079.049.558)
Surplus (Defisit) Operasional	13.385.454.000	(260.222.583)
Pendapatan Non Operasional	12.338.394.521	-
Beban Non Operasional	(10.433.864.261)	(89.862.515)
Surplus (Defisit) Non Operasional	1.904.530.260	(89.862.515)
Surplus (Defisit) Bersih	15.289.984.260	(350.085.098)

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

DAFTAR 5

**REKENING KHUSUS
PER 31 DESEMBER 2012**

No	Uraian	Jumlah
1	Reksus Dalam Valuta Rupiah	Rp 338.495.260.131
2	Reksus Dalam Valuta AUD	Rp 523.015.088.320
3	Reksus Dalam Valuta EUR	Rp 515.156.462
4	Reksus Dalam Valuta JPY	Rp 133.472.243.181
5	Reksus Dalam Valuta USD	Rp 911.715.686.515
6	Rekening Dana Talangan No. 500.000001980	Rp 0
7	Rekening Sub BUN Dana Talangan IBRD No. 561.000001980	Rp 0
8	Rekening Sub BUN Dana Talangan ADB No. 561.000002980	Rp 0
9	Rekening Sub BUN Dana Talangan OECF/JBIC No. 561.000003980	Rp 0
10	Rekening Sub BUN Dana Talangan Lainnya No. 561.000005980	Rp 0
11	Rekening Penerimaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri Dalam Rangka Reksus Dalam Rupiah No. 609.000000980	Rp 0
12	Rekening Penerimaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri Dalam Rangka Reksus Dalam Valuta USD No. 609.100411980	Rp 0
13	Rekening Penerimaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri Dalam Rangka Reksus Dalam Valuta Yen No. 609.002111980	Rp 0
14	Rekening Penerimaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri Dalam Rangka Reksus Dalam Valuta Asing Selain USD dan Yen USD No. 519.000120980	Rp 0
TOTAL		Rp 1.907.213.434.609

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

DAFTAR 6

**REKENING PEMERINTAH LAINNYA DI BANK INDONESIA
PER 31 DESEMBER 2012 DAN 31 DESEMBER 2011**

Dalam Rupiah

NO	NO -- NAMA REKENING		31/12/2012	31/12/2011
1	600000411980	Depkeu K / Hasil Minyak Perjanjian Karya Production Sharing	13.005.460.815.909	6.237.138.752.226
2	508000071980	Penerimaan Pertambangan dan perikanan	126.612.654.459	123.745.646.379
3	508000084980	Penerimaan Panas Bumi	347.992.721.305	197.960.188.008
		JUMLAH I	13.480.066.191.673	6.558.844.586.613

DAFTAR 7A

LAPORAN KEANGGARAN PERBENTARAN PUSAT TAHUN 2012 ALOKASI

BUMIHANG RENCANA KERJA USKAWAN MNC 2011-2013

No	MNC	MNC		TDS			LL			Saluran Overfing MNC	Saluran Overfing	Total	Saluran Anggaran Tahunan 2012 Revisi (Rp.000.000.000)			Saluran Overfing	Total		
		Kategori		MNC			MNC						Saluran Overfing	Total	Saluran Anggaran			Saluran Overfing	Total
		Elabor	MNC	MNC	MNC	MNC	MNC	US\$	US\$										
1	PT. BUNDA	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1		
2	PT. BUNDA	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2		
3	PT. BUNDA	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3		
4	PT. BUNDA	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4		
5	PT. BUNDA	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5		
6	PT. BUNDA	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6		
7	PT. BUNDA	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7		
8	PT. BUNDA	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8		
9	PT. BUNDA	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9		
10	PT. BUNDA	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0		
11	PT. BUNDA	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1		
12	PT. BUNDA	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2		
13	PT. BUNDA	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3		
14	PT. BUNDA	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4		
15	PT. BUNDA	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5		
16	PT. BUNDA	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6		
17	PT. BUNDA	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7		
18	PT. BUNDA	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8		
19	PT. BUNDA	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9		
20	PT. BUNDA	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0		
21	PT. BUNDA	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1		
22	PT. BUNDA	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2		
23	PT. BUNDA	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3		
24	PT. BUNDA	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4		
25	PT. BUNDA	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5		
26	PT. BUNDA	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6		
27	PT. BUNDA	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7		
28	PT. BUNDA	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8		
29	PT. BUNDA	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9		
30	PT. BUNDA	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0		
31	PT. BUNDA	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1		
32	PT. BUNDA	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2		
33	PT. BUNDA	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3		
34	PT. BUNDA	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4		
35	PT. BUNDA	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5		
36	PT. BUNDA	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6		
37	PT. BUNDA	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7		
38	PT. BUNDA	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8		
39	PT. BUNDA	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9		
40	PT. BUNDA	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0		

DAFTAR BERKAJIAN

DAFTAR 7A

LAPORAN KEANGGAPAN PERHIMPAN PUSAT TAHUN 2012 ANGGREB

BORDIRANG HASIL RESOLUSI USKORAN HASIL MIRCIS TAHUN 2013

No.	Nama	MHS	Skoransi dan Tagihan (Fkg Tahun 2012) h-h		Skoransi dan Tagihan (Fkg Tahun 2012) h-h		Program BINAUDS		Fee Pekerjaan Mhs	DMD/FM	Unk/Inf/Ingl/ORS
			Skoransi dan Tagihan (Fkg Tahun 2012) h-h	Skoransi dan Tagihan (Fkg Tahun 2012) h-h	PPH Mhs	PRPD Mhs	PPH Mhs	PRPD Mhs			
			By	US\$	By	US\$	By	US\$	By	US\$	US\$
1	BERSEKUTU										
2	BERSEKUTU										
3	BERSEKUTU										
4	BERSEKUTU										
5	BERSEKUTU										
6	BERSEKUTU										
7	BERSEKUTU										
8	BERSEKUTU										
9	BERSEKUTU										
10	BERSEKUTU										
11	BERSEKUTU										
12	BERSEKUTU										
13	BERSEKUTU										
14	BERSEKUTU										
15	BERSEKUTU										
16	BERSEKUTU										
17	BERSEKUTU										
18	BERSEKUTU										
19	BERSEKUTU										
20	BERSEKUTU										
21	BERSEKUTU										
22	BERSEKUTU										
23	BERSEKUTU										
24	BERSEKUTU										
25	BERSEKUTU										
26	BERSEKUTU										
27	BERSEKUTU										
28	BERSEKUTU										
29	BERSEKUTU										
30	BERSEKUTU										

DAFTAR BERKAS 23B

RIK.134.73

DIFPERINDA.08

LAPORAN KEMERDEKAAN PERUSAHAAN DAN PISOT TAHUN 2012 ANGGARAN

REVISI PERUSAHAAN DAN PISOT TAHUN 2012

No	NAMA PERUSAHAAN	PENDAPATAN PERUSAHAAN DAN PISOT TAHUN 2012 ANGGARAN		PENDAPATAN PERUSAHAAN DAN PISOT TAHUN 2012 REVISI		PENDAPATAN PERUSAHAAN DAN PISOT TAHUN 2012 ANGGARAN		PENDAPATAN PERUSAHAAN DAN PISOT TAHUN 2012 REVISI		PENDAPATAN PERUSAHAAN DAN PISOT TAHUN 2012 ANGGARAN		PENDAPATAN PERUSAHAAN DAN PISOT TAHUN 2012 REVISI	
		Uraian	Angka	Uraian	Angka	Uraian	Angka	Uraian	Angka	Uraian	Angka	Uraian	Angka
1	PERUSAHAAN DAN PISOT												
2	PERUSAHAAN DAN PISOT												
3	PERUSAHAAN DAN PISOT												
4	PERUSAHAAN DAN PISOT												
5	PERUSAHAAN DAN PISOT												
6	PERUSAHAAN DAN PISOT												
7	PERUSAHAAN DAN PISOT												
8	PERUSAHAAN DAN PISOT												
9	PERUSAHAAN DAN PISOT												
10	PERUSAHAAN DAN PISOT												
11	PERUSAHAAN DAN PISOT												
12	PERUSAHAAN DAN PISOT												
13	PERUSAHAAN DAN PISOT												
14	PERUSAHAAN DAN PISOT												
15	PERUSAHAAN DAN PISOT												
16	PERUSAHAAN DAN PISOT												
17	PERUSAHAAN DAN PISOT												
18	PERUSAHAAN DAN PISOT												
19	PERUSAHAAN DAN PISOT												
20	PERUSAHAAN DAN PISOT												
21	PERUSAHAAN DAN PISOT												
22	PERUSAHAAN DAN PISOT												
23	PERUSAHAAN DAN PISOT												
24	PERUSAHAAN DAN PISOT												
25	PERUSAHAAN DAN PISOT												
26	PERUSAHAAN DAN PISOT												
27	PERUSAHAAN DAN PISOT												
28	PERUSAHAAN DAN PISOT												
29	PERUSAHAAN DAN PISOT												
30	PERUSAHAAN DAN PISOT												
31	PERUSAHAAN DAN PISOT												
32	PERUSAHAAN DAN PISOT												
33	PERUSAHAAN DAN PISOT												
34	PERUSAHAAN DAN PISOT												
35	PERUSAHAAN DAN PISOT												
36	PERUSAHAAN DAN PISOT												
37	PERUSAHAAN DAN PISOT												
38	PERUSAHAAN DAN PISOT												
39	PERUSAHAAN DAN PISOT												
40	PERUSAHAAN DAN PISOT												
41	PERUSAHAAN DAN PISOT												
42	PERUSAHAAN DAN PISOT												
43	PERUSAHAAN DAN PISOT												
44	PERUSAHAAN DAN PISOT												
45	PERUSAHAAN DAN PISOT												
46	PERUSAHAAN DAN PISOT												
47	PERUSAHAAN DAN PISOT												
48	PERUSAHAAN DAN PISOT												
49	PERUSAHAAN DAN PISOT												
50	PERUSAHAAN DAN PISOT												
51	PERUSAHAAN DAN PISOT												
52	PERUSAHAAN DAN PISOT												
53	PERUSAHAAN DAN PISOT												
54	PERUSAHAAN DAN PISOT												
55	PERUSAHAAN DAN PISOT												
56	PERUSAHAAN DAN PISOT												
57	PERUSAHAAN DAN PISOT												
58	PERUSAHAAN DAN PISOT												
59	PERUSAHAAN DAN PISOT												
60	PERUSAHAAN DAN PISOT												
61	PERUSAHAAN DAN PISOT												
62	PERUSAHAAN DAN PISOT												
63	PERUSAHAAN DAN PISOT												
64	PERUSAHAAN DAN PISOT												
65	PERUSAHAAN DAN PISOT												
66	PERUSAHAAN DAN PISOT												
67	PERUSAHAAN DAN PISOT												
68	PERUSAHAAN DAN PISOT												
69	PERUSAHAAN DAN PISOT												
70	PERUSAHAAN DAN PISOT												
71	PERUSAHAAN DAN PISOT												
72	PERUSAHAAN DAN PISOT												
73	PERUSAHAAN DAN PISOT												
74	PERUSAHAAN DAN PISOT												
75	PERUSAHAAN DAN PISOT												
76	PERUSAHAAN DAN PISOT												
77	PERUSAHAAN DAN PISOT												
78	PERUSAHAAN DAN PISOT												
79	PERUSAHAAN DAN PISOT												
80	PERUSAHAAN DAN PISOT												
81	PERUSAHAAN DAN PISOT												
82	PERUSAHAAN DAN PISOT												
83	PERUSAHAAN DAN PISOT												
84	PERUSAHAAN DAN PISOT												
85	PERUSAHAAN DAN PISOT												
86	PERUSAHAAN DAN PISOT												
87	PERUSAHAAN DAN PISOT												
88	PERUSAHAAN DAN PISOT												
89	PERUSAHAAN DAN PISOT												
90	PERUSAHAAN DAN PISOT												
91	PERUSAHAAN DAN PISOT												
92	PERUSAHAAN DAN PISOT												
93	PERUSAHAAN DAN PISOT												
94	PERUSAHAAN DAN PISOT												
95	PERUSAHAAN DAN PISOT												
96	PERUSAHAAN DAN PISOT												
97	PERUSAHAAN DAN PISOT												
98	PERUSAHAAN DAN PISOT												
99	PERUSAHAAN DAN PISOT												
100	PERUSAHAAN DAN PISOT												

DANA REKENING MIGAS No. 600.000411980 YANG DICADANGKAN PER 31 DESEMBER 2012
DALAM RANGKA MEMENUHI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PEMERINTAH SEKTOR MIGAS

URAIAN	LANDASAN HUKUM	JUMLAH		KETERANGAN
		USD	Ekuivalen RP	
A. Pembayaran kewajiban Pemerintah		532.703.689,64	5.161.244.678.786,93	
PBB Migas	- Kontrak FSC - UU No. 8 tahun 1971	14.953.310,23	144.599.599.876,53	a. Perkiraan cadangan pembayaran PBB Migas tahun 2011 untuk Energy Equity Epic (Sengkang) dan BR- Winagar Ltd. total sebesar Rp74,5 miliar (berdasarkan hasil Audit BPK) (S-138F/J2012 tanggal 10 Juni 2012) b. Perkiraan sementara pembayaran PBB migas tahun 2012 untuk KKKS Petrochina. Berkurangnya sebesar 70 miliar yang belum dapat diselesaikan pada tahun 2012 disebabkan karena adanya sengketa perhitungan
Reimbursement PFN	- PMK No.45/KM/K.04/1997 - Kontrak FSC - UU No. 8 tahun 1971 - PMK No.64/PMK/02/2005	31.761.984,49	307.138.196.609,00	Tagihan reimbursement PFN bulan September s.d. Oktober 2012, serta Tagihan reimbursement PFN ConocoPhillips Gresik dan ConocoPhillips Indonesia s.d. bulan Agustus 2012 yang ditunda penyelesaiannya karena dikaitkan dengan penyelesaian kewajiban overlifting KKKS yang belum diselesaikan sesuai usulan BPMIGAS
PDRO	- Undang-undang No.8 tahun 1971	3.255.283,37	31.478.590.218,90	Tagihan yang sudah diterima pada 2012 namun belum diselesaikan berkenaan dengan selanjutnya dokumen
a. PPI Non PLN	- Peraturan Pemerintah No.41 tahun 1982 - Undang-undang No.34 tahun 2000		21.780.640.292,71	
b. Pajak ABT&AP	- Peraturan Pemerintah No.85 tahun 2000 - Keputusan Menteri No.12 tahun 2002		9.697.949.926,19	
Fee Penjualan	- Peraturan Pemerintah No.22 tahun 2001 - Peraturan pemerintah No.42 tahun 2002 - Peraturan pemerintah No.35 tahun 2004	325.052.864,74	3.143.259.481.1435,80	a. Perkiraan tagihan Fee Penjualan tahun 2011 yang diperkrakan sama dengan tahun 2010 b. Perkiraan tagihan Fee Penjualan tahun 2012 yang diperkrakan sama dengan tahun 2010
DMD Fee KKKS	- Kontrak FSC - UU No. 8 tahun 1971 - PMK No.56/PMK/02/2005	157.580.446,91	1.524.769.920.652,70	a. Tagihan DMD Fee ConocoPhillips Indonesia dan ConocoPhillips Gresik yang ditunda penyelesaiannya karena dikaitkan dengan penyelesaian overlifting Tagihan ConocoPhillips bulan Desember 2011 sesuai surat BPMIGAS No.0195BPRC/2000/2012/54 sebesar USD17,9 juta
		3.407.487,46		b.

Lampiran 8: MEMORANDUM PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUGUST)

DAFTAR 7.C

**DANA REKENING MIGAS No. 600.000411980 YANG DICADANGKAN PER 31 DESEMBER 2012
DALAM RANGKA MEMENUHI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PEMERINTAH SEKTOR MIGAS**

URAIAN	LANDASAN HUKUM	JUMLAH		KETERANGAN
		USD	Ekuivalen RP	
		85.587.742,18		g. Tagihan ConocoPhillip bulan Jan 2012 sesuai surat BPFMIGAS No.0953/BFC/2000/2012/S4 sebesar USD6.76 juta
		503.486,00		d. Tagihan ConocoPhillip bulan Feb 2012 sesuai surat BPFMIGAS No.0521/BFC/2000/2012/S4 sebesar USD12,01 juta
		17.909.001,61		e. Tagihan ConocoPhillip bulan Mar 2012 sesuai surat BPFMIGAS No.0916/BFC/2000/2012/S4 sebesar USD9.06 juta
		8.783.516,80		f. Tagihan ConocoPhillip bulan Apr 2012 sesuai surat BPFMIGAS No.1087/BFC/2000/2012/S4 sebesar USD7,75 juta
		12.006.696,01		g. Tagihan ConocoPhillip bulan Juni 2012 sesuai surat BPFMIGAS No.1327/BFC/2000/2012/S4 sebesar USD6.97 juta
		9.083.563,41		h. Tagihan ConocoPhillip bulan Juni 2012 sesuai surat BPFMIGAS No.1492/BFC/2000/2012/S4 sebesar USD5.72 juta
		7.747.986,67		i. Tagihan ConocoPhillip bulan Oktober 2012 sesuai surat SKKMIGAS No.0569/BFC/2000/2012/S4 sebesar USD22.98 juta
		6.970.760,11		J. Insentif DMO Fee Tallisman OK sesuai surat BPFMIGAS No.0960/BFC/2000/2012/S4 sebesar USD3.55 jt
		5.720.296,61		

DAFTAR MERKA.307

Lampiran 8A MEMORANDUM PERINTAH TAHUN 2012 (AUGUST)

DAFTAR 7.C

**DANA REKENING MIGAS No. 600.000411980 YANG DICADANGKAN PER 31 DESEMBER 2012
DALAM RANGKA MEMENUHI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PEMERINTAH SEKTOR MIGAS**

URAIAN	LANDASAN HUKUM	JUMLAH		KETERANGAN
		USD	Ekuivalen RP	
B Pendapatan yang offunda	Pendapat Komite Standar Akuntansi Pemerintah melaik surat No.S-80/KSA/PI/2007 tgl 30 April 2007	529.708.768,36	5.122.283.693.371,07	
Perkiraan PPh migas yang belum lengkap dokumen pendukungnya	- Undang-undang No.8 tahun 1971 - Peraturan Pemerintah No.41 tahun 1981 - Kontinik PSC - Laporan PSC 7.1 & 7.2	300.183.155,65	2.902.771.115.135,50	Perkiraan Penerimaan PPh Migas yang ditangguhkan berkenaan dengan belum lengkapnya dokumen pendukung sehingga belum dapat diidentifikasi jenis dan walib palkatnya.
PfNB Lainnya dari Kegiatan Usaha Hulu Migas		7.341.554,87	70.992.932.292,90	Penerimaan bonus produksi dan transfer material yang sedang dalam proses penyelesaian
Perkiraan PNBPF SDA Migas yang di tangguhkan		222.184.037,84	2.148.519.645.942,67	Penerimaan SDA Migas per tanggal 20 s.d. 28 Desember 2012
TOTAL CADANGAN		1.082.412.448,00	10.273.528.372.158,00	

Catatan:
Perhitungan menggunakan kurs tengah BI per 28 Desember 2012 (Rp9,6700USD)
Saldo akhir per tanggal 28 Desember 2012

DAFTAR MERKA 298

Lampiran 16 MEMORANDUM PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUGUST)

DAFTAR 7.C

**DANA REKENING MIGAS No. 600.000411980 YANG DICADANGKAN PER 31 DESEMBER 2012
DALAM RANGKA MEMENUHI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PEMERINTAH SEKTOR MIGAS**

URAIAN	LANDASAN HUKUM	JUMLAH		KETERANGAN
		USD	Ekuivalen RP	
A. Pembayaran kewajiban Pemerintah		532.703.689,64	5.161.244.678.786,93	
PBB Migas	- Kontrak FSC - UU No. 8 tahun 1971	14.953.310,23	144.598.599.876,53	a. Perkiraan cadangan pembayaran PBB Migas tahun 2011 untuk Energy Equity Epic (Sengkang) dan BR - Winagar Ltd. total sebesar Rp74,5 miliar (berdasarkan hasil Audit BPK) (S-138F/J2012 tanggal 10 Juni 2012) b. Perkiraan sediaan pembayaran PBB migas tahun 2012 untuk KKKS Petrochina. Berkurangnya sebesar 70 miliar yang belum dapat diselesaikan pada tahun 2012 disebabkan karena adanya sengketa perhitungan
Reimbursement PPN	- PMK No.45/KM/K.04/1997 - Kontrak FSC - UU No. 8 tahun 1971 - PMK No.64/PMK/02/2005	31.761.984,49	307.138.196.609,00	Tagihan reimbursement PPN bulan September s.d. Oktober 2012, serta Tagihan reimbursement PPN ConocoPhillips Gresik dan ConocoPhillips Indonesia s.d. bulan Agustus 2012 yang ditunda penyelesaiannya karena dikaitkan dengan penyelesaian kewajiban overlifting KKKS yang belum diselesaikan sesuai usulan BPMIGAS
PDRO	- Undang-undang No.8 tahun 1971	3.255.283,37	31.478.590.218,90	Tagihan yang sudah diterima pada 2012 namun belum diselesaikan berkenaan dengan selanjutnya dokumen
a. PPN Non PLN	- Peraturan Pemerintah No.41 tahun 1982 - Undang-undang No.34 tahun 2000		21.780.640.292,71	
b. Pajak ABT&AP	- Peraturan Pemerintah No.85 tahun 2000 - Keputusan Menteri No.12 tahun 2002		9.697.949.926,19	
Fee Penjualan	- Peraturan Pemerintah No.22 tahun 2001 - Peraturan pemerintah No.42 tahun 2002 - Peraturan pemerintah No.35 tahun 2004	325.052.864,74	3.143.259.481.1435,80	a. Perkiraan tagihan Fee Penjualan tahun 2011 yang diperkrakan sama dengan tahun 2010 b. Perkiraan tagihan Fee Penjualan tahun 2012 yang diperkrakan sama dengan tahun 2010
DMD Fee KKKS	- Kontrak FSC - UU No. 8 tahun 1971 - PMK No.56/PMK/02/2005	157.580.446,91	1.524.769.920.652,70	a. Tagihan DMD Fee ConocoPhillips Indonesia dan ConocoPhillips Gresik yang ditunda penyelesaiannya karena dikaitkan dengan penyelesaian overlifting Tagihan ConocoPhillip bulan Desember 2011 sesuai surat BPMIGAS No.0195BPRC/2000/2012/S4 sebesar USD17,97 juta b. No.0195BPRC/2000/2012/S4 sebesar USD17,97 juta
		3.407.487,46		

DAFTAR MERKA.246

DAFTAR 7.C

168 BANGUNAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUGUST)

DANA REKENING MIGAS No. 600.000411980 YANG DICADANGKAN PER 31 DESEMBER 2012
DALAM RANGKA MEMENUHI KEWAJIBAN KEWAJIBAN PEMERINTAH SEKTOR MIGAS

URAIAN	LANDASAN HUKUM	JUMLAH		KETERANGAN
		USD	Ekuivalen RP	
		85.587.742,18		g. Tagihan ConocoPhillip bulan Jan 2012 sesuai surat BPFMIGAS No. 0953/BFC/2000/2012/S4 sebesar USD6.76 juta
		503.486,00		d. Tagihan ConocoPhillip bulan Feb 2012 sesuai surat BPFMIGAS No.0521/BFC/2000/2012/S4 sebesar USD12,01 juta
		17.909.001,61		e. Tagihan ConocoPhillip bulan Mar 2012 sesuai surat BPFMIGAS No.0916/BFC/2000/2012/S4 sebesar USD9.06 juta
		8.783.516,80		f. Tagihan ConocoPhillip bulan Apr 2012 sesuai surat BPFMIGAS No.1087/BFC/2000/2012/S4 sebesar USD7,75 juta
		12.006.696,01		g. Tagihan ConocoPhillip bulan Juni 2012 sesuai surat BPFMIGAS No. 1327/BFC/2000/2012/S4 sebesar USD6.97 juta
		9.083.563,41		h. Tagihan ConocoPhillip bulan Juni 2012 sesuai surat BPFMIGAS No. 1492/BFC/2000/2012/S4 sebesar USD5.72 juta
		7.747.986,67		i. Tagihan ConocoPhillip bulan Oktober 2012 sesuai surat SKKMIGAS No.0569/BFC/2000/2012/S4 sebesar USD22.98 juta
		6.970.760,11		J. Insentif DMO Fee Tallisman OK sesuai surat BPFMIGAS No.0960/BFC/2000/2012/S4 sebesar USD3.55 jt
		5.720.296,61		

DAFTAR MERKA CA. 207

Lampiran 16 MEMORANDUM PEMERINTAH TAHUN 2012 (AUGUST)

DAFTAR 7.C

**DANA REKENING MIGAS No. 600.000411980 YANG DICADANGKAN PER 31 DESEMBER 2012
DALAM RANGKA MEMENUHI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PEMERINTAH SEKTOR MIGAS**

URAIAN	LANDASAN HUKUM	JUMLAH		KETERANGAN
		USD	Ekuivalen RP	
B Pendapatan yang offunda	Pendapat Komite Standar Akuntansi Pemerintah melalui surat No.S-80/KSA/PI/2007 tgl 30 April 2007	529.708.768,36	5.122.283.693.371,07	
Perkiraan PPh migas yang belum lengkap dokumen pendukungnya	- Undang-undang No.8 tahun 1971 - Peraturan Pemerintah No.41 tahun 1981; - Kontrak PSC - Laporan PSC 7.1 & 7.2	300.183.155,65	2.902.771.115.135,50	Perkiraan Penerimaan PPh Migas yang ditangguhkan berkenaan dengan belum lengkapnya dokumen pendukung sehingga belum dapat diidentifikasi jenis dan walib pajaknya.
PNBP Lainnya dari Kegiatan Usaha Hulu Migas		7.341.564,87	70.992.932.292,90	Penerimaan bonus produksi dan transfer material yang sedang dalam proses penyelesaian
Perkiraan PNBP SDA Migas yang di tangguhkan		222.184.037,84	2.148.519.645.942,67	Penerimaan SDA Migas per tanggal 20 s.d. 28 Desember 2012
TOTAL CADANGAN		1.082.412.448,00	10.273.528.372.158,00	

Catatan:
Perhitungan menggunakan kurs tengah BI per 28 Desember 2012 (Rp9,6700USD)
Saldo akhir per tanggal 28 Desember 2012

DAFTAR NERACA 298

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

DAFTAR 8

**SALDO PEMERINTAH LAINNYA DI BANK UMUM
PER 31 DESEMBER 2012**

No.	Nama Rekening	Saldo Awal 1 Januari 2012	Jumlah Penerimaan	Jumlah Pengeluaran	Saldo Akhir 31 Desember 2012
1.	Rek Induk Dana Lingk Bergulir	7.113.244.925,59	13.535.310.657,42	20.648.555.583,01	0,00
2.	Kredit Listrik Pedesaan	12.522.938,00	14.755,00	12.537.693,00	0,00
3.	Rek KKPA Bagi Hasil BMI	9.970.268,61	319.678.220,27	329.648.488,88	0,00
4.	Rek K U M K	40.775.802.226,33	378.367.442.896,00	419.143.245.122,33	0,00
5.	Proyek Distribusi Ternak	10.229.050,90	98.787,00	10.327.837,90	0,00
6.	Proyek P 3 Bali	10.151.080,28	88.085.781,74	98.236.862,02	0,00
7.	Rek Recoveri KUT 1999/2000	10.000.732,55	281.997.835,00	291.998.567,55	0,00
8.	Dana Cadangan KUT 99/2000	10.000.086,98	13.699,00	10.013.785,98	0,00
9.	Rekening GLK - KUD	116.048.945,58	600.337.316,04	716.386.261,62	0,00
10.	Proy Pengem Akuntansi (P2A)	7.663.882,91	9.026,00	7.672.908,91	0,00
11.	PIR/UPP Perkebn (5%) BRI	345.334.434,97	1.245.133.993,02	962.437.638,45	628.030.789,54
12.	PIR/UPP Perkebn (92%) BRI	6.181.458.524,66	22.799.095.212,65	17.761.004.604,68	11.219.549.132,63
13.	PIR/UPP Perkebn (3%) BRI	266.812.223,08	970.428.916,36	781.567.765,76	455.671.373,68
14.	PIR/UPP Perkebn (92%) Mandiri	391.507.390,84	2.857.710.752,86	2.595.850.964,91	653.367.178,79
15.	PIR/UPP Perkebn (5%) Mandiri	45.365.178,63	152.359.588,87	155.746.585,01	41.978.182,49
16.	PIR/UPP Perkebn (92%) Mandiri	1.320.896.390,19	4.822.341.051,24	3.659.882.336,30	2.483.355.105,13
17.	PIR/UPP Perkebn (5%) Mandiri	81.125.319,61	233.937.056,35	197.707.363,73	117.355.012,23
	Jumlah	56.708.133.599,71	426.273.993.544,82	467.382.820.370,04	15.599.306.774,49

DAFTAR NERACA 349

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

DAFTAR 9

SALDO KAS KPPN PER 31 DESEMBER 2012 DAN 2011

No.	Kamwil/KPPN	Kode KPPN	31 DES 12	31 DES 11
	I. ACEH		246.974.287.980	188.416.495.674
1	BANDA ACEH	001	123.269.177.573	86.077.181.048
2	LANGSA	002	18.101.292.915	15.082.906.830
3	MEULABOH	003	13.284.477.031	21.953.058.037
4	TAPAK TUAN	074	18.985.060.789	9.171.385.471
5	LHOKSEUMAWE	089	51.512.878.198	40.342.405.921
6	KUTACANE	105	11.768.772.807	8.129.876.402
7	TAKENGON	122	10.052.628.667	7.659.681.965
	II. MEDAN		551.158.849.169	321.199.207.671
9	MEDAN I	004	191.041.897.059	116.517.432.750
10	PEMATANG SIANTAR	005	42.512.135.860	30.558.035.281
11	PADANG SIDEMPUAN	006	30.017.957.727	16.732.965.415
12	GUNUNG SITOLI	007	15.848.180.267	4.830.717.821
13	RANTAU PRAPAT	075	15.704.695.739	6.934.925.218
14	TANJUNG BALAI	076	27.026.895.538	13.244.293.422
15	SIBOLGA	106	33.323.229.492	18.576.597.817
16	SIDIKALANG	119	17.206.509.739	7.209.056.200
17	MEDAN II	123	112.521.329.136	76.539.868.893
18	TEBING TINGGI	124	35.293.661.237	15.918.964.206
19	BALIGE	125	30.662.357.375	14.136.350.648
	III. PADANG		238.876.601.056	200.126.914.179
20	PADANG	010	131.486.195.196	116.372.676.317
21	BUKIT TINGGI	011	52.174.058.484	45.115.347.189
22	SIJUNJUNG	077	14.771.947.254	7.688.869.045
23	SOLOK	090	20.764.811.257	15.246.445.955
24	LUBUK SIKAPING	091	12.960.429.082	8.885.623.905
25	PAINAN	142	6.719.159.783	6.817.951.768
	IV. PEKANBARU		438.691.060.217	253.137.514.313
26	PEKANBARU	008	212.816.459.495	95.759.045.711
27	TANJUNG PINANG	009	45.162.831.599	26.410.968.448
28	RENGAT	092	15.488.138.983	16.864.617.718
29	DUMAI	120	135.207.910.285	93.484.930.241
30	BATAM	137	30.015.719.855	20.617.952.195
	V. JAMBI		129.103.450.417	107.874.425.306
31	JAMBI	012	64.958.783.085	60.822.369.565
32	SUNGAI PENUH	013	14.892.432.848	7.283.391.670

DAFTAR NERACA 350

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

DAFTAR 9

No.	Kamwil/KPPN	Kode KPPN	31 DES 12	31 DES 11
33	MUARA BUNGO	078	12.230.162.634	7.738.691.912
34	KUALA TUNGKAL	143	22.131.497.091	14.646.910.168
35	BANGKO	159	14.890.574.759	17.383.061.991
	VI. PALEMBANG		318.241.511.251	199.873.562.625
36	PALEMBANG	014	143.156.517.444	117.280.832.748
37	LUBUK LINGGAU	070	36.391.208.785	8.510.828.352
38	BATURAJA	109	14.021.373.847	13.395.919.424
39	LAHAT	144	72.760.419.498	34.394.220.638
40	SEKAYU	160	51.911.991.677	26.291.761.463
	VII. BANDAR LAMPUNG		172.834.192.201	124.991.607.152
41	BANDAR LAMPUNG	017	116.047.552.819	83.916.071.055
42	KOTABUMI	116	25.930.855.666	20.121.342.334
43	METRO	126	27.048.408.416	17.587.616.363
44	LIWA	145	3.807.375.300	3.366.577.400
	VIII. BENGKULU		111.594.007.813	76.262.812.730
45	BENGKULU	016	78.048.089.438	50.038.651.771
46	MANNA	121	12.299.025.351	8.872.744.151
47	CURUP	146	17.024.637.405	14.007.964.217
48	MUKO MUKO	181	4.222.255.619	3.343.452.591
	IX. PANGKAL PINANG		62.756.929.547	34.964.306.343
49	PANGKAL PINANG	015	56.123.122.437	30.228.474.436
50	TANJUNG PANDAN	107	6.633.807.110	4.735.831.907
	X. SERANG		374.413.592.759	163.509.005.823
51	SERANG	020	109.559.140.252	69.621.389.505
52	TANGERANG	127	256.134.918.475	87.599.894.052
53	RANGKASBITUNG	161	8.719.534.032	6.287.722.266
	XII. JAKARTA		7.816.449.970.584	6.215.661.070.268
54	JAKARTA I	018	642.959.421.852	342.318.039.905
55	JAKARTA II	019	5.706.749.536.342	4.888.636.130.973
56	JAKARTA III	088	781.645.582.783	466.379.021.887
57	JAKARTA IV	133	310.284.701.751	241.609.957.073
58	JAKARTA V	139	372.962.352.106	276.717.920.430
59	JAKARTA VI	140	1.848.375.750	0
	XII. BANDUNG		1.094.270.704.064	739.473.513.121

DAFTAR NERACA 351

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

DAFTAR 9

No.	Kamwil/KPPN	Kode KPPN	31 DES 12	31 DES 11
60	PURWAKARTA	021	56.376.499.064	41.779.439.077
61	BANDUNG I	022	180.024.223.757	115.247.800.077
62	BOGOR	023	178.209.370.423	118.026.272.859
63	CIREBON	024	64.343.410.527	54.875.582.926
64	TASIKMALAYA	025	64.177.131.460	43.239.923.479
65	KARAWANG	086	31.908.349.126	14.161.787.144
66	SUMEDANG	087	24.416.096.967	22.641.355.778
67	BANDUNG II	095	229.533.884.463	172.003.296.805
68	GARUT	096	38.517.004.416	24.293.491.939
69	SUKABUMI	128	65.746.568.111	44.982.917.708
70	KUNINGAN	147	20.305.992.204	24.401.377.157
71	BEKASI	171	140.712.173.546	63.820.268.172
	XIII. SEMARANG		746.099.688.522	575.464.671.600
72	SEMARANG I	026	122.081.919.125	78.317.416.517
73	PURWOREJO	027	23.877.300.041	19.736.629.948
74	SURAKARTA	028	112.301.808.479	81.908.231.762
75	PURWOKERTO	029	51.869.372.205	44.959.483.849
76	PEKALONGAN	072	24.582.428.644	17.481.832.807
77	PATI	097	32.501.460.876	31.528.953.352
78	MAGELANG	115	63.951.723.719	56.162.920.834
79	TEGAL	118	46.354.850.781	38.403.745.347
80	KUDUS	129	58.766.537.753	41.665.343.266
81	CILACAP	130	23.364.683.186	13.792.898.270
82	SEMARANG II	134	92.563.565.896	69.058.848.620
83	KLATEN	148	25.167.978.709	30.224.375.137
84	SRAGEN	162	24.676.502.850	16.125.845.424
85	PURWODADI	163	15.397.089.643	16.043.618.721
86	BANJARNEGARA	164	28.642.466.615	20.054.527.746
	XIV. YOGYAKARTA		213.157.567.756	148.845.090.854
87	YOGYAKARTA	030	191.393.902.908	133.298.807.618
88	WONOSARI	149	9.522.458.646	7.608.087.687
89	WATES	176	12.241.206.202	7.938.195.549
	XV. SURABAYA		1.015.948.425.956	780.833.712.442
90	SURABAYA I	031	226.325.004.900	153.914.701.187
91	MALANG	032	165.847.093.574	131.275.728.795
92	MADIUN	033	77.021.945.020	66.487.469.748
93	KEDIRI	034	95.089.396.277	49.418.890.010
94	BONDOWOSO	035	26.491.382.824	28.447.897.869
95	PAMEKASAN	036	39.155.734.589	33.979.855.463

DAFTAR NERACA 352

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

DAFTAR 9

No.	Kamwil/KPPN	Kode KPPN	31 DES 12	31 DES 11
96	BOJONEGORO	073	18.958.169.672	50.312.400.150
97	MOJOKERTO	098	49.933.426.436	36.372.233.735
98	PACITAN	099	7.230.452.886	4.447.470.212
99	BANYUWANGI	100	16.730.632.502	21.771.804.309
100	JEMBER	131	62.928.357.630	44.893.609.790
101	SURABAYA II	135	125.350.912.640	96.338.089.695
102	BLITAR	150	32.287.581.752	20.073.786.082
103	SIDOARJO	165	59.188.458.551	31.623.690.537
104	TUBAN	166	13.409.876.703	11.476.084.860
	XVI. PONTIANAK		169.971.391.027	118.459.122.694
105	PONTIANAK	042	97.578.410.425	65.165.853.136
106	SINTANG	079	15.755.516.160	12.595.983.260
107	SINGKAWANG	093	24.335.644.317	23.681.592.452
108	KETAPANG	094	12.267.294.880	5.152.825.982
109	PUTUSSIBAU	117	8.870.436.313	3.631.276.400
110	SANGGAU	167	11.164.088.932	8.231.591.464
	XVII. PALANGKARAYA		85.124.157.150	71.579.888.714
111	PALANGKARAYA	043	53.092.076.311	46.198.599.855
112	SAMPIT	044	14.597.480.790	8.119.043.616
113	BUNTOK	080	9.648.478.668	10.815.901.393
114	PANGKALAN BUN	102	7.786.121.381	6.446.343.850
	XVIII. BANJARMASIN		198.527.322.727	112.667.726.943
115	BANJARMASIN	045	110.851.018.459	66.483.972.764
116	KOTABARU	081	27.661.531.532	7.244.064.506
117	BARABAI	110	31.768.237.494	16.610.321.737
118	TANJUNG	151	15.063.955.112	17.488.812.949
119	PELAIHARI	168	13.182.580.130	4.840.554.987
	XIX. SAMARINDA		431.941.402.875	175.948.396.725
120	SAMARINDA	046	205.879.766.913	84.901.238.253
121	BALIKPAPAN	047	110.201.466.731	53.184.666.832
122	TARAKAN	048	67.722.959.852	19.656.905.709
123	NUNUKAN	152	30.655.779.495	7.128.688.881
124	TANJUNG REDEP	153	17.481.429.894	11.076.897.050
	XX. DENPASAR		177.272.502.482	132.471.879.720
125	DENPASAR	037	137.016.851.228	99.165.506.726
126	SINGARAJA	132	26.177.909.070	21.881.463.265

DAFTAR NERACA 353

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

DAFTAR 9

No.	Kamwil/KPPN	Kode KPPN	31 DES 12	31 DES 11
127	AMLAPURA	154	14.077.742.184	11.424.909.729
	XXI. MATARAM		130.615.523.727	111.106.739.455
128	MATARAM	038	85.977.835.985	65.409.009.387
129	BIMA	071	17.279.480.779	27.736.875.370
130	SUMBAWA BESAR	101	13.996.899.498	9.215.617.194
131	SELONG	169	13.361.307.465	8.745.237.504
	XXII. KUPANG		128.084.106.822	85.000.812.969
132	KUPANG	039	80.072.272.258	50.917.913.971
133	ENDE	040	15.144.157.549	9.667.891.305
134	WAINGAPU	041	8.079.987.812	6.173.899.892
135	RUTENG	111	10.958.838.910	6.939.434.227
136	ATAMBUA	172	8.385.109.176	6.668.597.450
137	LARANTUKA	174	5.443.741.117	4.633.076.124
	XXIII. MAKASAR		393.172.117.245	281.388.541.016
138	MAKASSAR I	054	147.436.830.463	94.684.199.384
139	WATAMPONE	055	27.601.782.569	21.540.286.521
140	BANTAENG	056	15.318.053.683	12.930.842.139
141	PARE-PARE	057	39.570.102.278	33.129.220.883
142	PALOPO	058	19.279.768.040	11.215.487.221
143	MAJENE	059	11.867.495.854	8.021.147.900
144	MAKASAR II	136	94.180.894.956	74.148.684.755
145	BENTENG	155	3.301.823.460	2.327.701.472
146	MAKALE	170	6.946.291.553	4.092.372.091
147	SINJAI	177	503.255.301	2.984.796.443
148	MAMUJU	178	27.165.819.088	16.313.802.207
	XXIV. PALU		112.893.144.345	83.627.539.607
149	PALU	051	85.177.404.176	63.238.366.826
150	POSO	052	10.852.641.820	8.912.525.305
151	LUWUK	053	10.978.643.692	6.169.225.472
152	TOLI-TOLI	082	5.884.454.657	5.307.422.004
	XXV. KENDARI		125.069.584.448	72.601.273.699
153	KENDARI	060	87.187.148.462	46.995.964.344
154	BAU-BAU	103	19.651.321.099	12.926.099.127
155	KOLAKA	156	12.120.264.095	8.852.652.540
156	RAHA	157	6.110.850.792	3.826.557.688

DAFTAR NERACA 354

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

DAFTAR 9

No.	Kamwil/KPPN	Kode KPPN	31 DES 12	31 DES 11
	XXVI. GORONTALO		52.448.479.858	41.068.814.727
157	GORONTALO	050	47.846.157.884	36.890.096.058
158	MARISA	180	4.602.321.974	4.178.718.669
	XXVII. MANADO		152.000.009.087	117.985.820.918
159	MANADO	049	108.459.020.686	86.266.916.410
160	TAHUNA	083	3.866.393.127	3.502.929.182
161	KOTAMOBAGU	158	14.984.415.024	10.207.836.284
162	BITUNG	179	24.690.180.250	18.008.139.042
	XXVIII. TERNATE		56.047.389.012	33.803.319.339
163	TERNATE	062	47.177.044.257	30.439.383.635
164	TOBELO	112	8.870.344.755	3.363.935.704
	XXIX. AMBON		97.092.401.969	80.767.163.265
165	AMBON	061	76.245.673.931	64.196.813.365
166	TUAL	084	8.977.016.839	6.472.561.900
167	SAUMLAKI	104	3.586.767.803	2.807.300.200
168	MASOHI	173	8.282.943.396	7.290.487.800
	XXX. JAYAPURA		367.051.591.610	221.445.997.769
169	JAYAPURA	063	129.721.438.062	87.468.959.472
170	BIAK	064	32.621.175.781	16.121.899.746
171	MANOKWARI	065	38.226.433.145	16.635.786.830
172	SORONG	066	39.707.070.576	19.375.235.800
173	FAK-FAK	067	12.164.676.544	6.512.654.739
174	MERAUKE	068	49.793.683.259	30.156.700.640
175	NABIRE	085	10.317.691.576	5.646.511.805
176	WAMENA	113	18.296.279.453	5.880.640.500
177	SERUI	138	8.400.238.890	5.346.098.271
178	TIMIKA	141	27.802.904.324	28.301.509.966
	JUMLAH KAS KPPN		16.207.881.963.676	11.870.556.947.661

DAFTAR NERACA 355

DAFTAR 10

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

**KAS PADA KIL DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2012 DAN 31 DESEMBER 2011**

No.	BA	Kementerian Negara/Lembaga	KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN		KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN		KAS LAINNYA DAN SETARA KAS	
			31 Desember 2012 Audited	31 Desember 2011 Audited	31 Desember 2012 Audited	31 Desember 2011 Audited	31 Desember 2012 Audited	31 Desember 2011 Audited
1	001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	245.854.591	10.531.022	-	1.821.261.971	-	3.044.874.479
2	002	Dewan Perwakilan Rakyat	4.187.864.264	4.004.839.807	41.098	17.700.000	19.461.343.127	-
3	004	Badan Pemeriksa Keuangan	312.171.706	15.805.535.379	-	-	3.285.409.606	2.510.532.423
4	005	Mahkamah Agung	762.775.284	636.667.521	141.405.490	132.571.641	2.208.991.096	6.194.093.868
5	006	Kejaksaan Agung	529.445.200	703.832.326	-	-	7.299.844.509	56.727.015.418
6	007	Sekretariat Negara	7.825.054.290	3.035.136.669	12.001.333.379	5.877.625.188	14.732.170.708	15.182.785.648
7	010	Kementerian Dalam Negeri	2.166.221.516	6.415.630.392	876.135.813	488.076.654	5.635.155.491	11.137.702.626
8	011	Kementerian Luar Negeri	74.188.572.032	89.237.337.975	23.617.699.173	22.372.149.618	164.962.221	185.351.188
9	012	Kementerian Pertahanan	-	3.033.990.995	2.150.025.094	14.544.581	204.452.465.878	119.999.965.000
10	013	Kementerian Hukum dan HAM/RI	4.905.639.465	2.517.872.150	5.804.728.975	6.829.895.698	20.417.269.305	2.155.885.364
11	015	Kementerian Keuangan	8.796.459.747	1.439.690.756	6.659.090.818	3.060.980.249	20.739.677.126	8.115.195.871
12	018	Kementerian Pertanian	7.256.929.378	6.029.889.911	727.404.900	970.359.615	221.026.831.575	6.708.498.077
13	019	Kementerian Perindustrian	702.782.550	5.162.527.913	369.140.695	312.270.855	207.920.841	159.994.850
14	020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	2.056.199.983	707.394.298	865.039.194	23.887.118.524	15.810.637	24.471.542.175
15	022	Kementerian Perhubungan	810.754.169	473.999.973	19.029.872.722	10.024.539.870	3.328.183.847	1.873.343.972
16	023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	27.815.159.787	29.067.547.642	84.169.697.427	99.365.904.969	814.433.874.164	227.399.900.696
17	024	Kementerian Kesehatan	6.262.832.774	6.014.567.167	623.004.566	1.426.762.912	241.587.253.030	380.514.591.981
18	025	Kementerian Agama	4.393.553.295	2.772.512.926	1.033.400.795	2.579.653.331	8.686.980.410	10.104.236.574
19	026	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.405.547.028	18.015.981.617	11.776.493.881	9.837.150.157	99.582.296	17.559.844
20	027	Kementerian Sosial	553.837.436	1.116.994.992	115.463.800	60.453.150	186.916.521.611	119.950.889.291
21	029	Kementerian Kehutanan	8.907.079.629	21.868.190.391	11.448.241.591	48.365.489.680	16.274.025.016	31.840.821.036
22	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	944.490.452	1.477.393.772	150.527.604	83.426.415	2.018.057.651	1.148.074.146

DAFTAR NERACA 366

DAFTAR 10

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

No.	BA	Kementerian Negara/Lembaga	KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN		KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN		KAS LAINNYA DAN SETARA KAS	
			31 Desember 2012 Audited	31 Desember 2011 Audited	31 Desember 2012 Audited	31 Desember 2011 Audited	31 Desember 2012 Audited	31 Desember 2011 Audited
23	033	Kementerian Pekerjaan Umum	288.246.285	895.824.764	-	135.000.000	8.549.586.967	23.732.861.771
24	034	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	445.960.218	-	-	-	53.237.800	-
25	035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	-	-	-	-	536.001.150	809.363.470
26	036	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	1.368.065.769	860.727.715	-	-	268.130.322	306.900.481
27	040	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	181.674.532	2.740.637.216	57.661.500	11.415.000	5.790.062.021	530.087
28	042	Kementerian Riset dan Teknologi	694.577.314	203.531.790	639	5.829	4.773.916.489	349.089.104
29	043	Kementerian Lingkungan Hidup	280.875.100	1.273.164.777	-	50.000	2.126.233.320	2.791.517.085
30	044	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	3.330.000	4.528.000	-	-	2.913.896.411	2.771.410.906
31	047	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	556.935.000	734.989.171	-	-	4.581.928.445	291.408.075
32	048	Kementerian Perencanaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	-	900	-	-	-	-
33	051	Lembaga Sandi Negara	-	-	-	-	1.366.311.316	311.794.000
34	054	Badan Pusat Statistik	240.116.614	986.006.527	4.288.005	49.152	2.982.000.086	6.110.643.451
35	055	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	554.826.583	800	-	-	3.776.666.767	4.953.263.921
36	056	Badan Pertanahan Nasional	316.863.362	531.237.399	595.548.647	1.906.740.306	1.143.587.599	1.594.150.828
37	057	Perustakaan Nasional Republik Indonesia	102.470.469	40.959.025	25.552.660	38.957.292	-	-
38	059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	227.054.318	984.785.932	-	126.699.000	1.631.407.114	1.368.981.516
39	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	1.821.055.720	2.891.198.021	4.378.685.000	7.936.183.000	940.182.468.453	329.225.730.631
40	063	Badan Pengawas Obat dan Makanan	119.000.835	19.783.547	86.955.000	86.935.000	70.585.046.807	994.856.254
41	064	Lembaga Ketahanan Nasional	107.950.650	2.642.800	-	-	2.684.794.099	6.201.000
42	065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	4.563.602.803	2.135.186.973	-	-	6.835.628	-
43	066	Badan Narkotika Nasional	626.059.418	168.705.840	-	-	56.449.642.805	8.066.788.253
44	067	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	162.332.300	120.382.875	-	-	-	89.980.000
45	068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	3.676.009.618	6.972.725.190	6.253	6.253	149.063.977	367.839.400
46	074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	1.000.000	24.890.442	-	-	5.541.203.601	5.782.675.437
47	075	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	47.235.076	54.790.671	71.770	1.769.500	100.937	268.441.281

DAFTAR NEKACA 367

DAFTAR 10

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

No.	BA	Kementerian Negara/Lembaga	KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN		KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN		KAS LAINNYA DAN SETARA KAS	
			31 Desember 2012 Audited	31 Desember 2011 Audited	31 Desember 2012 Audited	31 Desember 2011 Audited	31 Desember 2012 Audited	31 Desember 2011 Audited
48	076	Komisi Pemilihan Umum	1.988.329.566	734.812.937	-	31.172.034	2.248.807	
49	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	78.334.863	3.319.350	383.781.034	113.838.857	197.888.230	
50	080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	7.852.625	-	338.235.000	93.108.876	-	
51	081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	28.178.205	602.389.087	1.156.811.826	886.034.055	1.763.476.489	
52	082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	544.241.877	88.071.600	-	159.106.460	45.777.154	
53	083	Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional	-	5.214.500	1.171.862.824	1.691.678.894	-	
54	084	Badan Standardisasi Nasional	-	-	-	2.287.222	-	
55	085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	-	-	-	7.257.500	-	
56	086	Lembaga Administrasi Negara	-	-	936.601.888	989.778.988	1.040.771.650	
57	087	Arsip Nasional Republik Indonesia	11.940.000	341.282.393	343.000.000	16.482.906	1.681.785.000	
58	088	Badan Kepegawaian Negara	32.082.786	22.088.116	-	-	2.000.000	
59	089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	162.543.743	10.083.900	-	-	28.764.984	
60	090	Kementerian Perdagangan	10.005.589.488	12.488.197.859	3.555.160.551	3.552.948.888	342.208.496	
61	091	Kemen Perumahan Rakyat	813.252.090	86.383.250	-	-	1.140.273.286.385	
62	092	Kemen Pemuda dan Olah Raga	44.024.750	222.424.000	5.518.200	96.518.700	5.106.390.031	
63	093	Komisi Pemberantasan Korupsi	3.757.620	-	-	-	114.918.513	
64	095	Dewan Perwakilan Daerah	5.802.098.853	6.721.342.129	-	-	3.786.178.476	
65	100	Komisi Yudisial RI	-	40.747	-	-	365.408	
66	103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	674.830.400	-	-	-	391.590.106.838	
67	104	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	521.092.220	695.096.374	-	-	25.821.855	
68	106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	-	18.912.929	-	-	277.672.560	
69	107	Badan SAR Nasional	90.552.463	238.082.195	-	-	279.739.084	
70	109	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	-	-	-	-	105.900.646	
71	110	Ombudsman Republik Indonesia	10.250.000	10.921.755	-	-	99.100.601	
72	111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	-	3.235.900	-	-	1.716.751.838	

DAFTAR NERACA 368

DAFTAR 10

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

No.	BA	Kementerian Negara/Lembaga	KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN		KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN		KAS LAINNYA DAN SETARA KAS	
			31 Desember 2012 Audited	31 Desember 2011 Audited	31 Desember 2012 Audited	31 Desember 2011 Audited	31 Desember 2012 Audited	31 Desember 2011 Audited
73	112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam					207.517.479	-
74	113	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	617.156.502	-			501.077.101	-
75	114	Sekretariat Kabinet					608.351.819	-
76	115	Badan Pengawas Pemilihan Umum					48.785.000	-
77	116	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	3.742.060	-			7.473.448.131	-
78	117	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	931.041.030	-			56.392.452.235	-
79	118	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang			1.581.981.356	-		
80	999.03	Investasi Pemerintah					1.429.687.753	1.912.974.670
81	999.05	Transfer ke Daerah					768.861.261.146	383.906.986.740
82	999.07	Belanja Subsidi					551.551.995.942	1.371.744.022.079
83	999.08	Belanja Lain-lain	4.951.651.724	29.257.142.989			706.180.892.512	3.158.586.431.289
		TOTAL	213.458.829.221	292.795.937.959	196.150.458.978	252.900.321.124	6.103.251.516.103	6.756.875.778.441

DAFTAR NERACA 369

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

DAFTAR 11

**UANG MUKA BELANJA DAN BELANJA DIBAYAR DI MUKA
PER 31 DESEMBER 2012 DAN 31 DESEMBER 2011**

(Dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	BELANJA DIBAYAR DI MUKA 31 Desember 2012 (Audited)	UANG MUKA BELANJA 31 Desember 2012 (Audited)	UANG MUKA BELANJA*)
					31 Desember 2011 (Audited)
1	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA	1.660.074.994		1.066.471.406
2	006	MAHKAMAH AGUNG	2.961.231.216		1.192.330.134
3	006	KEJAKSAAN	7.694.940		
4	007	SEKRETARIAT NEGARA	76.128.670		68.062.473
5	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI		20.020.281.442	51.141.529.276
6	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	7.903.132.866		6.208.141.664
7	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA			1.006.479.261
8	015	KEMENTERIAN KEUANGAN RI	23.212.842.494	3.723.250.772	26.926.848.602
9	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	20.232.200		19.694.386
10	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	6.433.660.610		
11	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	160.696.996	19.836.100.668	611.736.738
12	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	56.227.476.637	54.910.107.821	17.218.006.494
13	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	14.233.629.670	168.901.211.223	77.436.394.671
14	025	KEMENTERIAN AGAMA	296.660.010	238.206.273	1.774.616.367
15	027	KEMENTERIAN SOSIAL RI			6.670.248.230
16	029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	528.464.898	153.679.300	977.416.167
17	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	173.368.764		63.730.494
18	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	166.468.667		60.376.000
19	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	67.214.000		
20	040	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	13.466.622.376	2.086.361.362	6.069.122.260
21	043	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	41.666.667		
22	064	BADAN PUSAT STATISTIK	322.971.666		476.960.889
23	066	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	138.876.833		61.021.064
24	069	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.036.431.396.606		947.992.197.260
25	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	9.944.626.682		1.633.391.100
26	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN		3.699.539.604	7.941.663.771
27	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	314.666.666		451.200.000
28	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	66.033.333		
29	076	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	2.614.800		6.637.000
30	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	90.126.000		15.000.000
31	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA		400.000.000	11.667.910
32	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	39.666.667		
33	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARiksa NASIONAL	2.642.036.000		
34	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL		338.664.428.427	77.308.639.323
35	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	106.480.000		137.776.000
36	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	502.132.167		606.642.617
37	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN		30.244.896.633	34.162.707.602
38	091	KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT			92.400.000
39	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI		527.083.403	611.612.226
40	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	436.862.260		377.646.260
41	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	16.647.974.391		2.226.666.667
42	104	BNP 2TKI		150.416.667	201.080.000
43	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	10.619.014.941		8.034.861.313
44	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	1.819.276.084		
45	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATAAN		2.626.923.962	1.197.873.876
46	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	63.806.871	341.786.000	
47	115	BADAN PENGAWAS PEMILU RI	1.200.320.000		
48	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	206.616.068	38.831.193.262	
		TOTAL	1.208.189.107.486	686.344.454.479	1.279.166.315.147

*) Pada Tahun Anggaran 2011 Uang Muka Belanja dan Belanja Dibayar di Muka masih digabung

DAFTAR NERACA 360

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

DAFTAR 12.A

PIUTANG PAJAK BERDASARKAN KANWIL DJP DAN JENIS PAJAK
per 31 Desember 2012
 (dalam rupiah)

Kode Akun	Nama Akun	Neraca Percobaan Tahun Anggaran 2012	Laporan Perkembangan Piutang Pajak (LP3) Modul ALPP	Selisih
115 121	Piutang PPh Pasal 21	1.391.617.937.283	1.391.617.937.284	1
115 122	Piutang PPh Pasal 22	468.432.815.179	468.432.815.179	0
115 124	Piutang PPh Pasal 23	4.918.350.082.956	4.918.350.082.964	8
115 125	Piutang PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	1.218.354.326.211	1.218.354.326.214	3
115 126	Piutang PPh Pasal 25/29 Badan	18.473.224.608.353	18.473.224.608.352	-1
115 127	Piutang PPh Pasal 26	2.093.962.968.364	2.093.962.968.364	0
115 128	Piutang PPh Final	589.715.652.211	589.715.652.210	-1
115 131	Piutang PPN Dalam Negeri	15.704.901.728.808	15.704.901.728.814	6
115 141	Piutang PPnBM dalam Negeri	176.236.958.386	176.236.958.386	0
115 151	Piutang PBB Pedesaan	2.996.934.810.829	2.996.934.810.828	-1
115 152	Piutang PBB Perkotaan	11.591.237.794.772	11.591.237.794.773	1
115 153	Piutang PBB Perkebunan	661.307.597.823	661.307.597.822	-1
115 154	Piutang PBB Kehutanan	558.001.107.117	558.001.107.119	2
115 155	Piutang PBB Pertambangan	7.587.645.821.758	7.587.645.821.760	2
115 172	Piutang Pajak Tidak Langsung Lainnya	15.396.781	15.396.781	0
115 173	Piutang Bunga Penagihan PPh	2.291.242.280.829	2.291.242.280.831	2
	TOTAL	70.721.181.887.660	70.721.181.887.681	21
	Penyisihan Piutang Pajak	42.929.017.362.023	42.929.017.362.025	2
	Piutang Pajak Neto (NRV)	27.792.164.525.637	27.792.164.525.656	19

ket: Selisih antara Neraca Percobaan dengan LP3 karena pembulatan

DJPPM 123

PLUTANG PAJAK BERDASARKAN KAWIL D.PP DAN JENIS PAJAK per 31 Desember 2012 (dalam rupiah)

Table with 20 columns: ID, KAWIL D.PP, PPH 26, PPH 21, PPH 11, PPh 10, PPh 9, PPh 8, PPh 7, PPh 6, PPh 5, PPh 4, PPh 3, PPh 2, PPh 1, PPh 0, PPh 0, PPh 0, PPh 0, PPh 0, PPh 0. Rows include entities like PT SMI, PT SMI, PT SMI, PT SMI, PT SMI, PT SMI, PT SMI, PT SMI, PT SMI, PT SMI, PT SMI, PT SMI, PT SMI, PT SMI, PT SMI, PT SMI, PT SMI, PT SMI, PT SMI, PT SMI.

LAPORAN KEUANGAN FEMENITAH FISCAL TAHUN 2012 (Lampiran 1)

DJPPM 132

LAPORAN KEUANGAN PEMERIN TAHPUS AT TAHUN 2012 (AUDITED)

DAFTAR 12C

PIUTANG PAJAK BERDASARKAN KANWIL DJP DAN UMUR PAJAK
per 31 Desember 2012
(dalam rupiah)

NO	KANWILDJP	≤ 1 Thn	1 Thn < UT ≤ 2 Thn	2 Thn < UT ≤ 3 Thn	3 Thn < UT ≤ 4 Thn	4 Thn < UT ≤ 5 Thn	> 5 Thn	JUMLAH
1	NAD	61.250.111.185	66.900.833.903	150.487.132.348	151.389.832.444	64.524.902.822	118.209.350.164	612.835.962.868
2	SUMUT I	131.581.170.539	74.797.834.907	100.864.831.500	116.337.731.675	43.886.735.481	534.473.128.895	1.001.541.432.967
3	SUMUT II	204.045.167.819	121.877.875.040	152.672.848.864	98.504.240.523	40.429.582.238	193.822.721.134	811.352.235.618
4	RIAU DAN KEPRI	395.966.623.277	309.091.696.849	246.408.539.431	387.725.735.177	185.924.830.067	1.341.734.257.438	2.828.881.682.239
5	SUMBAR JAMBI	214.830.371.202	123.509.332.452	125.539.799.851	207.124.546.394	78.644.817.701	313.480.679.661	1.062.829.547.261
6	SUMSEL BABEL	470.972.014.248	183.798.722.557	178.117.728.458	387.904.977.408	69.033.828.751	239.982.190.424	1.507.809.459.842
7	BENGGULU	111.728.089.870	67.250.011.733	93.011.430.983	162.329.891.059	36.112.739.450	220.145.672.212	680.575.805.307
8	JKT PUSAT	922.358.095.100	462.632.013.544	678.627.962.791	807.402.748.878	161.647.509.552	3.063.938.050.827	6.186.802.410.793
9	JKT BARAT	273.917.327.111	191.086.494.844	187.759.352.872	104.502.079.240	158.464.312.042	826.987.582.497	1.742.717.128.605
10	JKT SELATAN	598.415.581.395	572.302.838.974	576.275.891.950	661.580.453.425	208.745.311.071	2.486.950.435.618	5.104.250.113.404
11	JKT TIMUR	274.672.253.373	240.144.704.791	238.263.801.661	192.338.088.767	192.008.393.309	829.305.390.295	1.998.732.432.215
12	JKT UTARA	391.049.015.826	302.418.866.334	200.134.482.643	179.950.188.491	1.843.106.288.696	803.764.842.523	3.660.423.675.111
13	JKT KHUSUS	6.525.070.832.501	649.800.868.872	430.237.181.325	596.247.873.695	330.598.308.682	3.758.725.866.682	12.560.681.078.337
14	BANTEN	487.612.141.561	411.172.884.379	203.203.204.289	160.163.470.167	98.142.378.694	633.008.016.550	1.973.302.095.910
15	JAWA BARAT I	481.431.107.824	328.903.574.631	395.452.474.228	325.274.894.819	171.219.812.443	1.181.761.801.637	2.894.043.235.580
16	JAWA BARAT II	593.182.588.554	277.344.733.451	382.982.475.280	364.880.394.231	189.096.988.822	1.010.402.341.859	2.787.889.522.198
17	JAWA TENGAH I	212.391.918.278	168.390.051.498	174.294.274.640	122.089.406.178	84.584.759.397	390.787.206.300	1.152.547.611.589
18	JAWA TENGAH II	240.674.015.674	149.250.317.649	126.046.247.122	149.523.807.142	60.802.682.357	389.353.257.438	1.118.650.137.382
19	DIY	86.788.345.387	69.913.007.217	47.233.311.744	41.195.982.134	30.943.897.334	151.048.449.159	427.124.102.975
20	JATIM I	112.942.826.162	71.758.228.031	132.551.211.651	43.185.909.304	29.385.630.716	349.211.382.814	739.035.186.678
21	JATIM II	94.508.803.301	103.095.290.689	169.504.253.737	272.123.243.031	35.074.079.627	215.063.550.119	889.369.220.504
22	JATIM III	186.508.626.429	117.055.078.911	134.809.788.568	147.044.252.835	58.493.939.719	527.074.133.782	1.150.983.820.343
23	KALBAR	107.535.474.134	55.699.557.658	68.131.100.110	113.802.772.687	31.366.182.197	141.243.182.767	517.548.250.150
24	KAL SELTEN	252.170.613.826	217.899.148.692	208.630.357.378	141.828.682.847	72.421.974.491	294.148.750.358	1.187.069.505.562
25	KAL TIM	204.477.034.982	230.004.185.645	523.206.035.343	657.411.185.678	136.695.033.608	517.807.973.646	2.269.801.448.801
26	SULSELBARTRA	252.919.586.033	193.034.249.225	213.171.785.400	207.459.327.279	54.716.197.698	305.185.707.618	1.228.486.833.550
27	SULUT TENGGOBORMALUT	97.917.793.056	76.051.991.870	121.804.235.371	203.513.453.250	55.729.380.852	250.630.396.591	805.847.200.960
28	BALI	226.148.108.274	183.919.478.736	234.315.072.280	116.575.277.674	88.948.113.697	325.119.122.352	1.157.025.172.582
29	NUSRA	84.278.722.985	72.128.368.773	68.692.347.153	114.194.279.815	34.704.388.157	181.084.518.812	578.322.653.665
30	PAPUA DAN MALUKU	407.235.528.833	95.280.930.554	365.497.576.452	329.824.194.867	61.314.570.621	323.341.618.294	1.582.474.418.621
31	WAJIB PAJAK BESAR	5.877.110.715.607	415.155.949.869	480.217.783.462	396.239.985.682	180.348.171.947	1.011.428.097.078	8.460.498.703.643
	JUMLAH	20.573.515.583.316	6.881.679.095.571	7.430.393.929.500	8.056.452.006.491	4.844.915.814.960	22.931.225.455.842	70.721.181.887.681

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

DAFTAR 12.D

**PENYISIHAN PIUTANG PAJAK, PIUTANG PAJAK DALUARSA, USUL PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
DAN PIUTANG PAJAK YANG DIHAPUSKAN
per 31 Desember 2012
(dalam rupiah)**

JENIS PAJAK	PENYISIHAN PIUTANG PAJAK	PIUTANG PAJAK DALUARSA	USUL PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK	PIUTANG PAJAK DIHAPUSKAN
PPH Pasal 25 DP	866.983.868.843	263.020.013.467	3.808.470.191	-
PPH Pasal 25 Badan	11.922.280.542.092	2.615.655.348.631	35.121.702.976	-
PPH Pasal 21	941.548.793.298	217.944.933.182	2.343.104.408	-
PPH Pasal 22	437.379.388.708	8.969.330.731	635.493.414	-
PPH Pasal 23	1.715.150.130.774	513.249.757.140	2.045.914.731	-
PPH Pasal 26	1.544.661.253.999	98.740.769.876	285.561.190	-
PPH Pasal 4(2)	390.009.037.796	42.213.456.830	1.802.993.751	-
PPN	11.034.824.793.601	2.159.663.954.649	158.095.651.653	28.075.790.794.612
PPhBM	148.003.842.711	29.605.336.533	150.000	-
Bunga Penagihan	1.731.435.956.728	229.588.621.246	1.216.798.652	-
Pajak Tidak Langsung Lainnya	11.887.369	11.698.503	3.021.982	-
PBB Sektor Pedesaan	1.127.774.505.409	700.857.672.238	115.876.745.424	-
PBB Sektor Perkotaan	3.413.729.102.893	1.660.615.090.670	626.533.488.315	-
PBB Sektor Perkebunan	148.776.916.135	10.631.043.311	-	-
PBB Sektor Perhutanan	313.316.983.775	52.760.295.569	-	-
PBB Sektor Pertambangan Non Migas	7.040.480.536.167	5.198.131.139	-	-
PBB Sektor Pertambangan Migas	152.649.821.732	29.504.384.540	228.278.115.326	-
BPHTB	-	-	-	-
JUMLAH	42.929.017.362.025	8.638.230.038.255	1.176.047.212.013	28.075.790.794.612

DAFTAR 12.E

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR YANG DIAJUKAN SENGKETA PAJAK DAN PIUTANG PAJAK YANG DILAKUKAN UPAYA HUKUM
per 31 Desember 2012

NO	JENIS PAJAK	PENGURANGAN /PEMBETULAN	KEBERATAN	BANDING	PENINJAUAN KEMBALI	JUMLAH
	2	3	4	5	6	7
1	PPH Pasal 25 Orang Pribadi	21.129.962.745	65.547.960.038	48.080.767.232	33.833.723.109	168.592.413.124
2	PPH Pasal 25 Badan	4.504.430.116.601	5.144.709.429.864	11.064.189.780.997	1.086.496.652.791	21.799.825.980.253
3	PPH Pasal 21	16.906.105.493	581.654.881.166	444.481.398.666	19.684.672.419	1.062.627.057.734
4	PPH Pasal 22	33.782.141.757	25.527.402.661	7.510.269.960	580.657.535	67.400.471.913
5	PPH Pasal 23	213.762.535.849	585.995.954.215	1.567.097.294.088	102.552.806.222	2.469.408.590.374
6	PPH Pasal 26	245.249.392.981	3.568.571.835.135	4.756.171.781.425	219.017.833.618	8.789.010.843.159
7	PPH Pasal 4(2)	254.695.850.857	182.689.131.593	222.037.148.847	116.746.448.614	776.168.579.911
8	PPN	922.105.834.811	3.885.380.727.073	11.572.414.193.709	2.717.168.508.084	19.097.069.263.676
9	PPnBM	2.054.036.360	67.130.859.734	338.946.626.294	314.019.421	408.445.541.809
10	Bunga Penagihan	122.032.708.293	160.082.424	12.259.394.802	2.933.575.574	137.365.761.093
11	Pajak Tidak Langsung Lainnya					
12	PBB Sektor Pedesaan	1.349.990.857	5.742.817.838	47.344.780	611.930.928	7.752.084.403
13	PBB Sektor Perkotaan	7.605.850.344	8.489.264.402	7.431.296.219	5.102.643.632	28.629.054.597
14	PBB Sektor Perkebunan	11.486.241.282	65.928.036.942	25.426.101.070	775.785.520	103.616.164.814
15	PBB Sektor Kehutanan	6.695.913.313	23.599.002.290			30.294.915.603
16	PBB Sektor Pertambangan dan Non Migas	9.321.547.912	186.931.997.266	153.651.343.876		349.904.889.054
17	PBB Sektor Pertambangan Migas		31.686.188.090			31.686.188.090
18	BPH TB					
	MASIONAL	6.372.608.229.454	14.429.745.570.731	30.219.744.741.955	4.305.719.257.467	55.327.817.799.607

DAFTAR NERACA 365

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012(AUDITED)

DAFTAR 13

**PIUTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PER 31 DESEMBER 2012 DAN 31 DESEMBER 2011**

(Dalam Rupiah)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	PIUTANG BUKAN PAJAK			31 Desember 2011 Audited
			31 Desember 2012 Audited			
			BRUTO	PENYISIHAN	NETTO	
1	002	DPK	7.468.407.149	(37.342.036)	7.431.065.113	8.684.884.505
2	004	BPK	5.082.027.403	(25.410.138)	5.056.617.265	111.159.818
3	005	MA	474.780.446	(424.301)	474.356.145	87.408.524
4	006	Kejaksaan Agung	12.570.632.222.592	(7.825.549.363.203)	4.745.082.859.389	-
5	007	Sekretariat Negara	1.207.113	(6.036)	1.201.077	-
6	010	Kementerian Dalam Negeri	3.549.915.000	(21.729.575)	3.528.185.425	51.901.629.359
7	011	Kementerian Luar Negeri	103.963.942.184	-	103.963.942.184	50.876.235.365
8	012	Kementerian Pertahanan	83.737.774.393	-	83.737.774.393	71.678.009.885
9	013	Kementerian Hukum dan HAM RI	37.497.955.959	(12.670.630.903)	24.827.325.056	18.343.360.446
10	015	Kementerian Keuangan	96.450.818.001	(51.808.973.643)	44.641.844.358	85.849.145.052
11	018	Kementerian Pertanian	2.463.017.960	(233.518.690)	2.229.499.270	1.553.735.162
12	019	Kementerian Perindustrian	3.433.122.283	(267.203.432)	3.165.918.851	4.284.175.541
13	020	Kementerian ESDM	9.399.082.826.374	(8.229.230.514.076)	1.169.852.312.298	8.504.284.454.660
14	022	Kementerian Perhubungan	146.322.771.124	(28.407.901.233)	117.914.869.891	187.044.736.967
15	023	Kementerian Pendidikan Nasional	21.639.032.813	(257.575.523)	21.381.457.290	240.867.186.876
16	024	Kementerian Kesehatan	132.537.177.149	(53.368.242)	132.483.808.907	8.487.337.460
17	025	Kementerian Agama	3.542.282.517	(2.557.490)	3.539.725.027	3.565.993.353
18	026	Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-	-	5.306.136
19	027	Kementerian Sosial	72.350.000	(361.750)	71.988.250	249.573.600
20	029	Kementerian Kehutanan	2.067.471.003.070	(1.778.821.775.130)	288.649.227.940	1.502.665.036.007
21	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	144.845.719	(724.247)	144.121.472	5.092.048.911
22	033	Kementerian Pekerjaan Umum	3.479.383.930	(13.425.394)	3.465.958.536	2.124.894.294
23	035	Kemenko Bidang Perekonomian	278.298.981	(1.391.245)	276.907.736	-
24	036	Kemenko Bidang Kesejahteraan Rakyat	558.536.000	-	558.536.000	2.045.249.040
25	040	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	2.573.784.317	(12.865.922)	2.560.918.395	282.400.000
26	041	Kementerian Negara BUMN	79.750.000	(39.875.000)	39.875.000	1.709.508.000
27	043	Kementerian Negara Lingkungan Hidup	501.354.000	(2.506.770)	498.847.230	1.059.796.000
28	044	Kementerian Negara KUKM	-	-	-	53.644.833
29	051	LSN	2.557.251.555	(12.786.258)	2.544.465.297	-
30	054	BPS	89.793.732	(448.968)	89.344.764	167.452.574
31	055	Kementerian Negara PPN/ Bappenas	2.197.800	(10.989)	2.186.811	-
32	056	Badan Pertanahan Nasional	6.975.637.424	(34.878.201)	6.940.759.223	1.675.448.928
33	057	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	24.000.000	(120.000)	23.880.000	3.600.000
34	059	Kementerian Kominfo	2.780.032.927.625	(1.375.490.622.216)	1.404.542.305.409	2.442.864.218.815
35	060	Kepolisian RI	15.700.999.463	(80.970.300)	15.620.029.163	12.958.853.609
36	063	BPOM	-	-	-	6.272.000
37	066	BNN	2.747.692.715	-	2.747.692.715	2.814.006.110
38	068	BKKBN	-	-	-	8.499.808.374
39	075	BMG	10.465.520.491	(52.327.603)	10.413.192.888	9.913.911.993
40	076	KPU	94.615.072	-	94.615.072	17.378.350
41	077	Mahkamah Konstitusi RI	299.201.563	(1.496.008)	297.705.555	34.894.202
42	078	PP-ATK	25.842.500	(129.213)	25.713.287	-
43	079	LIPi	2.654.712.840	(159.939.521)	2.494.773.319	377.542.612
44	080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	803.431.921	(4.017.160)	799.414.761	1.436.574.741
45	081	BPPPT	34.195.581.633	(10.477.719.011)	23.717.862.622	34.998.226.149
46	082	LAPAN	409.674.994	(1.912.442)	407.762.552	-
47	083	Bakosurtanal	-	-	-	7.602.799.948
48	084	BSN	31.840.000	(159.200)	31.680.800	65.329.500
49	085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	552.899.000	(234.380.305)	318.518.695	915.559.500
50	086	LAN	188.500.000	(942.500)	187.557.500	88.500.000
51	087	ANRI	223.150.531	(1.115.752)	222.034.779	-
52	088	BKN	340.693.544	(323.138.897)	17.554.647	657.337.450
53	090	Kementerian Perdagangan	388.611.870	(18.416.978)	370.194.892	1.648.413.124
54	091	Kemen Perumahan Rakyat	-	-	-	1.681.770.379
55	092	Kemen Pemuda dan Olah Raga	-	-	-	319.912.000
56	093	KPK	516.903.016.873	(30.306.317.535)	486.596.699.338	441.671.318.958

DAFTAR NERACA 388

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012(AUDITED)

DAFTAR 13

**PIUTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PER 31 DESEMBER 2012 DAN 31 DESEMBER 2011**

(Dalam Rupiah)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	PIUTANG BUKAN PAJAK			31 Desember 2011 Audited
			31 Desember 2012 Audited			
			BRUTO	PENYISIHAN	NETTO	
57	095	DPD	-	-	-	82.771.503
58	100	Komisi Yudisial RI	41.676.185	-	41.676.185	-
59	104	BNP2TKI	3.028.561.850	(15.142.810)	3.013.419.040	2.164.151.250
60	105	BPLS	37.277.302.290	(12.414.448)	37.264.887.842	2.773.751.395
61	106	LKPBJP	626.131.123	-	626.131.123	-
62	107	Badan SAR	12.643.400.000	(12.643.400.000)	-	15.429.322.590
63	108	KPPU	49.939.919.330	(45.829.210.160)	4.110.709.170	48.923.261.920
64	111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	-	-	-	3.827.012.418
65	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS &	1.380.700	-	1.380.700	-
66	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK PFI	852.606.035	(4.263.030)	848.343.005	-
67	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	67.244.099.178	-	-	-
68	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS	11.122.157.614	-	11.122.157.614	-
69	999.03	BUN (Investasi)	185.384.473.276	(100.617.241.298)	84.767.231.978	54.914.355.161
70	999.05	BUN (DUPK)	3.913.204.981.704	-	3.913.204.981.704	-
71	999.07	BUN (Subsidi)	1.142.775.784.247	(5.713.878.921)	1.137.061.905.326	878.939.094.800
72	999.08	BUN (Belanja lainnya)	211.015.741.654	-	211.015.741.654	7.438.160.200
73	999.99	BUN (Transaksi Khusus)	87.221.853.987.448	(71.832.889.674.798)	15.388.964.312.650	5.148.072.494.298
TOTAL			120.925.758.512.257	(91.342.386.518.501)	29.516.127.894.579	19.885.890.412.635

DAFTAR NERACA 367

DAFTAR 14

LAMPIRAN KEUANGAN PERIKHIAN FUSAI IAHUW ZULI KHUJULI

SALDO KEWAJIBAN S (UMIA) BANK DALAM LIKUIDASI EKIS PROGRAM PERJAMINAN PEMERINTAH PER 31 DESEMBER 2012

No.	Nama Bank	Dana Penjaminan		Realisasi Hasil Penerimaan					Jumlah Sisa Kewajiban	
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL	2012
1.	PT Bank Asiatc (DU)	886.579.224.443,93	18.500.000.000,00	5.000.000.000,00	31.500.000.000,00	-	88.000.000.000,00	-	88.000.000.000,00	818.579.224.443,93
2.	PT Bank Dagang Bah (DU)	1.321.516.811.477,24	-	-	289.806.630.005,00	1.233.388.652.895,00	-	-	383.249.282.870,00	938.220.629.607,24
3.	PT Bank Global Internasional (DU)	804.234.270.395,51	-	-	82.280.000.000,00	-	100.000.000,00	-	182.280.000.000,00	941.674.270.395,51
4.	PT Bank Riau (DU)	71.817.895.392,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-	-	-	-	30.000.000.000,00	41.817.895.392,00
5.	PT Bank Persada (DU)	227.134.559.144,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	18.497.094.494,32	-	-	-	20.994.094.494,32	206.231.653.638,32
	Jumlah	3.3.21.282.950.812,68	28.500.000.000,00	9.000.000.000,00	380.163.664.469,32	133.388.652.895,00	8.401.890.081,00	674.855.197.415,32	2.646.227.753.397,06	

* Saldo awal Bank Asiatc adalah sebagaimana tersebut di atas. Kemudian adanya pengembalian 2 nasabah setelah BAST BNI, yakni Sitr Yetti Nurmasari Rp. 13.495.383,00 dan Sitr Beng Magaudin Rp. 5.000.000,00

Saldo Kewajiban Bank Dalam Likuidasi (BDL) Eks Dana Talangan s.d 31 Desember 2012

No	ASAL BANK BDL	Kewajiban	Nilai Buku Aset Yang Diserahkan (Berdasarakan)	Hasil Pengelolaan Aset Eks BDL					Jumlah Pengembalian		Sisa Kewajiban		
				s.d Desember 2006	hak tagih saat diseraikan	2007	2008	2009	2010	2011		2012	
1	PT Bank Andara	210.680.728.375,70	140.787.811.123,81	4	9.532.857.340,07	200.567.771.036,68	5.102.888.722,00	7	1.609.202.023,00	6.490.713.243,00	11	4.454.527.844,10	125,310
2	PT Bank Cita Internasional	251.056.083.000,00	106.107.201.937,41	5	183.856.000.000,00	67.890.000.000,00	17.318.888.497,88	6	2.690.263.096,52	2.044.426.806,59	8	10.656.408.897,00	221.102.877.765,32
3	PT Bank Himpun Sentosa	3.885.182.372.852,07	136.397.469.195,84	6	585.726.665.493,00	3.280.459.256.250,07	41.314.833.383,56	8	5.106.998.512,56	8.779.099.228,44	9	19.678.463.995,75	3.188.627.996.556,22
4	PT Bank Citibank International	201.802.186.925,30	172.736.762.527,00	7	26.098.183.637,19	176.702.978.095,11	3.376.068.627,00	10	190.270.781,00	0,00	11	3.582.321.698,00	18.424.657.293,11
5	PT Bank Korpri Smetris Segitiga	201.812.614.291,48	187.450.001.984,00	8	46.872.292.071,00	164.940.472.204,48	30.746.892.410,83	12	2.845.975.443,00	3.295.914.543,00	13	4.437.547.126,83	107.686.088.540,65
6	PT Bank Mekar Mandiri	326.753.234.865,38	6.260.684.894,70	9	31.186.000.000,00	305.572.698.884,98	4.018.000.000,00	14	0,00	0,00	15	655.694.203,00	297.059.600.920,98
7	PT Bank Perti	2.132.346.474.624,93	1.638.279.007.000,00	10	332.023.076.287,80	1.801.340.256.571,83	29.247.897.894,00	16	14.876.177.662,50	19.600.001.520,16	17	74.242.254.274,00	593.233.557.701,76
8	PT Sejahtera Bank Utama	1.687.346.515.372,93	1.016.940.110.444,00	11	857.887.817.393,85	623.892.297.978,83	550.081.483,46	18	29.832.436.510,76	28.020.046.077,00	19	59.246.945.684,00	1.113.081.688.091,56
9	PT Somp Fast Loan Bank	699.298.023.306,99	161.395.841.474,06	12	89.202.719.300,89	800.096.200.878,19	134.482.272,00	20	200.726.240,00	27.806.945.654,00	21	39.880.379.546,00	709.296.629.627,31
10	PT Bank Citibank	10.028.927.030,37	47.945.536.195,34	13	6.370.174.800,00	41.258.652.539,37	0,00	22	0,00	359.200,00	23	11.245.816,00	14.989.979,37
11	PT Bank Citibank	631.028.430.818,58	82.182.282.117,24	14	18.456.800.103,11	662.627.818.194,77	746.723.807,00	24	3.590.998.621,00	1.363.214.618,00	25	5.412.266.712,00	622.222.186.044,32
12	PT Bank Mandiri	210.944.000.000,00	0,00	15	120.459.500.061,67	90.004.069.930,33	60.000.000,00	26	21.222.394.930,00	0,00	27	67.107.675.210,00	15.429.291.963,60
13	PT Bank Mandiri	511.470.225.226,88	238.376.301.422,00	16	279.124.000.000,00	232.246.229.236,69	0,00	28	79.216.241.617,00	88.420.788,00	29	481.132.821,00	2.800.000.000,00
14	PT Bank Mandiri	9.556.789.942,67	4.057.861.694.824,81	17	2.800.000.000,00	6.664.789.642,67	0,00	30	0,00	47.941.145,00	31	252.873.941.823,55	6.064.789.642,67
15	PT Bank Ummul Ma'arifat Jaya	11.888.939.791.983,20	4.057.861.694.824,81	18	2.730.906.724.151,39	31.159.233.007.406,89	228.083.333.376,52	32	140.794.183.769,46	941.776.537.911,50	33	3.963.324.310.024,25	8.046.653.301.916,76
	Total BDL Elemen Tabungan												

DAFTAR NEPAKA 368

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH RI SATU TAHUN 2012 (40/2012)

DIRTA: 15 A

ASET KREDIT EKS BPPN

1) Telah Dilakukan Pengurusan Oleh PUPN

Mata Uang	Saldo Per 31 Desember 2011	Mutasi Tahun 2012	Saldo Per 31 Desember 2012	Nilai Konversi
Dolar Amerika	31.9.844.316,23	(281.484,98)	31.9.562.831,25	3.090.172.579.117,20
Rupiah	6.433.980.316.476,42	(11.207.161.367,22)	6.422.773.155.109,20	6.422.343.187.961,61
Yen Jepang	6.815.941.993,95	-	6.815.941.993,95	628.760.963.618,86
Deutschmark	600.000,00	(600.000,00)	0,00	0,00
Jumlah				10.141.276.617.601,70

*Nilai telah memperhatikan tahap pengurusan yang telah PBP/PFN

2) Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham

Nama Obligasi	Bank Asal	Saldo Per 31 Desember 2011	Mutasi Tahun 2012	Saldo Per 31 Desember 2012
Beringin Marulim Hasilkan Panggabean & Joseph Januardy	Bank Namura	170.144.000.000,00	-	170.144.000.000,00
Trijono Gaskokostanto	Bank Putra Surya Perikasa	5.049.096.000.000,00	-	5.049.096.000.000,00
Santosa Samali	Bank Monevitas	70.460.000.000,00	-	70.460.000.000,00
Santosa Samali	Bank Bihari	406.416.000.000,00	-	406.416.000.000,00
I.M. Sudarta/AGD Darmawan	Bank Aeca	736.360.000.000,00	181.818.181.818,00	654.541.818.182,00
Fadel Muhammad	Bank Intan	136.430.000.000,00	-	136.430.000.000,00
Hengky Wijaya	Bank Tata Intemasional	686.794.000.000,00	-	686.794.000.000,00
David Mica Wijaya/Tarunajaya Nica	Bank Serwita	4.308.730.000.000,00	-	4.308.730.000.000,00
Devanto Kurniawan	Bank Deka	117.609.814.938,82	31.689.400.838,00	86.920.414.100,82
Agus Rover	Bank Palta Istamarat	577.812.000.000,00	-	577.812.000.000,00
Atang Lelaif	Bank Indonesia Raya	165.727.000.000,00	-	165.727.000.000,00
Marnata Shivasan	Bank Putra Matikarsa	790.657.000.000,00	-	790.657.000.000,00
Ulung Bursa	Bank Lautan Berlian	424.656.000.000,00	-	424.656.000.000,00
Lidia Muchtar	Bank Tamara	188.483.118.182,00	-	188.483.118.182,00
Kaharudin Dugla	Bank Uluw Nasonal	803.949.863.653,18	133.901.178.180,00	7.900.947.486.383,18
Samadika Hartono	Bank Modern	2.630.304.229.248,00	-	2.630.304.229.248,00
Jumlah		24.297.416.826.932,00	347.408.760.836,00	23.950.007.066.096,00

*Nilai telah memperhitungkan penjualan obligasi 2 barang jaminan obligasi yang diterima pada bulan Februari 2012

DIRTA: MEKAC309

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH RI SATU TAHUN 2012 (40/2012)

DIRTA: 15 A

3) Dikelola Kantor Pusat (ATK)

Mata Uang	Saldo Per 31 Desember 2011	Saldo Per 31 Desember 2012*	Nilai Konversi
Rupiah	21.167.693.030.119,20	13.360.363.864.509,60	13.360.363.864.509,60
Dolar Amerika	1.472.167.922,48	1.948.022.803,17	10.134.378.630.673,90
Yen Jepang	6.644.744.692,87	988.413.744,22	111.782.402.802,97
Deutschmark	600.000,00	-	-
Euro	13.263.366,67	13.263.366,67	189.901.697.361,61
Dolar Australia	1.332.763,73	1.332.763,73	13.361.678.878,90
Poundsterling	266.124,00	266.124,00	4.146.908.538,94
			23.783.964.340.666,40

*) Berdasarkan pengesahan ulang SAPB dan MKN

Telah Dilakukan Pengurusan Oleh PUPN	Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham	Dikelola Kantor Pusat (ATK)	Grand Total
Jumlah	10.141.276.617.601,70	23.950.007.066.096,00	23.783.964.340.666,40
			57.875.238.023.263,00

Catatan

Kurs Tengah BI per 28 Desember 2012:

1 Dolar Amerika	9.670,00
2 Yen Jepang	111,96
3 Deutschmark	24.978,23
4 Euro	12.638,86
5 Dolar Australia	10.025,39
6 Poundsterling	15.678,86

DIRTA: MEKAC370

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

DAFTAR 15.B

ASET KREDIT EKS KELOLAAN PT PPA

1) Telah Dilakukan Pengurusan Oleh PUPN

Mata Uang	Nilai Awal Penyerahan	Saldo Per 31 Desember 2011	Mutasi Tahun 2012	Saldo Per 31 Desember 2012	Nilai Konversi
Dollar Amerika	93.191.688,16	80.470.696,97	(4.323.639,40)	76.147.167,57	736.343.013.701,90
Rupiah	2.370.429.668.167,60	2.349.909.993.739,11	(10.961.941.940,77)	2.338.948.061.798,34	2.338.948.061.798,34
Yen Jepang	141.216.722,60	141.216.722,60	-	141.216.722,60	16.810.624.261,10
Deutchmark	768.612,78	768.612,78	-	768.612,78	18.947.062.914,02
Jumlah					3.110.048.752.665,36

2) Dikelola Kantor Pusat

Nama Debitur	Bank Asal	Saldo 31 Desember 2011	Mutasi Tahun 2012	Saldo 31 Desember 2012
Dirgantara Indonesia PT	BBB (Mandiri)	1.299.160.000,00		1.299.160.000,00
Dirgantara Indonesia PT	BBB (Mandiri)	108.990.024,00		108.990.024,00
Dirgantara Indonesia PT	BBB (Mandiri)	34.584.020.409,75		34.584.020.409,75
Dirgantara Indonesia PT	BBB (Mandiri)	69.168.040.819,60		69.168.040.819,60
Dirgantara Indonesia PT	BBB (Mandiri)	62.099.370.000,00		62.099.370.000,00
Dirgantara Indonesia PT	Mandiri	30.938.810.688,84		30.938.810.688,84
Dirgantara Indonesia PT	Mandiri	112.771.449.868,24		112.771.449.868,24
Dirgantara Indonesia PT	Mandiri	426.983.823.648,60		426.983.823.648,60
Dirgantara Indonesia PT	Mandiri	8.693.911.800,00		8.693.911.800,00
Dok & Perkapalan Kodja Bahan PT	Fasilitas Restructuring	91.489.249.097,01		91.489.249.097,01
Dok & Perkapalan Kodja Bahan PT	Fasilitas Restructuring	1.212.686.363.877,93		1.212.686.363.877,93
Perusahaan Perdagangan Indonesia PT	Fasilitas Restructuring	26.981.928.647,66		26.981.928.647,66
Perusahaan Perdagangan Indonesia PT	Fasilitas Restructuring	616.026.707.374,47		616.026.707.374,47
Perusahaan Perdagangan Indonesia PT	Fasilitas Restructuring	46.000.000.000,00		46.000.000.000,00
Jumlah				2.736.829.806.146,89

Jumlah

Telah Dilakukan Pengurusan Oleh PUPN	Dikelola Kantor Pusat	Grand Total
3.110.048.752.665,36	2.736.829.806.146,89	5.846.878.558.811,25

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

DAFTAR 15.C

Daftar Aset Kredit yang Diserahkankelolakan ke PT PPA Tahun 2012

No.	Debitur	Mata Uang	Nilai Aset
1	Jaya Perkasa Engineering, PT	IDR	151.367.074.750,00
		USD	38.822.432,00
2	Polysindo Eka Perkasa, PT	IDR	459.555.536,00
		USD	960.092,00
3	Texmaco Jaya, PT	IDR	365.572.613,00
		USD	2.435,00
4	Wastra Indah, PT	IDR	10.493.948,00
5	PT Bina Prima Perdana	IDR	470.399.713.486,00
		USD	25.540.008,00
6	PT Tuban Petrochemical Industries	IDR	1.083.805.023.902,64
Total IDR			1.706.407.434.235,64
Total USD			65.324.967,00
Total (setelah konversi ke IDR)			2.334.964.266.709,64

Kurs menggunakan kurs transaksi beli BI tanggal 28 Desember 2012

1 USD = Rp. 9.622,- (65.324.967,00 USD x Rp. 9.622,- = Rp628.556.832.474)

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

DAFTAR 15.D

PENYISIHAN PIUTANG

Uraian	Formula Penyisihan Piutang	Jumlah Penyisihan Piutang
Aset kredit eks BPPN	32% x (outstanding piutang tahun 2011 - recovery tahun 2012)	53.245.218.361.402,00
Aset kredit eks kelolaan PT PPA	32% x (outstanding piutang tahun 2011 - recovery tahun 2012)	5.379.128.274.106,35
Aset kredit yang diserahkan/dikelolaan kepada PT PPA	32% x (outstanding piutang tahun 2011 - recovery tahun 2012)	2.148.167.125.372,87
Piutang eks BDL	(100% x (outstanding piutang tahun 2012)) - nilai agunan	10.573.232.359.353,80
Piutang pada PT PPA	32% x (Outstanding piutang tahun 2012)	2.590.720.000,00
Total		71.345.746.740.235,00

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

DAFTAR 16

**BAGIAN LANCAR TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI
PER 31 DESEMBER 2012 DAN 31 DESEMBER 2011**

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	BAGIAN LANCAR TUNTUTAN GANTI RUGI			
			31 Desember 2012 Audited			31 Desember 2011 Audited
			BRUTO	PENYISIHAN	NETTO	
1	004	Badan Pemeriksa Keuangan	85.162.037	(1.011.204)	84.150.833	82.032.037
2	005	Mahkamah Agung	1.246.335.592	(961.769.723)	284.565.869	227.287.079
3	006	Kejaksaan Agung	2.400.000	(12.000)	2.388.000	-
4	007	Sekretariat Negara	50.240.000	(251.200)	49.988.800	46.434.000
5	010	Kementerian Dalam Negeri	86.972.704	(434.864)	86.537.840	86.972.704
6	011	Kementerian Luar Negeri	33.217.459.502	(32.731.700.959)	485.758.551	31.295.078.475
7	012	Kementerian Pertahanan	5.232.005	-	5.232.005	6.737.920
8	013	Kementerian Hukum dan HAM	178.837.498	(894.189)	177.943.310	168.980.500
9	015	Kementerian Keuangan	9.625.650.721	(9.414.674.698)	210.976.023	9.874.029.786
10	018	Kementerian Pertanian	1.643.001.627	(602.009.332)	1.040.992.295	595.311.033
11	019	Kementerian Perindustrian	1.600.000	(8.000)	1.592.000	66.349.821
12	020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	62.107.000	(310.535)	61.796.465	94.562.000
13	022	Kementerian Perhubungan	69.900.000	(215.000)	69.685.000	46.170.400
14	023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	223.761.170	(959.806)	222.801.364	97.661.170
15	024	Kementerian Kesehatan	44.375.000	(497.875)	43.877.125	270.131.114
16	025	Kementerian Agama	1.500.000	-	1.500.000	-
17	027	Kementerian Sosial	16.359.900	(81.800)	16.278.100	13.499.996
18	029	Kementerian Kehutanan	9.481.845.887	(9.223.360.770)	258.285.117	9.580.872.359
19	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	-	-	-	17.466.694
20	033	Kementerian Pekerjaan Umum	503.214.788	(2.516.074)	500.698.714	261.430.000
21	034	Kemenko Bidang Politik dan Keamanan	7.251.576	(36.258)	7.215.318	6.840.000
22	041	Kementerian BUMN	3.500.004	(17.500)	3.482.504	4.063.338
23	044	Kementerian KUKM	28.038.410	(140.492)	27.897.918	48.958.800
24	047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan	24.000.000	(120.000)	23.880.000	-
25	054	Badan Pusat Statistik	16.452.257.474	(16.190.794.280)	261.463.194	362.276.673
26	055	Kementerian Negara PPN/ Bappenas	-	-	-	36.090.000
27	056	Badan Pertanahan Nasional	57.600.000	(3.258.000)	54.342.000	58.301.770
28	059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	459.033.088	(2.295.468)	456.737.622	194.576.406
29	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	681.330.564	(3.409.653)	678.520.911	44.565.702
30	065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	29.285.148	(146.426)	29.138.722	-
31	067	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	19.000.000	(15.000.000)	4.000.000	17.250.000
32	068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	1.347.250	(6.736)	1.340.514	-
33	077	Mahkamah Konstitusi	14.880.000	(74.400)	14.805.600	-
34	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	104.199.992	(521.000)	103.678.992	52.360.607
35	080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	1.838.025.728	(275.936.097)	1.562.089.631	4.217.591.028
36	081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	-	-	-	21.340.008
37	082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	1.200.000	(6.000)	1.194.000	2.400.000
38	083	Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional	11.304.000	(56.520)	11.247.480	7.200.000
39	084	Badan Standardisasi Nasional	397.413.000	(1.987.065)	395.425.935	-
40	085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	6.000.000	(30.000)	5.970.000	6.000.000
41	086	Lembaga Administrasi Negara	-	-	-	1.553.078.099
42	087	Arsip Nasional Republik Indonesia	2.994.268	(14.821)	2.979.447	-
43	089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	1.648.114.290	(8.240.571)	1.639.873.719	11.835.000
44	090	Kementerian Perdagangan	363.589.208	(333.443.693)	30.145.515	399.900.208
45	093	Komisi Pemberantasan Korupsi	-	-	-	9.469.148
46	103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	13.200.000	(66.000)	13.134.000	-
47	104	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	54.847.998	(274.239)	54.573.759	170.498.732
48	108	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	178.941.115	(178.941.115)	-	173.000.207
49	116	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	31.696.201	(158.481)	31.537.720	-
50	999.08	Belanja Lain-lain	-	-	-	242.297.208
		TOTAL	78.975.494.772	(69.955.662.840)	9.019.811.932	60.470.939.992

DAFTAR NERACA 374

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

DAFTAR 17

**PERSEDIAAN
PER 31 DESEMBER 2012 DAN 31 DESEMBER 2011**

(Dalam Rupiah)				
No.	BA	Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2012 (Audited)	31 Desember 2011 (Audited)
1	001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	2.881.355.431	2.004.238.360
2	002	Dewan Perwakilan Rakyat	14.890.423.697	14.613.978.819
3	004	Badan Pemeriksa Keuangan	24.539.681.115	14.149.867.432
4	005	Mahkamah Agung	8.996.475.335	12.794.906.024
5	006	Kejaksaan Agung	160.148.509.223	278.962.662.823
6	007	Sekretariat Negara	203.336.908.519	194.626.516.842
7	007	BLU Sekretariat Negara	74.258.049.593	74.100.536.302
8	010	Kementerian Dalam Negeri	385.938.241.128	31.310.707.268
9	011	Kementerian Luar Negeri	41.167.550.689	73.281.389.166
10	012	Kementerian Pertahanan	44.647.358.307.542	46.209.249.007.353
11	013	Kementerian Hukum dan HAM RI	324.101.005.634	274.318.672.069
12	015	Kementerian Keuangan	284.672.873.440	282.731.013.941
13	015	BLU Kementerian Keuangan	913.269.070	1.107.526.185
14	018	Kementerian Pertanian	905.627.537.236	148.145.904.916
15	018	BLU Kementerian Pertanian	17.214.862.186	10.992.397.374
16	019	Kementerian Perindustrian	39.520.592.845	6.169.596.666
17	020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	819.945.422.944	397.942.386.202
18	022	Kementerian Perhubungan	154.789.258.848	749.249.628.830
19	022	BLU Kementerian Perhubungan	1.305.581.206	1.170.208.683
20	023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	200.038.773.429	143.290.602.535
21	023	BLU Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	195.413.139.998	147.733.438.587
22	024	Kementerian Kesehatan	982.793.939.244	490.573.034.841
23	024	BLU Kementerian Kesehatan	414.626.580.637	339.699.336.087
24	025	Kementerian Agama	80.889.655.702	61.710.862.838
25	025	BLU Kementerian Agama	4.068.412.628	3.632.598.518
26	026	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	50.044.362.305	167.195.865.597
27	026	BLU Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	534.944.407	603.425.378
28	027	Kementerian Sosial	307.581.276.149	265.005.062.599
29	029	Kementerian Kehutanan	102.210.748.516	27.257.932.644
30	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	335.432.858.964	745.794.093.746
31	033	Kementerian Pekerjaan Umum	397.247.031.751	401.248.691.555
32	034	Kemenko Bidang Politik dan Keamanan	399.328.494	148.727.855
33	035	Kemenko Bidang Perekonomian	1.072.644.674	897.875.501
34	036	Kemenko Bidang Kesejahteraan Rakyat	909.558.824	624.294.167
35	040	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	93.444.658.629	150.587.198.880
36	041	Kementerian BUMN	1.915.538.403	1.352.572.937
37	042	Kementerian Riset dan Teknologi	16.103.260.628	8.288.334.452
38	043	Kementerian Lingkungan Hidup	31.017.567.337	17.284.283.255
39	044	Kementerian KUKM	151.081.644	280.780.075
40	044	BLU Kementerian KUKM	690.774.025	437.460.065
41	047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan	1.885.079.937	3.036.142.921
42	048	Kementerian PAN	812.707.447	664.284.347
43	050	Badan Intelijen Negara	2.991.965.980	3.273.027.297
44	051	Lembaga Sandi Negara	6.527.651.935	9.671.455.164

DAFTAR NERACA 375

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

DAFTAR 17

**PERSEDIAAN
PER 31 DESEMBER 2012 DAN 31 DESEMBER 2011**

				(Dalam Rupiah)	
45	052	Dewan Ketahanan Nasional	25.513.700	2.414.500	
46	054	Badan Pusat Statistik	18.257.177.113	18.293.548.809	
47	055	Kementerian Negara PPN/ Bappenas	3.419.627.611	1.535.774.403	
48	056	Badan Pertanahan Nasional	61.046.164.797	55.673.263.969	
49	057	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	448.464.020	1.411.256.784	
50	059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	51.655.136.288	36.273.736.429	
51	059	BLU Kementerian Komunikasi dan Informatika	11.143.402.700	11.179.209.616	
52	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	2.514.597.356.111	2.458.580.229.680	
53	063	Badan Pengawas Obat dan Makanan	78.905.931.172	63.592.759.532	
54	064	Lembaga Ketahanan Nasional	44.665.005	358.844.130	
55	065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	9.862.079.965	6.150.770.586	
56	066	Badan Narkotika Nasional	18.026.512.814	18.551.276.514	
57	067	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	70.668.031.896	12.310.609.780	
58	068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	632.375.797.484	666.545.768.411	
59	074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	84.120.934	63.402.986	
60	075	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	21.465.620.019	23.246.417.366	
61	076	Komisi Pemilihan Umum	401.403.738.376	485.017.642.483	
62	077	Mahkamah Konstitusi	1.260.238.329	1.475.252.202	
63	078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	813.780.988	595.620.672	
64	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	6.554.603.435	5.746.377.474	
65	080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	56.944.602.898	55.993.169.179	
66	081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	11.653.945.045	11.082.574.374	
67	081	BLU Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	629.120	10.759.155	
68	082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	34.885.205.578	23.197.781.964	
69	082	BLU Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	119.383.110	94.270.840	
70	083	Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional	133.306.056.181	131.034.968.365	
71	084	Badan Standardisasi Nasional	299.852.579	150.922.750	
72	085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	681.201.740	789.995.836	
73	086	Lembaga Administrasi Negara	1.929.728.129	1.566.980.318	
74	087	Arsip Nasional Republik Indonesia	670.406.839	864.181.177	
75	088	Badan Kepegawaian Negara	14.097.031.747	10.229.132.916	
76	089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	7.385.810.532	5.864.852.211	
77	090	Kementerian Perdagangan	5.832.728.260	8.388.960.571	
78	091	Kemen Perumahan Rakyat	911.749.448.150	151.612.155.419	
79	091	BLU Kemen Perumahan Rakyat	12.999.600	34.155.000	
80	092	Kemen Pemuda dan Olah Raga	11.286.179.408	72.788.130.273	
81	093	Komisi Pemberantasan Korupsi	26.135.356.185	12.190.358.475	
82	094	BRR NAD - Nias	76.642.906.311	78.951.123.713	
83	095	Dewan Perwakilan Daerah	2.247.400.031	1.572.238.972	
84	100	Komisi Yudisial	824.138.257	945.879.061	
85	103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	475.216.786.893	355.460.776.110	
86	104	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	54.820.922.799	70.078.320.865	
87	105	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	132.222.804	3.431.763	
88	106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1.322.006.083	1.996.296.501	
89	107	Badan SAR Nasional	19.306.830.535	8.599.198.546	

DAFTAR NERACA 376

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

DAFTAR 17

**PERSEDIAAN
PER 31 DESEMBER 2012 DAN 31 DESEMBER 2011**

(Dalam Rupiah)

90	108	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	1.205.184.714	1.140.552.598
91	109	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	45.377.000	9.408.500
92	110	Ombudsman Republik Indonesia	140.936.150	69.182.560
93	111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	636.190.150	452.272.208
94	112	BLU Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	12.577.082.111	-
95	113	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	4.928.250	-
96	114	Sekretariat Kabinet	1.034.256.952	-
97	115	Badan Pengawas Pemilihan Umum	67.784.000	-
98	116	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	6.986.630.375	-
99	117	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	8.072.215.335	-
100	118	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	3.321.624.103	-
101	999.07	Belanja Subsidi	-	4.841.100.000
102	999.08	Belanja Lain-lain	4.892.498.398.336	2.571.016.619.518
TOTAL			62.016.561.796.415	59.214.846.453.160

DAFTAR NERACA 377

DAFTAR ISIA

LAPORAN KEUANGAN FEMERITAHUSKAT TAHUN 2012 (AUDITED)

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA BUMI TAHUN 2012
PENDAPATAN, BEBAN, DAN LABA RUGI BERSIH

NO	SEKTOR	BUMI	STATUS LAPORAN	KESEHATAN	PENDAPATAN USAHA	HPP - BEBAN USAHA	LABA USAHA	PENDAPATAN LAIN - LAIN	BEBAN LAIN - LAIN	EBIT	BEBAN BUNGA	LABA SEBELUM PAJAK	PAJAK	LABA RUGI TAHUN BERJALAN	PENDAPATAN KOMPREHENSIF	LABA RUGI KOMPREHENSIF
1	Perkebunan	PT Perkebunan Nusantara I	Audited 2012	Sehat A	866.615	815.768	50.847	21.403	23.338	48.912	-	48.912	12.778	36.434	-	36.434
2		PT Perkebunan Nusantara II	Audited 2012	Kurang Sehat BBB	1.467.242	1.385.329	101.914	51.259	163.080	(8.907)	88.065	(97.972)	7.989	137.234	137.234	31.273
3		PT Perkebunan Nusantara III	Audited 2012	Sehat AAA	5.963.606	4.819.094	1.144.712	84.889	-	1.228.611	85.022	1.164.590	340.986	823.691	(2.745)	820.946
4		PT Perkebunan Nusantara IV	Audited 2012	Sehat AAA	5.419.615	4.248.808	1.170.807	146.147	130.877	1.166.077	191.249	994.828	299.168	895.661	-	895.661
5		PT Perkebunan Nusantara V	Audited 2012	Sehat AA	5.024.326	4.611.226	413.100	48.270	39.276	420.094	-	420.094	107.912	312.282	-	312.282
6		PT Perkebunan Nusantara VI	Audited 2012	Sehat AAA	2.136.866	2.000.866	197.990	41.155	40.663	188.472	-	188.472	53.565	144.877	-	144.877
7		PT Perkebunan Nusantara VII	Audited 2012	Sehat A	4.360.371	4.082.413	277.957	120.889	335.654	63.002	-	63.002	8.570	54.333	-	54.333
8		PT Perkebunan Nusantara VIII	Audited 2012	Sehat AA	1.832.164	1.658.179	173.984	2.909	-	176.894	10.961	165.933	47.262	118.651	-	118.651
9		PT Perkebunan Nusantara IX	Audited 2012	Sehat AA	1.392.423	1.103.069	289.354	78.975	48.604	319.726	68.069	251.656	81.971	169.686	(74)	169.611
10		PT Perkebunan Nusantara X	Audited 2012	Sehat AAA	2.145.471	1.680.074	465.397	81.830	45.003	522.225	31.366	490.840	127.372	363.468	15.866	379.334
11		PT Perkebunan Nusantara XI	Audited 2012	Sehat AA	2.100.660	1.681.143	219.417	35.326	61.021	193.722	-	193.722	59.646	134.074	-	134.074
12		PT Perkebunan Nusantara XII	Audited 2012	Sehat AA	1.130.268	895.148	235.110	16.479	78.261	172.321	-	172.321	49.068	128.653	-	128.653
13		PT Perkebunan Nusantara XIII	Audited 2012	Sehat A	2.953.173	2.907.742	145.431	19.987	105.089	60.329	-	60.329	21.339	38.491	-	38.491
14		PT Perkebunan Nusantara XIV	Audited 2012	Kurang Sehat BB	504.141	468.772	34.369	64.808	42.174	56.803	41.949	14.854	2.463	12.491	-	12.491
15		PT Rajawali Nusantara Indonesia	Audited 2012	Sehat AA	4.542.736	4.039.673	503.063	78.514	146.490	435.067	-	435.067	128.229	306.838	-	306.838
16	Kehutanan	Perum Perhutani	Audited 2012	Sehat AA	3.555.851	3.367.759	188.192	120.248	44.518	263.922	-	263.922	86.854	197.068	-	197.068
17		PT Pihutan I	Audited 2012	Sehat A	138.677	133.489	5.188	146.447	45.514	106.321	-	106.321	-	106.321	-	106.321
18		PT Pihutan II	Audited 2012	Kurang Sehat BB	52.061	70.715	(18.654)	11.863	7.546	(14.336)	-	(14.336)	(495)	(13.841)	(1.042)	(14.883)
19		PT Pihutan III	Audited 2012	Kurang Sehat B	7.168	13.339	(6.171)	6.832	4.762	(4.101)	-	(4.101)	(570)	(3.531)	-	(3.531)
20		PT Pihutan IV	Audited 2012	Sehat A	28.944	35.440	(6.496)	8.232	926	810	-	810	(46)	866	-	866
21		PT Pihutan V	Audited 2012	Sehat A	281	5.947	(5.666)	38.197	23.665	9.485	-	9.485	(40)	9.505	-	9.505
22	Perikanan	PT Perikanan Nusantara	Audited 2012	Sehat A	68.559	73.975	(5.416)	88.867	52.415	31.036	-	31.036	115	30.921	-	30.921
23		Perum Praesana Perikanan Samudera	Audited 2012	Sehat A	168.525	166.567	1.958	2.171	1.265	2.664	943	1.921	(1.074)	2.895	-	2.895
24	Perikanan	Perum Bulog	Audited 2012	Sehat AA	27.685.978	27.088.491	597.487	767.045	1.088.191	269.341	788.326	(622.895)	(149.539)	(373.347)	-	(373.347)

DAFTAR NEKCA 276

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGERA BUMI TAHUN 2012
PENDAPATAN, BEBAN, DAN LABA RUGI/BERHIS

No	Nama Perusahaan	Kategori	Audited 2012	1.914.148	1.882.748	21.400	31.465	149.531	686.665	686.665	(23.465)	(73.200)
25	PT Sang Hyang Seri	Kurang Sehat BBB	Audited 2012	1.335.043	1.332.893	2.050	15.515	52.671	63.132	63.132	(1.521)	(33.210)
26	PT Perani	Sehat AA	Audited 2012	51.261.674	43.672.604	7.589.070	1.041.907	705.274	7.925.403	1.128.141	1.738.482	66.920
27	PT Pupuk Indonesia	Sehat AAA	Audited 2012	283.295	220.859	62.436	8.768	3.443	67.782	67.782	15.378	52.384
28	Perusahaan Jasa Tirta I	Sehat AAA	Audited 2012	403.890	345.080	58.810	-	-	58.910	58.910	6.901	52.008
29	Perusahaan Jasa Tirta II	Sehat AA	Audited 2012	10.449.886	9.594.021	895.864	3.352.154	118.022	4.129.996	254.301	3.895.495	902.379
30	Perusahaan Tbk	Sehat AAA	Audited 2012	7.822.560	683.024	683.024	46.443	51.523	678.944	30.305	946.639	215.051
31	PT Timah Tbk	Sehat AA	Audited 2012	11.788.422	8.194.912	3.593.510	327.637	5.914	3.915.233	3.846	3.911.587	1.002.168
32	PT Bukit Asam Tbk	Sehat AAA	Audited 2012	89.128	60.465	28.664	1.772	5.678	24.757	24.757	6.613	18.144
33	PT Sarana Karya	Sehat AA	Audited 2012	895.893.335	639.789.947	46.098.988	3.944.325	391.828	49.622.485	3.194.360	46.438.125	19.693.709
34	Energi	Sehat AA	Audited 2012	25.121.776	15.273.041	9.848.734	1.464.051	-	11.312.795	208.846	11.104.139	8.850.528
35	PT Perusahaan Gas Negara Tbk	Sehat AA	Audited 2012	28.680	29.054	1.384	307	2.016	12.074	-	12.074	13.005
36	PT Energy Management Indonesia	Sehat AAA	Audited 2012	23.458	35.725	(12.267)	368	782	(12.681)	-	(12.681)	7.326
37	PT Batan Teknologi	Kurang Sehat BB	Audited 2012	18.988.248	13.468.234	6.109.014	313.381	134.941	6.287.424	61	1.380.814	8.857.654
38	Industri semen	Sehat AA	Audited 2012	1.086.634	731.701	367.133	28.350	-	395.483	61	395.421	298.513
39	PT Semen Baraja	Sehat AA	Audited 2012	18.161	3.153	15.007	84	25.358	(10.267)	-	(10.267)	(10.267)
40	PT Semen Kujang	Sehat AA	Unaudited 2012	2.985.893	2.989.312	17.571	97.187	19.643	95.115	95.445	38.670	40.073
41	Industri Perikanan	Kurang Sehat BB	Audited 2012	574.200	572.058	2.142	61.714	152.317	(89.461)	154.950	15.501	65.722
42	PT PAL Indonesia	Sehat AA	Audited 2012	1.508.058	1.377.806	130.252	53.447	77.594	106.105	-	106.105	76.912
43	PT Hindal	Sehat AA	Audited 2012	810.125	807.175	2.949	4.385	-	7.334	-	7.334	14.052
44	PT Dahana	Sehat A	Audited 2012	22.119.953	22.385.753	(265.800)	529.007	39.628	243.220	392.824	(149.605)	189.145
45	Ind. Baja, Manufaktur, & Rekayasa	Kurang Sehat BBB	Audited 2012	634.056	821.941	(187.885)	742	-	(186.627)	56.213	(244.415)	50.935
46	PT INKA	Kurang Sehat BBB	Audited 2012	886.910	840.685	46.216	87.378	76.455	56.138	12.213	43.926	33.382
47	PT Barata Indonesia	Sehat A	Audited 2012	162.266	173.519	(11.253)	53.866	6.682	35.951	9.768	26.183	26.183
48	PT Bina Bina Indra	Kurang Sehat BB	Unaudited 2012	760.249	762.005	(1.756)	54.954	34.632	18.586	10.240	8.326	9.956
49	Industri Dik dan Perkapalan	Kurang Sehat B	Audited 2012	365.542	331.968	33.574	4.140	12.677	25.037	15.394	5.542	9.641
50	PT Dik dan Perkapalan Surabaya	Kurang Sehat B	Audited 2012	50.425	46.887	3.428	651	1.093	2.896	-	2.896	2.794
51	PT Industri Kapal Indonesia	Kurang Sehat BBB	Audited 2012									

DAFTAR 18.B

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

IKHTISAR PERUSAHAAN NEGARA DAN PENYERTAAN MODAL NEGARA PADA BUNMI PER 31 DESEMBER 2012

No	Kategori	Nama Perusahaan	Tipe	Saldo	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Awal	Saldo Akhir	
76	76	PT Garuda Indonesia	Garuda 2012	683.283.952	458.253.183	2.943.350	877.744.010	746.902.300	1.153.903.131	350.116.004	463.973.830	30.718.307	1.271.124	833.773.011	1.373.931.272	38.984	137.808.916	100%	137.808.916
77	77	PT Garuda Indonesia	Garuda 2012	1.173.856.59	1.173.856.59									1.343.100	2.386.117	2.386.117	17.801.872	100%	2.386.117
78	78	PT Garuda Indonesia	Garuda 2012	2.589.118	2.589.118									7.954.576	8.259.957	8.259.957	90.758	100%	8.259.957
79	79	PT Garuda Indonesia	Garuda 2012	621.322	621.322									31.827	427.087	427.087	4.370.370	100%	4.370.370
80	80	PT Garuda Indonesia	Garuda 2012	3.200.782	3.200.782									2.782.027	2.782.027	2.782.027	2.142.500	100%	2.142.500
81	81	PT Garuda Indonesia	Garuda 2012	3.159.771	3.159.771									1.188.272	1.188.272	1.188.272	1.000	100%	1.000
82	82	PT Garuda Indonesia	Garuda 2012	2.940.814	2.940.814									1.213.258	1.213.258	1.213.258	979.667	100%	979.667
83	83	PT Garuda Indonesia	Garuda 2012	48.225	48.225									1.011.521	1.011.521	1.011.521	41.720	100%	41.720
84	84	PT Garuda Indonesia	Garuda 2012	197.212	197.212									1.857.147	1.857.147	1.857.147	181.27	100%	181.27
85	85	PT Garuda Indonesia	Garuda 2012	297.258	297.258									15.182	15.182	15.182	338.877	100%	338.877
86	86	PT Garuda Indonesia	Garuda 2012	6.156.558	6.156.558									194.111	194.111	194.111	13.892	100%	13.892
87	87	PT Garuda Indonesia	Garuda 2012	1.555.757	1.555.757									1.886.424	1.886.424	1.886.424	4.729.107	100%	4.729.107
88	88	PT Garuda Indonesia	Garuda 2012	945.771	945.771									271.004	271.004	271.004	480	100%	480
89	89	PT Garuda Indonesia	Garuda 2012	41.122	41.122									183.897	183.897	183.897	2.577.581	100%	2.577.581
90	90	PT Garuda Indonesia	Garuda 2012	268.670	268.670									1.021.943	1.021.943	1.021.943	120.255	100%	120.255
91	91	PT Garuda Indonesia	Garuda 2012	2.263.637	2.263.637									4.325	4.325	4.325	26.203	100%	26.203
92	92	PT Garuda Indonesia	Garuda 2012	8.138.945	8.138.945									153.971	153.971	153.971	1.174.148	100%	1.174.148
93	93	PT Garuda Indonesia	Garuda 2012	4.822.925	4.822.925									709.439	709.439	709.439	7.246	100%	7.246
94	94	PT Garuda Indonesia	Garuda 2012	2.136.628	2.136.628									222.752	222.752	222.752	301	100%	301
95	95	PT Garuda Indonesia	Garuda 2012	642.710	642.710									183.294	183.294	183.294	746.024	100%	746.024
96	96	PT Garuda Indonesia	Garuda 2012	2.788.715	2.788.715									7.853	7.853	7.853	2.311	100%	2.311
97	97	PT Garuda Indonesia	Garuda 2012	18.118	18.118									1.814	1.814	1.814	18.884	100%	18.884
98	98	PT Garuda Indonesia	Garuda 2012	83.388	83.388									6.119	6.119	6.119	2.251	100%	2.251
99	99	PT Garuda Indonesia	Garuda 2012	56.420	56.420									5.894	5.894	5.894	30.447	100%	30.447
100	100	PT Garuda Indonesia	Garuda 2012	253.108	253.108									4.459	4.459	4.459	8.868	100%	8.868
101	101	PT Garuda Indonesia	Garuda 2012	50.908	50.908									14.908	14.908	14.908	22.413	100%	22.413
102	102	PT Garuda Indonesia	Garuda 2012	189.052	189.052									68.602	68.602	68.602	62.467	100%	62.467
103	103	PT Garuda Indonesia	Garuda 2012	43.072	43.072									153.507	153.507	153.507	68.007	100%	68.007
104	104	PT Garuda Indonesia	Garuda 2012	52.648	52.648									16.297	16.297	16.297	183.807	100%	183.807
105	105	PT Garuda Indonesia	Garuda 2012	83.925	83.925									10.816	10.816	10.816	26.312	100%	26.312
106	106	PT Garuda Indonesia	Garuda 2012	291.275	291.275									44.338	44.338	44.338	4.251.184	100%	4.251.184
107	107	PT Garuda Indonesia	Garuda 2012	360.872.212	360.872.212									1.911.775	1.911.775	1.911.775	1.967.246	100%	1.967.246
108	108	PT Garuda Indonesia	Garuda 2012	667.185.652	667.185.652									30.000.231	30.000.231	30.000.231	64.881.728	100%	64.881.728
109	109	PT Garuda Indonesia	Garuda 2012	2.258.417	2.258.417									30.000.231	30.000.231	30.000.231	42.472.022	100%	42.472.022
110	110	PT Garuda Indonesia	Garuda 2012	3.258.417	3.258.417									1.038.652	1.038.652	1.038.652	1.307.023	100%	1.307.023
111	111	PT Garuda Indonesia	Garuda 2012	173.847	173.847									1.205.725	1.205.725	1.205.725	1.556.044	100%	1.556.044

DAFTAR MERACA 386

**DAFTAR BPYBDS PADA BUMN
PER 31 DESEMBER 2012**

No.	BUMN	STATUS DATA	31 DESEMBER 2012	31 DESEMBER 2011
1	Perum DAMRI	Audited 2012	31.844.050.000,00	161.462.000.000,00
2	Perum PPD	Un-audited 2012	12.150.681.819,00	67.770.841.819,00
3	PT Kereta Api Indonesia	Audited 2012	0,00	826.546.294.645,00
4	PT Perusahaan Listrik Negara	Audited 2012	30.718.066.780.700	29.049.436.783.477,00
5	Perum Jasa Tirta I	Audited 2012	0,00	1.131.342.305,00
6	PT Angkasa Pura I	Audited 2012	2.793.108.893.422,36	3.393.090.807.000,00
7	PT Angkasa Pura II	Audited 2012	313.027.372.227,51	2.221.583.000.000,00
8	Perum BULOG	Audited 2012	675.250.887.482,00	670.113.824.005,00
9	PT Pelindo I	Audited 2012	427.056.982.506,00	435.790.297.506,00
10	PT Pelindo III	Audited 2012	0,00	209.730.528.118,00
11	PT Pelindo IV	Audited 2012	0,00	88.176.454.500,00
12	PT Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan	Audited 2012	896.740.136.947,00	1.304.919.497.954,00
13	Perum Percetakan Negara Republik Indonesia	Audited 2012	0,00	1.003.285.000,00
14	Perum Prasarana Perikanan Samudra	Audited 2012	34.501.090.440,00	47.036.685.555,00
15	PT Djakarta Lloyd	Un-audited 2012	667.188.771.346,05	667.188.771.346,05
16	PT Pelayaran Nasional Indonesia	Audited 2012	0,00	2.997.874.185.088,93
17	Perum Perumnas	Audited 2012	0,00	5.068.434.600,00
18	PT Pos Indonesia	Audited 2012	0,00	29.936.024.480,00
19	Perum produksi film Negara (PFN)	Un-audited 2012	14.903.777.061,00	14.903.777.061,00
20	PT Pertamina	Audited 2012	12.452.878.178,53	520.917.962.842,46
21	PT Geo Dipa Energi	Audited 2012	1.979.664.199.753,75	1.670.877.372.176,00
	Jumlah		38.575.956.501.883,20	44.364.558.169.478,40

**PENDAPATAN, BEBAN, DAN LABA (RUGI) BERSIH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2012
PERUSAHAAN NEGARA/LEMBAGA DI BAWAH PEMBINAAN KEMENTERIAN KEUANGAN**

(dalam juta Rupiah)

NO	PERUSAHAAN NEGARA/LEMBAGA	SUMBER	STATUS	1	2	3 = (1-2)	4	5	6 = (3+4-5)	7	8 = (6-7)	9	10 = (8-9)	11	12 = (10-11)
				PENDAPATAN USAHA	HPP + BEBAN USAHA	LABA USAHA	PENDAPATAN LAIN - LAIN	BEBAN LAIN - LAIN	EBIT	BEBAN BUNGA	LABA SEBELUM PAJAK	PAJAK	LABA RUGI TAHUN BERJALAN	PENDAPATAN KOMPREHENSIF	LABA RUGI KOMPREHENSIF
1	LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA	Audited 2012		2.175.921	1.438.288	690.653	33.820	1.838	712.637	-	712.637	127.014	585.623	(1.703)	583.920
2	P.T. SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL	Audited 2012		435.989	259.457	179.533	-	-	179.533	-	179.533	38.128	140.405	-	140.405
3	P.T. SARANA MULTI INFRASTRUKTUR	Audited 2012		228.037	107.309	118.728	14.021	369	132.390	-	132.390	25.819	106.562	-	106.562
4	PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA	Audited 2012		312.240	51.132	261.108	910	444	261.574	-	261.574	48.198	213.378	-	213.378
5	PT GEO DIPA ENERGI	Audited 2012		73.164	86.237	(22.073)	7.821	41.824	(56.376)	-	(56.376)	(5.781)	(50.595)	-	(50.595)

**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA
NERACA PER 31 DESEMBER 2012
PERUSAHAAN NEGARA/LEMBAGA DI BAWAH PEMBINAAN KEMENTERIAN KEUANGAN**

NO	PERUSAHAAN/LEMBAGA	SUMBER	STATUS	ASET LANCAR	ASET TIDAK LANCAR	ASET LAIN	TOTAL ASSET	LIABILITAS JANGKA PENDEK	LIABILITAS JANGKA PANJANG	TOTAL LIABILITAS	MODAL SAHAMI	TAMBAHAN MODAL DISEKTOR	BP/BEDS	ERUITAS LAIN	SALDO LABA	ERUITAS YANG DISTRIBUSIKAN KEPADA PEMILIH ERUITAS	KEPENTINGAN NON PENKENDALI	JUMLAH ERUITAS	% SAHAM NEGARA	(dalam juta Rupiah)	
																				1	2
1	LEMBAGA PEMBINAAN EKSPOR INDONESIA	Audited 2012		33.284.089	41.807	27.105	33.322.751	523.455	25.259.299	25.782.704	6.321.588				1.228.461	7.550.047		7.550.047	100,00%	7.550.047	
2	P.T. SARANA MULTIGRIVA FINANSIAL	Audited 2012		2.104.542	4.074.105		6.178.648	1.021.438	2.509.893	3.531.041	2.000.000				847.807	2.497.807		2.497.807	100,00%	2.497.807	
3	P.T. SARANA MULTI INFRASTRUKTUR	Audited 2012					5.132.417			5.132.417	2.000.000	2.000.000			257.713	4.310.317		4.310.317	100,00%	4.310.317	
4	P.T. PENANJAMAN INFRASTRUKTUR INDONESIA	Audited 2012		4.808.799	58.189	803	4.868.837	25.790	29.830	49.720	4.500.000				415.200	4.917.117		4.917.117	100,00%	4.917.117	
5	P.T. GEO. OPA. ERESS	Audited 2012		245.270	1.805.799	14.620	2.165.847	86.580	204.887	291.278	682.001			1.978.884	(787.299)	1.874.389		1.874.389	86,67%	1.249.842	
																				21.288.453	20.974.730

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (R09729)

DAFTAR 21

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PADA NON BUMN (MINORITAS)
PER 31 DESEMBER 2012**

No.	Nama Perusahaan	Sumber a)	% Saham Kepemilikan RI		Nilai Ekuitas	Kepemilikan Pemerintah Per 31 Desember 2012
1	PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM)	Audited 2012 (31 Maret 2012)	41,12%		9.864.836.923.320	4.056.420.942.869
2	PT Surabaya Indah Estate Rungkut (SIER)	Audited 2012	50,00%		271.471.680.248	135.735.840.124
3	PT Jakarta Indah Estate Pulogadung (JIEP)	Audited 2012	50,00%		224.313.335.000	112.156.667.500
4	PT Asean Copper Product					-
Jumlah I						4.304.313.450.493
No.	Nama Perusahaan	Sumber a)	Saham	% Saham Kepemilikan	Jumlah Saham	Kepemilikan Pemerintah
1	PT Bank Bukopin	Audited 2012	A	0,06%	4.736.255	47.362.550.000
			B	13,00%	1.034.232.376	103.423.237.600
2	PT Rekyasa Industri (REKIND)	Audited 2012		4,97%	22.366	22.366.000.000
3	PT Freeport Indonesia	Semester I 2012	Biasa	9,36%	21.300	20.597.100.000
4	Kertas Padalarang	Audited 2012		7,74%	25.000	25.000.000.000
5	PT Indosat, Tbk	Audited 2012	Seri B	14,29%	776.624.999	77.662.499.900
6	PT Socfindo	Audited 2012	Seri B		1	265.000
			Seri C		2.999	794.735.000
			Seri D		2.000	3.430.000.000
			Total	10,00%	42.250.000.000	
7	PT Prasadha pamanah Limbah Industri (PPLI)	Audited 2011		5,00%	50	11.398.512.500
8	PT Nindya Karya	Audited 2012		1,00%	59.500	59.500.000.000
9	PT Asean Bintulu Fertilizer	Audited 2012		13,00%	39.000	123.225.375.000
10	Asean Infrastructure Fund	Angka Realisasi PMN		25,52%		379.568.226.388
JUMLAH II						874.328.501.388
JUMLAH I + II						5.178.641.951.881

DAFTAR NERA CA 201

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

DAFTAR 22

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
PADA ORGANISASI/LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL/REGIONAL
PER 31 DESEMBER 2012**

NO	LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL	TOTAL PENYERTAAN MODAL			Penyertaan yang masih Berbentuk Promissory
		Mata Uang	USD	IDR	
1	Asian Development Bank	SDR	227.278.100,32	3.377.810.854.303,97	
2	International Monetary Fund	SDR	2.079.300.000,00	30.902.590.700.520,00	26.550.675.238.720,50
	World Bank Group				
3	International Bank for Reconstruction and Development	USD	121.515.290,69	1.175.052.860.972,30	
4	International Development Association	USD	16.114.990,97	155.831.962.661,00	5.173.139.667,81
5	International Finance Corporation	USD	29.384.013,04	284.143.406.096,80	
6	Multilateral Investment Guarantee Agency	USD	3.797.820,00	36.724.919.400,00	10.975.624.060,00
7	Islamic Development Bank Group	ID	124.260.000,00	1.846.754.157.864,00	
8	International Islamic Trade Finance Corporation	USD	2.060.000,00	19.920.200.000,00	
9	Islamic Corporation for Insurance of Investment and Export Credit	ID	125.140,32	1.859.837.488,14	
10	International Fund for Agricultural Development	USD	51.928.728,38	502.150.803.434,60	
11	Common Fund for Commodities	USD	1.323.475,70	12.798.009.979,88	2.862.368.084,75
12	The Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD)	USD	6.160.559,98	59.572.615.006,60	
13	Credit Guarantee and Investment Facility	USD	12.600.000,00	121.842.000.000,00	
	Jumlah total		3.981.090.902,56	38.497.052.327.727,30	26.569.686.370.533,00

DAFTAR NERACA 382

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

DAFTAR 23.A

BANK INDONESIA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2012
(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 DESEMBER 2012	31 DESEMBER 2011
AKTIVA		
Emas	38.248.767	33.510.1C9
Uang Asing	11.342	4.010
Hak Tarik Khusus	26.264.734	24.445.667
Giro	55.434.588	22.514.3C8
Deposito	98.082.115	76.658.783
Surat Berharga	874.344.507	843.126.744
Surat Berharga Negara Republik Indonesia	100.430.268	82.402.779
Surat Berharga yang dibeli dengan Janji Jual Kembali	0	0
Tagihan Kepada Pemerintah	243.053.782	247.552.945
Tagihan Kepada Bank	3.225.921	4.398.870
Tagihan Kepada Lainnya	0.477.304	0.638.078
Persertaan	875.212	828.052
Aktiva Lain-Lain	77.595.349	41.022.8C8
Persisihan Aktiva	(12.232.109)	(11.263.320)
TOTAL AKTIVA	1.519.526.148	1.371.841.819
KEWAJIBAN		
Uang Asing Dalam Peredaran	439.730.314	372.682.462
Giro	345.481.704	343.132.261
Sertifikat Bank Indonesia	77.282.423	117.367.1E3
Sertifikat Bank Indonesia Syariah	0.455.000	0.478.000
Perampasan Berjangka	208.511.302	152.639.030
Perampasan Dana	39.024.266	152.474.266
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah	15.582.200	17.403.1C0
Surat Berharga yang Diual Dengan Janji Dibe i Kembali	39.591.344	66.752.428
Pinjaman dari Pemerintah	99.098	110.084
Pinjaman Luar-Negeri	3.427.704	4.477.8C3
Alokasi Hak Tarik Khusus	29.520.537	27.483.875
Kewajiban Lain-Lain	51.341.300	21.762.2E2
TOTAL KEWAJIBAN	1.353.057.380	1.282.268.544
EKUITAS		
Modal	17.114.024	16.876.826
Cadangan Umum	17.145.089	41.555.778
Cadangan Tujuan	13.189.140	12.608.148
Keuntungan/Kerugian Belum Realisasi	113.221.542	42.382.140
Surplus (Defisit) Tahun Berjalan	5.813.593	(25.146.713)
TOTAL EKUITAS	136.469.488	86.572.275
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.519.526.148,00	1.371.841.819,00

www.djpp.kemendagri.go.id

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

DAFTAR 23 B

BANK INDONESIA
LAPORAN SURPLUS DEFISIT
PERIODE 1 JANUARI 2012 S.D 31 DESEMBER 2012
 (dalam jutaan Rupiah)

Uraian	1 Januari 2012 - 31 Desember 2012	1 Januari 2011 - 31 Desember 2011
PENERIMAAN		
Pergelolaan Moneter		
Pergelolaan Devisa	24.697.913,00	23.421.345,00
Pergelolaan SSB Dalam Negeri	7.074.621,00	3.756.152,00
Pemberian Kredit dan Pembiayaan	289.421,00	515.888,00
Selisih Kurs Karena Transaksi Valuta Asing	7.416.842,00	(11.693.801,00)
Pergalolaan Sistem Pembayaran	271.272,00	223.897,00
Pengawasan Perbankan	26.234,00	17.467,00
Lainnya	289.252,00	1.108.197,00
JUMLAH PENERIMAAN	40.036.696,00	17.348.146,00
BEBAN		
Pengendalian Moneter		
Operasi Moneter	19.006.279,00	30.092.015,00
Pergelolaan Devisa	143.497,00	67.827,00
Pinjaman Luar Negeri	82.334,00	178.422,00
Lainnya	31.525,00	19.345,00
Jasa Giro Pemerintah	4.156.871,00	4.666.712,00
Peralaksanaan Sistem Pembayaran		
Sistem Pembayaran Tunai	1.439.975,00	1.987.204,00
Sistem Pembayaran Non Tunai	24.427,00	22.812,00
Pengaturan dan Pengawasan Perbankan	183.002,00	174.917,00
Umum dan Lainnya		
SDM dan Logistik	5.728.137,00	4.294.839,00
Lainnya	1.136.248,00	1.068.056,00
JUMLAH BEBAN	31.839.386,00	42.662.148,00
SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM PAJAK	8.096.230,00	(25.213.004,00)
PENERIMAAN (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	(2.276.537,00)	64.291,00
SURPLUS (DEFISIT) BERSIH SETELAH PAJAK	5.819.693,00	(25.148.713,00)

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

DAFTAR 24.A

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN**NERACA**

PER 31 DESEMBER 2012

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	31 DESEMBER 2012	31 DESEMBER 2011
AKTIVA		
Kas dan Setara Kas	609.177.281,00	347.892.634,00
Investasi Surat Berharga	26.971.502.699,00	20.060.287.492,00
Piutang Premi Penjaminan	1.719.554	26.261,00
Piutang Investasi	390.261.604,00	256.463.487,00
Piutang Bank Dalam Likuidasi Bersih	2.975.000,00	3.505.746,00
Piutang Lain-Lain Bersih	3.020.529,00	1.961.253,00
Penyertaan Modal Sementara	6.762.361.000,00	6.762.361.000,00
Aktiva Tetap Bersih	116.881.725,00	125.343.321,00
Aktiva Lain-Lain	21.802.253,00	8.026.880,00
TOTAL AKTIVA	34.879.701.645,00	27.565.868.074,00
KEWAJIBAN		
Hutang Klaim Penjaminan	26.141.776,00	37.869.590,00
Cadangan Klaim Penjaminan	11.184.587.299,00	10.691.811.203,00
Cadangan Manfaat Karyawan	15.278.005,00	11.144.773,00
Hutang Pajak	129.359.106,00	93.223.329,00
Hutang Lain-Lain	33.745.078,00	5.330.325,00
TOTAL KEWAJIBAN	11.389.111.264,00	10.839.379.220,00
EKUITAS		
Modal Awal Pemerintah	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00
Cadangan Tujuan	3.898.118.076,00	2.545.297.771,00
Cadangan Penjaminan	15.592.472.305,00	10.181.191.084,00
TOTAL EKUITAS	23.490.590.381,00	16.726.488.855,00
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	34.879.701.645,00	27.565.868.075,00

DAFTAR NERACA 395

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

DAFTAR 24.B

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
LAPORAN SURPLUS DEFISIT
 PERIODE 1 JANUARI 2012 S.D 31 DESEMBER 2012
 (dalam ribuan Rupiah)

Uraian	1 Januari 2012 - 31 Desember 2012	1 Januari 2011 - 31 Desember 2011
PENDAPATAN OPERASI		
Pendapatan Premi Penjaminan	6.201.380.301,00	5.038.287.333,00
Pendapatan Hasil Investasi	1.852.831.073,00	1.367.629.044,00
Pendapatan Kontribusi Kepesertaan	29.564,00	71.473,00
Pendapatan Denda	19.272,00	79.442,00
Pendapatan Pengembalian Klaim	26.468.317,00	6.218.721,00
TOTAL PENDAPATAN OPERASI	7.779.718.547,00	6.410.879.815,00
BIAYA OPERASI		
Biaya Klaim Penjaminan	8.673.939,00	45.563.567,00
Cadangan Klaim Penjaminan Direalisasi	(6.673.639,00)	(45.533.567,00)
Biaya terkait Dengan Resolusi Bank	4.003.447,00	3.537.444,00
Biaya Kenaihan (Penunutan) Ctd. Kaitin	491.291.364,00	(380.835.919,00)
Biaya Investasi	277.121.635,00	212.291.913,00
Biaya Umum dan Administrasi	95.970.635,00	143.661.267,00
TOTAL BIAYA OPERASI	968.387.101,00	28.577.441,00
SURPLUS (DEFISIT) OPERASI	6.811.331.446,00	6.382.102.374,00
Pendapatan dan Biaya Lain-Lain		
Pendapatan Lain-Lain	51.493.757,00	60.897.742,00
Biaya Lain-Lain	(116.402.672,00)	(12.942.158,00)
Total Pendapatan dan Biaya Lain-Lain	(64.908.915,00)	(47.955.584,00)
SURPLUS (DEFISIT) BERSIH SEBELUM PAJAK	6.852.422.231,00	6.430.057.958,00
Pajak Penghasilan Badan		
Biaya PPh Badan Kini	89.637.513,00	1.003.635.363,00
Biaya PPh Badan Tanggahan	(1.370.608,00)	(1.331.845,00)
Total Pajak Penghasilan Badan	88.266.705,00	1.002.303.524,00
SURPLUS (DEFISIT) BERSIH SETELAH PAJAK	6.764.155.526,00	5.427.754.434,00

DAFTAR NERACA 358

ASET TETAP PADJARANBARUN PER 31 DESEMBER 2012 DAN 31 DESEMBER 2011

Table with columns: No., BA, Kementerian Negara/Lembaga, TAHUN, PERALATAN DAN MESIN, GELOUNDANG BANDUAN, JALAN, RIGANS, DAN JAMINAN, ASET TETAP LAIN-LAIN, KONSTRUKSI DALAM PENERJAJAN, and Dalam Rubah. The table contains financial data for various government departments across different years.

**ASSET TETAP PADA KULONBUN
PER 31 DESEMBER 2012 DAN 31 DESEMBER 2011**

No.	BA	Kemampuan Menagrol Kemanga	TAMAH		PERALATAN DAN MESIN		GEDUNGAN DAN BANGUNAN		JALAN, BIKAS, LAMPAU DAN JALAN		ASET TETAP LAINNYA		KONSTRUKSI DALAM PENGURANGAN		Saldo (Rupiah)
			31/12/2012	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2011	
40	044	Kemampuan Menagrol Kemanga	894.681.672.627	874.645.027.087	130.715.462.706	278.561.672.527	26.524.841.446	30.639.977.300	16.667.730.300	602.676.500	528.026.500	76.263.686.000	13.015.647.500		
41	044	BULKEMAS (KEMAHAM)	90.726.869.239	66.634.424.209	66.634.424.209	526.119.627.794	5.265.680.587.344	226.206.100	1.861.401.800	226.206.100	1.861.401.800	76.263.686.000	13.015.647.500		
42	047	Kemampuan Menagrol Kemanga	294.120.000	294.120.000	29.286.820.085	204.426.689	204.426.689	256.108.000	256.108.000	256.108.000	256.108.000	256.108.000	256.108.000		
43	048	Kemampuan Menagrol Kemanga	51.622.294.617	41.102.694.488	41.102.694.488	18.579.954.604	17.357.393.437	1.295.116.650	1.295.116.650	1.295.116.650	1.295.116.650	1.295.116.650	1.295.116.650		
44	089	BN	1.201.076.696.696	807.178.016.625	1.564.515.644.915	1.824.833.621.238	31.736.501.107	261.058.388.945	111.869.593.686	2.440.158.145	2.085.845.645	2.440.158.145	2.085.845.645		
45	089	BN	95.669.708.177	95.669.708.177	95.669.708.177	4.677.979.659.93	108.303.208.438	35.689.627.628	35.689.627.628	35.689.627.628	35.689.627.628	35.689.627.628	35.689.627.628		
46	082	Daerah Khusus Mestral	18.818.131.710	18.818.131.710	18.818.131.710	1.937.345.132	1.937.345.132	1.937.345.132	1.937.345.132	1.937.345.132	1.937.345.132	1.937.345.132	1.937.345.132		
47	082	Kemampuan Menagrol Kemanga	687.658.626.687	529.270.176.370	529.270.176.370	115.270.304.143	1.037.270.126.026	1.037.270.126.026	1.037.270.126.026	1.037.270.126.026	1.037.270.126.026	1.037.270.126.026	1.037.270.126.026		
48	082	Kemampuan Menagrol Kemanga	176.438.086.656	176.438.086.656	176.438.086.656	1.943.686.656	1.943.686.656	1.943.686.656	1.943.686.656	1.943.686.656	1.943.686.656	1.943.686.656	1.943.686.656		
49	082	Kemampuan Menagrol Kemanga	1.736.868.944.266	1.643.529.668.806	1.184.843.083.133	1.104.223.869.807	80.442.719.345	8.444.837.430	7.257.370.650	216.303.138.811	83.662.382.311	216.303.138.811	83.662.382.311		
50	087	Kemampuan Menagrol Kemanga	317.661.875.000	317.661.875.000	317.661.875.000	184.443.083.133	202.162.424.406	202.162.424.406	101.150.000	101.150.000	215.222.151.966	101.150.000	215.222.151.966		
51	089	Kemampuan Menagrol Kemanga	325.286.606.040	325.286.606.040	1.144.711.830.055	1.076.843.170.442	702.458.441.300	91.652.768.974	23.912.163.004	101.150.000	101.150.000	194.211.010.000	12.818.008.449		
52	089	Kemampuan Menagrol Kemanga	42.789.016.401.369	42.789.016.401.369	8.200.756.608	23.841.759.690	23.841.759.690	1.169.893.700	1.169.893.700	1.169.893.700	1.169.893.700	594.433.662	112.889.229.474		
53	089	Kemampuan Menagrol Kemanga	462.306.756.622	81.623.131.789	1.122.001.180.191	897.887.694.195	11.869.228.834.245	694.422.388.869	624.005.308.978	50.473.180.026	38.731.673.681	786.273.883.821	1.271.215.606.662		
54	083	BP	101.429.010.000	101.429.010.000	129.898.467.264	83.897.346.954	29.206.727.805	19.996.163.660	15.183.661.779	46.467.763.478	1.819.977.248	80.283.478.729	110.315.944.275		
55	084	Kemampuan Menagrol Kemanga	330.830.010.000	330.830.010.000	423.823.684.009	423.823.684.009	156.441.316.108	1.263.988.037	4.263.184.163	4.263.184.163	1.073.866.202	25.869.186.233	110.315.944.275		
56	085	BN	23.694.970.000	23.694.970.000	23.694.970.000	30.083.039.224	30.083.039.224	30.083.039.224	30.083.039.224	30,083.039.224	30,083.039.224	30,083.039.224	30,083.039.224		
57	087	Kemampuan Menagrol Kemanga	366.263.710.993	378.510.269.193	299.858.686.428	401.673.845.933	66.859.363.200	56.859.363.200	30.666.921.825	30.666.921.825	30.666.921.825	30.666.921.825	30.666.921.825		
58	088	Kemampuan Menagrol Kemanga	831.279.172.710	827.214.379.964	1.568.678.131.321	1.374.204.303.640	284.430.629.412	230.691.665.226	17.278.467.020	4.153.363.192	3.918.407.867	18.666.102.681	8.617.413.681		
59	086	BN	59.883.005.406	89.517.561.176	516.689.680.708	4.873.446.324.437	200.372.594.730	200.372.594.730	1.433.729.066	1.433.729.066	1.433.729.066	14.947.026.627	24.011.153.772		
60	078	PN	67.881.000.000	67.881.000.000	67.881.000.000	67.881.000.000	67.881.000.000	44.807.778.866	36.001.009.525	13.698.650.046	42.000.000	42.000.000	658.679.300		
61	078	PN	6.014.226.413.684	6.014.226.413.684	6.014.226.413.684	6.014.226.413.684	6.014.226.413.684	592.946.196	170.394.796.203	62.888.043.961	4.148.693.009	128.997.797.626	72.785.100.311		
62	078	PN	1.738.226.023.900	1.738.226.023.900	1.738.226.023.900	1.738.226.023.900	1.738.226.023.900	44.807.778.866	36.001.009.525	13.698.650.046	42.000.000	42.000.000	658.679.300		
63	081	BUPPT	275.154.256.716	275.154.256.716	1.421.624.161.735	5.129.844.025	1.421.624.161.735	142.066.173.059	89.699.971.077	48.793.811.662	11.446.696.000	108.242.926.000	108.242.926.000		
64	082	BUPPT	27.226.540.000	27.226.540.000	27.226.540.000	27.226.540.000	27,226.540.000	27,226.540.000	27,226.540.000	27,226.540.000	27,226.540.000	27,226.540.000	27,226.540.000		
65	079	BN	20.666.122.350	20.666.122.350	20.666.122.350	20.666.122.350	20.666.122.350	20.666.122.350	20.666.122.350	20.666.122.350	20.666.122.350	20.666.122.350	20.666.122.350		
66	079	BN	216.526.882.936	216.526.882.936	171.403.824.115	171.403.824.115	171,403.824.115	13.096.627.910	13.096.627.910	13,096.627.910	13,096.627.910	11.813.662.449			
67	089	BN	1.024.658.413.673	1.024.658.413.673	230.569.128.806	230.569.128.806	230.569.128.806	10.600.681.25	10.600.681.25	10.600.681.25	10.600.681.25	2.262.765.204	26.398.658.997		
68	089	BN	646.614.648.202	646.614.648.202	646.614.648.202	646.614.648.202	646,614.648.202	25,944.123.289	25,944.123.289	25,944.123.289	17,880.633.663	4.242.788.210			

DAFTAR 25

ASET TETAP PADJARANJARAN PER 31 DESEMBER 2012 DAN 31 DESEMBER 2011

Table with columns for No., BA, Kementerian/Instansi, TAHUN (31/12/2012, 31/12/2011), PERALATAN DAN MESIN, GEOLANDAN BENDAHARIAN, JALAN, RIGAS, LONJARAN, ASET TETAP LAINNYA, KONSTRUKSI DALAM PEMERILAH, and Dalam Rupa/luar.

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

DAFTAR LERACA 389

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (UDITED)

DAFTAR 26

**TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI
PER 31 DESEMBER 2012 DAN 31 DESEMBER 2011**

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 Desember 2012 Audited			31 Desember 2011 Audited
			BRUTO	PENYISIHAN	NETTO	
1	004	Badan Pemeriksa Keuangan	1.805.083.257	(1.805.083.257)	-	1.778.343.870
2	005	Mahkamah Agung	442.849.467	(8.184.243)	434.665.224	1.927.628.763
3	006	Kejaksaan Agung	113.388.627	(37.868.127)	75.520.500	349.936.815
4	007	Sekretariat Negara	13.855.000	(69.275)	13.785.725	56.095.000
5	010	Kementerian Dalam Negeri	18.420.089.235	-	18.420.089.235	18.470.089.235
6	011	Kementerian Luar Negeri	232.336.044	(6.626.237)	225.709.807	1.626.260.460
7	012	Kementerian Pertahanan	4.262.335.790	-	4.262.335.790	4.243.256.085
8	013	Kementerian Hukum dan HAM RI	1.512.747.503	(77.474.849)	1.435.272.654	423.564.049
9	015	Kementerian Keuangan	171.642.005	(858.210)	170.783.795	26.443.698
10	018	Kementerian Pertanian	2.845.325.250	(2.302.967.643)	542.357.607	2.157.094.620
11	019	Kementerian Perindustrian	-	-	-	181.095.000
12	020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	40.265.000	(37.777.500)	2.487.500	93.357.000
13	022	Kementerian Perhubungan	479.001.363	(1.653.996)	477.347.365	423.135.811
14	023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	28.050.000	(140.250)	27.909.750	12.350.000
15	023	BLU Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	5.853.574.766	(120.108.099)	5.733.466.667	124.000.000
16	024	Kementerian Kesehatan	576.602.260	(76.450.750)	500.151.510	635.083.757
17	024	BLU Kementerian Kesehatan	-	-	-	28.900.000
18	026	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	13.771.235.658	(6.885.618)	13.764.350.040	-
19	027	Kementerian Sosial	90.162.000	(86.518.310)	3.643.690	659.024.331
20	029	Kementerian Kehutanan	87.228.974	(35.211.394)	52.017.580	-
21	033	Kementerian Pekerjaan Umum	1.008.724.495	(175.028.615)	833.695.880	59.038.536.783
22	034	Kemendikbud dan Kemendagri	31.869.468	(159.347)	31.710.121	39.121.044
23	040	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2.485.785.307	(188.064.805)	2.317.720.502	195.289.055
24	041	Kementerian BUMN	61.829.662	(309.148)	61.520.514	65.916.662
25	043	Kementerian Lingkungan Hidup	1.373.636.362	(1.373.636.362)	-	1.650.000.000
26	044	Kementerian KUKM	54.030.207	(9.274.903)	44.755.304	114.403.034
27	047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan	6.000.000	(30.000)	5.970.000	-
28	054	Badan Pusat Statistik	25.907.973	(4.971.097)	20.936.876	149.631.949
29	056	Badan Pertanahan Nasional	3.155.900.348	(2.109.414.985)	1.046.485.363	3.299.478.133
30	059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	1.362.339.403	(354.529.181)	1.007.810.222	781.663.184
31	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	409.157.104	(206.558.597)	202.598.507	439.231.908
32	065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	26.844.691	(134.223)	26.710.468	-
33	067	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	58.000.000	-	58.000.000	67.000.000
34	068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	1.347.250	(6.736)	1.340.514	-
35	077	Mahkamah Konstitusi	29.658.827	(148.294)	29.510.533	-
36	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	53.772.171.119	(53.751.607.775)	20.563.344	53.496.444.530
37	080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	22.491.189.860	(20.194.564.680)	2.296.625.180	20.265.332.478
38	081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	67.492.809.337	(67.449.327.837)	43.461.500	49.718.310.377
39	082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	1.701.968.664	(169.329.042)	1.532.639.622	1.173.602.576
40	083	Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional	13.242.893.007	(10.145.938.649)	3.096.954.358	22.500.000
41	084	Badan Standardisasi Nasional	397.413.000	(1.987.065)	395.425.935	-
42	085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	28.676.256	(143.381)	28.532.875	34.676.256
43	087	Arsip Nasional Republik Indonesia	1.976.188	(9.881)	1.966.307	-
44	088	Badan Kepegawaian Negara	-	-	-	305.950.945
45	089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	25.994.008.771	(25.994.008.771)	-	24.843.968.482
46	090	Kementerian Perdagangan	468.184.250	(2.340.921)	465.843.329	699.881.250
47	103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	8.500.000	(42.500)	8.457.500	-
48	104	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	24.563.650	(122.819)	24.440.831	-
49	108	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	7.536.370	(7.536.370)	-	9.827.278
50	117	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	252.620.150	-	252.620.150	-
		TOTAL	246.721.313.918	(186.723.103.744)	59.998.210.174	249.626.424.418

DAFTAR NERACA 400

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (RUP/TEZ)

DAFTAR 27

**ASET TAK BERWUJUD DAN ASET LAIN-LAIN
PER 31 DESEMBER 2012 DAN 31 DESEMBER 2011**

No.	BA	Kementerian Negara/Lembaga	ASET TAK BERWUJUD		ASET LAIN-LAIN	
			31 Desember 2012 Audited	31 Desember 2011 Audited	31 Desember 2012 Audited	31 Desember 2011 Audited
1	001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	988.499.540	933.829.540	36.844.200	807.641.200
2	002	Dewan Perwakilan Rakyat	18.259.646.774	9.277.485.378	26.772.590.656	27.486.408.656
3	004	Badan Pemeriksa Keuangan	64.337.315.213	46.281.373.781	20.742.811.168	26.300.729.803
4	005	Mahkamah Agung	20.291.891.071	16.585.257.378	39.304.602.239	14.826.970.294
5	006	Kejaksaan Agung	3.309.798.403	2.494.978.123	15.752.248.289	5.917.865.224
6	007	Sekretariat Negara	15.165.235.054	12.662.391.404	1.966.644.881.972	1.948.657.588.647
7	007	BLU Sekretariat Negara	305.659.000	224.599.000	-	651.885.105.326
8	010	Kementerian Dalam Negeri	1.513.687.117.222	751.443.921.142	98.118.807.399	107.135.811.691
9	011	Kementerian Luar Negeri	12.325.132.833	10.758.120.681	139.199.578.914	187.706.944.536
10	012	Kementerian Pertahanan	489.295.668.447	262.525.510.568	3.723.067.557.798	3.598.464.347.679
11	013	Kementerian Hukum dan HAM RI	288.291.861.880	239.237.022.128	64.318.557.468	28.952.931.315
12	015	Kementerian Keuangan	518.108.669.309	474.893.975.398	379.512.337.729	248.393.281.860
13	015	BLU Kementerian Keuangan	3.177.745.040	2.898.446.790	38.742.000	75.164.492.014
14	018	Kementerian Pertanian	61.924.734.091	19.234.185.300	290.804.071.696	251.030.604.245
15	018	BLU Kementerian Pertanian	4.432.790	4.432.790	47.481.765	240.818.015
16	019	Kementerian Perindustrian	27.012.663.128	9.309.730.559	13.929.819.697	6.518.045.709
17	019	BLU Kementerian Perindustrian	364.970.000	-	197.304.192	-
18	020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	1.672.085.267.468	1.631.499.801.236	1.345.105.299.094	712.189.250.764
19	022	Kementerian Perhubungan	1.886.541.933.297	1.465.590.727.842	2.142.196.518.442	1.197.499.645.717
20	022	BLU Kementerian Perhubungan	42.026.303.393	24.093.295.916	1.009.825.900	1.122.200.000
21	023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	361.056.604.717	290.717.673.533	14.137.027.496.322	13.912.326.313.272
22	023	BLU Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	167.096.017.733	63.824.711.360	46.404.100.710	19.613.463.891
23	024	Kementerian Kesehatan	59.933.887.371	42.517.391.731	9.072.903.497.017	8.788.274.613.189
24	024	BLU Kementerian Kesehatan	28.007.851.163	23.372.871.313	66.109.501.512	66.105.923.633
25	025	Kementerian Agama	61.526.128.279	40.990.665.207	66.651.129.587	46.617.514.732
26	025	BLU Kementerian Agama	18.454.671.532	15.851.399.401	10.704.019.400	3.114.844.489
27	026	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	44.675.607.153	34.357.200.673	3.057.318.419.569	2.291.751.851.101
28	026	BLU Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	558.042.084	233.452.200	139.136.000	139.136.000
29	027	Kementerian Sosial	19.120.804.306	16.620.459.754	23.593.457.063	21.488.713.987
30	029	Kementerian Kehutanan	65.661.460.948	53.811.575.679	52.646.176.261	33.879.700.436
31	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	37.526.347.402	25.670.748.726	98.751.209.153	95.378.157.264
32	033	Kementerian Pekerjaan Umum	4.919.228.727.633	4.251.358.800.389	590.641.764.292	475.711.122.701
33	034	Kemenko Bidang Politik dan Keamanan	36.866.485.817	25.090.001.130	2.335.627.675	1.277.717.821
34	035	Kemenko Bidang Perekonomian	217.680.750	217.680.750	-	-
35	036	Kemenko Bidang Kesejahteraan Rakyat	2.266.145.420	2.182.335.590	1.411.426.095	-
36	040	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	21.475.791.427	12.132.642.500	8.794.108.241	8.483.623.341
37	041	Kementerian BUMN	15.637.031.192	15.253.927.692	5.451.789.510	4.696.412.561
38	042	Kementerian Riset dan Teknologi	42.527.429.146	41.678.448.646	34.313.194.790	34.041.634.991
39	043	Kementerian Lingkungan Hidup	16.623.377.045	12.324.441.685	5.174.866.915	5.229.223.412
40	044	Kementerian KUKM	15.123.060.982	10.222.932.609	59.008.181.711	61.818.508.592
41	044	BLU Kementerian KUKM	13.030.938.000	13.030.938.000	25.909.000	25.909.000
42	047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan	3.002.050.500	7.250.505.800	1.018.447.308	344.949.647
43	048	Kementerian PAN	2.575.023.720	2.004.023.720	373.688.861	236.261.898
44	050	Badan Intelijen Negara	421.868.768.788	379.007.042.708	482.212.000	3.183.187.009
45	051	Lembaga Sandi Negara	116.922.073.689	96.884.035.889	113.458.224.100	-
46	052	Dewan Ketahanan Nasional	4.025.245.964	3.576.883.314	-	-
47	054	Badan Pusat Statistik	179.365.871.843	62.265.274.936	33.486.652.486	35.205.833.268
48	055	Kementerian Negara PPN/ Bappenas	19.686.419.731	19.363.875.078	61.828.874.529	69.073.284.203
49	056	Badan Pertanahan Nasional	106.850.641.704	136.381.563.351	41.457.371.204	20.422.991.234
50	057	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	56.913.776.992	53.787.976.992	709.713.110	583.937.583
51	059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	150.949.043.922	89.461.851.871	284.410.074.101	39.460.355.542
52	059	BLU Kementerian Komunikasi dan Informatika	5.461.943.300	4.910.128.300	12.937.849.000	-
53	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	306.455.496.578	208.820.615.494	252.189.434.163	244.662.565.080
54	063	Badan Pengawas Obat dan Makanan	59.377.156.339	8.072.253.591	6.947.984.321	5.625.260.748

DAFTAR NERACA 401

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (RUP/TEZ)

DAFTAR 27

No.	BA	Kementerian Negara/Lembaga	ASET TAK BERWUJUD		ASET LAIN-LAIN	
			31 Desember 2012 Audited	31 Desember 2011 Audited	31 Desember 2012 Audited	31 Desember 2011 Audited
55	064	Lembaga Ketahanan Nasional	149.303.736.448	75.497.112.203	1.538.519.680	1.621.487.045
56	065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	88.368.164.878	83.041.567.078	76.615.072	76.615.072
57	066	Badan Narkotika Nasional	56.960.938.158	52.616.875.958	58.860.698.533	98.515.035.915
58	067	Kementerian Pembangunan Daerah	14.000.000	14.000.000	17.907.541.150	2.541.108.400
59	068	Badan Kependudukan dan Keluarga	21.769.745.654	17.073.786.308	7.747.216.065	2.765.612.169
60	074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	1.707.252.089	1.667.352.089		
61	075	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan	130.021.054.483	97.524.923.063	18.975.675.618	16.467.950.870
62	076	Komisi Pemilihan Umum	1.729.592.666	903.866.495	23.724.944.099	8.044.921.229
63	077	Mahkamah Konstitusi	5.479.346.974	5.479.346.974	3.565.519.467	3.633.832.467
64	078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi	8.444.716.975	4.725.432.026	831.293.429	48.437.300
65	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	11.050.335.154	7.576.012.881	11.512.513.177	16.685.127.770
66	080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	27.977.944.914	23.243.139.814	11.354.168.104	6.036.509.332
67	081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	60.723.930.817	58.113.195.929	9.335.606.268	2.801.395.090
68	081	BLU Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	34.727.000	34.727.000	4.448.910.924	2.647.606.204
69	082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	16.367.334.785	6.463.404.447	7.939.828.321	167.348.384
70	082	BLU Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	4.361.000	3.362.000		
71	083	Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional	510.530.952.633	398.981.655.253	681.042.662	681.042.662
72	084	Badan Standardisasi Nasional	1.434.637.750	1.239.937.750	253.498.257	962.310.206
73	085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	1.320.219.056	230.203.450	371.030.000	1.639.059.940
74	086	Lembaga Administrasi Negara	3.418.506.100	2.970.828.600	1.667.951.716	260.665.379
75	087	Arsip Nasional Republik Indonesia	12.659.577.325	11.324.654.375	287.444.199	8.282.196.849
76	088	Badan Kepegawaian Negara	147.886.272.661	145.791.342.374	3.402.454.643	6.391.879.179
77	089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	9.983.054.815	9.726.730.615	2.941.957.890	4.290.136.128
78	090	Kementerian Perdagangan	130.199.386.130	114.569.882.280	232.827.451.844	2.989.840.702
79	091	Kemen Perumahan Rakyat	46.815.142.553	46.486.627.553	539.318.215.316	542.230.677.038
80	092	Kemen Pemuda dan Olah Raga	18.430.889.900	17.468.139.900	163.326.368.442	129.981.308.254
81	093	Komisi Pemberantasan Korupsi	16.453.417.052	12.154.550.178	1.161.224.396	1.098.530.337
82	094	BRR NAD - Nias			516.936.124.188	485.603.480.566
83	095	Dewan Perwakilan Daerah	5.059.536.602	4.224.326.072	97.378.500	3.025.000
84	100	Komisi Yudisial	1.524.651.246	1.306.201.600	302.408.735	209.275.875
85	103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	28.331.128.584	23.844.661.884	511.741.762.685	129.924.581.806
86	104	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	6.314.782.920	5.957.914.170	392.815.650	5.940.000
87	105	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	549.989.747	449.256.147	410.354.480	160.952.430
88	106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	11.133.566.320	6.444.211.246	66.473.000	66.473.000
89	107	Badan SAR Nasional	28.132.472.322	23.761.391.102	62.062.835.853	52.021.000.336
90	108	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	9.231.159.346	6.988.859.346	324.193.843	1.988.511.148
91	109	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	35.432.797.250	16.326.182.650		
92	110	Ombudsman Republik Indonesia	184.549.840	85.000.000		
93	111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	73.375.610.560	55.377.790.710		
94	112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan	5.235.025.271	-		
95	113	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	19.016.400	-		
96	114	Sekretariat Kabinet	889.454.500	-		
97	115	Badan Pengawas Pemilihan Umum	230.267.026	-		
98	116	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik	1.029.234.318	-	51.360.154.112	-
99	117	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik	2.479.038.211	-	12.422.072.015	-
100	118	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan			2.877.832.400	-
101	999.03	Investasi Pemerintah			42.346.855.319	142.127.657.545
102	999.04	Penerusan Pinjaman			19.719.281.153.339	19.419.108.122.985
103	999.08	Belanja Lain-lain	-	23.734.946.611	-	46.701.991.689
104	999.99	Transaksi Khusus			43.080.717.197.935	49.476.131.894.229
TOTAL			15.705.813.685.536	12.406.618.813.595	103.540.902.717.961	105.992.977.283.250

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

DAFTAR 28.A

ASET TANAH KKKS YANG DICATAT PADA NERACA LKPP 2012

No.	UNIT / KKKS	LOKASI/BLOCK	SALDO PER DESEMBER 2012		KETERANGAN
			LUAS (M2)	NILAI WAJAR TANAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	TOTAL INDONESIA E&P	BALIK PAPAN	9.705.925	546.054.937.372	
2	VICO SANGA SANGA	SANGA-SANGA	1.154.632	44.075.198.000	
3	PT. MEDCO E & P TARAKAN	TARAKAN	340.635	28.962.632.000	
4	PT PERTAMINA EP AREA CEPU	AREA CEPU	42.055	6.392.380.000	
5	PT. CHEVRON INDONESIA COMPANY	BALIK PAPAN	14.459.988	261.863.240.500	
6	PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA	ROKAN	437.675.037	10.592.439.949.130	
7	PT. KONDUR PETROLEUM SA	PEKANBARU	6.981.158	230.121.681.000	
8	PT. PETROSELAT LTD	SELAT PANJANE	411.388	10.602.840.000	
9	PT. MEDCO E & P INDONESIA	PEKANBARU - PELALAWAN	6.195.852	84.653.336.280	
10	PT. KALILA (BENTU) LTD	PELALAWAN & PEKANBARU	361.235	1.945.175.000	
11	PT. KALILA (KORINCI BARU) LTD.	PEKANBARU	464.088	7.592.592.400	
12	PT. PETROCHINA INT. BERMUDA	SORONG	3.862.621	7.307.770.750	
13	PT. PETROCHINA SALAWATI	SALAWATI	1.660.974	2.654.037.310	
14	KANGEAN ENERGY	KANGEAN BLOCK	898.504	40.817.885.860	
15	PT. MEDCO E & P RIMAU	RIMAU BLOCK	1.497.067	5.562.224.000	
16	MOBIL CEPU LTD	BLORA & BOJONEGORO	587.573	49.679.658.000	
17	EXXONMOBIL OIL INDONESIA	BLOCK B ACEH	504.273	10.501.230.000	
18	PT PERTAMINA EP REGION SUMATERA	SUMATERA	12.540.916	832.092.427.000	
19	CONOCOPHILLIPS SOUTH JAMBI LTD	JAMBI	25.867.874	3.400.036.160	
20	VICO UNIT SEMBERAH	SEMBERAH	12.392.826	51.415.100.000	
21	VICO UNIT MUTIARA	LAPANGAN PAMAGUAN	5.869.285	20.536.437.113	
22	VICO UNIT MUTIARA	LAPANGAN MUTIARA	11.686.331	64.787.724.558	
23	VICO UNIT BADAQ & NILAM	BADAQ DAN NILAM	79.897.257	186.273.424.543	
24	PETROCHINA INTERNATIONAL BANGKO	BANGKO BLOCK	1.014.425	19.021.937.352	
25	PT. MEDCO E & P INDONESIA	LEMATANG BLOCK	962.044	3.549.632.633	
26	JOB HESS JAMBI MERANG	JAMBI	871.217	6.029.880.000	
27	JOB PERTAMINA GOLDEN SPIKE - PENDOPO	PENDOPO	955.055	31.627.815.000	
28	JOB PERTAMINA JAVA - TUBAN	TUBAN	569.945	66.459.346.700	
29	CONOCOPHILLIPS GRISSIK LTD	GRISSIK - MUSI BANYUASIN	685.838	502.869.000	
30	PT. MEDCO E & P INDONESIA	CENTRAL SUMATERA/MUSI RAWAS	289.942	2.112.767.000	
31	JOB PERTAMINA TALISMAN	OGAN KOMERINC	482.923	2.258.798.000	
32	PT. BOB BUMI SIAK PUSAKO	SIAK - PEKANBARU	132.829	4.100.448.000	
33	TAC PERTAMINA BWP MERUAP LTD	SAROLANGUN	301.743	3.657.875.075	
34	PT. LAPINDO BRANTAS INC.	SIDARJO	447.275	33.296.382.862	
35	JOB PERTAMINA - MEDCO TOMORI	BLOCK TOILI - SULAWESI	343.689	3.274.558.000	
36	PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA - SIAK	SIAK - PEKANBARU	4.254.516	9.403.683.400	
37	ENERGY EQUITY EPIC (SENGKANG)	SENGKANG	567.485	23.890.286.000	
38	PEARL OIL TUNGKAL LTD	TUNGKAL BLOCK - JAMBI	353.137	1.041.880.133	
39	PT. PETROCHINA INT JABUNG	JABUNG BLOCK - JAMBI	8.449.765	323.833.352.258	
40	KODECO ENERGY LTD.	GRESIK	39.520	1.088.469.575	
41	HESS INDONESIA PANGKAH	GRESIK	286.675	63.497.000.000	
		TOTAL		13.788.358.699.984	
42	PT PERTAMINA EP REGION JAWA BAGIAN BARAT	JAWA BAGIAN BARAT	.	68.597.208.000	Hasil IP 2011
43	Chevron Indonesia Company	East Kalimantan	11.924.869	475.008.806.000	Hasil IP 2011
44	PT PERTAMINA EP Cepu		89.369	30.319.456.000	Hasil IP 2011
		TOTAL		573.925.470.000	
	TOTAL		667.919.254	14.362.284.169.984	

kurs 1 US\$ = Rp 9.400

DAFTAR NERACA403

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

DAFTAR. 28 B

**REKAP ASET NON TAMAH
PER 31 DESEMBER 2012**

No	Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)	Kontrak Area (Block)	Jumlah Aset	Hasil IP Minus Tanah		Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
				Nilai Perolehan (USD)	Nilai Wejar (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8
KKKS PRODUKSI							
1	BOB PT Bumi Siat Pusako Pertamina Hulu	Coastal Plain Pekanbaru	6.765	223.156.225	962.528.383.135	255.148.897.394	707.379.485.741
2	BP Berau Ltd.	Berau					
3	BP Muturi Ltd.	Muturi	221	625.356.492	6.420.196.686.910	1.422.531.239.492	4.997.665.447.418
4	BP WIRIAGAR	Wirriagar					
5	Camar Resources Canada Ltd.	Bawean	159	47.546.153	207.800.598.620	39.941.725.875	167.858.872.745
6	Chevron Indonesia Company (Cic-ol)*	East Kalimantan	4.201	736.851.012	3.705.065.244.719	989.571.644.548	2.715.493.600.171
7	Chevron Makassar Ltd.	Makassar Strait	97	435.514.026	2.373.190.921.407	327.570.019.610	2.045.620.901.798
8	Chic Seram Ltd.	Seram Non Bula	701	65.428.478	355.539.808.623	109.019.586.730	246.520.221.893
9	CNOOC South East Sumatera Ltd.	Southeast Sumatera	1.661	704.397.899	4.307.496.957.285	1.199.331.551.863	3.108.165.405.422
10	ConocoPhillips (Grissik) Ltd.	Corridor	1.141	867.096.247	5.402.435.174.739	1.293.257.428.023	4.109.177.746.715
11	ConocoPhillips (South Jambi) Ltd.	South Jambi B	255	47.765.930	278.741.845.786	25.967.347.718	252.774.498.068
12	ConocoPhillips Indonesia Ltd.	South Natuna Sea B	1.972	2.288.497.258	20.830.850.030.970	3.212.312.968.494	17.618.537.062.476
13	Energy Equity EPIC (Sengkang) Pty Ltd.	Sengkang	501	17.159.299	74.092.281.835	16.729.384.057	57.362.897.778
14	ExxonMobil Indonesia Inc.	Block B	4.865	1.122.134.334	4.977.143.086.940	1.733.413.526.776	3.243.729.562.164
15	Hess (Indonesia Pangkajene) Ltd.	Pangkajene	272	347.575.097	3.519.113.744.796	877.970.618.344	2.641.143.126.452
16	JOB Pertamina - Golden Spike Ltd	Raja Pendopo	41	8.098.151	75.912.082.730	17.347.506.078	58.564.576.652
17	JOB Pertamina-Costa International Group Ltd.	North Gebang	188	39.865.582	167.223.575.061	106.850.538.883	60.373.040.178

DAFTAR NEFACAD04

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

DAFTAR. 28 B

**REKAP ASET NON TANAH
PER 31 DESEMBER 2012**

No	Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)	Kontrak Area (Block)	Jumlah Aset	Hasil IP Minus Tanah		Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
				Nilai Perolehan (USD)	Nilai Wejar (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8
18	JOB Pertamina-Medco E&P Tomori Sulawesi	Senoro-Tolli	28	10.653.763	116.093.590.199	23.903.259.672	92.190.330.528
19	JOB Pertamina-PetroChina East Java	Tuban	1.007	103.963.783	691.058.024.889	178.602.695.068	512.455.329.822
20	JOB Pertamina-PetroChina Salawati	Kepala Burung	205	22.220.684	129.918.609.542	54.356.107.279	75.562.502.264
21	JOB Pertamina-Talisman (Ogan Komering) Ltd.	Ogan Komering	1.001	53.971.488	302.934.160.227	109.951.069.295	192.983.090.932
22	JOB Pertamina-Talisman Jambi Merang	Jambi Merang	285	590.664	5.575.792.147	3.154.213.700	2.421.578.447
23	Kalia (Korinci Baru) Pty Ltd.	Korinci Baru	102	10.269.906	88.309.436.143	33.381.668.907	54.927.767.236
24	Kalrez Petroleum (Saram) Ltd.	Bula	900	6.028.908	31.336.286.668	10.949.005.526	20.389.281.142
25	Kangean Energy Indonesia	Kangean	363	339.216.478	962.929.613.541	599.944.258.672	362.985.354.869
26	Kodeco Energy Co. Ltd.	West Madura	339	221.500.439	2.090.598.649.436	461.437.223.732	1.629.161.425.704
27	Kondur Petroleum S.A.	Malacca Strait	1.314	176.477.024	870.230.911.831	150.702.340.910	719.528.570.921
28	Lapindo Brantas Inc.	Brantas	219	18.810.200	128.101.350.329	31.344.431.910	96.756.918.419
29	Mobil Cepu Ltd.	Cepu	1.317	88.533.669	826.944.954.045	180.002.823.263	646.942.130.781
30	Mobil Exploration Indonesia	North Sumatera Offshore	569	437.154.022	2.429.479.131.736	584.933.970.312	1.844.545.161.423
31	MontD'Or Tungkal Oil Ltd.	Tungkal	57	14.310.596	132.233.579.776	44.978.350.651	87.255.229.125
32	Pertamina Hulu Energi ONWJ Ltd	Offshore Northwest Java	15	358.564.948	2.085.904.753.378	919.262.958.753	1.166.641.800.625
33	Perusia Benua Taka	Wailawi	521	8.141.964	36.980.990.984	5.561.210.146	33.419.780.838

DAFTAR NEFACAOB

**REKAP ASET NON TAMAH
PER 31 DESEMBER 2012**

No	Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)	Kontrak Area (Block)	Jumlah Aset	Hasil IP Minus Tanah		Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
				Nilai Perolehan (USD)	Nilai Wejar (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8
34	PetroChina International (Bangko) Ltd.	Bangko	23	409.011	3.827.014.250	1.943.928.845	1.883.085.405
35	PetroChina International (Bermuda) Ltd.	Salawati Basin	2.863	88.270.903	386.189.722.754	146.001.553.274	240.188.169.480
36	PetroChina International (Jabung) Ltd.	Tanjung Jabung	5.632	520.951.856	4.379.413.803.338	1.482.148.882.163	2.897.264.921.175
37	Petroseilat Ltd.	Selat Panjang	80	4.795.594	36.406.235.432	11.431.342.547	24.974.892.884
38	Premier Oil Natuna Sea BV	Natuna Sea Block A	614	305.126.859	1.930.334.016.637	403.866.503.152	1.526.467.513.485
39	PT Chevron Pacific Indonesia	Siak	300	11.355.965	48.073.381.431	7.100.714.380	40.972.667.051
40	PT Chevron Pacific Indonesia	Rokan	51.933	3.209.853.448	17.533.562.672.650	5.338.955.575.098	12.194.607.097.553
41	PT SPR Langgak	Mountain Front Kuantan	90	3.689.212	21.743.118.651	3.288.970.257	18.454.148.394
42	PT Medco E&P Indonesia	South & Central Sumatera	1.123	125.149.323	945.926.371.658	213.422.208.161	732.506.163.497
43	PT Medco E&P Lematang	Lematang	27	72.692.535	632.469.522.762	85.180.382.623	547.279.140.139
44	PT Medco E&P Malaka	Block A	1	32.080	113.338.000	37.779.333	75.558.667
45	PT Medco E&P Rimau	Barisan Rimau	2.411	179.939.127	1.257.192.761.282	324.897.374.901	932.295.386.381
46	PT Medco E&P Tarakan	Tarakan	186	30.446.205	211.008.547.572	65.218.422.979	145.790.124.593
47	PT Pertamina EP*	Indonesia	3.963	639.296.217	5.666.761.000.475	1.769.206.979.464	3.897.554.021.011
48	Santos (Madura) Pty Ltd.	Madura	13	15.988.607	148.694.046.377	52.042.916.232	96.651.130.145
49	Santos (Sampang) Pty Ltd.	Sampang	43	94.343.073	904.968.630.104	170.568.108.932	734.400.521.173
50	Star Energy (KAKAP) Ltd.	Kakap	707	379.049.130	1.881.318.722.421	1.308.379.471.580	572.939.250.841
51	Total E&P Indonesia	Manakam	7.032	3.237.019.630	28.778.336.795.030	7.149.852.045.792	21.628.484.749.238
52	Total E&P Indonesia	Tengah Area	54	22.335.338	212.193.394.037	52.871.997.795	159.321.396.242

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

DAFTAR. 28 B

**REKAP ASET NON TAMAH
PER 31 DESEMBER 2012**

No	Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)	Kontrak Area (Block)	Jumlah Aset	Hasil IP Minus Tanah		Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
				Nilai Perolehan (USD)	Nilai Wejar (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8
53	Triangle Pase Inc	Pase	37	60.313.435	427.090.461.000	51.547.370.697	375.543.090.303
54	Vico Indonesia Co.	Sanga-sanga	3.672	1.199.777.816	6.125.994.488.706	1.847.189.033.031	4.278.805.455.675
SUB TOTAL KKKS PRODUKSI				112.146	196.119.572.314.994	35.504.581.132.918	100.614.991.182.076
KKKS EKSPLORASI							
55	Anadarko Indonesia Company	North East Madura II	12	30.121.00	274.366.543.00	201.778.121.31	72.588.421.69
56	Anadarko Indonesia Nunukan Company	Nunukan	5	151.231.00	1.687.112.240.00	843.556.120.00	843.556.120.00
57	Anadarko Papalang Ltd.	Papalang	14	23.778	215.381.124	161.535.843.00	53.845.281.00
58	Anadarko Popodi Ltd.	Popodi	14	23.778	215.381.124	161.535.843.00	53.845.281.00
59	Bungamex International Co.	Bungamex	23	186.894	1.673.658.210	532.071.922.63	1.141.586.287.38
60	Enusa Bangkanai Energy Ltd.	Bangkanai	21	25.053.00	193.042.264.00	167.438.030.96	25.604.233.04
61	ENI Ambalat Ltd.	Ambalat		0			
62	ENI Bukit Ltd.	Bukat	77	295.765	1.888.014.066	1.561.099.025.32	326.915.040.81
63	ENI Krueng Mane Ltd.	Offshore North Aceh	9	49.646.00	298.009.358	298.009.357.81	
64	ENI Muara Bekau B.V.	Muara Bekau	5	7.639	69.692.883	25.553.691.97	44.139.191.13
65	ENI Bulungan B.V.	Bulungan		0			

DAFTAR NEFAC4407

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

DAFTAR. 28 B

**REKAP ASET NON TANAH
PER 31 DESEMBER 2012**

No	Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)	Kontrak Area (Block)	Jumlah Aset	Hasil IP Minus Tanah		Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
				Nilai Perolehan (USD)	Nilai Wejar (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8
66	ExxonMobil Exploration and Production Indonesia (Mandar) Limited	Mandar	1	313.721,59	3.435.251.410,50	1.932.328.918,41	1.502.922.492,09
67	ExxonMobil Exploration and Production Indonesia Surumana Limited	Surumana	4	319.798,48	3.493.282.376,00	1.961.681.369,00	1.531.601.007,00
68	Husky Oil (Madura) Ltd.	Madura Strait	95	31.590	304.215.294	136.224.827,24	167.990.466,55
69	Husky Oil North Sumbawa Ltd	North Sumbawa	64	158.276	1.508.064.422	634.509.312,02	873.555.110,11
70	Inpex Masela Ltd	Masela	43	104.713	885.568.533	470.883.092,57	414.685.440,46
71	Irian Petroleum Ltd	Manokwari	50	45.813	379.235.780	308.567.221,05	70.668.558,82
72	Kallia (Bentui) Ltd	Bentui Block	31	78.098	697.871.754	468.530.899,98	229.340.853,67
73	AED Rombelai B.V	Rombelai	90	177.080	1.636.022.894	1.381.079.617,50	244.943.276,50
74	Pearl Oil (Sebuku)	Sebuku	18	240.684	2.264.167.432	1.572.599.082,13	691.568.350,26
75	Transworld Seruway Exploration LTD.		89	100.221	944.079.540	626.954.065,63	317.125.484,70
76	BP Bomberai Ltd	Bomberai					
SUB TOTAL KKKS EKSPLORASI				2.363.900	22.062.417.248	13.455.936.351	8.606.480.896
TOTAL ASET				19.650.052.182	136.141.634.732.242	35.518.037.069.269	100.623.597.662.973

DAFTAR NEFAC/A008

DAFTAR 28.C

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012/2013

**REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN ULANG LHP KKS
DENGAN NILAI WAJAR RP 0,00 (NOL RUPIAH)**

No	KKS	NERACA				Keterangan	CaLK		Keterangan	
		Jumlah Aset	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Akumulasi Penyusutan		Nilai Buku	Jumlah Aset		Nilai Perolehan
1	JOB Pertamina Talisman Ogan Komerling	1	187.844	829.702.058	622.276.544	207.425.515				
2	Pertamina EP Prabumulih	1	5.762,00	30.529.775	2.654.763	27.875.012	2 aset sudah digabung ke aset induk			
3	Total EP Mahakam	689	-	-	-	-	sudah digabung ke aset induk			
4	Kondur Petroleum	6	11.327.022,71	61.119.180.066	13.818.092.033	47.301.088.032		387	70.058.375,36	11.496.730.768
5	Monti Or Oil	2	54.546	121.313.016	13.997.656	107.315.360				dicalat di neraca digabung dengan penyajian subsequent
6	CPI Rokan	2.496	128.784.240	424.382.585.479	140.329.345.385	284.053.240.094	dikurangi 3 aset karena dibel pencatatan	162	773.317,00	2.865.857.070
7	PT Sarana Pembangunan Riau Langgak	1		44.435.495	2.962.366,37	41.473.129,11				
8	Petrosehat Ltd.				0	0				
9	PT Chevron Pacific Indonesia (Siak)	2		7.469.221	5.417.829,32	2.051.391,62		1		378.000
	Jumlah	3.198	140.359.415	486.535.215.110	154.794.746.576	331.740.468.534		550	70.831.692	14.362.965.638

Reklasifikasi line number
1| Petrochina Bermuda 56 11300450,58 40.562.337.436,00 9.780.142.835,11 30.782.194.600,89

DAFTAR MERACA09

DATA ASET SUMUR YANG TIDAK DIGUNAKAN

No	Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)	Kontrak Area (Block)	Jumlah Aset	Hasil IP Minus Tanah	
				Nilai Perolehan (USD)	(Rp)
1	2	3	4	5	6
KKKS PRODUKSI					
1	BOB PT Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu	Coastal Plain Pekanbaru			
2	BP Berau Ltd.	Berau	1	2.716.113	31.439.004.734
3	BP Muturi Ltd.	Muturi			
4	BP WIRIAGAR	Wirriagar			
5	Camar Resources Canada Ltd.	Bawean			
6	Chevron Indonesia Company (Cico)*	East Kalimantan	2	2.611.557	11.813.911.128
7	Chevron Makassar Ltd.	Makassar Strait			
8	Citic Seram Ltd.	Seram Non Bula	11	3.720.663	11.493.492.728
9	CNOOC South East Sumatera Ltd.	Southeast Sumatera	125	42.097.286	176.033.168.096
10	ConocoPhillips (Grissik) Ltd.	Corridor	15	2.193.677	6.100.083.943
11	ConocoPhillips (South Jambi) Ltd.	South Jambi B			
12	ConocoPhillips Indonesia Ltd.	South Natuna Sea B	2	374.762	947.188.387
13	Energy Equity EPIC (Sengkang) Pty Ltd.	Sengkang			
14	ExxonMobil Indonesia Inc.	Block E	12	10.331.467	36.029.977.761
15	Hess (Indonesia Pangkah) Ltd.	Pangkah			
16	JOB Pertamina - Golden Spike Ltd	Raja Pendopo			
17	JOB Pertamina-Costa International Group Ltd.	North Gebang			
18	JOB Pertamina-Medco E&P Tomori Sulawesi	Senoro-Toili			
19	JOB Pertamina-PetroChina East Java	Tuban			
20	JOB Pertamina-PetroChina Salawati	Kepala Burung			
21	JOB Pertamina-Talisman (Ogan Komering) Ltd.	Ogan Komering			
22	JOB Pertamina-Talisman Jambi Merang	Jambi Merang			
23	Kalila (Korinci Baru) Pty Ltd.	Korinci Baru			
24	Kalrez Petroleum (Seram) Ltd.	Bula			
25	Kangean Energy Indonesia	Kangean			
26	Kodeco Energy Co. Ltd.	West Madura	11	3.805.010	34.872.916.650
27	Kondur Petroleum S.A.	Malacca Strait	2	523.322	2.311.117.255
28	Lapindo Brantas Inc.	Brantas			
29	Mobil Cepu Ltd.	Cepu			
30	Mobil Exploration Indonesia	North Sumatera Offshore			
31	Mont'Dr Tungal Oil Ltd.	Tungal			
32	Pertamina Hulu Energi DNWJ Ltd	Offshore Northwest Java	4	1.002.456	1.521.997.115
33	Perusa Benua Taka	Wailawi			
34	PetroChina International (Bangko) Ltd.	Bangko	15	1.504.467	13.867.595.915
35	PetroChina International (Bermuda) Ltd.	Salawati Basin			
36	PetroChina International (Jabung) Ltd.	Tanjung Jabung	2	329.981	3.157.272.500
37	Petrosetat Ltd.	Selat Panjang	1	96.045	442.817.603
38	Premier Oil Natuna Sea BV	Natuna Sea Block A			
39	PT Chevron Pacific Indonesia	Siak			
40	PT Chevron Pacific Indonesia	Rokan	255	13.653.673,00	36.903.241.484,64
41	PT SPR Langgak	Mountain Front Kuantan			
42	PT Medco E&P Indonesia	South & Central Sumatera			
43	PT Medco E&P Lematang	Lematang			
44	PT Medco E&P Malaka	Block A			
45	PT Medco E&P Rimau	Barisan Rimau			
46	PT Medco E&P Tarakan	Tarakan			
47	PT Pertamina EP*	Indonesia			
48	Santos (Madura) Pty Ltd.	Madura			
49	Santos (Sampang) Pty Ltd.	Sampang			

DATA ASET SUMUR YANG TIDAK DIGUNAKAN

No	Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)	Kontrak Area (Block)	Jumlah Aset	Hasil IP Minus Tanah	
				Nilai Perolehan (USD)	(Rp)
1	2	3	4	5	6
50	Star Energy (KAKAP) Ltd.	Kakap	21	13.782.983	60.608.368.588
51	Total E&P Indonesia	Mahakam	131	96.026.008	750.802.929.482
52	Total E&P Indonesia	Tengah Area			
53	Triangle Pase Inc	Pase			
54	Vico Indonesia Co.	Sanga-sanga	13	2.058.840	5.877.521.789
SUB TOTAL KKKS PRODUKSI			623	196.828.310	1.184.222.605.157
KKKS EKSPLORASI					
55	Anadarko Indonesia Company	North East Madura II			
56	Anadarko Indonesia Nunukan Company	Nunukan			
57	Anadarko Papalang Ltd.	Papalang			
58	Anadarko Popodi Ltd.	Popodi			
59	Bungamas International Co.	Bungamas			
60	Elnusa Bangkanai Energy Ltd.	Bangkanai			
61	ENI Ambalat Ltd.	Ambalat			
62	ENI Bukat Ltd.	Bukat			
63	ENI Krueng Mane Ltd.	Offshore North Aceh			
64	ENI Muara Bakau B.V.	Muara Bakau			
65	ENI Bulungan B.V	Bulungan			
66	ExxonMobil Exploration and Production Indonesia (Mandar) Limited	Mandar			
67	ExxonMobil Exploration and Production Indonesia Surumana Limited	Surumana			
68	Husky Oil (Madura) Ltd.	Madura Strait			
69	Husky Oil North Sumbawa Ltd	North Sumbawa			
70	Inpex Masela Ltd	Masela			
71	Irian Petroleum Ltd	Manokwari			
72	Kalila (Bentu) Ltd.	Bentu Block			
73	AED Rom bebai B.V	Rom bebai			
74	Pearl Oil (Sebuku)	Sebuku			
75	Transworld Seruway Exploration LTD.				
76	BP Bomberai Ltd	Bomberai			
SUB TOTAL KKKS EKSPLORASI			.	.	.
TOTAL ASET			623	196.828.310	1.184.222.605.157

DAFTAR 28 F

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (LUD/7252)

REKAPITULASI HASIL IP BMN KKKS LANJUTAN TAHUN 2012

No	Nama KKKS	PIC	NILAI WAJAR AWAL RB		LHP RB NET TO NERACA		AKUMULASI PENYUSUTAN		NILAI BUKU		LHP RB NET TO CALK	
			Jumlah Aset	Harga Perolehan (USD)	Nilai Wajar (Rp)	Jumlah Aset	Harga Perolehan (USD)	Nilai Wajar (Rp)	Nilai Wajar (Rp)	Jumlah Aset	Harga Perolehan	Nilai Wajar (Rp)
1	BOB Bumi Siat Pusko	Pekabaru	979	18.667.081	29.593.750.371	57	628.321	1.370.580.833	370.704.383,75	999.676.449,56	922	18.039.761
2	IAD Rombhai	Jakarta	1	977	1.094.954	-	-	-	-	-	1	977
3	BP Tangguh	Bawand	7	687.823	835.940.469	-	-	-	-	-	7	687.823
4	Camar Resources Canada	Bawand dan Jakarta	26	1.091.276	1.627.215.306	-	-	-	-	-	26	1.091.276
5	Chevron Indonesia Company	Jakarta	755	4.156.593	6.038.476.562	8	554.235	816.116.749	34.965.355,18	781.148.394,01	747	3.602.368
6	Chevron Indonesia Company (Lanjutan)	Jakarta	11	235.450	343.860.737	11	235.450	343.860.737	132.972.685,16	210.875.052,00	-	-
7	Chevron Indonesia Company (Lanjutan)	Jakarta	675	2.409.698	3.626.796.689	-	-	-	-	-	675	2.409.698
8	Chevron Indonesia Company (Lanjutan)	Samarinda	5	3.352.829	17.069.674.977	4	3.094.105	16.674.782.765	4.952.652.707,63	11.722.127.057,38	1	259.724
9	Citic Seram	Eran Non Bula	56	1.004.502	1.413.888.767	-	-	-	-	-	56	1.004.502
10	CHOC	Jakarta	1.164	25.857.144	44.543.717.711	76	17.189.907	33.517.436.001	11.452.965.971,96	22.064.470.029,04	1.088	8.367.237
11	ConocoPhillip Gresik	Gresik	26	2.678.951	4.317.686.254	15	478.839	906.974.736	454.912.757,69	452.063.977,89	11	2.200.112
12	ConocoPhillip Indonesia Blok B Natuna	Blok B Natuna	1.959	11.276.049	24.324.791.288	364	2.475.992	6.996.388.209	4.839.307.828,45	2.149.080.390,55	1.595	8.800.057
13	ConocoPhillip South Jambi	South Jambi	1	1.295	1.663.298	-	-	-	-	-	1	1.295
14	Energ Equit Epic Sangkang	Jakarta	89	895.107	1.520.561.964	1	819.043	1.194.497.529	238.895.505,80	955.598.023,20	88	176.064
15	ENI Ambalat	Ambalat	2	4.310	5.255.989	-	-	-	-	-	2	4.310
16	ENI Bukit	Bukit	11	137.432	165.413.966	-	-	-	-	-	11	137.432
17	ENI Krung Mane	Krung Mane	46	245.635	299.868.698	-	-	-	-	-	46	245.635
18	Exxon Mobil Indonesia	Acah dan Jakarta	1.836	96.516.405	147.746.370.455	1.647	95.046.119	145.746.521.412	137.645.242.395,43	8.101.279.056,81	189	1.470.266
19	Husky Oil North Sumbawa	Jakarta	2	2.562	24.586.781	-	-	-	-	-	2	2.562
20	Inpeks Masela	Jakarta	4	3.895	25.647.537	-	-	-	-	-	4	3.895
21	Irian Petroleum Escosse	Jakarta	18	23.633	215.740.729	-	-	-	-	-	18	23.633
22	IOB Pertamina Golden Stake	Jakarta	10	1.107.629	10.252.863.251	9	1.107.629	10.252.863.251	2.573.924.049,01	7.678.939.201,99	1	-
23	IOB Pertamina Costa Intarnasional	North Sebang	3	4.404	7.795.000	-	-	-	-	-	3	4.404
24	IOB Pertamina Talisman Ogan Kemerang	Ogan Kemerang	313	2.336.403	3.388.078.156	7	352.645	522.057.397	333.352.391,72	188.705.005,28	306	1.983.768
25	IOB Pertamina Talisman Jambi (Merang)	Jambi Merang	31	29.093	272.586.687	-	-	-	-	-	31	29.093

DAFTAR MERANGKAI 13

DAFTAR 28 F

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AKD/7E2)

REKAPITULASI HASIL IP BMN KKKS LANJUTAN TAHUN 2012

No	Nama KKKS	PIC	NILAI WAJAR AWAL RB		LHP RB NET TO NERACA		AKUMULASI PENYUSUTAN		NILAI BUKU		LHP RB NET TO CALK		
			Jumlah Aset	Harga Perolehan (USD)	Nilai Wajar (Rp)	Jumlah Aset	Harga Perolehan (USD)	Nilai Wajar (Rp)	Nilai Wajar (Rp)	Jumlah Aset	Harga Perolehan	Nilai Wajar (Rp)	
26	JOB Pertamina Petrochina East Java	Tuban	232	723.431	1.272.693.074	4	3.743	5.184.152	4.614.623,06	569.522,62	228	719.688	1.267.508.922
27	JOB Pertamina Salawati	Salawati	101	3.274.804	13.949.906.189	2	5.031	11.867.618	5.925.809,00	5.928.809,00	99	3.269.573	13.938.048.571
28	Kelcez Petroleum	Bula	524	2.366.035	5.336.633.287	31	4.148.733	2.741.731.802	1.745.202.269,16	996.529.542,84	493	1.941.162	2.694.901.485
29	Kelala Koinco Baru	Pekabaru	1	1.145	1.978.000	-	-	-	-	-	1	1.145	1.978.000
30	Kangsan Energy Indonesia	Kangsan	98	1.692.082	2.039.641.273	7	56.556	359.295.812	314.885.586,49	44.412.226,55	91	1.625.526	1.680.345.461
31	Kondur Petroleum	Kondur	54	308.736	1.470.408.642	27	176.389	1.263.561.029	982.390.039,03	281.170.990,41	27	132.348	208.847.613
32	Lapindo Brantas	Surabaya	20	111.186	162.741.929	-	-	-	-	-	20	111.186	162.741.929
33	PT Medco EP Indonesia	Lirik dan SSE	283	952.462	1.381.652.019	4	15.517	24.806.890	4.362.767,52	20.424.082,48	279	936.946	1.356.845.169
34	PT Medco EP Lematang	Lematang	6	2.336.571	3.506.379.367	6	2.336.571	3.506.379.367	892.075.814,50	2.614.305.552,90	-	-	-
35	PT Medco EP Malaka	Malaka	46	363.366	344.621.000	3	96.240	83.369.000	76.421.583,33	6.947.416,67	43	267.126	261.252.000
36	PT Medco EP Rimau	Rimau	178	3.980.460	7.131.641.561	14	339.392	1.804.431.767	349.762.960,39	1.454.668.816,61	164	3.621.058	5.327.209.784
37	PT Chevron Pacific Indonesia (Rokan)	Rokan	9.046	199.046.041	339.964.862.903	7.044	174.229.264	302.813.986.391	119.908.414.719,34	182.905.570.661,96	2.002	24.818.777	37.150.877.921
38	Petrochina Internasional Jabung	Jabung	456	3.674.564	8.007.919.862	23	241.470	821.507.527	522.744.234,27	298.763.292,73	433	3.433.094	7.186.412.355
39	Pearl Oil Sebulu	Jakarta	1	2.275	20.083.700	-	-	-	-	-	1	2.275	20.083.700
40	MICO Indonesia Company	Sangasanga	868	58.832.439	111.929.946.792	218	50.118.539	95.465.611.311	54.780.357.426,42	40.675.253.894,24	640	8.713.900	16.464.335.461
41	RB Triangle Pse 2010/2011	Jakarta	17	9.876.713	18.410.647.186	4	5.164.812	7.641.378.185	2.780.112.976,67	4.861.266.208,33	13	4.711.901	10.769.169.000
42	RB Transworld Serunay_2010/2011	Jakarta	1	562	6.008.154	1	562	6.008.154	3.004.076,80	3.004.076,80	-	-	-
43	Total E&P Indonesia	Mahakam	312	22.443.423	73.756.730.463	134	18.450.927	67.036.226.699	23.316.625.313,51	43.719.597.365,68	178	3.992.497	6.720.503.764
44	Sar Energi IKAKAP Ltd	Siak	221	810.478	1.756.676.863	7	50.432	63.281.644	31.645.822,00	31.640.822,00	214	860.046	1.693.394.219
45	PT Chevron Pacific Indonesia	Natuna	13	1.741.120	2.631.649.862	13	1.741.120	2.631.649.862	406.892.703,05	2.224.757.158,95	-	-	-
46	Pramer Oil Natuna Sisa B.V.	Natuna	89	373.497	2.76.558.568	-	-	-	-	-	89	373.497	2.76.558.568
47	Kodico Energy Do. Ltd.	West Madura	85	29.940.371	130.715.296.190	-	-	-	-	-	85	29.940.371	130.715.296.190
48	Pertamina Hulu Energy	OMWU	5	143.308.095	217.176.723.296	-	-	-	-	-	5	143.308.095	217.176.723.296
49	PT Pertamina EP	North Sumatra Offshore	217	6.859.099	40.706.601.783	21	2.293.594	9.981.273.621	1.934.495.865,37	8.052.773.755,52	4	1.125.576	1.305.518.249
50	Mobil Exploration Indonesia Inc.	Cepuran Jakarta	14	37.711.325	57.381.460.538	14	37.711.325	57.381.460.538	11.020.985.109,73	46.360.472.428,80	196	4.564.505	30.719.328.162
51	Mobil Cepu Ltd	Tanaran	37	264.432	438.698.838	37	264.432	438.698.838	229.222.691,50	209.471.146,50	-	-	-
52	PT Medco E&P	Pekabaru	39	395.357	878.498.162	14	215.077	539.898.730	300.692.931,91	239.302.798,95	25	160.280	338.599.422
53	Petrolsat	Bermuda	65	118.537	142.878.749	-	-	-	-	-	65	118.537	142.878.749
54	Petrochina International	Bermuda	619	4.164.023	7.136.416.368	-	-	-	-	-	619	4.164.023	7.136.416.368
	TOTAL		21.648	708.259.525	1.346.649.097.750	9.628	558.090.657	988.832.891.554	463.602.376.818	525.230.514.735	11.820	150.168.868	356.816.206.196

DAFTAR NERACA 14

DAFTAR ASET KKKS YANG DIKELUARKAN PENCATATANNYA DARI NERACA KARENA DALAM PROSES PENGHAPUSAN/FUPP

KKKS : Kodaco Energy Co. Ltd
Block : West Madura

No	No Harmoni	Line	Kategori	Deskripsi Aset	Merk/Type	Lokasi	Jumlah Aset	Dasar Perolehan	Tahun Perolehan	Dasar Perolehan (US \$)	Dasar Perolehan Rp	Nilai Wajar	Kondisi	Keterangan
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	93220128	01	G	COMPUTING MACHINES	DELL OPTIPLX 210	KE05/Gresik	16		2006	44.022,00	397.078.440,00	40.1.040.420,00	B	
2	93220115	01	G	COMPUTING MACHINES	DELL OPTIPLX	KE05/Gresik	1		2006	9.600,00	86.592.000,00	88.512.000,00	B	
3	93220105	01	G	COMPUTING MACHINES	DELL	KE05/Gresik	1		2006	5.730,00	51.684.600,00	53.833.350,00	B	
4	93220113	01	G	COMPUTING MACHINES	DELL	KE05/Gresik	1		2006	40.875,00	368.692.500,00	384.020.625,00	B	
							JUMLAH	19		100.227,00	904.047.540,00	927.406.395,00		

KOREKSI ATAS NILAI WAJAH HASIL IP TAHUN 2011 dan 2012

No.	KPKS	Block	ASET BERNILAI WAJAH NEGATIF PER 31 DES 2012		KOREKSI ASET INDIK						koreksi akumulasi penyusutan	
			Aset KKS (Berdasarkan LHP)	Nilai Waajar (Rp)	Jumlah	Nilai Perolehan (US\$)	Nilai Waajar (Rp) Sebelum Koreksi	Nilai Waajar (Rp) Sesudah Koreksi	Koreksi dalam Neraca	koreksi akumulasi penyusutan		
	Jumlah		USD									
1	ConocoPhillips (Grossik) Ltd. Dilakukan Perhitungan Uang	Corridor	1	(5.957)	(53.732.140)	1	87.299.551	458.412.994.335	445.243.644.830	(13.169.349.505)	(1.795.820.387)	(1.795.820.387)
2	Total EP Indonesia Nilai Waajar terkoreksi IP 2011 Nilai Waajar terkoreksi IP 2012	Manakam	201	(23.612.415)	(236.538.505.206)	149	404.935.248	3.504.350.930.323	2.224.842.663.120	(1.279.508.267.203)	(216.988.471.926)	(216.988.471.926)
			138	(22.296.130)	(223.794.027.042)	88	360.063.407	3.415.179.533.615	2.043.789.437.120	(1.371.380.036.495)	(216.988.471.926)	(216.988.471.926)
			63	(1.316.284)	(12.744.478.163)	61	24.871.841	88.171.396.708	181.043.226.000	91.871.829.292	0	0
3	Chic Serum Nilai Waajar Terkoreksi Nilai Menjadi Nol	Seram Nuri Bula	6	(401.608)	(3.748.610.030)	6	787.000	4.233.030.334	3.891.049.130	(341.981.204)	(537.365.873)	(537.365.873)
			4	(71.123)	(675.642.275)	4	787.000	4.233.030.334	3.891.049.130	(341.981.204)	(537.365.873)	(537.365.873)
			2	(330.486)	(3.072.767.755)	2						
4	Premier Oil Indonesia Nilai Menjadi Nol	Natuna	1	(0,3)	(2.770)	1						
			1	(0,3)	(2.770)	1						
Total			209	(24.019.980)	(240.340.850.146)	157	493.021.799	3.966.996.954.992	2.673.977.357.080	(1.293.019.597.912)	(219.321.658.186)	(219.321.658.186)
Mengkoreksi hasil IP 2011			146	(22.703.696)	(227.598.371.963)	93	468.149.958	3.877.625.558.264	2.492.394.131.060	(1.384.891.427.204)	(219.321.658.186)	(219.321.658.186)
Mengkoreksi hasil IP 2012			63	(1.316.284)	(12.744.478.163)	61	24.871.841	88.171.396.708	181.043.226.000	91.871.829.292		

Catatan:
Hasil koreksi aset yang menjadi Rp 0,00 dikeluarkan dan LHP dan dicatat dalam BA-04, karena nilai aset sudah terkoreksi namun karena sistem yang tidak mengizinkan harmoni tsb dipaparkan maka ditempuh dengan membuat harmoni baru dengan nilai minus

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

DAFTAR 29.A

Rincian Aset Properti Eks BPPN

NO.	ASET	UNIT	NILAI
1	BJDA (Verifikasi 2009)	114	618.158.742.000
2	Settlement (Verifikasi 2009)	23	61.301.947.000
3	BJDA (Verifikasi 2011)	314	846.861.639.807
4	Temuan BPK	917	943.801.628.200
5	Griya Potensa	132	23.767.000.000
6	Apartemen Paladian	143	34.069.110.000
7	Sinar Bonana	42	139.208.400.000
	Total	1.685	2.667.168.467.007

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

DAFTAR 29.B

Surat Berharga Eks BPPN

No.	Nama Aset	Nilai Aset
a. Corporate Bonds		
1	Dgs International Finance Co.	835.000
2	Bank Dagang Nasional Indonesia	38.282.123.925
3	Tpe International Finance Co. Bv	3.914.062.500
4	Ciputra Surya	38.750.000
5	Jakarta International Hotel	800.000.000
6	Mulia Glass Coupon	38.125.000
7	Mulia Keramik Coupon	38.125.000
8	Polysindo Eka Perkasa	526.050.000
9	Tpe International Finance Co. Bv	313.125.000
Total		43.951.196.425
b. Government Bond		
1	Bank Papan	500.000.000
2	Polysindo Eka Perkasa Medium Term Notes	1.427.328.042
3	Polysindo Eka Perkasa	701.400.000
4	Polysindo Eka Perkasa	1.340.571.458
5	Polysindo Eka Perkasa Medium Term Notes	150.300.000.000
6	Polysindo Eka Perkasa Medium Term Notes	7.218.608.400
7	Polysindo Eka Perkasa Medium Term Notes	7.258.287.600
Total		168.746.195.500
c. Non-Convertible Debentures		
1	Polysindo Eka Perkasa	5.000.000.000
Total		5.000.000.000
d. Miscellaneous		
1	Hutama Karya	8.350.000.000
2	Hutama Karya	8.350.000.000
3	Hutama Karya	8.350.000.000
4	Hutama Karya	41.750.000.000
Total		66.800.000.000
Total (a + b + c + d)		284.497.391.925

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

DAFTAR 29.B

Aset saham eks BPPN

No.	Nama Emiten	Nilai per 31 Desember 2012
a. Aset Saham Pada Kustodi Citibank		
1	Bank PDFCI	87.500
2	Bank Ficorinvest	20.000
3	Merck, Tbk.	4.000.000
4	Reksadana Perdana	22.404.107.500
5	Multi Sarana R. Agung	63.855.000
6	Bank Surya	240.000
7	Langgeng Makmur	17.659.805.610
8	PT Sierad Produce	1.535.092.000
9	Apac Citra Center	2.667.935.900
10	Apac Citra Centertex	3.109.155.100
11	Holcim Indonesia Tbk, Pt	24.322.375.000
12	Bank Dagang Nasional Indonesia Tbk	3.468.750
13	Sucaco	1.015.000
14	Sucaco	783.000.000
15	Aster Dharma Ind.	760.000
16	Mulia Industrindo	9.250.000.000
17	Perdana Inti Investama	2.462.575.000
18	Citatah Industri M	836.572.450
19	Citatah Industri M	3.065.186.486
20	Bank Dagang Nasional Indonesia Tbk	27.225
21	Gajah Tunggul	108.000
22	Lippo E-Net	14.000
23	Prima Alloy Steel	187.500
24	Trias Sentosa	17.400
Total		88.169.605.421
b. Aset Saham Pada DJKN		
1	PT Karabha Digdaya	418.734.567.643
2	PT Sukapraja Estetika Padang Golf	1.425.000.000
3	PT Aqua Golden Misisipi	312.000
4	PT Kabelindo Murni	20.389.779.189
Total		440.549.658.832
Total (a + b)		528.719.264.253

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

DAFTAR 29.C

Surat Berharga Eks Kelolaan PT PPA

No.	Nama Aset	Jenis Surat Berharga	Nilai Aset
1.	Dharmala Intiutama	Obligasi	2.793.450.000
2.	Ometraco Multi Artha	Obligasi	6.499.457.694
3.	Ongko Intl Fin	Obligasi	4.317.150.000
4.	Ongko Intl Fin CO BV	Obligasi	215.857.500
5.	Pacific Intl CP	Obligasi	507.900.000
6.	Pacific Intl CP	Obligasi	507.900.000
7.	Indonesia Bermuda	Reksadana	1.805.657.589
8.	Mulia Keramik I/97 – Mulia Ind Wrt SRA-SL	Warrants	4.934.713
9.	Mulia Keramik I/97 – Mulia Ind Wrt SRA-SL	Warrants	4.934.713
Total			16.657.242.209,00

Saham (Non Bank) Eks Kelolaan PT PPA

No.	Nama Emiten	Nilai per 31 Desember 2012 (Unaudited)	Nilai per 31 Desember 2011 (Audited)
1	PT Asuransi Jiwa Intan Life	223.500	223.500
2	PT Bunas Multifinance	75.000.000	75.000.000
3	PT Danaloka Pratama	141.550.000	141.550.000
4	PT Pam a Indonesia Ltd	28.310.000	28.310.000
5	PT Pam a Ventura Indonesia	234.871	234.871
6	PT Servitia Finance	1.500.000.000	1.500.000.000
7	PT Apikanusa Lintasarta	125.015.692	125.015.692
8	PT Bhakti Sarana Ventura	385.154.000	385.154.000
9	PT Dbs Securities Indonesia	0	500.000.000
10	PT Sarana Jambi Ventura	124.823.000	124.823.000
11	PT Sarana Kalbar Ventura	193.544.000	193.544.000
12	PT Sarana Kalsel Ventura	77.950.000	77.950.000
13	PT Sarana Maluku Ventura	31.286.000	31.286.000
14	PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia	8.819.163.000	8.819.163.000
15	PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri	1	1
16	PT Asuransi Putra Mandiri	335.020.000	335.020.000
17	BDNI Reksadana (PT Reksadana Perdana)	6.000.000.000	6.000.000.000
18	PT Sarana Sulut Ventura	61.000.000	61.000.000
19	PT Sarana Sumbang Ventura	275.625.000	275.625.000
20	PT Sarana Irian Ventura	66.150.000	66.150.000
21	PT SMBC Indonesia Finance	3.750.000.000	3.750.000.000
Total		21.990.049.064	22.490.049.064

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

DAFTAR 29.D

Saham yang diserahkan kelolaan kepada PT PPA

Saham Bank					
No	Emiten	31-Des-12		31-Des-11	
		Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	PT Bank Panin	1	287.482.800,00	1	490.505.136,00
2	PT Bank Permata	1	24.672.629.000,00	1	35.949.260.546,00
Jumlah		2	24.960.111.800,00	2	36.439.765.682,00

Saham non bank					
No	Emiten	31-Des-12		31-Des-11	
		Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	PT Sejahtera Eka Graha	1	22.470.000.000,00	1	22.470.000.000,00
2	PT Tugu Reasuransi Indonesia	1	34.680.531.082,00	1	28.415.673.000,00
3	PT Asia Natural Resources	1	1.210.357.500,00	1	1.210.357.500,00
4	PT Jemblo Cable Company	1	431.315.500,00	1	406.746.000,00
5	PT Bina Prima Perdana	1	0		-
6	PT Tuban Petrochemical Industries	1	8.750.000,00		-
Jumlah		6	58.800.954.082,00	4	52.502.776.500,00
Total			83.761.065.882,00		88.942.542.182

**UTANG KEPADA PIHAK KETIGA DAN PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA
PER 31 DESEMBER 2012 DAN 31 DESEMBER 2011**

No.	BA	Kementerian Negara/Lembaga	UTANG KEPADA PIHAK KETIGA		PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA	
			31 Desember 2012 Audited	31 Desember 2011 Audited	31 Desember 2012 Audited	31 Desember 2011 Audited
1	001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	126.831.868	102.093.063	86.751.000	-
2	002	Dewan Perwakilan Rakyat	1.122.258.712	-	773.655.004	-
3	004	Badan Pemeriksa Keuangan	35.331.449.393	27.009.591.017	169.368.266	189.313.796
4	005	Mahkamah Agung	269.099.975.148	7.122.222.207	309.260.111	295.004.531
5	006	Kejaksaan Agung	11.986.441.141	52.575.145.987	214.061.690	-
6	007	Sekretariat Negara	93.904.514.134	58.484.424.331	50.627.476	99.400.454
7	010	Kementerian Dalam Negeri	49.497.775.823	240.630.523	1.419.063.688	375.304.509
8	011	Kementerian Luar Negeri	6.873.378.890	6.377.506.628	134.087.731	134.087.731
9	012	Kementerian Pertahanan	5.546.502.560.030	3.238.769.595.999	-	-
10	013	Kementerian Hukum dan HAM RI	53.795.140.417	11.601.007.436	-	60.618.001.500
11	015	Kementerian Keuangan	39.060.216.445	17.174.929.541	4.367.814.771	1.583.445.635
12	018	Kementerian Pertanian	171.647.290.347	6.125.215.601	659.365.245	396.576.000
13	019	Kementerian Perindustrian	963.336.597	952.352.095	6.040.207.934	506.916.100
14	020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	2.427.083.259	26.996.099.190	99.884.602	42.459.875

No.	BA	Kementerian Negara/Lembaga	UTANG KEPADA PIHAK KETIGA		PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA	
			31 Desember 2012 Audited	31 Desember 2011 Audited	31 Desember 2012 Audited	31 Desember 2011 Audited
15	022	Kementerian Perhubungan	103.357.423.491	131.518.928.284	19.802.839.526	19.480.696.134
16	023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	955.716.455.141	355.436.295.118	434.691.143.607	51.063.936.616
17	024	Kementerian Kesehatan	1.004.941.446.608	757.292.903.523	24.893.173.943	99.880.268.663
18	025	Kementerian Agama	1.891.674.557.774	3.557.037.840.052	9.214.660.077	9.154.923.970
19	026	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	687.757.769	789.017.524	246.512.196	600.986.660
20	027	Kementerian Sosial	757.165.652	429.229.942		
21	029	Kementerian Kehutanan	7.378.565.495	1.595.997.772		
22	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	41.862.991.794	1.565.102.403	281.560.000	
23	033	Kementerian Pekerjaan Umum	10.189.555.693	90.256.723.878	186.931.450	464.723.968
24	034	Kemendiknas Politik dan Keamanan	141.022.199	89.281.032	90.833.333	67.500.000
25	035	Kemendiknas Perencanaan	42.169.490	80.660.791		
26	036	Kemendiknas Kesejahteraan Rakyat	70.869.061	502.912.927		
27	040	Kemendiknas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	12.924.138.691	1.770.921.240	138.000.000	18.333.333
28	041	Kementerian BUMN		16.772.500	311.838.667	
29	042	Kemendiknas Riset dan Teknologi	5.116.828.459	821.660.991	205.645.344	
30	043	Kemendiknas Lingkungan Hidup	879.908.257	73.607.371	76.600.000	109.200.000
31	044	Kemendiknas KUKM	3.095.961.959	2.908.617.548	10.474.672.148	7.485.950.149

DAFTAR 30

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

No.	BA	Kementerian Negara/Lembaga	UTANG KEPADA PIHAK KETIGA		PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA	
			31 Desember 2012 Audited	31 Desember 2011 Audited	31 Desember 2012 Audited	31 Desember 2011 Audited
32	047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan	2.850.090.666	96.293.000		
33	048	Kementerian PAN	154.497.108	123.191.960		
34	050	Badan Intelijen Negara	2.003.361.402	.		
35	051	Lembaga Sandi Negara	516.892.448	311.794.000		
36	054	Badan Pusat Statistik	3.721.781.542	2.774.401.823		
37	055	Kementerian Negara PPN/ Bappenas	35.485.301	.		
38	056	Badan Pertahanan Nasional	11.423.683.792	9.885.856.284	29.432.450.447	17.406.378.211
39	059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	4.447.078.101	1.713.855.113	6.168.415.488.349	6.040.228.256.095
40	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	268.652.578.034	83.127.696.097	4.702.701.056	9.252.117.772
41	063	Badan Pengawas Obat dan Makanan	69.558.806.730	926.332.863	14.666.560	16.380.000
42	064	Lembaga Ketahanan Nasional	2.684.794.099	6.201.000		
43	065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	307.258.671	626.741.873	610.863.660	.
44	066	Badan Markotika Nasional	56.109.259.090	8.118.498.620		
45	067	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	14.057.177.400	133.951.193		
46	068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	144.198.073	223.609.345		
47	074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	134.900.972	.		
48	075	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	2.004.752.106	655.648.487		

DAFTAR NERACA 424

DAFTAR 30

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

No.	BA	Kementerian Negara/Lembaga	UTANG KEPADA PIHAK KETIGA		PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA	
			31 Desember 2012 Audited	31 Desember 2011 Audited	31 Desember 2012 Audited	31 Desember 2011 Audited
49	076	Komisi Pemilihan Umum	557.722.122	369.770.658		
50	077	Mahkamah Konstitusi	377.155.405	10.055.990		93.108.000
51	078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	14.983.078	.	10.604.141	18.089.388
52	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	10.431.755.820	502.174.953	6.914.271	2.513.590
53	080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	11.933.130.260	1.655.754.362	203.388.250	177.566.250
54	081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	8.310.180.650	1.499.328.181	196.250.000	.
55	082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	594.569.452	356.453.745	3.967.792	.
56	084	Badan Standardisasi Nasional	11.987.625	15.625.618	720.066.192	248.500.000
57	085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	418.622.600	300.260.443		
58	086	Lembaga Administrasi Negara	1.362.287.357	191.746.148	728.950.000	903.678.988
59	087	Arsip Nasional Republik Indonesia	2.020.211.749	1.589.126.556		
60	088	Badan Kepegawaian Negara	850.735.555	165.842.208	86.451.000	96.000.000
61	089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	1.076.608.864	1.468.435.491	439.178.505	112.224.813
62	090	Kementerian Perdagangan	173.988.345	141.236.531	355.750.739	652.345.859
63	091	Kemen Perumahan Rakyat	977.776.254.227	9.866.226.118		
64	092	Kemen Pemuda dan Olah Raga	540.792.328	1.225.169.654	142.450.000	1.650.000
65	093	Komisi Pemberantasan Korupsi	3.171.908.147	3.828.046.940		

DAFTAR NERACA 425

DAFTAR 30

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

No.	BA	Kementerian Negara/Lembaga	UTANG KEPADA PIHAK KETIGA		PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA	
			31 Desember 2012 Audited	31 Desember 2011 Audited	31 Desember 2012 Audited	31 Desember 2011 Audited
66	095	Dewan Perwakilan Daerah	337.347.888	341.437.793		
67	100	Komisi Yudisial	11.203.459	19.500.000		9.798.000
68	103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	1.476.602.706	364.836.512.063		
69	104	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja	543.924.482	707.847.172	411.837.430	87.677.562
70	105	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	39.357.679	.		
71	106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	130.961.136	.		
72	107	Badan SAR Nasional	2.458.823.721	492.047.967	247.553.000	.
73	108	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	233.049.151	24.560.405		
74	109	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	105.900.646	.		
75	110	Ombudsman Republik Indonesia	28.545.197	41.580.400		
76	112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan	497.250.059.265	.		
77	113	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	25.465.390	.		
78	114	Sekretariat Kabinet	664.661.283	.		
79	115	Badan Pengawas Pemilihan Umum	48.765.000	.		
80	116	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	7.549.030.897	.		
81	117	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	101.271.821.106	.		
82	999.03	Investasi Pemerintah				2.318.040.768.528

DAFTAR NERACA 426

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

DAFTAR 30

No.	BA	Kementerian Negara/Lembaga	UTANG KEPADA PIHAK KETIGA		PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA	
			31 Desember 2012 Audited	31 Desember 2011 Audited	31 Desember 2012 Audited	31 Desember 2011 Audited
83	999.05	Transfer ke Daerah	16.039.742.327.165	18.292.725.677.411		
84	999.08	Belanja Lain-lain	186.675.433.374	3.495.984.368.048		
85	999.992	BUN (Dit. PKN)	1.119.941.138.161	1.137.834.225.993		
TOTAL			29.738.138.976.562	31.780.634.369.020	6.721.668.089.201	8.639.914.082.680

DAFTAR NERACA 427

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

DAFTAR 31.A

BAGIAN LANCAR UTANG OBLIGASI DALAM NEGERI
Per 31 Desember 2012

(Dalam Rupiah)

No.	Seri	Maturity Date	Principle Outstanding	Rate (%)	Unamortized Prem(+)/Disc(-)	Book Value
FIXED RATE BOND			33.013.173.000.000		(71.468.618.000)	32.941.704.382.000
1	FR0019	15-Jun-13	10.477.941.000.000	14,25000%	-	10.477.941.000.000
2	FR0020	15-Dec-13	9.596.751.000.000	11,00000%	-	9.596.751.000.000
3	FR0033	15-Mar-13	8.500.474.000.000	12,50000%	4.975.734.000	8.505.449.734.000
4	FR0049	15-Sep-13	4.438.607.000.000	9,00000%	(76.444.352.000)	4.362.162.648.000
ORI			10.475.875.000.000		-	10.475.875.000.000
1	ORI005	15-Sep-13	2.662.875.000.000	11,45000%	-	2.662.875.000.000
2	ORI007	15-Aug-13	7.813.000.000.000	7,95000%	-	7.813.000.000.000
ZERO COUPON			1.263.000.000.000		(32.112.311.000)	1.230.887.689.000
1	ZC005	20-Feb-13	1.263.000.000.000		(32.112.311.000)	1.230.887.689.000
SURAT UTANG PEMERINTAH			5.274.926.878.452		-	5.274.926.878.452
1	SU002	1-Apr-13	378.767.858.000	0,10000%	-	378.767.858.000
2	SU002	1-Oct-13	397.706.250.899	0,10000%	-	397.706.250.899
3	SU004	1-Jun-13	957.115.457.252	0,10000%	-	957.115.457.252
4	SU004	1-Dec-13	1.004.971.230.115	0,10000%	-	1.004.971.230.115
5	SU007	1-Feb-13	914.724.307.492	0,10000%	-	914.724.307.492
6	SU007	1-Aug-13	960.460.522.867	0,10000%	-	960.460.522.867
7	SRBI-01	1-Feb-13	322.527.439.916	0,10000%	-	322.527.439.916
8	SRBI-01	1-Aug-13	338.653.811.911	0,10000%	-	338.653.811.911
BAGIAN LANCAR SUN JK PJG (a)			50.026.974.878.452		(103.580.929.000)	49.923.393.949.452
SPN			22.820.000.000.000		(323.235.977.000)	22.496.764.023.000
1	SPN12130111	11-Jan-13	3.350.000.000.000	-	(4.035.211.000)	3.345.964.789.000
2	SPN12130208	8-Feb-13	1.750.000.000.000	-	(5.711.134.000)	1.744.288.866.000
3	SPN12130307	7-Mar-13	2.100.000.000.000	-	(14.801.398.000)	2.085.198.602.000
4	SPN12130404	4-Apr-13	2.900.000.000.000	-	(28.329.934.000)	2.871.670.066.000
5	SPN12130502	2-May-13	900.000.000.000	-	(11.702.909.000)	888.297.091.000
6	SPN12130606	6-Jun-13	1.880.000.000.000	-	(33.020.951.000)	1.846.979.049.000
7	SPN12130704	4-Jul-13	1.550.000.000.000	-	(33.392.283.000)	1.516.607.717.000
8	SPN12130812	12-Aug-13	990.000.000.000	-	(26.190.296.000)	963.809.704.000
9	SPN12130912	12-Sep-13	2.000.000.000.000	-	(62.065.220.000)	1.937.934.780.000
10	SPN03130107	7-Jan-13	1.000.000.000.000	-	(762.504.000)	999.237.496.000
11	SPN12131007	7-Oct-13	1.200.000.000.000	-	(39.396.781.000)	1.160.603.219.000
12	SPN03130213	13-Feb-13	1.000.000.000.000	-	(4.449.125.000)	995.550.875.000
13	SPN12131113	13-Nov-13	1.000.000.000.000	-	(38.287.582.000)	961.712.418.000
14	SPN03130304	4-May-13	700.000.000.000	-	(2.346.042.000)	697.653.958.000
15	SPN12131204	20-Feb-13	500.000.000.000	-	(18.744.607.000)	481.255.393.000
SUN JANGKA PENDEK (b)			22.820.000.000.000		(323.235.977.000)	22.496.764.023.000
SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SYARIAH (d)			195.000.000.000		(2.480.479.000)	192.519.521.000
1	SPNS03042013	3-Apr-13	90.000.000.000	-	(1.052.020.000)	88.947.980.000
2	SPNS17042013	17-Apr-13	105.000.000.000	-	(1.428.459.000)	103.571.541.000
SBSN			8.593.860.000.000		(1.468.160.000)	8.582.391.840.000
1	SR002	10-Feb-13	8.033.860.000.000	8,70000%	-	8.033.860.000.000
2	IFR004	15-Oct-13	560.000.000.000	9,00000%	(1.468.160.000)	548.531.840.000
SDHI			4.250.000.000.000		-	4.250.000.000.000
1	SDHI 2013A	17-May-13	4.250.000.000.000	7,55000%	-	4.250.000.000.000
BAGIAN LANCAR SBSN RUPIAH (b)			12.833.860.000.000		(1.468.160.000)	12.832.391.840.000
TOTAL SBN JANGKA PENDEK			85.875.834.878.452		(430.765.545.000)	85.445.069.333.452

DAFTAR NERACA 428

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

DAFTAR 31 B

Utang Bunga/Imbalan (Accrued Interest/Return) - Surat Berharga Negara
Per 31 Desember 2012

(Dalam Rupiah)

No.	Seri	Maturity Date	Principle	Rate (%)	Accrued Interest
FIXED RATE BOND			576.240.761.000.000		13.473.294.459.092
1	FR0019	15/06/2013	10.477.341.000.000	14,25000%	69.726.704.355
2	FR0020	15/12/2013	9.596.751.000.000	14,27500%	63.981.538.917
3	FR0026	15/10/2014	13.126.479.000.000	11,00000%	309.404.236.509
4	FR0027	15/06/2015	19.304.000.000.000	9,50000%	85.651.848.000
5	FR0028	15/07/2017	14.055.716.000.000	10,00000%	649.317.856.336
6	FR0030	15/05/2016	10.491.000.000.000	10,75000%	146.422.887.000
7	FR0031	15/11/2020	17.899.000.000.000	11,00000%	255.633.518.000
8	FR0032	15/07/2018	1.434.000.000.000	15,00000%	99.366.162.000
9	FR0033	15/03/2013	8.500.474.000.000	12,50000%	317.008.176.882
10	FR0034	15/06/2021	16.756.400.000.000	12,80000%	100.169.759.200
11	FR0035	15/06/2022	11.023.750.000.000	12,90000%	66.418.093.750
12	FR0036	15/09/2019	10.735.500.000.000	11,50000%	368.324.269.500
13	FR0037	15/09/2026	2.450.000.000.000	12,00000%	87.712.450.000
14	FR0038	15/08/2018	2.920.757.000.000	11,60000%	127.972.967.955
15	FR0039	15/08/2023	4.175.000.000.000	11,75000%	185.294.850.000
16	FR0040	15/09/2025	26.474.000.000.000	11,00000%	868.823.732.000
17	FR0042	15/07/2027	14.774.100.000.000	10,25000%	699.568.409.100
18	FR0043	15/07/2022	14.417.000.000.000	10,25000%	682.659.367.000
19	FR0044	15/09/2024	18.014.000.000.000	10,00000%	537.429.676.000
20	FR0045	15/05/2037	6.400.000.000.000	9,75000%	81.017.600.000
21	FR0046	15/07/2023	16.855.000.000.000	9,50000%	739.698.530.000
22	FR0047	15/02/2028	20.840.000.000.000	10,00000%	787.168.480.000
23	FR0048	15/09/2018	5.675.970.000.000	9,00000%	152.405.470.470
24	FR0049	15/09/2013	4.438.607.000.000	9,00000%	119.181.036.557
25	FR0050	15/07/2038	15.686.000.000.000	10,50000%	760.849.430.000
26	FR0051	15/05/2014	2.282.123.000.000	11,25000%	33.332.688.538
27	FR0052	15/08/2030	23.500.000.000.000	10,50000%	932.010.000.000
28	FR0053	15/07/2021	19.123.793.000.000	8,25000%	728.826.875.023
29	FR0054	15/07/2031	27.096.000.000.000	9,50000%	1.189.135.056.000
30	FR0055	15/09/2016	14.850.000.000.000	7,37500%	326.744.550.000
31	FR0056	15/09/2026	17.164.000.000.000	8,37500%	428.859.704.000
32	FR0057	15/05/2041	13.550.000.000.000	9,50000%	167.125.700.000
33	FR0058	15/06/2032	42.798.000.000.000	8,25000%	164.900.694.000
34	FR0059	15/05/2027	26.630.000.000.000	7,00000%	242.013.440.000
35	FR0060	15/04/2017	11.600.000.000.000	6,25000%	155.358.800.000
36	FR0061	15/05/2022	29.700.000.000.000	7,00000%	269.913.600.000
37	FR0062	15/04/2042	12.000.000.000.000	6,37500%	163.932.000.000
38	FR0063	15/05/2023	10.550.000.000.000	5,62500%	77.046.650.000
39	FR0064	15/05/2028	9.976.000.000.000	6,12500%	79.329.152.000
40	FR0065	15/05/2033	13.850.000.000.000	6,62500%	119.137.700.000
41	FR0066	15/05/2018	5.050.000.000.000	5,25000%	34.420.800.000
ORI			34.152.620.000.000		115.220.237.595
1	ORI005	15/09/2013	2.662.875.000.000	11,45000%	13.934.824.875
2	ORI007	15/08/2013	7.813.000.000.000	7,95000%	28.384.629.000

DAFTAR NERACA 429

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

DAFTAR 31 B

Utang Bunga/Imbalan (Accrued Interest/Return) - Surat Berharga Negara
Per 31 Desember 2012

(Dalam Rupiah)

No.	Seri	Maturity Date	Principle	Rate (%)	Accrued Interest
3	ORI008	15/10/2014	11.000.000.000.000	7,30000%	36.696.000.000
4	ORI009	15/10/2015	12.676.745.000.000	6,25000%	36.204.783.720
VARIABLE RATE BOND			122.754.933.000.000		562.986.830.700
1	VR0019	25/12/2014	9.411.226.000.000	4,01819%	7.350.167.506
2	VR0020	25/04/2015	9.164.007.000.000	4,01563%	67.996.931.940
3	VR0021	25/11/2015	7.436.328.000.000	3,72500%	27.849.048.360
4	VR0022	25/03/2016	9.016.749.000.000	4,01819%	7.042.080.969
5	VR0023	25/10/2016	8.652.056.000.000	4,01563%	64.198.255.520
6	VR0024	25/02/2017	9.909.300.000.000	3,72500%	37.110.328.500
7	VR0025	25/09/2017	3.209.300.000.000	4,01819%	2.506.463.300
8	VR0026	25/01/2018	5.442.142.000.000	4,01563%	40.380.693.640
9	VR0027	25/07/2018	5.442.142.000.000	4,01563%	40.380.693.640
10	VR0028	25/08/2018	7.033.994.000.000	3,72500%	26.342.307.530
11	VR0029	25/08/2019	12.212.320.000.000	3,72500%	45.735.138.400
12	VR0030	25/12/2019	10.503.015.000.000	4,01819%	8.202.854.715
13	VR0031	25/07/2020	25.322.354.000.000	4,01563%	187.891.866.680
SU DAN SRBI			240.144.465.084.155		80.992.417.836
1	SU002	01/04/2025	18.077.490.987.816	0,10000%	4.556.518.276
2	SU004	01/12/2025	48.921.476.666.168	0,10000%	4.289.006.173
3	SU007	01/08/2025	46.754.718.593.138	0,10000%	19.598.553.273
4	SRBI01	01/08/2033	126.390.778.837.033	0,10000%	52.548.340.114
SBSN			98.622.775.000.000		1.187.093.504.560
1	IFR001	15/08/2033	2.714.700.000.000	11,80000%	120.996.893.700
2	IFR002	15/08/2018	1.985.000.000.000	11,95000%	89.596.945.000
3	IFR003	15/09/2015	2.632.000.000.000	9,25000%	72.635.304.000
4	IFR004	15/10/2013	550.000.000.000	9,00000%	10.607.300.000
5	IFR005	15/01/2017	1.171.000.000.000	9,00000%	48.685.496.000
6	IFR006	15/03/2030	2.175.000.000.000	10,25000%	66.511.500.000
7	IFR007	15/01/2025	1.547.000.000.000	10,25000%	73.251.997.000
8	IFR008	15/03/2020	252.000.000.000	8,80000%	6.616.008.000
9	IFR010	15/02/2036	4.110.000.000.000	10,00000%	155.242.920.000
10	SDHI2013A	17/05/2013	4.250.000.000.000	7,55000%	12.937.000.000
11	SDHI2014A	09/08/2014	2.855.000.000.000	7,36000%	12.993.105.000
12	SDHI2014B	25/08/2014	336.000.000.000	7,30000%	461.664.000
13	SDHI2014C	07/10/2014	2.000.000.000.000	7,13000%	9.584.000.000
14	SDHI2014D	11/02/2014	6.000.000.000.000	7,85000%	26.586.000.000
15	SDHI2015A	28/06/2015	1.000.000.000.000	5,21000%	560.000.000
16	SDHI2016A	27/04/2016	1.000.000.000.000	5,03000%	676.000.000
17	SDHI2017A	21/03/2017	2.000.000.000.000	5,16000%	3.052.000.000
18	SDHI2018A	30/05/2018	2.500.000.000.000	6,06000%	815.000.000
19	SDHI2019A	21/03/2019	3.000.000.000.000	5,46000%	4.845.000.000
20	SDHI2020A	27/04/2020	1.500.000.000.000	5,79000%	1.167.000.000
21	SDHI2020B	28/06/2020	1.000.000.000.000	6,20000%	667.000.000

DAFTAR NERACA 430

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

DAFTAR 31 B

Utang Bunga/Imbalan (Accrued Interest/Return) - Surat Berharga Negara
Per 31 Desember 2012

(Dalam Rupiah)

No.	Seri	Maturity Date	Principle	Rate (%)	Accrued Interest
22	SDHI2021A	11/04/2021	2.000.000.000.000	8,0000%	9.032.000.000
23	SDHI2021B	17/10/2021	3.000.000.000.000	7,1600%	8.661.000.000
24	SDHI2022A	21/03/2022	3.342.000.000.000	5,9100%	5.841.816.000
25	SR-002	10/02/2013	8.033.860.000.000	8,7000%	41.334.209.700
26	SR-003	23/02/2014	7.341.410.000.000	8,1500%	14.477.260.520
27	SR-004	21/09/2015	13.613.805.000.000	6,2500%	25.158.311.640
28	PBS001	15/02/2018	5.920.000.000.000	4,4500%	99.503.360.000
29	PBS002	15/01/2022	1.208.000.000.000	5,4500%	30.413.816.000
30	PBS003	15/01/2027	2.847.000.000.000	6,0000%	78.910.299.000
31	PBS004	15/02/2037	6.739.000.000.000	6,1000%	155.273.299.000
INTERNATIONAL BOND			264.907.350.000.000		5.183.426.483.222
1	RI0014	10/03/2014	12.571.000.000.000	6,7500%	261.633.937.500
2	RI0015	20/04/2015	9.670.000.000.000	7,2500%	138.267.569.444
3	RI0016	15/01/2016	8.703.000.000.000	7,5000%	300.978.750.000
4	RI0017	09/03/2017	9.670.000.000.000	6,8750%	206.830.555.556
5	RI0018	17/01/2018	18.373.000.000.000	6,8750%	575.432.152.778
6	RI0035	12/10/2035	15.472.000.000.000	8,5000%	288.595.777.778
7	RI0037	17/02/2037	14.505.000.000.000	6,6250%	357.689.270.833
8	RI0038	17/01/2038	19.340.000.000.000	7,7500%	682.809.444.444
9	RI0320	13/03/2020	19.340.000.000.000	5,8750%	340.867.500.000
10	RI140504	04/05/2014	9.670.000.000.000	10,3750%	158.849.895.833
11	RI190304	04/03/2019	19.340.000.000.000	11,6250%	730.689.375.000
12	SNI14	23/04/2014	6.285.500.000.000	8,8000%	104.478.977.778
13	SNI18	21/11/2018	9.670.000.000.000	4,0000%	42.977.777.778
14	SNI22	21/11/2022	9.670.000.000.000	3,3000%	35.456.666.667
15	JPYSH1907	29/07/2019	3.918.950.000.000	2,7300%	45.172.430.333
16	JPYSB2010	12/11/2020	6.718.200.000.000	1,6000%	14.630.746.667
17	RIJPY1122	22/11/2022	6.718.200.000.000	1,1300%	8.224.196.500
18	RI0521	05/05/2021	24.175.000.000.000	4,8750%	183.327.083.333
19	RI0142	17/01/2042	21.757.500.000.000	5,2500%	520.366.875.000
20	RI0422	25/04/2022	19.340.000.000.000	5,2500%	186.147.500.000
TOTAL			1.336.822.904.084.150		20.603.013.933.005

* Kurs Tengah BI JPY pada tanggal pelaporan (28 Des 2012) adalah Rp111,97

* Kurs Tengah BI USD pada tanggal pelaporan (28 Des 2012) adalah Rp9,670

DAFTAR NERACA 431

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

DAFTAR 32.A

**Surat Berharga Negara Jangka Panjang Rupiah
Per 31 Desember 2012**

(Dalam Rupiah)

No.	Seri	Maturity Date	Principle Outstanding	Rate (%)	Unamortized Prem(+)/Disc(-)	BookValue
FIXED RATE BOND			543.227.588.000.000		4.460.562.331.509	547.688.150.331.509
1	FR0026	15/10/2014	13.126.479.000.000	11,00000%	(99.163.077.000)	13.027.315.923.000
2	FR0027	15/06/2015	19.304.000.000.000	9,50000%	50.157.776.509	19.354.157.776.509
3	FR0028	15/07/2017	14.055.716.000.000	10,00000%	223.320.750.000	14.279.036.750.000
4	FR0030	15/05/2016	10.491.000.000.000	10,75000%	(128.381.884.000)	10.362.618.116.000
5	FR0031	15/11/2020	17.899.000.000.000	11,00000%	(342.053.378.000)	17.556.946.622.000
6	FR0032	15/07/2018	1.434.000.000.000	15,00000%	(32.267.061.000)	1.401.732.939.000
7	FR0034	15/06/2021	16.756.400.000.000	12,80000%	183.761.020.000	16.940.161.020.000
8	FR0035	15/06/2022	11.023.750.000.000	12,90000%	(20.135.106.000)	11.003.614.894.000
9	FR0036	15/09/2019	10.735.500.000.000	11,50000%	(3.443.357.000)	10.732.056.643.000
10	FR0037	15/09/2026	2.450.000.000.000	12,00000%	(108.031.371.000)	2.341.968.629.000
11	FR0038	15/08/2018	2.920.757.000.000	11,60000%	(14.668.667.000)	2.906.088.333.000
12	FR0039	15/08/2023	4.175.000.000.000	11,75000%	(37.812.878.000)	4.137.187.122.000
13	FR0040	15/09/2025	26.474.000.000.000	11,00000%	1.130.808.744.000	27.604.808.744.000
14	FR0042	15/07/2027	14.774.100.000.000	10,25000%	(101.093.198.000)	14.673.006.802.000
15	FR0043	15/07/2022	14.417.000.000.000	10,25000%	(92.395.229.000)	14.324.604.771.000
16	FR0044	15/09/2024	18.014.000.000.000	10,00000%	(1.242.730.385.000)	16.771.269.615.000
17	FR0045	15/05/2037	6.400.000.000.000	9,75000%	(23.368.744.000)	6.376.631.256.000
18	FR0046	15/07/2023	16.855.000.000.000	9,50000%	(1.852.703.321.000)	15.002.296.679.000
19	FR0047	15/02/2028	20.840.000.000.000	10,00000%	(1.368.473.042.000)	19.471.526.958.000
20	FR0048	15/09/2018	5.675.970.000.000	9,00000%	(225.410.677.000)	5.450.559.323.000
21	FR0050	15/07/2038	15.686.000.000.000	10,50000%	(428.761.117.000)	15.257.238.883.000
22	FR0051	15/05/2014	2.282.123.000.000	11,25000%	(22.698.799.000)	2.259.424.201.000
23	FR0052	15/08/2030	23.500.000.000.000	10,50000%	(281.644.707.000)	23.218.355.293.000
24	FR0053	15/07/2021	19.123.793.000.000	8,25000%	601.374.141.000	19.725.167.141.000
25	FR0054	15/07/2031	27.096.000.000.000	9,50000%	16.216.315.000	27.112.216.315.000
26	FR0055	15/09/2016	14.850.000.000.000	7,37500%	(27.674.585.000)	14.822.325.415.000
27	FR0056	15/09/2026	17.164.000.000.000	8,37500%	(343.798.211.000)	16.820.201.789.000
28	FR0057	15/05/2041	13.550.000.000.000	9,50000%	587.122.234.000	14.137.122.234.000
29	FR0058	15/06/2032	42.798.000.000.000	8,25000%	5.658.827.629.000	48.456.827.629.000
30	FR0059	15/06/2027	26.630.000.000.000	7,00000%	1.005.759.351.000	27.635.759.351.000
31	FR0060	15/04/2017	11.600.000.000.000	6,25000%	306.432.274.000	11.906.432.274.000
32	FR0061	15/05/2022	29.700.000.000.000	7,00000%	1.778.453.694.000	31.478.453.694.000
33	FR0062	15/04/2042	12.000.000.000.000	6,37500%	(21.768.726.000)	11.978.231.274.000
34	FR0063	15/05/2023	10.550.000.000.000	5,62500%	(165.676.977.000)	10.384.323.023.000
35	FR0064	15/05/2028	9.976.000.000.000	6,12500%	(60.619.377.000)	9.915.380.623.000
36	FR0065	15/05/2033	13.850.000.000.000	6,62500%	(31.020.191.000)	13.818.979.809.000
37	FR0066	15/05/2018	5.050.000.000.000	5,25000%	(5.877.532.000)	5.044.122.468.000
ORI			23.676.745.000.000		-	23.676.745.000.000
1	ORI008	15/10/2014	11.000.000.000.000	7,30000%	-	11.000.000.000.000
2	ORI009	15/10/2015	12.676.745.000.000	6,25000%	-	12.676.745.000.000
VARIABLE RATE BOND			122.754.933.000.000		-	122.754.933.000.000
1	VR0019	25/12/2014	9.411.226.000.000	4,01819%	-	9.411.226.000.000
2	VR0020	25/04/2015	9.164.007.000.000	4,01563%	-	9.164.007.000.000
3	VR0021	25/11/2015	7.436.328.000.000	3,72500%	-	7.436.328.000.000
4	VR0022	25/03/2016	9.016.749.000.000	4,01819%	-	9.016.749.000.000
5	VR0023	25/10/2016	8.652.056.000.000	4,01563%	-	8.652.056.000.000
6	VR0024	25/02/2017	9.909.300.000.000	3,72500%	-	9.909.300.000.000
7	VR0025	25/09/2017	3.209.300.000.000	4,01819%	-	3.209.300.000.000
8	VR0026	25/01/2018	5.442.142.000.000	4,01563%	-	5.442.142.000.000
9	VR0027	25/07/2018	5.442.142.000.000	4,01563%	-	5.442.142.000.000
10	VR0028	25/08/2018	7.033.994.000.000	3,72500%	-	7.033.994.000.000
11	VR0029	25/08/2019	12.212.320.000.000	3,72500%	-	12.212.320.000.000
12	VR0030	25/12/2019	10.503.015.000.000	4,01819%	-	10.503.015.000.000

DAFTAR NERACA 432

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

DAFTAR 32.A

**Surat Berharga Negara Jangka Panjang Rupiah
Per 31 Desember 2012**

(Dalam Rupiah)

No.	Seri	Maturity Date	Principle Outstanding	Rate (%)	Unamortized Prem(+)/Disc(-)	Book Value
13	VR0031	25/07/2020	25.322.354.000.000	4,01563%	-	25.322.354.000.000
SURAT UTANG PEMERINTAH			234.869.538.205.703		-	234.869.538.205.703
1	SU002	01/04/2025	17.301.016.878.917	0,10000%	-	17.301.016.878.917
2	SU004	01/12/2025	46.959.389.978.801	0,10000%	-	46.959.389.978.801
3	SU007	01/08/2025	44.879.533.762.779	0,10000%	-	44.879.533.762.779
4	SRBI01	01/08/2033	125.729.597.585.206	0,10000%	-	125.729.597.585.206
Total SUN Jangka Panjang (a)			924.528.804.205.703		4.460.562.331.509	928.989.366.537.212
SBSN			85.788.915.000.000		(417.246.536.000)	85.371.668.464.000
1	IFR001	15/08/2033	2.714.700.000.000	11,80000%	-	2.714.700.000.000
2	IFR002	15/08/2018	1.985.000.000.000	11,95000%	-	1.985.000.000.000
3	IFR003	15/09/2015	2.632.000.000.000	9,25000%	31.408.858.000	2.663.408.858.000
4	IFR005	15/10/2017	1.171.000.000.000	9,00000%	30.220.669.000	1.201.220.669.000
5	IFR006	15/03/2030	2.175.000.000.000	10,25000%	14.146.668.000	2.189.146.668.000
6	IFR007	15/01/2025	1.547.000.000.000	10,25000%	4.048.283.000	1.551.048.283.000
7	IFR008	15/03/2020	252.000.000.000	8,80000%	(235.822.000)	251.764.178.000
8	IFR010	15/02/2036	4.110.000.000.000	10,00000%	339.733.383.000	4.449.733.383.000
9	SDHI2014A	09/08/2014	2.855.000.000.000	7,36000%	-	2.855.000.000.000
10	SDHI2014B	25/08/2014	336.000.000.000	7,30000%	-	336.000.000.000
11	SDHI2014C	07/10/2014	2.000.000.000.000	7,13000%	-	2.000.000.000.000
12	SDHI2014D	11/02/2014	6.000.000.000.000	7,85000%	-	6.000.000.000.000
13	SDHI2015A	28/06/2015	1.000.000.000.000	5,21000%	-	1.000.000.000.000
14	SDHI2016A	27/04/2016	1.000.000.000.000	5,03000%	-	1.000.000.000.000
15	SDHI2017A	21/03/2017	2.000.000.000.000	5,16000%	-	2.000.000.000.000
16	SDHI2018A	30/05/2018	2.500.000.000.000	6,06000%	-	2.500.000.000.000
17	SDHI2019A	21/03/2019	3.000.000.000.000	5,46000%	-	3.000.000.000.000
18	SDHI2020A	27/04/2020	1.500.000.000.000	5,79000%	-	1.500.000.000.000
19	SDHI2020B	28/06/2020	1.000.000.000.000	6,20000%	-	1.000.000.000.000
20	SDHI2021A	11/04/2021	2.000.000.000.000	8,00000%	-	2.000.000.000.000
21	SDHI2021B	17/10/2021	3.000.000.000.000	7,16000%	-	3.000.000.000.000
22	SDHI2022A	21/03/2022	3.342.000.000.000	5,91000%	-	3.342.000.000.000
27	SR-003	23/02/2014	7.341.410.000.000	8,15000%	-	7.341.410.000.000
28	SR-004	21/09/2015	13.613.805.000.000	6,25000%	-	13.613.805.000.000
29	PBS001	15/02/2018	5.920.000.000.000	4,45000%	(315.550.644.000)	5.604.449.356.000
30	PBS002	15/01/2022	1.208.000.000.000	5,45000%	(37.866.118.000)	1.170.133.882.000
31	PBS003	15/01/2027	2.847.000.000.000	6,00000%	(109.515.309.000)	2.737.484.691.000
32	PBS004	15/02/2037	6.739.000.000.000	6,10000%	(373.636.504.000)	6.365.363.496.000
Total SBSN Jangka Panjang (b)			85.788.915.000.000		(417.246.536.000)	85.371.668.464.000
TOTAL SBN Jangka Panjang (a + b)			1.010.317.719.205.700		4.043.315.795.509	1.014.361.035.001.210

DAFTAR NERACA 433

DAFTAR 32.B

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

SURAT BERHARGA NEGARA JANGKA PANJANG VALAS
Per 31 Desember 2012

No.	Seri	Maturity Date	Issued Principle Outstanding	Rate (%)	Accrued Indexation	Indexed Principle Outstanding	Unamortized		Book Value
							Prem(+)	Disc(-)	
(Dalam Rupiah)									
SUM VALAS (USD)			Rp220.031.126.678.670		(Rp1.895.373.321.330)	Rp221.926.500.000.000	Rp579.605.291.000	Rp222.506.105.291.000	
1	RI0014	10-Mar-14	Rp11.330.165.221.750	6,75000%	-Rp1.240.834.778.250	Rp12.571.000.000.000	(6.110.274.000)	12.564.889.726.000	
2	RI0015	20-Apr-15	Rp9.613.000.000.000	7,25000%	-Rp57.000.000.000	Rp9.670.000.000.000	(17.943.271.000)	9.652.056.729.000	
3	RI0016	15-Jan-16	Rp9.099.000.000.000	7,50000%	Rp396.000.000.000	Rp8.703.000.000.000	(20.627.530.000)	8.682.372.470.000	
4	RI0017	9-Mar-17	Rp9.370.000.000.000	6,87500%	-Rp300.000.000.000	Rp9.670.000.000.000	(31.350.993.000)	9.638.649.007.000	
5	RI0018	17-Jan-18	Rp17.804.549.364.750	6,87500%	-Rp568.450.635.250	Rp18.373.000.000.000	(145.808.104.000)	18.227.191.896.000	
6	RI0035	12-Oct-35	Rp15.436.000.000.000	8,50000%	-Rp36.000.000.000	Rp15.472.000.000.000	866.400.002.000	16.338.400.002.000	
7	RI0037	17-Feb-37	Rp13.575.648.587.500	6,62500%	-Rp929.351.412.500	Rp14.505.000.000.000	(174.544.207.000)	14.330.455.793.000	
8	RI0038	17-Jan-38	Rp18.729.115.845.000	7,75000%	-Rp610.884.155.000	Rp19.340.000.000.000	(351.201.372.000)	18.988.798.628.000	
9	RI0320	13-Mar-20	Rp18.550.000.000.000	5,87500%	-Rp790.000.000.000	Rp19.340.000.000.000	-	19.340.000.000.000	
10	RI 140504	4-May-14	Rp12.025.000.000.000	10,37500%	Rp2.355.000.000.000	Rp9.670.000.000.000	(16.983.163.000)	9.653.016.837.000	
11	RI 190304	4-Mar-19	Rp24.050.000.000.000	11,62500%	Rp4.710.000.000.000	Rp19.340.000.000.000	(107.467.414.000)	19.232.532.586.000	
12	RI0521	5-May-21	Rp21.441.986.560.150	4,87500%	-Rp2.733.013.439.850	Rp24.175.000.000.000	311.878.260.000	24.486.878.260.000	
13	RI0142	17-Jan-42	Rp20.626.661.099.520	5,25000%	-Rp1.130.838.900.480	Rp21.757.500.000.000	414.508.276.000	22.172.008.276.000	
14	RI0422	25-Apr-22	Rp18.380.000.000.000	3,75000%	-Rp960.000.000.000	Rp19.340.000.000.000	(141.144.919.000)	19.198.855.081.000	
SBSN VALAS (USD)			Rp25.705.804.674.903		Rp80.304.674.903	Rp25.625.500.000.000	Rp0	Rp25.625.500.000.000	

DAFTAR NERACA 434

DAFTAR 32.B

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

No.	Seri	Maturity Date	Issued Principle Outstanding	Rate (%)	Accrued Indexation	Indexed Principle Outstanding	Unamortized		Book Value
							Prem(+)	Disc(-)	
15	SN114	23-Apr-14	Rp7.031.748.227.903	8,80000%	Rp746.248.227.903	Rp6.285.500.000.000	-	-	6.285.500.000.000
16	SN118	21-Nov-18	Rp9.035.050.295.000	4,00000%	-Rp634.949.705.000	Rp9.670.000.000.000	-	-	9.670.000.000.000
17	SN122	21-Nov-22	Rp9.639.006.152.000	3,30000%	-Rp30.993.848.000	Rp9.670.000.000.000	-	-	9.670.000.000.000
	SUN VALAS (JPY)		17.198.408.000.000		-Rp156.942.000.000	17.355.350.000.000	-	-	17.355.350.000.000
18	RIJPY0719	29-Jul-19	3.695.300.000.000	2,73000%	-Rp223.650.000.000	3.918.950.000.000	-	-	3.918.950.000.000
19	RIJPY1120	12-Nov-20	6.490.800.000.000	1,60000%	-Rp227.400.000.000	6.718.200.000.000	-	-	6.718.200.000.000
20	RIJPY1122	22-Nov-22	7.012.308.000.000	1,13000%	Rp294.108.000.000	6.718.200.000.000	-	-	6.718.200.000.000
	Jumlah SBSN Valas		25.705.804.674.903		80.304.674.903	25.625.500.000.000	-	-	25.625.500.000.000
	Jumlah SUN Valas		237.229.534.678.670		(2.052.315.321.330)	239.281.850.000.000	579.605.291.000	579.605.291.000	Rp239.861.455.291.000
	TOTAL		262.935.339.353.573		(1.972.010.646.427)	264.907.350.000.000	579.605.291.000	579.605.291.000	265.486.955.291.000

* Kurs Tengah BI JPY pada tanggal pelaporan (28 Desember 2012) adalah Rp111,97

* Kurs Tengah BI USD pada tanggal pelaporan (28 Desember 2012) adalah Rp867C

DAFTAR NERACA 435

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

DAFTAR 33

**IKHTISAR LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
HASIL INVENTARISASI DAN PENILAIAN BMN PER KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2012**

No	Kode BA	Uraian Kementerian/Lembaga	Koreksi Satgas	Koreksi K/L	Selisih Koreksi
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	40.757.932.306	40.757.932.306	-
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	286.109.778.878	286.109.778.878	-
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	543.831.559.292	543.831.559.292	-
4	005	MAHKAMAH AGUNG	2.970.658.227.020	2.970.005.609.389	652.617.631
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	2.914.555.329.072	2.914.555.329.072	-
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	8.725.929.155.982	8.725.929.155.982	-
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	2.192.016.588.273	2.175.836.381.426	16.180.206.847
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	12.172.100.783.749	12.172.100.783.749	-
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	102.075.796.507.334	102.075.796.507.334	-
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	10.189.864.612.087	10.190.340.621.272	(476.009.185)
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	13.249.400.523.623	13.249.429.156.619	(28.632.995)
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	7.875.329.191.147	7.873.675.305.555	1.653.885.582
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	1.641.341.601.296	1.641.341.601.296	-
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	949.328.841.566	949.328.841.566	-
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	16.654.117.154.617	16.555.010.101.226	(892.946.609)
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	46.043.777.865.974	46.027.561.923.110	16.215.942.864
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	11.699.049.912.317	11.696.920.205.705	2.129.706.612
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	13.782.028.340.182	13.782.030.886.082	(2.545.900)
19	026	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	778.423.960.183	778.423.960.183	-
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	3.211.097.760.823	3.212.126.278.755	(1.028.517.932)
21	029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	2.350.286.446.800	2.350.286.446.800	-
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.183.335.227.223	1.178.946.890.468	4.388.536.755
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	123.939.747.214.483	123.963.610.136.845	(23.662.922.362)
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	(881.857.911)	(881.857.911)	-
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	(4.225.575.304)	(4.225.575.304)	-
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	(4.880.468.733)	(4.880.468.733)	-
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.809.100.210.346	1.808.866.719.340	233.491.006
28	041	KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA	(8.924.581.782)	(8.924.581.782)	-
29	042	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	2.052.620.811.853	2.052.620.811.853	-
30	043	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	(5.948.553.910)	(5.948.553.910)	-
31	044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	824.955.290.882	824.955.290.882	-
32	047	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEMPUAN DAN PA	(6.577.861.751)	(6.577.861.751)	-
33	048	KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN RB	722.179.567.356	722.179.567.356	-
34	050	BADAN INTELUJEN NEGARA	722.179.567.356	722.179.567.356	-
35	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	36.929.127.943	36.929.127.943	-
36	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	(1.020.104.341)	(1.020.104.341)	-
37	054	BADAN PUSAT STATISTIK	502.116.711.427	502.116.711.427	-
38	055	KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS	322.205.984.837	322.205.984.837	-
39	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	1.270.589.689.300	1.270.585.500.564	(24.188.736)
40	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	287.847.560.198	287.847.560.198	-
41	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	311.680.341.771	311.680.341.771	-
42	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	23.612.527.267.869	23.612.543.196.988	(15.929.119)
43	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	5.720.230.913	5.720.230.913	-
44	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	(12.381.528.148)	(12.381.528.148)	-
45	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	330.239.133.274	330.239.133.274	-
46	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	(42.295.121.272)	(42.295.121.272)	-
47	067	KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	(4.133.861.756)	(4.133.861.756)	-
48	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	421.362.220.173	421.347.572.119	4.648.054
49	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	(341.407.813)	(341.407.813)	-
50	075	BADAN METEOROLOGI, GEOFISIKA, DAN KLIMATOLOGI	720.727.674.800	720.721.342.312	6.332.488
51	076	KOMISI PEMULIHAN UMUM	64.204.050.470	64.169.085.000	34.965.470
52	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	(6.621.927.918)	(6.621.927.918)	-
53	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	66.090.187.544	66.090.187.544	-
54	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	6.078.270.200.964	6.078.270.200.964	-
55	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	1.785.168.758.442	1.785.168.758.442	-
56	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	698.296.450.360	698.327.005.260	(30.554.900)
57	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKASA NASIONAL	337.438.406.169	337.438.406.169	-
58	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	(83.995.370.940)	(83.995.370.940)	-
59	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	(2.629.521.039)	(2.629.521.039)	-
60	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	(16.701.815.248)	(16.701.815.248)	-
61	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	344.222.513.258	344.222.513.258	-
62	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	228.549.103.080	228.549.103.080	-
63	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	359.937.786.533	359.937.786.533	-
64	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	1.188.766.767.231	1.188.766.767.231	-
65	090	KEMENTERIAN PEDAGANGAN	378.060.913.009	378.088.228.289	(27.315.280)

DAFTAR NERACA 436

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

DAFTAR 33

No	Kode BA	Uraian Kementerian/Lembaga	Koreksi Satgas	Koreksi KL	Selisih Koreksi
66	091	KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT	-	-	-
67	092	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	67.575.084.826	67.575.084.826	-
68	093	KOMISI PEMBERANTAS AN KORUPSI	(6.497.923.875)	(6.497.923.875)	-
69	095	DEWANI PERWAKILAN DAERAH	(4.245.353.621)	(4.245.353.621)	-
70	100	KOMISI YUDISIAL	16.748.000	16.748.000	-
71	103	BNPB	(2.104.777.953)	(2.104.777.953)	-
72	104	BNP2TKI	12.439.626.401	-	12.439.626.401
73	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	-	-	-
74	106	LEMDAGA KEDUKAJAN PENGADAAN DAN ANGGARAN PEMERINTAH	-	-	-
75	107	BADAN SAR	(21.706.053.903)	(21.838.923.253)	132.869.350
76	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	-	-	-
77	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA	-	-	-
78	110	OMBUDSMEN REPUBLIK INDONESIA	-	-	-
79	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	-	-	-
80	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	-	-	-
81	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	-	-	-
82	114	SEKRETARIAT KABINET	-	-	-
83	115	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	-	-	-
84	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	(13.681.694.047)	(13.681.694.047)	-
85	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	-	-	-
86	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN SABANG	-	-	-
TOTAL			430.671.127.139.547	430.643.395.496.033	27.863.266.041

DAFTAR 34.A

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)
 KEMENTERIAN KESEHATAN RI
 ADOTED PER 31 DESEMBER 2012

No	JABIS AYATRAIN	KEMENTERIAN/DEKORATIF	Asal Usul	Kategori	Rincian	REK			Kumulatif	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Akhir	KEMENTERIAN			Saldo Akhir	Saldo Akhir	Saldo Akhir
						10	11	12					13	14	15			
1	Pelayanan Dasar dan/atau Jasa	KEMENTERIAN KESEHATAN RI																
1			3324.1197.869		2.366.420.629.925		508.930.959.950			82.500.000	2.180.324.347.285		687.14.540.606		687.14.540.606	2.111.610.007.395		2.180.324.347.285
2			74.225.703.984		1.712.297.458.902		224.901.158.865			0	1.650.593.066.111		4.113.154.238		4.113.154.238	1.529.438.822.177		1.650.593.066.111
3			129.975.345.676		224.879.250.888		106.805.184.049			710.637.672	243.880.063.897		28.600.481.699		28.600.481.699	21.259.588.318		243.880.063.897
4			180.142.418.919		1.180.623.689.538		353.245.288.415			0	1.024.900.788.942		84.453.513.337		84.453.513.337	940.457.245.304		1.024.900.788.942
5			204.934.118.484		1.357.167.721.382		227.616.706.940			236.158.4652	1.334.717.522.269		4.567.046.299		4.567.046.299	1.330.150.246.088		1.334.717.522.269
6			230.905.014.249		751.817.200.096		251.162.619.919			3.609.804.130	734.784.458.887		887.801.889.914		887.801.889.914	645.574.289.783		734.784.458.887
7			167.199.028.160		682.594.711.474		140.602.596.500			1.357.076.752	617.137.863.815		119.891.938.443		119.891.938.443	487.486.045.372		617.137.863.815
8			59.714.321.762		557.717.461.173		239.967.125.646			509.894.100	67.692.027.204		78.065.145.528		78.065.145.528	601.656.981.677		67.692.027.204
9			79.891.066.646		1.181.860.891.590		184.741.528.666			629.272.684	1.095.369.911.184		11.035.286.285		11.035.286.285	1.085.798.514.900		1.095.369.911.184
10			39.616.959.206		699.833.641.157		114.961.600.000			0	629.588.384.359		25.427.751.452		25.427.751.452	598.080.590.907		629.588.384.359
11			74.619.114.262		284.402.714.963		94.535.893.331			197.108.116	284.883.078.000		8.830.889.063		8.830.889.063	255.852.179.937		284.883.078.000
12			24.220.952.299		525.235.469.407		93.565.442.557			516.069.521	490.715.617.920		904.228.915		904.228.915	488.811.388.795		490.715.617.920
13			203.706.060.799		973.471.168.676		384.768.022.420			889.911.052	823.309.138.107		84.019.599.518		84.019.599.518	738.388.613.539		823.309.138.107
14			52.840.950.000		1.325.515.336.000		98.235.156.000			411.800.000	1.289.532.336.000		21.330.773.000		21.330.773.000	1.268.201.533.000		1.289.532.336.000
15			265.482.272.700		955.761.365.922		314.195.004.519			10.102.729.895	910.157.822		117.150.295.047		117.150.295.047	400.000.139.921		910.157.822
16			9.254.501.371		127.361.004.681		29.065.123.248			102.304.673	108.771.719.861		1.745.352.866		1.745.352.866	107.026.367.056		108.771.719.861
17			20.971.072.963		242.229.037.718		302.897.926.718			1.063.013.868	272.519.174.733		1.063.013.868		1.063.013.868	231.449.880.025		272.519.174.733
18			304.883.173.907		1.95.732.228.979		693.926.988.150			305.512.102	810.115.722.821		1.395.597.695		1.395.597.695	81.646.986.197		810.115.722.821
19			24.313.158.456		392.331.362.836		30.891.024.167			402.381.000	398.115.067.307		512.077.437		512.077.437	386.600.010.770		398.115.067.307
20			13.114.300.951		678.111.684.976		362.039.891.284			787.840.000	656.389.444.363		20.695.369.414		20.695.369.414	695.140.581.582		656.389.444.363
21			1.749.038.206		1.188.844.409.798		20.956.115.172			0	100.027.766.487		627.267.084		627.267.084	98.400.069.401		100.027.766.487
22			505.164.17.597		162.639.000.477		305.010.844.536			273.604.000	149.769.930.306		956.869.563		956.869.563	148.814.060.724		149.769.930.306
23					78.675.987.689		131.601.007.066			0	182.117.857.822		2.767.589.280		2.767.589.280	179.349.999.492		182.117.857.822

DAFTAR MERACA.4.88

DAFTAR 34.A

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (ALU7TEZ)

No	URIS LAYANAN	KEMENTERIAN/LEMBAGA/INSTANSI	ASET											KEVALUARIAN			BUNYUS		JUMLAH KEVALUASIBUNYUS	
			Akuntansi	Investasi/Jangka Panjang	Rektif/Oper	Amortisasi/Peperintah	Hilang/Sebut/Ret/Oper	Antisipasi	Jumlah ASET	Kelebihan/Keperintah	Kelebihan/Keperintah	Kelebihan/Keperintah	Kelebihan/Keperintah	Kelebihan/Keperintah	Kelebihan/Keperintah	Kelebihan/Keperintah	Kelebihan/Keperintah	Kelebihan/Keperintah	Kelebihan/Keperintah	Kelebihan/Keperintah
26	RS Smek Nasiona (Bakirtangg)		13.088.197.995		1.164.226.299.100	35.144.773.895	8.281.125.114	1.185.900.257	2.176.844.379		2.176.844.379		94.646.683.376		94.646.683.376		94.646.683.376		94.646.683.376	
27	RS Kertaj Dr. Sramah		14.988.625.401		4.123.539.230.001	22.245.089.659	394.285.164.942	0	4.04.873.559.43		3.771.249.207		404.873.559.43		404.873.559.43		404.873.559.43		404.873.559.43	
28	RS Ortopedi Prof. Dr. A Soebarto		47.751.479.963		438.639.434.181	85.759.798.204	352.829.625.887	1.218.910.122	3.303.917.652		3.303.917.652		296.545.592.340		296.545.592.340		296.545.592.340		296.545.592.340	
29	RS Kertaj Darmas		7.178.816.642.9		1.189.123.212.402	190.149.863.884	978.973.848.719	60.921.160	27.894.227.008		27.894.227.008		1.050.803.106.872		1.050.803.106.872		1.050.803.106.872		1.050.803.106.872	
30	RS Kertaj Palembang		7.802.237.592		44.446.612.656	134.82.027.522	30.954.585.109		52.458.285		52.458.285		38.730.000.726		38.730.000.726		38.730.000.726		38.730.000.726	
31	RS Keperawatan Obat Jekatra		4.511.154.371		784.089.957.797	44.949.189.759	33.959.756.008		924.881.952		924.881.952		37.672.488.194		37.672.488.194		37.672.488.194		37.672.488.194	
32	PoliTeknik Kesehatan Jakarta III		4.028.027.760		245.045.946.601	69.965.833.797	178.090.112.804		1.851.739.071		1.851.739.071		452.090.286.786		452.090.286.786		452.090.286.786		452.090.286.786	
33	PoliTeknik Kesehatan Bandung		25.154.897.695		454.516.500.777	26.027.089.895	428.488.003.812		58.606.385		58.606.385		116.234.183.079		116.234.183.079		116.234.183.079		116.234.183.079	
34	PoliTeknik Kesehatan Medan		3.367.657.787		125.545.226.723	12.650.765.007	112.915.461.676		2.942.440.184		2.942.440.184		363.452.239.284		363.452.239.284		363.452.239.284		363.452.239.284	
35	PoliTeknik Kesehatan Semarang		29.449.775.648		367.167.970.701	31.689.929.901	338.408.043.800		1.749.775.117		1.749.775.117		248.307.856.402		248.307.856.402		248.307.856.402		248.307.856.402	
36	PoliTeknik Kesehatan Makassar		17.419.501.401		255.487.800.914	23.810.016.983	231.867.588.951		2.885.175.500		2.885.175.500		94.831.088.130		94.831.088.130		94.831.088.130		94.831.088.130	
37	PoliTeknik Kesehatan Jakarta II		10.786.532.294		113.831.172.952	29.774.048.959	84.067.124.376		1.915.677.219		1.915.677.219		104.722.017.441		104.722.017.441		104.722.017.441		104.722.017.441	
38	PoliTeknik Kesehatan Tanjung Krang		9.614.356.021		103.227.502.368	82.094.442.240	98.017.848.159		1.732.955.544		1.732.955.544		254.181.739.395		254.181.739.395		254.181.739.395		254.181.739.395	
39	PoliTeknik Kesehatan Surakarta		18.685.556.686		248.892.462.417	137.132.925.239	255.268.837.088		2.279.627.384		2.279.627.384		482.000.165.888		482.000.165.888		482.000.165.888		482.000.165.888	
40	PoliTeknik Kesehatan Malang		14.917.215.674		884.974.119.479	1.197.945.428	76.517.945.051		1.234.324.923		1.234.324.923		92.539.655.225		92.539.655.225		92.539.655.225		92.539.655.225	
41	PoliTeknik Kesehatan Bengkulu		17.760.004.272		502.298.245.846	27.126.003.060	475.172.842.788		2.797.949.960		2.797.949.960		482.000.165.888		482.000.165.888		482.000.165.888		482.000.165.888	
42	PoliTeknik Kesehatan Pontianak		3.173.194.375		64.007.507.047	5.904.467.737	78.103.039.310		691.828.000		691.828.000		13.942.524.182		13.942.524.182		13.942.524.182		13.942.524.182	
43	PoliTeknik Kesehatan Yogyakarta		3.511.133.1536		135.440.360.653	10.729.894.980	128.710.465.073		3.807.067.141		3.807.067.141		117.679.875.452		117.679.875.452		117.679.875.452		117.679.875.452	
44	PoliTeknik Kesehatan Bengkulu		8.168.077.741		116.890.000.152	8.214.456.692	12.463.972.077		15.770.000		15.770.000		19.329.992.732		19.329.992.732		19.329.992.732		19.329.992.732	
45	Balai Besar Labortorium Palembang		1.547.868.494		20.679.429.759	8.214.456.692	12.463.972.077		15.770.000		15.770.000		19.329.992.732		19.329.992.732		19.329.992.732		19.329.992.732	
46	Balai Besar Labortorium Kesehatan Jakarta		4.74.524.871		20.683.000.126	3.067.788.054	17.801.233.072		0		0	18.506.373.943		18.506.373.943		18.506.373.943		18.506.373.943		
47	Balai Besar Labortorium Kesehatan Surabaya		2.123.902.167		26.173.371.700	8.980.000.885	17.212.771.045		15.770.000		15.770.000		19.329.992.732		19.329.992.732		19.329.992.732		19.329.992.732	
48	Balai Besar Labortorium Kesehatan Makassar		3.496.034.533		20.687.171.184	1.580.453.055	9.393.458.789		41.362.486		41.362.486		44.926.434.015		44.926.434.015		44.926.434.015		44.926.434.015	
49	Balai Besar Kesehatan Panti Masyarakat Surakarta		3.025.415.003		47.431.145.907	5.843.024.255	41.587.903.182		3.944.070		3.944.070		15.494.721.522		15.494.721.522		15.494.721.522		15.494.721.522	
50	Balai Besar Kesehatan Mata Masyarakat Makassar		4.018.477.692		19.611.515.198	8.180.277.679	11.431.237.510		0		0	14.027.225.571		14.027.225.571		14.027.225.571		14.027.225.571		
51	Balai Besar Kesehatan Panti Masyarakat di Bandung		4.372.898.061		39.935.394.149	11.437.004.849	27.887.759.600		721.166.278		721.166.278		31.549.501.373		31.549.501.373		31.549.501.373		31.549.501.373	
52	Balai Besar Kesehatan Panti Masyarakat di Makassar		1.267.964.579		54.697.814.143	10.922.207.875	43.914.576.628		454.981.288.947		454.981.288.947		45.481.288.947		45.481.288.947		45.481.288.947		45.481.288.947	
KEMENTERIAN KEUANGAN 1019																				
1 Sekolah Tinggi Aumimor Negara (STAN), Jakarta			30.401.796.927											780.024.279.947		780.024.279.947		780.024.279.947		
KEMENTERIAN PERTANIAN 1018																				
1 Sekolah Tinggi Aumimor Negara (STAN), Jakarta			30.401.796.927											780.024.279.947		780.024.279.947		780.024.279.947		

DAFTAR MERACA 438

DAFTAR 34.A

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (ALUUTEEZ)

No	URIS LAYANAN	KEMENTERIAN/SEKELURUSAN/LEMBAGA	RSET										KEVALUARIAN Kewajiban/Utang Pajak	KEVALUARIAN Kewajiban/Utang Pajak	JUMLAH KEVALUARIAN BUDS		
			Akuntansi	Investasi/Jangka Panjang	Revisi/Temp	Amortisasi/Peperadin	Hutang/Beban/Retensi	Antisipasi	JUMLAH RSET 10+11+12+13+14	Keuntungan/kerugian/Modal	Keuntungan/kerugian/Modal	15			16		
1	1. Pusat Vektorial Fama Surabaya	3.874.183.125		682.874.335.504	17.506.815.878	646.387.518.825		642.10.882.861	314.597.729		314.597.729		314.597.729		646.886.086.222		643.210.882.861
2	2. Balai Besar KemassalBuran Sigoran/Minang	23.625.504.418		70.482.531.907	4.287.505.042	86.095.028.625		89.788.875.405	18.309.828		18.309.828		18.309.828		89.751.386.577		89.788.875.405
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN																	
1	1. Jabatan Kima Adala (K.A.) Bogor	4.518.546.905		47.008.860.887	17.581.022.184	28.457.888.948		34.000.860.885	72.380.375		72.380.375		72.380.375		33.958.500.238		34.000.860.884
2	2. Balai Besar Kalsi Agri	167.248.924.481		110.614.075.882	92.320.834.334	98.289.241.518		75.774.855.929	281.541.546		281.541.546		281.541.546		75.480.144.433		75.774.855.929
3	3. Balai Besar Babar dan Berang Jenik Bandung	13.845.100.488		180.587.249.509	89.311.833.160	111.225.815.249		125.217.251.881	126.714.889		126.714.889		126.714.889		125.081.000.152		125.217.251.881
4	4. Balai Besar Standarisasi dan Pencetakan Lampung	703.592.910		20.188.854.025	10.188.065.741	9.970.488.284		10.674.051.194	6.053.250		6.053.250		6.053.250		10.688.007.944		10.674.051.194
5	5. Balai Besar Teknologi Pengolahan & Pencetakan Kalsi	1.488.388.622		37.498.389.453	13.825.725.883	29.872.887.800		25.246.200.172	128.625.450		128.625.450		128.625.450		25.118.804.722		25.246.200.172
KEMENTERIAN PERDIKASRI DAN ASRI (02)																	
1	1. Universitas Donggoro Semarang	920.025.457.198		2.678.881.777.427	288.618.221.893	2.399.033.855.844		2.715.524.757.001	973.048.393		973.048.393		973.048.393		2.714.551.708.748		2.715.524.757.001
2	2. Universitas Pajajaran Bandung	164.868.957.898		2.475.003.972.888	593.200.840.070	1.951.800.331.981		2.117.772.564.775	487.950.050.980		487.950.050.980		487.950.050.980		2.088.018.500.815		2.117.772.564.775
3	3. Universitas Negeri Malang	11.6597.298.244		899.887.057.294	149.988.119.211	314.322.272		886.880.964.459	17.737.012.790		17.737.012.790		17.737.012.790		789.880.341.759		886.880.964.459
4	4. Universitas Hasanudin	139.625.825.237		3.951.792.189.394		3.391.792.189.394		3.497.088.629.276	17.345.853.881		17.345.853.881		17.345.853.881		3.485.301.451.029		3.497.088.629.276
5	5. Universitas Brawijaya Malang	88.202.803.717		3.559.216.111.420	198.545.884.782	3.385.570.245.629		4.250.424.822	48.122.575.542		48.122.575.542		48.122.575.542		3.419.984.488.682		3.489.124.575.167
6	6. Universitas Negeri Semarang	138.641.501.180		1.048.181.041.796		1.048.181.041.796		1.191.888.885.300	3.171.182.771		3.171.182.771		3.171.182.771		1.188.687.713.432		1.191.888.885.300
7	7. Universitas Negeri Surabaya	78.285.802.743		2.085.824.241.887	36.881.716.077	2.080.033.025.800		2.117.716.884.855	55.119.286.233		55.119.286.233		55.119.286.233		2.065.587.088.722		2.117.716.884.855
8	8. Universitas Muhammadiyah Semarang	91.541.841.476		900.039.343.578		500.039.343.578		597.384.880.864	390.228.885		390.228.885		390.228.885		597.084.422.088		597.384.880.864
9	9. Universitas Sebelas Maret Surakarta	134.028.880.071		2.537.893.259.882	277.289.459.880	2.280.541.788.659		2.401.087.843.312	17.318.744.825		17.318.744.825		17.318.744.825		2.383.779.188.387		2.401.087.843.312
10	10. Institut Teknologi Sepuluh Nopember	70.915.288.388		2.205.045.817.579	370.613.887.085	1.894.432.016.517		2.073.880.880.429	23.980.282.229		23.980.282.229		23.980.282.229		2.049.980.488.100		2.073.880.880.429
11	11. Universitas Lampung	58.774.016.397		738.685.180.884	13.611.438.100	722.454.741.731		782.385.558.098	16.346.704.725		16.346.704.725		16.346.704.725		786.018.081.473		782.385.558.098
12	12. Universitas Negeri Yogyakarta	85.801.390.521		2.007.621.449.213	67.688.041.727	1.909.933.434.488		2.027.075.488.007	50.502.733.884		50.502.733.884		50.502.733.884		1.976.572.414.553		2.027.075.488.007
13	13. Universitas Negeri Gorontalo	6.720.958.729		559.581.386.380	2.373.912.589	557.207.727.791		576.818.884.120	1.122.586.126		1.122.586.126		1.122.586.126		575.688.989.884		576.818.884.120
14	14. Universitas Bengkulu																
15	15. Universitas Swadaya	121.344.128.723		2.886.888.258.235	321.520.821.686	2.375.477.082.249		2.553.514.404.088	28.869.621.120		28.869.621.120		28.869.621.120		2.534.584.918.888		2.553.514.404.088
16	16. Universitas Negeri Jakarta	58.280.078.495		1.947.678.985.449		1.947.678.985.449		2.020.976.880.729	8.818.181.316		8.818.181.316		8.818.181.316		2.011.780.888.813		2.020.976.880.729
17	17. Universitas Andalas	59.594.286.231		2.306.689.381.707	728.817.453.880	1.577.861.811.887		1.684.188.385.088	16.127.886.824		16.127.886.824		16.127.886.824		1.617.170.888.254		1.642.188.385.088
18	18. Universitas Andalas/Sediman, Purwokerto	71.581.187.418		1.894.408.078.884	183.971.687.297	1.840.432.118.887		1.923.184.785.273	23.888.981.045		23.888.981.045		23.888.981.045		1.888.888.884.228		1.923.184.785.273
19	19. Universitas Hlabo																
20	20. Universitas Riau	27.280.182.726		802.474.342.880	420.278.900	902.474.342.880		960.174.814.528	40.527.821.188		40.527.821.188		40,527,821,188		918.886.880.340		960.174.814.528
21	21. Universitas Tabrika	781.424.088.456		1.271.333.978.880	14.185.070.194	1.257.148.908.788		2.045.194.216.223	15.018.980.113		15.018.980.113		15,018,980,113		2.000.175.246.110		2.045.194.216.223

DAFTAR MERACA 440

DAFTAR 34.A

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AKUTIF)

No	URIS LAYANAN	KEMENTERIAN KESEHATAN										Jumlah Pembelian BUKS	Jumlah Pembelian BUKS		
		Asisten	Investasi/Jangka Panjang	Act/Gap	Amunisi/Peperangan	Nilai/Biaya/Act/Gap	Act/Gap	Act/Gap	Act/Gap	Act/Gap	Act/Gap				
22	Jahrestas Ulyana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahrestas Gajah Mada	1.010.380.188.808	-	8.021.412.867.429	13.875.111.089	8.007.637.446.051	-	-	13.875.111.089	14.510.255.697	138.751.154.675	75.737.293.181	215.895.437.866	8.817.035.194.020	9.032.570.931.976
24	Jahrestas Pasidaktan Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Jahrestas Alinggar	50.461.776.687	10.421.613.851	1.251.172.292.494	82.049.682.121	1.169.122.610.972	-	-	82.049.682.121	240.842.424.407	40.000.702.105	-	40.000.702.105	14.716.648.225.004	15.113.648.225.004
26	Jahrestas Indonesia	1.427.633.918.538	-	7.512.534.143.300	-	7.512.534.143.300	-	-	-	47.248.980.480	214.544.562.260	20.854.283.245	235.988.865.695	8.752.265.186.763	8.997.694.622.088
27	Jahrestas Sumatera Utara	347.021.316.951	-	2.889.376.195.597	17.685.724.420	2.871.029.411.097	-	-	-	928.632.100	5.591.720.300	-	5.591.720.300	3.148.397.629.347	3.157.989.439.947
28	Restorasi Teknologi Bandung	900.770.416.567	31.841.945.001	1.235.941.268.161	581.815.626.661	744.128.341.300	-	-	-	26.635.238.624	69.053.759.997	67.91.882.081	77.845.641.078	1.225.565.330.014	1.303.440.935.062
29	Restorasi Pertanian Bogor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Jahrestas Mataram	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Jahrestas Maluku	29.499.621.388.00	0,00	685.597.561.018.000	0,00	865.597.561.018.000	-	-	-	13.967.595.602,00	19.520.886.529,00	0,00	19.520.886.529,00	883.184.223.375,000	900.085.118.908
32	Polestank Negeri Maling	17.059.895.848	-	588.467.070.120	-	588.467.070.120	-	-	-	646.656.800	249.764.494	-	249.764.494	615.693.231.304	617.172.885.786
33	Jahrestas SAT Banten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KEMENTERIAN AGAMA (029)															
1	JUN Sana Keljaga Yogyakarta	28.224.864.690	-	1.065.583.428.125	-	1.065.583.428.125	-	-	-	5.239.720.500	7.045.508.188	-	7.045.508.188	1.085.102.138.927	1.082.147.847.115
2	JUN Syarif Hidayatullah -shera	70.736.513.541	-	1.435.917.270.906	320.684.980.732	1.115.242.437.174	-	-	-	2.739.743.688	1.188.782.244.423	1.972.560.253	1.972.560.253	1.188.808.998.070	1.188.782.244.423
3	JUN Maling	23.306.737.734	-	617.881.688.868	-	617.881.688.868	-	-	-	891.056.186	8.674.898	-	8.674.898	841.630.688.788	841.630.688.788
4	JUN Sana Ganes Djati Bandung	9.708.347.814	-	374.610.895.059	501.229.827.847	374.700.977.212	-	-	-	31.180.500	169.970.713	-	169.970.713	334.271.924.813	334.440.965.226
5	JUN Muadlin Makassar	13.306.716.270	1.031.240.000	1.429.556.929.202	3.202.429.857.610	1.429.556.929.202	-	-	-	3.801.717.800	696.754.700	-	696.754.700	1.445.788.808.372	1.446.685.683.272
6	JAN Sumatera Utara	5.356.255.553	-	322.428.857.610	-	322.428.857.610	-	-	-	849.896.145	3.782.815.226	-	3.782.815.226	225.478.537.807	228.818.953.163
7	JUN Waluyo Semarang	30.295.196.470	-	699.341.169.892	-	699.341.169.892	-	-	-	3.561.223.700	3.561.223.700	-	3.561.223.700	726.526.899.007	730.049.120.707
8	JUN Sahar Syarif Kamal Riau	30.295.196.470	-	699.341.169.892	-	699.341.169.892	-	-	-	3.561.223.700	3.561.223.700	-	3.561.223.700	726.526.899.007	730.049.120.707
9	JAN Siliran Huda Sullidin	2.652.502.233	-	146.081.085.173	-	146.081.085.173	-	-	-	42.826.122	141.921.1574	-	141.921.1574	145.634.502.664	148.776.242.228
10	JAN Sana Ampel	19.170.390.220	-	613.351.271.998	-	613.351.271.998	-	-	-	2.259.728.478	694.781.360.086	-	694.781.360.086	694.781.360.086	694.781.360.086
11	JAN Sana Maulana Hasmuddin Banten	11.693.006.495	-	181.083.888.111	-	181.083.888.111	-	-	-	990.228.000	75.798.198	-	75.798.198	183.616.426.418	183.622.333.906
9	JAN Sana Irian Lampung	6.827.225.189	-	259.216.945.456	9.056.091.610	246.294.451.648	-	-	-	278.013.700	825.949.953	-	825.949.953	251.591.151.161	251.394.100.714
13	JAN Sana Fatah Palembang	4.989.214.053	-	275.078.960.326	-	275.078.960.326	-	-	-	43.886.000	280.122.163.979	-	280.122.163.979	280.036.834.479	280.122.163.979
14	JAN Mataram	4.033.572.266	-	138.186.103.755	-	138.186.103.755	-	-	-	137.150.000	130.307.293	-	130.307.293	142.267.118.226	142.267.118.226
15	JAN Sana Rindu Aceh	3.956.571.162	-	467.042.895.953	-	467.042.895.953	-	-	-	4.491.291.300	1.489.607.477	-	1.489.607.477	473.631.180.588	475.089.584.515
KEMENTERIAN TERAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (028)															

DAFTAR MERACA.441

DAFTAR 34.A

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AKUTIF)

No	URIS LAYANAN	KEMENTERIAN/DEPARTEMEN/LEMBAGA NASIONAL	RSET							KEVALUARIAN			JUMLAH KEVALUASIAN BUDNIS		
			Akuntansi	Investasi/Jangka Panjang	Revisi/Top	Nilai Buku/Revisi/Top	Antisipasi	Jumlah Riset	Keuntungan/ Kerugian	Keuntungan/ Kerugian	Keuntungan/ Kerugian	Keuntungan/ Kerugian			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
		KEMENTERIAN KEHUTANAN DAN KAWASAN BUDIDHASA													
		1. Balai Besar Pengendalian Lahan Diambil Negeri Bandung	186.524.730	-	284.961.061.878	-	298.961.051.878	469.788.884	-	204.904	-	-	204.904	266.617.366.692	19.133.418
		2. Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Lar Negeri Bekasi	543.217.236	-	239.271.192.659	-	239.271.192.659	-	-	239.814.419.932	-	-	-	239.814.419.932	239.814.419.932
		3. Balai Besar Latihan Kerja Industri, Serang	801.504.402	-	74.689.998.826	-	74.689.998.826	88.52.200	-	75.579.195.428	-	-	36.515.986	75.542.639.442	75.579.195.428
		KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI (KEMENRISTEK)													
		1. IPI P-TEK	2.039.924.183	-	10.186.886.264	-	3.187.274.933	-	-	5.223.219.116	-	-	12.745.893	5.210.460.222	5.223.219.116
		KEMENTERIAN OPERASI DAN UDM (KEMENDAG)													
		1. Lembaga Layanan Pemasaran (LLP) Jakarta	38.055.631.396	-	615.916.951.674	-	48.819.931.225	7.271.013.866	-	536.145.966.477	-	-	13.886.903.367	521.290.020.111	536.145.966.478
		BADAN PENELITIAN DAN PENELITIAN TEKNOLOGI (BPPT)													
		1. BPPT Enyong	21.534.924.554	-	5.226.659.525	-	3.905.089.874	4.448.910.594	-	29.888.985.92	-	-	7.909.202.055	21.979.733.259	29.888.985.92
		KERPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KORPRI)													
		1. RS. Bhayangkara R. Said Sukarno, Jakarta	30.177.278.573	-	108.193.319.177	-	9.706.862.200	1.193.5000	-	158.749.863.520	-	-	34.221.729.2	155.327.488.538	158.749.863.520
		2. RS. Bhayangkara Tk. II Kediri	17.627.741.044	-	31.439.574.887	-	3.549.914.657	16.525.271	-	45.701.066.525	-	-	1.141.424.506	44.559.620.019	45.701.066.525
		3. RS Bhayangkara Tk. I/1.S. Smoser Monejo, Surabaya	9.022.092.351	-	42.115.572.366	-	5.141.687.689	3.646.070.50	-	49.649.67.759	-	-	14.87.687.533	48.161.940.226	49.649.67.759
		4. RS Bhayangkara Tk. II/Marga Duing, Makassar	164.980.063.735	-	65.849.356.912	-	9.890.413.073	154.510.800	-	79.931.000.307	-	-	3.256.733.314	76.674.286.580	79.931.000.307
		5. RS Bhayangkara, Semarang	12.006.626.117	-	32.779.655.502	-	1.153.069.691	67.358.915	-	47.222.841.863	-	-	1.686.106.399	42.086.436.315	47.222.841.863
		6. RS Bhayangkara, Bandung	2.710.237.711	-	46.675.199.042	-	24.503.929.759	74.839.908	-	47.309.445.459	-	-	284.284.408	47.025.181.061	47.309.445.459
		7. RS Bhayangkara Tk. II Palembang	6.040.17.896	-	59.343.694.213	-	7.722.418.886	4.897.000	-	64.656.072.193	-	-	972.288.077	63.686.704.116	64.656.072.193
		8. RS Bhayangkara Lendit (RS) Sukabumi	3.443.130.107	-	14.300.669.778	-	888.965.130	13.401.574.648	-	17.295.651.310	-	-	186.094.980	17.110.000.70	17.295.651.310
		9. RS Bhayangkara Tk. II. Tjati Poldarai	2.441.742.984	-	24.153.356.527	-	894.497.766	4.509.949.655	-	25.790.610.755	-	-	79.079.176	25.681.531.579	25.790.610.755
		LEMBAGA PENELITIAN DAN PENELITIAN NASIONAL (LPP)													
		1. Pusat Penelitian Teknologi Organisasi (PTEKORG)	3.428.320.795	-	1.501.633.596	-	504.391.483	2.340.587	-	44.273.833.814	-	-	163.715.994	4.254.167.549	44.273.833.813
		KEMENTERIAN PERHUBUNGAN													
		1. Balai Besar Penelitian, Pengajaran & Pengajaran Ilmu Pelayaran (BPJPP)	594.651.644.256	-	171.542.233.044	-	42.999.922.669	129.073.880.461	-	198.437.945.000	-	-	202.897.379.661	176.140.586.532	198.437.945.000
		2. Balai Penelitian dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Surabaya	164.419.153.394	-	613.296.139.174	-	54.966.117.527	583.220.020.847	-	1.169.170.761	-	-	964.154.000	575.001.262.782	575.001.262.782
		3. Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP)	48.345.298.104	-	911.960.987.409	-	77.698.862.112	804.316.525.259	-	891.965.456.317	-	-	2.316.619.000	889.608.838.317	891.965.456.317
		4. Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar	19.359.227.020	-	4.183.897.086.195	-	42.814.193.009	16.626.733.400	-	431.676.273.966	-	-	900.043.873	430.746.980.413	431.676.273.966
		5. Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang	13.710.425.739	-	624.864.718.932	-	66.155.721.171	598.508.997.731	-	572.949.927.863	-	-	125.318.711	572.949.927.863	572.949.927.863
		6. Akademi Teknik dan Keahlian Penunjang Surabaya	6.130.226.921	-	522.462.749.861	-	500.939.42.141	472.423.707.520	-	478.953.904.951	-	-	12.741.000	478.951.138.451	478.953.904.951
		7. Badan Obat Transportasi Darat (BPTD) Regal	3.182.819.962	-	155.452.863.860	-	19.885.202.866	1.419.100.000	-	140.689.686.196	-	-	-	140.689.686.196	140.689.686.196

DAFTAR MERACA.442

DAFTAR 34.A

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AKHIR)

No	URIS LAYANAN	KEMENTERIAN/SEKTOR/LEMBAGA	ASET										KEVALUARIAN	Jumlah Kewajiban	BUTIR	Jumlah Kewajiban Butir			
			Akuntansi	Investasi/Jangka Panjang	Rektif	Alumina/Reposh	Nilai Buku Rektif	Antisipasi	Jumlah Aset	Neto	Neto	Neto					Neto	Neto	Neto
1	KEMENTERIAN ESDM	1. Pusat Pengembangan Teknologi Minyak & Gas Bumi	30.407.796.927	-	822.024.457.820	70.863.361.868	791.071.091.722	7.833.000	791.490.561.889	1.452.221.922	-	1.455.221.922	791.490.561.889	791.490.561.889	-	-	791.490.561.889		
			27.468.697.543	-	733.256.867.471	21.794.202.720	711.462.546.751	49.144.002	739.990.398.956	332.907.957	-	332.907.957	739.647.430.759	739.647.430.759	-	-	739.647.430.759		
			37.290.558.398	-	305.869.162.496	18.297.381.252	222.620.881.244	1.022.213.459	270.943.850.801	616.295.510	-	-	616.295.510	270.327.397.800	270.327.397.800	-	-	270.327.397.800	
			2.775.059.896.278	-	22.688.889.690.100	4.578.279.411.332	18.090.007.748.769	38.922.538.886	906.851.657.922	20.084.594.153.942	906.851.657.922	-	906.851.657.922	19.698.636.249.050	19.698.636.249.050	-	-	19.698.636.249.050	
			6.090.998.126.178	-	6.090.998.126.178	42.365.953.182	58.441.469.000.677	451.800.386.181	61.026.616.75.059	925.369.659.070	124.762.073.771	1.060.01.769.841	-	61.026.616.75.059	61.026.616.75.059	-	-	61.026.616.75.059	
			284.249.950.139	-	1.031.240.000	8.755.719.069.096	421.750.903.398	8.333.962.065.707	22.249.711.980	8.621.492.967.709	23.137.694.490	-	23.163.026.360	8.598.329.698.349	8.598.329.698.349	-	-	8.598.329.698.349	
			1.531.246.398	-	578.921.843.270	578.921.843.270	578.921.843.270	578.921.843.270	578.921.843.270	578.921.843.270	578.921.843.270	-	578.921.843.270	578.921.843.270	578.921.843.270	-	-	578.921.843.270	
			2.035.594.189	-	10.185.885.254	6.986.620.331	3.187.274.939	5.727.03.716	12.745.689	12.745.689	12.745.689	-	12.745.689	12.745.689	12.745.689	-	-	12.745.689	
			38.055.611.396	-	615.416.561.674	125.497.270.449	468.919.181.225	7.271.013.866	536.145.966.477	13.886.900.367	13.886.900.367	-	13.886.900.367	521.260.023.111	521.260.023.111	-	-	521.260.023.111	
			99.074.350.086	-	455.168.872.374	284.865.134.560	426.627.677.793	6.127.886.800	592.775.066.691	12.514.889.914	12.514.889.914	-	12.514.889.914	500.288.142.377	500.288.142.377	-	-	500.288.142.377	
			21.534.694.554	-	5.226.699.525	1.321.009.651	3.905.088.674	4.448.910.324	29.888.385.852	7.909.202.055	7.909.202.055	-	7.909.202.055	21.693.730.239	21.693.730.239	-	-	21.693.730.239	
			3.423.207.395	-	1.501.637.595	504.391.463	997.242.132	2.340.597	4.427.933.314	165.719.994	165.719.994	-	165.719.994	4.284.139.549	4.284.139.549	-	-	4.284.139.549	
			166.610.542.396	-	3.437.889.570.235	394.539.251.634	3.063.350.318.801	39.607.181.101	3.269.988.042.088	24.636.653.145	24.636.653.145	-	24.636.653.145	3.269.501.488.943	3.269.501.488.943	-	-	3.269.501.488.943	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pegelolaan Wilayah/Kawasan	SERKETAJAM BESAR 007	9.598.633.527.233	43.396.803.182	96.910.590.350.069	9.772.962.868.371	87.138.027.72.699	572.890.281.613	1.916.624.075.649	125.659.440.822	2.042.208.851.370	95.269.548.231.456	97.312.158.884.277	-	-	97.312.158.884.277			
1.	Pusat Pengelahan Komplek Galeri Bangkitan PPK 6800, Jakarta	Pusat Pengelahan Komplek Kemayoran PPK00, Jakarta	172.228.357.945	6.697.194.500	50.208.425.350.620	257.148.084.438	49.991.126.945.182	6.556.938.750	49.999.907.591	-	49.999.907.591	501.067.371.438.096	501.067.371.438.096	-	-	501.067.371.438.096			
			727.494.292.639	-	24.847.739.923.098	(134.888.015.653)	24.412.540.907.467	289.136.500	25.140.318.286.806	60.927.710.534	-	60.927.710.534	25.079.390.686.272	25.140.318.286.806	-	-	25.140.318.286.806		
2.	Pusat Pengelahan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	Bukit Pengelahan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

DAFTAR MERACA 443

DAFTAR 34.A

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AGUSTUS)

No	JENIS LAYANAN	KEMENTERIAN/DEKRET/LEMBAGA	ASSET										KEVALUASI		JUMLAH KEVALUASIAN BUKTIS	JUMLAH KEVALUASIAN BUKTIS
			Akuntansi	Investasi/Jangka Panjang	Rektif	Alat/Bahan/Peralatan	Harta Benda/Rektif	Antariksa	JUMPAH ASSET	Kevaluan/Informasi Publik	JUMPAH KEVALUASIAN	BUKTIS				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	TOTAL PER DEPARTEMEN		889.722.550.424	6.637.194.500	74.755.804.276.718	122.310.392.806	74.363.817.882.649	6.879.115.250	75.277.056.712.883	110.294.648.115	110.294.648.115	75.277.056.712.883	75.277.056.712.883	75.277.056.712.883	75.277.056.712.883	75.277.056.712.883
	SEKRETARIAT NEGARA (007)															
	Badan Penyelidikan, Kewasanaan, Perancangan, Bekerja dan Pelaksanaan Bekerja Badan															
	TOTAL JENIS PELAYANAN PERBEOJAJAN WILAYAH / KEMASJAN		899.722.550.424	6.637.194.500	74.755.804.276.718	122.310.392.806	74.363.817.882.649	6.879.115.250	75.277.056.712.883	110.294.648.115	110.294.648.115	75.277.056.712.883	75.277.056.712.883	75.277.056.712.883	75.277.056.712.883	75.277.056.712.883
3	Pegabahan Dana Khusus															
	KEMENTERIAN KEUANGAN (019)															
	1. Pusat Investasi Pemerintah		2.651.045.586.009	7.682.128.726.108	12.208.888.622	4.784.826.180	7.543.860.429	14.443.146.075.568	22.401.184.348.110	2.001.448.655.408	2.001.448.655.408	20.399.716.682.702	20.399.716.682.702	22.401.184.348.110	22.401.184.348.110	22.401.184.348.110
	2. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)		2.007.615.531.096		12.869.495.349	5.862.474.500	7.104.020.719	742.924.928.086	2.757.844.479.911			2.757.844.479.911	2.757.844.479.911	2.757.844.479.911	2.757.844.479.911	2.757.844.479.911
	KEMENTERIAN KEMUTAHAN (029)															
	1. Pusat Pembinaan Pembangunan Hutan															
	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM (039)															
	1. BID. PENANGANAN SEKRETARIAT BAGIAN PENGATUR JALAN TOL		3.370.192.996.806		3.789.6516.272	945.832.725	2.843.300.607	4.416.200.426.746	7.786.245.716.018			7.786.245.716.018	7.786.245.716.018	7.786.245.716.018	7.786.245.716.018	7.786.245.716.018
	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (059)															
	1. BP3TI															
	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM (044)															
	1. Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB)		2.007.615.531.096		12.869.495.349	5.862.474.500	7.104.020.719	742.924.928.086	2.757.844.479.911			2.757.844.479.911	2.757.844.479.911	2.757.844.479.911	2.757.844.479.911	2.757.844.479.911
	TOTAL PER DEPARTEMEN		2.007.615.531.096	7.682.128.726.108	25.266.081.871	10.847.100.723	14.847.981.148	15.186.071.000.680	25.158.808.828.021	2.001.448.655.408	2.001.448.655.408	23.157.360.172.613	23.157.360.172.613	25.158.808.828.021	25.158.808.828.021	25.158.808.828.021
	KEMENTERIAN KEHUTAN (029)															
	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM (039)		3.370.192.996.806		3.789.6516.272	945.832.725	2.843.300.607	4.416.200.426.746	7.786.245.716.018			7.786.245.716.018	7.786.245.716.018	7.786.245.716.018	7.786.245.716.018	7.786.245.716.018
	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM (044)		2.007.615.531.096		12.869.495.349	5.862.474.500	7.104.020.719	742.924.928.086	2.757.844.479.911			2.757.844.479.911	2.757.844.479.911	2.757.844.479.911	2.757.844.479.911	2.757.844.479.911
	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (059)															
	TOTAL JENIS PELAYANAN PERBEOJAJAN DAERAH KHUSUS		7.643.468.614.007	7.682.128.726.108	42.051.213.352	17.455.807.978	24.595.075.774	20.344.205.356.461	35.704.689.023.959	2.001.448.655.408	2.001.448.655.408	31.705.250.368.542	31.705.250.368.542	35.704.689.023.959	35.704.689.023.959	35.704.689.023.959
	TOTAL SELURUH JENIS PELAYANAN		18.101.945.271.1725	7.742.462.723.770	171.708.945.944.139	9.912.729.187.155	161.526.440.930.721	20.923.104.155.724	206.291.913.821.991	4.124.152.154.893	4.124.152.154.893	204.131.951.666.766	204.131.951.666.766	206.291.913.821.991	206.291.913.821.991	206.291.913.821.991

DAFTAR MERACA.444

DAFTAR 3A-B

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (RUDITEC)

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BAHAN LAYANAN UMUM
LAPORAN AKTIVITAS
REVISI TAHUN 2012
BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

Table with 13 main columns: No, Jenis Layanan, Kementerian/Seselon/Isiater/SBU, Pendapatan Jasa dan Lain-lain, Hibah, Pendapatan, Pengeluaran, Pendapatan Usaha Lainnya, Biaya, Keuntungan/Keuntungan Bersih, Pajak dan Biaya Lain-lain, Surplus/Defisit Bruto, Surplus/Defisit Net, Surplus/Defisit Bersih, Ket. The table lists various services from 'KEMENTERIAN KESEHATAN' to 'Pemerintah Aceh' and their financial performance.

DAFTAR LERAKA 3A-B

DAFTAR 3A B

No	JENIS LAYANAN	REKEMENTERAN WELAS (KATER BELU)		PENDAPATAN			BIAYA	SURPLUS/DEFISIT KEKURANGAN/KELEBIHAN	SURPLUS/DEFISIT KEKURANGAN/KELEBIHAN	SURPLUS/DEFISIT KEKURANGAN/KELEBIHAN	SURPLUS/DEFISIT KEKURANGAN/KELEBIHAN	SURPLUS/DEFISIT KEKURANGAN/KELEBIHAN	Keterangan
		Pendapatan Usahabertausaha	Hibah	Pendapatan APBN	Pendapatan Usahabertausaha	Jumlah Pendapatan							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
35	Pomnankasabang Sarung	10.842.270.028	457.141.391	18.129.022.264	143.011.727	18.129.022.264	143.011.727	1.504.029.677	31.584.254.277	31.584.254.277	31.584.254.277	08-14-19	017
36	Pomnankasabang Masarak	13.266.249.000	8.046.628.024	4.571.331.072	59.572.441.077	59.572.441.077	59.572.441.077	44.586.656.811	66.686.008	66.686.008	66.686.008	09-03-09	031
37	Pomnankasabang Juktan II	14.010.752.824	30.471.800.010	4.722.388.622	44.884.889.622	44.884.889.622	44.884.889.622	17.800.421.884	17.800.421.884	17.800.421.884	17.800.421.884	02-01-08	032
38	Pomnankasabang Tanjung Karang	15.443.220.030	40.514.027.100	4.910.172.024	61.678.389.653	61.678.389.653	61.678.389.653	16.800.181.776	16.800.181.776	16.800.181.776	16.800.181.776	04-11-12	033
39	Pomnankasabang Sudaia	15.955.529.240	54.393.229.824	630.981.849	70.576.714.213	70.576.714.213	70.576.714.213	38.402.624.949	37.420.264.223	37.420.264.223	37.420.264.223	01-05-13	034
40	Pomnankasabang Sudaia	29.516.714.011	46.395.629.803	67.962.002	76.445.459.422	76.445.459.422	76.445.459.422	26.341.669.890	26.341.669.890	26.341.669.890	26.341.669.890	02-01-08	035
41	Pomnankasabang Sudaia	29.369.149.022	47.776.626.937	736.226.25	74.803.002.664	74.803.002.664	74.803.002.664	18.801.181.776	18.801.181.776	18.801.181.776	18.801.181.776	01-05-13	036
42	Pomnankasabang Pontak	15.443.220.030	40.514.027.100	4.910.172.024	61.678.389.653	61.678.389.653	61.678.389.653	16.800.181.776	16.800.181.776	16.800.181.776	16.800.181.776	04-11-12	037
43	Pomnankasabang Yogyakarta	14.572.000.748	45.974.374.578	69.656.915.226	40.657.724.684	69.656.915.226	69.657.724.684	11.541.541.584	11.541.541.584	11.541.541.584	11.541.541.584	02-01-08	038
44	Pomnankasabang Yogyakarta	3.517.156.581	50.303.373.569	..	50.303.373.569	50.303.373.569	50.303.373.569	29.244.176.847	29.244.176.847	29.244.176.847	29.244.176.847	02-01-08	039
45	Balibesar labes Palembang	4.850.009.908	8.786.800.022	38.782.412	13.785.672.322	14.775.220.023	14.775.220.023	109.209.299	109.209.299	109.209.299	109.209.299	08-12-13	040
46	Balibesar Laberuan Kemukiman Jakarta	2.213.226.900	8.228.597.721	..	10.447.734.221	10.447.734.221	10.447.734.221	1.164.426.209	1.164.426.209	1.164.426.209	1.164.426.209	02-01-08	041
47	Balibesar Laberuan Kemukiman Jakarta	2.167.741.950	7.936.661.035	44.079.817	10.693.394.452	11.196.810.657	11.196.810.657	853.924.716	853.924.716	853.924.716	853.924.716	02-01-08	042
48	Balibesar Laberuan Kemukiman Surabaya	5.642.309.840	9.322.790.992	42.950.386	15.009.650.798	14.154.116.052	14.154.116.052	2.524.036.002	2.524.036.002	2.524.036.002	2.524.036.002	02-01-08	043
49	Balibesar Kemukiman Puluha Kemukiman Jakarta	3.015.005.741	12.496.298.470	1.065.624.650	17.019.336.593	14.526.642.591	14.526.642.591	8.987.257.009	8.987.257.009	8.987.257.009	8.987.257.009	02-01-08	044
50	Balibesar Kemukiman Puluha Kemukiman Surabaya	11.047.109.954	11.292.298.470	14.693.474	16.236.721.313	16.236.721.313	16.236.721.313	881.200.952	881.200.952	881.200.952	881.200.952	02-01-08	045
51	Balibesar Kemukiman Puluha Kemukiman Surabaya	4.500.051.019	11.952.298.470	13.225.298	15.188.225.297	15.188.225.297	15.188.225.297	4.830.746.277	4.830.746.277	4.830.746.277	4.830.746.277	02-01-08	046
52	Balibesar Kemukiman Puluha Kemukiman Surabaya	2.675.938.352	15.668.441.352	62.751.624	18.402.121.963	13.941.367.681	13.941.367.681	1.366.554.477	1.366.554.477	1.366.554.477	1.366.554.477	02-01-08	047
53	REKEMENTERAN WELAS (KATER BELU) KEMENTERAN KEKURANGAN/KELEBIHAN	15.706.101.728	1.401.781.970	76.653.203.992	456.661.729	93.656.776.309	75.730.181.911	17.965.684.477	..	17.965.684.477	17.965.684.477	08-12-13	048
54	REKEMENTERAN WELAS (KATER BELU) KEMENTERAN KEKURANGAN/KELEBIHAN	8.145.153.042	..	19.879.671.845	65.304.693	26.120.009.295	26.840.450.192	6.610.410.613	..	6.610.410.613	6.610.410.613	02-01-08	049
55	REKEMENTERAN WELAS (KATER BELU) KEMENTERAN KEKURANGAN/KELEBIHAN	13.426.003.027	..	2.301.443.273	10.641.669	23.609.264.913	21.061.968.627	1.309.236.229	..	1.309.236.229	1.309.236.229	02-01-08	050
REKEMENTERAN PENGUNJUKAN (015)													
1	Kedua Kuba (Kater BALU) Bogor	6.756.362.000	..	10.880.028.798	1.04.856.671	17.661.236.369	18.977.236.607	170.969.790	34.186.572.783	34.186.572.783	34.186.572.783	02-01-08	051
2	Balibesar Mesti Mupi	19.843.063.298	19.843.063.298	19.843.063.298	78.772.250.072	18.943.063.298	58.923.888.904	58.923.888.904	58.923.888.904	58.923.888.904	58.923.888.904	02-01-08	052
3	Balibesar Bahari dan Bahari Teak Bahari	23.778.024.405	23.778.024.405	23.778.024.405	95.112.289.602	23.778.024.405	67.130.417.915	67.130.417.915	67.130.417.915	67.130.417.915	67.130.417.915	02-01-08	053
4	Balibesar Telp Pengisian & Pemasaran Mesti	6.838.278.275	..	5.430.240.204	15.022.279	7.624.454.701	8.201.304.236	676.449.250	676.449.250	676.449.250	676.449.250	02-01-08	054
5	Balibesar Telp Pengisian & Pemasaran Mesti	6.838.278.275	..	10.912.447.228	27.148.902	17.819.174.445	30.271.830.142	12.468.017.129	64.923.888	64.923.888	64.923.888	02-01-08	055
REKEMENTERAN PENGUNJUKAN (020)													
1	Universita Djogjonegoro Semarang	359.628.631.082	..	349.643.507.212	23.845.917.004	722.238.629.698	654.215.391.056	781.131.137.942	..	781.131.137.942	781.131.137.942	02-01-08	056
2	Universita Pajajaran Bandung	614.746.694.433	5.201.784.960	350.102.116.888	14.504.625.056	859.284.297.246	857.249.962.044	42.034.286.702	42.034.286.702	42.034.286.702	42.034.286.702	02-01-08	057
3	Universita Negeri Malang	89.870.230.300	..	139.842.036.664	13.542.156.644	427.676.021.064	427.676.021.064	7.066.573.000	..	7.066.573.000	7.066.573.000	02-01-08	058
4	Universita Pajajaran Bandung	200.959.899.235	..	628.271.272.411	11.394.929.683	988.940.676.899	979.819.890.341	342.820.896.195	..	342.820.896.195	342.820.896.195	02-01-08	059
5	Universita Pajajaran Bandung	520.111.499.295	..	1.024.840.000	478.759.165.022	1.074.820.103.876	772.436.936.391	300.931.673.664	1.088.420.788	1.088.420.788	1.088.420.788	02-01-08	060
6	Universita Negeri Malang	141.759.556.919	..	1.440.840.000	598.177.862.019	5.904.777.421	5.904.777.421	195.180.188.656	..	195.180.188.656	195.180.188.656	02-01-08	061
7	Universita Negeri Surabaya	397.260.097.818	..	3.898.523.218	514.620.094.467	32.376.118.622	32.376.118.622	917.489.711.503	..	917.489.711.503	917.489.711.503	02-01-08	062
8	Universita Muhammadiyah Semarang	19.986.448.131	..	34.699.291.818	64.603.094.467	328.376.516.522	198.443.955.945	184.443.955.945	..	184.443.955.945	184.443.955.945	02-01-08	063
9	Universita Islam Sumatera Utara	198.986.092.798	..	6.702.567.773	297.427.152.181	281.263.013.124	629.223.682.181	644.394.320.000	..	644.394.320.000	644.394.320.000	02-01-08	064
10	Universita Islam Sumatera Utara	151.279.104.611	..	4.000.000.000	15.819.004.047	597.961.955.921	540.520.411.961	95.541.153.370	..	95.541.153.370	95.541.153.370	02-01-08	065
11	Universita Islam Sumatera Utara	100.889.959.021	..	22.126.298.588	51.130.100.947	239.234.073.776	91.846.139.995	91.846.139.995	..	91.846.139.995	91.846.139.995	02-01-08	066
12	Universita Negeri Yogyakarta	143.899.351.127	..	312.202.298.413	1.034.169.057	467.752.211.003	394.801.141.193	72.991.036.664	..	72.991.036.664	72.991.036.664	02-01-08	067

DAFTAR NERACA 446

DAFTAR 9A B

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH TAHUN 2012 (RUDITEZ)

No	JENIS LAYANAN	KEMENTERIAN/SEKOLAH KEMENTERIAN/BLU	PENDAPATAN				BIAYA			SURPLUS/DEFISIT KEKEMENTERIAN/BLU	SURPLUS/DEFISIT NEGARA	SURPLUS/DEFISIT BOKS	Ket.
			Pendapatan Usaha Lain-lain	Pendapatan APBN	Hibah	Pendapatan Usaha Lain-lain	Jumlah Pendapatan	Surplus/Defisit Kementerian/BLU	Keuntungan/Kerugian				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			4.029.274.000	4.029.274.000	1.761.213.710	1.761.213.710	1.761.213.710	1.761.213.710	2.268.060.290	2.268.060.290	2.268.060.290	2.268.060.290	2.268.060.290
			31.035.341.848	31.035.341.848	-	-	31.035.341.848	31.035.341.848	31.035.341.848	31.035.341.848	31.035.341.848	31.035.341.848	31.035.341.848
			63.892.894.844	63.892.894.844	-	-	63.892.894.844	63.892.894.844	63.892.894.844	63.892.894.844	63.892.894.844	63.892.894.844	63.892.894.844
			55.797.516.051	55.797.516.051	-	-	55.797.516.051	55.797.516.051	55.797.516.051	55.797.516.051	55.797.516.051	55.797.516.051	55.797.516.051
			55.342.209.652	55.342.209.652	-	-	55.342.209.652	55.342.209.652	55.342.209.652	55.342.209.652	55.342.209.652	55.342.209.652	55.342.209.652
			12.234.051.351	12.234.051.351	-	-	12.234.051.351	12.234.051.351	12.234.051.351	12.234.051.351	12.234.051.351	12.234.051.351	12.234.051.351
			41.537.214.867	41.537.214.867	-	-	41.537.214.867	41.537.214.867	41.537.214.867	41.537.214.867	41.537.214.867	41.537.214.867	41.537.214.867
			6.138.313.000	6.138.313.000	-	-	6.138.313.000	6.138.313.000	6.138.313.000	6.138.313.000	6.138.313.000	6.138.313.000	6.138.313.000
			10.520.054.216	10.520.054.216	-	-	10.520.054.216	10.520.054.216	10.520.054.216	10.520.054.216	10.520.054.216	10.520.054.216	10.520.054.216
			10.588.926.395	10.588.926.395	-	-	10.588.926.395	10.588.926.395	10.588.926.395	10.588.926.395	10.588.926.395	10.588.926.395	10.588.926.395
			1.318.024.945	1.318.024.945	-	-	1.318.024.945	1.318.024.945	1.318.024.945	1.318.024.945	1.318.024.945	1.318.024.945	1.318.024.945
			4.106.922.153	4.106.922.153	-	-	4.106.922.153	4.106.922.153	4.106.922.153	4.106.922.153	4.106.922.153	4.106.922.153	4.106.922.153
			3.968.874.297	3.968.874.297	-	-	3.968.874.297	3.968.874.297	3.968.874.297	3.968.874.297	3.968.874.297	3.968.874.297	3.968.874.297
			53.521.997.955	53.521.997.955	-	-	53.521.997.955	53.521.997.955	53.521.997.955	53.521.997.955	53.521.997.955	53.521.997.955	53.521.997.955
			69.112.352.453	69.112.352.453	-	-	69.112.352.453	69.112.352.453	69.112.352.453	69.112.352.453	69.112.352.453	69.112.352.453	69.112.352.453
			59.549.359.100	59.549.359.100	-	-	59.549.359.100	59.549.359.100	59.549.359.100	59.549.359.100	59.549.359.100	59.549.359.100	59.549.359.100
			48.585.076.728	48.585.076.728	-	-	48.585.076.728	48.585.076.728	48.585.076.728	48.585.076.728	48.585.076.728	48.585.076.728	48.585.076.728
			86.426.248.543	86.426.248.543	-	-	86.426.248.543	86.426.248.543	86.426.248.543	86.426.248.543	86.426.248.543	86.426.248.543	86.426.248.543
			10.241.430.087	10.241.430.087	-	-	10.241.430.087	10.241.430.087	10.241.430.087	10.241.430.087	10.241.430.087	10.241.430.087	10.241.430.087
			7.653.024.357	7.653.024.357	-	-	7.653.024.357	7.653.024.357	7.653.024.357	7.653.024.357	7.653.024.357	7.653.024.357	7.653.024.357
			15.766.101.728	15.766.101.728	-	-	15.766.101.728	15.766.101.728	15.766.101.728	15.766.101.728	15.766.101.728	15.766.101.728	15.766.101.728
			19.590.192.618	19.590.192.618	-	-	19.590.192.618	19.590.192.618	19.590.192.618	19.590.192.618	19.590.192.618	19.590.192.618	19.590.192.618
			59.635.546.267	59.635.546.267	-	-	59.635.546.267	59.635.546.267	59.635.546.267	59.635.546.267	59.635.546.267	59.635.546.267	59.635.546.267
			6.103.958.084.793	6.103.958.084.793	-	-	6.103.958.084.793	6.103.958.084.793	6.103.958.084.793	6.103.958.084.793	6.103.958.084.793	6.103.958.084.793	6.103.958.084.793
			7.775.896.776.571	7.775.896.776.571	-	-	7.775.896.776.571	7.775.896.776.571	7.775.896.776.571	7.775.896.776.571	7.775.896.776.571	7.775.896.776.571	7.775.896.776.571
			502.200.816.814	502.200.816.814	-	-	502.200.816.814	502.200.816.814	502.200.816.814	502.200.816.814	502.200.816.814	502.200.816.814	502.200.816.814
			4.857.744.2448	4.857.744.2448	-	-	4.857.744.2448	4.857.744.2448	4.857.744.2448	4.857.744.2448	4.857.744.2448	4.857.744.2448	4.857.744.2448
			4.792.974.000	4.792.974.000	-	-	4.792.974.000	4.792.974.000	4.792.974.000	4.792.974.000	4.792.974.000	4.792.974.000	4.792.974.000

DAFTAR NEKAYA 448

DAFTAR 9A-B

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (RUTITEZ)

No	JENIS LAYANAN	KEMENTERIAN/SELAMIS/ISAT/ITER/BLU	PENDAPATAN				BIAYA	SURPLUS/DEFISIT KEUANGAN UMUM	SURPLUS/DEFISIT KEUANGAN NEGARA	SURPLUS/DEFISIT NEGARA	SURPLUS/DEFISIT BOP	Ket.
			Pendapatan APBN	Pendapatan Uraha	Jumlah Pendapatan	Hibah						
01	01											
		KEPULSIAN REPUBLIK INDONESIA (000)	147.868.612.149	21.170.020.959	398.447.700.634	352.688.729.647	15.539.971.037	15.539.971.037	15.539.971.037	0		
		BIAYA PENDALAMAN PERSEKIPAN TEKHNOLOGI	4.398.993.939	326.084.084	26.718.220.677	21.328.068.112	2.962.142.866	24.921.425.866	2.962.142.866	2.962.142.866		
		LEMBAGA PENGEMBANGAN ANTI PAKSISA NASIONAL	3.989.879.297	295.734.081	4.344.448.339	3.089.215.148	1.169.233.194	1.169.233.194	1.169.233.194	1.169.233.194		
		KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	819.703.694.693	23.056.611.984	1.626.262.120.807	1.422.735.411.215	197.898.710.396	197.898.710.396	322.328.317.944	322.328.317.944		
		KEMENTERIAN ESDM										
		KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT										
		TOTAL JENIS PELAYANAN PELAYANAN BERKAWAN JASA	15.594.046.076.909	2.244.710.463.176	26.925.608.424.685	26.925.608.424.685	6.244.938.300.300	6.244.938.300.300	302.844.001.033	302.844.001.033		
2	Penghasilan Wangkawan	SEKRETARAT NEGARA (007)										
		1. Pusat Pengolahan Komplet Sektor Energi (Pusat PPK) GRU	127.579.009.950	17.937.968.639	145.515.979.039	142.020.356.135	16.594.396.699	16.594.396.699	16.594.396.699	16.594.396.699		
		2. Pusat Pengolahan Komplet Sektor Air (Pusat PPK) Jakarta	62.539.559.955	24.143.452.429	106.682.012.022	106.682.012.022	50.026.398.099.301	12.656.613.963	12.656.613.963	12.656.613.963		
		Badan Pengusahaan Investasi Perdagangan Bebas dan										
		1. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam										
		TOTAL PERLOP/PERTEKEN	210.116.599.145	42.081.412.917	262.197.992.061	262.197.992.061	256.046.793.194	0.947.771.129	0.947.771.129	0.947.771.129		
		3. Penghasilan Dana										
		TOTAL JENIS PELAYANAN PERLOP/PERTEKEN	210.116.599.145	42.081.412.917	262.197.992.061	262.197.992.061	256.046.793.194	0.947.771.129	0.947.771.129	0.947.771.129		
		1. Pusat Investasi Mandiri	442.256.652.710	634.016.728.600	1.091.665.268.137	670.016.046.046	1.023.664.986.091	1.023.664.986.091	1.023.664.986.091	1.023.664.986.091		
		KESEKUTUPAN PERUSAHAAN PERUSAHAAN	299.857.959.344	4.217.061.014	296.381.184.799	3.086.384.272	253.328.620.668	253.328.620.668	253.328.620.668	253.328.620.668		
		1. Pusat Investasi Mandiri										
		KEHUTUPAN PERUSAHAAN PERUSAHAAN										
		1. PERUSAHAAN BERSEKUTUPAN BERKAWAN	138.969.197.566	243.165.616.612	386.664.763.196	310.845.665.662	376.890.217.330	376.890.217.330	376.890.217.330	376.890.217.330		
		KEHUTUPAN KOMUNIKASI (SIARAN INFORMASI) (016)										
		1. BERTI										
		KEHUTUPAN KOPERASI/UKM (040)										
		1. Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB)	92.271.965.535	3.020.087.772	41.062.288.636	47.484.656.645	94.888.657.267	94.888.657.267	94.888.657.267	94.888.657.267		
		TOTAL PERLOP/PERTEKEN	699.594.653.454	4.021.893.827	634.629.913.914	604.656.319.137	1.276.979.916.577	1.276.979.916.577	1.276.979.916.577	1.276.979.916.577		
		KEHUTUPAN NEGAWAN (016)										
		KEHUTUPAN NEGAWAN (029)										
		KEHUTUPAN PERUSAHAAN LUMAJANG (039)										
		KEHUTUPAN KOPERASI/UKM (040)										
		KEHUTUPAN KOMUNIKASI (SIARAN INFORMASI) (016)										
		TOTAL JENIS PELAYANAN PERLOP/PERTEKEN	636.459.881.040	88.336.579.236	1.223.591.234.693	1.091.591.061.061	1.653.959.733.907	1.653.959.733.907	1.653.959.733.907	1.653.959.733.907		
		TOTAL SELURUH JENIS PELAYANAN	16.629.656.597.994	342.047.707.583	15.127.436.962.291	15.127.436.962.291	15.127.436.962.291	15.127.436.962.291	15.127.436.962.291	15.127.436.962.291		

Ket. : Keunggulan / kerugian : Keuntungan merupakan lebih kecil antara harga jual dengan pembelian satuan lancar sedangkan kerugian adalah sebaliknya antara harga pembelian dengan pembelian satuan lancar.
 Keunggulan / kerugian : Keuntungan merupakan lebih kecil antara harga jual dengan pembelian satuan lancar sedangkan kerugian adalah sebaliknya antara harga pembelian dengan pembelian satuan lancar.
 *Surplus/Defisit : Terdiri dari pendapatan dan pendapatan luar biasa dan pendapatan luar biasa.
 *Surplus/Defisit : Terdiri dari pendapatan dan pendapatan luar biasa dan pendapatan luar biasa.
 *Surplus/Defisit : Terdiri dari pendapatan dan pendapatan luar biasa dan pendapatan luar biasa.
 *Surplus/Defisit : Terdiri dari pendapatan dan pendapatan luar biasa dan pendapatan luar biasa.

DAFTAR NEKARA 449

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

DAFTAR 35

**PENGUNGKAPAN PENYUSUTAN ASET TETAP PADA 105 SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
SESUAI DENGAN IMK (NOMOR 53/IMK.06/2012 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN IMK (NOMOR 04/IMK.06/2013
PER 31 DESEMBER 2012 (Audited)**

No	Badan Layanan Umum	Nilai Perolehan Aset Tetap	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA			
1	Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPK-GBK), Jakarta	50.214.126.153.085	257.156.985.262	49.957.267.167.823
2	Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPKK), Jakarta	24.474.413.820.413	135.606.015.448	24.495.808.668.126
	Sub Jumlah	74.688.539.973.498	392.765.000.710	74.453.075.835.949
015	KEMENTERIAN KEUANGAN			
1	Sekolah Tinggi Akuntansi Negara	802.732.706.234	52.727.017.376	750.005.688.858
2	Pusat Investasi Pemerintah	12.713.220.331	3.607.308.457	9.105.911.874
	Sub Jumlah	815.445.926.565	56.334.325.832	759.111.600.733
019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN			
1	Akademi Kimia Analisis Bogor	44.477.827.153	17.581.022.164	26.896.804.989
2	Balai Besar Industri Agro	111.345.887.852	52.320.834.334	59.024.753.518
3	Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri	37.556.770.402	13.825.725.853	23.731.044.549
4	BAT Bandung	180.537.248.509	70.306.420.441	110.230.828.068
5	Baristand Industri Lampung	20.168.564.025	10.278.429.302	9.889.134.723
	Sub Jumlah	394.085.997.941	164.313.432.094	229.772.565.847
022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN			
1	Balai Besar Pendidikan, Penyebaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP)	171.542.233.044	42.939.822.668	128.602.410.376
2	Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP)	911.953.987.409	77.110.045.017	834.843.942.392
3	Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar	438.507.076.195	42.814.763.409	395.692.312.786
4	Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang	624.684.718.902	66.155.721.171	558.508.997.731
5	Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal	155.452.646.850	19.985.202.606	135.467.444.244
6	BP2IP Surabaya	613.286.138.174	54.966.117.527	558.320.020.647
7	AT KP Surabaya	522.462.749.661	50.039.042.141	472.423.707.520
	Sub Jumlah	3.437.869.550.235	354.010.714.539	3.083.858.835.696
023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL			
1	Institut Teknologi 10 Nopember	2.280.974.356.434	370.613.897.062	1.910.360.459.372
2	Institut Teknologi Bandung	1.325.944.268.161	581.815.926.861	744.128.341.300
3	Universitas Airlangga	1.251.172.292.494	82.049.682.121	1.169.122.610.373
4	Universitas Indonesia	7.664.369.105.052	649.778.734.191	7.014.590.370.861
5	Universitas Pendidikan Indonesia	963.808.629.560	299.502.379.820	664.306.249.740
6	Universitas Sumatera Utara	2.989.705.135.507	178.665.724.420	2.811.039.411.087
7	Universitas Andalas	2.306.669.361.707	728.817.549.850	1.577.851.811.857
8	Universitas Brawijaya	3.859.216.111.420	193.645.864.792	3.365.570.246.628
9	Universitas Diponegoro	2.678.651.777.427	289.618.221.583	2.389.033.555.844
10	Universitas Hasanuddin	3.351.792.169.394	292.360.713.185	3.059.431.456.209
11	Universitas Lampung	736.066.180.834	13.611.439.103	722.454.741.731
12	Universitas Mulawarman	611.173.545.531	180.930.194.372	430.243.351.159
13	Universitas Negeri Gorontalo	24.234.871.340	2.373.912.599	21.860.958.741
14	Universitas Negeri Malang	839.667.053.204	149.968.319.211	689.698.733.993
15	Universitas Negeri Surabaya	2.066.974.741.897	36.661.716.077	2.030.313.025.820
16	Universitas Negeri Yogyakarta	2.007.621.448.213	67.688.014.727	1.939.933.434.486
17	Universitas Padjadjaran	2.475.033.972.698	523.203.640.707	1.951.830.331.991
18	Universitas Riau	940.613.742.183	8.139.399.290	932.474.342.893
19	Universitas Sebelas Maret	2.537.835.259.652	277.293.459.993	2.260.541.799.659
20	Universitas Sriwijaya	2.696.868.758.235	321.520.821.986	2.375.347.936.249
21	Universitas Terbuka	1.271.333.976.930	14.185.070.194	1.257.148.906.736
22	Universitas Negeri Semarang	1.048.163.041.796	-	1.048.163.041.796
23	Politeknik Negeri Malang	599.467.070.120	-	599.467.070.120
24	Institut Pertanian Bogor	1.283.687.777.666	526.496.920.729	757.190.856.937
	Sub Jumlah	47.511.044.648.455	5.788.941.602.873	41.722.103.045.582
024	KEMENTERIAN KESEHATAN			
1	RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo	2.356.420.629.525	508.590.559.550	1.847.830.069.975
2	RSUP Fatmawati	1.712.287.464.902	224.870.158.855	1.487.327.306.047
3	RSUP Persahabatan	225.014.987.054	105.360.572.669	119.654.414.385
4	RSJPD Harapan Kita	560.876.038.822	314.195.304.519	246.680.734.303
5	RSAB Harapan Kita	1.325.515.336	95.235.156	1.230.280.180
6	RS Kanker Dharmais	1.168.772.948.238	190.148.863.684	978.623.084.554

DAFTAR BERKA 450

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUS AT TAHUN 2012 (AUDITED)

DAFTAR 35

No	Badan Layanan Umum	Nilai Perolehan Aset Tetap	Alumulasi Penyusutan	Nilai Buku
7	RSUP Dr. Hasan Sadikin	1.180.623.608.538	354.015.448.415	826.608.160.123
8	RSUP Dr. Karadi	1.357.163.721.282	227.616.706.840	1.129.547.014.442
9	RSUP Dr. Sardjito	761.817.200.096	261.162.819.318	500.654.380.778
10	RSUP Dr. M. Hoesin	1.181.960.981.590	164.741.509.656	1.017.209.471.934
11	RSUP Dr. M. Djamil	667.717.461.173	238.846.102.547	318.871.358.626
12	RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo	652.421.713.474	140.602.596.530	511.819.116.944
13	RSUP Sanglah Denpasar	739.948.846.688	234.062.952.874	505.885.892.814
14	RSIP H. Ariam Malik	873.471.168.676	364.758.022.420	618.713.146.256
15	RSUP Dr. Soeradi Tironegoro	284.402.714.963	94.535.859.331	189.866.855.622
16	RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou	698.833.641.167	114.961.930.003	583.871.711.164
17	RS Mata Cicendo	210.277.167.733	78.675.987.668	131.601.170.065
18	RSD Prof. Dr. R. Soeharso	438.639.434.091	85.758.798.204	352.879.635.887
19	RSP Dr. H. A. Rotinsulu	242.329.337.718	26.773.282.997	215.556.054.721
20	RSP Dr. Ario Wirawan	125.743.455.691	29.055.123.248	96.688.332.443
21	RSP Dr. Goenawan Partowidigdo	102.169.889.128	40.197.755.413	61.972.133.715
22	RSSN Bukittinggi	116.426.298.100	36.144.773.986	80.281.525.114
23	RSJ Dr. Soeharto Haeardjani	392.331.362.636	30.931.824.187	361.399.538.449
24	RSJ Dr. Marzoeki Mahdi	625.335.469.407	59.356.442.657	465.979.026.850
25	RSJ Prof. Dr. Soeroyo	678.111.864.978	36.209.801.264	641.902.063.714
26	RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat	196.732.228.979	69.326.558.150	126.405.670.829
27	RSKO Jakarta	78.408.955.767	44.849.199.758	33.559.756.009
28	RS Kusta Sitanala	44.446.612.636	13.492.027.527	30.954.585.109
29	RSPI Soeliani Saroso	412.538.233.001	22.253.068.659	390.285.164.342
30	RS Kusta Dr. Rivai Abdullah	118.844.408.798	20.566.111.618	98.278.298.280
31	RS Kusta Dr. Tadjuddin Chalid	162.639.004.477	30.601.934.536	132.037.069.941
32	BBLK Jakarta	20.863.001.126	3.061.768.054	17.801.233.072
33	BBLK Makassar	26.173.371.730	8.960.600.685	17.212.771.045
34	BBLK Surabaya	20.973.711.844	11.580.453.056	9.393.258.788
35	BBLK Palembang	20.678.428.739	8.214.456.663	12.463.972.076
36	BBKPM Bandung	38.336.364.149	11.437.604.649	27.897.759.500
37	BBKPM Surakarta	47.431.145.937	5.843.642.755	41.587.503.182
38	BBKPM Makassar	54.837.814.143	10.923.237.875	43.914.576.268
39	BKMM Makassar	19.611.515.188	8.180.277.678	11.431.237.510
40	Politeknik Jakarta 3	245.046.946.601	66.956.833.797	178.090.112.804
41	Politeknik Bandung	454.404.298.177	26.027.099.965	428.377.198.212
42	Politeknik Medan	125.546.226.723	12.630.765.047	112.915.461.676
43	Politeknik Makassar	256.487.603.914	23.640.016.963	231.857.586.951
44	Politeknik Semarang	367.087.973.701	31.689.929.901	335.408.043.800
45	Politeknik Jakarta 2	113.884.031.864	29.774.048.589	84.109.983.375
46	Politeknik Surabaya	502.298.245.846	27.126.003.060	475.172.242.786
47	Politeknik Pontianak	84.007.507.047	5.904.467.737	78.103.039.310
48	Politeknik Tanjungkarang	103.227.592.398	8.209.744.240	95.017.848.158
49	Politeknik Surakarta	248.982.462.417	13.713.925.329	235.268.537.088
50	Politeknik Yogyakarta	135.440.360.063	10.729.894.980	124.710.465.073
51	Politeknik Bengkulu	116.890.000.152	8.094.851.970	108.795.148.182
52	Politeknik Malang	88.584.530.080	11.879.465.428	76.605.064.652
	Sub Jumlah	21.337.744.487.574	4.487.428.420.459	16.850.316.067.115
025	KEMENTERIAN AGAMA			
1	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	1.435.917.270.906	330.565.686.710	1.105.351.584.196
2	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	374.830.805.059	36.230.649.935	338.600.155.124
3	IAIN Walisongo Semarang	361.648.882.352	26.289.512.216	335.359.370.146
4	IAIN Raden Intan Lampung	297.205.543.456	50.956.091.810	246.249.451.646
	Sub Jumlah	2.469.802.501.783	444.041.940.671	2.025.760.561.112
029	KEMENTERIAN KEHUTANAN			
1	Pusat Pembiayaan Pambangunan Hutan	3.728.546.350	308.963.528	3.419.582.821
	Sub Jumlah	3.728.546.350	308.963.528	3.419.582.821
033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM			
1	Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol	3.789.636.232	(946.332.725)	4.735.968.957
	Sub Jumlah	3.789.636.232	(946.332.725)	4.735.968.957
042	KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI			
1	Pusat Peragaan IPTEK	10.185.895.264	6.998.620.331	3.187.274.933

DAFTAR BERKA 451

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

DAFTAR 35

No	Badan Layanan Umum	Nilai Perolehan Aset Tetap	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
	Sub Jumlah	10.185.895.264	6.998.620.331	3.187.274.933
044	KEMENTERIAN OPERASI DAN UJOM			
1	Lembaga Pengelola Dana Bergulir	615.119.514.174	125.497.270.449	489.622.243.725
2	Lembaga Layanan Pemasaran	12.966.495.249	5.862.474.530	7.104.020.719
	Sub Jumlah	628.086.009.423	131.359.744.979	496.726.264.444
059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
1	Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan	64.193.806.010	11.154.206.722	53.039.599.288
	Sub Jumlah	64.193.806.010	11.154.206.722	53.039.599.288
081	BADAN PENGIKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI			
1	BPPT Engineering	5.222.798.175	1.320.630.398	3.902.167.777
	Sub Jumlah	5.222.798.175	1.320.630.398	3.902.167.777
082	LAPAN			
1	Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara (FATEKGAN)	1.505.994.595	172.648.540	1.333.346.056
	Sub Jumlah	1.505.994.595	172.648.540	1.333.346.056
091	KEMENTERIAN PERUMAHAN RAIYAT			
1	Pusat Pembiayaan Perumahan	2.631.027.700	308.125.207	2.322.902.493
	Sub Jumlah	2.631.027.700	308.125.207	2.322.902.493
	TOTAL	151.373.676.799.800	11.898.512.044.158	139.692.465.618.803

IKHTISAR LAPORAN PELUANG PELUANG LEMBAGA NON STRUKTURAL
 APBN / NON APBN JANUARI 2012 AKSET
 Per 31 Desember 2012

NO	NAMA LEMBAGA	APBN	REALISASI		Jumlah Realisasi	SISA	TOTAL BAKI BERSIH	T. ON APBN	METERING/PI	Keterangan	BIL
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG MODAL							
1	1. Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (API)	3	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	14
2	2. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	14
3	3. Badan Koordinasi Pembinaan Negeri Pesisir (BKPNP)	31.28.014	0	0	0	0	0	0	0	0	14
4	4. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)	28.865.931	0	0	0	0	0	0	0	0	14
5	5. Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	225.415.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14
6	6. Badan Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Nasional (BKPPAN)	1.585.883	0	0	0	0	0	0	0	0	14
7	7. Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKORKAMLA)	225.415.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14
8	8. Badan Koordinasi Penanaman Ruang Nasional (BKPRN)	1.585.883	0	0	0	0	0	0	0	0	14
9	9. Badan Pelaksana Pengabdian Masyarakat (BPPM)	54.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14
10	10. Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyelidikan Air Minum (BPP-S PAM)	37.862.942	0	0	0	0	0	0	0	0	14
11	11. Badan Pengantar Hike Migas (BPHMIGAS)	288.932.800	0	0	0	0	0	0	0	0	14
12	12. Badan Pengabdian dan Kajian (BPDAK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
13	13. Badan Pengabdian KAPET Bandar Aceh Darussalam - Pembinaan Manajemen	3.264.985	0	0	0	0	0	0	0	0	14
14	14. Badan Pengabdian KAPET Banteng - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	2.002.853	0	0	0	0	0	0	0	0	14
15	15. Badan Pengabdian KAPET Bengkulu - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	1.890.859	0	0	0	0	0	0	0	0	14
16	16. Badan Pengabdian KAPET Bontol - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	3.521.478	0	0	0	0	0	0	0	0	14
17	17. Badan Pengabdian KAPET Bima - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	3.868.948	0	0	0	0	0	0	0	0	14
18	18. Badan Pengabdian KAPET Bukari - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	1.711.882	0	0	0	0	0	0	0	0	14
19	19. Badan Pengabdian KAPET DASS KLABUNG - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	1.892.283	0	0	0	0	0	0	0	0	14
20	20. Badan Pengabdian KAPET Dhuwazi - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	3.643.078	0	0	0	0	0	0	0	0	14
21	21. Badan Pengabdian KAPET Manado Bitung - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	2.140.018	0	0	0	0	0	0	0	0	14
22	22. Badan Pengabdian KAPET Mbayi - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	1.894.950	0	0	0	0	0	0	0	0	14
23	23. Badan Pengabdian KAPET Parigi - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	2.118.400	0	0	0	0	0	0	0	0	14
24	24. Badan Pengabdian KAPET Sasampuran - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	5.180.024	0	0	0	0	0	0	0	0	14
25	25. Badan Pengabdian KAPET Seram - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	2.268.208	0	0	0	0	0	0	0	0	14

DAFTAR RIBUAN RUPIAH

DAFTAR 36A

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA NON STRUKTURAL
 APBN / NON APBN DAN TOTAL ASET
 Per 31 Desember 2012

		(dalam Ribuan Rupiah)												
26	Badan Pertimbangan Keuangan Nasional (BPKN)	14.800.000	2.718.750	8.623.510	-	-	11.940.200	3.459.740	1.427.407	-	TA. 2012	-	Satker	090
27	Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPKE)	1.170.000	288.150	851.741	-	-	1.198.881	30.108	-	-	TA. 2012	-	Bagian satker	088
28	Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional (BPKN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak Aktif	024
29	Badan Pertimbangan Perlindungan Nasional (BPPN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TA. 2012	-	Tidak Aktif	040
30	Badan Pertimbangan Tindakan Pemukiman - PMS (BAPERTASUM-PMS)	-	-	-	-	-	-	-	381.850.072	-	TA. 2012	-	Bagian satker	081
31	Badan Nelay Indonesia (BNI)	3.000.000	1.885.813	1.304.157	-	-	3.000.000	-	4.385.875.880	-	TA. 2012	28.738	Bagian satker	025
32	Badan Baku Nasional (BBN)	-	-	-	-	-	-	-	1.514.320	-	TA. 2012	-	Bagian Aktif	023
33	Badan Energi Nasional (BEN)	50.210.141	4.982.609	45.509.823	857.880	-	51.330.529	4.879.612	15.156.386	-	TA. 2012	-	Bagian satker	020
34	Badan Sula Indonesia (BSI)	1.094.800	-	1.040.897	-	-	1.040.897	44.203	-	-	TA. 2012	-	Bagian satker	018
35	Badan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TA. 2012	-	Bagian satker	969
36	Badan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan	12.293.128	-	-	-	-	8.805.487	3.483.661	2.343.883	-	TA. 2012	-	Bagian satker	969
37	Badan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun	8.624.882	-	-	-	-	7.582.408	1.042.533	6.434.373	-	TA. 2012	-	Bagian satker	989
38	Badan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Kalimantan	11.048.008	-	10.786.351	152.250	-	10.620.801	127.207	1.572.243	-	TA. 2012	-	Bagian satker	032
39	Badan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Kepulauan Riau	5.721.183	-	5.334.014	-	-	5.334.014	387.189	164.305	-	TA. 2012	-	Bagian satker	018
40	Badan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Lampung	88.891.575	-	82.148.868	-	-	82.148.868	6.847.707	-	-	TA. 2012	-	Bagian satker	044
41	Badan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Aceh	12.000.000	188.547	8.614.809	515.259	-	10.288.403	1.769.597	1.888.098	-	TA. 2012	-	Bagian satker	045
42	Badan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Deyan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan	-
43	Badan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Kalimantan	29.300.000	-	24.518.940	4.255.823	-	28.776.065	524.335	11.221.554	-	TA. 2012	-	Bagian satker	043
44	Badan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Kepulauan Riau	458.180	-	438.000	-	-	438.000	21.180	-	-	TA. 2012	-	Bagian satker	082
45	Badan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia (BPKTI)	750.285	-	732.295	-	-	732.295	18.000	-	-	TA. 2012	-	Bagian Aktif	026
46	Badan Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Deyan	17.074.538	1.421.669	13.782.577	290.880	-	15.495.113	1.579.423	4.341.230	-	TA. 2012	-	Bagian satker	059
47	Badan Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Deyan	1.378.820	-	1.158.207	-	-	1.158.207	217.413	-	-	TA. 2012	-	Bagian satker	010
48	Badan Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Deyan	42.805.387	3.418.384	30.253.158	1.883.249	-	35.334.771	7.470.628	11.454.854	-	TA. 2012	-	Bagian satker	007
49	Badan Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Deyan	3.948.710	-	3.376.370	-	-	3.376.370	590.340	3.354	-	TA. 2012	-	Bagian satker	042
50	Badan Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Deyan	8.024.788	158.528	6.783.595	138.707	-	7.069.800	863.888	2.095.880	-	TA. 2012	-	Bagian satker	033
51	Badan Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Deyan	3.000.000	-	2.828.878	48.425	-	2.877.401	322.588	289.575	-	TA. 2012	-	Bagian satker	059
52	Badan Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Deyan	487.280	-	445.696	-	-	445.696	321.284	-	-	TA. 2012	-	Bagian satker	013
53	Komis Banding Merek	138.488	-	112.521	-	-	112.521	25.847	-	-	TA. 2012	-	Bagian satker	013
54	Komis Banding P non	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DAFTAR MERANGKAI

DAFTAR 36A

LAPORAN KEUANGAN FEMENIT (APUDSAT TAHUN 2012 6607722)

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA NON STRUKTURAL
APBN / NON APBN DAN TOTAL ASSET
Per 31 Desember 2012

	461.202	5.217.179	388.232	7.781.179	388.232	72.810	17.258.136	3.463.694	32.894.714	TA. 2012	TA. 2012	029
83 Lembaga Produktifitas Nasional (LPN)	20.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian sntkr
84 Lembaga Sensor Film (LSF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sntkr
85 Majelis Diklat Peningkatan Kesehatan (MDPK)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak Aktif
86 Direktorat Adhuan	32.624.162	21.857.534	8.150.710	2.705.405	32.513.739	110.423	14.803.500	166.482.228	540.090.422	TA. 2012	TA. 2012	Non APBN
87 Sekretariat Pengabdian Paksi	26.485.785	-	18.182.868	-	18.182.868	7.302.912	-	-	14.803.500	TA. 2012	TA. 2012	Sntkr
88 Staf Khusus Presiden	66.048.805	15.472.153	27.858.256	10.423.818	53.756.230	13.168.375	-	-	10.423.818	TA. 2012	TA. 2012	Bagian sntkr
89 Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sntkr
90 Komite Antar Departemen Bidang Keturunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak Aktif
91 Badan Koordinasi Nasional Penyelidikan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	250.0100	-	222.058	-	222.058	27.942	-	-	-	TA. 2012	TA. 2012	Bagian sntkr
92 Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat	60.708.162	24.800.568	28.383.517	650.428	53.814.528	88.758.823	-	-	1.103.402	TA. 2012	TA. 2012	Sntkr
93 Badan Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Sekt. Sunda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	007
94 Badan Informasi Geospasial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	083
95 Badan Promosi Pariwisata	54.513.129	-	53.500.145	-	53.500.145	1.012.894	-	-	-	TA. 2012	TA. 2012	BA
96 Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian sntkr
97 Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TA. 2012	TA. 2012	Bagian sntkr
98 Kawasan Ekonomi Khusus Sei Melayu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TA. 2012	TA. 2012	Tidak mendapat APBN
99 SKK (MIGAS)	-	-	-	-	-	-	-	-	67.814.910	TA. 2012	TA. 2012	Tidak mendapat APBN
J U M L A H	2.489.487.044	502.136.962	869.783.068	228.092.560	456.810.332	2.058.822.922	430.664.122	8.992.388.327	1.369.864.192			

DAFTAR MERAC.466

**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN YAYASAN MILIK NEGARA
PENDAPATAN, BEBAN, DAN SURPLUS/DEFISIT BERSIH
PER 31 DESEMBER 2012**

(Dalam Ribuan Rupiah)

No.	Badan Hukum Milik Negara	Pendapatan Operasional	Pendapatan Non Operasional	Total Pendapatan	Beban Operasional	Beban Non Operasional	Total Beban	Surplus (Defisit)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	(8)=(6)+(7)	(9)=(5)-(8)
1	Yayasan Harapan Kita/ Badan Pengelola dan Pengembangan TMII	87.883.084	-	87.883.084	86.222.574	-	86.222.574	1.660.510
2	Yayasan Gedung Veteran RI "Graha Purna Yudha"	5.043.922	-	5.043.922	608.604	3.987.736	4.596.340	447.582
3	Yayasan Bhumi Bhakti Adiguna	-	-	-	-	-	-	-
4	Yayasan Gedung Arsip Nasional RI	-	-	-	-	-	-	-
5	Yayasan Yustisia Dharmayukti Karini	-	-	-	-	-	-	-
6	Yayasan Purna Bhakti (YARMA TI)	-	-	-	-	-	-	-
7	Yayasan Pengembangan BUMN	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	92.927.006	-	92.927.006	86.831.178	3.987.736	90.818.914	2.108.092

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

DAFTAR 36C

**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN YAYASAN
AKTIVA, KEWAJIBAN, DAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2012**

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA YAYASAN	Kementerian/Lembaga	Aset Lancar	Aset Tetap	Aset Lainnya	Investasi	TOTAL Aset 7=3+4+5+6	Kewajiban Jk Pendek	Kewajiban Jk Panjang	TOTAL Kewajiban 10=(8+9)	TOTAL Ekuitas Dana 11	Total Kewajiban & 12=(10+11)	KET
1	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
1	Yayasan Harapan Kita/ Badan Pengelola dan Pengembangan TMII	Sekretariat Negara	30.817.056	88.358.710	893.525		120.169.291	5.456.199	3.801.942	9.258.141	110.911.150	120.169.291	TA. 2012
2	Yayasan Gedung Veteran RI "Gedha Purna Yudha"	Sekretariat Negara	11.357.924	126.197			11.484.121	3.315	-	3.315	11.480.806	11.484.121	TA. 2012
3	Yayasan Bhumi Bhakti Adiguna	BPN	-	-	-		-	-	-	-	-	-	Likuidasi
4	Yayasan Gedung Arsip Nasional RI	Arsip Nasional RI	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
5	Yayasan Yustisia Dharmayukti Karini	M/A	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
6	Yayasan Purna Bhakti (YARNATI)	Kementerian dalam Negeri	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
7	Yayasan Pengembangan BUMN	Kementerian BUMN	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
	TOTAL		42.274.980	88.484.907	893.525		131.653.412	5.456.514	3.801.942	9.261.456	122.391.956	131.653.412	

DAFTAR NERACA 486

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

DAFTAR 37.A

**REKAPITULASI HASIL PENILAIAN ASET BEKAS MILIK ASING/CINA
PER 31 DESEMBER 2012**

No	KANWIL DJKN	NILAI	Tahun Penilaian
1	BANDA ACEH	15.134.350.000	
1	Jl. Persada (Jl. Perdagangan) Kel. Keude Siblah Kec, Blang Pidie, Kab. Aceh Selatan	524.100.000	2008
2	Jl. Merdeka Kel. Kampung Belakang Meulaboh Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat	1.578.950.000	2008
3	Jl. Merdeka Blangkel Kel Blang Paseh Kec. Kota Sigi Kab, Pidie	619.400.000	2008
4	SD/SMP Muhammadiyah Panton Labu, Jl. Mesjid Kel. Keude, Panton Labu Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara	1.169.000.000	2009
5	SKKP Negeri Samalanga, Desa Keude Kec. Samalanga	256.800.000	2009
6	STM dan SMP Kosgoro, Jl. Perdagangan Lhokseumawe Kel. Peusong Baru Kec. Banda Sakti Lhokseumawe	6.264.200.000	2009
7	Eks SDN No. 4,5,6, Kantor/Rumah Tinggal, Lap Basket, Jl Jend A. Yani Kuala Simpang	2.810.800.000	2009
8	SMEAN KANDEPDIKBUDCAM, PEMDA, Tempat Tinggal, Jl MT Zen Langsa Pekanbaru Langsa	1.911.100.000	2009
2	MEDAN	84.875.778.916	
1	Jl. Besar, Simpang Dolok Kel. Simpang Dolok Kec. Simpang Dolok Kab. Batubara	202.840.000	2008
2	Jl. Ahmad Yani (dahulu Jl. Merdeka) Kel. Pangkalan Dodek Kec. Medang Deras Kab. Batubara	242.500.000	2008
3	Jl. Cokroaminoto No. 73 Kel Kisaran Kec. Kota Kisaran Barat Kab Asahan	648.700.000	2008
4	Jl. Rivai No. 48 Kisaran, sekarang menjadi Jl. Rivai No.39 Kisaran	4.272.050.000	2008

DAFTAR NERACA 459

DAFTAR 37.A

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

No	KANWIL DJKN	MILAI	Tahun Penilaian
5	Jl. Rivai No. 67 dahulu 60 kel., Kisanan Kota, Kec. Kota Kisaran Barat, Kab. Asahan	779.690.000	2008
6	Jl. Sudirman (Jl. Besar Indrapura) dahulu Jl. Merdeka Kel. Indrapura Kota Kec. Air Putih, Kab. Batubara	6.752.200.000	2008
7	Jl. Merdeka, Tanjung Tiram	1.541.301.000	2008
8	Jl. Sudirman (Jl. Besar Indrapura) dahulu Jl. Merdeka Kel. Indrapura Kota Kec. Air Putih, Kab. Batubara	232.100.000	2008
9	Jl. Merdeka, Tanjung Tiram	1.827.820.000	2008
10	Kel. Tanjung Leidong Kec. Kualuh Hilir	184.370.000	2008
11	Jl. Besar Simandulang, Desa Simandulang, Kec. Kualuh Leidong, dahulu Kec. Kualuh Hilir Kab. Labuhan Batu	150.100.000	2008
12	Jl. Jenderal Sudirman dahulu Jl. Besar Kota Pinang No.33 Kel. Kota Pinang Kec. Kota Pinang, Kab. Labuhan Batu	234.800.000	2008
13	Jl. Raya Binjai Serbangan Kel. Binjai Serbangan Kec. Air Joman, Kab. Asahan	695.800.000	2008
14	Jl. Pulau Rakyat Guntung Saga Kel. Bandar Pulau Pekan, Kec. Bandar Pulau, Kab. Asahan	110.300.000	2008
15	Jl. Besar Gumug Melayu-Bandar Pulau, Kel. Bandar Pulau Pekan Kec. Bandar Pulau, Kab. Asahan	38.700.000	2008
16	Jl. Asahan No. 23 Kel. Indra Sakti Kec. Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai	398.600.000	2008
17	Jl. Imam Bonjol No. 70 Tanjung Balai, Kel. Karya, Kec. Tg. Balai Selatan, Kota Tanjung Balai	628.100.000	2008
18	Jl. Veteran No. 82 Kel. Indra Sakti Kec. Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai	297.300.000	2008
19	Jl. Mesjid No. 28 Kel. Tg. Balai Kota II Kec. Tg. Balai Selatan Kota Tg. Balai	346.430.000	2008
20	Jl. Sukramai No. 30 Dusun I desa Bagan Asahan Pekan Kec. Tg. Balai Kab. Asahan	397.125.000	2008
21	Jl. Sukramai Desa Bagan Asahan Kec. Tg. Balai Kab. Asahan	484.310.000	2008
22	Jl. Pajak Pagii/Balai Desa, Desa Pulau Rakyat Pekan Kec. Pulau Rakyat Kab. Asahan	143.300.000	2008

DAFTAR NERACA 460

DAFTAR 37.A

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

No	KANWIL DJKN	MILAI	Tahun Penilaian
23	Jl. Prof. HM Yamin/Mi. Said, Kel. Sigambal, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhan Batu	623.540.000	2008
24	Jl. Jenderal Ahmad Yani Kel. Kota Pinang, Kec. Kota Pinang Kab. Labuhan Batu	899.160.000	2008
25	Jl. Kampung Loteng (dahulu Gang Kampung Lorong Tengah) Kel. Langga Payung, Kec. Sungai Kanan, Kab. Labuhan Batu	458.836.000	2008
26	Jl. Jend Ahmad Yani Kel. Sungai Berambang, Kec. Panei Hilir, Kab. Labuhan Batu	1.079.046.000	2008
27	Jl. Jend Ahmad Yani Kel. Sungai Berambang, Kec. Panei Hilir, Kab. Labuhan Batu	1.159.070.000	2008
28	Jl. Mesjid Kel. Tanung Leidong Kec. Kualuh Leidong, Kab. Labuhan Batu	967.400.000	2008
29	SMA Kuala ex SMA Swasta Gotong Royong, Jl. Antara No. 18 Kel. Pekan Kuala Kec. Kuala Kab. Langkat	147.323.000	2009
30	Pertokoan/Ruko, Jl. Mesjid Pangkalan Brandan Kec. Babalan Kab. Langkat	675.607.000	2009
31	SMA Persiapan STABAT, Jl. Perniagaan Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat	1.463.910.800	2009
32	SMP PGRI Pulau Kampai, Jl. Peabuhan Desa Pulau Kampai Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat	6.500.000	2009
33	Pertokoan/Ruko, Jl. KH Zainal Arifin Kab. Langkat	645.700.000	2009
34	SD Filial Gajah Mada, Jl. Anggur Bandar Sinembah Kec. Binjai Barat Kab. Binjai	285.206.430	2009
35	Pertokoan, Jl. MH Thamrin d/h Jl. Binjai Kel. Binjai Kota Kec. Pekan Binjai Kab. Binjai	3.440.907.300	2009
36	Pertokoan, Jl. Beitung Kel. Binjai Kota Kec. Pekan Binjai Kab. Binjai	1.101.073.500	2009
37	Perguruan Setia Budi Ahadi, Jl. Serdang No. 157 Simpang Tiga Pekan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai	1.720.000.000	2009
38	Balai Pertemuan Desa, Jl. Besar Rantau Panjang Kec. Pantai labu Kab. Deli Serdang	27.700.000	2009
39	SMA Negeri I Lubuk Pakam, Jl. Dr. Wahidin No. 1 Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang	4.890.140.000	2009
40	SMP Negeri I Sei Rampah, Jl. Sudirman Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai	2.023.266.000	2009

DAFTAR NERACA 461

DAFTAR 37.A

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

No	KANWIL DJKN	MILAI	Tahun Penilaian
41	SD Negeri 102037, Dusun XII Kebun Sayur Desa Sei Bambi Kec. Sei Bambi	49.000.000	2009
42	SMP Perbaungan (SMA 2 Perbaungan), Jl. Cempaka No. 25 Kel. Simpang III Kec. Perbaungan Kab. Deli Serdang	1.192.005.900	2009
43	Perg.Nas. Budi Basa I (Yay. Tuanku Tambusai), Jl. Dusun 7 Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai	38.684.000	2009
44	Perg.Nas. Budi Basa II (Gdg. P'temuan Sos. Sehati), Jl. Dusun 3 Kota Pari Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai	151.706.000	2009
45	SD Harapan, Jl. Dusun IV Desa Sarang Burung Kec. Pantai Labu Kab. Serdang Bedagai	60.413.000	2009
46	Rumah Kosong, Jl. Jend. Sudirman Pekan Dolok Masihol Kab. Serdang Bedagai	36.495.000	2009
47	SD Negeri (Tanah Kosong), Jl. Perintis Kemerdekaan Desa Pantai Labu Pekan Kab. Deli Serdang	309.279.000	2009
48	Yayasan Perguruan Widyasana Utama dan Yayasan Perguruan Swadaya, Jl. Jose Rizal No. 3A Medan	1.952.770.000	2009
49	Gedung SD dan STM, Jl. Cut Nyak Din No. 1 Lingkungan VII Kel. Beras Basah Kec. Pangkalan Sulu Kab. Langkat	199.889.300	2009
50	SMA Negeri I Tanjung Pura, Jl. Jenderal Sudirman No. 52 Kel. Pekan Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat	1.637.121.296	2009
51	Kantor Veteran RI, Jl. Dr Wahidin No. 124 Kel. Dwikora Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar	1.106.700.000	2009
52	Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran, Jl. Merdeka No. 230 Dwikora Kec. Siantar Barat Kab. Pematang Siantar	5.454.400.000	2009
53	SD/SMP Yayasan Taman Asuhan, Jl. Kapt MH Sitorus Kel. Teladan Kec. Siantar Barat Kab. Pematang Siantar	15.226.300.000	2009
54	SMPN 3, STM YPD, Jl. MH Thamrin No. 50-52 Tebing Tinggi	9.443.100.000	2009
55	Kantor Depdikbud, Jl. Veteran No. 38 Tebing Tinggi	1.947.000.000	2009
56	Kantor Primkopad 0204, Jl. Dr Sutomo Tebing Tinggi	830.100.000	2009
57	Sebidang Tanah, Jl. Balai Kota d/h Jl Gereja No. 14 atau Jl Mesjid S. Parman Kec. Tebing Tinggi Kota	764.256.000	2009
58	Rumah Tinggi/Gereja GP, Jl. Pekan Pematang Bandar/Jl. Gereja Kec. Pematang Bandar Kab. Simalungun	142.100.000	2009

DAFTAR NERACA 462

DAFTAR 37.A

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

No	KANWIL DJKN	MILAI	Tahun Penilaian
59	TK Aisyiyah, Dusun Tiga Nagori Marihat Bandar Kec. Bandar Kab. Simalungun	156.622.000	2009
60	Bangunan Pos Polisi Huta Sei Langgai Bandar Maasilam Kec. Bandar Kab. Simalungun	124.700.000	2009
61	Klenteng, Desa Bandar Tinggi, Kec. Bandar Maasilam Kab. Simalungun	32.695.390	2009
62	Bangunan Rumah Toko sbg sarang walet, Jl Diponegoro Perdagangan Kab. Simalungun	412.000.000	2009
63	Tanah dan Bangunan SDN No. 7, Jl. Kampung Melayu Kel. Tanah Jawa Kab. Simalungun	815.700.000	2009
64	SD Al Wasiyah dan SMA Teladan, Jl. Asahan Km. 17 Desa Bangun Kec. Gunung Malela Kab. Simalungun	505.620.000	2009
65	Kedai Kopi, Desa Ujung Padang Kec. Bosar Maligas Kab. Simalungun	264.300.000	2009
3	III PEKANBARU	176.885.951.000	
1	Jl. Ahmad Karim No. 12 Kel. Benteng Pasar Atas Kec. Guguk Panjang Bukit Tinggi	3.935.000.000	2008
2	Jl. Raya Soekarno Hatta No. 35 Kel. Parit Rantang Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh	1.100.000.000	2008
3	Jl. Lundang Kel. Parit Rantang, Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh	780.000.000	2008
4	Jl. Niaga No. 156 Kel. Belakang Pondok, Kec. Padang Selatan, Padang	432.530.000	2008
5	Jl. HDS Cokroaminoto No. 12 Kel. Ranah Kongsil Kec. Padang Barat, Padang	432.530.000	2008
6	Jl. Plaua Karam No. 82 Kel. Kp. Pondok Kec. Padang Barat, Padang	6.576.750.000	2008
7	Jl. AR Hakim No. 4 Kel. Belakang Pondok Kec. Padang Selatan, Padang (Jl. Kampung Nias)	2.559.130.000	2008
8	Jl. Sudirman No. 50 Padang Kel. Jatibaru Padang	133.590.000.000	2008
9	Jl. Nipah No. 33 Kel. Berop Nipah Kec. Padang Barat, Padang	10.984.950.000	2008

DAFTAR NERACA 463

DAFTAR 37.A

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

No	KANWIL DJKN	MILAI	Tahun Penilaian
10	Jl. Klenteng No. 319 Padang Kel. Berok Kec. Padang Timur Padang	242.425.000	2008
11	Jl. Kampung Nias V Kel. Belakang Pondok, Kec. Padang Selatan, Padang	1.791.505.000	2008
12	Jl. Besar Sangiang Kel. Urung Barat Kec. Kundur Batu Kab. Karimun	118.394.000	2008
13	Jl. Klenteng (Sekarang Jl. Usman Harun) Kel. Tanjung Batu Kota, Kec. Kundur Tanjung Batu Kab. Karimun	683.909.000	2008
14	Jl. Klenteng (Sekarang Jl. Usman Harun No. 51) Kel. Tanjung Batu Kota, Kec. Kundur Tanjung Batu Kab. Karimun	347.769.000	2008
15	Jl. Klenteng (Sekarang Jl. Usman Harun) Kel. Tanjung Batu Kota, Kec. Kundur Tanjung Batu Kab. Karimun	2.797.248.000	2008
16	Jl. Raya Sungai Ungar Desa Sungai Ungar Kec. Undur Kab. Karimun	163.231.000	2008
17	Jl. Besar Urung Kota Kel. Urung Kec. Kundur Utara , Kab. Karimun	377.534.000	2008
18	Jl. Besar Tanjung Phang (Sekarang Jl. Jend. Sudirman) Kel. Tanjung Batu Kota , Kec. Kundur Tanjung Batu, Kab. Karimun	2.344.828.000	2008
19	Jl. Nusantara No. 05 Kel. Tanjung Balai Kec. Karimun Kab. Karimun	891.987.000	2008
20	Jl. Trikora No. 43 Kel. Tanjung Balai Kec. Karimun Kab. Karimun	204.783.000	2008
21	Jl. Trikora Kel. Tanjung Balai Kec. Karimun Kab. Karimun	3.371.495.000	2008
22	Jl. A. Yani Meral Kel. Meral Kota Kec. Meral Kab. karimun	340.741.000	2008
23	Jl. Pegadaian No. 45 Kel. Tanjung Balai Kec Karimun, Kab. Karimun	602.030.000	2008
24	Jl. Gang SD Cahay Meral Kel. Meral Kota Kec. Meral Kab. karimun	826.490.000	2008
25	Jl. Besar Sawang, Kel. Sawang Kota Kec. Kundur Barat, Kab. Karimun	150.351.000	2008
26	Jl. RA Kartini Kel. Pasar Taluk, Kec. Kuantan Tengan, Kab. Kuantan Singingi	770.500.000	2008
27	Jl. Pasar (Jl. Katib Sutan) Kel. Pasar Cerenti Kec. Cerenti Kab. Kuantan Singingi	80.080.000	2008

DAFTAR NERACA 464

DAFTAR 37.A

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

No	KANWIL DJKN	MILAI	Tahun Penilaian
28	Jl. Sudirman No. 109 Baserah, Kel. Pasar Usang Kec. Kauntan Singingi (Jl. Raya Teluk Kuantan)	389.761.000	2008
4	IV PALEMBANG	383.870.355.814	
1	Jl. Kepten Zen Ali Kel Pasar Lama Kec. Lahat Kab. Lahat	2.261.648.000	2008
2	Jl. Garuda Hitam (dh Jl. Dharmapala) Kel. Pasar Pemiri Kec. Lubuk Linggau Barat II Kota Lubuk Linggau	5.226.531.800	2008
3	Jl. Pembangunan Kel. Pasar Bhayangkara Kec. Talang Ubi Kab. Muara Enim	12.540.000	2008
4	Jl. Letnan M. Akip Kel Pasar II Kec. Muara enim, Kab. Muara Enim	820.000.000	2008
5	Jl. Cut Nyak Dien (dh Jl. Tanjung Priuk) Kel. Tungkai Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim	417.500.000	2008
6	Jl. Garuda Hitam (dh Jl. Dharmapala) Kel. Pasar Pemiri Kec. Lubuk Linggau Barat II Kota Lubuk Linggau	5.381.539.500	2008
7	Kel. 15 Ulu Kec. Seb. Ulu I Palembang	139.270.000	2007
8	Jl. Remiva Rt. 11, Komplek NV Remiva, Kel. Organ Baru Kec. Seb. Ulu I, Palembang (Bekas TK Melati)	44.977.200	2007
9	Jl. Letkol. Iskandar No. 708 Kel. 15 Iir Timur I, Palembang	38.632.498.000	2007
10	Jl. Veteran No. 7085 Kel. 20 Iir I, Kec. Iir Timur I, Palembang	1.466.055.000	2007
11	Jl. Jend. Sudirman No. 31/2 Kel. 20 Iir, Kec. Iir Timur I, Palembang	129.965.635.000	2007
12	Jl. Padang Selasa Kel. Bukit Lama, Kec. Iir Barat I Palembang	3.982.200.000	2007
13	Jl. Jen. Sudirman KM 3,5 No. 74 Palembang	39.753.525.000	2007
14	Jl. Letkol. Iskandar No. 452 Kel. 15 Iir Timur I, Palembang	3.820.300.000	2007
15	Jl. Rawakasih Kel. Duku Iir Timur II Palembang	4.551.900.000	2007

DAFTAR NERACA 465

DAFTAR 37.A

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

No	KANWIL DJKN	MILAI	Tahun Penilaian
16	Jl. DI Panjaitan Kel. Playa Hulu, Kec. Seb. Ulu II, Palembang	1.123.706.578	2007
17	Jl. Bukit Intan Kec. Bukit Intan Pangkal Pinang	2.397.600.000	2007
18	Kel. Semabung Baru II Pangkal Pinang	376.483.000	2007
19	Jl. Mayor H. Muhidin Kel. Masjid Jamik Kec. Rangkui Pangkal Pinang	2.253.372.173	2007
20	Jl. Mesjid Jamik Kec. Rangkui, Pangkal Pinang	1.891.968.000	2007
21	Jl. Mesjid Jamik No. 26 Kel. Mesjid Jamik, Kec. Rangkui, Pangkal Pinang	2.141.958.000	2007
22	Jl. Mayor H. Muhidin Kec. Rangkui, Pangkal Pinang	14.431.964.463	2007
23	Jl. Bukit Intan No. 121, Kel. Bukit Intan Kec. Bukit Intan Pangkal Pinang	32.954.760.000	2007
24	Jl. Jend. A. Yani Kel. Kacang Pedang Pangkal Pinang	3.166.140.000	2007
25	Jl. Mayor Syafri Rachman Kel. Semabung Baru, Kec. Bukit Intan, Pangkal	37.879.25.400,00	2007
26	Jl. Yos Sudarso No. 90, Pangkal Pinang	2.399.778.700	2007
27	Jl. Gudang Padi No. 16, Kel. Gudang Padi, Pangkal Pinang	8.227.460.000	2007
28	Jl. Pasir Putih Kel. Pasir Putih, Pangkal Pinang	34.130.620.000	2007
29	Jl. Moh Yamin, Jambi	2.198.500.000	2007
30	Jl. Panglima Polim Jambi Kel. Kasang Jaya	1.820.000.000	2007
31	aset yang dinilai sebelum tahun 2007	37.879.925.400	sebelum tahun 2007
5	BANDAR LAMPUNG	1.615.040.000	

DAFTAR NERACA 466

DAFTAR 37.A

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

No	KANWIL DJKN	MILAI	Tahun Penilaian
1	Jl. WR Supratman No. 69 Teluk Betung Bandar Lampung	1.615.040.000	2008
6	VI SERANG	28.533.055.000	
1	Jl. Juhdi No. Kel. Cimunjang, Kec. Serang, Kota Serang, Propinsi	9.490.600.000	2007
2	Jl. Ki Samaun, Gang Babakan Ledeng No. 06 RT 01 RW 07, Kel. Sukasari,	4.274.000.000	2007
3	Tangerang Kota, Kota Tangerang, Propinsi Banten		2007
4	Jl. Ki. Semaun No. 171 Kel. Sukasari, Kec. Tangerang, Kota Tangerang	9.099.536.000	2007
5	Jl. Syekh Yusuf RT 005 RW 06 No. 20, Kel. Sujasari, Kec. Tangerang Kota, Kota Tangerang	2.714.000.000	2007
6	Jl. A. Dimiyati No. 52/KH. Sholeh Ali kel. Sukasari, Kec. Tangerang, Kota Tangerang	948.000.000	2007
7	Jl. Raya Curug RT 001/007 Desa Curug Kulon, Kec. Curug, Kab. Banten,	1.171.919.000	2007
8	Tangerang, Banten	835.000.000	2007
9	Jl. Raya Kedaung Barat RT 002/01 Desa Kedaung Barat Kec. Sepatan Timur, Tangerang Banten		2007
7	VII JAKARTA	Belum Dinilai	
8	VIII BANDUNG	3.926.481.000	2008
1	Jl. A. Yani No. 7 Kel. Nagri Tengah Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta	3.926.481.000	

DAFTAR NERACA 467

DAFTAR 37.A

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

No	KANWIL DJKN	MILAI	Tahun Penilaian
9	IX SEMARANG	50.782.163.775	
1	Jl. Raya Wonogiri Kel. Giritirto Kec. Wonogiri Kota sekarang Jl. Sudirman No. 147A Kel. Giritirto Kec Wonogiri Kab. Wonogiri	1.276.920.000	2008
2	Jl. Bioskop Sena Kel Kaliurang Kec. Bumiayu Kab. Brebes	1.115.205.000	2008
3	JL. Cendrawasih No. 37 Ds. Tanjung Kec. Tanjung Kab. Brebes	712.800.000	2008
4	Jl. Brebes Ds. Klampok Kec. Wanasari	5.263.440.000	2008
5	Desa. Dukuh Turi Kec. Bumiayu Kab. Brebes	1.956.475.000	2008
6	Ds. Paguyangan Kec. Paguyangan	33.325.000	2008
7	Jl. Tegal Purwokerto Ds. Linggapura Kec. Tonjong Kab. Brebes	157.500.000	2008
8	Jl. Tegal Purwokerto Ds. Tonjong Kec. Tonjong Kab. Brebes	209.712.000	2008
9	Jl. Koonel Sugiri No. 10 Krenj Banyumas	1.829.578.700	2008
10	Jl. MT Haryono Purworejo	1.678.315.800	2008
11	Jl. A. Yani No. 33 Kebumen Kab. Kebumen	1.144.720.300	2008
12	Pusat Keterampilan Pemuda, Jl. Beskalan No. 13, 15, 17 Yogyakarta	6.161.523.000	2009
13	SMEA Negeri II, Jl. Kemitiran Kidul No. 47 A Yogyakarta	12.946.820.000	2009
14	TK, SD, SMP Bhineka Tunggal Ika, Jl. Poncowinatan No. 16 Yogyakarta	2.328.700.000	2009
15	DPD Pepabri, Jl Dagen No. 44 Yogyakarta	1.281.422.000	2009
16	Sukowati No. 378 Sragen	3.969.600.000	2007

DAFTAR NERACA 468

DAFTAR 37.A

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

No	KANWIL DJKN	MILAI	Tahun Penilaian
17	Jl. Gondang Winong, Gondang Sragen	396.340.000	2007
18	Jl. Diponegoro No. 23 Kel. Tasik Aging, Kec. Kota, Kab. Rembang	1.570.200.000	2007
19	Jl. Petungi No. 23 Adiwirna, Tegal 52194	2.087.900.000	2007
20	Jl. Dr. Wahidin No. 2, Kel. Temanggung II, Kec/Kab. Temanggung	2.375.200.000	2007
21	Jl. Stasiun No. 5, Kurtowinangun, Kabumen	921.466.975	2007
22	Jl. Jeruk No. 18 Kota Pekalongan	1.365.000.000	2007
10 X	SURABAYA	461.020.708.298	
1	Jl. Kampung Baru, Kel. Grikik, Kec. Rogojampi, Kab. Banyuwangi (sekarang menjadi Jl. Ki Hajar Dewantoro)	5.086.848.000	2008
2	Jl. Genteng Ds. Gendoh Kec. Singojuruh (Skrng Menjadi Jl. Raya No. 155 Ds. Gendoh Kec. Sempu) Kab. Banyuwangi	2.568.685.000	2008
3	Jl. Karyawan No. 4 Mojokerto	3.017.509.000	2008
4	Jl. PB Sudirman No. 40 Mojokerto	1.805.153.000	2008
5	Jl. Kabupaten No. 3 Kel. Mangkujayan, Kec/Kab. Ponorogo	5.471.400.000	2008
6	Jl. Jenderal Sudirman No. 102 dan 105 Kel. Pakunden, Kec/Kab Ponorogo	17.169.205.886	2008
7	Jl. Aris Munandar No. 2-4 Kel. Kirul Dalam Kec. Klojen Kotamadya Malang	8.601.830.000	2008
8	Jl. Maduloro No. 14 Kel. Lawang Kec. Lawang Kab. Lawang	2.939.000.000	2008
9	Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Lamongan (Dahulu Jl. Ki Sarmidi Mangunsarkoro 16 Kel. Tettis, Kec/Kab. Lamongan	3.187.529.000	2008
10	Jl. Pramuka No. 3 Sendangharjo, Kec/Kab. Tuban	6.436.995.000	2008

DAFTAR NERACA 469

DAFTAR 37.A

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

No	KANWIL DJKN	MILAI	Tahun Penilaian
11	Jl. Stasiun Sepanjang, Wonocolo, Taman, Sidoarjo	4.857.359.000	2008
12	Jl. Wonocolo, Sepanjang, Sidoarjo	2.121.384.000	2008
13	Jl. KH. Marzuki No. 27 Desa Mindi Kec. Porong Kab. Sidoarjo	5.178.803.000	2008
14	Jl. Hasanuddin No. 12 Kel. Karanganyar, Kec. Gadingrejo, Kota Pasuruan	13.399.258.000	2008
15	Jl. Pacet mojosari, Desa Seduri, Mojoasri, Kab. Mojokerto	2.958.371.000	2008
16	Jl. Tanimbar No. 24 Malang	42.402.000.000	2008
17	Jl. Mujair No. 10 Desa Tawang Kec. Wates Kab. Kediri	2.678.000.000	2008
18	Jl. Yulius Usman No. 58 Malang	19.585.000.000	2008
19	Jl. Kartini No. 5 Kediri	10.321.034.000	2008
20	Jl. Wahidin No. 8 Kediri	2.900.491.527	2008
21	Jl. Erlangga No. 22/26 Kediri	6.511.962.000	2008
22	Jl. Basuki Rachmad No. 96 Tulung Agung	7.481.022.000	2008
23	Jl. Arjuno Malang	16.201.000.000	2008
24	Jl. Lawu No. 12 Malang	13.511.000.000	2008
25	Jl. Brawijaya No. 20 Kel. Pocanan, Kec. Kota Kediri, Kediri	18.825.251.000	2008
26	Jl. Monginsidi No. 24 Kel. Setonogedong Kec. Kota Kediri Kodya Kediri	2.117.520.000	2008
27	Jl. Prof. Buya Hamka No. 1A Desa Jombang Kec. Jombang Kab. Jombang	1.241.971.000	2008
28	Jl. Basuki Rachmat No. 6 Kel. Baliwerti Kota Kediri	9.630.340.000	2008

DAFTAR NERACA 470

DAFTAR 37.A

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

No	KANWIL DJKN	MILAI	Tahun Penilaian
29	Tanah dan Bangunan Rumah Sakit TK.IV,05,07,02 Kediri	83.555.571.000	2008
30	Tanah dan Bangunan Tempat Perbekalan V-44-02-A Kediri	24.887.683.000	2008
31	Jl. Ki Hajar Dewantoro 18 Ds. Kalibaru Kec. Kalibaru Banyuwangi (Dh. Jl. Saleh No.1 Kab. Banyuwangi)	751.313.000	2008
32	Jl. Pattimura Desa. Sepanjang Kec. Glenmore Banyuwangi	486.089.000	2008
33	Jl. Gajahmada Desa. Genteng Kulon, Kec. Genteng Banyuwangi	4.088.161.000	2008
34	Jl. Suprpto Kec. Pesanggrahan Kab. Banyuwangi	570.562.000	2008
35	Desa Kebondalem, Kec. Bangotejo Banyuwangi	873.530.000	2008
36	Jl. A. Yani Ds./Kec. Purwoharjo Kab. Banyuwangi	904.142.000	2008
37	Jl. Muncar, Ds. Kebamen Kec. Srono Banyuwangi	1.112.389.000	2008
38	Jl. Ikan Cakalang Kec. Kepatihan Kab. Banyuwangi	995.491.000	2008
39	Jl. Kalipahit Desa/Kec. Tegaldimo Kab. Banyuwangi	690.140.000	2008
40	Jl. Wijaya Kusuma No.2 Sampang	5.489.396.538	2008
41	Jl. PB Sudirman No. 19 Sampang	562.126.173	2008
42	Jl. Veteran No. 385 Sumenep	843.546.144	2008
43	Jl. Letjen Sunarto No. 15 Bangkalan	2.231.248.871	2008
44	Jl. Niaga No. 21 Pamekasan (dh No 19)	3.007.393.125	2008
45	Jl. Bunguran No. 31-33 Kel. Bongkaran, Kec. Pabean Cantikan, Surabaya	15.298.000.000	2007
46	Jl. Bunguran No. 63 Kel. Bongkaran, kec. Pabean Cantikan, Surabaya	17.853.750.000	2007

DAFTAR NERACA 471

DAFTAR 37.A

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

No	KANWIL DJKN	MILAI	Tahun Penilaian
47	Jl. Pekulan, Selarang Jl. Sultan Iskandar Muda No. 42 Kel. Ujung, Kec.	10.519.110.000	2007
48	Jl. Gentengkali 43-45 Kel. Genteng, Kec. Genteng, Surabaya	6.215.625.000	2007
49	Jl. Darmokali 69 Kel. Darmo, Kec. Wonokromo, Surabaya	3.292.800.000	2007
50	Jl. Darmokali 69 Kel. Darmo, Kec. Wonokromo, Surabaya	4.599.479.000	2007
51	Jl. Gentengkali 10 Kel. Genteng, Kec. Genteng, Surabaya	6.442.960.000	2007
52	Jl. Gembong Cantikan No. 48-50 Kel. Kapasan, Kec. Simokerto, Surabaya	11.313.400.000	2007
53	Jl. Waspada No. 94-96 Kel. Bongkaran, Kec. Pabeanan Cantikan	10.553.692.500	2007
54	Jl. Sidodadi No. 27 Kel. Sawahan, Surabaya	2.434.000.000	2007
55	Jl. Argopuro No. 27 Kel. Sawahan, Kec. Sawahan, Surabaya	806.949.000	2007
56	Jl. Wahid Hasim (di/h Jl. Jend. Panjaitan No. 4) Jember Kidul, Kali	1.511.677.939	2007
57	Jl. Raya A. Yani 89, Bangsalsari, Jember	924.561.595.00	2007
58	Aset yang dinilai sebelum tahun 2007	924.561.595	sebelum tahun 2007
11	XI PONTIANAK	8.086.895.780	2009
1	SDN 2,4, Jl. Kopo Mahmud, Kel. Pasiran, Kec. Pasiran (sekarang Singkawang Barat)	5.173.568.000	2009
2	SDN VII dan lapangan basket Jl. Gereja, Kel. Pemangkat kota, Kec. Pemangkat	293.760.000	2009
3	SDN 2 Jl. Raya Sambas-Pemangkat Desa Makrampai B, Kec. Tebas	72.549.000	2009
4	SDN No.2 Desa Parit Baru, Kec. Selakau	146.232.000	2009

DAFTAR NERACA 472

DAFTAR 37.A

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

No	KANWIL DJKN	MILAI	Tahun Penilaian
5	SDN No.4 Jl. Raya Sei Duri , Desa Sei Duri I, Kec. Sei Kuyut	10.280.000	2009
6	SDN No.2 dan SDN No.3 (inpres) Jl. Raya Sei Kuyut, Desa Sei Kuyut Laut, Kec. Sei Kuyut	28.290.000	2009
7	SD Inpres No.6 Nusapati Jl. Saliong dalam, Desa Selung/Nusapati, Kec. Sei Pinyuh	1.446.900	2009
8	SDN No.6 Pak Bulu Jl. Raya Mandor Desa Kepayang, Kec. Sei Pinyuh	29.113.000	2009
9	SDN No. 2 Anjungan Jl. Raya Toho, Desa Anjungan Dalam, Kec. Sei Pinyuh	58.320.000	2009
10	SDN Terap Jl. Raya Toho- Karangan, Desa Terap , Kec. Toho	12.183.500	2009
11	SDN Sei Purun Besar Jl. Swadaya Sei Purun Besar Desa Sei Purun Besar, Kec. Siantan	4.836.500	2009
12	SD Santo Yosef (YP3 GK) Kampung Sinam, Kec. Pemangkat	71.928.000	2009
13	Tanah/Bangunan Kosong Desa yohandung, Kec. Salamantan	12.500.000	2009
14	Tempat Tinggal Kepala Sekolah dan Guru SD, Jl. Raya Pontianak-Singkawang, Desa Sei Purun Kecil, Kec. Sei Puyuh	2.209.350	2009
15	Rumah Tinggal Guru SDN I dan Penyuluh Pertanian Jl. Raya Sei Bakau Kecil Desa Sei Bakau Kecil, Kec. Mempawah Hilir	10.674.950	2009
16	Madrasah Islamiyah Jl. Raya Panibungan Desa. Manibungan Kec. Mempawah Hilir	62.600.000	2009
17	Gedung Generasi Muda Jl. Raya Sei Pinyuh Kel. Sei pinyuh, Kec. Sei Pinyuh	79.980.000	2009
18	SMPN8 Jl. Dr. Setia Budi Desa Benua Melayu Darat Kec. Pontianak Selatan	312.460.000	2009
19	Bekas KUD Nanga pinoh Jl. Merak, Kompleks Pasar Nanga Pinoh Kab. Melawi	32.400.000	2009
20	Perumahan PPL Desa Mensere Kec. Tebas	34.480.000	2009
21	Asrama Guru/Karyawan Pemda Jl. Merdeka Ketapang, Desa Kampung Kantor, Kec. Matan Hilir Utara	1.618.896.000	2009
22	Perumahan Guru SD Jl. Raya Pontianak-Singkawang Desa Sei Bakau Kecil Laut Kec. Sei Pinyuh	668.580	2009

DAFTAR NERACA 473

DAFTAR 37.A

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

No	KANWIL DJKN	NILAI	Tahun Penilaian
23	Bekas Kantor depdikbudcam nanga pinoh Jl. Melati Kompleks Pasar Nanga pinoh Kab. Melawi	17.520.000	2009
12	XII BANJARMASIN	151.777.333.000	
1	Jl. H.M. Nurung Kel. Kota Pagatan Kec. Kusan Hilir, Kab. Tanah Bumbu	1.546.416.000	2008
2	Jl. Lambung Mangkurat No. 10 Kel. Kertak Baru Ulu, Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin	15.032.368.000	2008
3	Jl. Jend. Sudirman No. 18 Kel. Antasan Besar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin	3.196.085.000	2008
4	Jl. DI Panjaitan No. 6 Kel. Antasan Besar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin	4.736.905.000	2008
5	Jl. Lambung Mangkurat No. 9 Kel. Kertak Baru Ulu, Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin	22.557.091.000	2008
6	Jl. Surya Gandamana Desa Sebatang, Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru	.	
7	Jl. P. Samudera No. 95 Kel. Kertak Baru Ulu, Kec Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin	16.770.000.000	2007
8	Jl. P. Samudera No. 97-99 Kel. Kertak Baru Uli, Kec Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin	9.277.500.000	2007
9	Jl. P. Samudera Kel. Kertak Baru Ulu, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota	3.600.000.000	2007
10	Jl. Brigjen Katamdo Kel. Kertak Baru Iir, Kec. Banjarmasin Tengah,m Kota	6.305.250.000	2007
11	Jl. Jend. A. Yani Km 2,5 No. 180 Kel. Sungai Baru, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin	12.312.465.000	2007
12	Jl. Kapt. Pierre Tendean No. 22 Kel. Gadang Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin	14.438.580.000	2007
13	Jl. Veteran Kel. Kampung Melayu, Kec. Banjarmasin Tengah, Kot Banjarmasin	38.879.950.000	2007
14	Jl. K.S Tubun No. 122 Kel. Kelayan Barat, Kec. Banjarmasin, Kota Banjarmasin	3.124.723.000	2007

DAFTAR NERACA 474

DAFTAR 37.A

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

No	KANWIL DJKN	MILAI	Tahun Penilaian
13	XIII SAMARINDA	74.200.602.000	2008
	1. Jl. Muawarman (P. Hidayattullah) Kel. Pelabuhan Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda	2.718.363.000	2008
	2. Jl. Makhoda No.30-32 Kel. Pelabuhan, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda	3.601.252.000	2008
	3. Jl. P. Hidayattullah 64 Kel. Pelabuhan, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda	2.846.480.000	2008
	4. Jl. Pangeran Diponegoro 9 Kel. Pelabuhan, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda	2.355.675.000	2008
	5. Jl. Yos Sudarso Kel. Karang Mumus Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda	20.679.099.000	2008
	6. Jl. Muawarman Kel. Pelabuhan Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda	3.906.875.000	2008
	7. Jl. KH Moh Khalid No. 19 Kel. Pasar Pagi Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda	2.250.388.000	2008
	8. Jl. Muawarman Kel. Karang Mumus Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda	9.428.370.000	2008
	9. Jl. Bukit Niaga No. 43 Kel. Kelandaran Ilir, Kec. Balikpapan Timur Kota Balikpapan	17.724.000.000	2008
	10. Jl. Sunoi, Rt. Kel. Kampung Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan	2.791.200.000	2008
	11. Jl. Letjen Suprpto No. 1 Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan	5.898.900.000	2008
14	XIV DENPASAR	Belum Dimilai	
15	XV MAKASSAR	5.454.511.000	
	1. Jl. Sangir Lr. 223 No. 9 (153) Kel. Melayu Kec. Wajo, Makassar	151.672.000	2007
	2. Jl. G. Latimojo No. 54 A (No. 124A) Kel. Lariangbangi, Makassar.	755.860.000	2007

DAFTAR NERACA 475

DAFTAR 37.A

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

No	KANWIL DJKN	MILAI	Tahun Penilaian
3	Jl. Ranggong Daeng Romo No. 7 Kel. Molaku Kec. Ujung Pandang,	499.494.000	2007
4	Jl. Lembah No. 63 Kel. Melayu Kec. Wajo, Makassar.	728.068.000	2007
5	Jl. Jend. Sudirman No. 52 Kel. Parang Kec. Mamajang (No.42), Makassar	2.186.911.000	2007
6	Jl. Serui No. 18 Kel. Pattunuang, Kec Wajo, Kota Makassar.	456.758.000	2007
7	Jl. Sumba No. 44 Kel. Pattunuang, Kec Wajo, Makassar	675.748.000	2007
16	XVI MANADO	3.053.000.000	
	1. Jl. Sultan Hasanuddin No. 22 Kel. Biawao Kec. Kota Selatan, Kota Gorontalo	3.053.000.000	2008
17	XVII JAYAPURA	720.789.000	
	1 Jl. Macan Tutul No. 137 RT.03/RW.01 Doom	720.789.000	2007
	TOTAL	1.449.937.014.583	

DAFTAR NERACA 476

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

DAFTAR 37.B

**JUMLAH BEKAS ASET MILIK ASING/CINA YANG TELAH DINILAI
POSISI PER 31 DESEMBER 2012**

NO	KAWIL DJKN	Data Awal		Gbr Fisik		Penilaian		NILAI (Rp/jah)
		(aset)	(%)	(aset)	(%)	(aset)	(%)	
1	I BANDA ACEH	16	100	16	100	8	50	15.104.050.000,00
2	II MEDAN	109	100	127	91	95	47	84.875.778.916,00
3	III PEKANBARU	78	100	78	100	28	37	178.895.951.000,00
4	IV PALEMBANG	84	100	43	51	30	38	383.870.355.814,00
5	V LAMPUNG	16	100	11	68	1	5	1.515.040.000,00
6	VI SERANG	9	100	9	99	7	78	28.500.022.000,00
7	VII JAKARTA	48	100	10	21	0	0	0,00
8	VIII BANDUNG	104	100	45	43	1	1	3.926.481.000,00
9	IX SEMARANG	58	100	54	93	22	38	50.792.193.775,00
10	X SURABAYA	170	100	144	85	37	34	481.020.768.258,00
11	XI PONTIANAK	199	100	99	50	23	14	8.098.895.780,00
12	XII BANJARMASIN	13	100	13	100	13	100	151.777.022.000,00
13	XIII SAMARINDA	17	100	13	76	11	65	74.200.002.000,00
14	XIV DENPASAR	23	100	20	87	0	0	0,00
15	XV MAKASSAR	40	100	21	53	7	18	5.454.511.000,00
16	XVI MANADO	22	100	4	18	1	5	3.093.000.000,00
17	XVII JAYAPURA	15	100	1	7	1	7	720.789.000,00
	JUMLAH	1009	100	645	64	275	27	1.448.937.914.583,00

Sejak semester II tahun 2009 tidak ada peningkatan jumlah ABMA/C yang telah dinilai, karena adanya hambatan dari pihak penghuni, serta prioritas pekerjaan saat ini adalah ditujukan untuk penyelesaian status hukum ABMA/C sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 188/PMK.06/2008. Hambatan dari pihak penghuni dalam pelaksanaan penilaian di lapangan menyebabkan Penilai DJKN tidak dapat melaksanakan survei fisik atas aset (penghuni/pengusaha/pihak ketiga yang menemptati tidak memperkenankan Penilai DJKN masuk ke objek yang akan dinilai). Dalam rangka penilaian aset, jika survei fisik aset tidak dapat dilakukan maka dengan sendirinya penilaian tidak dapat dilaksanakan.

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

DAFTAR 38A

BPMIGAS
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 13 NOVEMBER 2012 DAN 31 DESEMBER 2011
(Rupiah Penuh)

URAIAN	13 NOVEMBER 2012	31 DESEMBER 2011
ASET		
ASET LANCAR		
Kas	778.969.241	809.137.300
Bank	661.955.258.238	436.950.656.550
Biaya Dibayar Dimuka	11.953.823.315	0
Panjar Kerja Operasional	5.966.686.229	0
Piutang Lain-Lain	1.362.974.947	131.457.500
Piutang kepada Pemerintah atas Kewajiban Manfaat Kerja	609.742.320.153	0
Persediaan Perlengkapan Kantor	1.037.422.844	532.657.158
JUMLAH ASET LANCAR	1.292.797.454.967	438.423.908.508
ASET TIDAK LANCAR		
Aset Tetap	36.341.536.625	42.285.675.038
Aset Tidak Berwujud	37.933.558.887	29.632.457.633
Pekerjaan Dalam Pelaksanaan	0	10.285.293.588
Aset yang Dibatasi Penggunaannya	3.320.427.758.878	2.421.058.092.313
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	3.394.702.854.390	2.503.261.518.572
TOTAL AKTIVA	4.687.500.309.357	2.941.685.427.080
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN LANCAR		
Hutang Kepada Pemerintah	15.099.331.066	77.095.716.034
Hutang Kepada Pekerja	298.199.589	0
Hutang Kepada Pihak Ketiga	148.130.887.713	68.872.038.021
Hutang Pajak	1.178.327.013	18.274.624.055
Hutang Lancar Lainnya	41.758.201	266.888.449.935
JUMLAH KEWAJIBAN LANCAR	165.608.613.589	430.940.628.045
KEWAJIBAN TIDAK LANCAR		
Hutang pasca Pemerintah	3.115.800.608.882	2.271.778.116.831
Hutang pasca Pihak Ketiga	204.028.050.013	140.278.073.882
Kewajiban Diestimasi atas Imbalan Pasca Kerja	809.742.320.153	213.177.290.739
JUMLAH KEWAJIBAN TIDAK LANCAR	3.930.170.079.031	2.834.235.323.052
TOTAL KEWAJIBAN	4.095.978.892.620	3.085.176.151.097
EKUITAS		
Keayaan Awa EPMIGAS	3.333.525.094	13.303.525.094
Surplus Defisit Kinerja Bersih	444.134.951.807	6.257.741.823
Ekuitas Lainnya	134.053.140.033	(143.051.396.731)
JUMLAH EKUITAS	591.521.816.737	(123.490.724.016)
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	4.687.500.309.357,00	2.941.685.427.081,00

D:\104\38A\38A12

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)

DAFTAR 38 B

BPMIGAS
LAPORAN KINERJA KEUANGAN
PERIODE 1 JANUARI 2012 S.D 13 NOVEMBER 2012
(Rupiah Penuh)

Uraian	1 Januari 2012 - 13 November 2012	1 Januari 2011 - 31 Desember 2011
PENDAPATAN	1.606.950.338.447,00	1.306.356.388.095,00
BEBAN		
Beban Pekerja	581.905.439.289,00	620.039.863.848,00
Beban Operasional	466.522.859.060,00	571.869.918.460,00
Beban Perjalanan Dinas	114.357.088.491,00	98.570.548.797,00
Penyesuaian Imbalan Kerja	0,00	9.618.309.367,00
JUMLAH BEBAN	1.162.785.386.840,00	1.300.098.640.472,00
SELISIH PENDAPATAN DAN BEBAN	444.164.951.607,00	6.257.747.623,00
BEBAN LAIN-LAIN	0,00	0,00
SURPLUS KINERJA	444.164.951.607,00	6.257.747.623,00

DAFTAR NERACA 479

DAFTAR 39

MONITORING RENCANA TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LKPP) TAHUN 2011

No	TEMUAN	PEJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI		REKAM TINDAK	PROGRESS/ EFFORT	JADWAL PEYELESAIAN
			1	2			
I	TEMUAN SISTEMPENGENDAIAN INTERNI						
I	Pendapatan dan Hibah						
1.	Mikrostruktur Pendanaan Tarif Pajak Hibah dan Pribumi Asli Melayu	<p>Sedikitnya terdapat 30 SKKS yang tidak konsisten dalam menggunakan tarif Pajak Penghasilan (PPH). RAKS tersebut tidak menunjukkan bentuk PPH sesuai Pokok-pokoknya. Pada tahun yang bersangkutan tidak ada hasil yang terdapat dalam laporan PPH berdasarkan SKKS tersebut. Dengan memperhatikan hal tersebut, tindakan Pemerintah adalah lebih lanjut yang diharapkan dan Pemerintah memperoleh pendapatan yang lebih kecil. Selama tahun 2009 sampai dengan kuartal pertama tahun 2011, Pemerintah kehilangan pendapatan negara sebesar USD259,62 juta atau Rp2,35 triliun. Khusus kontrak tersebut belum menunjukkan penerimaan SKKS.</p>			<p>1. Kementerian akan meningkatkan koordinasi antara Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, dan JPMIGAS untuk melakukan pemeriksaan kontrak bagi hasil in gas regional dan melakukan evaluasi kontrak EKSIS yang telah dilaksanakan oleh ESDM agar apabila dilaksanakan oleh ESDM, maka dapat pemenuhan harus disesuaikan sehingga pemenuhan pemenuhan tidak terjadi.</p> <p>2. Pemerintah telah Direktur Jenderal Pajak telah menyelaraskan alat bukti EPMIGAS agar dapat menggunakan kontrak bagi hasil EKSIS dengan menggunakan alat bukti yang lain yang dapat dibuktikan secara hukum yang lain dan dapat dibuktikan secara hukum.</p>	<p>Koordinasi telah dilakukan pada Juni 2012 untuk menyelesaikan masalah kontrak.</p> <p>Surat telah disampaikan pada tanggal Juli 2012</p>	

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2011 -430-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (LAK2012)

No	TAMBAHAN	PENYISWAAN TAMBAHAN	KELAS FINANSIAL (*)			RUMAH TINDAK	PROGRESS EFFORT	JADWAL PESELESAIAN
			1	2	3			
		<p>Bantuan Subsidi BPK:</p> <p>Pemerintah akan mengupayakan dana idar dan PSJ, dan akan mendirikan dan mendirikan KKS yang menggunakan dana PSJ sehingga akan berkontribusi pada peningkatan negara dan PPH Marga Lintas Trans.</p>				<p>a. Sejalan dengan Pasa 2012 upaya UU PPH, KKS wajib memiliki kewajiban penjabarannya sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana dituntun dalam kontrak awal. Dengan demikian tidak ada KKS melakukan kewajiban pembayaran di luar yang telah ditetapkan sebelumnya sebagaimana diuraikan terlebih dahulu dengan Pemerintah Indonesia.</p> <p>b. Pada paragraf di atas kontrak bagi hasil adalah sebagai perik sumber daya alam yang diatur dalam Pasal 33 UUD 1945 dan juga sebagai regulator. Oleh karena itu, sesuai hasil kali akan lebih mudah dan lebih cepat untuk melakukan negosiasi kontrak kepada perusahaan tersebut.</p> <p>2. Dalam rangka meningkatkan efisiensi BPK tersebut akan terdapat dengan penggunaan dana yang akan digunakan untuk KKS lebih lanjut yang dibutuhkan oleh KKS lebih lanjut dan dibutuhkan untuk pemeliharaan dan KKS. Dikawatirkan bahwa penambahan biaya akan menambah beban KKS.</p>		

Suatu kontrak telah ditandatangani oleh BPK LKS

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Tuntutan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2011 - 481-

Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat Tahun 2012 (LAKS2012)

No	TITIK	PENJELASAN	KELAS FIKSASI (*)			REVISI/TAMBAH	PROGRES/ EFFORT	JADWAL PELAKSANAAN
			1	2	3			
						<p>mencakup nomor 1283/PE/1000/2012/SA tanggal 3 Agustus 2012 yang berisi hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> BFMIGAS telah melakukan pertemuan dengan KKS yang diorganisasikan oleh BSM, untuk membahas mengenai amandemen PSC. Dari hasil pertemuan tersebut, KKS perlu desainya setuju untuk melakukan amandemen PSC dengan syarat hal tersebut berlaku ke depan dan bilahada, penggunaan <i>low cost</i> yang telah tertajur digunakan agar produktif. Kesepakatan dari KKS tersebut BFMIGAS akan segera sampaikan DUP. <p>DUP kemudian melibatkan kajian mengenai penerapan hal <i>low cost</i> untuk <i>low cost</i> pada OKMMP KKS dengan melibatkan risiko pada</p> <ol style="list-style-type: none"> Tanggal 21 September 2012 dengan kesimpulan bahwa hasil pembahasan Tanggal 3 Oktober 2012 dengan akademia, Profesi Sunari Tanggal 8 Oktober 2012 dengan kepala divisi hukum BFMIGAS, Samud L Purba Tanggal 16 Oktober 2012 dengan pejabat internal DPKP, P-2/P2/MD/Karwil Khusus, Karwil LIU, Karwil Jakarta. 		

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Terusan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2011 -482-

Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

No	TITIK	PENJELASAN	KELAS FIKSASI (*)			REVISI/TAMBAH	PROGRESS/ EFFORT	JADWAL PELAKSANAAN
			1	2	3			
						<p>Selanjutnya, DJP akan membuat konsep awal dan Menteri Keuangan terkait Menteri ESDM dan Kepala BPMIGAS terkait pengumpulan tarif dan biaya dalam perhitungan harga jual ke para UPKAS.</p> <p>Sehubungan dengan kekurangan pemetaan P7 Migas yang dilakukan Indonesia dan bagian tarif pajak, Direktur Penilaian dan Penetapan telah menyampaikan surat kepada Kepala KPP Migas nomor S-3084/PJ.04/2012 tanggal 4 Desember 2012 yang meminta agar melakukan penilaian dan verifikasi lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>3. DJP telah menyampaikan daftar PSC yang disulkan untuk dilakukan penilaian yaitu sejumlah 12 PSC. Sebagai tindak lanjut DJP akan menyelesaikan surat ke BPMIGAS untuk menegosiasikan agar dilakukan amandemen PSC. DJP telah mengirimkan surat kepada BPMIGAS melalui surat nomor S-1377/JJ.2012 tanggal 8 Juli 2012 hal Tindak Lanjut atas Temuan Pemeriksaan FPY RI masa IYPP Tahun 2011, menyangkut amandemen PSC bahwa, yapılacak komunikasi DJP namun merupakan</p>	Bertanjutan	
						<p>3. Pemerintah akan mengidentifikasi uraian tersebut. Sebagai Gaseer PSC yang akan dar akan diinformasikan tahun.</p>		

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas UKPP Tahun 2011 - 483.

Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

No	TITIK	PENGALIHAN TERMINAL	KLASIFIKASI (*)			RENCANA TINDAK	PROGRESS REPORT	JADWAL PEWELASAN
			1	2	3			
1.2	Pelaksanaan Monitoring dan Pengujian atas kewajiban PPh Migas Tidak Dinyala	<p>Terdapat beberapa kelemahan yang dapat meningkatkan optimalisasi pelaksanaan PPh Migas yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tidak ada tindak lanjut atas hasil rekonstruksi setiap kewajiban PPh Migas antara laporan gabungan satu wilayah kerja dengan laporan bulanan bulan 2000 dan 20 0 sehingga kurang layak PPh Migas sebesar USD 11,75 juta atau setara Rp62,06 miliar belum ditagih sesuai perubahan peraturan yang berlaku. Belum ada pengawasan yang memadai terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan KKKs sehingga Pemerintah belum mendapatkan nilai tinggi untuk atas pelaksanaan pembayaran PPh Migas sebesar USD 223 juta atau setara Rp1,2 miliar sesuai perubahan peraturan yang berlaku. 	X			<p>Telaah diterbitkan PMK Nomor 7/PMK.1.3-2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pelaporan, Penentuan Bumi dan/atau Lahan Bumi dan Penhitungan Pajak Penghasilan untuk Laporan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi Janasau Gas Bumi Benua Volunte Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi yang mengajut:</p> <ol style="list-style-type: none"> KKKS wajib menyampaikan laporan pembayaran PPh Migas kepada LJP, baik secara bulanan ataupun tahunan. D. A. akan menyampaikan laporan mengenai pembayaran PPh Migas kepada LJP. 	<p>keseluruhan B2MIGAS.</p> <p>Telaah selesai tidak ada</p>	<p>Selesai (Juni 2012)</p>
		<p>Retromenansi BFK:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mendapatkan informasi yang merupakan 				<p>Pada tanggal 23 Juni 2012 telah diadakan rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait antara lain DJPB, DJK dan B2MIGAS. Berdasarkan hasil rapat tersebut diketahui bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dari total pelaksanaan pembayaran PPh Migas sebesar USD 110,75 juta, kekurangan PPh tahun 	<p>Selesai (Juni 2012)</p>	

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas UKPP Tahun 2011 - 484-

Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

No	TAMBAHAN	KELAS FIKSASI (*)			REVISI TAMBAHAN	PROGRESS REPORT	JADWAL PESELESAIAN	
		1	2	3				
		<p>tentang perubahan ketentuan yang mengatur biaya yang dapat dibebankan pada Migas dari KES</p> <p>2. Membuat mekanisme pemantauan dan pengujian terhadap PPh Migas yang lebih memadai dan</p> <p>3. Meningkatkan sistem kewajiban dan ketepatan pembayaran PPh Migas serta menguji ketepatan dan sanksi atas keterlambatan pembayaran PPh Migas sesuai peraturan perpajakan.</p>		3		<p>2009 terdapat US\$ 1,14 juta seharusnya sebesar US\$ 4.289.279,07 karena terdapat pembayaran B.T. Itochu West Java sebesar US\$ 81.564,00 yang belum diperlihatkan oleh Tim Peneliti BPK RI</p> <p>k. Atas ketepatan pembayaran tersebut, dilakukan audit ke atas BPOMIGAS terkait dengan foto copy perhitungan jumlah pajak yang terutang dan pemisahan pembayaran antara PPh Badan dan PPh pasal 26 ayat 14 melalui S-1962/PJ.04/2012 tanggal 3 Juli 2012.</p> <p>g. Direktorat Penertarikan dan Pengalihan telah mengirimkan surat kepada KPP Migas nomor S-2003/PJ.04/2012 tanggal 30 Juli 2012 tentang Tindakan Lanjut Pemeriksaan Maksudnya PPh Migas berdasarkan hasil Temuan Pemeriksaan BPK RI atas SPJ Keuangan Keuangan Tahun 2011. KPP Migas telah melakukan tindak lanjut dengan menyampaikan Surat Timbuan dan melakukan tanding kepada Wajib Pajak.</p>		
					<p>3. Peningkatan daya hal in CLP telah dilakukan:</p> <p>a. Penertarikan KPP Migas yang akan</p>	<p>Selesai April 2012</p>		

Tindakan Lanjut Pemeriksaan BPKI atas UKPP Tahun 2011 - 485-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (LAK2012)

No	TITIK	PENGALIHAN TERTAMBAH	KELAS FIKSASI (*)			RENCANA TINDAK	PROGRESS EFFORT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
2.	Sistem Pengumpulan Ases					<p>melakukan perubahan dan pengujian keagihan PPh Migas yang telah menjadi atas KKKS (PMK No. 28/PMK.01/2012 tentang organisasi dan tata laksana instansi vertikal DJP).</p> <p>b. Dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan isortasi dengan kegiatan migas, BPMIGAS, DUA, dan DJP akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait lainnya mengenai PPh Migas Pasal 10 PMK Nomor 28/PMK.01/2012.</p>	<p>Telaah ditindaklanjuti dan akan dibuat</p> <p>Selasa (April 2012)</p>	
2.1	Sistem Pengumpulan Ases dan Pencabutan	Terdapat keterlambatan dalam pencabutan dan penyelesaian Ases Tetap yang berpengaruh terhadap tercapainya pengisian Ases Tetap	X			<p>4. DJP akan melakukan verifikasi dan pemeriksaan terhadap kelengkapan pembayaran dan sanksi atas keterlambatan pembayaran PPh Migas dan KKKS yang bersangkutan.</p>	<p>Telaah selesai ditindaklanjuti</p> <p>Target selesai Agustus 2012. Saat ini masih dalam proses</p> <p>Kebijakan terhadap ketuntasan pembayaran dan sanksi atas keterlambatan pembayaran PPh Migas telah dapat dilaksanakan. Saat ini DJP telah menyampaikan Surat Perintah dan melakukan konseling kepada Wajib Pajak sebagai tanggapan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.</p>	<p>Target selesai Oktober 2012</p> <p>1P masih dalam proses</p>

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2011 -436-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

No	TITIK	PENGUJIAN TERMINAL	KLASIFIKASI (*)			RENCANA TEKNIK	PROGRESS EFFORT	JADWAL PEWELASAN
			1	2	3			
	Pencapaian Ases Telep	<p>dengan secara LKPP Tahun 2011, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terecap Ases Telep pada sepuluh KL dengan nilai perolehan Rp4,12 triliun belum dilakukan IP; 2. Masih terdapat selisih nilai kontrak hasil IP pada DUEM dan SIMAK ERN pada 40 KL senilai Rp1,54 triliun; 3. Terdapat Ases Tanah Jaan Nasional pada Kementerian Pekerjaan Umum senilai Rp108,03 triliun tidak dapat disekuti karena adanya kendala belum selesai dilakukan IP dan hasil IP tidak selesai; 4. Ases Telep pada 14 KL senilai Rp6,00 triliun tidak diketahui keberadaannya; 5. Ases Telep hasil IP pada 100 KL senilai Rp3,00 triliun dicatat garris; 6. Pelaksanaan IP belum mencapai penyelesaian secara maksimal Ases Telep sehingga pembayaran belum dapat melakukan pembayaran Ases Telep; 7. Ases Telep belum dilakukan rekening kepan lihan pada 25 KL senilai Rp81,00 				<p>Mensistren aset yang belum di IP dan melaksanakan penilaian atas Ases Telep yang belum dilakukan IP.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Telah siap saat wawancara dengan Ases dan Melaksanakan Ases Telep yang tidak terdapat Ases Telep yang akan dilakukan IP b. Untuk B KL karena telah terdapat BOB Center yang memiliki Ases Telep yang belum dilakukan IP. <ol style="list-style-type: none"> 2. DUKK telah melakukan penataan dan Dirjen Kerkas Marjalis telah melaksanakan anggi kepiha KFRML melalui surat nomor: <ol style="list-style-type: none"> a. S-1498/MK/2012 tanggal 25 Jun 2012 untuk asbes di Kem. PU, KK> dan Kuntikunt. b. S-1628/MK/2012 tanggal 13 Juli 2012 untuk asbes di Kem. Pertanian, BM, dan BPDMA. c. S-1735/MK/2012 tanggal 24 Juli 2012 untuk asbes di Kem. Perencanaan dan Kek. Pembangunan. d. Saat ini sedang dalam proses IP pada B KL dengan anggaran per 7 Februari 2013 telah dibelikan B82 Sabter dan 834 sabter 830099775. 		
						<p>Tertahit selisih nilai kontrak hasil IP:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pengumpulan data rinci setiap kontrak nilai hasil IP BMM per sabter 		Selesai Minggu II Juni

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Terapan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2011 - 487.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (LAK2012)

No	TITIK	PENGALIHAN TITIK	KLASIFIKASI (*)			RENCANA TITIK	PROGRESS REPORT	JADWAL PEWILAYAHAN
			1	2	3			
						<p>sektor dan BML.</p> <p>2. Meningkatkan kualitas Keuangan regional Kementerian PU terkait data tanah jalan nasional yang belum terIP.</p> <p>3. Melaksanakan pemetaan perizinan dan tanah untuk setiap wilayah kerja KPKUL, KEMDI DUKN</p> <p>4. Melaksanakan penelitian</p>	<p>KPKUL</p> <p>Revisi rencana Kementerian PU telah dibatalkan dan data sektor telah disampaikan kepada KPKUL untuk dibatalkan pemetaan.</p> <p>DJPN telah melakukan pemetaan permasalahan. Untuk Keluasan Wilayah MGS telah ditunjukkan target kepada KPKUL melalui surat Nomor:</p> <p>E. S-1495/KM.2012 tanggal 25 Juni 2012 untuk sektor di Kem. PU, KKP, dan Kemahub.</p> <p>L. S-1629/KM.2012 tanggal 13 Juni 2012 untuk sektor di Kem. Perencanaan, BM, dan SPDM.</p> <p>G. S-1705/KM.2012 tanggal 29 Juni 2012 untuk sektor di Gov Perencanaan dan Kev Paratubogas.</p> <p>Saat ini masih dilakukan proses perbaikan terhadap aset jalan nasional dan sektor yang hollow di IP pada R KL dengan progress 7 Februari 2013 telah realisasikan 882 Sektor dari 894 sektor atau 99,77%</p>	<p>selesai</p> <p>selesai</p> <p>Target selesai Oktober 2012. Saat ini masih dalam proses</p>

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2011 -489-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (LAK2012)

No	TITIK	PENJELASAN	KLASIFIKASI (*)			REVISI TITIK	PROGRESS REPORT	JADWAL PEWILAYAHAN
			1	2	3			
			X			<p>Terlihat aset yang tidak dicatat. Telah selesai ditindaklanjuti</p> <p>1. Penyempurnaan Surat Menteri Keuangan Nomor 582/MBK.06/2012 tanggal 8 Juni 2012, berupa 14. KL. 164 Tidak Lajut Terusan BPK atas LKPP 2011, yang menyamakan BGR-KL:</p> <p>Mencatat unit yang terganggu izasi di lingkungan KL utuc mencakup: itu internal guna mendusun dan melakukan verifikasi atas barang yang tidak diformulasikan.</p> <p>Mempastikan incian barang yang tidak dibenarkan.</p> <p>Meningkatkan pemeliharaan barang yang tidak diformulasikan oleh IP sebagai pemeliharaan dengan KMK Nomor 27/TK/MK.CO/2011</p> <p>2. Menyampaikan surat pembinaan kepada BPK atas incian aset tetap yang masih belum (tidak) disampaikan: Direktur DPM Nomor 3-</p>	Selesai Minggu II Juni 2012	Selesai Minggu II Juni 2012

Tidak Lajut Penerimaan terhadap Penerimaan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2011 -430-

Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat Tahun 2012 (LAKS2012)

No	TAMBAHAN	PENYISWAAN TERMINAL	KLASIFIKASI (*)			REVISI/TAMBAHAN	PROGRESS EFFORT	JADWAL PEWILAYAHAN
			1	2	3			
						<p>13/06/2012 tanggal 14 Juni 2012 kepada BPK dan Pembinaan Rindar Jasi Tegal Tahun 2011-2012 dan LKPP Tahun 2011 yang berisi pembinaan mengenai MBR serta laporan dan informasi mengenai KL untuk masing-masing instansi dan instansi yang disambungkan TAMPAH MILIKI pada 7 KL.</p>		
						<p>3. Melakukan koordinasi teknis dengan masing-masing KL terkait rencana aksi tugas yang menjadi tujuan dan fungsi tugas yang telah dilaksanakan oleh masing-masing KL.</p>	<p>DJKN telah melaksanakan rapat koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum pada tanggal 9 Juli 2012 untuk membahas BMD yang tidak diketahui keberadaannya pada Kementerian Pekerjaan Umum senilai Rp6,59 triliun (96% dari total tahun senilai Rp683 triliun).</p> <p>Kementerian PU telah melakukan pembahasan dengan Isid sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • telah dilakukan kembali Rp4,9 triliun; • tidak ditransferkan Rp148 miliar (Rp147,7 miliar dalam proses penghapusan dan Rp313 juta dalam proses Tuntutan Ganda Rp100 juta); • masih dalam pembahasan Rp1,18 triliun. 	<p>Selanjutnya Minggu Juli 2012</p>
						<p>4. Melakukan pertemuan langsung dengan KL dan Keresnabul dalam rangka pembahasan teknis terkait temuan dan tindak lanjut sebagaimana telah</p>	<p>Tahap dilaksanakan rapat koordinasi terintegrasi pada tanggal 19 Juli 2012 untuk membahas rencana temuan awal yang akan proses tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh masing-masing KL. Dari pertemuan</p>	<p>Sekesai Minggu Juli 2012</p>

Tindak Lanjut Pemerintahan Terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2011 - 431

Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

No	TITIK	PENJELASAN	KELAS FIKSASI (*)			RENCANA TINDAK	PROGRESS EFFORT	JADWAL PESELESAIAN
			1	2	3			
						<p>dapatkan dari Menteri Keuangan kepada KL atas barang yang tidak diketahui keberadaannya.</p> <p>5. Meninjau tindak lanjut kendali BPK atas barang yang tidak diketahui keberadaannya dan penyelesaiannya sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 27/KM/KU.06/2011.</p>	<p>bersifat telah diperoleh namun belum dapat K/L namun belum dapat terdapat yang TAMPIL NILAI.</p> <p>Tindak lanjut TGF atas EMY yang tidak diketahui keberadaannya pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</p>	<p>Juli-Desember 2012</p>
	X					<p>Terdapat hasil IP yang dicatat pada:</p> <p>1. Meningkatkan koordinasi internal Ditjen Manajemen Monev dan pengawasan laporan hasil IP pelaksanaan kegiatan yang telah disampaikan saat Direktur BMN saat ini 5-063/KM/2012 tanggal 14 Mei 2012 kepada 35 KPWL untuk menyampaikan laporan penilaian hasil IP yang akan berlaku.</p> <p>2. Meningkatkan koordinasi dengan 3 K/L untuk meningkatkan kualitas dan penyelesaian pada saat terdapat hasil IP telah disampaikan saat Menteri</p>	<p>Tahap pelaksanaan hasil penyelesaian tindak lanjut laporan BPK atas permasalahan yang telah diidentifikasi oleh Dit. Perizinan, Kanal VIII, LKRN, dan KPRN. Status yang masih belum selesai telah ditindaklanjuti oleh Ditjen BMN.</p>	<p>selesai</p>
								<p>Selesai</p> <p>9Maret - Juni 2012</p>

Tindak Lanjut Pemerintahan terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2011 -482-

Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

No	TAMBAHAN	PENYISWAAN	KELAS FIKSASI (*)			REVISI TAMBAHAN	PROGRESS REPORT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
					3	<p>Keuangan Nomor 5/2012/TK/02/2012 tanggal 8 Juni 2012 tentang J-1.1.1 untuk mendirikan lembaga BPK tersebut dengan indikator:</p> <p>Meningkatkan unit yang bertanggung jawab di lingkungan K1 untuk berkoordinasi melaksanakan tindak lanjut terhadap rencana tersebut</p> <ul style="list-style-type: none"> Mempastikan data nama, alamat, jenis dan jumlah BMM yang dilaksanakan sesuai BFK tercatat terdapat. <p>3. Menyempatkan surat pemintan penjelasan kepada BPK atas tindakan aset tetap yang terjadi tahun. Telah disampaikan surat Direktur BMM Nomor 5/131/M.2/2012 tanggal 14 Juni 2012 kepada BPK melalui Fasilitasi Insan Aset Tetap Tahun Pelaksanaan BPK atas LKPP Tahun 2011.</p>		<p>Selesai Minggu II Juni 2012</p>
					4.	<p>Dalam rangka pemeliharaan aset tetap yang dicatat pada</p> <p>4. Melakukan pemeliharaan pemeliharaan aset tetap pada IP.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ditukut BMM melalui surat No. S-103/M.2/2012 tanggal 8 Juni 2012 telah mengirimkan surat laporan penilaian yang diterima oleh Kantor Pusat DJKN 	<p>Juni - Oktober 2012 (mahlis dalam proses)</p>	

Tindak Lanjut Pemerintahan terhadap Tamuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2011 - 433.

Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

No	TITIK	PENJELASAN	KELAS FIKSASI (*)			REVISI/TAMBAH	PROGRESS/EFFORT	JADWAL PELAKSANAAN
			1	2	3			
						<p>kepada PNL Jakarta :</p> <ul style="list-style-type: none"> Telah dilaksanakan rapat pembahasan pada tanggal 3 Agustus 2012 yang dihadiri oleh Dir. BINA, Dir. Pemas dan K. PNL Jakarta mengenai hasil studi terkait nilai serius nilai IP yang berpengaruh dengan nilai pengembalian saat ini dan dapat nilai neto nilai konkrit pelaksanaan pada dengan menggunakan nilai IP. <p>Berdasarkan hasil monitoring diketahui bahwa telah dibuktikan bahwa nilai serius nilai konkrit saat ini IP. Yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pencapaian pada pada Kelembagaan Agung dan Bina yang terkait pada Layanan Bina Pengguna 2011 K. PNL Telah dilakukan kerangka pelaksanaan pada saat ini Kelembagaan Kelembagaan pada Serius nilai 2012. Berdasarkan verifikasi data pada Kelembagaan Kelembagaan, BINA senilai Rp2,98 triliun yang terdiri dari dasar-ganda adalah Rp1,82 triliun. Setelah dilakukan peninjauan ulang atas nilai Rp1,52 triliun pada SIMAK-BINA maka diperoleh nilai Rp1,39 triliun yang akan nilai dan telah dilakukan pada SIMAK-BINA Serius nilai Tahun 2012. 	November 2012	
						<p>1. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pada</p>		

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Tindakan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2011 -494-

Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat Tahun 2012 (LAKS-2012)

No	TAMBAHAN	KELAS FIKSASI (*)			RENCANA TINDAK	PROGRESS REPORT	JADWAL PEWILAYAHAN
		1	2	3			
		1	2	3			
		8			<p>Terkait penyusunan aset tetap:</p> <p>1. Telah diterbitkan KMK Nomor 53/KM/08/2012 tentang Penerapan Penugasan Barang Milik Negara Besi Asam Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, yang antara lain mengatur penerapan pengisian unit sakti RU yang mulai ditunjukkan pada tahun 2011.</p> <p>2. RPKM tentang Penyusunan Barang Milik Negara Asam Tetap pada Entitas Pemerintahan Pusat sedang dalam proses finalisasi penyusunan.</p> <p>3. Selanjutnya Pemerintah akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:</p> <p>8 Menganalisis nilai masa manfaat, tingkat rencana implementasi penyusunan pada TA 2013.</p> <p>9 Merumuskan kebijakan, sosialisasi dan sosialisasi pada berbagai k/L. Dengan progres: Progres pengembangan aplikasi sosialisasi, dan sosialisasi akan ditunjukkan</p>	<p>Telah selesai difinalisasi</p> <p>Telah selesai difinalisasi</p> <p>Telah diterbitkan PMK No. 1/PMK.08/2013 tentang Penyusunan Barang Milik Negara Besi Asam Tetap pada Entitas Pemerintahan Pusat sebagai dasar penyusunan yang mulai dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2013.</p> <p>Telah Mula Mula DMU telah disusun, dan saat ini sedang menunggu masukan dari Kementerian Pekerjaan Umum terkait akan membuat beberapa sub kelompok DMU</p> <p>Aplikasi dalam tahap penyusunan</p>	<p>Selesai</p> <p>Target selesai akhir 2012</p> <p>Target akhir tahun 2012</p> <p>Target selesai akhir tahun 2012</p>

Tindak Lanjut Pemerintahan Terhadap Tindakan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2011 -495-

Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

No	TAMBAHAN	KELAS FIKSASI (*)			RENCANA TINGKAT	PROGRESS/ EFFORT	JADWAL PEMUELAHAN
		1	2	3			
					<p>tahun 2012</p> <p>di Merupakan pada standar K/L tetapi menyesuaikan terhadap implementasi skema-besik aktual. Ciri-ciri progress: Penyelesaian penyusunan pada tahun standar K/L dilakukan pada tahun 2013.</p>	<p>Penyelesaian penyusunan pada seluruh standar K/L Tagori dilaksanakan tahun 2013</p>	
	X				<p>Terkait aset tetap yang baik dan didukung dokumentasi/kepenilikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyempatkan surat pemintan penjelasan kepada BPK atas rincian aset tetap yang terdapat dalam buku inventaris aset yang diterbitkan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.01/2011 tanggal 14 Juni 2012 kepada BPK melalui Penerimaan rincian Aset Tetap Tahunan Penerimaan BPK atas LKPP Tahun 2011. 2. Menanti KL untuk menindaklanjuti BPK yang tidak didukung dokumen dasar dan lain-lain untuk setelah diproses rincian dan BPK. 	<p>Telah selesai ditindaklanjuti oleh BPK tahun ini dengan penitiansi/audit</p>	<p>Selesai Minggu II Juni 2012</p>
						<p>Telah dilaksanakan rapat koordinasi terpadu pada tanggal 18 Juli 2012 untuk membahas rincian temuan BPK. Hasil rapat progress tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh masing-masing KL. Semua aset tetap yang belum didukung dokumen/kepenilikan</p>	<p>Selanjutnya Minggu Juli 2012</p>

Tindak Lanjut Pemerintahan terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2011 -436-

Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

No	TITIK	PENJELASAN	KLASIFIKASI (*)			REKAPITULASI	PROGRESS/EFFORT	JADWAL PELAKSANAAN
			1	2	3			
						<p>sempai dengan 2 November 2012 telah selesai dilakukan rehabilitasi Rp1,36 miliar.</p> <p>DJKN telah melaksanakan rapat koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, BPN, BAPPENAS dan BAK perdis tanggal 9 Juli 2012 untuk membahas BMN BMN tempo tanah.</p> <p>Untuk BMN berupa tanah DJKN telah berupaya KI untuk melakukan identifikasi dan peninjauan kembali tanah yang belum bersertifikat atau sudah bersertifikat tetapi tidak sesuai ketentuan.</p> <p>3. Berkonfirmasi terus menerus dengan BPN untuk meninjau penyelesaian permasalahan BMN tempo tanah.</p> <p>Untuk BMN berupa tanah DJKN telah berupaya KI untuk melakukan identifikasi dan peninjauan kembali tanah yang belum bersertifikat atau sudah bersertifikat tetapi tidak sesuai ketentuan.</p> <p>88% seputok BMN akan dilaksanakan pada pertengahan tahun 2013 adalah 3.232 bidang tanah di kawasan jalan nasional. Penganggaran sertifikasi untuk tanah jalan nasional yang menjadi tanggung jawab DPR selangge bidang tanah yang akan disertifikasikan tahun 2013 adalah 2.000 bidang tanah.</p> <p>Untuk ERN berupa tanah yang belum dibungakan akan dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Telah diterbitkan Peraturan Bersama Menteri No. 58/PMK/05/2009 & Keputusan BPN No. 24/2009 tentang Penyelesaian BMN tempo Tanah Telah diterbitkan surat Menteri Keuangan No. S-556/MK/06/2011 tanggal 13 September 2011 kepada Kepala BPN tentang penyelesaian rekam 	2013 - 2015 Secara terus menerus	

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2011 - 437.

Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

No	TITIK	PENJELASAN	KELAS FIKSASI (*)			RENCANA TINDAK	PROGRESS EFFORT	JADWAL PESELESAIAN
			1	2	3			
						<p>jenis objeknya. BUMN berupa tanah pada Kementerian Kehutanan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Telah diterbitkan surat Dirjen Ekspansi Negara No. 5-104/KM/2012 tanggal 11 Januari 2012 kepada DJK tentang Pengalokasian Anggaran Perencanaan BUMN berupa tanah: <ul style="list-style-type: none"> Telah diterbitkan surat Menteri Keuangan No. S-4/MK/2012 tanggal 11 Januari 2012 tentang BPN belkondisional dengan BAPPENAS 5 DJK untuk: mengaitkan rencana isoperogram terkait pelaksanaan ekspansi BUMN sebagai "aspek" 5-2005/2012 dan APBN 101 Top di DIPA BPN; Telah diterbitkan surat Dirjen Ekspansi Negara No. 5-435/KM/2012 tanggal 27 Februari 2012 kepada Sistemasi BPN tentang pemetaan target serapitas tahun 2013 sebanyak 5.000 bidang tanah; Telah diterbitkan surat Dirjen Ekspansi Negara No. 3-500/KM/2012 tanggal 12 Maret 2012 kepada seluruh K/L CG (Inkludasi dan peninjauan BPN berupa tanah dan pemetaan aplikasi Sistem Manajemen Pemetaan Tanah Perseminan SIMANTARA); Telah dibentangkan beberapa kali rapat koordinasi dengan BPN, BAPPENAS dan DJK, terakhir pada tanggal 0 s.d. 10 Juli 2012 untuk menganalisis data tanah yang akan disertifikatkan. 		

Tindak Lanjut Pemerintahan terhadap Tujuan Pemeriksaan BPK atas UKPP Tahun 2011 -436-

Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat Tahun 2012 (LAKS2012)

No	TITIK	PENJELASAN TERMINI	KLASIFIKASI (*)			RENCANA TITIK	PROGRESS EFFORT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
			X			<p>Terlihat Acet Tapp diuraikan digunakan pihak lain yang tidak sesuai ketentuan pengalihan BPK</p> <p>1. Menetapkan surat permintaan penjelasan kepada BPK atas mesin acat tapp yang tidak teruraikan. Lebih disampaikan surat Direktur BPK Nomor S-131/KU.3/2012 tanggal 14 Juni 2012 kepada BPK dan Penjabat Dirjen Aspek Tapp Tahunan Penjabatan BPK atas LKPP Tahun 2011.</p> <p>2. Berkoordinasi dengan KL terkait bidang lanjut dengan mengacu pada KMK Nomor 27/LKMK.06/2011.</p> <p>3. Melakukan monitoring atas pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 27/LKMK.06/2011 terkait BPK yang digunakan/biaya tidak sesuai ketentuan.</p>	<p>Telah selesai ditandatangani BPK belan menyakan pakam jawa barat.</p> <p>Sesuai Minggu II Juni 2012</p> <p>Telah dilaksanakan koordinasi dengan KL terkait pada tanggal 10 Juli 2012 untuk membahas kemajuan progress tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh masing-masing KL.</p> <p>Insidien soal biaya yang dibayarkan/dijumlahkan pihak lain tidak sesuai dengan ketentuan sampai dengan 2 November 2012 yang telah selesai ditandatangani sebesar Rp40,33 miliar di 027 dari total temuan sebesar Rp1.032,9 miliar.</p>	<p>Sesuai Minggu II Juni 2012</p> <p>Sesuai Minggu II Juli 2012</p> <p>Jus 2012 Insidien telah selesai proses</p>

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2011 - 499.

Laporan Keuangan Pemerintahan Tahun 2012 (LAK2012)

No	TAMBAH	PENGURANGAN	KELAS FIKSASI (*)			REVISI TINGKAT	PROGRESS REPORT	JADWAL PEWILAYAHAN
			1	2	3			
2.2	Terdapat Kebutuhan dibayarkan IP atas hasil dari IP atau Ases KKS	Pemerintah telah menyelesaikan IP atas seluruh hasil KKS, tetapi masih terdapat kelainan dalam penyelesaian dan penguasaan atas pelaksanaan IP Ases KKS, yaitu:	X			<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah akan terus meningkatkan koordinasi antara Kementerian Keuangan dengan RESOM, BPP, BFMIGAS dan KKS dalam rangka penyelesaian perjanjian aset KKS IP teras, dan akan terus melakukan koordinasi dan verifikasi secara berkala yang dapat dan tidak dapat diidentifikasi 2. Hasil IP Ases KKS berupa pengeluaran sebesar Rp1.000.000.000,00 akan dipotong dari anggaran tahun 2013 dan akan dipotong dari anggaran tahun 2014 3. Hasil IP Ases KKS berupa pengeluaran sebesar Rp1.000.000.000,00 akan dipotong dari anggaran tahun 2013 dan akan dipotong dari anggaran tahun 2014 4. Terdapat 4.500.000,00 yang akan dipotong dari anggaran tahun 2013 dan akan dipotong dari anggaran tahun 2014 5. Pemerintah akan melakukan peninjauan atas aset KKS yang berupa script dan data yang kondisinya rusak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. DKK telah menyelesaikan surat kepada BFMIGAS tanggal 13 Juni 2012 tentang penyelesaian hasil IP BMM KKS. Surat ini merupakan proses penyelesaian. 2. DKK telah menerima BFMIGAS untuk melakukan peninjauan dan verifikasi atas aset KKS yang akan dipotong dari anggaran tahun 2013 dan akan dipotong dari anggaran tahun 2014. DKK telah menerima BFMIGAS untuk melakukan peninjauan dan verifikasi atas aset KKS yang akan dipotong dari anggaran tahun 2013 dan akan dipotong dari anggaran tahun 2014. 	Terdapat kelainan dalam penyelesaian hasil IP BMM KKS. Surat ini merupakan proses penyelesaian.

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2011 - 500-

Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat Tahun 2012 (LAK2012)

No	TITIK	PENJELASAN TITIK	KELAS FIKSASI (*)			RUMAH TINGGI	PROGRESS EFFORT	JADWAL PEWELASAN
			1	2	3			
		<p>Rekomendasi BPK:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperbaiki metode dan pengendalian atas pelaksanaan IP Asat KKK yang masih berlangsung dan menuntaskan kembali hasil IP yang sudah dilaksanakan; 2. Menetapkan prosedur verifikasi data Harori III ke dokumen sumber data Asat KKK yang dipertahakan tahun 2010 				<p>Syasarat: 681 sejumlah 12.886 ibu sat dengan nilai pembelian US\$ 8.989.430.703 dan nilai wajar Rp44.346.556.307,37 pada 31 KKK telah ributkan dengan memetica ruben panribung lialal AFB yang arla</p> <ol style="list-style-type: none"> a. verifikasi kewajaran pendian asal: 21.870 ibu sat, dengan nilai pembelian US\$ 7.063.679.624 dan nilai wajar Rp1.042.238.018.373 pada 31 KKK telah dibukun cengat memetica sunat kulanega dari KKK; b. Pemerintah telah rinyan rakar bliritali kuaa BPK untuk penghapusan BMM KKK, berisikan kilitasi lialal lialal, arilpa lialal penghapusan BMM KKK yang banjaban lialal; c. Terkait dengan sat KKK yang dikulasi an digunakan oleh pihak ketiga, pemerintah telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • DUKN telah rinala BFMIB3/KKK untuk menyelesaikan proses serah terima penghapusan berdasarkan ketentuan PP Nomor 2 Tahun 2006; • EMM KKK PLOPI telah dibarkan penghapusan kepada Yayasan PCR; • PLOPI telah rinalal serah terima penghapusan proses penghapusan rinalal 		

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2011 - 501-

Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

No	TITIK	PENCAPAIAN	KELAS FIKSASI (%)			RENCANA TINDAK	PROGRESS EFFORT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
						<p>pengadaan kepada BPMIGAS aset KKKS FLCP yang telah diserahkan pengembangannya kepada Yayasan PCR.</p> <p>1. Target PBM KKKS tahun 2012 adalah embai US\$2,34 miliar yang tersebar dalam 72 lokasi KKKS pada 12 Kantor LKRN. Laporan nilai IP BMM KKKS 2012 yang sudah diterima per 25 Januari 2013 adalah sebanyak 21.028 firma saat dengan nilai perkiraan sebesar US\$9.957.738,33 atau 41,03% dari target IP tahun 2012 di. Dengan pencapaian tersebut, maka IP BMM KKKS telah dilaksanakan 85,05% saat KKKS per bulan di 31 Desember 2010 (US\$298-M atau 12,13% dari 2,46 M). Sisanya (US\$1.659-M) merupakan aset yang tidak diberikan dan saat ini sedang disiapkan kebijakan seperti di Meantel untuk mendiskanjuti permasalahan tersebut.</p>		
						<p>2. Menyusunakan Butiri Teknis Invenstrasi dan Bulebin Teknis. Perintah ini akan sangat membantu negara ini pependirian IP terhadap aset KKKS yang belum di IP Bulebin Teknis invenstrasi</p> <p>3. Bulebin Teknis Invenstrasi Aset KKKS telah selesai dipertahakan dan dipertahakan pada tanggal 02 Juli 2012</p> <p>4. Bulebin Teknis Penilaian Aset KKKS telah selesai</p>	<p>Selanjut Juni 2012</p> <p>Taunt selesai Duluu 2012</p>	

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2011 - 502.

Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

No	TAMBAHAN	PENYISIHAN	KLASIFIKASI (*)			REVISI TAMBAHAN	PROGRES PEKERJAAN	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
					3	<p>diperiksa keauthen dengan BPK RI melalui surat S-490/STN.42012 tanggal 20 Juni 2012.</p> <p>3. Menutupkan prosedur verifikasi cara Harmoni II atas aset KKKS yang dipratih adalah tahun 2010 untuk kemudian disampaikan kepada Kementerian ESDM untuk dipulihkan.</p>	<p>dipaparkan dan Bulat: Penilaian telah dikomunikasikan ke BPK RI pada rapat tanggal 2 November 2012.</p> <p>Dalam rangka meningkatkan prosedur validasi dan verifikasi data Harmoni III tersebut, telah diadakan workshop/pembekalan oleh BPK/PPKS mengenai proses dan mekanisme pelaksanaan 881 yang dilaksanakan oleh Harmoni II pada tanggal 18-19 Juli 2012. Hasil kegiatan tersebut, meliputi telah penyusunan prosedur validasi dan verifikasi cara Harmoni II untuk aset perolehan di atas 2010.</p> <p>Pemerintah telah menetapkan PMK No. 248/PMK.05/2012 sebagai pengganti PMK No. 02/PMK.05/2011 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset Lunas BUMN yang berasal dari KKKS dan PMK No. 248/PMK.05/2012 sebagai pengganti PMK No. 230/PMK.05/2011 tentang Setor Akuntansi Transaksi Eksternal yang salah satu langkahnya tentang verifikasi dokumen sumber sehingga akan memudahkan Kementerian ESDM untuk memverifikasi dokumen sumber, dan melakukan pencatatan serta pelaporan aset KKKS secara</p>	Oktober 2012

Tindak Lanjut Pemerintahan terhadap Tindakan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2011 - 503-

Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

No	TITIK	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK	PROGRESS REPORT	JADWAL PEWILAYAHAN
		1	2	3			
2.3	Pelaksanaan IP Asst Ets BPPN Tidak Dendaskan Dabumen yang Valid	<p>Terdapat keberatan dalam pelaksanaan inventarisasi, perhitungan, dan pendataan terhadap Asst Ets BPPN yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemerintah belum menetapkan ketentuan secara apa Asst Ets BPPN berupa Asst Kredit senilai Rp 18,25 triliun Asst Ets BPPN yang telah diserahkan kepada PUPR senilai Rp 11,18 triliun telah dicampur oleh dabumen sumber yang valid Asst Ets BPPN berupa tagihan PKPS senilai Rp 8,83 triliun belum didukung kesepakatan dengan Pemasang Saham Mula aset properti adalah: BTT item belum dinilai, dan Pemerintah juga belum dapat menyajikan nilai tanah yang dapat direalisasikan oleh Asst Ets BPPN yang berupa pinang 	X	<p>Pemerintah akan melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penelitian dan pemantauan secara berkala Bank Asst Penyempurnaan Metode Penilaian aset sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Furtojat hukum Asst Ets BPPN, dan dasar pengukuran nilai aset BPPN pada Asst Ets BPPN sebagai dasar penghitungan aset kredit Asst Tindakan Kiri (ATK) dan nilai pada Dukuman Kredit sebagai dasar penghitungan aset kredit Kiri ATK. Furtojat pengakuan dan pemertan serta penyajian aset sisa aset eks BPPN, khususnya aset kredit, dabumen sumber yang dilikui, dan metode 	<p>Sesuai dengan Rencana Timbangan Tidak Lanjut Hasil Perencanaan BPPN atas LKPP Tahun 2011, seluruh dabumen penilaian yang angkasas nilai Bank Asst ke pada BPPN telah dituntun.</p> <p>Telah selesai ditindaklanjuti</p>	<p>Selesai Juni 2012</p> <p>Selesai Juli 2012</p> <p>Selesai Juni 2012</p>	

Tidak Lanjut Pemerintah terhadap Tuntutan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2011 - 504-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (LAK2012)

No	TAMBAHAN	KELAS FIKSASI (*)			RENCANA TINDAK	PROGRESS EFFORT	JADWAL PEMVELESAAN
		1	2	3			
		<p>Balokansi BEK: Melaksanakan inonisasi dan perhitungan aset BPPK dengan menggunakan standar ATK (tidak ada perubahan dengan standar, menggunakan nilai PUPS dengan pengingat bahwa, nilai awal aset properti dan memisahkan aset Ecs BPPN</p>		3	<p>penelitian, dalam Laporan Keuangan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Fasesan Pengujian yang telah bertukar hak milik ke BPPK, serta PUPS atau nilai kembali obligasi PUPS dan K. Sp. S. Ag. Ag. 3. Terhadap aset kredit: <ol style="list-style-type: none"> a. Verifikasi terhadap aset kredit ATK pada Modal K.M. II dengan data SAPS dan dokumen, serta b. Rekamasi data hasil pengujian aset kredit TA 2011 dan S. S. S. I TA 2012 dengan PUPN. c. Verifikasi terhadap aset kredit Modal K.M. II dengan dokumen hukum dan lain-lain. 4. Terhadap aset properti: <ol style="list-style-type: none"> a. Penilaian B17 aset properti yang belum dilakukan penilaian seragam dalam proses pemberian oleh pemerintah. b. Pengadaan dokumen aset. 	<p>Tahap selesai ditindaklanjuti</p> <p>Tahap selesai ditindaklanjuti</p> <p>Tahap selesai ditindaklanjuti</p> <p>Tahap selesai ditindaklanjuti</p> <p>Tahap selesai ditindaklanjuti</p> <p>Tahap selesai ditindaklanjuti</p> <p>Tahap selesai ditindaklanjuti</p>	<p>Selesai (Juli 2012)</p> <p>Selesai (Juni 2012)</p> <p>Selesai (Juli 2012)</p> <p>Selesai (September 2012)</p> <p>Selesai (Agustus-September 2013)</p>

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2011 - 505.

Laporan Keuangan Pemerintahan Tahun 2012 (Lanjutan)

No	TAMBAHAN	KLASIFIKASI (*)			REVISI TAMBAHAN	PROGRESS REPORT	JADWAL PEWILAYAHAN	
		1	2	3				
24	<p>Penyelesaian BPYBDS dan Penyelesaian BPYBDS dalam PP yang Berdampak Terhadap Penyelesaian APBD</p>	<p>Penyelesaian BPYBDS dan Penyelesaian BPYBDS dalam PP yang Berdampak Terhadap Penyelesaian APBD</p>	<p>1. Misi BPYBDS adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan meningkatkan pendapatan daerah. BPYBDS akan dilaksanakan pada tahun 2012.</p> <p>2. DUKN sebagai Unit Akuntansi Pembantu SUN-Instansi Pemerintah yang akan melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan penganggaran pusat pemerintahan yang akan dilaksanakan oleh BUNM.</p> <p>3. Masih terdapat BPYBDS untuk RAGAG yang akan dilaksanakan oleh BUNM.</p> <p>4. Pemerintah akan melaksanakan kebijakan BPYBDS yang akan dilaksanakan dalam PP dengan misi penyelesaian masalah BPYBDS.</p>	<p>1. Mengingat kondisi antara Kementerian Keuangan dan K/L telah lebih dari setahun surat DUKN K/L atau nama Menteri Keuangan Mo S. SUDHARNO yang meminta kepada K/L untuk mengizinkan penyetoran BPYBDS ke rekening BUNM.</p> <p>2. Saat ini sedang proses penyetoran BPYBDS ke rekening BUNM yang akan dilaksanakan pada tahun 2012.</p>	<p>1. Mengingat kondisi antara Kementerian Keuangan dan K/L telah lebih dari setahun surat DUKN K/L atau nama Menteri Keuangan Mo S. SUDHARNO yang meminta kepada K/L untuk mengizinkan penyetoran BPYBDS ke rekening BUNM.</p> <p>2. Saat ini sedang proses penyetoran BPYBDS ke rekening BUNM yang akan dilaksanakan pada tahun 2012.</p>	<p>1. Mengingat kondisi antara Kementerian Keuangan dan K/L telah lebih dari setahun surat DUKN K/L atau nama Menteri Keuangan Mo S. SUDHARNO yang meminta kepada K/L untuk mengizinkan penyetoran BPYBDS ke rekening BUNM.</p> <p>2. Saat ini sedang proses penyetoran BPYBDS ke rekening BUNM yang akan dilaksanakan pada tahun 2012.</p>	<p>1. Mengingat kondisi antara Kementerian Keuangan dan K/L telah lebih dari setahun surat DUKN K/L atau nama Menteri Keuangan Mo S. SUDHARNO yang meminta kepada K/L untuk mengizinkan penyetoran BPYBDS ke rekening BUNM.</p> <p>2. Saat ini sedang proses penyetoran BPYBDS ke rekening BUNM yang akan dilaksanakan pada tahun 2012.</p>	<p>1. Mengingat kondisi antara Kementerian Keuangan dan K/L telah lebih dari setahun surat DUKN K/L atau nama Menteri Keuangan Mo S. SUDHARNO yang meminta kepada K/L untuk mengizinkan penyetoran BPYBDS ke rekening BUNM.</p> <p>2. Saat ini sedang proses penyetoran BPYBDS ke rekening BUNM yang akan dilaksanakan pada tahun 2012.</p>

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2011 - 506-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (LAK2012)

No	TAMBAHAN	PENYISWAAN TERMINAL	KLASIFIKASI (*)			REVISI TINGKAT	PROGRESS EFFORT	JADWAL PESELESAIAN
			1	2	3			
		<p>BALANCE SHEET:</p> <p>1. Pemecatan dan pengurangan atas BUMN yang akan dibagikan kepada BUMN sebagai PAM dengan melibatkan BUMN selaku unit akuntansi BUMN melalui PAM III/2011</p> <p>2. Melaksanakan penutupan BPVED3 sebagai PAM dan</p> <p>3. Priblaku atas selisih nilai antara penutupan BPVED3 dengan nilai yang akan dibagikan dalam PP.</p>			3	<p>Surat Direktur Jenderal Kesyasa Negara nomor S.1205/M.2012 tanggal 1 Juni 2012 kepada Direktur Jenderal Anggaran untuk melaksanakan rabin pemecatan/bekas pada No. yang sejak saat pelaksanaan direncanakan untuk dilaksanakan sebagai PAM pada BUMN.</p> <p>Pada tanggal 13 Juni 2012 telah dilakukan rapat kondisional dengan D.A. dan D.U.PU mengenai pelaksanaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan perubahan lebih lanjut yang melibatkan J.A., D.U.KA, D.U.P., Bapenas, dan Kementerian BUMN dikondisikan oleh CJAJ; - Melakukan sosialisasi ke semua D.U.KA, D.U.PU, DUAJ kepada KI terkait pelaksanaan KI yang merupakan pinjaman luar negeri untuk pengadaan BUMN yang sebelumnya disalurkan akan kepada BUMN dikondisikan oleh CJAJN. <p>3. Akan dilakukan pertemuan dengan PLN dan Kementerian ESOM untuk membahas kemungkinan pemecatan rata-rata 70% Esom.</p>	<p>note cina bersus antara DUA, DUMN, dan DUPB, sehingga 31 Agustus 2012 dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jangka pendek: <p>Dalam rangka penyusunan RAPBN 2013 perlu diadakan forum pertemuan antara DUA, DUKA, Kementerian BUMN dan BUNN terkait untuk meningkatkan kerjasama dengan lembaga dengan terwujudnya K.I. atau BUNN dibelant Forum tersebut juga telah dilakukan sebelum dilakukan pelaksanaan IF-Page Delimitasi TA 2013.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jangka Panjang: <p>Mempunyai prioritas sebagai dana yang digunakan sebagai penggerak kepada BUMN dan secara teknis akan tetap menjadi timunan rabin pengalihan untuk meningkatkan aset aset serta memopulasi akuntabilitas pemenuhan ran penganggaran.</p>	<p>Jul 2012</p>

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2011 - 507.

Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

No	TITIK	PELUFUSAN TERMINASI	ELAS FIKSASI (%)			RENCANA TINDAK	PROGRESS REPORT	JADWAL PEWILAYAHAN
			1	2	3			
2.b	Sistem Pelanggaran dan Pelaporan Leasing Non Struktural, Hibah, dan Subsidi Lainnya dalam UKPP Belanja Daerah Secara Konektivitas dan	<p>Program dan pelaksanaan atas dasar dan implementasi SPRL leasht, terapat pms selesaian dimana ada subsektor berikut:</p> <p>1. Pemerintah perlu mengaji program aset UEL sebagai investasi kerta</p>	X		<p>1. Mengingat laporan PT PIA sudah sebagai bahan pertimbangan ESOM.</p> <p>2. Telah dilakukan pemetaan jenis selain tersebut dan sisi nilai dan jumlah aset. Selanjutnya DUKM akan menyiapkan soal soal kepada BAKIN dan K.L. akan dilakukan terhadap masing-masing satuan tersebut.</p> <p>3. Sejak Tahun Anggaran 2013 tidak ada lagi penganggaran uruc aset yang akan disalurkan kepada BUMN yang akan diadakan FMM.</p> <p>4. Nilai aset K.L. sudah aset yang akan disalurkan dalam BASTO dalam rencana Pemerintah akan segera.</p> <p>5. Pemerintah akan melakukan kajian tentang pengujian dan pengujian aset UEL aset aset dengan UJ. Terao 1 tahun 2014 agar dapat terhitung sebagai pertanggungjawaban dan pelaporan lembaga non struktural, yewasan dan</p>	<p>penyempurnaan BPK.</p> <p>- Peninjauan agar proyek-proyek holding yang bersifat sebagai aset yang dapat didanai oleh internal PLN, sehingga aset yang dihasilkan tidak lagi dianggap sebagai BUMN.</p> <p>Pada tanggal 11 September 2012 telah dilaksanakan rapat antara DUKM bersama dengan Kementerian ESOM dan PT PLN untuk melaksanakan rekonsiliasi guna memverifikasi nilai BFCYEDS aneal hasil temuan BPK. Saat ini sedang menunggu jawaban dari K.L. mengenai ESOM atas hasil rekonsiliasi tersebut.</p> <p>Telah dilakukan rapat untuk memindahkan nilai aset tersebut ke pada Perum Jamb, FT Angkas Pura I, PT Angkas Pura II</p> <p>Telah selesai diindukat</p>	<p>Oktober 2012 (Hesal PMK-SAPRI dalam proses finalisasi)</p>	
								<p>Program dan pelaksanaan atas dasar dan implementasi SPRL leasht, terapat pms selesaian dimana ada subsektor berikut:</p> <p>1. Pemerintah perlu mengaji program aset UEL sebagai investasi kerta</p>

Tindak Lanjut Pemerintahan terhadap Terapan Pemeriksaan BPK atas UKPP Tahun 2011 - 506-

Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

No	TITIK	PELFIKSIAN TERMINI	ELAS FIKSASI (%)			RENCANA TINDAK	PROGRESS EFFORT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
		vepasan dan kerencananya			3	<p>pendapatan ribah dan biaya yang bersumber dari ribah.</p> <p>4. Telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Persanditeraan dan Pengamanan Nomor 184/PE/2.11 tentang Penambahan dan Pengurangan UEL dalam daftar UB, Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BL. Pemerintah akan menyetujui Daftar Lainnya yang baru dibentuk rekening yang sudah terbentuk namun belum ditetapkan sebagai UEL.</p>	<p>Telah selesai ditindaklanjuti</p> <p>Desember 2012</p>	
3.	Sistem Pengendalian Ekuitas							
3.1	Tinjauan Sistem Nilai SAL Tahun 2011 antara lain dengan Cabangnya	<p>Hasil pemrisasian terhadap saldo kas dan nilai SAL menunjukkan selisih sebesar Rp17,45 miliar antara saldo riak kas per 31 Desember 2011 dengan nilai catatan SAL. Selisih tersebut terjadi antara lain karena hal-hal sebagai berikut</p> <p>1. Tercepat akumulasi Uang Persediaan yang sudah digunakan oleh Kementerian Luar Negeri sebesar Rp88,00 miliar,</p>				<p>Terlihat saldo UP di Kemendik</p> <p>1. Kurang an Kas yang akan bertoo difiasi dengan Revisi lain -un M yang di lue, dan mengkan pengalihan pengalihan pemisahan UP di Kemendik yaitu untuk penyelesaian dan penyelesaian dan Bendahara Pengeluaran yang telah ditetapkasikan menaf Asri Lahir. dan pelajaran rekening dan prosedur penyusunan UP di Kemendik secara lebih</p>	<p>Langkah-langkah penyelesaian permasalahan ini akan di lakukan pada Desember 2012 dalam proses</p>	<p>Desember 2012 (dalam proses)</p> <p>Tercepat selesai September 2012. Saat ini masih dalam</p>

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas UKPP Tahun 2011 - 510-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (LAK2012)

No	TAMBAHAN	PENJELASAN TAMBAHAN	KLASIFIKASI (*)			REVISI/TAMBAHAN	PROGRESS REPORT	JADWAL PEWILAYAHAN
			1	2	3			
		<p>tepat/belum ajektif/unggul/lebih/awak:</p> <p>2. Penurunan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2011 berbeda sebesar Rp18,95 miliar dengan nilai transaksi selama tahun 2011;</p> <p>3. Masih beredar selisih utang antara nilai pembatas penerimaan kiriman Jang (KUP) dengan transaksi pengeluaran KU sebesar Rp12,82 miliar; dan</p> <p>4. Dalam etektinya retribusi realisasi bidang antara SAU dan SALIS hingga masih terdapat selisih sebesar Rp10,03 miliar.</p> <p><u>Bakamulisi BPR:</u></p> <p>1. Memperbaiki perbandingan pencatatan transaksi non anggaran; dan</p> <p>2. Segera menyelesaikan salisih SAL dengan baik/utuh.</p>			3	<p>menjadi</p> <p>2. Peninjauan jabatan hal ini Diingat Perencanaan telah mempersiapkan final Perencanaan Menteri Keuangan mengenai perincian Ulang Perencanaan dalam Visi atau Asing dan diutamakan dapat dilaksanakan dalam waktu 2 bulan.</p> <p>3. Penyediaan dana dalam bentuk valas akan dilakukan oleh Direktorat Pengalihan Kas Negara, Diingat Felembaharan untuk valas USD, JPY, dan EURO sesuai mekanisme yang selama ini telah dilaksanakan oleh KPPN Jakarta 41, untuk valas selain USD, JPY, dan Euro akan disediakan oleh dalam bentuk LSC yang selanjutnya akan diarsipkan ke valas di masing-masing perwakilan bus' negeri Kementerian Luar Negeri</p>	<p>2013</p> <p>Peninjauan dan jabatan bentuk valas akan dilaksanakan pada TA 2013</p>	<p>proses.</p>

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2011 - 511 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

No	TITIK	PENJAJAN TERMINAL	KELAS FIKSASI (*)			RENCANA TITIK	PROGRESS EFFORT	JADWAL PEWILAYAHAN
			1	2	3			
						<p>Terlihat dengan saldo kas di Bendahara Pengeluaran</p> <p>1. Kemendagri Keuangan c.q. Ditjen Pembendaharan sedang dalam proses pengumpulan, penutupan dan analisis data saldo di kas Bendahara Pengeluaran pada LKPP Tahun 2011 yang dituntaskan oleh sebagai salah satu dasar penyusunan kewajiban penyelesaian saldo yang tidak dapat dieksekusi lagi.</p> <p>2. Kemendagri Keuangan c.q. Ditjen Pembendaharan akan meninjau data penyelesaian saldo kas di BP pada LKPP KPPN tahun 2011 yang akan digunakan sebagai dasar rekomendasi saldo kas di BP yang akan dipudikan/dielektakan.</p> <p>3. Pemerintah akan membuat Keputusan dalam bentuk PMK untuk memfasilitasi saldo kas di Bendahara Pengeluaran (BP) yang sudah tidak bisa dieksekusi lagi saat ini dari PMK. Hal ini dilakukan dari proses penyelesaian PMK tersebut akan berdasarkan hasil penyelesaian dan peninjauan saldo kas di BP yang masih ada dan akan dieksekusi.</p>		<p>Sebagai tindak lanjut surat Direktorat PMK No. S-1500-08.2012 tanggal 27 September 2012 perihal rekomendasi Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran telah rangka pemuliharaan seluruh KPPN, KPPN yang akan dieksekusi akan dilakukan dasar oleh Direktorat PMK untuk memfasilitasi saldo kas di Bendahara Pengeluaran.</p> <p>Telah diterbitkan PMK No. 15/PMK.05/2013 tentang Penyelesaian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca Unit Akuntansi Keuangan Upam Negara Tingkat Daerah/Kantor Pelayanan Pemerintahan Negara</p> <p>Telah diterbitkan PMK No. 7/PMK.09/2013 tentang Peraturan Pemerintah, Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dan Neraca Unit Akuntansi Keuangan Upam Negara Tingkat Daerah/Kantor Pelayanan Pemerintahan Negara</p> <p>PMK No. 8/PMK.05/2013 tentang Besaran Penyelesaian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran</p>

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2011 - 612-

Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat Tahun 2012 (LAKPP)

No	TAMBAHAN	PENYISWAAN TERMINAL	KLASIFIKASI (*)			REVISI TAMBAHAN	PROGRESS REPORT	JADWAL PEWILAYAHAN
			1	2	3			
						<p>4. Pelaksanaan verifikasi mutasi JIF yang dilakukan secara bulanan antara KPPN dengan Sarker akan terus dilaksanakan termasuk pelaksanaan SPT pada Sarker yang sudah tidak aktif maupun perijinan kesediaan Sarker dalam penyelesaian IPI. Dendahnya sehingga Sarker UP dapat dibebaskan secara legal dan mengurangi beban administrasi penyelesaian SMI.</p> <p>Terdapat sedikit kurang antara nilai retribusi penerimaan KIR (nilai yang dikur)</p> <p>1. Pelaksanaan retribusi akan terus dilanjutkan dan ditunggu akuisisinya antara Direktorat PEN dengan KPPN dan SMI KPPN.</p> <p>2. Melanjutkan dan meningkatkan kegiatan monitoring dan evaluasi pemantauan KU pada KPPN.</p>	<p>Selain Kementerian Luar Negeri pada Kelas Unit Akuntansi Kusa Berdasarkan Urus Negara Tingkat Daerah/Kantor Pelayanan Pembudayaan Megana</p> <p>Rakomilasi untuk ritsamban dan akan terus dilaksanakan secara periodik</p>	<p>Evaluasi</p> <p>Berikutnya Terdapat</p> <p>Berikutnya Terdapat</p>

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2011 - 513.

Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

No	TITIK	PENGALIHAN TERMINASI	KELAS FIKSASI (*)			REVISI TITIK	PROGRESS REPORT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
		<p>melalui mekanisme APBD; dan</p> <p>5. PNEP pada dsr kl dpung: nambahi tarif yang ditetapkan sembi Rp,34 miliar.</p> <p>Rekomendasi BPK:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memperbaiki jawaban PNEP terkait mekanisme penyusunan PNEP Lu Kas Magang Memperhatikan penyelesaian revisi DIPA PNEP. Mengalokasikan yang tepat atas klir tambahan penyusunan dan penyusunan anggaran. Merevisi UU PNEP ketentuan yang memperjelas kewenangan pencapaian jasa dan penyelesaian tarif PNEP yang melibatkan pelaksanaan inspeksi dan Melakukan pendataan dan monitoring dan portofolio PR BP d seluruh kl. 				<p>langkah di bawah.</p> <ul style="list-style-type: none"> Praktikan akan melibatkan himpunan Utama KL yang diharapkan akan terus terlibat dalam monitoring pelaksanaan langkah-langkah strategis tersebut di KL masing-masing Selanjutnya akan dilakukan koordinasi dengan BPK terkait pengalihan PNEP pada KL di tingkat provinsi. Hal ini diperlukan sebagai bentuk koordinasi antara semua KL terkait langkah strategis di tingkat teknis. 	<p>walaupun detail, dirapikan untuk setiap indikator pencapaian ke-5000</p> <p>bi Untuk PNEP digunakan bingkai di NIS' mekanisme APBN dirapikan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> Anggaran bingkai PNEP tidak diperbolehkan 30000 menggunakan jasa/biaya anggaran kategori PNEP untuk Minat Keajaiban Keuangan kegiatan untuk menyelesaikan memenuhi sebagai PNEP Untuk PNEP kurang telah dipungut berdasarkan unit, segera melakukan pengalihan' penyusunan PNEP dan ditetapkan dalam tahun 2012 Untuk PNEP telah didukung dengan fasal hukum yang memadai, dirapikan untuk: <ul style="list-style-type: none"> Memperhatikan penguatan tersebut dalam PP tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNEP. Meningkatkan paripurna PNEP yang telah dibuktikan dengan 	

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2011 - 516-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (LAK2012)

No	TITIK	PENJELASAN TITIK	KELAS FIKSASI (*)			RENCANA TINDAK	PROGRESS EFFORT	JADWAL PESELESAIAN
			1	2	3			
						<p>kegiatan yang terjadi</p> <ul style="list-style-type: none"> Mempercepat pelaksanaan pp Terdiri PNEP atau revisi PNEP <p>31. Meneliti kegiatan telah dilaksanakan Surat Nomor S 5598/VIK.02/2012 tanggal 30 Juli 2012 hal Perbaikan cante turistis kawasan BPK yang meliputi kegiatan 3B Peningkatan K.L. yang antara lain telah dilakukan Peningkatan K.L. :</p> <ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan rekamansi BPK terkait dengan pemenuhan sanksi kepada pejabat peragabla FRBP yang tidak telah dalam anggaran FRBP. Meningkatkan kelengkapan peragabla PNEP sebagaimana tertera dalam 2011 dan mengupayakan kembali dilakukan terbagi lagi di tahun 2012 dan tahun berikutnya Letih dan berdayakan aparat pengawasan internal inspektoral untuk memantau tidak bonut penyelenggaraan BPK tahun 2011, serta melakukan pengawasan lebih lanjut sehingga semua kegiatan tersebut dapat terlaksana 	811111	

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2011 - 517-

Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat Tahun 2012 (LAKS2012)

No	TITIK	PENJELASAN	KLASIFIKASI (*)			RENCANA TINDAK	PROGRESS REPORT	JADWAL PEWILAYAHAN
			1	2	3			
						<p>tahun 2012 dan di tahun tahun mendatang</p> <p>3) Sebagai tindak lanjut Instruksi No. 17 Tahun 2011 tentang Aksi Peningkatan dan Penguatan Kinerja Tahun 2012 serta dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi supervisi dan pengendalian PMBP pada K/L, Menteri, Penguasaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengeluarkan Surat Edaran No. 17 Tahun 2012 tentang Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Supervisi dan Penguasaan PMBP pada K/L.</p>		
						<p>2. Terkait dengan Revisi DIPA PMBP, Pengisian bentuk penyelesaian Revisi DIPA PMBP telah ditinjau dalam PMK Nomor: 03/PMK.02/2012 tanggal 28 Maret 2012 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2012, yang mengatur antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perubahan tanpa perubahan tempat b. Perubahan karena pencairan blak-bla dan tiling. 	<p>selesai</p>	

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2011 - 516-

Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

No	TAMBAHAN	PENYISWAAN	KELAS FIKSASI (*)			REVISI/TAMBAHAN	PROGRESS/REFFORT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
					3	<p>c. Keungkinan dan Tata cara Revisi Anggaran.</p> <p>3. Melakukan penyempurnaan peraturan d bidang PMP, sebagai berikut:</p> <p>Memprioritaskan kegiatan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uruti masalah acuan revisi UU 20 Tahun 1997 tentang PMP. - Uruti revisi UU 20 tahun 1997 tentang PMP. <p>Draft Revisi PP 73 Tahun 1988 tentang pengawasan PMP.</p> <p>Draft PMK penyelesaian tugas masyarakat/journalisme PMP secara formal/teknis.</p> <p>4. Melakukan perbaikan sistem penyelesaian PMP, antara lain melalui:</p> <p>1. Revisi IT yang jenis dan lain-lain jenis PMP yang berlaku pada K- dan sebagainya penyusunan jenis dan lain-lain dengan kondisi terkini dan dalam rangka penanganan publikasi PMP dalam PP sehingga mempermudah PMP dalam proses hukum yang</p>	<p>Usaha Kementerian Keuangan terkait penyempurnaan peraturan perundang-undangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Masalah akta revisi UU 20 Tahun 1997 tentang PMP telah diselesaikan pada tahun 2011 2) Telah disusun draft perubahan UU No. 20 Tahun 1997 tentang PMP 3) RPKM (Kategori) PMP telah diselesaikan kepada Menteri Keuangan. <p>1. Hasilnya terdapat dalam RPP PMP yang berlaku pada 2012 dengan progres sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Telah ditetapkan - Kementerian Sosial (PP No.3 Tahun 2012) 	<p>Selesai</p> <p>Desember 2012</p> <p>Desember 2012</p> <p>2012/2013</p>

Tindak Lanjut Pemerintahan terhadap Tamuan Pemeriksaan BPK atau LKPP Tahun 2011 - 519-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (LAK2012)

No	TAMBAHAN	PENYISWAAN	TERMINASI	ELAS FIKSASI (*)			REVISI/AMENDAMEN	PROGRESS REPORT	JADWAL PEWILAYAHAN
				1	2	3			
							<p>2. Dalam rangka reorientasi pelaksanaan kegiatan PMP, dilakukan penyusunan draft revisi KMK lin Pngurusan PMP pada K. antara lain: Kementerian Perindustri dan Kementerian Sosial; Kementerian Hukum dan HAM; Kem. Sekeloaan Negara; Kem. Perudaan dan Koperasi; BKN; MA; BATAN; Mngurusan PMP; lmbang pmptra; PMP sesuai uraian jasa yang telah dilaksanakan; bea ngababan peryptoran PMP/Le Kas Negara.</p> <p>3. Melakukan sosialisasi kepada K. terkait pengalasan PMP sebagai PMP dengan asumsi jenis dan besaran baru yang ditetapkan dalam PP. ane dianggru ftektor di kas negara.</p>	<p>2. Revisi KMK lmbang Pngurusan Sebagian Dasa PMP pada k.a. da lmba pngura sebagai berikut :</p> <p>a) Telah rfratkap</p> <ul style="list-style-type: none"> - Drgan Admistrasi Hukun Uruu, Kementerian Hukun dan HAM (KMK Nomor 12/KMK.02/2012) - Drgan Perhangan Uruu, Kementerian Perubngan (KMK Nomor 20/KMK.02/2012) <p>b) Melakukan penyelesaian.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kamalraan Sakralaan Magara <p>c) Dalam proses pembahasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kamalraan Perubngan - Kamalraan Sosial - Kamalraan Perubngan - Kamalraan Petyajan Uruu - Kamalraan Perada dan Dab Raga - BKN - MA - BATAN 	2013-2013
							<p>3. Telah dilakukan sosialisasi terkait pelaksanaan PMP terkait tindak lanjut rencana pelaksanaan PMP terkait PMP pada LKPP TA 2011 kepada K. serta besaan baru yang ditetapkan dalam PP. ane dianggru lmbangan K. ralan anggru</p>	Desember 2012	Berjalan Ubin

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Terwujudnya Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2011 (521)

Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

No	TITIK	PENGALIHAN	KELAS FIKSASI (*)			RENCANA TINDAK	PROGRESS EFFORT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
1.2	Peningkatan PBB Migas atau Area Cukai, Tingkat Sesuai dengan UU PBB dan UU Migas	Pemerintah telah melakukan penajaban PBB Migas tahun 2011 sesuai UU PBB. Istensi penajabannya masih belum sesuai dengan UU PBB dan UU Migas yaitu sebagai berikut:	X			<p>dilakukan dalam mekanisme APBN.</p> <p>4. Tercapainya indikator-inikator kebijakan PBB pada K/L.</p> <p>5. Saat ini tengah dibangun Sistem Informasi PBB sebagai bagian dari Sistem Modul Pelayanan Masyarakat dan Sistem Modul Pelayanan Masyarakat sebagai pengadministrasian pemerintahan negara yang akurat dan real time yang diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dan monitoring atas penyusunan dan realisasi PBB.</p>	<p>melakukan sosialisasi pengalihan PBB untuk Anggaran Titik ke Anggaran K/L.</p> <p>4. Telah diterbitkan surat Dirjen Anggaran kepada Menteri Perencanaan No.S 1062/AG/2012 tanggal 31 Juli 2012 dan Surat Menteri Keuangan dan Kebudayaan Nomor S-2024/AG/2012 tanggal 2 Agustus 2012, untuk melakukan agar dilakukan limitasi pada potensi PBB pada Kementerian dimaksud.</p> <p>5. Telah dilakukan penajaban sistem S-WIS PBB sesuai ISMP/OMG yang saat ini dalam proses finalisasi pengalihan anggaran.</p>	<p>Desember 2012</p> <p>Selesai Februari 2013</p>

Tindak Lanjut Pemerintahan terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atau UKPP Tahun 2011 - 6522-

Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat Tahun 2012 (LAK2012)

No	TITIK	PENGALIHAN TERMINAL	KELAS FIKSASI (*)			RENCANA TINDAK	PROGRESS EFFORT	JADWAL PEMVELESAAN
			1	2	3			
		<p>1. Pemenuh kebutuhan Migas pada area eksplorasi dan produksi Migas serta seluruh wilayah kerja Migas atas seluruh wilayah kerja Migas yang telah dikuasai, dimiliki, dan atau dikembangkan selanjutnya UU Migas dan MDJP yang diamanatkan untuk seluruh Migas atas area tersebut sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab pemerintah dan tidak ditentukan melalui perjanjian kerjasama.</p> <p>2. Pemenuh kebutuhan Migas pada area eksplorasi dan produksi Migas serta seluruh wilayah kerja Migas yang telah dikuasai, dimiliki, dan atau dikembangkan selanjutnya UU Migas dan MDJP yang diamanatkan untuk seluruh Migas atas area tersebut sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab pemerintah dan tidak ditentukan melalui perjanjian kerjasama.</p>	<p>1. Pemenuh kebutuhan Migas pada area eksplorasi dan produksi Migas serta seluruh wilayah kerja Migas atas seluruh wilayah kerja Migas yang telah dikuasai, dimiliki, dan atau dikembangkan selanjutnya UU Migas dan MDJP yang diamanatkan untuk seluruh Migas atas area tersebut sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab pemerintah dan tidak ditentukan melalui perjanjian kerjasama.</p> <p>2. Pemenuh kebutuhan Migas pada area eksplorasi dan produksi Migas serta seluruh wilayah kerja Migas yang telah dikuasai, dimiliki, dan atau dikembangkan selanjutnya UU Migas dan MDJP yang diamanatkan untuk seluruh Migas atas area tersebut sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab pemerintah dan tidak ditentukan melalui perjanjian kerjasama.</p>	<p>3. Pemenuh kebutuhan Migas pada area eksplorasi dan produksi Migas serta seluruh wilayah kerja Migas yang telah dikuasai, dimiliki, dan atau dikembangkan selanjutnya UU Migas dan MDJP yang diamanatkan untuk seluruh Migas atas area tersebut sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab pemerintah dan tidak ditentukan melalui perjanjian kerjasama.</p>	<p>dan Pemas Bunk</p> <p>2. Telah diterbitkan Peraturan Pajak nomor PER-11/PJ/2012 tanggal 20 April 2012 dan Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SE-21/PJ/2012 tanggal 30 April 2012 tentang tata cara pengisian PBB sektor pertambangan yang dan 2012 baru</p> <p>3. Telah dilaksanakan sosialisasi pemenuhan PBB Migas pada bulan Februari dan Maret 2012</p> <p>4. Peraturan PBB Migas tahun 2012 telah dirumuskan pada bulan Juni 2012 dan telah disahkan pemerintah dan pembayaran PBB Migas kepada UUR pada tanggal 8 Juni 2012.</p>	<p>Selasa 1 April 2012</p> <p>Selasa 1 Maret 2012</p> <p>Selasa 1 Juni 2012</p>		
		<p>Rekomendasi BPK: Pemerintah perlu meningkatkan secara jelas objek pajak PDD Migas sesuai UU PDD dan</p>						

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2011 - 623-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (LAK2012)

No	TAMBAHAN	PENYISWAAN TERMINASI	KELAS FIKSASI (*)			REVISI/TAMBAHAN	PROGRESS/REFFORT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
		<p>BALAN KEMASALAHAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan pelaksanaan rekonsiliasi antara pencatatan BA 589.02 dengan catatan RUMH. Membakukan peralihan n-merasi monitoring penerimaan hibah langsung di tingkat K/L, pelapor dan saksi bagi satuan kerja yang tidak melaksanakan hibah langsung yang ditanggung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Membakukan peralihan n-merasi penyalangan batas waktu pengesahan hibah; dan Monitor Keuangan dan Menteri/Pimpinan lembaga penerima hibah melakukan sinergisasi silas perijinan hibah sudah ada dan menyesuaikan be kumbang dengan menandatangani klausul penerimaan BAST antara pihak neja/lembaga donor dengan K/L penerima hibah. 			3	menembalikan klausul penerimaan BAST.	<p>cegan donor pada tanggal 28 November 2012.</p> <p>Selain itu dalam rangka monitoring pelaksanaan hibah telah dilakukan koordinasi dengan penerima hibah antara lain S-2HL dan MPH.BUS dan telah diterbitkan Peraturan Perundang-undangan Nomor PER-28/2012 tentang Monitoring Penerimaan Penyalangan, Monev Penerimaan Hibah Langsung Bentuk Bawang, Jasa/Suasi Lainnya</p>	

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2011 - 626-

Laporan Keuangan Pemerintahan Press Tahun 2012 (Lanjutan)

No	TITIK	PENGALIHAN TERMINASI	KLASIFIKASI (*)			PENCAPAIAN TITIK	PROGRESS EFFORT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
1.4	Perintah Menteri Keuangan Tentang Perubahan PT yang Telah Cibirkan Status BHP-nya	Pusren Masukan Kemendagri (MK) lebih mendobrak UU Nomor 21 tahun 2003 tentang Sistem Pendiklat Nasional dan UU Nomor 9 Tahun 2002 tentang Badan Penyelenggara Pendidikan UU BHP. Untuk meradikalisasi penerapan MK tersebut, Pemerintah mengeluarkan PP Nomor 66 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa pengalihan keuangan eks BHPM diserahkan untuk pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (PLU-BLU). Maksud pasal dengan tahun 2011 berkekr. PP tentang BHP. Perumusan Tinggi IPTI eks BHPM tersebut belum selesai dan akan diinstruksikan sebagai BLU oleh PT eks BHPM juga akan diterbitkan. Pada Tahun 2011 kriduh PT tersebut telah diserahkan pada pengalihan keuangan badan layanan umum. Kriduh PT tersebut adalah Institut Pertanian Bogor, Universitas Airlangga, Universitas Gajah Mada, Universitas Indonesia, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Sunetra Utama, dan Institut Teknologi Bandung.	X			Perintah akan merencanakan proses penutupan RPP Pendidikan PP 23/2005 yang akan menjadi dasar untuk penutupan pengalihan 7 PTN eks BHPM melalui proses pengalihan keuangan BLU. BHPM dititikan menjadi salah satu BLU baru.		Selesai September 2012
						<p>Agenda penyelesaian dari RPP Perubahan PP 23/2005, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Menteri Keuangan melalui Surat No. S-323/MK.05/2012 tanggal 14 Mei 2012 lebih menyampaikan draft RPP Perubahan PP 23/2005 kepada Presiden RI untuk mendapatkan persetujuan 2 Menteri Sekretaris Negara melalui surat No. S-313/SM-Sekop-14/PUU.02/05/2012 tanggal 28 Mei 2012, dengan akan ditandatangani oleh draft RPP Perubahan PP 23/2005 kepada Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri 3 Saat ini draft RPP Perubahan PP 23/2005 tersebut telah dirapat oleh Menteri Keuangan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta telah ditandatangani. 		

Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Terusan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2011 - 626-

Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

No	TITIK	PELUFUSAN TERMINAL	ELAS FIKSASI (*)			RENCANA TINDAK	PROGRESS REPORT	JADWAL PEWELASAN
			1	2	3			
						revisi lebih awal oleh Menteri Dalam Negeri.		
		Rekomendasi BFK: Pemerintah agar segera menetapkan status hutang pemerintah kasusiter atas tahun P1 atas RANM.						
1.5	Pembekalan Kerepakan antara Pemerintah, El, dan Pulu Jar Kinto atau SCS; Tunggalan KUT TP 1990,1595 Pula Channing Baitan-Kant	Pemerintah telah membuat kewajiban atas SCS; Kredit Program KUT TP 1990,1599 Pula Canning Baitan sebagai bagian Ulang Jangka Panjang Debit Negeri Lainnya dalam Monev LKPP Tahun 2011 sebesar Rp19,7 triliun, Rp2,255Rp3,66 miliar, Nantun, Pemerintah, El, dan Pulu Jar Kinto belum menepati SCS; SCS; atas Kredit Program KUT khususnya atas tunggakan yang tidak dibayar dikantun lengkap. Dalam rangka menepati kewajiban keuangan Negara yang tertib, kerepakan ketiga pihak tersebut selanjutnya segera dilaksanakan.			X	Pemerintah akan melakukan: 1. Koordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM, dan El untuk melakukan verifikasi lapangan terhadap data berikut: <ul style="list-style-type: none">• Telah dibukukan laporan koordinasi penyelesaian tunggakan KUT pada Kanwil Bidang Pemerintahan sesuai surat undangan no. LMD 98.D.II.ML.BN.507-2012 tanggal 12 Juli 2012.• Verifikasi terhadap data debit tunggakan sulit dilakukan, berdasarkan hasil rapat tanggal 15 Agustus 2012 yang dipimpin oleh Menteri Pemerintahan.• Saat ini Menteri Koordinator Pemerintahan, Menteri Koperasi dan UKM dan Menteri Keuangan sedang dalam proses koordinasi untuk dapat melakukan pembahasan dengan terkait-komisaris terkait di DPR untuk membuat Keputusan Nomor 83/DPR-XXIX/2012 tanggal 3 November 2012.		Terdapat diinstansi
		Rekomendasi BFK: 1. Menambah nilai El dan Pulu				2. Monitoring pelaksanaan kegiatan verifikasi yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi		Jul dan Des 2012

Tindak Lanjut Pemerintahan terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2011 - 627-

Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

No	TITIK	PENGALIHAN TERMINASI	KELAS FIKSASI (*)			RENCANA TITIK	PROGRESS REPORT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
		<p>Jemberindo untuk penyediaan jasa konsultasi EIS KUT TP 1996/999 secara akurat dan dengan memperhatikan aspek kredibilitas dan</p> <p>1. Melakukan upaya hukum bila diperlukan penyelesaian dalam penyelesaian KUT TP 1996/999.</p>			<p>dan UMR.</p> <p>3. Melakukan evaluasi hasil verifikasi data Jabib oleh Kementerian Kopasa dan UMR.</p> <p>4. Mendapatkan kesepakatan dari BI dan Tim Jemberindo untuk menentukan kegiatan penyelesaian KUT Tahun Penyelesaian 1996/999.</p> <p>5. Menampaikan kebijakan penyelesaian KUT kepada DPR RI.</p> <p>6. Menindaklanjuti keputusan Pencritis dengan DPR.</p>		<p>Jemberindo, Maret 2013</p> <p>April s.d. Juni 2013</p> <p>Juli s.d. Sep 2013</p> <p>Oktober 2013 s.d.</p>	

Keterangan:

- Klasifikasi 1: Terusan Perencanaan DPR, dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.
- Klasifikasi 2: Terusan Perencanaan BPK, dilaksanakan dalam tahun anggaran berikutnya.
- Klasifikasi 3: Terusan Perencanaan BPK, dilaksanakan dalam 2-3 tahun anggaran berikutnya.

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN SURAT BERTHARGA NEGARA TAHUN 2012

I. PENDAHULUAN

Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Surat Berharga Negara ini disusun untuk memenuhi amanat pasal 16 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara dan pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Selain itu, laporan ini juga disusun agar seluruh pihak yang berkepentingan dapat mengetahui secara jelas dan transparan informasi terkait dengan pengelolaan Surat Berharga Negara. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk mengelola keuangan negara secara transparan, profesional dan bertanggung jawab. Seluruh angka dan data yang digunakan dalam laporan ini meliputi realisasi selama satu tahun anggaran yang dimulai 1 Januari 2012 dan berakhir 31 Desember 2012, kecuali secara jelas dinyatakan lain.

Dalam peta kebijakan fiskal, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) termasuk dalam sumber pembiayaan dan pengelolaan portofolio utang negara. Pengelolaan utang selain terkait dengan cara mengisi kesenjangan pembiayaan, dalam jangka panjang juga berperan dalam pengelolaan portofolio yang mendukung kesinambungan fiskal. Tujuan penerbitan Surat Berharga Negara adalah untuk:

- a. Membiayai defisit APBN
- b. Menutupi kekurangan kas jangka pendek akibat ketidaksesuaian antara arus kas penerimaan dan pengeluaran dari Rekening Kas Negara dalam satu tahun anggaran (*cash-mismatch*)
- c. Mengelola portofolio utang negara

Pemerintah pusat berwenang menerbitkan Surat Berharga Negara setelah mendapat persetujuan DPR yang disahkan dalam kerangka APBN dan setelah berkonsultasi dengan Bank Indonesia. Atas penerbitan tersebut, Pemerintah berkewajiban membayar bunga dan biaya lainnya serta pokok SBN pada saat jatuh tempo. Dana untuk pembayaran bunga dan biaya lainnya serta pokok SBN disediakan dalam APBN. Adapun manfaat penerbitan SBN adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai Instrumen Fiskal

Penerbitan SBN diharapkan dapat menggalang potensi sumber pembiayaan APBN yang lebih besar dari investor pasar modal.

- b. Sebagai Instrumen Investasi

SBN menyediakan alternatif investasi yang relatif bebas risiko gagal bayar dan memberikan peluang bagi investor dan pelaku pasar untuk melakukan diversifikasi portofolionya guna memperkecil risiko investasi.

- c. Sebagai Instrumen Pasar Keuangan

Surat Berharga Negara dapat memperkuat stabilitas sistem keuangan dan dapat dijadikan acuan (*benchmark*) bagi penentuan nilai instrument pasar keuangan lainnya.

Surat Berharga Negara (SBN) terdiri atas Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Pengertian Surat Utang Negara (SUN) menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan nilai nominalnya. Sedangkan pengertian Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau dapat disebut Sukuk Negara menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (lanjutan)

Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SESN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

Secara umum SUN dapat dibagi dalam dua jenis yaitu Surat Perbendaharaan Negara (*Treasury Bills*) dan Obligasi Negara (*Treasury Bonds*). Surat Perbendaharaan Negara (SPN) yang berjangka waktu sampai dengan 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. Sedangkan Obligasi Negara (ON) yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan dengan kupon dan/atau pembayaran bunga secara diskonto. Menurut denominasi mata uangnya, ON yang telah diterbitkan Pemerintah dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu ON berdenominasi Rupiah dan ON berdenominasi valuta asing. Menurut jenis tingkat bunganya, ON dapat dikelompokkan ke dalam ON dengan tingkat bunga tetap (*fixed rate*) dan ON dengan tingkat bunga mengambang (*floating rate*). Selain itu, Pemerintah juga telah menerbitkan ON tanpa bunga yaitu *Zero Coupon* (ZC).

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2002, SUN diterbitkan dalam bentuk warkat maupun tanpa warkat (*scriptless*). SUN dengan warkat adalah surat berharga yang kepemilikannya berupa sertifikat baik atas nama maupun atas anjak. Sertifikat atas nama adalah sertifikat yang nama pemiliknya tercantum di lembar sertifikat tersebut, sedangkan sertifikat atas anjak adalah sertifikat yang tidak mencantumkan nama dan pelaku pasar untuk melakukan diversifikasi pemilik sehingga setiap orang yang menguasainya portofolionya guna memperkecil risiko investasi, adalah pemilik yang sah. Surat Utang Negara tanpa warkat (*scriptless*) adalah surat berharga yang kepemilikannya dicatat secara elektronik (*book entry system*). Dalam hal SUN tanpa warkat maka bukti kepemilikan yang otentik dan sah adalah pencatatan kepemilikan secara elektronik. Cara pencatatan secara elektronik dimaksudkan agar pengadministrasian data kepemilikan (*registry*) dan penyelesaian transaksi perdagangan SUN di pasar sekunder dapat diselenggarakan secara efisien, cepat, aman, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

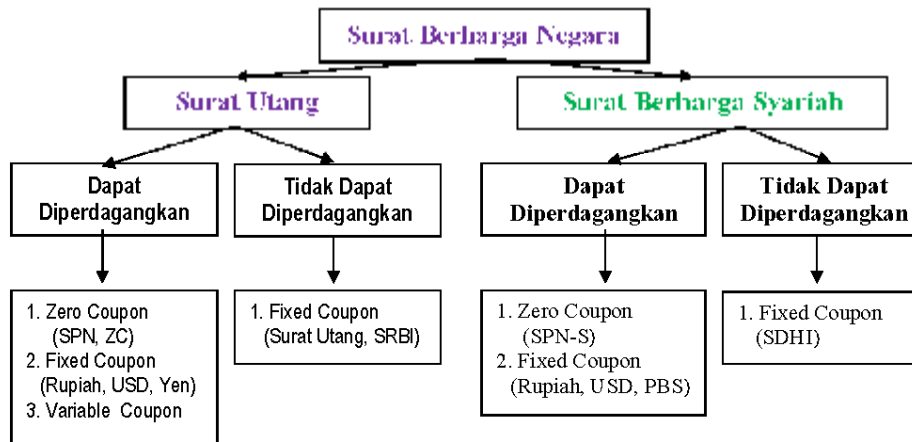
Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (SUN) menyatakan bahwa SUN dapat diterbitkan dalam bentuk yang dapat diperdagangkan (*tradable*) atau bentuk yang tidak dapat diperdagangkan (*non-tradable*). Surat Utang Negara yang dapat diperdagangkan pertama kali diperdagangkan oleh Pemerintah di pasar primer / pasar perdana. Perdagangan SUN selanjutnya ada di pasar sekunder baik di dalam maupun di luar negeri. Perdagangan dapat dilakukan melalui bursa dan atau di luar bursa (*over the counter/ OTC*). Surat Utang Negara yang tidak diperdagangkan adalah SUN yang tidak diperjualbelikan di Pasar Sekunder dan biasanya diterbitkan secara khusus untuk pemodal institusi tertentu, baik domestik maupun asing, yang berminat untuk memiliki SUN sesuai dengan kebutuhan spesifik dari portofolio investasinya.

SBSN adalah SBN yang berbasis syariah. Pemerintah mulai menerbitkannya pada tahun 2008 dengan denominasi rupiah yakni setelah disahkannya UU No 19 Tahun 2008 tentang SBSN. Berdasarkan metode penerbitan, SBSN tidak berbeda dengan SBN konvensional yaitu SUN. Yang membedakannya dengan SUN adalah SBSN bukan surat pernyataan utang sehingga dalam penerbitannya dibutuhkan *underlying transaction* dan *underlying asset* sebagai obyek transaksi. Adapun tujuan penerbitan SBSN adalah untuk membiayai APBN termasuk membiayai proyek-proyek pembangunan pemerintah seperti proyek infrastruktur dalam sektor energi, telekomunikasi, perhubungan, pertanian, industri manufaktur, dan perumahan rakyat.

Penerbitan SBSN dilakukan melalui SPV (*Special Purpose Vehicle*) sebagai penerbit. Yang bertindak sebagai SPV adalah Perusahaan Penerbit SBSN (PP SBSN), yang berbadan hukum. PP SBSN didirikan berdasarkan Undang-Undang SBSN untuk penerbitan SBSN. Ketentuan pendirian dan pengelolaan PP SBSN diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 56 tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit SBSN.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (lanjutan)

Adapun gambaran struktur penerbitan Surat Berharga Negara secara umum pada tahun 2012 adalah berikut:



Gambar 1. Struktur Surat Berharga Negara

II. PENGELOLAAN PORTOFOLIO SUN TAHUN 2012

Target pembiayaan APBN-Perubahan tahun 2012 dari SBN Neto ditetapkan sebesar Rp 159.596.700.000.000. Jumlah nominal tersebut merupakan target neto, yaitu jumlah penerbitan SUN baru setelah dikurangi dengan jumlah SUN yang jatuh tempo maupun dibeli kembali oleh Pemerintah sebelum jatuh tempo (*buyback*).

A. Penerbitan Obligasi Negara dalam Rupiah

Obligasi Negara (ON) dalam denominasi Rupiah yang diterbitkan pada tahun 2012 dilelang sebanyak 22 kali, yang dilakukan sejak bulan Januari sampai Desember 2012.

Penerbitan Obligasi Negara secara reguler dilakukan dengan cara lelang di pasar perdana. Pada setiap penerbitan, jumlah penawaran yang dimenangkan lebih rendah dan jumlah penawaran yang masuk dengan *bid to cover ratio* terbesar dari 1,01 kali sampai 15,60 kali.

Total nilai neto nominal ON dalam denominasi Rupiah yang diterbitkan pada tahun 2012 dengan tingkat bunga tetap (*Fixed Rate*) adalah sebesar Rp 122.245.000.000.000. ON dengan tingkat bunga mengambang (*Variable Rate*) dan ON dengan pembayaran bunga secara diskonto (*Zero Coupon*) tidak diterbitkan pada tahun 2012, serta ORI yang ditawarkan dengan metode *book building* diterbitkan sebanyak 1 kali penerbitan sebesar Rp 12.676.745.000.000. Penerbitan ON dalam denominasi Rupiah mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain: i) struktur jatuh tempo utang yang sudah ada, ii) pengembangan pasar sekunder SUN, dan iii) *cost of borrowing*.

Perjualan Obligasi Negara Ritel (ORI) yang dilakukan sebanyak 1 kali penerbitan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk memperluas basis investor SUN dan ditujukan untuk investor dengan metode *bookbuilding* melalui Agen Penjual yang diseleksi oleh Panitia Seleksi. *Bookbuilding* adalah salah satu metode penerbitan surat berharga, yaitu investor akan menyampaikan penawaran pembelian atas suatu surat berharga, biasanya berupa jumlah dan harga (*yield*) penawaran pembelian, dan dicatat dalam *book order* oleh *investment bank* yang bertindak sebagai *bookrunner*. Atas penerbitan ORI009 tersebut mendapat sambutan yang cukup positif dari masyarakat, terbukti dengan jumlah penawaran yang masuk mencapai Rp12.765.145.000.000.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

B. Penerbitan Surat Perbendaharaan Negara (SPN)

SPN adalah Surat Utang Negara yang jangka waktu jatuh temponya sampai dengan 12 bulan. Pada tahun 2012, Pemerintah menerbitkan 23 seri SPN, dengan total pencairan SPN mencapai Rp.31.520.000.000.000, dengan rincian sebagai berikut:

No	Seri	Tanggal Penerbitan	Jatuh Tempo	Kupon	Face Value
1	SPN03120411	10 Januari 2012	11 April 2012	-	1,000,000,000,000
2	SPN12130111	10 Januari 2012	11 Januari 2013	-	3,350,000,000,000
3	SPN03120429	26 Januari 2012	29 April 2012	-	800,000,000,000
4	SPN03120508	07 Februari 2012	08 Mei 2012	-	1,000,000,000,000
5	SPN12130208	07 Februari 2012	08 Februari 2013	-	1,750,000,000,000
6	SPN03120522	21 Februari 2012	22 Mei 2012	-	1,000,000,000,000
7	SPN03120607	06 Maret 2012	07 Juni 2012	-	500,000,000,000
8	SPN12130307	06 Maret 2012	07 Maret 2013	-	2,100,000,000,000
9	SPN03120621	20 Maret 2012	21 Juni 2012	-	250,000,000,000
10	SPN12130404	03 April 2012	04 April 2013	-	2,900,000,000,000
11	SPN03120718	17 April 2012	18 Juli 2012	-	300,000,000,000
12	SPN12130502	04 Mei 2012	02 Mei 2013	-	900,000,000,000
13	SPN12130606	07 Juni 2012	06 Juni 2013	-	1,880,000,000,000
14	SPN03120920	19 Juni 2012	20 September 2012	-	500,000,000,000
15	SPN12130704	05 Juli 2012	04 Juli 2013	-	1,550,000,000,000
16	SPN03121018	19 Juli 2012	18 Oktober 2012	-	500,000,000,000
17	SPN12130812	09 Agustus 2012	12 Agustus 2013	-	990,000,000,000
18	SPN03121112	09 Agustus 2012	12 Nopember 2012	-	850,000,000,000
19	SPN03121212	11 September 2012	12 Desember 2012	-	1,000,000,000,000
20	SPN12130912	11 September 2012	13 September 2012	-	2,000,000,000,000
21	SPN03130107	08 Oktober 2012	07 Januari 2013	-	1,000,000,000,000
22	SPN12131007	08 Oktober 2012	07 Oktober 2013	-	1,200,000,000,000
23	SPN03130213	14 Nopember 2012	13 Februari 2013	-	1,000,000,000,000
Jumlah					30.520.000.000.000

Tabel 21. Jenis dan Outstanding SPN tahun 2012

Untuk meningkatkan minat investor atas instrumen SPN dan mendorong perkembangan pasar SPN, Pemerintah telah melakukan perubahan terhadap PP nomor 11 tahun 2006 dengan menerbitkan PP Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas diskonto SPN, dimana pemungutan pajak atas diskonto SPN dilakukan di pasar sekunder dan pada saat jatuh tempo dengan tarif sebesar 20% final.

C. Penerbitan SUR dalam Valuta Asing (International Bonds)

Total pencairan SUR dalam Valuta Asing (International Bonds) dalam tahun 2012 mencapai Rp.46.016.969.099.520 yang terdiri dari US\$4.250.000.000 atau setara dengan 39.006.661.099.520 (atau JP¥60.000.000.000 atau setara dengan 7.012.098.000.000). Memperhatikan daya serap pasar SBN domestik, pada tahun 2012 dilaksanakan 2 kali penerbitan International Bonds yaitu pada bulan April 2012 yaitu seri RI0422 dengan tingkat yield 5,2500% dan pada bulan September 2012 yaitu seri RI0142 dengan tingkat yield 5,2500%. Sementara untuk *sovereign bond* melalui program Guarantee and

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 *lanjutan*

Acquisition toward Tokyo market Enhancement (GATE) diterbitkan seri Japanese Yen BS 2012 sebesar JPY60.030.000.000 pada bulan November 2012.

Sebagaimana penerbitan sebelumnya, penerbitan pada tahun 2012 ini juga mendapatkan sambutan yang baik di pasar internasional. Hasil penerbitan ini menunjukkan kepercayaan investor internasional terhadap manajemen fiskal dan prospek ekonomi Indonesia jangka panjang.

SUN Valas	■ TU	Jumlah (Rp/iah)
GMTN	US\$ 4.260.000.000	38.036.661.088.620
Guarantee etc Acquisition toward Tokyo Market Enhancement (GATE)	JPY 60.030.000.000	7.012.038.000.000
Total		45.048.699.088.620

Tabel 22. Realisasi Penerbitan SUN Valas s.d. 31 Desember 2012

D. Pelaksanaan *Debt Switching/Buyback*

Total pelaksanaan *debt switching* pada tahun 2012 adalah sebanyak 4 kali dengan jumlah nominal SBN yang ditukar sebesar Rp.11.358.000.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Debtswitch	Penawaran yang Masuk	Jumlah Dimenangkan
1	14 Juni 2012	10.883.000.000.000	5.455.000.000.000
2	31 Juli 2012	9.028.000.000.000	4.976.000.000.000
3	19 November 2012	1.608.000.000.000	738.000.000.000
4	11 Desember 2012	1.607.000.000.000	688.000.000.000
JUMLAH		23.126.000.000.000	11.859.000.000.000

Tabel 23. Realisasi pelaksanaan *Debtswitching* tahun 2012

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (lanjutan)

Tanggal	Sumber				Destinatif			
	Revisi	Daftar Transaksi	Kategori	Nilai Realisasi	Revisi	Daftar Transaksi	Nilai Realisasi	
31 Jun 12	AK001	15-12-2012	11-000000	100000000,000000	AK001	15-06-2012	7-000000	
	AK002	15-06-2012	11-000000	100000000,000000	AK002	15-06-2012	7-000000	
	GR001	15-06-2012	11-400000	100000000,000000	GR001	15-06-2012	7-000000	
	AK003	15-12-2012	11-000000	100000000,000000	AK003	15-06-2012	7-000000	
	AK004	15-06-2012	11-000000	100000000,000000	AK004	15-06-2012	7-000000	
	GR002	15-12-2012	11-000000	100000000,000000	GR002	15-06-2012	7-000000	
	VT0000	23-09-2015	11-000000	100000000,000000	VT0000	13-03-2017	7-000000	
	AK005	15-06-2012	11-000000	100000000,000000	AK005	15-06-2012	7-000000	
	VT0001	25-11-2015	11-000000	100000000,000000	VT0001	13-03-2017	7-000000	
	VT0002	23-03-2016	11-000000	100000000,000000	VT0002	13-03-2017	7-000000	
VT0003	23-03-2017	11-000000	100000000,000000	VT0003	13-03-2017	7-000000		
			3.400.000.000,000000					
3 Jul 12	TR001	13-09-2012	000000	100000000,000000	TR001	13-06-2012	0-200000	
	TR002	13-03-2013	11-000000	400000000,000000	TR002	13-06-2012	0-200000	
	FR001	15-06-2012	11-000000	800000000,000000	FR001	15-06-2012	8-200000	
	GR003	15-06-2012	11-000000	100000000,000000	GR003	15-06-2012	8-200000	
	TR003	13-04-2013	000000	100000000,000000	TR003	13-06-2012	0-200000	
	TR004	13-04-2013	000000	100000000,000000	TR004	13-06-2012	0-200000	
	GR004	15-06-2012	11-400000	100000000,000000	GR004	15-06-2012	8-200000	
	FR002	15-06-2012	11-000000	100000000,000000	FR002	15-06-2012	8-200000	
	TR005	15-06-2012	000000	400000000,000000	TR005	13-06-2012	0-200000	
	FR003	15-12-2012	11-000000	800000000,000000	FR003	15-06-2012	8-200000	
	GR005	15-12-2012	11-000000	800000000,000000	GR005	15-06-2012	8-200000	
	VT0004	23-09-2015	11-000000	800000000,000000	VT0004	13-03-2017	0-200000	
	AK006	15-06-2012	11-000000	800000000,000000	AK006	15-06-2012	8-200000	
	FR004	15-06-2012	11-000000	800000000,000000	FR004	15-06-2012	8-200000	
	VT0005	13-07-2017	11-000000	800000000,000000	VT0005	13-03-2017	0-200000	
			1.200.000.000,000000					
30 Jun 12	AK007	15-06-2012	11-000000	100000000,000000	AK007	15-06-2012	6-100000	
	TR006	13-06-2013	11-000000	100000000,000000	TR006	13-03-2016	6-100000	
	AK008	15-06-2012	11-000000	100000000,000000	AK008	15-06-2012	6-100000	
	AK009	15-12-2012	11-000000	100000000,000000	AK009	15-06-2012	6-100000	
	TR007	13-06-2013	000000	100000000,000000	TR007	13-03-2016	6-100000	
	TR008	13-06-2013	000000	100000000,000000	TR008	13-03-2016	6-100000	
	FR005	15-06-2012	11-000000	400000000,000000	FR005	15-06-2012	6-100000	
	FR006	15-06-2012	11-000000	400000000,000000	FR006	15-06-2012	6-100000	
				700.000.000,000000				
	17 Sep 12	FR007	15-06-2012	11-000000	400000000,000000	FR007	15-06-2012	6-100000
FR008		15-06-2012	11-000000	600000000,000000	FR008	15-06-2012	6-100000	
AK010		15-06-2012	11-000000	200000000,000000	AK010	15-06-2012	6-100000	
FR009		15-06-2012	11-000000	200000000,000000	FR009	15-06-2012	6-100000	
AK011		15-06-2012	11-000000	200000000,000000	AK011	15-06-2012	6-100000	
AK012		15-06-2012	11-000000	200000000,000000	AK012	15-06-2012	6-100000	
				500.000.000,000000				
			1.800.000.000,000000					

Tabel 24. Rincian realisasi pelaksanaan *Debuswaching* tahun 2012

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (lanjutan)

Selain itu pada tahun 2012 juga telah dilakukan transaksi langsung (*direct payment*) *cash buyback* SUN melalui *dealing room* DJPU sebanyak 6 kali dengan jumlah yang telah dibeli pemerintah sebanyak Rp 1.137.527.000.000 dari target Rp 2.000.000.000.000 dengan peninjauan sebagai berikut:

No	Tanggal	Seri	Jatuh Tempo	Volume	Nominal	Harga Rata-rata Tertimbang
1	24 Februari	FR0053	15 Juli 2011	498.207	498.207.000.000	19,96
		Sub total		498.207	498.207.000.000	
2	27 Februari	FR0028	15 Oktober 2014	101.270	101.207.000.000	16,26
		Sub total		101.270	101.207.000.000	
3	31 Agustus	FR0055	15 September 2016	30.000	30.000.000.000	08,00
		Sub total		30.000	30.000.000.000	
4	1 November	FR0029	15 Juli 2017	8.050	8.050.000.000	19,10
		Sub total		8.050	8.050.000.000	
5	27 November	FR0056	16 September 2016	600.000	600.000.000.000	08,06
		Sub total		600.000	600.000.000.000	
6	29 November	FR0030	16 Mei 2016	-	-	-
		Sub total		-	-	
		TOTAL		1.137.527	1.137.527.000.000	

Tabel 25. Transaksi *Buyback* tahun 2012

Pada akhir tahun 2012, profil jatuh tempo SUN terkonsentrasi dengan jumlah cukup besar pada kurun waktu 2012 - 2014. Dalam rangka mengurangi risiko pelunasan pokok SUN pada kurun tahun 2012-2014 tersebut, Pemerintah berupaya untuk memata ulang struktur jatuh tempo SUN melalui *debt switching*, yaitu dengan membeli sen-sen Obligasi Negara jangka pendek dan menukarkannya dengan Obligasi Negara yang mempunyai jatuh tempo jangka menengah dan panjang. Jumlah SUN yang jatuh tempo pada kurun tahun 2012 - 2014, yang berada pada kisaran di atas Rp 32,4 triliun, digeser ke jangka waktu jatuh tempo yang lebih panjang. Kuncis ini juga memberikan keluasaan bagi Pemerintah untuk menertitkar instrumen SUN jangka pendek, baik berupa Obligasi Negara Ritel maupun Surat Perbendaharaan Negara. Upaya lain yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mengurangi *refinancing risk* adalah dengan memberikan prioritas penertitan Obligasi Negara jangka menengah dan panjang.

Di samping *debt switch*, Pemerintah juga melakukan kegiatan *cash buyback* yang merupakan salah satu strategi pengelolaan portofolio SUN dengan cara melaksanakan pembelian Obligasi Negara yang belum jatuh tempo di pasar sekunder. Dalam periode tahun anggaran 2012, *cash buyback* sebanyak 6 kali melalui *dealing room* DJPU. *Buyback* dilakukan melalui pembelian langsung (*direct payment*) *cash buyback* dengan jumlah nominal sebesar Rp.1.137.527.000.000 dari target sebesar Rp.2.000.000.000.000. Obligasi Negara yang telah dibeli tersebut kemudian dinyatakan lunas atau jatuh tempo, sehingga mengurangi total *outstanding* SUN. Pada saat pasar mengalami *bearish*, dimana harga SUN cenderung diskon, penerapan strategi *cash buyback* ini akan lebih menguntungkan Pemerintah, dibanding jika harus membayar pelunasan pokok pada saat jatuh tempo utuhnya. Disamping itu pelaksanaan *cash buyback* oleh Pemerintah pada saat kondisi pasar *bearish* ini juga dapat menahan penurunan harga yang makin dalam dan melakukan stabilisasi pasar SUN.

III. PENGELOLAAN PORTOFOLIO SBN TAHUN 2012

Dalam rangka perluasan basis investor, diversifikasi sumber pembiayaan, dan pengembangan pasar keuangan dalam negeri, Pemerintah telah meratitkar surat berharga berdasarkan prinsip syariah, atau di kanal secara internasional dengan istilah *sukuk*. Instrumen keuangan ini pada prinsipnya sama seperti surat berharga konvensional, dengan perbedaan pokok antara lain berupa pengguna konsep imbalan dan bagi hasil sebagai pengganti bunga, adanya suatu transaksi pendukung (*underlying transaction*) berupa sejumlah aset riil yang menjadi dasar penertitan sukuk, serta adanya *syah* atau perjanjian antara pihak-pihak berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (lanjutan)

Untuk keperluan penerbitan surat berharga berdasarkan prinsip syariah, perlu adanya pengaturan secara khusus, baik yang menyangkut instrumen maupun perangkat yang diperlukan. Hal tersebut, juga dengan mempertimbangan adanya kendala-kendala yang dihadapi dari sisi legal dalam hal Pemerintah akan menerbitkan surat berharga berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan basis hukum yang ada di Indonesia pada saat ini. Oleh karena itu, Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada 7 Mei 2008 telah disahkan dan menjadi landasan legal pengelolaan SBSN. Secara garis besar UL tersebut mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Transparansi pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara dalam kerangka kebijakan fiskal dan kebijakan pengembangan pasar Surat Berharga Syariah Negara dengan mengatur lebih lanjut tujuan penerbitannya dan jenis-jenis akad atau perjanjian yang digunakan.
- b. Kewenangan Pemerintah untuk menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara, baik dilakukan secara langsung oleh Pemerintah yang didelegasikan kepada Menteri, ataupun dilaksanakan melalui Perusahaan Penerbit yang dibentuk oleh Menteri.
- c. Kewenangan Pemerintah untuk menggunakan Barang Milik Negara sebagai dasar penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (*underlying asset*).
- d. Kewenangan Wali Amanat untuk bertindak mewakili kepentingan Pemegang Surat Berharga Syariah Negara.
- e. Kewenangan Pemerintah untuk membayar semua kewajiban yang timbul dari penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, baik yang diterbitkan secara langsung oleh Pemerintah maupun melalui Perusahaan Penerbit, secara penuh dan tepat waktu sampai berakhirnya kewajiban tersebut.
- f. Landasan hukum bagi pengaturan lebih lanjut atas tata cara dan mekanisme penerbitan Surat Berharga Syariah Negara di pasar perdana maupun perdagangan Surat Berharga Syariah Negara di pasar sekunder agar pemodal memperoleh kepastian untuk memiliki dan memperdagangkan Surat Berharga Syariah Negara secara mudah dan aman.

Sesuai dengan UU Nomor 19 Tahun 2008, tujuan penerbitan SBSN adalah untuk membiayai APBN termasuk membiayai proyek. Pemerintah untuk pertama kalinya menerbitkan SBSN pada Agustus 2008 melalui metode *bookbuilding* di pasar perdana dalam negeri.

Pada tahun anggaran 2012, pemerintah Indonesia mulai menerbitkan SBSN seri PBS (*Project Based Sukuk*). SBSN berbasis proyek selain sebagai instrumen pembiayaan APBN juga sekaligus berfungsi mendukung percepatan pembangunan proyek infrastruktur dan pengembangan pasar keuangan syariah di dalam negeri. Manfaat dari penerbitan SBSN berbasis proyek antara lain adalah untuk mendiversifikasi sumber pembiayaan, mendukung percepatan pembangunan proyek infrastruktur, mendukung pengembangan pasar keuangan, khususnya pasar keuangan syariah, mendorong peningkatan pelayanan umum, pemberdayaan industri dalam negeri serta meningkatkan transparansi pelaksanaan kegiatan oleh K/L karena perkembangan pelaksanaan proyek akan dipantau oleh investor dan publik. Penerbitan SBSN seri PBS tersebut dilakukan dengan mekanisme sistem lelang yang ada di Bank Indonesia.

Dalam rangka pengembangan infrastruktur pasar, pada tahun 2012 pemerintah mengimplementasikan *Greenhouse Auction* (GSA) dalam lelang SBSN. GSA adalah lelang tambahan dimana lelang dilaksanakan satu hari setelah pelaksanaan lelang reguler yang pelaksanaannya diputuskan secara rasional penerbitan pemenang reguler. Pelaksanaan lelang GSA diatur melalui PMK Nomor 05 Tahun 2011.

Total jumlah penerbitan SBSN yang telah diterbitkan sampai dengan akhir tahun 2012 adalah sebesar Rp.57.088.811.152.000 yang terdiri dari 6 jenis instrumen yakni IFR, SR, SD-H, PBS, SPW-S dan SWL. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (lanjutan)

No	Seri	Tanggal Terbit	Maturity Date	Cupon	Jumlah	Metode Penyerbitan	
					57,088,811,151,000		
Surat Perbendaharaan Negara Surat (SPN-S)						138,000,000,000	Lelang
	SPN-31092012	13 Maret 2012	14 September 2013	4,7500%	98,000,000,000		
	SPN-309112012	28 Mei 2012	19 November 2012	3,8887%	90,000,000,000		
	SPN-30692012	04 Oktober 2012	23 April 2013	4,5844%	90,000,000,000		
	SPN-30742012	13 Oktober 2012	21 April 2013	4,7800%	100,000,000,000		
Bond Retail (BR)						1,611,905,000,000	Bond Retailing
	BR001	21 Maret 2012	31 September 2013	6,3500%	1,611,905,000,000		
Surat Dana Hasil Lelang (SDHL)						15,000,000,000	Private Placement
	SDHL001A	21 Maret 2012	21 Maret 2013	5,1500%	2,000,000,000,000		
	SDHL001B	21 Maret 2012	21 Maret 2013	5,4500%	3,000,000,000,000		
	SDHL001C	21 Maret 2012	21 Maret 2013	5,9000%	3,900,000,000,000		
	SDHL001D	21 April 2012	21 April 2013	5,3000%	1,000,000,000,000		
	SDHL001E	21 April 2012	21 April 2013	5,7500%	1,500,000,000,000		
	SDHL001F	30 Mei 2012	30 Mei 2013	6,3500%	3,000,000,000,000		
	SDHL001G	28 Juni 2012	28 Juni 2013	5,3000%	1,000,000,000,000		
	SDHL001H	28 Juni 2012	28 Juni 2013	6,3000%	1,000,000,000,000		
Ijzrah Hasil Lelang (IHL)						400,000,000,000	Lelang
	IHL001	27 Februari 2012	13 Februari 2013	10,3000%	400,000,000,000		
Proyek Berdasarkan Skema (PBS)						5,714,000,000,000	Lelang
	PBS001	27 Februari 2012	13 Februari 2013	4,4500%	5,900,000,000,000		
	PBS002	27 Februari 2012	13 Januari 2013	5,4500%	1,200,000,000,000		
	PBS003	27 Februari 2012	13 Januari 2013	6,0000%	2,800,000,000,000		
	PBS004	27 Februari 2012	13 Februari 2013	6,1000%	6,730,000,000,000		
Bond Retail						963,961,151,000	Bond Retailing
	BR102	21 September 2012	31 September 2013	3,3000%	3,000,000,000,000		

Tabel 26. Rekapitulasi Hasil Lelang SBSN tahun 2012

IV. STRUKTUR PORTOFOLIO SURAT BERHARGA NEGARA SELAMA TAHUN 2012

A. Surat Berharga Negara Berdenominasi Rupiah

Surat Berharga Negara berdenominasi Rupiah dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis, yaitu:

a. Obligasi berbunga tetap (*fixed rate bonds* – FR)

Obligasi jenis ini memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan dan dibayarkan secara periodik. Kupon obligasi berbunga tetap seri FR (*Fixed Rate*) dibayarkan setiap enam bulan sekali (*semi-annually*). Berdasarkan posisi akhir tahun 2012, terdapat 45 seri FR dengan tingkat kupon berkisar antara 5,25 % sampai dengan 15 % dengan masa jatuh tempo berkisar antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2041. Obligasi jenis FR dapat diperdagangkan dan

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (lanjutan)

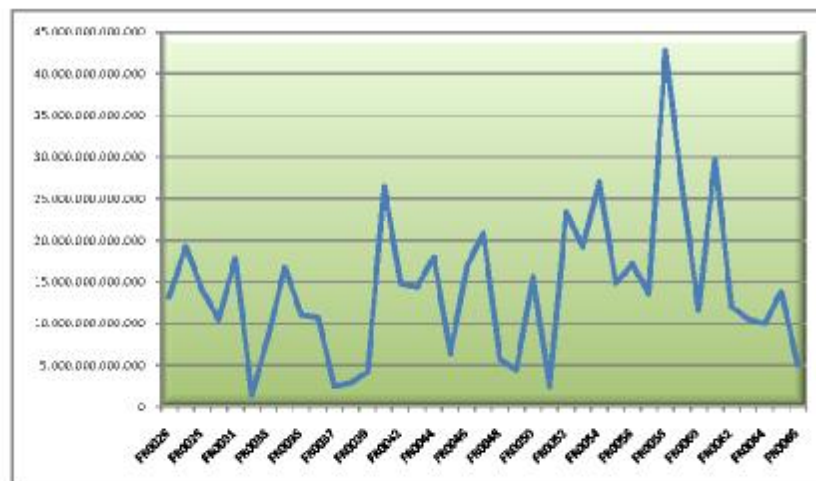
dipincaltanyakan kepemilikannya di pasar sekunder. Adapun outstarding sampai dengan Desember 2012 adalah sebagai berikut:

No	Series	First Issued Date	Maturity Date	Coupon	Face Value
1	FR0019	20-Nov-02	15-Jun-13	14.25000%	Rp 10,477,341,030,000
2	FR0020	20-Nov-02	15-Dec-13	14.27500%	Rp 9,596,751,000,000
3	FR0026	26-Aug-04	15-Oct-14	11.00000%	Rp 13,126,479,000,000
4	FR0027	27-Jan-05	15-Jun-15	9.50000%	Rp 19,304,000,000,000
5	FR0028	24-Feb-05	15-Jul-17	10.00000%	Rp 14,055,716,000,000
6	FR0030	19-May-05	15-May-16	10.75000%	Rp 10,491,000,000,000
7	FR0031	16-Jun-05	15-Nov-20	11.00000%	Rp 17,899,000,000,000
8	FR0032	1-Sep-05	15-Jul-18	15.00000%	Rp 1,434,000,000,000
9	FR0033	26-Jan-06	15-Mar-13	12.50000%	Rp 8,500,474,000,000
10	FR0034	26-Jan-06	15-Jun-21	12.80000%	Rp 16,756,400,000,000
11	FR0035	16-Feb-06	15-Jun-22	12.90000%	Rp 11,023,750,000,000
12	FR0036	20-Apr-06	15-Sep-19	11.50000%	Rp 10,735,500,000,000
13	FR0037	18-May-06	15-Sep-26	12.00000%	Rp 2,450,000,000,000
14	FR0038	24-Aug-06	15-Aug-18	11.60000%	Rp 2,920,757,000,000
15	FR0039	24-Aug-06	15-Aug-23	11.75000%	Rp 4,175,000,000,000
16	FR0040	21-Sep-06	15-Sep-25	11.00000%	Rp 26,474,000,000,000
17	FR0042	25-Jan-07	15-Jul-27	10.25000%	Rp 14,774,100,000,000
18	FR0043	22-Feb-07	15-Jul-22	10.25000%	Rp 14,417,000,030,000
19	FR0044	19-Apr-07	15-Sep-24	10.00000%	Rp 18,014,000,030,000
20	FR0045	24-May-07	15-May-31	9.75000%	Rp 6,400,000,030,000
21	FR0046	18-Jul-07	15-Jul-23	9.50000%	Rp 16,855,000,030,000
22	FR0047	30-Aug-07	15-Feb-28	10.00000%	Rp 20,840,000,030,000
23	FR0048	27-Sep-07	15-Sep-18	9.00000%	Rp 5,675,970,030,000
24	FR0049	14-Feb-08	15-Sep-13	9.00000%	Rp 4,438,607,030,000
25	FR0050	24-Jan-08	15-Jul-38	10.50000%	Rp 15,686,000,030,000
26	FR0051	15-Jan-09	15-May-14	11.25000%	Rp 2,262,123,030,000
27	FR0052	20-Aug-09	15-Aug-30	10.50000%	Rp 23,500,000,030,000
28	FR0053	8-Jul-10	15-Jul-21	8.25000%	Rp 19,123,793,030,000
29	FR0054	22-Jul-10	15-Jul-31	9.50000%	Rp 27,096,000,030,000

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Rasio)

30	FR0055	23-Sep-10	15-Sep-16	7.37500%	Rp	14,850,000,000,000
31	FR005E	23-Sep-10	15-Sep-26	8.37500%	Rp	17,1E4,000,000,000
32	FR0057	21-Apr-11	15-May-41	9.50000%	Rp	13,550,000,000,000
33	FR005E	21-Jul-11	15-Jun-32	8.25000%	Rp	42,7E8,000,000,000
34	FR005E	15-Sep-11	15-May-27	7.00000%	Rp	26,6E0,000,000,000
35	FR0060	6-Oct-11	15-Apr-17	6.25000%	Rp	11,600,000,000,000
36	FR0061	6-Oct-11	15-May-22	7.00000%	Rp	29,700,000,000,000
37	FR0062	9-Feb-12	15-Apr-42	6.37500%	Rp	12,000,000,000,000
38	FR0063	13-Aug-12	15-May-23	5.62500%	Rp	10,550,000,000,000
39	FR0064	13-Aug-12	15-May-28	6.12500%	Rp	9,976,000,000,000
40	FR0065	30-Aug-12	15-May-33	6.62500%	Rp	13,850,000,000,000
41	FR0066	25-Oct-12	15-May-18	5.25000%	Rp	5,050,000,000,000

Tabel 27. Outstanding SBN seri Fixed Rate (FR) per 31 Desember 2012



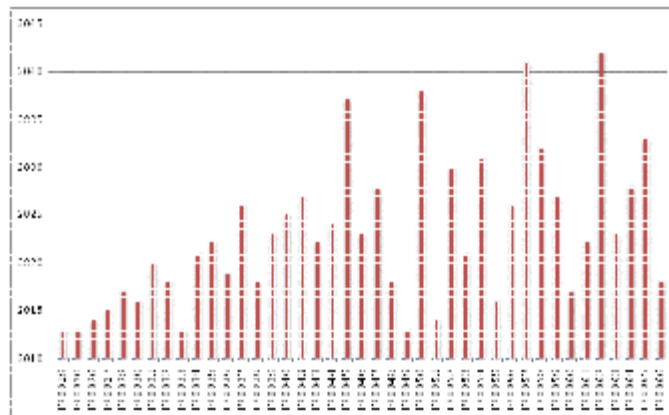
Grafik 43: Struktur Outstanding ON Rupiah seri FR per 31 Desember 2012

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

No.	Seri	Jatuh Tempo	No.	Seri	Jatuh Tempo
1	FR0019	15 Juni 2019	22	FR0047	15 Februari 2029
2	FR0020	15 Desember 2013	23	FR0048	15 September 2018
3	FR0026	15 Oktober 2014	24	FR0049	15 September 2013
4	FR0027	15 Juni 2016	25	FR0050	15 Juli 1938
5	FR0028	15 Juli 2017	26	FR0051	15 Mei 2014
6	FR0030	15 Mei 2016	27	FR0052	15 Agustus 1930
7	FR0031	15 Nopember 2020	28	FR0053	15 Juli 2021
8	FR0032	15 Juli 2018	29	FR0054	15 Juli 1931
9	FR0033	15 Maret 2013	30	FR0055	15 September 2016
10	FR0034	15 Juni 2021	31	FR0056	15 September 2026
11	FR0035	15 Juni 2022	32	FR0057	15 Mei 1941
12	FR0036	15 September 2019	33	FR0058	15 Juni 1932
13	FR0037	15 September 2026	34	FR0059	15 Mei 2027
14	FR0038	15 Agustus 2018	35	FR0060	15 April 2017
15	FR0039	15 Agustus 2023	36	FR0061	15 Mei 2022
16	FR0040	15 September 2025	37	FR0062	15 April 1942
17	FR0042	15 Juli 2027	38	FR0063	15 Mei 2023
18	FR0043	15 Juli 2022	39	FR0064	15 Mei 2028
19	FR0044	15 September 2024	40	FR0065	15 Mei 1933
20	FR0045	15 Mei 1937	41	FR0066	15 Mei 2018
21	FR0046	15 Juli 2023			

Tabel 28. Jatuh Tempo SDA ser Fixed Rate (7%) per 31 Desember 2012

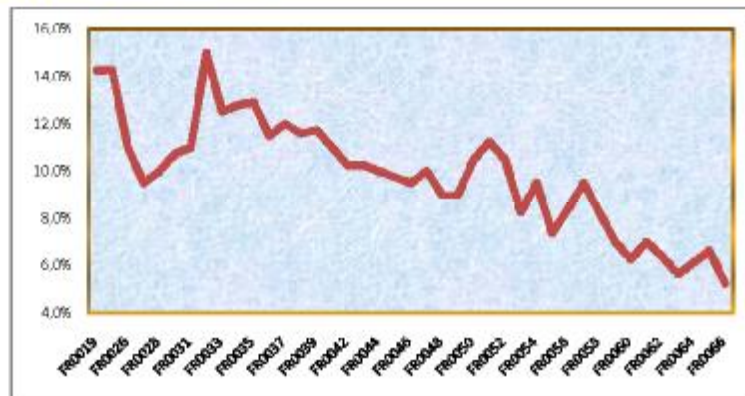
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (lanjutan)



Grafik 44: Struktur Jatuh Tempo DR Fupiah Seri FR per 31 Desember 2012

No.	Seri	Kupon	No.	Seri	Kupon
1	FR0019	14.75000%	27	FR0047	10.00000%
2	FR0020	14.27500%	23	FR0048	9.00000%
3	FR0026	11.00000%	24	FR0049	9.00000%
4	FR0027	9.50000%	25	FR0050	10.50000%
5	FR0029	10.00000%	28	FR0051	11.25000%
6	FR0030	10.75000%	27	FR0052	10.50000%
7	FR0031	11.00000%	28	FR0053	8.25000%
8	FR0032	15.00000%	29	FR0054	9.50000%
9	FR0033	12.60000%	30	FR0055	7.37500%
10	FR0034	12.00000%	31	FR0056	8.37500%
11	FR0035	12.80000%	32	FR0057	9.60000%
12	FR0036	11.50000%	33	FR0058	8.25000%
13	FR0037	12.00000%	34	FR0059	7.00000%
14	FR0039	11.80000%	35	FR0060	8.25000%
15	FR0039	11.75000%	36	FR0061	7.00000%
16	FR0040	11.00000%	37	FR0062	8.37500%
17	FR0042	10.25000%	38	FR0063	8.62500%
18	FR0043	10.25000%	39	FR0064	8.12500%
19	FR0044	10.00000%	40	FR0065	6.62500%
20	FR0045	9.75000%	41	FR0066	5.25000%
21	FR0046	9.50000%			

Tabel 29. Kupon SBN Seri Fixed Rate (FR) per 31 Desember 2012

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 *(lanjutan)*

Grafik 45: Tingkat kupon Seri FR per 31 Desember 2012

b. Obligasi Negara Ritel (ORI)

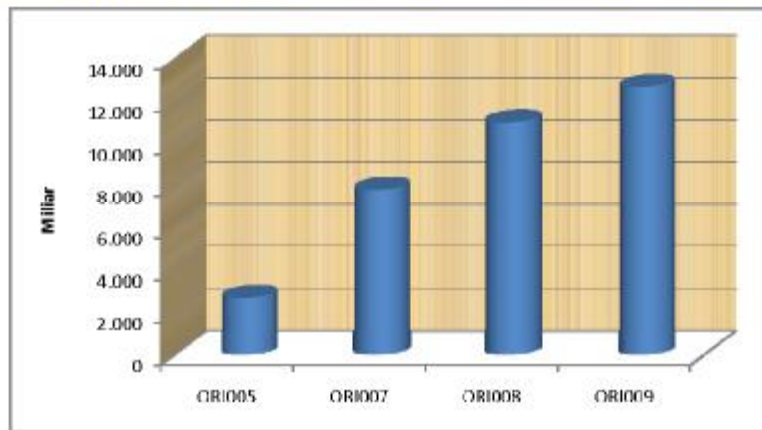
ORI adalah Obligasi Negara yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual di pasar perdana. ORI memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan dan dibayarkan secara periodik. Kupon ORI dibayarkan sebulan sekali (*monthly*). ORI dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.

Penerbitan ORI merupakan salah satu upaya untuk melaksanakan Strategi Pengelolaan Utang Negara tahun 2010 - 2014 yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan nomor 380/KM.K.08/2010. Di dalam dokumen strategi dimaksud ditetapkan bahwa pengembangan pasar sekunder SUN dilakukan antara lain dengan melakukan diversifikasi instrumen SUN melalui SUN Ritel yang mana hal ini sejalan pula dengan upaya memperluas basis investor. Penerbitan ORI merupakan langkah nyata Pemerintah dalam melaksanakan strategi dimaksud. Selain itu, ORI diterbitkan juga dalam rangka memberikan alternatif investasi yang cukup menguntungkan dan aman bagi investor individu, serta memberikan unsur pendidikan bagi investor individu untuk berinvestasi pada instrumen pasar modal seperti ORI. Selama ini investor individu umumnya menyalurkan dananya pada instrumen investasi berupa tabungan atau deposito yang notabene instrumen pasar uang. Terlebih dengan belum sepenuhnya kepercayaan masyarakat umum pada industri reksadana. Selain itu, keberadaan ORI dapat menjadi alternatif lahan investasi yang menjanjikan seperti instrumen investasi lainnya yang sudah ada seperti saham, reksadana dan deposito. Tahun 2012 pemerintah menerbitkan satu seri ORI baru yaitu ORI009 dengan tingkat kupon 6.25% dan mampu menghimpun dana investor sebesar Rp. 12.376.745.000.000 sehingga posisi *outstanding* pada akhir 2012 menunjukkan ada 4 seri ORI dengan jatuh tempo berkisar antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2015.

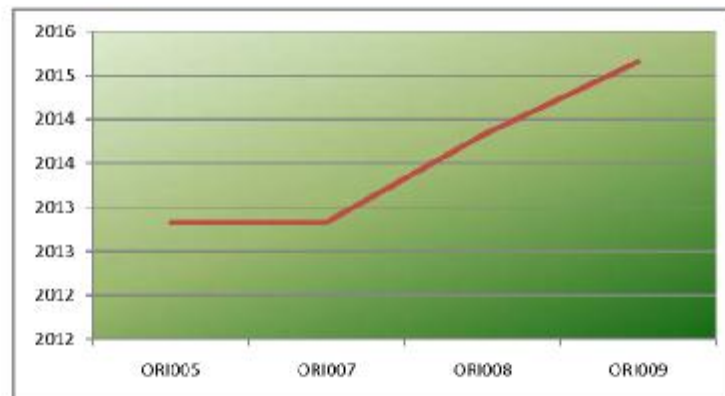
No	Seri	Outstanding	Jatuh Tempo
1	ORI005	2.652.875.000.000	15 September 2013
2	ORI007	7.813.000.000.000	15 Agustus 2013
3	ORI008	11.030.000.000.000	15 Oktober 2014
4	ORI009	12.676.745.000.000	15 Oktober 2015
Jumlah		21.475.875.000.000	

Tabel 30. Nilai dan Jatuh Tempo ORI per 31 Desember 2012

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (lanjutan)



Grafik 46: Struktur *Outstanding* ORI per 31 Desember 2012



Grafik 47: Struktur Jatuh Tempo ORI per 31 Desember 2012

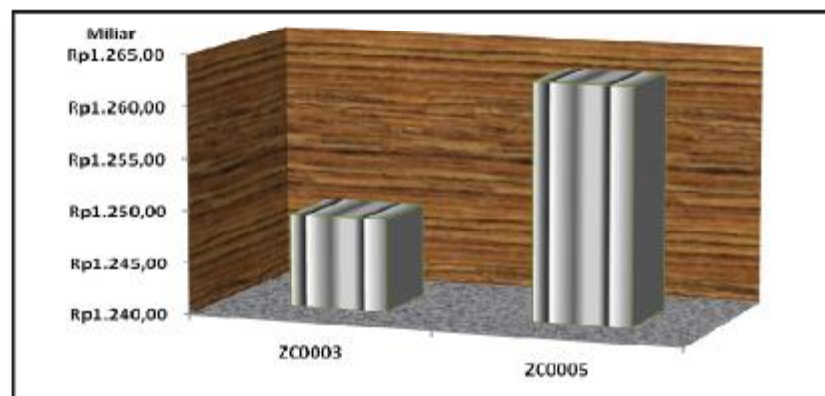
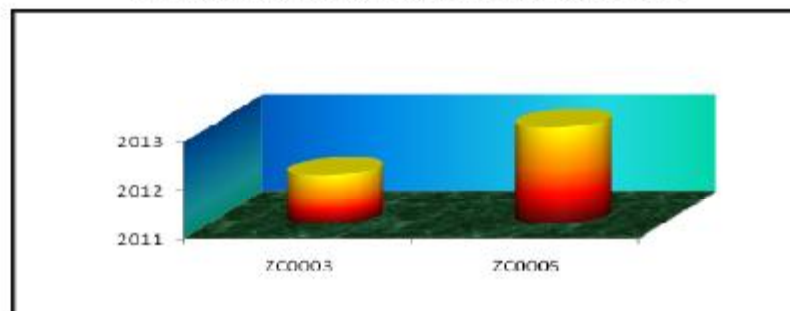
c. Obligasi tanpa bunga (zero coupon – ZC)

Zero coupon adalah obligasi negara tanpa bunga yang dijual secara diskonto. Berdasarkan posisi akhir tahun 2012, terdapat 1 seri ZC dengan *outstanding* berkisar dari Rp 1.263.000.000.000 dengan masa jatuh tempo pada tahun 2013. *Zero coupon* dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder. ZC0003 telah dilakukan pelunasan pada tahun 2012.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 *(lanjutan)*

No	Seri	Nilai Outstanding	Jatuh Tempo	Ket
1	ZC0003	Rp 1.249.000.000.000,00	20 Nopember 2012	Lunas
2	ZC0005	Rp 1.263.000.000.000,00	20 Februari 2013	

Tabel 31. Nilai Outstanding dan Jatuh Tempo Zero Coupon (ZC) per 31 Desember 2012

Grafik 48: Struktur *Outstanding* Zero Coupon (ZC) per 31 Desember 2012

Grafik 49: Struktur Jatuh Tempo Zero Coupon (ZC) per 31 Desember 2012

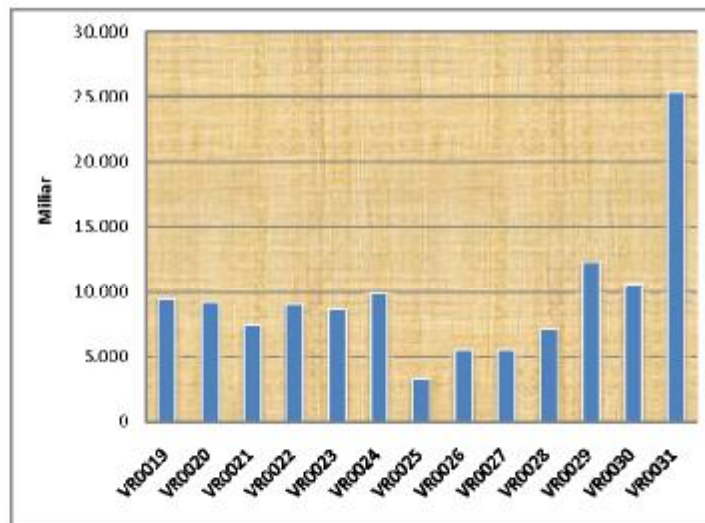
d. Obligasi berbunga mengambang (variable rate bonds - VR)

Obligasi berbunga mengambang memiliki tingkat kupon yang ditetapkan secara periodik berdasarkan tingkat bunga SBI (Sertifikat Bank Indonesia) berjangka 3 bulan. Kupon dibayarkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan. Sampai akhir tahun 2012, terdapat 13 seri VR dengan *outstanding* berkisar dari Rp 3,20 T sampai dengan Rp 25 T dengan masa jatuh temponya berkisar antara tahun 2014 sampai dengan 2020. Obligasi jenis VR dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (LAK/RSJ)

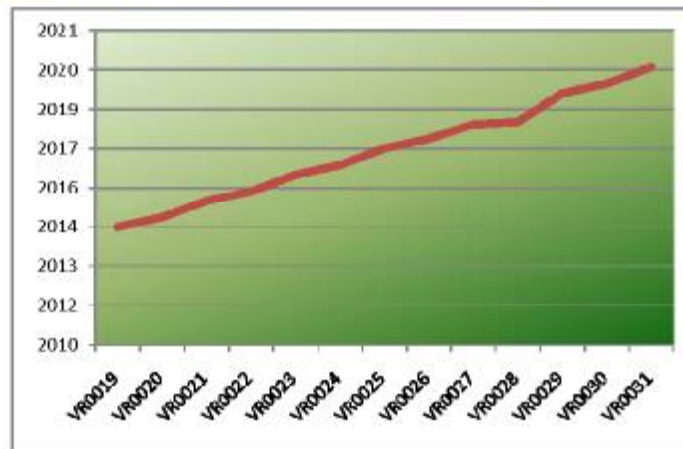
No	Seri	Nilai Outstanding	Jatuh Tempo
1	VR0019	9.411.228.000.000,00	25 Desember 2014
2	VR0020	9.184.007.000.000,00	25 April 2015
3	VR0021	7.438.328.000.000,00	25 November 2015
4	VR0022	8.118.748.000.000,00	25 Maret 2016
5	VR0023	8.362.068.000.000,00	25 Oktober 2016
6	VR0024	9.908.300.000.000,00	25 Februari 2017
7	VR0025	3.208.300.000.000,00	25 September 2017
8	VR0026	5.442.142.000.000,00	25 Januari 2018
9	VR0027	5.442.142.000.000,00	25 Juli 2018
10	VR0028	7.033.994.000.000,00	25 Agustus 2018
11	VR0029	12.212.320.000.000,00	25 Agustus 2019
12	VR0030	10.503.015.000.000,00	25 Desember 2019
13	VR0031	25.322.354.000.000,00	25 Juli 2020

Tabel 32. Nilai dan Jatuh Tempo SBN seri Variable Rate (VR) per 31 Desember 2012



Grafik 50: Struktur Outstanding VR per 31 Desember 2012

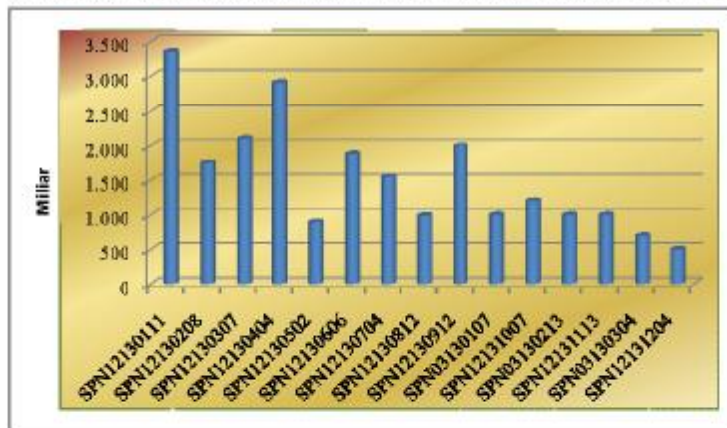
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 *(lanjutan)*



Grafik 51: Struktur Jatuh Tempo VR per 31 Desember 2012

e. Surat Perbendaharaan Negara (SPN)

SPN merupakan instrumen utang jangka pendek dengan penerbitan secara diskonto. Sampai akhir tahun 2012, terdapat 16 seri SPN yaitu SPN12130111, SPN12130208, SPN12130307, SPN12130404, SPN12130502, SPN12130606, SPN12130704, SPN12130812, SPN12130912, SPN03130107, SPN12131007, SPN03130213, SPN12131113, SPN03130304, SPN12131204 dengan *outstanding* berkisar Rp 500 M dan Rp 3,3 T yang akan jatuh tempo pada tahun 2013. SPN dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.



Grafik 52: Struktur *Outstanding* SPN per 31 Desember 2012

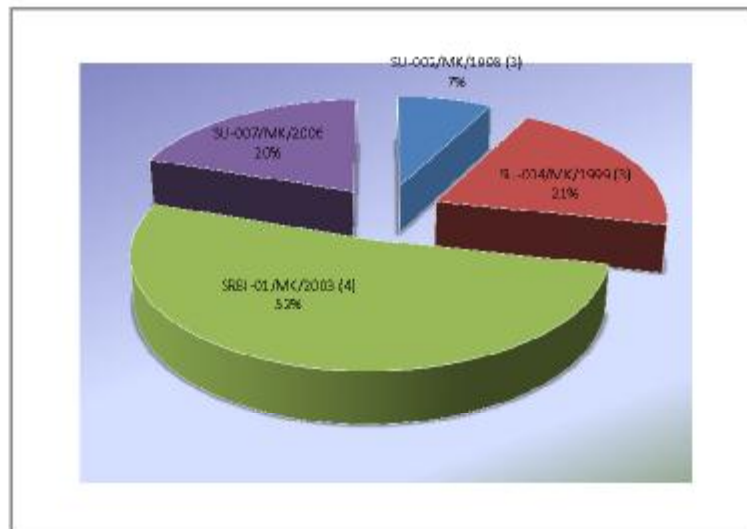
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 *lancirasi*

f. Surat Utang Pemerintah (SUP) kepada BI

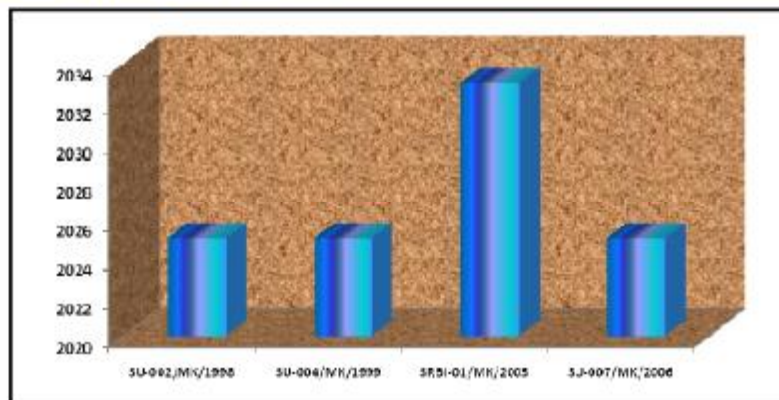
Surat Utang Pemerintah kepada Bank Indonesia terdiri dari lima seri yaitu SUD02, SUD04, SUD07, dan *Special Rate Bank Indonesia* (SRBI01). Kupon SUP dibayarkan secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali. Pembayaran cicilan pokok dilakukan bersamaan dengan pembayaran bunga.

No	Nama	Outstanding	Jatuh Tempo
1	SU-002/MK/1999	10.077.450.907,316	01 April 2022
2	SU-004/MK/1999	48.921.476.866,166	01 Desember 2025
3	SRBI-01/MK/2003	126.390.778.837,033	01 Agustus 2043
4	SU-007/MK/2006	46.754.718.593,138	01 Agustus 2025
JUMLAH		240.144.466.064,155	

Tabel 33 Nilai dan Outstanding Surat Utang Pemerintah per 31 Desember 2012



Grafik 53: Struktur *Outstanding* SUP per 31 Desember 2012

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 *(lanjutan)*

Grafik 54: Struktur Jatuh Tempo SUP Per 31 Desember 2012

g. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

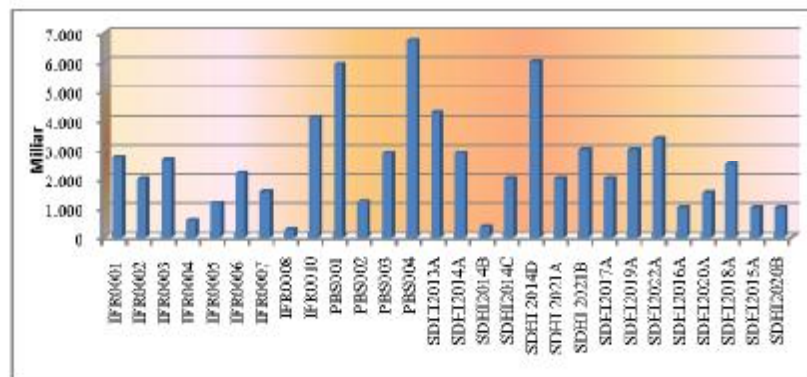
Pada akhir tahun 2012, terdapat 12 seri *fixed rate* SBSN yaitu IFR0001, IFR0002, IFR0003, IFR0004, IFR0005, IFR0006, IFR0007, IFR0008, IFR0010, SR-002, SR-003, SR-004 dengan masa jatuh tempo antara tahun 2013 sampai dengan 2036 dengan tingkat imbalan antara 8,15% sampai dengan 12,00%. Selain itu terdapat 8 seri SDHI (Sukuk Dana Haji Indonesia) yaitu SDHI2013A, SDHI2014A, SDHI 2014B, SDHI2014C, SDHI2014D, SDHI2021A, SDHI2021B, SDHI2017A, SDHI2019A, SDHI2022A, SDHI2016A, SDHI2020A, SDHI2018A, SDHI2015A, SDHI2020B dengan masa jatuh tempo 2013 sampai dengan tahun 2022. Di samping itu pada tahun 2012 ini, pemerintah Indonesia mulai menerbitkan SBSN seri PBS (*Project Based Sukuk*) dengan masa jatuh tempo antara tahun 2018 sampai dengan 2037 dan tingkat imbalan antara 4,45 % sampai dengan 6,10%.

No	Seri	Jatuh Tempo	Imbalan	Outstanding
1	IFR0001	5-Ag-15	11.8000%	2.714.703.000.000
2	IFR0002	5-Ag-13	11.9500%	1.985.003.000.000
3	IFR0003	15-Sep-15	9.2500%	2.632.003.000.000
4	IFR0004	15-Oct-13	9.0000%	550.003.000.000
5	IFR0005	15-Jan-17	9.0000%	1.171.003.000.000
6	IFR0006	15-Mar-31	10.2500%	2.175.003.000.000
7	IFR0007	15-Jan-25	10.2500%	1.547.003.000.000
8	IFR0008	15-Mar-23	8.8000%	252.003.000.000
9	IFR0010	15-Feb-33	10.0000%	4.110.003.000.000
10	PBS001	15-Feb-13	4.4500%	5.920.003.000.000
11	PBS002	15-Jan-22	5.4500%	1.208.003.000.000
12	PBS003	15-Jan-27	6.0000%	2.847.003.000.000
13	PBS004	15-Feb-37	6.0000%	6.739.003.000.000
14	SDHI2013A	17-May-13	7.5500%	4.250.003.000.000

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (Lanjutan)

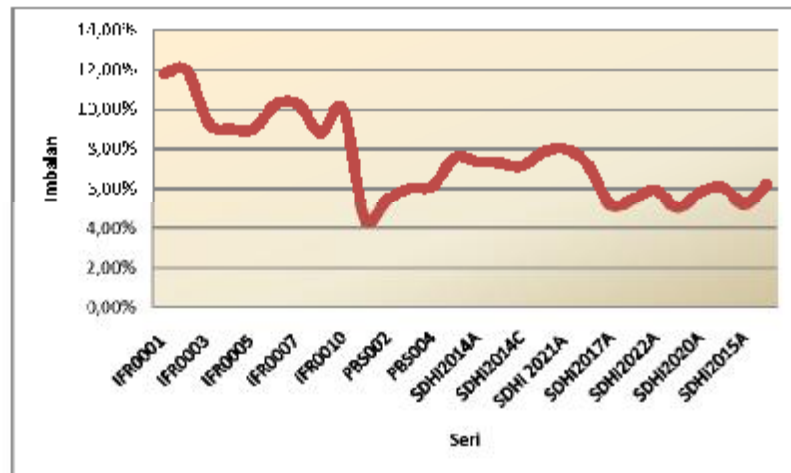
5	SDHI2014A	9-Ag-14	7.36100%	2.255.000.000,000
6	SDHI2014B	25-Ag-14	7.30100%	336.000.000,000
7	SDHI2014C	7-Oct-14	7.13000%	2.000.000.000,000
8	SDHI2014D	11-Feb-14	7.85000%	6.000.000.000,000
9	SDHI2021A	11-Apr-21	8.00000%	2.000.000.000,000
20	SDHI2021B	17-Oct-21	7.16000%	3.000.000.000,000
21	SDHI2014D	11-Feb-14	7.85000%	6.000.000.000,000
22	SDHI2021A	11-Apr-21	8.00000%	2.000.000.000,000
23	SDHI2021B	17-Oct-21	7.16000%	3.000.000.000,000
24	SDHI2017A	21-Mar-17	5.16000%	2.000.000.000,000
25	SDHI2019A	21-Mar-19	5.46000%	3.000.000.000,000
26	SDHI2022A	21-Mar-22	5.91000%	3.342.000.000,000
27	SDHI2016A	27-Apr-16	5.03000%	1.000.000.000,000
28	SDHI2020A	27-Apr-20	5.79000%	1.500.000.000,000
29	SDHI2018A	30-May-18	6.06000%	2.500.000.000,000
30	SDHI2015A	28-Jun-15	5.21000%	1.000.000.000,000
31	SDHI2020B	28-Jun-20	6.20000%	1.000.000.000,000
Total				61.451.260.000,000

Tabel 34. Nilai Outstanding dan Jatuh Tempo SBSN Rupiah per 31 Desember 2012

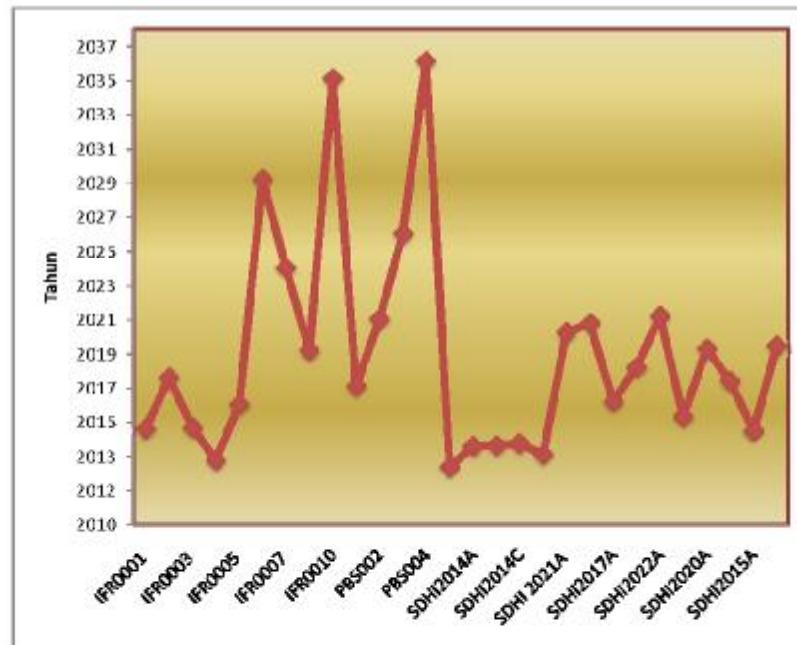


Grafik 55: Struktur Outstanding Fixed Rate SBSN per 31 Desember 2012

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (lanjutan)



Grafik 56. Tingkat Imbalan SBSN per 31 Desember 2012



Grafik 57. Struktur Jatuh Tempo SBSN per 31 Desember 2012

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (lanjutan)

B. Sukuk Ritel (SR):

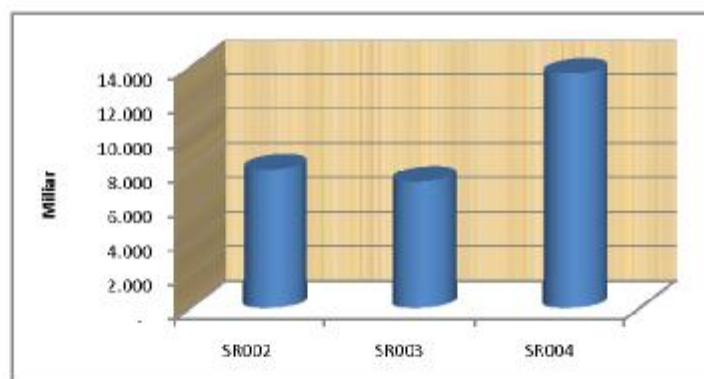
Sama halnya seperti ORI, Sukuk Ritel (SR) adalah Obligasi Negara yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual di pasar perdana. SR memiliki tingkat imbal hasil yang ditetapkan pada saat penerbitan dan dibayarkan secara periodik. Imbal hasil SR dibayarkan sebulan sekali (*monthly*). ORI dapat diperdagangkan dan dipindahtarukannya kepemilikannya di pasar sekunder.

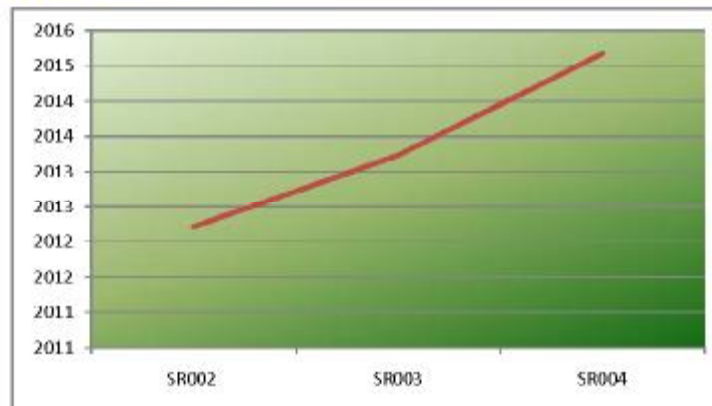
Perubahan SR dimaksudkan untuk memperluas pembiayaan sumber APBN, diversifikasi investor dan instrumen, memberikan alternatif instrumen ritel berbasis syariah, dan memberikan kesempatan kepada investor kecil untuk berinvestasi dalam instrumen pasar modal yang aman dan menguntungkan. Selain itu, keberadaan SR dapat menjadi alternatif lahan investasi yang menjanjikan seperti instrumen investasi lainnya yang sudah ada seperti saham, reksadana dan deposito.

Tahun 2012, pemerintah menerbitkan satu seri SR yaitu SR004 dengan tingkat imbal hasil 6,25% dan mampu menghimpun dana investor sebesar Rp. 13.613.805.000.000 sehingga posisi *outstanding* pada akhir 2012 menunjukkan ada 3 seri SR dengan jatuh tempo berkisar antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2015.

No	Seri	Outstanding	Jatuh Tempo
1	SR002	8.033.860.000.000	10 Januari 2013
2	SR003	7.341.410.000.000	23 Februari 2014
3	SR004	13.613.805.000.000	21 September 2015
Jumlah		28.989.075.000.000	

Tabel 35. Nilai dan Jatuh Tempo SR per 31 Desember 2012

Grafik 58: Struktur *Outstanding* SR per 31 Desember 2012

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 *(lanjutan)*

Grafik 59: Struktur Jatuh Tempo ORI per 31 Desember 2012

C. Surat Berharga Negara Berdenominasi Valas

Surat Berharga Negara (SBN) saat ini telah menjadi sumber utama dalam pemenuhan target pembiayaan dalam APBN karena mempunyai pengaruh yang signifikan. Dalam rangka pemenuhan target tersebut pemerintah semaksimal mungkin berusaha terus menggali potensi sumber pembiayaan dari dalam negeri, yaitu dengan menerbitkan SBN berdenominasi Rupiah di pasar domestik. Namun, dengan pertimbangan beberapa hal seperti daya serap pasar obligasi dalam negeri yang masih terbatas dan kebutuhan untuk pemenuhan *benchmark* atas obligasi Indonesia dalam denominasi USD, maka Pemerintah memutuskan untuk melakukan penerbitan obligasi negara dalam valuta asing di pasar internasional mengacu pada Undang-Undang nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.

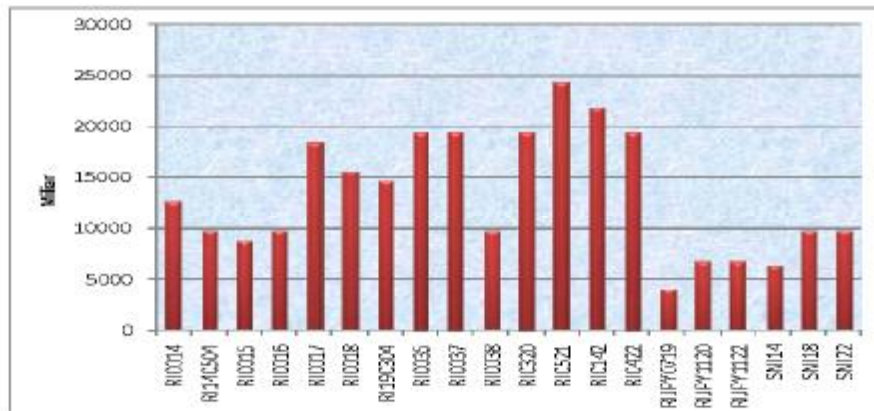
Sampai dengan akhir tahun 2012, terdapat 20 seri SBN Valas dengan 17 seri memiliki denominasi USD dan 3 seri dengan denominasi JPY yaitu seri RIJPY0719 dan RIJPY 120 dan RIJPY1122. SBN valas tersebut memiliki tingkat kupon mulai dari 1,13%, sampai dengan 11,825%, dengan masa jatuh tempo mulai dari tahun 2014 sampai dengan 2038. Selain itu terdapat 3 seri SRSN Valas yaitu seri SNI14 sebesar USD 650.000.000 setara Rp. 5,8 T dan USD 1.000.000.000 setara Rp. 9,07 T serta SNI22 sebesar USD 1.000.000.000 setara Rp. 16,38 T.

No	Seri	Jatuh Tempo	Kupon	Outstanding		
				Valas	Rupiah	
1	RI0014	10-Mai-14	6,75000%	USD	1.200.000.000	12.671.030.030.000
2	RI140504	4-Mai-14	10,37500%	USD	1.000.000.000	10.870.030.030.000
3	RI0015	20-Apr-15	7,25000%	USD	1.000.000.000	10.700.030.030.000
4	RI001E	1E-Jan-16	7,60000%	USD	600.000.000	6.670.030.030.000
5	RI0017	9-Mar-17	6,87500%	USD	1.000.000.000	10.370.030.030.000
6	RI001E	17-Jan-18	6,87500%	USD	1.600.000.000	17.472.030.030.000
7	RI150504	4-Mai-19	11,82500%	USD	2.000.000.000	22.606.030.030.000
8	RI0025	12-Oct-35	9,50000%	USD	1.600.000.000	17.244.030.030.000

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (dalam Rp)

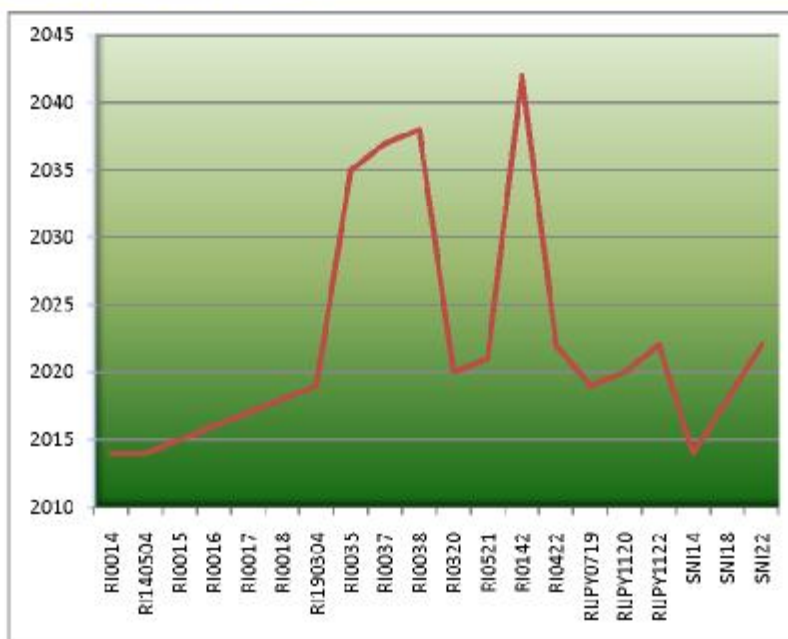
9	RI0037	17-Feb-37	6.82500%	USD	1.500.000.000	15.340.000.000,000
10	RI0038	17-Jan-39	7.75000%	USD	2.000.000.000	5.870.000.000,000
11	RI032C	13-Mai-20	5.87500%	USD	2.000.000.000	16.340.000.000,000
12	RI0621	6-May-21	4.87500%	USD	2.500.000.000	24.175.000.000,000
13	RI0142	17-Jan-42	6.25000%	USD	2.250.000.000	21.757.500.000,000
14	RI0422	25-Apr-22	3.75000%	USD	2.000.000.000	15.340.000.000,000
15	RJPY0719	29-Jul-19	2.73000%	JPY	35.000.000.000	3.918.850.000,000
16	RJPY1120	12-Nov-20	1.60000%	JPY	60.000.000.000	6.718.200.000,000
17	RJPY1122	22-Nov-22	1.13000%	JPY	60.000.000.000	6.718.200.000,000
18	SNI14	23-Apr-14	8.80000%	USD	650.000.000	6.286.500.000,000
19	SNI18	21-Nov-18	4.00000%	USD	1.000.000.000	9.670.000.000,000
20	SNI22	21-Nov-22	3.30000%	USD	1.000.000.000	9.670.000.000,000
Total				USD	25.600.000.000	247.552.000.000,000
				JPY	155.000.000.000	17.356.350.000,000
						264.907.350.000,000

Tabel 36. Outstanding dan Jatuh Tempo SBN Valas per 31 Desember 2012

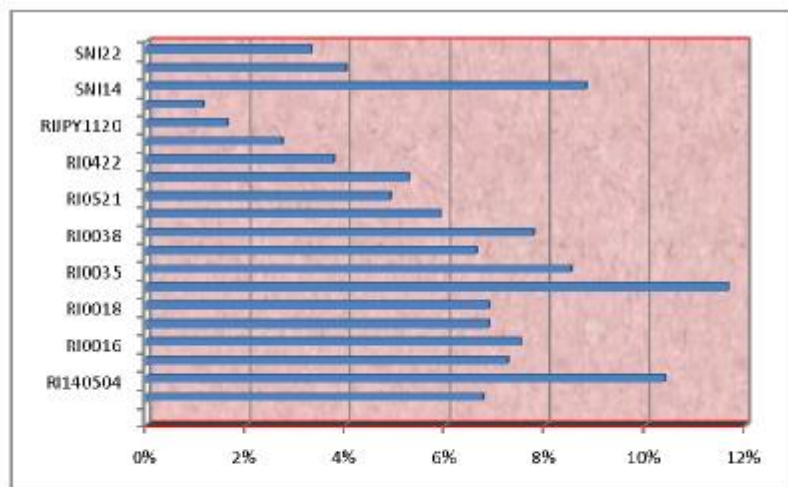


Grafik 60: Struktur Outstanding SBN Valas per 31 Desember 2012 (dalam rupiah)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 *(lanjutan)*



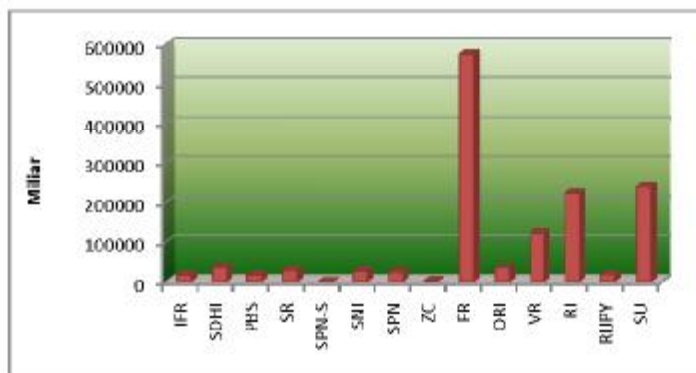
Grafik 61: Struktur Jatuh Tempo SBN Valas per 31 Desember 2012



Grafik 62: Tingkat Kupon/Imbalan SBN Valas per 31 Desember 2012

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 *(lanjutan)*

Secara umum, struktur Surat Berharga Negara pada akhir tahun 2012 dapat digambarkan sebagai berikut:



Grafik 63: Struktur Outstanding SUN dan SBSN Rupiah per 31 Desember 2012

V. MUTASI SURAT BERTHARGA NEGARA SELAMA TAHUN 2012

Surat Berharga Negara dapat berubah saldonya akibat adanya penerbitan baru, pelunasan, pembelian kembali atau oleh sebab lainnya. Adapun ringkasan perubahan posisi SBN tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (lanjutan)

No	Jenis SBN	31 Desember 2012	31 Desember 2011	Mutasi
1	2	3	4	5= (3-4)
1	FRB	171.769.000.000,000	167.487.000.000,000	4.282.000.000,000
2	SRU	35.783.000.000,000	23.785.000.000,000	11.998.000.000,000
3	SRK	26.989.071.000.000,000	30.241.500.000,000	26.747.571.000,000
4	PTA	157.4.000.000,000	0	157.4.000.000,000
5	SRU 3	196.000.000,000	1.300.000.000,000	1.104.000.000,000
6	SRU	256.75.000.000,000	14.864.000.000,000	141.886.000.000,000
		1.650.000,000	1.650.000,000	0
7	SRU 4	33.000.000.000,000	31.400.000.000,000	1.600.000.000,000
8	SRU	1.000.000.000,000	1.111.000.000,000	1.111.000.000,000
9	SRU	575.040.761.000,000	474.505.765.000,000	100.535.000.000,000
10	SRU	31.152.633.000,000	4.000.570.000,000	27.152.063.000,000
11	SRU	1.207.749.311.000,000	1.356.147.000,000	-148.397.689.000,000
12	SRU	22.295.500.000,000	62.571.500.000,000	40.276.000.000,000
		3.950.000,000	107.000,000	3.843.000,000
13	SRU 5	17.575.350.000,000	11.095.000.000,000	6.480.350.000,000
		130.000.000,000	20.000.000,000	110.000.000,000
14	SRU	340.144.400.000,150	340.614.711.430,7	470.211.275,630
Total	USD	12.950.000.000	16.700.000.000	3.750.000.000
	Rp	1.361.100.904.084.150	1.387.655.039.364.010	173.445.864.720.148

Tabel 37 Mutasi Principle Outstanding SBN Tahun 2012

Memperhatikan tabel di atas, dapat dilihat adanya perubahan yang cukup signifikan berupa meningkatnya porsi SBN berbunga tetap (FR) dan menurunnya porsi SBN berbunga mengambang (VR) serta menurunnya porsi Surat Utang Pemerintah kepada Bank Indonesia. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah untuk menurunkan risiko tingkat bunga dengan meningkatkan porsi *fixed rate bonds* dalam portofolio SEN.

VI. PENCAPAIAN TARGET APBN TA 2012

Target APBN atas pengelolaan Surat Berharga Negara (SBN) ditetapkan dalam dua pos yaitu pos Bunga Utang SBN dan Kewajiban Biaya Lain (SUN + SBSN) serta Cicilan Pokok Utang Dalam Negeri yang menjadi tunggak Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Utang (BBU 01).

A. Bunga Utang Surat Berharga Negara

Berdasarkan APBN-P TA 2012, total pagu Bunga dan Biaya Utang SBN Dalam Negeri ditetapkan sebesar Rp 84.749.000.000.000 sementara realisasi pembayaran bunga dan biaya SBN Dalam Negeri mencapai Rp 69.507.609.791.618, sehingga terdapat sisa pagu anggaran sebesar Rp 15.211.496.268.382. Secara persentase, realisasi pembayaran bunga utang dalam negeri mencapai 82,05%.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (lanjutan)

Pagu Bunga Utang SBN Valas ditetapkan sebesar Rp 17.051.800.000.000 sementara realisasi pembayaran bunga dan biaya SBN valas mencapai Rp 15.910.825.138.918, sehingga terdapat sisa pagu anggaran sebesar Rp 1.110.574.861.382. Secara persentase, realisasi pembayaran bunga utang valas mencapai 93,48%.

E. Surat Berharga Negara Neto

Surat Berharga Neto adalah selisih antara SBN yang diterbitkan dengan SBN yang jatuh tempo dan yang dibeli kembali. Mengingat target pembiayaan SBN dalam APBV ditetapkan dalam bentuk penerbitan SBN Neto, maka Pemerintah memiliki fleksibilitas untuk menentukan jumlah penerbitan SBN dan jumlah pembelian kembali.

Untuk tahun 2012, realisasi SBN Neto mencapai Rp 159.704.523.637.396. Adapun rincian sebagaimana terlampir di bawah ini:

	Uraian	Akumulasi	Jumlah
Penerbitan SBN			
	Penerbitan SBN	711411	30.590.143.000.000.000
	Penerbitan SBN Dalam Negara	711421	146.780.740.000.000.000
	Penerbitan Utang Bunga (Kupon Berkala) Dalam Negara	711422	7.261.791.240.000.000
	Penerbitan Penerbitan SBN Berjangka Panjang	711441	40.038.840.000.000.000
	Penerbitan Penerbitan SBN Berjangka	711421	300.000.000.000.000
	Penerbitan pembelian SBN Berjangka Panjang	711442	171.915.280.000.000.000
	Penerbitan LUMP - Valas	711511	46.018.968.000.000.000
	Pembelian SBN - Valas	712341	9.632.000.150.000.000
	Pembelian Utang Bunga (Kupon Berkala) - Valas	712312	65.670.305.200.000
	Total Penerbitan SBN		787.887.267.580.790.000
Pembayaran SBN			
	Walaupun SBN	721311	57.610.000.000.000.000
	Walaupun SBN - Dalam Negara	721321	68.889.418.999.889
	Pembelian Kembali SBN Dalam Negara	721322	12.298.520.000.000.000
	Pembayaran Utang Bunga (Kupon Berkala) - Dalam Negara	721324	2.384.108.740.000.000
	Pembayaran Utang Bunga (Kupon Berkala) - Valas	722312	67.658.604.642
	Pembayaran SBN	721321	2.500.000.000.000.000
	Walaupun SBN Berjangka Panjang	721331	8.696.950.000.000.000
	Pembayaran pembelian dibayar dimuka SBN Dalam Negara Berjangka Panjang	721332	1.08.900.711.000.000
	Pembayaran SBN Valas	722311	
	Pembelian kembali LUMP Valas	722312	
	Pembayaran pembelian dibayar dimuka SBN Valas Utang Berjangka	722342	
	Total Pembayaran SBN		123.402.944.352.694
	SBN Neto		664.484.323.228.096

Keterangan: Realisasi SBN Neto dengan Penerimaan dan Pembayaran Utang Bunga

PRUSIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHONYONO